PROSIDING

SEMINAR NASIONAL

"Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota"

Universitas Andalas
Padang, 23-24 November 2016

Kerjasama antara :
Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI)
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan
Program Pascasarjana Universitas Andalas

PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG. 2017

ISBN : 978-602-73463-1-4

Penyunting:

Rudi Febriamansyah
Melinda Noer
Zednita Azriani
Hasnah
Nuraini Budi Astuti

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL

Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota

Padang,
23-24 November 2016

Kerjasama antara:
Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI),
Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan
Program Pascasarjana Universitas Andalas

Penyunting:
Rudi Febriamansyah
Melinda Noer
Zednita Azriani
Hasnah
Nuraini Budi Astuti

Program Pascasarjana Universitas Andalas
Padang
2017

PROSIDING
SEMINAR NASIONAL
Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota

Padang
23-24 November 2016

Penyunting:
Rudi Febriamansyah
Melinda Noer
Zednita Azriani
Hasnah
Nuraini Budi Astuti

Pelaksana Teknis:
Siska Handayani
Anugrah Sri Widiasyih
Eki Amnur Hadi
Cut Mutiani

Desain Cover :
Siska Handayani
Gambar pada cover disumbangkan oleh Nurul Surya dan Anggun Putri Ayu

Diterbitkan pertama kali pada bulan Juli 2017
Oleh Program Pascasarjana Universitas Andalas
Limau Manis, Padang, Sumatra Barat
Email: sekretariat@pasca.unand.ac.id

Perpustakaan Nasional : Katalog Dalam Terbitan (KDT)
Rudi Febriamansyah, dkk.

Prosiding Seminar Nasional
Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota

Penyunting : Rudi Febriamansyah, Melinda Noer, Zednita Azriani, Hasnah, Nuraini Budi Astuti.
Program Pascasarjana Universitas Andalas: Padang. 2017

828 hlm +xvi: 21 x 29,2 cm
ISBN : 978-602-73463-1-4

KATA PENGANTAR
KETUA ASOSIASI SEKOLAH PERENCANAAN INDONESIA (ASPI)

Selamat dan terima kasih kepada Program Pascasarjana, Universitas Andalas, yang telah berhasil menyelenggarakan Seminar Nasional dengan sukses. Setiap tahun Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI) menyelenggarakan seminar nasional dengan bekerjasama dengan universitas dan beberapa pihak terkait. pada November 2016, seminar nasional telah berhasil diselenggarakan dengan Program Pasca Sarjana Universitas Andalas sebagai tuan rumah dan Perhepi.

Tema Seminar tentang Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa – Kota sangat tepat dipilih. Pembangunan desa-kota perlu dilihat secara terintegrasi sebagai satu kesatuan wilayah perencanaan dan kebijakan. Walaupun inklusifitas pembangunan desa-kota bukan tema yang baru dalam Bidang Perencanaan Wilayah dan Kota, tetapi isu tersebut sangat relevan untuk dibahas. Ketimpangan wilayah - yang salah satu contohnya - dalam bentuk ketimpangan desa kota merupakan permasalahan klasik di Indonesia yang belum memperlihatkan tanda-tanda perbaikan yang berarti.

Topik yang dibahas dalam seminar nasional ini cukup luas yang menggambarkan pembangunan desa-kota yang semakin kompleks. Selain pendekatan sektoral yang tetap digunakan dalam analisis, seperti sektor pertanian dan pariwisata, pendekatan aktor dan jaringan antar aktor digunakan pula dalam melihat perkembangan desa-kota. Hal ini menunjukkan cakupan minat dosen dan mahasiswa yang terus meluas dalam mengkaji relasi desa-kota.

Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia telah dan akan terus menggelar seminar nasional tiap tahun sebagai media komunikasi dan pembelajaran kolektif mahasiswa dan dosen yang berminat pada kajian kota dan wilayah. Seminar ini juga menjadi media untuk mendorong *knowledge production* sehingga dunia perguruan tinggi di Indonesia dapat berkontribusi secara lebih besar dalam perkembangan ilmu pengetahuan di dunia. Implikasi kebijakan yang terdapat dalam banyak paper pada seminar ini juga dapat membantu perumusan kebijakan perencanaan dan pembangunan kota dan wilayah di Indonesia.

Terima kasih saya sampaikan pada Universitas Andalas, khususnya Program Pascasarjana, Panitia Seminar, PERHEPI, Pemerintah Propinsi Sumatera Barat dan pihak lain yang telah membantu terselenggaranya acara Seminar Nasional ini.

Ir. Tubagus Furqon Sofhani, MA., PhD

KATA PENGANTAR
KETUA UMUM PERHEPI

Pertama sekali, kami ucapkan Selamat dan Terimakasih kepada Pengurus PERHEPI Komda Padang atas keberhasilannya menyelenggarakan satu event Seminar Nasional yang dikerjasamakan dengan Asosiasi Sekolah Perencana Indonesia (ASPI) dan Program Pascasarjana Universitas Andalas. Seminar Nasional yang mengambil tema Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota ini memang juga telah menjadi perhatian besar bagi para akademisi pembangunan pertanian, baik dari aspek ilmu ekonomi pertanian maupun aspek ilmu lainnya. Selama ini memang sama kita sadari bahwa model pembangunan desa (*rural development*) dan pembangunan kota (*urban development*) telah terlalu dibuat demikian eksklusif masing-masingnya. Pembangunan desa sering lebih dikonotasikan dengan pembangunan pertanian di perdesaan dalam rangka mencukupi kebutuhan pangan baik di domestik perdesaan sendiri maupun kebutuhan ekspor ke perkotaan. Konteks eksklusif dari model pembangunan seperti ini pada akhirnya membuat semakin besarnya jurang perbedaan antara desa dan kota, baik secara ekonomi maupun sosial. Masalah urbanisasi atau berpindahnya penduduk desa ke perkotaan pada akhirnya telah menjadi persoalan besar dari ketidakterpaduan model pembangunan seperti ini.

Pertemuan antara para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian dan para akademisi dari sekolah perencanaan pembangunan dalam Seminar Nasional ini merupakan satu bentuk sinergi yang sangat baik dan perlu dikembangkan lebih jauh lagi dalam usaha menjawab berbagai permasalahan tersebut. Seminar Nasional yang telah menghadirkan lebih dari 150 orang peserta serta mengkompilasi lebih dari 90 buah makalah penelitian dengan berbagai tema terkait dengan perencanaan pembangunan desa-kota dalam berbagai aspek pembangunan, mulai dari masalah sumberdaya alam, pariwisata, produksi dan pemasaran produk pertanian dan lainnya, diharapkan dapat bermanfaat bagi para pengambil kebijakan maupun untuk penelitian lebih lanjut.

PERHEPI sebagai satu perhimpunan bagi para pemerhati masalah pembangunan ekonomi pertanian di Indonesia akan terus mendukung upaya-upaya penyebarluasan hasil kajian dan hasil pemikiran dari para anggotanya dalam berbagai bentuk forum ilmiah, baik yang diselenggarakan secara khusus dalam lingkungan PERHEPI sendiri maupun berbentuk kerjasama dengan organisasi profesi lainnya yang mempunyai visi dan misi yang searah dalam upaya menjawab berbagai masalah pembangunan pada umumnya atau masalah pembangunan pertanian pada khususnya.

Akhir kata, kami, Pengurus Pusat PERHEPI, sekali lagi mengucapkan terimakasih kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan dan melaksanakan Seminar Nasional ini, terutama rekan-rekan ASPI, Program Pascasarjana Universitas Andalas, serta Pengurus PERHEPI Komda Padang. Terimakasih yang sebesar-besarnya juga kami sampaikan kepada, Pimpinan Universitas Andalas, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, serta kepada seluruh sponsor yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu yang telah mendukung penyelenggaraan Seminar ini.

Dr. Bayu Krisnamurthi

TANTANGAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA-KOTA: CATATAN DARI PENYUNTING

Hingga saat ini, permasalahan pembangunan di negara-negara berkembang termasuk Indonesia masih berkutat disekitar masalah yang dilematik antara pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dapat dikatakan sudah cukup tinggi, diatas 5% per tahunnya, sementara walau memang menurut catatan BPS tahun 2017 penurunan kemiskinan telah cukup besar (sekitar 2,5 jt orang per tahun), jumlah penduduk miskin (baik di perkotaaan maupun perdesaan) ternyata juga masih cukup besar, sebanyak 27.76 juta orang. Sejogyanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi dapat mengatasi masalah kesenjangan pendapatan antar penduduk. Data terakhir dari BPS mencatat bahwa selama tahun 2015, pertumbuhan ekonomi di Indonesia telah berhasil menurunkan tingkat kesenjangan, dengan ditandai oleh menurunnya Gini ratio sebesar 0.01 poin.

Diskursus pertumbuhan dan pemerataan ekonomi antara desa dan kota juga telah menjadi sorotan bagi para pengamat pembangunan. Sehingga dalam satu dekade terakhir ini, konsepsi pembangunan di Indonesia juga mulai diarahkan kepada konsepsi pembangunan yang inklusif, yang dapat mengangkat taraf hidup orang-orang ataupun wilayah yang selama ini relatif tertinggalkan. Sejumlah strategi dan pendekatan telah banyak dilakukan baik pada tingkat mikro dalam konteks pemberdayaan masyarakat, pemberian jaminan sosial dan perlindungan lainnya, maupun dukungan kebijakan makro yang mendorong peningkatan aktivitas ekonomi perdesaan, pertanian, ataupun sektor hulu lainnya yang berintegrasi dengan pertumbuhan ekonomi di perkotaan dan sektor hilirnya.

Seminar Nasional ini telah berupaya mengangkat permasalahan kesenjangan ekonomi dalam pembangunan desa dan kota selama ini, dengan mengajak peneliti dari berbagai aspek bidang ilmu; sosial, ekonomi, sain dan teknologi untuk bersama menemukan pokok-pokok pemikiran dalam membangun desa dan kota secara inklusif dan terintegrasi. Lebih dari 90 makalah yang tercakup dalam 6 tema utama telah dibahas dalam seminar ini, termasuk juga makalah dari para pembicara panel. Pembahasan makalah mencakup kajian terhadap aspek perencanaan pembangunan dalam arti luas, mulai dari kajian terhadap perencanaan program pembangunan itu sendiri maupun kajian atau evaluasi dari implementasi ataupun dampak dari proses pembangunannya.

Konsep-konsep dasar pemikiran tentang perencanaan pembangunan telah digarisbawahi oleh para pembicara panel yang diundang dalam Seminar ini. Secara umum panelis menyoroti bahwa paradigma pembangunan inklusif harus dijadikan pijakan utama dalam merancang kebijakan dan program-program pembangunan di perdesaan dan perkotaan. Berbagai pengalaman panelis di wilayah studinya masing-masing telah mengungkapkan fakta empirik bahwa perencanaan pembangunan yang lebih mengikutsertakan peran pihak-pihak yang selama ini terpinggirkan akan menghasilkan pembangunan yang lebih baik.

Sementara dari sejumlah makalah yang tercakup dalam 6 (enam) tema utama seminar ini, secara umum dapat diberi catatan sebagai berikut:

Tema A: Perencanaan dan Pengembangan Kepariwisataan dan Industri Kreatif

Sebanyak 19 (sembilan belas) makalah yang telah dibahas dalam tema ini, pada umumnya mengungkap berbagai fakta empirik tentang berbagai potensi ekonomi lokal terutama di wilayah perdesaan yang tentu saja menjadi produk konsumsi masyarakat perkotaan, seperti objek kawasan wisata baru, industri-industri pengolahan hasil pertanian dan kerajinan lokal, bahkan karya-karya seni masyarakat perdesaan.

Sejumlah model pendekatan perencanaan pengembangan kawasan wisata telah diungkap oleh para penulisnya, mulai dengan konsepsi kajian SWOT, pemanfaatan analisa spatial serta juga pelibatan partisipasi masyarakat. Secara umum, para peneliti pada dasarnya melihat bahwa peran serta masyarakat lokal menjadi faktor utama yang harus diperhatikan dalam setiap langkah kegiatan pengembangan di sektor ini, terutama sekali dimulai dalam tahap kegiatan perencanaan pengembangan itu sendiri. Sementara peran pihak luar, terutama pemerintah diharapkan dapat memfasilitasi pemikiran dan kegiatan yang dirancang oleh masyarakat lokal ini, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik.

Tema B: Perencanaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan

Lahan merupakan faktor utama dan bagian terpenting dari pengembangan pembangunan pertanian. Perencanaan dan pengembangan lahan sangat diperlukan karena keterbatasan sumberdaya lahan serta semakin besarnya kepentingan penggunaan lahan, tidak hanya bagi aktivitas pertanian tetapi juga aktivitas-aktivitas ekonomi lainnya di luar sektor pertanian. Pembangunan yang terus dilaksanakan menyebabkan banyak lahan pertanian yang harus beralih fungsi menjadi non-pertanian. Aspek-aspek perencanaan dan pengembangan lahan yang berkelanjutan

perlu dipikirkan dan dikaji lebih mendalam, untuk mendapatkan kesesuaian penggunaan lahan dengan tujuan pembangunan pertanian yang berkelanjutan.

Dari sepuluh makalah dalam tema ini, pembahasan makalahnya mencakup masalah upaya pemanfaatan lahan dan analisis kebutuhan lahan pertanian, diversifikasi penggunaan lahan serta konservasi lahan, sumberdaya manusia dan kesiapan masyarakat dalam penggunaan lahan, bencana alam yang berhubungan dengan penggunaan lahan, serta perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang dikaitkan dengan pengembangan agroindustri. Dari berbagai topik dari makalah-makalah tersebut, sebagian besar telah menyinggung tentang perencanaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan, namun upaya konkrit yang berhubungan dengan keberlanjutan tersebut belum terlalu dibahas. Masalah kesesuai penggunaan lahan dengan rencana tata ruang wilayah belum banyak disinggung dalam makalah yang ada.

Beberapa point penting yang mungkin masih perlu dikaji lebih lanjut berkaitan dengan topik ini antara lain: pemetaan lahan pertanian yang berkelanjutan antar daerah, kajian evaluasi dan efektifitas kebijakan pengembangan lahan yang ada dihubungkan dengan pembangunan pertanian yang berkelanjutan, Perencanaan dan pengembangan lahan pertanian pangan yang berkelanjutan, pembiayaan yang berhubungan dengan pengembangan lahan pertanian yang berkelanjutan, serta berbagai topic yang berkaitan dengan perencanaan dan pengembangan lahan pertanian yang berkelanjutan.

Tema C: Perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritiman

Perkembangan kota di pinggiran pantai berpengaruh sangat besar terhadap kawasan pesisir dan kemaritiman, terutama terjadinya modifikasi dan rusaknya ekosistim pantai dan kemaritiman. Hal lain bahwa adanya kecenderungan tingkat perekonomian masyarakat pesisir yang masih rendah dan rendahnya sumberdaya manusia di kawasan ini, dikhawatirkan akan berdampak negatif terhadap kondisi fisik kawasan pesisir. Perhatian khusus dalam perencanaan dan pengembangan kawasan pesisir dan kemaritiman dari semua pihak sangat dibutuhkan agar tercipta pembangunan yang mampu menjaga kelestarian alam pesisir secara berkelanjutan.

Makalah yang dipresentasikan dalam tema ini mencakup beberapa kajian seperti, kajian daya dukung lahan di kawasan pesisir, kajian pengembangan konsepsi agribisnis minapolitan, kajian pola penggunaan lahan di kawasan pesisir, serta kajian place-based management yang bersifat eco-region dalam pengelolaan ruang kawasan pesisir. Dari kajian-kajian tersebut dapat dilihat bahwa masih banyak sisi kajian empirik tentang pengelolaan lahan di kawasan pesisir yang dapat diaplikasikan sesuai dengan kebutuhan lokal.

Tema D: Perencanaan dan Pengembangan Sumberdaya Alam dan Lingkungan

Masalah degradasi sumberdaya alam serta kerusakan lingkungan telah menjadi sorotan para pemakalah seminar ini, terutama yang berkaitan dengan masalah sumberdaya lahan pertanian, bencana alam, longsor, serta masalah lingkungan perumahan dan pemukiman. Walaupun dalam setiap aspek pembangunan selalu ada kajian AMDAL-nya, tetapi pada kenyataannya masih banyak fakta empirik dari kegiatan-kegiatan pembangunan ataupun pengembangan wilayah yang pada akhirnya berdampak buruk terhadap lingkungn dan keberlanjutan sumberdaya alam yang ada di wilayah tersebut.

Para penulis makalah dalam tema ini pada umumnya telah mengekspos perkembangan baru dalam pengembangan wilayah dimana keterlibatan masyarakat lokal telah dijadikan faktor penting dalam setiap perencanaan pembangunan. Sisi inklusif dalam pelibatan masyarakat yang selama ini terpinggirkan telah mulai banyak dikembangkan di berbagai aspek pembangunan yang berkaitan dengan sumberdaya alam dan lingkungan, seperti yang telah disampaikan oleh banyak pemakalah antara lain dalam pengelolaan sampah, pengembangan kawasan wisata, pengelolaan Daerah Aliran Sungai, dan lainnya.

Tema E: Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan sistem yang meliputi pembinaan dan penyelenggaraan perumahan, pembinaan dan penyelenggaraan kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan penurunan kualitas dan upaya peningkatan kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Terkait dengan itu, perencanaan perumahan dan kawasan permukiman tidak bisa terlepas dari persoalan penyediaan tanah (lahan), pendanaan dan sistem pembiayaan, serta keterlibatan peran masyarakat berdasarkan sosial budayanya. Perumahan dan kawasan permukiman direncanakan dan diselenggarakan guna mendapat kepastian hukum, mendukung penataan ruang dan pengembangan wilayah, meningkatkan daya guna dan hasil guna sumberdaya alam berwawasan lingkungan, memberdayakan pemangku kepentingan (*stakeholders*), menunjang pembangunan ekonomi, sosial dan budaya, serta menjamin mutu rumah agar layak huni dan terjangkau dalam lingkungan yangsehat, aman, serasi, teratur, terpadu dan berkelanjutan.

Para penulis makalah yang dipresentasikan dalam tema ini telah menyajikan beberapa pemikiran, hasil studi literatur dan penelitian, serta evaluasi terhadap kebijakan dan program pembangunan terkait perumahan dan permukiman yang diimplementasi di daerah, baik di wilayah perkotaan atau perdesaan, terutama pada era desentralisasi. Diskusi yang menarik diantaranya adalah ketika kebijakan dan program pembangunan perumahan dan kawasan permukiman ternyata belum maksimal memenuhi unsur pemberdayaan *stakeholders* dan pelibatan masyarakat dalam hal meningkatkan kesadaran penggunaan sumberdaya wilayah yang berwawasan lingkungan. Sejauh mana kebijakan pembangunan perumahan dengan pola vertikal karena keterbatasan jumlah lahan perumahan,sesungguhnya telah menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan memberikan keluasan kepada penghuninya. Khusus untuk masyarakat berpendapatan rendah (MBR), pemerintah juga telah membangun perumahan dan kawasan permukiman baru, namun belum dimanfaatkan dengan baik. Beberapa kasus pembangunan perumahan dan permukiman di kota besar dan menengah yang berdampak pada terbentuknya kawasan kumuh, telah memberikan pembelajaran bahwa perencanaan dan implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman memerlukan pelibatan masyarakat sejak perencanaan awalnya.

Selain itu, kelembagaan pengelolaan perumahan dan kawasan permukiman juga perlu direvitalisasi melalui pemberdayaan struktur lembaga dan *stakeholders*, peningkatan kualitas sumberdaya manusia dengan kompetensi dan kapasitas yang sesuai dengan kebutuhan, sehingga tidak berakibat kepada penurunan kenyamaan dan kualitas hidup penghuni kawasan. Peraturan perundangan terkait pemanfaatan ruang wilayah diimplementasi melalui proses perizinan mendirikan bangunan, membangun perumahan dan kawasan permukiman yang melibatkan lintas sektor dan organisasi / unit pemerintahan, baik secara horizontal maupun vertikal. Hal itu tentu saja perlu dimulai dengan menata ruang wilayah, yang mencakup merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan ruang wilayah di tingkat pusat, daerah dan lokaldengan menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Tema ini juga mendiskusikan beberapa persoalan pembangunan sebagai dampak dari pembangunan kawasan komersial di lingkungan perguruan tinggi negeri yang berstatus kampus pemerintah, pertumbuhan perumahan dan kawasan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana, serta evaluasi program bedah rumah untuk MBR. Selain itu, juga dibahas tentang konsep*green development* sebagai solusi permasalahan perkotaan untuk mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan melalui keterpaduan strategi tata ruang, pembangunan infrastruktur, dan pembangunan sosial yang melibatkan semuaaktor kunci pembangunan. Sehubungan dengan itu, untuk mewujudkan perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman yang ideal, diperlukan koordinasi yang baik dan terpelihara dalam paradigma perencanaan partisipatif berbasis rasionalitas komunikatif (*communicative rationality*)agar tercapai pemahaman yang sama antarpelaku dan aktor kunci pembangunan, yang terdiri dari unsur pemerintah, masyarakat, serta pelaku bisnis.

Sesuai tema pokok seminar nasional "*Perencanaan dan Pembangunan Inklusif Desa–Kota*", makalah dan diskusi dalam sub tema "*Perencanaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman*" telah mampu mengisi dengan beberapa pemikiran dan solusi terkait sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan untuk keberlanjutan perumahan dan kawasan permukiman di desa dan kota. UU RI No. 1 tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman mengatur bahwa perencanaan perumahan dan kawasan permukiman merupakan satu kesatuan yang utuh dari rencana pembangunan tingkat nasional dan daerah dengan melibatkan peran masyarakat untuk menciptakan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat, aman, serasi, teratur dan memberikan keluasan kepada penghuninya. Oleh sebab itu perencanaan dan pengembangan perumahan dan permukiman selalu mengikuti dinamika penghuninya.

Tema F: Kemiskinan dan Ketimpangan

Dari makalah yang dikelompok kedalam Tema F ini tidak semua berkaitan dengan isu kemiskinan dan ketimpangan. Sebagaian besar makalah lebih berkaitan dengan isu pembangunan wilayah. Kajian kemiskinan berdasarkan artikel yang masuk didapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap angka kemiskinan disuatu wilayah yaitu, (a) pembangunan infrastruktur, (b) pendapatan regional, dan (c) Jumlah penduduk

Satu makalah secara khusus membahas tentang kerangka penetapan rumah tangga Miskin oleh BPS, yang selama ini belum memasukkan varibel ekonomi dalam pengukuran tingkat kesejahteraan masyarakat. Sementara beberapa yang lainnya mengkaji beberapa masalah seperti masalah waktu luang dalam rumah tangga, karakterisasi kemiskinan berdasar kawasan, kajian ketimpangan yang berkaitan dengan indikator demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia, serta kajian hubungan antara kemiskinan dengan ketahanan pangan. Apabila diperhatikan lebih lanjut, sejauh ini kajian mengenai ketimpangan belum memasukan bahasan mengenai pengaruh sektor industri, jasa dan perdagangan dalam melihat ketimpangan antar wilayah.

Sebagai penutup, seluruh makalah, baik dari panelis dan juga seluruh tema yang telah dikompilasi dalam buku proseeding ini, setidaknya telah menghasilkan dua hal pokok yang sangat berarti bagi pengembangan praktis dan konseptual lebih lanjut, yang menjadi tantangan ilmu perencanaan dalam pembangunan khususnya. Secara konseptual, pembangunan inklusif setidaknya menuntut pendekatan yang lebih humanistik, yang secara khusus harus lebih dapat

mentransformasi manusia dan masyarakat lebih awal sebelum adanya perubahan atau transformasi fisikal yang justru akan merubah kondisi masyarakat ke arah yang tidak diharapkan. Untuk itu, konsepsi ilmu perencanaan ke depan semakin membutuhkan keterpaduan keilmuan yang lebih komprehensif, terutama dengan bidang ilmu sosial dan kemasyarakatan. Secara praktis, kerangka-kerangka metodologi dan pendekatan praktis yang biasa dipakai dalam ilmu-ilmu sosial dan kemasyarakatan harus semakin dapat dipadukan dengan model-model teknis perencanaan yang saat ini juga sedang berkembang. Sejumlah makalah telah mulai mengekspor kerangka praktis ini, namun masih harus terus dapat disempurnakan dan dikembangkan. Selanjutnya, pada sisi yang lain, seminar ini juga mencoba menggiring pemikiran bahwa konteks pembangunan desa dan kota, tidak lagi harus dilihat secara terpisah, tetapi harus dilihat keterpaduannya untuk dapat berkembang dan bertransformasi bersama.

Akhir kata, kami sangat berterimakasih sekali kepada seluruh panelis dan pemakalah Seminar Nasional ini yang telah melengkapi dan menyempurnakan seluruh makalahnya sesuai dengan format penerbitan proseeding ini. Semoga seluruh hasil karya dan pemikiran yang telah dituangkan dalam buku ini dapat bermanfaat bagi kita semua, para akademisi, birokrat dan praktisi perencanaan dan pembangunan di Indonesia pada umumnya.

Padang, Juni 2017

Tim Penyunting

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Ketua ASPI iii
Kata Pengantar Ketua PERHEPI iv
Tantangan Perencanaan Pembangunan Inklusif Desa-Kota:Catatan Dari Penyunting v

MAKALAH PANEL

Desa-Kota sebagai Alternatif Permukiman yang Berkelanjutan: Pembelajaran dari Yogyakarta dan Bali
Boby Setiawan **1**

Perencanaan Organis: Mengatasi Kemajemukan dan Liberalisasi Pasar
Endry Martius **11**

Pengembangan Wilayah Berbasis *Quadruple Helix:* Analisis Jaringan Antar Aktor dalam Pengembangan Industri Kreatif Cimahi
Tubagus Furqon Sofhani dan Vaulli Nurrahma **17**

Pelajaran dari Praktik Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Werry Darta Taifur **27**

TEMA A : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN INDUSTRI KREATIF
Strategis Pengembangan Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung Trawas Kabupaten Mojokerto
Anak Agung Sagung Alit Widiyastuty dan Gesang Hari **35**

Model Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar
I Gusti Putu Anindya Putra **43**

Membangun Kampung Kreatif Melalui Kolaborasi Mahasiswa dengan Masyarakat: Kasus: Kawasan Balubur-Tamansari Kota Bandung
Asep Yudi Permana, Nana Sumarna dan Karto Wijaya **51**

Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort sebagai Kawasan Ekowisata dan Wisata Olahraga Berbasis Pemberdayaan Masyaakat
Desy Aryanti dan Harne Julianti Tou **59**

Risiko Produksi Pembenihan Lele pada Usaha Family Pisces Group Kecamatan Koto Tangah Kota Padang
Dwi Evaliza, Nur Afni Evalia dan Elfi Syukrina Sani **79**

Pengembangan Infrastruktur Pariwisata Di Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang Berdasarkan Aspirasi Masyarakat
Eko Budi Santoso, Arwi Yudhi Koswara dan Belinda Ulfa Aulia **87**

Pengembangan Kelembagaan Koperasi Melalui Perspektif Psikologi Sosial
Elfi Rahmadani, Rudi Febriamansyah dan Ira Wahyuni Syarfi **93**

Pengembangan Air Terjun Coban Pelangi Desa Wisata Gubugklakah Kabupaten Malang Berdasarkan Potensi Ekonomi dan Sosial Masyarakat
Ema Umilia, Ketut Dewi Martha Erli Handayeni dan Arwi Yudhi Koswara **103**

Implementasi Nagari Koto Hilalang sebagai Desa Wisata Pertanian di Kabupaten Solok
Harne Julianti Tou **111**

Analisis Program Pengembangan Ekowisata di Pulau Pahawang Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung
Hendro Muliarto, Isye Nurhasanah Susanah dan Citra Persada **115**

Tantangan Pembangunan Pariwisata Inklusif Geopark Ciletuh, Desa Ciwaru Kabupaten Sukabumi – Provinsi Jawa Barat
Hilwati Hindersah, Yulia Asyiawati, Lely Syiddatul Akliyah dan Taufik Akbar Ramadhan **125**

Pengembangan Agro-Technopark untuk Mendukung Agrowisata Salak Sibetan Berkelanjutan
I **Ketut Sumantra** **135**

Pengembangan Klaster Industri Kerajinan Mutiara, Emas, Perak (MEP) sebagai Kawasan Pariwisata Belanja di Kelurahan Karang Pule, Kecamatan Sekarbela Kota Mataram
Ima Rahmawati Sushanti, Baiq Harly Widayantl dan Sucia Wulandari Irawan **141**

Perkembangan Wisata Berbasis Sosial Media dan Pengaruhnya terhadap Penyediaan Infrastruktur Perdesaan
Isti Hidayati **153**

Pengembangan Industri Kreatif Pedesaan Melalui Komersialisasi Produk Unggulan Daerah (Studi Kasus pada Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam)
Lora Triana dan Faidil Tanjung **161**

Menakar Partisipasi Masyarakat dalam Engembangan Losari Sebagai Ruang Publik
Slamet Trisutomo, Mukti Ali dan Nuni Andriani Daunun **169**

Identifikasi Kebutuhan Ruang untuk Pengembangan Wisata Budaya Seni Pertunjukan Tradisional (Studi Kasus : Kota Bandung)
Sony Herdiana dan Khaerunnisa Larashati Mahmud **177**

Model Pengembangan Industri Kelapa di Provinsi Riau
Syaiful Hadi **183**

Penentuan Hirarki Pengembangan Wilayah pada Pulau-Pulau Kecil Berpotensi Wisata di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Tondobala Linda, Cynthia Wuisang dan Leidy Rompas **191**

TEMA B : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

Peranan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Kelas Berkembang dalam Pengembangan Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Tebo
Asnawati. Is **201**

Diversifikasi Sawah Melalui PTS Iptek bagi Masyarakat
Arief Setiyawa, Hutomo Moestadjab dan Gaguk Sukowiyono **209**

Pemetaan Lokasi Konservasi untuk Penyelamatan Stok Ternak
Delvia Nora **215**

Dampak Bencana Alam terhadap Sektor Pertanian di Perdesaan di Provinsi Jawa Barat
Dwi Mahroji **225**

Kontribusi Sektor Pertanian di Subsektor Perkebunan terhadap Ekonomi Kabupaten Tebo
Evo Afrianto **233**

Analisis Kebutuhan Luas Lahan Pertanian Pangan sebagai Dasar Perencanaan dan Pengembangan Lahan Pertanian Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan
Hasbullah Syaf, M.Tufaila, Lukman Yunus, La Baco, Jufri Karim dan M.Aris Rauf **243**

Pengembangan "Kampung Bibit" sebagai Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dan Pertanian Organik Perkotaan (Studi Kasus: RW 3, Kelurahan Lowokwarru, Kota Malang)
Aris Subagiyo, Abdul Wahid Hasyim dan Armei Rapudin **251**

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan
Muhammad Anshar dan Patris **257**

Analisis Kesiapan Masyarakat Nagari Paru Kecamatan Sijunjung Kabupaten Sijunjung dalam Program Pencetakan Sawah Baru
Nuraini Budi Astuti, Ira Wahyuni Syarfi dan Edwin **275**

Analisis Perencanaan Pengembangan Wilayah Pertanian terhadap Pengembangan Agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota
Rini Hakimi, Melinda Noer, Nofialdi dan Hasnah **281**

TEMA C: PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DAN KEMARITIMAN
Kajian Daya Dukung Lahan terhadap Tekanan Penduduk di Kecamatan Nanggalo Kota Padang
Fitriana Syahar **289**

Pengembangan Kawasan Pesisir Pantai dengan Konsep Agribisnis Minapolitan
Mohammad Agung Ridlo **301**

Karakteristik Pola Penggunaan Lahan Kawasan Pesisir Kota Makassar (Studi Kasus Delta Sungai Jeneberang)
Mukti Ali , Slamet Trisutomo, Sri Aliah Ekawati dan Resti Kharisma **309**

Place-Based Management sebagai Salah Satu Pendekatan dalam Pengelolaan Ruang Laut di Indonesia
Putu Oktavia **319**

TEMA D : PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA ALAM DAN LINGKUNGAN
Eksplorasi Pola Hidup Masyarakat Bugis sebagai Dasar Penyusunan Kebijakan Pembangunan Inklusif Perumahan dan Permukiman di Kota Makassar
Arifuddin Akil **327**

Valuasi Sumber Daya Lahan di Pinggiran Kota Malang (Studi Kasus : Wilayah Pinggiran Kota Malang, Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)
Dimas Wisnu Adrianto, Abdul Wahid Hasyim, Dian Dinanti, Januar Dwi Hari Sandy dan Raihanah Rizky Ananda **335**

Partisipasi Masyarkat pada Pengelolaan Sampah dengan Konsep 3r di Kota Bukittinggi
Dona Amelia dan Juarsa Badri **343**

Pengembangan Desa Berkelanjutan Melalui Konsep Mandiri Energi di Desa Parakanmuncang Kabupaten Bogor
Eneng Dayu Saidah dan Indarti Komala Dewi **353**

Ketahanan Pangan Rumah Tangga dan Wilayah Berbasis Pangan Lokal Sagu, Keladi dan Pisang di Kabupaten Kepulauan Mentawai
Erwin **373**

Analisis Resiko Bencana Multi Bahaya (*Multi Hazard*) dan Arahan Mitigasinya di Kota Bukittinggi
Firmansyah, Jajan Rohjan dan Deden Syarifudin .....

Evaluasi Kerawanan Bencana Tanah Longsor di Kawasan Permukiman di daerah Aliran Sungai (Das) Ciliwung Hulu
Indarti Komala Dewi dan Faisal Abdi **381**

Peranan Tanah Ulayat sebagai *Land Banking* dalam Perkembangan Kota Bukittinggi
Ira Safitri Darwin, Haryo Winarso dan Denny Zulkaidi **389**

Analisis Potensi Sumber Daya Kawasan Transmigrasi dan Kawasan Industri Perkotaan Baru Bumi Asri Dusun Tangah untuk Mempercepat Pembangunan Solok Selatan sebagai Daerah Tertinggal di Smatera Barat
Kardiman **397**

Kawasan Banjir dan Pola Aliran Sungai Berdasarkan Morphometri pada Daerah Aliran (DAS) Batang Kuranji Sumatera Barat
Lusi Utama, Amrizal Saidi, Isril Berd dan Zuherna Mizwar **409**

Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita sebagai Sarana Pilihan Angkutan Umum di Provinsi Bali
Ni Nyoman Rai Sriasih dan Ni Gusti Agung Gde Eka Martiningsih **421**

Model Penggunaan Lahan Berbasis Budaya di DAS Tukad Pakerisan Bali
Nyoman Utari Vipriyanti **425**

Water Poverty Index di Kecamatan Kedungkandang
Septiana Hariyani dan Ismu Rini Dwi Ari **431**

Pemanfaatan Poster Y untuk Mengeksplorasi Gagasan Mahasiswa Perencanaan Pembangunan Wilayah dalam Mengelola Kawasan Lanskap Budaya Dunia
Sang Putu Kaler Surata **441**

Kearifan Budaya Lokal Kampung Adat Cireundeu dan Konsep Swasembada Pangan
Saraswati dan Reiza Permanda Gulfa **451**

Analisis Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Pekerisan Ditinjau dari Daya Dukung Biofisik Lahan
Wayan Sudiani dan I Ketut Sumantra **459**

TEMA E: PERENCANAAN DAN PEMNGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

Studi Awal Tingkat Kepuasan Penghuni Rusun Jatinegara Barat di DKI Jakarta dan Kesempatan Pengentasan Kemiskinan
Akhmad Gunawan, Haryo Winarso dan Teti Armiati Argo **469**

Perubahan Ruang Sakral Wilayah Kuta, Bali
Ari Djatmiko dan Zulphiniar Priyandhoko **477**

Strategi Penyediaan Kawasan Komersial di Lingkungan Kampus ITS Surabaya
Arwi Yudhi KOSWARA, Sardjito dan Adjie PAMUNGKAS **483**

Kebijakan Pengembangan Area Permukiman Melayu Moderen di Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau
Fiki Angga Putra dan Puji Astuti **493**

Spiritualitas Ruang Tongkonan Kampung Adat Tua Sillanan – Toraja
Imam Indratno, Sudaryono, Bakti Setiawan Dan Kawik Sugiana **507**

Pengelolaan Permukiman Berkelanjutan di Kawasan Pinggiran Metropolitan Jabodetabek
Janthy Trilusianthy Hidayat **515**

Kajian Potensi Ekonomi Wilayah dan Penguatan Kelembagaan untuk Mendorong Pembagunan Kawasan Transmigrasi di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa Provinsi
Lilis Sri Mulyawati dan Inna Sri Supina Adi **521**

Kajian Penataan Eksistensi Kampung Terjepit (*Enclave*) Akibat Pengembangan Perumahan Skala Besar (Studi Kasus Kampung Lengkong Ulama Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang)
Medtry, Budi Haryo dan Kusmalinda Madjid **531**

Kebijakan Pengendalian Ruang Perumahan dan Pemukiman di Kota Padang: Studi Kasus Pemanfaatan Lahan untuk Pembangunan Perumahan di Kecamatan Pauh Kota Padang
Melinda Noer, Rian Hidayat dan Yushy **541**

Pengaruh Struktur Ruang Berdasarkan Tataguna Lahan Campuran (Mix Used) di Kota Banda Aceh
Noer Fadhly, A. Rahim Matondang Sirojuzilam dan Sofyan M. Saleh **549**

Kajian Dampak Perkembangan Permukiman Berdasarkan Debit Air Limpasan di Kecamatan Medan Johor
Rahmad Dian dan Muhamad Abdul Soleh **555**

Green City: Solusi Problematika Perkotaan dalam Dimensi Pembangunan Berkelanjutan
Syarif Imam Hidayat **567**

Analisis Laju Pertumbuhan Perumahan dan Permukiman di Kawasan Rawan Bencana Kota Bukittinggi
Tri Novi Arif, Melinda Noer dan Yossyafra **577**

Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kota Padang
Yushy, Yossyafra dan Melinda Noer **589**

TEMA F: KAJIAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

Ketimpangan Pendapatan dan Demokrasi Indonesia: Fakta dari Non-Linear Estimasi Gmm
Abdul Khaliq **599**

Integrasi Pembagunan Desa-Kota Menuju Kemandirian Pangan dan Masyarakat Sejahtera
Asep Suherman **611**

Identifikasi Tingkat Pelayanan Fasilitas Publik berdasar Aspek Penyediaan (*Supply Aspect*) (Studi Kasus: Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Malang)
Deni Agus Setyono, Denny Dwi Cahyono dan Dian Kusuma Wardhani **619**

Kajian Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan (Studi Kasus: Kota Padang Panjang)
Eliza dan Siska Yulia Defitri **629**

Transformasi *Technopark* Menuju *Technopolis* : Sebuah Pengalaman Pengembangan Technopark di Indonesia
Ery Supriyadi Rustidja dan Tuti Karyani **641**

Analisis Ketimpangan Pembangunan Sumatera Utara
Faoeza Hafiz Saragih dan Endang Sari Simanullang **649**

Resettlement, Partisipasi, Kompensasi dan Kesejahteraan Masyarakat
Fery Andrianus, Syafruddin Karimi, Melinda Noer dan Werry Darta Taifur **655**

Kegagalan Pembangunan Pertanian Meningkatkan Kesejahteraan Petani di Indonesia
Gevisioner, Rudi Febriamansyah, Ifdal dan Suardi Tarumun **663**

Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin Melalui Pemanfaatan Waktu Luang Istri di Kawasan Perdesaan (Kasus : Kabupaten Bekasi)
Ina Helena Agustina **671**

Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Gabungan Kelompok Tani Tanjung Sehati dalam Kegiatan Kelompok di Kabupaten Merangin
Isyaturriyadhah, Asnawati Is dan Effy Yudiawati **683**

Analisis Wilayah Komoditi Basis dalam Mengoptimalkan Potensi Ekonomi Regional Kabupaten Dharmasraya
Joni Haryadi, Melinda Noer dan Hery Bachrizal Tanjung **691**

Identifikasi Pusat - Pusat Pelayanan dengan Analisis *Weighted Centrality Index* (Studi Kasus Kabupaten Bogor)
Ken Martina Kasikoen, Darmawan Listya Cahya dan Laili Fuji Widyawati **697**

Mobilitas Pencari Kerja Perempuan di Perkotaan
Komara Djaja, Hera Susanti, Shelly Adelina dan Cita Wigjoseptina **703**

Peran Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari Berbasis Ikatan Sesama Petani terhadap Pembangunan Pedesaan di Nagari Balai Panjang
Muhamad Reza, Melinda Noer, Yonariza dan Asmawi **711**

Prioritas Pembangunan Infrastruktur Pedesaan (Studi Kasus : Desa Semukut–Kab. Kep. Meranti)
Muhammad Sofwan **721**

Interaksi Lintas Batas Antar Negara dalam Pendekatan Pembangunan Kawasan Perbatasan (Studi Kasus: Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu-Kalbar)
Muhamad Yogie Syahbandar **731**

Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastuktur terhadap Kemiskinan Kota Tangerang
Resti Meliana Sari, Ikhmaliska Aisha Maqdis dan M. Yogie Syahbandar **737**

Inventarisasi Lembaga Keuangan Lokal dalam Mendukung Pembangunan Pertanian Berkelanjutan di Kecamatan Pauh Kota Padang
Rika Hariance, Zednita Azriani, Cindy Paloma, Yuerlita dan M Refdinal **747**

Kajian Perkembangan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur
Siti Abir Wulan **755**

Kajian Penghidupan Rumah Tangga di Kabupaten Padang Pariaman Pasca Gempa 2009 (Studi Kasus Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan)
Sosmiarti, Syafruddin Karimi, Melinda Noer dan Werry Darta Taifur **761**

Badan Usaha Milik Desa: Mengidentifikasi Potensi, Peluang dan Tantangan
Teguh Widodo **771**

Mengawal Pembangunan Neo-Endogenous di Perdesaan: Pengembangan Kawasan Perdesaan di Kab Serang
Teti A Argo dan Hastu Prabatmojo **775**

Mentautkan Desa-Kota Melalui Penerapan *Supply Chain Financing* pada Komoditas Wortel di Koperasi Al-Ittifaq
Tuti Karyani, Nabila Luthfiannisaa dan Ery Supriyadi.R **783**

Model Pengembangan Perdesaan Kawasan Perbatasan Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis
Umar Mansyur **793**

Pembangunan Inklusif Desa-Kota Melalui Pengembangan Kawasan Agropolitan
Wiwik Ambarsari **805**

Local Economic Linkages pada Kota Kecil/Menengah sebagai Instrumen Konsep Keterkaitan Desa-Kota (Rural-Urban Linkage)
Yosep Mohamad Holis **817**

LAMPIRAN **827**
Lampiran 1 Panitia Pengarah **827**
Lampiran 2 Panitia Pelaksana **828**

MAKALAH
PANEL

DESA-KOTA SEBAGAI ALTERNATIF PERMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN: PEMBELAJARAN DARI YOGYAKARTA DAN BALI

B. Setiawan

Universitas Gadjah Mada

Email : bobi.setiawan@yahoo.com

Naskah diterima :25 Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Ditengah pandangan, keyakinan, dan tekanan berbagai lembaga dan kesepakatan global, termasuk hasil Habitat 3 di Ekuador, Oktober 2016 lalu, bahwa urbanisasi dan perkembangan kota di seluruh dunia merupakan sesuatu 'keniscayaan'atau tidak dapat dielakkan, diperlukan pandangan yang kritis, alternatif, dan bahkan terobosan, kalaupun tidak 'mengkoreksi,' tetapi memberikan alternatif atas proses dan wujud permukiman di masa depan yang lebih baik. Meneruskan ide awal dari McGee di tahun 1980an, paper ini berargumen bahwa proses dan wujud urbanisasi dan perkembangan kota di negara-negara berkembang seperti Indonesia tidak akan begitu saja mengikuti model urbanisasi dan perkembangan kota di negara-negara Barat. Indonesia menyimpan dan bahkan dapat menunjukkan model yang lain, model alternatif, model permukiman kota-desa, campuran yang kompleks, dinamis, dan seimbangantar unsur-unsur kota dan desa, yang lebih berkelanjutan. Meskipun masih perlu diteruskan dokumentasi dan kajian best practices di berbagai tempat di Indonesia, riset di Yogyakarta dan Bali, sampai saat ini menunjukkan bahwa model permukiman kota-desa dapat menjadi model permukiman yang tidak saja inklusif, aman, tangguh, tetapi juga bermartabat dan berkelanjutan.

***Kata kunci**: permukiman kota-desa, model, alternatif, berkelanjutan*

PENDAHULUAN

URBANISASI dan URBAN BIAS

Dengan tingkat urbanisasi dan pertumbuhan kota yang semakin pesat, keberlanjutan kehidupan dan lingkungan sebagian besar penduduk Indonesia akan sangat tergantung pada lingkungan kota. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Indonesia (BPS, 2013), pada tahun 2010, tingkat urbanisasi di Indonesia 49,8 persen, dan pada tahun ini (2015) sudah lebih dari separo penduduk Indonesia(53,3%) tinggal di perkotaan. Di tahun 2025 mendatang, dari jumlah total penduduk Indonesia sebesar 273 juta jiwa, diperkirakan sekitar 68 persennya akan bermukim di perkotaan. Data dan proyeksi ini menggambarkan bahwa sebagai satu Negara, Indonesia sudah dapat dikatakan sebagai '*urbanized country*' satu istilah untuk menggambarkan bahwa lebih banyak penduduk di Negara tertentu tinggal dan tergantung hidupnya di lingkungan perkotaan. Percepatan urbanisasi dan pertumbuhan kota yang sangat cepat ini harus diantisipasi dengan perencanaan yang baik dan tepat agar terjamin keberlanjutannya.

Status dan proyeksi masa depan urbanisasi dan perkembangan kota ini, tentunya mengandung dua hal bersamaan. **Pertama**, urbanisasi dan perkembangan kota dapat memberikan peluang pada peningkatan kualitas kehidupan dan lingkungan sebagian besar masyarakat Indonesia – dan hal ini yang tentunya kita harapkan dan upayakan. **Kedua**, percepatan urbanisasi dan perkembangan kota tersebut justru semakin menimbulkan banyak persoalan yang semakin kompleks, tidak tertangani, dan mengarah pada semakin memburuknya kondisi lingkungan dan kehidupan masyarakat perkotaan, bahkan mengancam pada keberlanjutan kota dan warganya. Diperlukan upaya-upaya perencanaan dan pengelolaan kota yang rasional, komprehensif, sistematis, dan terukur untuk menjamin agar percepatan urbanisasi dan perkembangan kota di Indonesia memberikan banyak peluang untuk menciptakan lingkungan kota dan kehidupan yan lebik baik dan berkelanjutan.

Pengantar di atas, memberikan ilustrasi, betapa sebagian besar dari kita terus berpandangan bahwa urbanisasi dan perkembangan kota merupakan sesuatu keniscayaan, akan terus terjadi, tanpa alternatif apalagi

'perlawanan'. Hasilnya dikhawatirkan, adalah persoalan dan kekalahan, dimana kita tidak mendapatkan model permukiman yang lebih baik, berkelanjutan, apalagi unik dan berkarakter. Terselip dalam berbagai pemikiran kita selama ini bahwa kota dan desa adalah entitas yang sepenuhnya berbeda, bertentangan, dan bahkan berlawanan.

Pandangan yang sangat dikotomik ini memperlakukan kota sebagai satu keharusan, keniscayaan, kebaharuan, kemajuan, dan masa depan. Sementara desa sebagai ketertinggalan, kemunduran, keterbelakangan, dan masa lalu. Desa adalah korban dan objek penderita serta penindasan atas kekuatan, kemajuan, dan kedigdayaan kota. Melanggengkan desa berarti melanggengkan ketertinggalan, keterbelakangan, kemiskinan dan ketidak-berdayaan.

KOTA-DESA SEBAGAI ALTERNATIF?

Konsep dan terminologi *desa-kota* atau *kotadesasi*, sesungguhnya bukan sesuatu yang baru. Konsep ini pertamakali dilontarkan oleh Terry Mc.Gee, ahli urbanisasi dan perkotaan di Asia pada tengah tahun 1980an [1] [2] McGee melontarkan konsep dan termonilogi *kotadesasi,* untuk menjelaskan fenomena perkembangan kota di negara-nagara Asia, khususnya Asia Tenggara yang menunjukkan perbedaan dengan fenomena perkembangan kota di negara-negara Barat. Konsep ini secara khusus menjelaskan proses, wujud, dan karakter perkembangan kota di daerah pinggiran kota yang awalnya merupakan daerah pedesaan.

Proses perkembangan kota yang tidak sepenuhnya terencana atau *organic* menyebabkan wujud yang merupakan campuran antara ciri ciri lingkungan perkotaan dan pedesaan. Wujud campuran antara kota dan desa ini menjadi lebih kompleks dan khas karena juga diwarnai dengan kegiatan ekonomi dan sosial yang juga bercampur, antara kegiatan perkotaan dan pedesaan. Proses dan wujud yang bercampur ini, kemudian, menghasilkan satu karateristik perkembangan kota yang khas, unik, dan menarik.

Dalam konteks kota-kota besar, proses, wujud, dan karakteri kotadesasi ini kemudian menyebabkan perkembangan megalopolis yang juga unik dank has. Meskipun demikian, McGee menjelaskan bahwa konsep kotadesasi tidak sama dengan konsep Megalopolis yang digagas oleh Gottman pada awal 1960-an. Dalam bahasanya langsung, McGee menjelaskan bahwa:

"T*he megalopolis is region dominated by the activities of central urban system. In many Asian countries , the process of Kotadesasi is somewhat different for it is occuring in many different locations often in areas adjacent to peri-urbans of the giants cities and sometimes in the form of corridor development adjacent to main roads or railways that link reasonably close, large cities.*

Lebih lanjut, McGee menjelaskan bahwa pertumbuhan megalopolis akan membentuk elemen-elemen yang khusus yakni: 1) kota besar; 2) wilayah pinggiran; 3) desa-kota; 4) desa berkepadatan penduduk tinggi; 5) desa berkepadatan penduduk rendah; dan 6) kota kecil. Proses ini ditandai dengan perubahan desa menjadi kota, yang diiringi dengan pergeseran kegiatan ekonomi formal ke informal. Contoh megalopolis di Indonesia antara lain Jabodetabekjur (Jakarta, Bogor, Depok, Bekasi, Cianjur), akan tetapi, dia juga menjelaskan betapa seluruh pulau Jawa sesungguhnya juga dapat disebut sebagai serangkaian megalopolis yang besar.

Fenomena *kotadesasi* ini kemudian juga dipakai untuk menjelaskan perkembangan kota metropolitan seperti Jabodetabekjur, yang disebut sebagai *Extended Metropolitan Region – EMR. Adapun* ciri-ciri satu EMR adalah: 1) berkepadatan penduduk tinggi; 2) sebagian besar penduduk bergantung pada sektor pertanian; 3) mengalami transformasi kegiatan dari pertanian ke beberapa kegiatan non pertanian (perdagangan, transportasi dan industri); 4) intensitas mobilitas penduduk yang tinggi dimungkinkan tersedianya transportasi yang murah; 5) interaksi yang tinggi antara aktivitas perdesaan dan perkotaan; dan 6) pencampuran guna lahan yang intensif antara permukiman dan aktivitas ekonomi, seperti pertanian, industri rumah tangga dan kawasan industri.

Dalam perkembanganya, konsep kotadesasi ini kemudian digunakan oleh banyak peneliti untuk mengkaji fenomena urbanisasi dan perkembangan kota di berbagai negara Asia, dan sebagian besar mengkonfirmasi konsep ini [3] [4] [5] . Salah satu hasil kajian desa-kota yang penting adalah disepakatinya sembilan (9) parameter desa-kota sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel berikut.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1. Parameter Desa-Kota

No.	Parameter	Catatan
1.	Terhubung dengan pusat kota besar	Jaringan ini memungkinkan konektifitas yang baik antara kawasan desa dan kota, baik untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial
2.	Tersedia tenaga kerja harian	Memungkinkan penduduk desa, termasuk wanita untk menmdapatkan pekerjaan dan penghasilan, tanpa harus meninggalkan desanya/perumahanya
3.	Mempunyai akses terhadap informasi dunia luar	Jaringan komunikasi yang memungkinkan warga desa berhubungan secara aktif dengan masyarakat luar, baik nasional maupun global
4.	Sebagian besar rumah tangga terlibat di sektor pedesaan dan perkotaan	Warga desa mempunyai pendapatan ganda dari kegiatan pertanian dan non-pertanian
5.	Masih terdapat kelompok kerja pedesaan	Masih terdapat spirit dan prakek kerja kelompok secara gotong royong, modal sosialnya tinggi
6.	Tersedia teknologi modern	Mulai tersedia teknologi modern untuk proses pertanian dan non-pertanianya
7.	Telah terjadi hubungan kerja yang berupah	Upah langsung/cash economy cukup dominant, meskipun masih cenderung sector informal
8.	Terdapat kelembagaan campuran	Mskipun lembaga-lembaga formal sudah mulai terbentuk, tapi masih banyak pula lembaga informal yang eksis dan bermanfaat
9.	Mempunyai kaitan dengan eonomi global	Semakin terkoneksi dengan ekonomi global

Sumber: Diadopsi dari The Desakota Study Team (2008)

Sampai saat ini, konsep kota-desasi atau desa-kota, cenderung dipakai sebagai cara pandang untuk menjelaskan fenomena atau model perkembangan kota di Indonesia dan Negara-negara di Asia Tenggara (model deskriptif). Meskipun tidak lepas dari kritik, konsep ini semakin diyakini dan diterima sebagai konsep yang relevan untuk menegaskan bahwa proses, wujud, dan karakteristik perkembangan kota di Indonesia tidaklah persis sama dengan yang terjadi di Negara-negara Barat.

Dengan tantangan dan kebutuhan perencanaan yang lebih tepat dan pas untuk Indonesia, konsep ini tentunya dapat digunakan dan dikembangkan lebih lanjut sebagai alat 'preskripsi' yakni seperangkat prinsip dan model untuk mengarahkan masa depan perkembangan kota di Indonesia.

Paper ini merupakan satu rangkuman atas kajian awal yang dilakukan di Yogyakarta dan Bali, yang mendokumentasikan *best practices* beberapa jenis permukiman desa-kota di dua daerah serta mengkaji keberlanjutanya, baik dari sisi konsep dan indikator pembangunan berlanjut, serta faktor-faktor yang menentukan keberlanjutan tersebut. Meskipun kajian yang lebih komprehensif akan terus dilakukan di berbagai kasus lain, sampai saat ini riset awal ini memberikan keyakinan bahwa konsep desa-kota, mempunyai berbagai karakteristik yang khas dan mengandung aspek-aspek yang sesuai dengan prinsip-prinsip serta indikator keberlanjutan. Dengan kata lain, model 'deskriptif' desa-kota, mengandung peluang untuk dikembangkan menjadi model 'preskriptif,' sebagai satu alternatif untuk mewujudkan perkembangan kota yang berkelanjutan.

Argumen dasarnya adalah bahwa konsep kotadesasi atau desa-kota, mempunyai karakteristik yang khas, dan dapat menjadi alternatif pembangunan kota yang berkelanjutan.Melalui serangkaian observasi lapangan melalui studi kasus, diskusi, workshop, dan kajian kasus, baik di Yogyakarta dan di Bali semakin diyakini bahwa konsep desa-kota bukanlah fenomena dan konsep yang sifatnya trasnsisi, tetapi dapat menjadi konsep alternatif pembangunan kota yang berkelanjutan. Desa-kota mempunyai karakter tangguh (*resilience*) tidak saja secara ekologis, tetapi juga social, dan ekonomi (Proto Tamansari Team, 2014; Setiawan dkk. 2016).

FENOMENA KOTA-DESA DI BALI

Meskipun penelitian kota-desa ini dilakukan di Yogyakarta dan Bali, dalam paper ini Bali diambil sebagai kasus empirik yang menjadi argumen bahwa model kota-desa dapat menjadi alternatif permukiman di masa depan.

Terdapat tiga lokasi *best practices* permukiman "desa-kota berkelanjutan" di Bali yang dijadikan contoh dalam paper ini. Ketiganya berada dalam area perkotaan Denpasar. Ketiga desa tersebut adalah: 1) Desa Lebih,

Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar; 2) Desa Jagapati, Kecamatan Abiansemal, Kabupaten Badung; dan 3) Desa Pejaten, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan.

Adapun karakteristik ketiga desa dapat dilihat dalam Tabel 2 di bawah ini. Karakteristik ini penting didokumentasikan dan dipahami, karena akan menjadi dasar pengembangan tiga desa ke depan, baik dalam konteks permukiman desa-kota maupun identitas ketiga desa tersebut. Tabel berikut meringkas karakteristik tiga desa yang dikaji.

Tabel 2. Karakteristik Tiga Desa Kasus

Aspek	Desa Lebih, Gianyar	Desa Jagapati, Badung	Desa Pejaten, Tabanan
Fisik/ Lingkungan	• Merupakan satuan ruang geografis yang menarik, gabungan antara wilayah perbukitan dan pesisir; • Telah mengalami abrasi yang menggerus dan menghilangkan sebagian area pantai; • Terancam oleh pembangunan jalan higway regional yang membuka akses desa tetapi juga mendorong percepatan konversi lahan; • Masih mempunyai tata permukiman tradisional yang manarik; • Mempunyai panorama atau landscape yang cantik mengarah pada pantai dan laut dan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan wisata	• Merupakan satuan ruang geografis yang subur, diapit oleh sungai yang menjadi sumber air utama • Lahan sawahnya masih luas/dominan; • Dilewati jalan kabupaten yang cukup sibuk, belum sepenuhnya mengusik kehidupan desa; • Masih mempunyai tata permukiman tradisional yang cukup menarik; • Mempunyai paniorama kawasan sawah dan tepian sungai yang potensial untuk pengembangan kawasan wisata	• Merupakan satuan ruang geografis yang subur; • Mempunyai seting yang unik, dikelilingi oleh sungai; • Lahan sawahnya terbatas/sempit dan sebagian lahanya telah dipakai atau diekspoitasi untuk bahan dasar gerabah, (tanah liat dan paras); • Mempunyai panorama yang khas, yakni desa dengan seting tobong-tobong pembakaran gerabah yang unik; • Sebagian area sudah mengalaman degradasi dalam bentuk ceruk-ceruk yang dalam karena proses penambangan
Sosial	• Kehidupan adat/religi masih kuat/kental; • Sudah mulai terimbas oleh kegiatan pariwisata (hotel, taman safari, pantai); • Warna kegiatan pertanian dan perikanan masih cukup menonjol dan dapat diapresisasi.	• Kehidupan adat/religi masih kuat/kental; • Warna kegiatan pertanianya masih menonjol; • Belum terimbas oleh kegiatan pariwisata secara langsung,	• Kehidupan adat/religi masih kuat/kental; • Sudah menjadi objek kunjugan wisata dalam jumlah yang sangat terbatas;
Ekonomi	• Betumpu pada pertanian, peternakan, nelayan, pertukangan/buruh • Ekonomi lokal; • Mulai terbuka sektor pariwisata; • Fasilitas kegiatan komersial sudah mulai berkembang,	• Bertumpu pada sektor pertanian dan peternakan • Pekerja di Sektor Publik dan swasta; • Fasiltas pendukung kegiatan komersial masih sangat terbatas	• Bertumpu pada sektor industri genteng/gerabah, sangat menonjol; • Mulai berkembang workshop seni tetapi masih sangat terbatas; • Mulai ada fasilitas komersial modern

Sumber: Peneliti (2016)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kesesuaian Tiga Desa/Kasus dengan Parameter Permukiman Desa-kota

Dari dokumentasi dan kajian atas tiga kasus/desa, dapat diidentifikasikan bahwa ketiganya memenuhi beberapa parameter permukiman desa kota. Secara ringkas, kesesuaian ketiga desa tersebut dengan indikator permukiman desa-kota dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel3. Kesesuaian Tiga Desa/Kasus dengan Parameter Permukiman Desa-kota

No.	Parameter	Kondisi umum di tiga desa
1.	Terhubung dengan pusat kota besar	Jaringan ini memungkinkan konektifitas yang baik antara kawasan desa dan kota, baik untuk menunjang kegiatan ekonomi dan sosial – terjadi di tiga desa
2.	Tersedia tenaga kerja harian	Memungkinkan penduduk desa, termasuk wanita untk menmdapatkan pekerjaan dan penghasilan, tanpa harus meninggalkan desanya/perumahanya – masih dimungkinkan di tiga desa
3.	Mempunyai akses terhadap informasi dunia luar	Jaringan komunikasi yang memungkinkan warga desa berhubungan secara aktif dengan masyarakat luar, baik nasional maupun global – terdapat di tiga desa
4.	Sebagian besar rumah tangga terlibat di sektor pedesaan dan perkotaan	Warga desa mempunyai pendapatan ganda dari kegiatan pertanian dan non-pertanian – masih dimungkinkan di tiga desa
5.	Masih terdapat kelompok kerja pedesaan	Masih terdapat spirit dan prakek kerja kelompok secara gotong royong, modal sosialnya tinggi – masih terjadi di tiga desa
6.	Tersedia teknologi modern	Mulai tersedia teknologi modern untuk proses pertanian dan non-pertanianya – ada dalam beberapa hal di tiga desa
7.	Telah terjadi hubungan kerja yang berupah	Upah langsung/cash economy cukup dominant, meskipun masih cenderung sector informal – terjadi di tiga desa
8.	Terdapat kelembagaan campuran	Mskipun lembaga-lembaga formal sudah mulai terbentuk, tapi masih banyak pula lembaga informal yang eksis dan bermanfaat - ya khususnya lembaga adat
9.	Mempunyai kaitan dengan eonomi global	Semakin terkoneksi dengan ekonomi global – terjadi di tiga desa, khususnya Lebih dan Pejaten

Sumber: Diadopsi dari The Desakota Study Team (2008) dan hasil Kajian Lapangan

Meskipun penelitian di Bali masih terbatas pada tiga desa, observasi secara umum di Bali dan juga di Yogyakarta sesungguhnya juga mencatat bahwa dengan semakin berkembangnya sarana-prasarana wilayah di seluruh Yogyakarta dan Bali, khususnya jaringan jalan dan moda transportasinya, dapat dikatakan bahwa sebagian besar desa di Bali dan Yogyakarta sudah dapat dikategorikan sebagai desa-kota. Dengan tingkat urbanisasi sekitar 60% lebih, wilayah Yogyakarta dan Bali sudah dapat dikatakan sebagai 'urbanized region' atau wilayah yang meng-kota. Hal ini juga didukung dengan faktor sosial dan ekonomi, khususnya peluang ekonomi modern atau ekonomi sektor produksi dan jasa yang semakin berkembang dan terbuka dan dapat diakses oleh banyak warga desa, menjadikan sebagian besar warga desa di Yogyakarta dan Bali sudah mempunyai alternatif pekerjaan di sektor modern/perkotaan, selain masih juga mengandalkan sektor pertanian.

Kondisi dan Prospek Keberlanjutan Tiga Desa Kasus

Kondisi dan prospek keberlanjutan tiga desa dalam hal ini dikaji dari tujuh parameter atau aspek yakni: 1) ketahanan/kedaulatan pangan; 2) kemiskinan, kerentanan, dan ketimbangan; 3) jaminan kehidupan ekonomi/livelihood dan kesejahteraan; 4) kebahagiaan, kebanggan, dan ketentraman; 5) pelestarian tradisi/heritage termasuk eksistensi dan peran lembaga adat; 6) sumber daya manusia; dan 7) harapan/pandangan, optimisme menjalani masa depan. Dari hasil Focuss Grup Discussion/FGD dan wawancara mendalam dengan berbagai nara sumber di tiga desa, dapat disimpulkan kondisi dan prospek keberlanjutan tiga dea dari tujuh aspek/parameter di atas.

Tabel 4. Kondisi dan Prospek Keberlanjutan Tiga Desa

Aspek	Desa Lebih, Gianyar	Desa Jagapati, Badung	Desa Pejaten, Tabanan
1.Ketahanan/kedaulatan pangan	Belum sepenuhnya terpenuhi, dengan indikasi produksi bersa mencapai 60-70 persen kebutuhan, dan bahan pangan lain yang dari luar desa. Sistem produski dan konsumsi pangan sudah terikat dengan sistem luar, tidak sepenuhnya mandiri dan tertutup. Terdapat potensi perikanan yang cukup besar, tetapi cenderung tersedot/terserap dalam ekonomi cash yang kurang baik. Prospeknya belum cukup baik.	Belum sepenuhnya terpenuhi, dengan indikasi produksi bersa mencapai 70-80 persen kebutuhan, dan bahan pangan lain yang dari luar desa. Sistem produski dan konsumsi pangan sudah terikat dengan sistem luar, tidak sepenuhnya mandiri dan tertutup. Mempunyai potensi peternakan (babi) yang dapat dikembangkan lebih lanjut. Prospeknya belum cukup baik.	Cenderung rendah karena tidak mempunyai lahan sawah di lingkungan desa, tetapi di desa tetangga. Lahan sawah ini mencukupi sekitar 6 persen kebutuhan, dan bahan pangan lain yang dari luar desa. Sistem produski dan konsumsi pangan sudah terikat dengan sistem luar, tidak sepenuhnya mandiri dan tertutup. Desa mempunyai KUD yang berfungsi mmendukung dan menjamin kecukupan dan akses pangan warganya. Prospeknya belum cukup baik.
2.kemiskinan, kerentanan, dan ketimbangan	Masih cukup menjadi persoalan, tetapi telah berkurang cukup signifikan selama 10 tahun terakhir. masih terdapat sekitar 400 KK miskin, tetqapi berdasar analisa warga desa sebenarnya tinggal sekitar 70-80 KK miskin, Prospeknya cukup baik	Tinggal sedikit warga desa yang dikategorikan miskin. Mereka umumnya adalah petani penggarap/buruh tani. Prospeknya cukup baik.	Tinggal sedikit warga desa yang dikategorikan miskin, tetapi jumlah warga dari luar desa yang bekerja menjadi buruh genteng cukup banyak dan mereka dapat dikatakan rentan. Prospeknya cukup baik
3.Jaminan kehidupan ekonomi/livelihood dan kesejahteraan	Sudah semakin baik dan semakin terbuka. Sejauh mau berusaha terdapat berbagai peluang ekonomi/pendapatan yang dapat menjamin penghiduopan warga desa. Prospeknya baik.	Sudah semakin baik dan semakin terbuka. Sejauh mau berusaha terdapat berbagai peluang ekonomi dan pendapatan yang dapat menjamin penghiduopan warga desa. Prospeknya baik.	Cukup mengkhawatirkan, khususnya sektor gerabah yang mengalami ketidak-jelasan karena daya saing yang kurang. Prospeknya tidak terlalu baik/perlu waspada
4.kebahagiaan, kebanggan, dan ketentraman	Secara umum merasa behagia, bangga, dan tentram, khususnya karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dan berbagai kewajiban agama dan tradisi, serta	Secara umum merasa behagia, bangga, dan tentram, khususnya karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dan berbagai kewajiban agama dan tradisi, serta	Secara umum merasa behagia, bangga, dan tentram, khususnya karena dapat memenuhi kebutuhan hidup dan berbagai kewajiban agama dan tradisi, serta

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

	pergaukan sosial yang baik/rukun. Prospeknya baik	pergaukan sosial yang baik/rukun. Prospeknya baik	pergaukan sosial yang baik/rukun. Prospeknya baik
5.Pelestarian tradisi/heritage dan eksistensi dan peran lembaga adat	Secara umum baik dan masih menjadi tatanan yang diakui dan bermanfaat. Tetapi belum sepenuhnya teruji untuk merespon perkembangan/perubahan yang terjadi. Prospeknya cukup baik.	Secara umum baik dan masih menjadi tatanan yang diakui dan bermanfaat. Tetapi belum sepenuhnya teruji untuk merespon perkembangan/perubahan yang terjadi. Prospeknya cukup baik.	Secara umum baik dan masih menjadi tatanan yang diakui dan bermanfaat. Tetapi belum sepenuhnya teruji untuk merespon perkembangan/perubahan yang terjadi. Prospeknya cukup baik.
6.sumber daya manusia	Secara umum baik, kelompok muda sudah dapat mengakses pendidikan menengah, tetapi masih perlu terus ditingkatkan. Prospeknya cukup baik	Secara umum baik, kelompok muda sudah dapat mengakses pendidikan menengah, tetapi masih perlu terus ditingkatkan. Prospeknya cukup baik	Secara umum baik, kelompok muda sudah dapat mengakses pendidikan menengah, tetapi masih perlu terus ditingkatkan. Prospeknya cukup baik
7.harapan/pandangan, optimisme menjalani masa depan	Pada umumnya berpandangan optimis, terutama mengingat faktor peluang ekonomi yang semakin terbuka.	Pada umumnya berpandangan optimis, terutama mengingat faktor peluang ekonomi yang semakin terbuka.	Terdapat kesan mixed-feelinmg atau campuran antara yang optimis dan cukup, pesimis. Yang pesimis merujuk pada prospek industri genteng/gerabah yang rentan.

Sumber: FGD di tiga desa, wawancara, dan data lain, dioleh peneliti secara kualitatif (2016)

Sebagaimana dirangkum dalam Tabel4 di atas, dapat disimpulkan secara umum bahwa kondisi keberlanjutan tiga desa cukup baik, dengan prospek keberlanjutan yang juga cukup baik. Meskipun demikian, terdapat beberapa aspek/parameter yang tidak cukup baik dan dengan sendirinya mengurangi prospek keberlanjutanya. Kesimpulan ini sangat penting karena dapat menjadi dasar bagi upaya-upaya untuk meningkatkan prospek keberlanjutan tiga desa.

Aspek-Aspek yang Menjamin Keberlanjutan Tiga Desa Kasus

Dari sisi faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi dan prospek keberlanjutan, kajian kualitatif berdasart FGD, wawancara dengan berbagai nara sumber, serta data-data yang terkumpul, dapat dirangkum sebagaimana Tabel berikut ini. Tabel berikut meringkas berbagai faktor dalam tiga pilar konsep berkelanjutan yakni aspek fisik/lingkuinga, sosial, dan ekonomi.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 5. Aspek-Aspek yang Menjamin Keberlanjutan Tiga Desa Kasus

Aspek	Desa Lebih, Gianyar	Desa Jagapati, Badung	Desa Pejaten, Tabanan
Fisik/ Lingkungan	• Adanya desa adat yang masih lestari; • Kondisi tanah yang subur; • Jaminan pasokan air; • Masih cukup banyak lahan persawahan; • Ragam flora yang masih ada; • Lahan perumahan masih dominan, mulai berkembang lahan pariwisata (hotel dll.)	• Adanya tata perumahan desa adat yang lestari; • Kondisi tanah yang subur; • Jaminan pasokan air; • Lahan persawahan yang masih cukup banyak; • Lahan perumahan masih dominan	• Adanya tata perumahan desa adat yang lestari; • Lahan perumahan masih dominan.
Sosial	• Kuatnya desa adat/tradisi; • Modal sosial yang tinggi; • Kepemimpinan desa yang baik;	• Kuatnya desa adat/tradisi; • Modal sosial yang tinggi; • Kepemimpinan desa yang baik; • Minimya angka kemiskinan dan penaggguran	• Kuatnya desa adat/tradisi; • Modal sosial yang tinggi; • Kepemimpinan desa yang baik; • Minimya angka kemiskinan dan penaggguran
Ekonomi	• Terbukanya peluang ekonomi wisata; • Peningkatan lapangan kerja; • Sistem ekonomi berbagi yang sudah berjalan; • Peningkatan harga tanah/lahan	• Terbukanya peluang ekonomi di perkotaan; • Sistem ekonomi berbagai yang sudah berjalan.	• Terbukanya Peluang ekonomi dari pariwisata; • Sistem ekonomi berbagai yang sudah berjalan.

Sumber: FGD di tiga desa, wawancara, dan data lain, diolah peneliti secara kualitatif (2016)

Tabel di atas menjelaskankan bahwa terdapat cukup banyak faktor positif yang berperan dalam menjamin kondisi dan prospek keberlanjutan tiga desa kajian. Dari ketiga pilar pembangunan berkelanjutan yakni pilar fisik/lingkungan, sosial, dan ekonomi, ketiganya secara umum mempunyai faktor-faktor yang positif untuk menjaga kondisi dan prospek keberlanjutan di tiga desa. Ketiganya, secara dinamik saling terkait dan mempengaruhi dan akhirnya mewujud pada tujuh aspek/parameter keberlanjutan sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.

PEMBELAJARAN DARI BALI: KOTA-DESA MODEL PERMUKIMAN BERKELANJUTAN

Dari hasil penelitian sampai saat ini di bali, khususnya di tiga desa yang dikaji dapat bahwa ketiganya memenuhi parameter permukiman desa-kota yang terdapat dalam literatur. Ketiganya juga mempunyai karakteristik/kekhasan yang cukup baik dan dapat merupakan potensi untuk dikembangkan menjadi model permukiman desa-kota yang unik, berkarakter, bahkan bermartabat

Ketiga desa memenuhi beberapa aspek *best practices* atau contoh yang baik dalam mempertahankan satu keterkaitan dan dialektika yang dinamis antara sistem lingkungan alam dan sistem lingkungan buatan, dan sistem kehidupan pedesaan/tradisi dan sistem kehidupan perkotaan/modern. Meskipun terdapat tekanan dan ancaman urbanisasi dan kegiatan pariwisata, ketiga desa masih dapat mempertahankan/melestarikan berbagai elemen/aspek lingkungan, sistem ekonomi, sosial dan kebudayaan pedesaan yang cukup kental dan mempunyai kondisi dan prospek keberlanjutan yang baik.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Meskipun demikian, ditengarai pula semakin meningkatnya tekanan/persoalan di tiga desa kasus, khususnya dikarenakan perkembangan kegiatan pariwisata dan pembangunan perkotaan. Peningkatan tekanan ini harus segera ditangani oleh karena akan mengancam keberlanjutan tiga desa. Perkembangan kegiatan pariwisata sendiri mengandung dua dimensi. Pertama, dimensi positif dalam artian memberikan berbagai peluang ekonomi penduduk. Kedua dimensi negatif, karena dapat semakin mengancam keberlanjutan tiga desa yang dikaji.

Sangat penting ditemukan dalam kajian ini bahwa kunci yang menentukan keberlanjutan tiga desa terletak pada kekuatan modal sosial yang masih sangat tinggi. Modal sosial ini khususnya didasari oleh nilai-nilai tradisi dan religi yang sudah terlembaga dengan baik dan lestari, khususnya dalam lembaga desa adat didukung oleh sistem sangsi religi (Hindu) yang masih sangat kuat.

Melalui upaya-upaya yang sistematis dan komprehensif, khususnya berdasarkan modal sosial yang tinggi, model permukiman desa-kota di Bali (dan di Yogyakarta) dapat dikeembangkan tidak saja menjadi model permukiman yang inklusif, aman, tangguh, dan berkelanjutan, tetapi juga unik dan bermartabat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] McGee, Terry G. 1991. *The Emergence of* Desakota *Regions in Asia: Expanding a Hypothesis*. *The Extended Metropolis: Settlement Transition Is Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

[2] McGee, T.G. 2009.*The Spatiality of Urbanization: The Policy Challenges of Mega-Urban and Desakota Regions of Southeast Asia*, UNU-IAS Working Paper (161), United Nations University Institute of Advanced Studies.

[3] Guldin, Gregory Eliyu (1997). *Desakotas and Beyond: Urbanization in Southern China*. *Farewell to Peasant China: Rural Urbanization and Social Change in the Late Twentieth Century* . Armonk NY: M. E. Sharpe.

[4] The Desa kota Study Team. 2008. *Re-imagining the Rural-Urban Continuum. Understanding the role ecosystem services play in the livelihoods of the poor in desakota regions undergoing rapid change.* Research Gap Assessement. Nepal, Institute for Social and Environmental Transition.

[5] Moench, Marcus and Dipak Gyawali. 2008. *Desakota: Reinterpreting the Urban-Rural Continuum*.

[6] Proto Tamansari Team. 2014. *Workshop Report*. Manuskrit tidak dipublikasikan.

[7] Setiawan, B. Dkk. 2016. "Kajian *Best Practices* Dan Pengembangan Model Permukiman Desa –

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PERENCANAAN ORGANIS MENGATASI KEMAJEMUKAN DAN LIBERALISASI PASAR[1]

Endry Martius[1]

[1]Prodi S2 Pembangunan wilayah pedesaan program pascasarjana universitas andalas

Email: endry.martius59@gmail.com

Naskah diterima :23 Maret 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 23 Maret 2017

ABSTRAK

Setidaknya ada dua konteks penting untuk mempromosikan perencanaan organis di Indonesia. Pertama adalah konteks kemajemukan budaya, etnik, agama dan ras. Indonesia tumbuh dari kesadaran berkebangsaan yang ditempa melalui pengalaman bersama dalam mengatasi kemajemukan. Dengan demikian, kesadaran berkebangsaan itu bukanlah serta merta, melainkan sesuatu yang harus dibentuk, dirawat dan diperjuangkan terus menerus dalam kesatuan institusional yang disebut negara. Kedua adalah konteks liberalisasi pasar yang menggiring perekonomian Indonesia semakin terbuka dari pengaruh luar dengan cara cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dalam hal ini Indonesia membutuhkan kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan etis untuk dapat mengatasi doktrin liberal pasar yang niscaya memperluas konteks kemajemukan menjadi global. Berangkat dari pemikiran bahwa perencanaan mekanis hanya merupakan panduan aksi yang jelas-jelas tidak didasarkan pada kesadaran organis, tulisan ini mempromosikan perencanaan organis sebagai jawabannya. Alasannya, selain merupakan kesadaran organis untuk mengatasi kemajemukan sekaligus liberalisasi pasar, perencanaan organis juga merupakan sistem sekaligus kerangka bagi keseluruhan perencanaan mekanis yang disiapkan untuk mengatasi kemajemukan sekaligus liberalisasi pasar.

Kata Kunci : *kemajemukan, liberalisasi pasar, perencanaan organis*

PENDAHULUAN

Indonesia bukan sekedar suatu kesatuan adminitratif, tapi sebagai negara nusantara dengan kemajemukan budaya, etnik, agama dan ras [1] yang dihuni oleh komunitas karakter kesadaran berkebangsaan yang tumbuh dari pengalaman bersama mengatasi kemajemukan. Kesadaran berkebangsaan mendahului kesadaran bernegara karena berkembang dari benih persatuan dan kesatuan sebagai akibat ketertindasan sepanjang masa kolonialisme. Oleh sebab itu, kesadaran berkebangsaan Indonesia bukanlah kesadaran moral dan etis[3] yang serta merta, melainkan sebagai suatu yang hams dibentuk, dirawat dan diperjuangkan terus-menerus melalui pengalaman bersama dalam kesatuan institusional yang disebut negara nasional

Penanganan kemajemukan bukanlah pekerjaan yang mudah dalam era liberalisasi pasar seperti sekarang ini. Perekonomian Indonesia semakin terbuka dari pengaruh luar dengan cara-cara yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Dalam hal ini Indonesia membutuhkan kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan etis untuk dapat mengatasi doktrin liberal pasar yang impersonal dan secara alami mengubah *'leverage'* kemajemukan dari konteks nusantara menjadi global. Berangkat dari pandangan bahwa

[1]Makalah yang disampaikan pada Seminar Nasional bertema "Perencanaan Inklusif Desa-Kota", yang diselenggarakan di Padang 24 November 2016, sebagai kerjasama Asosiasi Sekolah Perencanaan Indonesia (ASPI), Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia (PERHEPI) dan Universitas Andalas.

[2] Dosen pada Prodi S2 Pembangunan Wilayah dan Pedesaan (PWD) Program Pascasarjana (PPs) Universitas Andalas.

[3] Kesadaran moral dan etis adalah apa yang dapat mengikat suatu bangsa pluralistik modern agar menjadi suatu bentuk kerjasama sosial yang bisa mempertahankan kesatuan, stabilitas, dan keberlanjutan [2]. Kesadaran moral lahir dari pengalaman bersama atau tradisi, sementara kesadaran etis merupakan hasil proses rasional

perencanaan mekanis hanya merupakan panduan yang jelas-jelas tidak didasarkan pada kesadaran organis, tulisan ini mempromosikan perencanaan organis sebagai jawaban. Alasannya, selain merupakan kesadaran organis untuk mengatasi kemajemukan sekaligus liberalisasi pasar, perencanaan organis juga merupakan sistem sekaligus kerangka bagi keseluruhan perencanaan mekanis yang disiapkan untuk mengatasi kemajemukan sekaligus liberalisasi pasar. Berdasar Hegel, pengertian organis menunjukkan totalitas permasalahan yang berjalin sebagai suatu keseluruhan, dimana keseluruhan lebih utama daripada bagian bagiannya. Keseluruhan tidak semata jumlah bagian-bagian dan sekedar ikatan dari bagian bagiannya, tetapi suatu keseluruhan yang mempunyai arti sendiri, semangat sendiri, mengatasi perseorangan dan golongan-golongan [3]

Konteks Kemajemukan

Masalah utama praktik perencanaan yang berkembang bagi pembangunan di Indonesia bersumber dari kegagalan membentuk dan merawat kesadaran organis untuk mengatasi kemajemukan dengan fundamen moral dan etis. Memang perencanaan sudah masuk ke ruang publik[4], tetapi praktiknya masih terbatas bagi keperluan mengakomodasi kemajemukan yang berdimensi fisik dan teknis keruangan saja. Perkembangan ini tidak terlepas dari tuntutan mekanis di depan mata yang berhubungan dengan soal geografis (kawasan dan manusia) Indonesia sebagai negara kepulauan *(archipelago)* yang berada pada kawasan muson tropis yang iklimnya berubah-ubah. Ke depan, kepekaan terhadap kemajemukan yang berdimensi budaya, etnik, agama dan ras yang hanya bisa diraba oleh kesadaran organis perlu pula mendapat tempat sepatutnya dalam perencanaan.[5] Harus dicatat, sejumlah besar masalah pembangunan di Indonesia hari ini berhulu dan bermuara di wilayah non-teknis yang berdimensi budaya, etnik, ras, dan terutama agama, yang penyelesaiannya memerlukan kesadaran organis yang berpijak pada fundemen moral dan etis yang sulit dikontrol oleh negara.

Dalam kenyataan, agama tidak serta merta menyatu dengan negara, dan penyatuannya justru sering menimbulkan masalah absolutisme dan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Situasinya akan bertambah runyam apabila negara dipakai sebagai instrumen sektarian dan represi bagi pelaksanaan ajaran suatu agama [4] [6] Proyek sekularisasi untuk memisahkan agama dari negara—agama di ruang privat dan negara di ruang publik—.tidak pernah menjadi benar-benar nyata. Dalam praktik politik, yang diperkuat dengan konstitusi, partai-partai keagamaan tetap diberi peluang untuk berperan dalam pemerintahan. Pemisahan negara dan agama secara ketat tak pernah terjadi, kecuali negosiasi antara golongan nasionalis sekuler dan golongan nasionalis keagamaan, atau sekedar dinamisasi antara sekularisasi dan religiosasi. Kebebasan bergama dinegosiasikan agar keagamaan dibclehkan bukan saja untuk beribadah secara privat, tetapi sekalian untuk mengorganisasikan pengelompokan dalam *civil society* maupun *political society* [5] Dalam perkembangannya, sekularisasi dan religiosasi malah bernegosiasi sehingga memberi kesan bahwa agama dibolehkan masuk ke ruang publik dan tidak disudutkan untuk semata mengurusi ruang privat. Doktrin liberal yang menyatakan bahwa keyakinan keagamaan akan memudar dan kehilangan relevansinya di ruang publik mendapat banyak sanggahan. Alih-alih terjadinya privatisasi agama, politik islam malah mengedepan dengan mengusung agama keluar dari ruang privat menuju ke ruang publik, dan ini mengindikasikan bahwa yang sesungguhnya terjadi adalah deprivatisasi. Lebih dari itu, menahan agama di ruang privat bukan saja kontraproduktif tapi akan membangkitkan kekuatan fundamentalisme yang tak tertandingi oleh wacana keagamaan yang berkeadaban yang sudah ditahan dalam ruang privat dan sulit pula untuk dikontrol oleh negara.'

Konsekuensinya, setelah proyek sekularisasi (dan privatisasi) tak mendapat tempat, proyek religiosasilah yang digiring untuk berkontestasi di ruang publik. Masalahnya, setiap tradisi keagamaan bermuka dua *Onus face),* mengandung sekaligus benih-benih rekonsiliasi dan represi sehingga senantiasa memelihara ketegangan dan potensi buruk keterlibatan agama di ruang publik. Untuk mengatasi hal tersebut, hubungan antara agama dan negara perlu menemukan konteksnya di luar kerangka relasi hitam-putih separasi (atau penyatuan) supaya `toleransi kembar' antara agama dan negara melalui konsep yang disebut diferensiasi.[8]

---

[4] Dalam Habermas (1989) [6] , istilah ruang publik *(public sphere)* merujuk pada domain kehidupan sosial tempat opini publik terbentuk serta kegiatan-kegiatan intelektual dan politik diaktualisasikan, atau dalam bahasa lain, tempat yang memungkinkan kegiatan sosial memperoleh "publisitas" atau memasuki penciptaan kehidupan publik.

[5] Negara multi etnis biasanya peduli untuk mengatasi kemajemukan. Komunitas besar cenderung merupakan kesatuan dari multi atau seperangkat identitas. Negara Amerika sudah begitu lama memperjuangkan kesetaraan dan keadilan di tengah kemajemukan, dan secara kontemporer masih tersisa misalnya dalam bentuk perjuangan hak asasi manusia dan feminisme [4]

[6] Pada situasi agama terintegrasi dengan negara, represi negara cenderung menyebabkan ketidakpercayaan publik pada agama yang dampaknya bertahan lama. Dalam penilaian Mohammad Hatta (1945), "Negara teokrasi tidak memperdalam perasaan agama atau memperkuat semangat agama, melainkan mempergunakan agama untuk keperluan negara" [5]

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Diferensiasi adalah sintesis bagi penyatuan agama-negara, yaitu melalui pembedaan ranah social *(social sphere)* ke dalam ragam fungsi yang di dalamnya agama tidak lagi memonopoli makna realitas. Dengan menolak sekularisasi atau pemisahan peran agama dari negara, diferensiasi memungkinkan bidang sekuler menemukan tempatnya yang pas. Ketika keduanya saling mengerti batas otoritas masing-masing, terwujudlah `toleransi kembar', relasi agama dan negara yang kuat dan ajeg. Agama dibutuhkan, yaitu untuk mendapatkan legitimasi kekuasaan, sementara negara dibutuhkan untuk melindungi dan menegakkan ajaran-ajaran agama. Lebih jauh, dengan diferensiasi, agama bisa mengembangkan otonomi relatif dalam menyediakan landasan moral dan etis untuk menopang ataupun menentang kekuasaan. Kerangka diferensiasi inilah yang menurut Stepan dianggap memberi peluang bagi pengembangan `toleransi kembar' antara negara dan agama. Negara dan agama bisa mengembangkan peran publiknya masing-masing tanpa saling memaksa, karena masingmasing menemukan konteks keterlibatannya secara tepat [5]

Demi memenuhi asas `toleransi kembar', komunitas agama yang terlibat dalam *political society* harus tunduk pada prinsip-prinsip *public reason* dan *public deliberation.* Ajaran agama yang diejawantahkan sebagai subyektivitas boleh saja menjadi inspirasi, namun formulasinya harus mengalami substansiasi, tidak secara literer merujuk pada kitab dan doktrin keagamaan, atau obyektivasi, guna memenuhi legitimasi demokratis yang bersifat rasional dan imparsial. Suatu keputuan publik-politik dianggap obyektif, rasional dan imparsial jika didasarkan pada fakta (bukan doktrin semata), diorientasikan bagi kepentingan banyak orang dan jangka panjang, serta melibatkan partisipasi semua kalangan secara inklusif [5] [7]

Konteks Liberalisasi Pasar

Liberalisasi pasar yang berkonotasi keterbukaan ekonomi secara regional ataupun internasional bukanlah hal bare bagi Indonesia. Sejak dulu Indonesia disebut sebagai Nusantara yang bukan saja menyimpan memori tentang negara kepulauan yang kaya, tetapi juga memori keterbukaan dan kemegahan dalam pergaulan internasional di darat dan di laut[5] . Sejak masa purbakala bangsa Indonesia sudah terbiasa mengarungi laut dan sekaligus menjadi koridor menuju globalisasi [8] Ceritanya sudah dimulai dari penemuan jalur ke nusantara *(East Indies)* lewat Tanjung Harapan (pada 1488) oleh ekspedisi Portugis yang dipimpin Bartolomeu Dias dan dari penemuan Benua Amerika (pada 1492) oleh Columbus yang disponsori Spanyol yang memberi petunjuk bahwa yang sesungguhnya diniatkan mereka adalah menemukan Nusantara. Sejak itu penetrasi global yang tertuju pada Indonesia semakin ramai dan nusantara menjadi tempat persilangan jalan *(carrefour)* [5] . Sebagaimana juga dilukiskan oleh sejumlah penulis dalam [9], sejak itu Indonesia sudah berada dalam pusaran ekonomi dunia dan liberalisasi pasar tanpa pernah sempat lagi berkembang tanpa pengaruh dan gangguan dari luar.

Sekarang, liberalisasi pasar adalah suatu bentuk penerimaan terhadap keterbukaan ekonomi secara global untuk terjadinya efisiensi alokasi sumberdaya internasional. Namun yang jelas-jelas sedang berlangsung adalah memperluas penisbian kesejahteraan rakyat yang dalam pengertian ekonomi upah bergantung pada kekuatan orang-perorang dalam mengambil imbalan bukan lagi lewat pasar-pasar lokal tertutup, melainkan lewat pasar global terbuka. Dengan demikian, kemiskinan dan disparitas sosial merupakan konsekuensi logis dari pasar yang niscaya bertindak impersonal dan.meniscayakan kapitalisme sebagai induk semangnya. Para pemilik modal akan semakin kaya dan yang miskin terbelenggu dalam jeratan kemiskinannya. Sekarang, dalam perkembangannya, liberalisasi pasar telah nyata-nyata merongrong upaya peningkatan kesejahteraan rakyat melalui dominasi global nilai-nilai liberalisme: moral utilititarianisme, sistem moneter, dan ekonomi pasar kapitalisme. Nilai-nilai liberal sudah diadopsi menjadi "cara kerja", kalau bukan "cara hidup", sehingga menjauh dari upaya mencapai keadilan sosial, yang dalam kategori keadilan distributif berhubungan dengan pebagian nikmat dan beban dari suatu kerjasama sosial [2]. Menurut Stiglitz [10] , problem yang menyangkut keadilan sosial ini sebagiannya bisa ditelusuri sebagai akibat ketimpangan dalam sistem produksi dan sistem distribusi dan sebagai akibat daulat pasar yang menimbulkan inkompetensi pihak pengambil keputusan dan sekaligus merangsang ketidak jujuran dari pihak institusi finansial.

Peristiwa 4 November 2016 di Jakarta yang berkonotasi sebagai aksi melawan penistaan agama, yang dalam hal tertentu, bisa dianggap sebagai salah satu bentuk problem penyatuan atau pemisahan agama dan negara serta fenomena turun-naiknya momentum fundamentalisme di Indonesia.

"Toleransi kembar" adalah situasi ketika institusi agama dan negara menyadari batas otoritasnya untuk kemudian mengembangkan toleransi terhadap fungsinya masing-masing. Insitusi-institusi negara (demokratis) harus bebas, dalam batas-batas konstitusi dan hak-hak asasi, untuk membuat pelbagai kebijakan. Dalam kaitan ini, institusi-institusi agama tidak boleh memiliki prerogatif istimewa secara konstitusional yang membolehkan mereka untuk memaksakan kebijakan publik atas pemerintahan yang dipilih secara demokratis" [5]

Dalam situasi ini, urusan keadilan sosial terpaksa dipulangkan sepenuhnya menjadi urusan dan sekaligus kewajiban publik dengan menggunakan konsep pengimbangan beban dan manfaat dari kerjasama sosial antarwarga dalam suatu institusi yang disebut negara. Hanya saja, kewajiban publik akan semakin berat dan kompleks. Relasi ekonomi antarmanusia secara individual ataupun kelompok akan semakin terbuka dan menjadi bagian dart struktur ekonomi global, sehingga tidak mudah lagi dikendalikan melalui penciptaan *economic closure* kewilayahan dalam satuan lokal, regional ataupun nasional. Sebaliknya, kapitalisme justru semakin membelenggu relasi-relasi perekonomian yang memungkinkan eksklusivitas ekonomi segelintir golongan superkaya yang tak bekerja *(the non-working rich)* membelenggu perekonomian populasi besar golongan amat miskin yang bekerja *(the working poor)* [11].[9] Kemiskinan bukan lagi berkonotasi pada pengangguran akibat orang-orang yang tidak mempunyai akses pada pasar kerja. Populasi miskin umumnya justru merupakan para pekerja ulet yang oleh pasar kerja diimbali dengan upah yang rendah *(underpricing).* Sementara itu, kekayaan bukan lagi konsekuensi dari produktivitas dan kinerja, dan juga kompetensi, melainkan sebagai 'flak takdir' dan `takdir hak' untuk memonopoli warisan kekayaan yang secara terus-menerus ditumpuk oleh kapitalisme. Kenapa dikotomi *'the working poor vs. the non-working rich'* menjadi isu faktual, tak lain karena liberalisme dan khususnya kapitalisme dinilai telah menopang terbentuknya tabungan kekayaan untuk hanya segelintir orang [11].

Agenda Perencanaan Organis

Karena keniscayaan kemajemukan dan liberalisasi pasar adalah muatan inheren yang hams terus-menerus diatasi dalam pembangunan di Indonesia, maka kapasitas perencanaan mekanis menjadi sangat terbatas dan malah sering menimbulkan masalah ikutan yang panjang dan sulit dikontrol. Oleh sebab itu, untuk menopang pembanguan di Indonesia, yang dibutuhkan adalah perencanan organis, yaitu perencanaan yang secara prinsip bertujuan untuk mengontrol sistem kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan etis dalam satuan institusi yang disebut negara, dalam dan dengan menjalankan demokrasi politik dan demokrasi ekonomi. Dalam teori nagara organis[l°], demokrasi politik yang menyatu dengan demokrasi ekonomi yang disebut demokrasi deliberatif merupakan refleksi dari hasrat untuk berkeadilan sosial, prinsip kesamaan dan prinsip kemerdekaan secara sekaligus. Dengan kata lain, keadilan sosial adalah sasaran dari perencanaan organis, dimana demokrasi deliberatif diharapkan bisa memenuhi kebutuhan untuk mengatasi kemajemukan dan sekaligus untuk mengatasi atau menjindkkan liberalisasi pasar.

Demokrasi Deliberatif

Bagaimana demokrasi deliberatif bekerja? Perencanaan organik seyogyanya diproses secara tersubordinasi dalam kategori demokrasi politik dan ekonomi yang disebut demokrasi deliberatif. Sehubungan dengan ini, agaknya para perencana belum terlihat mengisi perencanaannya secara substansial berdasar musyawarah, suatu syarat imperatif demokrasi deliberatif. Demokrasi deliberatif diharapkan dapat mengatasi kekurangan demokrasi representatif dan demokrasi langsung serta dapat menggabungkan unsur-unsur positif dari gagasan-gagasan demokrasi populis dan liberal [5] Kebebasan individu dan kesetaraan politik tetap dianggap penting, tetapi didayagunakan untuk mendorong kemampuan manusia dalam membentuk tatanan kolektif yang berkeadilan melalui deliberasi rasional[5]. Melalui demokrasi deliberatif orang-orang diakomodasi dan dipersuasi untuk membentuk tatanan kolektif politik.

---

[9] Pembelengguan relasi perekonomian yang menguntungkan *the non-working rich* dan menekan *the working poor* adalah akibat perubahan konsep dan praktek yang bersangkut dengan hal-hal seperti berikut. Pertama, perubahan dalam kaitannya dengan properti. Properti penting bukan lagi berupa material yang *intangible,* melainkan berupa *intellectual property rights* semisal *patents, trade-marks* dan *copy rights.* Kedua, perubahan praktik monopoli. Para pelaku pasar yang superkuat, sekalipun diikat oleh aturan-aturan *antitrust* dan *antimonopoly,* berhasil mengendalikan kekuatan substansial pasar melalui kekuatan politik untuk memprotek insentif sekaligus memonopoli manfaat dengan *trade-off yang* merugikan pelaku pasar lemah. Contoh yang bisa dilihat adalah adanya upaya untuk mencegah independensi ilmuwan dalam berinovasi, sehingga menajemen inovasi sepenuhnya masuk wilayah atau dikuasai privat golongan superkaya. Ketiga, perubahan bentuk dan cara kontrak dari yang kasat mata *(tangible)* di ruang publik ke yang maya *(intagible)* di ruang privat. Kontrak dengan bentuk dan cara barn ini menyebabkan kontrol publik terhadap transaksi tidak bisa dilakukan, termasuk dalam hal apabila ada muatan kejahatan di dalamnya. Perkembangan ini jelas mengkondisikan golongan superkaya untuk melakukan manipulasi di ruang publik tanpa perlu merasa khawatir terhalangi [11]

[l°] Pandangan organik biasa diidentikkan dengan teori dan konsep negara organis "totaliter" atau integralistiknya Supomo yang ditariknya dari ajaran filsuf Hegel, Spinoza dan Adam Muller. Menurut sistematika konsep negara demokrasi, asas integralistik di sini tidak saling tolak dan meniadakan dengan asas kedaulatan rakyat [3]

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Berdasarkan pandangan Latif [5] tentang demokrasi, demokrasi deliberatif bisa menelurkan model perencanaan organik yang mengutamakan konsensus *(consensus planning)* dan menghindar dari perencanaan yang mengutamakan suara mayoritas *(majoritarian planning).* Model demikian tetap memahami bahwa preferensi atau suara mayoritas lebih baik daripada preferensi minoritas, namun preferensi mayoritas hanya bisa diterima sebagai suatu prasyarat minimum, karena ukuran maksimum mayoritasnya adalah institusi dan aturan main perencanaan yang mesti diarahkan pada partisipasi yang luas dalam proses perencanaan dan pada persetujuan yang luas pula dalam keputusan dan kebijakan pembangunan. Jadi yang sesungguhnya diharapkan adalah model perencanaan yang mengutamakan konsensus yang bersifat inklusif, tawar-menawar dan dapat berkompromibukan yang bersifat eksklusif, kompetitif, dan berseteru *(adversarial)* [12.Perencanaan berdasar konsensus ini sudah dirintis melalui model *'negotiation planning'* yang dalam bentuk kasarnya disebut *'collaborative planning'* dan secara terbatas sebagai *'planning by consent*

Hanya saja, satu hal pokok yang luput dari model perencanaan konsensus sebagai pertimbangannya adalah tentang untuk apa kesadaran moral dan etis dan kenapa konsensus diperjuangkan. Akibatnya, sasaran perencanaan dari yang sedang berlangsung menjadi lebih fokus untuk mengatasi dimensi fisik dan teknis dari kemajemukan ataupun liberalisasi pasar saja. Yang terlupakan adalah bahwa kesadaran moral dan etis untuk mengatasi kemajemukan yang telah berkelindan dengan fenomena liberalisasi pasar sebenarnya berkaitan erat dengan kesadaran diskursif, baik yang lahir dari dialektika dalam tradisi masyarakat sebagai diskursus moral ataupun yang lahir dari dialektika ilmiah sebagai diskursus etis. Dalam hal inilah perencanaan organis menjadi penting karena menjadikan kesadaran diskursif sebagai realitas yang menjadi pokok bahasan.

Menuju Perencanaan Organis

Apa yang bisa disintesiskan dari demokrasi deliberatif, dan apa kaitannya dengan perencanaan organis yang sedang dibicarakan. Dan lalu, bagaimana perencanaan organis bekerja? Realitas dan masalah kemajemukan ataupun liberalisasi pasar boleh diakui sebagai suatu keniscayaan mekanis, tetapi hanya bisa diatasi dengan menggunakan pemikiran dan kesadaran organis. Perencanaan organis mengontrolnya langsung pada inti terdalamnya, yaitu pada kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan etis untuk mengatasi keniscayaan mekanis dari realitas kemajemukan dan liberalisasi pasar dimaksud.

Dalam bentuk apa kemajemukan dan liberalisasi pasar terjawab sebagai keniscayaan mekanis, adalah melalui kronikel yang memperlihatkan kekosongan keasadaran organis dalam mengatasi masalah-masalah keadilan sosial.'[2] Kekosongan inilah bisa diisi oleh perencanaan organis.

Kekosongan kesadaran organis pertama-tama bisa dilihat dari konstruksi perencanaan mekanis yang umum berlangsung yang jelas-jelas hanya mempertimbangkan aspek mekanis tertentu dan dengan begitu mengabaikan komprehensifitas dan keterpaduan dari realitasrealitas. Sebaliknya, konstruksi perencanaan organis merupakan pengetahuan preskriptif yang bisa mendefinisikan komprehenfitas, keterpaduan sekaligus kestabilan dan keajegan realitasrealitas—baik realitas aktual (aktualita) sebagai titik berangkat perencanaan, realitas ideal (idealita) sebagai tujuan atau titik tarik perencanaan, ataupun realitas teknologi (transformer) yang menjadi pembawa perubahan dari aktualita ke idealita. Namun dari sinilah tantangan dimulai, karena para perencana mesti mengubah kebiasaannya dalam menyusun perencanaan, dari yang berpijak pada kesadaran mekanis yang hanya bisa bekerja untuk objek

Konsep *collaborative planning* berangkat dari asumsi dinamika sosial dan lingkungan yang tidak bisa diselesaikan oleh tradisi perencanaan yang dihasilkan secara individual [13]. Sementara itu, konsep *planning by consent* yang berkembang di Inggris muncul dengan tujuan esensial untuk mendapatkan penjelasan terhadap sifat idiosinkretik pengendalian pembangunan Inggris dan bagian dari debat intelektual tentang substansi apa yang mesti dikontrol guna perencanaan menghadapi abad 21 [14]

[12] Kronikel tentang fondasi moral dan etis untuk menangani keadilan sosial adalah sebagai berikut. Pertama, pemikiran ekonomi Pra-Merkantilis yang memusatkan perhatiannya tentang keadilan sosial pada gejala penumpukan kekayaan oleh para pedagang dan dengan begitu penyelesaian masalah keadilan didasarkan pada kecurigaan terhadap aktivitas komersial. Aktivitas komersial komersial dianggap mengandung ketidakacuhan moral *(moral indifference)* sehingga menjadi agresif, dan cara mengatasinya hanya melalui sanksi doktrinal. Selanjutnya, pemikiran ekonomi Merkantilis, dengan melanjutkan kesadaran bahwa aktivitas komersial berpotensi agresif, menekankan pentingnya regulasi negara. Dalam pandangan fisiokrat, aktivitas komersial boleh-boleh saja, asal dilakukan diskriminasi yang mengangkat kedudukan sektor riil semisal pertanian, yaitu

sektor yang dinilai sebagai *'the real surplus producing sector'.* Ada juga ide liberalisme klasik yang dikategorikan sebagai pemikiran Pasca-Merkanitlisme yang amat mendorong suatu oposisi terhadap seluruh intervensi negara dalam kehidupan pribadi dan sosial, kecuali dalam bentuk yang minimal dan terbatas. Pemikiran liberalisme klasik ini tak tertahankan akhirnya menjadi pijakan ekspansi kapitalisme yang justru melahirkan kolonialisme. Liberalisme klasik ini di tempat tertentu berkembang menjadi libertarian capitalisme, atau apa yang disebut neoliberalisme, yang intinya ingin mengedepankan kehidupan sosial dan ekonomi yang tidak dikekang oleh pranata yang represif. Di Indonesia, belakangan mucul sejumlah proposisi untuk merespon masalah keadilan sosial, yaitu melalui penguatan peran negara dalam konteks negara kesejahteraan, konteks ekonomi Islam dan ekonomi Pancasila [5]

Perencanaan yang bebas nilai di lingkup yang sempit kepada yang berpijak pada kesadaran organis untuk memastikan agar keseluruhan perencanaan mekanis dapat bekerja sebagaimana mestinya. Kompleks kemajemukan dan liberalisasi pasar mewajibkan kepedulian perencanaan langsung pada inti terdalamnya yaitu kesadaran organis yang berpijak pada fundamen moral dan etis untuk dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kekosongan berikutnya bisa dilihat dari kesulitan gagasan perencanaan dalam mengorganisir isu-isu dan muatan-muatan masalah pembangunan, terutama yang terkait dengan pewujudan keadilan sosial. Isu-isu dan muatan-muatan tersebut seolah-olah sudah menjadi masalah normatif yang tak boleh disentuh oleh perencanaan dan dibiarkan sekedar sebagai agenda-agenda besar pembangunan. Isu-isu tersebut kemudian oleh para ilmuwan sosial diberi penekanan sesuai keperluan dan perspektif keilmuan mereka masing-masing. Pandangan sosial demokrat, misalnya, mengusung kepedulian (i) menjunjung persamaan, (ii) perlindungan atas mereka yang lemah, (iii) kebebasan sebagai otonomi, (iv) tak ada hak tanpa tanggungjawab, (v) tak ada otoritas tanpa demokrasi, (vi) pluralisme kosmopolitan, (vii) konservatisme filosofis Giddens (1998). Dalam khasanah ekonomi kesejahteraan dinyatakan keperluan untuk: (i) mempromosikan efisiensi ekonomi, (ii) mengurangi kemiskinan, (iii) memperkuat kesetaraan sosial, (iv) mengembangkan integrasi sosial atau menghindari eksklusi sosial, (v) menjamin stabilitas sosial, (vi) mempromosikan kemandirian individu. Mahandas K. Gandhi malah sudah sejak lama menimbang isu-isu kegagalan mencapai keadilan sosial sebagai Tujuh Dosa Sosial yang dinyatakannya secara normatif sebagai (i) politik tanpa prinsip; (ii) kekayaan tanpa kerja keras; (iii) perniagaan tanpa moralitas; (iv) kesenangan tanpa nurani; (v) pendidikan tanpa karakter; (vi) sains tanpa humanitas; (vii) peribatan tanpa pengorbanan [5]

Walau demikian, dalam kebuntuannya, agaknya masih bisa disepakai menjadi prinsip kesadaran organis yang bisa diinkorporasikan ke dalam perencanaan organis. Pertama adalah keniscayaan kemajemukan dan liberalisasi pasar yang menjadi permasalahan. Kedua adalah bahwa kemajemukan dan liberalisasi pasar merupakan gejala kesatuan yang organis yang implikasi dan masalah-masalahnya bukan sekedar bersifat mekanis tetapi juga organis, sehingga hanya bisa didekati dan diatasi oleh kesadaran organis yang dioperasikan melalui perencanaan organis.

Sehubungan dengan ini, kepedulian perlu diarahkan untuk mengakomodasi pengalaman bersama untuk menibentuk dan merawat kesadaran organis dalam mengatasi

DAFTAR PUSTAKA

[1] Furnival, J.S. 2009. *Hindia Belanda, Studi tentang Ekonomi Majemuk* (terjemahan dari Netherlands India A Study of Plural Economy, 1939). Jakarta: Freedom Institute.

[2] Rasuanto, B. 2005. *Keadilan Sosial: Pandangan Deontologis Rawls dan Habermas, Dua Filsafat Politik Modern.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

[3] Simanjuntak, M. 1994. *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya dalam Persiapan UUD 1945.* Jakarta: Penerbit PT Pustaka Utama Grafiti.

[4] Reeves, D. 2005. *Planning for Diversity: Policy and Planning in A World of Difference.* London dan New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

[5] Latif, Y. 2005. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila.* Jakarta: Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama.

[6] Habermas, J. 1989. *The Structural Transformation of the Public Sphere*. Cambridge: Polity Press.

[7] Kuntowijoyo, 1991. *Paradigma Islam: Interpretasi untuk Aksi.* Bandung: Penerbit Mizan.

[8] Lombard, D. 1996. *Nusa Jawa: Silang Budaya,* Vol. 1 & 2. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

[9] Loindblad, J.T. 2002. *Fondasi Historis Ekonomi Indonesia.* Yogyakarta: Pusat Studi Sosial Asia Tenggara UGM dan Pustaka Pelajar.

[10] Stiglitz, J.E. 2008. "The Fruits of Hypocrisy". *The Guardian,* 16 September 2008.

[11] Reich, R. 2016. *Saving Capitalism: For the Many, Not the Few.* London: Icon Books Ltd.

[12] Woltjer, J. 2000. *Consensus Planning: The Relevance of Communicative Planning Theory in Dutch Infrastructure Development.* Aldershot, Burlington, Singapore, Sydney: Ashgate

[13] Healey, P. 1997. *Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies.* New York:

[14] Booth, P. 2003. *Planning by Consent: The Origins and Nature of British Development Control.* London dan New York: Routledge, Taylor & Francis Group.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN WILAYAH BERBASIS *QUADRUPLE HELIX:* ANALISIS JARINGAN ANTAR AKTOR DALAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF CIMAHI

Tubagus Furqon Sofhani[1)], Vaulli Nurrahma[1)]

[1]Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung

Email: tbfurqon@pl.itb.ac.id[1)]vaulli.nurrahma@gmail.com[2)]

Naskah diterima :17 November 2016 Naskah direvisi : 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 8Maret 2017

ABSTRAK

Perkembangan teori pengembangan wilayah saat ini semakin menguatkan arti penting pengetahuan dan inovasi dalam meningkatkan daya saing wilayah atau yang biasa dikenal dengan istilah knowledge – based regional development. Intensifikasi informasi dan kreativitas dengan mengandalkan ide dari sumber daya manusia merupakan faktor produksi utama dalam kegiatan ekonomi yang dikenal dengan ekonomi kreatif. Jejaring menjadi sebuah kunci yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran ide kreatif antar aktor sehingga akan memicu terciptanya inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan industri kreatif Quadruple helix menjadi salah satu unsur penting dalam pengembangan industri kreatif dan model interaksi ini telah banyak digunakan untuk menjelaskan relasi jaringan antar aktor di beberapa pusat – pusat inovasi dunia seperti Sillicon Valley - California, Bangalore - India, Zhongguancun - China, ataupun Daedeok Innopolis – Korea Selatan. Penelitian tentang quadruple helix dengan industri kreatif berbasis teknologi sederhana dan dukungan yang sangat terbatas dari pusat produksi inovasi belum banyak dilakukan. Penelitian ini berusaha menguji karakteristik pola interaksi quadruple helix apabila diterapkan pada negara dengan keterbatasan teknologi tinggi dan kekurangan dukungan dari perguruang tinggi sebagai pusat produksi inovasi. Oleh karena itu, tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi perbedaan interaksi quadruple helix dan dampaknya terhadap pengembangan industri kreatif dengan melihat peran, kontribusi, serta sifat relasi dari masing – masing aktor. Kota Cimahi diambil sebagai salah satu studi kasus dalam penelitian ini. Penelitian ini akan menjelaskan keterbatasan konsep quadruple helix dalam menggambarkan berbagai pola interaksi yang mungkin tercipta melalui content analysis dan social network analysis. Konsep quadruple helix mengungkapkan mengenai pentingnya sinergi dari aktor pemerintah – akademisi – pelaku usaha – masyarakat. Namun kondisi interaksi antar aktor yang terjadi di Kota Cimahi belum mampu melahirkan sinergi karena interaksi yang tercipta lebih merefleksikan hubungan ketergantungan dibandingkan hubungan saling melengkapi. Hal ini dikarenakanya absennya peran beberapa aktor dalam pola interaksi quadruple helix. Aktor akademisi dalam kawasan industri kreatif belum mampu memproduksi ilmu pengetahuan sehingga peran aktor intelektual lebih banyak pada proses transfer informasi dan pengetahuan. Akibatnya, interaksi yang terjadi membutuhkan jaringan yang lebih luas dengan menyentuh pusat – pusat produksi pengetahuan.

Kata kunci: *quadruple helix, industri kreatif, ekonomi wilayah*

PENDAHULUAN

Globalisasi memegang peranan yang semakin penting dalam pengembangan ekonomi wilayah. Globalisasi telah membuka aliran interaksi yang semakin luas dan tanpa batas yang secara tidak langsung sudah mengurangi tingkat daya saing. Menurut Porter [1] teori mengenai kompetisi adalah salah satu kekuatan untuk membuat sesuatu menjadi lebih baik. Setiap kota dan wilayah perlu meningkatkan daya saing untuk dapat menumbuhkan perekonomiannya. Adanya otonomi daerah yang diterapkan di Indonesia mengharuskan setiap daerah untuk selalu mengembangkan potensi ekonomi yang dimilikinya. Hal ini terkait pada perbedaan karakteristik antar wilayah yang menjadikan adanya perbedaan dalam tingkat pembangunan dan kecepatan pertumbuhan [2]. Namun, konsep daya saing saat ini tidak lagi bergantung pada ketersediaan sumber daya alam maupun tenaga kerja yang murah, namun lebih menekankan pada ilmu pengetahuan yang akan menciptakan

inovasi [1]. Jejaring menjadi sebuah kunci yang memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran ide kreatif antar aktor sehingga akan memicu terciptanya inovasi yang dibutuhkan dalam pengembangan industri kreatif [3].

Industri kreatif adalah industri yang menekankan pada kreativitas sehingga penciptaan inovasi menjadi hal yang penting dilakukan. Inovasi dapat tercipta di lokasi – lokasi dimana terdapat banyak klaster atau sumber – sumber pengetahuan yang menciptakan hubungan antar aktor yang pada gilirannya akan merangsang iklim kompetisi [4]. Jejaring merupakan sebuah sumber yang paling penting bagi inovasi. Jejaring juga memungkinkan terjadinya interaksi dan pertukaran ide kreatif yang akan menghasilkan sebuah inovasi.

Fungsi adanya jejaring antar aktor telah banyak menghasilkan pusat – pusat inovasi dunia seperti Silicon Valley di California, Bangalore di India, Zhingguancun di China, atau Daedeok Innopolis di Korea Selatan. Keberhasilan tempat – tempat ini dalam menciptakan inovasi tidak terlepas dari adanya pola interaksi antar aktor yang berada dalam kawasan tersebut. Pola interaksi ini telah membuat pusat – pusat inovasi menjadi lebih maju dan lebih cepat dalam mencapai *knowledge society* [5]. Pola interaksi yang dikenal sebagai konsep quadruple helix telah banyak digunakan dalam pengembangan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan. Konsep ini mengungkapkan pentingnya sinergi dari aktor pemerintah – akademisi – pelaku usaha – masyarakat yang dapat memicu terjadinya sirkulasi ilmu pengetahuan yang akan berujung pada penciptaan inovasi.

Riset – riset yang telah dilakukan terhadap konsep quadruple helix menghasilkan sebuah kesimpulan bahwa industri kreatif yang berkembang merupakan industri kreatif berbasis teknologi tiggi dengan dukungan pusat – pusat produksi inovasi pada negara tersebut. Hal ini juga didukung pleh peran aktif aktor dalam membangun jaringan. Akan tetapi, riset tentang quadruple helix dengan industri kreatif berbasis teknologi sederhana dan dukungan yang terbatas dari pusat – pusat produksi inovasi belum banyak dilakukan. Mengingat hal tersebut, penelitian ini berusaha untuk menguji karakteristik pola interaksi quadruple helix apabila diterapkan pada negara dengan keterbatasan teknologi tinggi dan kurangnya dukungan dari pusat – pusat produksi inovasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan interaksi quadruple helix dan dampaknya terhadap pengembangan industri kreatif dengan melihat peran, kontribusi, serta sifat relasi dari masing – masing aktor. Penelitian ini akan menjelaskan mengenai keterbatasan konsep quadruple helix dalam menggembarkan berbagai pola interaksi yang mungkin tercipta. Hasil penelitian ini akan memperkaya karakteristik interaksi antar aktor dalam penggunaan konsep quadruple helix.

Penelitian ini menggunakan metode studi kasus pada industri kreatif di Kota Cimahi. Berdasarkan tinjauan dari RTRW Nasional, RTRW Provinsi, RTRW Kota Cimahi, serta Rencana Pembangunan & Pengembangan Pariwisata Jabar, Kota Cimahi diarahkan pengembangannya sebagai pusat industri kreatif. Sejak tahun 2009, Kota Cimahi telah memfokuskan pengembangan ekonominya yang berbasiskan industri kreatif. Upaya yang dilakukan untuk mengembangkan industri kreatif di Kota Cimahi adalah dengan menerapkan konsep qaudruple helix seperti yang telah sukses untuk mengembangkan pusat – pusat inovasi dunia. Perbedaan karakteristik pada industri kreatif di Kota Cimahi dengan pusat – pusat inovasi dunia lainnya telah mendorong penelitian untuk mengidentifikasi karakteristik pola interaksi quadruple helix yang ada pada industri kreatif di Kota Cimahi.

Penelitian ini akan dibahas ke dalam dua bagian. Bagian pertama akan menjelaskan mengenai peran dan kontribusi masing – masing aktor dalam mengembangkan industri kreatif. Peran dan kontribusi masing – masing aktor tersebut akan dijelaskan mengenai perbedaannya dengan peran dan kontribusi masing – masing aktor dalam mengembangkan industri kreatif di pusat – pusat inovasi dunia. Perbandingan peran dan kontribusi ini akan menghasilkan beberapa karakteristik yang berbeda dari pola interaksi aktor meskipun sama – sama menggunakan konsep quadruple helix. Selanjutnya, bagian kedua pada penelitian ini akan memetakan sifat relasi atau jaringan antar aktor yang dianalisis menggunakan metode social network analysis. Hasil pemetaan akan menunjukkan kepentingan dan pengaruh suatu aktor dalam sebuah jaringan.

KERANGKA KONSEP

Pola interaksi *triple helix* dipopulerkan oleh Etzkowitz sebagai sebuah metode pengembangan kebijakan yang berbasiskan pada inovasi. Teori ini mengungkapkan mengenai pentingnya sinergi dari ketiga aktor yaitu pemerintah, akademisi, serta pelaku usaha. Sinergi yang tercipta dari ketiga aktor ini diharapkan dapat memicu terjadinya sirkulasi ilmu pengetahuan yang akan berujung pada penciptaan inovasi. Aktor – aktor yang terlibat dalam konsep *triple helix* berdiri sebagai satu individu dengan perannya masing – masing namun dalam sebuah sistem mereka bekerja sebagai satu kesatuan dimana diperlukan adanya dinamisasi dari peran – peran aktor tersebut [5,6].

Akademisi memiliki peran untuk menyediakan ilmu pengetahuan baru yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan oleh akademisi menjadi informasi bagi aktor lain. Informasi ini digunakan oleh para pelaku usaha kreatif untuk mengembangkan dan menciptakan sebuah

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

inovasi maupun kreativitas yang mampu meningkatkan nilai tambah terhadap produk kreatif. Interaksi yang tercipta antara intelektual dan pelaku usaha menciptakan sebuah iklim bagi tumbuh kembangnya inovasi dan kreativitas. Iklim kolaborasi ini juga perlu didukung oleh pemerintah sebagai aktor yang bertanggung jawab terhadap regulasi dan kebijakan program pembangunan untuk menstimulus kinerja aktor akademisi maupun pelaku usaha [6][7][8].

Keterlibatan ketiga aktor dalam konsep *triple helix* dirasa kurang memenuhi kualitas pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan [8]. Hal ini dikarenakan belum adanya aktor yang bertindak sebagai umpan balik terhadap perkembangan dan inovasi yang diterima oleh ketiga aktor lainnya [9]. Perkembangan teoritis ini menuju pada pengembangan interaksi antara empat aktor yang dikenal sebagai *quadruple helix*. Sebenarnya, *quadruple helix* belum memiliki pendefinisian yang cukup jelas mengenai ketetapan jenis kelompok untuk aktor keempat namun berdasarkan beberapa studi dapat disepakati bahwa aktor keempat dalam *quadruple helix* ialah pengguna dimana definisi dari pengguna itu sendiri sangat luas [10].

Afonso, Monteiro, & Thompson [6] lebih jauh menjelaskan mengenai peran dari aktor keempat dalam konsep *quadruple helix* yaitu masyarakat atau komunitas adalah diarahkan pada sisi konsumsi teknologi, pengetahuan, barang dan jasa, atau *output* lainnya dalam ekonomi kreatif. Aktor ini memiliki posisi serta kekuatan daya tawar untuk mendapatkan akses terhadap informasi yang berasal dari aktor lainnya dan juga memiliki pengaruh untuk menggiring opini publik terhadap suatu inovasi produk atau jasa atau kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat [9]. Mengingat peran aktor ini dapat mendorong pembentukan lingkungan yang kreatif dan inovatif, maka aktor masyarakat atau komunitas ini dikembangkan dalam konsep *quadruple helix*.

Pengikutsertaan masyarakat dalam aktor – aktor yang terlibat pada interaksi *quadruple helix* menganut konsep *bottom up* melalui partisipasi dari masyarakat. Pada konsep *triple helix,* inovasi difokuskan pada penghasilan produk inovasi yang berbasis teknologi tinggi yang diperoleh melalui riset sementara pada model *quadruple helix* lebih fokus pada penciptaan inovasi dengan mengaplikasikan teknologi serta pengetahuan untuk mengakselerasi inovasi guna mengembangkan pasar [11].

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus dilakukan pada industri kreatif yang ada di Kota Cimahi dengan melakukan pendalaman studi pada aktor – aktor yang terlibat dalam pengembangan industri kreatif yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha kreatif, serta komunitas. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan data primer. Data sekunder dalam bentuk dokumen, laporan statistik, dan artikel koran dikumpulkan untuk menjelaskan latar belakang terbentuknya industri kreatif dan kondisi industri kreatif di Kota Cimahi. Selanjutnya, serangkaian wawancara dilakukan untuk mengungkapkan hubungan relasi antar aktor, bagaimana mereka berinteraksi, serta perannya masing – masing dalam mengembangkan industri kreatif.

Responden penelitian ini terdiri dari pemerintah lokal, komunitas kreatif, akademisi, dosen, hingga pelaku usaha kreatif. Setiap responden merepresentasikan empat kelompok utama dalam konsep *quadruple helix* yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan komunitas. Seluruh responden dipilih berdasarkan beberapa kriteria yang digunakan untuk mendapatkan informasi terkait peran dan kontribusi masing – masing aktor serta sifat relasi antar aktor dalam pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi. Pertanyaan wawancara dalam penelitian ini berusaha mengungkapkan keterlibatan aktor dalam mengembangkan industri kreatif, peran masing – masing aktor dalam mengembangkan industri kreatif, serta bagaimana hubungan relasi antar aktor apakah relasi yang terbentuk mencerminkan hubungan saling melengkapi seperti yang sesuai dengan konsep *quadruple helix* atau justru menghasilkan hubungan saling ketergantungan. Penentuan informan yang akan diwawancarai dilakukan melalui teknik *purposive sampling* yang selanjutnya dikembangkan melalui teknik *snowball sampling.*

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini fokus untuk mengeksplorasi peran, kontribusi, serta relasi dari aktor yang akan membawa pada kesimpulan terkait interaksti antar aktor. Penelitian ini menggunakan *content analysis* untuk memahami dan menginterpretasikan data dari hasil wawancara yang kemudian dibandingkan dengan indikator yang dihubungkan dengan berbagai tinjauan literatur yang telah dilakukan [12]. Sementara itu, *social network analysis* digunakan untuk mengetahui karakteristik interaksi antar aktor dalam sebuah struktur sosial yang terdiri dari individu atau kelompok melalui pemetaan jejaring antar aktor dalam pengembangan industri kreatif berdasarkan pada pendekatan *graph theory* [13]. Metode pengukuran *social network analysis* yang digunakan dalam penelitian ini adalah sentralitas yang bertujuan untuk mengkuantifikasikan kepentingan dan pengaruh aktor dalam sebuah jaringan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran Aktor dalam Pengembangan Industri Kreatif berdasarkan Konsep *Quadruple Helix*

Beberapa negara seperti Malaysia, Korea Selatan, China serta beberapa negara Asia lainnya mulai menyelinap dan berjalan dalam sebuah tatanan ekonomi inovasi. Bangalore di India, Zhonggauancun di China,Daedeok Innopolis di Korea Selatan, atau Biopolis di Singarupa telah menjadi pusat aglomerasi atau berkumpulnya perusahaan – perusahaan yang bergerak dalam industri kreatif berbasis teknologi tinggi. Klaster – klaster ini telah bersanding dengan beberapa pusat – pusat inovasi di belahan dunia lainnya seperti Amerika Serikat dan Eropa. Model interaksi *quadruple helix* telah banyak digunakan untuk menjelaskan relasi jaringan antar aktor dalam mengembangkan pusat – pusat inovasi tersebut [14].

Aktor – aktor yang terlibat dalam pengembangan industri kreatif dikelompokkan ke dalam 4 (empat) kategori yaitu pemerintah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat yang diadopsi sesuai dengan konsep *quadruple helix*. Aktor – aktor yang terlibat dalam konsep *quadruple helix* berdiri sebagai satu individu dengan perannya masing – masing namun dalam sebuah sistem mereka bekerja sebagai satu kesatuan dimana diperlukan adanya dinamisasi dari peran aktor – aktor tersebut. Keempat aktor ini perlu memiliki sinergi dalam menjalankan perannya masing – masing. Hal ini lah yang menghasilkan keberhasilan bagi berbagai pusat – pusat inovasi di dunia.

Pada konsep *quadruple helix*, akademisi terkait dengan aktivitas – aktivitas penciptaan baru (*novelty*) yang memiliki daya tawar kepada pasar serta pembentukan insan kreatif. Berkaca pada keberhasilan pusat – pusat inovasi dunia, aktor akademisi atau perguruan tinggi telah menjadi pemeran kunci yang diperkuat oleh dukungan pemerintah [15]. Pada kasus Silicon Valley, Stanford University berperan dalam menerapkan ilmu pengetahuan yang ada atau menciptakan pengetahuan yang digunakan untuk pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, dua universitas di China yaitu Tsinghua dan Peking telah berperan dalam menyuplai tenaga ahli yang kompeten. Berdasarkan penelitian yang dilakukan terhadap Daedeok Innopolis, Korea Selatan, peran perguruan tinggi dalam mengembangkan inovasi dapat dibagi dua menjadi perguruan tinggi berbasis penelitian yaitu berperan dalam menyediakan ilmu pengetahuan untuk pengembangan inovasi dan perguruan tinggi berbasis pembelajaran yaitu berperan dalam menyediakan tenaga kerja yang terampil serta berpendidikan untuk dapat diserap oleh industri [16].

Peran yang dilakukan oleh Stanford University, Tsinghua University, Peking University, serta universitas – universitas di Korea Selatan sebagai aktor akademisi telah sejalan dengan pendapat Özsoy et al.,[17] yang mengatakan bahwa akademisi dapat berperan sebagai pabrik ilmu pengetahuan (*knowledge factory*) yang menyediakan temuan berbagai ilmu pengetahuan serta teknologi yang dapat didifusikan kepada sektor publik. Sayangnya, pada pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi, aktor akademisi berperan sangat minim dibandingkan dengan aktor lainnya. Adanya Akademi Komunitas Nasional (AKN) sebagai salah satu universitas yang ada di Kota Cimahi yang khusus bergerak di bidang – bidang yang mendukung pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi belum berperan sebagai pabrik ilmu pengetahuan. Saat ini AKN lebih banyak berperan dalam pengembangan sumber daya manusia.

Ketidakmampuan aktor akademisi di Kota Cimahi dalam memproduksi ilmu pengetahuan telah memperluas kebutuhan hubungan jejaring aktor akademisi untuk menanggulangi keabsenan peran tersebut dalam menghasilkan penelitian dan pengetahuan. Penelitian dan pengetahuan yang dibutuhkan oleh industri kreatif di Kota Cimahi lebih banyak dilakukan oleh aktor akademisi dari luar Kota Cimahi seperti Institut Teknologi Bandung, UNPAD, atau Telkom. Hal seperti ini juga dilakukan oleh Bangalore – India yang memerlukan pelatihan dari Stanford dan Berkeley dalam mengembangkan penelitian yang maju. Namun, terdapat perbedaan mendasar yang sangat mempengaruhi keberhasilan universitas tersebut dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan. Pada kasus di Kota Cimahi, aktor akademisi yang membantu dalam proses transfer informasi dan ilmu pengetahuan membutuhkan perantara dari pemerintah maupun komunitas. Biasanya kerjasama seperti ini difasilitasi oleh pemerintah atau komunitas yang menjadi penghubung antara akademisi dengan pelaku usaha. Pelaku usaha pun tidak mampu secara mandiri untuk menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi. Begitu juga dengan peran perguruan tinggi yang kurang pro aktof untuk menjalin kerjasama dengan pelaku usaha. Perbedaannya, perguruan tinggi seperti Stanford berperan secara aktif dalam melakukan transfer ilmu pengetahuan dan pelatihan kepada para pengusaha. Begitu juga dengan pengusaha yang berperan aktif dalam mengambil ilmu pengetahuan yang diproduksi oleh Stanford dan Berkeley untuk diterapkan di Bangalore – India [15].

Hubungan perguruan tinggi dengan pelaku usaha yang terjadi di Kota Cimahi dan beberapa pusat inovasi di dunia juga menjadi hal yang dapat diperhatikan perbedaannya. Silicon Valley muncul sebagai hasil strategi pengembangan Stanford University sebagai *entrepreneurial university*. Stanford University berperan secara proaktif dalam menciptakan industri. Hasilnya, riset – riset yang dilakukan mampu menjembatani

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

munculnya industri – industri. Sementara dalam pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi, komunitas lah yang lebih berperan dalam memunculkan industri – industri kreatif. Sayangnya baik komunitas maupun pelaku usaha yang muncul ini justru kesulitan mendapatkan hasil – hasil riset dari perguruan tinggi yang dibutuhkan untuk mengembangkan usaha kreatif mereka. Adanya ketidakterhubungan fungsi dari peran aktor perguruang tinggi, komunitas, dan pelaku usaha ini membutuhkan peran pemerintah sebagai aktor kunci yang mampu menghubungkannya.

Selain peran aktif perguruan tinggi, berdirinya perusahaan modal ventura juga menjadi elemen kunci bagi kesuksesan pusat – pusat inovasi di dunia. Keberhasilan pusat – pusat inovasi dunia berkembang karena hasil – hasil riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi yang ditangkap oleh pelaku usaha dan kemudian dimodali oleh para pemodal ventura [18]. Perbedaan yang dapat dikenali dari pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi dengan industri kreatif di pusat – pusat inovasi dunia adalah tidak hadirnya pemodal ventura yang mampu membiayai pelaku usaha kreatif dalam mengembangkan industrinya. Pemodal ventura menjadi sebuah aset yang dapat ditemui di beberapa pusat inovasi tersebut. Sayangnya, pada pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi, pemodal ventura menjadi sebuah hal yang sulit dijangkau bagi pelaku usaha. Kurangnya permodalan menjadikan industri kreatif mereka kurang berkembang. Namun, pelaku usaha tidak memiliki kemampuan dalam berinteraksi dengan pemodal ventura. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan jejaring yang mereka miliki.

Melihat pada jenis industri yang berkembang pada pusat – pusat inovasi dunia dengan yang berkembang di Kota Cimahi memang berbeda. Industri yang berkembang di Silicon Valley, Bangalore, atau Zhongguancun adalah industri – industri yang berteknologi tinggi sementara industri yang berkembang di Cimahi adalah industri yang berbasiskan teknologi sederhana. Namun, terdapat persamaan antara kedua industri ini yaitu kedua jenis industri ini perkembangannya tidak dapat terlepas dari pendanaan dan inovasi. Di Silicon Valley, pemerintah berperan dalam memberikan bantuan pendanaan dan menginvestasikan dana publik untuk pengembangan industri – industri berteknologi tinggi yang diasosiasikan dengan pengembangan pusat penelitian (*research and development*).

Pemerintah memberikan dukungan dan kebijakan melalui program yang memberikan insentif dan bantuan pendanaan bagi industri – industri kecil untuk mengkomersialisasikan inovasi – inovasi mereka (Dahad, 2016). Peran pemerintah tersebut mampu menstimulasi berkembangnya industri – industri kreatif sekaligus penciptaan inovasi yang berbasiskan penelitian dan ilmu pengetahuan. Sementara itu, pemerintah di Kota Cimahi justru lebih banyak berperan untuk mendukung ketidakmampuan peran aktor lain. Di Kota Cimahi, pemerintah belum mampu berperan dalam memberikan dukungan pendanaan dan insentif bagi pelaku usaha industri – industri kreatif khususnya dalam penciptaan inovasi. Oleh karena itu, iklim kompetisi antar pelaku usaha untuk menciptakan inovasi pun masih kurang ditandai dengan masih banyaknya pelaku usaha kreatif yang berperan sebagai maklun bukan pencipta. Selain itu, pemerintah juga belum mampu mengoptimalkan peran pusat penelitian yang ada disana yaitu Cimahi Technopark. Padahal, Cimahi Technopark dapat berpotensi menjadi wadah untuk menggali inovasi dan membantu industri kreatif dalam mengkomersialisasikan inovasi tersebut.

Tabel 1. Perbedaan Karakteristik Interaksi *Quadruple Helix* Pada Industri Kreatif di Kota Cimahi

	Kondisi di Pusat Inovasi	**Kondisi di Cimahi**
Pendanaan indutri kreatif	Pemerintah memiliki dukungan kebijakan dan program yang membantu pendanaan industri kreatif	Pemerintah tidak memiliki dukungan kebijakan dan program yang membantu pendanaan untuk industri *high grade* dan *unbankable*
Pusat penelitian dan pengembangan	Pemerintah mengembangkan pusat penelitian dan pengembangan untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan pembangunan	Pemerintah belum mampu mengoptimalkan peran pusat penelitian dan pengembangan dalam memenuhi kebutuhan penelitian dan pembangunan
Perguruan tinggi sebagai *knowledge factory*	Perguruan tinggi berperan sebagai *knowledge factory* dengan menghasilkan riset – riset yang dimanfaatkan untuk pengembangan industri kreatif	Perguruan tinggi belum mampu memproduksi ilmu pengetahuan untuk pengembangan industri kreatif
Proses penyebaran informasi, ilmu pengetahuan, dan inovasi	Perguruan tinggi menghasilkan dan mentransfer hasil riset pada pelaku usaha. Pelaku usaha menangkap hasil riset tersebut untuk pengembangan inovasi industri kreatif	Pemerintah berperan aktif dalam menghubungkan perguruan tinggi dengan pelaku usaha untuk menjembatani hasil riset untuk digunakan oleh industri kreatif
Keberadaan pemodal ventura	Kemampuan teknis dan berwirausaha industri telah menarik pemodal ventura	Industri tidak memiliki akses untuk dapat berjejaring dengan pemodal ventura kecuali dijembatani oleh pemerintah
Penciptaan industri – industri baru	Perguruan tinggi berperan proaktif dalam menciptakan industri baru melalui penciptaan hasil riset dan ilmu pengetahuan	Komunitas berperan secara aktif dalam menciptakan pelaku usaha baru dengan jenis industri yang serupa
Sumber: Hasil Analisis, 2016		

Pemetaan Hubungan Jaringan Antar Aktor dalam Pengembangan Industri Kreatif

Berdasarkan peran dan kontribusi masing – masing aktor dalam mengembangkan industri kreatif, dapat dipetakan hubungan jaringan antar aktor. Pemetaan jaringan hubungan antar aktor ini menggunakan metode social network analysis. Analisis ini digunakan untuk mengetahui pola hubungan yang terjadi antar aktor dan pertukaran sumber daya antar aktor tersebut melalui hubungan yang terjalin dan terbentuk antar aktor [19]. Hubungan jejaring aktor dapat dilihat dengan menggunakan pendekatan pengukuran jaringan sentralitas. Pendekatan ini dipilih untuk mengetahui kepentingan dan pengaruh suatu aktor dalam sebuah jaringan. Analisis dibagi ke dalam 3 (tiga) metode sentralitas yang digunakan yaitu degree centrality, closeness centrality, dan betweenness centrality.

a) *Degree Centrality*

Degree centrality atau analisis pemusatan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat siapa aktor yang paling penting dalam suatu hubungan yang menjadi suatu penyebab terjadinya atau berjalannya suatu kegiatan. Pemerintah kota dan CCA adalah aktor yang paling menonjol dan paling banyak berpengaruh terhadap aktor – aktor lainnya khususnya terhadap jaringan aktor yang terbentuk dalam pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi. Pemerintah Kota Cimahi memiliki hubungan atau keterkaitan yang paling banyak dengan aktor – aktor lainnya. Pemerintah Kota Cimahi sebagai aktor yang menginisiasi pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi memiliki kewenangan untuk menjalankan kebijakan, program, dan kegiatan yang menciptakan iklim dan semangat industri kreatif bagi berbagai aktor lainnya. Pemerintah Kota Cimahi juga memiliki kemampuan untuk berjejaring dengan aktor lainnya seperti menjalin kerjasama dengan komunitas, pelaku usaha, maupun akademisi dalam berbagai hal untuk pengembangan industri kreatif. Oleh karena itu, pemerintah kota menjadi aktor yang memberikan banyak hubungan atau keterkaitan dengan aktor lainnya.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

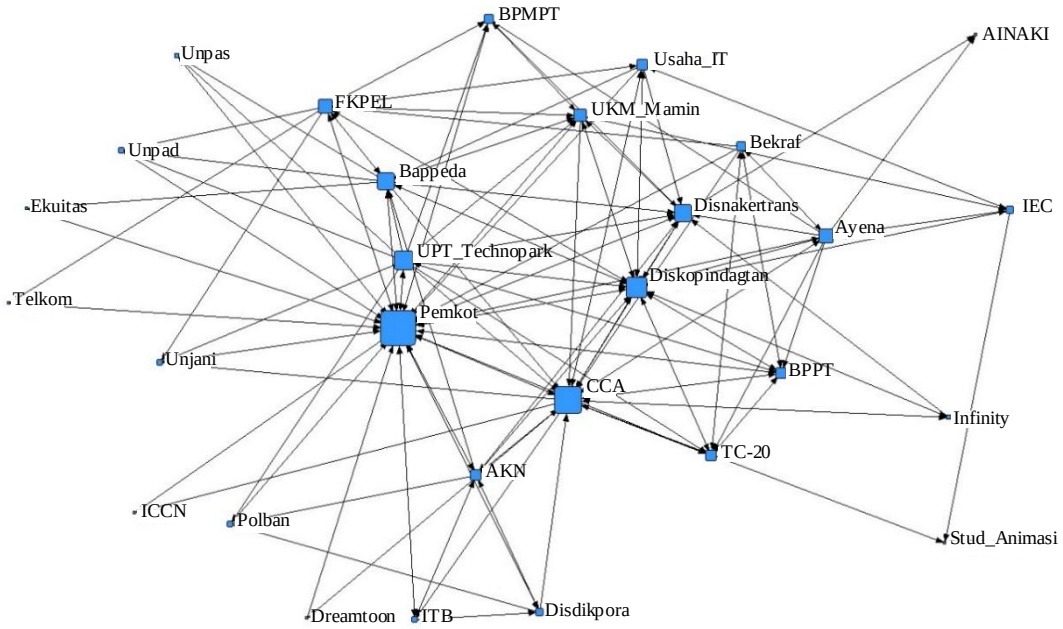

Gambar 1. Social Network Graph Degree Centrality dalam Pengembangan Industri Kreatif
Sumber: Hasil Analisis, 2016

b) *Closeness Centrality*

Closeness centrality atau derajat kedekatan melihat pada kedekan suatu aktor dengan aktor – aktor lainnya sehingga sangat terkait dengan posisi dan jarak dengan aktor lainnya. Berdasarkan hasil analisis closeness centrality yang dilakukan terhadap aktor yang terlibat dalam pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi, pemerintah adalah aktor yang memiliki jarak terkecil dengan aktor – aktor lainnya dalam keterkaitan jejaring yang ada dalam industri kreatif. Pemerintah Kota Cimahi merupakan aktor yang memiliki kedekatan dengan semua aktor dalam konsep quadruple helix. Tingkat kedekatan yang dimiliki oleh pemerintah menandakan bahwa aktor pemerintah memiliki pengaruh yang besar terhadap pengembangan industri kreatif di Kota Cimahi karena mampu menyebarkan informasi lebih cepat tanpa perlu perantara pihak ketiga. Derajat kedekatan aktor pemerintah menandakan bahwa tingkat ketergantungan terhadap aktor lain semakin rendah. Berbeda dengan kelompok aktor lainnya seperti akademisi dan pelaku usaha yang memiliki derajat kedekatan yang rendah sehingga tingkat kebergantungan mereka terhadap aktor lain cukup tinggi seperti bergantung pada pemerintah ataupun komunitas.

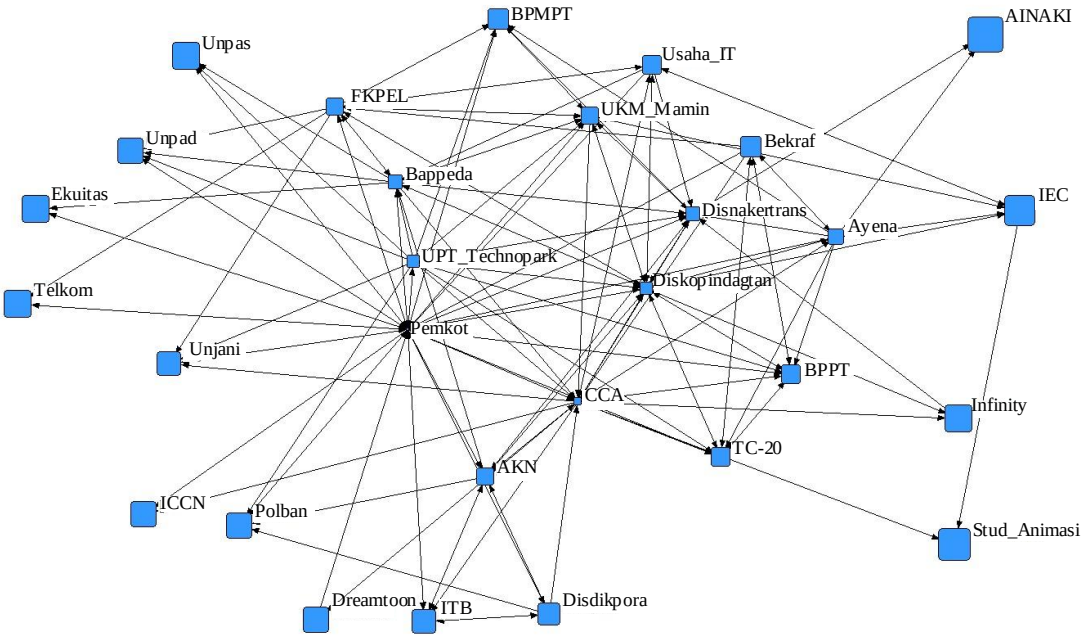

Gambar 2. Social Network Graph Closeness Centrality dalam Pengembangan Industri Kreatif
Sumber: Hasil Analisis, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4

c) *Betweenness Centrality*

Betweenness centrality atau derajat keterantaraan adalah pengukuran yang digunakan untuk menunjukkan aktor dengan posisi intermediary yang menghubungkan proses komunikasi dan penyaluran sumber daya lainnya antara dua atau lebih jejaring yang berbeda. Pemerintah Kota Cimahi dan CCA adalah aktor yang paling sering menjadi penghubung atau simpul informasi dalam jaringan sosial pada industri kreatif di Kota Cimahi. Sentralitas yang terbentuk dalam jaringan tidak begitu rendah namun juga tidak tinggi yang berarti tidak semua aktor dapat terhubung tanpa melalui perantara. Terdapat aktor – aktor yang memerlukan Pemerintah Kota Cimahi atau CCA sebagai perantara. Hal ini bukan juga menunjukkan hal yang buruk. Adanya aktor yang memiliki nilai penghubung yang besar merupakan sebuah keuntungan bagi pengembangan industri kreatif khususnya bagi aktor – aktor yang tidak memiliki kewenangan dan sumber daya dalam mengembangkan industri kreatif. Pemerintah Kota Cimahi dan CCA dapat menjadi inisiator atau pusat terbentuknya jaringan. Namun di sisi lain hal ini juga dapat menimbulkan ketergantungan terhadap aktor lain.

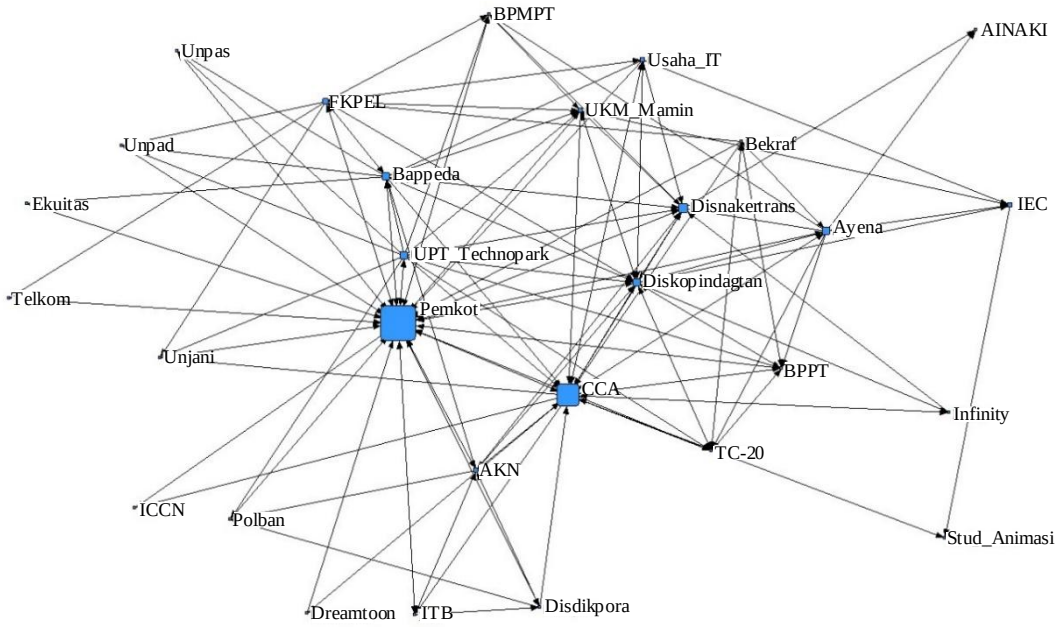

Gambar 2. Social Network Graph Closeness Centrality dalam Pengembangan Industri Kreatif
Sumber: Hasil Analisis, 2016

KESIMPULAN DAN SARAN

Jejaring aktor merupakan inti utama dari konsep pengembangan *quadruple helix* yang merupakan interaksi antara pemerintah – akademisi – pelaku usaha – masyarakat. Konsep *quadruple helix* mengungkapkan mengenai pentingnya sinergi dari keempat aktor. Sinergi yang tercipta diharapkan dapat memicu terjadinya sirkulasi ilmu pengetahuan yang akan berujung pada penciptaan inovasi [6]. Namun kondisi interaksi yang terjadi di Kota Cimahi belum mampu melahirkan sinergi. Interaksi antar aktor yang tercipta lebih merefleksikan hubungan ketergantungan dibandingkan hubungan saling melengkapi. Hal ini dapat dilihat dari hubungan dan interaksi yang terjadi di Kota Cimahi masih banyak dipengaruhi oleh pemerintah kota sebagai aktor utama dalam pengembangan industri kreatif. Padahal, menurut Etzkowitz [19] hubungan ketergantungan terhadap sumber daya tidak akan mampu menghasilkan inovasi yang berkelanjutan melainkan justru menjadi titik lemah yang mampu mengurangi daya saing.

Sinergi antar aktor pada konsep *quadruple helix* dapat tercipta apabila setiap aktor mampu memainkan perannya masing – masing tanpa bergantung pada peran aktor lain. Kondisi seperti ini akan menciptakan hubungan yang saling melengkapi yang mampu memperkuat inovasi yang dibutuhkan oleh industri kreatif. Namun, adanya ketidakmampuan salah satu atau beberapa aktor dalam menjalankan perannya dalam hubungan sinergi ini akan menciptakan hubungan yang saling ketergantungan. Hal ini berbeda dengan konsep yang digagas oleh *quadruple helix*. Pada akhirnya, interaksi *quadruple helix* membutuhkan jaringan yang lebih luas untuk menutupi keabsenan peran aktor.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Di Kota Cimahi, aktor akademisi yang berada dalam pengembangan kawasan industri kreatif belum mampu memproduksi ilmu pengetahuan sehingga peran aktor akademisi lebih dititikberatkan pada proses transfer informasi dan pengetahuan. Kondisi ini berdampak pada karakteristik interaksi *quadruple helix* yang terjadi di Kota Cimahi dimana Kota Cimahi membutuhkan jaringan yang lebih luas dengan menyentuh pusat – pusat produksi pengetahuan. Padahal salah satu kunci keberhasilan pusat – pusat inovasi dunia adalah adanya peran aktif dari aktor akademisi untuk memproduksi ilmu pengetahuan yang digunakan sebagai modal untuk pengembangan industri kreatif.

Pemerintah sebagai aktor utama lebih banyak membuka hubungan jejaring dan interaksi dengan aktor lain melalui perannya. Padahal yang diharapkan dari konsep *quadruple helix* ialah masing – masing aktor bergerak secara aktif dalam membentuk jejaring melalui berbagai interaksi yang ada sehingga mereka mampu menjalankan perannya masing – masing. Interaksi yang ada di Kota Cimahi lebih banyak bersifat interaksi satu arah. Kemampuan aktor dalam berjejaring juga dipengaruhi oleh sifat kepemimpinan (*leadership*) aktor. Tidak mampunya aktor lain dalam membentuk jejaring dikarenakan tidak adanya sifat kepemimpinan yang memiliki karakteristik kolaboratif. Sesuai konsep kepemimpinan yang dipopulerkan oleh Stimson [20], dibutuhkan sifat kepemimpinan yang kuat agar dapat mendorong tumbuhnya interaksi antar aktor. Kepemimpinan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Cimahi telah mampu membentuk tindakan bersama namun pemerintah masih menjadi aktor utama yang belum mampu mempengaruhi aktor lain dalam membentuk jaringan.

Di sisi lain, dinamika politik suatu negara menjadi dimensi yang perlu diantisipasi dalam sebuah interaksi yang terjadi dalam jejaring aktor khususnya bagi negara – negara yang memiliki kondisi politik tidak stabil. Dinamika politik mampu mengubah hubungan interaksi jejaring antar aktor. Terdapat kemungkinan bahwa interaksi dan hubungan dalam *quadruple helix* dijalankan untuk kepentingan politik padahal seharusnya interaksi dijalankan pada tingkatan profesionalisme dimana masing – masing aktor memiliki peran dan tujuan yang sama sehingga menghasilkan interaksi yang sinergis. Oleh karena itu, biasanya pusat – pusat inovasi di dunia bukanlah terjadi melalui *grand design* yang dibuat oleh pemerintah melainkan berkembang karena luapan hasil – hasil riset dari perguruan tinggi yang ditangkap oleh para pelaku usaha dan kemudian dimodali oleh pada pemodal ventura [18].

DAFTAR PUSTAKA

[1] Porter, M. E. (2007). *Clusters and the New Economics of Competition*', Harvard Business Review, 76 (6), November-December, 77-90. INTERNATIONAL LIBRARY OF CRITICAL WRITINGS IN ECONOMICS, 212(2), 51.

[2] Krugman, P. (1998). *Space: the final frontier. The Journal of Economic Perspectives*, 12(2), 161–174.

[3] Stimson, R. J., Stough, R. R., & Roberts, B. H. (2006). *Regional economic development: analysis and planning strategy*. Berlin: Springer Science & Business Media.

[4] Zuhal, M. R. (2010). *Knowledge & Innovation: Platform Kekuatan Daya Saing*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

[5] Etzkowitz, H. (2002). *Incubation of incubators: innovation as a triple helix of university-industry-government networks*. Science and Public Policy, 29(2), 115–128.

[6] Etzkowitz, H. (2008). *The triple helix: university-industry-government innovation in action*. London: Routledge.

[7] Afonso, O., Monteiro, S., & Thompson, M. (2012). A growth model for the quadruple helix. Journal of Business Economics and Management, 13(5), 849–865.

[8] Füzi, A. (2013). *Triple Helix International Conference 2013 Session "Building the innovative markets, places and networks."* Retrieved from http://www.triplehelixconference.org/th/11/bic/docs/Papers/Fuzi.pdf

[9] Widiastuti, L. (2016). *Jaringan Sosial Kota Pekalongan sebagai Modal Dukungan Perwujudan Kota Kreatif*. Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.

[10] Arnkil, R., Järvensivu, A., Koski, P., & Piirainen, T. (2010). *Exploring the quadruple helix*. Report of Quadruple Helix Research for the CLIQ Project, Work Research Centre, University of Tampere, Tampere, Finland. Retrieved from https://www.researchgate.net/profile/Robert_Arnkil/publication/262026073_Exploring_the_Quadruple_Helix_Report_of_Quadruple_Helix_Research_For_the_CLIQ_Project/links/0f31753673fe549303000000.pdf

[11] Chesbrough, H. (2003). *The logic of open innovation: managing intellectual property*. California Management Review, 45(3), 33–58.

[12] Creswell, J. W. (2013). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. California: Sage publications.

[13] Prell, C. (2012). *Social network analysis: History, theory and methodology*. India: Sage.

[14] Zuhal, M. R. (2013). *Gelombang Ekonomi Inovasi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
[15] Etzkowitz, H. (2012a). *Silicon Valley: The Sustainability of an Innovative Region*. Retrieved from http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.459.3982&rep=rep1&type=pdf
[16] Sohn, D.-W., Kim, H., & Lee, J. H. (2009). *Policy-Driven University – Industry Linkages and Regional Innovation Networks in Korea*. Environment and Planning C: Government and Policy, 27(4), 647–664. https://doi.org/10.1068/c0890b
[17] Özsoy, A., Aksoy, M., Dursun, P., Paker, N., Kahvecioğlu, F., Erkök, F., … Uzer, E. (2007). *Creative city, creative university: Creative discourses and activities at Istanbul Technical University*. Istanbul Technical University Faculty of Architecture Istanbul, Turkey. ITU A, (4), 2.
[18] Sambodo, A. (2010). *Perkembangan Bisnis Teknologi di Silicon Valley*. Retrieved from https://imambudiraharjo.wordpress.com/2010/02/02/perkembangan-bisnis-teknologi-di-silicon-valley/
[19] Etzkowitz, H. (2012b). *Triple Helix Clusters: Boundary Permeability at University—Industry—Government Interfaces as a Regional Innovation Strategy*. Environment and Planning C: Government and Policy, 30(5), 766–779.
[20] Widiastuti, L. (2016). *Jaringan Sosial Kota Pekalongan sebagai Modal Dukungan Perwujudan Kota Kreatif*. Bandung: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ITB.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PELAJARAN DARI PRAKTIK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Werry Darta Taifur

Fakultas Ekonomi Universitas Andalas

Email: werrydartataifur@yahoo.com

Naskah diterima :23 Maret 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 23 Maret 2017

PENDAHULUAN

Untuk mencapai sasaranan RPJMN 2015-2019, pemerintah menerapkan perencanaan pembangunan berdasarkan pendekatan holistik, tematik, integratif dan spasial-HTIS (Kementerian PPN/ Bappenas 2016). Keempat pendekatan ini pada dasarnya menekankan pada pentingnya koordinasi, keselarasan, integrasi dan sinkronisasi proses perencanaan maupun evaluasi pelaksanaan pembangunan mulai dari tingkat desa sampai nasional. Keselarasan tersebut tidak saja dalam rangka mencapai target nasional, tetapi juga keselarasan dengan target-target yang ditetapkan secara internasional seperti *Sustainable Development Goals* (SDGs) dan penurunan suhu rumah kaca. Dengan menggunakan pendekatan ini diharapkan program prioritas pemerintah Indonesia selama periode 2015-2019 dan target pembangunan secara nasional dan global dapat terakomodasi dalam seluruh RPJMD (Provinsi, Kabupaten dan Kota) dan RPJM Desa.

Peluang untuk melakukan penyelarasan program prioritas ini sudah terbuka dengan dua kebijakan mendasar yang diambil oleh Presiden Jokowi. *Pertama,* melaksanakan pelantikan kepala daerah serentak berdasarkan hasil Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) serentak pada tanggal 9 Desember 2015. Untuk pertama kalinya dalam sejarah Indonesia, sebanyak 9 pasangan gubernur dan wakil gubernur dilantik secara serentak di Istana Negara pada tanggal 12 Februari 2016. Kemudian masing-masing gubernur juga melantik pasangan bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota secara serentak di masing-masing daerah. Untuk Provinsi Sumater Barat telah dilantik sebanyak 12 pasangan bupati, wakil bupati dan 3 pasangan walikota dan wakil walikota pada tanggal 17 Februari 2016 di Padang.

Tidak dapat dipungkiri bahwa pelantikan kepala daerah serentak ini merupakan peluang yang besar untuk melakukan keselarasan prioritas program nasional dengan program prioritas daerah yang dituangkan dalam RPJMD provinsi, kabupaten dan kota [1] [2]. *Kedua*, pemerintah juga telah mengeluarkan *road map* alokasi dana desa sampai tahun 2019. *Road map* alokasi dana desa tersebut telah memberi jaminan yang tegas bahwa dana pembangunan untuk masing-masing desa telah tersedia dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan nasional.

Pasal 264 (Ayat 4) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 [3] menyatakan bahwa setiap kepala daerah yang baru dilantik diwajibkan menyiapkan dokumen RPJMD periode pemerintahannya paling lambat dalam waktu enam bulan setelah jadwal pelantikan. Dengan demikian pada tahun 2016 terdapat 9 RPJMD Provinsi dan 260 RPJMD Kabupaten/ Kota yang harus disiapkan sampai bulan Agustus 2016. Selanjutnya hakikat kewajiban menyiapkan RPJMD setelah 6 bulan pelantikan ini agar Gubernur, Bupati dan Walikota dapat dengan segera merealisasikan janji-janji yang disampaikan semasa proses PILKADA. Kemudian dokumen RPJMD ini dapat menggiring kepala daerah untuk tidak bertindak secara amatir dalammemimpin daerahnya.

Meskipun pemerintah telah membuat berbagai aturan dan telah diikuti dengan beberapa kali sosialisasi penyusunan dokumen RPJMD, dalam praktik penyusunan dokumen tersebut masih terdapat beberapa kesenjangan yang dapat mengakibatkan mutu dokumen RPJMD tidak seperti yang diharapkan dan bahkan tidak dapat mewujudkan pembangunan inklusif. Tulisan ini bertujuan untuk mengemukakan dan membahas lima kesenjangan yang ditemui dalam praktik penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Kelima kesenjangan tersebut adalah: (a) kesenjangan peraturan pedoman penyusun RPJMD, (b) kesenjangan antar dokumen perencanaan daerah, (c) kesenjangan jadwal konsultasi dengan instansi vertikal (d) kesenjangan substansi dan peserta konsultasi publik (*publichearing*) dan (e) kesenjangan pemahaman esensi dokumen RPJMD.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Pembahasan kelima kesenjangan ini menjadi urgen agar tidak terjadi lagi kesalahan yang sama untuk provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai pasangan kepala daerah baru berdasarkan hasil PILKADA serentak pada tanggal 15 Februari 2017. Dengan demikian tulisan ini dapat memberi masukan untuk perubahan ke arah yang lebih baik,karena pada tahun 2017 akan terdapat sebanyak 101 daerah yang harus menyiapkan dokumen RPJMD (7 provinsi, 76 kabupaten dan 18 kota) di seluruh Indonesia.

Kesenjangan Peraturan Pedoman Penyusunan RPJMD

Instansi yang bertanggungjawab menyusun RPJM Nasional 2015-2019 adalah Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/ Bappenas. Kemudian instansi yang bertanggungjawab menyusun RPJMD di masing-masing daerah adalah Bappeda dengan dukungan instansi lain, sesuai dengan surat keputusan pengangkatan tim penyusunan yang dikeluarkan oleh masing-masing kepala daerah. Akan tetapi peraturan pedoman penyusunan RPJMD yang dipedomani oleh masing-masing daerah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Dari segi kewenangan sebetulnya tidak ada permasalahan,jika peraturan pedoman penyusunan RPJMD yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri tersebut selaras dengan substansi RPJMN 2015-2019.

Tetapi fakta yang dihadapi pada saat penyusunan RPJMD adalah terdapatnya kesenjangan substansi peraturan pedoman yang digunakan dengan substansi RPJMN 2015-2019. Seluruh daerah provinsi, kabupaten dan kota yang menyusun RPJMD untuk periode 2016-2021 masih menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010[4]. Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Peraturan ini mengatur segala sesuatu yang terkait dengan penyusunan RPJMD, mulai dari langkah-langkah atau tahap-tahap yang harus dilalui, jadwal, struktur dan jumlah bab RPJMD sampai pengesahan menjadi Peraturan Daerah (Daerah). Selanjutnya peraturan tersebut juga mengatur nomenklatur program yang harus dimasukkan dalam RPJMD. Namun Permendagri yang dikeluarkan tahun 2010 tersebut tidak mengakomodasi seluruh substansi, format dan nomenklatur program yang terdapat dalam RPJMN 2014-2019. Akibatnya terjadi kesenjangan dan kesalahan melakukan penyesuaian antara substansi, format dan nomenklatur yang terdapat dalam RPJMN 2014-2019 dengan yang terdapat dalam Permendagri Nomor 54 tahun 2010.

Kesenjanganselanjutnyaterjadipadasaatpenyusunan RPJMD 2016-2021 Kesenjangan selanjutnya terjadi pada saat penyusunan RPJMD 2016-2021 telah berakhir, yaitu akibat diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah yang mengatur tentang perangkat organisasi pemerintah daerah (OPD) dan pemindahan beberapa kewenangan dari pemerintah kabupaten dan kota kepada pemerintah provinsi yang harus diimplementasikan pada tahun 2017. Berhubung peraturan pemerintah tersebut keluar pada saat proses pengesahan RPJMD di Kementerian Dalam Negeri, maka pemerintah daerah tidak mempunyai waktu lagi untuk merevisi draf RPJMD 2016-2021 sesuai dengan tuntutan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tersebut.

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 [5] tersebut merupakan suatu kekeliruan yang yang mempunyai dua konsekuensi berat bagi daerah. *Pertama*, pemerintah daerah harus merevisi lagi RPJMD yang telah disusun pada tahun 2017. *Kedua*, organisasi pemerintah daerah yang belum tertera dalam dokumen RPJMD Provinsi 2016-2017 tentu mengalami kesulitan untuk menyusun rencana kerja tahun 2017 sebelum RPJMD direvisi dan sebelum disiapkan Rencana Strategis organisasi pemerintah daerah yang mengalami perubahan tersebut. Akibatnya, RPJMD Provinsi 2016-2021 yang sudah disusun sedemikian rupa dengan menghabiskan energi dan dana yang cukup besar menjadi kurang bermakna karena harus direvisi lagi sebelum dilaksana secara penuh.

Pelajaran yang dapat diambil dari kesenjangan peraturan ini adalah peraturan pedoman penyusunan RPJMD yang tidak relevan dan berubah dalam proses penyusunan telah mengakibat makna dan urgensi RPJMD yang disusun menjadi berkurang dan tindakan ini merupakan pemborosan bagi daerah karena penyusunan RPJMD harus melalui proses teknokratik dan politik. Kedua hal ini sebetulnya dapat dihindari, seandainya pemerintah, khususnya Kemendagari dapat melakukan penyesuaian terhadap pedoman penyusunan RPJMD dan menerbitkan lebih awal Peraturan Pemerintah yang terkait dengan perubahan organisasi pemerintah daerah.

.

Kesenjangan Antar Dokumen Perencanaan Daerah

Banyak dokumen perencanaan lain yang harus dipedomani dalam menyusun RPJMD provinsi seperti yang terlihat pada Gambar 1. Tetapi dokumen yang harus dipedomani tersebut juga mempunyai beberapa kesenjangan, sehingga rencana-rencana yang dituangkan dalam dokumen RPJMD untuk periode 2016-2021

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

menjadi tidak sejalan dan bahkan bertentangan antara satu dokumen dengan dokumen lainnya. Salah satu pedoman yang menganjal adalah peraturan yang terkait dengan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW). Untuk kasus Sumatera Barat, pengaturan tata ruang dan wilayah provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032.

Kesenjangan yang terjadi adalah peruntukan kawasan yang terdapat dalam RPJMD dengan yang terdapat Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2012 tersebut. Terdapatnya kesenjangan tersebut tidaklah mengherankan karena periode penyusunan dan legalisasi dokumen RTRW berbeda selama empat tahun. Tentu sudah banyak perkembangan dan dinamika baru yang sama sekali tidak terpikirkan atau terencanakan pada saat penyusunan RTRW. Sementara dokumen RPJMD 2016-2021 menangkap dan mengakomodasi perkembangan dinamika dan tuntutan yang berkembang setelah dokumen RTRW diterbitkan. Contohnya, dalam RPJMD Provinsi Sumatera Bara 2016-2021, Kawasan Mandeh, Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan kawasan pengembangan pariwisata, sementara dalam Perda Nomor 11 Tahun 2012 masih dinyatakan sebagai kawasan hutan lindung. Persoalan yang sama juga terdapat dalam rencana pengembangan lokasi pembangkit tenaga listrik air. Berdasarkan contoh-contoh yang dikemukakan ini, maka dapat dinyatakan bahwa rencana pengembangan daerah pariwisata yang dituangkan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 tidak akan efektif atau tidak dapat dilaksanakan sama sekali seandainya tidak dilakukan revisi terhadap peraturan daerah yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah tersebut. Investor dan instansi yang terkait dengan perizinan usaha tidak akan berani melakukan pelanggaran terhadap RTRW karena pelanggaran tersebut termasuk ranah hukum pidana.

Selanjutnya, merevisi peraturan daerah yang terkait dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) tidaklah pekerjaan mudah yang dapat dikerjakan dan disesuaikan dalam jangka waktu yang singkat. Proses yang dilalui untuk merevisi RTRW juga sama dengan proses teknokratik dan politik seperti penyusunan RPJMD. Oleh sebab itu kesenjangan antar dokumen perencanaan di daerah dapat dipastikan akan menghambat pelaksanaan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021.

Kesenjangan Jadwal Konsultasi Dengan Instansi Vertikal

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa waktu yang tersedia bagi masing-masing daerah untuk menyiapkan dokumen RPJMD sampai menjadi Peraturan Daerah adalah selama 6 bulan. Dalam waktu enam bulan ini masing-masing daerah (Bappeda) harus melalui proses konsultasi dengan instansi vertikal (Lihat Lampiran 1). Untuk penyusunan RPJMD provinsi perlu berkonsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas dan untuk RPJMD kabupaten/ kota perlu berkonsultasi dengan Bappeda masing-masing provinsi. Tujuan konsultasi vertikal ini adalah untuk sinkronisasi dan penyelarasan perencanaan seperti yang diperlihatkan pada Gambar 1 dimana RPJMD Provinsi harus merujuk RPJMN dan RPJMD Kabupaten/ Kota harus merujuk kepada RPJMD Provinsi. Selanjutnya konsultasi dengan instansi vertikal ini juga bertujuan untuk verifikasi kesesuaian antara dokumen RPJMD yang disusun dengan pedoman penyusunan dokumen yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Konsultasi ini sekurang-kurangnya dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada awal dan akhir proses penyusunan dokumen RPJMD.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Gambar 1

Hubungan RPJMD Provinsi Dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Lainnya

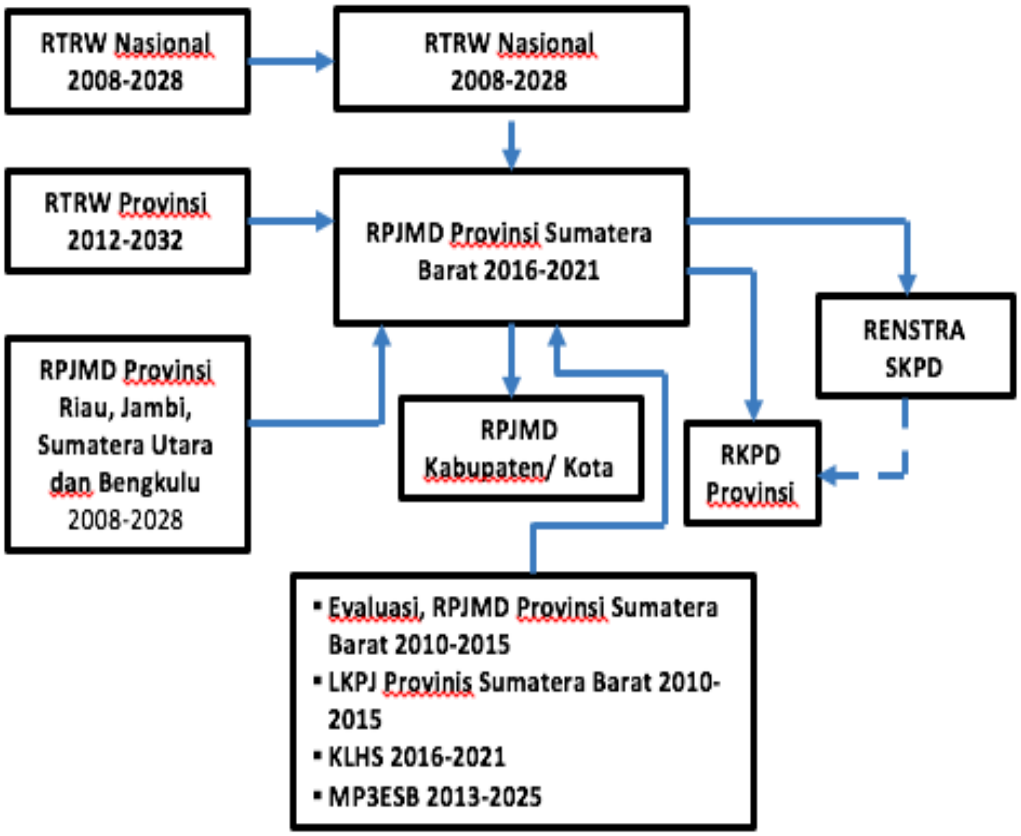

Sumber: Peraturan Derah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021

Tujuan baik dari konsultasi dengan instansi vertikal ini ternyata juga tidak mudah diwujudkan dalam menyusun RPJMD 2016-2021 karena terdapat kesenjangan waktu untuk melaksanakan konsultasi tersebut. Berdasarkan proses penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 dan juga provinsi lain paling tidak terdapat tiga kesenjangan atau benturan waktu untuk melaksanakan konsultasi dengan instansi vertikal. *Pertama*, draf RPJMD Provinsi pada umumnya siap pada bulan-bulan terakhir dari 6 bulan waktu yang tersedia. Masing-masing darah harus mengirim draf RPJMD untuk mendapatkan jadwal konsultasi sebelum batas akhir jangka waktu enam bulan penyusunan dokumen tersebut. Akibatnya, semua provinsi saling berusaha mendapatkan jadwal konsultasi lebih awal agar tidak terlambat dari batas akhir 6 bulan penyusunan RPJMD tersebut. Seandainya konsultasi dengan instansi vertikal ini terlambat dari batas akhir waktu 6 bulan tersebut, Kepala daerah dan DPRD akan mendapat sanksi, yaitu berupa tidak dibayarkan tunjangan sebagai kepala daerah untuk kepala daerah dan anggota dewan untuk anggota DPRD. Untuk menghindari sanksi ini, masing-masing Bappeda provinsi mengirim draf RPJMD lebih awal meskipun draf tersebut belum selesai secara sempurna.

Kedua, pada saat RPJMD Provinsi belum selesai, masing-masing daerah kabupaten dan kota yang kepala daerahnya sama-sama dilantik juga mengajukan draf untuk mendapatkan jadwal untuk konsultasi dengan Bappeda Provinsi. Untuk kasus Sumatera Barat, terdapat 12 daerah kabupaten dan kota yang mengajukan draf RPJMD dari daerah-daerah yang kepala daerahnya dilantik secara serentak. Konsultasi yang dilaksanakan pada waktu itu sudah dapat dipastikan tidak memberi hasil seperti yang diharapkan, karena terdapat kesenjangan waktu. Konsultasi dua belas RPJMD kabupaten dan kota dilaksanakan pada saat RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021 belum selesai dan belum mempunyai kekuatan hukum. Dalam situasi seperti ini dapat dibayangkan bagaimana kualitas konsultasi dan pembahasan RPJMD Kabupaten dan Kota oleh tim Bappeda

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Provinsi yang juga sedang sibuk menyelesaikan RPJMD Provinsi dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Pemerintah Provinsi 2017.

Tidak berbeda dengan perilaku Bappeda provinsi, masing-masing Bappeda kabupaten dan kota juga mengirim draf RPJMD yang telah disusun untuk mendapat jadwal konsultasi. Namun draf RPJMD 2016-2021 yang disampaikan oleh masing-masing Bappeda Kabupaten dan Kota kepada Bappeda Provinsi Sumatera Barat masih belum sesuai dengan harapan dan ketentuan pedoman penyusunan RPJMD tersebut. Dari penelusuran yang telah dilakukan terhadap 12 draf RPJMD Kabupaten dan Kota yang disampaikan ke Bappeda Provinsi Sumatera Barat pada bulan Juli 2016 ditemui dokumen yang dikirim banyak yang tidak lengkap sepertitabel yang kosong dan jumlah dan isi bab yang tidak lengkap.Kemudian target yang harus dicapai oleh masing-masing daerah daerah dan kabupaten belum dapat ditetapkan untuk mendukung sasaran target pembangunan Sumatera Barat dan nasional. Oleh sebab itu, berdasarkan pengalaman konsultasi dengan dengan instansi vertikal, terutama oleh Bappeda Kabupaten/ Kota dengan Bappeda Provinsi dapat dipastikan tidak mempunyai makna karena RPJMD Provinsi belum siap dan sangat terkesan hanya tentu memenuhi prosedur dan mengejar target waktu untuk menghindari sanksi keterlambatan.

Selanjutnya pada saat pemerintah Kabupaten menyelesaikan RPJMD, beberapa desa atau nagari di Sumatera Barat juga memerlukan RPJMD Kabupaten/ Kota sebagai rujukan dalam menyusun RPJM Desa/ Nagari. Berhubung RPJMD Kabupaten/ Kota belum siap pada saat diperlukan, maka rujukan yang digunakan untuk menyusun RPJM Desa/ Nagari juga menjadi tidak jelas. Dalam situasi yang demikian sudah dapat dipastikan bahwa penyusun RPJM Desa/ Nagari menghadapi kendala untuk mengakomodasi program prioritas provinsi, dan kabupaten/ kota. Akibatnya keterkaitan dokumen perencanaan daerah secara vertikal untuk mengakomodasi program prioritas nasional sulit untuk diwujudkan.

Kesenjangan Peserta dan Substansi Konsultasi Publik (*PublicHearing*)

Konsultasi publik adalah suatu keharusan dalam proses penyusunan dokumen RPJMD. Tujuannya adalah untuk mendapat masukan dari berbagai pemangku kepentingan dan sekaligus sosialisasi dari dokumen awal perencanaan yang telah disusun. Untuk kasus RPJMD 2016-2021 Provinsi Sumatera Barat terdapat 6 kali konsultasi publik (Lampiran 1). Konsultasi publik tersebut mulai dari menyerap masukan dari perantau dan tokoh masyarakat Minang di Jakarta. Kemudian dilanjutkan dengan mengundang pejabat daerah kabupaten dan kota, tokoh masyarakat, lembaga adat, agama dan organisasi profesi, termasuk wartawan. Dari rangkaian konsultasi publik yang demikian banyak tersebut sudah dapat dipastikan memerlukan biaya yang besar dan waktu yang lebih lama.

Namun terkait dengan konsultasi publik ini, pertanyaan yang muncul adalah apakah konsultasi publik ini bermanfaat dan apa kesenjangan yang terjadi. Untuk menjawab bermanfaat atau tidaknya konsultasi publik tersebut tentu tidak tepat hanya dengan mengambil kesimpulan dari satu kasus satu daerah, diperlukan studi mendalam dengan jumlah kasus lebih banyak. Tetapi dari kasus praktik penyusunan dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2011-2016 dan beberapa daerah kabupaten di Sumatera Barat dapat diungkapkan beberapa kesenjangan yang terjadi dalam pelaksanaan konsultasi publik. *Pertama*, peserta konsultasi publik masih belum semuanya memahami tentang pembagian kewenangan atau urusan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/ kota. Akibatnya tanggapan dan masukan yang diberikan sangat banyak yang tidak terkait langsung dengan kewenangan pemerintah provinsi dan untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Contohnya, tidak sedikit peserta yang meminta dilaksanakannya program dan kegiatan di daerah mereka berasal atau sesuai dengan kepentingan peserta. Fenomena ini juga termasuk dari anggota DPRD yang memperjuangkan aspirasi dari konstituen yang mereka wakili. Organisasi kemasyarakatan juga tidak kalah gesitnya memperjuangkan program dan kegiatan untuk keberlangsungan organisasinya. *Kedua*, tidak sedikit peserta yang meminta tambahan kegiatan yang terkait dengan kepentingannya.*Ketiga*, belum terdapat upaya untuk menyelaraskan program lintas instansi, sektoral dan daerah untuk mewujudkan pembangunan inklusif dari peserta yang hadir. Berdasarkan tiga contoh kasus ini, maka konsultasi publik belum banyak memberi kontribusi untuk perbaikan atau penyempurnaan dokumen RPJMD. Namun untuk tujuan sosialisasi RJMD dapat dikatakan konsultasi publik telah berhasil,

Kesenjangan Pemahaman Esensi Dokumen RPJMD

Kesenjangan esensi dokumen RPJMD ini terlihat pada saat pembahasan draf RPJMD dengan SKPD. Dari praktik pembahasan terdapat kesenjangan pandangan antara apa yang harus dicapai dengan apa yang bisa dicapai oleh SKPD. Roh dari perencanaan pembangunan adalah untuk mencapai perubahan atau perbaikan ke arah yang lebih baik dengan mengalokasikan sumberdaya yang dapat disediakan [7] [8]. Artinya *mindset* yang

harus tertanam dalam pemikiran SKPD adalah apa yang harus dicapai untuk perubahan atau perbaikan tingkat kesejahteraan atau kinerja instansi ke arah yang lebih baik.

Namun *mindset* SKPD cenderung terkooptasi dengankekhawatiran terhadap tidak tercapainya target yang ditetapkan atau terdapat keengganan untuk menerima target kinerja yang lebih tinggi untuk masing-masing SKPD. Dalam pikiran mereka sudah tertanam semenjak dari awal bahwa jika tidak tercapai target yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD, maka kinerja SKPDnya akan menjadi tidak baik. Oleh sebab itu kooptasi ketakutan terhadap target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD seharusnya tidak terjadi, seandainya*mindset* yang tertanam dalam pikiran pimpinan SKPD adalah "apa yang harus dicapai".

Target atau sasaran kinerja untuk SKPD setiap tahunnya merupakan target turunan dari visi dan misi kepala daerah yang harus dicapai. Seandainya*mindset* masing-masing SKPD hanya menginginkan target kinerja berdasarkan apa yang bisa dicapai, bukan berdasarkan apa yang harus dicapai, maka target atau sasaran kinerja yang ditetapkan oleh SKPD cenderung lebih rendah dari yang seharusnya untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah. Dengan kata lain dari perspektif SKPD target atau sasaran yang diinginkan adalah "target yang harus dicapai", tetapi lebih cenderung pada "target yang bisa mereka capai". Kesenjangan pemahaman tentang urgensi perencanaan pada tingkat SKPD sebagai unit pelaksana tentu akan berdampak kurang baik terhadap upaya pencapaian visi dan pelaksanaan misi kepala daerah. Apabila terget kinerja masing-masing SKPD ditetapkan rendah, maka pimpinan SKP tidak akan mempunyai kreatifitas dan inovasi untuk mewujudkan target kinerja yang lebih tinggi tersebut. Oleh sebab itu, *mindset*yang salah semenjak dari penyusunan RPJMD dikhawatirkan sebagai faktor yang tidak mendorong SKPD untuk berinovasi dan berjuang dengan gigih untuk mencapai target dan sasaran yang lebih tinggi.

Penutup

Aspek yang dibahas dalam tulisan ini adalah berdasarkan catatan dan pengalaman yang dilalui penulis selama terlibat dalam penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2021. Kebenaran dari informasi dan pembasahan untuk kasus Sumatera Barat dapat dikonfirmasi dari notulen rapat atau risalah dan konsultasi publik serta draf dari 12 RPJMD Kabupaten dan Kota yang disampaikan pada saat konsultasi dengan Bappeda Provinsi Sumatera Barat.

Pelajaran yang dapat diambil dari praktik penyusunan RPJMD ini adalah kesenjangan-kesenjangan dalam penyusunan RPJMD provinsi, kabupaten dan kota telah mengakibatkan dokumen perencanaan menjadi tidak bermakna sebelum dilaksanakan dan pengintegrasian serta sinkronisasi penyusunan dokumen perencanaan yang baik sangat sulit untuk diwujudkan. Kemudian perencanaan yang inklusif juga belum dapat diwujudkan dari rangkaian proses penyusunan RPJMD. Pembangunan inklusif akan sulit untuk dilaksanakan seandainya tidak dimulai dengan perencanaan yang inklusif. Oleh sebab itu, pemerintah pusat diharapkan segera melakukan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pedoman penyusunan RPJMD, sehingga tidak lagi terjadi berbagai kesenjangan yang terjadi pada saat penyusunan RPJMD 2016-2021 dan tidak mengulang kesalahan yang sama pada saat menyusun sebanyak 101 RPJMD setelah pelantikan kepala daerah berdasarkan PILKADA serentak pada tanggal 15 Februari 2015.

Selanjutnya kesalahan *mindset* di tataran SKPD tentang makna sebuah perencanaan perlu diluruskan, sehingga target kinerja yang tertera dalam RPJMD adalah target harus yang dicapai untuk mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah yang terpilih, bukan berdasarkan apa yang dapat dicapai oleh SKPD. Oleh sebab itu, sepanjang *mindset*SKPD masih bertumpu kepada target apa yang bisa dicapai, sepanjang itu pula pelaksanaan RPJMD tidak mencapai sasaran maksimal yang diharapkan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

LAMPIRAN I
Jadwal dan Kegiatan Penting Penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2016-2017

No	KEGIATAN	JADWAL	KETERANGAN
1	Perumusan Draf Rencana Awal RPJMD	Bulang Januari dan Minggu I Februari 2016	Terdapat 15 rangkaian kegiatan
2	Persiapan Penyusunan RPJMD	Minggu II dan III bulan Februari 2016	Terdapat 3 rangkaian kegiatan
3	Penyusunan Rancana Awal RPJMD	Minggu I-IV Bulan Maret dan Minggu I Bulan April	Terdapat 17 rangkaian kegiatan, diantaranya: a. Konsultasi dengan Dirjend Banda, Kemendagri dan Bappenas (3-5 Maret 2016) b. Konsultasi publik dengan perantau Minang di Jakarta (13 Maret 2016) c. Konsultasi publik dengan SKPD Provinsi (15 Maret 2016) d. Konsultasi publik dengan Bupati/ Wali Kota di Sumatera Barat (15 Maret 2016) e. Konsultasi publik dengan tokoh-tokoh masyarakat Sumatera Barat (17 Maret 2016) f. Konsultasi dengan Kemendagri untuk menyampaikan hasil konsultasi publik (21-22 Maret 2016) g. Pembahasan dan kesepakatan rancangan awal RPJMD (23-30 Maret 2016)
4	Penyusunan Rancangan RPJMD	Minggu II dan III bulan April 2016	Terdapat 4 kegiatan, mulai persiapan dan perumusan hasil Musrembang (21-22 April 2016)
5	Penyusunan Rancangan Akhir RPJMD	Bulan Mei – Minggu II bulan Juli 2016	Terdapat 5 rangkaian kegiatan, termasuk konsultasi dan pembahasan Rancangan Akhir RPJMD dengan Kemendagri (9 Juni 2016) dan penyempurnaan rancangan akhir RPJMD setelah konsultasi dengan Kemendagri
6	Penetapan Perda RPJMD	Bulan Juli – Agustus 2016	Pengesahan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021, tanggal 11 Agustus 2016 (batas akhir 6 bulan setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat)

Sumber: *Sekretariat Bappeda Provinsi Sumatera Barat (2016)*

DAFTAR PUSTAKA

[1] Taifur, WerryDarta (2016), "Manak Pelantikan Kepala Daerah Sentak", *Padang Ekspres*, (*http://www.m.padek.co/detail.php?news=53989*)
[2] Taifur, WerryDarta (2016), "Alice Bertanya Kepada Chersire", Padang Ekspres (*http://www.m.padek.co/detail.php?news=56240*)

[3] Undang-undang Nomor 23, Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah
[4] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54, Tahun 2010 Tentang Tata Cara Penyusunan, Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
[5] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat, Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021
[6] Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 11, Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat.
[7] Karthikeyan, C, et.al (2005), *Planningfor Development*, New Delhi: Authorspress
[8] El-Kholei, Ahmed (2015), Development of Planning Theory: Implications on Practice and Education,(*https://www.researchgate.net/publication/ 294342862_Development_ of_ Planning_ Theory_ Implications_on_Practice_and_Educatio*n)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TEMA A

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KEPARIWISATAAN DAN INDUSTRI KREATIF

STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA AIR TERJUN DLUNDUNG TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO

Anak Agung Sagung Alit Widiyastuty[1)] dan Gesang Hari[1)]

[1)] Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Universitas PGRI Adi Buana Surabaya

Email : adityawirayudha@yahoo.com

Naskah diterima :17 November 2016 Naskah direvisi : 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Mojokerto adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang memiliki sejumlah Objek wisata menarik, baik wisata yang berbasis keindahan alam maupun wisata sosial budaya. Perkembangan Industri wisata mengalami kemajuan yang sangat pesat dibangun oleh investor yang seharusnya menitikberatkan pada peningkatan peran masyarakat local dan kesejahteraannya. Namun fenomena yang terjadi saat ini banyak pengembangan industry pariwisata menimbulkan banyak permasalahan terutama masalah kerusakan lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan identifikasi potensi dan permasalahan kawasan wisata air Terjun Dlundung dan mengali persepsi wisatawan pengunjung kawasan Wisata Air Terjun Dlundung sehingga dapat memberikan arahan strategi pengembangan kawasan objek wisata alam air terjun Dlundung di kecamatan Trawas kabupaten Mojokerto. Penelitian ini merupakan penelitian Deskriptif Kualitatif dengan pendekatan analisis Potensi daya Tarik kawasan dan juga analisis persepsi wisatawan. Arahan strategis pengembangan berupa pengambilan keputusan menggunakan analisis SWOT. Hasil observasi ini menunjukkan bahwa obyek wisata Air Terjun Dlundung memiliki potensi daya tarik bagi wisatawan karena pemandangan alamnya yang masih alami dan juga budaya masyarakat , aksesbilitas yang mudah dijangkau, dan fasilitas pendukung lainnya seperti kios, khas makanan, tempat infomasi, area parkir yang cukup menarik. Selain potensi, terdapat beberapa permasalahan diantaranya belum adanya angkutan umum, kurangnya fasilitas di obyek wisata, dan promosi dan informasi yang kurang luas. Analisis SWOT yang dihasilkan strategis pengembangan yang dapat dikembangkan terletak pada kuandran tiga dengan arahan strategis pengembangan berupa strategis stabilisasi. Pengadaan kerjasama antara investor, pemerintah local dan masyarakat sekitar kawasan wisata air terjun Dlundung.

Kata Kunci : *Potensi Kawasan Wisata, Daya Tarik Kawasan, Persepsi Wisatawan, dan Strategi Pengembangan,*

PENDAHULUAN

Rekreasi atau yang berarti aktivitas wisata, umumnya bertujuan untuk membebaskan diri dari kegiatan rutinitas yang merupakan salah satu kebutuhan kehidupan manusia [1]. Kegiatan dan aktivitas wisata dapat diartikan juga sebagai suatu kegiatan yang tujuan utamanya adalah mendapatkan hiburan keluar dari lingkungan asalnya untuk membebaskan diri dari rutinitas sehari – hari. Pembangunan kepariwisataan sekarang ini menjadi trend kepariwisataan berbasis lingkungan dalam dua dasawarsa terakhir. Hampir setiap daerah wisata mengembangkan model pariwisata berbasis lingkungan ini, karena dianggap mempunyai dimensi yang luas, mampu memberdayakan berbagai unsur dan komponen – komponen dalam pembangunan serta yang bersifat jangka pendek, menengah dan panjang dan berkelanjutan [2]. Pengembangan daerah tujuan wisata didasari potensi kawasan wisata yang akan dikembangkan, baik pengembangan potensi fisik maupun non fisik. Faktor yang dapat digunakan untuk pengukuran pengembangan potensi daerah tujuan wisata, misalnya Geografi daerah, iklim, geomorfologi, hidrologi, lahan, aneka flora & fauna, budaya dan adat istiadat, kegiatan masyarakat dan sebagainya. Pada aspek dan faktor lain, pengembangan pariwisata harus di sesuaikan dengan morfologi dan manusia yang menetap di sekitar lokasi wisata untuk memperoleh keserasian dan keberlanjutan pengembangan di lingkungan lokasi wisata [3]

Pulau Jawa terbagi menjadi 6 (enam) Provinsi, yaitu Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Banten, dan Provinsi DI Yogyakarta. Provinsi Jawa Timur

merupakan salah satu provinsi di Pulau Jawa mempunyailokasi wisata alam yang pontensial dan menarik untuk dikembangkan, salah satu kabupaten yang menjadi unggulan wisata alam adalah Kabupaten Mojokerto.

Kabupaten Mojokerto Provinsi Jawa Timur, menurut RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 [4] Kabupaten ini merupakan kawasan andalan nasional GERBANGKERTOSUSILO yang bergerak disektor unggulan pertanian, perikanan, industri, dan pariwisata. Selain Lokasi dan kawasannya yang strategis (Gerbangkertosusilo), Kabupaten Mojokerto juga karena memiliki aneka ragam obyek dan daya tarik wisata baik wisata alam, religi dan cagar budaya. Kecamatan Trawas merupakan salah satu kecamatan di Mojokerto memiliki luas wilayah kurang lebih 29,4 km2 dengan ketinggian 700 meter diatas permukaan laut. Kecamatan ini sangat berpotensi di bidang pariwisata terutama di bidang penginapan dan wisata alamnya. Kecamatan Trawas dalamRTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032 yang berisi tentang iperuntukannya untuk Taman Hutan Raya dan Kawasan Cagar Budaya dan pendidikan Ilmu Pengetahuan. Kawasan obyek wisata yang menjadi andalan terdapat di Kecamatan Trawas, yaitu berupa Kawasan wisata Air Terjun Dlundung yang terletak di Desa Ketapanrame.

Kurang optimalnya penanganan Kawasan Obyek Wisata Air Terjun Dlundung, menyebabkan potensi yang ada tidak diekspos secara maksimal.Berkenan dengan hal ini dilakukan penelitian tentang " Strategi Pengembangan Kawasan Obyek Wisata Air Terjun Dlundung Di Kecamatan Trawas Kabupaten Mojokerto"
Kawasan Wisata Air Terjun Dlundung memiliki Prospek pengembangan ke depan sehingga perlu adanya arahan strategis yang tepat dalam pengelolaannya. Strategi pengembangan kawasan merupakan bagian dari perencanaan pariwisata yang berkelanjutan. Perencanaan meliputi strategi sebagaiimplementasi kebijakan yang merupakan prediksi dan oleh karenanya memerlukan beberapa perkiraan persepsi akan masa depan Strategi yang diharapkan dalam pengembangan ini merupakan respon yang berkelanjutan maupun adaptif terhadap kekuatan, kelemahan peluang serta ancaman yang dapat mempengaruhi organisasi [5]

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui potensi dan permasalahan kawasan obyek wisata Air Terjun Dlundung, Mengetahui persepsi wisatawan tentang kawasan obyek wisatadan Arahan Pengembangannya.

METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan Deskriptif Kualitatif dengan lokasi studi kasus di kawasan wisata Air Terjun Dlundung Trawas Mojokerto sebagai sumber data observasi yang digunakan untuk objek penelitian, mengidentifikasi, menjelaskan dan menguraikan secara komprehensif dan menyeluruh dari aspek sarana maupun prasarana dan juga kebijakan Lokal

Pengumpulan data terbagi menjadi :Data primer adalah informasi data dari hasil sumber-sumber yang merupakan kegiatan observasi langsung pada wilayah kajian. Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan sebar kuisoner, wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi terkait dengan kondisi sarana dan prasarana dilokasi obyek wisata, dan persepsi wisatawan diobyek wisata Air Terjun Dlundung; Data sekunder merupakan pengambilan data secara tidak langsung yang dilakukan pada instansi-instansi terkait rencana pengembangan kawasan, data jumlah wisatawan, dan kegiatan promosi di obyek wisata Air Terjun Dlundung.

Teknik analisis yang digunakan adalah :a) Reduksi Data, b) penyajian data, c) verifikasi/penarikan kesimpulan. Teknik pengambilan keputusan berupa arahan strategis pengembangan kawasan wisata menggunakan analisis SWOT. Reduksi Data, Penyajian Data digunakan untukl analisis Deskriptif kualitatif permasalahan dan potensi yang ada di wilayah studi berdasarkan kondisi eksisiting yang ada di obyek wisata Air Terjun Dlundung seperti daya tarik, aksesbilitas dan fasilitas pendukung serta persepsi wisatawan yang berkunjung di obyek wisata Air Terjun Dlundung berdasarkan hasil kuisoner yang disebarkan ke wisatawan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

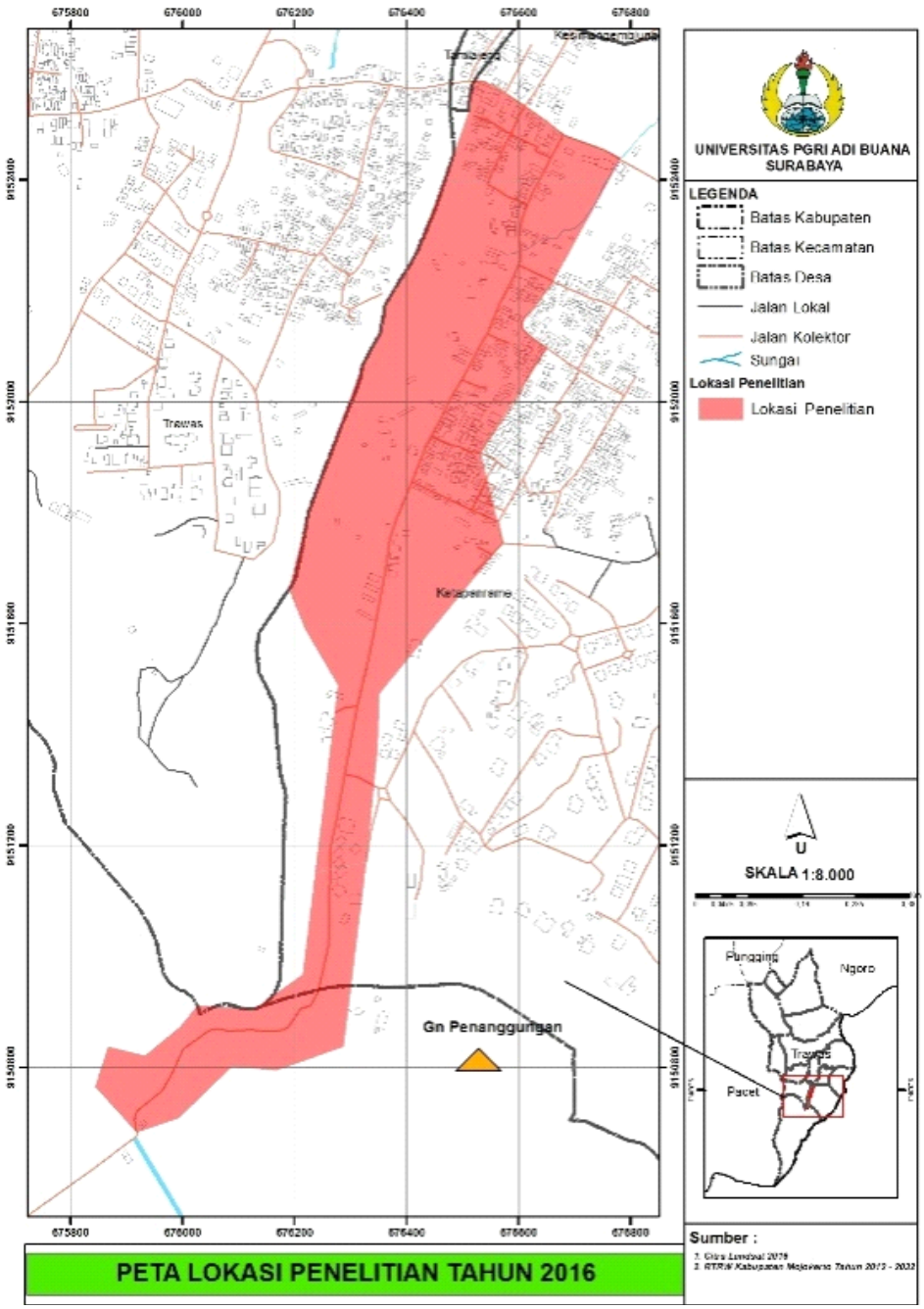

Gambar 1. Peta lokasi penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Potensi dan Permasalahan di Obyek Wisata Air Terjun Dlundung

Potensi dan permasalahan di obyek wisata Air Terjun Dlundung meliputi daya tarik, jalan masuk, dan sarana serta prasarana wisata. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No 10 tahun 2009 [6] daya tarik dibagi menjadi 2 macam yaitu daya tarik alam yang mengutamakan keindahan alam, dan daya tarik buatan.

Obyek wisata Air Terjun Dlundung memiliki berbagai macam daya tarik meliputi wisata alam Air Terjun Dlundung, camping ground, wahana outbound, kawasan villa, dan atraksi budaya. Akses jalan sangat penting dalam industry pariwisata, jika obyek wisata tersebut tidak didukung akses jalan yang baik, maka daya Tarik wisata tersebut akan susah di jangkau. [7]

Hasil analisis yang diperoleh untuk pengembangan dan penataan obyek wisata Air Terjun Dlundung meliputi analisis daya tarik, analisis aksesbilitas, dan analisis fasilitas pendukung pada objek wisata Air Terjun

Dlundung. Daya tarik dan Obyek wisata menjadi pertimbangan pertama dalam melakukan perjalanan. Tanpa keberadaan obyek dan daya tarik wisata tidak akan ditemui pelayanan penunjang kepariwisataan lainnya [8]

Pada analisis daya tarik diperoleh hasil untuk lebih melihatkan atraksi budaya yang dimiliki daerah sekitar dengan menyediakan tempat khusus untuk pertunjukan atraksi budaya tersebut. Daya Tarik berupa budaya seperti atraksi Seni Bantengan, Ludruk dan Wayang Kulit. Daya Tarik berupa wisata kuliner seperti Onde – onde, Kerupuk Rambak, Sambel Wader, Sate Bekicot/keong dan kerupuk Upil.

Pada analisis aksesbilitas (gambar 2) berdasarkan amatan, akses jalan beraspal tetapi sebagian sudah mengalami kerusakan dengan lebar ± 5 meter. Tidak tersedianya Angkutan umum mengakibatkan para wisata menggunakan kendaraan pribadi untuk menjangkau kawasan.

Sedangkan pada analisis fasilitas pendukung pemerintah dan pengelola obyek wisata Air Terjun Dlundung (Gambar 3) supaya menambah dan memperbaiki fasilitas-fasilitas pada obyek wisata tersebut seperti toilet, tempat souvenir, pedopo serta memperbanyak papan informasi dan mengembangkan media promosi.

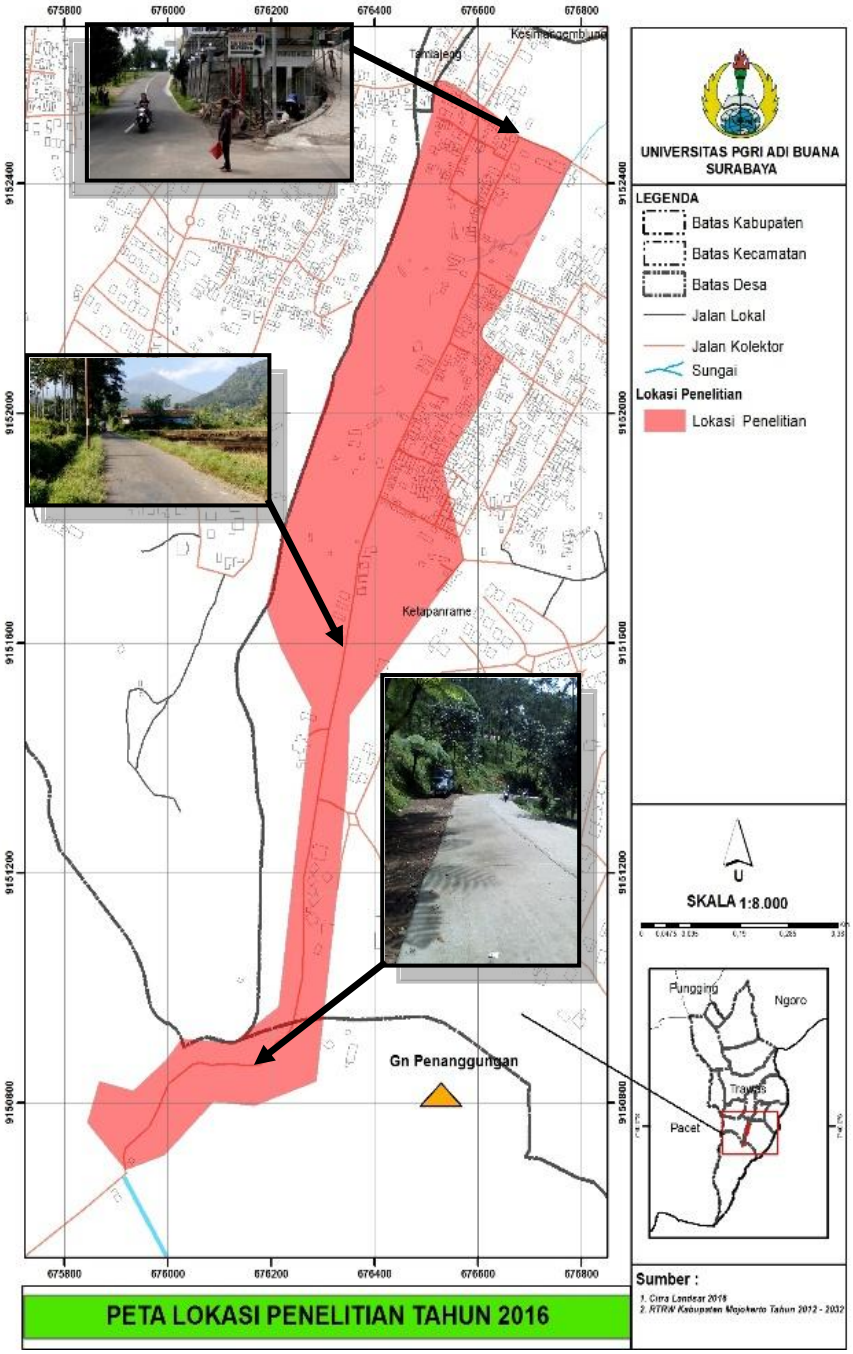

Gambar 2. Mapping Aksesbilitas

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

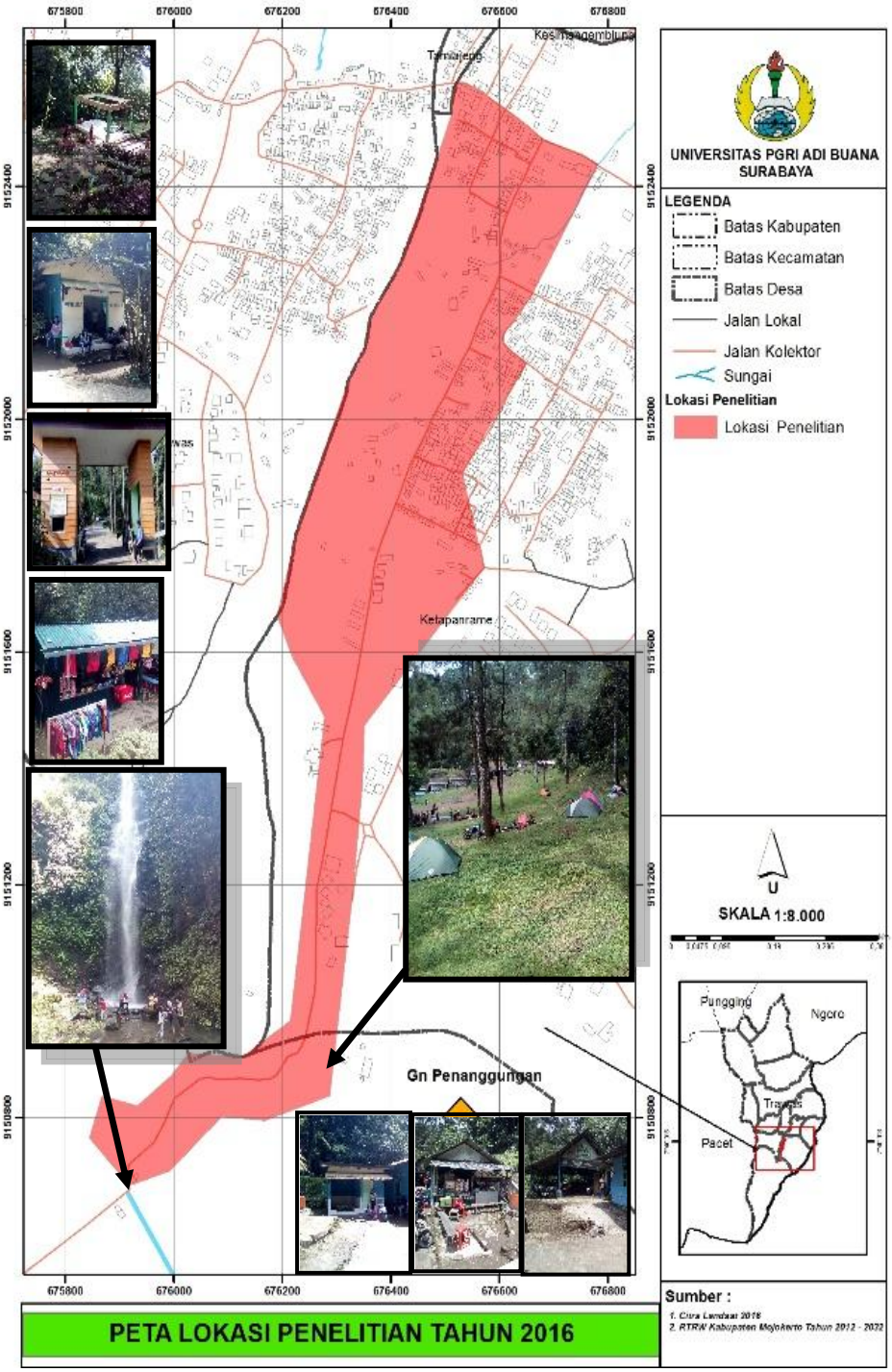

Gambar 3. Fasilitas dan Daya Tarik kawasan Wisata

1) Persepsi Wisatawan Terhadap Obyek Wisata Air Terjun Dlundung

Persepsi adalah suatu proses aktifitas seseorang dalam memberikan penilaian, kesan, pendapat, merasakan, dan menginterprestasikan sesuatu berdasarkan dari sumber yang didapat ([9]Poerwanto, 2004). Dari hasil persepsi wisatawan diperoleh suatu hasil yang dapat menjadi masukan untuk pengembangan dan penataan obyek wisata Air Terjun Dlundung. Analisis persepsi yang digunakan pada tahap ini adalah analisis persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata, aksesbilitas, kondisi fasilitas pendukung, dan promosi obyek wisata. Pada analisis persepsi wisatawan tentang daya tarik wisata diperoleh aspek kenyamanan dan ketenangan serta pemandangan alam mendapatkan bobot paling tinggi dari wisatawan, sedangkan aspek pameran pergelaran bantengan dan penataan ruang memiliki bobot paling rendah karena belum adanya tempat pertunjukan untuk pergelaran bantengan dan kurangnya penataan ruang pada objek wisata Air Terjun Dlundung tersebut.

ISBN : 978-602-73463-1-4

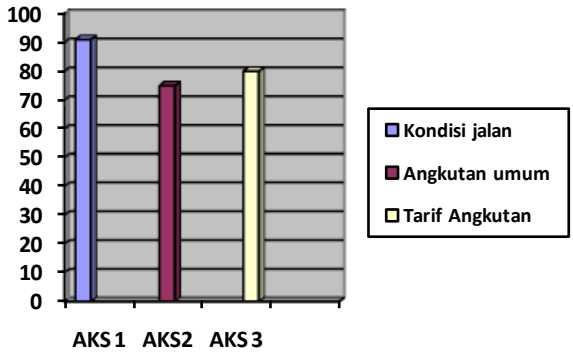

Gambar 4. Bobot Persepsi wisatawan tentang kondisi Daya Tarik

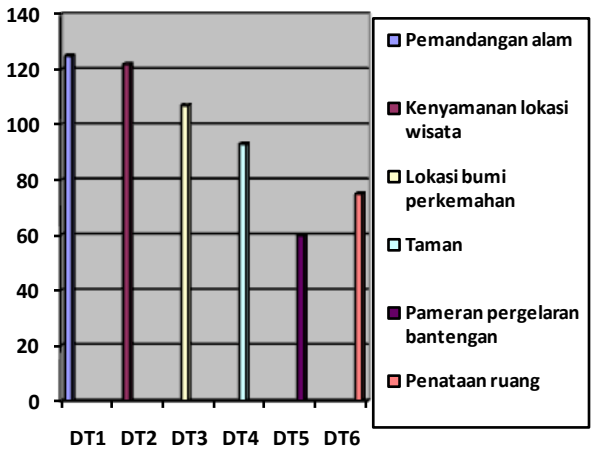

Gambar 5. Bobot Persepsi wisatawan tentang Aksesbilitas obyek wisata

Keterangan :
DT 1 : Daya Tarik 1 (Pemandangan Alam), DT 2 : Daya Tarik 2 (Kenyamanan Lokasi Wisata), DT 3 : (Lokasi Bumi Perkemahan), DT 4 : Daya Tarik 4 (Taman), DT 5 : Daya Tarik 5 (Pameran Pergelaran Bantengan), DT 6 : Daya Tarik 6 (Penataan Ruang).
AKS 1 : Aksesbilitas 1 (Kondisi Jalan), AKS 2 : Aksesbilitas 2 (Angkutan Umum), AKS 3 : Aksesbilitas 3 (Tarif Angkutan).

Pada analisis persepsi wisatawan tentang aksesbilitas obyek wisata diperoleh aspek angkutan umum yang melewati lokasi wisata mendapatkan bobot paling rendah, sedangkan kondisi jalan menuju lokasi obyek wisata mendapatkan bobot paling tinggi karena kondisi jalan di lokasi sudah bagus dan beraspal.

Pada analisis persepsi wisatawan tentang kondisi fasilitas pendukung diperoleh aspek kondisi area parkir memiliki bobot paling tinggi yang artinya aspek tersebut sudah mencukupi kebutuhan wisatawan, sedangkan aspek tempat souvenir dan tempat atraksi memilki bobot paling rendah itu tandanya lokasi wisata ini perlu pengembangan dan penataan karena kedua aspek tersebut merupakan faktor penunjang kemajuan suatu obyek wisata.

Analisis persepsi wisatawan yang terakhir yaitu tentang promosi obyek wisata. Pada analisis ini diperoleh kegiatan promosi yang ada di obyek wisata Air Terjun ini sudah baik dan banyak dari wisatawan yang mengingikan agar kawasan ini menjadi destinasi wisata para wisatawan nasional maupun mancanegara dengan nilai 51%, namun lebih di tingkatkan lagi karena kegiatan promosi menjadi faktor penting pada suatu wisata.

1) Strategis Pengembangan kawasan obyek wisata Air Terjun Dlundung

World Tourism Organization (WTO) yang dikutif Kamino (2015) dalam Gunawan [4]) menggariskan kebijakan strategi pengembangan pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) ada tiga hal, yaitu berkelanjutan ekonomi, sosial dan budaya, sertaalam. Konsep ini sangat sesuai dengan pembangunan pariwisata di Indonesia yang mensinergikan sektor pariwisata dengan keindahan alam dan keanekaragaman sosial budaya.Dalam merumuskan strategi pengembangan dan penataan kawasan obyek wisata air terjun dlundung, menggunakan teknik analisis SWOT.

Analisis TOSW adalah metode untuk mengidentifikasi serta mengevaluasi *Threats, Opportunities, Strengths, dan Weaknesses* dalam permasalahan. Teknik ini pertama kali dikemukanan oleh Albert Humphrey pada tahun 1960-an sampai dengan 1970-an, memimpin proyek riset di Universitas Stanford [10]

Berdasarkan hasil dari analisis SWOT diperoleh *strategi stabilisasi / Turn Around* pada kuadran tiga dengan nilai x = -0,1 dan y = 0,25. Maka strategi yang dapat dikembangkan adalah mengkonsep strategi dengan meminimalkan kelemahan untuk memanfaatkan peluangyang ada [11]. antara lain dengan mengadakan kerjasama antar pemerintah, masyarakat sekitar, swasta dan untuk pengembangan untuk pengembangan obyek wisata Air Terjun Dlundung dengan menyediakan angkutan umum serta memperbaiki dan menambah fasilitas di objek wisata terutama tempat souvenir dan pujasera sebagai tempat wisata kuliner, tempat atraksi, toilet, serta ruang pendopo untuk atraksi budaya.

Strategis – strategis yang akan digunakan dalam rangka pengembangan kawasan Wisata Alam Air Terjun Dlundung Trawas kabupaten Mojokerto dengan pendekatan matriks SWOT adalah :

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

1. Strategi S – O

Strategi ini dibuat dengan memanfaatkan kekuatan pada obyek wisata sertamenggunakan peluang yang ada sebesar – besarnya :

a. Mengembangkan potensi local berupa sosial budaya dan aneka makanan serta alam menjadi suatu atraksi yang diagendakan tiap bulan dalam paket wisata.
b. Mengadakan paket wisata dan memberikan souvenir dan aneka kerajinan yang khas daerah mojokerto kepada para pengunjung kawasan wisata.
c. Memberlakukan pembayaran tiket sekali masuk dengan penawaran paket wisata sosial dan budaya sertaaneka kuliner juga keindahan alam dan kenyamanan serta keasrian.
d. Adanya pengawasan dan pengendalian jumlah wisatawan yang masuk agar kerusakan lingkungan akibat perilaku wisatawan dapat dihindari.
e. Menarik masyarakat diluar desa Ketapanrame untuk mengisi acara bulanan atau tahunan berupa atraksi wisata seperti perkemahan dan lomba lintas alam di lokasi wisata.

2. Strategis S – T

Ini adalah strategis dalam menggunakan kekuatan yang dimiliku utk mengatasi ancaman :

a. Melakukan edukasi melalui sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep wisata alam berkelanjutan.
b. Menjadikan agenda wisata sebagai alternative penambahan income masyarakat yang dapat dirangkaikan dengan wisata budaya dan modern yang ada di kota Mojokerto.
c. Melakukan pengelolaan manajemen yang terpadu antara apparat pemerintahan dengan masyarakat sekitar kawasan wisata yang lebih baik untuk berberlanjutan kawasan wisata air terjun Dlundung.
d. Penyediaan pemandu wisata, asuransi kesehatan dan keselamatan, spot - spot yang indah, tempat penyimpanan barang dan sebagainya.
e. Pemetaan Kawasan Kawasan berbahaya.
f. Melakukan penanaman pohon di sekitar lokasi longsor dengan menanam tanaman tanaman pengikat tanah yang menarik dan memperindah lokasi kawasan wisata.

3. Strategis W – O

Strategi memanfaatan peluang yang ada dengan meminimalisir kelemahan yang ada :

a. Mengadakan regulasiantara pemerintahan, masyarakat, dan praktisi.
b. Menyediakan lahan perkemahan untuk wisatawan yang ingin melakukan kegiatan berkemah untuk menambah atraksi wisata yang ditawarkan.
c. Melakukan promosi wisata yang menarik melalui media online maupun offline dengan penawaran penawaran yang lebih bervariasi sehingga dapat memacu wisatawan yang datang bukan hanya pada akhir pekan tetapi melakukan kunjungan merata setiap harinya.
d. Menyediakan fasilitas utama dan pendukung kawasan wisata alam seperti pondok peristirahatan, pendopo, panggung pertunjukkan, ruang ganti beserta toilet, sarana peribadatan, pujasera serta menyediakan jalur tracking yang bisa digunakan oleh wisata keluarga.
e. Melakukan pengelolaan manajemen secara professional dan terstruktur.
f. Melakukan kegiatan pembersihan terhadap coretan – coretan dan sampah yang mengganggu estetika lingkungan kawasan wisata serta membuat papan himbauan yang bersifat mendidik.
g. Melakukan pendekatan dan sosialisasi kepada tokoh – tokoh masyarakat sekitar kawasan wisata mengenai pengelolaan wisata alam yang berkelanjutan sehingga dapat menguntungkan yang dirasakan tidak hanya untuk pengelolah kawasan wisata tetapi juga bagi masyarakat.

4. Strategis W – T

Strategi ini didasari pada kegiatan yang bersifat bertahan atau defensive dengan berusaha meminimalisir kelemahan yang ada serta menghindari ancaman :

a. Pembentukan Kader Lingkungan.
b. Meningkatkan promosi baik online maupun offline serta penataan dengan rancangan yang menarik di kawasan wisata air terjun Dlundung.
c. Menambah minat pengunjung dan daya tarik wisata dengan melakukan pengembangan kawasan agar sesuai dengan konsep wisata keluarga.
d. Pembuatan lokasi Camping Ground di tempat yang interaktif dana man jauh dari bencana alam.
e. Pengelolaan manajemen yang memerlukan kepandaian khusus tentang pariwisata.

ISBN : 978-602-73463-1-4

KESIMPULAN

Investasi keindahan alam sebagai kawasan wisata alam, akhir – akhir ini menjadi trend keberadaannya, sehingga perlu disikapi secara arif dan professional melalui arahan – arahan yang tegas dan bijaksana dari para pengambil keputusan (pemerintah) dan kesadaran yang tinggi dari para pengelola kawasan wisata agar fungsi ekologis dan ekonomis tetap terjaga dan terjamin. Penetapan harga pada kawasan wisata harus melibatkan pemerintah karena hal ini berdampak luas terhadap kelestarian lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Subsidi berupa dana harga masuk maupun bantuan masih sangat diperlukan untuk menarik investasi di wisata alam Indonesia. Dalam hal pengembangan wisata alam yang terpenting harus mampu mengangkat kesejahteraan masyarakat sekitar [12]

Simpulan yang diperoleh: 1. Potensi yang ada di kawasan adalah potensi alam dan juga potensi budaya masyarakat berupa kesenian dan kuliner, sedangkan permasalahan yang ada adalah sarana dan prasarana yang belum cukup dalam menunjang aktivitas wisata.2. berdasarkan persepsi wisatawan tentang keinginan pengembangan potensi dan sarana dan prasarana kawasan wisata mendapatkan nilai yang tinggi yaitu 51%, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengembangan strategi yang lebih baik pada kawasan wisata air terjun Dlundung Trawas Mojokerto. 3. Berdasarkan hasil analisis SWOT, Kawasan Wisata air terjun Dlundung berada pada Kuadran 3 matriks SWOT yang merupakan posisi turn around / stabilisasi dimana kawasan wisata Air Terjun Dlundung dalam strategisnya memanfaatkan peluang yang ada dengan maksimal dengan meminimalkan kelemahan yang ada. Posisi ini memungkinkan kawasan wisata air terjun Dlundung untuk diterapkannya strategis stabilisasi dan regulasi dengan memperbaiki manajemen pengelolaan dan pemerintah daerah.

UCAPAN TERIMA KASIH

Data lapangan yang digunakan dalamkajian ini berasal dari kegiatan observasi yang dibiayai oleh peneliti sendiri dengan menggunakan dana dari TPP sertifikasi dosen. Penulis mengucapkan terima kasihkepada seluruh pihak manajemen pengelola kawasan wisata air Terjun Dlundung yang membantu banyak pada pelaksanaan survey lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Attar, M., Hakim, L., & Yanuwiadi, B. 2013. Analisis Potensi dan Arahan Strategis Kebijakan Pengembangan Dewa Ekowisata di Kecamtan Bumiaji, Kota Batu. Jurnal of Indonesian Tourism and Development Studies, 1(2).
[2] Dalilla, F., Siregar, S. H., & Tarumun, S. 2013. Strategi Pengembangan Ekowisata Kawasan Mempura Kabupaten Siak. Jurnal Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Riau, 226–240.
[3] Evitin, E., & Widodo, B. S. 2016. Strategi Pengembangan Potensi Pariwisata Di Kabupaten Pacitan (Studi Kasus Pengembangan Potensi Wisata Goa Gong). Jurnal Swara Bhumi, 3(3), 109–115.
[4] RTRW Kabupaten Mojokerto Tahun 2012-2032
[5] Lucyanti, S., Hendrarto, B., & Izzati, M. 2014. Strategi Pengembangan Obyek Wisata Bumi Perkemahan Palutungan Berdasarkan Analisis Daya Dukung Lingkungan Wisata di Taman Nasional Gunung Ciremai Kabupaten Kuningan Propinsi Jawa Barat. Jurnal Ekosains, VI(1), 33–46.
[6] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan
[7] Oka A. Yoeti. 2008. Perencanaan Pariwisata Terpadu : Penerbit Angkasa
[8] Purwanto, S., Syaufina, L., & Gunawan, A. 2014. Kajian Potensi dan Daya Dukung Taman Wisata Alam Bukit Kelam Untuk Strategi Pengembangan Ekowosata. Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan, 4(2), 119–125.
[9] Gunawan, I. M. 2016. Pengembangan Agrowisata Untuk kemandirian Ekonomi dan Pelestarian Budaya di Desa Kerta, Payangan Gianyar. Jurnal Jumpa, 3(1), 156–174.
[10] https://id.Wikipedia.org/wiki/Analisis SWOT.
[11] Rangkuti, Freddy. 2003. Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis. Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama , Jakarta
[12] Nasution, R. A., Purwoko, A., & Hartini, K. S. 2015. Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Silimalima di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jurnal Fakultas Kehutanan, (1), 1–7.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MODEL PENGELOLAAN PARIWISATA KOTA DENPASAR

I Gusti Putu Anindya Putra

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Faktultas Teknik
Universitas Hindu Indonesia – Denpasar

e-mail : igpanindya@gmail.com

Naskah diterima : 23 Maret 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Denpasar sebagai ibukota Provinsi Bali, bila dilihat dari luasan wilayah administrasi sangatlah kecil dibanding status yang disandangnya. Sebagai ibukota Provinsi sarat dengan sederet fungsi baik sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, distribusi barang dan jasa, termasuk didalamnya adalah pengembangan pariwisata.Disisi lain Denpasar memiliki sejarah yang cukup panjang yang bermula dari desa-desa adat yang kemudian menjadi pusat kerajaan, ibukota Kabupaten sampai menjadi ibukota Provinsi. Dengan demikian Denpasar memiliki potensi budaya yang berkembang sangat beragam.Dalam jejak perjalanan sejarahnya, Denpasar sejak awal sudah dikenal sebagai destinasi yang banyak dikunjungi para wisatawan, terutama seniman manca negara.Sejarah panjang pariwisata di Bali, khususnya di Denpasar banyak memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi Bali, namun masih belum menyentuh pada peranan lebih besar bagi masyarakat Bali itu sendiri. Karena kebijakan pariwisata masih berkisar pada destinasi, pemasaran, industri/sarana serta kelembagaan dan kemitraan pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata belum menyentuh bagaimana peranan masyarakat lokal mengelola potensinya yang justru akan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pengelolaan pariwisata kota (urban tourism) yang memberikan peran secara proporsional kepada masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan potensi setempat secara setara dan berkeadilan.Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan perbandingan substantif kualitatif berdasarkan kajian teori, peraturan perundang-undangan, kewenangan, kebijakan dan gejala yang terjadi di tengah masyarakat.Hasil yang akan dicapai adalah (1) Kebijakan pengembangan pariwisata kota Denpasar berbasis pada budaya unggulan; (2) Model pengelolaan dengan memberikan peran kepada masyarakat secara proporsional; (3) konsep model perjalanan wisata kota (city tour) dengan moda angkutan.

***Kata Kunci** : budaya unggul, pengelolaan, pariwisata.*

PENDAHULUAN

Kota Denpasar bertumbuh dan berkembang dalam kurun waktu yang lama sesuai dengan apresiasi jamannya. Berangkat dari desa-desa tradisional dengan ciri khas struktur dan pola ruangnya, berkembang menjadi pusat-pusat kerajaan sampai pada jaman penjajahan dan kemerdekaan.Perjalanan panjangnya dicirikan pula dengan masuknya penduduk dari berbagai suku, bahkan bangsa asing memberikan ciri akulturasi budaya yang khas Kota Denpasar.Dalam jejak perjalanan sejarahnya, Denpasar sejak awal sudah dikenal sebagai destinasi yang banyak dikunjungi para wisatawan, terutama seniman manca negara.Kesemuanya banyak

memberikan dampak dalam pertumbuhan ekonomi, namun masih belum menyentuh pada peranan lebih besar bagi masyarakat itu sendiri. Karena kebijakan pariwisata masih berkisar pada destinasi, pemasaran, industri/sarana serta kelembagaan dan kemitraan pariwisata, sehingga pengembangan pariwisata belum menyentuh bagaimana peranan masyarakat lokal mengelola potensinya yang justru akan memberikan dampak terhadap perekonomian masyarakat.

Kebudayaan yang hidup dan berkembang menjadi salah satu yang diminati/daya tarik untuk berkunjung ke Bali. Kecenderungan ini merupakan konsekuensi logis pemanfaatan aspek-aspek kebudayaan sebagai obyek dan atraksi wisata. Termasuk di dalamnya adalah wahana Pusaka Budaya yang menjadi daya tarik dan sasaran kunjungan para wisatawan.Pusaka Budaya berkembang sangat beragam. Secara kategori dibedakan atas tiga kategori utama. Kategori Pusaka Budaya benda (*tangible*) meliputi aneka bangunan bernilai arkeologis, sejarah sampai pemukiman urban dengan arsitektur yang khas. Kategori kedua tentang Pusaka Tak Benda (*intangible*) mencakup filosofi *Tri hita Karana,* konsep *desa-kala-patra*, konsep *jagadhita* sampai dengan nilai-nilai dasar tentang etika, estetika, spiritualita, solidarita. Kategori ketiga tentang *behavior and institution* meliputi: Lembaga *banjar, desa pekraman, subak* dan juga sikap *jengah, taksu, seni,* dan aneka ritual *Tumpek* yang mempresentasikan apresiasi warga tentang flora, fauna, teknologi logam, cinta kasih dan ilmu pengetahuan[1].

Dengan mengedepankan '*branding concept*' kreatif berbasis budaya lokal, Kota Denpasar membangkitkan produk-produk lokal untuk dapat bersaing dengan produk-produk luar, sekaligus mendorong masyarakat untuk menggali kembali aneka jenis produk lokal, melakukan inovasi dan kreatifitas terkait dengan rasa, kualitas, keragaman, tampilan, dan promosi.Sudah saatnya *wisata heritage* yang terintegrasi kedalam Denpasar City Tour diprogramkan secara makin atraktif, holistik dan terus diperbaharui, sehingga disatu pihak berperan bagi sosialisasi Denpasar sebagai Kota Pusaka dan dipihak lain melelehkan fenomena monoton dalam mengembangkan atraksi wisata di Kota Denpasar.

Untuk mengaktivasi tema-tema diatas, dilakukan penelitian ini melalui kajian terhadap program wisata kota dalam 1 hari (*one day City Tours/ODCT*). ODCT menghubungkan simpul-simpul potensi unggulan Kota Denpasar yang tersebar diseluruh wilayah kota ke dalam beberapa kawasan (simpul) yang terkoneksi satu sama lain.

Dalam kepentingan tersebut diatas, perlu disusun Model Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar yang diharapkan memberikan landasan untuk mengaktivasi potensi destinasi secara tematik dan produk unggulannya, standarisasi kualitas kepariwisataan di Denpasar, model pengelolaan dan landasan hukumnya.Penelitian ini bertujuan untuk membangun model pengelolaan pariwisata kota (*urban tourism*) yang memberikan peran secara proporsional kepada masyarakat, sehingga dapat mengoptimalkan potensi setempat secara setara dan berkeadilan.

Hasil yang akan dicapai adalah (1) Kebijakan pengembangan pariwisata kota Denpasar berbasis pada budaya unggulan; (2) Model pengelolaan dengan memberikan peran kepada masyarakat secara proporsional; (3) konsep model perjalanan wisata kota (city tour) dengan moda angkutan.

METODE PENELITIAN

Metode analisis yang digunakan adalah pendekatan perbandingan substantif kualitatif berdasarkan kajian teori, peraturan perundang-undangan, kewenangan, kebijakan dan gejala yang terjadi di tengah masyarakat.Deskriptif, dilakukan lebih banyak melalui literatur dan tulisan-tulisan yang temanya sesuai dengan pokok bahasan dengan pengayaan melalui pengamatan dan pengalaman penulis.Komparatif, dengan melakukan komparasi antara indikator-indikator yang tertulis dalam tema-tema sesuai dengan kebijakan pembangunan, tata kelola, komparasi antara rumusan indikator dengan penelusuran modal dasar budaya unggulan.Mensinergikan antara budaya unggul dengan indikator-indikator, sehingga diharapkan akan didapat rumusan awal hal-hal yang perlu dilakukan didalam menghadapi tantangan pariwisata kota masa depan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 POSISI KOTA DENPASAR DALAM KONTEKS PARIWISATA.

Dalam konteks ini, Denpasar menerima dampak paling besar dan kompleks, mulai dari distorsi budaya, kependudukan, ketersesakan, lingkungan, lalulintas, keamanan dan pembiayaan, bahkan branding.Dilematis dan memerlukan perhatian ekstra, karena sebagai titik sentral, keberagaman penduduk pendatang yang semakin besar membawa keragaman budaya, menyebabkan keterdesakan masyarakat dalam berkompetisi, ketersesakan ruang menimbulkan lingkungan kumuh dan berdampak terhadap kualitas lingkungan.

Sebagai ibukota Provinsi Bali yang sekaligus juga menjadi pusat perdagangan dan jasa, pendidikan, kesehatan dan pusat pemerintahan, Denpasar harus memantapkan posisinya sebagai Branding Bali dengan jalan mengokohkan budaya Bali sebagai landasan segala gerak dan langkah pembangunannya, sebagai pondasi menegakkan jati diri masyarakat Bali.Denpasar harus menjadi etalase budaya Bali, menjadi jendela adat dan tradisi Bali dengan menggali kembali, mengelola dengan teknologi kekinian budaya Bali, serta mempromosikannya.

Menjadikan masyarakat Kota Denpasar yang majemuk untuk tetap menghormati keragaman budaya dengan tetap menjaga budaya Bali, dengan cara re-intepretasi, re-integrasi, dan adaptasi terhadap kapasitas (*capabilities*) dan dukungan (*supporting*) untuk mendapatkan kemanfaatan bagi masyarakat (*public value*), yang kemudian kesemuanya menjadi landasan didalam setiap gerak dan langkah pembangunan.Persoalannya kemudian, ternyata didalam membangun kotanya, Denpasar tidak bisa sendirian, banyak faktor luar yang membutuhkan sinkronisasi dan kebersamaan, dari sisi kewenangan, didalam Kota Denpasar terdapat beberapa bagian yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, akselerasi dan sinkronisasi konsep, kebijakan, strategi dan program pembangunan menjadi sangat penting, supaya tidak terjadi 'tabrakan' atau bertentangan satu sama lain, harus ada pemahaman yang sama dan kesepahaman didalam menjalankannya.

Banyak contoh yang terjadi saat ini akibat perbedaan pemahaman dan ketidak sepahaman antara satu dengan lainnya, polemik berkepanjangan, substansi permasalahan tidak terurai dengan baik, dan ini bisa menjadi salah satu pemicu penyimpangan/bergesernya arah pembangunan, dan masih banyak lagi persoalan-persoalan yang terjadi atau akan terjadi apabila tidak ada pengendalian yang baik.

3.2 KOTA DENPASAR DALAM KONTEKS PARIWISATA.

3.2.2 Denpasar dalam dimensi masa depan Pariwisata.

Dari hal ini tampak jelas bahwa arah pembangunan Denpasar yang paling tepat adalah yang mengacu pada kreativitas dan budaya. Karena itulah saya menggiatkan pembangunan Monumen Maya, bukan monumen fisik kota ini. Monumen maya itu ya sumber daya manusianya, heritage kebudayaannya serta kantong-kantong kreativitasnya [2].

Sangat jelas bahwa untuk dapat menggerakkan pembangunan di Kota Denpasar, maka setiap penduduk di Kota Denpasar harus menjadi Monumen Maya, menjadi manusia unggul, dan tidak ada jalan lain untuk menjadi manusia unggul adalah kreatif, sedangkan kreatif itu sendiri sangat dinamis, oleh karena itu harus mampu melakukan re-intepretasi, re-integrasi dan adaptasi baik terhadap budaya lokal maupun budaya dari luar, terseleksi secara terukur dan menjadi identitas masyarakat urban kota denpasar. Intinya adalah bahwa masyarakat diharapkan untuk memliki semangat yang kreatif, terampil, berani mencoba, dan bertanggung jawab.

Kreativitas itu multi-dimensi sifatnya. Pemikiran Barat menyatakan bahwa salah satu dimensi kreativitas adalah economic creativity. Kreativitas ekonomi itu berdiri di atas tiga pilar penting, yaitu seni budaya, teknologi dan entrepreneurship atau ke-wirausahaan. Tampak jelas bahwa ada hubungan imbal-balik antara dimensi ekonomi, kreativitas, dan seni [2].

Teknologi menjadi faktor pendorong dalam membangun mindset baru bagi masyarakat Kota Denpasar, melalui teknologi terkini maka keberadaan insan-insan kreatif dan produk budaya unggul dapat dikenal oleh

dunia luar.Kedepan, paling tidak ada 4 isu yang harus dijawab oleh Kota Denpasar, yakni (1) bagaimana membangun masyarakat menjadi insan kreatif dan potensi budaya unggul menjadi komoditi pariwisata secara selektif; (2) bagaimana mem-*branding* potensi budaya unggul Kota Denpasar sebagai ikon Bali; (3) bagaimana mengembangkan kluster-kluster destinasi pariwisata secara tematik dengan infrastruktur yang memadai; (4) bagaimana mengelola pariwisata Kota Denpasar dengan manajemen profesional[3].

3.2.2 Potensi Pariwisata Denpasar berbasis Budaya Unggul.

Hasil penelitian mutakhir tahun 2009 oleh antropolog I Wayan Geriya, dkk menemukan, bahwa kegiatan kota kreatif perlu menjaga tiga prinsip keseimbangan. Keseimbangan antara pemuliaan jiwa kebudayaan yang menjadi inspirasi dengan pencarian raga yang berorientasi pasar dan materi; keseimbangan antara spirit revitalisasi untuk pelestarian dan semangat *entrepreneur* yang beorientasi bisnis; dan keseimbangan filosofi integrasi yang memuliakan unitas dengan wawasan multikultur yang menghormati keragaman.

Penelitian juga menginventori **66 unsur budaya unggulan** dan **44 unsur budaya potensial sebagai basis andalan kota kreatif**. Diantara 66 unsur budaya ungulan, 33,3% berorientasi spiritual-kultural, 16,7% berorientasi ekonomi-material, dan 50,0% berorientasi ganda, spiritual-kultural dan ekonomi-material [4].

Apabila dikaitkan dengan 16 komponen ekonomi kreatif yang ditetapkan di Indonesia, maka terlihat betapa 'kaya'nya Kota Denpasar dengan bekal keunikan budayanya.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kota Denpasar pada dasarnya memiliki potensi unggulan yang berasal dari budaya lokal, terungkap pula bahwa potensi tersebut memiliki muatan ekonomi yang cukup besar. Potensi inilah yang nantinya menjadi spesifik Kota Denpasar dan akan menjadi identitas Denpasar, menjadi branding Denpasar.

Pengelompokkan jenis dan sebaran potensi budaya unggulan tersebut akan membentuk kluster-kluster destinasi wisata yang tematik. Kluster-kluster destinasi wisata ini juga merupakan potensi yang dapat mendorong pergerakan waistawan dalam kota, apabila dapat dikelola secara profesional.

3.4 PENGEMBANGAN WISATA KOTA DENPASAR.

3.4.1 Konsep pengembangan

Landasan penyusunan konsep pengembangan pariwisata Kota Denpasar adalah Potensi Budaya Unggulan yang dimilikinya. Dasar pertimbangannya adalah kebijakan, pilihan-pilihan potensi yang akan dijadikan komoditi pariwisata, model pengelolaan, apakah keseluruhan manajemen kepariwisataan akan dikelola oleh Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Pariwisata, ataukah disebar terkoneksi (secara manajemen terbagi ke dalam segmen-segmen tertentu, tetapi masih dalam satu pengendali).

Hal-hal yang perlu dilakukan dalam penyusunan konsep pengembangan Pariwisata Kota Denpasar, antara lain :

1. *Collecting and Structuring*, data-data yang dimiliki, terutama 66 unsur potensi budaya unggulan, baik terhadap jenis, jumlah, dan sebarannya, data ini akan mengelompokkan potensi budaya unggulan berdasarkan dominasi jenis dan jumlah didalam sebuah kawasan. Kelompok-kelompok ini akan menunjukkan tema-tema kawasan, lokasi kawasan, luasan kawasan, dan aksesibilitas kawasan.
2. Identifikasi potensi tiap kawasan, memilah dan mengelompokkan secara lebih rinci potensi kawasan, menetapkan jenis dan sifat potensi kawasan.
3. Analisis spesifikasi tiap kawasan, menetapkan tema-tema kawasan, analisis potensi, menetapkan program pengembangan, analisis potensi organisasi lokal, analisis model pengelolaan kawasan.
4. Analisis struktur berdasarkan kawasan yang sudah terbentuk dengan tema-tema kawasannya, menganalisa hubungan '*link and match*' antar kawasan dengan potensi unggulannya.
5. Menetapkan Struktur Pengembangan Pariwisata Kota Denpasar dengan menyusun skala prioritas program dan menyusun model pengelolaan pariwisata berdasarkan hasil kajian tiap kawasan.
6. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3.4.2 Pengelompokan dan Tematik

Apabila melihat kondisi kekinian, sebenarnya sudah terlihat adanya kawasan yang sudah mulai dikembangkan, sedang tumbuh menuju pengelolaan yang terintegrasi dan ada pula yang sudah ditetapkan namun belum tertangani dengan baik. Salah satu contoh :

Kawasan Subak Sembung di wilayah Peguyangan Kaja, sementara dikelola oleh Tim yang dibentuk melalui Subak dan Badan LH, Tema Kawasan sementara adalah Lingkungan Hidup, Pertanian Kota (*Urban Farming*), dengan model transport didalam kawasan adalah jalan kaki dan naik sepeda. Fasilitas yang ada, jalan setapak, wantilan dan parkir. Potensi budaya unggulan yang ada di kawasan tersebut masih belum ditangani secara terintegrasi, manajemen masih bersifat internal, belum ada upaya bersama untuk mempromosikannya. Sebagai langkah awal sudah memadai, tinggal pengembangan potensi budaya unggul, integrasi pengelolaan, dan fasilitas yang harus dikembangkan secara terpadu.

Kawasan Sanur, sebenarnya kawasan ini terbilang sudah maju, potensi budaya uggul sudah tergarap dengan baik, terintegrasi (walau lokal), fasilitas sudah memadai, tema yang muncul sastra, seni dan budaya, alam pantai, dan kreatif. Untuk jenis pengelolaan bahkan sudah terbentuk Yayasan Pembangunan Sanur (YPS), persoalannya tinggal menetapkan alternatif jalur-jalur wisata yang variatif dan menarik.

Kawasan Pusat Kota, secara Kawasan sebenarnya sudah ditetapkan sebagai *Heritage Old Town* (Kota Tua), potensi heritage-nya cukup banyak dalam bentuk kawasan, bangun-bangunan dan ruang terbuka, seperti kawasan Jl. Gajahmada, Jl. Sulawesi, Jl. Kartini, Bangunan Bali Hotel, Kompleks Puri, Pasar, dsb, termasuk Lapangan Puputan Badung (I Gst Made Agung), Setra Badung, Pura Desa/Puseh, Tambangan Badung, dsb.

Kawasan-kawasan lain yang masih belum tergarap, dapat dibangkitkan melalui partisipasi masyarakat. Masyarakat dilibatkan dalam menetapkan Tema Kawasan, produk-produk budaya unggul yang akan dikembangkan, penyusunan rencana zonasi dan model pengelolaannya.

3.4.3 Fasilitas Penunjang.

Fasilitas penunjang dimaksud meliputi (1) fisik seperti restoran, souvenir shop, kantor, km/wc, dsb tergantung kesepakatan bersama; (2) tenaga/jasa seperti pengelola dan guide internal (lokal); (3) pengaturan rute perjalanan dengan titik-titik singgah; (4) skala perjalanan/moda angkutan.Fungsi-fungsi penunjang fisik seperti restoran, souvebir shop, kantor, km/wc, dsb ditempatkan pada lokasi/zona tersendiri, kecuali pada titik-titik singgah dilengkapi minimal km/wc umum dan tempat beristirahat.Untuk kawasan yang sudah tergarap, fasilitas ini sudah tersedia dan dipandang perlu untuk meningkatkan kelengkapannya. Namun pada kawasan-kawasan yang belum tergarap, perlu perencanaan zonasi untuk fasilitas penunjang dengan jenis, besaran dan luasannya.

Fasilitas jasa/tenaga baik pengelola maupun pemandu internal, secara potensi sebenarnya tidak kekurangan, tinggal pelatihan untuk memberikan wawasan dan substansi potensi. Seka Teruna Teruni adalah potensi sdm unggulan, baik sebagai pengelola maupun sebagai pemandu internal, dan untuk menjaga kesinambungan generasi, dapat dilakukan kursus dalam setiap tahunnya dengan bantuan kepada kegiatan kepemudaan.

Pengaturan rute perjalanan menjadi sangat penting dan akan menjadi daya tarik tersendiri dengan dilengkapi titik-titik singgah. Titik singgah dapat berperan sebagai area pemotretan disamping tempat beristirahat, sehingga lokasinya juga mempertimbangkan sudut/angel yang baik untuk pengambilan foto dan dapat menjangkau seluruh kawasan. Rute ini dapat dibangun dalam beberapa alternatif, sehingga dapat menjadi pilihan-pilihan yang menarik dengan variasi potensi yang berbeda.

Skala perjalanan/moda angkutan akan menjadi spesifik dari masing-masing kawasan, karena disesuaikan dengan Tema dan rute. Seperti di Kawasan Subak Sembung, secara internal bisa dengan kendaraan sepeda atau joging. Sedangkan di Kawasan Sanur bisa dengan sepeda pada beberapa rute, bisa joging atau kombinasi keduanya.Sedangkan di Kawasan Pusat Kota dengan angkutan khusus yang disiapkan untuk itu, dengan pengaturan rute, titik singgah dan jam layanannya/shift trayek.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Fasilitas penunjang ini harusnya dirancang lebih awal, termasuk perencanaan luasan kawasan dan zonasi, karena kondisi obyektif di lapangan sangat bervariasi. Pada kawasan yang sudah tersedia, belum tentu dapat mendukung karena tidak pada lokasi yang diharapkan, dilain pihak pada kawasan yang belum tersedia, dihadapkan pada lahan pada lokasi yang dirancang.

3.4.4 Pengelolaan.

Sementara ini tata kelola kepariwisataan Kota Denpasar berfokus pada bidang-bidang (a) promosi pariwisata yang mencakup analisa pasar, penyuluhan dan informasi; (b) obyek dan daya tarik wisata yang meliputi rekreasi dan hiburan umum serta obyek dan atraksi wisata; (c) usaha jasa dan sarana wisata yang meliputi usaha jasa dan akomodasi pariwisata serta usaha rumah makan, bar dan jasa boga.Dipahami bahwa pengelolaan pariwisata di daerah masih saling terkait dengan pemerintah atasan, baik itu provinsi maupun pemerintah pusat, dengan pembagian kewenangan yang 'samar' atau saling mengisi kalau tidak boleh dikatakan saling tumpang tindih.

Diperlukan strategi dan kebijakan pengelolaan pariwisata, yang meliputi antara lain (a) strategi dan kebijakan yang mengatur alur kunjungan wisatawan dikaitkan dengan destinasi wisata, produk unggulan setempat; (b) strategi dan kebijakan yang mengatur model pengelolaan pariwisata setempat; (c) strategi dan kebijakan yang mengatur dan melindungi sdm setempat yang mampu dan profesional dalam mengelola pariwisata setempat; (d) strategi dan kebijakan yang mengatur model pengelolaan pariwisata, sehingga jelas lingkup pengelolaan yang dilaksanakan oleh pemerintah, serta pembagiannya mana yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Denpasar dituntut untuk mengembangkan model pengelolaan pariwisata secara kreatif dan inovatif sesuai dengan kewenangannya. Strategi dan kebijakan yang ditempuh antara lain (a) menata kembali destinasi wisata secara tematik dengan membagi seluruh bagian wilayah kota dalam kawasan-kawasan dengan spesifikasi unggulan masing-masing kawasan; (b) mengatur pola transportasi antar kawasan dan internal kawasan secara terpadu; (c) mengarahkan tupoksi Dinas Pariwisata Kota Denpasar pada strategi dan kebijakan pengelolaan, pembinaan masyarakat, manajemen data, dan promosi. Kalaupun toh masih terlibat didalam pengelolaan, hanya terbatas pada aset-aset pemerintah dan publik serta manajemen retribusi; (d) mengintegrasikan kegiatan-kegiatan di dalam kota baik yang insidentil maupun reguler kedalam kalender pariwisata; (e) mengelola potensi sdm lokal sebagai insan kreatif pariwisata Kota Denpasar yang unggul.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan.

1. Kebijakan pengembangan pariwisata kota Denpasar berbasis pada budaya unggulan.
   Diarahkan pada pengembangan kawasan-kawasan untuk menjadi destinasi sesuai potensi unggulan di kawasan tersebut dalam bentuk kluster-kluster. Meliputi (a) tema kawasan, produk unggulan, rute dan moda pilihan, standard kualitas dan pengelolaan; (b) standard kualitas destinasi, produk, pelayanan, sdm dan marketing; (c) bentuk organisasi, mekanisme kerja, lingkup kewenangan dan tanggung jawab, hak dan kewajiban, lingkup pelayanan dan pungutan; (d) landasan hukum dibidang destinasi, produk unggulan, standarisasi kualitas pariwisata, pengelolaan, pelayanan dan pungutan.
2. Model pengelolaan dengan memberikan peran kepada masyarakat secara proporsional.
   Pemerintah Kota (Dinas Pariwisata) memberikan regulasi dan tata laksana, mengelola dan mengendalikan secara menyeluruh, terutama dalam kaitannya dengan kualitas, baik produk, kenyamanan kawasan, promosi dan pelayanan.
   Penyelenggaraan pengelolaan, secara proporsional dilaksanakan dengan memberikan kepada pihak ketiga maupun kelompok masyarakat setempat;
3. konsep model perjalanan wisata kota (city tour) dengan moda angkutan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Model perjaanan wisata dibagi menjadi dua kerangka besar (a) dari titik sentral kearah masing-masing destinasi dikendalikan oleh Pemerintah (Dinas Pariwisata) dengan jenis moda roda-4 kapasitas maksimum 10 orang; (b) didalam kawasan disesuaikan dengan tema dan kondisi lapangan, dengan alternatif pilihan kedaraan roda-4, sepeda, atau jalan kaki.

4.2 Saran

1. Mengelompokkan potensi budaya unggulan berdasarkan dominasi jenis dan jumlah didalam sebuah kawasan, serta menetapkan jenis dan sifat potensi kawasan
2. Menetapkan program pengembangan, analisis potensi organisasi lokal, analisis model pengelolaan kawasan
3. Menganalisa hubungan '*link and match*' antar kawasan dengan potensi unggulannya.
4. Menetapkan Struktur Pengembangan Pariwisata Kota Denpasar dengan menyusun skala prioritas program dan menyusun model pengelolaan pariwisata berdasarkan hasil kajian tiap kawasan
5. Menyiapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Pariwisata Kota Denpasar

DAFTAR PUSTAKA.

[1] Geriya, I Wayan (ed), Pusaka Budaya : representasi ragam pusaka dan tantangan konservasi di Kota Denpasar, Penerbit Bappeda Kota Denpasar, 2010.

[2] Anindya Putra, I Gusti Putu (ed); Menyongsong Kota Masa Depan : Tantangan Denpasar menuju Kota Metropolitan (sebuah Bunga Rampai), Penerbit Bappeda Kota Denpasar, 2015.

[3] Ardhana, I Ketut, Prof. Dr. Phil, MA (ed); Denpasar Smart Heritage City, Sinergi Budaya Lokal, Nasional, Universal, Penerbit Bappeda Kota Denpasar, 2014.

[4] Geriya, I Wayan dan Tim; Kebudayaan Unggul : Inventori unsur unggulan sebagai basis Kota Denpasar Kreatif, Penerbit Bappeda Kota Denpasar, 2009.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MEMBANGUN KAMPUNG KREATIF MELALUI KOLABORASI MAHASISWA DENGAN MASYARAKAT: KASUS: KAWASAN BALUBUR-TAMANSARI KOTA BANDUNG

Asep Yudi Permana[1)], Nana Sumarna[2)], Karto Wijaya[3)]

[1)]Teknik Arsitektur FPTK UPI
[2)]Teknik Sipil FPTK UPI
[3)]Teknik Arsitektur Universitas Kebangsaan

E-mail: yudi.perman@upi.edu

Naskah diterima :13 Maret 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 22 Maret 2017

ABSTRAK

Kota Bandung sebagai kota pendidikan sudah dimulai sejak berdirinya Hollandsch Inlandsche Kweekschool disingkat HIK48 yang didirikan tanggal 13 Mei 1868 oleh R. H. Muhammad Musa, Penghulu Kepala di Limbangan Garut dan didukung K.F Holle seorang humanis Belanda sahabat R.H. Muhammad Musa. Sementara itu kehidupan pendidikan tinggi mulai tumbuh sejak didirikannya Technische Hoogeschool (disingkat THS) tahun 1920 sebagai cikal bakal berdirinya Insitut Teknologi Bandung (ITB), di mana saat itu merupakan bagian dari Politik Etis Pemerintah Belanda kepada wilayah jajahannya.Salah satu kawasan pendidikan tertua di kota Bandung yang sampai sekarang masih tetap menjadi kawasan penyangga pendidikan tinggi adalah kawasan Balubur-Taman sari, karena kawasan ini tidak bisa terlepas dari perkembangan ITB. Tujuan penelitian ini adalah mendapatkan gambaran perubahan setting ruang yang terjadi berdasarkan fenomena lapangan sebagai akibat terjadinya aglomerasi fungsi pondokan mahasiswa dengan permukiman warga. Pondokan mahasiswa merupakan bagian dari struktur kampung itu sendiri dalam artian pondokan ini bersatu (inherent) dengan permukiman masyarakat.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan grounded theory. Fokus penelitian ditujukan pada fenomena diskrit di lapangan sebagai upaya untuk pengungkapan makna yang melatar belakangi terbentuknya bangun pengetahuan yang dihasilkan. Penelitian ini tidak menggunakan kerangka teoritik, namun adanya konsistensi di dalam melihat suatu fenomena diskrit dari hasil grand tourdi lapangan. Fenomena tersebut diangkat melalui proses snowball sampling. Proses pengumpulan data dab analisis dilakukan secara bersama-sama dalam satu rentang waktu penelitian dan iteratif (berulang-ulang). Penelitian ini menghasilkan bangun pengetahuan berupa proses kolaborasi antara mahasiswa sebagai pendatang (Migrant student) dengan masyarakat setempat yang menghasilkan sebuah kampong kreatif.

***Kata Kunci**: Pondokan mahasiswa,Kolaborasi, Migrant student*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk perkotaan di negara berkembang mengalami peningkatan yang sangat pesat. Gejala ini sebagai dampak dari arus pertukaran dan kondisi saling mempengaruhi diberbagai dimensi, baik pada aspek ekonomi, sosial, politik, budaya, dan teknologi. Perkembangan ini mengakibatkan pertumbuhan dan perkembangan penduduk di kota-kota besar meningkat pesat, di manadi dunia ketiga rata-rata pertumbuhan penduduk perkotaan mencapai 32% dalam 30 tahun terakhir, ini sama dengan dua kali lipat dari angka semula yang hanya 16%.Pertumbuhan ini didukung oleh adanya peningkatan eksplorasi alam, pesatnya migrasi dan perubahan-perubahan pada masyarakat perdesaan.[1]Salah satu penyumbang pertumbuhan penduduk perkotaan di negara berkembang adalah adanya m*igrant student*.Kondisi ini mengakibatkan permukiman sekitar kampus menjadi padat dan banyak rumah tinggal beralih fungsi menjadi pondokan mahasiswa.

Fenomena rumah sebagai pondokan mahasiswa di Kota Bandung khususnya di wilayah Bandung Utara terlihat mulai dari Kawasan Ciumbuleuit, Balubur Tamansari, sampai dengan Kawasan Braga (kurang lebih 80%) rumah yang ada dikontrakan baik sebagian maupun seluruhnya, meskipun ruang tinggalnya sangat terbatas. Dengan segala keterbatasan yang ada, warga setempat berusaha memenuhi kebutuhan akan tempat tinggal bagi mahasiswa, karyawan, maupun pendatang lainnya. Dalam kondisi terbatas dan minim, cara pemondok

beradaptasi dengan menyiasati ruang tinggalnya sangat menarik untuk diteliti dan dikaji lebih lanjut untuk dapat dipahami fenomenanya.

Kawasan Balubur Tamansari yang terletak di utara Kota Bandung pada awal perkembangannya (masa penjajahan Balanda) merupakan salah satu tempat rekreasi dan beristirahat Tuan Menier dan None Belanda. Berawal dari dibukanya *Koninklijk Instituut voor Hoger Technische Onderwijs in Nederlandsche Indie* (*Technische Hoogeschool Bandung*) sebagai cikal bakal dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 1920.[2] Sejak saat itu mulai dibangun fasilitas *Technische Hogeschool* Bandung dan merangsang pertumbuhan permukiman di Kawasan Balubur Tamansari dan sekitarnya. Seiring dengan perkembangan Kota Bandung kawasan ini berubah menjadi kampung kota padat penduduk.

Salah satu fenomena yang terjadi di Kawasan Balubur Tamansari ini adalah terjadinya aglomerasi fungsi pondokan mahasiswa dengan permukiman warga, sehingga pondokan mahasiswa sebagai bagian dari daerah permukiman penduduk. Pondokan mahasiswa merupakan bagian dari struktur kampung itu sendiri dalam artian pondokan ini bersatu (*inherent*) dengan permukiman masyarakat. Aktivitas yang terjadi tidak bisa dipisahkan satu dengan lainnya.

Membahas fenomena ruang pondokan mahasiswa di Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung tidak bisa lepas dari pembahasan kawasan tersebut. Kawasan Balubur Tamansari merupakan salah satu dari 6 (enam) kawasan kampung kota kreatif binaan Pemerintah Kota Bandung. Kekuatan dari kampung ini adalah adanya peran aktif mahasiswa dalam membentuk struktur ruang sosial kampung untuk mempertahankan kekuatan nilai-nilai lokal dalam keberagaman masyarakatnya. Dengan adanya komunitas mahasiswa di kawasan ini memberikan dampak positif, sehingga lingkungan yang terbentuk menjadi humanis dengan ditandai adanya kantung-kantung ruang bersama (seperti: lapangan sebagai ruang bersama yang digunakan untuk kegiatan kolaborasi Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah, dan Warga Masyarakat). Toleransi penggunaan ruang secara bersama dalam rumah tinggal sangat mewarnai kehidupan bermasyarakat di kawasan ini. Dengan segala keterbatasan luas lahan yang dimiliki, mereka berusaha untuk memenuhi kebutuhan akan pondokan mahasiswa. Dalam keterbatasan dan minimnya luas lahan, bagaimana masyarakat dan mahasiswa berusaha beradaptasi dengan melakukan kolaborasi untuk menyiasati ruang tinggalnya.

Kota sebagai simpul dari kehidupan masyarakat merupakan proses aglomerasi dari ragam manusia dan obyek pendukung lainnya. Sebagai konsekuensi dari keanekaragaman yang ada, maka akan memunculkan berbagai kebutuhan dari keinginan-keinginan yang berbeda dalam konteks berinteraksi antar masyarakat. Ruang baik dalam makna sempit sebagai ruangan maupun makna luas sebagai kawasan dan kota, digunakan untuk wadah dan tempat saling berinteraksi antar masyarakat pengguna dan juga sebagai bagian dari kehidupan sosial. Ruang dalam arti "kota" merupakan identitas dari kehidupan bermasyarakat warganya. Oleh karena itu sebuah kota akan mengalami "siklus kehidupan" dengan tumbuh dan berkembang secara terus menerus. Semakin tua umur sebuah kota, maka morfologi kotanya akan semakin banyak mengandung *layer-layer* berupa *urban tissues* sebagai tempat terartikulasikannya beragam fenomena kota sepanjang sejarah pertumbuhan dan perkembangannya.[3][4]*Urban tissues layers* tersebut akan membentuk beragam konfigurasi pada bentukan fisik kota.

Pertumbuhan dan perkembangan fisik ini tidak berdiri sendiri tetapi selalu berjalan bersama dengan perubahan dan perkembangan secara non fisik. Seperti dijelaskan Rapoport[5]proses transformasi pada sebuah kota terjadi akibat adanya perubahan aktivitas pengguna sebagai satu konsekuensi dari perubahan nilai-nilai, sosial, kultur, dan cara pandang dari masyarakatnya. Dengan demikian konfigurasi bentuk fisik kota akan selalu mengalami perubahan, tidak akan selesai dan tidak akan pernah berhenti selama kota tersebut dihuni.Akan tetapi pertumbuhan kota-kota di Indonesia tidak mengalami perubahan yang drastis seperti yang pernah terjadi di Eropa, hal ini terjadi karena didasarkan pada pola dan kehidupan masyarakat Indonesia yang berbeda dengan Eropa. Menurut Soetomo[6] pada umumnya kota-kota di Indonesia berciri dualistik, di mana struktur morfologi terencana di sepanjang jalan utama dan struktur morfologi tak terencana di belakangnya sebagai area kampung kota yang ditandai kehidupan sektor formal berciri modern dan sektor informal berciri tradisional berjalan bersama-sama.[4][7]Dualistik morfologi antara yang formal modern dan informal yang tradisional membentuk pemisahan yang drastis. Keadaan tersebut menciptakan kesulitan sektor informal untuk berkembang, dengan kata lain kemiskinan kota akan tetap stagnan.

Kota Bandung merupakan salah satu kota kreatif di Indonesia. Banyak kekuatan kreativitas yang ada di Kota Bandung, sehingga terpilih menjadi pilot project kota kreatif se Asia Pasifik. Keberhasilan mengembangkan citra Kota Bandung sebagai kota kreatif sangat tergantung pada sumber daya manusia yang ada yaitu komunitas kreatif[8]. Menurut Charles Landry [9], jaringan dan kreativitas pada hakikatnya saling menguntungkan, karena semakin besar jumlah simpul dalam sebuah sistem semakin besar kapasitas untuk berinovasi.

Fenomena mahasiswa sebagai bagian dari tumbuhnya kawasan sebagai kekuatan kolaboratif yang merupakan jejaring pelaku dalam pengembangan dan membangun kawasan kreatif di Kota Bandung masih

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

belum banyak tereksplorasi. Kekuatan mahasiswa dengan membangun jejaring dengan komunitas *Bandung Creative City Forum* (BCCF) tentunya akan memberikan implikasi yang besar dalam pengembangan Bandung Kota Kreatif. Peran mahasiswa melalui aksi kolaboratif dengan masyarakat yang didukung penuh oleh pemerintah memberikan dampak yang signifikan dalam perkembangan Kota Bandung sebagai kota kreatif.

Penelitian ini untuk mengetahui peran mahasiswa dalam pengembangan Bandung sebagai Kota Kreatif dengan mengidentifikasi proses keterlibatan mahasiswa sebagai salah satu kekuatan dalam kolaboratif antara mahasiswa, komunitas, masyarakat dan pemerintah dalam membangun kawasan kreatif.

METODE PENELITIAN

Metode dan Langkah Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan model *Grounded theory*yang dikembangkan oleh Glaser dan Strauss.[10] Melalui Pendekatan model *Grounded theory* ini, peneliti berusaha untuk melihat langsung sebuah *setting* tanpa menyesuaikan alat, metode, model terlebih dahulu dari opini-opini dan kejadian-kejadian di lapangan. Menurut Strauss dalam Groat dan Wang [11] bahwa dalam pendekatan model *Grounded theory* proses pengumpulan data, analisis, dan teori berdiri dalam hubungan erat satu sama lain dan dilakukan secara bersama-sama serta berulang-ulang (*itteratif*). Secara diagramatik prosedur penelitian dapat dilihat pada gambar 1.

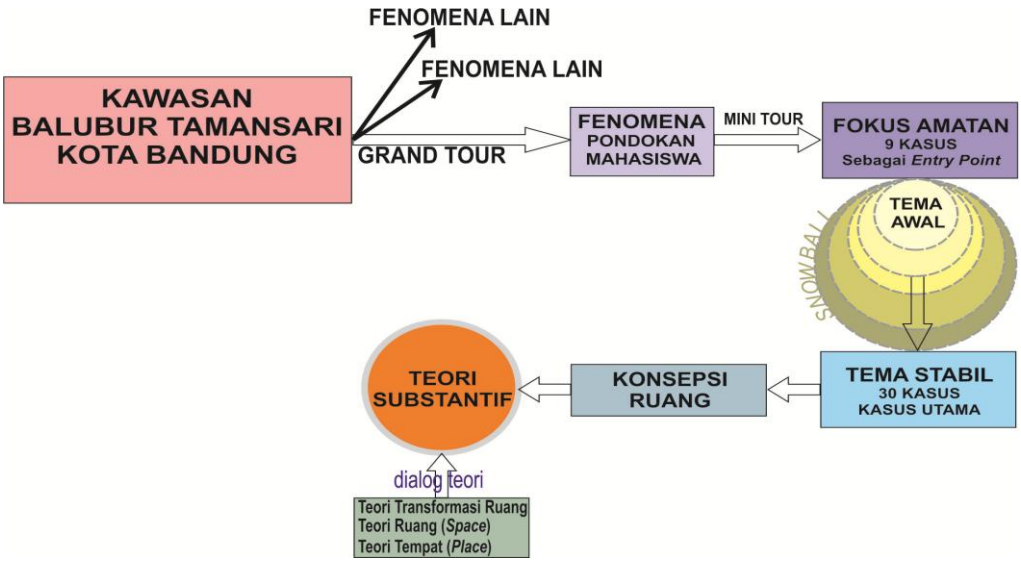

Gambar 1. Langkah-langkah Penelitian
Sumber: Modifikasi dari berbagai sumber 2016

Berdasarkan gambar 1 langkah penelitian dibagi menjadi 6 (enam) tahapan yang ditujukan untuk mengetahui: (1) kondisi pengaruh, (faktor-faktor yang menjadi penyebab permasalahan utama penelitian); (2) fenomena, (menjelaskan bagaimana ciri-ciri fisik bisa dibaca, suasana emosi bisa dirasakan); (3) konteks, yaitu diuraikan pada konteks permasalahan; (4) kondisi kausal, (dijelaskan bagaimana situasi permasalahan semakin kuat, semakin lemah, atau berubah-ubah); (5) strategi (tindakan), (bagaimana tindakan konkrit yang telah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan); dan (6) konsekuensi, yaitu terkait dengan strategi (tindakan) yang sudah dilakukan.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, video, observasi, dan wawancara kualitatif.Pengambilan sampel kualitatif dilakukan berdasarkan metode sampling purposive.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kawasan Taman Hewan yang termasuk ke dalam Wilayah Balubur-Tamansari Kota Bandung yang memiliki keunikan dan kekhasan baik dilihat dari fisik bangunan maupun kawasannya sendiri [12].

Secara geografis, Kawasan Balubur ini terletak pada kawasan Bandung Utara dengan kondisi lahan berkontur dengan kemiringan mengarah ke arah Sungai Cikapundung yang membelah Kota Bandung dari mulai Utara di daerah Ciumbuleuit sampai Selatan di Jalan Soekarno Hatta. Secara administrasi Kawasan ini terdiri dari 3 RW dengan 11 RT dan mempunyai luas lahan sebesar 45Ha. Dari segi kepemilikan lahan di kawasan ini terbagi menjadi 3 kelompok kepemilikan, yaitu (1) tanah hak milik perorangan; (2) tanah milik salah satu BUMN Negara yaitu milik PJKA; dan Tanah milik Negara yaitu marka sungai Cikapundung. Penggunaan lahan pada kawasan ini 95% digunakan sebagai lahan terbangun.Lebih jelasnya lokasi penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2.

Gambar 2. Kawasan Balubur-Tamansari Kota Bandung
Sumber: Diolah Peneliti dari Peta Digital Kota Bandung

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan kawasan Balubur-Tamansari Kota Bandung

Pola tekstur kawasan dan fungsi bangunan kawasan Balubur-Tamansari kota Bandung berdasarkan sejarah perkembangannya mengalami 6 periode perkembangan yaitu: (1) masa penjajahan Belanda yang berfungsi sebagai ruang terbuka hijau (RTH) dan tempat untuk bertamasya; (2) masa sebelum kemerdekaan (tahun 1920-1945) sebagai "Botani garden" untuk kepentingan pendidikan yang bersamaan didirikannya *Technishe Hoogeschool* THS tahun 1920; (3) masa setelah kemerdekaan (tahun 1945 – 1959) sebagai kawasan penyangga perguruan tinggi, sejak didirikannya Sekolah Tinggi Teknik/STT Bandung (cikal bakal ITB) yang secara resmi didirikan pada tahun 1959 oleh Ir. Soekarno; (4) tahun 1960 – 1980 mulai tumbuh beberapa perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta di Kota Bandung umumnya yang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ditandai dengan perkembangan fisik sepanjang aliran Sungai Cikapundung. Perubahan yang terjadi meliputi perubahan fungsi lahan, perubahan massa bangunan dengan penambahan massa bangunan; (5) Awal tahun 1980-an adanya perubahan dari Situ Garunggang berubah fungsi menjadi lahan perumahan yang sekarang bernama "Perumahan Taman Pelesiran Baru". Sejak saat itu mulai tumbuh dan berkembang rumah-rumah menjadi perkampungan padat.Sempadan sungai yang semula sebagai ruang terbuka hijau merubah fungsi menjadi rumah-rumah dan pondokan mahasiswa.Ujung bawah jalan Tamansari semula sebagai Kuburan Belanda atau Kerkhof yang terlindung di bawah kerindangan Cemara Gunung berubah fungsi menjadi permukiman dan perguruan tinggi (UNISBA). Era ini wujud kawasan menjadi perkampungan mahasiswa dengan menjamurnya pondokan mahasiswa; (6) Pada Oktober tahun 2001 dibangun Jalan Layang Pasupati dan tanggal 25 Juni 2005 mulai beroperasi, maka sejak itu Kawasan Balubur Tamansari ini dibelah menjadi 2 bagian dengan dibangunnya jalan layang Pasupati dengan panjang jalan sekitar 2,8 km dan lebar 30-60 meter[13]. Jembatan ini dibangun untuk mengurangi kemacetan, mengingat Bandung semakin hari semakin dibanjiri kendaraan bermotor pribadi, apalagi pada saat akhir pekan Kota Bandung dibanjiri oleh kendaraan dari luar kota yang sengaja berkunjung ke Kota Bandung dengan tujuan untuk berbelanja ataupun hanya sekedar menikmati makanan (wisata kuliner), karena Kota Bandung selain terkenal sebagai kota pendidikan tetapi juga terkenal sebagai surganya berbelanja dan kuliner. Kondisi kawasan ini dapat dilihat pada gambar 3 dan gambar 4.

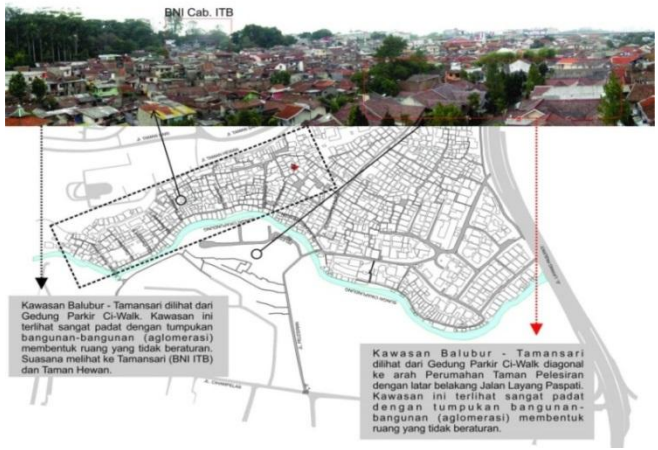

Gambar 3 Suasana Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung Dilihat dari Arah Jembatan Pasupati
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Gambar 4 Kawasan terbentuk dari tumpukan bangunan yang tidak beraturan
Sumber: Dokumentasi Peneliti

Kolaborasi Mahasiswa, Komunitas BCCF, Masyarakat, dan Pemerintah Kota Bandung

Kolaborasi antara Mahasiswa, Komunitas BCCF, dan masyrakat yang didukung penuh oleh Pemeritah Kota Bandung membentuk satu kawasan yang kreatif. Kawasan Balubur-Tamansari (Taman hewan) sebagai kampung kreatif terlihat dari beberapa kegiatan mahasiswa Seni Rupa dan Arsitektur ITB, komunitas BCCF, dan masyarakat dengan didukung penuh oleh Pemerintah Kota Bandung, seperti: saat kegiatan festival Seni Budaya

Taman Hewan melalui program perbaikan kampung, HELARFEST, *Kukuyaan* dalam rangka normalisasi sungai Cikapundung, Mural atau lukisan dinding area bermain dan lapangan terbuka, dan sebagainya. Sehingga kampung ini bukan hanya berkembang sebagai kampung pondokan mahasiswa tetapi juga berkembang menjadi kampung kreatif. Kampung Balubur Tamansari ini dijadikan sebagai kampung percontohan dalam mengembangkan kreativitas kampung kota pada kawasan padat penduduk. Kegiatan ini seperti terlihat pada gambar 5.

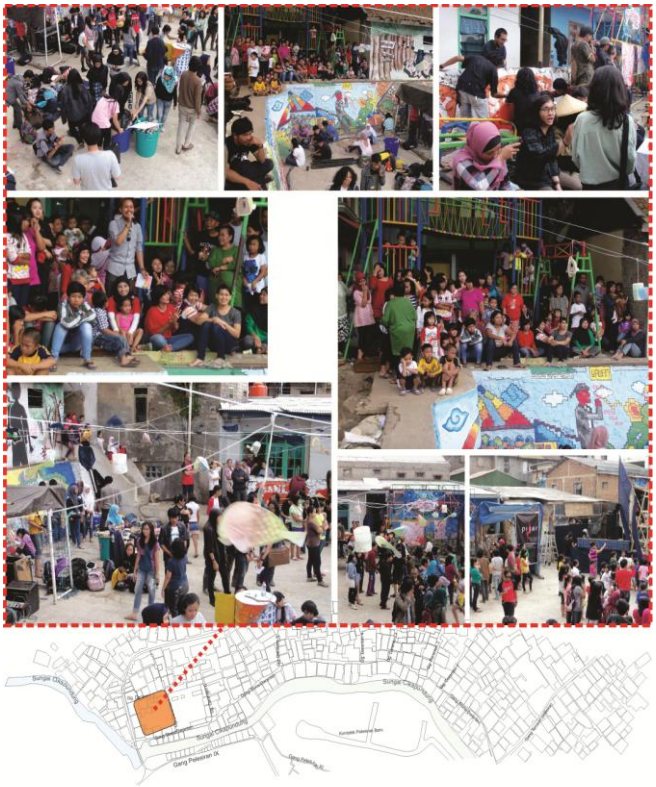

Suasana saat acara HELARFEST yang diselenggarakan selama 3 hari (19-21 September 2013). Berbagai kegiatan dilaksanakan mulai dari workshop gambar bagi anak-anak di kawasan ini, gambar mural dinding dan lapangan terbuka, berbagai atraksi dari komunitas yang ada sampai puncak acara malam kreativitas yang langsung disaksikan oleh Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bandung. Kegiatan ini merupakan kolaborasi antara Pemerintah Kota, Warga Masyarakat dan Masyarakat Kampus dalam pengembangan dan perbaikan kampung kota.

Gambar 5. Suasana Lapang Terbuka saat kegiatan HELARFEST
Sumber: Dokumentasi Peneliti

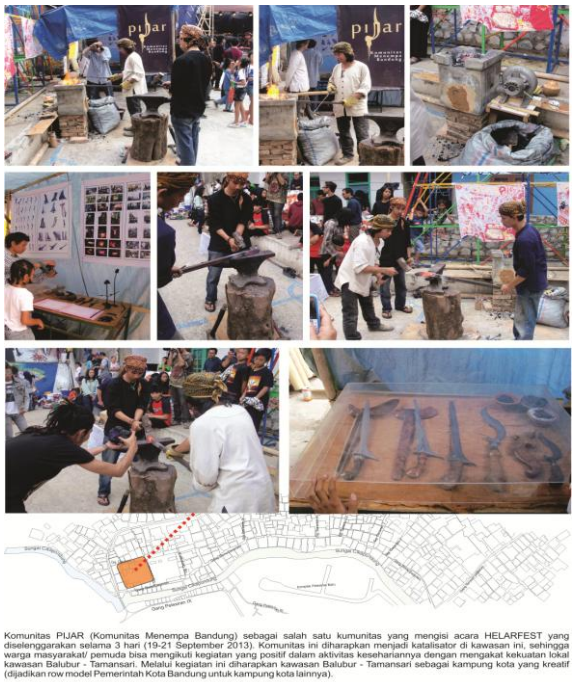

Komunitas PIJAR (Komunitas Menempa Bandung) sebagai salah satu kumunitas yang mengisi acara HELARFEST yang diselenggarakan selama 3 hari (19-21 September 2013). Komunitas ini diharapkan menjadi katalisator di kawasan ini, sehingga warga masyarakat/ pemuda bisa mengikuti kegiatan yang positif dalam aktivitas keseharianya dengan mengakat kekuatan lokal kawasan Balubur - Tamansari. Melalui kegiatan ini diharapkan kawasan Balubur - Tamansari sebagai kampung kota yang kreatif (dijadikan row model Pemerintah Kota Bandung untuk kampung kota lainnya).

Gambar 6. Komunitas Menempa Bandung dalam Kegiatan HELARFEST

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Sumber: Dokumentasi Peneliti

Banyak *event-event* yang diselenggarakan melalui kolaborasi antara masyarakat, seperti: pemuda, anak-anak, mahasiswa, dan Pemerintah Kota Bandung. Kegiatan HELARFEST yang dilaksanakan di ruang terbuka di Kawasan Balubur Tamansari juga digunakan untuk unjuk kebolehan komunitas muda, seperi: komunitas PIJAR merupakan komunitas menempa Bandung dalam mempertahankan warisan budaya berupa pembuatan pusaka kujang seperti pada gambar 6.

Selain itu juga kegiatan HELARFEST diisi dengan kegiatan mural atau lukisan dinding yang dikerjakan oleh mahasiswa Seni Rupa ITB tingkat pertama, sebagai salah satu kegiatan kembali ke masyarakat dengan langsung melakukan pengabdian kepada masyarakat di Kawasan Balubur Tamansari ini seperti terlihat pada gambar 7.

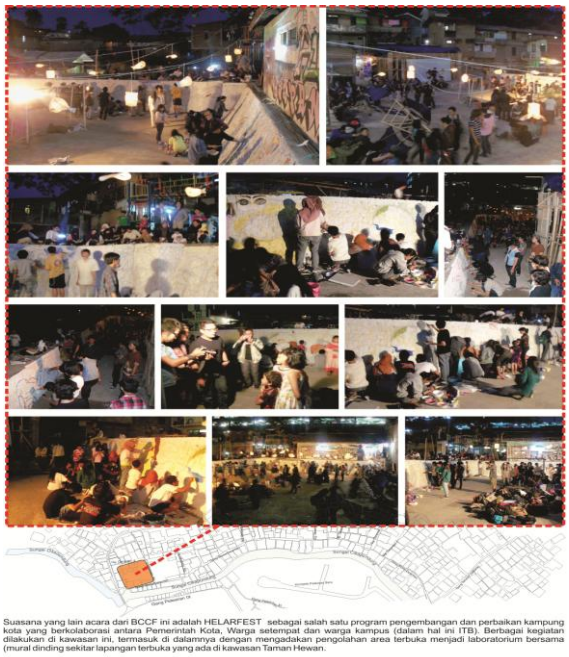

Gambar 7. Suasana Kegiatan MURAL oleh mahasiswa Seni Rupa ITB

Sumber: Dokumentasi Peneliti

KESIMPULAN

Terbentuknya *human settlement* yang dibangun secara bersama-sama antara masyarakat dan mahasiswa (perguruan tinggi) serta adanya dukungan dan dilindungi oleh pemerintah daerah yang membuat kebijakan dalam menciptakan kawasan yang humanis dengan bercirikan kampung kota kreatif. Lingkungan ini terbentuk oleh adanya dinamika dari penghuninya dengan bercirikan dua karakter masyarakat yaitu pemilik pondokan yang tetap dan mahasiswa yang dinamis silih berganti (bermukim 4-5 tahun) membentuk kawasan yang berkelanjutan (*sustainable*) dan tetap bertahan (*survive*) dengan kekhasannya sebagai kampung kota kreatif yang bercirikan kampung seni.

Adanya Kolaborasi pengguna diharapkan dapat digunakan sebagai model dalam perbaikan dan mengembangkan kampung kota (kawasan) lain melalui pemberdayaan masyarakat sesuai dengan karakteristik dari kawasan tersebut dengan didukungan dan dilindungi oleh kebijakan dari pemerintah. Karena keinginan dan peran masyarakat dalam membangun kawasan yang mempunyai keunikan dan kekhasan sesuai dengan karakteristiknya tidak cukup tanpa adanya campur tangan dan keberanian pemerintah untuk tetap menjaga dan melindungi kawasan tersebut sebagai salah satu aset dan identitas serta kekayaan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] [A. Gilbert and J. Gugler, *Cities Poverty and Development Urbanization in The Third World*. Oxford: Oxford University Press, 1983.

[2] R. Voskult, *Bandung Citra sebuah Kota*. Bandung: Departemen Planologi bekerjasama dengan Jagadhita, PT, 2007.

[3] S. Kontoff, *The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History*. London: Thames and Hudson, 1991.

[4] B. Setioko, "Integrasi Ruang Perkotaan dalam Fenomena Pertumbuhan Kawasan Pinggiran Kota di

Indonesia," Universitas Diponegoro Semarang, 2013.
[5] Amos Rapoport, *History and Precedent in Environmental Design*. New York: Penum Press, 1990.
[6] S. Soetomo, *Urbanisasi dan Morfologi: Proses perkembangan peradaban dan wadah ruang fisiknya : Menuju Ruang Kehidupan yang Manusiawi*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.
[7] Masykur, "Karakteristik Permukiman Dualistik dan Tingkat Keberhasilan Penghunian, studi kasus Kota Bogor Jawa Barat," Institut Pertanian Bogor, 2005.
[8] F. Fitriyana, "PENGEMBANGAN BANDUNG KOTA KREATIF MELALUI KEKUATAN," no. Perencanaan Wilayah dan Kota, pp. 1–8, 2011.
[9] C. Landry, *Creative city: a toolkit for urban innovation*, Earthscan. London, 2008.
[10] B. Glaser and A. Stauss, *The Discovery of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research*. New York: Aldine Publishing Company, 1967.
[11] L. Groat and D. Wang, *Architectural Research Methods*. Canada: John Wiley and Sons, Inc, 2002.
[12] A. Permana, S. Soetomo, G. Hardiman, and I. Buchori, "Smart Architecture as a Concept of Sustainable Development in the Improvement of the Slum Settlementarea in Bandung," vol. 2, no. 9, pp. 26–35, 2013.
[13] A. Permana, "Transformasi Gubahan Ruang: Pondokan Mahasiswa di Kawasan Balubur Tamansari Kota Bandung," Universitas Diponegoro Semarang, 2013.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KONSEP PENGEMBANGAN KAWASAN WISATA GUNUNG BUNGSU RESORT SEBAGAI KAWASAN EKOWISATA DAN WISATA OLAHRAGA BERBASIS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Desy Aryanti[1)], Harne Julianti Tou[2)]

[1]Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Studi Arsitektur, Universitas Bung Hatta

[2]Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Bung Hatta

Email :desy73aryanti@gmail.coml :iyun_tou@yahoo.com

Naskah diterima :19 Maret 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 24 Maret 2017

ABSTRAK

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang berpotensi dengan berbagai keanekaragaman sumber daya pariwisata, meliputi alam dan budaya serta pengembangan ekowisata disalah satu Wilayah Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Lima Puluh Kota yang berada di WPP1 dan WPP3. Berdasarkan hasil analisa daya tarik wisata yang tertuang pada Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Lima Puluh Kota, Gunung Bungsu Resort merupakan salah satu objek wisata yang ditempatkan pada prioritas ketiga untuk dikembangkan objek wisatanya yang menyatukan wisata olah raga paraglider dengan keindahan alam, bahkan pada tahun 2013 yang lalu telah dilaksanakan Bungsu Resort Internasional Paragliding Exhibition yang menghadirkan lebih dari 20 orang atlet luar negeri dan 60 orang atlet dalam negeri selain itu juga telah diadakan kejuaraan-kejuaraan daerah. Potensi pariwisata yang besar di Gunung Bungsu Resort belum diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi.Objek wisata terlihat kurang terawat dan tertata, jumlah fasilitas pendukung bagi beragam aktifitas wisatawan yang masih sangat minim dan kebanyakan fasilitas yang ada kurang terkelola dengan baik, terlihat dari kurang bersihnya lokasi objek, serta belum diperbaikinya fasilitas yang rusak.Disamping itu keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan objek wisata saat ini masih bersifat sendiri-sendiri dan tidak terorganisir dengan baik, ditambah lagi kualitas SDM lokal dalam melayani wisatawan masih rendah. Tujuan utama dari penelitian ini adalah menemukan suatu konsep pengembangan Kawasan Gunung Bungsu Resort sebagai kawasan wisata alam dan olah raga dengan metode partisipasi masyarakat setempat.Dengan melibatkan partisipasi masyarakat di kawasan penelitian diharapkan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.Sedangkan metode penelitian yang dipakai yaitu metode pendekatan dan metode analisis eksisting dan SWOT.

Kata kunci: *Gunung Bungsu Resort, konsep pengembangan ekowisata, wisata olah raga paralayang*

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan salah satu sub sektor ekonomi yang cukup mendapat perhatian dalam upaya meningkatkan perekonomian daerah yang dinilai mampu mensejahterakan kehidupan masyarakat. Pembangunan pariwisata tidak terlepas dari pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya penunjang lainnya, serta keterlibatan dan peran serta *stakeholders* dan sub sektor ekonomi lainnya untuk mendukung keberhasilan suatu pembangunan pariwisata.

Secara konseptual Ekowisata dikatakan sebagai suatu konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan tujuan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan alam maupun budaya dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan, sehingga memberi manfaat ekonomi kepada masyarakat setempat.Dari segi pengelolaannya, ekowisata dapat diartikan sebagai suatu penyelenggaraan kegiatan wisata yang bertanggung jawab ditempat alami atau daerah yang dibuat berdasarkan kaidah alam, dimana teknologi diterapkan untuk mendukung upaya pelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.Inti dari ekowisata adalah kegiatan perjalanan wisata dengan tidak merusak lingkungan.

Ekowisata pertama kali dikenalkan pada tahun 1990 oleh organisasi *The Ecotourism Society*, sebagai perjalanan ke daerah–daerah yang masih alami yang dapat mengkonservasi lingkungan dan memelihara kesejahteraan masyarakat setempat [1] .Ekowisata merupakan wisata berorientasi pada lingkungan untuk

menjembatani kepentingan perlindungan sumberdaya alam dan industri kepariwisataan [2]. Kegiatan ekowisata dapat menciptakan dan memuaskan keinginanakan alam, tentang eksploitasi potensi wisata untuk konservasi dan pembangunan serta mencegah dampak negatif terhadap ekosistem, kebudayaan, dan keindahan [1]

Secara umum ada 5 hal penting terkait dengan pengembangan ekowisata yaitu:

1. Pengembangan dan penyelenggaraan kegiatan berbasis pemanfaatan lingkungan untuk perlindungan
2. Berintikan partisipasi aktif masyarakat
3. Penyajian produk bermuatan pendidikan dan pembelajaran
4. Berdampak negatif minimum
5. Memberikan kontribusi positif terhadap pembangunan perekonomian daerah

Dalam perencanaan kegiatan ekowisata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain :

1. Daerah yang dilindungi harus direncanakan sebagai bagian integral dari pengembangan wilayah.
2. Tujuan pengelolaan harus disusun untuk setiap tingkatan.
3. Perencanaan yang baik harus disusun oleh tim yang terdiri dari berbagai disiplin, institusi, dan berbagai cara pandang.
4. Diharapkan dengan interaksi dari berbagai disiplin, institusi, dan cara pandang didapatkan situasi yang sinergi untuk menghasilkan suatu perencanaan yang baik.
5. Perencanaan yang baik tergantung dari efektivitas partisipasi semua pemangku kepentingan.

Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan bagian dari Provinsi Sumatera Barat adalah daerah yang berpotensi dengan berbagai keanekaragaman sumber daya pariwisata, meliputi alam dan budaya serta pengembangan ekowisata. Gunung Bungsu Resort muncul sebagai salah satu objek wisata yang menyatukan wisata olahraga paraglider dengan keindahan alam, bahkan pada tahun 2013 yang lalu telah dilaksanakan *Bungsu Resort Internasional Paragliding Exhibition* yang menghadirkan lebih dari 20 orang atlet luar negeri dan 60 orang atlet dalam negeri selain itu juga telah diadakan kejuaraan-kejuaraan daerah.

Potensi pariwisata yang besar dan beragam tersebut belum diikuti dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi. Objek wisata terlihat kurang terawat dan tertata, jumlah fasilitas pendukung bagi beragam aktifitas wisatawan yang masih sangat minim dan kebanyakan fasilitas yang ada kurang terkelola dengan baik, terlihat dari kurang bersihnya lokasi objek, belum diperbaikinya fasilitas yang rusak, serta vegetasi yang terlihat tumbuh secara liar. Disamping itu keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan objek wisata saat ini masih bersifat sendiri-sendiri dan tidak terorganisir dengan baik, ditambah lagi kualitas SDM lokal dalam melayani wisatawan masih rendah.

Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan mencarikan solusi yaitu membuat suatu Konsep Pengembangan Kawasan Wisata Gunung Bungsu Resort Sebagai Kawasan Wisata Alam dan Olah Raga di Kabupaten Lima Puluh Kota.Dengan melibatkan partisipasi masyarakat di kawasan penelitian diharapkan juga dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini metode yang dilakukan yaitu metode pendekatan kebijakan (sektoral), pendekatan keruangan/kewilayahan *(spatial based),* pendekatan sediaan dan permintaan pariwisata *(supply and demand),* pendekatan pengembangan pariwisata berkelanjutan *(sustainable)*.

Gambar 1.Pendekatan pembangunan berkelanjutan
Sumber : Analisa pribadi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Metode lain yang dipakai yaitu metode pengumpulan data yang terdiri dari pengumpulan data dan informasi, melakukan *desktop study*, melakukan studi lapangan *(field research)* serta metode analisis. Seperti penjelasan dibawah ini :

a. Pengumpulan data dan informasi :

- Potensi fisik, sosial, ekonomi dan budaya Kabupaten Lima Puluh Kota
- Studi dan Perencanaan yang terkait dengan wilayah studi, seperti; RTRW Kabupaten Lima Puluh Kota,RDTR Kawasan IKK, Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota
- Profil industri dan perdagangan Kabupaten Lima Puluh Kota
- Profil kunjungan wisatawan domestik dan mancanegara
- *Demand* Investor dan permintaan ijin lokasi untuk kegiatan Pariwisata 5 tahun terakhir
- Berbagai Peta tematik Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota

b. Melakukan *desktop study* :

- Standar Pelayanan dan perencanaan Pariwisata Kabupaten Lima Puluh Kota berdasarkan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota No. 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Kepariwisataan Daerah
- Diskusi dan Intepretasi keinginan investor
- Contoh-contoh kasus dan perencanaan pariwisata pada wilayah sejenis
- Peraturan perundangan perencanaan pariwisata dan perundangan sisteminvestasi

c. Melakukan studi lapangan *(field research)*

- Identifikasi tapak (site) pada kawasan perencanaan untuk mengetahui secara spesifik pengembangan wisata alam pada kawasan Lembah Harau Resort dan Gunung Bungsu Resort
- Observasi dan peninjauan lokasi-lokasi wisata di Kabupaten Lima Puluh Kota sebagai bahan perbandingan dan gambaran umum profil pengunjung
- Observasi dan peninjauan pada kegiatan yang bersifat tradisional dan spesifik lokal, baik berupa industri, kerajinan, kesenian maupun kuliner. Kunjungan kepada pengusaha yang berhubungan dengan pariwisata, seperti ; hotel, restoran, kerajinan tradisional, dan lainnya
- Kunjungan kepada kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pariwisata yang selama ini telah dibina oleh Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota

Tahap Analisis Data

Untuk mendapatkan informasi yang lebih spesifik dan menilai keterkaitan, pengaruh, kecenderungan, potensi dan kendala pembangunan dan pengembangan pariwisata, maka dibutuhkan serangkaian analisa. Analisa yang dilakukan menyangkut :

1. Penilaian keadaan eksisting, meliputi perkembangan sediaan produk wisata, perkembangan pasar, sosial budaya, karakteristik wilayah (fisik lingkungan) dan keterkaitan wilayah perencanaan dengan wilayah yang lebih luas.
2. Penilaian kecenderungan perkembangan, meliputi kecenderungan perkembangan kawasan, kecenderungan kunjungan wisatawan, investasi, produk wisata, Sumber Daya Alam dan lingkungan.
3. Menghitung kapasitas pengembangan, meliputi perhitungan kemampuan modal, kemampuan lingkungan, ketersediaan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Buatan
4. Memperkirakan kebutuhan yang akan datang, meliputi kebutuhan sarana dan prasarana serta, kegiatan usaha serta permintaan produk wisata.

Analisis yang akan dilakukan akan menggunakan beberapa alat analisa dan metode analisa, yang diantaranya:

1. Analisis Kualitatif, yang akan menggambarkan pengaruh kebijaksanaan terhadap perkembangan sektor-sektor kegiatan di kawasan dan pengaruh kebijaksanaan terhadap perkembangan sektor-sektor kegiatan di pusat-pusat wilayah khususnya terhadap kawasan yang direncanakan.
2. Metode Skoring, kegunaannya hampir sama dengan metoda skalogram tetapi metoda ini dapat digunakan dalam skala yang lebih luas.

3. Metode Komparatif, untuk memperbandingkan suatu keadaan dengan keadaan lain, dimana perbandingan ini bisa dilakukan oleh perbedaan waktu atau dapat juga apabila jenis berlainan dan biasanya dalam penggunaan model ini diikuti juga oleh presentase.
4. Penilaian dengan menggunakan standar, yaitu nilai yang telah ditetapkan dalam penyelidikan geologi yang berkaitan dengan pengembangan kawasan.
5. Analisis SWOT *(Strength, Weakness, Opportunities, Threat)*

Tahap Perencanaan

Setelah melakukan analisis terhadap data-data dan informasi, maka akan didapat kapasitas daya dukung dan sumber daya yang tersedia sebagai acuan dalam merumuskan sasaran pembangunan dan pengembangan pariwisata kawasan Gunung Bungsu Resort. Rumusan sasaran tersebut meliputi :

1. Sasaran jumlah kunjungan wisata, yaitu menyangkut target jumlah wisatawan yang berpotensi, sesuai dengan kapasitas pengembangan.
2. Sasaran Ekonomi, yaitu manfaat ekonomi yang akan di peroleh dari pengembangan pariwisata. Sasaran ini meliputi tenaga kerja, pendapatan daerah dan peluang usaha bagi masyarakat.
3. Sasaran Sosial Budaya, meliputi peningkatan apresiasi masyarakat dan tergalinya aspek-aspek budaya tradisional dan unik.
4. Sasaran Fisik Lingkungan, yaitu menyangkut peran pariwisata sebagai sarana pelestarian lingkungan.

Rumusan rencana pengembangan pariwisata kawasan Gunung Bungsu Resort dapat di bagi menjadi tiga bagian, yaitu :

1. Rencana Kebijakan Pengembangan "Menyusun rencana pengembangan sarana dan prasarana di objek-objek dan dayatarik wisata di kawasan wisata Gunung Bungsu Resort".
2. Strategi Dan Langkah Pengembangan

Merupakan langkah-langkah yang lebih sistematis untuk mecapai tujuan dan sasaran pembangunan dan pengembangan pariwisata yang telah dirumuskan.
Strategi akan dibagi menjadi beberapa bagian antara lain :

- Strategi Pengembangan Pasar
- Strategi pemanfaatan ruang dan pengembangan pariwisata
- Strategi Pengembangan Sumber Daya Manusia
- Strategi Pengembangan Investasi

3. Strategi Pengelolaan Lingkungan "Memberikan arahan desain fisik dan arsitektur untuk sarana dan prasarana dengan tetap berpedoman kepada *eco-design* untuk desain arsitektur, bahan bangunan, penggunaan energi, penggunaan air, spesifikasi teknis dan arsitektur bangunan sarana dan prasarana pada objek wisata Gunung Bungsu Resort
4. Mengkaji kebijakan pengelolaan dan pengembangan kawasan objek wisata oleh pemerintah berdasarkan pembagian perwilayahan untuk pembangunan industri pariwisata, destinasi, pemasaran, kelembagaan serta dampak pengelolaanpariwisata di masing-masing kawasan objek wisata
5. Menentukan konsep pengembangan dan pemanfaatan objek wisata Gunung Bungsu Resort dengan tetap mempertimbangkan prinsip-prinsip *ecotourism*(ekowisata); yang dilengkapi dengan jenis-jenis kegiatan pariwisata yang dapat dikembangkan di kawasan Gunung Bungsu Resort sesuai dengan potensinya, lokasi dan fasilitas atraksi wisata yang akan dikembangkan di Gunung Bungsu Resort, jenis-jenis paket pembangunan kegiatan pariwisata yang dapat diinvestasikan kepada investor di Kawasan Gunung Bungsu Resort.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Lima Puluh Kota adalah sebuah kabupaten di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia.Kabupaten ini memiliki luas wilayah 3.354,30 km². Wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota beriklim tropis dipengaruhi oleh angin muson dengan curah hujan rata–rata berkisar antara 2200 sampai dengan 3750 mm /tahun, suhu rata–rata berkisar antara 20°C sampai dengan 25°C. Kabupaten Lima Puluh Kota terletak antara 0025'28,71 LU dan 0022'14,52" LS serta antara 100015'44,10" – 100050'47,80" BT. Luas daratan mencapai 3.354,30 km² yang berarti 7,94% persen dari daratan Provinsi Sumatera Barat yang luasnya 42.229,64 km².

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kabupaten Lima Puluh Kota diapit oleh 4 kabupaten dan 1 Provinsi yaitu: Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Pasaman serta Provinsi Riau.

Adapun batas-batasnya sebagai berikut.

Sebelah Utara: Berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar Provinsi Riau.
Sebelah Selatan: Berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Sijunjung.
Sebelah Barat: Berbatasan dengan Kabupaten Agam dan Kabupaten Pasaman.
Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Kampar dan Propinsi Riau.

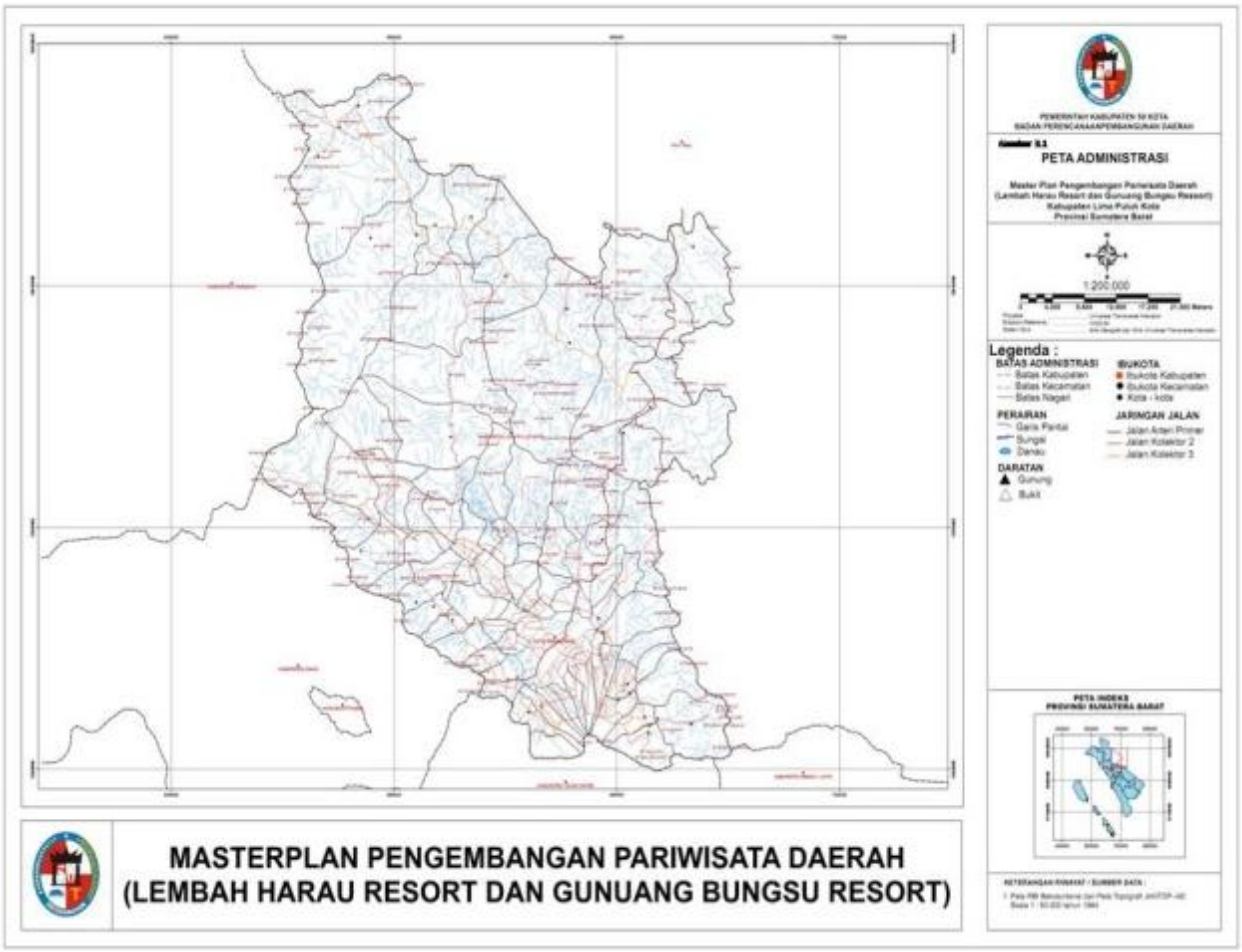

Gambar 2. Peta Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota

Topografi daerah Kabupaten Lima Puluh Kota bervariasi antara datar, bergelombang dan berbukit-bukit dengan ketinggian dari permukaan laut antara 110 m dan 791 m. Di daerah ini terdapat 3 (tiga) buah gunung berapi yang tidak aktif yaitu Gunung Sago (2.261 m), Gunung Bungsu (1.253 m), Gunung Sanggul (1.495 m) serta 13 buah sungai besar dan kecil yang mengalir dan telah banyak dimanfaatkan oleh penduduk untuk pengairan/irigasi.Dengan posisi wilayah yang strategis, di mana secara geografis berada pada pintu gerbang Provinsi Sumatera Barat ke wilayah timur Pulau Sumatera, maka letak wilayah seperti ini sangat menguntungkan daerah ini dalam meningkatkan dan mengembangkan perekonomian, sosial dan budayanya.

Potensi lain yang dimiliki daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya adalah di bidang industri kepariwisatan, karena daerah ini memiliki objek wisata alam, wisata budaya dan wisata sejarah yang sangat menarik untuk dikunjungi.Akan tetapi karena belum dikelola secara profesional, menjadikan objek-objek wisata tersebut belum memberikan dampak yang bernilai ekonomis tinggi terhadap daerah maupun kepada masyarakat.Di samping itu, penyebab lainnya adalah belum satu visinya pemerintah daerah, para pemilik modal danmasyarakat tentang pengembangan berbagai objek pariwisata tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Lima Puluh Kota Nomor 64 Tahun 2011 tentang penyelenggaran kepariwisataan dibagi atas lima Wilayah Pengembangan Pariwisata WPP Yaitu :

1. WPP 1 meliputi Kecamatan Harau, Kecamatan Guguak dan Kecamatan Mungka dengan pusat pengembangan adalah Objek Wisata Resort Lembah Harau, Museum Arkeologi Belubus dan Sarasah Burai yang didukung 17 objek wisatapendukung.
2. WPP 2 meliputi Kecamatan Luak, Kecamatan Situjuah Limo Nagari, Kecamatan Lareh Sago Halaban dengan pusat pengembangan Objek Batang Tabik dan Makam Pahlawan Situjuah Batua yang didukung 12 wisata pendukung.
3. **WPP 3** meliputi Kecamatan Payakumbuh dan Kecamatan Akabiluru dengan pusat pengembangan **Gunung Bungsu Resort** dan Pusako Rumah Godang yangdidukung 11 objek wisata pendukung.
4. WPP 4 meliputi Kecamatan Bukik Barisan, Kecamatan Suliki dan Kecamatan Gunuang Omeh dengan pusat pengembangan adalah Menhir Maek dan Tugu PDRI yang didukung 10 objek wisata pendukung.
5. WPP 5 meliputi Kecamatan Pangkalan Koto Baru dan Kecamatan Kapur IX dengan pusat pengembangan adalah Waduk Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tanjuang Pauah dan Air Terjun AirPanas Muaro Pati yang didukung 4 objek wisata pendukung.
6.

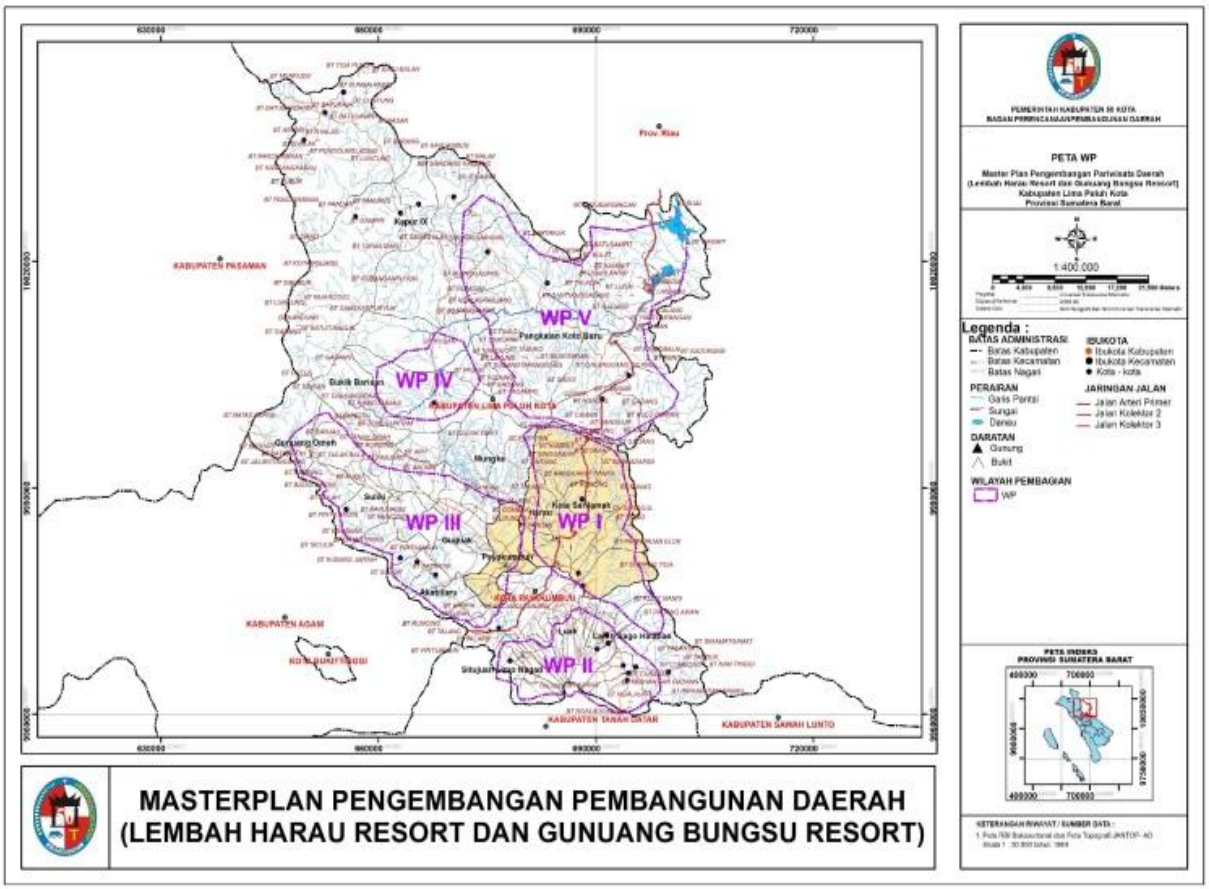

Gambar 3.Peta Wilayah Pegembangan Pariwisata (WPP)

Gunung Bungsu Resort meliputi Menhir Gurun, Batu Munjuang, Benteng Tuangku Nan Garang, Tungka View, Bukik Lontiak Paralayang, Puncak Gunuang Bungsu, Aie Sonsang dan Panorama Bukik Tapuang. Bila melihat kepada penggunaan lahan wisata yang berada di Kecamatan Payakumbuh ini mayoritas adalah hutan sekunder, dan terdiri juga atas hutan primer, kolam air tawar, perkebunan rakyat, seperti yang telah dapat dilihat pada peta penggunaan lahan, kelerengan Kawasan Wisata Lembah Harau Resort dan Gunuang Bungsu Resort.

1. PUNCAK GUNUNG BUNGSU

Gunung Bungsu Resort selain merupakan pusat pengembangan pariwisata di WPP 3, berdasarkan hasil analisa daya tarik wisata yang tertuang pada Rencana Induk Pengembangan Pariwisata (RIPPDA) Kabupaten Lima Puluh Kota, Gunung Bungsu Resort merupakan salah satu objek wisata yang ditempatkan pada prioritas ketiga untuk dikembangkan objek wisatanya. Seiring dengan perkembangan kepariwisataan di masyarakat,

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gunung Bungsu Resortmuncul sebagai salah satu objek wisata yang menyatukan wisata olahraga paraglider dengan keindahan alam, dan pada tahun 2013 telahdilaksanakan *Bungsu Resort Internasional Paragliding Exhibition* yang menghadirkan lebih dari 20 orang atlet luar negeri dan 60 orang atlet dalam negeri selain juga telah diadakan kejuaraan-kejuaraan daerah.

Gambar 4.Kondisi Eksisting menuju Puncak Gunung Bungsu

Fasilitas

Salah satu sarana penunjang Objek Wisata terletakdi kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh, yaitu salah satu cafe yang menawarkan makanan dan minuman yang organik dengan masakan spesifik nusantara. Dari cafe ini kita bisa menikmati keindahan panorama alam seluruh Kota Payakumbuh dan sebagian Kabupaten Lima Puluh Kota serta dapat melihat Gunung Merapi, Singgalang serta Gunung Bungsu. Untuk menuju ke Cafe Bako ini, bisa mengunakan kendaraan umum dan pribadi dengan jarak tempuh ± 10 km dari Kota Sarilamak.

Gambar 5 Café Bako

ISBN : 978-602-73463-1-4

Pada kawasan ini belum tersedia untuk mendukung kegiatankepariwisataandiBukik Gunung Bungsu, namun keindahan alam di areal perbukitan Gunung Bungsu ini sudah dijadikan arena *motocross.*

Gambar 6.Arena motocross

Selain memiliki tradisi Basafa ke Gunung Bungsu dan objek wisata Aia Songsang, Taeh Bukik adalah suatu nagari seluas 2.691 ha yang dihuni 3.350 jiwa penduduk, memiliki arena olahraga menantang yakni, arena olahraga *motocross*. Adapun arena *motocross* di Bukik TopuangNagari Taeh Bukik, terbilang sangat menantang dan penuh tanjakan. Arena yang memiliki panjang hampir 2 km itu, sering dijadikan para pembalap dari berbagai penjuru daerah di Tanah Air, untuk menjejal kemampuan mereka.Sirkuit yang berada pada ketinggian 650 dpl ini merupakan ajang adu ketangkasan bagi *crosser-crosser*daerah sehingga menjadi daya tarik bagi wisatawan dalam berkunjung ke Gunung Bungsu Resort.

Secara umum dapat dilihat kawasanGunung Bungsu Resort lebih banyak hutan primer seperti dapat dilihat pada penggunaan lahan di Kawasan Lembah Harau Resort berikut ini.

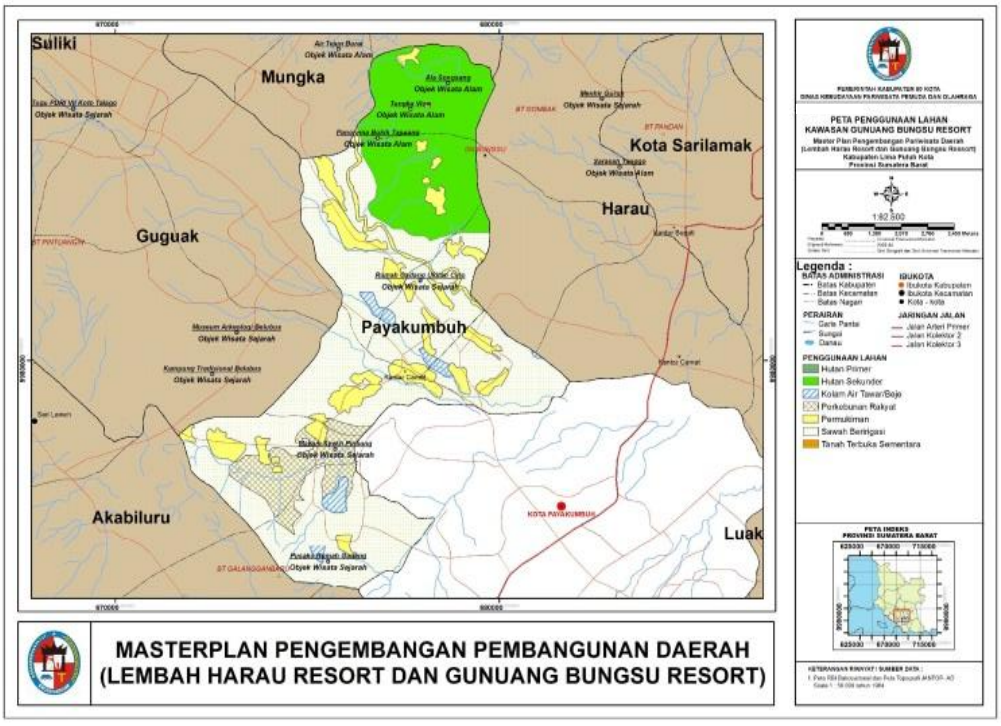

Gambar 6. Peta Penggunaan Lahan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

2. BENTENG TUANKU NAN GARANG

Kawasan Benteng Tuanku Nan Garang berada di kaki Bukit Gunung Bungsu yang agak terpisah dari pemukiman penduduk.Kawasan ini merupakan daerah batas antara Nagari Lubuak Batingkok dan Nagari Taeh Bukik yang ditandai dengan batang aur yang ditanam disepanjang perbatasan tersebut. Kawasan Wisata Benteng Tuanku Nan Garang mempunyai pemandangan alam sekitar yang masih alami, bisa ditempuh dengan kendaraan roda dua dan roda empat. Namun areal objek belum terbina dengan baik, dimana areal objek belum punya pagar, masih dikelilingi rumput.Didalamnya masih ada peninggalan batu-batu benteng.

Gambar 7 Kondisi eksisting Benteng Tuanku Nan Garang

Menurut cerita, Tuanku Nan Garang adalah salah satu tokoh Paderi yang taat dalam mengembangkan ajaran Islamdi Luhak Lima Puluh Kota dan ditakuti Belanda. Sewaktu Residen Sumatera BaratMac. Gillve mengunjungi Benteng Tandikek di Tanjung Alam, Tanah Datar padatanggal 9 Oktober 1829, berkirim surat kepada Tuanku Nan Garang, yang intinyamengajak Tuanku Nan Garang dan pengikutnya bersatu dengan Belanda untuk menghadapi kaum Paderi. Surat Residen dibalas oleh Tuanku Nan Garang menyatakan bahwa mereka tidak perlu diganggu dulu, karena rakyat Luhak Lima Puluh Koto dengan ajaran Islam telah hidup dengan aman dan tentram. Pada Tanggal 17 dan 18 Oktober 1932 Belanda memperluas wilayahnya di Luhak Lima Puluh Kota, dengan melakukan penyerangan suatu kampung dilereng Gunuang Bungsu yaitu Koto Tangah LubuakBatingkok yang rakyatnya dibawah pimpinan Tuanku Nan Garang masih belum menyerah kepada Belanda, sehingga terjadi pertempuran yang sengit di kaki Gunung Bungsu.Pada tanggal 19 Oktober 1832 dengan pasukan kuat Belanda menyerang Koto Tangah. Untuk merampungkan pertahanan Tuanku Nan Garang pemimpin yang cukup taktis dan cerdik ini, mengajak tentara Belanda untuk berunding diluar parit pertahanan kampung. Perundinganyang disengaja mengulur waktu itu tetap saja mendatangkan hasil. Merasa dipermainkan, tentara Belandalalu menyerang dengan segenap kekuatan dan persenjataan yang ada.Walaupun ditembaki dengan meriam dan periuk api,Benteng Tuanku Nan Garang tetap bertahan. Benteng Koto Tangah yang dikelilingi parit dan aur berduri ini baru dapat ditaklukkan Belanda setelah didatangkan bala bantuan tentara dan senjata berat dari Payakumbuh. Sebagai balasan atas perlawanan ini Belandamembakar Kampung Koto Tangah. TuankuNan Garangdan pengikutnya mundur kearah utara. Untuk menaklukkan Benteng Tuanku Nan Garang ini selama 4 hari (19-22 Oktober 1832) di pihak Belanda banyak yang mati.

Objek wisata ini termasuk jenis Wisata Sejarah dengan luas kawasan ± 1 Ha yang terletak Jorong Tigo Balai Kenagarian Lubuak Tingkok Kecamatan Harau. Jarak kawasan ini dari Ibu Kota Kabupaten (Sarilamak) ± 10 km yang dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan roda dua dan roda empat. Fasilitas Objek Wisata yang baru ada dikawasan ini berupa area parkir, dan MCK. Kegiatan yang bisa dilakukan di kawasan ini adalah untuk penelitian benda sejarah dan melihat pemandangan alam.

3. TUNGKA VIEW

Merupakan jenis wisata alam yang berlokasi di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh, memiliki luas ± 5 Ha, jarak dari Ibukota Kecamatan (IKK) Sarilamak ± 9 km dan jarak dari Provinsi ± 139 km. Sarana transportasi yang bisa digunakan untuk mencapai objek wisata ini adalah kendaraan pribadi (roda dua dan

empat), mikrolet, taksi. Fasilitas objek wisata yang dapat dinikmati yaitu berupa panorama alam dan arena paragliding.Kegiatan yang bisa dilakukan di kawasan ini adalah terbang layang, berkemah serta pertunjukan kesenian dan budaya. Tungka View memiliki keindahan alam yang berada di kaki Gunung Bungsu, lokasi ini sangat cocok untuk dibangun kawasan wisata yang terpadu karena melekat pada kawasan Gunung Bungsu yang juga terdapat sebuah Benda Cagar Budaya "Batu Borobono". Pada tiap bulan Syafar tahun Hijriah tempat ini sangat ramai karena banyak pengunjung melakukan ritual Basafa ke puncak Gunung Bungsu. Menurut ceritanya, seorang yang menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dokter, maka penyakitnya akan dapat disembuhkan dengan memohon kepada Allah pada waktu Basafa.

Gambar 8. Kondisi eksisting Tungka View

4. AIA SONSANG

Kawasan Wisata Aia Sonsang memiliki sungai yang mengalir dari arah Timur ke Barat, sedangkan yang biasanya air mengalir dari arah Barat ke Timur. Kawasan Wisata Aia Sonsang mempunyai keindahan alam yang masih alami. Kawasan ini dapat dijangkau dengan kendaraan roda dua dan roda empat dengan keadaan jalan yang sudah baik, mudah untuk dikunjungi.

Gambar 9.Kondisi eksisting area Aia Sonsang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Jenis wisata kawasan ini termasuk jenis Wisata Alam dengan luas kawasan sekitar ± 1 Ha yang berlokasi Jorong Pabatungan Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh yang berjarak ± 14 km dari IKK (Sarilamak). Objek wisata ini dapat ditempuh dengan menggunakan sarana transportasi kendaraan roda dua dan roda empat. Sementara fasilitas Objek Wisata yang ada di kawasan ini antara lain: kolam pemandian alam, areal parkir dan warung. Di kawasan ini kita dapat menikmati pemandangan alam sekitar area.

5. MENHIR GURUN

Berdasarkan data dilapangan setelah dilakukan survey diketahui untuk Objek Wisata Menhir Gurun sudah tidak teridentifikasi.

6. BATU MUNJUANG

Berdasarkan data dilapangan setelah dilakukan survey diketahui untuk Objek Wisata Batu Munjuang sudah tidak teridentifikasi.

7. PANORAMA BUKIK TOPUANG/BUKIK LONTIAK PARALAYANG

Merupakan objek wisata alam dengan luas ± 5 Ha berlokasi di Nagari Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh, jarak dari Ibukota Kecamatan (IKK) Sarilamak ± 10 km dan jarak dari Ibu Kota Provinsi ± 140 km. Sarana transportasi yang dapat digunakan untuk mencapai kawasan ini adalah kendaraan pribadi (roda dua dan rodaempat), mikrolet, dan taksi. Bukik Topuang adalah salah satu kawasan pada Gunung Bungsu Resort dengan keindahan alam yang menakjubkan karena dari lokasi ini bisa terlihat sebagian besar daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh.

Atraksi wisata adalah Paralayang yang telah dikuti oleh paraglider dunia karena memiliki keunggulan unik dari lokasi-lokasi paralayang yang ada di Indonesia diantaranya, dapat digunakan oleh paraglider junior dan senior.Karnaval Paralayang adalah kalender wisata daerah yang setiap tahunnya digelar di lokasi ini dengan diikuti berbagai negara sehingga menjadi daya tarik khusus bagi wisatawan untuk berkunjung ke Gunung Bungsu Resort yang berada pada kenagarian Taeh Bukik Kecamatan Payakumbuh Kabupaten Lima Puluh Kota.

Bukik Topuang memiliki keindahan alam yang masih alami.Dari sini bisa dilihat sebagian daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kota Payakumbuh dan pada tempat ini sangat cocok dibangun lapangan golf dan resort yang menawarkan kawasan wisata terpadu.

Gambar 10.Kondisi eksisting Bukik Topuang

POTENSI DAN PERMASALAHAN

a. Potensi

Potensi pengembangan kawasan wisata Gunung Bungsu Resort dapat dilihat dari :

1. Keberagaman Objek Wisata
   - Dikelilingi objek wisata alam, objek wisata sejarah, seperti keberadaan Batu Munjung, Benteng Tuanku Nan Garang, Tungka View, Bukik Lontiak Paralayang/Bukik Topuang, Puncak Gunung Bungsu, Aia Sonsang, dll.

ISBN : 978-602-73463-1-4

- Potensi alam mendukung untuk pelaksanaan olahraga paralayang, *motocross,* sepeda gunung.
- Sudah pernah diselenggarakan event Internasional untuk olahraga paralayang.

2. Potensi Geografis
   - Potensi alam berupa kawasan hutan yang alami.
   - Berdasarkan dari analisis *overlay* lahan, kawasan Gunung Bungsu Resort merupakan kawasan hijau (hutan primer) yang masih asri untuk mendukung kegiatan wisata terkait dengan panorama.
3. Potensi Aksesibilitas
   - Kondisi jalan menuju objek pada umumnya dapat dilewati oleh kendaraan roda dua dan empat dengan kondisi beberapa bagian jalan belum diaspal.
   - Kedekatan Kabupaten Lima Puluh Kota dengan *home base* wisata Kota Bukittinggi dapat membawa pengaruh pada aliran wisatawan.
4. Potensi pasar
   - Peluang pengembangan wisata minat khusus (olahraga tantangan dan pendidikan).
   - Banyak ODTW (Objek dan Daya Tarik Wisata) yang perlu dikembangkan dengan tema-tema tertentu.
   - Peluang pengembangan wisata berbasis lingkungan dengan daya tarik keaslian daerah.

b. Permasalahan

Permasalahan yang ditemui dari Gunung Bungsu Resort seperti :

1. Objek dan Daya Tarik Wisata
   - Kelestarian alam belum terjamin, karena belum ada upaya perencanaan dan pengelolaan yang sistematis dan berkelanjutan *(sustainable).*
   - Belum adanya perencanaan yang jelas tetang upaya menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati Sumber Daya Alam (SDA) di Kawasan Gunuang Bungsu Resort.
2. Potensi Geografis
   - Dari hasil *overlay* , kawasan memiliki keterbatasan untuk dibangun secara fisik (bangunan permanen).
3. Fasilitas
   - Masih terdapat beberapa titik lokasi penting yang potensial yang nyaris belum tersentuh pengelolaan dan pengolahan.
   - Sarana dan prasarana yang tersedia masih relatif sangat minim, baik sarana dan prasarana untuk wisata alam, petualangan, pemasaran, dan penelitian.
4. Sumber Daya Manusia
   - Watak dan karakter masyarakat relatif yang belum terbuka terhadap perubahan.
   - Tingkat pengetahuan, ketrampilan dan kesadaran masyarakat yang masih relatif rendah terhadap dunia pariwisata.
   - Peran sektor pariwisata dari *anak nagari* belum optimal.
   - Tidak terakomodirnya berbagai potensi yang ada di bidang budaya dan wisata pada masyarakat.
5. Kelembagaan
   - Perlunya pengaturan regulasi dalam pengelolaan objek wisata di Kawasan Gunung Bungsu Resort agar lebih optimal.
   - Perlunya kerjasama aparat pemerintah seperti Dinas Pariwisata, Politani, Bappeda,Dinas Pekerjaan Umum, untuk pengaturan pengembangan di Kawasan Gunung Bungsu Resort agar lebih optimal.
   - Belum optimalnya penyerapan lapangan pekerjaan baru bagi angkatan kerja produktif yang mau dan mampu bekerja di industri pariwisata.

Selain potensi dan masalah tersebut diatas, diperlukan penilaian terhadap potensi objek dan daya tarik wisata di Kawasan Gunung Bungsu Resort. Penilaian ini dibutuhkan untuk menentukan tingkat prioritas pengembangan objek wisata dan di masing-masing objek memiliki daya tarik dan peluang pengembangan yang tidak sama. Karena itu dibutuhkan prioritas pengembangan dengan tujuan implementasi pembangunan dan pengembangan objek wisata nantinya bisa efektif, efisien dan maksimal. Secara spesifik penentuan prioritas ini bertujuan sebagai berikut :

1. Adanya *attraction* yaitu atraksi atau objek wisata yang menarik, unik, bernilai tinggi dan dapat diandalkan.
2. Adanya *supporting facilities*, antara lain tempat penginapan *(home stay),* angkutan, tempat makan, toko souvenir, dan infrastruktur yang baik dan sebagainya.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3. Adanya *accessibilities* yaitu kemudahan pencapaian menuju objek wisata dan kemudahan mencapai tempat penginapan *(home stay)* atau fasilitas pendukung lainnya.

Analisa potensi objek dan daya tarik wisata dilakukan dengan menilai variabel-variabel yang berpengaruh pada suatu objek wisata.Variabel-variabel tersebut merupakan faktor-faktor penentu pengembangan atraksi wisata. Variabel-variabel ini akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya yang berbeda karakteristiknya.

Untuk studi kasus Kabupaten Lima Puluh Kota sendiri, variabel tersebut dikelompokan menjadi :

1. **Daya Tarik**, meliputi keunikan, keindahan objek, keragaman atraksi, daya dukung lingkungan baik fisik maupun kemasyarakatan, dan faktor berapa lama suatu atraksi objek wisata mampu menahan seseorang untuk tinggal.
2. **Aksesibilitas** atau tingkat pencapaian, meliputi kemudahan pencapaian suatu objek wisata (mengacu kepada pusat wilayah, karena pada pusat inilah terkonsentrasi fasilitas pendukung wisata seperti akomodasi, dll) ketersediaan moda dan kualitas jaringan jalan.
3. **Dukungan**, meliputi ketersediaan akomodasi, prasarana penunjang wisata, fasilitas pada objek wisata sendiri, keterkaitan dengan objek wisata lainnya, dan kemungkinan pengembangan.
4. **Pemasaran**, meliputi jumlah pengunjung dan skala pemasaran (lokal, regional atau internasional).
5. **Dampak Terhadap Ekonomi dan Lingkungan,** yaitu pengaruh yang diberikan suatu objek wisata terhadap lingkungan, ekonomi dan sosial budaya.

KONSEP PENGEMBANGANPARIWISATA

Kawasan Gunung Bungsu Resort ini terletak bersebelahan dengan Kawasan Lembah Harau Resort yang merupakan Wilayah Pengembangan Pariwisata (WPP 3) dalam pembagian zonasi yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lima Puluh Kota. Kawasan yang dipersiapkan sebagai objek wisata ini selayaknya tidak diganggu atau diubah fungsi dan tata guna lahannya. Pengembangan objek wisata yang dapat dilakukan di Gunung Bungsu Resort adalah : rekreasi di alam terbuka. seperti : berkemah, bersepeda, petualangan.

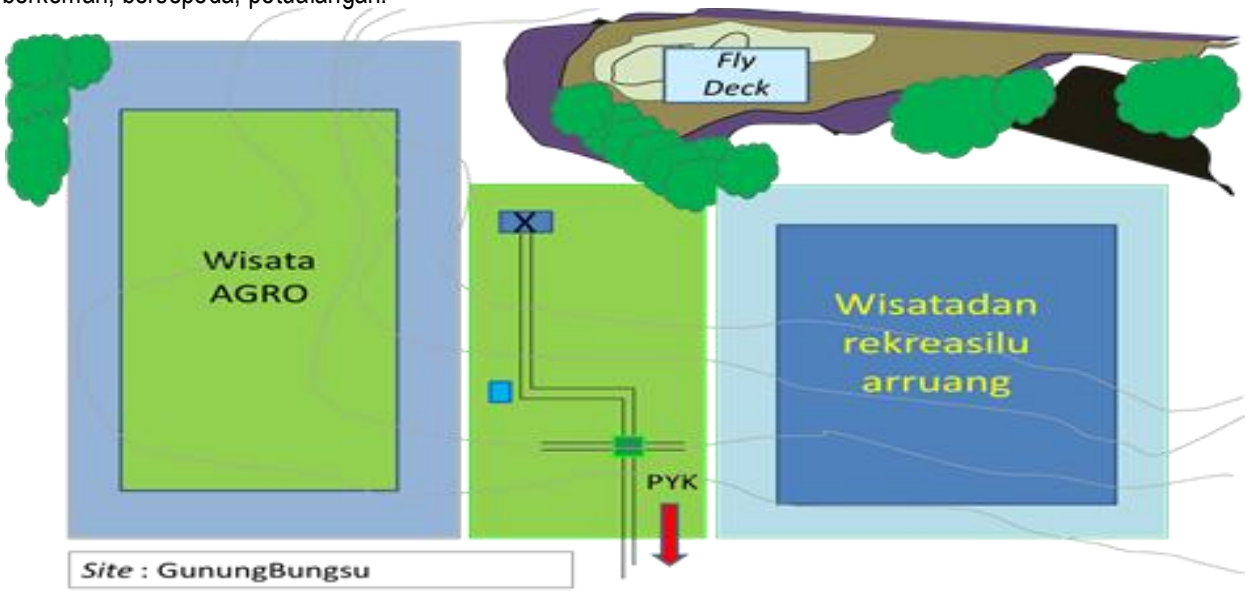

Gambar 11. Kondisi Eksisting

Gambaran umum program pengembangan di Kawasan Gunung Bungsu Resort dapat direncanakan dari beberapa bidang yaitu :

A. Bidang Sarana dan Prasarana

Arahan Rencana Kegiatan Fisik, seperti :

1. Memperbaikiaksesjalanmenuju kawasan puncak gunung untuk pemanfaatan jalur menuju *take off* paralayang, arena sepeda gunung dan motor cross.

ISBN : 978-602-73463-1-4

2. Merencanakan fasilitas-fasilitas umum dan fasilitas-fasilitas sosial berupa; kios kuliner, kios souvenir, *information center* (ruang pengelola, ruang klinik kesehatan, ruang satpam), mushola, toilet, gazebo, taman/*open space*, tempat memancing.
3. Merencanakan posko/*basecamp* paralayang, sepeda gunung, motor cross.
4. Merencanakan tempat parkir kendaraan pengunjung/wisatawan.
5. Pemanfaatan rumah masyarakat sebagai *home stay*
6. Memperbaiki akses jalan ke area wisata.

Arahan Rencana Kegiatan Non Fisik, seperti ;

1. Peningkatan kualitas SDM dibidang kepariwisataan dengan pengembangan lembaga dan institusi yang mendukung upaya penyadaran dan peningkatan mutu pelayanan kepariwisataan.
   - Mengadakankomunikasidengankomunitasmasyarakatuntukmelestarikankawasan sekitar.
   - Mengadakan sosialisasi serta kerjasama antara komunitas, swasta, pemerintah, masyarakat.
   - Menyediakan jasa biro wisata perjalanan menuju Kawasan Gunung Bungsu Resort.
   - Penyusunan kesepakatan hukum kemitraan bagi pihak swasta yang melakukan kerjasama dengan pemerintah.
   - Pengembangan wisataparalayang menjadi kalender wisata atau agenda tahunan.

2. Pengembangandaya tarik wisata maupun pola kegiatan yang memiliki potensi yang besar namun belum muncul atau belum digali potensi kepariwisataannya.
   - Menerapkan kebijakan yang dapat melindungi cagar budaya seperti Perda, Renstra, RIPP dan RDTRK.
   - Mengadakan sosialisasi pentingnya kebijakan terkait cagar budaya Kawasan Sekitar Gunung Bungsu Resort.
   - Peningkatan program kerjasama regional untuk mengantisipasi semakin tajamnya persaingan antar wilayah maupun secara nasional.
   - Meningkatkan keahlian dalam hal kesenian dan atraksi budaya.
   - Meningkatkan keahlian untukmembuat cinderamata.
   - Meningkatkan promosi (informasi) Gunung Bungsu Resort secara langsung/fisik, maupun secara tidaklangsung/non fisik.
   - Melakukan kerjasama dengan sektor swasta melalui CSR perusahaan.
3. Peningkatan pemahaman masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan dan penyebarluasan informasi dampak dan manfaat kepariwisataan terhadap aspek kehidupan masyarakat.
   - Pelatihan peningkatan mutu pariwisata berbasiskan masyarakat.

B. Bidang Penawaran Paket Wisata

1. **Paket Wisata Alam (PWA)** Gunung Bungsu Resort berisi berbagai kegiatan perjalanan dan petualangan di alam, seperti Puncak Gunung Bungsu, Tungka View, Panorama Bukik Topuang.
2. **Wisata Petualangan *(Advanture Tour Package)*;** Paket Wisata Petualangan merupakan "lanjutan" dari wisata alam. Dalam *Advanture Tour Package* dilanjutkan dengan kegiatan menginap di alam bebas di pegunungan dan hutan di Bukik Lontiak.
3. **Wisata Sejarah (*Historical Tour Package*)**; Dalam paket wisata sejarah ditawarkan kesempatan untuk mengunjungi tempat bersejarah di Luhak Limo Puluh Kota seperti; sejarah ke Benteng Tuanku Nan Garang
4. **Wisata Olah Raga (Sporty *Tour Package)*;** Wisata olah raga yang khusus ingin dikembangkan di Kawasan Gunung Bungsu Resort adalah olah raga paralayang, motorcross, sepeda gunung, mengingat kondisi Gunung Bungsu memiliki *track* yang unik bergelombang.
5. **Wisata Agro**; Kawasan Gunung Bungsu Resort banyak terdapat obyek pertanian, perkebunan dan peternakan, hal ini dapat dilaksanakan wisata agro bagi masyarakat yang ingin mengenal budi daya tanaman pangan di salah satu sentra industri pangan di Sumatera Barat dengan menyelenggarakan program pelatihan, mengenal tata cara bercocok tanam dsb.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

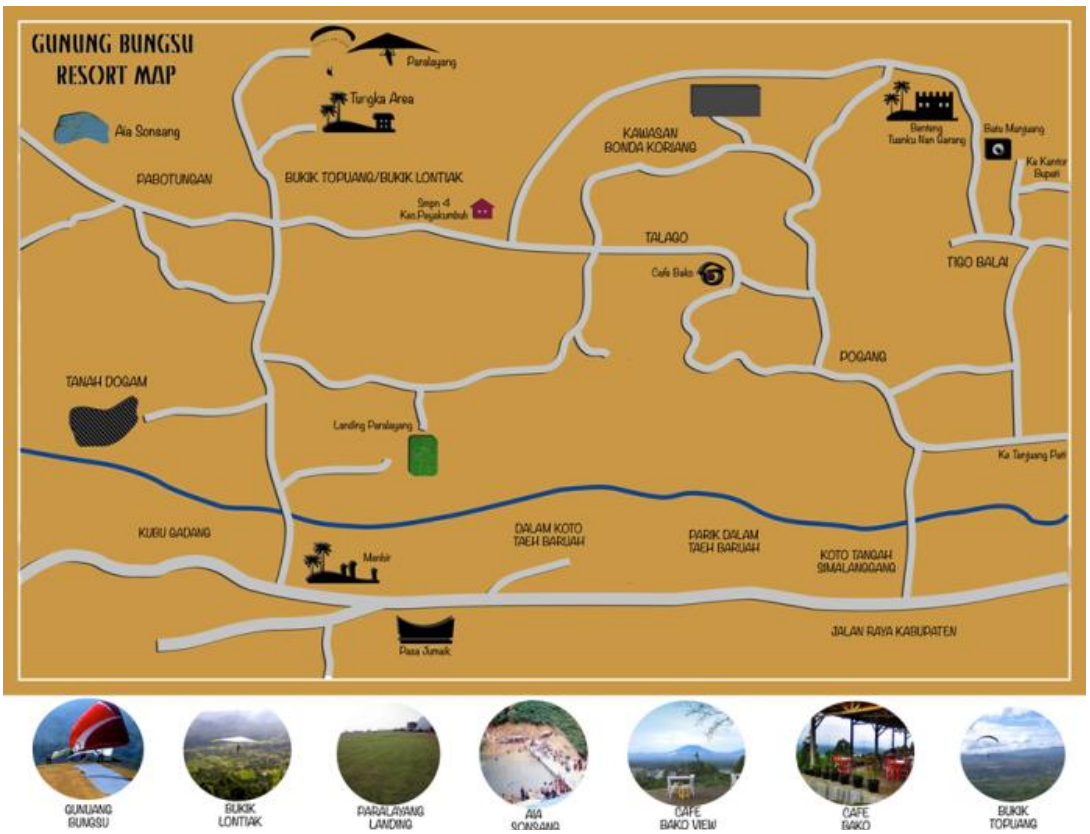

Gambar 12.Green Map Kawasan Gunung Bungsu Resort

Perencanaan zonasi di Kawasan Gunung Bungsu Resort ini yaitu :

1. Zona Inti: Bukik Lontiak/Bukik Topuang dan Tungka View
2. Zona Penyangga *(buffer zone)* : Kawasan hutan cagar alam/puncak gunung
3. Zona Pelayanan dan Pengembangan : Aia Sonsang, Benteng Tuanku Nan Garang

Gambar 13.Existing site dan rencana pengembangan area Tungka View
Sumber: Hasil Analisa dan Rencana, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4

Gambar 14. Existing site dan rencana pengembangan area Aia Sonsang
Sumber : Hasil Analisa dan Rencana, 2016

Gambar 15. Existing & rencana pengembangan Benteng Tuanku Nan Garang
Sumber: Hasil Analisa dan Rencana, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1.
Analisis SWOT Pengembangan Atraksi, Amenitas, dan Aksesibilitas Kawasan Gunung Bungsu Resort

	KEKUATAN (STRENGTH)	**KELEMAHAN (WEAKNESS)**
INTERNAL **EKSTERNAL**	• Memiliki sumberdaya wisata meliputi wisata alam, budaya, sejarah dan berbagai atraksi di kawasan lembah harau • Memiliki pasar wisata yang cukup jelas dan dikunjungi secara periodik. • Memiliki areal pengembangan objek yang cukup luas pada beberapa kawasan. • Memiliki kecenderungan peningkatan jumlah wisatawan, baik lokal dan mancanegara. • Objek wisata alam (terutama Puncak Bukik Lontiak/Paralayang) masih menjadi pilihan utama wisatawan. • Masyarakat lokal memiliki pengetahuan tentang objek wisata secara historis maupun simbolis.	• Terbatasnya sarana penunjang wisata seperti terminal, hotel, restoran dan lainnya serta rendahnya permintaan akan fasilitas akomodasi karena singkat nya waktu tinggal wisatawan. • Tujuan wisata masih terfokus pada Kawasan Lembah Harau dan belum mampu menyebar pada objek wisata lain. • Belum semua potensi wisata diinventarisasi dan dikelola secara optimal • Tidak semua objek wisata dapat dijangkau oleh sarana angkutan umum. • Terbatasnya kapasitas dan kualitas jalan terutama menuju objek wisata yang ada. • Jenis atraksi wisata kurang beragam dan sangat tergantung pada atraksi pemandangan alam, goa dan pegunungan • Sebagian besar objek bersifat potensial dan dalam tahap eksplorasi
PELUANG (OPPORTUNITIES)	**STRATEGI S-O (Ekstensifikasi)**	**STRATEGI O-W (Intensifikasi)**

ISBN : 978-602-73463-1-4

• Peluang pengembangan wisata minat khusus (olahraga tantangan dan pendidikan) • Banyak ODTW yang perlu dikembangkan dengan tema-tema tertentu. • Peluang pengembangan wisata berbasis lingkungan (ekowisata) dengan daya tarik keaslian daerah. • Kedekatan Kab. Lima Puluh Kota dengan *Home Base* wisata Kota Bukittinggi dapat membawa pengaruh pada aliran wisatawan. • Pengembangan akomodasi yang sekaligus menjadi atraksi wisata seperti penginapan Echo di Lembah Harau.	• Mengembangkan destinasi wisata alam terutama dengan tema wisata alam dataran tinggi. • Mengembangkan potensi seni budaya sebagai atraksi budaya pendukung aktivitas wisata • Meciptakan kerjasama kepariwisataan dengan Propinsi Riau sebagai pasar potensial • Meningkatkan hubungan dengan jaringan kepariwisataan regional Sumatera Barat	• Inventarisasi dan pembuatan *data base* sebaran ODTW secara lengkap sebagai informasi awal dalam perencanaan pengembangan dan promosi pariwisata • Menyediakan dan memperbaiki infrastruktur dan fasilitas sarana perhubungan yang lebih memadai • Penambahan fasilitas wisata secara bertahap pada objek-objek wisata unggulan • Melakukan perbaikan kualitas sarana dan prasarana umum (*public good*) yang telah ada • Menambah dan memperbaiki sistem jaringan transportasi (jumlah dan kualitas) • Menjalin kerjasama dengan wilayah sekitar (Payakumbuh dan Bukittinggi) • Membangun fasilitas wisata yang dibutuhkan wisatawan.
HAMBATAN (THREATS)	**STRATEGI S-T (Diversifikasi)**	**STRATEGI W-T (Konsolidasi)**
• Pola wisata masih cenderung bersifat wisata massal sehingga kurang mendukung pengembangan wisata khusus seperti pendidikan dan sejarah. • Terjadi pergeseran psikografi dari berbasis alam menjadi berbasis hiburan dan rekreasi.	• Merancang dan mengembangkan secara terpadu objek wisata dengan memperhatikan aspek keberlanjutan (ekonomi dan konservasi) dari keberadaan objek tersebut • Pengemasan produk wisata yang berbeda dengan daerah/kabupaten lain	• Optimalisasi wisata alam, budaya dan sejarah yang dimiliki sebagai daya tarik utama pariwisata. • Menciptakan strategi pengembangan yang meminimalkan kelemahan yang ada dan mensiasati persaingan yang tajam antar daerah dalam menarik kunjungan wisatawan • Terus menerus dilakukan diversifikasi produk pariwisata sesuai tuntutan pasar

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

• Kompetisi antar Kota/Kabupaten di Sumatera Barat dalam meningkatkan potensi wisatanya dan menciptakan keragaman atraksi. • Waktu perjalanan wisata sangat tergantung pada pola libur nasional. • Ketersediaan SDM bidang pariwisata masih terbatas.	• Pengembangan objek wisata berbasis wisata olahraga dan tantangan sebagai objek wisata minat khusus. • Pengembangan wisata massal yang dekat dengan pusat wilayah yang telah memiliki fasilitas memadai.	

KESIMPULAN DAN SARAN

Gunung Bungsu Resort muncul sebagai salah satu objek wisata yang menyatukan wisata olah raga paralayang dengan keindahan alam.Potensi pariwisata yang besar dan beragam di Gunung Bungsu Resort belum di ikuti dengan pengelolaan yang baik dan terintegrasi.

Keterlibatan masyarakat dalam pengembangan dan pemanfaatan objek wisata saat ini masih bersifat sendiri-sendiri dan tidak terorganisir dengan baik, ditambah lagi kualitas SDM lokal dalam melayani wisatawan masih rendah.

Indikasi program di Kawasan Gunung Bungsu Resort yaitu :

1. Sosialisasi rencana dan inventarisasi potensi objek wisata
2. Melakukan kesepakatan dengan yang lingkungan rumahnya dilalui jalur tracking
3. Melakukan sosialisasi dan kesepakatan dengan masyarakat yang tempat tinggalnya akan dijadikan *homestay.*
4. Melakukan penataan pada sentra-sentra yang disepakati
5. Menyediakan sentra point, fasilitas penduduk untuk sarana penunjang
6. Melakukan uji coba tracking
7. Melaksanakan sosialisasi Pemerintah Daerah dengan *travel agent*
8. Dokumentasi semua potensi yang ada
9. Pembuatan beberapa panduan wisata di website atau blog
10. Perencanaan pembangunan infrastruktur jalan
11. Perencanaan pembangunan Museum Megalitik
12. Perencanaan pembangunan *camping ground, area tracking*
13. Merencanakan moda transportasi ke objek-objek wisata, seperti; bendi, kereta wisata
14. Perencanaan pembangunan sarana dan prasarana di setiap lokasi objek wisata

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi masukan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk pengembangan kawasan wisata alam dan olah raga yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Lindberg, K. dan Hawkins, D.E. (1995). *Ekowisata: Petunjuk untuk Perencanaan dan Pengelolaan*. Yayasan Alami Mitra Indonesia. Jakarta.

[2] Ekonomi. *Pariwisata*. Diterjemahkan oleh : Jusuf S. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. *META*, *2002*. Planning for Marine Ecotourism in the UE Atlantic Area.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

RISIKO PRODUKSI PEMBENIHAN LELE PADA USAHA FAMILY PISCES GROUP KECAMATAN KOTO TANGAH KOTA PADANG

Dwi Evaliza[1)], Nur Afni Evalia[1)], Elfi Syukrina Sani[1)]

[1] Program Studi Agribisnis, Jurusan Sosial Ekonomi, Fakultas Pertanian, Unand

Email :dwievaliza@yahoo.com

Naskah diterima :7 Maret 2017 Naskah direvisi : 18 Maret 2017 Disetujui terbit : 18 April 2017

ABSTRAK

Lele adalah salah satu jenis ikan air tawar yang cukup di minati oleh konsumen. Tingginya jumlah permintaan konsumsi ikan lele, menyebabkan permintaan benih lele juga meningkat. Salah satu usaha yang bergerak di bidang pembenihan ikan lele di Kota Padang adalah Family Pisces Group. Pelaku usaha dihadapkan dengan masalah fluktuasi survival rate (SR) yang menunjukkan risiko produksi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif. Metode kuantitatif digunakan untukmenghitung rata-rata dan probabilitas dan menghitung dampak penggunaan Value at Risk (VaR). Sumberrisiko produksi yang terdapat dalam usaha pembenihan Lele Sangkuriang di Family Pisces Group yaituhama, penyakit, kualitas air, dan kanibalisme. Hasil analisis probabilitas ataurisiko kemungkinan timbul, yaitu: 1) hama dengan 17,11 persen/tahun, 2) penyakit 16,97 persen/tahun, 3)kualitas air dengan 38,89 persen/tahun, dan 4) kanibalisme dengan 27,02 persen/tahun. Hasil analisis dampak risiko, yaitu: 1) hama sebanyak Rp. 677.126/bulan, 2) penyakit sebesar Rp. 679.519/bulan, 3) kualitas air Rp. 1.505.165/bulan, dan 4) kanibalisme sebesar Rp. 1.058.261/bulan.

Kata kunci: *Risiko Produksi, Lele, Fluktuasi Tingkat Kelangsungan Hidup*

PENDAHULUAN

Lele merupakan komoditas perikanan yang telah memasyarakat dan potensial untuk menggerakkan perekonomian rakyat. Selain itu, lele juga sangat prospektif untuk dikembangkan guna menunjang program ketahanan pangan dan gizi Oleh karena itu, perkembangan produksi lele setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana berdasarkan data yang dikeluarkan oleh DKP, pada tahun 2009-2013 terjadi kenaikan produksi rata-rata 40,18 persen setiap tahunnya. Perkembangan produksi yang cukup signifikan tersebut menjadi bukti bahwa lele memang menjadi salah satu komoditas utama perikanan budidaya di tengah-tengah masyarakat yang masih akan terus berkembang [1]

Budidaya ikan lele banyak dilakukan masyarakat karena dapat dilakukan pada lahan yang sempit dan sumber air yang terbatas dengan kepadatan populasi ikan yang tinggi. Selain itu, pakan untuk budidaya ini mudah didapat dan teknologi yang digunakan relatif mudah dimengerti oleh masyarakat. Ikan lele memiliki beberapa keunggulan dibandingkan komoditas lainnya, seperti rasa dagingnya yang enak dan lembut, kandungan gizi pada setiap ekornya cukup tinggi, yaitu protein (17-37%), lemak (4,8%), vitamin (1,2%) yang terdiri dari vitamin A, B kompleks, D dan E. Kemudian mineral yang terkandung sebesar 1,2% yang terdiri dari garam fosfat, kalsium, besi, tembaga, dan yodium [2]

Salah satu pelaku yang bergerak dalam usaha pembenihan ikan lele di kota Padang adalah Family pisces group. Perusahaan ini fokus pada kegiatan pembenihan ikan lele Sangkuriang dan telah memiliki sertifikat lele sangkuriang. Salah satu risiko yang terkait dengan usaha yang dilakukan Family Pisces Group adalah risiko produksi. Risiko produksi mempunyai pengaruh terhadap hasil produksi. Oleh sebab itu, diperlukan adanya antisipasi dan penanganan dalam faktor-faktor tersebut.

Family Pisces Group merupakan pelaku budidaya perikanan yang bergerak dalam bidang pembenihan ikan air tawar di kota Padang. Salah satu produk unggulan yang di hasilkan oleh Family Pisces Group ini adalah benih ikan lele sangkuriang. Berdasarkan penelitian dan sumber pustaka mengenai ikan lele Sangkuriang biomassa induk lele Sangkuriang (induk betina) seberat 5 kg, mampu menghasilkan benih berumur 25 hari dengan tingkat kelangsungan hidup (SR / survival rate) lebih dari 90 persen atau lebih dari 168.000 ekor,

sedangkan family Pisces Group menghasilkan benih berumur 25 hari dengan SR rata-rata 70,2 persen atau jumlah rata-rata 120.000 ekor benih. Hal ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara standar dengan aktual. Padahal benih lele sebagai salah satu input kegiatan budidaya pembesaran lele, sehingga sangat penting penangannya dalam peningkatan produksi. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan pembenihan ikan lele menghadapi risiko produksi. Dengan demikian, pengelolaan risiko benih ikan lele menjadi penting dalam keberhasilan produksi.

Dalam melakukan kegiatan usaha pembenihan ada beberapa faktor yang diindikasikan sebagai sumber risiko produksi yang akan mempengaruhi hasil produksi seperti kualitas induk, kualitas pakan, kualitas air, suhu air, kanibalisme, hama dan penyakit. Kualitas induk akan mempengaruhi hasil produksi yang apabila kualitas induk yang digunakan berkualitas buruk baik itu jantan ataupun betina, maka akan menyebabkan *fekunditas* (jumlah telur) yang dihasilkan sedikit, *fertilization rate* (derajat pembuahan) yang tidak sempurna, *hatching rate* (derajat penetasan) yang rendah, serta benih yang tidak berkualitas sehingga *survival rate* (tingkat kelangsungan hidup) akan bernilai rendah, dan begitu juga sebaliknya. Kualitas pakan juga menjadi salah satu masalah pada produksi, apabila kualitas pakan yang digunakan kurang baik, maka pertumbuhan dan daya tahan ikan akan berkurang. Selain itu, buruknya kualitas pakan juga dapat mempengaruhi kualitas air yang apabila kualitas air pemeliharaan memburuk, dapat menyebabkan kematian benih-benih tersebut.

Peralihan dari kondisi panas kepada hujan ataupun sebaliknya dapat menyebabkan perubahan suhu dan kondisi air, sehingga dapat menyebabkan kematian benih dalam jumlah yang besar. Kesalahan dalam seleksi induk lele yang akan dipijahkan dapat menyebabkan telur yang dihasilkan rendah derajat penetasannya. Musim kemarau mempengaruhi produktivitas induk lele dalam menghasilkan telur, sehingga jumlah telur yang dihasilkan menurun. Sementara itu, hama maupun penyakit dapat menyerang benih lele yang dibudidayakan, sehingga mengakibatkan kematian benih lele yang dipelihara.

Penelitian ini bertujuan untuk Mengidentifikasi sumber risiko produksi yang terdapat pada usaha pembenihan ikan lele Sangkuriang di Family Pisces Group serta menganalisis probabilitas dan dampak dari sumber risiko produksi pada usaha pembenihan ikan lele Sangkuriang di Family Pisces Group.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Penelitian ini dilakukan pada Family Pisces Group di Kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota Padang Sumatera Barat.

Metode yang digunakan untuk mengetahui kemungkinan terjadinya risiko adalah metode nilai standar atau z-score. Metode ini dapat digunakan apabila ada data historis dan berbentuk kontinus (desimal). Data yang terkait adalah jumlah benih berukuran 2-3 cm yang dihasilkan, total benih yang mati pada setiap siklus/periode, jumlah benih yang mati yang diakibatkan oleh setiap sumber risiko pada siklus/ periode, dan batas normal kematian benih.

Data yang digunakan adalah data produksi lele dari bulan Mei 2015 – April 2016. Data tersebut diperoleh dengan hasil data sekunder. Rumus yang digunakan untuk mendapatkan data kematian benih setelah mendapatkan data kematian dalam bentuk persen dari setiap sumber risiko produski adalah sebagai berikut :

$$Benih\ Mati = \Sigma\ Kematian\ Benih\ X\ Persen\ Kematian\ Benih$$

Dimana :

Benih Mati = benih yang mati akibat sumber risiko pada siklus/periode tertentu
Σ Kematian Benih = total benih yang mati (ekor) pada 1 siklus (1 bulan)
Persen kematian benih = persen benih yang mati dari total kematian benih pada siklus/periode tertentu dari setiap sumber.

Data kematian benih akan diperoleh dari hasil observasi di lokasi penelitian. Langkah yang dilakukan untuk mendapatkan jumlah benih yang mati yang diakibatkan oleh setiap sumber risiko adalah sebagai berikut :

1. Menghitung benih mati yang diakibatkan oleh penyakit secara manual dngan indikator fisik benih.
2. Menghitung benih mati yang diakibatkan oleh kualitas air secara manual dengan indikator fisik benih tidak menunjukkan adanya kematian yang disebabkan oleh penyakit.
3. Menghitung benih mati yang diakibatkan oleh kanibalisme pada kolam pemeliharaan secara manual dengan indikator fisik benih terluka atau fisik benih tersebut tinggal bagian tertenntu saja.
4. Menghitung benih mati yang diakibatkan oleh hama saat pemanenan dengan perhitungan sebagai berikut :

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

$$BM.H = (No - (BM.P + BM.KA + BM.K)) - Nt$$

Dimana :
BM.H = benih mati akibat hama (ekor)
No = Jumlah benih awal (ekor)
Nt = Jumalh benih Akhir (ekor)
BM.P = benih mati akibat penyakit (ekor)
BM.KA = benih mati akibat kualitas air yang buruk (ekor)
BM.K = benih mati akibat kanibalisme (ekor)

Menurut Kountur [3] langkah yang perlu dilakukan untuk melakukan perhitungan kemungkinan terjadinya risiko menggunakan metode ini dan aplikasinya pada pembenihan lele sangkuriang family pisces group adalah:

a. Menghitung rata-rata kejadian berisiko Rumus yang digunakan untuk menghitung rata-rata benih ikan lele yang diproduksi adalah:

$$\bar{x} = \frac{\sum_{i=1}^{n} xi}{n}$$

Dimana: x = Nilai rata-rata dari kejadian berisiko
xi = Nilai per bulan dari kejadian berisiko
n = Jumlah data

b. Menghitung nilai standar deviasi dari kejadian berisiko

$$s = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n} (xi - \bar{x})^2}{n-1}}$$

Dimana: s = Standar deviasi dari kejadian berisiko
xi = Nilai per bulan dari kejadian berisiiko
x = Nilai rata-rata dari kejadian berisiko
n = Jumlah data

c. Menghitung z-score

$$z = \frac{x - \bar{x}}{s}$$

Dimana: z = Nilai z-score dari kejadian berisiko
x = Batas risiko yang dianggap masih dalam taraf normal
x = Nilai rata-rata kejadian berisiko
s = Standar deviasi dari kejadian berisiko

Analisis Dampak Risiko Metode yang paling efektif digunakan dalam mengukur dampak risiko adalah VaR (*Value at Risk*). Var adalah kerugian terbesar yang mungkin terjadi dalam rentang waktu tertentu yang diprediksikan dengan tingkat kepercayaan tertentu. Menurut Kountur (2008), VaR dapat dihitung dengan rumus berikut.

$$VaR = \bar{x} + z\left(\frac{s}{\sqrt{n}}\right)$$

Dimana:
VaR = Dampak kerugian yang ditimbulkan oleh kejadian berisiko
X = Nilai rata-rata kerugian akibat kejadian berisiko
Z = Nilai z yang diambil dari tabel distribusi normal
S = Standar deviasi kerugian akibat kejadian berisiko
N = Banyaknya kejadian berisiko

ISBN : 978-602-73463-1-4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Family Pisces Group

Family Pisces Group adalah pembudidaya ikan tahap pembenihan yang telah memiliki sertifikat Lele Sangkuriang. Family Pisces Group berlokasi di kelurahan Pasie Nan Tigo Kecamatan Koto Tangah Kota padang Sumatra Barat. Luas lahan yang dimiliki dan digunakan sebagai tempat usaha yaitu 1500 m^2 dengan status kepemilikan lahan yaitu milik sendiri. Adapun alur kegiatan pembenihan ikan lele sangkuriang di family pisces group bisa dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1. Alur kegiatan pembenihan ikan lele sangkuriang di family pisces group

Family Pisces Group melakukan kegiatan produksi mulai dari pemeliharaan induk, pemijahan induk baik secara alami, penetasan telur, pemeliharaan larva, pemeliharaan benih hingga pemanenan benih lele sangkuriang. Lama pemeliharaan yang dibutuhkan untuk menghasilkan benih berukuran 2-3 cm yaitu 25 hari sampai 30 hari. Dalam melakukan kegiatan produksi, Family Pisces Group menerapkan teori produksi pembenihan dengan cukup baik, karena pemilik Family Pisces Group adalah lulusan jurusan budidaya perikanan dan selalu memberikan pelatihan baik secara teori maupun praktek kepada karyawannya. Namun dalam penerapannya masih ada beberapa hal yang belum dilakukan dengan baik karena adanya keterbatasan seperti pemberian pakan.

A. Analisis Risiko Produksi Pembenihan Ikan Lele Sangkuriang

1. Hama.

Organisme yang menjadi hama yang bersifat predator atau pemangsa utama bagi benih lele Sangkuriang berdasarkan kondisi di Family Pisces Group adalah kelelawar, burung, dan kodok. Keberadaan hama pemangsa ini tentu akan merugikan karena akan menyebabkan benih yang dipelihara mati akibat dimangsa oleh hama pemangsa tersebut. Pada Family Pisces Group, kematian yang disebabkan oleh hama yaitu sebanyak 144.159 ekor dari jumlah benih awal yaitu 2.241.000 ekor. Kematian tersebut adalah kematian yang terjadi sejak juni 2015 – mei 2016.

2. Penyakit

Penyakit yang disebabkan oleh bakteri adalah *Motile Aeromonas Septicemea* (MAS) atau yang lebih dikenal dengan nama penyakit bercak merah. Penyakit tersebut disebabkan oleh bakteri *Aeromonas hydrophila*. Sedangkan jamur yang dapat menyebabkan penyakit pada benih lele adalah jamur *Sapolegnia* dan jamur *Achyla*. Pada Family Pisces Group, kematian yang disebabkan oleh penyakit yaitu sebanyak 143.001 ekor dari

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

jumlah benih awal yaitu 2.241.000 ekor. Kematian tersebut adalah kematian yang terjadi sejak Juni 2015 – mei 2016.

3. Kualitas Air

Kualitas air yang buruk dapat menyebabkan kematian larva atau benih yang dapat merugikan suatu usaha. Kematian larva atau benih yang terjadi di Family Pisces Group yaitu disebabkan kandungan pH air yang rendah atau dibawah 5. Selain pH yang asam, kematian juga dapat disebabkan karena perubahan suhu lebih dari 5^0 C secara drastis dalam waktu yang singkat. Perubahan suhu lebih dari 5^0 C yang drastis tidak hanya menyebabkan kematian, namun juga menghambat laju pertumbuhan benih ikan.

Pada Family Pisces Group, kematian yang disebabkan oleh kualitas air (pH asam dan perubahan suhu secara drastis) yaitu sebanyak 327.686 ekor dari jumlah benih awal yaitu 2.241.250 ekor. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan pada bulan Mei 2016 di lokasi penelitian, jumlah kematian benih yang terjadi pada bulan Mei yang disebabkan oleh kualitas air (pH asam dan perubahan suhu secara drastis) yaitu 30.490 ekor dari jumlah benih awal yaitu 186.750 ekor.

4. Kanibalisme

Kanibalisme terjadi tidak hanya karena keragaman ukuran, namun juga karena kualitas benih. Biasanya benih yang berkualitas baik (lincah dan aktif) akan memangsa benih yang berkualitas buruk (pasif), walaupun ukuran badan benih yang kanibal lebih kecil dari benih yang dimangsa. Kanibalisme juga dapat disebabkan oleh padat tebar yang terlalu tinggi. Padat tebar yang tinggi mengakibatkan ruang gerak ikan terbatas dan tingkat persaingan makanan dan oksigen menjadi tinggi. Kanibalisme sering terjadi pada saat musim hujan. Hal ini dikarenakan sulitnya mendapatkan pasokan pakan alami berupa cacing sutera pada musim tersebut. Keterlambatan dalam melakukan sortir juga dapat memicu tingginya tingkat kanibalisme.Kematian terbanyak pada benih di Family Pisces Group yang diakibatkan kanibalisme terjadi pada bulan mei yaitu 47 % dari total kematian. Pada Family Pisces, kematian yang disebabkan oleh kanibalisme yaitu sebanyak 227.673 ekor dari jumlah benih awal yaitu 2.241.000 ekor.

B. Analisis Probabilitas Sumber Risiko Produksi

Data yang digunakan dalam analisis probabilitas adalah hasil wawancara dengan pemilik usaha. Data tersebut adalah data kematian benih yang disebabkan oleh masing-masing sumber risiko produksi pada tahun 2015-2016. Penentuan jumlah, kondisi, dan batas nilai yang digunakan oleh pemilik usaha mengacu pada pengalaman terdahulu. Perhitungan analisis probabilitas terjadinya risiko dari masing – masing sumber risiko produksi diolah menggunakan metode nilai standar atau Z-score.

Tabel 1. Probabilitas Risiko dari Sumber Risiko di Family Pisces Group Tahun 2016

No	Sumber Risiko Produksi	Probabilitas (%)
1	Hama	17,11
2	Penyakit	16,97
3	Kualitas Air	38,89
4	Kanibalisme	27,02

Berdasarkan Tabel 1 diketahui bahwa nilai probabilitas masing – masing sumber risiko produksi dari yang terbesar sampai yang terkecil yaitu kualitas air 38,89 persen, kanibalisme sebesar 27,02 persen, hama sebesar 17,11 persen, dan penyakit sebesar 16,97 persen.

Nilai Z = 0,07 untuk sumber risiko kanibalisme jika dipetakan pada tabel distribusi Z akan menunjukkan nilai 0,472. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemungkinan terjadinya kematian yang diakibatkan oleh kualitas air yang melebihi batas normal kematian yaitu 20.000 ekor adalah 47,2% persen. Kanibalisme adalah sumber risiko produksi yang dihadapi oleh Family Pisces Group dengan nilai probabilitas terbesar dibandingkan sumber lainnya. Hal ini terkait dengan sulitnya untuk menyediakan kuantitas pakan alami yang mencukupi, karena sampai saat ini sumber pakan alami yaitu cacing sutera masih didapat dari alam.

Nilai Z yang diperoleh untuk sumber risiko kualitas air adalah 0,14. Nilai tersebut jika dipetakan pada tabel distribusi Z akan menunjukkan nilai 0,444. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemungkinan terjadinya kematian yang diakibatkan oleh hama yang melebihi batas normal kematian yaitu 30.000 ekor adalah 44,4 persen. Hasil Kualitas air adalah sumber risiko produksi yang dihadapi oleh Family Pisces Group dengan nilai probabilitas terbesar kedua setelah kualitas air.

Nilai Z yang diperoleh untuk sumber risiko penyakit adalah 0,28. Nilai tersebut jika dipetakan pada tabel distribusi Z akan menunjukkan nilai 0,390. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemungkinan terjadinya kematian

yang diakibatkan oleh hama yang melebihi batas normal kematian yaitu 15.000 ekor adalah 39 persen. Penyakit adalah sumber risiko produksi yang dihadapi oleh Family Pisces Group dengan nilai probabilitas yang ketiga setelah kanibalisme dan kualitas air. Penyakit yang ada pada Family Pisces Group disebabkan oleh bakteri. *Aeromonas* dan jamur *Achyla* atau *Sapolegnia*. Kematian terbanyak yang diakibatkan oleh penyakit terjadi pada bulan April.

Z yang diperoleh untuk sumber risiko hama adalah 0,30. Nilai tersebut jika dipetakan pada tabel distribusi Z akan menunjukkan nilai 0,382. Nilai tersebut memiliki arti bahwa kemungkinan terjadinya kematian yang diakibatkan oleh hama yang melebihi batas normal kematian yaitu 15.000 ekor adalah 38,2 persen. Hasil pencarian probabilitas pada tabel distribusi Z dapat dilihat pada lampiran 20. Hama adalah sumber risiko produksi yang dihadapi oleh Family Pisces Group dengan nilai probabilitas terendah dibandingkan sumber risiko produksi lainnya.

C. Analisis Dampak Sumber Risiko Produksi

Pada perhitungan dampak risiko produksi ditentukan tingkat keyakinan yang digunakan yaitu 70 persen dan sisanya *error* yaitu 30 persen. Harga jual benih ikan lele sangkuriang berukuran 2-3 cm yaitu Rp 50/ekor. Harga sebesar Rp 50/ekor untuk benih lele berukuran 2-3 cm adalah harga yang ditetapkan oleh pemilik usaha dan disepakati oleh pembeli atau konsumen. Harga benih tersebut bisa saja berubah sesuai dengan harga pakan benih ikan lele.

Tabel 2. Dampak Risiko dari Sumber Risiko Produksi di Family Pisces Group Tahun 2015-2016

No	sumber Risiko Produksi	Dampak (Rp)
1	Hama	677.126
2	Penyakit	679.519
3	Kualitas Air	1.505.162
4	Kanibalisme	1.058.261

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa dampak yang diakibatkan oleh masing-masing sumber risiko produksi dari yang terbesar sampai yang terkecil yaitu kualitas air Rp 1.505.162, kanibalisme Rp 1.058.261, penyakit Rp 679.519, hama Rp 677.126.

Dampak yang diakibatkan oleh sumber risiko kualitas air adalah Rp 1. 505.162 pada tingkat kepercayaan 70 persen. Hal tersebut berarti bahwa kerugian maksimal yang diterima akibat kualitas air adalah Rp 1.505.162, namun kemungkinan kerugian diluar Rp 1.505.162 sebesar 30 persen. Kerugian terbesar akibat kualitas air terjadi pada bulan januari, september, dan maret. Bulan-bulan tersebut adalah bulan dengan musim penghujan yang dapat mempengaruhi kualitas air terutama perubahan suhu air yang drastis dan membuat kandungan pH air menjadi asam sehingga mengakibatkan kematian benih hingga 60 persen.

Dampak yang diakibatkan oleh sumber risiko kanibalisme adalah Rp 1.058.261 pada tingkat kepercayaan 70 persen. Hal tersebut berarti bahwa kerugian maksimal yang diterima akibat kanibalisme adalah Rp 1.058.261, namun kemungkinan kerugian diatas Rp 1.058.261 sebesar 30 persen. Kerugian terbesar akibat kanibalisme terjadi pada bulan April dan Mei 2016. Bulan-bulan tersebut adalah bulan dengan musim penghujan sehingga Family Pisces Group kesulitan untuk mendapatkan pasokan pakan alami. Kekosongan pasokan pakan alami tersebut dapat memicu tingginya tingkat kematian benih yang disebabkan kanibalisme.

Dampak yang diakibatkan oleh sumber risiko penyakit adalah Rp 679.519 pada tingkat kepercayaan 70 persen. Hal tersebut berarti bahwa kerugian maksimal yang diterima akibat penyakit adalah Rp 679.519, namun kemungkinan kerugian diluar Rp 679.519 sebesar 30 persen. Kerugian terbesar akibat penyakit pada bulan april 2016. Penyakit pada bulan tesebut disebabkan karena pengelolaan kualitas air yang kurang baik sehingga memicu timbulnya penyakit.

Dampak yang diakibatkan oleh sumber risiko hama adalah Rp 677.126 pada tingkat kepercayaan 70 persen. Hal tersebut berarti bahwa kerugian maksimal yang diterima akibat hama adalah Rp 677.126, namun kemungkinan kerugian diluar Rp 677.126 sebesar 30 persen. Kerugian terbesar akibat hama terjadi pada bulan maret dan april 2016. Pada bulan tersebut terdapat banyaknya hama Kodok dan Burung yang memangsa benih ikan lele sangkuriang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Dari penelitian yang dilakukan mengenai analisis risiko produksi pembenihan ikan lele sangkuriang pada Family Pisces Group dapat disimpulkan bahwa :

1. Sumber risiko yang dihadapi pelaku usaha yaitu hama, penyakit, kualitas air dan kanibalisme.
2. Berdasarkan hasil analisis probabilitas atau kemungkinan terjadinya risiko,diperoleh nilai probabilitas masing – masing sumber risiko produksi dari yang terbesar sampai yang terkecil, yaitu : 1) kanibalisme sebesar 47,2 persen, 2) kualitas air sebesar 44,4 persen, 3) hama sebesar 38,2 persen, 4) penyakit sebesar 39,0 persen.
3. Berdasarkan hasil analisis dampak risiko, diperoleh nilai dampak yang diakibatkan oleh masing – masing sumber risiko produksi dari yang terbesarsampai yang terkecil, yaitu : 1) kualitas air sebesar Rp 1.505.162, 2) kanibalisme sebesar Rp 1.058.261, 3) penyakit sebesar Rp 679.519, dan 4) hama sebesar Rp 677.126.

Saran

Berdasarkan kondisi yang terjadi di lapangan, saran yang dapat diajukan berupa alternatif strategi penanganan risiko yaitu :

1. Untuk menjaga kualitas air sebaiknya membuat atap pada setiap kolam yang bertujuan untuk menjaga pH air saat hujan turun dan mencegah perubahan suhu yang drastis saat panas.
2. Untuk mengatasi kanibalisme sebaiknya Family Pisces Group menjalin kerjasamadengan beberapa penjual cacing sutera agar dapat menjamin ketersediaan pakan alamiterutama pada musim hujan

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kelautan dan perikanan dalam angka. 2014. Kementrian Kelautan dan Perikanan. 302 hal.
[2] Khairuman dan K. Amri. 2009. Peluang Usaha dan Teknik Budidaya lele Sangkuriang. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta
[3] Kountur (2008) dalam Sahar, Bujang. 2010. Manajemen Risiko Pembenihan Larva Ikan Bawal Air Tawar Studi Kasus pada Ben's Fish Farm Cibungbulang Kabupaten Bogor. [Skripsi]. Bogor. Departemen Agribisnis. Fakultas Ekonomi dan Manajemen. 93 hal.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PARIWISATA DI DESA PLUMBON GABANG KECAMATAN GUDO KABUPATEN JOMBANG BERDASARKAN ASPIRASI MASYARAKAT

Eko Budi Santoso[1)], **Arwi Yudhi Koswara**[1)], **Belinda Ulfa Aulia**[1)]

[1)]Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Email : ekobudis@hotmail.com

Naskah diterima :10 Maret 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 18 April 2017

ABSTRAK

Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang dikenal sebagai desa sentra pertanian, juga sentra industri manic-manik dan jalur lintas alternatif Surabaya/Jombang ke Kidiri Jawa Timur. Desa ini memiliki potensi Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW) sebagai desa wisata melalui usaha kerajinan manik-manik. Adanya ODTW dan akses menuju desa wisata menjadi modal awal pembangunan pariwisata, sedangkan fasilitas pariwisata dan hospitality services belum dikembangkan. Dari kondisi ini perlu dilakukan penelitian pengembangan infrastruktur pariwisata yang mendukung pengembangan Desa Plumbon Gabang sebagai desa wisata. Untuk mendapatkan arahan pengembangan infrastruktur yang dikembangkan langkah pertama dilakukan survey kondisi eksisting berbagai fasilitas yang ada. Hasilnya adalah tabulasi kondisi eksisting fasilitas desa yang mendukung pengembangan wisata. Kedua dilakukan FGD dan participatory mapping dengan melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka digunakan pendekatan Participatory Rural Appraisal (PRA) dengan menggunakan teknik participatory mapping. Selanjutnya ketiga dilakukan gap analysis terhadap fasilitas pariwisata. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil akhir dilakukan analisis triagulasi dari teori perencanaan pariwisata perdesaan, kebijakan pembangunan desa dan hasil analisis sebelumnya. Dari hasil analisa dapat disimpulkan arahan pengembangan Infrastruktur Pariwisata di Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang berdasarkan Aspirasi Masyarakat meliputi, pengembangan fasilitas showroom sebagai sarana pamer pembuatan manik manik yang dapat dilakukan sendiri oleh wisatawan, pengembangan area peristirahatan terintegrasi showroom manik manik, pelebaran jalan di sekitar showroom dan area peristirahatan, gapura penanda desa wisata, dan tempat informasi pemandu wisata. Harapanya pembangunan infrastruktur pariwisata ini mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Desa Plumbon Gabang dengan menjaring orang dan/atau kendaraan yang lewat pada jalur lintas alternatif ini, disamping pengunjung yang secara khusus memang tertarik pada pembuatan kerajinan manik-manik.

Kata kunci: *Pembangunan Desa, Desa Wisata, Infrastruktur Pariwisata, Aspirasi Masyarakat*

PENDAHULUAN

Secara umum pengembangan pembangunan perdesaan biasanya bertumpu pada sektor pertanian, industri kecil, pariwisata desa dan jasa perdagangan hasil pertanian. Pengembangan sektor-sektor ini didasarkan pada potensi dan masalah yang dihadapi di desa seperti prasarana terbatas seperti jalan, irigasi, pasar, informasi, kesehatan serta lemahnya keterkaitan antar kegiatan ekonomi baik sektoral maupun spasial. [1]. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengamanatkan adanya kemandirian dan partisipasi masyarakat desa dalam pembangunan. Desa memiliki kewenangan luas sebagai daerah otonom untuk mengelola wilayahnya dalam pembangunan. Peran desa sangat penting dalam mewujudkan pembangunan pada tataran nasional, sehingga kini masyarakat desa bukan lagi hanya berperan sebagai obyek pembangunan, melainkan sudah menjadi subyek pembangunan tersebut.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan upaya untuk memandirikan masyarakat desa melalui potensi yang dimiliki untuk menetapkan pilihan-pilihan kegiatan yang paling sesuai bagi kemajuannya [2]. Upaya pemberdayaan masyarakat desa dapat memberikan stimulasi untuk mendorong atau memotivasi

individu agar memiliki kemampuan atau keberdayaan dalam memutuskan pilihan-pilihannya melalui proses dialog. Proses dialog dapat membangun kapasitas masyarakat desa dalam perumusan program-program dalam mengatasi permasalahan yang ada dimasyarakat, sehingga tujuan-tujuan pembangunan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan pada kurun waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu, untuk mempercepat pembangunan Desa Plumbon Gambang, diperkulan partisipasi masyarakat desa dalam proses mencari potensi dan masalah sehingga dapat tersusun program-program pembangunan desa yang berkelanjutan.

Di desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang telah mulai meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan usaha kecil dan mikro berupa pengembangan industri kecil dan menengah usaha kerajinan manik-manik dan turunannya. Dari adanya 121 kegiatan usaha manik-manik bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.007 pekerja tetap dan 600 pekerja tidak tetap. Selain itu juga terdapat lembaga APMA (Asosiasi Pengusaha Manik-mnik dan Aksesoris). Kondisi ini mendukung Desa Plumbon Gabang menjadi tujuan wisata manik-manik. Tersedianya akses dari Kabupaten Jombang menuju Kediri yang merupakan jalan alternatif Jombang-Kediri via Simpang Lima Gumul Kediri, menjadikan wisata manik-manik Desa Plumbon Gabang mempunyai akses baik dari Kediri maupun Jombang. Sayangnya pengembangan Desa Wisata Plumbon Gabang belum sepenuhnya didukung kelengkapan infrastruktur pariwisata pada umumnya. Dari sini disadari bahwa perlu kajian penyediaan infrastruktur pariwisata di Desa Plumbong Gabang.

Membangun desa menjadi kawasan wisata perlu memperhatikan beberapa hal antara lain: mengembangkan potensi unggulan yang dimiliki oleh desa, memperkuat hubungan antara fungsi pengembangan kegiatan pariwisata dengan sektor lain, perbaikan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk menjadi bagian dari pengembangan desa wisata [3]. Oleh sebab itu, potensi dan kekuatan yang ada di bidang kerajinan manik-manik bisa menjadi langkah awal dalam membangun desa wisata.

METODE PENELITIAN

Untuk mendapatkan arahan pengembangan infrastruktur yang dikembangkan langkah pertama dilakukan survey kondisi eksisting berbagai fasilitas yang ada. Hasilnya adalah tabulasi kondisi eksisting fasilitas desa yang mendukung pengembangan wisata. Kedua dilakukan FGD dan *participatory mapping* dengan melibatkan masyarakat dan perangkat desa. Untuk mendapatkan informasi yang akurat maka digunakan pendekatan *Participatory Rural Appraisal* (PRA) dengan menggunakan teknik *participatory mapping*. Pemetaan partisipatif adalah proses pembuatan peta yang berusaha meperlihatkan kesatuan antara lahan dengan komunitas lokal dengan menggunakan pemahaman umum dan simbol kartografi (legenda peta) yang dikenali masyarakat lokal [4]

FGD memungkinkan peneliti dan informan berdiskusi intensif dan tidak kaku dalam membahas isu-isu yang sangat spesifik. FGD juga memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi secara cepat dan konstruktif dari peserta yang memiliki latar belakang berbeda-beda. Analisa data dilakukan untuk menghasilkan fakta kondisi desa sebagai titik arahan rencana.

Fakta wilayah terdiri atas potensi wilayah, faktor pembatas, peluang, dan hambatan. Selanjutnya ketiga dilakukan *gap analysis* terhadap fasilitas pariwisata. Selanjutnya untuk mendapatkan hasil akhir dilakukan analisis triagulasi dari teori perencanaan pariwisata perdesaan, kebijakan pembangunan desa dan hasil analisis sebelumnya. Teori perencanaan pariwisata perdesaan memberikan konsep desa wisata yang didukung potensi desa, hingga pengembangan pariwisata didesa bisa dinikmati oleh penduduk desa. Kebijakan perencanaan desa di Kabupaten Jombang didorong bersifat partisipatif yang ditandai keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. Diakhir perencanaan yang memperhatikan aspirasi masyarakat arahan didasarkan pada potensi yang dibutuhkan masyarakat sehingga apa yang direncanakan/diarahkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif wilayah Desa Plumbon Gambang, Kecamatan Gudo, Kabupaten Jombang terdiri dari 5 Dusun, 5 RW dan 22 RT. Adapun luas wilayah secara keseluruhan seluas : 173,860 Ha yang terdiri dari :

a. Pemukiman / Pekarangan Penduduk: 39,036 Ha
b. Sawah Pertanian: 133,424 Ha
c. Lain-lain: 1,400 Ha

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gambar. 1 Pola dan Struktur Ruang Desa Plumbon Gambang

Desa Plumbon Gambang mempunyai Visi Desa yaitu terwujudnya Desa Plumbon Gambang BERMESRA singkatan dari *BERSAMA MENUJU SEJAHTERA.* Keberadaan Visi ini merupakan cita-cita yang akan dituju di masa mendatang oleh segenap warga Desa Plumbon Gambang. Dengan visi ini diharapkan akan terwujud masyarakat Desa Plumbon Gambang yang maju dalam bidang usaha Industri Kerajinan Manik-manik dan pertanian serta sektor yang lain sehingga bisa mengantarkan kehidupan masyarakat Desa Plumbon Gambang yang sejahtera dan ekonominya mapan. Sedangkan misi Desa Plumbon Gambang dengan mempertimbangan potensi dan hambatan baik internal maupun eksternal, maka disusunlah Misi Desa Plumbon Gambang sebagai berikut:

1. Membangun sarana prasarana yang menunjang terwujudnya lingkungan yang bersih dan elok seperti pembuatan bak sampah.
2. Membangun sarana prasarana keamanan dan menumbuh kembangkan serta membangkitkan kesadaran masyarakat terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa seperti gotong rroyong, kerja bakti, gugur gunung dan pam swakarsa.
3. Membangun sarana prasarana perekonomian masyarakat seperti Pembagunan JITUT, plengsengan saluran irigasi, dam pembagi air, Gedung BUMDes serta penguatan kapasitas lembaga ekonomi yang ada yakni Gapoktan dan Kopwan serta APMA.
4. Mewujudkan dan mengembangkan kegiatan keagamaan untuk menambah keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.
5. Mewujudkan dan mendorong terjadinya usaha-usaha kerukunan antar dan intern warga masyarakat yang disebabkan karena adanya perbedaan agama, keyakinan, organisasi, dan lainnya dalam suasana saling menghargai dan menghormati.
6. Menata Pemerintahan Desa Plumbon Gambang yang kompak dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat masyarakat.
7. Meningkatkan pelayanan masyarakat secara terpadu dan serius.
8. Menumbuh Kembangkan Kelompok petani ternak dan Gabungan Kelompok Tani ternak serta bekerja sama denga HIPPA untuk memfasilitasi kebutuhan Peternakan.
9. Menumbuhkembangkan usaha kecil dan menengah.
10. Membangun dan mendorong majunya bidang pendidikan baik formal maupun informal yang mudah diakses dan dinikmati seluruh warga masyarakat tanpa terkecuali yang mampu menghasilkan insan intelektual, inovatif dan enterpreneur (Kewirausahawan) [5]

Upaya membangun dan mendorong usaha-usaha untuk pengembangan dan optimalisasi sektor pertanian, perkebunan, peternakan, dan perikanan, baik tahap produksi maupun tahap pengolahan hasilnya. Beberapa misi Desa Plumbon Gabang juga menitik beratkan pada upaya peningkatan infrastruktur. Kondisi infrastruktur hasil survey awal oktober 2016 adalah adanya masjid yang belum selesai pembangunannya. Kondisi balai desa yang perlu direnovasi, beberapa kali pelatihan manik-manik memanfaatkan balai desa, adanya jembatan yang perlu direhabilitasi. Kondisi sosial eksistingnya banyak warga yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, pasar manik-manik menurun dampak krisis global dan belum adanya showroom sebagai sentra manik-manik serta belum adanya gedung BUMDes yang menjadi sentra kegiatan. Sekarang ini Desa Plumbon Gambang Kecamatan Gudo Kab. Jombang menjadi sebagai sentra Industri kecil yang merambah pasar luar negeri dari industri kerajinan manik-manik berbahan baku kaca.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Desa Plumbon Gambang adalah Desa yang sangat terkenal, bukan hanya di dalam negeri saja namun sudah mendunia, ini disebabkan di desa Plumbon Gambang terdapat sentra industri manik-manik dari kaca, bahkan manik-manik sudah menjadi ikonnya Kabupaten Jombag, karena manik-manik kaca produksi Desa Plumbon Gambang sudah dikenal sampai keluar negeri. Dari 121 pengusaha manik-manik yang ada di Desa Plumbon Gambang bisa menyerap tenaga kerja sebanyak 1.007 pekerja tetap dan 600 pekerja tidak tetap.

Desa Plumbon Gabang memiliki keunggulan komparatif pada hal tertentu yang tidak dimiliki oleh wilayah lain. Posisinya adalah lokasi Desa Plumbon Gabang memiliki keuntungan dilintasi jalur alternative Jombang Kediri yang tidak dimiliki daerah lain di sekitarnya. Ditambah lagi Desa Plumbon Gabang memiliki keunggulan kompetitif misalnya dalam hal kualitas SDM, tenaga kerja yang efisiensi, dan teknologi yang digunakan dalam membuat manik-manik dari kaca. Adanya tenaga trampil mengolah limbah kaca menjadi barang berharga dan mempunyai nilai jual tinggi.

Hasil dari survey primer menunjukan ada berbagai ODTW yang bisa dikembangkan desa yaitu showroom kerajinan manik manik, ruang terbuka hijau di sekitar masjid jamik desa dan Rumah Baca Kayana. Komponen akses pariwisata, tersedia akses dari Kabupaten Jombang maupun Kabupaten Kediri. Komponen fasilitas pariwisata tersedia rumah makan/warung di sekitar showroom manik manik, ruang terbuka berupa lapangan desa yang sementara ini untuk parkiran, toilet menumpang di showroom, fasilitas atm bersama, dan tempat ibadah. Sedang komponen *hospitality services* tersedia hansip di desa dan limas yang beberapa kali menjadi pemandu wisatawan lokal menuju pusat industri manik manik.

Gambar 2 Peta Partisipatif Aspek Fisik Termasuk Permasalahan Infrastruktur Pengairan Pertanian.
Sumber: dokumen penulis, 2016

Ada tiga komponen penting dalam mengembangkan destinasi wisata, yaitu obyek daya tarik wisata, akses transportasi, fasilitas pendukung wisata, dan *hospitality service*. Hasil FGD diketahui kebutuhan pengembangan ODTW berupa atraksi menyusun sendiri variasi manik-manik di showroom warga, area peristirahatan berfasilitas showroom manik-manik, dan pelebaran jalan di sekitar showroom. Dari komponen akses perlu ditambahkan penanda bahwa wisatawan memasuki area pusat manik-manik Desa Plumbon Gabang serta gapura/tugu manik-manik. Berdasarkan kebutuhan *hospitality services* warga mengusulkan pelatihan pemandu wisata serta promosi desa wisata plumbon gabang ke Kabupaten Kediri, menarik potensi wisatawan dari Simpang Lima Gumul Kediri.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1. Kondisi Eksisting Infrastruktur dan Kebutuhan Infrastruktur Pariwisata

No.	Komponen Pariwisata	Kondisi Eksisting	Kebutuhan Pariwisata
1.	Obyek Daya Tarik Wisata (ODTW)	Showroom manik-manik, Rumah baca Kayana, dan masjid Jamik	Area peristirahatan mendukung show-room manik-manik, tempat workshop membuat manik2 sendiri, gapura penanda masuk desa wisata Plumbon Gabang.
2.	Akses Transportasi	Jalan kolektor primer Jombang Kediri baik, adanya jalan poros desa yang rusak dan sulit dilalui	Pelebaran jalan di sekitar area peristirahatan untuk manuver parkir yang keluar masuk lokasi, penanda lokasi area peristirahatan. Peningkatan jalan poros desa dari industri kerajinan ke showroom manik-manik dan lokasi 3 ODTW.
3.	Fasilitas Pendukung Pariwisata	RTH, Rumah Makan, ATM, tempat ibadah.	Perlu tersedia pusat informasi wisata, dan jaringan wifi.
4.	Hospitality Services	Ada petugas keamanan yang sering ditanya oleh wisatawan tentang lokasi industri manik2.	tempat pemandu wisata, tempat pelatihan pemandu wisata, pemandu wisata membuat manik2 sendiri.

Sumber: Hasil FGD, 2016

Naiknya tingkat pendapatan perkapita desa Plumbon Gambang tidak lepas dari berkembangnya Home Industri Kerajinan Manik-manik dan sektor Pertanian juga Perdagangan yang mampu menyerap tenaga kerja 1.007 orang untuk Home Industri. Sedangkan komposisi sumber pendapatan masyarakat secara berturut-turut sebagai berikut :

1. Sektor Pertanian (Pertanian tanaman pangan, Perkebunan, Perikanan dan Perternakan).
2. Industri Kerajinan Manik-manik
3. Perdagangan Barang dan Jasa.

Di Desa Plumbon Gambang terdapat juga Asosiasi Pengusaha Manik-manik dan Aksesoris (APMA), Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN) dan Koperasi Wanita Sejahtera. Peran serta ketiga lembaga tersebut sangat membantu permodalan baik Pengusaha Manik-manik, Petani dan Pengusaha lainnya. Sedangkan untuk permodalan secara individu baik petani, pengusaha manik-manik, pedagang memperoleh kredit dari BUMN dan Perbankan. Diharapkan kelembagaan tersebut dapat mendorong pertumbuhan pariwisata desa yang berbasis pada industri kerajinan manik-manik.

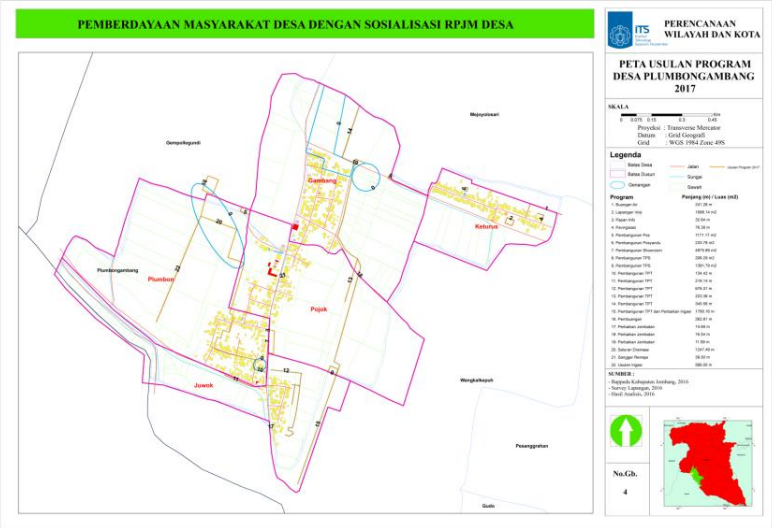

Gambar 3. Peta Partisipatif Aspek Fisik Termasuk Di Dalamnya Usulan Infrastruktur Pengairan Pertanian
Sumber: analisis penulis, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4

Gambar 4. Proses Sosial Mapping Aspek Infrastruktur

KESIMPULAN DAN SARAN

Pada dasarnya, masyarakat memiliki kemampuan dalam melakukan mengumpulan potensi dan permasalahan untuk mengembangkan desanya. Namun, diperlukan intervensi luar untuk mempercepat proses tersebut, khususnya dari akademisi. Intevensi tersebut berupa pengembangan masyarakat dengan pendekatan *participatory rural planning* (PRA) dengan bantuan teknik *participatory mapping*. Dengan pendekatan PRA dan bantuan teknik *participatory mapping* dalam masyarakat mampu menggambarkan lokasi-lokasi yang menjadi potensi, masalah, beserta pengembangan desa sebagai solusinya.

Arahan pengembangan Infrastruktur Pariwisata di Tingkat Desa Plumbon Gabang Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang berdasarkan aspirasi masyarakat meliputi pengembangan ODTW, jalan akses, fasilitas pendukung wisata dan *hospitality services*. Pada komponen pengembangan ODTW perlu dikembangan fasilitas workshop dimana wisatawan dapat membuat kerajinan manik-manik sendiri, pengembangan area peristirahatan terintegrasi dengan showroom manik-manik dan gapura penanda masuk desa wisata Plumbon Gabang.

Pada komponen akses pariwisata dibutuhkan sarana fisik dan prasarana perlu dilakukan pelebaran jalan di sekitar showroom dan area peristirahatan, dan peningkatan jalan poros desa dari industri rumah tangga ke showroom manik-manik dan lokasi 3 ODTW yaitu area peristirahatan, tempat workshop membuat manik-manik sendiri dan rumah baca kayana. Komponen fasilitas pendukung pariwisata perlu dikembangkan pusat informasi pariwisata, dan jaringan wifi. Sedangkan komponen *hospitality services* perlu tempat pos pemandu wisata, tempat pelatihan pemandu wisata. Harapanya infrastruktur pariwisata ini mampu meningkatkan kunjungan wisata ke Desa Plumbon Gabang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] M. Sadyohutomo. 2014. Tata Guna Tanah dan Penyerasian Tata Ruang, Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
[2] Sumodiningrat, Gunawan. 1996. Pemberdayaan Masyarakat dan Jaring Pengaman Sosial. Jakarta, PT. Gramedia Pustaka Utama.
[3] A.D. Ardhala, E.B. Santoso, H. Sulistyarso, "Determining The Potential Footwear Village To Developed As Creative Industries Tourism Area Study Case: Footwear Village, Mojokerto City, Indonesia", International Journal of Innovative Research in Science, Engineering and Technology , Vol. 5, Issue 1, pp. 536-542, Januray 2016.
[4] J. Corbett. 2009. Good Practices in Participatory Mapping. Kelowna: Univesity of Biritsh Columbia Okanagan,
[5] Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Plumbon Gambang 2014-2019, Pemerintah Desa Plumbon Gambang, Jombang, 2014.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KOPERASI MELALUI PERSPEKTIF PSIKOLOGI SOSIAL

Elfi Rahmadani[1)], Rudi Febriamansyah[2)] dan Ira Wahyuni Syarfi[2)]

[1)] Mahasiswa Doktoral PPS Unand Padang

[2)] Dosen Program Pasca Sarjana Universitas Andalas Padang

Email: Elfirahmadani@yahoo.co.id

Naskah diterima :4 Maret 2017 Naskah direvisi : 22 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Psikologi sosial merupakan perpaduan dari disiplin sosiologis yang menekankan pada kajian struktur sosial dankajian individualistik pada berbagai variasi perilaku manusia. Psikologi sosial menunjukkan pengaruh yang kuat bagi pengembangan koperasi secara eksplosif karena didalam pokok bahasan kelembagaannya terdapat hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompoknya atau interaksi sosial kelompok dengan kelompok. Perkembangan studi psikologi sosial tidak terlepas dari pengaruh pemikiran tokoh sosiologi dan filsafat klasik dan aliran pemikiran baru dalam psikologi sejak dekade 1900-an. Penelitian ini merupakan studi literatur atau kajian pustaka yang bertujuan mendeskripsikan periodisasi perkembangan sejarah psikologi (teori dan perspektif) sehingga melahirkan ilmu psikolog sosial dan menelusuri perkembangan studi psikologi sosial pada kelembagaan koperasi yang ada di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa sebagian besar studi pengembangan koperasi di Indonesia berkaitan dengan faktor SHU, pelayanan, partisipasi pengurus dan anggota, faktor internal pengelola dan manajemen. Sementara pada sisi lainnya, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk pengembangan koperasi dinilai belum mampu menambah jumlah koperasi yang aktif serta menciptakan kesejahteraan bagi pengurus dan anggota.

***Kata kjunci**: kelembagaan, koperasi, psikologi sosial.*

PENDAHULUAN

Pada dasarnya pengembangan ilmu psikologi sosial dipengaruhi oleh pemikiran dan teori ilmuwan tentang filsafat atau psikologi. Dimana filsafat telah mempelajari gejala-gejala kejiwaan sejak 500-600 tahun sebelum masehi melalui filsuf-filsuf Yunani kuno yaitu Socrates (469-399 SM), Plato (427-347) dan Aristoteles (384-322). Pada prinsipnya Socrates, Plato dan Aristoteles memiliki pendapat yang sama mengenai psikologi yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang hakikat jiwa serta prosesnya pada manusia sampai akhir.

Kecendrungan psikolog yang memper-luas analisis keilmuwannya dengan fokus kajian sosial menyebabkan lahirnya disiplin ilmu psikologi sosial. Adapun psikologi sosial secara resmi menjadi satu disiplin ilmu mandiri sejak tahun 1908. Pada tahun tersebut terdapat dua buah buku teks yang terkenal yaitu *"Intro-duction to Social Psychology"* yang ditulis oleh William Mc. Dougall (seorang psikolog) dan "*Social Psychology: An Outline and Source Book*, yang ditulis oleh E. A. Ross (seorang sosiolog). Berdasarkan latar belakang buku tersebut maka psikologi sosial bisa dipahami sebagai bagian dari psikologi dan bisa juga bagian dari sosiol ogi. Psikologi sosial merupakan pokok bahasan dalam sosiologi karena kajian struktur sosiologi dikenal ada dua perspektif utama yaitu perspektif struktural makro yang menekankan kajian struktur sosial dan perspektif mikro yang menekankan kajian individualistik sehingga dengan kata lain psikologi sosial menjelaskan variasi perilaku manusia. William Mc. Dougall menerangkan bahwa manusia berperilaku sosial karena nalurinya sedangkan E. A. Ross berpendapat bahwa perilaku sosial dari manusia diakibatkan oleh tata aturan dalam masyarakat yang mesti diikuti dan hal ini berkaitan dengan teori struktur sosial.[1]. Pendapat E.A. Ross dilengkapi oleh F. Allport [2] dan menjelaskan perilaku sosial bukan hanya disebabkan instink yang bersifat biologik dan berlaku bagi setiap orang dan juga bukan hanya karena dipengaruhi oleh struktur sosial. Perilaku sosial terjadi pada individu karena beragam faktor yangmempengaruhinya.

Ilmu psikologi dilndonesia memiliki sejarah yang pendek daripada keberadaan psikologi dinegara-negara barat dan perkem-bangan ilmu psikologinya telah dimulai pada tahun 1953 yang dipelopori oleh Slamet

Imam Santoso dengan mendirikan lembaga pendidi-kan psikologiyang mandiri pertama pada tahun 1960.Lembaga tersebut sejajar dengan fakultas-fakultas lain di UI dan kemudian dikembangkan di UNPAD dan UGM [3].Kebutuhan ilmu psiko-logi sosial di Indonesia sama besar dengan negara barat lainnya, tapi aplikasinya kurang menyentuh dan menyeluruh pada kajian kelem-bagaan masyarakat terutama koperasi.

Berdasarkan fenomena tersebut, maka kajian pengembangan koperasi di Indonesia secara eksplosif perlu ditinjau dari perspektif psikologi sosial baik dari pemikiran tokoh klasik maupun yang berkembang saat ini karena koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial yang didalamnya terdapat sekumpulan orang-orang yang memiliki kepen-tingan yang sama, memiliki konsep dan perilaku sosial (mengandung norma-norma, perilaku hubungan, kerjasama dan interaksi antara individu dan kelompok serta peraturan-peraturan). Secara khusus, artikel ini bertujuan untuk (1).Mendeskripsikan periodisasi perkem-bangan sejarah psikologi (teori dan perspektif) sehingga melahirkan ilmu psikolog sosial dengan pendalaman faktor-faktor yang mempengaruhinya, (2).Mengetahui perkem-bangan studi koperasi dan psikologi sosial di Indonesia dan (3). Memberikan gambaran kebijakan pengembangan koperasi di Indonesia yang terkait dengan psikologi sosial dalam konteksperencanaan pengembangan pedesaan melalui koperasi perkebunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada bulan September 2016 dan merupakan kajian pustaka atau studi literatur.Data sekunder penelitian ini berasal dari buku-buku, artikel ilmiah, surat kabar, buletintentang sejarah lahirnya psikologi dan psikologi sosial, serta pendekatan yang berkaitan dengan sosiologi dan psikologi sosial.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Periodisasi Lahirnya Psikologi dan Psikologi Sosial
A. Masa Pra Yunani Kuno (abad 15-7 SM)

Pada masa ini ditandai bagaimana pengetahuan berdasarkan pengalaman diterima sebagai fakta dengan sikap *receptive mind* (semua keterangan dihubungkan dengan dunia magis). Kemampuan manusia berpikir, menulis, berhitung, menyusun kalender yang didasarkan sintesa terhadap hasil abstraksi yang dilakukan, dan kemampuan meramalkan peristiwa berdasarkan hal sebelumnya yang pernah terjadi seperti gerhana bulan dan matahari[4].

B.Zaman Yunani Kuno (Abad 7-2 SM)
1. Pra-Socrates.

Pada masa ini, cara pikir manusiadipengaruhi oleh usaha mencari asal (asas) segala sesuatu (arche). Tokohnya adalah Pythagoras (580-500 SM), Democritus (460-370 SM) dikenal oleh konsepnya tentang atom, Zeno (490 SM) berhasil mengembangkan metode *reductio ad absurdum* untuk meraih kesimpulan yang benar.Aliran pra-Socrates terdiri darialiran Miletos, aliran Pythagoras, aliran Elea, aliran Pluralis, aliran Atomis, dan aliran Sofis[5].Pada zaman ini, terdapat aliran Socrates dengan tokoh filsafat Yunani Socrates (470-399 SM).Selanjutnya, aliran dualisme oleh Plato (428-348 SM)dan terdapat jugaaliran psikologi cartian oleh Rene Descrates (1596-1960) yang menerangkan tingkah laku hewan dalam prinsip mekanistis [6].

C.Zaman Pertengahan (Abad 2-14 M)

Tokoh pada zaman ini: St Agustinus(354-430 M) yang pemikirannya dipengaruhioleh filsafat Plato dan Thomas Aquinas (1225-1274).Pada zaman ini, Eropa dalammasa kegelapan (*dark age*) dan terdapatajaran dwimurtiyang mana jiwa dan raga manusia itu tak dapat dipisah-pisahkan/ dwimurti (dua jalan yakni jasmani dan rohani).[7].

D. Zaman Renaissance (Abad 14-17 M)

Istilah renaissance diperkenalkan Jules Michelet sejarawan Perancis dan dikembangkan oleh J. Burckhardt pada tahun 1860-an dan zaman ini disebut peralihan. Zaman ini menganggap manusiamemiliki pemikiran bebas, mencapai kemajuan atas hasil usaha sendiri. Tokoh lainnya: Roger Bacon (1214-1219), Copernicus (1473-1543), B. L. Vives (1492-1540), Tycho Brahe (1546-1601), Johannes Keppler (1571-1630), dan Galileo Galilei (1546-1642).Pada masa ini muncul aliran humanisme [8].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

E. Zaman Modern (Abad 17-19 M)

Zaman modern ditandai dengan berbagaipenemuan bidang ilmiah dan psikologi dikukuhkan sebagai ilmu yang berdiri sendiri oleh Wihelm Wundt dengan didirikannya laboratorium pertama di dunia (Kota Leipzig, Jerman) di tahun 1879. Sebelum tahun 1879, psikologi dianggap bagian dari filsafat. Pada zaman ini lahiraliran empirisme pada abad ke 17, aliran konstruktivisme (1886), aliran strukturalisme (1832-1920), aliran fungsionalisme (1842-1952), aliran behaviorisme (1878-1958), aliran psikologi gestalt (1880-1967), aliran psikoanalisis (1900), dan humanistik (1902-1987). Aliran empirismepelopornya Jhon Locke (1632-1704) dengan teori tabula rasa. Pada zaman ini juga ada aliran konstruktivisme oleh Giambatista Vico tahun 1710. [9].Selanjutnya, pada akhir 1800, muncul akar psikologi sosial di Eropa. Perang dunia pertama menyebabkan banyak psikolog mengunsi ke Amerika Serikat. Perkembangan ilmu psikologi membentuk aliran fungsionalisme dengan tokoh-tokohnya: William James, James Rowland Angell, John Dewey dan James Mc. Keen Cattell dengan aliran fungsionalisme [10].

Aliran strukturalisme juga berkembang pada 1879oleh Wilhem Wundt.Selanjutnya, aliran behaviorismeoleh Ivan Petrivich Pavlov (1849-1936), Edward lee Thorndike (1974-1949), John Broades Watson (1878-1958), Edward Chase Tolman (1886-1959) dan B.F. Skinner (1904).Selanjutnya, juga aliran psikoanalisis oleh Sigmund Freud (1856-1939), Carl Gustav Jung (1875-1961) dan Harry Stack Sullivan (1892-1949) [11].. Lalu aliran psikologi lainnya gestalt dan tokohnya: Max Wertheimer (1880-1943), Kurt Koffka (1886-1941) dan Wolfgang Kohler (1887-1967[12].. Pada aliran ini menghasilkan teori S (stimulus) dan R (Reson) pada ilmu komunikasi [13].

Ilmu psikologi sosial resmi menjadi satu disiplin ilmu pada tahun 1908 dan penelitian-penelitian dibidang psikologi sosial di negara barat telah dimulai periode 1920-1940. Pada tahun1900-an terjadi imigrasi besar-besaran penduduk Eropa Barat menuju Amerika Utara sehingga sejak saat itu penelitian-penelitian banyak berbicara tentang sikap, kebangsaan, dan kelompok-kelompok etnis [14]. Perkembangan psikologi sosial diikuti aliran humanistik yang dicetuskan oleh Abrahan Harold Maslow (1908-1970)[15].

F. Zaman Kontemporer (Abad 20 dan Seterusnya).

Pada masa inimuncul berbagai aliran filsafat yang telah berkembang pada abad modern seperti: neothomisme,neo-kantianisme, neo-hegelianisme,neo-marxisme, neopositivis-me dan sebagainya. Namun ada juga aliran filsafat yangbaru seperti: fenomenologi, eksis-tensialisme, pragmatisme, strukturalisme dan postmodernisme dan tokoh-tokohnya diantara-nya Russell dan Wittgenstein dengan metode analisa bahasa memilih sikap atau keyakinan ontologis sebagai alternatif terbaik dalama ktivitas berfilsafat, Edmund Husserl (tahun 1859-1938), selaku pendiri aliran fenomenologi, Jean Paul Sartre (1905-1980) aliran eksisten-sialisme. Michel Foucault dari tahun 1926 sampai 1984 merupakan tokoh yang berpe-ngaruh pada aliran filsafat strukturalisme dan tokoh pragmatisme, William James. Selanjutnya muncul aliran postmodernisme diakhir abad 20, dengan tokohnya Francois Lyotard (1924). [16].

Perspektif dan Teori Psikologi Sosial Dari Berbagai Ilmuwan

1. Perspektif perilaku (John B. Watson, 1941-1919).

Pendekatan ini pada tahun 1920 sampai dengan 1960-an. B.F. Skinner mengubah fokus perilaku melalui percobaan yang dinamakan*operant behaviour* dan *reinforcement*. Teorinya terdiri dari pembelajaran sosial (*Social Learning Theory*) dan pertukaran sosial (*Social Exchange Theory.*Teori pembelajaran sosial (*social learning theory)* dikembangkan oleh Neil Miller dan John Dollard pada tahun 1941 [17].Sementara, teori pertukaran sosial (*social exchange theory*) dikembangkan oleh psikolog John Thibaut dan Harlod Kelley (1959), sosiolog George Homans (1961), Richard Emerson (1962) dan Peter Blau (1964). Homans menulis dalam bukunya berjudul:"*Elementary Forms of Social Behavior*" pada tahun 1974. [18].

2. Perspektif kognitif (James Baldwin, 1897) dan Charles Cooley, 1902).

Baldwin dan Cooley memandang perilaku sosial manusia sebagai pemusatan penyusunan mental (pikiran, perasaan) dan memproses informasi yang datangnya dari lingkungan. Teori yang melandasi perspektif ini adalah teori medan (*Field Theory*) oleh Kurt Lewin, teori atribusi dan konsistensi sikap (*Concistency Attitude and Attribution Theory*) oleh Fritz Heider, dan teori kognisi kontemporer yang berkembang 1980-an [19].

3. Perspektif struktural

Para sosiolog Wiliam James, John Dewey, Robert Park dan Robert Linton di tahun 1936 memusatkan perhatian pada proses sosialisasi. Beberapa teori yang melandasi perspektif struktural adalah teori peran (*Role Theory*), teori pernyataan dan harapan (*Expectation-State Theory*) dan Posmodemisme (*Postmodemism)*[20].

a. Teori peran (*role theory*).

Robert Linton pada tahun 1936 mengemukakan seseorang mempunyai perilaku yang ditentukan oleh peran sosial. Glen Elder pada tahun 1975 membantu pengembangan teori Linton dan pendekatannya disebut *life-course*(setiap masyarakat mempunyai perilakusesuai dengan kategori-kategori usia) [21].

b. Teori pernyataan dan harapan (*expectation-state theory*)

Penemu teori ini ditemukan Joseph Berger dan rekan-rekannya di Universitas Stanford pada tahun 1972. Menurut teori ini, manusia sebagai individu harus mendasarkan harapannya pada atribut pribadinya[22].

c. TeoriPosmodemisme (*Postmodemism)*.

Teori ini menyatakan secara gradual seseorang akan kehilangan individualitasnya/kemandiriannya, konsep diri/jati diri. Dalam pandangan teori ini, erosi gradual individualitas munculbersamaan dengan terbitnya kapitalisme dan rasionalitas [23].

4. Perspektif interaksionis

Teori ini dikembangkan George Herbert Mead seseorang sosiolog dan pengajar psikologi sosial pada departemen filsafat Universitas Chicago. Teorinya memusatkan pada proses interaksi yang mempengaruhi perilaku sosial manusia. Dalam perspektif ini terdapat teori interaksi simbolis (*Symbolic Interaction Theory*) dan teori identitas (*Identity Theory*) [24].

a. Teori interaksi simbolis (*Symbolic Interaction Theory*)

Teori Interaksi diantara beberapa pihak akan berjalan lancar tanpa gangguan apapun jikagerak-isyarat (gesture) atau simbol yang dikeluarkan oleh masing-masing pihak dapat dimaknakan bersama sehingga semua pihak mampu mengartikan dengan baik. Namun tidak selamanya interaksi berjalan mulus,ada pihak tertentu yang menggunakan simbol tidak signifi-kan[25].

b. Teori identitas (*Identity Theory)*

Menurut Sarwono[26],teori ini dikemuka-kan Sheldon Stryker pada tahun 1980 yang memusatkan pada hubungan saling mempe-ngaruhi diantara individu dengan struktur sosial masyarakat (adanya interaksi simbolis dan identitas). Seseorang dibentuk oleh interaksi namun struktur sosial membentuk interaksi.

Aplikasi Psikologi Dalam Lembaga Koperasi di Indonesia

Psikologi di Indonesia sering dikaitkan dengan psikologi terapan dan psikologianalisis sehingga banyak menggunakan teknik proyeksi serta tes IQ untuk tujuan psikodiagnostik. Pada tahun 1960-an, aliran behaviorisme menjadi populer dengan adanya konstruksi tes dan metode-metode kuantitatif. Walaupun metode kuantitatif ini banyak digunakan, namun banyak pula peneliti yang bertahan pada metode kualitatif [27].

Tidak semua teori psikologi barat yang dapat diaplikasikan di Indonesia oleh peneliti karena Indonesia dan barat memiliki aliran dan etnik yang berbeda antar masyarakatnya. Peneliti Indonesia menggunakan berbagai pendekatan, teori dan metodologi yang berbeda dalam mengkaji masalah yang terkait hubungan profesi seperti psikiater, pendidikan dan manajemen organisasi perusahaan dan masih kurang berkembang dalam menyelesaikan masalah yang berhubungan dengan kelembagaan seperti koperasi. Sementara, kebijakan yang dikeluarkan pemerintah dalam pengembangan koperasi kurang mampu menambah jumlah koperasi yang aktif sehingga mempengaruhi kesejahteraan pengurus dan anggotanya. Disisi lain,sebetulnya keberadaan ilmu psikologi sosial dalam lembaga koperasi ini sangat dibutuhkan bagi pengembangannya. Mengingat koperasi merupakan lembaga ekonomi yang berwatak sosial dan identik dengan perkum-pulan orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama (didalamnya terdapat konsep sosiologis antar sesama baik terkait hubungan, kerjasama atau interaksi sosial antar pribadi dengan pribadi, pribadi dengan kelompok dan antar kelompok).

Penelitian Terdahulu Tentang Kajian Faktor Penentu Baik Buruknya Pengembangan Koperasi di Indonesia.

a. Faktor SHU

Peneliti pengembangan koperasi di Indonesiayang membahas dari faktor SHUsecara kuantitatif dan kualitatifdiantaranya: Sularti [28],Pratiwi [29],Hosekini[30],Albana [31],Lestari[32],dan lain-lainnya. Secara umum, studi-studi tersebutmenghubungkan SHU dengan indikator rasio keuangan, modal sosial, modal pinjaman, modal kerja, modal manusia, modal sendiri dan biaya operasional, dan aspek non keuangan (jumlah anggota, partisipasi anggota, volume usaha, kinerja pengurus, dankinerja manager).

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

b. Faktor Pelayanan

Para peneliti pengembangan koperasi yang mengaitkan dengan faktor pelayananbaik kuantitatif dan kualitatif diantaranya: Harjanto [33],Mahareni [34],Mulyani [35],Amiruddin dan Farida [36], dengan indikatorkemampuan manajerial, pengetahuan pengurus, kinerja karyawan, keandalan melayani permintaan dan keinginan anggota,tingkat partisipasi dan kepuasan anggota, serta penilaian produk koperasi (simpanan pokok, wajib dan sukarela).

c. Partisipasi Pengurus dan Anggota

Peneliti yang mengaitkan faktor partisipasi pengurus dan anggotauntuk pe-ngembangan koperasi baik kuantitatif dan kualitatif diantaranya:Mulyono [37], Aromatika [38],Satria [39],Putri [40],Utami, dkk[41], dan peneliti lainnya. Peneliti-peneliti ini beranggapanindikator yang mempengaruhi faktor partisipasi anggota koperasi adalah: kualitas, kemampuan/kinerja pengurus dalam analisis rasio keuangan koperasi, motivasi tingkat kepercayaan danloyalitas anggota melalui partisipasi modal, dan partisipasi usaha.

d. Faktor Internal Pengelola (Pengurus, Anggota, Manajer dan Karyawan)

Peneliti yang mengaitkan pengem-bangan koperasi dengan faktor internal pengurus, anggota, manajer dan karyawan inibaik kuantitatif dan kualitatif diantaranya:Hernawan [42],Kadaryono [43],Hidayah [44], Odhiansyah[45], Kharisma [46], dan mereka mengaitkanfaktor internal pengurus, anggota, manajer dan karyawan koperasi dengan indikator pendidikan,pengalaman, pengeta-huan, komitmen organisasi, motivasi kerja, kemampuan kerja baik dalam teknik, konseptual,kedisiplinan, rasa percaya diri dan jiwa kepemimpinan (untuk pengurus/manajer).

e. Manajemen Koperasi

Peneliti yang mengaitkan manajemen bagi pengembangan koperasi baik kuantitatif dan kualitatif diantaranya: Hidayat [47], Darwas [48], Muchamad [49],Wulan [50],dan lainnya. Peneliti-peneliti ini mengaitkan manajemen koperasi dengan indikator kepuasan anggota, keuntungan/SHU,investasi modal, kinerja SDM (pengurus dan karyawan), besarnya pemberian kredit dan perolehan laba, volume dan proses kerja yang dilakukan pengurus dan perlunya penerapan sistem komputer pada manajemen koperasi pada analisa *domain plan* and *organise*, aplikasi perencanaan, kinerja dan ketersediaan pengurus yang profesional.

Penelitian Terdahulu di Indonesia Berkaitan Dengan Psikologi Sosialpada Koperasi.

Peneliti-peneliti yang mengambil pengaruh sosial terhadap proses individu diantaranya: Sapriati [51],Saifudin [52],Nurranto dan Firdaus [53],Pangestuti [54],dan peneliti lainnya. Kebanyakan para peneliti ini mengaitkan kajian partisipasi dengan indikator faktor internal anggota (pendidikan/pengetahuan), kepercaya-an, loyalitas dan motivasi anggota untuk pengembangan koperasi tersebut.Shaw dan Constanzo [55],menyatakan studi psikologi sosial berkaitan dengan pengaruh sosial terhadap proses individu adalah studi tentang persepsi, motivasi proses belajar, atribusi (sifat) dan lain-lain. Simamora [56],menambahkan pernyataan Shaw dan Constanzo bahwa faktor psikologis organisasibukan hanya persepsi, tetapi juga*attitude*, *personality*, pembelajaran dan motivasi.

Selanjutnya, dimensi sosial yang selalu diteliti adalah interaksi individu dengan kelompok yang dikaitkan denganaspek komunikasipimpinan antara pengurus dan anggotadalam rapat tahunan, tingkat keaktifan dalam mengemukakan pendapat dansistem operasional koperasi dalam hal pelayanan koperasidan peneliti-penelitinya: Widodo [57],Faqih [58],Susanti [59],Latifah [60], dan lain-lainnya.Kajian interaksi individu dengan kelompok lainnya yang diteliti: sifat kepe-mimpinan antara pengurus dan karyawan, kerjasama *teamwork* karyawan di koperasidan dikaitkan dengan proses individu seperti motivasi dan komitmen berorganisasi dan aspek fisik kantor koperasi. Peneliti dengan kajian ini diantaranya: Marpaung[61], Mandala [62], Dwi [63], Noor [64]. Sementara peneliti yang mengambil kajian kerjasama koperasi dengan pihak luar (pemerintah,swasta dan lembaga keuangan)umumnya mengaitkan dengan efektifitas kewajiban anggota dengan kinerja pengurus. Peneliti dengankajian ini: Nur [65], Syahza [66], Sariwibowo [67]dan lain-lainnya.

Gambaran Kebijakan Koperasi di Indonesia pada Konteks Pengembangan Koperasi Perkebunan

Saat ini, dasar hukum koperasi mengacu pada UU No.12 Tahun 1967, Pasal 33 UUD 1945, UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian dan untuk pengertian koperasi mengacu pada pasal 1 UU No. 25 tahun 1992,

koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegia-tannya berdasarkan prinsip koperasi yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sebelumnya, dasar hukum koperasi silih berganti dari UU No. 17 Tahun 2012 kembali ke UU No.25 Tahun 1992menyebabkan pemahaman pengurus dan anggota menjadi rancu dalam pengertian dan pengembangan unit usahanya sehingga hal ini berdampak pada perkembangan jumlah koperasi dari 212.135 unit hanya 150.223 unit koperasi yang aktif. Sementara untuk Riau memiliki jumlah koperasi 5.185unit dengan 2.134unit yang aktif [68]. Hal ini menjadi dilema bagi pengembangan koperasiterutama perkebunankaret. Padahal disatu sisi, disamping dasar hukumnya, pemerintah juga telah mengeluarkan kebijakan lain bagi pengembangan koperasi diantaranya Permentan No. 273 Tahun 2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani. Peraturan ini membuka peluang berdirinya kelompok tani dan Gapoktan untuk dapat diresmikan menjadi koperasi. Hal ini menyebabkan banyaknya koperasi-koperasi baru bermunculan namun tidakmengembang-kankoperasi yang aktif. Disisi lain telah berbagai cara dilakukan oleh peneliti terdahulu dalam upaya pengembangan koperasi.Menurut kajian penulis, kebijakan pengembangan koperasi perlu dikembalikan lagi ke pengertian, nilai, sendi dasar koperasi seperti yang dicetuskan oleh ICA dan M. Hatta sehingga pemahaman pengembangan koperasi tidak lagi bertumpu dari penilaian rasio/aspek ekonomi yang merupakan standar perusahaan dan bukan kelembagaan, disamping itu perlu mengem-bangkan koperasi-koperasi aktif dan meng-hidupkankoperasi yang tidak aktif menjadi aktif kembali agar tercipta kesejahteraan bagi perangkat pengurus dan anggota.Sebagai lembaga ekonomi yang berwatak sosial, koperasi memerlukan kajian ilmu psikologi sosial dalam mendalami hubungan sosial,kerjasama dan interaksi antarelemennya (anggota, pengurus, manager, karyawan dan badan pemeriksanya). Kebijakan penilaian kelembagaan yang diambil pemerintahmasih jugamengambil pendekatan ekonomi, hal ini terlihat dari Permen Koperasi dan UKM RI No. 14/Per/M.KUKM/XII/2009 tentang Perubahan atas Permen Negara Koperasi dan UKM No.20/Per/M.KUKM/XI/2008, hal ini akan memberatkan kedudukan koperasi sebagai lembaga berwatak sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagian besar studi pengembangan koperasi berkaitan dengan faktor SHU, pelayanan, partisipasi, faktor internal pengelola, manajemen serta dari aspek sosialproses individu dan interaksi individu dengan kelompok pengurus, anggota dan karyawan. Disarankan pengembangan koperasi dengan memperhati-kan aspek-aspek lain pada ilmu psikologi sosial seperti atribusi,*attitude*, *personality*, pembe-lajaran dan perlunya penelitian lanjutan terkait perilaku sosial antar hubungan perangkat kelembagaan koperasi dan pengambil kebi-jakannya yang dilakukan secara utuh.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Sarwono, Sarlito Wirawan. 1998. Psikologi Sosial: Individu dan Teori-Teori Psikologi Sosial. Edisi 3. Balai Pustaka. Jakarta..
[2] Allport, Gordon. Personality. 1924.Holt, Rinehart and Winston. New York.
[3] Mustansyir, Rizal, dan Misnal Munir. 2002. Filsafat Ilmu. Pustaka Pelajar. Yogyakarta
[4] Bartens K. Sejarah Filsafat Yunani. 1975.Yayasan Kanisius. Yogyakarta.
[5] Sarwono, *Loc. cit*.
[6] Surajiyo. Filsafat Ilmu dan Pengem-bangannya di Indonesia. 2009.Bumi Aksara. Jakarta.
[7] Fudyartanta. 2012. Psikologi Kepribadian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
[8] Sobur, Alex. 2013.Psikologi Umum Dalam Lintasan Sejarah. CV. Pustaka Setia. Bandung.
[9] Muhibbin, Syah. 2002. Psikologi Belajar. PT. Raja Grapindo Persada. Jakarta.
[10] Fudyartanta, *Loc. cit*.
[11] Sobur, *Loc. cit*.
[12] Schultz, D.P. 2014. Sejarah Psikologi Modern. Nusa Media. Bandung.
[13] Ahmadi, Abu. 2009.Psikologi Umum. Rieka Cipta. Jakarta.
[14] Dirgagunarsa, Singgih. 1975.Pengantar Psiko-logi. Mutiara Sumber Widya. Jakarta.
[15] Setianingtyas, Anna F. Peran Filsafat Ilmu Bagi Pengembangan Psikologi (Sutau Tinjauan Menurut Aliran Psikologi Modern). Jurnal Magistra, No. 86, Th. XXV, Desember 2012. Hal. 87-111.
[16] Mustansyir, Rizal, dan Misnal Munir., *Loc. cit*.
[17] Bandura, Albert. 1971.Social Learning Theory. General Learning. New York.
[18] Mustafa, Hasan. Perilaku Manusia Dalam Perspektif Psikologi Sosial. Jurnal Administrasi Bisnis,Vol. &, No.2 Tahun2011. Hal: 143-158.
[19] Muhibbin, Syah., *Loc. cit*.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[20] Allyn dan Bacon Slavin, R.E. 2000.Educational Psychology: Theory and Practice (Sixth Edition). Boston Company. Boston.
[21] Soekanto, Soerjono. Sosiologi Suatu Pengantar. 2006.PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
[22] Dougall, Mc. D. Sc., F. R.S. William. 1919.An Introduction to Social Psychology.Meutheun & Co. Ltd. London.
[23] Ahmadi, Abu. , *Loc. cit*.
[24] Sarwono, *Loc. cit*.
[25] Mustafa, Hasan., *Loc. Cit*
[26] Sarwono, *Loc. cit*.
[27] Mustansyir, Rizal, dan Misnal Munir., *Loc. cit*.
[28] Sularti. 2006. Analisis Pengaruh Kinerja Pengurus, Motivasi dan Kepemimpinan Terhadap Peningkatan SHU pada Pusat Koperasi Pegawai Negeri (PKPRI Surakarta. Tesis. Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.
[29] Pratiwi, Elvira Dian. 2013. Faktor-faktor yang Menentukan Kenaikan dan Penurunan Sisa Hasil Usaha Dari Aspek Keuangan dan Non Keuangan (Studi Kasus KSP Artha Jaya Pasuruan Periode 2007-2011).Skripsi. Jurusan Manajemen, Fakultas Ekonomi, UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.
[30] Hosekini, Hana. 2015. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Sisa Hasil Usaha Koperasi Simpan Pinjam Di Kabupaten Sukoharjo. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta.Surakarta.
[31] Albana, Isna Fara. 2015. Pengaruh Modal Sendiri dan Current Ratio Terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) di KPRI Kota Semarang Tahun 2013. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang. Semarang.
[32] Lestari, Ika. 2016. Sistem Pembagian Sisa Hasil Usaha di Koperasi Mahasiswa (Kopma) UIN Raden Fatah Palembang di Tinjau dari Perspektif Ekonomi Islam.Skripsi. Fakul-tas Hukum dan Ilmu Sosial. UIN Raden Patah Palembang.Palembang.
[33] Harjanto, Roufik Setyo. 2010. Kepuasan Anggota Ditinjau dari Kualitas Pelayanan Koperasi Serba Usaha Ja'Far Medika Syariah Mojogedang.Tugas Akhir. Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret Surakarta.
[34] Mahareni. 2011. Pengaruh Kemampuan Manajerial Pengurus Dan. Kinerja Karyawan Terhadap Kualitas *Pelayanan*Anggota *Koperasi*Pegawai. Republik Indonesia (KPRI). Skripsi. Fakultas Pendidikan Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
[35] Mulyani, Heni Wahyu. 2013.Pengaruh Kualitas Pelayanan Koperasi dan Citra Koperasi Terhadap Kepuasan Konsumen Melalui Keputusan Pembelian Sebagai Variabel.Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang.
[36] Mulyono, Budi Kemal. 2009.Pengaruh Kemampuan Manajerial Pengurus, dan Pelayanan Koperasi Terhadap Partisipasi KPRI "Bhakti Praja" Provinsi Jawa Tengah. Skripsi.Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Semarang. Semarang.
[37] Amiruddin, Fahmi dan Ida Farida. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepuasan Nasabah Dilihat dari Kualitas Pelayanan da Nilai Nasabah Pada Koperasi Serba Usaha (KSU) Bina Mitra di Kudus. Skripsi. Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro tahun 2014.. *eprints.dinus.ac.id/8830/1/ jurnal_13619.pdf. Hal. 1 - 11.*
[38] Aromatika, Dhanie Istiani. 2011.Faktor-faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota pada KUD Makmur Jaya Kecamatan Jekulo Kudus. Skripsi, Jurusan Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
[39] Satria, Depo Panca. 2013.Analisis Kinerja dan Tingkat Partisipasi Anggota Koperasi Peternak Kelinci (KOPNAKCI) Kabupaten Bogor.Skripsi. Depertemen Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor. Bogor.
[40] Putri, Asri Lutfiana. 2014. Pengaruh Motivasi dan Kualitas Pelayanan Koperasi Terhadap Partisipasi Anggota Di KUD Cepogo Boyolali Tahun 2014.Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
[41] Utami, Riza., Nuraini Asriati, dan Husni Syahrudin. 2015. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Anggota Pada Koperasi Pegawai Negeri Politeknik Pontianak.Jurnal.untan.ac.id/index.php/ jpdpb/article/ download/10802/10330.
[42] Hernawan, Ahmad Bobby. 2014. Pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Karyawan (Studi Penelitian di Koperasi Mitra Husada). Skripsi. Program Studi Manajemen. Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama Bandung.

[43] Kadaryono, Citra Suci. 2014. Kinerja Karyawan Ditinjau dari Karakteristik Individu dan Motivasi Kerja di KUD Cepogo Boyolali. Skripsi. Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta.

[44] Hidayah, Rahmah Syinta. 2015. Pengaruh Pendidikan Perkoperasian dan Kemampuan Manajerial Pengurus Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) NU Graha Unggaran. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. UNS. Semarang.

[45] Odhiansyah, Novanda Tri. 2016. Pengaruh Pengetahuan Anggota Tentang Perkoperasian, Kreativitas pengurus, dan Motivasi Anggota Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta.

[46] Kharisma, Billy Widoera. 2016. Pengaruh Kinerja Pengurus dan Motivasi Anggota Terhadap Perkembangan KPRI EKA Kecamatan Bukateja Kabupaten Purbalingga. Skripsi. Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. Yogyakarta.

[47] Hidayat, Nur. 2008. Aplikasi perencanaan Koperasi Simpan Pinjam KPN UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dalam Kesejahteraan Anggota. Skripsi. Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah, UIN Sunan Kalijaga. Yogyakarta.

[48] Darwas, Rahmadini. 2010. Evaluasi Peran Sistem Informasi Manajemen Koperasi Swadharwa dengan Menggunakan Model *Maturity Level* Pada Kerangka Kerja *Cob IT* Pada *Domain Plan and Organise*Skripsi. Program Magister Sistem Informasi Akuntansi Universitas Gunadarma. Jawa Barat.

[49] Muchamad, Nur. 2012. Analisis Manajemen Koperasi Selapa Polri Pondok Pinang Dalam Pelayanan Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Anggota. Skripsi.Jurusan Manajemen Dakwah, Fakultas Ilmu Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

[50] Wulan, Heru Sri. Analisis Jiwa Kewirausahaan Pemimpin, Gaya Partisipasi Para Anggota dan Model Manajemen Koperasi Dalam Meningkatkan Kinerja Koperasi Di Kota Semarang.Jurnal.unpand.ac.id/index.php/EBK/article/download/345/339.Tahun 2015. Hal. 55-70.

[51] Sapriati, Rini. 2013. Pengaruh Partisipasi Anggota Terhadap Peningkatan Kinerja Pengurus KUD Iyo Basamo di Desa Terantang Kecamatan Kabupaten Kampar. Skripsi.Jurusan Manajemen. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN SUSKA Riau.

[52] Saifudin, Ardin. 2013.Persepsi Masyarakat Terhadap Perkembangan Koperasi Kredit Yang Bermasalah (Studi pada Koperasi Kredit *"Sedya Waluya"*, Dusun Klangon, Desa Argosari, Kecamatan Sedayu, Kabupaten Bantul, Yogyakarta). Skripsi. Jurusan Pendidikan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Yogyakarta.

[53] Nurranto, Heri dan FirdausBudhySaputro. Pengukuran Tingkat Partisipasi Anggota dan Pengaruhnya terhadap Keberhasilan Koperasi. Jurnal Sosio e-Kons, Vol.7 No.2Agustus2015: 111-127.

[54] Pangestuti, Dhara Rima. . 2016.Pengaruh Pengetahuan Anggota Koperasi, Persepsi Anggota Tentang Pelayanan Koperasi dan Motivasi Berkoperasi Siswa SMA Negeri I Ngemplak, Sleman, Yogyakarta. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Universitas Sanata Dharma. Yogyakarta

[55] Shaw, M.E., & Costanzo, P. R. 1970. Theories of Social Psychology. Mc Graw Hill Co. New York. Simamora Henry. Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan kedua. STIE TKPN. Yogyakarta.2006.

[56] Widodo, Sri. 2008. Pengaruh Komunikasi dan Partisipasi Anggota Terhadap Keberhasilan Koperasi Unit Desa Melati.Jurnal Akmenika UPY, Volume 2 ,

[57] Faqih, Moh. Nur. 2011. Pengaruh Komunikasi dan Etika Kerja Islam Terhadap Kinerja Karyawan KJKS BMT Fastabiq Pati. Skripsi. Jurusan Ekonomi Islam, Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang..

[58] Susanti H., Ira. 2012.Pengaruh Kualitas Layanan dan Kepemimpinan Pengurus Terhadap Partisipasi Anggota Pada Koperasi Simpan Pinjam Rabi Jonggor Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat. Skripsi.Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Ekonomi UNP. Padang.

[59] Latifah, Rozita Nur. 2015. Pengaruh Komunikasi dan Interpersonal Skill Karyawan Terhadap Minat Menjadi Anggota Di Koperasi Syariah Muhammadiyah Kota Blitar. Skripsi. Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung.

[60] Marpaung, Marudut.Pengaruh Kepemimpinan dan Team Work Terhadap Kinerja Karyawan di Koperasi Sekjen Kemdikbud Senayan Jakarta.Jurnal IlmiahWIDYA, Volume 2, Nomor 1, Maret-April 2014: 33-40.

[61] Mandala W., Yohan. 2012. Analisis Pengaruh Gaya Kepemimpinan Transformasional, Motivasi, Kerja dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan (Studi pada Pusat Koperasi Unit Desa Provinsi Jawa Timur. Skripsi. Jurusan Ekonomika dan Bisnis, Manajemen, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro. Semarang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[62] Dwi U., Munfarida. 2014. Pengaruh Motivasi Kerja Dan Gaya Kepemimpinan Terhadap Kinerja Karyawan Koperasi Simpan Pinjam Karya Kabupaten Pati. Skripsi.Program Studi Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta.
[63] Noor, Safari H. 2015. Pengaruh Pengetahuan Perkoperasian, Motivasi Berkoperasi dan Kualitas Pelayanan Terhadap Partisipasi Anggota Koperasi Serba Usaha (KSU) Padurenan Jaya Gebog Kabupaten Kudus. Skripsi. Jurusan Pendidikan Ekonomi. Fakultas Ekonomi. Universitas Negeri Semarang. Semarang.
[64] Nur,Yunita. 2010. Efektivitas Kemitraan Usaha Pada Koperasi Susu "SAE" Unit Pujon dalam Meningkatkan Kesejahteraan Peternak Sapi Perah (Kasus Pada Desa Pandesari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang). Skripsi. Jurusan Ekonomi Pembangunan. Fakultas Ekonomi. Universitas Brawijaya. Malang.
[65] Syahza, Almasdi. Model Pengembangan Kelembagaan Perkebunan Dalam Mendukung Keberdayaan Ekonomi Masyarakat.*Jurnal Manajemen Usahawan Indonesia*, Vol. 40, No.2, Maret-April ,2011. Hal. 1-14.
[66] Sariwibowo, Puspita. 2014. Kebijakan Pemberian Kredit dan Pengaruh *Loan to Deposit Ratio* (LDR) Terhadap *Non Performing* Loan (NPL) Pada Koperasi Pembatikan Nasional (KPN) Solo. Skripsi. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
[67] Dinas Perkebunan Kabupaten Kuantan Singingi. 2015.*Laporan Kinerja Tahunan*. Dinas Perkebunan Kab. Kuansing. Kuansing.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN AIR TERJUN COBAN PELANGI DESA WISATA GUBUGKLAKAH KABUPATEN MALANG BERDASARKAN POTENSI EKONOMI DAN SOSIAL MASYARAKAT

Ema Umilia[1)] , Ketut Dewi Martha Erli Handayeni[1)], Arwi Yudhi Koswara [1)]

[1] Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota (PWK) FTSP- ITS Surabaya, Jawa Timur, Indonesia

Email :umilia84@gmail.com; erli.martha@gmail.com; arwiyudhi@gmail.com

Naskah diterima :9 Maret 2017 Naskah direvisi : 17 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Coban Pelangi merupakan wisata air terjun di bawah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang menyimpan keindahan tersendiri. Air terjun ini terletak di Desa Gubugklakahyang masih termasuk kawasan desa adat Tengger. Sebagai lokasi wisata, Coban Pelangi memenuhi kriteria pengembangan obyek wisata karena didukung oleh kebutuhan dasar komponen dasar pengembangan wisata, diantaranyaadanya ODTW berupa air terjun dan desa wisata adat, adanya akses mengunjungi lokasi wisata, adanya sarana prasarana yang memungkinkan wisatawan tinggal lebih lama, dan keramahtamahan penduduk lokal. Pengembangan wisata Coban Pelangi perlu mengedepankan potensi ekonomi lokal dan sosial masyarakat agar didukung dan berdampak positif bagi ekonomi warga sekitar. Untuk mendapatkan arahan pengembangan Coban Pelangi,dilakukan identifikasi potensi ekonomi dan kependudukan masyarakat yang mendukung pengembangan wisata Coban Pelangi. Potensi tersebut diketahui dengan profil penduduk kecamatan disekitar lokasi wisata. Harapannya ada kesesuaian kebutuhan pengembangan wisata Coban Pelangi dengan potensi yang ada di lokasi sekitar, sehingga kebutuhan pariwisata Coban Pelangi bisa dipenuhioleh lokal. Dari survei primer diketahui Coban Pelangi dikelola oleh desa adat, transportasi lokal berupa angkutan umum dikelola pengusaha lokal, *homestay* dan pusat souvenir dikelola investor luar dengan asal souvenir dari lokal, serta pemandu wisata asli penduduk sekitar. Ada kebutuhan kedepan untuk melatih pemandu agar mendapatkan sertifikasi dari Disbudpar Kab. Malang. Sarana dan prasara perlu distandarkan untuk menampung limpahan wisman yang berkunjung ke Bromo Tengger Semeru. Kebutuhan penghijauan sekitar air terjun diperlukan agar debit air stabil dan berlanjut. Kerjasama dengan pemilik *hardtop*diperlukan untuk meningkatkan transportasi menuju DTW, serta sosialisai dari Disbudpar untuk pelibatan masyarakat dalam pengembangan wisata.

Kata kunci: pengembangan wisata air terjun, potensi ekonomi, sosial masyarakat.

PENDAHULUAN

Pariwisata merupakan sektor yang sangat potensial untuk membangun dan mengembangkan suatu kawasan, baik di lingkungan perkotaan maupun perdesaan. Pariwisata juga dapat meningkatkan taraf kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di area wisata.Selain itu, sektor pariwisata juga memberikan *multiplier effect* dan nilai manfaat yang besar bagi masyarakat, seperti menciptakan lapangan pekerjaan baru dan menurunkan angka pengangguran [1]

Dalam paradigma yang baru, kepariwisataan harus menghargai adat istiadat lokal, melestarikan lingkungan hidup, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat sekitar. Dengan demikian, pengembangan kepariwisataan diarahkan pada pariwisata berkelanjutan. UNWTO [2] mendefinisikan pariwisata berkelanjutan sebagai pariwisata yang memperhitungkan penuh dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan; serta memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat setempat. Pariwisata berkelanjutan mencakup 3 aspek utama yang terdiri dari:

1. Aspek lingkungan – memanfaatkan secara optimal sumber daya lingkungan yang merupakan elemen kunci dalam pengembangan pariwisata, mempertahankan proses ekologi dan turut andil dalam melestarikan warisan alam dan keanekaragaman hayati di suatu destinasi wisata.

2. Aspek ekonomi – memastikan kegiatan ekonomi jangka panjang yang layak, memberikan manfaat sosial ekonomi kepada semua stakeholder dengan adil, seperti pekerjaan tetap, kesempatan mendapatkan penghasilan (membuka usaha) dan pelayanan sosial kepada masyarakat lokal, serta membantu mengurangi kemiskinan.
3. Aspek sosial budaya – menghormati keaslian sosial budaya masyarakat setempat, melestarikan nilai-nilai warisan budaya dan adat yang mereka bangun, dan berkontribusi untuk meningkatkan rasa toleransi serta pemahaman antar budaya.

Di lingkungan perdesaan, pariwisata perdesaan menjadi salah satu wahana pembangunan perdesaan yang berkelanjutan. Setiap desa memiliki keunikan pola hidup, budaya, dan produk kerajinan khas daerah yang menjadi keunggulan masing-masing desa.Pengembangan Desa Wisata menjadi salah satu bentuk pengembangan wilayah desa yang didasarkan pada penggalian potensi desa sebagai atribut produk wisata.Dalam pengembangan desa wisata, masyarakat bukan sebagai obyek pasif melainkan subyek aktif. Artinya, masyarakat tidak hanya menjadi tujuan kegiatan pariwisata melainkan juga menjadi penyelenggara dan pelaku kegiatan pariwisata. Masyarakat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari produk wisata sehingga produk wisata memiliki ciri khas budaya setempat.

Sebagai lokasi wisata, Desa Gubugklakah memiliki sejumlah potensi obyek dan daya tarik wisata, salah satunya Air Terjun Coban Pelangi. Coban Pelangi terletak di bawah kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Coban memiliki arti Air Terjun. Coban Pelangi memiliki keindahan alam berupa air terjun yang dapat membiaskan warna pelangi. Tidak hanya memiliki potensi alam yang indah, Desa Gubugklakahjuga memiliki kearifan lokal yang khas karena masih termasuk kawasan desa adat Tengger.

Jika ditinjau dari aspek pariwisata, Coban Pelangi memenuhi kriteria pengembangan obyek wisata karena didukung oleh kebutuhan dasar komponen dasar pengembangan wisata. Pertama, adanya obyek daya tarik wisata berupa air terjun dan desa wisata adat. Kedua, adanya akses mengunjungi lokasi wisata. Ketiga, sarana prasarana yang memungkinkan wisatawan tinggal lebih lama seperti *homestay* dan pusat souvenir.Keempat, keramahtamahan penduduk lokal yang terbiasa mendapatkan kunjungan baik dari wisatawan nusantara naupun wisatawan luar negeri.

Pengembangan wisata air terjun coban pelangi perlu mengedepankan potensi ekonomi lokal dan sosial masyarakat, agar pengembangan wisata didukung oleh masyarakat dan berdampak positif bagi ekonomi warga sekitar. Berdasarkan hal tersebut maka dilakukan penelitian untuk mengidentifikasi potensi ekonomi dan kependudukan masyarakat yang mendukung pengembangan wisata Coban Pelangi. Potensi tersebut digunakan untuk merumuskanstrategi pengembangan Wisata Air Terjun Coban Pelangi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif karena tidak menguji hipotesis dari suatu teori melainkan mengekplorasi suatu permasalahan yang sedang terjadi dengan memanfaatkan teori-teori yang telah ada. Selain itu data yang digunakan merupakan data yang telah ada, bukan merupakan data-data yang didapat secara eksperimental [3]

Objek penelitian ini adalah Air Terjun Coban Pelangi yang terletak di Desa Gubugklakah, Kecamatan Poncokucumo, Kabupaten Malang. Wisata Coban Pelangi terletak di Koordinat GPS: 8° 1' 32.27" S 112° 49' 1.06" E.Pemilihan lokasi didasarkan pada potensi yang besar di bidang pariwisata dan Coban Pelangi memenuhi kriteria pengembangan obyek wisata karena didukung oleh kebutuhan dasar komponen dasar pengembangan wisata.

Terdapat beberapa data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan sekunder. Data primer merupakan data atau informasi yang didapat langsung dari objek penelitian dan penulis bertindak sebagai pengumpul data. Data primer diperoleh melalui observasi, yaitu pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena yang diteliti [4]. Data primer dalam penelitian ini meliputi kondisi eksisting objek wisata. Sedangkan data sekunder merupakan data atau informasi yang sudah dikumpulkan oleh pihak lain dan penulis bertindak sebagai pemakai data. Data sekunder dalam penelitian ini meliputi hasil penelitian / publikasi, laporan tertulis, dan studi terkait. Data sekunder diperoleh melalui studi literatur dan survei instansi. Instansi yang berkepentingan ialah Disbudpar Kab. Malang dan Perum Perhutani KPH Malang.

Teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini ialah analisa deskriptif kualitatif dan SWOT. Analisis data deskriptif bertujuan untuk memberikan deskripsi mengenai subjek penelitian berdasarkan data dari variabel yang diperoleh [4]. Data-data dideskripsikan untuk menjadi sebuah informasi yang lebih jelas, dalam bentuk persentase, proporsi, atau frekuensi yang divisualisasikan melalui grafik dan *chart*.Analisis SWOT merupakan alat analisis yang digunakan untuk menyusun strategi / arahan dari berbagai situasi yang dihadapi. S adalah

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Strengths, W adalah *Weaknesses*, O adalah *Opportunities*, dan T adalah *Threats*. *Strengths* dan *Weaknesses* berasal dari dalam (internal). Sedangkan *Opportunities* dan *Threats* berasal dari luar (eksternal).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wisata Coban Pelangi terletak sekitar 32 km sebelah timur Kota Malang. Wisata ini berada di di kaki Gunung Semeru arah ke Desa Ngadas dan dikelola oleh Perum Perhutani KPH Malang. Air terjun Coban Pelangi ini berada di ketinggian 1299,5 m dan memiliki terjunan air setinggi ±110 m. Suhu udara di kawasan ini berkisar antara 19 - 23^{0}Celcius. Coban Pelangi terhubung dengan Sungai Amprong. Dari area pintu masuk Coban Pelangi, perjalanan dilakukan dengan berjalan kaki menyusuri jalan setapak sepanjang ±1,5 km yang menurun dan melintasi jembatan. Waktu kunjungan paling baik ke ke air terjun Coban Pelangi adalah di pagi hari, karena kabut tebal sering muncul setelah lewat dari tengah hari.Pada musim hujan, pihak pengelola sering membatasi kunjungan hingga pukul 16.00. Hal ini untuk menghindari munculnya air bah yang sering datang dari pegunungan di bagian hulu.

Potensi Wisata

Desa Wisata Gunungklakah (DWG) memiliki beberapa produk dan potensi wisata, diantaranya:

1. Wisata Alam (Bumi Perkemahan, Coban Pelangi, Coban Trisula, Coban Pancut, dan Coban Gereja).
2. Agro Wisata (Apel, Sayur-Mayur, Edukasi Pertanian, dan Agro Susu).
3. Even Tahunan (Upacara Karo dan Upacara Sadranan).
4. Wisata Minat Khusus (Rafting, Tubing, dan*Outbond*).
5. Wisata Budaya (Edukasi Bahasa, Al Banjari, Terbangan, Karawitan, Campur Sari, Pencak Silat, Bantengan, Jaran Kencak, Kuda Lumping, dan Wayang Topeng).

Coban Pelangi menjadi salah satu destinasi wisata yang terkenal di DWG. Pada tahun 2016, jumlah pengunjung di Coban Pelangi berkisar 40-50 orang pada hari biasa. Sedangkan pada hari libur atau *weekend* jumlah pengunjung bisa mencapai 150 orang.

Kegiatan pariwisata di DWG sudah didukung dengan ketersediaan fasilitas penunjang pariwisata, diantaranya:

1. Jalan ke obyek wisata
2. Penunjuk arah (*sign board*) menuju obyek wisata
3. Pintu gerbang masuk Desa Wisata
4. Gardu pendang dan *rest area*
5. Tempat parkir
6. Ojek pariwisata
7. *Home stay*

Gambar. 1 Potensi Wisatadi Desa Gubugklakah
Sumber: www.gubugklakah.com [6]

Gambar. 2 Keindahan Air Terjun Coban Pelangi
Sumber: www.gubugklakah.com [6]

Potensi Ekonomi Lokal

Adanya kegiatan wisata di DWG memberikan dampak positif bagi perekonomian sekitar. Masyarakat melakukan pemanfaatan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi desa. Sumber daya alam dikelola sedemikian rupa menjadi destinasi wisata baru. Selain itu, Sumber Daya Manusia (SDM) juga dimanfaatkan, dengan membekali warga untuk menjadi *tour guide* dan penyedia jasa pariwisata. Beberapa warga menyewakan rumahnya untuk dijadikan *homestay.* Sekitar ±64 rumah singgah tersebut berjajar di sisi kanan dan kiri jalan. Ada pula warga yang menyewakan mobil jeep untuk mengangkut para pengunjung yang sedang berwisata di area Desa Gubugklakah maupun ke Gunung Bromo Tengger Semeru.

Gambar. 3 Peta Persebaran *Homestay* di DWG
Sumber: www.gubugklakah.com [6]

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Desa ini juga memiliki berbagai inovasi yang belum ada di desa lain. Pengunjung yang datang bisa memesan kaos yang didesain dengan gambar foto wisatawan ketika mengunjungi objek-objek wisata. Desa wisata ini juga memiliki *souvenir* menarik yang disebut Apel Kaligrafi, dimana di permukaan apel terpampang atau terlukis tulisan dan gambar berdasarkan pesanan.

Gambar. 4 Inovasi Souvenir Khas Desa – Apel Kaligrafi
Sumber: http://tcdwgsakti.malangkab.go.id/ [6]

Selain berdampak pada perekonomian masyarakat, kegiatan wisata juga berdampak pada perkembangan desa. Terlihat adanya penambahan beberapa infrastruktur, seperti fasilitas pendidikan (PD), kesehatan (KS), peribadatan (PR), institusi sosial (IS), pondok pesantren (PP), obyek wisata (OW), sarana olahraga (SO), hotel / penginapan (HP), koperasi (KO), industri kecil (IK), dan kegiatan usaha masyarakat (KUM) sebelum dan sesudah ada Desa Wisata Gubugklakah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar berikut:

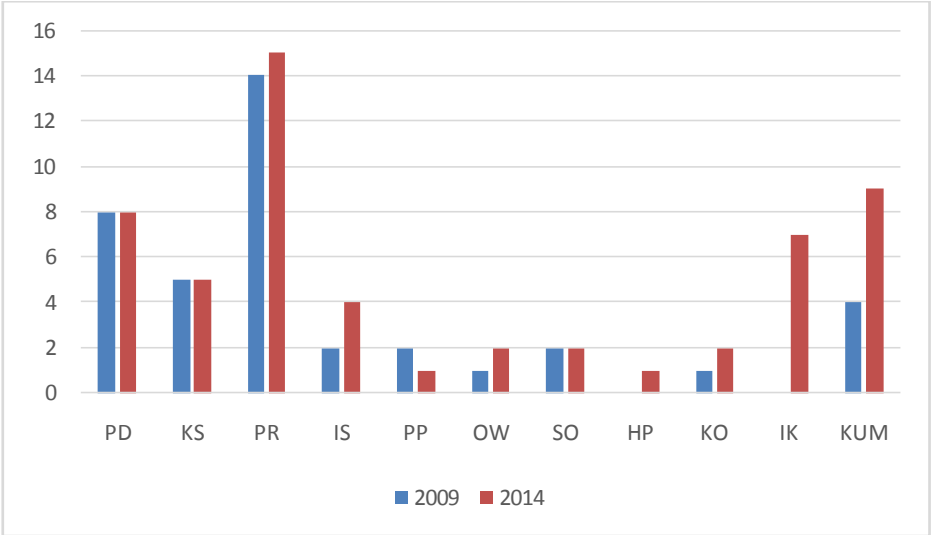

Gambar. 5 Perkembangan Infrastruktur di Desa Gubugklakah Sebelum (2009) dan Sesudah (2014) Adanya Desa Wisata
Sumber: Kecamatan Poncokusumo dalam Angka 2010, 2015 [7]

Potensi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial masyarakat DWG menjadi salah satu aspek yang mendukung pengembangan Wisata Air Terjun Coban Pelangi. Desa wisata ini masih termasuk kawasan desa adat Tengger yang memiliki sistem kebudayaan lokal. Penjelasan sistem kebudayaan di DWG mengacu pada 7 unsur kebudayaan universal yang dikemukakan oleh Kluckhohn (1953), dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Sistem bahasa –** bahasa Jawa dengan dialek Tengger.
2. **Sistem kesenian –** seni Tari (Roro Anteng dan Joko Seger yang biasanya dimulai sebelum pembukaan Upacara Kasada) dan seni bangunan (bangunan peribadatan berupa Pura yang disebut pundem, danyam, dan poten / tanah di lautan pasir sebagai tempat berlangsungnya upacara Kasada).
3. **Sistem teknologi –** berkembang seperti halnya masyarakat Jawa Modern.
4. **Sistem religi –** agama yang dianut sebagian besar Suku Tengger adalah Hindu, Islam, dan Kristen. Masyarakat masih sering melakukan upacara tertentu, seperti Upacara Yahya Kasada, Karo, Kapat, Kawalu, Kasanga, Kasada, dan Unan.
5. **Sistem Perkawinan –** pola perkawinan endogami dengan adat Tengger dan adat menetap setelah menikah / neolokal.
6. **Sistem Kemasyarakatan –** ada kelompok-kelompok desa yang dipimpin oleh tetua dan seluruh perkampungan ini dipimpin oleh seorang kepala adat.
7. **Sistem Pengetahuan –** masih tradisional dan berorientasi pada kebudayaan lama, namun saat ini mulai mengacu ke sistem pengetahuan yang modern.
8. Sistem Mata Pencarian – mayoritas petani sayuran dan penambang (pasir dan belerang). Ada sebagian masyarakat Tengger yang berprofesi menjadi pemandu wisatawan di Bromo.

Desa Gubugklakah juga memiliki kesenian yang menggambarkan kearifan lokal setempat, seperti Bantengan dan Kesenian Musik Islami Terbangan. Bantengan merupakan atraksi yang serupa dengan kuda lumping namun penari menari seperti banteng. Musik Terbang biasanya dimainkan bersamaan dengan pembacaan ayat Al-Quran pada acara keagamaan.

Gambar. 6 Kearifan Lokal Desa Gubugklakah
Sumber: www.explorebromo.com

Strategi Pengembangan

Strategi pengembangan Wisata Air Terjun Coban Pelangi di Desa Wisata Gubugklakah didapatkan setelah melakukan analisa SWOT, seperti yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. SWOT Potensi Sosial dan Ekonomi dalam Pengembangan Wisata

STRENGTH	**WEAKNESS**
• Memiliki potensi dan daya tarik yang khas (alam dan budaya). • Masyarakat masih memiliki tata cara kehidupan dan budaya tradisional Tengger yang kental. • Partisipasi dan inisiatif masyarakat dalam mendukung pengembangan wisata tinggi. • Sudah ada pemanfaatan sumber daya dan aset untuk meningkatkan	• Coban Pelangi terletak di kaki pegunungan sehingga rawan bencana longsor dan banjir. • Memiliki trek pendakian yang curam, dengan sudut kemiringan mencapai 45^0. • Minimnya teknologi dalam pengolahan sumber daya alam sehingga manfaat ekonomi kurang optimal.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

potensi ekonomi desa. • Tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.	
OPPORTUNITY • Masyarakat yang mendukung pariwisata perdesaan semakin banyak. • Ada inovasi dalam produksi souvenir khas yang belum ada di area wisata lain. • Minat masyarakat untuk berkunjung masih tinggi. • Ada kesepakatan pengembangan dengan pihak lain yang terkait.	**THREAT** • Budaya dan perilaku kurang baik yang dibawa oleh pengunjung. • Ditemukannya air terjun lain yang menyebabkan jumlah pengunjung tersebar. • Ancaman bencana / gangguan alam. • Eksploitasi yang menyebabkan rusaknya lingkungan fisik. • Pasar bebas menuntut destinasi bisa memenuhi standar pasarnya karena peluang usaha terbuka bagi Negara / kota lain. • Perubahan orientasi lembaga pengelola atau individu yang kebih berat ke manfaat ekonomi.

Sumber: Hasil Analisa, 2016

Berdasarkan tabel diatas maka dapat disusun strategi pengembangan Wisata Air Terjun di Desa Wisata Gunungklakah. Strategi pengembangan terdiri dari 4 bagian yaitu Strategi Strength-Opportunities (S-O), Weakness-Opportunities (S-O),Strength-Threat (S-T), dan Weakness-Threat (W-T). Berikut merupakan penjelasannya:

Strategi S-O:

1. Mengoptimalkan potensi alam air terjun Coban Pelangi dengan metode ramah lingkungan.
2. Mengoptimalkan potensi sosial budaya tradisional Tengger sebagai produk wisata.
3. Mengembangkan inovasi dan variasi atraksi untuk meningkatkan jumlah pengunjung.
4. Menggalakkan aksi penggunaan produk setempat dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan *image* kawasan yang kuat dan meningkatkan promosi.
5. Meningkatkan kerjasama antara pihak desa wisata dengan stakeholder lain yang terkait.

Strategi W-O:

6. Terus menjaga kelestarian lingkungan hidup agar tidak menambah resiko bencana.
7. Melakukan pelatihan untuk pengolahan dan pemasaran souvenir khas desa.
8. Rajin melakukan pemantauan di area wisata air terjun, khususnya pada musim penghujan untuk menurunkan resiko korban akibat bencana.

Strategi S-T:

9. Tetap menjaga kualitas, tradisi, tata cara kehidupan serta budaya tradisional masyarakat setempat.
10. Menonjolkan ciri khas yang dimiliki untuk membedakan dengan area wisata lain.
11. Meningkatkan kreativitas dalam pengembangan produk dan desain kerajinan setempat.

Strategi W-T:

12. Merancang program pengelolaan dan pemasaran yang efektif dan berkelanjutan.
13. Memberikan pembekalan tentang *product knowledge*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian ini adalah terumuskannya strategi pengembangan wisata. Secara keseluruhan, strategi pengembangan wisata air terjun Coban Pelangi di Desa Wisata Gubugklakah adalah mengoptimalkan potensi alam dan social budaya yang dimiliki, mengembangkan inovasi dan variasi atraksi untuk meningkatkan jumlah pengunjung, meningkatkan keterampilan dalam mengolah prosuk wisata, menonjolkan ciri khas yang dimiliki, serta merancang program pengelolaan kawasan yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hadiwijoyo, Suryo Sakti. 2012. *Perencanaan Pariwisata Perdesaan Berbasis Masyarakat (Sebuah Pendekatan Konsep)*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
[2] UNWTO (World Tourism Organization).

[3] Sarwono, Jonathan. 2006. *Analisis Data Penelitian Menggunakan SPSS*. Yogyakarta: ANDI.
[4] Hariwijaya dan Triton. 2008. *Pedoman Penulisan Ilmiah Proposal dan Skripsi*. : Tugu Publisher.
[5] Azwar, Saifuddin. 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[6] Website: http://tcdwgsakti.malangkab.go.id/, www.explorebromo.com, www.gubugklakah.com.
[7] Kecamatan Poncokusumo dalam Angka tahun 2010 dan 2015.
[8] Kluckhohn, Clyde. (1953) 1961 U*niversal Categories of Culture*. New Haven: Human Relations Area Files Press.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

IMPLEMENTASI NAGARI KOTO HILALANG SEBAGAI DESA WISATA PERTANIAN DI KABUPATEN SOLOK

Harne Julianti Tou

Mahasiswa Program Doktoral, Universitas Andalas

Email: iyun_tou@yahoo.com

Naskah diterima :13 Maret 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 18 Mei 2017

ABSTRAK

Pembangunan pedesaan tidak selalu bertumpu pada sektor pertanian saja, dengan sumberdaya alam yang dimiliki oleh desa dimungkinkan bagi desa untuk mengembangkan sektor lain seperti industri dan pariwisata. Pergeseran ini menumbuhkan konsep desa wisata, dan jika dikaitkan dengan sektor dominan pedesaan yakni pertanian, maka konsep ini lebih dikenal sebagai desa wisata pertanian. Dimana konsep desa wisata pertanian, mengabungkan pertanian dan pariwisata dalam mengerakkan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan hal diatas dan merujuk pada Peraturan Dearah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2025 bahwa Nagari Koto Hilalang yang berada di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok merupakan salah satu destinasi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Nagari Tradisional.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Nagari Koto Hilalang sebagai desa wisata pertanian. Mengidentifikasi karakteristik pola permukiman dengan segala kearifan lokal di Nagari Koto Hilalang serta mengidentifikasi permasalahan pelestarian adat istiadat Nagari Koto Hilalang. Metodologi penelitian dilakukan secara eksploratif dan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemilik rumah tradisional.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Nagari Koto Hilalang masih perlu melakukan persiapan dalam mewujudkan nagari sebagai desa wisata pertanian. Namun demikian pola permukiman yang ada di Nagari Koto Hilalang berkelompok alias berbentuk cluster di satu jorong saja, yakni di Jorong Dalam Nagari. Sementara pelestarian adat istiadat Nagari Koto Hilalang sudah mulai ditinggalkan. Sementara budaya lokal yang menjadi ciri khas daerah ini, salah satunya budaya Tupai Janjang pun sudah mulai ditinggalkan.

***Kata Kunci** : Desa wisata, Pola Permukiman*

PENDAHULUAN

Kabupaten Solok di kenal dengan sebutan ”Solok Nan Indah”, di Nagari Koto Hilalang terdapat objek wisata Desa Tradisional. Hal ini berdasarkan pada Peraturan Dearah Kabupaten Solok Nomor 4 Tahun 2013 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Daerah Tahun 2013-2025 bahwa Nagari Koto Hilalang yang berada di Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok yang merupakan salah satu destinasi pariwisata yang akan dikembangkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Daerah Nagari Tradisional. Keterpaduan antara kegiatan pertanian, kearifan lokal atau kekhasan daerah serta pariwisata merupakan hal yang menarik untuk dikembangkan. Selain bermanfaat bagi masyarakat dalam peningkatan pendapatan juga membuka peluang usaha dan lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi Nagari Koto Hilalang sebagai desa wisata pertanian. Mengidentifikasi karakteristik pola permukiman dengan segala kearifan lokal di Nagari Koto Hilalang serta mengidentifikasi permasalahan pelestarian adat istiadat Nagari Koto Hilalang.

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian dilakukan secara eksploratif dan kualitatif dengan melakukan wawancara dengan tokoh masyarakat dan pemilik rumah tradisional. Dimana untuk menjawab penelitian dilakukan observasi

terhadap rumah gadang dan peralatan khas daerah. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada pemilik rumah gadang dan tokoh masyarakat untuk mengali kekhasan Nagari Koto Hilalang.

Tinjauan Literatur

Menurut Bălan, Mariana, and Cristina Burghelea. 2015 [1] Pembentukan dan konsolidasi dari pasar wisata desa wisata merupakan salah satu bentuk pariwisata yang menggabungkan aspek pembangunan berkelanjutan, lingkungan perlindungan, pengembangan kewirausahaan, baik dalam kegiatan langsung dan yang berkaitan dengan praktek bentuk pariwisata tradisi dan adat istiadat, kuno dan murni, kehidupan pedesaan, game komputer, dan arsitektur, memberikan identitas spesifik Fundata,desa tertinggi di Rumania. Identitas Fundata dilengkapi dengan pemandangan alam, berbaris di Bucegi dan Piatra Pegunungan Craiului.

Menurut Mircea, Bârsan, dan Lia-Dorica Dogaru, Pariwisata memiliki peran penting memodifikasi masyarakat pedesaan di lingkungan mereka, struktur ekonomi, sosial dan budaya, proses dan dinamika. Dalam konteks ini desa wisata memainkan peran utama karena turis harus bergerak menuju tujuan wisata untuk menikmati produk. Wisatawan yang tertarik ke daerah pedesaan dengan kualitas warisan lanskap sosial dan budaya khas mereka. Jadi, ruang pedesaan dapat terancam oleh dampak pariwisata dan kegiatan rekreasi yang dikembangkan untuk wisatawan. Desa wisata sebagian besar merupakan fenomena dalam negeri dengan alam yang berbeda di seluruh negara dan benua

Pemandangan pedesaan selalu dipengaruhi oleh aktivitas pertanian. Keabadian manusia di daerah pedesaan terkena faktor risiko (degradasi, depopulasi, kemiskinan) dapat berkontribusi untuk pelestarian nilai-nilai sosial, untuk menaikkan harga sumber daya manusia yang, ekonomi dan lingkungan dari berbagai masyarakat pedesaan, untuk memenuhi syarat dan untuk mempromosikan citra daerah ini , meningkatkan kapasitas mereka yang menarik dan memberikan kontribusi untuk perkembangan mereka [2]

PEMBAHASAN

Nagari Koto Hilalang merupakan salah satu nagari yang ada di Kecamatan Kubung yang berada di wilayah Kabupaten Solok. Pusat Kecamatan Kubung berada pada Nagari Koto Hilalang. Nagari Koto Hilalang memiliki luas 35,50 Km^2 atau 18,5% dari luas Kecamatan Kubung.

Jumlah penduduk di Nagari Koto Hilalang tahun 2015 sebanyak 2.849 jiwa, dengan jumlah penduduk laki-laki 1.427 jiwa dan penduduk perempuan sebnayak 1.422 jiwa. Luas lahan berupa sawah dan hutan negara di Kecamatan Kubung sebagian terdapat di Nagari Koto Hilalang. Sebagian besar masyarakat di Nagari Koto Hilalang bekerja sebagai petani.

a. Rumah Gadang

   Rumah gadang yang terdapat di Nagari Koto Hilalang berdasarkan hasil survey lapangan paling banyak tersebar di Jorong Dalam Nagari yaitu sebanyak 16 rumah gadang milik kaum dan 18 rumah gadang milik pribadi. Rumah gadang yang status kepemilikannya oleh kaum dimiliki oleh 5 (lima) suku yaitu Suku Melayu, Tanjung, Piliang, Caniago, dan Jambak. Berdasarkan bentuknya, rumah gadang di Nagari Koto Hilalang ini memiliki jumlah ruang yang berbeda-beda. Ada yang terdiri dari 3 – 4 ruang bahkan di Jorong Koto Tingga terdapat rumah gadang dengan 5 ruang. Rumah gadang yang ada di Nagari Tardisional ini sebagian besar dikelola oleh masyarakat/kaum.

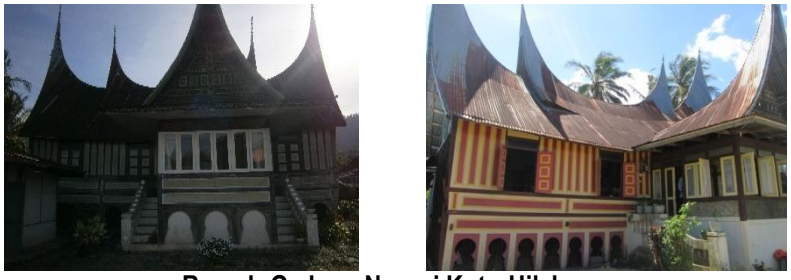

Rumah Gadang Nagari Koto Hilalang

b. Kesenian / Tradisi Khas Koto Hilalang

   Daya tarik wisata selain rumah gadang di Nagari Koto Hilalang yaitu kesenian randai, tupai bajanjang, dan saluang. Untuk kesenian randai masih rutin dilaksankan setiap 1 x seminggu (kecuali di Bulan Ramadhan) dilaksanakan oleh pemuda pemudi setempat. Tempat dilaksanakannya randai ini di Jorong Simpang Ampek. Sedangkan untuk tradisi pernikahan di Nagari Koto Hilalang masih menggunakan tradisi adat setempat.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Selain kesenian khas yang terdapat di Nagari Koto Hilalang, juga terdapat makanan khas Nagari Koto Hilalang yaitu kue jalin seribu (kareh-kareh), pangek cubadak, dan pinyaram.

c. Benda-benda Bersejarah
Benda-benda bersejarah juga merupakan salah satu daya tarik wisata di Nagari Tradisional Koto Hilalang selain rumah gadang dan kesenian daerah. Benda-benda bersejarah ini merupakan benda yang memiliki nilai historis misalnya pakaian adat atau keris. Dari 41 rumah gadang di Nagari Koto Hilalang tidak semua rumah gadang memiliki benda bersejarah, hanya ada beberapa rumah yang memiliki benda bersejarah. Pemeliharaan benda-benda bersejarah ini dilakukan oleh masyarakat atau kaum yang mengelola rumah gadang. Pemerintah belum ada memberikan bantuan kepada masyarakat Koto Hilalang.

Gambar 2. Benda-benda Bersejarah

b. Analisis Kebutuhan Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana penunjang Kawasan Wisata Nagari Tradisional:

a) Tempat Penginapan
Tempat penginapan di Nagari Tradisional ini dapat dikatakan belum ada atau belum tersedia. Namun, berdasarkan hasil wawancara kepada masyarakat bahwa masyarakat bersedia menggunakan rumah mereka untuk tempat menginap bagi wisatawan (*homestay*). Masyarakat di Nagari Koto Hilalang juga bersedia menerima kedatangan wisatawan baik lokal maupun asing tetapi tetap mempertahankan ketradisionalan Nagari Koto Hilalang.

b) Media Informasi
Di Nagari Koto Hilalang belum terdapat media informasi ataupun penunjuk arah objek wisata. Hal ini akan mempengaruhi kunjungan wisatawan dikarenakan tidak mengetahui adanya objek wisata ini.

c) Toko Souvenir
Nagari Tradisional Koto Hilalang belum memiliki toko souvenir tempat menjual barang-barang ataupun makanan ciri khas Nagari Koto Hilalang.

d) Aksesibilitas
Aksesibilitas ke Nagari Koto Hilalang khususnya Jorong Kampung Dalam sebagai kawasan prioritas dalam kegiatan ini terdapat 3 jalur masuk menuju Nagari koto Hilalang atau Jorong Kampung Dalam, yakni jalur 1 dari Selayo, jalur 2 dari Gantung Ciri, jalur 3 Batu Palano. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat table aksesibiltas di bawah ini.

KESIMPULAN

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa Nagari Koto Hilalang masih perlu melakukan persiapan dalam mewujudkan nagari sebagai desa wisata pertanian. Namun demikian pola permukiman yang ada di Nagari Koto Hilalang berkelompok alias berbentuk *cluster* di satu jorong saja, yakni di Jorong Dalam Nagari. Sementara pelestarian adat istiadat Nagari Koto Hilalang sudah mulai ditinggalkan. Sementara budaya lokal yang menjadi ciri khas daerah ini, salah satunya budaya *Tupai Janjang* pun sudah mulai ditinggalkan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bălan, Mariana, and Cristina Burghelea. 2015. "Rural Tourism and Its Implication in the Development of the Fundata Village." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 188 (1360 m): 276–81.

[2] Lanfranchi, M., Giannetto, C., 2014. Sustainabledevelopment in rural areas: The new model of social farming, in *Quality-Access Success,* Vol. 15, Issue Suppl. 1, p. 219-223.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS PROGRAM PENGEMBANGAN EKOWISATA DI PULAU PAHAWANG KABUPATEN PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

Hendro Muliarto[1)], Isye Nurhasanah Susanah[1)], Citra Persada[2)]

[1)] Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Sumatera

[2] Fakultas Teknik, Universitas Negeri Lampung 2

Email : hendro.muliarto@itera.ac.id

Naskah diterima :10 Maret 2017 Naskah direvisi : 22 Maret 2017 Disetujui terbit : 23 Maret 2017

ABSTRAK

Pariwisata Pulau Pahawang yang terletak di Kabupaten Pesawaran Provinsi Lampung berkembang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, namun tidak didukung oleh kesiapan prasarana dan sarana yang mendukung Pulau Pahawang sebagai destinasi ekowisata (ecotourism). Hal ini dikhawatirkan akan mengancam upaya konservasi di Pahawang yang sudah dilakukan masyarakat bersama Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) sejak tahun 20 tahun yang lalu. Peran LSM dan masyarakat dalam pengembangan Pulau Pahawang sebagai destinasi wisata sangat besar terutama dalam konservasi mangrove dan terumbu karang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif. Data yang digunakan merupakan data sekunder, hasil pengamatan lapangan (observasi), focus group discussion dan data depht interview stakeholders yang fokus pada ekowisata Pulau Pahawang. Hasil analisis menunjukkan bahwa pengembangan pariwisata Pulau Pahawang belum sesuai dengan prinsip-prinsip ekowisata.

Kata kunci: *ekowisata, Pulau Pahawang, Stakeholders.*

PENDAHULUAN

Kepariwisataan Pahawang dikembangkan agar mampu mendorong kegiatan ekonomi dan meningkatkan citra Pulau Pahawang bahkan Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal, menurut Persada [1]serta memberikan perluasan kesempatan kerja dengan model pengambangan ekowisata. Menurut dokumen WWF [2] Istilah "ekowisata" dapat diartikan sebagai perjalanan oleh seorang turis ke daerah terpencil dengan tujuan menikmati dan mempelajari mengenai alam, sejarah dan budaya di suatu daerah, di mana pola wisatanya membantu ekonomi masyarakat lokal dan mendukung pelestarian alam. Menurut Persada [1] Berkembangnya kegiatan pariwisata di suatu daerah akan memberikan pengaruh pada sektor ekonomi serta mendorong pembangunan sektor-sektor lainnya, khususnya dalam memperluas lapangan kerja dan peluang berusaha.

Pulau Pahawang berkembang sangat pesat dalam 5 tahun terakhir, tetapi belum didukung oleh kesiapan sebagai destinasi pariwisata khususnya ekowisata (ecotourism). Tahun 1996 Mitra Bentala, LSM berbasis lingkungan, melakukan pendampingan masyarakat untuk konservasi kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil. Sebelum berkembang menjadi lokasi wisata seperti saat ini, warga Pahawang belajar bersama sama selama 12 tahun dibantu oleh Mitra Bentala terkait cara menyelamatkan hutan mangrove dan terumbu karang, serta menjaga kebersihan laut yang berpotensi pula sebagai destinasi wisata [3], baru pada tahun 2010, Pahawang mulai banyak dikunjungi oleh peneliti dan wisatawan. Tahun 2007, Pulau Pahawang masuk dalam daerah administrasi Kabupaten Pesawaran, menyebabkan pemerintah mulai melirik potensi wisata pahawang sebagai salah satu wisata unggulan, namun pada tahun tersebut pemerintah belum fokus untuk pengembangan wisata pahawang. Berbagai pihak mengkhawatirkan kelestarian lingkungan Pulau Pahawang, karena tidak ada peraturan yang melindungi kawasan ini dari ancamana berbagai kegiatan wisata di sana. Pada tahun 2016, salah satu organisasi yang peduli yaitu Forum CSR Lampung mulai melakukan penanaman terumbu karang sebagai upaya konservasi di daerah wisata Pulau Pahawang.

Penelitian ini merupakan lanjutan dari penelitian sebelumnya, menurut Persada [3] dari penelitian sebelumnya didapatkan kesimpulan berupa (1) Proses keterlibatan masyarakat dan pemberdayaan dapat menjadi kekuatan pendorong dari pariwisata berkelanjutan; (2) Kolaborasi yang lebih efektif antara pemerintah - masyarakat lokal (bisnis, dan penduduk) - semakin banyak kesempatan untuk mendapatkan pariwisata yang berkelanjutan; (3) Kurangnya peran pemerintah untuk memfasilitasi kebijakan dalam mengelola kawasan ekowisata sebagai kendala pembangunan pariwisata berkelanjutan potensi; (4) Sebuah studi longitudinal di daerah ini akan diterima untuk memeriksa pemberdayaan ekonomi daerah ini. Penelitian ini akan melihat gambaran berupa arahan program pengembangan Pahawang sebagai destinasi ekowisata.

Tujuan Penelitian:

1. Identifikasi potensi dan permasalahan dalam pengembangan ekowisata Pulau Pahawang
2. Identifikasi peran stakeholders dalam pengembangan ekowisata di Pulau Pahawang.
3. Arahan program pengembangan pariwisata Pulau Pahawang sebagai destinasi ekowisata

Persada dalam penelitian sebelumnya [1] membahas ekowisata berbasis masyarakat, beberapa aspek kunci dalam ekowisata berbasis masyarakat adalah:

- Masyarakat membentuk panitia atau lembaga untuk pengelolaan kegiatan ekowisata di daerahnya, dengan dukungan dari pemerintah dan organisasi masyarakat (nilai partisipasi masyarakat dan edukasi)
- Prinsip local ownership (pengelolaan dan kepemilikan oleh masyarakat setempat) diterapkan sedapat mungkin terhadap sarana dan pra-sarana ekowisata, kawasan ekowisata, dll (nilai partisipasi masyarakat)
- Homestay menjadi pilihan utama untuk sarana akomodasi di lokasi wisata (nilai ekonomi dan edukasi)
- Pemandu adalah orang setempat (nilai partisipasi masyarakat)
- Perintisan, pengelolaan dan pemeliharaan obyek wisata menjadi tanggungjawab masyarakat setempat, termasuk penentuan biaya (fee) untuk wisatawan (nilai ekonomi dan wisata).

METODOLOGI PENELITIAN

Lingkup penelitian ini adalah teridentifikasinya penerapan prinsip-prinsip ekowisata di Pahawang. Menurut Creswell [4] dalam penelitian deskriptif proses analisis dan interpretasi data tidak hanya dilakukan pada akhir pengumpulan data atau berdiri sendiri, namun secara simultan juga dilakukan pada saat pengumpulan data dilapangan berlansung, sehingga penelititan ini juga dikenal sebagai penelitian siklus. Setelah mendapatkan informasi, dilakukan analisis untuk mencari hipotesis kemudian dilakukan pengumpulan informasi berikutnya. Ini dimaksudkan untuk memperoleh kesesuaian dengan hipotesis sementara yang telah disusun, demikian terus berputar hingga ditemukan puncak informasi atau kejenuhan data. Selanjutnya, kegiatan dalam analisis data meliputi pencarian data, menatanya, membaginya menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesanya, mencari pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari serta memutuskan apa yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Pulau Pahawang terletak di perairan Teluk Lampung, Kecamatan Punduh Pidada, Kabupaten Pesawaran, dengan Luas area 1020 Ha. Tahun 1996, LSM Mitra Bentala melakukan proses pendampingan di Desa Pulau Pahawang. Pada awalnya Pulau Pahawang adalah salah satu desa terisolasi, maraknya penebangan mangrove, penangkapan ikan dengan bom, potasiun dan pukat besar, mengakibatkan rusaknya ekosistem pesisir.Pendampingan LSM dari tahun 1996 sampai saat ini, mengenai program rehabilitasi dan penyadaran fungsi lingkungan ke masyarakat, membuat masyarakat lokal Pulau Pahawang menjadi sadar lingkungan dan menumbuhkan rasa memiliki terhadap lingkungan tempat tinggalnya. Sehingga ketika masyarakat lokal Pulau Pahawang dan sekitarnya dirasa telah siap, menurut Persada [3] maka pada tahun 2009 Mitra Bentala mendorong masyarakat lokal untuk menjadikan lokasi tempat tinggal mereka sebagai salah satu destinasi wisata bahari Lampung.

Data penelitian ini didapat dari *depth interview* dan *FGD (focus group discussion)*. *Depth interview* dilakukan dengan narasumber tokoh masyarakat, dinas pariwisata kabupaten, LSM dan akademisi yang terlibat lansung dalam pengembangan ekowisata Pahawang. *FGD* dilakukan sebanyak 2 kali. *FGD* pertama dilakukan Januari 2016 yang dipimpin lansung oleh Wakil Gubernur Lampung dengan mengundang tokoh masyarakat setempat, aparat desa, LSM, pelaku bisnis pariwisata dan akademisi. *FGD* kedua dilakukan Juni 2016, dengan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dihadiri Dewan Riset Daerah Lampung yang fokus membahas kepariwisataan dengan mengundang akademisi bidang pariwisata. Isu-isu yang dapat ditarik dari *deep interview* dan data-data yang didapat yaitu:

Tabel 1. **Isu-isu ekowisata Pahawang**

Konservasi	Edukasi	Pemberdayaan Masyarakat	Ekonomi Lokal	Partisipasi Masyarakat
Tidak adanya peraturan bagi wisatawan agar tidak merusak lingkungan (terumbu karang) Masyarakat, LSM, dan pemerintah sudah mulai khawatir dengan ancaman peningkatan aktivitas wisata Pahawang Tidak adanya perencanaan menyeluruh untuk pengembangan Ekowisata Pulau Pahawang	Belum adanya kegiatan edukasi untuk wisatawan di Pulau Pahawang yang harus melalui peraturan dan TIC (tourist information centre)	Masyarakat asli Pulau Pahawang sudah mulai memperoleh manfaat ekonomi dari aktivitas pariwisata tapi manfaatnya lebih dominan dirasakan oleh masyarakat luar Pahawang yang melakukan bisnis wisata di Pahawang, seperti guide, pemilik kapal, pemilik penyewaan alat-alat snorkling	Ekonomi lokal yang berkembang berupa homestay, warung makan, penyewaan kapal Ekonomi lokal yang belum berkembang, yaitu cinderamata, ekonomi kreatif, guide	Partisipasi masyarakat dalam konservasi mangrove dan terumbu karang

Peran yang dilakukan LSM Mitra Bentala

1. **Ditingkat Masyarakat;** Melakukan proses pendampingan yang berkelajutan, dengan pegutamaan penyadaran pendidikan lingkungan. Penyadaran ini berupa sosialisasi efek positif dan negatif dari kondisi alam ke kelansungan hidup masyarakat setempat.
2. **Ditingkat Pemerintahan Desa;** Mendorong tatakelola lingkungan yang baik, mendorong lahirnya peraturan desa tentang wisata dan sebagainya,
3. **Pemerintah Kabupaten/Provinsi;** Mendorong sinergi antar program SKPD/dinas untuk konservasi Pahawang dan pembangunan sarana prasarana yang mendukung ekowisata Pahawang.
4. Terus melakukan kampanye/publikasi ekowisata Pulau Pahawang ke wisatawan.

Selain program-program yang dilakukan LSM, keterlibatan masyarakat sangat besar dalam pengembangan wisata di Pulau Pahawang. Masyarakat setempat adalah pihak pengerak utama sekaligus penerima manfaat langsung terhadap wisata yang dikembangkan, Maka dalam hal ini peningkatan kapasitas masyarakat harus dilakukan dalam pengembangan wisata. Peran masyarakat secara umum adalah ikut serta menjaga lingkungan yang baik, keamanan yang kondusif, bersikap ramah dan bersahaja layaknya dalam kaidah dalam wisata seperti sapta pesona. Disamping masyarakat juga merupakan pengelola lansung dalam berwisata di Pulau Pahawang. Hal ini menyebabkan perubahan pola kegiatan masyarakat, dari kegiatan nelayan dan bertani menjadi kegiatan pelayanan pariwisata terutama dihari sabtu dan minggu.

LSM dan masyarakat secara rutin mengadakan pertemuan untuk membahas tentang pengembangan dan pengelolaan wisata yang baik. Efek dari kegiatan yang dilakukan LSM dan masyarakat dapat dilihat dari naiknya perekonomian lokal, pembaikan kesehatan dan gizi masyarakat. Tidak hanya masyarakat Pulau Pahawang namun juga masyarakat yang bersinggungan lansung dengan Pulau Pahawang, dampak lainnya dapat dilihat dari berkembangnya agen-agen wisata dari luar penduduk Pulau Pahawang. Masuknya agen-agen wisata diluar penduduk Pulau Pahawang yang tidak terjangkau oleh pendampingan LSM, menimbulkan ancaman bagi konservasi Pulau Pahawang. Diperkirakan wisatawan yang datang melalui agen wisata Pulau Pahawang adalah 5000 wisatawan perbulan. Hal ini tentu mendatangkan keuntungan finansial yang melimpah, namun juga mendatangkan ancaman bagi konservasi Pulau Pahawang. Hal ini juga menimbulkan kerancuan, karena manfaat finansial Pulau Pahawang, sebagian besar dirasakan oleh agen-agen wisata yang bukan penduduk asli Pulau Pahawang.

Keuntungan dan ancaman ini perlu disinergiskan dengan program-program pemerintah. Menurut data yang didapatkan dari *deep interview* belum ada sinergi program antar SKPD, membuat program-program yang dijalankan menjadi tumpeng tindih. Peraturan-peraturan pengelolaan pariwisata yang belum jelas juga menjadi

kendala dalam pengembangan Pulau Pahawang, misalnya, masihadap penerbitan izin alih fungsi lahan mengrove. Hubungan desa dan pemerintah yang belum optimal juga membuat belum banyaknya kegiatan ekowisata yang dikembangan oleh pemerintah-masyarakat.Dukungan dari pemerintah sudah dilakukan berupa pelatihan-pelatihan tentang wisata dan bantuan perahu walaupun belum begitu banyak. Komunikasi dan kordinasi yang belum baik antara pemerintah dengan pelaku bisnis dan masyarakat setempat mengaibatkan belum adanya perencanaan yang baik dan juga menghadirkan program-program yang spontan dan belum bisa menyentuh perencanaan yang komprehensif.

Dari studi kasus pendampingan panjang LSM untuk konservasi Pulau Pahawang, dapat dilihat peran penting dalam pengembangan dan implementasi bisnis ekowisata sesuai dengan keadaan dan kebutuhan yang ada diwilayah ekowisata. Namun peran-peran tersebut harus diawasi pemerintah agar tetap berjalan dengan keberpihakan pada kepentingan masyarakat lokal dan kelestarian sumberdaya alam, dan juga tetap membangun relasi positif dengan pihak-pihak lainnya, yakni pemerintah, pihak-pihak swasta dan kelompok-kelompok pengunjung. Sedangkan peran-peran stageholders dalam pengembangan ekowisata Pulau Pahawang dapat disimpulkan sebagai berikut

Tabel 2 peran-peran stageholders

LSM	Masyarakat	Pemerintah
1. Edukasi masyarakat dalam konservasi mangrove dan terumbu karang 2. Edukasi masyarakat dalam pengembangan teknoliogi informasi 3. Promosi wisata Pulau Pahawang 4. Membangun jaringan dengan peneliti, media, pemerintah dan swasta 5. Melakukan penyuluhan sadar wisata melalui sapta pesona 6. Memfasilitasi masyarakat untuk pelatiahan guide	1. Meyediakan fasilitas penginapan berupa homestay, ada sekitar 30 homestay milik masyarakat 2. Menyediakan makanan dan minuman untuk wisatawan 3. Menyewakan perlengkapan wisata air, snorkeling 4. Membentuk wadah dan forum dialog antar tokoh masyarakat untuk pengembangan dan pengelolaan pariwisata 5. Melakukan musyawarah bersama dalam pengelolaan pariwisata Pulau Pahawang dengan masyarakat Pulau Pahawang, Pemerintahan Kabupaten, DPRD	1. Memberi dukungan dan turut andil dalam penyuluhan kelompok Sadar Wisata (sapta pesona) yang telah dibentuk komunitas lokal Pahawang 2. Memberikan bantuan fasilitas pendukung penginapan termasuk perlengkapan berupa Kasur untuk homestay, alat-alat snorkeling, kotak sampah, sepeda gunung dan lainnya Penetapan peraturan tentang kapal dan tarif kapal 3. Melaksanakan promosi melalui pameran wisata ke untuk menarik wisatawan Indonesia dan mancanegara 4. Merealisasikan pembentukan koperasi. Pelatihan keamanan dan keselamatan pariwisata 5. Menjadikan pariwisata sebagai sektor unggulan dan mengadakan even festival Pahawang pertama, November 2016, sebagai even pariwisata.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan berisi rangkuman singkat atas hasil penelitian dan pembahasan. Berdasarkan data-data dan analisis yang dilakukan dapat disimpulkan :

1. Pengembangan pariwisata Pulau Puhawang belum mempertimbangkan prinsip-prinsip ekowisata
2. Peran LSM dan masyarakat sangat besar yang diawali dengan konservasi lingkungan dan saat ini masyarakat mulai merasakan manfaat dari sektor pariwisata, tetapi di sisi lain ada kekhawatiran pariwisata akan mengancaman konservasi lingkungan.
3. Peran pemerintah masih terbatas pada penyuluhan dan pemberian bantuan fasilitas pendukung pariwisata, diharapkan ke depan pemerintah dapat menyiapkan berbagai perangkat peraturan yang berkaitan dengan konservasi mangrove dan terumbu karang, penyediaan infrastruktur seperti: jalan akses di kawasan Pulau Pahawang, pelabuhan, listrik dan air bersih.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

4. Perlu adanya percepatan pelaksanaan berbagai program berkaitan dengan prinsip ekowisata sebagaimana terlihat pada konsep pengembangan ekowisata Pulau Pahawang pada Gambar 1 dan arahan program pengembangan ekowisata Pahawang pada Tabel 3.

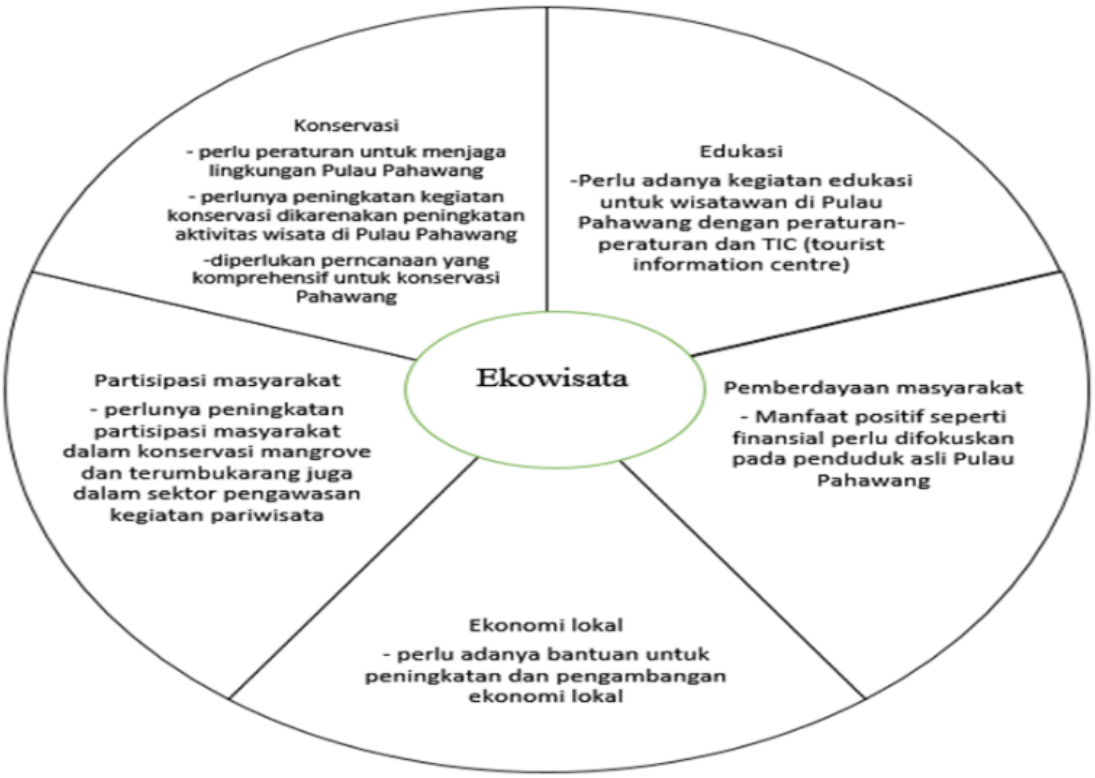

Gambar 1 Konsep pengembangan ekowisata Pahawang

Tabel 3 Arahan dan strategipengembangan ekowisata Pahawang

No.	Arahan Program Pengembangan	Kegiatan	Keterangan (rincian dan tujuan)	Penanggung Jawab
1.	Penyusunan dokumen perencanaan	1. Penyusunan Rencana Induk Kawasan Puhawang dan sekitarnya (Teluk Lampung) 2. Tindak lanjut buku Pola Perjalanan Pariwisata Provinsi Lampung untuk Koridor Kawasan Wisata Puhawang dan sekitarnya (Teluk Lampung)	- Harus ada keterkaitan RIPPDA Kabupaten dengan RIPPDA Provinsi, pengembangan KORIDOR TENGAH-BARAT (yang tertuang dalam RIPPDA Provinsi Lampung) - Tahun 2016 Dinas Pariwisata Provinsi melakukan Review RIPPDA Provinsi Lampung - Pengembangan transportasi ramah lingkungan (sepeda, gerobak, berkuda dll) untuk wisatawan - *Fam Trip* dengan mengundang ASITA, PHRI, HPI dll, untuk mengembangkan Jalur Wisata yang sudah disusun	Pemerintah Kabupaten (BAPPEDA) Pesawaran bersama konsultan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Lampung Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran dan ASITA

ISBN : 978-602-73463-1-4

No.	Arahan Program Pengembangan	Kegiatan	Keterangan (rincian dan tujuan)	Penanggung Jawab
			pemerintah. - Dinas Pariwisata Kabupaten Pesawaran menindaklanjuti masukan dari Fam Trip pada jalur tersebut di atas	
2.	Penyusunan Peraturan berkaitan dengan Pengembangan Kawasan Puhawang	1. Penyusunan Peraturan tentang perlindungan terumbu karang dan mangrove 2. Penyusunan Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata di kawasan Puhawang dsk seperti: - pembayaran atau bea masuk kawasan wisata - penyewaan alat-alat *snorkeling* dan lain-lain (standar kesehatan utk alat snorkling) - standar keamanan transportasi dan alat-alat - sewa kapal dan alat-alat	- Peraturan tentang Konservasi Kawasan Pesisir dan Laut - Peraturan ttg tata tertib pengunjung (seperti: ada di TIC di pintu masuk kawasan) - Peraturan tentang tata Tertib bagi pengusaha di Pelabuhan Ketapang, Misal: standarisasi transportasi wisata (kapal,dll) - Peraturan yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan pariwisata (standar harga, dll) yang dituangkan dalam Peraturan Desa	Pemerintah Provinsi dan Kabupaten (DKP, Dinas Pariwisata, Dispenda, Dishub)
3.	Pengembangan Destinasi Wisata	Penataan (revitalisasi) Pelabuhan Ketapang sebagai tempat penyeberangan yang aman Pengembangan Kawasan Mangrove sebagai salah satu objek wisata alam di Puhawang Pembangunan Pusat Informasi Wisata (TIC) di sekitar Ketapang (sebelum masuk kawasan wisata) Pembangunan akomodasi dan restoran Pembangunan pusat seni dan budaya 1. Gedung Pertunjukan 2. Plaza atau Teater Terbuka 3. Kampung Budaya	- Pembangunan dan peningkatan jalan dari Bandarlampung - Puhawang yang memenuhi standar aman dan nyaman (lebar jalan, rambu-rambu dll) - Pembangunan dan perluasan dermaga Ketapang (layak utk pariwisata) - Pembangunan dermaga Jetty di Dusun Jelarangan di Puhawang Besar - Pembangunan dermaga wisata di Lempasing menuju Puhawang - Pembangunan jalan lingkungan di Pulau Puhawang untuk transportasi ramah lingkungan (sepeda, berkuda, gerobak)	Dinas Bina Marga Provinsi Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten Dinas Kelautan dan Perikanan Dinas Permukiman /Cipta Karya Kabupaten Pemerintah (Dinas Kelautan& Perikanan) bersama LSM Dinas Pariwisata Kabupaten Pesa-waran bersama swasta, LSM ling-kungan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

No.	Arahan Program Pengembangan	Kegiatan	Keterangan (rincian dan tujuan)	Penanggung Jawab
			1. Program pemeliharaan dan penanaman mangrove 2. Pembangunan jalan atau *track* di kawasan mangrove 3. Transplantasi Terumbu Karang di Puhawang *Tourism Information Center* (TIC) yang memberikan informasi kepada wisatawan sebelum memasuki Kawasan Wisata Alam/Bahari Puhawang. Sebagai kawasan wisata alam (EKOWISATA) para wisatawan wajib ikut menjaga kelestarian lingkungan, sehingga perlu disampaikan tata tertib masuk kawasan wisata 1. Pembangunan *homestay* (rumah penduduk, base camp Mitra Bentala) dan pengembangan *camping ground* 2. Pengembangan restoran yang dikelola masyarakat yang sesuai dengan permintaan pasar 3. Pembinaan bidang pertanian ke masyarakat lokal untuk penyediaan berbagai macam bahan baku makanan (sayuran dan buah-buahan) 1. Gedung pertunjukan dan teater terbuka digunakan untuk menambah daya tarik wisata terutama di waktu-waktu ketika wisatawan tidak ke laut (malam hari) 2. Kampung Budaya dan	Pemerintah Kab. Pesawaran (Dinas Pariwisata) dan masyarakat lokal Dinas Koperindag Kabupaten Pesa-waran Pemerintah (Dinas Pertanian) Pemerintah (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) bersama masyarakat lokal

ISBN : 978-602-73463-1-4

http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

No.	Arahan Program Pengembangan	Kegiatan	Keterangan (rincian dan tujuan)	Penanggung Jawab
			Wisata dikembangkan dengan thema yang unik 3. Penggalian cerita rakyat/legenda berkaitan dengan objek wisata atau desa wisata	
4.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pelatihan dan pembinaan bidang pariwisata bagi: birokrat, dan masyarakat setempat di Pulau Pahawang	1. Aparatur teknis pariwisata di Kabupaten 2. Penyuluhan SADAR WISATA pada masyarakat di objek wisata 3. Pelatihan pembuatan souvenir bagi masyarakat lokal 4. Pelatihan berkaitan kuliner bagi masyarakat lokal 5. Pelatihan pramuwisata bagi masyarakat loka 6. Pembangunan Sekolah Menengah Kejuruan bidang Pariwisata	Pemerintah (Dinas Pariwisata, Dinas Perindag) Pemerintah (Dinas Pendidikan)
5.	Pengembangan Parsarana dan sarana pendukung	1. Pemgembangan listrik 2. Penyediaan Air bersih 3. Penyediaan tempat pembuangan sampah sementara TPA dan TPA 4. Pengolahan limbah padat dan cair (sampah, sanitasi lingkungan)	- Pengembangan Konsep 3 R (Reuse, Recycle dan Reduce) untuk sampah dan air	PLN PDAM Dinas Pekerjaan Umum
6.	Kelembagaan	1. Pembentukan TIM Koordinasi Strategis Lintas Sektor Bidang Kepariwisataan (Perbup) 2. Pembentukan BPPD Kabupaten yang beranggotakan akademisi, pengusaha, pers dan komunitas (SK Bupati)	Tim Koordinasi dipimpin langsung oleh Wakil Bupati BPPD adalah amanat UU No 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan	Pemerintah Kabupaten Pesawaran

DAFTAR PUSTAKA

[1] C. Persada, Pariwisata dalam perencanaan wilayah membangun Lampung sebagai destinasi baru, Lampung, 2011.

[2] D. K. d. Pariwisata and WWF-Indonesia, "Prinsip dan kriteria ekowisata berbasis masyarakat," Direktorat Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata, Jakarta, 2009.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[3] I. S. Nurhasanah and C. Persada, "Identifying Local Community's Empowerment in Developing Sustainable Tourism in Pahawang Island, Pesawaran Regency, Lampung Province," in *Icositer*, Lampung, 2016.

[4] J. Creswell, Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research., New Jersey: Prentice Hall, 2004.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TANTANGAN PEMBANGUNAN PARIWISATA INKLUSIF GEOPARK CILETUH, DESA CIWARU KABUPATEN SUKABUMI – PROVINSI JAWA BARAT

Hilwati Hindersah[1)], Yulia Asyiawati[1)], Lely Syiddatul Akliyah[1)], Taufik Akbar Ramadhan[1)]

[1)] Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung

E-mail : hilwati_hindersah@yahoo.com[1)] ; yulia_asyiawati@yahoo.com[2)]; ulil_sa@yahoo.com[3)], ; taufik.vantobaar@gmail.com[4]

Naskah diterima :13 Maret 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 24 Maret 2017

ABSTRAK

Geopark Ciletuh merupakan potensi wisata alam yang berpeluang untuk dikembangkan di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Pembangunan pariwisata inklusif di suatu area yang terpencil mempunyai permasalahan tersendiri. Di dalam area Desa Ciwaru, Geopark Ciletuh ini adalah satu situs geologi yang memberikan panorama pemandangan alam yang indah sehingga dapat menjadi satu tujuan wisata alam. Desa Ciwaru ini terletak di Teluk Ciletuh yang dikelilingi gugus batuan geologi yang unik dan rangkaian air terjun yang membuat desa ini nyaris tersembunyi. Dengan kondisi masyarakat nya yang masih mengandalkan kehidupannya dari pertanian dan tingkat pendidikan nya rendah, maka adalah sebuah tantangan untuk mengembangkan pariwisata inklusif untuk area Geopark Ciletuh ini. Tantangan utama adalah bagaimana potensi wisata ini dapat meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat juga desa sekelilingnya. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dalam upaya membangun pariwisata inklusif di Desa Ciwaru dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Dimulai dengan pemahaman tentang kondisi Desa Ciwaru dan sekelilingnya, analisis potensi wisata alam Geopark Ciletuh akan dilakukan bersamaan dengan mengaitkan kepada keberhasilan daerah wisata lainnya yang serupa. Pendekatan perencanaan wisata Geopark yang sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal diharapkan dapat mewujudkan pembangunan inklusif yang dapat menciptakan peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ciwaru dan sekelilingnya.

Kata kunci: *Pariwisata, Inklusif, Geopark*

PENDAHULUAN

Geopark Ciletuh terletak terpencil di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas. Kecamatan Ciemas ini merupakan kawasan perdesaan yang terletak di bagian Selatan Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat yang berbatasan langsung dengan Samudera Hindia. Kecamatan Ciemas mempunyai potensi sumberdaya alam untuk dimanfaatkan sebaik-baiknya dan sumberdaya manusia untuk mendukung pembangunan kawasan ini. Potensi sumberdaya alam yang dipunyai kawasan perdesaan Kecamatan Ciemas adalah lahan pertanian yang subur, lahan perkebunan, obyek wisata alam. Geopark Ciletuh yang membentang di Desa Ciwaru dalam lingkar Teluk Ciletuh ini merupakan potensi obyek wisata alam yang berpeluang untuk dikembangkan. Geopark Ciletuh adalah satu situs geologi yang mempunyai karakter alam yang unik dan berbeda sebagai sebuah fitur daya tarik wisata. Menurut Inskeep [1], daya tarik wisata ini merupakan elemen paling penting dari sebuah produk pariwisata. Pembangunan sektor pariwisata terus dipacu dan diharapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat setempat. Untuk mencapai hal ini, maka pilihan pembangunan pariwisata dengan pendekatan inklusif yang melibatkan masyarakat di suatu area yang nyaris tersembunyi adalah merupakan satu tantangan tersendiri.

Paradigma pembangunan inklusif ini mendorong salah satunya tercapainya bentuk-bentuk kerjasama dalam proses pembangunan melalui upaya pelibatan masyarakat seutuhnya. Telah banyak berkembang beberapa model atau konsep pembangunan berbasis masyarakat. Community Economic Development (CED) sebagai salah satu model pembangunan berbasis masyarakat telah dipraktikan sejak tahun 1970-an. Menurut Shragge [2], CED menawarkan peran untuk membangun banyak alternatif kegiatan ekonomi juga kekuatan masyarakat lokal untuk mempunyai kendali yang lebih besar terhadap proses kegiatan sosial dan ekonominya.

Tersirat kuat adanya kerja partisipasi masyarakat. Terkait dengan pembangunan pariwisata, telah dikenal konsep Community Based Tourism (CBT) yang hampir serupa dengan konsep CED. Esensi nya adalah masyarakat lokal memiliki, mengelola dan mengendalikan secara substansial kegiatan pariwisata dan yang terpenting proporsi keuntungan yang besar tetap ada di masyarakat. Di Bali, sebagai destinasi pariwisata di Indonesia yang telah dan paling maju, kegiatan pariwisata nya telah berhasil tampil secara kolektif di tangan lembaga desa adat pakraman [3]. Beberapa lokasi destinasi pariwisata, sebagaimana telah dipelajari oleh Guterres [4] di Pantai Vatuvou – Timor Leste dan Nurdin [5] di Pulau Samalona – Makassar, diupayakan berkembang melalui pendekatan CBT ini.

Tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yang akan dihadapi dalam upaya membangun pariwisata inklusif di Desa Ciwaru. Oleh karena itu, tulisan ini dimulai dengan menyampaikan metode penelitian dilanjutkan dengan penyampaian hasil dan pembahasan tentang pemahaman kondisi dan permasalahan Desa Ciwaru dan sekelilingnya. Serangkaian analisis potensi dan tantangan pembangunan wisata alam Geopark Ciletuh dilakukan bersamaan dengan mengaitkan kepada keberhasilan-keberhasilan pembangunan pariwisata di destinasi wisata yang lain. Selanjutnya bagian akhir tulisan ini berusaha menyampaikan beberapa saran yang dianggap dapat mewujudkan pembangunan pariwisata inklusif di Desa Ciwaru.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Desa Ciwaru, Kecamatan Ciemas – Kabupaten Sukabumi dengan menggunakan metode penelitian deskriptif-kualitatif. Menurut Moleong [6], metode kualitatif didefinisikan sebagai tata-cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Obyek penelitian adalah Desa Ciwaru dengan aspek fisik-geografis, kegiatan ekonomi dan kegiatan sosial-budaya masyarakat yang terkait dengan kegiatan kepariwisataan.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan dengan observasi visual terhadap kondisi alam, wawancara mendalam dengan kepala desa dan Camat Ciemas. Pengumpulan data sekunder melalui survey ke instansi-instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi dan Kecamatan Ciemas serta kajian studi terdahulu. Teknik analisis dilakukan dengan pendekatan analisis deskriptif kuantitatif dan kualitatif terhadap faktor-faktor kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities) dan ancaman (threats) atau analisis SWOT [7]. Hasil analisis ini sebagai dasar tinjauan yang diperlukan untuk melihat tantangan pembangunan pariwisata inklusif Geopark Ciletuh sebagai kajian utama dari tulisan ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Geopark Ciletuh terletak di Kabupaten Sukabumi. Kabupaten Sukabumi ini mempunyai banyak lokasi destinasi pariwisata-nya. Salah satu yang sudah lama menjadi ikon destinasi wisata yang terkenal adalah Kota Pelabuhan Ratu dengan wisata pantai-nya. Dalam kebijakan pembangunan Kabupaten Sukabumi, potensi wisata ini menjadi produk unggulan yang telah tertuang dalam Perda Nomor 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032 [8]. Secara eksplisit tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten dalam perda ini adalah mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, produktif, berkelanjutan dan berdaya saing di bidang agribisnis, pariwisata dan industri menuju kabupaten yang maju dan sejahtera. Hal ini mempertegas arah pembangunan bahwa pariwisata akan menjadi sektor unggulan. Dalam Perda ini juga ditetapkan Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Pesisir Sukabumi yang melihat adanya kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup yang harus tetap terjaga. Geopark Ciletuh yang berada di Kawasan Pesisir Sukabumi, dalam KSK telah diarahkan untuk pengembangan kegiatan pertanian dan pariwisata.

Kota Pelabuhan Ratu dengan pantai-nya yang terletak di Teluk Pelabuhan Ratu adalah ibukota Kabupaten Sukabumi yang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) telah ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW). Demikian pula hal nya dengan Kota Sukabumi yang tersambung ke arah Selatan dengan Kota Pelabuhan Ratu dan Kota Pangandaran yang sama-sama dengan Kota Pelabuhan Ratu berada di Pantai Selatan Provinsi Jawa Barat merupakan PKW yang saling terhubungkan dalam satu sistem perkotaan. Adanya koneksitas yang baik antara Kota Pelabuhan Ratu dengan Kota Sukabumi dan Kota Pangandaran yang nantinya akan tersambung dalam Jalur Selatan ini akan memberikan peluang bagi Geopark Ciletuh dan Kecamatan Ciemas yang berjarak 61 km dari Kota Pelabuhan Ratu untuk berkembang. Demikian pula pembangunan kawasan sekitar Geopark Ciletuh sebagai destinasi pariwisata dapat diandalkan sebagai sumber pendapatan daerah dan masyarakat setempat dan akan mendorong pembangunan desa-desa sekitarnya. Walau demikian, sebagaimana destinasi pariwisata yang telah berkembang, menurut Kanom [9] sebuah strategi pengembangan yang berkelanjutan akan sangat diperlukan sebagai pedoman pembangunan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Geopark Ciletuh ini terletak di Desa Ciwaru Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi. Kecamatan Ciemas merupakan salah satu wilayah administrasi yang berada pada bagian Barat Daya Kabupaten Sukabumi. Dengan ketinggian 10-400 m dari permukaan air laut, posisi tepatnya Desa Ciwaru di Kecamatan Ciemas ini dapat dilihat pada Gambar 1. Kecamatan Ciemas terdiri atas 9 desa, dengan total luas wilayah sebesar 21.443 Km^2 dan jumlah penduduk wilayah perdesaan seluruhnya 51.112 jiwa.[10].

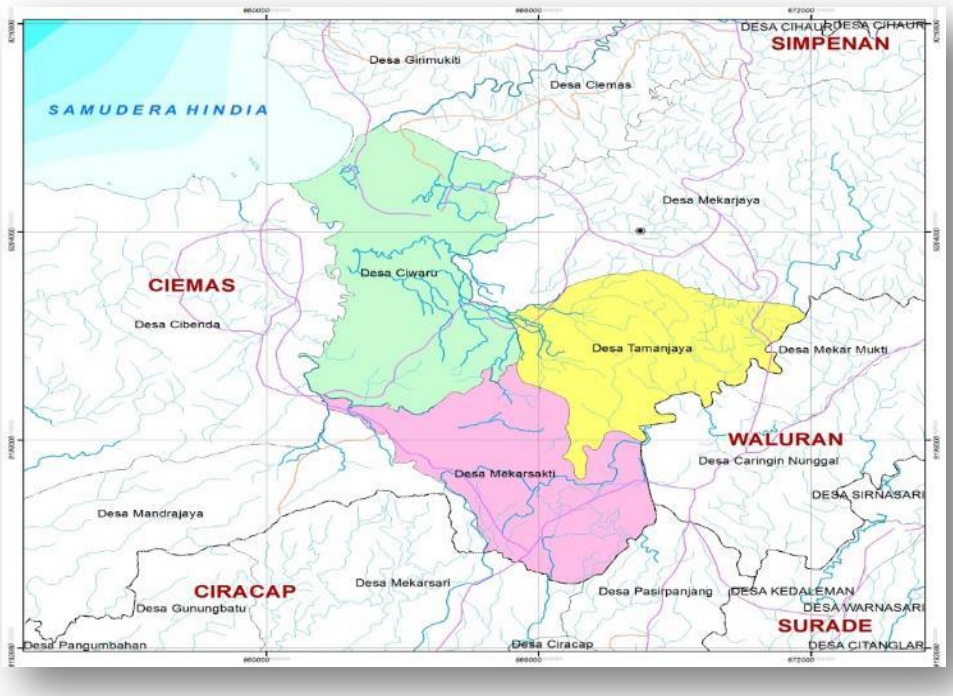

Gambar 1. Peta Desa Ciwaru di Kecamatan Ciemas

Desa Ciwaru ini sendiri terletak di pesisir pantai dari Teluk Ciletuh. Gambar 2. Menunjukkan posisi Teluk Ciletuh yang seolah-olah memberikan tanda adanya bentangan geologi yang istimewa. Kombinasi alam ini tentunya membentuk sebuah ekosistem tertentu, yang berdasarkan kajian Asyiawati dan Akliyah [11] pada ekosistem pesisir akan membutuhkan sebuah pengelolaan yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

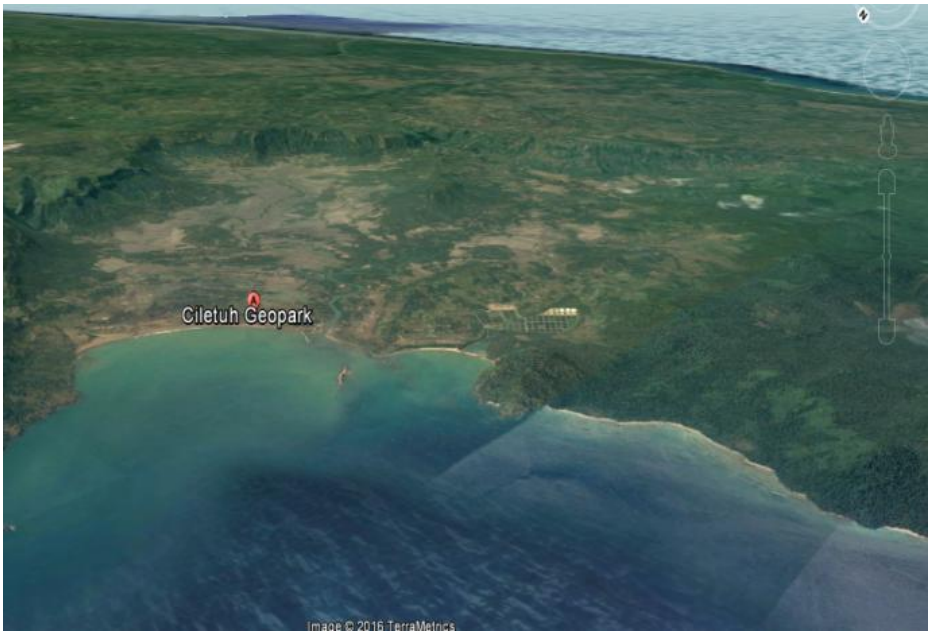

Gambar 2. Geopark dan Teluk Ciletuh

Geopark Ciletuh yang terletak di sebelah Tenggara Teluk Pelabuhan Ratu mempunyai luas wilayah sekitar 3.900 Km^2. Geopark ini dibatasi oleh pesisir pantai berpasir putih yang menghadap ke arah Teluk Ciletuh

ISBN : 978-602-73463-1-4

dan Lautan Samudra Hindia, sebagaimana terlihat dalam Gambar 3., yang mana teluk ini juga merupakan muara dari Sungai Ciletuh.

Gambar 3. Muara Sungai di Teluk Ciletuh

Geopark Ciletuh yang sebagian kecil berada di wilayah administratif Desa Ciwaru adalah satu situs geologi yang sangat istimewa karena mempunyai keragaman komposisi batuan purba paling tua di Jawa Barat. Singkapan batuan ini terbentuk pada zaman kapur sekitar 50-60 juta tahun silam setelah terendapkan dalam palung laut hasil penunjamanan lempeng samudra yang terletak di bawah lempeng benua. Dari aspek geologi, kawasan Geopark Ciletuh ini merupakan fosil tektonik yang memperlihatkan adanya pendampingan dua zona yang disusun oleh batuan berasal dari lempeng samudera yaitu Lempeng Indo-Australia dan lempeng benua yaitu lempeng Eurasia. Dua penggalan kerak bumi ini sangat berbeda sifatnya yang terbentuk karena adanya subduksi (tumbukan) dari kedua lempeng. Lempeng Indo-Australia berkomposisi basal yang bersifat basa, sedangkan Lempeng Eurasia berkomposisi granit yang bersifat asam [12]. Namun kawasan ini dikenal rawan gerakan tanah dan bencana tsunami.

Kondisi geologi ini dapat dikatakan sangat langka dan unik. Seluruh batuan tersingkap di dalam suatu lembah besar berbentuk tapal kuda yang terbuka ke arah Samudra Hindia sehingga menyerupai amfiteater, sebagaimana terlihat dalam Gambar 2. Menurut Hardiyono et.al [12], aneka jenis batuan ini yang bercampur dan terangkat di permukaan dinamai batuan campur aduk atau dikenal sebagai melange yang masuk ke dalam jenis batuan dengan kategori batuan Pra-Tertier yaitu batuan yang berumur paling tua. Kemudian, batuan Pra-Tertier yang tersingkap dapat dibedakan atas tiga (3) kelompok yaitu ofiolit, batuan metamorf dan sedimen. Ofiolit terdiri dari peridotit, gabro, dan berbantalkan lava. Batuan metamorf terdiri dari biru/sekis glaukofan, phyllite, dan serpentinit. Batuan sedimen terdiri atas sedimen laut dalam yaitu serpih merah dan rijang, dan sedimen benua yaitu batupasir graywacke dan kapur [12]. Dengan demikian, Geopark Ciletuh ini menyimpan sejarah dan kekayaan alam yang luar biasa tidak ternilai.

Sebenarnya Negara Indonesia mempunyai banyak kekayaan keragaman geologi yang tinggi yang layak untuk dikonservasi sebagai warisan geologi. Keuntungan lingkungan, ekonomi dan budaya akan tercipta bila pengembangan kawasan warisan geologi dalam bentuk geopark ini melibatkan masyarakat lokal. Geopark atau Taman Bumi ini telah berhasil dipraktikkan di negara Cina, Jepang dan Malaysia. Sudah sepantasnya Indonesia mendaftarkan situs-situs geologi nya ke dalam Global Geopark Network (GGN) Unesco, sebuah organisasi Jaringan Geopark Dunia.

Situs geologi di Ciletuh ini oleh Komite Nasional Indonesial untuk Unesco dan Kementrian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tanggal 22 Desember 2015 sudah diakui sebagai geopark nasional. Kini Geopark Ciletuh areanya diperluas dan pada tanggal 21 Juni 2016 telah menjadi Geopark Nasional Ciletuh-Pelabuhan Ratu [13]. Pada saat ini sedang dalam proses diajukan ke Unesco untuk diakui sebagai situs warisan dunia kategori alam milik Indonesia sekaligus sebagai geopark internasional. Geopark sejenis yang telah diakui Unesco adalah Kawasan Batur Global Geopark yang terletak di Kompleks Kaldera Gunung Batur - Bali dan Geopark Kompleks Pegunungan Sewu – Pacitan..

Geopark Ciletuh ini mempunyai panorama pemandangan bentang alam yang indah sebagaimana terlihat dalam Gambar 4. Dari beberapa lokasi dapat disaksikan pemandangan air terjun, tebing, pantai dan pulau dalam satu pandangan mata, yang secara geomorfologi membentuk amfiteater alam.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gambar 4. Pemandangan Teluk Ciletuh

Bentang alam Geopark Ciletuh yang indah ini mempunyai banyak air terjun yang mempunyai keunikan yang berbeda-beda, yaitu ada yang bertingkat, tunggal atau berjejer. Air terjun ini dapat dilihat baik dari jauh maupun dari dekat. Gambaran air terjun/curug ini dapat dilihat pada Gambar 5 dan Gambar 6. Beberapa nama air terjun yang istimewa adalah Curug Cimarinjung, Curug Sodong yang mempunyai air terjun kembar, Curug Awang yang memiliki ketinggian sekitar 40 m dengan lebar sekitar 60 m.

Gambar 5. Air Terjun Kembar: Curug Sodong

ISBN : 978-602-73463-1-4

Gambar 6, Air Terjun Bertingkat: Curug Cikanteh

Selain air terjun, terdapat banyak gugus batuan besar yang dinamai dengan nama-nama hewan, seperti Batu Munding, Batu Kodok, Batu Komodo karena ada keserupaan dengan bentuk hewan tersebut. Juga terdapat goa dan pulau-pulau kecil melengkapi keelokan bentang alam Ciletuh. Potensi geologi yang dimiliki Ciletuh ini dapat menjadi satu daya tarik wisata alam. Pengakuan Unesco tentu akan menjadi sebuah prestise bagi Indonesia dan Provinsi Jawa Barat. Namun ada harapan pengakuan ini dapat menjadi daya jual dan mendorong terwujudnya kegiatan pariwisata. Sebagaimana telah berkembang di obyek wisata Batur Global Geopark di Bali, geopark tergolong suatu konsep yang baru dalam industri kepariwisataan [14].

Desa Ciwaru ini terletak di Teluk Ciletuh yang dikelilingi gugus batuan geologi dan rangkaian air terjun. Bentang alam geologis dengan berbagai keunikan dan sejarahnya dapat menjadi potensi geowisata yang termasuk kedalam klasifikasi pariwisata minat khusus. [15]. Menurut Newsome dan Dowling (dalam Andriany et.al [16]), geowisata dapat didefinisikan sebagai pariwisata berkelanjutan yang fokus utama nya adalah tentang evolusi bumi dan fitur geologi yang mendorong pemahaman mengenai lingkungan, budaya, apresiasi dan konservasi dan memberi keuntungan bagi masyarakat lokal. Fitur geologi seperti bentang alam, singkapan batuan, jenis sedimen membentuk 'sense of place' untuk setiap geosite, yang dapat menciptakan ragam kegiatan wisata geologi antara lain: geo-site sightseeing, geo-sport, geo-study, geo-konservasi, geo-pendidikan, geo-festival [16].

Geowisata Karangsambung dapat dijadikan contoh yang menawarkan kegiatan wisata dengan tawaran atraksi yang terbatas. Namun yang terpenting, karena Geopark Ciletuh ini merupakan kawasan yang harus dilindungi maka prinsip pencagaran atau konservasi dan konsep eco-tourism harus menjadi pilihan [17][18]. Menurut Darsoprajitno [17], kegiatan pencagaran memerlukan kemampuan untuk mengelola berbagai unsur tata lingkungan, karena tidak hanya ilmu pengetahuan alam saja yang dibutuhkan namun juga ilmu pengetahuan sosial. Menurut Weaver [18], tantangan utama dalam pengelolaan eco-tourism adalah tidak kompromi dengan keutuhan aspek ekologi atau sosial-budaya dari kawasan yang harus dilindungi. Dengan kata lain, eco-tourism tidak dimaksud untuk mempunyai konsekuensi sosial-budaya yang negatif namun sebaliknya harus mendapatkan dukungan masyarakat setempat. Sebagai contoh, dalam pelaksanaan eco-tourism, menurut Diarta dalam [3], di Bali telah terbukti adanya peran adat sebagai salah satu faktor yang menyebabkan keberhasilan program konservasi dan pelestarian khususnya ekosistem perairan laut. Lembaga adat adalah institusi sosial-budaya masyarakat yang mempunyai kekuatan dalam melaksanakan aturan dan menegakkan sanksi adat untuk berbagai kegiatan dan program masyarakat adatnya.

Menurut Kusumahbrata dan Suwardi [19], geopark merupakan konsep pengembangan kawasan yang dapat disinergikan dengan prinsip-prinsip konservasi, edukasi, penumbuhan ekonomi lokal melalui geowisata. Hal ini berkesesuaian dengan pendekatan pembangunan yang inklusif. Oleh karena itu, kegiatan geo-konservasi dan geo-pendidikan sebaiknya diutamakan menjadi pilihan dalam pengembangan kegiatan wisata di Ciletuh ini. Geopark dapat menjadi tempat uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi dan juga sebagai tempat percobaan dan peningkatan metoda perlindungan dari kerusakan atau penurunan mutu lingkungan [19].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Pembangunan area ini juga harus memperhatikan prinsip keseimbangan, yang merupakan nilai dasar pembangunan berkelanjutan [20]. Nilai keseimbangan merupakan nilai yang universal yang dapat muncul sebagai produk budaya, sebagaimana Falsafah Tri Hita Karana yang telah diusung dalam pembangunan kepariwisataan di Bali [21]. Demikian pula, menurut Steinfield dan Maisel [22], prinsip rancangan pembangunan kawasan geowisata harus universal, sebagai upaya membangun lingkungan alam dan sekaligus sosial-budaya yang bernuansa inklusif.

Dalam pembangunan pariwisata, aspek budaya dapat menjadi daya tarik wisata yang kuat. Pariwisata Bali berkembang pesat karena di dukung oleh budaya Bali yang sekaligus dijadikan sebagai obyek wisatanya. Geopark Ciletuh berada pada kawasan dengan dominasi masyarakat dari Suku Sunda yang masih mengusung budaya seni Sunda dalam hal ini berupa tarian, nyanyian dan seni bela diri. Berdekatan dengan Desa Ciwaru, ada Desa Girimukti yang masih kuat mengusung tradisi Budaya Sunda Buhun. Gambar 7 memperlihatkan atraksi tarian di Desa Girimukti. Masih dalam satu kawasan Sukabumi Selatan, terdapat Kampung-kampung Budaya Kasepuhan Banten Kidul. Keberadaan potensi budaya ini tentunya akan memperkuat upaya menjaga eksistensi Geopark Ciletuh dan lingkungan sekitarnya.

Gambar 7 Atraksi Seni Tari Sunda

Di dalam internal Kecamatan Ciemas, yang mana Desa Ciwaru berada, kegiatan sektor pariwisata (termasuk ke dalam kategori sektor jasa lainnya) terus mengalami peningkatan. Hal ini diperkuat dengan adanya dukungan pemerintah daerah dalam memperkuat infrastruktur jalan yang sudah ada melaui program perbaikan jalan sepanjang 32 Km dari Kecamatan Waluran menuju Kecamatan Ciemas yang dapat mempersingkat waktu perjalanan hingga 70 menit. Kemudian menjamurnya berbagai sarana perekonomian seperti mini market dan warung yang keberadaannya meningkat tiap tahun.

Kemudian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kecamatan Ciemas memiliki nilai pertumbuhan yang signifikan. Lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini. Perkembangan PAD tersebut merupakan pendapatan asli Kecamatan Ciemas dari berbagai sektor unggulannya. Dalam hal ini terlihat bahwa potensi unggulan Kecamatan Ciemas adalah pada sektor pertanian, pariwisata, dan perikanan. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling dominan di Kecamatan Ciemas meskipun sistem pengairan yang digunakan masih menggunakan sistem irigasi tadah hujan. Sektor ini menyerap jumlah tenaga kerja yang cukup besar. Jenis kegiatan pertanian yang berkembang yaitu tanaman pangan, palawija, sayuran, dan buah-buahan. Khusus di Desa Ciwaru terkenal dengan buah mangga nya. Namun demikian dapat diasumsikan bahwa kegiatan pariwisata memberikan kontribusi yang cukup besar pada PAD Kecamatan Ciemas.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 1. Pertumbuhan PAD Kecamatan Ciemas

Tahun	Nilai PDRB	Laju Pertumbuhan(%)
2011	176.000.000	-
2012	1.021.000.000	845
2013	1.021.000.000	0
2014	1.021.000.000	0
2015	1.091.000.000	70

Sumber: Kecamatan Ciemas Dalam Angka 2010-2015

` Berdasarkan fakta di atas menunjukkan adanya sektor unggulan pariwisata yang menjadi sumber pendapatan untuk pembangunan Kabupaten Sukabumi dan khususnya Kecamatan Ciemas. Dengan kondisi masyarakat yang masih mengandalkan kehidupannya dari pertanian dan tingkat pendidikannya rendah, maka adalah sebuah tantangan untuk mengembangkan pariwisata inklusif dalam kawasan Geopark Ciletuh ini. Timbul satu masalah tentang kesiapan masyarakat untuk menerima lingkungan desa tempat tinggal nya menjadi kawasan pariwisata. Pariwisata dengan segala keunggulannya memang dapat meningkatkan pembangunan fisik namun belum tentu mampu turut membangun perekonomian masyarakatnya. Masyarakat Kecamatan Ciemas terlihat belum siap sebagai stakeholder untuk membangun kepariwisataan di Kecamatan Ciemas, dikhawatirkan pada perkembangannya nanti masyarakat di Kecamatan Ciemas hanya menjadi "penonton" kegiatan pariwisata di Kecamatan Ciemas.

Sudah ada tanda-tanda keikutsertaan masyarakat dalam kegiatan wisata di beberapa desa. Ada kelompok dengan nama Paguyuban Pakidulan Sukabumi Selatan (PAPSI) aktif sebagai tour guide untuk pariwisata di Kecamatan Ciemas khususnya di Kawasan Geopark Ciletuh. Beberapa rumah masyarakat di Desa Ciwaru, Taman Jaya telah berubah menjadi homestay untuk wisatawan. Masyarakat juga sudah melakukan bisnis sewa kendaraan bermotor. Namun demikian, prosentase partisipasi ini masih sedikit sekali dibandingkan dengan perkembangan pariwisata yang telah meningkat tajam di Kecamatan Ciemas. Hasil wawancara dengan Kepala Desa Ciwaru mengungkapkan bahwa untuk dapat sepenuhnya terlibat pada kegiatan pariwisata yang masih terasa asing, perlu ada upaya pemberdayaan masyarakat desa. Dalam pembangunan desa memang akan sangat dibutuhkan kader-kader pemberdayaan masyarakat yang mendorong masyarakat ikut serta dalam pembangunan desanya [23].

Tantangan utama adalah bagaimana Geopark Ciletuh ini menjadi potensi geowisata yang dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan masyarakat desa setempat juga desa sekelilingnya. Dengan pendekatan pembangunan inklusif maka tantangan yang harus dihadapi adalah mengupayakan peningkatan kapasitas masyarakat Desa Ciwaru ini sendiri secara menerus. Hal ini tentu menjadi persyaratan agar supaya masyarakat mampu turut serta secara aktif dalam kegiatan geowisata ini bahkan mampu mendaya-gunakan potensi lain seperti budaya Sunda yang sudah melekat ini diolah menjadi atraksi wisata budaya. Dalam kegiatan geowisata, masyarakat Desa Ciwaru dan sekitarnya dapat belajar menjadi pemandu wisatawan, misalnya untuk mengantar ke lokasi-lokasi curug atau turut serta memberi jasa membawakan barang dalam perjalanan menjelajah ke lokasi-lokasi situs geologi yang sulit.

Ini berarti upaya pemberdayaan masyarakat harus menjadi sebuah program yang dilaksanakan dengan terencana. Pemberdayaan masyarakat dalam kegiatan pariwisata dapat berbentuk pengembangan pariwisata berbasis kerakyatan dan dikelola dengan manajemen komunitas oleh masyarakat setempat [24]. Dengan membangun kapasitas masyarakat, sebagaimana konsep CBT, kemampuan masyarakat Desa Ciwaru untuk memiliki, mengelola obyek wisata di area Geopark Ciletuh dapat meningkat dan akhir nya secara substansial mampu mengendalikan kegiatan pariwisata dan masyarakat desa mendapatkan proporsi keuntungan yang besar. Dengan demikian, pembangunan pariwisata yang inklusif akan terwujud dengan bertahap. Kegiatan ekonomi wisata yang inklusif ini akan mampu meningkatkan pendapatan masyarakat yang secara tidak langsung akan mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat desa.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa Kawasan Geopark Ciletuh mempunyai potensi wisata alam yang luar biasa dan potensi budaya yang masih terpendam. Namun masyarakat Desa Ciwaru dan sekitarnya dapat dikatakan belum sepenuhnya siap untuk dapat berperan serta dalam kegiatan pariwisata. Konsep eco-tourism yang mengusung keutuhan ekologi dan sosial-budaya dapat menjadi alternatif konsep pengembangan geopark Ciletuh ini. Pendekatan perencanaan wisata Geopark Ciletuh yang sepenuhnya melibatkan masyarakat lokal diharapkan dapat mewujudkan pembangunan inklusif yang dapat menciptakan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa Ciwaru dan sekelilingnya. Dalam peningkatan dan perkembangan pariwisata harus sejalan dengan peningkatan dan perkembangan kapasitas masyarakatnya.

Beberapa saran dapat diajukan sebagai berikut: (1) Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, rencana pembangunan pariwisata secara terpadu harus segera disusun dengan pendekatan partisipasi masyarakat. Dalam skala kabupaten, pembangunan infrastruktur dari beberapa obyek wisata harus benar-benar terintegrasi; (2) Untuk Pemerintah Desa Ciwaru, penyusunan rencana dan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dapat dibantu oleh instansi pemerintah maupun perguruan tinggi; (3) Untuk kelompok masyarakat yang sudah terbentuk dapat memperkuat diri dengan menambah pengetahuan khusus nya tentang pengelolaan wisata alam atau geowisata melalui studi banding ke obyek wisata yang serupa atau melalui kursus-kursus singkat tentang pengelolaan kegiatan wisata dan obyek-obyek wisata alam maupun budaya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] E. Inskeep, *Tourism Planning: An Integrated and Sustainable Development Approach.* New York, US: Van Nostrand Reinhold. 1991.

[2] E. Shragge, Ed., *Community Economic Development : In Search of Empowerment and Alternatives*, Montreal, Canada, Black Rose Books, 1993.

[3] I Ny. Darma Putra, Ed., *Pariwisata Berbasis Masyarakat Model Bali*, Buku Arti dan Program Studi Magister Kajian Pariwisata Universitas Udayana, 2015.

[4] C.D.S. Guterres, "Pengembangan Daya Tarik Wisata Berbasis Masyarakat di Pantai Vatuvou, Distrik Liquisa, Timor Leste", *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Vol. 1, No.1, Hal. 119 – 138, Juli 2014.

[5] Nurdin, "Strategi Pengembangan Pariwisata Berbasis Masyarakat di Pulau Samalona, Makassar", *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Vol. 3, No.1, Hal. 175 – 189, Juli 2016.

[6] L.J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 2007.

[7] F. Rangkuti. *Analisis SWOT: Teknik Membedah Kasus Bisnis,* PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2000.

[8] Bappeda Kabupaten Sukabumi, *Perda No. 22 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukabumi Tahun 2012-2032*.

[9] Kanom, "Strategi Pengembangan Kuta Lombok sebagai Destinasi Pariwisata Berkelanjutan", *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Vol. 1, No.2, Hal. 25 – 42, Januari 2015.

[10] H. Hindersah, Y. Asyiawati, dan L.S. Akliyah, *Kajian Optimasi Pemanfaatan Lahan Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Secara Berkelanjutan di Kawasan Perdesaan Kecamatan Ciemas Kabupaten Sukabumi*, Laporan Akhir Penelitian, LPPM Unisba, 2016.

[11] Y. Asyiawati, L.S. Akliyah, "Identifikasi Dampak Perubahan Ekosistem Pesisir Terhadap Lingkungan di Wilayah Pesisir Kecamatan Muaragembong", Makalah, disampaikan pada Seminar Nasional Fakultas Teknik, Bandung, Indonesia, 2014.

A. Hardiyono, I. Syafri, M. F. Rosana, E, Y. Yuningsih, Herry, S.S. Andriany, "Potensi Geowisata di Kawasan Teluk Ciletuh, Sukabumi, Jawa Barat", *Bulletin of Scientific Contribution*, Vol. 13, No. 2, Hal. 119 – 127, Agustus 2015.

[12] Pusat Penelitian Geopark dan Kebencanaan Geologi, Universitas Padjadjaran, "Geopark Ciletuh – Palabuhan Ratu menuju Unesco Global Geopark: Bagaimana Unpad Berkontribusi?,2017, http://www.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2017/02/GNCP-toward-UGG_Peran-UNPAD_07022017.pdf

[13] I.G. Gede Saputra, "Respon Wisatawan terhadap Pengembangan Batur Global Geopark Bali", *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Vol. 2, No.2, Hal. 77 – 94, Januari 2016.

[14] S. Nugroho, "Praktik Geowisata Karangsambung Kebumen: Tinjauan Perspektif Dualitas", *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Vol. 3, No.1, Hal. 92 – 114, Juli 2016.

[15] S.S. Andriany, M.R. Fatimah, A. Hardiyono, "Geowisata Geopark Ciletuh: Geotrek Mengelilingi Keindahan Mega Amfiteater Ciletuh", *Bulletin of Scientific Contribution*, Vol. 14, No. 1, Hal. 75 – 88, April 2016.

[16] S. Darsoprajitno, *Ekologi Pariwisata: Tata Laksana Pengelolaan Objek dan Daya Tarik Wisata.* Bandung, Indonesia: Percetakan Angkasa. 2002

[17] D. Weaver, *Ecotourism*. Milton, Australia: John Wiley & Sons Australia, Ltd. 2001.

[18] Y. Kusumahbrata, S. Suwardi, "Indonesia Menuju Jaringan Geopark Dunia", *Geomagz*, Vol.2, No.1, Hal. 18 – 25, Maret 2012.

[19] H. Hindersah, "Islamic Concept of Sustainable Development in The River Estuary". dalam *Proceedings International Conference on Architecture and Built Environment,* IIUM & Putrajaya, Kuala Lumpur, Malaysia. 2013.

[20] I.G. Pitana, "Tri Hita Karana in My Perspective", dalam J. Hensen, B. Ashrama, Berata, *Lethal Discourse : Tri Hita Karana Tourism Awards and Accreditations*. Denpasar, Bali: Green Paradise. 2006.

[21] E. Steinfeld, J.L. Maisel, *Universal Design: Creating Inclusive Environments*. Hoboken, New Jersey: John Wiley & Sons, Inc. 2012.
[22] H. Hindersah, N. Kurniasari, I. Safitri, H. Burhanudin, "Membangun Kader Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cikole, Kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat", dalam Prosiding SNaPP: Sains dan Teknologi 4 (1), Hal. 133-138, 2014.
[23] F. Yulianie. "Partisipasi dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Daya Tarik Wisata *Rice Terrace* Ceking, Gianyar, Bali", *Jurnal Master Pariwisata (JUMPA)*, Vol. 2, No.1, Hal. 165 – 184, Juli 2015.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN AGRO-TECHNOPARK UNTUK MENDUKUNG AGROWISATA SALAK SIBETAN BERKELANJUTAN

I Ketut Sumantra

Fakultas Pertanian Universitas Mahasaraswati Denpasar-Bali

E-mail: ketut.sumantra61@gmail

Naskah diterima :21 Februari 2017 Naskah direvisi : 8 Maret 2017 Disetujui terbit : 15 Maret 2017

ABSTRAK

Desa Sibetan, Kabupaten Karangasem adalah pusat pengembangan tanaman salak di Bali, dan telah dijadikan rintisan objek agrowisata sejak tahun 1999. Namun jumlah kunjungan wisatawan keobyek ini masih rendah sekitar 0,008% dari total kunjungan wisatawan ke obyek wisata di Kabupaten Karangasem. Tujuan penelitian adalah untuk mengidentifikasi aspek biofisik dan menyusun strategi pengembangan agro-technopark pendukung Agrowisata Salak Sibetan. Pengumpulan data dilakukan melalui dua tahap (1) pengumpulan data sekunder dengan metode studi dokumen dan (2) pengumpulan data primer di lapangan dengan metode observasi dan wawancara, dan data dianalisis dengan SWOT. Hasil penelitian menunjukkan desa Sibetan potensial dikembangkan sebagai agrotechnopark dengan potensi hamparan kebun salak dan hasil olahan industry rumahtangga berbasis buah salak.Hasil analisis QSPM, jumlah nilai total attractiveness (TAS) terbesar adalah strategi mengoptimalkan pemanfaatan produk buah salak sebagai produk olahan dan pengembangan keanekaragaman jenis salak dan potensi keindahan alam. Pembentuk organisasi pengelola obyek lebih profesional berbasis desa adat dan perlu dilakukan restrukturisasi aspek biopisik, aspek social, budaya, kelembagaan dan pembiayaan dari pemerintah serta menjalin kemitraan dengan biro perjalanan pariwisata menduduki nilai TAS ke dua dan ketiga.

Kata kunci: *Agrotechnopark, Agrowisata, Salak Sibetan*

PENDAHULUAN

Kepariwisataan telah menjadi salah satu industri yang memberikan dampak besar terhadap pertumbuhan perekonomian Bali. Dari PDRB Bali sebesar 73.478,16 miliar rupiah, kontribusi sektor perdagangan, hotel, dan restoran adalah sebesar 30,62% [1] . Namun manfaat ekonomi yang diperoleh dari sektor pariwisata masih kerap dibarengi oleh kerusakan lingkungan, pengalihan fungsi lahan, eksploitasi sosial budaya dan kriminalitas [2].

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2009 total lahan sawah di Bali tercatat seluas 81.931Ha, sedangkan pada tahun 2012 total lahan sawah tercatat 81.625 Ha . Ini berarti dalam kurun waktu 4 (empat) tahun dari 2009 s/d tahun 2012 tercatat alih fungsi lahan sawah sebesar 306 Ha (0,37%) atau sekitar 76,5 Ha/tahun [3]. Alih fungsi lahan pertanian merupakan ancaman terhadap pencapaian ketahanan pangan menuju kedaulatan pangan. Alih fungsi lahan mempunyai implikasi yang serius terhadap produksi pangan, lingkungan fisik serta kesejahteraan masyarakat pertanian dan perdesaan yang kehidupannya tergantung pada lahannya. Disamping itu kesenjangan antara pertanian dengan industri pariwisata di Bali juga dilatarbelakangi oleh tidak seimbangnya pembagian hasil pemanfaatan pertanian untuk kepentingan pariwisata [4], sehingga masyarakat bali enggan mengembangkan sektor pertanian. Oleh karena itu, Bali pulau kecil yang memiliki keindahan alam dan keunikan adat, budaya dan agama seringkali harus dihadapkan pada pilihan yang sulit antara mengembangkan pariwisata dengan mengorbankan pertanian dan lingkungan atau sebaliknya.

Menyikapi fenomena tersebut, diperlukan pilihan yang bijak yaitu mengembangkan sinergitas pariwisata dengan pertanian dengan pengembangan agroteknopark (ATP) untuk mendukung agrowisata. Agrowisata atau wisata pertanian didefinisikan sebagai rangkaian aktivitas perjalanan wisata yang memanfaatkan lokasi atau sektor pertanian mulai dari awal produksi hingga diperoleh produk pertanian dalam berbagai sistem dan skala dengan tujuan memperluas pengetahuan, pemahaman, pengalaman, dan rekreasi di bidang pertanian [5].

Adanya pengembangan agrowisata di perdesaan yang berbasis masyarakat setempat diharapkan dapat memberi manfaat yang banyak, tidak saja bagi masyarakat perdesaan tetapi juga masyarakat perkotaan untuk lebih memahami dan memberikan apresiasi pada bidang pertanian serta menjadi sarana edukasi. Agrowisata salak Sibetan memiliki potensi yang kuat berupa hamparan kebun salak yang sangat luas yaitu 81,12%, dan keragaman jenis salak Bali mencapai 13 jenis dan tidak dimiliki oleh daerah lain [6]. Program agrowisata salak ini merupakan salahsatu implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang perlindungan buah lokal khususnya pasal 27 sampai dengan pasal 35 memberikan peluang dan iklim kondusif dalam pengembangan agrowisata salak [7].

Permasalahan utama dalam pengembangan ATP salak sebagai obyek agrowisata adalah jumlah kunjungan wisata ke obyek agrowisata ini sangat rendah yaitu 0.008 % dari total 462233 kunjungan wisatawan ke 12 obyek wisata yang tersebar di Kabupaten Karangasem [8]. Penyebabnya antara lain wisatawan sulit mendapatkan buah untuk dipetik langsung terutama di luar panen raya Desember – Maret [9]. Belum ada kebun koleksi dan objek agrowisata ini belum dikelola dengan baik mulai dari penataan areal yang dijadikan objek, operasional kegiatan tour, dan sumber daya manusia dan pemasaran [10]. Penelitian ini bertujuan 1) mengidentifikasi aspek biofisik, (2) merumuskan strategi pengembangan ATP untuk mendukung agrowisata berbasis masyarakat di desa Sibetan.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan dengan metode survei dengan observasi lapangan wawancara, dan studi pustaka. Analisis data dengan deskriptif kualitatif melalui pemahaman perdesaan dalam waktu cepat atau RRA (*rapid rural appraisal*) dan pemahaman perdesaan secara partisipatif atau PRA (*partisipatory rural appraisal*), dan analisis SWOT. Rekomendasi model pengembangan ATP sebagai pendukung agrowisata disusun berdasarkan hasil identifikasi dan analisis potensi sumber daya alam dan lingkungan, potensi pertanian yang diintegrasikan dengan analisis segi sosial ekonomi, kelembagaan, serta kemitraan dalam pengembangannya. Fokus penelitian ini adalah pengembangan model ATP sebagai pendukung agrowisata dengan pendekatan community based tourism, yang meliputi: (a) program-program pemberdayaan masyarakat dalam mengembangkan agroteknopark, (b) keterlibatan masyarakat di dalam proses perencanaan pengembangan ATP , (c) sarana dan prasarana pendukung pengembangan ATP, (d) promosi agrowisata berbasis potensi agroteknopark, dan (e) mendorong tumbuhnya kemitraan (*partnership*).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Sibetan merupakan sebuah desa dengan pola kehidupan masyarakat yang sebagian besar bergerak dalam bidang pertanian, khususnya petani salak. Luas pertanian salak di desa ini sekitar 1.125.000 hektar, lokasinya terletak pada ketinggian 400-600 meter di atas permukaan laut, dengan temperatur 20-30 derajat celcius, serta curah hujan 1.567 mm – 2000 mm per tahun. Tekstur tanah lempung, kandungan C-organik sedang, N sedang, P sangat tinggi dan K tanah sangat rendah, pH agak masam [11].

Terdapat 13 jenis kultivar salak diantaranya Salak Injin, Salak Nangka, Salak Putih, Salak Boni, Salak Penyalin, Salak Cengkeh, Salak Gondok, Salak Nenas, Salak Bingin, Salak Cemara, Salak Kelapa, Salak Gula Pasir, Salak Muani, dan Salak Embadan, disertai dengan beberapa jenis produk olahan berbahan dasar salak, diantaranya : Wine, Dodol, Keripik, Sirup dan Manisan, yang membuat desa ini berbeda dari desa wisata lainnya yang ada di Kabupaten Karangasem [10].

Petani di desa Sibetan menanam salak di bawah tanaman pelindung.Tanaman pelindung pada tanaman salak sangat penting karena tanaman ini tidak tahan terhadap sinar matahari penuh disamping dapat memodifikasi iklim mikro seperti temperatur udara dan tanah [11]. Hasil inventarisasi jenis tanaman pelindung pada sistem budidaya salak yang ditanam di Sibetan berjumlah 13 jenis. Tanaman Dadap merupakan pelindung yang paling dominan yaitu 66.52%, kemudian diikuti jenis pelindung Pisang, dengan INP 58.36%, Durian (*Durio zibethinus* Murr) , Sengong (*Albisia falcate*), Kelapa (*Cocos nucifera*), Manggis (*Garcinia mangostana* L) dan Gamal (*Glyricidia sepium*) dengan INP masing-masing 25.44%, 24.93%, 24.55%, 22.75% dan 20.74%.

Jumlah kepala keluarga dari sepuluh banjar berjumlah 2186 KK dengan jumlah penduduk 8.618 jiwa yang terdiri dari laki-laki 4305 jiwa dan perempuan 4313 jiwa. Tingkat pendidikan penduduk Desa Sibetan masih tergolong rendah, terlihat dari jumlah penduduk yang sebagian besar berada pada tingkat tamat SD /sederajat yaitu sebanyak 811 orang (37,95%), tamat SLTP sebanyak 545 orang (25,50%), dan tingkat pendidikan tertinggi sampai Sarjana (S1) yaitu sebanyak 305 orang (14,27%).

Pengembangan ATP sebagai pendukung agrowista desa sibetan di kelompokan menjadi 3 kluster

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

yaitu: Kelompok Dukuh lestari mengembangkan pengolahan salak menjadi wine salak. Pusat konsevasi tanaman salak dengan membangun kebun koleksi beberapa kultivar salak. Disamping itu di tempat ini akan dibangun homestay yang terletak di bukit pemukuran dan jalur tracking bagi wisatawan.

Kelompok Mekarsari di banjar Telaga dengan beberapa produk Kelompok Wanita Tani (KWT) Sradha yang beranggotakan 16 orang yang telah mampu menhasilkan beberpa produk: pia salak, pai salak, dodol, kripik salak dan aneka jajanan rumah tanga

Kelompok Karanganyar dengan aktivitas seperti tempat kuliner berbahan dari tanaman salak sebagai menu utama. Juga ditempat ini para tamu dapat menikmati panorama dan keindahan alam dan juga bisa melakukan petik buah langsung di kebun. Pembinaan masyarakat tentang mengolola aset SDA dan manajemen agrowisata salak belum maksimal demikian pula dengan kelembagaan ekonomi belum berjalan optimal.

Analisis SWOT Pengembangan ATP sebagai pendukung Agrowisata

a. Kekuatan (Strength)

- Potensi yang kuat dan unik dari agrowisata salak di desa ini adalah hamparan kebun salak yang sangat luas yaitu 81,12%. Keragaman genetik salak Bali mencapai 14 jenis dan tidak dimiliki oleh daerah lain yang dapat dijadikan sebagai obyek wisata terutama bagi para pelajar, mahasiswa dan peneliti.
- Di sela-sela tanaman salak terdapat berbagai jenis tanaman pelindung dengan ragam mencapai 13 jenis. Habitat ini merupakan kondisi ideal bagi kehidupan burung punglor yang saat ini sudah mulai langka akibat perburuan liar.
- Pengembangan ATP salak merupakan salah satu implementasi dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal memberikan peluang dan iklim kondusif dalam pengembangan ATP (Pemerintah Prop.Bali, 2013).
- Petani sudah mampu menghasilakn produk industry rumah tangga berbasis buah salak seperti berem, kripik, dodol, kurma salak, manisan salak, pia salak dan produk kuliner berbahan embung (anakan salak) sebagai sayur bernuasa khas daerah Sibetan.
- Kawasan ini juga merupakan kawasan perkebunan ramah lingkungan, karena petani tak pernah menggunakan bahan kimia.
- Panorama yang indah di kawasan Pemukuran di ujung selatan kawasan desa Sibetan memberikan keindah berupa lembah dengan persawahan serta panorama pantai di kecamatan Manggis. Daerah ini juga dekat dengan objek wisata Bukit Putung, obyek wisata Candi dasa, Tirta Gangga dan Pura Agung Besakih.

b. Kelemahan (*Weakness*)

- Implementasi perda Propinsi Bali No 3 tahun 2013 belum dilaksanakan secar optimal.
- Jenis-jenis salak yang ada belum dikelola dengan baik dan belum ada kebun koleksi dan dikawatirkan beberapa jenis akan mengalami kepunahan.
- Wisatawan sulit mendapatkan buah untuk dipetik langsung terutama di luar panen raya (Desember – Maret), disamping itu mutu buah belum memenuhi standar.
- Objek ATP belum dikelola dengan baik mulai dari penataan areal yang dijadikan objek, operasional kegiatan tour, dan sumber daya manusia
- Belum tersedia fasilitas penginapan yang memadai dan jalur perjalanan wisata yang jelas.
- Produk ATP desa Sibeten belum dipasarkan secara maksimal, disamping itu kerjasama antar stakeholder pariwisata (pemerintah, masyarakat lokal, industri pariwisata, dan akademisi) belum berjalan dengan baik.
- Masyarakat belum berpengalaman dalam mengelola ATP sebagai objek wisata.
- Dana untuk penataan kawasan belum tersedia.

c. Peluang(*Opportunity*)

- Kunjungan wisata ke Bali dari tahun ketahun menunjukkan trend peningkatan.
- Pengembangan ATP sebagai objek wisata akan dapat melestarikan dan sekaligus menciptakan peluang terbentuknya produk baru.
- Ekonomi masyarakat akan meningkat akibat hasil industry rumah tangga yang dihasilkan seperti kripik, dodol, wine, pia dan kurma salak dapat dipasarkan sebagai oleh-oleh khas dari kebun salak.

ISBN : 978-602-73463-1-4

d. Ancaman (*Treath*)

- Pembentukan agrowisata baru di daerah yang berdekatan dengan obyek agrowisata salak.
- Efek pengembangan agrowisata terhadap budaya masyarakat sering bergesekan apabila tidak dipersiapkan sematang mungkin, terutama budaya yang dibawa wisatawan asing.

Strategi Pengembangan ATP sebagai Obyek Wisata berbasis Masyarakat

Strategi S-O

1. Menggali dan menata potensi alam di bukit pemukuran, penataan obyek-obyek wisata yang meliputi penataan kebun salak, kebun percontohan, kebun koleksi, penataan taman di view puncak Pemukuran banjar Dukuh, pembuatan produk olahan berbasis buah salak banjar Telaga. Pemberdayaan kelembagaan pendukung agrowisata perlu digalakkan. Unit-unit organisasi ini akan berperan dan melakukan tugas sesuai fungsinya. Kelompok Wanita Tani akan menyediakan produk-produk industry rumah tangga yang telah dihasilkan [12]. Kelompok yang bertugas langsung sebagai Tim agrowisata melakukan tugasnya mulai dari menerima tamu, mendampingi dan member pelayanan kepada wisatawandan.pengembangan kebun koleksi salak bali dan pengolahan produk pasca panen berbasis buah salak untuk mengoptimalkan pengembangan ATP..
2. Dukungan Masyarakat
   Masyarakat Desa Sibetan belum memahami konsep ATP sebagai objek wisata berbasis masyarakat. Pengenalan model ATP menyebabkan mereka tahu dan setuju mengembangkan usaha tersebut karena akan memberikan dampak yang lebih luas bagi perkonomian desa dan peluang kerja bagi masyarakat setempat. Hal ini diwujudkan dengan memberikan informasi dan masukan yang lebih mendalam tentang rencana dan harapan untuk mengembangkan agrowisata salak. Rencana pengembangan tersebut dituangkan dalam bentuk bagan dan peta tentang hal-hal yang perlu digarap dalam recana tersebut.Disamping itu masyarakat memerlukan dukungan dalam peningkatan kapasitas SDM yang selama ini masih dianggap kurang terutama dalam etika menerima tamu, penguasaan bahasa dan pengelolaan manajemen.Pelatihan-pelatihan yang terkait dengan pariwisata dan agrowisata perlu diberikan kepada masyarakat, dan masyarakat perlu dilibatkan dalam perencanaan pengembangan agrowisata di wilayahnya [13].Masyarakat desa Sibetan juga memerlukan sumber pendanaan untuk menunjang agrowisata, apakah sumber pendanaan nantinya melalui BUMDes atau bentuk Koperasi atau sumber lain yang menguntungkan dan kemudahan dalam memperoleh pendanaan dalam mengembangkan industry rumah tangga yang sudah berkembang saat ini. Disamping itu, masyarakat sangat memerlukan regulasi yang dapat mengatur dan juga dijadikan acuan dalam pengelolaan agrowisata sehingga semua kompenen yang terlibat di dalamnya dapat memperoleh keuntungan dan berkeadilan.

Strategi W-O

1. Meningkatkan promosi. Promosi adalah sarana yang digunakan perusahaan dalam upaya untuk menginformasikan, membujuk, dan mengingatkan konsumen langsung atau tidak langsung tentang produk dan merek yang mereka jual. Berbagai macam bentuk promosi yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata banyak dipengaruhi oleh kebutuhan dinas serta berdasarkan target peningkatan komoditas pariwisata untuk menambah devisa Negara.
2. Pengembangan sarana dan prasarana sangat dibutuhkan untuk dapat memberikan pelayanan kepada wisatawan untuk memenuhi kebutuhan mereka yang beranekaragam. Penataan dan pembuatan sarana tempat parkir kendaraan tamu, tempat penginapan, kantor, showroom jalan setapak, WC umum dan fasilitas lainya menjadi penting dalam strategi pengembangan ATP.

Strategi S-T

Mejalin Kemitraan dengan *stake holder*. Terciptanya otonomi daerah, sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Undang-undang No.32 Tahun 2004, maka Pemerintah Kabupaten berhak melakukan kebijakan sendiri dengan melakukan program-program yang sesuai dengan kondisi dan potensi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

unggulan daerah, yaitu melalui sektor pariwisata yang berbasis pertanian. Program-program tersebut antara lain adalah dengan melakukan kerjasama/kemitraan dengan institusi swasta yang berkomitmen penuh terhadap kemajuan sektor pariwisata berbasis pertanian, yaitu melakukan partnership dengan pengelola agrowisata salak Sibetan.

Strategi W-T

Meningkatkan mutu sumber daya manusia dengan mengadakan pelatihan untuk meningkatkanketerampilan, pengetahuan dan peran aktif pengelola dalam peningkatan mutu pelayanan.Pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya dengan menggunakan sumber daya setempat sebaik mungkin. Proses tersebut menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan. Program-program pelatihan yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem adalah berupa pelatihan dan pembinaan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam rangka pemanfaatan sumber daya yang ada. Dalam perencanaan ATP sebagai obyek wisata, masyarakat diikutsertakan dalam praktek lapangan dengan memberikan pembelajaran terhadap fakta yang terjadi di suatu daerah seperti survai atau studi banding. Melalui kegiatan ini masyarakat akan secara langsung mengetahui problem yang ada, sehingga masyarakat memiliki gambaran dalam membuat suatu perencanaan yang sesuai dengan kondisi daerah

Indikator ketercapaian pemberdayaan masyarakat desa Sibetan dilihat dari kemampuan : (1) Masyarakat mampu mengakses sarana produksi maupun pemasaran; (2) Masyarakat mampu menghasilkan produk unggulan yang bernilai tukar tinggi sehingga program ATP menjadi pola kemitraan edukasi pariwisata pendidikan dari berbagai daerah; (3) Meningkatkan status dan citra diri dalam identitas budayanya

Evaluasi Keberlanjutan Agrowisata Berbasis Masyarakat

Evaluasi keberlanjutan agrowista salak berbasisis masyarakat di Desa Sibetan dari aspek fisik, social ekonomi, dan aspek budaya menunjukkan bahwa segi fisik memerlukan tindakan perbaikan dan penataan lebih lanjut.Sedangkan dari aspek social ekonomi dan aspek budaya menunjukkan arah yang baik menuju keberlanjutan. Beberapa fakta di daerah Bali menunjukkan, pengembangan fasilitas pariwisata akan diikuti oleh alih fungsi lahan. Peristiwa ini perlu diantisipasi melalui peraturan-peraturan khusus yang dapat dituwangkan dalam awig-awig desa adat, sehingga peningkatan nilai fungsi lahan akan mampu meningkat pendapatan dan taraf hidup masyarakat. Sejalan dengan hasil-hasil penelitian negara lain seperti Malaysia bahwa pengembangan agrowisata mampu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pembangunan berkelanjutan, meningkatkan system pemberdayaan sosial, memperkuat ikatan social mereka dan mengembangkan keterampilan sosial dalam hungannya dengan peningkatan pendapatan masyarakat, diversifikasi dan intensifikasi kegiatan ekonomi, menyediakan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan [14]. Pengembangan model ATP sebagai ojek wisata perlu memperhatikan berbagai faktor-faktor yang berperan, diantaranya faktor fisik, masyarakat dan sosial budaya, ekonomi, teknologi, aspek legal dan kebijakan, tingkat supply dan demand wisata pertanian, pengalaman yang diperoleh wisatawan ketika berkunjung ke area wisata pertanian [15]

KESIMPULAN

1. Desa Sibetan mempunyai potensi pengembangan ATP sebagai objek wisata dengan unggulan hamparan kebun salak, produk olahan berbahan tanaman dan buah salak, keunikan budaya serta panorama yang indah di bukit Pemukuran, Banjar Dukuh.
2. Masyarakat sangat membutuhkan pendampingan baik di bidang perencanaan, pengembangan dan pengelolaan agrowisata maupun pendapingan dalam pengolahan produk pasca panen buah salak.
3. Perlu dilakukan penataan biofisik, aspek social, budaya, kelembagaan, pendanaan dari pemerintah dan dari sumber lain, pemasaran dan peningkatan jejaring kerjasama.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih disampaikan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, KEMENRISTEKDIKTI yang telah membiayai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistika Provinsi Bali, 2011.Bali Dalam Angka 2011. Arysta Jaya Denpasar

[2] Dinas Pariwisata Propinsi Bali 2012.Jumlah kunjungan wisatawan pada obyek-obyek wisatawan di Bali tahun 2012

[3] Dharma Putra, 2010. Pencemaran Lingkungan Ancam Pariwisata Bali,: Manikgeni.

[4] Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029

[5] Astiti, 2011.Sinergi Pertanian dengan Pariwisata.http://asti astiti.blogspot.com /2011 /08/ sinergikan-pertanian-dengan-pariwisata.html (down load 28 Nopember 2013).

[6] Monograpi desa Sibetan 2010. Desa Sibetan.

[7] Darmadi, AAK., A. Hartana, J. P.Mogea. 2002. Perbungaan salak Bali. Hayati 9 (2) :59 – 61.

[8] Disparda Provinsi Bali, 2010.International Seminar on Tourism Harmonization Development, Faculty of Tourism, Udayana, Denpasar, 27 April 2010.

[9] Pemerintah Prop.Bali, 2013.Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Buah Lokal.

[10] Sumantra, K. Sumeru Ashari, T. Wardiyati, Agus Suryanto, 2012. Diversity of shade trees and their influence on the microclimate of agro-ecosystem and fruit production of gulapasir salak (Salacca Zalacca var. Amboinensis). InternaBtional Journal of Basic& Applied Sciences IJBAS-IJENS :12 (06) : 214-221.

[11] Sumantra dan Labek Suyasdi Pura, 2012.Analisis neraca air lahan pada pertanaman salak gulapasir sebagai dasar unutk pembuahan di luar musim. Jurnal Agrimeta 02 (03): 1-12.

[12] Priyadharsini, R. K. Hairiah, D. Suprayoga, J.B. Baon. 2011. Keragaman pohon penaung pada kopi berbasis agroforestry dan pengaruhnya terhadap layanan ekosistem. Berk.Penel.Hayati edisi Khusus 7 F. p. 81-85.

[13] Budiarti, T, Suwarto, I. Muflikhati. 2013. Pengembangan Agrowisata Berbasis Masyarakat pada Usahatani Terpadu guna Meningkatkan Kesejahteraan Petani dan Keberlanjutan Sistem Pertanian.Jurnal Ilmu Pertanian Indonesia (JIPI). 18 (3): 200-207.

[14] Sumantra, K. Anik Yuesti dan Sudiana. 2015. Pengembangan model agrowisata salak berbasis masyarakat di desa Sibetan. Jurnal Bakti Saraswati: 04 (02): 157 -169.

[15] Sumantra, K.. Sumeru Ashari, N.Labek Suyasdi Pura, 2014. Heat unit, phenology and fruit quality of salak (Salacca Zalacca var. Amboinensis) on different elevation in Tabanan regency Bali.J.Agriculture, Forestry and Fisheries. 3 (02): 102-107 (http://www.sciencepublis hinggroup.com/j/aff).

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN KLASTER INDUSTRI KERAJINAN MUTIARA, EMAS, PERAK (MEP) SEBAGAI KAWASAN PARIWISATA BELANJA DI KELURAHAN KARANG PULE, KECAMATAN SEKARBELA KOTA MATARAM

Ima Rahmawati Sushanti[1], Baiq Harly Widayanti[1], Sucia Wulandari Irawan[1]

[1)] Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Universitas Muhammadiyah Mataram

Email : imarahmawati77@gmail.com

Naskah diterima :20 Maret 2017 Naskah direvisi : 24 Maret 2017 Disetujui terbit : 27 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menentukan upaya pengembangan yang tepat bagi klaster industri Mutiara, Emas, Perak (MEP) yang merupakan produk unggulan Kota Mataram. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram tahun 2011 – 2031, klaster industri MEP di kelurahan Karang Pule, kecamatan Sekarbela ditetapkan sebagai kawasan pariwisata belanja. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis Strength, Weakness, Opportunity and Treat (SWOT). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengerajin di klaster industri MEP yang sebagian besar merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman sekitar klaster industri tersebut memiliki potensi untuk dikembangkan karena adanya keterkaitan antara klaster industri dan permukiman. Dan berdasarkan komponen-komponen pendukung kawasan wisata belanja, yaitu : 1) ketersediaan produk, 2) kelengkapan fasilitas pendukung dan 3) aksesibilitas, klaster industri MEP di kelurahan Karang Pule masih belum layak sebagai kawasan wisata belanja, khususnya pada aspek kelengkapan fasilitas pendukung dan aksesibilitas. Dan berdasarkan analisis SWOT maka dilakukan pengembangan secara terpadu sesuai komponen-komponen pendukung kawasan wisata dengan melibatkan segenap stakeholders. Upaya pengembangan yang dilakukan, antara lain adalah : 1) ketersediaan produk lebih ditekankan pada peningkatan hasil produksi dan inovasi, 2) kelengkapan fasilitas dengan peningkatan fasilitas pendukung wisata belanja, pelibatan masyarakat dalam mendukung dan memelihara fasilitas yang ada serta merencanakan pembagian blok pengembangan berdasarkan fungsi kawasan dan 3) aksesibilitas lebih ditekankan pada peningkatan kualitas jalan, pengadaan pedestrian dan parkir yang memadai.

Kata Kunci : *Pengembangan, Klaster Industri, dan Wisata Belanja*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Kelurahan Karang Pule merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram yang ditetapkan sebagai klaster industri kecil unggulan untuk kerajinan Mutiara, Emas dan Perak (MEP) di Kota Mataram sesuai Keputusan Walikota Mataram Nomor 526/X/2009 tentang Penetapan Klaster Industri Kecil Unggulan Kota Mataram [1]. Berdasarkan Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram tahun 2011 – 2031 [2], kecamatan Sekarbela termasuk dalam pengembangan kawasan perumahan sedangkan kelurahan Karang Pule ditetapkan sebagai kawasan pariwisata belanja dan pengembangan industri kecil [2].

Dampak sosial dengan keberadaan klaster MEP menimbulkan pertambahan jumlah penduduk yang berpengaruh pada kepadatan bangunan dan peningkatan aktivitas perekonomian. Selain itu menimbulkan pengaruh terhadap lingkungan, seperti pencemaran, dan terbentuknya permukiman kumuh di sekitar kawasan industri dikarenakan kondisi industri yang berada di dalam permukiman warga sekitar [3].

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 [4] tentang Perindustrian, industri adalah kegiatan ekonomi yang mengelola bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaanya termasuk kegiatan rancangan bangun dan perekayasaan industri.

Menurut Undang - Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 [5] tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan Pemerintah Daerah. Jadi Pariwisata Belanja merupakan suatu kegiatan wisata menikmati daya tarik dari kawasan dan membeli keperluan yang khas dan menarik di lokasi tersebut. Adapun komponen pendukung wisata belanja guna menarik minat wisatawan berkunjung, antara lain : 1) Ketersediaan produk, 2) Fasilitas dan 3) Aksesibilitas [6].

Maka dari itu penelitian ini dilakukan dalam rangka pengembangan terhadap klaster industri MEP sebagai kawasan pariwisata belanja dengan produk unggulan mutiara, emas dan perak.

METODE PENELITIAN

Lokasi dari penelitian ini berada di kelurahan Karang Pule, kecamatan Sekarbela kota Mataram. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan rasionalistik yang bersumber dari teori dan kebenaran empirik. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan menggambarkan sistematis mengenai suatu keadaan, situasi, program tertentu [7]. Analisis yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan memberikan gambaran secara jelas kondisi yang ada sesuai fakta hasil observasi. Gambaran kawasan dengan peta menggunakan teknik overlay. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan. Menurut Porter [8], strategi adalah suatu alat yang penting untuk mencapai keunggulan bersaing Alat analisis yang cocok untuk merumuskan strategi tersebut adalah analisis SWOT [9].

Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk merumuskan strategi pengembangan. Analisis ini didasarkan pada logika yang memaksimalkan kekuatan (Strength) dan peluang (Opportunities), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats). Proses pengambilan keputusan strategis selalu berkaitan dengan pengembangan misi, tujuan, strategi dan kebijakan perusahaan. Dengan demikian perencana strategis (Strategic Planner) harus menganalisis factor-faktor internal dan eksternal dalam kondisi yang ada saat iniAnalisis SWOT dilakukan untuk menentukan upaya pengembangan yang sesuai bagi klaster industri MEP dengan berdasarkan komponen wisata belanja., yaitu 1) ketersediaan produk, 2) kelengkapan fasilitas dan 3) aksesibilitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Kawasan

Kelurahan Karang Pule memiliki luas 106,7 Km^2. Kelurahan Karang Pule memilliki 544 KK dengan jumlah penduduk 10.423 jiwa yang terbagi menjadi 7 (tujuh) lingkungan. Kelurahan Karang Pule yang terbagi menjadi 7 (tujuh) lingkungan yaitu : 1) Lingkungan Karang Pule, 2) Lingkungan Pande Besi, 3) Lingkungan Pande Mas Barat, 4) Lingkungan Pande Mas Timur, 5) Lingkungan Karang Seme, 6) Lingkungan Mas Mutiara, dan 7) Lingkungan BTN Kekalik.

Persebaran dan Pola Pemanfaatan Ruang Kawasan Permukiman

Pemanfaatan ruang di kelurahan Karang Pule didominasi perumahan dan kawasan permukiman dengan luasan hampir mencapai 50% dari keseluruhan luasan kelurahan Karang Pule. Untuk perumahan sebagian besar terletak di lingkungan Karang Pule dan BTN Kekalik, sedangkan lingkungan Karang Seme, Pande Mas Timur, Pande Mas Barat, Pande Besi, dan lingkungan Mas Mutiara merupakan kawasan permukiman, yang ditunjukkan pada gambar 1.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

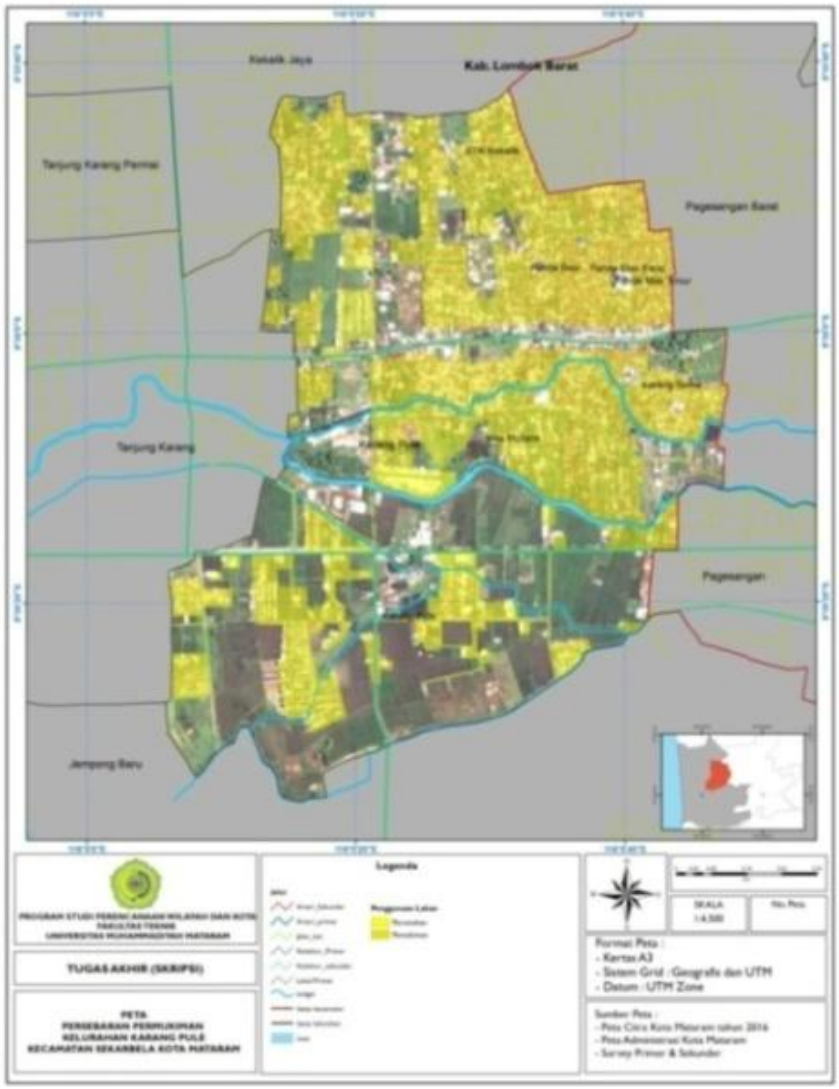

Gambar 1. Peta persebaran permukiman kelurahan Karang Pule

Persebaran

Untuk persebaran industri MEP kelurahan Karang Pule terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok yaitu pengerajin, pengerajin yang juga merupakan penjual, dan penjual (pedagang). Terdapat 4 (empat) lingkungan yang merupakan kawasan inti dari industri MEP kelurahan Karang Pule yaitu di lingkungan Pande Besi, Pande Mas Barat, Pande Mas Timur, dan Lingkungan Mas Mutiara.
Secara keseluruhan jumlah lokasi dan kelompok industri dapat dilihat pada tabel 1 berikut :

Tabel 1. Jumlah Lokasi Industri Kerajinan MEP dibagi Per Jenis dan Per Lingkungan

No	Lingkungan	Pengerajin	Pengerajin & Penjual	Penjual
1	Pande Besi	1	3	4
2	Pande Mas Barat	13	0	9
3	Pande Mas Timur	62	1	14
4	Mas Mutiara	0	4	7

Sumber : Hasil Observasi dan Interpretasi Peta 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4

Untuk persebaran pengerajin tersebar di empat lingkungan tersebut dan didominasi lingkungan Pande Mas Timur. Lokasi para pengerajin ini kebanyakan merupakan rumah tinggal yang juga dijadikan *workshop*. Sedangkan untuk persebaran pengerajin yang juga merupakan pengusaha terdapat di lingkungan Mas Mutiara, Pande Mas Barat. Sedangkan di lingkungan Karang Pule jumlahnya masih sedikit. Persebaran pengusaha (pedagang) berada di empat lingkungan tersebut, yaitu tersebar di sepanjang koridor Jalan Sultan Kaharudin yang memang merupakan lokasi yang paling strategis untuk menjualkan produk. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 2 berikut.

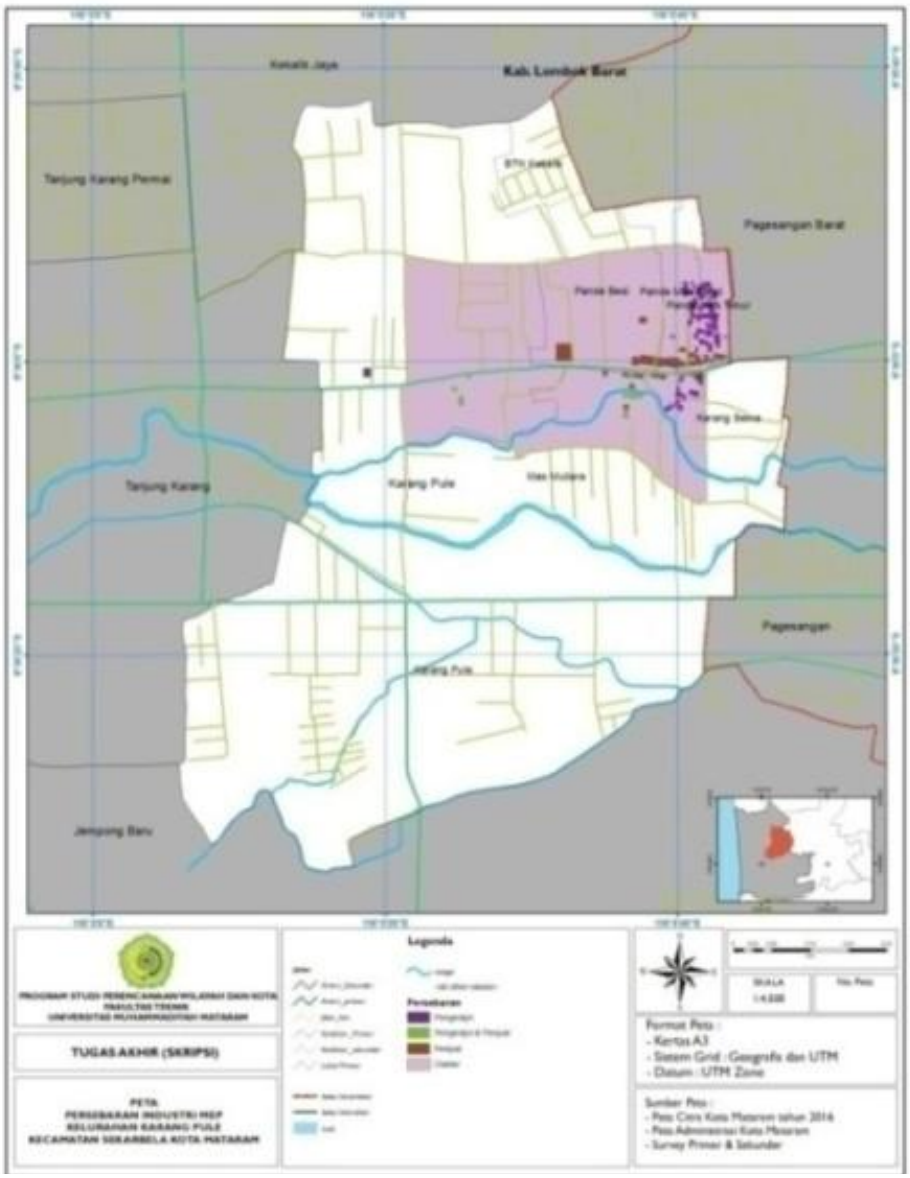

Gambar 2. Peta Persebaran Industri

Jadi dapat diketahui bahwa pengerajin di klaster industri MEP sebagian besar merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman sekitar klaster industri tersebut.

Kepadatan Bangunan

Lingkungan Karang Pule, BTN Kekalik, dan Mas Mutira termasuk dalam lingkungan dengan kepadatan bangunan yang cukup padat dengan kondisi cukup tertata karena sebagian besar merupakan kawasan perumahan. Jarak kepadatan bangunan di daerah ini mencapai 60 - 70 rumah/Ha dan termasuk dalam kepadatan sedang. Sedangkan untuk lingkungan Pande Besi, Pande Mas Barat, Pande mas Timur dan Karang Seme merupakan kawasan yang sangat padat. Peta kepadatan bangunan dapat dilihat pada gambar 4 berikut :

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

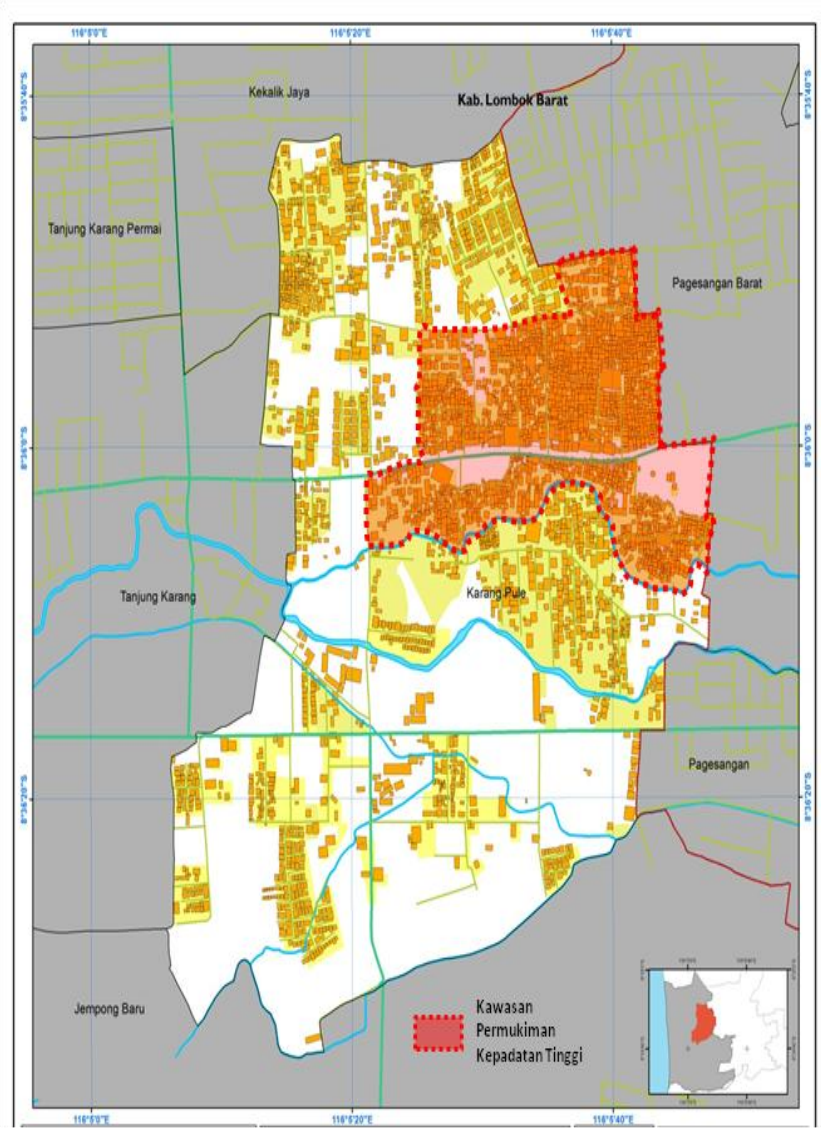

Gambar 3. Peta kepadatan bangunan kelurahan Karang Pule

Jenis Klaster Kerajinan Industri

Identitas Budaya Lokal

Dahulu keahlian warga Sekarbela dalam membuat berbagai bentuk perhiasan ini adalah kecakapan yang diturunkan oleh nenek moyang ratusan tahun silam, dan masih tetap lestari sampai sekarang. Bahkan kini menjadi pekerjaan utama bagi sebagian warga Sekarbela.

Dikarenakan sudah dikenal sebagai ahli pembuat perhiasan, maka pada setiap desain perhiasan kerajinan MEP ini memiliki ciri khas tersendiri dan memasukkan beberapa unsur budaya. Desain dilakukan pada kalung, cincin, anting, giwang, gelang, bros, maupun aksesoris lainnya. Yang paling disukai pembeli adalah yang memiliki ciri khas Lombok, yaitu desain yang dikombinasikan dengan mutiara. Mutiara yang tersedia selain dibedakan dari jenis budidayanya juga terdapat beragam warna, yaitu : putih, kuning keemasan, coklat, dan hitam. Menurut penjualnya, mutiara air laut yang dibudidayakan di Lombok dikenal dengan sebutan “South Sea Pearl”. Mutiara air laut memiliki tekstur yang berbeda dari mutiara air tawar. Warnanya lebih creamy atau lebih keemasan. Selain perpaduan dengan mutiara, motif dari perhiasannya pun memiliki ciri khas, yaitu motif ukiran bunga atau bentuk daun seperti yang terlihat pada gambar di bawah ini.

Gambar 4. Desain khas perhiasan MEP

Keahlian Teknis

Sama halnya dengan sentra kerajinan lain seperti Banyumulek, Labuapi dan Sukarara yang mayoritas warganya memiliki keahlian membuat gerabah dan menenun diperoleh secara turun temurun, maka pada klaster industri MEP di Kelurahan Karang Pule juga seperti itu. Penduduk di kelurahan ini tidak pernah secara khusus mempelajari teknik pembuatan perhiasan atau lebih otodidak.

Gambar 5. Para pengerajin sedang membuat perhiasan

Lembaga Keuangan Lokal

Secara umum akses para perajin MEP ke sumber permodalan sangat terbatas. Mayoritas perajin memenuhi kebutuhan dana untuk usahanya dengan dana sendiri, melalui pinjaman kepada para pemasok bahan baku (tanpa persyaratan khusus-kepercayaan) atau dari uang muka yang diberikan oleh pemesan. Sementara para pemilik toko (perajin-pengusaha) sebagian besar memiliki akses ke koperasi simpan pinjam (Koppontren) dan kredit perbankan. Beberapa diantaranya juga mendapatkan dana bantuan dari BUMN (dana CSR).

Selain itu BDS-PINBUK Kota Mataram yang sejak tahun 2003 mendampingi pengembangan perajin MEP di Kota Mataram. Lembaga lain yang juga aktif memberikan jasa layanan bagi pengembangan UMKM adalah Lembaga Pengembangan Bisnis Pembinaan dan Pengembangan Koperasi dan Pengusaha Kecil atau LPB PPKP. Lembaga yang dibentuk atas kerjasama Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi NTB dengan Yayasan Dana Bakti Astra atau YDBA ini telah aktif memberikan jasa pelayanan informasi, pelatihan dan pendampingan kepada UMKM di Provinsi NTB.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gambar 6. Beberapa Koperasi yang berada di sekitar kawasan Industri MEP

Proses produksi yang dilakukan oleh pengerajin antara lain : 1) Penyiapan bahan baku (pencu cian, peleburan), 2) Pembentukan (sesuai desain yang diminta), 3) Perakitan (apabila produk terdiri dari beberapa bagian) dan 4) Finishing. Untuk jumlah pemilik toko yang ada di Klaster Industri Mutiara Emas Perak di kelurahan Karang Pule ini terdapat ± 29 pemilik toko pengerajin MEP (IKM Dinas Koperindag Kota Mataram). Dalam memenuhi pesanan, para pemilik toko bekerjasama dengan para perajin untuk memenuhi produk yang dipesan tersebut. Pengerajin - pengusaha (pemilik toko) ini rata-rata mempekerjakan 3 (tiga) orang karyawan. Volume penjualan para pemilik toko rata-rata sebanyak 100 unit per bulan, dengan rata-rata omset sebesar Rp. 100.000.000,- per bulan.

Berikut adalah peta rantai nilai klaster industri MEP :

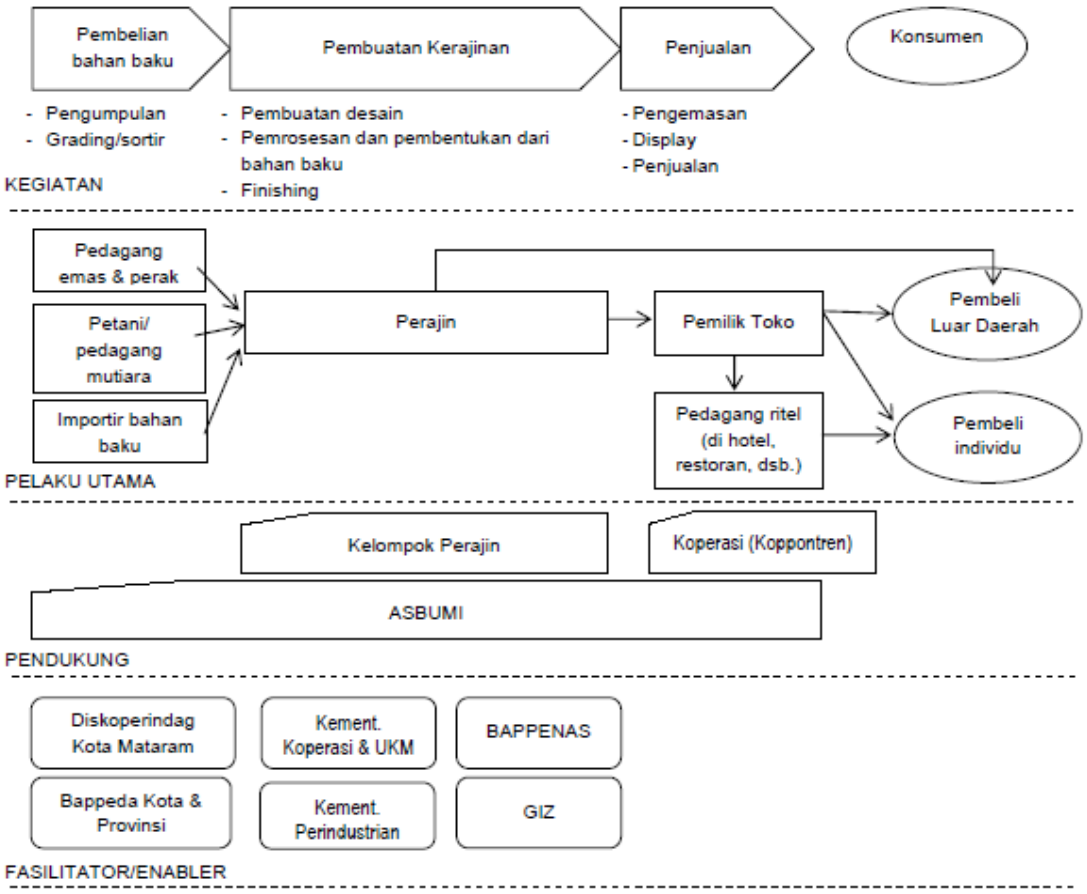

Gambar 7. Peta rantai nilai kerajinan MEP

ISBN : 978-602-73463-1-4

Dan jika dilihat dari segi rantai nilai, pelaku dalam rantai nilai klaster industry MEP terdiri dari produsen, pemilik toko (pengerajin-pengusaha), dan pedagang ritel [10]. Produsen merupakan penyedia bahan baku dan para perajin. Sebagian besar penyuplai bahan baku dari kerajinan MEP di kelurahan Karang Pule ini berasal dari luar wilayah tersebut. Untuk bahan baku mutira bersumber dari para petani mutiara yang berada di Lombok dan Sumbawa sedangkan untuk peyuplai bahan bau emas berasal dari perusahaan pertambangan dari luar daerah dan sebagian juga berasal dari lumpur yang menggandung emas yang didapat dari kecamatan Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Sebagian besar dari pengerajin mendapat pasokan emas dari para pemilik toko atau dari para pembeli. Jadi para pengerajin hanya diminta untuk membantu dalam proses pembentukkan sampai dengan perakitan.

Keterkaitan antara Klaster Industri MEP dengan Kawasan Permukiman Sekitar

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pengerajin di klaster industri MEP sebagian besar merupakan masyarakat yang tinggal di permukiman sekitar klaster industri tersebut. Klaster industri kerajinan MEP juga muncul disebabkan para pengerajin yang dulunya merupakan pengerajin perhiasan di kawasan Ampenan membuka usaha sendiri di tempat tinggalnya yaitu di kelurahan Karang Pule dan berkembang sampai saat ini sehingga munculah klaster industri kerajinan Mutiara Emas Perak.

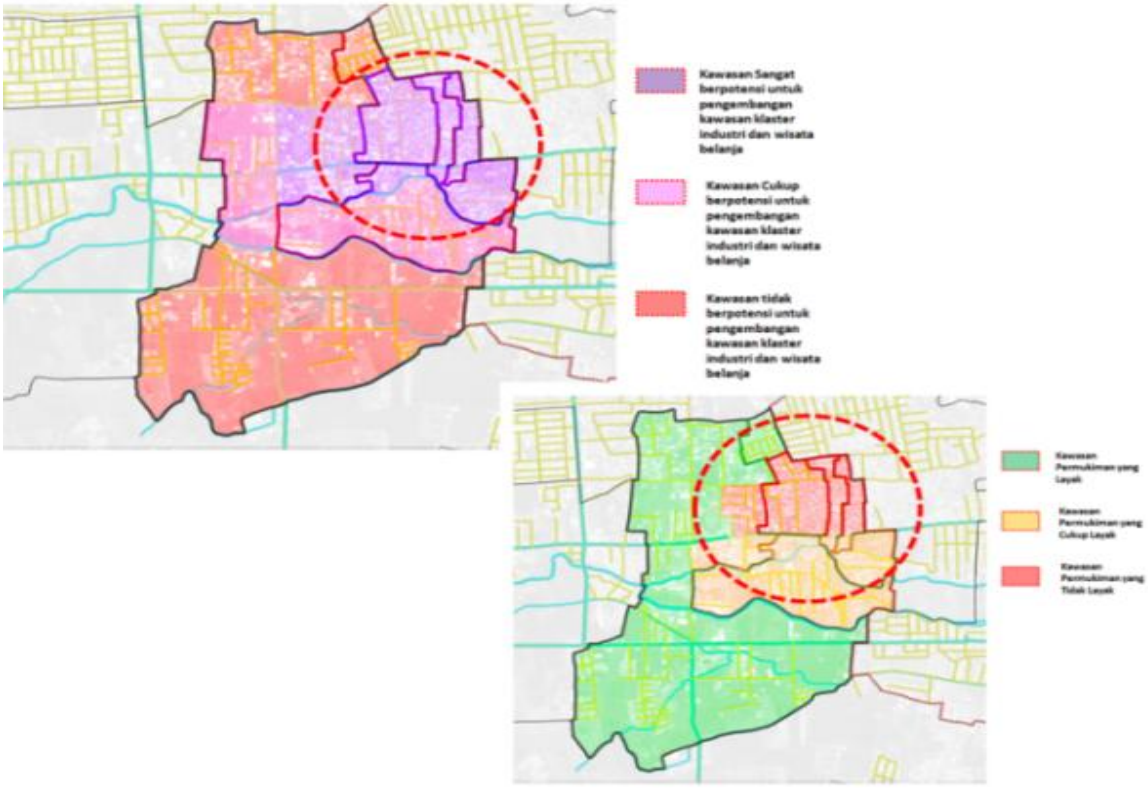

Gambar 8. Bentuk keterkaitan antara kawasan klaster industri kerajinan MEP dengan kawasan permukiman

Dari peta pembagian kawasan potensial industri dan kawasan kelayakan permukiman tersebut dapat diketahui bahwa kawasan yang merupakan kawasan yang paling potensial untuk pengembangan kawasan industri juga merupakan kawasan permukiman yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan industri kerajinan Mutiara Emas Perak yang sudah ada sejak dulu mempengaruhi kawasan terutama dalam hal lingkungan dan memiliki potensi untuk dikembangkan karena adanya keterkaitan antara klaster industri dan permukiman Di satu sisi kegiatan industri kerajinan MEP memberikan dampak positif dalam menunjang perekonomian masyarakat sekitar namun di sisi lain berdampak negatif yaitu menyebabkan terbentuknya kawasan permukiman yang tidak layak.

Analisis Kelayakan Kawasan Pariwisata Belanja

Analisis kelayakan kawasan wisata belanja pada klaster industri MEP di kelurahan Karang Pule berdasarkan komponen-komponen pendukung kawasan wisata belanja adalah :

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

1. Ketersediaan Produk

Kerajinan MEP menghasilkan produk perhiasan yang terdiri dari mutiara, emas, perak atau kombinasi. Material emas dan perak digunakan sebagai bahan ikatan untuk merangkai mutiara menjadi produk perhiasan yang biaanya terdiri dari : 1) emas 18 karat atau 75% dan emas 22 karat atau 92% dan 2) perak 925, yaitu campuran perak murni dan tembaga dengan persentase 92.5% perak + 7.5% tembaga. Adanya perhiasan mutiara tersebut, membuat pusat kerajinan perhiasan Sekarbela sekarang lebih di kenal masyarakat sebagai pusat kerajinan mutiara di Lombok. Peminat jenis perhiasan mutiara asli budidaya dari Lombok *(South Sea Pearl)* adalah wisatawan domestic dan mancanegara. Desain perhiasan mulai dari kalung, cincin, anting, giwang, gelang, bros, maupun asesoris lainnya yang paling disukai pembeli adalah yang memiliki ciri khas Lombok, yaitu desain yang dikombinasikan dengan mutiara. Mutiara yang tersedia, selain dibedakan dari jenis budidayanya, juga terdapat beragam warna, putih, kuning keemasan, coklat, dan hitam. Mutiara air laut memiliki tekstur yang berbeda dari mutiara air tawar. Warnanya lebih creamy atau lebih keemasan.

Bentuk-bentuk mutiara dapat dilihat pada gambar 10 berikut ini :

Gambar 9. Bentuk - bentuk Mutiara

Selain mutiara juga terdapat material dan jenis lain yang berasal dari kulit atau cangkang kerang mutiara seperti pada gambar 11. berikut :

Gambar 10. Material dan Jenis Lain Produk

2. Fasilitas Pendukung

Ketiadaan sarana parkir untuk kendaraan bermotor juga ditambah dengan kehadiran cidomo (cikar, dokar, dan mobil alias kereta kuda khas Lombok,) yang berhenti atau mangkal mengakibatkan kendaraan tersebut memenuhi hampir seluruh bahu jalan di jalan utama yang relatif tidak terlalu lebar itu pada titik lokasi kawasan belanja tersebut serta masih belum optimalnya fungsi bangunan di koridor jalan wisata belanja MEP. Dari aspek kemanan juga belum adanya pos keamanan di lokasi wisata serta tempat istirahat dan atau makan wisatawan yang memadai.

3. Aksesibilitas

Aksesibilitas pendukung terutama bagi pejalan kaki masih kurang memadai. Di jalan utama kawasan wisata belanja, yaitu jalan Sultan Kaharudin tidak terdapat pedestrian untuk para pejalan kaki. Sedangkan kondisi jalan-jalan kecil seperti gang-gang kondisinya juga kurang baik.

Dari hasil analisis, dapat diketahui bahwa klaster industri Mutiara Emas Perak (MEP) di kelurahan tersebut masih belum layak sebagai kawasan wisata belanja. Dari ketiga komponen pendukung kawasan wisata belanja, hanya satu komponen yang terpenuhi yaitu ketersediaan produk sedangkan untuk komponen lain belum

ISBN : 978-602-73463-1-4

terpenuhi secara optimal. Dari potensi yang dimiliki, klaster industri MEP dapat dikembangkan sebagai kawasan wisata belanja.

Upaya pengembangan klaster industri kerajinan MEP di kelurahan Karang Pule sebagai kawasan wisata belanja berdasarkan analisis SWOT adalah sebagai berikut :

1. Ketersediaan Produk

Pengembangan terhadap komponen ketersediaan produk lebih ditekankan pada peningkatan hasil produksi dan inovasi dari hasil kerajinan MEP di klaster industri, yaitu dengan : 1) meningkatkan jumlah produksi kerajinan MEP untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan permintaan, 2) mencari pemasok bahan baku dari tempat lain ataupun mengembangan kawasan budidaya khusus untuk memasok bahan baku dan 3) inovasi untuk meningkatkan daya saing produk kerajinan MEP dengan tren terbaru namun tetap mempertahankan ciri khas dengan memanfaatkan para pengerajin yang memiliki keterampilan dan keahlian.

2. Fasilitas

Pengembangan fasilitas untuk meningkatkan fasilitas dalam menunjang kegiatan wisata belanja, yaitu :1) mendesain koridor jalan Sultan Kaharudin sebagai koridor wisata belanja dan wisata industri dengan konsep *shopping street,* 2) melakukan refungsi bangunan yang kurang menunjang aktifitas wisata di koridor tersebut, 3) mengoptimalkan keberadaan ruang terbuka dilengkapi dengan penataan *street furniture* yang menunjang aktifitas wisata, 4) pengadaan fasilitas pendukung, seperti : pos keamanan, tempat parkir, tempat istirahat dan atau tempat makan yang menyajikan kuliner khas Lombok sehingga pengunjung juga bisa berwisata kuliner, 5) melibatkan masyarakat untuk mendukung dan memelihara kelengkapan fasiitas yang ada demi kenyamanan dan keamanan wisatawan dan 6) melakukan pembagian blok pengembangan berdasarkan fungsi kawasan untuk memudahkan pengembangan industri MEP. Blok pengembangan tersebut terbagi menjadi 4 (empat) kawasan blok pengembangan seperti yang terdapat pada peta di bawah ini.

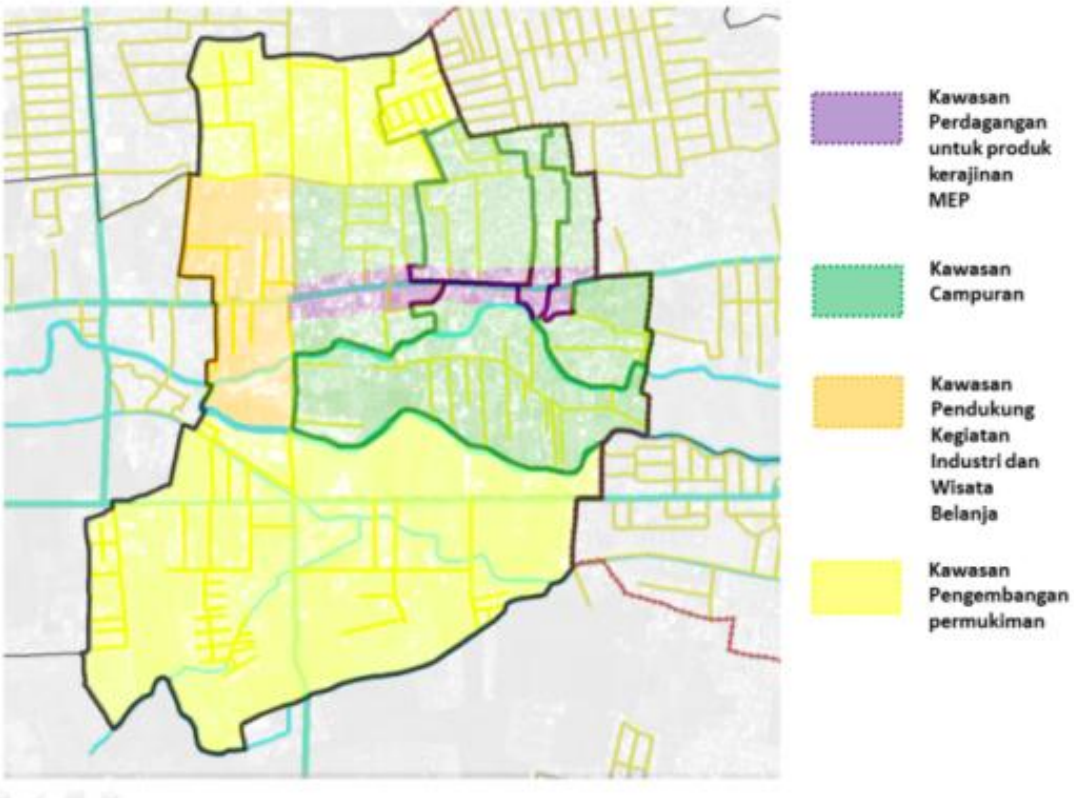

Gambar 11. Rencana Pembagian Blok Pengembangan

Kawasan pengembangan tersebut, antara lain : 1) Kawasan perdagangan, sebagai tempat pengembangan lokasi pemasaran kerajinan MEP berupa pertokoan, 2) Kawasan Campuran, untuk permukiman dan workshop para pengerajin, 3) Kawasan pendukung kegiatan industri dan wisata belanja, seperti rumah makan, ataupun tempat penginapan dan 4) Kawasan pengembangan permukiman, dengan relokasi permukiman sebagai upaya penataan dan peningkatan kualitas hunian yang tidak layak .

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3. Aksesibilitas

Pengembangan aksesibilitas dilakukan dengan meningkatkan aksesibilitas kawasan , yaitu : 1) peningkatan kualitas jalan, khususnya di koridor utama wisata belanja dan 2) peningkatan kualitas sirkulasi pejalan kaki pada koridor jalan utama, sirkulasi utamanya berupa area pedestrian yang nyaman dan aman bagi para penggunanya, yaitu : mampu mengakomodasi kebutuhan orang berkebutuhan khusus, adanya pembatas antara pejalan kaki dengan kendaraan dan jalur pedestrian yang memiliki keterikatan pada fasilitas-fasilitas wisata yang ada di koridor tersebut.

KESIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa :

1. Dari peta pembagian kawasan potensial industri dan kawasan kelayakan permukiman tersebut dapat diketahui bahwa kawasan yang merupakan kawasan yang paling potensial untuk pengembangan kawasan industri juga merupakan kawasan permukiman yang tidak layak. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan industri kerajinan Mutiara Emas Perak yang sudah ada sejak dulu mempengaruhi kawasan terutama dalam hal lingkungan dan memiliki potensi untuk dikembangkan karena adanya keterkaitan antara klaster industri dan permukiman
2. Berdasarkan pemenuhan komponen-komponen pendukung kawasan wisata belanja, hanya satu komponen yang terpenuhi yaitu ketersediaan produk sedangkan untuk komponen lain seperti fasilitas pendukung dan aksesibilitas masih belum terpenuhi secara maksimal.
3. Upaya pengembangan berdasarkan analisis SWOT, adalah : 1) ketersediaan produk lebih ditekankan pada peningkatan hasil produksi dan inovasi, 2) kelengkapan fasilitas dengan peningkatan fasilitas pendukung wisata belanja dan pembagian blok pengembangan berdasarkan fungsi kawasan untuk memudahkan pengembangan Industri MEP dan 3) aksesibilitas lebih ditekankan pada peningkatan peningkatan kualitas jalan, pengadaan pedestrian dan parkir yang memadai.

Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan kerjasama semua pihak untuk mengembangkan kawasan pariwisata belanja MEP ini sehingga dapat mengoptimalkan potensi kawasan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Anonim, Keputusan Walikota Mataram Nomor 526/X/2009 tentang Penetapan Klaster Industri Kecil Unggulan Kota Mataram
[2] Anonim, Peraturan Daerah No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Mataram tahun 2011 – 2031
[3] R.Sushanti. *Pengaruh Keberadaan Industri terhadap Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kota Mataram.* Jurnal Sosial Ekonomi Humaniora. Universitas Mataram, Vol.1 No.1. 2015
[4] Anonim, Undang - Undang Republik Indonesia No 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
[5] Anonim, Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.
[6]] M.A. Medlik S, and Middleton. *The Product Formulation In Tourism*, Association Internationale d'Experts du Tourism (AIEST). 1973
[7] Singarimbun. *Metode Penelitian Survei*. Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta. 2008
[8] M.E. Porter. *Competitive Strategy : Techniques For Analyzing Industries and Competitors*. The Free Press, New York.1980
[9] Rangkuti. *Analisis SWOT Teknik Membedah Kaus Bisnis*. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta . 2004
[10] H.Albanjari 2012. Analisis Rantai Nilai Kerajinan Mutiara, Emas dan Perak di Kota Mataram, NTB. GIZ GmbH – Regional Economic Development.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PERKEMBANGAN WISATA BERBASIS SOSIAL MEDIA DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PERDESAAN

Isti Hidayati

Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada

Email : justisti@gmail.com

Naskah diterima :10 Maret 2017 Naskah direvisi : 17 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Beberapa tahun terakhir, penggunaan sosial media sebagai media promosi wisata telah mampu mengangkat spot-spot wisata "baru". Kunjungan wisatawan ke spot-spot wisata baru yang umumnya terletak di perdesaan, memberi pengaruh terhadap penyediaan infrastruktur, terutama dalam hal peningkatan aksesibilitas. Paper ini mengelaborasi hubungan antara perkembangan wisata berbasis sosial media dan pengaruhnya terhadap penyediaan infrastruktur perdesaan pada 25 spot wisata "baru" di Yogyakarta yang tengah ramai diperbincangkan di media sosial. Analisis kuantitatif dan kualitatif sederhana dilakukan untuk melihat bentuk pengaruh perkembangan wisata terhadap penyediaan infrastruktur. Hasil analisis menyebutkan adanya perbaikan infrastruktur, terutama yang bersifat mendukung kegiatan wisata seperti akses jalan dari dan menuju kawasan wisata maupun penyediaan air bersih dan listrik. Di samping perbaikan infrastruktur, pada beberapa kasus terdapat peningkatan kapasitas masyarakat lokal terkait pengelolaan infrastruktur. Temuan pola tersebut dapat berfungsi sebagai alternatif penyediaan infrastruktur perdesaan untuk mempersempit disparitas pembangunan kota-desa.

Kata kunci: *wisata, infrastruktur perdesaan, disparitas pembangunan*

PENDAHULUAN

Dewasa ini, sosial media memegang peranan penting dalam perkembangan wisata, terutama dalam pemilihan tujuan wisata, pemilihan hotel, ataupun pemilihan metode perjalanan [1]. Lebih lanjut, terdapat tren untuk menuliskan pengalaman wisata melalui sosial media dan *review* pengalaman wisata tersebut menjadi rekomendasi terpercaya dibandingkan iklan perjalanan wisata yang dikelola secara profesional [1] [2]. Dengan mengunggah foto berlatar belakang spot yang menarik di sosial media seperti *instagram* ataupun *facebook,* maka dapat meningkatkan kunjungan wisatawan ke spot tersebut, walaupun peningkatan kunjungan wisatawan tersebut tidak selalu berdampak positif. Kasus yang ekstrim adalah kebun bunga amarilis (*lily*) di Gunungkidul, Yogyakarta, yang sempat tenar di media social selama beberapa minggu dan rusak terinjak-injak karena terlalu banyak wisatawan[1].

Berdasarkan data statistik kepariwisataan 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Pariwisata DIY, kunjungan wisatawan di Propinsi D.I. Yogyakarta terus mengalami peningkatan yang signifikan sejak tahun 2011. Di tahun 2014, kunjungan wisatawan (domestik dan asing) mencapai 16.774.235, meningkat 31% dari data pada tahun sebelumnya (kunjungan wisatawan ke DIY pada tahun 2013 mencapai 12.759.153 wisatawan). Peningkatan kunjungan wisata tersebut dipengaruhi munculnya obyek-obyek wisata "baru", terutama di wilayah selatan DIY yang berbasis wisata alam, seperti wisata pantai, susur goa, ataupun *sightseeing*sebagai latar belakang foto (*selfie*). Hal ini dapat dilihat dari kemunculan *website-website* yang berisi rekomendasi tempat kunjungan wisata di Yogyakarta.

Selain media sosial, ketersediaan dan kualitas jaringan transportasi menuju obyek wisata memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengambilan keputusan tentang tujuan wisata [3],[4]. Adanya jaringan

[1] Seperti yang diberitakan di http://nasional.tempo.co/read/news/2015/11/28/058723040/taman-bunga-gunungkidul-rusak-warga-buka-kotak-sumbangan dan http://jogja.tribunnews.com/2015/11/28/kebun-lily-gunungkidul-rusak-terinjak-injak-ini-komentar-pemiliknya

transportasi yang baik menuju lokasi wisata, ditunjang dengan kemudahan komunikasi dan informasi, dapat menjadi salah satu faktor penarik kunjungan wisata [5].

Di sisi lain, lokasi wisata yang bertumpu pada pemandangan yang "unik" pada umumnya berada di pedesaan, atau jauh dari pusat kota, dimana penyediaan infrastruktur dasar (termasuk jalan) masih belum optimal dibandingkan wilayah perkotaan.Penyediaan infrastruktur perdesaan pada umumnya berkaitan erat dengan produktivitas pertanian yang diharapkan berujung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa. Penyediaan infrastruktur tersebut seringkali bertumpu pada kapasitas pemerintah (baik lokal maupun pusat), sementara partisipasi masyarakat masih tergolong sangat kecil atau sangat jarang [6].

Terlepas dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup pesat, disparitas desa-kota masih tetap terasa [7], terutama dalam hal penyediaan infrastruktur perdesaan. Di tahun 2010, berdasarkan Logistic Performance Index (LPI) yang dikeluarkan oleh World Bank, Indonesia menempati urutan ke-75 dari 155 negara dalam hal kualitas infrastruktur transportasi. Di area perdesaan, kondisi jaringan transportasi lebih memprihatinkan karena 50% jalan perdesaan masih belum diaspal dan lebih dari 10% desa tidak bisa diakses oleh kendaraan roda empat pada waktu-waktu tertentu. Selain transportasi, akses masyarakat perdesaan terhadap air bersih, sanitasi, dan energi juga cukup memprihatinkan. Hanya 45% masyarakat desa yang memiliki akses terhadap air bersih, 34% memiliki akses terhadap sanitasi, dan lebih dari 90 juta masyarakat perdesaan tidak memiliki akses terhadap listrik [8]. Padahal, penyediaan infrastruktur listrik, air bersih, dan jalan memiliki efek yang signifikan dalam peningkatan kualitas hidup masyarakat [9].

Terkait dengan permasalahan penyediaan infrastruktur perdesaan tersebut, kegiatan wisata dapat menjadi salah satu alternatif untuk merangsang pembangunan infrastruktur. Kegiatan wisata merupakan salah satu *demand pressure* yang cukup tinggi terhadap jaringan transportasi sehingga keberadaan suatu obyek wisata dapat memberi pengaruh positif pada perkembangan jaringan transportasi di wilayah tersebut [10]. Di samping itu, kegiatan wisata juga menuntut tersedianya air bersih dan sanitasi yang baik [11]. Dengan demikian, peningkatan infrastruktur dasar seperti air bersih dan sanitasi dapat menjadi bagian upaya untuk mendorong peningkatan kunjungan wisatawan.

Makalah ini bertujuan untuk memverifikasi kecenderungan ataupun hubungan antara kunjungan wisata yang berbasis promosi sosial media dengan peningkatan infrastruktur perdesaan di wilayah tersebut. Kasus yang digunakan adalah kegiatan wisata di Provinsi D.I.Yogyakarta, dengan fokus pada spot-spot wisata "baru" yang sering disebutkan di sosial media selama 3 tahun terakhir.

METODE PENELITIAN

Penulisan makalah ini bertujuan untuk melihat korelasi antara penggunaan sosial media sebagai media promosi wisata terhadap peningkatan infrastruktur perdesaan. Preposisi yang digunakan adalah dengan mengunggah foto dengan latar belakang lokasi wisata tertentu, maka secara tidak langsung telah melakukan promosi terhadap pariwisata di daerah tersebut (Gambar 1). Hal ini akan berdampak pada peningkatan kunjungan wisatawan, yang selanjutnya berfungsi sebagai *demand pressure* terhadap penyediaan infrastruktur di kawasan tersebut. Melihat kecenderungan trend wisata di DIY, yang sering diunggah sebagian besar adalah foto-foto di lokasi perdesaan, sehingga konteks infrastruktur perdesaan digunakan dalam penelitian ini.

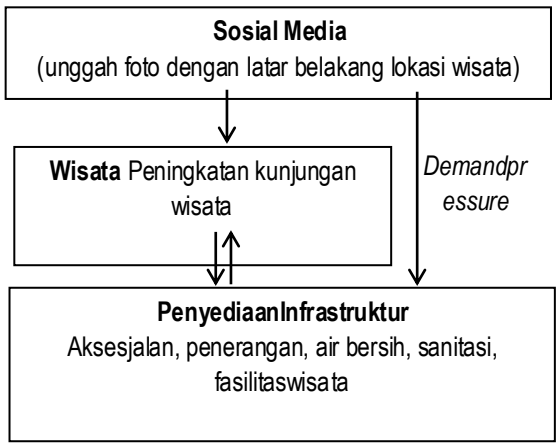

Gambar 1.Kerangka Kerja Penelitian
Sumber: konstruksi peneliti, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Sebagai langkah awal, dilakukan *screening* untuk memilih lokasi wisata yang akan menjadi obyek amatan. Pemilihan lokasi dilakukan dengan melihat jumlah *mention* (frekuensi lokasi wisata tersebut diperbincangkan) pada *facebook* dan *instagram* pada rentang waktu 3 tahun kebelakang, sehingga didapatkan 25 spot wisata (Gambar 2), yang sebagian besar berada di Kabupaten Gunung kidul.

Pada masing-masing obyek wisata dilakukan observasi dan wawancara yang mencakup sekuens penyediaan infrastruktur dasar (meliputi akses jalan menuju tempat wisata, penerangan jalan, air bersih, sanitasi, serta fasilitas wisata seperti tempat parkir dan warung makan) serta bagaimana pengelolaan infrastruktur tersebut. Hasil observasi dan wawancara dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Analisis secara kuantitatif dilakukan melalui statistik deskriptif untuk mendapatkan profil tentang ketersediaan infrastruktur di masing-masing spot wisata amatan. Sementara analisis kualitatif dilakukan melalui pencocokan pola (*pattern matching*) dan interpretasi terhadap hasil analisis kuantitatif yang telah dilakukan sebelumnya.

Gambar 2.Peta Sebaran Obyek Wisata Amatan
Sumber: konstruksi peneliti, 2016

Dua puluh lima obyek wisata tersebut menawarkan salah satu atau gabungan dari atraksi wisata alam, fotografi, dan olahraga (Gambar 3). Dari 25 spot wisata yang menjadi fokus amatan, 22 di antaranya merupakan spot yang terkenal sebagai tempat untuk mengabadikan foto (fotografi profesional ataupun *selfie*).

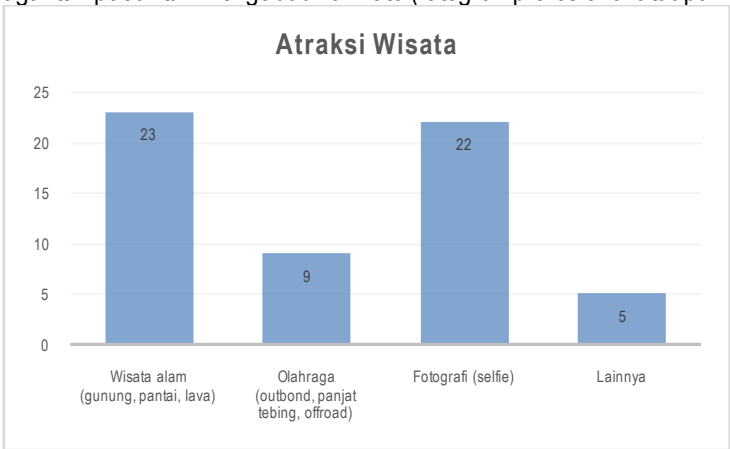

Gambar 3.GrafikAtraksiWisata
Sumber: analisis, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Ketersediaan Infrastruktur

Dengan adanya promosi sosial media, informasi menuju 25 tempat wisata tersebut tergolong mudah untuk didapat dan diikuti, ditambah dengankualitas jalan yang relatif bagus. Hanya 5 spot wisata yang harus melalui jalan tanah untuk benar-benar sampai ke lokasi. Dari segi lebar jalan, 32% mampu dilewati bis besar 2 arah dan landai, 20% mampu dilewati bis besar 2 arah tetapi curam, 20% hanya cukup untuk 1 arah kendaraan dan landai, serta 28% hanya cukup untuk 1 arah dan curam (Gambar 3). Dari sisi keamanan, 16% akses jalan menuju spot wisata tersebut termasuk dalam kriteria rawan longsor dan tidak dilengkapi dengan pagar pengaman, serta hanya 36% yang dilengkapi dengan penerangan jalan.

Gambar 3. Akses jalan aspal yang rusak ke Pok Tunggal (kiri) dan lebar jalan yang kurang memadai menuju Kalibiru (kanan)

Sumber: observasi, 2016

Dari sisi pengelolaan, 16 dari 25 spot wisata amatan memungut retribusi dan 9 spot wisata yang lain tidak memungut retribusi untuk memasuki kawasan wisata tersebut. Selain retribusi, pada 24 spot wisata amatan, pemasukan juga didapat dari pengelolaan fasilitas pendukung seperti parkir, toilet, warung makan, toko souvenir, ataupun penyewaan alat. Untuk operasional fasilitas seperti toilet dan warung makan, sumber air bersih sebagian besar berasal dari sumur ataupun mata air yang kemudian dialirkan dengan pompa ke kawasan wisata. Jika tidak mencukupi dan belum terjangkau aliran PDAM, masyarakat ataupun pengelola kawasan wisata mendatangkan air bersih melalui tangki air. Untuk sanitasi, toilet umum di 24 spot wisata telah memiliki *septic tank*.

B. Pengaruh Perkembangan Wisata terhadap Penyediaan Infrastruktur Perdesaan

Berdasarkan hasil wawancara terhadap pengelola fasilitas di 25 spot wisata amatan, didapatkan informasi bahwa terdapat peningkatan aksesibilitas menuju18 spot wisata amatan yang populer di media sosial pada beberapa tahun terakhir. Tujuh spot wisata yang lain telah memiliki akses yang cukup memadai sehingga peran kegiatan wisata sebagai *demand pressure* tidak terlalu signifikan. Peningkatan aksesibilitas tersebut berupa pembanggunan jalan, perkerasan jalan, pelebaran jalan, perbaikan jalan, ataupun penerangan jalan yang dilakukan setelah obyek wisata tersebut mulai terkenal (*booming*) di sosial media(lihat Tabel 1). Dengan demikian, peran sosial media (*facebook* dan *instagram* dalam konteks penelitian ini) yang mengunggah foto berlatar belakang kawasan wisata, merupakan salah satu *demand pressure* terhadap penyediaan infrastruktur, terutama peningkatan aksesibilitas jalan. Lebih lanjut, peningkatan aksesibilitas juga memberikan dampak terhadap peningkatan kunjungan wisata, seiring dengan banyaknya *mention* tentang kawasan wisata tersebut di sosial media.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1. Peningkatan Akses Jalan di 25 Spot Wisata Amatan

Spot Wisata Amatan	Peningkatan Akses Jalan	Ramai Dikunjungi	Inisiatif
Pantai Wediombo	Pengaspalan (2012)	2013	Masyarakat dan PU
Pantai Nglambor	Pembangunan jalan dan penerangan (2015)	2015	Masyarakat dan Pemkab
Baron Technopark	Pengaspalan jalan (2012)	2012	BPPT
Pantai Sepanjang	Pengaspalan (2009)	2003	Tokoh masyarakat dan Pemkab
Pantai Indrayanti	Penerangan jalan (2012)	2012	PU
Pantai Ngandong	Perbaikan jalan	2011	Masyarakat dan Pemkab
Pantai Pok Tunggal	Pembangunan jalan (2011)	2011	Masyarakat
Puncak Kosakora	Perbaikan jalan (2015)	2015	Pokdarwis
Lava Bantal	Pengaspalan jalan (2016)	2013	Masyarakat dan Pemkab
Hutan Mangroove	Perkerasan jalan (2013)	2016	Masyarakat
Desa Wisata Nglinggo	Pengaspalan jalan (2013)	2013	PU
Desa Wisata Kalibiru	Perkerasan jalan (2012) Penerangan (2014)	2013	Masyarakat dan Pemkab
Lava Tour	Pembukaan rute yang tertutup abu material (2011)	2010	Pengelola kaw. Wisata
Tebing Breksi	Pembangunan jalan (2015)	2015	Masyarakat dan Pemkab
Kebun Buah Mangunan	Pengaspalan jalan (2014)	2014	Masyarakat dan Pemkab
Gunung Api Purba Nglanggeran	Pengaspalan dan pelebaran jalan (2013)	2011	Masyarakat dan Pemkab
Goa Pindul	Pengaspalan jalan (2013)	2012	Pemkab
Cave Tubing Kalisuci	Pengaspalan jalan (2014)	2012	Pengelola kaw. Wisata
Puncak Becici	Perkerasan jalan (2015)	2014	

Sumber: wawancara, 2016

Dari sisi pengelolaan, peningkatan kunjungan wisatawan menjadi salah satu faktor dorongan bagi masyarakat untuk mengajukan inisiatif peningkatan aksesibilitas kawasan. Hal ini terlihat dari adanya inisiasi upaya peningkatan akses jalan yang berasal dari masyarakat, tanpa menunggu proyek pemerintah. Di sisi lain, adanya bagi hasil dari pengelolaan kegiatan wisata (bisa bersumber dari retribusi ataupun kegiatan ekonomi di lokasi wisata seperti berjualan makanan atau menyewakan alat), mendorong masyarakat untuk lebih meningkatkan kunjungan wisatawan melalui peningkatan akses jalan. Pada konteks ini, insentif ekonomi dari kegiatan wisata mampu memunculkan inisiatif untuk penyediaan infrastruktur (insentif ekonomi mampu berfungsi sebagai *demand pressure* penyediaan infrastruktur). Lebih lanjut, inisiasi penyediaan infrastruktur yang datang dari masyarakat membawa efek rasa kepemilikan bersama yang lebih besar sehingga tanggung jawab pengelolaan dilakukan secara swadaya.

Secara skematis, pengaruh perkembangan wisata terhadap penyediaan infrastruktur perdesaan dideskripsikan pada Gambar 4 berikut:

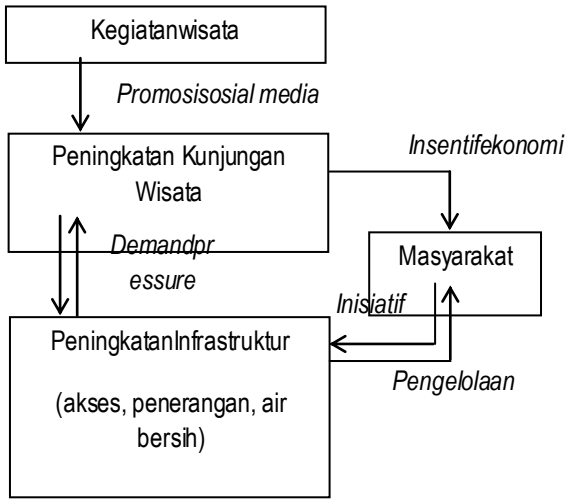

Gambar 4.Pengaruh kegiatan wisata terhadap penyediaan infrastruktur

Sumber: konstruksi peneliti, 2016

Kondisi ini menyebabkan munculnya atau meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan infrastruktur, terutama akses jalan. Pada beberapa kasus, pengelolaan oleh masyarakat tidak hanya terhadap peningkatan akses jalan, tetapi juga meliputi distribusi air bersih. Pada beberapa lokasi wisata yang belum

dijangkau oleh PDAM, ketersediaan air bersih dipasok menggunakan tangki air ataupun pompa yang pengadaannya diinisiasi oleh masyarakat.

Terkait dengan konteks perdesaan, pada umumnya pembangunan perdesaan diidentikkan dengan pembangunan di bidang pertanian, sehingga terdapat kecenderungan untuk menegasikan sumber pembangunan lain di luar pertanian (*rural non-farming* atau *RNF*) [12]. Padahal, pendapatan masyarakat perdesaan tidak bertumpu hanya pada kegiatan pertanian. Kegiatan di luar pertanian (RNF) seperti wisata, perdagangan, ataupun pertambangan dapat berkontribusi 40%-60% terhadap pendapatan masyarakat perdesaan [13]. Hal ini juga berimbas pada penyediaan infrastruktur, terutama jalan, yang difokuskan untuk mobilitas logistik pertanian. Secara implisit, wisata pedesaan belum dianggap sebagai satu sektor yang dapat berkontribusi terhadap penyediaan infrastruktur pedesaan ataupun peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hal ini tampak dari program pembangunan pedesaan oleh pemerintah yang sebagian besar masih berfokus pada sektor pertanian. Padahal, wisata pedesaan (*rural tourism*) merupakan prospek yang cukup menjanjikan bila digarap dengan serius [14].

Pada konteks 25 spot wisata yang menjadi obyek penelitian di makalah ini, yang juga berada di kawasan perdesaan, kegiatan wisata memiliki kontribusi yang cukup signifikan. Pada 18 spot wisata, kegiatan wisata mampu menjadi faktor pemicu peningkatan infrastruktur, terutama peningkatan akses jalan. Insentif ekonomi dari kegiatan wisata dapat menjadi pendapatan masyarakat di luar pertanian, sehingga dalam konteks pembangunan perdesaan, penggunaan sosial media yang berfungsi sebagai media promosi wisata dapat memberikan kontribusi yang positif.

Di sisi lain, perlu diperhatikan bahwa upaya perbaikan ataupun pengadaan infrastruktur pedesaan tersebut dapat mengancam "atmosfer" pedesaan yang pada awalnya merupakan daya tarik wisata. Isu alih fungsi lahan non terbangun menjadi lahan terbangun merupakan salah satu hal yang perlu diwaspadai dalam konteks ini.

C. Limitasi Penelitian dan Rekomendasi

Efektivitas penggunaan media sosial untuk mempromosikan lokasi wisata di perdesaan sebagai *demand pressure* penyediaan infrastruktur masih perlu untuk dikaji lebih lanjut. Terdapat beberapa faktor yang kemungkinan berpengaruh terhadap penyediaan infrastruktur perdesaan, namun tidak dibahas secara mendalam dalam penelitian ini, antara lain:

- Inisiatif dan kapasitas masyarakat

Kapasitas masyarakat dalam hal ini mencakup kapasitas sosial, institusi, dan kemampuan finansial yang berpengaruh terhadap implementasi penyediaan infrastruktur. Dalam makalah ini, konsep kapasitas masyarakat tidak menjadi fokus bahasan, terlebih penelitian dilakukan pada satu lanskap regional yang relatif homogen. Akan menarik untuk membandingkan apakah penyediaan infrastruktur yang bertujuan meningkatkan kunjungan wisatwan, dapat terlaksana dengan baik jika berasal dari inisiatif masyarakat di lokasi yang berbeda. Analisis kualitatif dengan *in-depth interview* akan sangat membantu untuk membahas faktor ini secara mendetail.

- Jenis kegiatan wisata

Pada penelitian ini, kegiatan wisata yang dikaji adalah wisata berbasis alam. Akan menarik untuk membandingkann apakah penggunaan media sosial untuk promosi wisata yang berbasis non-alam juga dapat menjadi *demand pressure* bagi penyediaan infrastruktur. Melihat kecenderungan saat ini di sosial media, wisata kuliner dan wisata budaya dapat menjadi kasus pembanding yang menarik.

- Dukungan pemerintah

Secara umum, penyediaan infrastruktur masih banyak bergantung pada pemerintah, baik melalui program pembangunan daerah ataupun nasional. Dalam makalah ini, dukungan pemerintah belum dipertimbangkan. Akan menarik untuk melihat apakah penyediaan infrastruktur akan lebih optimal jika terdapat dukungan pemerintah, atau seberapa besar komitmen pemerintah dalam penyediaan infrastruktur jika terdapat *demand pressure* dari masyarakat.

- Keterkaitan dengan tata guna lahan

Pembangunan ataupun peningkatan infrastruktur, terutama akses jalan, akan berpengaruh terhadap tata guna lahan. Peningkatan akses jalan berpotensi menarik pembangunan di sepanjang jalan (*ribbon development* menuju *sprawl*) sehingga perlu diiringi dengan kontrol implementasi rencana tata guna lahan.

- Konsep *sustainable tourism*

Aspek keberlanjutan (*sustainability*) belum terlalu dipertimbangkan dalam penelitian ini. Konsep wisata berkelanjutan (*sustainable tourism*) akan menerapkan "ambang batas" terhadap seberapa besar perkembangan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

wisata yang sebaiknya diperbolehkan. Sebagai contoh, pengambilan retribusi (sebagai karcis masuk, retribusi parker, ataupun retribusi penggunaan fasilitas seperti toilet), di satu sisi akan memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat. Akan tetapi, dari sisi wisatawan, pengambilan retribusi yang "berlebihan" akan memberikan kesan negatif terhadap lokasi wisata tersebut. Pembangunan ataupun pelebaran jalan juga harus mempertimbangkan aspek lingkungan, dan tidak hanya berfokus pada peningkatan kunjungan wisatawan. Selaras dengan konsep *sustainable* tourism, maka pengadaan jaringan air bersih dan sanitasi juga harus mempertimbangkan keseimbangan ekosistem, dan tidak hanya berfokus pada kenyamanan wisatawan.

Berdasarkan limitasi di atas, maka dapat disusun rekomendasi penelitian lanjutan dengan mempertimbangkan salah satu atau gabungan dari kelima faktor tersebut. Penelitian lanjutan dengan melibatkan sampel lokasi wisata yang lebih banyak dan beragam diharapkan dapat memperkaya dan memberikan penguatan justifikasi dalam pengambilan generalisasi bahwa *"penggunaan media sosial sebagai media promosi wisata dapat berkontribusi positif terhadap penyediaan infrastruktur perdesaan"*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Tren mengunggah foto dengan latar belakang kawasan wisata tertentu melalui sosial media menjadi salah satu kegiatan promosi wisata yang cukup efektif untuk meningkatkan kunjungan wisatawan. Peningkatan kunjungan wisatawan ini merupakan *demand pressure* yang memiliki pengaruh signifikan terhadap upaya peningkatan infrastruktur, terutama akses jalan menuju lokasi wisata (yang umumnya berada di perdesaan). Hasil observasi dan wawancara terhadap pengelola 25 kawasan wisata "baru" di Yogyakarta menegaskan pengaruh kunjungan wisatawan terhadap peningkatan infrastruktur, terutama akses jalan menuju kawasan tersebut. Selain akses jalan, peningkatan infrastruktur juga mencakup instalasi penerangan jalan dan distribusi air bersih ke lokasi wisata menggunakan tangki air ataupun pompa yang pengadaannya diinisiasi oleh masyarakat.

Di sisi lain, peningkatan kunjungan wisatawan memberikan insentif ekonomi bagi masyarakat sekitar melalui bagi hasil pengelolaan retribusi dan fasilitas wisata (seperti warung makan, penyewaan alat, ataupun toilet umum). Hal ini mendorong masyarakat untuk menginisiasi pengadaan infrastruktur yang menunjang kegiatan wisata.

DAFTAR PUSTAKA

[1] C. Jashi,*Significance of Social Media Marketing in Tourism*, 8th Silk Road International Conference "Development of Tourism in Black and Caspian Seas Regions", Georgia, 24-26 May 2013

[2] P. Madasu, "Social Media Marketing and Promotion of Tourism,"*Management Insight*, 2013, Vol. 9, No. 1

[3] K. Thompson, danP. Schofield, "An investigation of the relationship between public transport performance and destination satisfaction", *Journal of Transport Geography*, 2007, Vol. 15, pp. 136-144

[4] J. Khadaroo, danB. Seetanah, "The role of transport infrastructure in international tourism development: A gravity model approach", *Tourism Management*, 2008, Vol. 29, pp. 831-840

[5] B. Seetanah, "Does Infrastructure Matter in Tourism Development?", *University of Mauritius Research Journal*, 2011, Vol. 17, pp. 89-108

[6] O.A. Egbetokun, "Provision of Rural Infrastructure Oyo State Nigeria", *Agricultura, Agricultural Practice and Science Journal*, 2009, Vol. 69, No. 1-2, pp. 128-135

[7] W. Mulyana, "Rural-Urban Linkages: Indonesia Case Study". Working Paper Series No. 126. Working Group: Development with Territorial Cohesion for Development Program. RIMISP. Santiago, Chile, 2014

[8] *Report on the Achievement of the Millennium Development Goals*, BAPPENAS, 2010

[9] H. Kusharjanto, danD. Kim, "Infrastructure and human development: the case of Java, Indonesia." *Journal of the Asia Pacific Economy*, 2011, Vol. 16, No. 1, pp. 111-124

[10] D. Albalate, dan G. Bel, "Tourism and urban public transport: Holding demand pressure under supply constraints", *Tourism Management*, 2010, Vol. 31, pp. 425-433

[11] S.M. Frone, danD.F. Frone, "Water Supply and Sanitation Development as a Requirement for Sustainable Tourism Development in Romania", *Recent Researches in Tourism and Economic Development*, 2011, pp. 464-469

[12] T. Reardon,dkk. "Rural non-farm income in developing countries." *The state of food and agriculture* 1998, pp. 283-356.

[13] J.R. Davis,"The rural-non-farm economy, livelihoods and their diversification: Issues and options".*NRI Report no. 2753*. 2003

[14] S. Iwantoro, *Rural tourism–the impact on rural communities in Indonesia*. FFTC International Seminar on Rural Tourism, Korean Academy of Tourism and Agriculture. Choonchun, Korea. 1998

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN INDUSTRI KREATIF PEDESAAN MELALUI KOMERSIALISASI PRODUK UNGGULAN DAERAH (STUDI KASUS PADA KECAMATAN KAMANG MAGEK, KABUPATEN AGAM)

Lora Triana[1)], Faidil Tanjung[1)]

[1] Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

Email : lora.triana@gmail.com

Naskah diterima :10 Maret 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Kecamatan Kamang Magek merupakan salah satu daerah penghasil makanan ringan tradisional Sumatera Barat, yaitu kerupuk kamang. Pelaku usaha kerupuk kamang di daerah ini termasuk kategori usaha mikro. Sebagai salah satu makanan tradisional Sumatera Barat, kerupuk kamang belum dikenal seperti halnya kerupuk balado atau kerupuk sanjai. Padahal kerupuk kamang mempunyai potensi untuk dikembangkan, karena kerupuk kamang ini terbuat dari bahan alami serta bebas dari pewarna, pengawet dan penyedap rasa. Industri kerupuk kamang merupakan industry kreatif yang merupakan salah satu sumber perekonomian masyarakat setempat. Berdasarkan hal ini, maka tujuan penelitian adalah untuk mengkaji aspek-aspek yang bisa dikembangkan pada agroindustri kerupuk kamang, baik secara internal dan eksternal, sehingga bisa menjadi salah satu Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Agam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan observasi, kemudian dilakukan Focus Grup Discussion (FGD) dari hasil kajian lingkungan internal dan eksternal usaha. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlu upaya untuk meningkatkan sinergi antara pelaku usaha, pemerintah dan perguruan tinggi dalam pengembangan usaha kerupuk kamang. Solusi yan g dihasilkan melalui FGD adalah: 1) Melakukan sistem pemasaran satu pintu, 2) Membentuk koperasi untuk menghimpun modal, 3) Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kerupuk kamang, 4) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui pemanfaatan limbah kulit ubi kayu menjadi pakan ternak, 5) Membuat kontrak dengan penyedia bahan baku, 6) Melakukan diversifikasi produk kerupuk kamang, seperti memberikan inovasi rasa pada kerupuk kamang, sehingga produk lebih inovatif, 7) Menerapkan sistem pertanian terpadu.

***Kata kunci** : industri kretif, makanan tradisional, kerupuk kamang*

PENDAHULUAN

Krisis ekonomi sebagai akibat adanya krisis moneter yang terjadi sejak pertengahan Juli 1997, berakibat bangkrutnya perusahaan-perusahaan berskala besar, tetapi di sisi lain masih banyak usaha kecil dan menengah yang masih bertahan. Bahkan bisa dikatakan industri kecil ini mempunyai peran dalam menyelamatkan perekonomian nasional. Industri kecil cenderung menggunakan bahan baku lokal dan bahan baku impor yang kecil proporsinya. Produksinya tidak terlalu dipengaruhi depresiasi nilai rupiah, sehingga lebih tahan terhadap goncangan perekonomian global, meskipun sangat dipengaruhi oleh perubahan daya beli masyarakat [1].

Perkembangan jumlah UMKM periode 2010-2011 mengalami peningkatan sebesar 2,57 persen yaitu dari 53.823.732 unit pada tahun 2010 menjadi 55.206.444 unit pada tahun 2011. UMKM merupakan pelaku usaha terbesar dengan persentasenya sebesar 99,99 persen dari total pelaku usaha nasional tahun 2011 [2].

Sumatera Barat merupakan daerah yang mengalami peningkatan jumlah UMKM pada tahun 2012. Data ini dibandingkan dengan data jumlah UMKM tahun 2011. Pada tahun 2011, usaha mikro di Sumatera Barat berjumlah 57.987 unit dan tahun 2012 meningkat menjadi 71.413 unit. Pertumbuhan ini meningkat sebesar 23,15 persen. [3].

Ibukota Provinsi Sumatera Barat, yaitu Kota Padang Merupakan daerah yang paling tinggi jumlah unit usaha mikro di Sumatera Barat. Kabupaten Agam merupakan daerah terbanyak yang memiliki jumlah unit terbesar setelah Kota Padang, yaitu sebesar 41,762 unit. Di Kabupaten Agam, jenis industri berdasarkan skala

usahanya yang paling besar adalah industri kecil, jika dibandingkan dengan industri besar. Industri sandang merupakan industri terbesar, yaitu sebanyak 2770 unit, selanjutnya industri pangan sebesar 2376 unit.

Industri pangan atau industri yang bergerak dalam bidang pengolahan makanan adalah industri yang mengubah bahan mentah menjadi makanan. Industri yang mengolah bahan mentah yang berasal dari hasil pertanian disebut agroindustri.

Salah satu bahan mentah hasil pertanian yang banyak digunakan dalam industri pangan di Kabupaten Agam yaitu ubi kayu. Ubi kayu diolah menjadi makanan berupa aneka kerupuk yang menjadi khas Kabupaten Agam, salah satunya adalah kerupuk sanjai yang terkenal sebagai oleh-oleh khas Sumatera Barat. Selain kerupuk sanjai, banyak kerupuk yang menggunakan ubi kayu sebagai bahan utamanya, yaitu; karak kaliang, dakak-dakak. Kerupuk tersebut dijual dalam bentuk siap konsumsi. Namun, ada juga yang dijual dalam bentuk mentah atau belum siap konsumsi, salah satunya adalah kerupuk kamang.

Kerupuk Kamang merupakan salah satu kerupuk yang dibuat dari ubi kayu. Sesuai namanya, kerupuk kamang berasal dari daerah Kamang (tepatnya di Kecamatan Kamang Magek), Bukittinggi, Sumatera Barat. Karena berasal dari Kamang, maka banyak masyarakat di daerah ini yang memproduksi kerupuk kamang. Usaha kerupuk kamang merupakan usaha mikro yang berbahan baku hasil pertanian yang menjadi produk unggulan daerah ini. Sebagai salah satu makanan tradisional Sumatera Barat, kerupuk kamang belum dikenal seperti halnya keripik balado atau kerupuk sanjai. Padahal kerupuk kamang ini punya potensi untuk dikembangkan dan menjadi salah satu oleh-oleh khas Sumatera Barat. Pertimbangan kerupuk ini berpotensi untuk dikembangkan yaitu; 1) tingkat daya tahan produk cukup tinggi, karena produk ini dijual dalam bentuk mentah, sehingga menjadikan kerupuk ini tahan lama, 2) Kerupuk Kamang ini segmen pasarnya bisa lebih luas dibanding kerupuk yang citarasanya pedas, karena orang yang tidak suka pedas, bisa mengkonsumsi kerupuk ini,dan 3) Kerupuk Kamang terbuat dari bahan alami, tidak ada bahan kimia dan penyedap rasa dalam proses pembuatannya.

Berdasarkan keunggulan yang dimiliki kerupuk kamang, maka kerupuk kamang berpotensi untuk dijadikan Produk Unggulan Daerah (PUD). Merujuk pada **Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pengembangan Produk Unggulan Daerah**, maka peneliti tertarik untuk mengkaji pengembangan terhadap usaha kerupuk kamang sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD), dengan judul penelitian "**Kajian Pengembangan Agroindustri Berbasis Produk Unggulan Daerah (PUD) Di Kabupaten Agam**".

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendapatkan aspek-aspek yang bisa dikembangkan pada agroindustri kerupuk kamang, sehingga bisa menjadi salah satu Produk Unggulan Daerah (PUD) di Kabupaten Agam. Berikut uraian tujuan penelitian:

a. Mendeskripsikan profil usaha mikro kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek, Kabupaten Agam.
b. Merumuskan aspek internal dan aspek eksternal yang ada pada agroindustri kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek.
c. Mengkaji aspek-aspek yang dapat dikembangkan pada usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek sebagai Produk Unggulan Daerah (PUD).

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Pada metode kualitatif, peneliti sebagai *human instrument* dan teknik pengumpulan data *participant observation* (observasi berperan serta) dan *in depth interview* (wawancara mendalam), maka peneliti harus berinteraksi dengan sumber data. Penelitian kualitatif tidak melakukan generalisasi, tetapi lebih menekankan kedalam informasi sehingga sampai pada tingkat makna [4].

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh agroindustri yang aktif memproduksi kerupuk Kamang di Kecamatan Magek ketika penelitian dilaksanakan. . Aktif maksudnya disini yaitu, usaha tersebut berproduksi secara kontiniu.Sampel sumber data akan dipilih secara *purposive sampling* dan bersifat *snowball sampling*. *Purposive sampling* maksudnya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu [4].

Pada penelitian kualitatif, sampel disebut sebagai narasumber. Kriteria narasumber yang dipilih berdasarkan populasi yang ada yaitu pengusaha kerupuk kamang yang telah mendapat binaan dari pihak pemerintah atau pihak perguruan tinggi. Informasi ini akan diperoleh melalui informasi dari pemerintah kecamatan setempat. Alasan pemilihan usaha yang telah dibina diharapkan agar informasi yang dibutuhkan tentang segala aspek yang ada pada sebuah usaha mikro didapat secara lengkap.

Pemilihan sampel dilanjutkan dengan *snowball sampling*. Menurut Sugiyono [4], *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sampel yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan. *Snowball sampling* akan dilakukan jika informasi dari narasumber yang dipilih berdasarkan purposive sampling belum lengkap untuk dijadikan landasan dalam perumusan pengembangan usaha mikro kerupuk kamang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penduduk Kecamatan Kamang Magek sebagian besar bermata pencaharian pokok sebagai petani dan persentasenya diantara mata pencaharian yang lain sangat besar yaitu lebih kurang 84 %, dari seluruh mata pencaharian yang ada di Kecamatan Kamang Magek . Mata pencaharian ini diwarisi secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat dahulunya, dan juga ditunjang oleh kondisi lingkungan alam yang luas untuk pengembangannya. Jenis tanaman yang paling utama dibidang pertanian adalah padi, dengan mayoritas padi unggul local. Bahkan hasil-hasil pertanian terutama beras diproduksi keluar daerah seperti Pekan Baru, Jambi. Untuk sektor perkebunan terdapat tanaman Duria, Manggis, Kakao, Jeruk, kelapa,cengkeh, kulit manis dan lainnya yang dimiliki oleh rakyat. Sedangkan di sektor petenakan, hewan ternak yang di pelihara adalah jenis kambing, sapi, kerbau, ayam buras, ayam pedaging, itik, dan kelinci.

Selain bermata pencaharian sebagai petani, lebih kurang 16 % penduduk bermata pencaharian beragam seperti Pedagang, tukang, pegawai negeri, pegawai nagari, perawat, bidan dan pengacara.Berdagang adalah ciri khas keahlian yang dimiliki oleh masyarakat Minangkabau, juga tercermin pada masyarakatKecamatan Kamang Magek. Mereka berdagang dilingkunggan tempat tinggal mereka yaitu pasar-pasar terdekat jauhnya 3 km, dan 3 kali dalam seminggu yaitu hari Senin, Selasa dan Jumat. Untuk hari selain hari-hari tersebut mereka tetap berdagang dimana ada pasar, walaupun jauhnya mencapai 9 km seperti Pakan Kamis. Produk yang mereka jual yaitu hasil dari pertanian, seperti buah dan sayur , serta produk olahan seperti makanan tradisonal dari ubi, talas, ketan, dan juga produk khas daerahdari ubi yang disebut Karupuak kamang.

Data mengenai profil usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek didapat dari pelaku usaha kerupuk kamang yang tergabung ke dalam anggota gabungan kelompok tani (Gapoktan). Gapoktan ini bernama Kamek (Kamang Magek) yang khusus membina pelaku usaha kerupuk kamang yang berada di Kecamatan Kamang Magek. Ketua Gapoktan ini bernama Ibu Zethelmi. Kelompok tani yang berada di dalam Gapoktan Kamek ini berjumlah delapan kelompok tani. Adapun daftar nama kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan Kamek adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Daftar Kelompok Tani Usaha Kerupuk Kamang Di Kamang magek

No	Nama Kelompok Tani	Jumlah Anggota	Kenagarian
1.	Pranchise	25	Kamang Magek
2.	Saraso Pulai	22	Kamang Magek
3.	Magek Saondoh	10	Kamang Magek
4.	Mekar Rasa	51	Kamang Hilir
5.	Indah Sari	33	Kamang Hilir
6.	Usaha Ibu	13	Kamang Hilir
7.	Suka Jadi	20	Kamang Mudik
8.	Kampung Saiyo	17	Kamang Mudik

Sumber : Data Profil Usaha Mikro Kecamatan Kamang Magek

Pelaku usaha yang diwawancarai dalam penelitian ini adalah pelaku usaha yang tergabung dalam kelompok tani dan ditemui secara acak. Selanjutnya pelaku usaha yang dijadikan sampel penelitian ini disebut sebagai narasumber. Jumlah narasumber sebanyak 38 pelaku usaha kerupuk kamang.

Pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik *snowball sampling*. Menurut Sugiyono, 2013:219, *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-lama menjadi besar. Hal ini dilakukan karena jumlah sampel yang sedikit tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan.

Dari hasil wawancara dan observasi lapangan, 38 narasumber sudah cukup untuk menggali informasi tentang profil pelaku usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek. Dari jumlah pelaku usaha karupuak kamang, maka diketahui bahwa tingkat pendidikan terakhir yang di tempuh masing – masing pelaku usaha berbeda, dalam usaha rumah tangga ini dapat dilihat bahwa jumlah pelaku usaha yang tamat sekolah dasar (SD) sebanyak 11%, Sekolah menengah pertama (SMP) 18%, Sekolah menengah atas (SMA) 55%, dan setara

sarjana (S1) 16%. Data ini menunjukan bahwa jumlah pelaku usaha kerupuk kamang diatas rata – rata yaitu telah menamatkan pendidikan di tingkat SMA dan setara S1.

Kerupuk kamang merupakan komoditi unggulan di daerah kecamatan Kamang Magek yang telah berkembang mulai dari beberapa dekade yang lalu, untuk itu bisa di lihat dari pengalaman lama berusaha oleh pelaku usaha yaitu dengan pengalaman usaha kecil dari 5 tahun yaitu hanya 15% , pengalaman berusaha 5 sampai 10 tahun yaitu 29% , sedangkan pengalaman berusaha lebih dari 10 tahun yaitu sebesar 58%. Dari data ini telah diketahui bahwa mayoritas usaha kerupuk kamang telah digeluti masyarakat Kecamatan Kamang Magek lebih dari 10 tahun bahkan telah turun temurun. Gambaran ini dapat menjadi acuan bahwa usaha ini telah mampu berkontribusi dalam memberikan pendapatan rumah tangga bagi pelaku usaha sejak puluhan tahun yang lalu, sehingga usaha ini masih berkembang hingga saat ini.

Usaha kerupuk kamang ini merupakan usaha keluarga yang diusahakan secara turun temurun. Karena merupakan usaha keluarga, pendapatan yang diperoleh dari usaha ini digunakan untuk membiayai anggota keluarga.

Pelaku usaha kerupuk kamang berproduksi rata-rata 5 – 7 hari seminggu. Hanya 2 narasumber yang berproduksi 4 hari dalam seminggu. Ini karena keterbatasan pendukung produksi yang dimiliki narasumber, dimana mereka tidak memiliki mesin untuk mendukung proses produksi. Pelaku usaha yang berproduksi setiap hari, pada umumnya adalah mereka yang tidak mempunyai pekerjaan lain selain memproduksi kerupuk kamang. Jadi kerupuk kamang adalah sumber pendapatan utama mereka. Disisi lain, jumlah produksi mereka rendah, hanya mengolah ubi kayu sebanyak 10 kg/hari.

Proses produksi masih menggunakan tekhnologi sederhana. Penggunaan tekhnologi mesin berupa mesin penumbuk dan mesin penggiling, namun belum banyak pelaku usaha yang menggunakan kedua mesin ini, karena harganya yang cukup mahal, yaitu Rp 7.500.000,- untuk kedua mesin tersebut. Mesin penumbuk berfungsi untuk menghancurkan ubi kayu yang sudah direbus. Jika pelaku usaha tidak memiliki mesin ini, maka alternatifnya adalah dengan sistem upah atau mengupahkan kepada pelaku usaha yang mempunyai mesin. Mesin penggiling berfungsi untuk memipihkan adonan yang sudah dihancurkan. Jika tidak mempunyai mesin ini, pelaku usaha menggunakan ampia. Penggunaan ampia ini akan memakan waktu yang lebih lama karena diputar secara manual.

Sumber bahan baku, yaitu ubi kayu, berasal dari daerah sekitar lokasi usaha. Ini bertujuan agar biaya transportasi bahan baku menjadi lebih murah. Untuk pembelian bahan baku, ada yang dibeli ke lokasi tempat bahan baku, ada yang diantar oleh supplier bahan baku secara kontinue. Daerah asal bahan baku ada yang dari daerah Kamang sendiri, Gadut dan yang terjauh adalah Payakumbuh. Menurut pelaku usaha, ubi kayu yang paling baik kualitasnya adalah yang berasal dari Gadut.

Sistem distribusi usaha kerupuk kamang dapat digambarkan sebagai berikut:

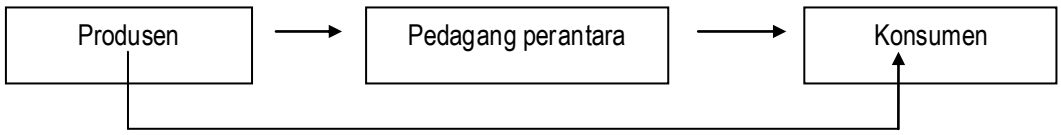

Gambar 1. Skema sistem distribusi kerupuk kamang

Dari gambar diatas, sistem distribusi kerupuk kamang melalui 2 jalur, ada yang langsung dari pelaku usaha ke konsumen dan ada yang melalui pedagang perantara. Berdasarkan informasi, narasumber ada yang menjual sendiri kepasar dan ada yang datang ke lokasi usaha. Keterangan dari narasumber, kerupuk kamang yang dijual ke pasar, ada yang dibeli oleh pedagang perantara dan ada yang dibeli langsung oleh konsumen akhir. Begitu juga dengan orang yang yang datang langsung ke lokasi usaha, ada yang merupakan pedagang perantara dan ada juga yang merupakan konsumen akhir. Pelaku usaha menggunakan jasa pedagang perantara karena tidak mampu memasarkan produk ke luar daerah dan produk yang dihasilkan juga banyak sehingga memburuhkan pedagang perantara untuk memasarkannya.

Menurut Tjiptono [5], perantara dibutuhkan terutama karena adanya beberapa kesenjangan antara produsen dan konsumen. Kesenjanagan itu adalah : 1) *Geographical gap*, yaitu gap yang disebabkan oleh tempat pemusatan produksi dan lokasi konsumen yang tersebar dimana-mana, 2) *Time gap*, yaitu kesenjangan yang terjadi karena adanya kenyataan bahwa pembelian atau konsumsi dilakukan hanya pada waktu-waktu tertentu, 3) *Quantity gap*, yaitu gap yang terjadi karena jumlah baran yang dapat diproduksi secara ekonomis berbeda dengan kuantitas normal yang diinginkan konsumen, 4) *Assortment gap*, yaitu situasi dimana produsen umumnya berspesialisasi pada produk tertentu, sedangkan konsumen menginginkan produk yang beraneka ragam, dan 5) *Communication and information gap*, yaitu gap yang timbul karena konsumen tidak tahu dimana

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

sumber-sumber produksi yang menghasilkan produk yang diinginkan, di lain pihak produsen tidak tahu siapa dan dimana pembeli potensial berada.

Pada umumnya pelaku usaha kerupuk kamang belum pernah mendapat bantuan dari pemerintah atau pihak lain. Jadi usaha yang mereka kelola merupakan modal sendiri. Hanya 3 dari 38 narasumber yang telah mendapat bantuan dan 3 narasumber tersebut juga telah memiliki izin PIRT dan Dinkes. Bagi pelaku usaha, izin PIRT merupakan salah satu kekuatan untuk dapat mengajukan pinjaman kepada pihak bank.

Kajian Lingkungan Internal

Proses audit internal merupakan identifikasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki industri. Tidak satupun industri yang mempunyai kekuatan dan kelemahan yang sama di semua bidang.

Kerupuk kamang merupakan kerupuk khas daerah Kamang Magek. Nama kerupuk kamang diambil dari nama daerah penghasil kerupuk kamang tersebut. Dahulunya wilayah Kamang dan Magek adalah merupakan dua wilayah yang akhirnya disatukan menjadi Kecamatan Kamang Magek.

Kerupuk kamang mempunyai ciri khas yang berbeda dengan kerupuk khas daerah Sumatera Barat lainnya. Kerupuk ini bentuknya bulat tipis, berwarna putih dan dijual dalam kondisi mentah atau belum digoreng. Ciri khas kerupuk kamang ini terletak pada ukurannya yang tidak terlalu besar, yaitu diameternya sekitar 6 cm dan potongan daun bawang yang terlihat pada kerupuk tersebut.

Bahan baku utama dari kerupuk kamang adalah ubi kayu. Sedangkan bahan penolong terdiri atas bawang putih, daun bawang dan garam. Untuk pengemasan, narasumber masih menggunakan kemasan bungkus plastik. Sebanyak 100 kerupuk di ikat dengan tali raffia kemudian sebanyak empat ikatan dikemas dalam plastik kemudian diikat dengan karet.

Tidak ada label dalam kemasannya. Kondisi kemasan yang masih sangat sederhana menjadikan usaha kerupuk kamang ini sulit untuk berkembang. Dari 38 narasumber, hanya 3 narasumber yang mempunyai merk pada kemasan kerupuk kamangnya. Jadi secara keseluruhan, pelaku usaha kerupuk kamang belum memiliki merk pada kemasan produk.

Usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek ini masih tergolong usaha mikro. Jumlah tenaga kerja rata-rata 2-3 orang. Berdasarkan hasil wawancara, usaha yang dikelola merupakan usaha turun temurun dari orangtua. Jadi keahlian membuat kerupuk didapat dari orang tua para pelaku usaha.

Proses produksi kerupuk kamang dapat digambarkan sebagai berikut:

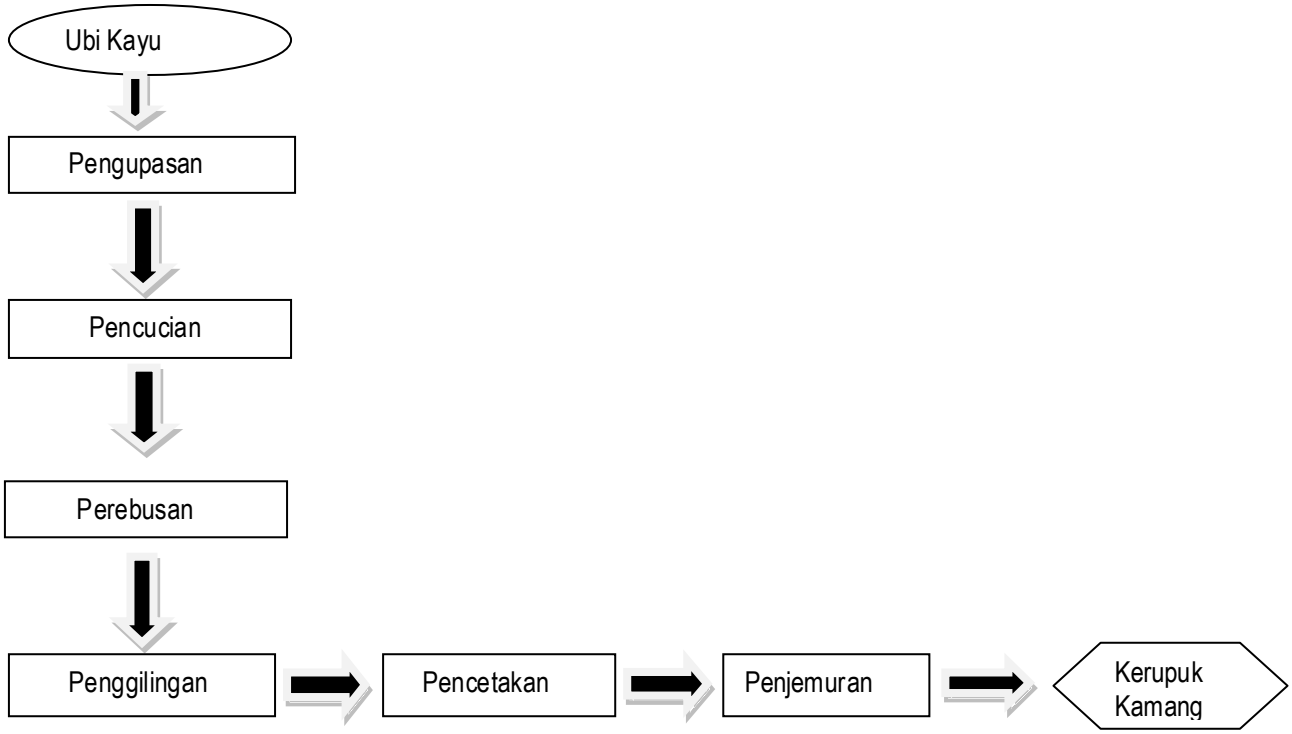

Gambar 2. Bagan Proses Produksi Kerupuk Kamang

Proses produksi masih menggunakan tekhnologi sederhana. Penggunaan tekhnologi mesin berupa mesin penumbuk dan mesin penggiling, namun belum banyak pelaku usaha yang menggunakan kedua mesin ini,

ISBN : 978-602-73463-1-4

karena harganya yang cukup mahal, yaitu Rp 7.500.000,- untuk kedua mesin tersebut. Mesin penumbuk berfungsi untuk menghancurkan ubi kayu yang sudah direbus. Jika pelaku usaha tidak memiliki mesin ini, maka alternatifnya adalah dengan sistem upah atau mengupahkan kepada pelaku usaha yang mempunyai mesin. Mesin penggiling berfungsi untuk memipihkan adonan yang sudah dihancurkan. JIka tidak mempunyai mesin ini, pelaku usaha menggunakan ampia. Penggunaan ampia ini akan memakan waktu yang lebih lama karena diputar secara manual.

Faktor lain yang menjadi permasalahan dalam usaha kerupuk kamang ini adalah bervariasinya harga yang ditetapkan oleh para pelaku usaha. Kerupuk kamang ini dijual per pack nya berkisar Rp 12.000,- s/d Rp 15.000,-. Per pack ini memiliki berat ± 600gr, tergantung kepada ketebalan kerupuk kamang tersebut. Sebagian besar harga yang ditetapkan masih dipengaruhi oleh pedagang perantara. Pelaku usaha belum memiliki posisi tawar menawar harga yang kuat, karena masih banyak pelaku usaha kerupuk kamang lainnya yang bersedia menjual dengan harga lebih rendah.

Sistem pemasaran produk kerupuk kamang pada umumnya adalah pelaku usaha melakukan penjualan langsung ke pasar-pasar tradisional. Dari 3 narasumber, hanya 2 orang yang memasarkan produknya melalui toko sentra oleh-oleh Christine Hakim. Selain memasarkan langsung kepasar tradisional, sistem lainnya adalah melalui pedagang perantara yang datang ke lokasi usaha dan mendistribusikan ke luar daerah, mulai dari daerah di Sumatera Barat sampai ke luar Sumatera Barat, seperti Jakarta dan Pekanbaru.

Kajian Lingkungan Eksternal

Tujuan audit eksternal adalah membuat daftar terbatas mengenai berbagai peluang yang dapat menguntungkan perusahaan dan berbagai ancaman yang harus dihindari. Audit eksternal ditujuakan untuk mengidentifikasi variabel-variabel kunci yang dapat memberikan respon yangb dapat dilaksanakan [6].

Peranan pemerintah Kecamatan Kamang Magek adalah melakukan pembinaan terhadap pelaku usaha melalui Gapoktan Kamek. Pembinaan berupa mengikuti pameran serta pelatihan bagi ketua gapoktan dan poktan. Namun masih banyak pelaku usaha yang belum mendapat pembinaan dari pemerintah setempat.

Pesaing kerupuk kamang ini adalah kerupuk sanjai yang sudah sangat terkenal sebagai kerupuk khas Sumatera Barat. Kerupuk sanjai ini juga berbahan baku ubi kayu. Bedanya, kerupuk kamang dijual dalam bentuk mentah, sehingga lebih tahan lama dan diberi campuran bumbu yang membuat rasa kerupuk kamang ini lebih gurih dibanding kerupuk sanjai.

Menurut Kasmir [7], Hal-hal yang perlu diketahui dari pesaing dan terus menerus kita pantau adalah produk pesaing, baik mutu, kemasan, label atau lainnya. Kita bandingkan kelebihan produk yang dimiliki pesaing berikut kelemahan yang dimilikya, dengan produk kita.

Dalam hal ini, pelaku usaha kerupuk kamang harus terus mengamati setiap gerak gerik pesaing. Pelaku usaha kerupuk kamang juga harus mampu melakukan inovasi untuk dapat menghadapi pesaing.

***Focus Grup discussion* (FGD)**

FGD dilakukan setelah semua data dari narasumber sudah dianalisis oleh peneliti. FGD melibatkan tiga pihak yang berkepentingan dalam mengambil keputusan untuk pengembangan usaha kerupuk kamang di Kecamatan Kamang Magek. Dari pihak pelaku usaha, peserta FGD adalah ketua gapoktan, Ibu Zethelmi dan 9 orang pelaku usaha yang rutin dalam memproduksi kerupuk kamang. Dari pihak pemerintah, dihadiri oleh Waliganari Kamang Magek, beserta sekretaris Walinagari. Dari pihak perguruan tinggi, narasumber yaitu Bapak DR.Nofialdi, SP.MSi dan Ibu Ir. Zelfi Zakir, MSi. Kedua narasumber dari perguruan tinggi ini merupakan dosen Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, UNAND yang memiliki kompetensi di bidang kewirausahaan.

Dari hasil FGD, didapat beberapa poin yang menjadi masalah yang dihadapi pelaku usaha kerupuk kamang, yaitu:

1. Masalah penetapan harga produk dan harga produk yang tidak seragam oleh pelaku usaha.Hal ini disebabkan oleh harga bahan baku yang bervariasi yang didapat oleh setiap pelaku usaha, sehingga harga produk pun berbeda bagi tiap pelaku usaha.
2. Pemasaran yang masih lemah, belum bisa memasarkan produk dengan sistem yang lebih baik. Pemasaran produk masih sebatas pasar tradisional, belum menembus pasar modern.
3. Kekurangan modal dalam menjalankan usaha, masih banyak pelaku usaha yang belum memiliki mesin penumbuk dan mesin penggiling untuk meningkatkan produktivitas usaha. Selain itu, pelaku usaha juga belum ada izin PIRT, sehingga menyulitkan akses untuk meminjam ke pihak bank.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

4. Produktivitas ubi kayu sebagai sumber bahan baku yang masih terbatas. Kurangnya akses pelaku usaha dalam mendapatkan bahan baku, sehingga ada saat pelaku usaha tidak berproduksi karena tidak ada bahan baku.
5. Belum ada manajemen usaha yang baik bagi pelaku usaha. Pelaku usaha tidak mengetahui seberapa besar keuntungan yang diperoleh dari setiap produk yang terjual.
6. Belum bisa bersaing dengan produk unggulan lainnya, seperti kerupuk sanjai.

Solusi yang dihasilkan melalui FGD ini untuk mengembangkan usaha kerupuk kamang adalah:

1. Melakukan sistem pemasaran satu pintu. Disini para pelaku usaha membentuk kelompok yang mengkoordinir penjualan kerupuk kamang, sehingga diharapkan terciptanya standarisasi harga, yaitu satu harga untuk semua pelaku usaha.
2. Membentuk koperasi untuk menghimpun modal, sehingga anggota koperasi bisa melakukan pinjaman untuk meningkatkan produkstivitas usaha. Koperasi ini juga bisa untuk mengkoordinir sistem pemasaran satu pintu.
3. Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kerupuk kamang bagaimana memenej usaha dengan baik, memberikan pelatihan bagaimana menghitung keuntungan usaha.
4. Meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui pemanfaatan limbah kulit ubi kayu menjadi pakan ternak. Pelaku usaha diberi pelatihan bagaimana mengolah limbah kulit ubi kayu menjadi pakan ternak.
5. Membuat kontrak dengan penyedia bahan baku, sehingga ketersediaan bahan baku dapat selalu terjaga.
6. Melakukan sistem pertanian terpadu, dimana pelaku usaha membentuk kelompok yang mengelola pertanian terpadu, seperti menanam ubi kayu dan beternak. Limbah kulit ubi kayu untuk pengolahan kerupuk kamang bisa dijadikan pupuk untuk tanaman dan pakan ternak. Sehingga tercipta siklus pertanian yang saling menguntungkan.
7. Adanya standarisasi rasa pada kerupuk kamang.
8. Melakukan diversifikasi produk kerupuk kamang, seperti memberikan inovasi rasa pada kerupuk kamang, sehingga produk lebih inovatif.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Kerupuk Kamang merupakan produk unggulan di Kecamatan Kamang Magek untuk produk pengolahan hasil pertanian. Usaha kerupuk kamang ini masih berskala usaha mikro. Dalam upaya untuk mengembangkan usaha kerupuk kamang ini, ada beberapa hambatan yang muncul, yaitu: 1) Masalah penetapan harga produk dan harga produk yang tidak seragam oleh pelaku usaha, 2) Pemasaran yang masih lemah, belum bisa memasarkan produk dengan sistem yang lebih baik, 3) Kekurangan modal dalam menjalankan usaha, 4) Produktivitas ubi kayu sebagai sumber bahan baku yang masih terbatas, 5) Belum ada manajemen usaha yang baik bagi pelaku usaha, 6) Belum bisa bersaing dengan produk unggulan lainnya, seperti kerupuk sanjai.

Solusi yang dihasilkan melalui FGD ini adalah: 1) Melakukan sistem pemasaran satu pintu. Disini para pelaku usaha membentuk kelompok yang mengkoordinir penjualan kerupuk kamang, sehingga diharapkan terciptanya standarisasi harga, 2) Membentuk koperasi untuk menghimpun modal, 3) Memberikan pelatihan kepada pelaku usaha kerupuk kamang bagaimana memenej usaha dengan baik, memberikan pelatihan bagaimana menghitung keuntungan usaha, 4) Meningkatkan pendapatan pelaku usaha melalui pemanfaatan limbah kulit ubi kayu menjadi pakan ternak. Pelaku usaha diberi pelatihan bagaimana mengolah limbah kulit ubi kayu menjadi pakan ternak, 5) Membuat kontrak dengan penyedia bahan baku, sehingga ketersediaan bahan baku dapat selalu terjaga, 6) Melakukan diversifikasi produk kerupuk kamang, seperti memberikan inovasi rasa pada kerupuk kamang, sehingga produk lebih inovatif, 7) Menerapkan sistem pertanian terpadu.

Saran

1. Bagi pemerintah, sebaiknya lebih fokus dalam membina produk kerupuk kamang sebagai produk unggulan Kecamatan Kamang Magek, dengan cara memberikan pelatihan kewirausaahan bagi pelaku usaha dan selalu meyertakan produk kerupuk kamang di berbagai pameran dagang sebagai bentuk promosi yang efektf.
2. Bagi pihak perguruan tinggi, bisa berperan dengan cara memberikan penyuluhan dan pembinaan yang terkait dengan pengembangan usaha kerupuk kamang.

ISBN : 978-602-73463-1-4

3. Bagi pelaku usaha, agar lebih menjalin kerjasama yang baik antar pelaku usaha kerupuk kamang sehingga posisi pelaku usaha dalam menetapkan harga lebih kuat.Pelaku usaha juga seharusnya lebih giat dalam memasarkan produknya ke pasar modern.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Said, Adri dan N. Ika Widjaja. 2007. *Akses Keuangan UMKM; Buku Panduan Untuk Membangun Akses Pembiayaan bagi Usaha Menengah, Kecil dan Mikro Dalam Konteks Pembangunan Daerah*. Jakarta

[2] www. depkop.go.id. *narasi_statistik_umkm 2010-2011*.

[3] www.bps.go.id. *Jumlah Perusahaan Industri Mikro dan Kecil Menurut Provinsi, 2013-2014*.

[4] Sugiyono, Prof.Dr. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D.* Cetakan ke 18. Penerbit Alfabeta. Bandung.

[5] Tjiptono, Fandy. 2008. *Strategi Pemasaran*. Edisi III. Penerbit Andi. Yogyakarta

[6] David, Fred.R. 2004. *Manajemen Strategis-Konsep-Konsep*. Edisi Sembilan. PT Indeks Kelompok Gramedia. Jakarta

[7] Kasmir. 2016. *Kewirausahaan*. Edisi Revisi. PT RajaGrafindo Persada. Jakarta.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MENAKAR PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM ENGEMBANGAN LOSARI SEBAGAI RUANG PUBLIK

Slamet Trisutomo[1)], Mukti Ali[2)], Nuni Andriani Daunun[3)]

[1] Kepala Laboratorium *Waterfront Planning* PWK Unhas
[2] Peneliti Laboratorium *Waterfront Planning* PWK Unhas
[3] Mahasiswa Tugas Akhir Laboratorium *Waterfront Planning*PWK Unhas

Email: trisutomo@gmail.com

Naskah diterima :13 Maret 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 22 Maret 2017

ABSTRAK

Ruang publik Losari Makassar sebagai hasil reklamasi pantai telah dikenal sangat luas, dan kini berhasil menjadi salah satu ikon Makassar. Sejalan dengan program Makassar menuju kota dunia, ruang publik di pantai ini perlu dievaluasi dan dikembangkan perencanaan kualitasnya lebih lanjut. Penelitian ini bertujuan untuk menakar partisipasi masyarakat dalam menyusun perencanaan tersebut. Pengunjung sebanyak 180 orang terpilih secara aksidental sebagai partisipan. Kepada mereka ditanyakan, bagaimana penilaian terhadap kondisi kualitas fasilitas ruang publik,dan bagaimana strategi untuk peningkatannya. Analisis kuantitatif distribusi dan frekuensi diaplikasikan untuk menakar partisipasi dalam bentuk pernyataan persepsi dan pendapat terhadap kualitas fasilitas ruang publik Losari. Metode AHP dengan melibatkan pemangku kepentingan diaplikasikan untuk menentukan peringkat kriteria pengembangan lanjut. Analisis IFAS – EFAS menjadi dasar penentuan kuadran strategi SWOT. Kesimpulan penelitian ini bahwa dalam rangka mewujudkan Makassar kota dunia, pengunjung dan pemangku kepentingan telah memberikan partisipasi dalam penilaian dan penyusunan strategi perencanaan pengembangannya.

Kata kunci: *ruang publik Losari, perencanaan partisipatif, AHP dan SWOT*

PENDAHULUAN

Anjungan pantai Losari di Makassar dalam dasawarsa terkahir dikenal sebagai ruang publik hasil reklamasi pantai. Hasil sayembara di tahun 93, pesisir kota di Selat Makassar ini direklamasi sepanjang 935 meter dan menghasilkan ruang publik seluas 4,3 ha[1] . Saat ini Losari memiliki 3 anjungan dengan nama etnik, yaitu anjungan Losari di tengah, Bugis Makasar di sisi selatan, dan Toraja-Mandar di sisi utara. Masing-masing anjungan menampilkan keunikan patung etnik antara lain patung tarian adat, arsitektur tradisional, tari paraga, becak Makassar dan patung pahlawan pejuang Sulsel; ini semua menggambarkan kekayaan budaya Sulsel Memiliki posisi srategis di jantung kota serta panorama matahari terbenam yang indahdan berudara laut yang segar, anjungan pantai Losari benar-benar menjadi ruang publik yang menarik. Setiap hari, pagi maupun sore, terutama di akhir pekan, ribuan warga maupun wisatawan datang menikmati suasana yang menyenangkan. Disemarakkan dengan berbagai acara seperti pentas musik, basar kuliner, pameran dan promosi komersial, Losari benar-benar menjadi ruang publik ikon kota Makassar.

Dalam masa jabatan Walikota saat ini, Makassar ingin merealisasikan visi misinya yaitu Makassar Menuju Kota Dunia. Meskipun masih memerlukan pemahaman lebih jelas maknanya, kota dunia yang dimaksud terkait dengan adanya fasilitas kota yang kualitasnya setara dengan kota-kota berskala dunia. Berbagai program dan kegiatan dilakukan oleh Pemkot Makassar untuk mewujudkan visi misi menjadi kota dunia tersebut, antara lain dengan membangun prasarana dan fasiltas kota serta mengisinya dengan *event* berskala dunia.

Sejalan dengan visi misi menjadi kota dunia tersebut, penelitian [1] menyimpulkan bahwa Losari mesih perlu dikembangkan lebih jauh lagi agar setaraf dengan ruang publik kota dunia. Selama ini perencanaan selalu didominasi oleh gagasan dari atas (*top-down planning*) tanpa mendengarkan aspirasi masyarakat pengguna.Penelitian ini bertujuan menakar aspirasi masyarakat sebagai upaya mengembangkan perencanaan dengan partisipasi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini sengaja memilih Losari sebagai obyek (Gambar 1). Jenis penelitian ini mengkombnasikanmetode kualitatif dan kuantitatif. Analisis kualitatif digunakan untuk menggali partisipasi dan persepsi pengunjung Losari terhadap kualitas ruang publik. Pengunjung Losari pada hari kerja dan hari Minggu dipilih secara aksidental, dan menghasilkan pilihan sebanyak 180 orang sebagai partisipan. Kepada mereka ditanyakan penilaiannya terhadap kualitas dan fasilitas Losari sebagai ruang publik

Gambar 1. Losari di Makassar

Analisis AHP diaplikasikan untuk menentukan peringkat kriteria (bobot) yang dijadikan dasar untuk analisis strategis. AHP ini melibatkan para pemangku kepentingan, yaitu pengunjung Losari, staf Pemkot Makassar, pengelola Losari, dan akademisi. Selanjutnya untuk menyusun strategi pengembangan perencanaan, analisis SWOT dan *external factor analysis srategy* (EFAS) dan *internal factor analysis strategy* (IFAS)diaplikasikan dan menghasilkan 4 kuadran strategis[2] [3]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden

Dengan 180 pengunjung Losari yang dipilih secara aksidental sebagai responden, profil mereka adalah berikut

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1. Profil responden

No	Uraian	Distribusi (%)
1	Jumlah sampel	180 (100%)
2	Rincian sample	Pria = 86 (47,7%) Women= 94 (52,3%)
4	Pekerjaan	PNS = 21 (11,66%) Pelajar/mahasiswa = 91 (50,55%) Wiraswasta = 38 (21,11%) Lainnya = 30 (16,66%)
5	Frekuensi kunjungan dalam 1 bulan terakhir	Jarang sekali = 85 (47,22%) Sering = 83 (46,11%) Sering sekali = 12 (6,67%)
6	Maksud kunjungan	Menikmati keindahan = 58 (32,22%) Menghadiri acara = 3 (1,66%) Kuliner = 23 (12,77%) Olah raga = 15 (8,33%) Berdagang = 9 (5%) Berkumpul keluarga/teman = 67 (37,22%) Lainnya = 5 (2,77%)

Sumber: survey 2016

Penilaian terhadap fasilitas Losari

Setiap responden diminta memberi penilaian terhadap 9 fasilitas yang ada di Losari yaitu parkir, toilet, art gallery, lapak PKL, masjid, tempat sampah, tempat duduk, perahu bebek, dan kran air siap minum. Penilaian menggunakan skala Likert antara 1 (sangat buruk) sampai 5 (sangat baik). Hasilnya menunjukkan bahwa pada umumnya 9 fasilitas sebagian besar dinilai antara sedang dan baik. Khusus untuk masjid dinilai sangat baik. Kemudian kepada pengunjung ditanyakan meski kondisi Loasi pada tingkat sedang dan baik, apakah masih diperlukan peningkatan dalam rangka memenuhi gagasan Makassar menuju kota dunia. Sebesar 70% menyatakan sangat setuju dan 26,67% menjayatak setuju (Gambar. 3)

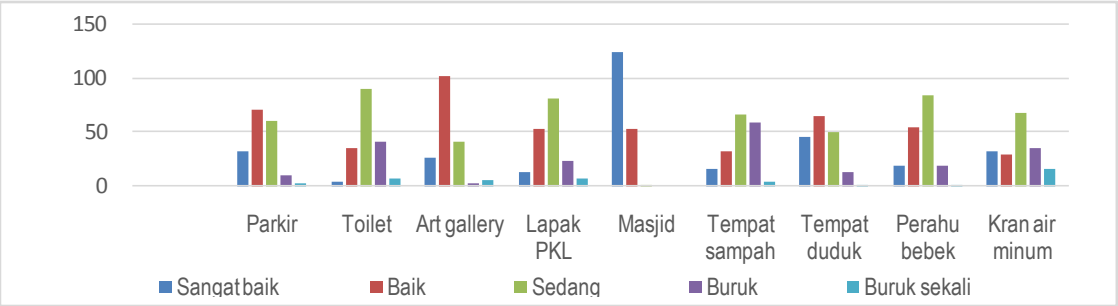

Gambar 2. Grafik penilaian responden terhadap fasilitas di Losari

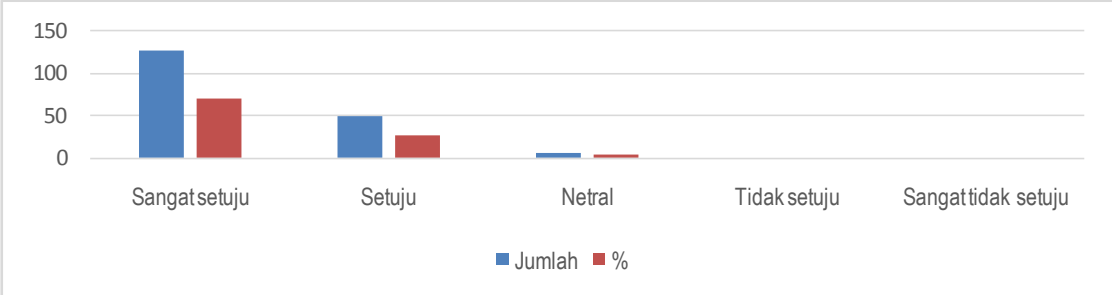

Gambar 3. Pendapat partisipan perlunya peningatan kualitas Losari

ISBN : 978-602-73463-1-4

Penentuan bobot kriteria

Kepada masyarakat pengunjung Losari diminta menyebutkan kriteria untuk menentukan strategi pengembangan. Diperoleh 6 kriteria yaitu (1) fleksibilitas desain, (2) fasilitas pendukung, (3) akses, (4) identitas, (5) daya tarik, dan (6) manajemen. Analyses Hierarchy Process (AHP) yang diintroduksikan oleh Saaty [3] melbatkan para pemangku kepentingan, yaitu pengunjung, staf Pemkot Makassar, penglola Losari, dan akademisi; mereka diminta memberikan masukannya. AHP ini dapat menghasilkan hirarki bobot antar kriteria yang dipersandingkan seperti Gbr 4. Selanjutnya bobot tersebut digunakan untuk analisis strategis dengan EFAS dan IFAS

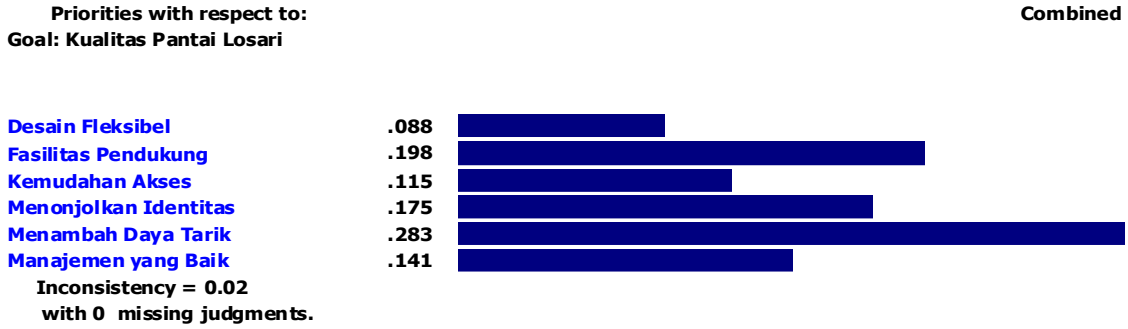

Gambar 4. Output AHP

Analisis strategis peningkatan kualitas

Analisis strategis didahului dengan *internal factors analysis* strategy (IFAS) dan *external factors analysis strategy* (EFAS). Hasil AHP digunakan sebagai bobot masing-masing kriteria. Bobot kriteria dikalikan dengan skor tiap kriteria dan menghasilkan tabel berikut:

Tabel 2. Analisis faktor Internal (IFAS)

Faktor-Faktor Strategi Internal	Bobot	Rating	Bobot x Rating
a.*Strength*			
- Desain fleksibel: Pantai Losari selain sebagai tempat wisata bagi pengunjung berdasarkan hasil survei 5% pengunjung menggunakan Pantai Losari sebagai tempat berolahraga	0,088	1	0,088
- Fasilitas pendukung Masjid terapung dan *art gallery* menjadi daya tarik pengunjung	0,198	3	0,594
- Akses Pengunjung yang mengunjungi Pantai Losari tidak dipungut biaya dalam mengakses ruang Pantai Losari seperti bebas biaya parkir dan fasilitas toilet umum	0,115	1	0,115
- Menonjolkan identitas Pantai Losari memiliki keindahan *sunset* yang memikat pengunjung	0,175	2	0,350
- Daya tarik Persepsi masyarakat kondisi Pantai Losari bersih dan nyaman	0,283	4	1,024
- Manajemen yang baik Pantai Losari menjadi salah satu ikon Kota Makassar	0,141	2	0,282
Jumlah (a)	**1,00**		**2,453**
b. *Weakness*			
- Desain fleksibel Tidak tersedianya fasilitas pusat informasi, pos keamanan, dan	0,088	-1	-0,088

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

tempat bermain anak			
- Fasilitas pendukung Tidak meratanya fasilitas pendukung di setiap segmen Anjungan Pantai Losari	0,198	-3	-0,594
- Menonjolkan identitas Kurangnya sarana penunjang interaksi antara pengunjung dengan air untuk menguatkan identitas Pantai Losari sebagai ikon *waterfront city* dan ruang terbuka tepian air	0,175	-2	-0,350
- Daya tarik Persepsi pengunjung bahwa Pantai Losari kurang memiliki daya tarik	0,283	-4	-1,132
- Manajemen yang baik dan Kemudahan akses Kurangnya manajemen parkir pada saat meningkatnya jumlah pengunjung yang mengakibatkan kesemrawutan dan menghalangi akses pengunjung/kendaraan lainnya (M + KA)	0,256	-4	-1,024
Jumlah (b)	**1,00**		**-3,188**

Tabel 3. Analisis faktor Eksternal (EFAS)

Faktor-Faktor Strategi Eksternal	**Bobot**	**Rating**	**Bobot x Rating**
a.*Opportunities*			
- Desain fleksibel dan Manajemen Memaksimalkan penggunaan seluruh segmen anjungan (DF + M)	0,229	3	0,687
- Fasilitas pendukung Adanya fasilitas perdagangan dan jasa di sekitar Pantai Losari	0,198	3	0,594
- Kemudahan akses Akses menuju Pantai Losari didukung dengan adanya transportasi publik	0,115	1	0,115
- Menonjolkan identitas Pantai Losari juga didukung dengan kawasan kuliner dan sarana perdagangan dan jasa di sepanjang Jalan Penghibur	0,175	2	0,350
- Daya tarik Memberikan akses lebih kepada pengunjung untuk menikmati badan air untuk menciptakan kesan pariwisata alam	0,283	4	1,024
Jumlah (a)	**1,00**		**2,770**
b. *Threats*			
- Desain fleksibel, fasilitas pendukung, identitas, dan daya tarik Adanya ruang terbuka tepian air lainnya yang memiliki daya tarik (atraksi) lebih menarik dan variatif dibandingkan Pantai Losari	0,744	-4	-2,976
- Akses dan manajemen yang baik Munculnya parkir liar di sepanjang Jalan Penghibur (A+M)	0,256	-4	-1,024
Jumlah (b)	**1,00**		**-4,000**

Hasil analisis IFAS dan EFAS digunakan untuk mengetahui posisi koordinat X dan Ydan kuadran SWOT dilakukan perhitungan sebagai berikut;

X= *strength* + *weakness* = 2,453+ (-3,188) = -0,735

Y = *opportunities* + *threats* = 2,770+ (-4) = -1,232

Kedua nilai X (internal) dan Y (eksternal) tersebut dimasukan ke dalam matriks strategi dengan hasil gambar berikut:

ISBN : 978-602-73463-1-4

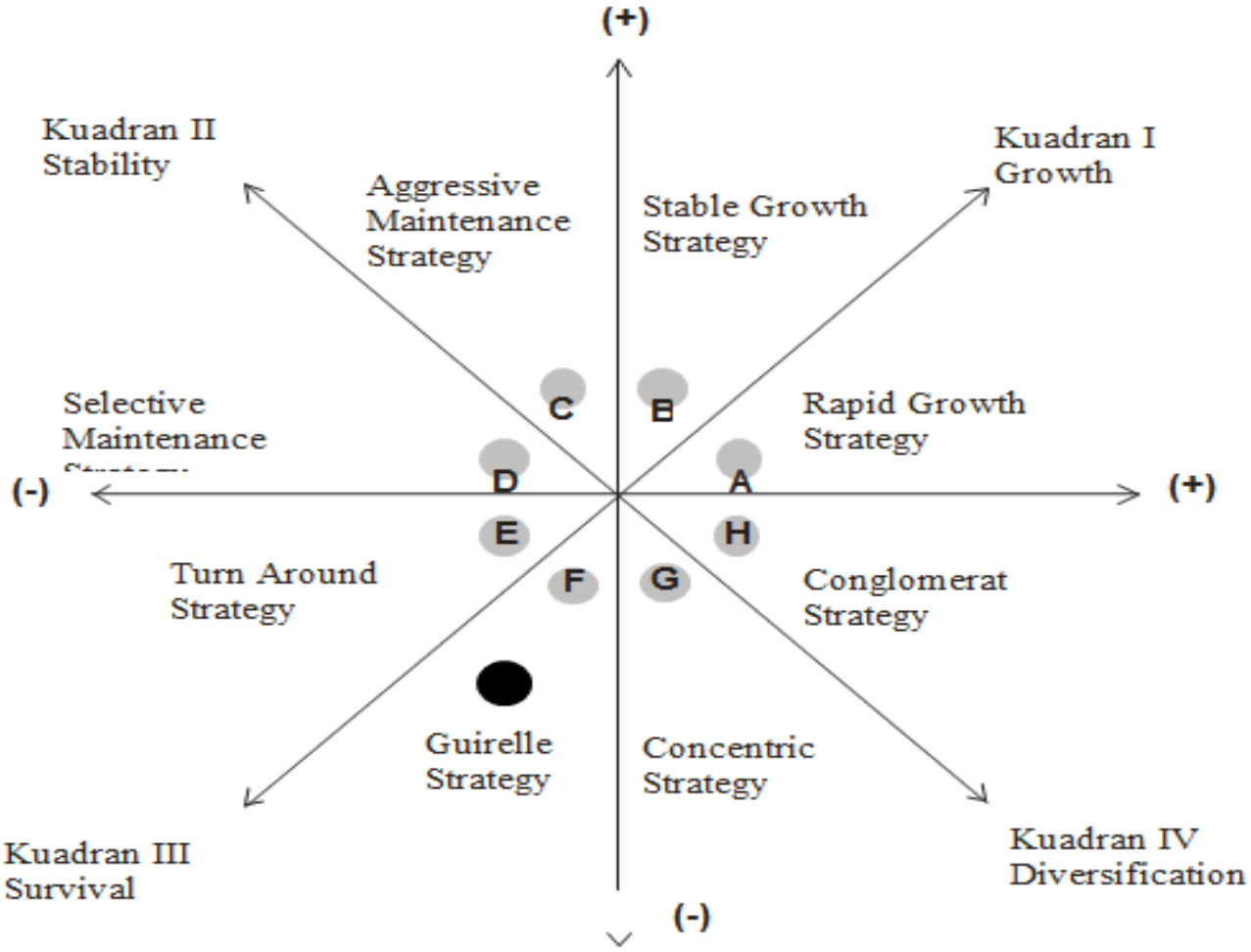

Gambar 5. Posisi Strategis berdasarkan IFAS dan EFAS

Berdasarkan matriks SWOT, maka titik IFAS (-0,735) dan EFAS (-1,232) berada di kuadran III. Menurut Rahmaddin dkk (2015) pada kuadran ini strateginya adalah *guerrilla strategy*, yaitu strategi dengan menciptakan suatu keadaan yang defensive atau survival, efisiensi yang menyeluruh agar kelemahan dan ancaman dapat teratasi dengan strategi gerilya, operasional dilakukan, dan diadakan pembangunan atau usaha pemecahan masalah dan ancaman

Berdasarkan hasil analisis IFAS dan EFAS tersebut, untuk penyusunan strategi peningkatan kualitas Losari sebagai ruang publik kota dunia, strategi yang disarankan ialah:

(1) Menambah atraksi/kegiatan untuk meningkatkan daya tarik dengan memanfatkan potensi/kekuatan yang ada seperti: festival kuliner, susur pantai untuk menikmati *sunset* dengan kapal pesiar, agar memperkuat identitas Losari sebagai ruang publik tepi air
(2) Menambah fasilitas pendukung seperti pusat informasi, pos keamanan, dan tempat bermain anak, yang penempatannya secara merata di semua anjungan
(3) Meningkatkan kualitas manajemen khususnya perparkiran agar tercipta suasana nyaman bagi pengunjung.
(4) Meningkatkan keterkaitan fisikal dan visual antara ruang publik dengan laut dan perairannya sehingga identitas ruang publik tepi air lebih menonjol dan sebagai ikon *waterfront city*.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan menakar partisipasi pengunjung Losari dalam perencanaan lanjut menuju kota dunia. Kesimpulan yang dihasilkan:

(1) Penilaian terhadap 9 fasilitas fisik Losari sebagai prasarana ruang publik masing-masing menunjukkan tingkat yang berbeda; secara umum pada tingkat sedang sampai baik.
(2) Partisipan menganggap bila ingin menuju kota dunia, maka Losari masih memerlukan peningkatan kualitas prasarana dan peyelenggaraan acara tahunan (event)
(3) Strategi yang disusun oleh pemangku kepentingan menunjukkan pada kuadra survival, yaitu menambah atraksi, menyempurnakan fasilitas pendukung, peningkatan manajemen, dan peningkatan kaitan visual maupun fisikal dengan laut dan perairannya.
(4) Menakar tingkat partisipasi masyarakat, mereka terlibat pada penilaian kualitas, dan pemangku kepentingan berpartisipasi pada penyusunan strategi perencanaan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Trisutomo, S. 2015. The Power of Public Space. *Proceding of 10th International Simposium on City Planning and Environmental Management in Asian Countries*.
[2] Rahmaddin, M.Y; Hidayat, T; Yanuwiyadi, B; Suryadi. 2015. Social Engineering Strategy of Waste Management in River Banks of Martapura. *Journal Resource and Environment 5(3): 97-105*
[3] Saaty, T.L. 2008. Decision Making with Analysis Hierarchy Process. *International Journal of Services Sciences I(1):83-98*

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

IDENTIFIKASI KEBUTUHAN RUANG UNTUK PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA SENI PERTUNJUKAN TRADISIONAL (STUDI KASUS : KOTA BANDUNG)

Sony Herdiana[1)] , Khaerunnisa Larashati Mahmud[1)]

[1]Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Nasional Bandung

Email :sony.asgar@gmail.com

Naskah diterima :25 Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 18 April 2017

ABSTRAK

Wisata budaya mengalami perkembangan yang pesat tahun-tahun belakangan ini. Karena perkembangan yang pesat ini, United Nation World Tourism Organization (UNWTO) untuk wilayah Asia Tenggara mengusulkan salah satu fokus pengembangan adalah pada wisata budaya (UNWTO Annual Report,2013). Wisata budaya sendiri adalah wisata yang memanfaatkan objek dan daya tarik budaya dan kehidupan sosial yang meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukkan, dan kerajinan. Indonesia dengan keragaman suku bangsanya mempunyai kekayaan dan potensi yang sangat luar biasa dalam hal wisata budaya.Upaya pelestarian dan pengembangan budaya perlu dilakukan terus menerus dan berkesinambungan.Namun demikian, pengembangan wisata budaya membutuhkan ruang sebagai tempat tumbuh dan berkembangnya sektor ini. Terbatasnya ruang pengembangan budaya di kota-kota di Indonesia menjadi salah satu kendala yang harus diatasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan ruang dalam upaya mengembangkan wisata budaya dengan lingkup penelitian pada wisata budaya seni pertunjukan tradisiona dan wilayah penelitian di Kota Bandung. Melalui teknik wawancara dan pendekatan fenomenologi eksploratif, penelitian kualitatif ini dimaksudkan untuk menemukenali kebutuhan ruang dalam upaya pengembangan wisata budaya seni pertunjukan tradisional.Pengetahuan tersebut diambil dari berbagai narasumber ahli di bidang seni dan tata ruang.Teknik wawancara terstruktur dilakukan dalam penelitian ini untuk mendapatkan kedalaman informasi. Identifikasi kebutuhan ruang ini menunjukkan adanya kebutuhan ruang untuk pengembangan baik dalam proses produksi maupun dalam kegiatan promosi. Pemenuhan kebutuhan ruang untuk proses-proses tersebut akan memberikan pengaruh yang signifikan dalam perkembangan budaya seni pertunjukan tradisional. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam aplikasi perencanaan tata ruang untuk mendukung pengembangan potensi wisata budaya.

Kata kunci: *Kebutuhan ruang, wisata budaya, pertunjukan tradisional*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Tren perkembangan pariwisata di dunia meningkat setiap tahunnya.United Nation World Tourism Organization (2013) melaporkan bahwa perkembangan wisata dan pergerakan wisatawan paling tinggi terdapat di daerah Asia Pasifik. Di Asean, wisatawan internasional diperkirakan tumbuh dari 14 juta jiwa pada tahun 2012 menjadi 214 juta jiwa pada tahun 2030. Di antara program pengembangan pariwisata yang diusulkan dalam UNWTO untuk wilayah Asia Tenggara, salah satunya difokuskan terhadap pengembangan wisata budaya sosial [1]

Wisata budaya adalah wisata yang memanfaatkan objek dan daya tarik budaya dan kehidupan sosial yang meliputi museum, peninggalan sejarah, upacara adat, seni pertunjukkan, dan kerajinan. Menurut Yoeti [2], alasan pertama orang-orang melakukan perjalanan adalah pendidikan dan kebudayaan. Wisatawan ingin mengetahui kemajuan-kemajuan yang telah dicapai oleh negara lain serta ingin menyaksikan tempat-tempat bersejarah, kesenian rakyat, festival, keindahan alam, dan lain-lain. Pada abad ke-16 di Eropa, motif pariwisata berbasis budaya mulai dilakukan oleh kalangan elit di Inggris untuk mengunjungi kota-kota dengan tujuan pendidikan, budaya dan liburan.

Indonesia dengan beragam potensi budayanya mempunyai peluang yang sangat besar untuk mengembangkan wisata budaya sebagai salah satu andalan pada sektor pariwisata.Pengembangan wisata budaya selain berpotensi untuk peningkatan ekonomi wilayah juga dapat berperan sebagai salah satu upaya pelestarian budaya.Daerah-daerah yang cukup berhasil mengembangkan wisata budaya di Indonesia antara lain Bali dan Jogjakarta.

Namun demikian, pengembangan wisata budaya perlu didukung oleh adanya ruang-ruang fisik yang bisa dimanfaatkan oleh para pelaku wisata budaya untuk melakukan aktifitas pengembangannya.Kondisi saat ini menunjukkan tidak banyak daerah yang cukup peduli atas kebutuhan ruang ini.Tidak banyak rencana tata ruang yang secara khusus mengalokasikan ruang untuk memenuhi kebutuhan pengembangan budaya khususnya dikaitkan dengan sektor pariwisata.

Upaya pemenuhan kebutuhan ruang untuk pengembangan wisata budaya dapat diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan ruangnya itu sendiri. Kajian terkait hal ini diperlukan untuk memahami apa saja ruang-ruang yang dibutuhkan untuk kemudian menjadi dasar dalam pengalokasian ruangnya.

Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan ruang dalam mengembangkan wisata budaya, khususnya sub kegiatan pertunjukan seni tradisional. Ruang yang dimaksud adalah segala bentuk ruang yang dapat mendukung berkembangnya wisata budaya khususnya wisata budaya pertunjukan seni tradisional.

Lingkup Wilayah dan Lingkup Kajian

Penelitian ini dilakukan di wilayah administratif Kota Bandung. Sebagai Ibu Kota Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung memiliki banyak potensi wisata budaya khususnya kesenian tradisional yang berasal dari seluruh pelosok Jawa Barat. Kajian yang dilakukan di Kota Bandung diharapkan akan dapat memberikan gambaran kebutuhan ruang untuk pengembangan wisata budaya.

Lingkup kajian difokuskan kepada sub kegiatan budaya seni pertunjukkan tradisional. Sebagai bagian dari kegiatan budaya, pertunjukkan seni tradisonal menjadi salah satu daya tarik utama dalam wisata budaya. Adapun jenis-jenis pertunjukkan tradisional yang teridentifikasi dan menjadi objek kajian adalah :Seni Tari Tradisional, Seni Karawitan,Seni Teater Tradisional, Seni Pedalangan/ Pewayangan.

METODE PENELITIAN

Identifikasi kebutuhan ruang yang dilakukan dalam penelitian ini mengacu pada pendapat ataupun persepsi para ahli dalam bidangnya mengenai proses kegiatan dan kebutuhan ruang dalam seni pertunjukan tradisional. Maka dari itu, penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif murni.Penelitian kualitatif dilakukan salalah satunya ketika penelitian bertujuan untuk mengembangkan teori. Sehingga pada dasarnya, penelitian mengenai identifikasi kebutuhan ruang dalam upaya mengembangkan wisata budaya tradisional ini tidak untuk memecahkan masalah yang telah ada hipotesanya, melainkan mengembangkan hal yang ditemukan selama proses penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah fenomenologi eksploratif.Dimana keseluruhan penelitian merupakan pandangan dari kejadian atau pengalaman seorang expert yang kemudian di eksplorasi menjadi hasil penelitian yang diharapkan.Teknik pengambilan data yang digunakan untuk mendapatkan pendapat dan persepsi para ahli tersebut adalah primer kualitatif murni dengan wawancara mendalam semi terstruktur.

Wawancara dilakukan secara formal terbuka.Daftar pertanyaan telah disediakan dengan kategori yang sudah ditentukan untuk dapat menjawab sasaran yang dituju.Narasumber yang ahli dalam bidangnya ini diperkenankan untuk menjawab pertanyaan yang diajukan dengan persepsinya tanpa digiring menuju jawaban yang diinginkan.Namun demikian, pada tahap awal wawancara tidak lupa peneliti menjelaskan maksud dan tujuan arah wawancara kepada narasumber.Hal tersebut dirasa perlu dilakukan agar meminimalisir melencengnya alur wawancara.

Pada dasarnya, penelitian ini adalah penghimpunan beberapa pendapat narasumber terkait tema penelitian.Kesimpulan jawaban yang telah dihimpun tersebut, didapatkan melalui interpretasi peneliti dengan keywords analysis.Keywords analysis adalah analisis yang dilakukan dengan cara melihat kata kuci yang keluar dari jawaban para narasumber yang didapatkan melalui intepretasi peneliti.Kesimpulan yang didapatkan merupakan hasil intepretasi yang disandingkan dengan teori terkait.Sehingga penelitian ini disimpulkan dengan metode deskriptif induktif.

Adapun tahapan analisis yang digunakan adalah model Miles and Huberman, analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga sampai tuntas

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dan data dinyatakan jenuh. Analisis data model Miles and Huberman meliputi data reduction, data display, danverification.

Adapun kelompok narasumber yang dipilih adalah :

1. Akademisi : merupakan narasumber dengan wawasan yang mendalam mengenai tata ruang, kepariwisataan, dan kesenian.
2. Birokrasi : merupakan narasumber dengan wewenang penuh atas kebijakan mengenai pariwisata khususnya wisata seni budaya pertunjukan tradisional.
3. Praktisi/Seniman : merupakan narasumber dengan wilayah pekerjaan sebagai pekerja, pelaku, maupun pengembang dalam bidang seni budaya khususnya seni pertunjukan tradisional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis yang dilakukan pada penelitian ini secara umum terbagi atas 3 analisis utama, yaitu : analisis proses pengembangan budaya pertunjukkan tradisional, analisis kegiatan pada setiap proses pengembangan, dan analisis kebutuhan ruang untuk memfasilitasi kegiatan-kegiatan pada setiap proses di atas.

Proses Pengembangan Seni Pertunjukkan Tradisional

Berdasarkan hasil analisis trianggulasi terhadap responden terkait, dapat diambil kesimpulan pengembangan seni pertunjukkan tradisional secara umum terbagi atas dua proses utama, yaitu proses produksi dan proses promosi dan distribusi. Proses produksi dalam hal ini adalah proses untuk menghasilkan suatu karya seni pertunjukkan tradisonal. Karya seni pertunjukkan ini sendiri akan terjadi jika didukung oleh dua komponen utama, karya seninya sendiri dan pelaku/seniman pertunjukkan yang mempresentasikan karya dimaksud. Dengan demikian, proses produksi yang dilakukan dalam pengembangan produk budaya seni pertunjukkan tradisional adalah proses produksi karya dan proses produksi seniman, sumber daya manusia yang bisa mempresentasikan hasil karya seninya.

Proses yang kedua adalah proses promosi dan distribusi produk hasil seni pertunjukkan kepada publik sebagai konsumen. Karya seni pertunjukkan yang sudah diproduksi harus disampaikan kepada peminatnya dalam bentuk suatu pertunjukkan, dalam upaya ini terdapat proses yang harus dilakukan sehingga upaya penyampaian hasil karya tersebut dapat berlangsung dengan baik dan diapresiasi oleh khalayak. Proses yang dilakukan mulai dari proses persiapan sampai dengan pelaksanaan pertunjukkan dan kegiatan seteleh selesai pertunjukkan.

Kegiatan dalam Proses Pengembangan

Hasil analisis menunjukkan ada kegiatan-kegiatan spesifik yang harus dilakukaan dalam setiap tahapan proses, baik pada proses produksi maupun pada proses promosi/distribusi.

Pada proses produksi seniman/sumber daya manusia, dapat diidentifikasi tahapan-tahapan yang diperlukan untuk menghasilkan sumberdaya yang mempunyai kompetensi yang diharapkan. Tahapan atau komponen kegiatannya sebagai berikut :

- Pengenalan teori: tahapan ini merupakan tahapan awal untuk memahami konsep dan filosofi dari jenis kesenian yang akan ditekuni oleh calon seniman.
- Pengembangan skill: tahap ini merupakan tahapan pengembangan keterampilan bagi calon seniman.
- Workshop: tahap ini merupakan tahap lanjut pengembangan skill dengan melibatkan calon seniman dalam aplikasi teori atas suatu karya yang harus ditampilkan.
- Pematangan: tahapan lanjutan dari workshop, termasuk dalam tahap penghayatan seni, dan latihan yang berulang.
- Transfer knowledge &Knowledge Sharing: merupakan tahapan lanjutan dari workshop dan pematangan, bahan diskusi dengan pelatih dan sesama calon seniman.

Adapun pada proses produksi karya seni pertunjukkan tradisional dapat dipahami karakteristik proses ini adalah sesuatu yang bisa sangat personal dan berbeda-beda antara satu seniman pencipta karya dengan seniman yang lainnya. Dengan demikian tahapan yang ada tidak mempunyai aturan baku. Namun secara umum dimulai dari kegiatan pembentukan ide, penemuan gagasan ataupun pemahaman teori, lalu menjadi sebuah konsep, komposisi dan bentuk karya seni, uji coba yang berulang, workshop, dan pematangan.

Proses promosi dan distribusi hasil karya secara umum terbagi dalam dua tahap utama, persiapan dan pelaksanan. Pada tahap persiapan dilakukan perencanaan-perencanaan untuk menjamin terlaksananya proses distribusi karya yang berhasil diapresiasi oleh khalayak penikmatnya. Perencanaan yang dilakukan menyangkut ide penyelenggaraan maupun persiapan-persiapan mobilisasi kebutuhan-kebutuhan pendukung (termasuk property dan alat-alat gelar karya)

Tahap Pelaksanaan merupakan produk akhir dalam sudut pandang wisata, sedangkan dalam sudut pandang seniman, proses ini merupakan tahapan evaluasi bagi pencipta karya dan sumber daya yang melakukan pertunjukan seni. Tahapan pelaksanaan ini juga merupakan proses apresiasi yang diberikan apresiator/penonton terhadap seniman. Dalam sudut pandang wisata, tahapan ini sangat banyak berkaitan dengan hal kenyamanan dan kesiapan seniman dan pengunjung.Untuk itu kondisi ruang yang digunakan dalam tahap ini menjadi sangat penting.Ruang yang digunakan harus bisa mendukung kebutuhan seniman maupun khalayak yang menikmati pertunjukkan.

Kebutuhan Ruang

Implikasi dari adanya aktifitas adalah kebutuhan ruang untuk melaksanakan aktifitas tersebut. Dalam kaitannya dengan pengembangan wisata budaya kesenian pertunjukan tradisional, ruang yang dimaksud adalah ruang-ruang yang dipergunakan untuk menunjang dan melaksanan kegiatan proses pengembangan dan proses promosi-distribusi kesenian tradisional

Kebutuhan ruang untuk seni pertunjukan tradisional sangat beragam.Kebutuhan-kebutuhan ruang ini dapat dilihat antara lain berdasarkan:

- Fungsi ruang; utama dan penunjang
- Skala kegiatan; lokal, regional, nasional, dan internasional
- Jenis kesenian; dalam penelitian ini adalah tari, teater, karawitan, dan pedalangan.

Ruang dengan fungsi utama terkait dengan proses pengembangan secara umum adalah ruang yang digunakan untuk sarana belajar mengajar dan diskursus antar seniman baik teori maupun praktek. Adapun pada proses promosi-distribusi adalah venue untuk menyelenggarakan pertunjukan. Sedangkan ruang-ruang penunjang adalah yang akan mendukung lancarnya aktifitas utama, antara lain fasilitas umum seperti tempat penyimpanan alat dan property pertunjukan, sarana parker yang memadai, toilet, musholla, dsb.

Besaran kebutuhan ruang akan ditentukan oleh skala kegiatan wisata budaya seni pertunjukan yang dirancang. Semakin luas dan besar skala kegiatan, maka semakin luas pula kebutuhan ruang yang dibutuhkan.Eskalasi kegiatan yang lebih luas juga membutuhkan item-item ruang yang lebih beragam dan lebih komplek.

Identifikasi kebutuhan ruang berdasarkan jenis seni pertunjukan tradisional dapat dilihat dari Tabel 1 di bawah ini:

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1.Tabel Rekapitulasi Kebutuhan Ruang Berdasarkan Jenis Kesenian

Jenis Kesenian	**Proses/Kegiatan**	**Kebutuhan Ruang**
Seni Tari	**Proses Produksi**	
	Latihan	Indoor/ Outdoor
	Teori	
	Praktik (beserta alat musik)	
	Proses Promosi	
	Pertunjukan	Indoor/ Outdoor
	Rias, kostum	Indoor
	Alat	Indoor
	Sarana/prasarana penunjang	Toilet, Musholla, Parkir, dll
Seni Karawitan	**Proses Produksi**	
	Latihan	Indoor/ Outdoor (dibutuhkan akustik yang sesuai)
	Teori	
	Praktik (beserta alat)	
	Proses Promosi	
	Pertunjukan	Indoor
	Rias, kostum	
	Alat	
	Sarana/prasarana penunjang	Toilet, Musholla, Parkir,dll
Seni Theater	**Proses Produksi**	
	Latihan	Indoor/Outdoor
	Teori	Indoor/Outdoor
	Praktik (beserta alat)	Indoor/Outdoor
	Proses Promosi	
	Pertunjukan	Indoor/Outdoor
	Rias, kostum	Indoor
	Alat	Indoor
	Sarana/prasarana penunjang	Toilet, Musholla, Parkir,dll
Seni Pedalangan/ Pewayangan	**Proses Produksi**	
	Latihan	Indoor/ Outdoor (dibutuhkan akustik yang sesuai)
	Teori	
	Praktik (beserta alat)	
	Proses Promosi	
	Pertunjukan	Indoor
	Rias, kostum	
	Alat	
	Sarana/prasarana penunjang	Toilet, Musholla, Parkir, dll

Sumber : Hasil Analisis, 2015.

ISBN : 978-602-73463-1-4

KESIMPULAN DAN SARAN

Seni pertunjukan tradisional merupakan salah satu daya tarik utama wisata budaya.Wilayah yang memiliki keragaman dan keunikan dalam hal seni pertunjukan tradisional memiliki potensi untuk mengembangkan wisata budaya.Namun demikian pengembangan hal tersebut harus diringi dengan penyediaan ruang sebagai salah satu faktor pendukungnya.Penyediaan ruang adalah sebuah keniscayaan. Ruang-ruang tersebut dibutuhkan baik dalam proses produksi sumber daya manusia dan proses produksi karya seni pertunjukan tradisional maupun dalam proses mempromosikan dan mendistribusikan karya-karya seni yang dihasilkan. Semakin banyak ruang yang disediakan maka akan semakin banyak pula aktfitas berkesenian yang terjadi. Aktifitas yang tinggi ini tentu akan seiring dengan pengayaan SDM maupun karya seni yang berkualitas.

Terkait dengan penataan ruang, wilayah yang menginginkan pelestarian dan pengembangan seni tradisional harus mengalokasikan sebagian ruangnya untuk mendukung pengembangan seni pertunjukan tradisional ini. Unit-unit administratif sampai pada level terkecil perlu dipikirkan untuk memiliki ruang-ruang berkesenian tersebut, yang pada aplikasinya bisa saja menjadi ruang yang mempunyai fungsi campuran dengan kebutuhan yang lain. Wilayah-wilayah atau kota-kota yang mempunyai target dan ekspektasi pengembangan pada level yang lebih tinggi harus menyediakan ruang dengan ukuran dan fasilitas yang mempunyai standard yang lebih tinggi pula.

DAFTAR PUSTAKA

[1] United Nation World Tourism Organization Annual Report. 2013. Wortley, Adrian. Cultural Tourism Cultural Spaces.Tourism in Nunavut Conference

[2] Oka A. Yoeti. 1996. Pariwisata Berbasis Budaya, Masalah dan Solusinya. Jakarta : PT.Pradnya Paramita.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MODEL PENGEMBANGAN INDUSTRI KELAPA DI PROVINSI RIAU

Syaiful Hadi

Jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Riau

Email: hadi6633@yahoo.co.id

Naskah diterima :28 Febrari 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Provinsi Riau merupakan sentra industri kelapa terbesar di Indonesia. Dalam perkembangannya, keberadaan industri kelapa terus menurun seiring dengan semakin menurunnya daya saing minyak kelapa dibanding minyak kelapa sawit sehingga industri kelapa terjebak dalam lingkaran 'setan' yaitu harga beli kelapa petani rendah yang mendorong petani tidak lagi mengusahakan tanaman kelapa dengan baik yang diperparah oleh instrusi air laut dan tanaman kelapa yang tua. Kondisi ini menjadi produktivitas dan produksi kelapa rakyat menurun tajam sehingga suplai kelapa ke pabrik pengolahan kelapa semakin menurun, pabrik beroperasi dibawah kapasitas produksi dan biaya pengolahan meningkat. Kondisi keterjebakan pada lingkaran 'setan' pengembangan industri kelapa ini semakin hari terlihat semakin parah. Makalah ini menganalisis model pengembangan untuk penyelamatan industri kelapa di Provinsi Riau menggunakan pendekatan A'WOT. Hasil analisis menunjukan bahwa model kemitraan integratif antara petani dan perusahaan pengolahan kelapa yang saling menguntungkan yang ditunjukkan dengan harga pembelian kelapa rakyat yang tinggi dan perusahaan mendapat suplai bahan baku dengan kuantitas cukup dan kualitas baik. Model kemitraan integratif ini sekaligus akan mendorong secara bersama semua stakeholder (petani, dunia usaha/pabrik pengolah kelapa dan pemerintah) untuk mengatasi permasalahan besar lainnya yaitu intrusi air laut, replanting dan lambatnya hilirisasi industri kelapa.

Kata kunci: Daya saing, hilirisasi, kemitraan integratif.

PENDAHULUAN

Tantangan utama yang dihadapi oleh industri nasional saat ini adalah masih rendahnya daya saing industri di pasar internasional. Pada tahun 2014, *IMD Competitiveness Report* [1] meletakan peringkat daya saing Indonesia berada pada posisi 37 dari 60 negara, menurun menjadi 52 pada tahun 2015. Posisi Indonesia jauh tertinggal jika dibandingkan dengan Singapura (3), Malaysia (14) dan Thailand (30). Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya daya saing Indonesia adalah adanya peningkatan biaya khususnya energi dan upah, tingginya biaya ekonomi, serta belum memadainya layanan birokrasi. Tantangan lain adalah kelemahan struktural sektor industri itu sendiri, seperti masih lemahnya keterkaitan antara industri hulu dan hilir, belum terbangunnya struktur klaster (*industrial cluster*) yang saling mendukung. Di samping itu, belum terjamin pasokan bahan baku yang berkelanjutan dengan jumlah, kualitas dan harga yang stabil dan secara ekonomi layak.

Di industri kelapa, Indonesia merupakan negaradengan luas areal kelapa terluas di dunia setelah India yaitu seluas 3,62 juta hektar. Pada masa yang sama, Provinsi Riau merupakan daerah yang memiliki areal kelapa terluas di Indonesia yaitu seluas 514.026 hektar atau 14,19% dari total areal kelapa di Indonesia. Dalam perkembangannya, luas areal kelapa Provinsi Riau terus menurun. Pada tahun 2008, areal kelapa di Provinsi Riau seluas 553.567 hektar menurun menjadi 514.025 hektar pada tahun 2015 . Selama periode 2008 – 2016, rata-rata pertumbuhan areal kelapa di Provinsi Riau menurun sebesar 0,92% per tahun.

Menurunnya luas areal kelapa di Provinsi Riau disamping karena tingginya laju pertumbuhan areal tanaman kelapa yang tua dan rusak alami (4.943. hektar per tahun) dibandingkan laju replanting (800 hektar per

tahun), juga karena kerusakan yang disebabkan instrusi air laut karena rusaknya tanggul-tanggul. Pada tahun 2015, sekitar 100.000 hektar kelapa rakyat terancam rusak akibat instrusi air laut.

Seiringan dengan laju pertumbuhan areal kelapa yang menurun, produksi kelapa juga terus menurun. Pada tahun 2008, produksi kelapa di Provinsi Riau sebesar 675.612 ton setara kopra menurun menjadi 411.042 ton setara kopra pada tahun 2015 sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 1. Selama periode 2008 – 2015, rata-rata laju pertumbuhan produksi kelapa di Provinsi Riau menurun sebesar 6,02% per tahun. Rata-rata laju pertumbuhan menurun produksi kelapa jauh lebih tinggi dibanding rata-rata pertumbuhan penurunan luas areal kelapa (0,92% per tahun).

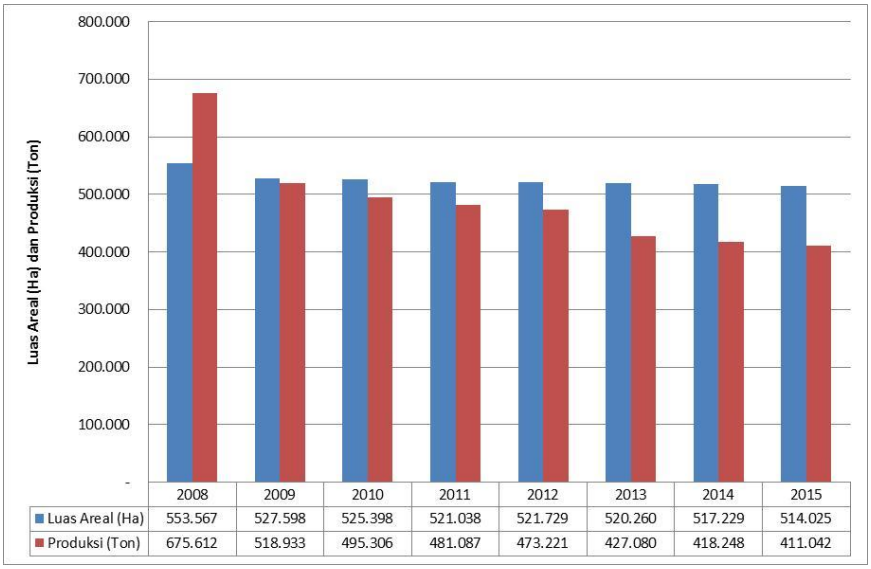

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Luas Areal (Ha)	553.567	527.598	525.398	521.038	521.729	520.260	517.229	514.025
Produksi (Ton)	675.612	518.933	495.306	481.087	473.221	427.080	418.248	411.042

Gambar 1. Luas Areal dan Produksi Kelapa Tahun 2008 – 2015 di Provinsi Riau
Sumber: Disbun Provinsi Riau [2]

Disisi petani kelapa, semakin luasnya areal kelapa yang tua dan rusak serta terinstrusi air laut menjadikan produktivitas dan produksi kelapa terus menurun sehingga berdampak kepada rendahnya pendapatan. Disisi lain, pasar kelapa bulat cenderung monopsoni sehingga harga jual kelapa petani ke pabrik pengolah domestik relatif rendah dan berfluktuatif. Kondisi yang telah berlangsung lama ini menjadikan sentra-sentra produksi kelapa sekaligus menjadi kantong-kantong kemiskinan di Provinsi Riau.

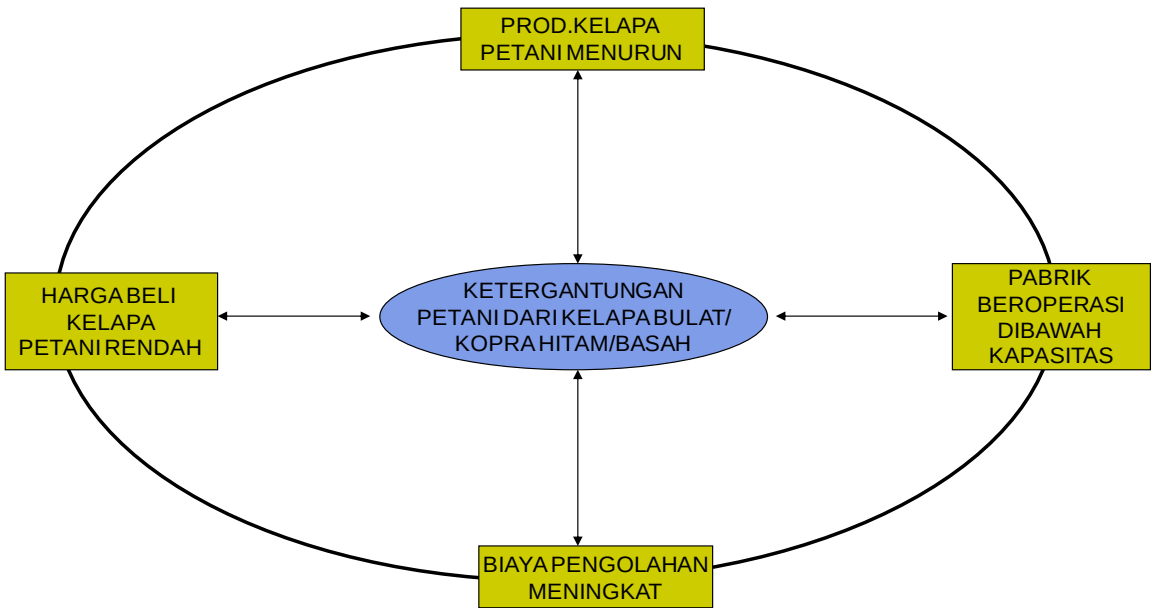

Gambar 2. Lingkaran Masalah Industri Pengolahan Kelapa di Provinsi Riau

Kondisi pasar buah kelapa yang cenderung monopsoni dan posi tawar petani yang lemah menjadi harga jual kelapa yang rendah di pabrik pengolahan kelapa setempat. Kondisi ini disikapi petani kelapa dengan (i) menyisip dan mengkonversi kebun kelapa menjadi tanaman kelapa sawit, (ii) tidak merawat kebun kelapa dan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

(iii) menjual kelapa keluar negeri melalui perdagangan lintas batas. Tim IMT-GT Provinsi Riau dalam rapat Kelompok Kerja Industri Pengolahan Kelapa menyatakan bahwa pada posisi Juli 2014 sebanyak 42 juta butir kelapa bulat diekspor ke Johor dan 20 juta butir kelapa ke Melaka. Disperindag Kabupaten Indragiri Hilir mencatat bahwa ekspor kelapa bulat dari Indragiri Hilir sebanyak 87,40 juta butir pada tahun 2011 dan 62,26 juta butir tahun 2012. Disperindag Kabupaten Kepulauan Meranti mencatat bahwa ekspor kelapa bulat dari Kabupaten Kepulauan Meranti ke Malaysia tahun 2012 sebanyak 16,31 juta butir dan 22,75 juta butir tahun 2013.

Menurunnya produksi kelapa dan tingginya ekspor kelapa bulat melalui perdagangan lintas batas menjadikan ketersediaan bahan baku kelapa di pabrik pengolahan kelapa domestik semakin menurun. Rata-rata kapasitas terpakai pabrik hanya berkisar sekitar 60% dari kapasitas terpasang sehingga biaya olah terus meningkat. Semakin meningkatnya biaya olah dan masih berlanjutnya "aksi ambil untung jangka pendek" oleh pabrik pengolahan kelapa dengan menekan harga beli kelapa bulat petani, menjadikan daya saing ekspor produk kelapa Indonesia terus melemah dan menuju "kehancuran". Makalah ini bertujuan menganalisispengembangan industri kelapa di Provinsi Riau.

METODE PENELITIAN

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan diempat Kabupaten sentra kelapa Provinsi Riau yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten, Pelalawan dan Kabupaten Bengkalis. Penelitian dilaksanakan pada tahun 2014/2015.

Sampling

Penelitian dilakukan dengan metode survei. Pengambilan responden representatif dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) yaitu petani kelapa pola swadaya dan petani peserta PIR-Trans kelapa hibrida terkait dengan UKM pengolah kelapa sebanyak 50 responden dan pedagang kelapa (10 responden) di empat kabupaten sampel dan 4 pabrik pengolah kelapa yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir.Disamping responden yang terkait langsung dengan industri kelapa, diambil juga sampel representatif ahli yang meliputi Bappeda, Dinas Perkebunan dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan masing-masing Kabupaten, serta Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pengembangan Industri Pengolahan Kelapa Provinsi Riau.

Data

Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari responden dengan melakukan wawancara mendalam (*indept interview*) menggunakan alat bantu kuesioner terhadap responden.Aspek yang diamati meliputi lingkungan Internal dan lingkungan eksternal pelaku industri kelapa. Lingkungan internal yang diamati dan data yang dikumpulkan terdiri dari variabel-variabel kekuatan (*Strengths*) dan kelemahan (*Weaknesses*). Lingkungan eksternal yang yang diamati dan data yang dikumpulkan meliputi peluang (*Opportunities*) dan ancaman (*Threats*). Data yang diperoleh digunakan pengumpulan pada matrik SWOT dan pemadanan informasi pada matrik TOWS. Perbandingan berpasangan dilakukan oleh ahli (*expert*) untuk memperoleh keputusan strategi alternatif yang diprioritaskan dilakukan oleh Kepala Dinas terkait dan Tim Pokja Pengolahan Kelapa Provinsi Riau. Data sekunder diperoleh dari Pabrik Pengolahan Kelapa dan isntansi terkait. Data sekunder ini digunakan untuk melengkapi dan memperkuat serta mencroschek pengumpulan dan pemadanan strategi pada matrik SWOT.

Teknik Analisis

Analisis A'WOT merupakan gabungan antara AHP (*Analytic Hierarchy Process*) dan SWOT (*Strengths-Weaknesses-Opportunities-Threats*). Analisis SWOT menyediakan kerangka dasar yang akan menghasilkan keputusan fungsional, sedangkan AHP membantu meningkatkan analisis SWOT dalam mengkorelasikan hasil analisis, sehingga keputusan strategi alternatif dapat di prioritaskan

Perhitungan dan perbandingan dari pendapat responden ahli berdasarkan skala nilai berpasangan Saaty yaitu pada skala 1 hingga 9 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Perhitungan dan perbandingan dari pendapat responden ahli berdasarkan skala nilai berpasangan Saaty yaitu pada skala 1 hingga 9 sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1. Pembatasan ini didasarkan pada beberapa alasan yaitu: (i) perbedaan hal-hal yang bersifat kualitatif akan mempunyai arti dan dapat dijamin keakuratannya, (ii) secara umum seseorang dapat menyatakan perbedaan hal-hal kualitatif dalam lima istilah yaitu sama, lemah, kuat, sangat kuat dan absolut, dan (iii) manusia tidak dapat secara simultan membandingkan lebih dari tujuh objek dan akan kehilangan konsistensinya bahkan cenderung bingung.

ISBN : 978-602-73463-1-4

AHP mengukur konsistensi menyeluruh dari berbagai pertimbangan melalui rasio. Nilai rasio inkonsistensi paling tinggi 10%, dan jika lebih maka perlu dilakukan perbaikan. Sebelum mencari indeks konsistensi maka harus dicari nilai λ_{maks} dengan prosedur sebagai berikut:

$$\begin{bmatrix} \text{Jumlah baris 1} \\ \text{Jumlah baris 2} \\ \text{Jumlah baris n} \end{bmatrix} : \begin{bmatrix} \text{Rataan jumlah baris 1} \\ \text{Rataan jumlah baris 2} \\ \text{Rataan jumlah baris n} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a1 \\ a2 \\ a3 \end{bmatrix}$$

$$\text{Dari nilai zyz diambil nilai rata-rata} = \frac{a1 + a2 + \ldots + an}{N}$$

Tabel 1. Skala Nilai berpasangan Saaty

Intensitas	Keterangan
1	Kedua elemen sama penting
3	Elemen yang satu sedikit lebih penting dari elemen yang lain
5	Elemen yang satu lebih penting dari elemen yang lain
7	Elemen yang satu jelas lebih penting dari elemen yang lain
9	Elemen yang satu mutlak lebih penting dari elemen yang lain
2, 4, 6, 8	Nilai antar dua nilai pertimbangan yang berdekatan. Bila dibandingkan dengan aktifitas ke j, maka j mempunyai nilai kebalikannya bila dibandingkan dengan i

Sumber: Saaty [3]

Indeks konsistensi (konsistensi indeks = CI) diperoleh dengan rumus:

$$CI = \frac{\lambda_{maks} - n}{n - 1}$$

Rasio Konsistensi diperoleh dengan rumus:

$$CR = CI / RI$$

Dimana:
CR = Rasio Konsistensi
CI = Indeks Konsistensi
RI = Indeks Random

Tabel 2. Nilai Indeks Random (RI)

Ukuran Matriks	Indeks Random
1 dan 2	0,00
3	0,58
4	0,90
5	1,12
6	1,24
7	1,32

Sumber: Saaty [3]

HASIL DAN PEMBAHASAN

Industri kelapa di Provinsi Riau telah mengalami masa-masa kejayaan dan dalam 10 tahun terakhir memasuki masa penurunan menuju 'kehancuran'.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Perkembangan Industri Kelapa Provinsi Riau

Pada awal tahun 80-an, konsumsi minyak goreng Indonesia bersumber dari minyak kelapa. Pada masa itu, meski Indonesia merupakan salah satu produsen kelapa terbesar di dunia sekaligus merupakan negara pengimpor kopra yang merupakan bahan baku minyak goreng terbesar di dunia. Impor kopra ini telah menguras cukup besar devisa negara karena minyak goreng merupakan salah satu 9 bahan pokok yang diatur keberadaannya oleh Pemerintah.

Langkah besar Pemerintah menghadapi besarnya impor kopra adalah mengupayakan berswasembada kelapa yang diikuti pengembangan industri pengolahan kelapa dengan pendekatan agribisnis. Di industri hulu, kebijakan peningkatan produksi tanaman kelapa antara lain melalui perluasan areal kelapa rakyat pola swadaya yang diikuti dengan penyebaran bibit unggul dan pola PIR-Trans kelapa hibrida. Lahan gambut pasang surut yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir dan Pelalawan disulap menjadi perkebunan kelapa. Hasilnya, selama periode 1980 – 1990, Provinsi Riau khususnya Kabupaten Indragiri Hilir produsen utama kelapa di Indonesia. Provinsi Riau memiliki areal dan produksi kelapa terbesar di Indonesia. Beberapa Perusahaan yang bergerak di Pengolahan Kelapa seperti Sambu Grup mendirikan 3 pabrik pengolahan di Provinsi Riau. Industri pengolahan kelapa rakyat yang mengolah kelapa menjadi kopra dan minyak gorang menjamur disetiap pelosok desa. Kesejahteraan petani dan UKM pengolah kelapa terlihat dari tingginya daya beli dan sebagian besar jemaah haji dari daerah sentra kelapa.

Pada masa yang hampir bersamaan dan dalam rangka swasembada bahan baku minyak goreng, Pemerintah memulai mengembangkan industri kelapa sawit rakyat melalui pola PIR. Secara berangsur, kopra yang merupakan bahan baku utama minyak goreng mulai digantikan dengan CPO yang lebih murah. Mulai tahun 90-an, Indonesia telah berswasembada bahan baku minyak goreng dari CPO sedangkan kopra dan produk olahan kelapa kelapa lainnya didorong menjadi komoditi ekspor. Namun dalam perjalannya, pengembangan produk olahan kelapa relatif tidak berkembang, produk utama kelapa masih minyak goreng kelapa yang relatif 'kalah bersaing' dibanding minyak goreng kelapa sawit baik di pasar domestik maupun di pasar ekspor.

Pasca swasembada minyak goreng sawit tahun 90-an, industri kelapa relatif terabaikan. Tanaman kelapa yang ditanam hingga tahun 80-an, yang saat ini telah berusia diatas 25 tahun merupakan porsi terbesar tanaman kelapa di Provinsi Riau. Rata-rata replanting hanya seluas 800 hektar per tahun, jauh dibawah luasan tanaman tua dan rusak yaitu 5.551 hektar per tahun. Tanggul dan trio tata air yang merupakan kunci keberhasilan perkebunan kelapa di lahan gambut pasang surut yang dibangun tahun 80-an oleh Pemerintah banyak yang rusak dan tidak berfungsi. Hal ini menambah keparahan kondisi tanaman kelapa yang tua ini menjadi rusak khususnya di Indragiri Hilir, sehingga terjadi intrusi air dan mulai merusak tanaman kelapa seluas 100.000 hektar. Kondisi ini tergambar jelas dengan penurunan laju produksi yang tinggi dengan rata-rata penurunan sebesar 7,36% per tahun.

Dominannya tanaman kelapa rakyat yang tua dan terinstrusi air laut di Provinsi Riau menjadi produksi kelapa yang dihasilkan petani menjadi rendah. Rata-rata produksi kelapa petani kelapa hibrida PIR-Trans yang merupakan perkebunan standar hanya sebesar 3.000 butir per hektar untuk panen 3 bulan sekali. Disbun Provinsi Riau [4] menyatakan bahwa pendapatan petani kelapa hibrida pola PIR-Tran seluas 2 hektar pada tahun 2001 hanya sebesar Rp 3.515/KK/Tahun dan tahun 2002 sebesar Rp 4.320.000/KK/Tahun. Pendapatan petani kelapa hibrida pola PIR-Trans pada tahun 2007 relatif tidak lebih baik, dimana Eliza [5] menyatakan bahwa pendapatan petani kelapa hibrida pola PIR-Trans hanya sebesar Rp 3.787.000/KK/Tahun. Kondisi ini jauh berbeda dibandingkan petani kelapa sawit pola PIR-Trans. Disbun Provinsi Riau [4] menyatakan bahwa pendapatan petani kelapa sawit PIR-Trans seluas 2 hektar sebesar Rp 18.000.000/KK/Tahun. Hasil kajian Hadi dkk [6] menyatakan bahwa pendapatan petani kelapa pola PIR-Trans sebesar Rp 18.889.932/KK/Tahun.

Produksi kelapa yang terus menurun dan tertekannya harga jual kelapa rakyat menjadikan usaha perkebunan kelapa menjadi kurang menarik bagi petani. Pasar kelapa yang monopsoni telah menekan harga jual kelapa petani. Hadi dkk [7] merumuskan harga pembelian kelapa hibrida di Indragiri Hilir. Hasil simulasi dari rumus harga pembelian kelapa hibrida untuk Oktober 2012 adalah sebesar Rp 352,62 per butir untuk klas A, Rp 566,04 per butir untuk klas A dan Rp 966,98 per butir untuk klas Khina. Realisasi harga pembelian kelapa yang ditekan oleh perusahaan hanya Rp 250 per butir untuk klas B, Rp 500 per butir untuk klas A dan Rp 800 per butir untuk klas Khina. Pada masa yang relatif sama, penjualan kelapa bulat klas Khina oleh petani ke pedagang luar melalui perdagangan lintas batas sebesar Rp 1.750 per butir. Pada pertengahan tahun 2013, harga kelapa bulat hibrida klas Khina dan kelapa dalam sempat di atas Rp 2.000 per butir, namun kondisi tersebut tidak bertahan lama. Pada akhir tahun 2014, harga kelapa turun drastis menjadi Rp 1.200 per butir.

Produksi kelapa petani yang terus menurun dan semakin meningkatnya ekspor kelapa bulat menjadikan suplai kelapa ke pabrik pengolahan kelapa domestik juga menurun. Persaingan antar pabrik pengolahan kelapa untuk memperoleh bahan baku kelapa semakin ketat. Kondisi ini telah 'mendegradasi' pabrik pengolahan kelapa yang

tidak efisien. Tahun 2008 masih ada 18 unit pabrik pengolahan, menurun menjadi 5 unit pada tahun 2014. Pada akhir 2015, jumlah pabrik pengolahan kelapadi Provinsi Riau hanya tinggal 4 pabrik saja.

Analisis SWOT - TOWS

Pengumpulan informasi menggunakan analisis SWOT meliputi lingkungan internal (kekuatan dan kelemahan) dan lingkungan eksternal (peluang dan ancaman). Kekuatan yang dimiliki oleh industri kelapa di Provinsi Riau adalah:

1. Provinsi Riau memiliki luas areal dan produksi kelapa terbesar di Indonesia. Pada tahun 2015, luas areal kelapa dalam bentuk perkebunan kelapa di Provinsi Riau seluas 514.026 hektar atau 14,19% dari total areal kelapa di Indonesia. Produksi kelapa sebesar sebesar 411.042 ton setara kopra [2].
2. Kesesuaian tanaman kelapa dilahan gambut pasang surut. Lahan gambut pasang surut yang direkayasa dengan tanggul dan trio tata air telah terbukti sesuai untuk pertanaman kelapa dan relatif tidak bersaing dengan tanaman lainnya seperti kelapa sawit. Pada kondisi cukup baik, produktivitas kelapa dalam dilahan gambut pasang surut lebih dari 1,48 ton/ha/tahun setara kopra, lebih tinggi dari potensi rata-rata yaitu sebesar 1 ton/ha/tahun setara kopra.
3. Tanaman kelapa telah lama menjadi sumber usaha dan pendapatan masyarakat. Sejak tahun 70-an hingga saat ini, perkebunan kelapa diusahakan dan menjadi sumber pendapatan utama oleh setidaknya 100.000 kepala keluarga yang ada di Provinsi Riau
4. Komitmen yang tinggi dari Pemerintah Kabupaten khususnya Kabupaten Indragiri Hilir dan Pemerintah Provinsi Riau dalam pengembangan industri pengolahan kelapa. Upaya mengembalikan kejayaan industri kelapa di Indragiri Hilir, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir telah mencanangkan gerakan kembali menanam kelapa. Selama periode 2005 – 2014, telah dilakukan peremajaan kebun kelapa rakyat seluas 5.760 hektar. Perbaikan tanggul mekanik sepanjang 1.322 KM. Pembangunan tanggul manual sepanjang 302 KM. Normalisasi saluran sepanjang 670 KM.
5. Sistem agribisnis kelapa yang telah berkembang baik. Sejak awal tahun 80-an, pengembangan industri kelapa berbasis agribisnis sama halnya dengan pengembangan industri kelapa sawit. Perbedaannya adalah industri kelapa sawit terus mendapat perhatian yang cukup baik dari pemerintah, sebaliknya industri kelapa dilakukan 'pembiaran' sehingga sub-sistem agribisnis kelapa banyak yang terputus.
6. Masih banyak produk turunan kelapa yang dapat dihasilkan dari kelapa. Produk turunan kelapa yang sudah diproduksi dan diekspor tiga tahun terakhir sekitar 18 produk berbasis kelapa, antara lain arang tempurung, crude coconut oil, RBD coconut oil, desiccated coconut, coconut cream, cream coconut squares, coconut milk powder, coconut virgin oil, gula merah, copra extraction pallet, coconut shell activated C, coconut shell charcoal, coconut milk, serat sabut kelapa, coconut extraction pellets, coconut water consentrate, coconut shell carbon, granular coconut shell AC, dan coconut oil. Masih banyak produk berbasis kelapa yang dapat dihasilkan, dimana Philipina telah memproduksi dan mengekspor tidak kurang dari 100 produk berbasis kelapa.

Kelemahan pada industri kelapa adalah:

1. Luasnya tanaman kelapa petani yang tua dan rusak. Pada tahun 2015 seluas 117.758 hektar tanaman kelapa dalam dari total luas 514.026 hektar
2. Banyak infrastruktur kelapa (trio tata air dan tanggul) yang sudah rusak dan tidak berfungsi. Bila pada periode 2005 – 2014 telah diupayakan perbaikan infrastruktur kebun kelapa oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah, namun kecepatan laju kerusakan infrastruktur lebih besar dibandingkan yang direhabilitasi. Pada tahun 2015, masih terdapat 100.000 hektar tanaman kelapa yang terancam instrusi air laut karena sudah rusak dan tidak berfungsinya tanggul dan trio tata air yang dibangun tahun 80-an oleh Pemerintah.
3. Produksi dan produktivitas tanaman kelapa terus menurun. Selama periode 2008 – 2015, rata-rata produksi kelapa menurun sebesar 6,02% per tahun dengan penurunan produktivitas sebesar 18,93% per tahun.
4. Harga jual kelapa bulat petani yang rendah. Harga pembelian kelapa hibrida pada bulan Oktober 2012 hanya Rp 250 per butir untuk klas B, Rp 500 per butir untuk klas A dan Rp 800 per butir untuk klas Khina. Pada masa yang relatif sama, penjualan kelapa bulat klas Khina oleh petani ke pedagang luar melalui perdagangan lintas batas sebesar Rp 1.750 per butir. Pada pertengahan tahun 2013, harga kelapa bulat hibrida klas Khina dan kelapa dalam sempat di atas Rp 2.000 per butir, namun kondisi tersebut tidak bertahan lama. Pada awal tahun 2014, harga kelapa turun menjadi Rp 1.200 per butir

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dan pada bulan Juli 2014 meningkat menjadi Rp 1.950 per butir. Pada April 2015, harga kelapa dalam Rp 1.750 per butir, turun menjadi Rp 1.500 per butir pada bulan Desember 2015..

5. Sumber pendapatan petani hanya bergantung dari produksi kelapa bulat. Sabut, tempurung, dan air belum diolah dan menjadi sumber pendapatan. Begitu juga dengan pemanfaatan lahan kelapa untuk tanaman sela atau ternak.
6. Biaya pengolahan kelapa yang meningkat dan relatif tinggi. Kapasitas terpakai pabrik sekitar 60%, labor intensif dan upah tenaga kerja yang terus meningkat serta lambatnya pengembangan produk bernilai tambah tinggi menjadi rasio pengolahan kelapa biaya pengolahan terhadap harga jual terus meningkat.

Pada lingkungan eksternal, peluang pengembangan industri kelapa adalah:

1. Permintaan terhadap produk- produk kelapa dipasar domestik dan ekpor masih prospek. Pada tahun 2011, volume ekspor produk kelapa Indragiri Hilir sebesar 281.567.817,87 MT meningkat menjadi 413.495.056,36 MT tahun 2015 [4].
2. Permintaan terhadap produk- produk kelapa yang bernilai tambah tinggi terus meningkat. Ekspor coconut milk powder Kabupaten Indragiri Hilir pada tahun 2011 sebesar 51.841 kg meningkat menjadi 1.459.404 MT tahun 2015. Ekspor coconut water cocentrate tahun 2011 sebesar 4.754,59 MT meningkat menjadi 23.045.618 MT ton tahun 2015 [4].
3. Harga produk kelapa yang relatif tinggi. Selama periode Januari -Desember 2015, harga coconut oil (Nort-West Europe Market) sebesar US$1.109/ton lebih tinggi dibanding CPO US$ 623 maupun palm kernel oil US$ 909 (MPOB, 2016). Harga ekspor DC (FOB) sebesar US$ 2.418/ton [9] dan [8]
4. Rendahnya penolakan produk kelapa oleh AS dan MEE. Berbeda dengan produk kelapa sawit, produk olahan kelapa yang diekspor relatif bebas dari isu lingkungan sehingga tidak mendapat hambatan memasuki pasar AS dan MEE.

Sementara itu, ancaman yang dihadapi oleh industri kelapa adalah:

1. Daya saing minyak kelapa sawit yang jauh lebih tinggi. Terus berkembangnya teknologi di industri kelapa sawit, baik di hulu seperti berkembangnya bibit kelapa sawit unggul dan teknologi pemeliharaan, maupun dihilir seperti teknologi pengolahan dan diversifikasi produk turunan telah menjadikan industri kelapa sawit semakin efisien dibanding kelapa.
2. Philipina jauh lebih maju dalam pengembangan industri kelapa. Philipina merupakan leader dalam industri pengolahan kelapa dengan memproduksi dan mengekspor lebih dari 100 produk berbasis kelapa.

Hasil pemadanan informasi terhadap informasi yang dikumpulkan diperoleh 7 alternatif strategi alternatif untuk pengembangan industri kelapa di Provinsi Riau.Strategi SO meliputi (i) Replanting tanaman kelapa dengan pola SUPRADIN (sistem usaha perkebunan kelapa rakyat diversifikasi integratif) – diversifikasi dengan kopi/coklat - terintegrasi dengan ternak dan dilakukan pemberdayaan dengan luasan yang setara dengan laju tanaman tua/rusak. (ii) percepat hilirisasi industri pengolahan kelapa secara terpadu dengan pengembangan produk olahan kelapa yang bernilai tambah tinggi bersumber dari daging buah, air, tempurung dan sabut. (iii) Mendorong kemitraan integratif melalui peran perusahaan pengolahan kelapa memberdayakan usaha kebun kelapa dan UKM pengolahan kelapa. Strategi WO meliputi (iv) Perbaiki infrastruktur di perkebunan kelapa, utamanya tanggul dan trio tata air. (v) Penetapan harga pembelian kelapa petani, sepertinya halnya penetapan harga TBS kelapa sawit sehingga petani kelapa juga mendapattkan harga jual kelapa yang lebih pantas. (vi) Kembangkan UKM pengolahan kelapa, dengan memberdayakan usaha bahan baku tempurung kelapa dan sabut yang selama ini belum terbuang.
Strategi ST adalah dengan (vi) meningkatkan akses petani terhadap bibit unggul kelapa melalui penumbuhan penangkar kelapa unggul disentra-sentra pengembangan kelapa. Strategi WT dengan (ii) memperbaiki infrastruktur di perkebunan kelapa dan percepat hilirisasi industri pengolahan kelapa secara terpadu sebagaimana telah diuraikan dibagian sebelumnya.

Prioritas Pengembangan Industri Kelapa

Keputusan alternatif yang diprioritaskan dari strategi pengembangan industri kelapa menggunakan AHP ditunjukkan pada Gambar 3. Pengembangan untuk penyelamatan industri kelapa Provinsi Riau dapat dilakukan melalui kemitraan integratif 3 stakeholder utamanya yaitu Petani Kelapa – Pengusaha Kelapa (Pabrik

Pengolahan Kelapa) dan Pemerintah. Strategi prioritas lainnya adalah penetapan harga pembelian kelapa oleh pemerintah daerah, perbaikani infrastruktur kebun kelapa, replanting, percepat hilirisasi industri pengolahan kelapa secara terpadu, pengembangan UKM pengolahan kelapa, peningkatan akses petani terhadap bibit kelapa unggul.

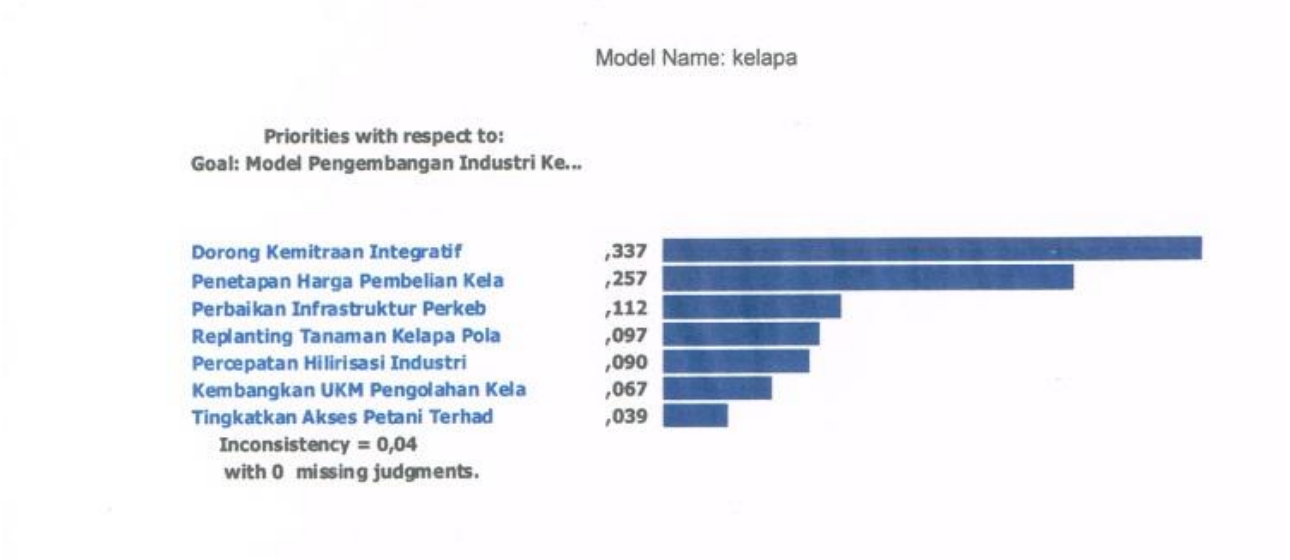

Gambar 3. Keputusan Alternatif Prioritas Pengembangan Industri Kelapa di Provinsi Riau

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengembangan untuk penyelamatan industri kelapa Provinsi Riau dapat dilakukan melalui kemitraan integratif antara petani kelapa – pengusaha dan pemerintah. Keberhasilan kemitraan integratif harus didukung dengan penetapan harga pembelian kelapa dan perbaikan segera infrastruktur kebun kelapa khususnya tanggul dan Trio Tata Air.

DAFTAR PUSTAKA

[1] IMD. 2014. IMD World Competitiveness Year Book 2014. www.imd.org/news/2014-world-competitiveness.cfm.

[2] Dinas Perkebunan Provinsi Riau., "Statistik Perkebunan Provinsi Riau".,DisbunProvinsi Riau,Pekanbaru, 2015

[3] Saaty, T.L., Pengambilan Keputusan Bagi Para Pemimpin"Proses Hirarki Snalitik Pengambilan Keputusan dalam situasi yang kompleks". Seri Manajemen No. 134, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. 1993.

[4] Dinas Perkebunan Provinsi Riau., "Statistik Perkebunan Provinsi Riau".,DisbunProvinsi Riau. Pekanbaru. 2003.

[5] Eliza., "PengaruhFaktorProduksiTerhadapProduksiKelapaHibridaPola Plasma di Kabupaten Indragiri Hilir". Laporan Research Grant,JurusanSosialEkonomi, FakultasPertanianUniversitas Riau, Pekanbaru, 2007

[6] Hadi, S., Ahmad, R danNurul, Q., "Perkebunan KelapaSawit Rakyat di Provinsi Riau".,LaporanPenelitiankerjasama antara Universitas Riau denganYayasan WWF Indonesia, Pekanbaru, 2006.

[7] Hadi, S., YusminidanEliza.,"KajianPenetapanRumusBaruHargaPembelianKelapaHibridaProduksiPetani Plasma PIR-Trans di Kabupaten Indragiri Hilir". LaporanPenelitiankerjasamaDinas Perkebunan Kabupaten Indragiri HilirdenganFakultaspertanianUniversitas Riau. Pekanbaru, 2009.

[8] Malaysian Palm Oil Board (MPOB). Available http:/mpob.gov.my/index.php/en/ statistics/price/montly. Html.

[9] Asian and Pacific Coconut Community (APCC). Available: http:/apccsec/apccsec/media.php?page= statistics.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENENTUAN HIRARKI PENGEMBANGAN WILAYAH PADA PULAU-PULAU KECIL BERPOTENSI WISATA DI KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO

Tondobala Linda[1], Cynthia Wuisang[1], Leidy Rompas[2]

[1]Prodi PWK/Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi

[2] Prodi Arsitektur/Fakultas Teknik, Universitas Sam Ratulangi

lindtmt@yahoo.com

Naskah diterima :21 Februari 2017 Naskah direvisi : 2 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara kaya akan obyek wisata bahari. Spot-spot penyelaman menyebar di seluruh klaster pulau namun berkembang secara 'exclusive', tidak berinteraksi dengan desa-desa di pulau. Kebijakandanperencanaan pembangunan sering mengabaikan kondisi spesifik pulau-pulau kecil, masih berorientasi wilayah daratan (continental). Potensi unggulan kepulauanbelum dilihat sebagai pendorong pertumbuhan wilayah. Pusat-pusat pengembangan wilayah yang ada di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro belum berfungsi sesuai hirarkinyamenjadi 'prime mover' bagi kawasan/desa-desa sekitar. Dalam konteks penentuan pusat pengembangan wilayah kepulauan, perlu variabel yang mendukung karakteristik pulau kecil.Tujuan penelitian, mengetahui permasalahan pengembanganwilayah pulau-pulau kecil dan menemukantingkat pengembangan wilayah serta hirarki pengembangan wilayah dengan pendekatan karakteristik dan keunggulan pulau-pulau kecil. Penelitian deskriptif kuantitatif dengan teknik skoring dan rumus kelas interval untuk menemukan tingkat pengembangan wilayah.Analisa skalogram dipakai untuk menentukan hirarki pengembangan wilayah.Penentuan variabelselain didasarkan pada kondisi spesifik pulau dan potensi unggulan, juga ketersediaan prasarana dan sarana yang mendukung potensi yang ada.Hasil penelitian memperlihatkan bahwapusat pengembanganwilayah padaklaster pulau belum berperan sebagaimana yang diharapkan dalam rencana tata ruang;28 desa yang bukan merupakan pusat pengembangan wilayah dalam struktur ruang memiliki tingkat pengembangan wilayah yang tinggi dan desa-desa ini dapat dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan baru; hirarki I dan II dalam pengembangan wilayah ditempati oleh desa-desa yang memiliki banyak keunggulan dari sisi karakterisktik sumber daya pariwisata kepulauan. Selama ini, kegiatan berbasis pariwisata belum diberikan kesempatan - melalui kebijakan dan peraturan - untuk menciptakan stimulus dalam pengembangan wilayah.

***Kata Kunci**: Pengembangan wilayah, pariwisata, klaster, pulau kecil*

PENDAHULUAN

Latar Belakang Permasalahan

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro di Provinsi Sulawesi Utara memiliki potensi sumberdaya perikanan, kelautan dan pariwisata besar ternyata belum dapat menyejahterakan masyarakat. Pendekatan perencanaan wilayah selama inimengabaikan sifat dinamis dan problematik spesifik kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil sehingga terjadi kekeliruan dalam penentuan kebijakan dan rencana.Pusat-pusat pengembangan wilayah dalam struktur ruang berdasarkan RTRW Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013-2033 [1] belum berfungsi sesuai hirarkinya untuk memberikan pelayanan bagi wilayah sekitar. Menurut Adisasmita, R, 2006 [2], satuan wilayah kepulauan memiliki karakteristik wilayah geografis, kondisi demografis dan tuntutan kebutuhan prasarana dan sarana yang khas dalam pengembangan wilayah.

Dalam perencanaan tata ruang, Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro terbagi dalam satuan wilayah pengembangan yang disebut klasterpulau/gugus pulau.Klaster pulau merupakan pendekatan dalam penataan ruang yang dianggap paling tepat untuk wilayah kepulauan, dimana setiap pulau utama melayani pulau kecil sekitarnya[3].Namun sampai saat ini, pusat pengembangan yang adajauh dari fungsimaksimal. Interaksi yang diharapkan antara pulau utama dan pulau kecil sekitarnya belumterjadi.Pengembangan ekonomi cenderung

mengisi kawasan geografis tertentu, sehingga menimbulkan kesenjangan ruang (*spatial inegualities*) berdasarkan pendapatan, kemakmuran dan kesejahteraan material[4].

Kepulauan yang kaya akan potensi wisatadengan spot-spot penyelaman tersebar di perairan yangmulai ramai dikunjungi oleh para operator selam, membawa penyelam lokal dan mancanegara tetapi *'spreat effect'* kepada masyarakat yang berada di pulau belum terlihat.

Urgensi Penelitian

Stagnasi dalam pengembangan wilayah pulau-pulau kecil tetap berlanjut jika pendekatan perencanaan wilayah tidak diubah. Kondisi ini akan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat akibat ketertinggalan dan kesenjangan pengembangan wilayah. Pulau-pulau kecil belum diberikan peran dalam pengembangan wilayah setara dengan karakteristik dan potensi unggulannya; tidak terintegrasi antara pengembangan pariwisata dan pengembangan wilayah sehingga masyarakat belum mendapat manfaat dari kegiatan pariwisata yang ada. Kebijakan memadai dari pemerintah untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan kegiatan-kegiatan usaha pesisir dan pariwisataakanmemperkecil kesenjangan pembangunan antar wilayah.

Dalam menentukan pusat-pusat pengembangan wilayah pesisir dan pulau perlu kriteria berbeda dengan wilayah daratan. Perbedaan pusat pertumbuhan wilayah pesisir tidak tergantung pada kemampuan kota yang berperan sebagai pusat pengembangan. Wilayah pesisir dan pulau dapat bertumbuh tanpa melalui dorongan dan rangsangan dari kota[5].

Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan dalam penelitian ini adalah mengetahui hambatan dan permasalahan pengembangan wilayah yang terjadi pada klaster pulau kecil sekaligus mengetahuitingkat pengembangan wilayah dan menemukan hirarki pengembangan wilayah dengan pendekatan karakteristik dan keunggulan pulau-pulau kecil.Diharapkan pusat-pusat pengembangan baru bisa tercipta dengan adanya pendekatan perencanaan wilayah dengan menggunakan variabel-variabel spesifik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian deskriptif kuantitatif. Untuk menjawab tujuan pertama penelitian maka pendekatan keruangan dipakai dalam pendeskripsian ruang seperti identifikasi, inventarisasi dan klasifikasi indikator-indikator(kependudukan, posisi strategis pulau, fasilitas sosial dan ekonomi). Melalui analisa tingkat pengembangan wilayahdapat ditemukan permasalahan wilayah yang dimiliki oleh kawasan.

Pada tujuan penelitian kedua, analisis skalogram dipakai untuk menentukan hirarki pusat-pusat pengembangan. Dalam hal ini, indikator dari variabel seperti potensi unggulan lokasi/desa; jarak, akses ke noda transportasi dan peranan kawasan dibenturkan dengan temuan tujuan pertama (lokasi yang memiliki tingkat pengembangan wilayah tinggi). Sehingga dapat ditemukanpusat-pusat pengembangan wilayah (baru).

Penelitian ini berlokasi pada seluruh wilayah klaster pulau di Kabupaten Siau Tagulandang Biaro, dan observasi secara khusus dilakukan pada desa-desa yang diseleksi berdasarkan karakteristik dan keberadaan potensi unggulan pariwisata. Dalam observasi lapangan dilaksanakan pengambilan data primer berdasarkan variabel yang ditentukan. Dokumentasi, teknik wawancara dan diskusi serta ketersediaan data-data sekunder berupa profil desa dan kecamatan serta data-data statistik lainnya mendukung observasi lapangan. Pemetaan merupakan bagian yang penting yang dilakukan secara paralel dengan pengambilan data di lokasi. Koreksi peta dibuat langsung di lapangan agar peta dasar yang dipakai menjadi peta yang sahih untuk selanjutnya disusun dalam bentuk peta tematik sesuai kepentingan analisis dan kajian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Wilayah Kepulauan

Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro salah satu dari 13 daerah otonom di Provinsi Sulawesi Utara, terdiri dari pulau-pulau yang membentang dari selatan ke utara. Kabupaten ini memiliki luas daratan 275,95 km^2, terdiri dari 47 pulau yaitu,12 pulau berpenghunidan 35 pulau belum berpenghuni. Hanya ada tiga pulau besar,Pulau Siau (pulau terbesar), Pulau Tagulandang dan Pulau Biaro (pulau terkecil).Ondong di Kecamatan Siau Barat sebagai ibukota kabupaten berada di Pulau Siau. Wilayah ini memiliki 5 (lima) buah gunung dan 2 (dua) di antaranya gunung berapi aktif. Lahan datar (0-15%) hanya sekitar 30% dari luas wilayah kabupaten. Wilayah dengan kelerengan > 25% meliputi 60% dari luas wilayah kabupaten.

Kabupaten ini terdiri dari 6 (enam) kecamatan di Pulau Siau, 3 (tiga) kecamatan di Pulau Tagulandang dan 1 (satu) kecamatan di Pulau Biaro. Kecamatan Siau Timur Selatan memiliki kepadatan penduduk tertinggi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

diikuti dengan Kecamatan Siau Timur.Kecamatan Siau Timur Selatan merupakan kecamatan hasil pemekaran dari Kecamatan Siau Timur sehingga tidak heran memiliki konsentrasi jumlah penduduk yang besar.Kecamatan Siau Timur secara historis telah berkembang sebagai kegiatan jasa, perdagangan dan perhubungan.Pelabuhan Ulu yang berada di kecamatan ini merupakan pelabuhan yang paling ramai di Pulau Siau.

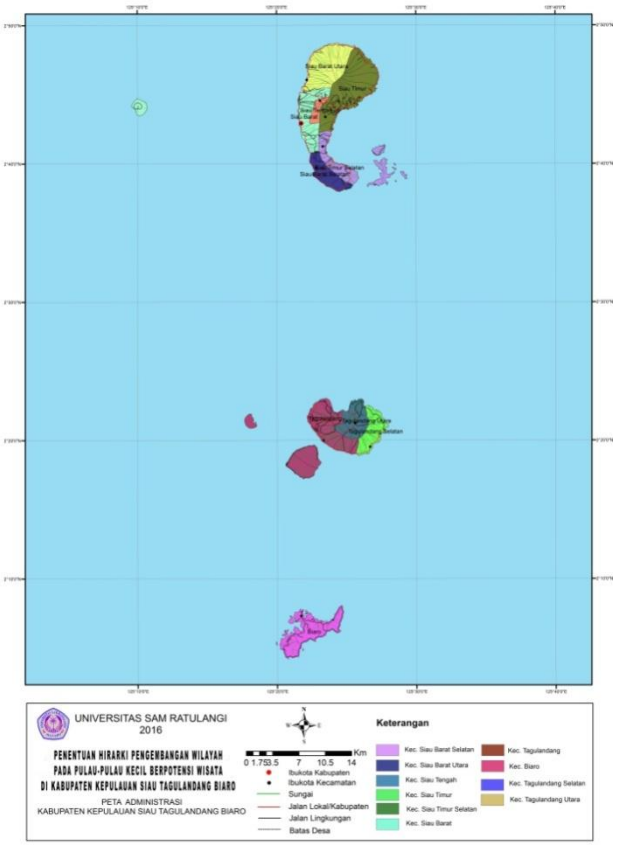

Gambar 1. Wilayah Administratif Kabupaten
Sumber : RTRW Kab.Kep. Sitaro 2013-2033

Peringkat berikut kepadatan penduduk di Pulau Siau berada pada Kecamatan Siau Barat Selatan yang merupakan hasil pemekaran dari Kecamatan Siau Barat.Di Kecamatan Siau Barat terdapat Ondong, ibukota Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.Kesibukan kota-kota kecil ditandai dengan 'hari pasar'. Kegiatan pasar hanya terpusat di Ulu dan Ondong, tidak berlangsung setiap hari dan, bergantian di kedua kota itu setiap minggu.Pada saat hari pasar kedua kotatersebut ramai dengan berbagai kegiatan perdagangan dan transportasi.

Tabel 1. Luas wilayah per kecamatan di KabupatenKepulauan Siau Tagulandang Biaro

No.	Kecamatan	Luas (km^2)	Persentase (%)	Jlh. Pend (jiwa)
1	Tagulandang	55.53	20.12	12508
2	Biaro	20.85	7.56	3554
3	Tagulandang Utara	17.92	6.49	4360
4	Tagulandang Selatan	21.63	7.84	4724
5	Siau Timur	55.94	20.27	16246
6	Siau Timur Selatan	24.06	8.72	8189
7	Siau Barat	34.92	12.65	8518
8	Siau Barat Selatan	15.10	5.47	4597
9	Siau Barat Utara	18.20	6.60	4391
10	Siau Tengah	11.80	4.28	1927
		275.95	100.00	69014

Sumber : Kabupaten Sitaro Dalam Angka 2016.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Kepadatan penduduk tertinggi selanjutnya berada di Pulau Tagulandang di Kecamatan Tagulandang Utara, yang juga memiliki pelabuhan. Melihat sebaran kepadatan penduduk, kecenderungan perkembangan wilayah mengikuti kemudahan aksesibilitas dan ketersediaan pelabuhan.Jika sebaran kepadatan di sandingkan dengan dengan kondisi kelerengan maka terlihat konsentrasi penduduk cenderung menyebar pada daerah datar (0-15%) sampai kelerengan30%.Pencapaian ke permukiman dengan kelerengan yang cukup terjal ditempuh melalui jalan berkelok, menanjak dan curam.

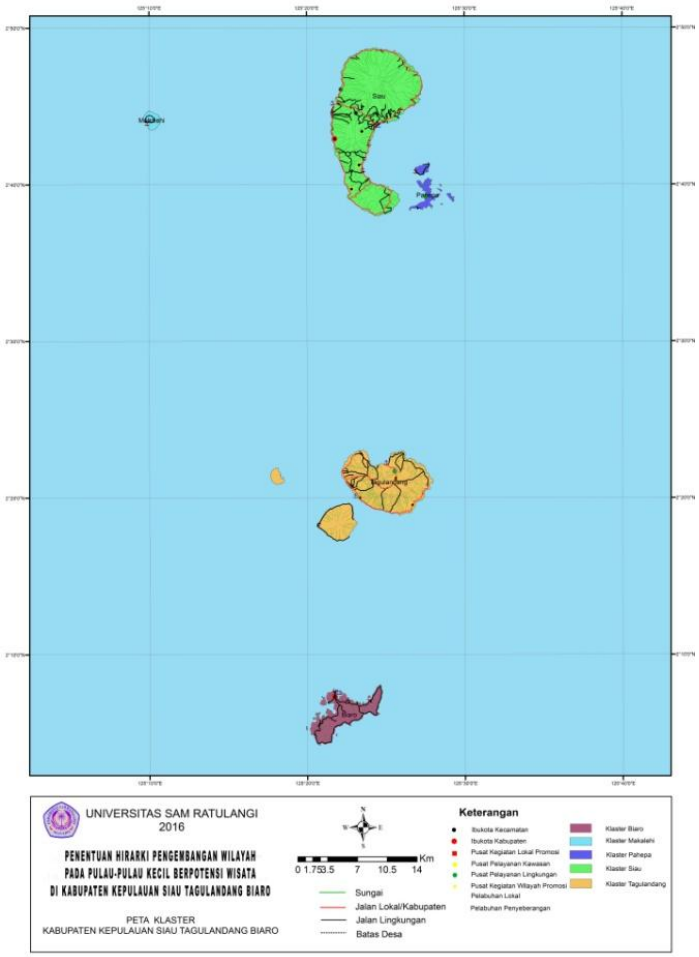

Gambar 2. Klaster dan Pusat Kegiatan
Sumber : RTRW Kab.Kep. Sitaro 2013-2033

Sistem perwilayahan menurut RTRW Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013-2033 [5], terdiri atas 5 (lima) klaster.Struktur ruang disesuaikan dengan wilayah pengembangan dalam klaster. Ada 6 (enam) pusat pengembangan wilayah dalam 5 (lima) klaster dan hanya 3 (tiga) pusat yang berkembang seperti yang direncanakan. Kegiatan ekonomi, pelayanan jasa dan pusat transportasi terkonsentrasi pada ketiga pusat tersebut yang terletak pada pulau besar. Pusat-pusat pengembangan wilayah dalam klaster pulau yang seyogyanya menjadi pusat pertumbuhan wilayah, belum memberikan hasil dan menguntungkan masyarakat karena potensi unggulan wilayah yang ada belum mampu dikelola secara optimal dan menjadi daya tarik bagi investasi.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel. 2 Pusat Kegiatan Dalam Klaster

Kecamatan	Klaster	Ibukota Kecamatan	Pusat Pengemb.
Siau Timur Selatan	Siau Timur	Sawang	Pahepa
Siau Timur	Siau Timur	Ulu	Ulu
Siau Tengah		Beong	
Siau Barat Utara	Siau Barat	Mahuneni	Ondong
Siau Barat Selatan		Makoa	
Siau Barat		Ondong	
	Makalehi		Makalehi
Tagulandang	Tagulandang	Buhias	Buhias
Tagulandang Utara		Bawoleu	
Tagulandang Selatan		Kisihang	
Biaro	Biaro	Lamanggo	Lamanggo

Sumber : RTRW Kab.Kep.Sitaro, 2013-2033

Obyek wisata alam dan budaya tersebar di seluruh kepulauan. Spot penyelaman berada pada setiap klasternamun berkembang secara ekslusif, tidak berinteraksi dengan desa sekitar.

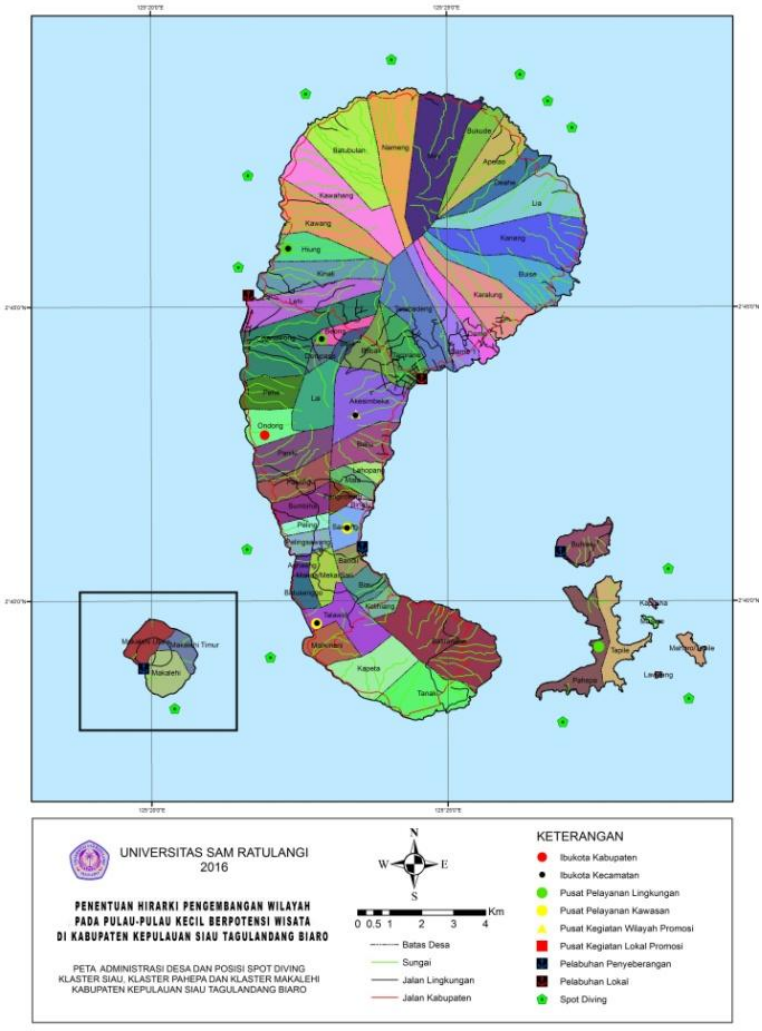

Gambar 3. Administrasi Desa dan Lokasi Spot Diving Klaster Siau, Klaster Pahepa dan Klaster Makalehi
Sumber : RIPPDA Kab. Kep. Sitaro 2014-2024 [6]

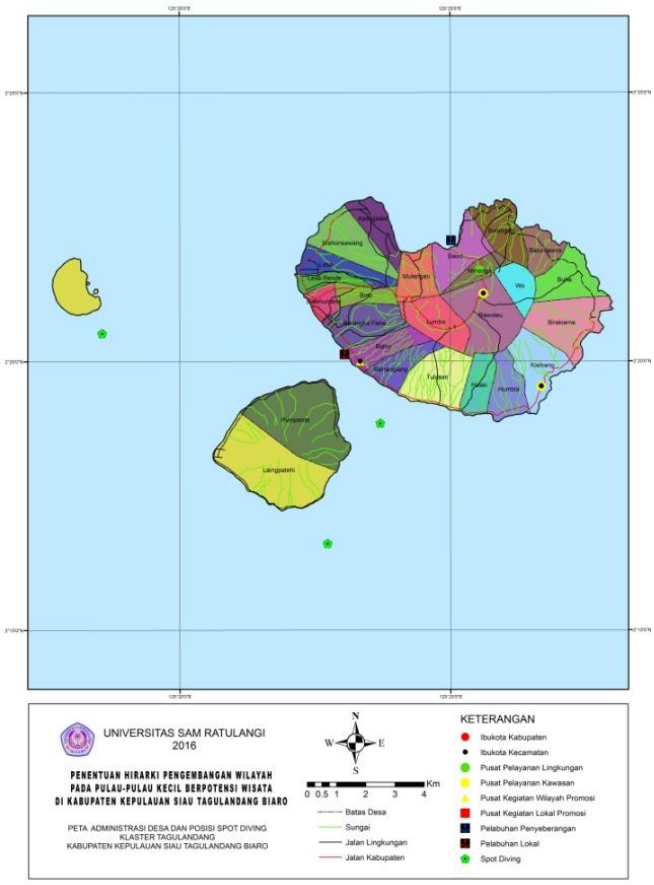

Gambar 5. Administrasi Desa dan Lokasi Spot Diving Klaster Tagulandang
Sumber : RIPPDA Kab. Kep. Sitaro 2014-2024 [6]

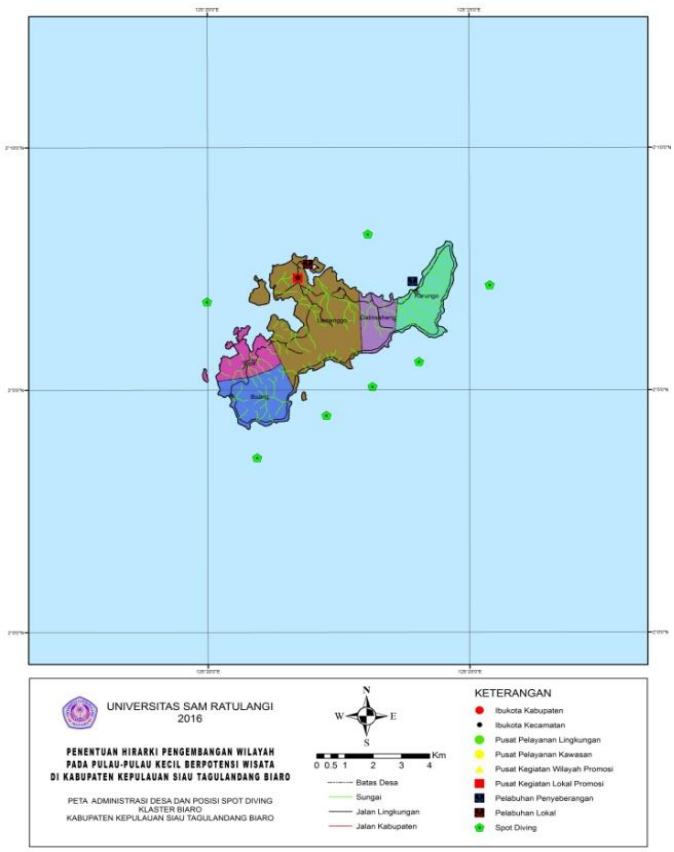

Gambar 5. Administrasi Desa dan Lokasi Spot Diving Klaster Biaro
Sumber : RIPPDA Kab. Kep. Sitaro 2014-2024

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Pengembangan pariwisata membutuhkan pendekatan menyeluruh dan terpadu yang melibatkan seluruh sektor. Sejauh ini, pengembangan pariwisata belum dilihat dalam suatu kesatuan pengembangan wilayah. Konsentrasi pengembangan produk bukan hanya terletak pada aktivitas penyelaman tetapi juga pada aktivitas masyarakat kepulauan dan obyek wisata lainnya secara keseluruhan dalam konsep wisata kepulauan (*island tourism*).

Permasalahan Pusat-Pusat Pengembangan Wilayah

Beberapa alasan sehinggapusat-pusat pengembangan wilayah di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biarotidak berkembang layaknya sebagai pusat pertumbuhan wilayah :

- Pertama: variabelpengembangan wilayah dalam tata ruanghasil perencanaan RTRW Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro 2013-2033 mengacu pada kriteria standar/umum pengembangan wilayah berorentasi daratan seperti, jumlah penduduk, jarak/pencapaian dari pulau besar/kota, ketersediaan prasarana dan sarana.
- Kedua: di wilayah daratan, pertumbuhan desa sangat tergantung pada kemampuan kotayang berperan sebagai pusat pengembangan; di wilayah pulau-pulau kecil, desa dapat tumbuh dan berkembang tanpa melalui dorongan/rangsangan dari pusatkegiatan di pulau besar. Penentuan pusat-pusat pengembangan wilayah dalam sistem wilayah kepulauan, memerlukan variabel yang berbeda karena karakteristik spesifik yang dimiliki wilayah kepulauan.
- Ketiga: sistem klaster pulau dalam struktur ruangKabupaten Siau Tagulandang Biaro secara fungsional memberikan peluang pusat-pusat pertumbuhan dalam klaster pulau kecil bisa berkembang tanpa rangsangan pusat-pusat pengembangan wilayah di pulau besar. Hal ini ternyata belum memberikan hasil maksimal dalam pertumbuhan dan pengembangan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro.
- Ke-empat: Kegiatan berbasis potensi unggulan kepulauan (wisata bahari) belum diberikan kesempatan untuk menciptakan stimulus pada pusat-pusat pengembangan yang ada. Spot-spot wisata berdiri sendiri dan tidak berinteraksi dengan desa-desa sekitar.

Penentuan Tingkat Pengembangan Wilayah

Dalam konteks secara fungsional klaster pulau belum memberikan hasil maksimal pada pengembangan wilayah maka memerlukan variabel yang berbeda untuk menentukan pusat pertumbuhan baru yang didasari oleh karakteristik spesifik lokasi sebagai landasan kebijakan mendorong perkembangan kegiatan pariwisata yang merupakan potensi unggulan wilayah kepulauan.

Beberapa pertimbangan dalam penentuan variabel, yaitu :

- Potensi sumber daya manusia
- Kesadaran masyarakat terhadap potensi yang ada di wilayahnya (selain yang rutin ditekuni)
- Fasilitas sosial dan ekonomi
- Posisi geografis

Untuk itu, dipilih variabel 1) kependudukan dan kemasyarakatan dengan indikator kepadatan penduduk, kelompok umur, pendidikan, organisasi kemasyarakatan; 2) variabel fasilitas sosial dengan indikator keberadaan sekolah dan balai pengobatan; 3) variabel posisi strategis dengan indikator kerapatan jalan, jarak ke pusat kegiatan, posisi dan kondisi desa; 4) variabel fasilitas ekonomi terkait indikator sebaran industri, jasa perdagangan dan pasar. Setiap indikator diberi bobot dan dihitung nilai skor. Teknik skoring dengan rumus kelas interval dipakai untuk mendapatkan tingkat pengembangan wilayah (tinggi sedang dan rendah).

Dari hasil perhitungan ditemukan 5 (lima) ibukota kecamatan, 5 (lima) pusat pengembangan klaster dan sejumlah 28 desa yang bukan pusat pengembangan wilayah ternyata memiliki tingkat pengembangan wilayah yang tinggi.

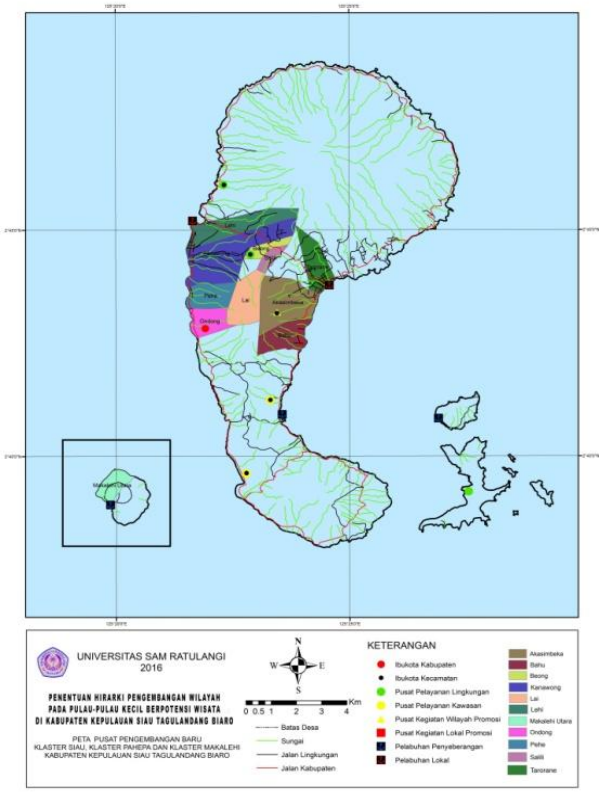

Gambar 6. Pusat Pengembangan Baru Klaster Siau, Klaster Pahepa dan Klaster Makalehi
Sumber : Hasil Analisa, 2016

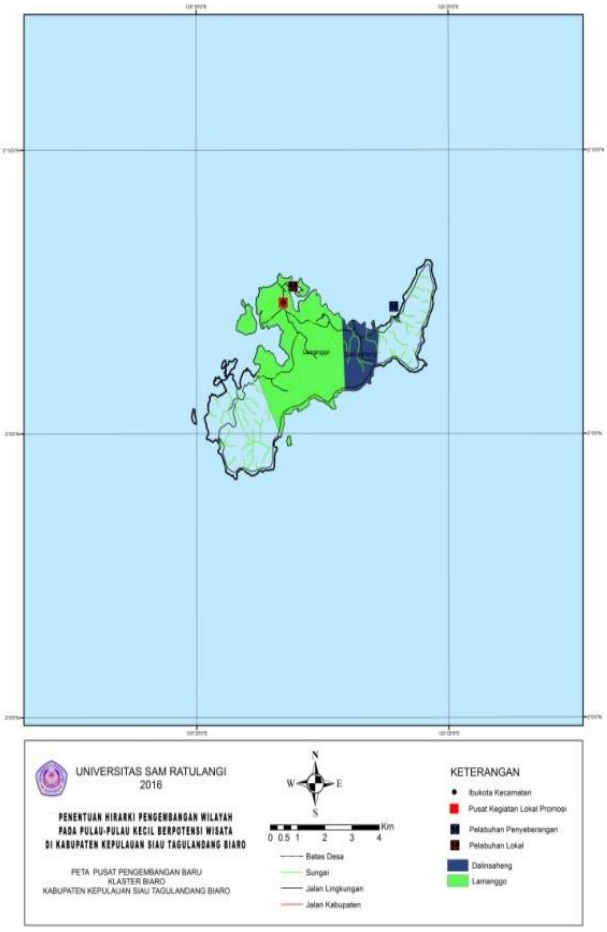

Gambar 7. Pusat Pengembangan Baru Klaster Tagulandang
Sumber : Hasil Analisa, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

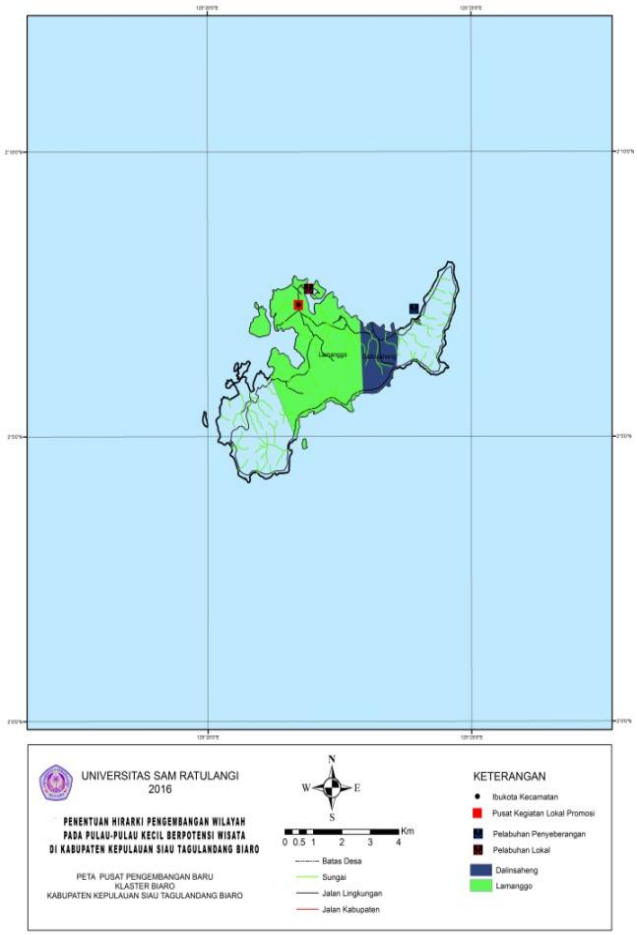

Gambar 8. Pusat Pengembangan Baru Klaster Siau, Klaster Pahepa dan Klaster Makalehi
Sumber : Hasil Analisa 2016

Hirarki Pengembangan Wilayah

Kota/desa yang memiliki tingkat pengembangan wilayah tinggi akan diklasifikasikan hirarkinya dengan cara dibenturkan dengan beberapa variabel terpilih. Melalui analisis skalogram ditemukan hirarki dalam peringkat : I,II, III. Pertimbangan yang dipakai dalam analisis ini adalah :

- Potensi/keunggulan lokasi
- Aksesibilitas
- Peranan lokasi (kota/desa)

Variabel terpilih dalam analisis hirarki pengembangan wilayah yaitu, 1) variabel potensi unggulan lokasi dengan indikatorjumlah obyek wisata, lokasi wisata unggulan; 2) variabel aksesibilitas terkait dengan indikator jarak ke pelabuhan, jarak ke terminal dan akses transportasi publik; 3) variabel peranan kawasan terkait dengan indikator hirarki pelayanan kota/desa. Hasilnya, ditemukan pusat-pusat pengembangan wilayah baru yang berpotensi untuk berkembang.Beberapa desa tepatnya di hinterland menempati peringkat I dan II. Banyak desa yang tidak diperhitungkan ternyata berpeluang mengalami pertumbuhan jika diberikan kesempatan dalam pembangunan.

KESIMPULAN DAN SARAN

- Sistem klaster pulau dalam struktur tata ruangsecara fungsional wilayah belum memberikan peluang berkembangpusat-pusat pertumbuhan pada pulau kecil.
- Penentuan pusat-pusat pengembangan wilayah dalam sistem wilayah kepulauan, memerlukan variabel yang berbeda yang didasari oleh karakteristik spesifik pulau-pulau kecil terkait pengembangan pariwisata.

ISBN : 978-602-73463-1-4

- Desa-desa yang tidak diperhitungkan dalam struktur ruang memiliki tingkat pengembangan wilayah yang tinggi dan dikategorikan sebagai pusat pertumbuhan baru.
- Penelitian lanjut penting untuk mengintegrasikan pusat pertumbuhan baruke dalam pusat pengembangan klaster; menyusun konsep kebijakan mendukung pengembangan pusat pertumbuhanwilayah dan pengembangan pariwisata dalam satu kesatuan wilayahmelalui ketersediaan prasarana dan sarana wilayah untuk pengembangan produk wisata.
- Menyusun *policy brief* sebagai bentuk advokasi kepada pemerintah daerah agar kebijakan lebih fokus dan peraturan teraplikasi baik.
-

DAFTAR PUSTAKA

[1] RTRW Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2013-3033
[2] Adisasmita Rahardjo,"Pembangunan Kelautan dan Kewilayahan", Yogyakarta : Graha Ilmu, 2006
[3] Baiquni, M,"Membangun Pusat-Pusat di Pinggiran : Otonomi di Negara Kepulauan" Yogyakarta : *IdeAs* & PKPEK, 2004
[4] Asep Hariyanto, "Percepatan Pengembangan Wilayah Melalui Strategi Implementasi Wilayah Pengembangan (WP) dan Hirarki Kota-Kota", Jurnal PWK UNISBA, Vol 7 No 1, 2007
[5] Kartika Listriana, "Penentuan Pusat-Pusat Pengembangan Di Wilayah Pesisir dan Laut,Buletin Tata Ruang, September-Oktober 2011, Dijen Penataan Ruang, Kementrian PU, Jakarta, 2011
[6] RIPPDA Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro, 2014-2024

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TEMA B

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN

PERANAN USAHA PELAYANAN JASA ALSINTAN (UPJA) KELAS BERKEMBANG DALAM PENGEMBANGAN USAHATANI PADI SAWAH DI KABUPATEN TEBO

Asnawati. Is

Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo

Email:Zahira_siregar@yahoo.co.id

Naskah diterima : 22 Februari 2017Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) kelas Berkembang dan pendapatan petani padi sawah yang memanfaatkan UPJA tersebut di Kabupaten Tebo. Kemajuan teknologi mekanisasi sudah dikembangkan pada subsektor pertanian tanaman pangan, dengan teknologi mekanisasi pertanian (alat mesin pertanian/Alsintan), sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia akan lebih termanfaatkan dalam rangka peningkatan produksi pertanian, yang pada gilirannya sekaligus akan mengembangkan ekonomi masyarakat.Metode Penelitian yang digunakan adalah metode survei dengan dasar penetapan wilayah sengaja (purposive sampling) dengan pertimbanganbahwa daerah ini memiliki kelompok UPJA kelas berkembang, berprestasi tingkat kabupaten dan provinsi bahkan pada tahun 2013 UPJA salah satu UPJA mendapatkan peringkat sepuluh besar penilaian tingkat nasional yang dilakukan oleh Direktur alsintan Kementrian Pertanian RI. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan UPJA kelas berkembang di Kabupaten Tebo terlaksana dengan baik. Petani yang menggunakan jasa alsintan sangat terbantu dari aspek efisiensi waktu, tenaga, dan penggunaan alsintan mempercepat alih teknologi alsintan kepada masyarakat pertanian dipedesaan. Penerimaan usahatani padi sawah di Kabupaten Tebo dengan adanya peranan UPJA selama satu kali proses produksi adalah Rp 17.070.652,- dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 6.554.598,-.

***Kata kunci**: Peranan, UPJA, Usahatani Padi Sawah*

PENDAHULUAN

Salah satu komoditas yang dihasilkan dari sektor pertanian (sub sektor tanaman pangan) yang memiliki peran penting terhadap pemenuhan kebutuhan hidup penduduk Indonesia adalah padi. Program peningkatan produksi pertanian pada dasarnya merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan efisiensi pertanian dengan cara memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia secara efisien, efektif dan selektif dengan tujuan agar peningkatan produksi hasil pertanian dapat optimal. Dalam peningkatan produksi pertanian, proses produksi yang meliputi kegiatan prapanen sampai pada pascapanen memerlukan dukungan dari berbagai sarana dan prasarana produksi yang efektif, diantaranya adalah dukungan dalam mekanisasi pertanian yaitu alat mesin pertanian (Alsintan) [1].

Sejalan dengan kemajuan teknologi, maka penggunaan teknologi mekanisasi sudah dikembangkan pada subsektor pertanian tanaman pangan. Dengan teknologi mekanisasi pertanian (alat mesin pertanian/Alsintan), sumber daya alam dan sumber daya manusia yang tersedia akan lebih termanfaatkan dalam rangka peningkatan produksi pertanian, yang pada gilirannya sekaligus akan mengembangkan ekonomi masyarakat. Pemerintah Kabupaten Tebo telah mengembangkan Usaha Pelayanan Jasa Alsin Pertanian (UPJA). Pengembangan ini merupakan rangkaian upaya untuk memfasilitasi, melayani dan mendorong berkembangnya usaha agribisnis berbasis usahatani tanaman pangan, khususnya padi sawah. Secara ekonomi, UPJA ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat tani di pedesaan secara signifikan. Kabupaten Tebo memiliki 35 UPJA yang tersebar di beberapa kecamatan, dari 35 UPJA tersebut ada 3 UPJA kelas berkembang yang ada di Kecamatan Tebo Ulu bernama UPJA Usaha Bakti, Kecamatan VII Koto Ilir bernama UPJA Mandiri, dan Kecamatan Sumay bernama UPJA Tunas Baru. UPJA ini mempunyai bengkel, menjalin hubungan kerjasama dengan PT. KUBOTA dalam penyediaan suku cadang (*spare parts*), dan memiliki alsintan. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **"Peranan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) Kelas Berkembang dalam Pengembangan Usahatani Padi Sawah di Kabupaten Tebo".**

Tabel 1. Data Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Padi Sawah di Kabupaten Tebo Menurut Kecamatan Tahun 2014

No	Kecamatan	Luas Tanam (Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Kw/Ha)
1	Rimbo Bujang	0	0	0	0,00
2	Rimbo Ulu	0	0	0	0,00
3	Rimbo Ilir	0	0	0	0,00
4	Tebo Ilir	1.813	1.608	7.998,7	4,97
5	Muara Tabir	16	0	0	4,84
6	Tebo Tengah	259	217	1.079,4	4,97
7	Sumay	453	443	2.077,2	4,69
8	Tengah Ilir	305	290	1.254,4	4,33
9	Tebo Ulu	1.252	1.234	6.229,1	5,05
10	VII Koto	141	108	467,2	4,33
11	Serai Serumpun	270	322	1.529,3	4,75
12	VII Koto Ilir	220	163	826,3	5,07
	Jumlah		**9.972**	**39.661,88**	**39,77**

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo [2].

Dari uraian diatas maka permasalahan pokok yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah :

1. Bagaimana peranan UPJA kelas berkembang di Kabupaten Tebo ?
2. Berapa pendapatan petani padi sawah yang memanfaatkan UPJA kelas berkembang di Kabupaten Tebo ?

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tebo, pemilihan lokasi di daerah ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) atas pertimbangan bahwa daerah ini memiliki kelompok UPJA kelas berkembang, berprestasi tingkat kabupaten dan provinsi bahkan pada tahun 2013 UPJA Usaha Bakti mendapatkan peringkat 10 besar penilaian tingkat nasional yang dilakukan oleh Direktur alsintan Kementrian Pertanian RI [2].

Sumber data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data primer yaitu dengan cara observasi dan wawancara. Observasi yaitu metode pengamatan dan peninjauan langsung ke objek penelitian khususnya petani padi sawah yang menggunakan jasa UPJA. Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan daftar pertanyaan (kuisioner) kepada petani padi sawah untuk memperoleh informasi-informasi yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

Metode pengumpulan data sekunder dilakukan dengan mengutip dan menyalin data dari dinas atau instansi terkait, literatur pustaka, buku-buku, internet, dan laporan-laporan hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian.

Responden pada penelitian ini adalah operator UPJA dan petani padi sawah yang menggunakan jasa UPJA. Pengambilan sampel untuk petani dilakukan dengan metode acak sederhana (*simple random sampling*). Penarikan petani sampel dilakukan secara *proporsional random sampling* sebesar 5% dari populasi petani padi sawah yang ada. Jumlah petani populasi dan responden petani padi sawah yang menggunakan jasa UPJA terdapat pada Tabel 2 [3].

Tabel 2. Jumlah petani populasi dan responden di Kabupaten Tebo

No.	Nama UPJA	Kelompok Tani	Jumlah Populasi (Orang)	Jumlah Responden 5% (Orang)(*)
1	Usaha Bakti	1.Sinar Usaha	125	6
		2.Bedaro Indah	86	4
		3.Berkat Mulia	101	5
		4.Lumbung Jaya	74	3
		5.Usaha Bakti	95	4
		6.Tunas Harapan	66	3
		7.Panggo Rapat	118	5
2	Mandiri	1.Sialang Jaya	39	1
		2.Lingkaran Nago	38	1
		3.Telaga Putri	54	2
		4.Payau Sialit	42	2
		5.Mulya Tani	56	2
		6.Maju Jaya	25	1

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3	Tunas Baru	7.Harapan Makmur 1.Tunas Baru 2.Sido Makmur 3.Sadar Diri	15 40 43 43	1 2 2 2
Jumlah			**1.060**	**46**

Sumber : BPP Kabupaten Tebo [3].
(*) Hasil Olah Data Penelitian, 2015

Metode analisis data yang digunakan analisis deskriptif kuantitatif. Variabel yang diukur dan aspek yang diamati adalah peranan UPJA kelas berkembang dan pendapatan petani padi sawah yang memanfaatkan UPJA kelas berkembang di Kabupaten Tebo. Untuk menghitung besarnya tingkat pendapatan digunakan rumus sebagai berikut [4].

$$TR = Y \times Py$$

Dimana : TR = Total penerimaan (Rp)
Py = Harga Produk (Rp)
Y = Jumlah Produksi yang diperoleh (Kg),

$$TC = FC + VC$$

Dimana : TC = Total biaya (Rp)
FC = Total Biaya tetap (Rp)
VC = Total Biaya Variabel (Rp),

$$Y = TR - TC$$

Dimana : Y = Pendapatan (Rp)
TR = Total penerimaan (Rp)
TC = Total biaya (Rp)

HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Profil UPJA

UPJA Usaha Bakti berkedudukan di Kecamatan Tebo Ulu. UPJA Usaha Bakti didirikan pada tanggal 14 April 2000 yang pembentukan UPJA merupakan swadaya petani. UPJA Mandiri berada di Kecamatan VII Koto Ilir dan UPJA Tunas Baru berada di Kecamatan Sumay, kedua UPJA ini didirikan berdasarkan swadaya petani pada tahun 2001.

Berdasarkan AD/ART UPJA, kegiatan UPJA adalah melakukan pembajakan lahan sawah di Kelompok Tani, memperbaiki kerusakan Alsintan, merontok hasil panen petani, dan memantau peredaran dan pelaksanaan UPJA dilapangan. Tujuan UPJA adalah : 1) Memberikan pedoman dan arahan bagi petani dalam rangka pengembangan UPJA Mandiri, 2) Memfasilitasi pengembangan kelembagaan UPJA di sentra produksi komoditas pertanian menuju arah kemandirian, dan meningkatkan kemampuan pengelolaan UPJA di tingkat Kelompok, 3) Untuk meningkatkan hasil produktivitas padi sawah di Kabupaten Tebo, 4) Memberikan solusi dalam mengatasi kebutuhan alsintan bagi petani untuk mengolah lahan pertanian, 5) UPJA diharapkan dapat berperan yang penting dan strategis dalam rangka menggerakkan perekonomian di perdesaan, 6) UPJA di diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam rangka penyediaan pelayanan jasa alsintan guna mendukung tercapainya pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan makin berkurangnya tenaga kerja di pedesaan, menurunnya daya dukung lahan, dan rendahnya intensitas pertanaman, 7)Secara operasional pengembangan UPJA diarahkan untuk mendorong berkembangnya pemanfaatan alsintan dan sekaligus merupakan terobosan untuk mengatasi masalah kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan [5].

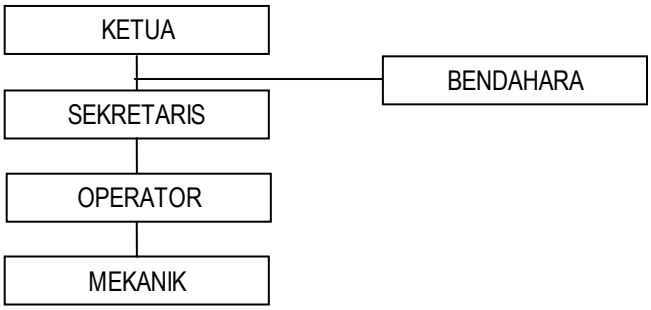

Gambar 1. Struktur Organisasi UPJA di Kabupaten Tebo

UPJA di Kabupaten Tebo melakukan usaha utama yaitu pelayanan jasa alat mesin pertanian (alsintan) dalam bentuk pelayanan jasa dengan sistem sewa, baik kepada anggota maupun kepada petani non anggota kelompok tani. UPJA juga memiliki bengkel sebagai tempat pemeliharaan atau perbaikan alsintan dan gudang penyimpanan alsintan. Alsintan yang dikelola oleh UPJA terdiri dari Traktor Roda 2 (TR2), Power Thresher (PT), Pompa Air (PA), Rice Milling Unit (RMU), Alat Pembuatan Pupuk Organik (APPO), Alat Pengering (Dryer). Pemakaian alsintan dihubungkan dengan luas areal dan jenis tanaman yang dibudidayakan serta jenis kegiatannya. Alsintan yang selektif dalam pemakaian akan mampu menjamin keberhasilan petani dalam mengelolanya secara komersil.

Tabel 3. UPJA Kelas Berkembang di Kabupaten Tebo Tahun 2015

No.	Nama UPJA	Nama Manajer	Kecamatan	Jenis Alat yang Dimiliki				
				TR2	PT	PA	RMU	APPO
1	Usaha Bakti	H. Najmi	Tebo Ulu	4	4	3	2	1
2	Mandiri	Jaswadi	VII Koto Ilir	6	4	2	2	1
3	Tunas Baru	Ibnu Hajar	Sumay	2	2	1	2	1

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo [2].

3.2. Peranan UPJA dalam Usahatani Padi Sawah

UPJA dilaksanakan pada wilayah kawasan agribisnis atau wilayah pengembangan kawasan agribisnis yang mempunyai masalah keterbatasan tenaga kerja dan penanganan hasil panen serta membutuhkan alsintan sebagai solusinya. Menurut Manwan [6] alsintan berperan untuk meningkatkan luas garapan dan intensitas tanam, untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi usahatani, menekan kehilangan hasil dan meningkatkan mutu dan nilai tambah produk pertanian serta memperluas kesempatan kerja di pedesaan melalui terciptanya agribisnis terpadu yang pada akhirnya akan memacu kegiatan ekonomi di pedesaan.

Dalam usahatani padi sawah peranan UPJA sangat dibutuhkan. UPJA berperan sebagai penyedia alsintan, tenaga operator, dan mekanik. Sedikitnya ada 9 (sembilan) kegiatan yang dikerjakan dalam kegiatan usahatani padi sawah yaitu penyemaian, pengolahan tanah, penanaman, penyiangan, pemupukan, penyemprotan pengendalian hama dan penyakit, panen, perontokan, dan penggilingan. Namun demikian, di Kabupaten Tebo belum semua pekerjaan tersebut dikerjakan dengan melibatkan alsintan karena keterbatasan jenis dan jumlah alsintan yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa baru 3 (tiga) jenis pekerjaan yang melibatkan alsintan yaitu pengolahan tanah (dengan TR2), perontokan/merontok (dengan PT), dan penggilingan (dengan RMU). Sementara 6 (enam) jenis kegiatan lainnya masih dikerjakan secara manual dengan peralatan atau cara tradisional. Melaksanakan pekerjaan dengan cara manual ini sangat menguras tenaga, memakan waktu yang lama, membutuhkan biaya yang lebih besar dan kurang efisien.

Pola penggunaan alsintan pada UPJA di Kabupaten Tebo mengikuti pola tanam padi sawah yang dilakukan oleh petani selama ini. Pola tanam padi ini dilakukan umumnya dua kali musim tanam dalam satu tahun, yaitu musim tanam I (pada musim kemarau) dan musim tanam II (pada musim hujan). Penggunaan alsintan dimulai dengan persiapan persemaian dan persiapan pengolahan tanah.

3.3. Sistem Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Sistem UPJA Usaha Bakti di Kecamatan Tebo Ulu terdiri dari pertama sub sistem Pembinaan dan Pengendalian. Pembinaan dan pengendalian dari tingkat pusat (Dirjen Teknis) dilakukan satu kali dalam setahun, dari Tingkat I (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Provinsi Jambi) dilakukan enam kali dalam setahun, sedangkan Tingkat II (Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo) dilakukan sembilan kali dalam setahun. Terbentuknya regulasi yang lebih kuat disertai standarisasi kapasitas dan kapabilitas SDM pelaksana akan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

membantu pengembangan UPJA. Oleh karena itu pelatihan, pembinaan, dan pendampingan rutin dilakukan pada UPJA.

Sub Sistem yang kedua Permodalan atau Pendanaan dimana didapatkan dari bantuan pusat, provinsi dan kabupaten dalam bentuk alsintan dengan harapan UPJA dapat mengembangkan alsintan yang diberikan supaya bisa bertambah dengan pola orientasi bisnis yang dilakukan UPJA tersebut dan swadaya anggota yang tergabung pada UPJA sehingga usahatani padi sawah dapat berkembang dan terlaksana dengan baik. Sumber biaya pengadaan alsintan tambahan pada UPJA Usaha Bakti didapatkan dari usaha penyewaan alsintan yang ada pada UPJA.

Sub Sistem yang ketiga Penggunaan Jasa Alsintan yang mana langsung digunakan oleh petani dan kelompok tani yang tergabung di UPJA. Cara mendapatkan jasa UPJA, petani atau kelompok tani dapat menghubungi langsung operator UPJA dan realisasi operasi pelayanan jasa berdasarkan jadwal pelayanan operasional UPJA yang telah ditentukan pengelola UPJA. Pekerjaan pengolahan tanah menggunakan TR2 dengan biaya Rp. 1.800.000,-/hektar. Sewa yang didapatkan dari hasil pengolahan tanah untuk UPJA dibagi menjadi 3 (tiga) bagian, dimana sebagian untuk operator, sebagian untuk operasional, dan sebagian lagi untuk kas UPJA. Pekerjaan perontokan menggunakan PT dengan upah 10 % dari Gabah Kering Panen (GKP) untuk UPJA. Upah yang didapatkan UPJA adalah 10 % GKP dikalikan dengan harga GKP/kilogram, kemudian uang yang didapatkan dari penjualan GKP dibagi menjadi 3 (bagian) dimana sebagian untuk operator, sebagian untuk operasional, dan sebagian lagi untuk kas UPJA. Begitu juga untuk pekerjaan penggilingan padi menggunakan RMU dengan upah 10 % dari Produksi Beras (PB) untuk UPJA.

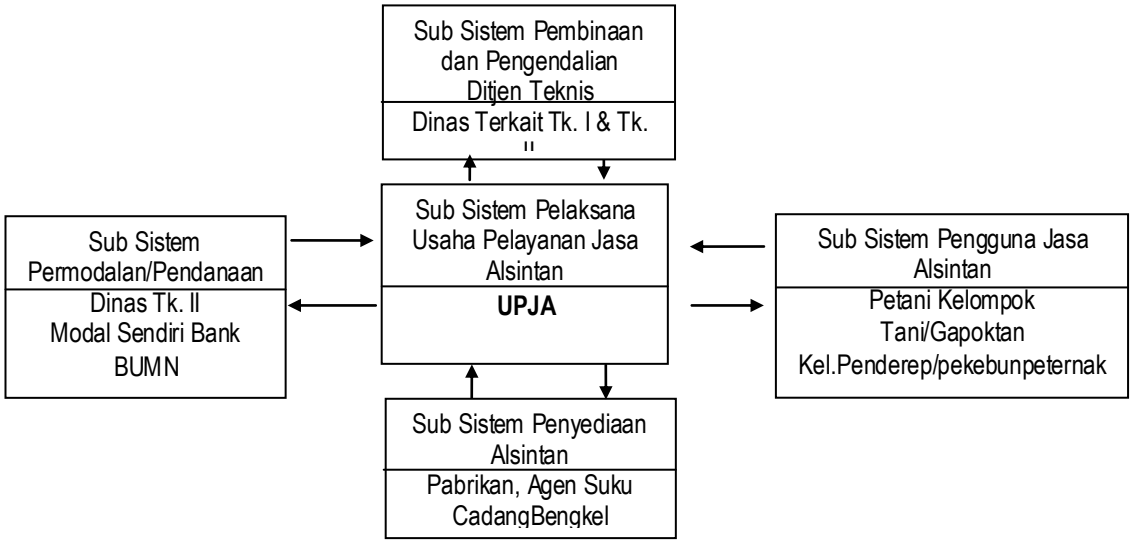

Gambar 2. Sistem Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA)

Sub Sistem keempat Penyediaan Alsintan, dimana penyediaan alsintan langsung dari pabrikan Quick, Yanmar, Honda, Agrindo, dan Kubota. Untuk suku cadang alsintan, pengelola UPJA dapat memesan langsung ke pabrikan alsintan tersebut. Sedangkan perbengkelan di kelola oleh UPJA dalam hal pemeliharaan atau perbaikan alsintan dan pabrikan juga biasanya setiap tahun mengadakan perbengkelan keliling dimana dalam hal ini difasilitasi oleh Dinas Pertanian Tanaman pangan Kabupaten Tebo.

3.4. Analisis Biaya Produksi

3.4.1. Biaya Variabel

Biaya variabel atau juga disebut *variable cost* adalah biaya yang nilainya tidak tetap atau berubah-ubah sesuai dengan volume bisnis.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 4. Rata-rata biaya variabel usahatani padi Sawah di Kabupaten Tebo.

No	Uraian	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1	Benih	132.391	1,33
2	Pupuk	434.609	4,38
3	Obat-obatan	113.826	1,15
4	Tenaga kerja	9.242.460	93,14
Jumlah		**9.923.286**	**100,00**

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2015

Untuk rata-rata biaya variabel pada usahatani padi sawah adalah sebesar Rp 9.923.286,- biaya yang terbesar adalah biaya tenaga kerja yaitu sebesar Rp 9.242.460,- atau 93,14 %, dan biaya yang terendah adalah biaya obat-obatan yaitu sebesar Rp 113.826,- atau 1,15 %. Besarnya biaya tenaga kerja pada usahatani padi sawah karena tenaga kerja dalam keluarga diperhitungkan, dan banyaknya proses atau jenis kerjaan dalam usahatani padi sawah. Besarnya biaya tenaga kerja maka perlu diperhatikan oleh petani adalah menekan biaya tenaga kerja dengan cara pengurangan waktu dalam setiap tahap pekerjaan atau penggunaan alsintan dari UPJA agar lebih efisien waktu dalam penggunaan tenaga kerja, tidak hanya biaya tenaga kerja saja yang perlu perhatian tetapi semua biaya produksi terutama biaya variabel. Penekanan biaya produksi bukan karena ketidakmampuan petani dalam memenuhi kebutuhan usahatani padi sawah tetapi hal ini dilakukan guna memperkecil pengeluaran sehingga akan mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi. Semakin sedikit biaya yang dikeluarkan maka semakin tinggi pendapatan yang diterima petani, dimana harus didukung dengan harga jual yang tinggi.

3.4.2. Biaya Tetap

Biaya tetap yang terdapat pada usahatani padi sawah adalah penyusutan alat serta biaya sewa lahan.

Tabel 5. Rata-rata biaya tetap pada usahatani padi sawah di Kabupaten Tebo

No	Biaya Tetap	Nilai (Rp)	Presentase (%)
1.	Penyusutan alat		
	- *Hand Spayer*	32.813	5,54
	- Cangkul	42.346	7,14
	- Sabit	15.652	2,64
	- Ember	15.000	2,53
2.	Sewa Lahan	486.957	82,15
Jumlah		**592.768**	**100,00**

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2015

Untuk biaya tetap pada usahatani padi sawah meliputi biaya penyusutan alat dan sewa lahan. Rata-rata biaya tetap yang terbesar adalah biaya sewa lahan Rp 486.957,- atau 82,15 % dan biaya tetap terkecil adalah ember yaitu Rp. 15.000,- atau 2,53 % dari keseluruhan biaya Tetap.

Nilai sewa lahan biasanya ditentukan oleh lokasi dan kualitas lahan tersebut, seperti jarak terhadap sarana transportasi dan tingkat kesuburannya. Semakin strategis lokasi atau tingkat kesuburannya maka akan semakin tinggi nilai sewa lahan.

3.4.3. Analisis Biaya Total

Biaya total adalah semua biaya yang dibutuhkan untuk melaksanakan usaha yang dihitung dengan menjumlahkan biaya tetap dengan biaya variabel.

Tabel 6. Rata-rata biaya total pada usahatani padi sawah di Kabupaten Tebo.

No	Uraian	Nilai (Rp)	Persentase (%)
1	Biaya Variabel	9.923.286	94,36
2	Biaya Tetap	592.768	5,64
Jumlah		**10.516.054**	**100,00**

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2015

Rata-rata biaya total yang dibutuhkan untuk pelaksanaan usahatani padi sawah adalah sebesar Rp. 10.516.054,-. Jika dilihat perbandingan antara biaya variabel dan biaya tetap yang diperoleh dari penelitian ini,

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ternyata biaya yang terbesar adalah biaya variabel, hal ini terlihat bahwa total rata-rata biaya variabel untuk usahatani padi sawah adalah Rp. 9.923.286,- atau 94,36 % sedangkan total rata-rata biaya tetap hanya sebesar Rp. 592.768,-atau 5,64 %. Biaya variabel besar karena besarnya biaya tenaga kerja dan biaya pupuk yang digunakan dalam satu kali musim tanam. Biaya variabel besar karena menggunakan alsintan dari UPJA dengan membayarkan uang sewa atau upah dan adanya kenaikan upah pada tenaga kerja, yang didasarkan pada sulitnya mencari pekerja yang bergerak dibidang pertanian karena para pekerja banyak yang bekerja dibidang usahatani lainnya.

3.4.4. Penerimaan Usahatani Padi Sawah

Penerimaan usahatani padi sawah dihitung dari hasil perkalian antara jumlah hasil produksi padi sawah (setelah dikurangi 10 % GKP untuk UPJA sebagai upah pekerjaan perontokan dengan PT) dengan harga jualnya dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP). Jumlah rata-rata produksi padi sawah di lokasi penelitian adalah 3.212 kilogram GKP dengan rata-rata harga jual sebesar Rp. 5000,-/kg GKP. Rata-rata penerimaan yang diperoleh petani responden dari hasil penjualan padi sawah adalah sebesar Rp. 16.057.500,-.

3.4.5. Pendapatan Usahatani Padi Sawah

Pendapatan adalah hasil bruto dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya usahatani seperti benih, pupuk, obat-obatan, biaya pengolahan tanah, upah menanam, upah pemeliharaan, biaya panen [7].

Tabel 7. Rata-rata Pendapatan pada usahatani padi sawah di Kabupaten Tebo.

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Penerimaan (a)	17.070.652
2	Biaya Total (b)	10.516.054
3	Pendapatan (c) = (a-b)	6.554.598

Sumber : Hasil Olahan Data Penelitian, 2015

Dari Tabel 7 diketahui bahwa rata-rata pendapatan dari usahatani padi sawah yang diperoleh sebesar Rp. 6.268.393,- sehingga terbukti bahwa penerimaan yang besar selalu diikuti dengan pendapatan yang akan diperoleh dari suatu usaha tersebut juga akan besar, karena biaya total yang bisa ditekan.

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisis maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Pelaksanaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) kelas berkembang di Kabupaten Tebo terlaksana dengan baik. Petani yang menggunakan jasa alsintan sangat terbantu dari aspek efisiensi waktu, tenaga, dan penggunaan alsintan mempercepat alih teknologi alsintan kepada masyarakat pertanian di pedesaan.
2. Rata-rata penerimaan usahatani padi sawah dengan adanya peranan UPJA di Kabupaten Tebo selama satu kali proses produksi adalah Rp 17.070.652,-dengan rata-rata pendapatan sebesar Rp 6.554.598,-.

4.2. Saran

1. Kepada petani padi sawah di Desa Pagar Puding Kecamatan Tebo Ulu diharapkan petani dapat mempertahankan budidaya padi sawah dengan memanfaatkan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA).
2. Kepada pemerintah agar dapat memperhatikan dan mendukung UPJA di Kabupaten Tebo agar lebih baik sehingga penggunaan alsintan yang merupakan bantuan pemerintah dapat dimanfaatkan dan terpelihara dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Henny, M dan T. Pranadji. 2012. *Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Sistem Usahatani Padi yang Berdayasaing*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 10 No. 4, Bogor
[2] Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Tebo. 2015.
[3] Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Tebo Ulu, VII Koto Ilir, dan Sumay Kabupaten Tebo. 2015.
[4] Suratiyah, K. 2006. *Ilmu Usahatani*. PT. Penebar Swadaya, Jakarta.
[5] Thomson, S. 2002. *Analisis Sistem UPJA dan Dampaknya Terhadap Pengembangan Ekonomi Masyarakat.* Laporan Penelitian Fakultas Pertanian Jurusan Sosial Ekonomi USU, Sumatera Utara.
[6] Henny, M dan T. Pranadji. 2012. *Pola Pengembangan Kelembagaan UPJA untuk Menunjang Sistem Usahatani Padi yang Berdayasaing*. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian Vol. 10 No. 4, Bogor

[7] Daniel, M. 2002. *Pengantar ekonomi pertanian*. PT. Bumi Aksara, Jakarta.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

DIVERSIFIKASI SAWAH MELALUI PTS IPTEK BAGI MASYARAKAT

Arief Setiyawan [1)], Hutomo Moestadjab [2)] dan Gaguk Sukowiyono [3)]

[1]PWK FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang
[2]PWK FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang
[3]Arsitektur FTSP, Institut Teknologi Nasional Malang

Email :arf_setiyawan@yahoo.com

Naskah diterima : 8 Maret 2017 Naskah direvisi : 15 Maret 2017 Disetujui terbit : 15 Maret 2017

ABSTRAK

Sinergi antar sektor akan selalu memberikan nilai tambah bagi masing-masing sektor. Sawah yang ada di Desa Kebonagung Kabupaten Malang akan disenergikan dengan kegiatan wisata kuliner. Diversifikasi fungsi sawah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dan warga kampung gang dua. Konsep yang ditawarkan adalah wisata kuliner berbasis pondok di tengah sawah (PTS) sebagai pengembangan Iptek bagi Masyarakat yang merupakan salah satu skema Dikti untuk pengabdian kepada masyarakat. Pengunjung akan merasakan sensasi menikmati makanan tradisional Jawa Timur atau Malang dipondok yang berada di tengah sawah. menu yang ditawarkan merupakan menu yang biasa disantap oleh petani tatkala menggarap atau mengolah sawah. Sambil menunggu menu yang sudah dipesan, pengunjung sapat berfoto ria ditengah sawah dengan latar belakang rumah-rumah kampung dan gunung Kawi, Panderman dan Arjuna serta akan terasa lengkap jika ada kereta api yang sedang lewat di jalan kereta api yang berada di timur kampung gang dua Kebonagung.

Kata kunci: *diversifikasi, sawah, wisata kuliner*

PENDAHULUAN

Desa Kebonagung Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang berada 5 (lima) kilometer arah selatan dari pusat Kota Malang. Desa ini berbatasan dengan wilayah Kota Malang. Perpaduan antara nuansa perdesaan dan perkotaan sekaligus terpadu pada Desa Kebonagung.

Desa Kebonagung secara umum memiliki potensi wisata yang cukup kuat untuk dikembangkan karena:

a. Terdapat pabrik Gula Kebonagung peninggalan masa kolonial Belanda, yang dibangun sekitar tahun 1900
b. Bangunan-bangunan pendukung pabrik Gula Kebonagung juga bergaya kolonial misalkan kantor Direksi Utama, poliklinik dan rumah staf menengah (*loji*).
c. Lokasi berada pada jalur utama Kota Malang menuju ibukota Kabupaten Malang yang juga menghubungkan ke Kota Blitar
d. Dilintasi jalur rel kereta api Malang – Jakarta lewat selatan

Lokasi kegiatan berada di RW 04 (gang dua) Desa Kebonagung yang berada di bagian utara desa. Keunggulan kampung gang dua ini adalah:

a. Terdapat sawah yang masih produktif.
b. Dibagian timur kampung, dilintasi jalur rel kereta api, yang sekaligus menjadi batas antara kampung dengan sawah.
c. Dari tengah sawah arah ke timur dapat melihat pemandangan hamparan sawah dengan latar belakang Gunung Semeru dan arah ke barat dapat melihat hamparan sawah dengan latar belakang rumah-rumah

kampung dan Gunung Kawi, Panderman dan Arjuno dikejauhan, pemandangan ini dapat lebih lengkap ketika ada kereta api lewat.

d. Jalan utama kampung yang cukup lebar (kurang lebih 4 meter) dengan perkerasan aspal dan masih memiliki bahu jalan rata-rata 1,5 meter kiri kanan jalan, jadi berpotensi menjadi tempat parkir yang representative.

Kondisi diatas akan lebih produktif jika disinergikan dengan kegiatan jasa produksi berupa wisata kuliner. Peluang usaha dalam wisata kuliner yang digagas adalah dalam bentuk konsep Pondok Tengah Sawah (PTS). Pondok dengan bahan dari bambu akan dibangun pada pojok-pojok petak sawah. Pemilik sawah yang menjadi tempat berdirinya pondok adalah warga RW 04 yaitu Bu Djarwati, Pak Slamet, Pak Sugiarto, Bu Sumiati dan Bu Sumarmi (kelompok petani pemilik). Menu makanan yang disediakan merupakan menu makanan tradisional yang biasanya menjadi menu petani ketika sedang istirahat menggarap sawah, yaitu nasi putih ditambah sayur atau lalapan, ikan atau daging atau telur, serta minuman berupa teh atau kopi yang kesemuanya dihidangkan dalam wadah yang disebut rantang. Makanan nantinya dimasak oleh kelompok usaha RW 04 yang memiliki keahlian dibidang memasak yaitu bu Suhermanto, bu Saiful, Bu Eko, dan bu Edi Yaser.

Pengunjung akan memesan menu dimeja petugas yang berada didepan rumah ibu Kusaeri. Disediakan juga sandal dari karet ban bekas dan caping yang dapat digunakan oleh pengunjung secara gratis. Pengunjung akan menikmati hidangan yang sudah dipesan di dalam pondok yang berada di tengah sawah. Sambil menunggu pesanan pengunjung dapat berfoto ria atau beraktifitas lain layaknya seorang petani. Pangsa pasar yang menjadi target konsep ini adalah warga Kota Malang, warga Kota Malang yang bekerja di Kepanjen dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, Kota Malang atau ke tempat wisata bagian selatan Kabupaten Malang.

Aspek produksi terdiri dari dua aspek yaitu produktifitas sawah dan warga yang berkontribusi langsung pada usaha PTS baik sebagai petugas maupun penyedia makanan dan minuman. Sawah sebagai poin utama akan tetap digarap atau diolah sebagaimana biasanya. Dalam konsep PTS petani sama sekali tidak dirugikan dari sisi produktifitas, karena pondok yang didirikan maksimal hanya dua pondok per petak sawah, sehingga tidak akan mengurangi secara sifnifikan produktifitas sawah. Setiap perubahan sawah garapan karena tahapan produksi akan menjadi daya tarik tersendiri bagi pengunjung. Petani akan mendapat konpensasi dari didirikannya pondok dipetak sawah mereka secara proporsional. Aspek produksi bagi warga kampung yang dipilih memenuhi menu yang akan dijual tentunya mereka akan mendapat tambahan pendapatan dari masakan yang mereka jual. Selain itu terdapat juga warga kampung yang akan menjadi pengurus wisata kuliner, petugas parkir. Konsep ini optimis akan melahirkan efek ganda berupa munculnya pedagang kecil semisal jual gorengan, kue tradisional atau kios-kios yang menjual souvenir hasil karya warga kampung sendiri, untuk yang satu ini telah terdapat embrio usaha souvenir berupa pembuatan tas lukis.

Manajemen usaha direncanakan dalam bentuk koperasi. Koperasi yang dimaksud harus betul-betul untuk kesejahteraan seluruh anggotanya. 'Koperasi" ini akan dilengkapi dengan AD/ART. Mekanisme rapat seluruh anggota adalah pengambil kebijakan tertinggi. Warga kampung yang berminat akan didata dan nantinya diwajibkan untuk menyertakan modalnya. Pada langkah awal modal yang disertakan oleh warga sesuai kemampuan, tentunya terkait sisa hasil usaha akan dibagi secara proporsional berdasarkan penyertaan modalnya. Penyertaan modal akan dievaluasi tiap tiga bulan dan diharapkan pada suatu saat seluruh anggota akan memiliki proporsi yang sama. Penambahan jumlah anggota harus melalui mekanisme rapat anggota. Terpenting adalah manajemen yang dibangun berlandaskan pada keadilan, transparansi dan kesejahteraan bersama.

Persoalan sumberdaya yang ditemui pada lokasi adalah pemahaman warga terkait dengan kemampuan membaca peluang usaha, hal ini erat kaitannya dengan masalah pendanaan mengingat warga kampung gang dua merupakan warga dengan pendapatan menengah ke bawah (berdasarkan keterangan ketua RW 04). Sumberdaya alam yang dimiliki kampung gang dua terkait keberadaan sawah beserta pemandangan yang ditawarkan juga dimiliki berberapa kampung di Desa Genengan Kecamatan Pakisaji dan juga beberapa desa di Kecamatan Kepanjen, namun kekuatan dari kampung gang dua adalah kedekatannya dengan Kota Malang dan keberadaan Pabrik Gula Kebonagung.Penentuan permasalahan prioritas berkaitan dengan masalah produksi adalah bagaimana menjaga standar mutu dari makanan yang ditawarkan. Sedangkan yang menjadi prioritas bekenaan aspek manajemen untuk berwirausaha adalah sikap profesional dari petugas dan meyakinkan anggota koperasi bahwa konsep ini benar-benar prospektif.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TARGET DAN LUARAN

Tulisan ini merupakan bagian dari penyusunan laporan pengabdian kepada masyarakat dalam format Iptek badi Masyarakat. Target dari aspek produksi diversifikasi sawah melalui PTS adalah berjalannya sistem untuk memproduksi makanan, minuman dengan kualifikasi kontrol yang baik dalam kurun waktu satu bulan sebelum resmi dibuka untuk umum. Sistem yang akan dibangun adalah sistem dengan sub-sub sistem yang dapat mengontrol seluruh aspek produksi, sedangkan kualifikasi kontrol yang dimaksud adalah standarisasi rasa, mutu dan tampilan penyajian makanan yang ditawarkan atau dijual. Target produksi lainnya adalah tetap berproduksinya sawah dengan komoditi padi meski wisata kuliner ini sudah beroperasi.

Target mandiri secara modal adalah setelah enam bulan berjalan setelah resmi dibuka. Target pasar yang dibidik adalah warga Kota Malang, warga Kota Malang yang bekerja di Kepanjen dan wisatawan yang berkunjung ke Kota Batu, Kota Malang atau ke tempat wisata bagian selatan Kabupaten Malang.

Target manajemen yang diinginkan adalah terbentuknya lembaga koperasi yang menaungi kegiatan wirausaha wisata kuliner ini. Koperasi yang dibentuk tentunya memiliki AD/ART yang representatif dan responsif terhadap kesejahteraan seluruh anggotanya.

Luaran produksi adalah beroperasinya wisata kuliner Pondok Tengah Sawah di RW 04 Desa Kebonagung Malang. Berharap bahwa usaha ini dapat diikuti oleh kampung-kampung lain di Desa Kebonagung. Wirausaha yang akan dirintis tentunya akan menjadi salah satu pengahasilan baru, menambah pendapatan bagi warga kampung gang dua dan tentunya pula akan berperan mengurangi pengangguran.

Luaran manajemen dari beroperasinya wisata kuliner ini adalah terbentuknya lembaga koperasi dan dapat berjalan koperasi tersebut sesuai dengan apa yang sudah direncanakan. Kesejahteraan seluruh anggota yang nota bene adalah warga kampung gang dua dapat betul-betul dapat diwujudkan secara berkelanjutan.

METODOLOGI

Metode pelaksanaan kegiatan yang akan menjadi solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan adalah metode yang berbasi perencanaan strategis dan perencanaan operasional. Perencanaan strategis akan berlandaskan keputusan strategis lebih bersifat fundamental, memberi arah dan berorientasi masa depan. Sedangkan perencanaan operasional berlandaskan keputusan operasional itu terutama mempengaruhi pelaksanaan sehari-hari keputusan strategis. Keputusan strategis senantiasa memiliki implikasi jangka panjang, sedang keputusan operasional cenderung memiliki implikasi jangka pendek (Allison, 2005).

Penentuan permasalahan prioritas dilakukan dengan diawali mengumpulkan masukan dari para pihak-pihak internal yang berkepentingan. Mencoba mengumpulkan pandangan *stakeholder* luar sehingga didapat informasi tentang efektivitas dari program kegiatan yang akan dilaksanakan yang pada akhirnya dapat diidentifikasi permasalahan yang akan dihadapi. Mekanisme yang digunakan adalah rapat anggota berdasarkan musyawarah mufakat dengan mengedepankan keadilan.

Metode pendekatan yang ditawarkan untuk menyelesaikan persoalan mitra program pertama menyamakan pemahaman kepada semua anggota koperasi tentang tujuan dan pentingnya kegiatan ini agar terlaksana. Kedua, melaksanakan uji coba dan simulasi kegiatan untuk seluruh bagian produksi dan manajemen. Satu misal terkait standarisasi makanan yaitu dengan mencatat dengan tertib setiap kali memasak meliputi takaran bahan dan bumbu yang digunakan dari insting menjadi terukur dan pilihan bahan harus bisa distandarkan.

Prosedur kerja untuk mendukung realisasi metode yang ditawarkan adalah dengan mekanisme pemberian pengahargaan dan hukuman secara adil dan konsisten. Prosedur kerja yang demikian akan menjadikan tertib, tepat waktu dan dapat berjalan secara sistemik.

Rencana kegiatan yang menunjukkan langkah-langkah solusi atas persoalan pada kedua aspek utama adalah dengan melakukan percobaan-percobaan, latihan, pencatatan dengan cermat, pengujian secara umum dan acak serta melakukan simulasi. Evaluasi program dan kegiatan secara periodik, misalnya tiap satu bulan sekali akan memberikan umpan balik yang tentunya sangat-sangat positif.

Partisipasi mitra dalam pelaksanaan program akan dimulai dari penyusunan rencana program kegiatan. Dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan baik keputusan strategis maupun keputusan operasional. Partisipasi aktif anggota yang juga warga kampung gang dua tersebut juga pada proses evaluasi program.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pondok Tengah Sawah (PTS) adalah suatu konsep warung makan yang penyajian makanannya berada di pondok bambu dan yang terletak di tengah sawah. Adanya Gunung Arjuno mermberikan pemandangan yang

ISBN : 978-602-73463-1-4

berbeda dan mampu menyejukkan mata sembari bersantai sambil menikmati makanan bersama keluarga, kerabat maupun teman. Disamping itu, pemandangan kereta api dari Surabaya – Kepanjen yang melintas melewati lokasi PTS memberikan suasana yang berbeda dengan warung/rumah makan disekitarnya sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung.

Proses kegiatan

Sebelum melakukan pembangunan pondok, dilakukan survey lokasi dan berdiskusi dengan warga terkait rencana pembuatan PTS yang berada di wilayah mereka. Diskusi tersebut dilakukan di balai pertemuan warga sehingga semua warga dapat ikut terlibat dalam pembangunan PTS dan memberikan transparansi dari setiap rencana yang nantinya akan dilaksanakan di Desa Kebongung khususnya RW 04. Warga cukup antusias terkait rencana PTS dan warga bersedia untuk bekerjasama untuk merealisasikan serta memelihara tiap pondok yang dibuat. Adapun kesepakatan dengan warga adalah pekerja atau karyawan di PTS merupakan warga sekitar RW 04 Desa Kebonagung sehingga memberikan peluang kerja bagi warga sekitar. Menjaga kebersihan sekitar pondok maupun sawah dari sampah pengunjung PTS. Tidak merusak tanaman padi yang ditanaman oleh petani. Adanya pembagian hasil antara warga harus adil seuai dengan kesepakatan.

Setelah melakukan diskusi dengan warga, dilanjutkan dengan persiapan bahan-bahan dan peralatan untuk membuat pondok. Setiap pembelian dilengkapi dengan tanda pembelian (kuitansi) yang menjadi bukti dari setiap pengeluaran biaya. Jumlah pondok yang disediakan adalah 4 unit dan masing-masing berukuran 2,5m x 2m. pekerja pondok berasal dari warga sekitar agar nantinya diharapkan warga memiliki rasa memiliki terhadap setiap pondok yang telah dikerjakan. Pekerjaan pembangunan pondok dilakukan pada siang hingga sore hari tergantung dari waktu kosong pekerja dikarenakan warga juga memiliki pekerjaan lainnya. Setiap minggu ada dilakukan pengawasan terhadap pengerjaan pondok agar mengetahui setiap perkembangan. Metode ini dipakai denganharapan bahwa natinya akan muncul rasa memiliki dari warga. Diharapkan kedepannya PTS yang sudah dibuat dapat berkembang dengan baik sehingga dapat menambah jumlah pondok dan jumlah karyawan juga dapat meningkat.

Sistem Pelayanan Pondok Tengah Sawah (PTS)

Sistem pelayanan akan mempengaruhi tingkat kemajuan dari setiap usaha yang dikerjakan karena pelayanan yang baik akan menjadi nilai tambah dari setiap warung/rumah makan. Berdasarkan hal tersebut, pelayanan PTS mengusung konsep ramah terhadap setiap pengunjung yang ada sehingga nantinya dapat berkunjung kembali. Adapun system pelayanan PTS, yaitu: pengunjung yang datang disambut dan diminta memilih menu makanan. Menu makanan yang disediakan bersifat paketan (1 paket 4-6 porsi). Paketan makan tersebut sudah termasuk dengan sayur dan minuman sehingga pengunjung tidak memesan minuman lagi, kecuali ada tambahan minuman lainnya. Setelah itu, pengunjung akan di antarkan ke pondok yang diingikan. Sembari menunggu makanan yang sudah dipesan, pengunjung bisa menikmati hamparan sawah yang hijau nan asri dan pengunjung bisa melihat kereta api yang melintas melewati PTS. Untuk makanan yang sudah dipesan selanjutnya akan diantarkan oleh pelayan ke pondok pengunjung dan makanan siap disantap bersama keluarga maupun kerabat. Setelah menikmati makanan dan minuman, pengunjung bisa bersantai bersama dan anak-anak dapat pula bermain-main disekitar pondok.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Alur Pelayanan Pondok Tengah Sawah (PTS)

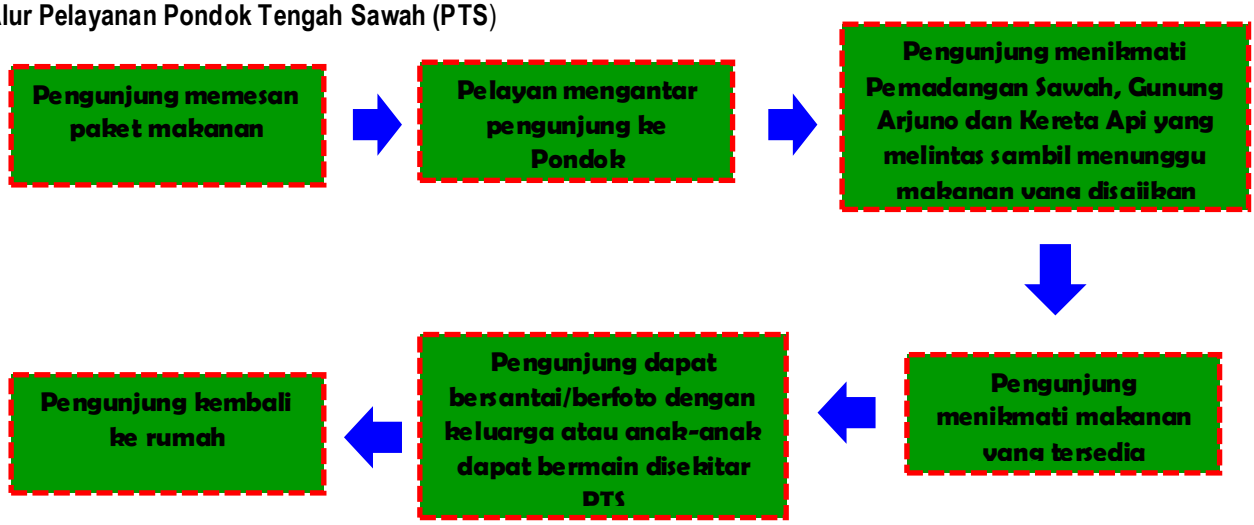

Hasil Kegiatan

Hingga saat ini hasil yang diperoleh adalah pembangunan pondok sawah yang berjumlah 4 unit sudah terealisasi. Adapun proses pemasaran dari Pondok Tengah Sawah (PTS) masih terus berjalan hingga peresmian pembukaan PTS. Pemasaran tersebut melalui pembagian brosur, pamflet yang disebarkan di beberapa lokasi yang memiliki keramaian cukup besar, seperti: pasar, mall, kampus, sekolah, kantor pemerintah dan spot-spot jalan yang strategis. Terkait paket menu yang ditawarkan sudah ada, namun masih membutuhkan tambahan dan inovasi menu baru sehingga pengunjung bisa menikmati bermacam-macam makanan yang disajikan. Pengurus dan karyawan ditangani langsung dari masyarakat sekitar sehingga tujuan utama dari program ini dapat tercapai. Program Ipteks bagi Masyarakat (IbM) dapat berjalan dengan baik dikarenakan adanya kerjasama yang baik antara tim penyusul dengan warga gang dua, Desa Kebonagung sehingga kedepannya diharapkan program ini berlanjut dan memberikan pekerjaan bagi masyarakat sekitarnya.

KESIMPULAN

Pendekatan kepada masyarakat harus dilakukanmulai pemunculan ide kegiatan hingga pelaksanaan kegiatan. Pertemuan yang rutin harus selau dilakukan guna menjaga semangat dan antusiasme masyarakat dalam kegiatan yang dirancang. Jauh lebih efektif pendekatan kepada masyarakat tidak hanya dilakukan secara administratif dalam arti pendekatan hanya kepada aparat seperti ketua RW atau Ketua RT tapi juga kepada ibu-ibu PKK yang memiliki waktumlebihuntuk mengelola dan mengembangan usaha yang dirancang. Informasi dan pembuktian masalah kebersihan makanan serta hal yang terkait kesehatan harus dilakukan dan diinformasikan kepada pelanggan secara menerus.

Besar harapan untuk mensukseskan kegiatan ini sehingga dapat menjadi mata pencaharian baru dan mengurangi jumlah pengangguran, serta meningkatkan taraf hidup bagi warga yang tinggal di sekitarnya. Proses kegiatan diversifikasi Sawah melalui Pondok Tengah Sawah (PTS) pada awalnya melibatkan masyarakat sebanyak 6 orang dan seiring berjalannya kegiatan IbM ini keterlibatan masyarakat meningkat sebanyak 14 orang. Dari kegiatan IbM terdapat pembangunan gubuk/pondok sebanyak 4 (empat) gubuk dimana sebelumnya belum terdapat gubuk di tengah sawah, hal ini untuk mendukung kegiatan sesuai dengan konsep.

Jumlah Keluarga yang meningkat pendapatannya karena efek dari adanya kegiatan Pondok Tengah Sawah (PTS) sebanyak 8 (delapan) Kepala Keluarga (KK). Kegiatan Pondok Tengah Sawah selain meningkatkan pendapatan keluarga juga menimbulkan kegiatan produktif masyarakat dimana pada awalnya hanya ada pembuatan tas lukis, sekarang bertambah kegiatan jasa parkiran dan kolam pancing.

Diharapakan adanya kerjasama dari masyarakat dan pemerintah setempat untuk mengembangkan Pondok Tengah Sawah (PTS) yang sudah dibangun. Adanya keinginan dari pihak Swasta maupun CSR untuk berinvestasi sebagai upaya pengembangan PTS. Pemasaran PTS agar terus dilanjutkan sehingga pengunjung dapat bertambah, baik dari dalam dan luar Kabupaten/Kota Malang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Happer W. Boyd Jr., Orville C. Walker Jr., dan Jean Cdlaude Larreche, 2000, *Manajemen Pemasaran (Pendekatan Strategis dengan Orientasi Global)*, Penerbit Erlangga, Jakarta
[2] Irham Fahmi, 2010, *Manajemen Resiko (Teori, Kasus, dan Solusi)*, Alfa Beta, Bandung
[3] Michael Allison, Jude Kaye, 2005, *Perencanaan Strategis,* yayasan obor Indonesia, Jakarta
[4] Salah Wahab, 1996, *Manajemen Kepariwisataan*, Pradnya Paramita, Jakarta
[5] Thomas L. Saaty, 1991, *Pengambilan Keputusan (Bagi Para Pemimpin),*Pustaka Binaan Pressindo, Jakarta

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PEMETAAN LOKASI KONSERVASI UNTUK PENYELAMATAN STOK TERNAK

Delvia Nora

Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo
Jln. Lintas Sumatera KM. 06 Sungai Binjai Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo Propinsi Jambi

Email : delvianora@yahoo.com

Naskah diterima :10Maret 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk (1) menganalisis pemetaan ketersediaan sumber daya ternak sapi dalam pengembangan usaha sapi potong (2) mengevaluasi basis situasi pra konservasi, 3) besaran dukungan kontribusi integrasi limbah pertanian untuk pakan ternak pada daerah basis dan non basis sapi potong Di Kabupaten Bungo.Tahapan penelitian meliputi (1) identifikasi faktor-faktor sumber daya usaha menggunakan analisis Location Quation untuk penentuan wilayah basis dan non basis sapi,(2) identifikasi potensi integrasi limbah-ternak wilayah berpopulasi sapi potong, (3) merumuskan pemetaan posisi konservasi stok ternak . Berdasarkan hasil penelitian tahap satu dan dua data dianalisis untuk merumuskan strategi konservasi lanjutan sebagai dasar untuk mengukur kondisi pra penyelamatan ternak dilihat dari perubahan populasi keseluruhan sebelum diukur dalam pemetaan posisi konservasi stok ternak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemetaan posisi konservasi Kabupaten Bungo untuk stok ternak berada di level 2, 3 dan 4 dengan laju perubahan populasi yang dipengaruhi luasnya wilayah integrasi limbah pertanian-ternak, jumlah pemotongan. Posisi 0,068 adalah perubahan yang terjadi pada kurun waktu satu tahun adapun tindakan konservasi yang dilakukan adalah dengan tindakan awal penyelamatan stok ternak sebelum mengalami penurunan yang besar dan berpengaruh pada minimnya stok ternak.

Kata Kunci : Pemetaan , Konservasi, Stok

PENDAHULUAN

Potensi sumber daya suatu wilayah memiliki karakteristik yang berbeda-beda, akibatnya ada pembagian wilayah yang berbeda besaran potensinya. Untuk mempemudah identifikasi suatu wilayah dari sudut pengamatan yang sederhana sering terkendala karena adanya parameter yang tidak dimiliki untuk mendukung suatu analisis hal yang akan diteliti. Berbagai rumus dan teknis digunakan dengan tujuan untuk menjawab tentang suatu masalah yang akan diteliti. Untuk mengantisipasi kesulitan dalam mengukur kondisi pengembangan dan perbaikan kondisi, maka diperlukan suatu teknis sederhana untuk memudahkan dalam mencerna suatu kondisi secara ringkas. Identifikasi dan pemetaan diperlukan sebagai basis awal untuk mengambil kesimpulan dari usaha pengembangan dan perbaikan kondisi tersebut. Teknik pemetaan lokasi yang mengalami perubahan sering sulit diukur secara cepat. Pemetaan ini untuk menganalisis kondisi khusus pada wilayah seperti perlu tidaknya tindakan konservasi.

Konservasi bukan hanya pada hal sumber alami saja yang akan dipertahankan juga termasuk hal yang berhubungan dengan perbaikan sumber daya yang telah dimiliki. Ketersediaan stok ternak yang berubah-ubah memiliki tahapan evaluasi lebih panjang bila dibandingkan dengan evaluasi pada lokasi yang telah jelas sumber dayanya.

Peta konservasi merupakan suatu peta yang dipergunakan sebagai alat bantu untuk mendapatkan informasi tentang batasan keputusan tentang perlu tidaknya suatu wilayah dilakukan konservasi, posisi konservasi, dan tindakan konkrit yang dapat dilakukan berdasarkan level yang telah diketahui sejak awal sehingga mempermudah dalam penanggulangan masalah yang berhubungan dengan ketersediaan stok ternak.
Kekhususan peta konservasi adalah sebagai alat pola deteksi kondisi stok ternak berdasarkan ukuran indikator yang digunakan sehingga nantinya diperoleh suatu gambaran kondisi pra penyelamatan ternak sebagai ukuran sebelum memasuki wilayah pengukuran dalam peta konservasi. Pemanfaatan peta konservasi ditujukan

mempermudah membaca keaadaan situasi ketersediaan ternak dan kemungkinan adanya ancaman penurunan populasi ternak sehingga dibutuhkan suatu kajian awal sebelum kondisi menjadi lebih buruk yakni penurunan populasi ternak yang drastis mengarah pada perubahan populasi ternak yang menipis. Tindakan penyelamatan ternak dilakukan setelah dapat diketahui peta konservasinya sehingga mempermudah membaca kondisi suatu wilayah yang mengalami penurunan stok ternak potong.

METODOLOGI

Tahapan penelitian yakni meliputi : 1) identifikasi faktor-faktor sumber daya usaha menggunakan analisis Location Quation untuk penentuan wilayah basis dan non basis sapi, 2) identifikasi potensi integrasi limbah-ternak dibeberapa wilayah berpopulasi sapi potong, (3) merumuskan pemetaan posisi konservasi stok ternak.

Hasil tahapan digunakan sebagai dasar analisis pemetaan untuk mengukur kondisi pra penyelamatan ternak dilihat dari perubahan populasi keseluruhan sebelum diukur dalam pemetaan posisi konservasi stok ternak.Data dianalisis dengan LQ (Location Quation), Peta Awal Rujukan Basis Pengembangan Sapi Potong, penjumlahan, persentase dan klas. Pengukur kondisi pra penyelamatan ternak dilihat dari perubahan populasi keseluruhan sebelum diukur dalam pemetaan posisi konservasi stok ternak. Pada tahapan pertama yang menjadi fokus pengukuran adalah mengidentifikasi daerah atau wilayah basis sapi potong berdasarkan rumus LQ. Hasil yang diperoleh merupakan base wilayah yang dijadikan sebagai ukuran kondisi untuk pemetaan sebelum dicari variabe-variabel yang akan didata. Selanjutnya tahapan manajemen peta konservasi meliputi 1) tahapan identifikasi daerah / wilayah basis sapi potong meliputi identifikasi faktor sumber daya alam dan manusia, luas dan fungsi lahan dalam periode tahun tertentu, klas lahan, klas komoditi, 2) performa kondisi pra penyelamatan stok ternak, 3) daerah konservasi meliputi klas program dan klas populasi, dan 4) pemetaan posisi konservasi stok ternak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tahapan penelitian yang dilakukan pada tahap pertama identifikasi faktor-faktor sumber daya usaha diukur berdasarkan potensi yang tersedia terutama dalam pemetaan konservasi dititik beratkan pada ada tidaknya usaha yang mendukung pengembangan ternak stok seperti ketersediaan pakan. Ketersediaan pakan dilihat dari dukungan sumber pakan lain seperti ada tidaknya potensi limbah sebagai alternatif, Karena usaha konservasi ditujukan untuk melihat dasar awal pengukuran adalah luas tanam dan luas panen kegiatan manusia yang dapat meningkatkan Bahan Kering (BK) limbah dalam setahun dan perubahannya. Di Kabupaten Bungo didapatkan hasil bahwa Kecamatan Pelepat Ilir merupakan penghasil rumput alami terbesar (lampiran 1), namun karena tingginya usaha pengembangan yang dilakukan (daerah sentra sapi potong) maka tentunya berdampak pada usaha penyediaan pakan. Kegiatan ini menjadi tanda pertama pemetaan lokasi konservasi yang harus dijaga keseimbangan sumber pakannya agar tidak mempengaruhi usaha penggembangan dan berdampak pula pada akhirnya pada stok ternak yang ada nantinya.

A. Daerah Basis dan Non Basis Di Kabupaten Bungo

Keadaan umum Kabupaten Bungo sebagian besar memberikan kontribusi besar untuk pengembangan sapi potong di masa mendatang (lampiran 1 dan 2). Kesiapan menghadapi swasembada daging masih perlu dituntaskan sehingga dapat tercukupinya kebutuhan daging dan ternak dimasa mendatang diperlukan suatu metode atau teknik menata semua komoditi dari sumber daya yang dimiliki untuk mendukung lancarnya fokus pencapaian usaha dalam pengadaan ternak maupun pengembangan usaha yang berkelanjutan dimasa mendatang. Kondisi ini menjadi rekomendasi untuk pemetaan lokasi yang memerlukan upaya konsevasi terutama dalam penyelamatan dan mempertahankan stok ternak di suatu daerah. Kondisi stok ternak menurun di Kabupaten Bungo sehingga perlu memetakan lokasi yang perlu dilakukan tindakan konservasi stok ternak.Penentuan daerah basis dan non basis sapi potong sangat menentukan jejak awal yang akan ditempuh dalam pemetaan lokasi konservasi. Sebagai contoh untuk daerah yang memiliki tingkat perbandingan rasio penduduk dan ternak potong yang memiliki nilai ambang batas minimal (nilai 1) dalam analisis Locatio Quation (LQ) merupakan daerah basis yang memiliki tingkat perubahan populasi yang gampang berubah tidak stabil dalam penyediaan stok ternak. Kenapa demikian ? jawaban yang terpenting adalah peta LQ memegang peranan penting dalam penentuan basis ternak potong. Pemeriksaan awal lokasi dapat dilihat pada Tabel 1 dibawah ini.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1. Peta Awal Rujukan Basis Pengembangan Sapi Potong

No.	Basis Sapi Potong	Konservasi	Keterangan
1	LQ Lebih 1	Level 1	Tanpa Konservasi/Aman
2	LQ Minimal 1	Level 2	Awal Tindakan Konservasi
3	LQ 0 s/d -1	Level 3 dan 4	Konservasi Lanjutan

Pemetaan lokasi peta stok ternak memegang peranan penting dalam pengevaluasian keberhasilan dan keberlanjutan usaha pengembangan sapi potong dimasa mendatang. Ketepatan dalam penentuan hasil nilai awal peta akan menentukan dengan penelitian tentang faktor pengubah terjadinya usaha konservasi. Perubahan pada masing-masing indikator tersebut akan menentukan level konservasi.

Level konservasi yang digunakan adalah level 1,2,3 dan 4. Adapun level konservasi dibatasi oleh perbedaan level tersebut. Berlakunya konservasi suatu wilayah bila berada pada lokasi level 2 sebagai ambang batas aman stok ternak. Stok ternak yang dimaksud adalah stok ternak yang cukup dan berlebih. Kondisi stok yang mencukupi permintaan akan berpengaruh pada kekuatan usaha peternakan dalam penyediaan ternak potong di suatu wilayah. Adapun perubahan populasi terjadi merupakan klas terakhir yang akan diukur mengingat daerah basis rentan dengan tindakan konservasi penyelamatan stok ternak. Mengapa demikian ?? beberapa alasan akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Daerah basis ternak potong merupakan daerah serapan populasi ternak potong tertinggi dibandingkan keseluruhan wilayah yang luas
2. Perubahan populasi tertinggi disinyalkan dari daerah basis berupa awal mula timbulnya dinamika ternak
3. Dinamika ternak tertinggi biasanya berasal dari daerah sentra pusat pengembangan ternak potong yang akan diukur
4. Perubahan-perubahan yang mempengaruhi populasi daerah sentra berasal dari faktor-faktor internal dan eksternal yang ada dalam setiap usaha dan pencerminan karakteristik ternak dapat dihitung dari identifikasi karakter usaha dan peternak di daerah sentra itu sendiri untuk melihat apa saja yang mempengaruhi klas-klas dalam tahapan pemetaan stok ternak.

Perubahan yang terjadi dapat dilihat pada Gambar 1.

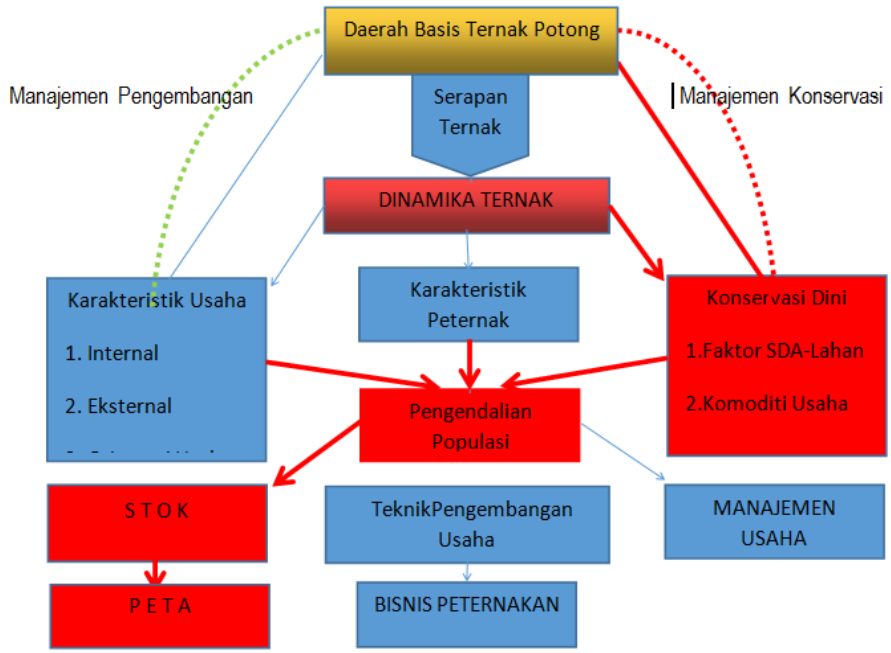

Gambar 1. Penyebab Perubahan Stok Daerah Basis Sapi Potong
(Arah Mula Konservasi)

Indikator utama adalah perbandingan rasio antara jumlah penduduk dan jumlah ternak potong yang tersedia. Sapi potong yang dimaksud adalah semua jenis ternak potong yang dipergunakan sebagai bahan baku untuk penyedia daging Adapun jenis tertentu ditentukan oleh kebijakan yang berlaku oleh pemerintah setempat, namun untuk penentuan peta konservasi tidak mempermasalahkan hal itu hanya pada jumlah ketersediaan ternak yang ada bukan pada jenis yang berkembang.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Titik tolak penyediaan ternak merupakan rujukan dasar untuk mengetahui penilaian ini berlaku atau tidak berlakunya konservasi. Sejarah konservasi pada awal penilaian menjadi dasar penyelamatan stok lebih dini. Antara arah kebijakan pengembangan dan arah kebijakan konservasi dapat sejalan selama belum mengalami perubahan penurunan populasi yang signifikan dan permanen. Arah kebijakan pengembangan mendasari usaha keberlanjutan atau kelangsungan usaha sedangkan arah kebijakan konservasi lebih menitikberatkan pada mekanisme penyelamatan populasi ternak yang diukur dari ketersediaan stok ternak. Hubungan keduanya berimplementasi (berimbas) pada kontribusi ternak potong.

Nora (2017) menyatakan bahwa wilayah basis pengembangan berada di 7 (tujuh) kecamatan dengan perbandingan populasi antara daerah basis dan non basis 41,18 % : 58,82% dengan kekuatan stok (41,17%). Namun yang menjadi fokus tindakan konservasi adalah penyelamatan ternak stok dan faktor yang dapat mempengaruhi usaha penyediaan ternak stok, sehingga arah sasaran ada lokasi pusat yang aktif dan jumlah ternak yang memiliki dinamika ternak tinggi (lampiran 4)

B. Kondisi Pendukung Integrasi Limbah Pertanian-Ternak Di Kabupaten Bungo

Melimpahnya limbah dapat diintegrasikan dengan ternak melalui pemanfaatan limbah sebagai ukuran faktor pendukung pada lokasi basis dan non basis yang sebagian besar masih memiliki peluang besar dalam penyediaan pakan. Tindakan konservasi pertama dilihat melalui integrasi pertanian dan ternak.

C. Daerah Integrasi Di Kabupaten Bungo

Hasil pemetaan berdasarkan sistem integrasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Identifikasi Faktor-Faktor SDA dan SDM (Daerah Basis Penelitian)

No	Kecamatan	Populasi		Hasil Analisis	
		Sapi2013	Sapi 2014	Kontribusi Lahan	Produksi HMT
1	Jumlah Total Untuk Kabupaten	24.407	22.950	9.895,68	10.717,59

Sumber :BPS Kabupaten Bungo, Dinas Peternakan Kabupaten Bungo, dan Hasil Analisis dalam Nora (2015)

Identifikasi faktor-faktor pendukung usaha yang berasal dari alam dan manusia menjadi penggerak utama di Kabupaten Bungo, namun dalam kenyataanya antara kegiatan lain diluar peternakan dan usaha pengembangan ternak potong masih diperlukan peningkatan usaha yang lebih maksimal lagi. Ini terbukti dari masih rendahnya usaha peternakan murni (diluar daerah basis) dan perlu peningkatan jumlah ternak yang dipelihara agar signifikan jumlahnya dari tahun ketahun (di daerah basis) sehingga keseimbangan ketersediaan stok dan permintaan dapat terus dipertahankan. Tindakan mempertahankan ini adalah awal cikal bakal usaha penyelamatan stok yang akan diukur dalam penelitian ini. Bila terjadi gejala tanda-tanda ada keadaan yang mencirikan adanya penurunan dan tipisnya perbedaan populasi atau perubahan populasi merupakan suatu signalement untuk dilakukan penyelamatan stok ternak, apalagi pusat konservasi diutamakan di daerah sentra ternak karena dikhawatirkan akan mengancam jumlah populasi yang ada dalam suatu waktu dapat menipis jumlahnya.

Daerah basis yang melimpah limbah dapat dijadikan sebagai lumbung pakan alternatif. Keberlanjutan usaha yang dilakukan untuk penyelamatan alternatif pengembangan daerah non basis diperlukan untuk meningkatkan populasi sapi sebagai daerah baru untuk pengembangan lanjutan usaha sapi potong di Kabupaten Bungo. Asumsi ini dijadikan sebagai rujukan penelitian selanjutnya.

Besaran kontribusi daya dukung lahan sangat berpengaruh pada hasil limbah yang dapat digunakan sebagai sumber bahan baku pakan ternak. Di Kabupaten Bungo pemanfaatan limbah ini sudah dilakukan namun masih perlu ditingkatkan arah pengembangan dan tujuan pemanfaatan serta bentukan dari pakan alternatif ini melalui peran penggunaan teknologi dan kemampuan peternak untuk memberdayakan limbah tersebut sebagai sumber pakan alternatif.

Tabel 3. Perbandingan Luas dan Fungsi Lahan di Kabupaten Bungo Tahun 2008 dan 2013

No.	Fungsi Lahan	Luas (Ha)	
		2008	2013
1	Luas	510.539	253.859
2	Total Luas	764398	
Persentase Luas		66,79%	33,21%
% Penyusutan Luas dan Fungsi Lahan		33,58 %	

Sumber : Hasil Analisis Nora (2016) dari Data BPS Kabupaten Bungo (2008 dan 2013)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Luas tanam menurun dalam 5 (lima) tahun sehingga berpotensial menurunnya limbah sebesar 41,95% (2013) yaitu dari tanaman padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai dan kacang tanah. Kondisi produksi limbah sebagai salah satu sumber pakan yang digunakan didaerah sentra memerlukan suatu sikap kreatif dalam pembauatan pakan berkualitas yang nantinaya akan mendukung usaha pengembangan ternak potong disebabkan karena jumlah ketersediaan rumput unggul dan rumput alami sudah semakin sulit didapatkan sehingga tindakan usaha mengelola kebun rumput menjadi suatu usaha yang harus dilakukan bila beternak pada daerah yang padat dan daerah basis ternak potong. Adapun identifikasi konservasi untuk kontribusi hasil sumber daya lahan dapat dilihat pada Gambar 2.

Lahan yang dimanfaatkan sebagai indikator produksi bahan baku pakan ternak dan alternatif pakan perlu dilakukan pengukuran kekuatan daya dukungnnya. Hal ini berkaitan dengan gambaran kekuatan kontribusi pemanfaatan lahan

Gambar 2. Identifikasi Faktor-Faktor Sumber Daya Fungsi Lahan (Ha)

Sumber daya hasil pemanfaatan lahan berupa besaran luas lahan dan identifikasi klas lahan dapat dilihat pada Tabel 4.

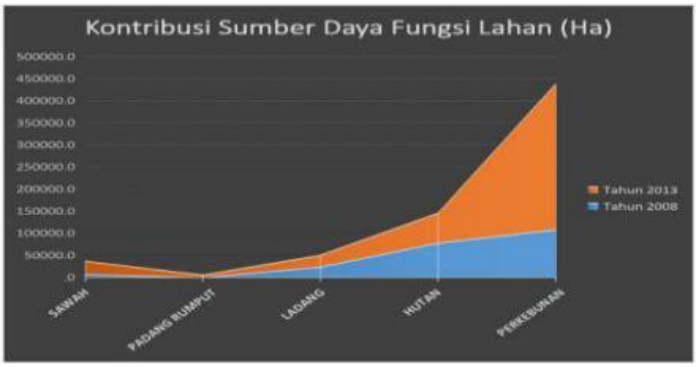

Tabel 4. Identifikasi Klas Lahan

Kls	Kontribusi Pemanfaatan Lahan	Indikator Luas (%)	Pemetaan Hutan (%)	Evaluasi Konservasi	Penilaian
1	Lemah /Minimum	0-50	≥60	Pola Pemberdayaan Usaha	Kuat
2	Sedang	50-60	50-60	Pola Usaha Terpadu	Sedang
3	Kuat/Maksimum	≥60	0-50	Pola Integrasi/Posisi Konservasi Optimal	Lemah

Sumber : Hasil Penelitian Nora (2016)

Klas lahan di Kabupaten Bungo berada di klas 1 dengan posisi lahan belum banyak tergarap yang diukur yang dilihat dari luas Hutan. Evaluasi dilihat dari luas lahan secara keseluruhan, sempitnya hutan menyebabkan evaluasi konservasi berlaku semakin luasnya hutan menyebabkan turunnya klas pemetaan konservasi (klas 1)/ lahan minim dimanfaatkan. Artinya, lahan yang masih luas dan belum tergarap menggambarkan bahwa produksi rumput alami masih tinggi, dimungkinkan tidak ada kesulitan dalam memperoleh bahan baku hijauan bagi pakan ternak. Sedangkan daerah sentra sangat rentan dengan minimnya sumber rumput unggul dan rumput alamiah hal ini tentunya akan berimbas pada minim dan sulitnya rumput dapat diperoleh sebagai bahan baku pakan hijauan ternak. Signalement sulitnya sumber rumput alami perlu rekayasa usaha lain dalam pengembangan usaha ternak potong yaitu pembuatan kebun rumput yang intensif dan menyatu dengan usaha sebagai usaha pendukung dalam mempertahankan kondisi pemeliharaan ternak potong yang berkelanjutan.

Lahan optimal dimanfaatkan namun hutan menurun, kegiatan pertanian dominan dari peternakan, gambaran yang diperoleh adalah peternakan belum mendominasi usaha pengembangan ternak kecuali ada kegiatan program integrasi. Penilaian Konservasi dapat dilihat dari liniearitas laju perubahan populasi dan stok (sisa ternak secara keseluruhan), bila berbanding terbalik antara perubahan antar waktu tertentu dengan lainnya menunjukkan nilai yang menurun maka laju perubahan mengarah ke peta konservasi

Tabel 5. Identifikasi Klas Komoditi

Klas	Posisi Konservasi	Penilaian (%)		Tindakan Konservasi
		Mutu		
		Positif	Negatif	
1	Rendah	0-50	≥50	Perbaikan
2	Menengah	50-60	40-50	Proteksi /Perlindungan
3	Tinggi	≥60	≥40	Perluasan

Sumber : Hasil Analisis Dalam Nora (2016)

Penyusutan luas dan fungsi lahan pertanianbila terjadi terus menerus akan menyebabkan terjadinya produksi limbah yang menurun sehingga kemampuan daya dukung limbah rendah terhadap ketersedian sumber pakan lain. Besaran fungsi lahan akan berpengaruh pada penyelamatan ternak.

Komoditi terbesar limbah di Kabuaten Bungo berasal dari padi dan sawit. Pengukuran komoditi berada pada penguatan potensi dengan posisi konservasi sedang (mutu positif 42,86 %) tindakan konservasi berada di Klas 2 (Tabel 5).

Penjelasan Tabel 4 dimaksudkan bahwa pada prodksi limbah padi Lahan terus mengalami penurunan luas olah sebagai lahan produktif pertanian, perkebunan dan kehutanan, namun teknik pengelolaan lahan merupakan kepentingan yang mendesak untuk mengantisipasi penurunan luas lahan dan pola manajemen lahan.

Diwyanto (2002) menyatakan bahwa di Indonesia integrasi antara tanaman dan ternak sudah diterapkan oleh petani di Pedesaan, namun sistem pengelolaan masih bersifat tradisional tanpa memperhitungkan nilai ekonomi.

D. Identifikasi Daerah Konservasi Di Kabupaten Bungo

Untuk mempermudah identifikasi perbedaan pengaruh kondisi riil dilapangan pada masing-masing kecamatan dapat dilakukan pemetaan secara rinci tentang faktor internal di setiap kecamatan dalam Kabupaten Bungo. Usaha penyelamatan stok ternak dapat ditunjukkan dari penurunan laju perubahan populasi dari tahun ke tahun yang terus menurun sampai pada 44,78%, meningkatnya pemotongan (2,92%) bukan faktor namun masih dapat ditolerir karena perbandingan antara komposisi populasi dan ketersediaan stok masih linier belum menunjukkan perbedaan antara populasi dan sisa ternak akibat pemotongan yang signifikan hingga melebihi 50% atau dua kali lipat lebih tinggi pada perubahan populasi serta ditunjukkan dari kemampuan rata-rata ketersediaan stok .

Boyon (1996) Evaluasi faktor internal dan eksternal, mengukur potensi yang dimiliki, mengambil tindakan korektif merupakan awal usaha mengenali potensi daerah untuk menetapkan merumuskan program dan kegiatan-kegiatan pengembangan ternak potong serta merumuskan kebijakan berbasis sumber daya lokal sesuai potensi yang dimiliki suatu daerah. Menciptakan kondisi yang kondusif dalam usaha pengembangan suatu komoditi daerah diperlukan pengkajian mendalam tentang *existing condition* yang berlaku sebagai dasar mengenali permasalahan dan gambaran pengambilan kebijakan dasar dalam memecahkan permasalah yang ada dalam meneliti suatu potensi dan strategi yang akan diambil. Kondisi suatu daerah selalu dipengaruhi oleh berbagai faktor-faktor yang berbeda-beda.

Tabel 6. Performa Kondisi Pra Penyelamatan Stok Ternak

Populasi	Populasi (ekor)	Perubahan Populasi (%)	Pemotongan (ekor)	Sisa Ternak (ekor)	Stok (%)
Persentase (2005-2011)	26.62	45,12	2.77	23.84	45.28
Persentase Hingga 2014	27,99	44,78	2,92	25,09	44,72

Sumber : BPS Kabupaten Bungo(Tahun 2005-Tahun 2014) dan Nora (2016)

Kemampuan stok sejak tahun 2005 sampai tahun 2011 adalah 45,28 % dan menurun 1% 44,72 %92015). Artinya masih diperlukan usaha berkelanjutan untuk meningkatkan stok, agar pengembangan sapi potong berkelanjutan,Winarsoet.al.(2005) mengemukakan beberapa saran sebagai berikut: 1) perlunya perlindungan dari pemerintah daerah terhadapwilayah-wilayah kantong ternak, terutama dukungan kebijakan tentang tata ruang ternak serta pengawasan terhadap alih fungsi lahan pertanian yang berfungsi sebagai

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

penyangga budi daya ternak, 2) pengembangan teknologi pakan terutama pada wilayah padat ternak, antara lain dengan memanfaatkan limbah industri dan perkebunan.

E. Daerah Konservasi Di Kabupaten Bungo

Pemetaan daerah konservasi yang berintegrasi pada limbah dapat dilihat pada Tabel 7 dibawah ini.

Tabel 7. Identifikasi Klas Program

MATRIK	Ternak	Pakan	Manajemen	Jumlah	Perioritas Program
Ternak	1	1	1,0010	3,0010	Program Alternatif 2
Pakan	1	1	3,0001	5,0001	Program Alternatif 1
Manajemen	0,9999	0,3333	1	2,3332	Program Alternatif 3
Jumlah	2,9999	2,3333	5,0011	10,3343	

Sumber : Hasil Analisis Penelitian dalam Nora (2015)

Klas program dari tabel diatas didapat hasil berupa informasi adanya program yang dilakukan Kabupaten Bungo dalam memajukan usaha integrasi Semakin luas usah integrasi dilakukan maka populasi ternak yang dipelihara tidak akan mengalami gangguan dalam hal pakan. Data menunjukkan bahwa klas program yang berlaku mengarah pada kebijakan integrasi pakan dengan posisi jumlah yang tinggi dan diartikan prioritas program yang disarankan atau wajib dilakukan adalah program integrasi dengan ketersediaan sumber daya alam yang melimpah dari hasil samping usaha lain diluar peternakan untuk menunjang kegiatan pemeliharaan ternak.

Urutan program yang dapat dilakukan dilihat dari urutan prioritas program secara berturut-turut adalah : 1) program perbaikan pakan, 2) program peningkatan mutu dn populasi pakan dan 3) progra perbaikan manajemen. Dengan kekuatan terbesar identifikasi prioritas adalah pada klas program pakan. Mengingat pentingnya peranan pengelollaan usaha atau manajerial usaha sebagian besar kenyataan dilapangan menunjukkan bahwa ketersediaan pakan terbatas untuk di daerah sentra ini terbukti dari adanya usaha integrasi dengan limbah dalam pengadaan pakan ternak. Integrasi pakan dan ternak menandakan bahwa kualitas dan kuantitas Hijauan Makanan Ternak (HMT) yang diproduksi sangat minim dan sejalan dengan keterbatasan pakan disarankan untuk melakukan program pengadaan hijauan melalui pembuatan kebun HMT berupa rumput unggul pada kebun-kebun pada areal peternakan dan pembuatan kebun rumput secara luas untuk menghindari kekurangan rumput unggul mengingat daerah sentra sangat memerlukan pengadaan kebun rumput yang dikelola secara luas sehingga dapat menghasilkan rumput dalam jumlah yang banyak. Secara global proram alternatif merupakan program pilihan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dari permasalahan lapangan yang dihadapi peternak, sedangkan secara prioritas program dipilih berdasarkan analisis lapangan dana permasalahan yang paling sering terjadi dan memerlukan solusi secara luas dan cepat untuk mengatasi situasi yang melemahkan usaha pengembangan ternak potong di Kabupaten Bungo. Dengan kolaborasi yang didapat dari hasil analisis diatas bahwa point terpenting keseluruhan program adalah perbaikan pakan, perbaikan ternak dan perbaikan manajemen (secara horisontal) sedangkan secara vertikal perbaikan program yang dilakukan adalah manajemen, ternak dan pakan. Titik temu program dititik beratkan pada perbaikan ternak. Tentunya berkaitan dengan usaha peningkatan mutu populasi ternak dan nantinya akan bersentuhan pula dengan klas populasi yang menentukan pemetaan konservasi. Bila konservasi berlanjut ke level yang lebih tinggi diartikan konservasi lebih intensif dilakukan dengan harapan ternak dapat dipertahankan saat hampir menurun drastis sehingga tidak terjadi sulitnya mendapatkan ternak potong suatu saat dalam kondisi yang telah parah dalam usaha pengembangan ternak potong, terutama didaerah sentra, minimnya populasi menandakan ancaman internal yang harus segera diperbaiki situasi populasi ternaknya sehingga usaha keberlanjutan peningkatan terak potong tidak terhenti, stok minim dapat diatasi dan tindakan konservasi adalah jawaban yang diperlukan cepat dengan cara mencari ukuran peta konservasi yang tepat sehingga situasi usaha yang tidak menguntungkan dapat diatasi sesegera mungkin.

Penilaian Konservasi dapat dilihat dari liniearitas laju perubahan populasi dan stok (sisa ternak secara keseluruhan). Pada Identifikasi Populasi dari Tabel 8 dapat dilakukan uji identifikasi ada tidaknya tindakan konservasi pada suatu wilayah ditinjau dari populasi yang ada. Tindakan pemetaan konservasi berlaku bila pengukuran pada setiap tahapan klas telah dilakukan.Identifikasi klas populasi dimaksudkan untuk mengukur perubahan populasi dan kecepatan turunnya pada ukuran waktu tertentu. Semakin tinggi ukuran perubahan populasi akan mempengaruhi kecepatan perubahan. Adapun identifikasi populasi di Kabupaten Bungo dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Identifikasi Klas Populasi

Jangka Waktu (Thn)	Perubahan Populasi	Kecepatan Penurunan Populasi
10	45,12	4,512
5	0,34	0,068

Sumber : Hasil Analisis Nora (2016)

Hasil menunjukkan bahwa Kabupaten Bungo pada posisi mempertahankan stok yakni dilevel kekuatan stok 0,1-0,9. Kondisi menggambarkan perlunya usaha konservasi populasi yang dapat dilihat dari bergesernya pengukuran kecepatan penurunan populasi ke level tinggi pada posisi peta konservasi. Penjabaran situasi stok berada pada arah menuju up atau atas dengan kecepatan penurunan 0,068 dan kecepatan naik menuju arah lebih tinggi nilainya yaitu pada level 2 dan dapat berlanjut bila tidak dilakukan pendeteksian dini tentang perubahan populasi kontinue dapat bergerak kearah level yang lebih tinggi. Dikatakan level 2,3 dan 4 adalah disebabkan karena kebiasaan perubahan populasi selalu mengarah menurun, dan bila tidak ditolerir otomatis arah level mengarah pada peningkatan level pemetaan konservasi. Tindakan penyelamatan stok teraman berada pada level 1 selebihnya bila terus menunjukkan level yang tinggi akan membeikan kontribusi lemah pada stok berupa penurunan angka populasi dengan kecepatan perubahan yang berbeda-beda tetapi bila secara keseluruhan dapat dilihat adanya penurunan populasi dari tahun ke tahun. Hal inilah yang dikatakan konservasi untuk penyelamatan stok ternak.

Hasil diatas juga menggambarkan bahwa semakin cepat waktu perubahan populasi dan mengarah pada posisi penurunan populasi, maka konservasi akan semakin cepat terjadi dan menjadi tinggi tingkatannya. Perubahan populasi yang dapat dideteksi bermula dari perubahan tahun tertentu, antar tahun, dan keseluruhan tahun yang diukur. Untuk melihat perubahannya dengan cara melihat perbandingan pada tahun sebelumnya dengan tahun saat akan dilihat perubahan tersebut.

Usaha berkelanjutan penyelamatan stok yang sangat labil ini dapat mengancam stabilitas populasi. Kontinuitas pengukuran konservasi seharusnya terus dilakukan pada klas populasi menjadi point khusus untuk diperhatikan karena berkaitan dengan pembacaan posisi konservasi dalam peta dan tindakan apa yang akan dilakukan. Evaluasi harus terus dilakukan pada klas populasi dan tentunya tetap melihat kemungkinan perubahan lain yang menjelaskan kondisi lain pula pada klas diluar klas populasi ini. Pemetaan posisi konservasi stok ternak dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pemetaan Posisi Konservasi Stok Ternak

Range Nilai	Kekuatan Stok	Tindakan Konservasi	Level
≥ 0,1	≥ 1	Konservasi Lanjutan Kontinue	4
0,1	1	Posisi Penyelamatan Stok	3
0,01-0,99	0,1-0,9	Tindakan Awal Penyelamatan	2
	0,01-0,09	Tansisi	1-2
0-009	0-0,009	Posisi Aman	1

Sumber : Hasil Analisis (2015)

Pemotongan antara range 10 tahun dan 5 tahun memiliki kekuatan kurang lebih sama dengan penurunan per tahun sebesar 0,068. Posisi mempertahankan populasi mulai dilakukan bila menunjukkan angka 0,1. Masa transisi dapat berubah bila ada tindakan penyelamatan populasi dan bila tidak ada usaha penyelamatan populasi maka arah peta bergeser keatas, inilah yang harus dihindari. Melewati masa transisi merupakan berlakunya kebijakan konservasi. Posisi transisi diharapkan merupakan masa pembenahan situasi populasi dan tindakan aktif berupa perbaikan manajemen teknis pengadaan ternak sangat dibutuhkan saat itu, hal ini disebabkan karena semua tindakan yang berhubungan dengan populasi dan peningkatannya, merupakan usaha yang sangat dibutuhkan saat situasi telah berada pada level transisi. Biasanya perbaikan dalam penyediaan ternak sangat menentukan keberhasilan penyelamatan stok ternak potong disuatu daerah.

Posisi mempertahankan stok yakni dilevel kekuatan stok 0,1-0,9. Kondisi menggambarkan perlunya usaha konservasi populasi yang dapat dilihat dari bergesernya pengukuran kecepatan penurunan populasi ke level tinggi pada posisi peta konservasi. Penjabaran situasi stok berada pada arah menuju up atau atas dengan kecepatan penurunan 0,068 dan kecepatan naik menuju arah lebih tinggi nilainya yaitu pada level 2 dan dapat berlanjut bila tidak dilakukan pendeteksian dini tentang perubahan populasi kontinue dapat bergerak kearah level

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

yang lebih tinggi. Dikatakan level 2,3 dan 4 adalah disebabkan karena kebiasaan perubahan populasi selalu mengarah menurun, dan bila tidak ditolerir otomatis arah level mengarah pada peningkatan level pemetaan konservasi. Tindakan penyelamatan stok teraman berada pada level 1 selebihnya bila terus menunjukkan level yang tinggi akan membeikan kontribusi lemah pada stok berupa penurunan angka populasi dengan kecepatan perubahan yang berbeda-beda tetapi bila secara keseluruhan dapat dilihat adanya penurunan populasi dari tahun ke tahun. Hal inilah yang dikatakan konservasi untuk penyelamatan stok ternak.

Peta lokasi konservasi untuk penyelamatan stok ternak merupakan peta yang menunjukkan masa berlakunya tindakan konservasi pada suatu daerah yang diduga memiliki masalah dengan populasi yang dilihat dari perubahan penurunan yang berlanjut dan terus menunjukkan angka penurunan pada setiap perubahan masa tahun berbeda yang bila dilihat secara keseluruhan atau antar tahun dilihat memiliki angka populasi yang terus menurun. Bila kondisi ini terjadi maka sebaiknya gunakan peta konservasi dan lakukan kebijakan konservasi.

Perubahan level pada peta posisi konservasi memberikan informasi tentang kondisi peta konservasi, bila bergerak arah level menuju tingkatan yang lebih tinggi maka konservasi semakin penting dan kekuatan stok lebih dari satu memerlukan usaha lebih cepat dalam menyikapi situasi rasio suplay yang dapat berubah drastis menuju kedua arah yakni arah posisitif dan negatif. Bila kearah positif artinya kekuatan stok masih tinggi dilihat dari rasio perbandingan antara jumlah penduduk dan jumlah ternak potong masih mampu mencukupi permintaan/demand, namun tindakan konservasi digunakan lebih tinggi atau intensif untuk menjaga stabilitas ketersediaan stok ternak potong. Demikian pula bila kearah negatif artinya kekuatan stok lebih rendah akibat rasio perbandingan penduduk dan ketersediaan ternak potong yang rendah pula, artinya kondisi stok aman sehingga konservasi dapat diberlakukan saat posisi stok mengalami perubahan menuju arah yang tinggi saja dan diusahakan tetap dijaga stabilitas pada posisi tersebut.

Untuk menjamin keamanan situasi stok yang normal tersebut. Kebijakan konservasi didapat berdasarkan hasil penelitian sebelumnya yang dijelaskan Nora (2015) menyatakan bahwa kebijakan konservasi meliputi 1) mempertahankan stok sapi lokal, 2) impor sapi adalah sebagai pencukupan kebutuhan sapi potong yag diperlukan dalam mememnuhi jumlah permintaan tetapi bukan sebagai tujuan utama, 3) menjaga stabilitas harga sapi potong lokal dengan manajemen pemasara yang tepat dan mningkatkan nilai mutu ternak lokal sebagai tujuan utama di Indonesia, 4) meningkatkan peran utama badan penyeddiaan stok ternak (BULOG) daerah khusus ternak, sebagai kontrol ketersediaan ternak (logistik ternak), 5) menciptakan lokasi atau daerah lumbung ternak dengan daya dukung SDA dan SDM yang menjamin pengembangan usaha sapi potong, 6) manajemen impor ternak termasuk mengatur prosedural pelaksanaa, pelaku dan penerima impor perlu diatur lebih baik lagi terutama daerah-daerah yang mengalami inflasi, 7) penentuan kebijakan daerah dalam mempertahankan mutu ternak khusus daerahnya masing-masing dengan lumbung sapi mandiri, 8) membuat undang-undang tentang tindakan tegas bagi yang melemahkan ketersediaan ternak seperti tindakan penyimpangan praktek penimbunan stok sapi dengan tujuan menguntungka satu pihak saja bukan menguntungkan peternak secara umum.

Proporsi kebijakan diatas merupakan suatu kebijakan yang diterapkan pada suatu daeah yang aktif mengembangkan ternak potong tetapi memiliki kondisi populasi yang dapat berubah-ubah akibat masih lemahnya pengawasan ternak dan penyediaan ternak potong, untuk daerah yang sudah berkembang populasi ternak ditekankan pada pengawasan klas-klas yang mempengaruhi populasi yang berbeda penerapan kebijakan program integrasi atas komoditi potensi daerah yang dimiliki.

KESIMPULAN

Identifikasi penyelamatan tindakan konservasi stok ternak dapat dilihat dari: 1) Identifikasi klas lahan dan komoditi, 2) adanya perubahan populasi menyebabkan liniearitas antara angka stok dan pemotongan diatas 1, 2) pemetaan berlakunya konservasi berada dan dimulai dari level 2, 3, dan 4. Disarankan melakukankonservasi dini.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Boyon, Arfa'i. 1996. Potensi Ekonomi Ternak Sapi Potong dalam Sistem Usahatani pada Berbagai Topografi Lahan di Kabupaten Agam, Sumatera Barat (Laporan Penelitian). Padang : Lembaga Penelitian Universitas Andalas.

[2] Direktorat Jendral Peternakan. 2013. Statistik Peternakane dan Kesehatan Hewan. Livestock and Animal Health Statistics. Penerbit PT. CV. Alnidra Dunia Perkasa. Kementrian Pertanian.

[3] Diwyanto K, 2002. Pemanfaatan sumber daya local dan inovasi teknologi dalam mendukung pengembangan sapi potong diindonesia (orasi APU). Bogor : Badan Litbang Pertanian.
[4] Nora, D. 2015. Konservasi Potensi Daerah Untuk Pengembangan Lanjutan Pada Lokasi Inflasi dan Stok Minim Sapi Potong Kabupaten Bungo
[5] Nora, D. 2016. Peta Lokasi Konservasi Untuk Penyelamatn Stok Ternak. Hasil Penelitian Individu dan Seminar Nasional dengan Tema "Pembangunan Inklusif Desa-Kota" Kerjasama PPS PWD-UA dan ASPI-PERHEPI di Universitas Andalas, Padang
[6] Nora, D. 2017. Potensi dan Strategi Pengembangan Usaha Sapi Potong Di kabupaten Bungo. Tesis. PPS- Ilmu Peternakan Universitas Andalas, Padang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

DAMPAK BENCANA ALAM TERHADAP SEKTOR PERTANIAN DI PERDESAAN DI PROVINSI JAWA BARAT

Dwi Mahroji

Program Studi Ekonomi Pembangunan, STIE Pandu Madania

Email : d_mahroji@yahoo.com

Naskah diterima :13 Maret 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 22 Maret 2017

ABSTRAK

Berbagai literatur menyatakan bahwa bencana alam mempengaruhi sektor pertanian. Akan tetapi berapa tepatnya pengaruh tersebut belum dapat diperkirakan. Dengan menggunakan bukti empiris berdasarkan pada bencana alam gempa bumi di pedesaan di Provinsi Jawa Barat, diharapkan dapat diketahui dampak jangka pendek dan panjang dari bencana alam pada sektor pertanian. Sebuah kuesioner standar digunakan pada 200 rumah tangga petani untuk menilai dampak jangka pendek dan jangka panjang dari bencana gempa bumi 4,8 skala Richter yang terjadi di Desa Cibunian pada tanggal 12 September 2012 terhadap sektor pertanian. Hal ini dilengkapi dengan diskusi partisipatif dan observasi. Dengan penambahan statistik komparatif, diharapkan dapat terlihat kondisi masyarakat sebelum dan sesudah bencana alam. Hasil menunjukkan bahwa bencana memiliki dampak negatif yang cukup tinggi pada pertanian. Rumah tangga pertanian yang dipilih menyatakan bahwa sudah siap melupakan dan bangkit dari kejadian bencana yang menimpa mereka. Dikarenakan bencana di sektor pertanian memberikan dampak jangka pendek dan panjang maka diperlukan upaya menuju pencegahan yang salah satunya adalah dengan Early Warning System, dan penggunaan data sebagai dasar untuk manajemen bencana.

Kata kunci:*Bencana alam, Sektor Pertanian, Early Warning System*

PENDAHULUAN

Kata “bencana” indentik dengan suatu kejadian alam yang menghancurkan permukiman dan lingkungansekitarnya yang di sebabkan oleh tsunami, gempa bumi, letusan gunung merapi, badai hujan yang mengakibatkan banjir besar dan tanah longsor. Di sisi lain, bencana dapat juga menggambarkan suatu kejadian yang mengganggu pola kegiatan masyarakat sehari-hari. Gangguan tersebut umumnya timbul oleh ulah manusia, datangnya secara mendadak tidak pernah terpikirkan sebelumnya, dan akibatnya sangat meresahkan masyarakat. Dari dua gambaran tersebut, kata ‘’bencana’’ dapat di artikan sebagai suatu kejadian alam dan non-alam yang terjadi secara mendadak dan berangsur-angsur mengakibatkan kerugian yang harus di tanggung oleh masyarakat.

Bencana alam yang terjadi di Indonesia tidak terlepas dari letak geografis Indonesia yang terletak tepat di garis katulistiwa (daerah dengan itensitas hujan yang tinggi), dua lautan (Lautan Hindia dan Lautan Pasifik), dan terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik dunia yaitu lempeng ind-australia, Eurasia, dan Pasifik. Selain itu, indonesia juga mempunyai 127 gunung api aktif dengan 79 di antaranya di katagorikan berbahaya oleh badan geologi kementrian energi dan Sumber Daya Alam. Dengan kondisi geografis seperti itu dan di saat tiga lempeng tektonik saling bertumpukan, Indonesia sangatlah rawan terhadap bencana alam seperti letusan gunung berapi, gempa bumi, tsunami, dan tanah longsor. Selain itu, di saat musim hujan dengan intensitas hujan yang tinggi, Indonesia sangat rawan terhadap bencana banjir dan tanah longsor.

Horwich [1] menjelaskan dengan mengunakan logika multiplayer effect pada analisis ekonomi makro. Menurutnya, bencana alam akan berimplikasi pada kerusakan barang dan jasa yang dibutuhkan dalam perekonomian dan membawa penurunan nilai modal fisik yang berujung goncangan pada supply yang dapat mengeser kurva penawaran ke kiri.Implikasi lebih lanjutnya, harga keseimbangan akan mengalami kenaikan disebabkan oleh naik demand pada barang dan jasa yang tersisa. Dengan kondisi ini akan menimbulkan penurunan pada nilai riil uang dan menurunkan tabungan rumah tangga. Turunnya tabungan ini akan meningkatkan suku bunga. Suku bunga yang tinggi akan menurunkan investasi yang berakibat turunnya output yang juga akan menciptakan pengangguran.

Benson dan Clay [2] menjelaskan bahwa bencana alam membawa dampak secara ekonomi kepada rusaknya asset ekonomi (*stock value*), seperti rumah, gedung dan tempat usaha yang semuanya menimbulkan kerugian finansial. Aset yang rusaknya akan berakibat terganggu dan terhentinya kegiatan produksi serta menurunnya output. Paparan teori-teori di atas jika dihubungan dengan berbagai hasil riset dari dampak bencana alam memberikan sebuah penguatan.

Asia Disaster Preparedness Center [3] melansir dampak tsunami Aceh 2004; hilangan mata pencaharian, meningkatnya pengangguran, jaminan masa depan yang tak jelas, output turun drastis dan lebih 1 juta orang terjun bebas ke jurang kemiskinan. Bappenas [4], mengetimasi kerugian ekonomi dari gempa bumi di Yogyakarta dan Jateng mencapai Rp29,1 triliun. Kerugian ekonomi ini meliputi kerusakan stok value (asset pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) dan flow value (hilangnya asset ekonomis).

Pada sisi lain, laju pembangunan di Indonesia telah di iringi peningkatan penggunaan terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi, namun karena kurang tepatnya kebijakan penerapan teknologi, sering terjadi kegagalan teknologi yang berakibat fatal seperti kecelakaan industri. Hal yang demikian sering terjadi di Indonesia dan menjadi bencana non-alam yang mengakibatkan kerugian jiwa dan ekonomi.

Solehudin [5] mengelompokkan bencana menjadi 2 jenis yaitu Bencana alam (natural disaster) dan Bencana ulah manusia (man made disaster). Carlson, Plummer dan Megary [6] "*an earthquake is a trembling or shaking of the ground caused bythe sudden release of energy trored in the rock beneath earth's surface*". Gempa bumi adalah sebuah getaran atau goyangan tanah yang disebabkan oleh pelepasan energi yang tersimpan dibawah permukaan bumi secara tiba-tiba.

Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat merupakan salah satu desa yang berdasarkan catatan sejarah sudah pernah mengalami gempa bumi, yakni gempa dengan kekuatan 4,8 skala richter yang terjadi pada hari minggu dini hari pukul 01.27.15 WIB, tepat pada 09/09/2012.Lokasi pusat gempa bumi di darat yaitu 6.70 LS, 106.64 BT (31 km Barat Daya Kabupaten Bogor-Jawa Barat dengan 10 kilometer). Gempa Cibunian ini tidak menimbulkan potensi tsunami karena daerah dataran tinggi dan jauh dari air laut.Goncangan gempa ini tidak hanya dirasakan oleh warga Desa Cibunian, melainkan juga dirasakan oleh beberapa desa di kecamatan Pamijahan lainnya. Akibat gempa ini, sedikitnya 12 kepala keluarga terdiri dari 63 jiwa di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Jawa Barat memilih mengungsi karena rumahnya rusak usai digoyang gempa. Selain itu himbauan mengungsi juga disarankan oleh pemerintah setempat guna menghindari gempa susulan. Gempa yang terjadi pada tanggal 9 september di Desa Cibunian diketahui berkekuatan 4,8 skala Richter. Gempa Bumi yang terjadi di desa Cibunian menurut warga setempat merupakan gempa yang dahsyat hingga mengakibatkan Ratusan rumah rusak.

Dari kejadian tersebut sebagian warga tidak percaya penyebab terjadinya gempa disebabkan oleh pertemuan lempengan dari sungai Citarik. Menurut salah satu responden yang berprofesi sebagai seorang petani, menuturkan bagaimana kejadian gempa itu terjadi. Awalnya di sore hari sebelum gempa itu terjadi, warga Desa Cibunian RT 01 kedatangan sekelompok karyawan PT Chevron dengan membawa peti besar berwarna hitam. Mereka meminta izin kepada warga untuk mengubur peti tersebut di bukit belakang rumah warga dengan kedalaman yang mereka rahasiakan. Menurut karyawan PT. Chevron tersebut menjelaskan bahwa peti yang mereka bawa adalah berisi alat untuk mendeteksi gempa sebagai bantuan mereka terhadap warga demi keselamatan warga apabila akan terjadi gempa. Warga pun percaya dan senang hati menerima kepedulian dari perusahaan yang dimiliki Negara Perancis tersebut. Namun malam hari terdengar suara gemuruh, dinding dan genting rumah bergetar. Hanya dengan tiga detik gempa tersebut dapat meruntuhkan tembok dan atap rumah warga Kampung Muara, Cibunian.

Penelitian ini memfokuskan pengamatan di Kampung Muara, Desa Cibunian, yang meliputi tentang profil kebencanaan, mengetahui pengaruh adanya gempa cibunian tersebut atas kerugian materi dan perilaku masyarakat tentang adanya gempa tersebut pada tahun 2012. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui bagaimana profil kebencanaan yang ada di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat.
2. Mengetahui apa akibat dari bencana gempa bumi yang dirasakan warga di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, pada tahun 2012, dilihat dari kerusakan harta benda.
3. Mengetahui bagaimana perilaku ekonomi warga Desa Cibunian pasca gempa bumi tahun 2012 itu terjadi terkait dengan sektor pertanian.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup dan pembahasan penelitian ini hanya mengkaji mengenai Profil Kebencanaan dan Perilaku masyarakat di Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat serta bagaimana perilaku masyarakat setempat terkait dengan adanya gempa, serta mengkaji

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

mengenai kebencanaan yang terjadi di Desa tersebut yang difokuskan kepada terjadinya gempa pada tahun 2012, terutama kaitannya dengan Sektor Pertanian.

Penelitian ini dilakukan di Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, yang meliputi Kantor Kelurahan guna mendapatkan data primer wilayah tersebut, dan observasi lapangan guna mendapatkan data sekunder yang diperoleh langsung dengan masyarakat sekitar dengan melakukan interaksi/wawancara serta kuesioner yang diajukan. Adapun waktu penelitian ini dilakukan terhitung mulai tanggal 10 Oktober sampai dengan 10 Desember 2015 dan diteruskan dengan penyusunan laporan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan alat bantu kuesioner dan wawancara terstruktur kepada responden selaku masyarakat setempat, sehingga dirasa mampu untuk mendeskripsikan, memberi gambaran atau lukisan secara sistematis mengenai fakta-fakta dan sesuatu yang sedang terjadi pada objek yang akan diteliti. Sugiyono [7] menyatakan bahwa kuesioner adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab.

Selain itu, terdapat pula data sekunder yang diperoleh melalui data dokumentasi dari berbagai informasi yang berhubungan dengan ruang lingkup penelitian berupa data kecamatan yang menjadi wilayah objek penelitian, data di internet, referensi studi literatur yang relevan berupa artikel, skripsi, jurnal dan berbagai karya ilmiah lainnya. Adapun pengambilan sampel dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*) sebanyak 50 responden di Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Analisis data merupakan proses penyederhanaan dan kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterprestasikan. Metode yang dipilih untuk menganalisa dan harus sesuai dengan pola penelitian dan variabel yang akan diteliti. Dalam penelitian ini digunakan analisis kualitatif dan kuantitatif. Menurut Supranto [8], analisis kualitatif adalah merupakan suatu analisa yang digunakan untuk membahas dan menerangkan hasil penelitian tentang berbagai gejala atau kasus yang dapat diuraikan dengan menggunakan keterangan-keterangan yang tidak dapat diukur dengan angka-angka tetapi memerlukan penjabaran dan uraian yang jelas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskripsi daerah penelitian dimaksudkan untuk memberi gambaran umum tentang kondisi daerah penelitian, baik kondisi fisik maupun kondisi sosial ekonomi. Bab ini akan menguraikan letak, luas dan batas wilayah, kondisi lingkungan fisik dan kondisi sosial ekonomi.

Desa Cibunian merupakan salah satu dari 15 Desa yang termasuk wilayah Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Desa Cibunian berbatasan dengan Kecamatan Leuwiliang. Luas Desa Cibunian adalah 1.258 Ha, yang terdiri darat 518 Ha dan Sawah 288 Ha. Desa Cibunian mempunyai batas wilayah sebagai berikut :

1) Sebelah utara berbatasan dengan Desa Cibitung Kulon.
2) Sebelah timur berbatasan dengan Desa Ciasmara.
3) Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Leuwiliang.
4) Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Purwabakti.

Kondisi lingkungan fisik suatu wilayah dapat mencerminkan potensi wilayah. Aspek ini penting untuk diketahui sebagai salah satu bahan pertimbangan untuk perencanaan pengembangan suatu wilayah, selain aspek sosial ekonomi serta aspek lainnya. Sub bab ini menguraikan kondisi lingkungan fisik Desa Cibunian, terdiri dari topografi, geologi, iklim, tanah dan tata air.

Daerah penelitian berada pada dataran tinggi. Desa Cibunian berada pada ketinggian 515.600 meter di atas permukaan laut dan dengan suhu udara rata-rata 29 derajat celcius. Semakin ke barat akan semakin terjal kondisi struktural tanahnya. Banyak kondisi jalan utama yang kurang layak dan sangat mengganggu arus kegiatan penduduk sekitar dalam aktivitasnya. Kondisi tersebut berpusat pada sebelah barat kantor kelurahan Cibunian yang menuju kampung Muara Satu. Jalan utama menuju Kampung Muara Satu sangat terjal dengan kondisi jalan yang masih berupa batu-batuan yang kesannya belum tersentuh oleh pembangunan. Hampir seperempat dari luas wilayah merupakan tanah pertanian/persawahan yang berada sepanjang jalan wilayah tersebut.

Air merupakan sumberdaya alam yang sangat penting bagi makhluk hidup. Air memegang peranan penting dalam kehidupan manusia, baik air tanah maupun air permukaan. Keadaan hidrologis (air) suatu daerah dipengaruhi oleh banyaknya curah hujan, jenis litologi (batuan), stratigrafi dan struktur geologi serta keadaan topografi daerah bersangkutan. Keberadaan dan kemampuan hidrologi suatu daerah dapat dilihat secara langsung dari fluktuasi sumber air, debit air sungai dan kedalaman air tanah. Pemenuhan kebutuhan air untuk irigasi dan kebutuhan penduduk sehari-hari di Desa Cibunian menggunakan air dari mata air yang bersumber dari mata air yang ada di wilayah tersebut. Untuk kebutuhan sehari-hari penduduk memanfaatkan air sumur.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Wilayah penelitian ini termasuk beriklim tropis, dengan musim hujan antara bulan November-April dan musim kemarau antara bulan Mei-Oktober. Di Daerah tersebut mempunyai rata-rata suhu udara terendah sebesar 26,1° C pada bulan Januari dan November, serta yang tertinggi 28,4° C pada bulan September.

Objek dalam penelitian ini adalah warga Cibunian. Hal ini didasarkan karena dalam penelitian ini memerlukan narasumber penduduk asli daerah tersebut. Warga Cibunian merupakan penduduk asli setempat yang melakukan aktivitas perekonomian dan bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. Objek penelitian ini adalah warga setempat dimana penelitian ini dilakukan. Jumlah kepala keluarga di Desa Cibunian ini sebanyak 3.159. Tetapi subjek dalam penelitian ini diambil 50 orang yang berdomisili di Desa Cibunian salah satu desa di dalam wilayah administratif Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Dipilih sebanyak 50 subyek penelitian dikarenakan berbagai faktor, diantaranya umur, tingkat pendidikan, dan tingkat dari kesibukan warga setempat itu sendiri. Sedangkan karakteristik subyek penelitian sebagai berikut. 50 responden, dan responden yang paling banyak adalah responden berjenis kelamin perempuan yaitu berjumlah 28 responden atau sebesar 56%, sedangkan yang berjenis kelamin pria adalah 22 responden atau sebesar 44 %.

Sebagian besar responden adalah usia 18-26 yang mencapai 34%, kemudian usia 27-25 mencapai 24%, usia 36 - 44 dengan frekuensi 9 mencapai 18%, usia 45-53 mencapi 14%,dan usia diatas 54 mencapai 10%. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan observasi ini lebih antusias kalangan muda yang menjadi sebagian besar responden. Tingkat pendidikan responden dalam penelitian ini didominasi lulusan Sekolah Dasar (SD) dengan frekuensi 17 responden, selisih 1 responden dengan lulusan SMP dengan frekuensi 16 responden, kemudian tingkat SMA dengan frekuensi 14 responden, dan tidak sekolah/tidak lulus SD mencapai 3 responden. Sedangkan dilihat dari pekerjaan lebih dari 50% adalah pekerja tidak tetap (Buruh tani/Buruh nelayan) yang tepatnya mencapai 56%. Kemudian pekerja tetap (PNS/TNI/Polri/Karyawan swasta/Wiraswasta/Petani) mencapai 18%, dan responden yang tidak bekerja mencapai 26%.

Penghasilan responden yang sudah didapatkan sangat variatif. Tingkat penghasilan 50 responden dalam observasi ini sangat beragam, dimana minoritas sebagian responden berpenghasilan rendah dengan frekuensi 29 dan presentase 58% responden berpenghasilan < Rp.1000.000,-. Hal ini dapat dikatakan karena adanya responden yang hanya berprofesi sebagai ibu rumah tangga, anak sekolah, dan bahkan usia tua yang sudah tidak lagi bekerja.

Tipe rumah tempat tinggal disajikan guna mengetahui kondisi fisik tempat tinggal responden. Klasifikasi tipe rumah dan tempat tinggal ini kita dapat diketahui tipe rumah semi permanen (kayu, papan, dan tembok) mendominasi dengan presentase 70%. Sedangkan rumah permanen (tembok dan beton) mencapai 26%, kemudian rumah tidak permanen hanya mencapai 2 frekuensi, dengan presentase 4% dari 50 responden.

Selain status ekonomi diatas, juga digali informasi dari responden mengenai status ekonomi lainnya yang meliputi bagaimana responden mendapatkan air bersih, membuang BAK/BAB, alat transportasi yang responden miliki, alat komunikasi yang responden miliki, kemudian responden merupakan salah satu yang menerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) atau tidak, dan beberapa pertanyaan lainnya.

Berdasarkan catatan dari Dinas Pendaftaran Penduduk, jumlah penduduk Desa Cibunian pada tahun 2014 adalah 12.653 jiwa yang tersebar di 5 Dusun. Dari jumlah tersebut, 6397 jiwa adalah laki-laki dan 6252 jiwa adalah penduduk perempuan, dengan 3.159 Kepala Keluarga (KK).

Data kuesioner yang sudah terkumpul dari 50 responden di Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, kemudian diolah dengan menggunakan program Ms Excel. Data yang telah disusun tersebut selanjutnya dihitung dan disajikan dalam bentuk tabel. Pembuatan tabel tersebut dilakukan dengan cara ditabulasi sesuai dengan kebutuhan penelitian, yaitu untuk mengetahui secara terstruktur dari hasil observasi yang dilakukan selama di lapangan, yaitu mengenai dampak yang dirasakan oleh warga Cibunian dari segi kerusakan harta benda. Dari hasil yang didapatkan, berikut analisis data yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Resiko Bencana

Resiko Bencana	**Frekuensi**	**Presentase**
1. Rumah tidak mengalami kerusakan	0	0%
2. Rumah rusak ringan	11	22%
3. Rumah rusak namun masih dapat ditempati	17	34%
4. Rumah rusak berat dan tidak dapat ditempati	22	44%
5. Rumah hancur dan harus di bangun kembali	0	0%
Total	50	100%

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dari tabel diatas, maka dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang mengalami gempa tersebut, ternyata 44% mengalami rumah rusak namun masih dapat ditempati. Kemudian dengan tingkat frekuensi 16, dalam presentase 32% mengalami rumah rusak ringan. Selanjutnya rumah tidak mengalami kerusakan mendapat presentase 18%, dan hanya 6% rumah rusak berat dan tidak dapat ditempati.

Selain resiko bencana yang mengakibatkan kerusakan harta benda warga Desa Cibunian, ada pula data yang dapat disajikan berupa sikap mengenai resiko bencana tersebut yang sudah diolah melalui tabulasi dan perhitungan statistika sederhana yang dilakukan melalui persentase sebagai hasil akhir.

Tabel 2 berikut merupakan jawaban dari pertanyaan kuesioner yang diberikan kepada 50 responden warga Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor, terkait dengan sikap mengenai resiko bencana. Dari tabulasi data tersebut didapatkan hasil yang menunjukkan bahwa modus atau nilai yang sering muncul dari setiap pertanyaan yang diberikan kepada 50 responden menunjukkan hasil yang bervariasiTabel 2. Sikap Mengenai Resiko Bencana dan Perilaku Ekonomi

Butir Pertanyaan	Jawab				Skor	Modus
	1	2	3	4		
1	23	27	0	0	50	2
	46%	54%	0%	0%	100%	
2	0	0	30	20	50	3
	0%	0%	60%	40%	100%	
3	14	36	0	0	50	2
	28%	72%	0%	0%	100%	
4	7	26	17	0	50	2
	14%	52%	34%	0%	100%	
5	10	9	20	11	50	3
	20%	18%	40%	22%	100%	
6	32	18	0	0	50	1
	64%	36%	0%	0%	100%	
7	29	17	4	0	50	1
	58%	34%	8%	0%	100%	
8	9	32	9	0	50	2
	18%	64%	18%	0%	100%	

Sumber : data lapangan

Kerugian harta dan jiwa akibat gempa bumi ini mengakibatkan kerusakan berat sebanyak 32 unit rumah dan 2 unit mushola, kerusakan sedang 65 unit rumah dan 1 unit Madrasah Diniah, kerusakan ringan 161 unit rumah dan 2 unit masjid, sedangkan kerugian jiwa berjumlah 4 orang dengan luka ringan.

Perilaku Ekonomi Warga Desa Cibunian Pasca Gempa Bumi Tahun 2012

Perilaku ekonomi warga Desa Cibunian setelah terjadi gempa pada tahun 2012 menimbulkan perubahan kegiatan konsumsi. Berdasarkan faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya konsumsi dapat dilihat dari faktor- faktor berikut :

A. Selera (*taste*)

Selera adalah keinginan yang muncul dari dalam hati seseorang karena adanya daya tarik atau rangsangan terhadap suatu benda. Jika selera rendah komsumsi pun rendah, sebaliknya jika selera tinggi jumlah konsumsi juga akan tinggi. Jika dilihat perilaku konsumsi warga Desa Cibunian pasca gempa bumi menurut faktor selera, maka kegiatan konsumsi cenderung menurun. Hal ini disebabkan oleh menurunnya selera konsumsi warga Desa Cibunian akibat bencana gempa yang mereka alami.

B. Tingkat Pendapatan

Besar kecilnya tingkat pendapatan yang diterima oleh seseorang sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya pengeluaran untuk konsumsi. Berdasarkan data yang didapatkan, pasca gempa bumi pendapatan warga Desa Cibunian cenderung menurun karena aktivitas ekonomi yang belum berjalan seperti semula. Hal ini menyebabkan tingkat konsumsi warga Desa Cibunian juga menurun.

ISBN : 978-602-73463-1-4

C. Kebiasaan dan Sikap Hidup

Hal ini menyangkut perilaku yang sering muncul dan dilakukan oleh konsumen, misalnya hidup hemat atau sebaliknya hidup senang atau boros. Pasca terjadinya gempa kebiasaan warga Desa Cibunian berubah karena selera dan tingkat pendapatan yang belum stabil.

D. Lingkungan tempat tinggal

Manusia selalu hidup beradaptasi atau dipengruhi oleh lingkungannya. Sehingga pola konsumsi dapat dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkunga yang rusak pasca terjadinya gempa mempengaruhi pola konsumsi warga Desa Cibunian.

E. Alat Distribusi

Pengadaan jumlah barang disuatu tempat tergantung pada alat distribusi yang digunakan. Selain itu akses jalan untuk penyaluran barang juga mempengaruhi pengadaan barang. Sehingga pasca terjadinya gempa bumi penyaluran barang untuk konsumsi terhambat dan mempengaruhi konsumsi warga Desa Cibunian. Tetapi, penurunan-penurunan dalam beberapa faktor tersebut hanya berpengaruh sementara waktu saja. Hal ini disebabkan kerusakan yang ditimbulkan oleh gempa bumi tidak membutkan waktu lama untuk mengembalikan ke kondisi semula, terutama kerusakan pada faktor-faktor pendukung jalannya perekonomian, seperti akses jalan, lahan pertanian dan pasar.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamata Pamijahan, Kabupaten Bogor merupakan salah satu desa yang memiliki potensi bencana dengan intensitas tinggi. Potensi bencana tersebut dapat diamati dari kondisi geografis yang ada di kampung Muara tersebut yang berupa dataran tinggi dan terjal, yang dapat berpotensi terjadinya tanah longsor, gempa bumi, angin puting beliung, dan bahkan banjir. Akibat terjadinya gempa dengan kekuatan 4,8 SR di Kampung Muara, Desa Cibunian, Kecamatan Pamijahan, Kabupaten Bogor yang terjadi sekitar pukul 01.27 WIB dini hari pada 9 September 2012, telah mengakibatkan puluhan rumah rusak, sehingga harus mengungsi di tempat yang lebih aman.
2. Berdasarkan observasi yang penulis lakukan di Kampung Muara, Desa Cibunian, maka dapat diketahui bahwa dari 50 responden yang mengalami gempa tersebut, ternyata 44% mengalami rumah rusak namun masih dapat ditempati. Kemudian persentase 32% mengalami rumah rusak ringan dengan frekuensi 16. Selanjutnya rumah tidak mengalami kerusakan mendapat presentase 18%, dan hanya 6% rumah rusak berat dan tidak dapat ditempati.
3. Masyarakat Kampung Muara, Desa Cibunian, 58% tidak setuju bahwa warga harus pindah dari lokasi bencana tersebut guna menghindari adanya potensi bencana yang siap melanda sewaktu-waktu. Hal ini dikarenakan mayoritas masyarakat Kampung Muara, Desa Cibunian, menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan kekerabatan sehingga sulit untuk memisahkan diri dari tempat tinggal dan lingkungan yang mereka tempati. Masyarakat Kampung Muara masih mempunyai hubungan keluarga dekat yang turun-temurun hingga terbentuk suatu lingkungan baru. Sebanyak 64% masyarakat Kampung Muara, Desa Cibunian kurang setuju bahwa masyarakat akan terpengaruh aktivitasnya dalam kegiatan perekonomian pasca terjadi gempa. Hal ini dikarenakan bahwasannya masyarakat Kampung Muara, Desa Cibunian sudah kerap kali dilanda bencana. Responden menyadari bahwa bencana alam memberikan dampak kepada kehidupan mereka.
4. Melihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi pengeluaran konsumsi, konsumsi warga Desa Cibunian setelah terjadi gempa bumi pada tahun 2012 aktivitas ekonomi pasca terjadinya gempa di Desa Cibunian sempat tidak aktif dalam beberapa hari, karena faktor psikologis dari masyarakat. Bencana alam memberikan dampak kecil terhadap sektor pertanian baik pertanian tanaman pangan, peternakan dan hasil perkebunan.

Adapun sarannya adalah:

1. Dalam permasalahan tentang profil kebencanaan Kampung Muara, Desa Cibunian, yang diamati dari potensi bencana yang ada di kampung tersebut, seharusnya ada peran dari aparatur desa dalam upaya memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai kebencanaan. Baik itu berupa sosialisasi atau mitigasi terhadap masyarakat setempat dengan tujuan agar masyarakat lebih berperan aktif dan melakukan kesiapsiagaan apabila sewaktu-waktu terjadi bencana yang melanda kampung, tanpa harus pasrah dengan adanya bencana yang datang melanda.
2. Perlu adanya perbaikan infrastruktur yang ada di Kampung Muara, Desa Cibunian, teutama dari segi infrastruktur jalan utama menuju kampung Muara satu yang terletak di ujung desa. Jalan utama ini sangat terjal dan memprihatinkan, bahkan dapat disebut kurang layak dan terkesan jauh dari pembangunan. Maka

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dari itu, perlu adanya campur tangan pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur tersebut dan menambah infrastruktur lainnya dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat.

3. Dalam pengamatan di lapangan mengenai kebencanaan ini, jika dilihat dari kondisi geografis Kampung Muara, Desa Cibunian, seharusnya bagi masyarakat yang mempunyai pemukiman dengan tingkat potensi bencana tinggi segera dialihkan ke tempat yang lebih rendah potensi akan terjadinya bencana tanpa menunggu resiko besar itu terjadi. Hal tersebut dapat dtempuh dengan pengadaan *Early Warning System* tradisional yang berbasis budaya, misalnya dengan menghidupkan Siskamling untuk mengantisipasi adanya bencana alam yang akan terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Horwich, George (2000) Economic Lessons from Kobe earthquake. *Economic Development and Cultural Change. Vol 18 No. 3: 521-542*

[2] Benson, Charlotte dan Edward J. Clay (2004), Understanding the Economic and Financial Impacts of Natural Disasters, Disaster Risk Management Series No. 4, The World Bank, Washington D.C.

[3] Asian Disaster Preparedness Center, 2006, "Multi-hazard Early Warning Systems, Vol.12 No. 4, Asian Disaster Management News", Bangkok-Thailand.

[4] Badan Nasional Penanggulangan Bencana, 2008, "Implementasi Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia 2007-2008", Jakarta

[5] Solehudin, Usep. (2005). Business Continuity and Disaster Recovery Plan,Magister Teknologi Informasi, Universitas Indonesia.

[6] Carlson, Plumer, Megeary. (2006). Physical Geology Earth Revealed, sixth edition. New York: MC.Graw Hill.

[7] Sugiyono, 2011, "Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D", Cetakan ke-13, Alfabeta, Bandung.

[8] Supranto J., 2002. Metode Peramalan Kuantitatif untuk Perencanaan Ekonomi dan Bisnis, Jakarta: Rineka Cipta.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN DISUBSEKTOR PERKEBUNAN TERHADAP EKONOMI KABUPATEN TEBO

Evo Afrianto

Fakultas Pertanian, Universitas Muara Bungo

Email : evo_juventini@yahoo.com

Naskah diterima :6Maret 2016 Naskah direvisi : 24 Maret 2017 Disetujui terbit : 27 Maret 2017

ABSTRAK

Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah mengembangkan perekonomian yang berorientasi pada kemajuan teknologi dan membangun keunggulan kompetitif sebagai negara agraris. Selain itu pembangunan ekonomi harus berbasis dan sesuai dengan kompetisi produk unggulan disetiap daerah terutama produk pertanian dalam arti luas. Pembangunan ekonomi akan menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Menurut Jhingan, 2010. Perkembangan Ekonomi diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto) dalam jangka waktu panjang, kenaikan pendapatan perkapita dan terciptanya kesejahteraan ekonomi. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui besarnya kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tebo, untuk melihat produk subsektor perkebunan yang mempunyai keunggulan komparatif di Kabupaten Tebo dan untuk melihat sektor basis untuk subsektor perkebunan dari tahun 2007 – 2015. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan analisis Kontribusi, analisis basis Locationt Quentient (LQ) dan Formula Revealed Comparative Advantage (RCA). Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa pada hasil subsektor perkebunan yang mempunyai keunggulan komparatif di Kabupaten Tebo adalah karet, sedangkan subsektor perkebunan merupakan sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Tebo, dimana hasil perhitungan LQ untuk tahun 2007 – 2015 terhadap perekonomian Kabupaten Tebo lebih besar dari satu (>1). Ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan merupakan penggerak utama perekonomian Kabupaten Tebo dan telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo.

Kata kunci: *Kontribusi, Sektor Basis, Keunggulan Komparatif, PDRB*

PENDAHULUAN

Indonesia dikenal sebagai negara agraris yang berarti Negara yang mengandalkan sektor pertanian baik sebagai sumber mata pencaharian maupun sebagai penopang pembangunan. Sektor pertanian meliputi subsektor tanaman bahan makanan, subsektor perkebunan, subsektor holtikultura, subsektor perikanan, subsektor peternakan, dan subsektor kehutanan. Pertanian merupakan salah satu sektor yang sangat dominan dalam pendapatan masyarakat di Indonesia karena mayoritas penduduk Indonesia bekerja sebagai petani. Pembangunan ekonomi adalah salah satu tolak ukur untuk menunjukkan adanya pembangunan ekonomi suatu daerah, dengan kata lain pertumbuhan ekonomi dapat memperlihatkan adanya pembangunan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah mengembangkan perekonomian yang berorientasi pada kemajuan teknologi dan membangun keunggulan kompetitif sebagai negara agraris. Selain itu pembangunan ekonomi harus berbasis dan sesuai dengan kompetisi produk unggulan disetiap daerah terutama produk pertanian dalam arti luas.

Sebagian besar negara berkembang seperti Indonesia memulai pembangunan dengan mengandalkan sektor pertanian. Hal ini disesuaikan dengan kondisi negara yang bersifat agraris, karena sebagai negara agraris maka pertanian merupakan suatu usaha yang sangat cocok untuk dikembangkan di wilayah tersebut. Menurut Arsyad [1] sektor pertanian memegang peranan penting bagi keberhasilan pembangunan suatu negara karena hasil ekspor dari sektor ini mampu menghasilkan devisa yang cukup besar dan dalam tahapan pembangunan

selanjutnya sektor pertanian berperan sebagai penyedia input berupa bahan baku dan tenaga kerja bagi sektor industri dan jasa.

Pembangunan ekonomi adalah serangkaian usaha dalam suatu perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonomi (Sukirno, 1997). Dampak dari pembangunan ekonomi adalah tersedianya infrastruktur, berkembangnya perusahaan, meningkatnya taraf pendidikan, teknologi dan kesempatan kerja sehingga pendapatan meningkat dan masyarakat sejahtera. Pembangunan ekonomi akan menentukan perkembangan ekonomi suatu negara. Menurut Jhingan, 2010. Perkembangan Ekonomi diukur dalam arti kenaikan pendapatan nasional (Produk Domestik Bruto) dalam jangka waktu panjang, kenaikan pendapatan perkapita dan terciptanya kesejahteraan ekonomi.

Produk Domestik Bruto Indonesia dihitung dengan beberapa pendekatan salah satunya adalah pendekatan pendapatan yang dihitung dengan nilai tambah dari berbagai lapangan usaha dalam perekonomian (Sukirno, 1997). Sektor pertanian sebagai salah satu lapangan usaha dalam perekonomian memiliki sumbangan yang potensial terhadap pertumbuhandan pembangunan ekonomi nasional ("Kemenkeu menyatakan melalui laman Badan Pusat Statistik (BPS), struktur perekonomian Indonesia menurut lapangan usaha pada tahun 2014, didominasi oleh 3 lapangan usaha utama. Pertama adalah Industri Pengolahan sebesar 21,02 persen, kedua adalah Pertanian, Kehutanan dan Perikanan sebesar 13,38 persen, serta Perdagangan Besar-Eceran; Reparasi Mobil-Sepeda Motor sebesar 13,38 persen")

Data diatas menegaskan bahwa kontribusi sektor pertanian dalam pembangunan dan perekonomian sudah tidak diragukan lagi. Sektor pertanian akan selalu berperan selagi manusia masih memerlukan makanan dan memerlukan hasil pertanian sebagai bahan baku industri. Namun peranan sektor pertanian untuk masing-masing wilayah di Indonesia berbeda-beda. Salah satu wilayah yang ada di Indonesia adalah Propinsi Jambi. Jambi termasuk wilayah yang menjadikan sektor pertanian sebagai sektor ekonomi utama dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonominya, dari sembilan sektor perekonomian penyusun PDRB propinsi Jambi, sektor pertanian menyumbang rata-rata mendekati 30% dari total PDRB artinya 1/3perekonomian Jambi terbentuk dari sektor pertanian. Sektor kedua perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai yang juga terus meningkat setiap tahunnya sedangkan sektor ketiga adalah sektor industri pengolahan yang pada tahun 2011 beralih ke sektor pertambangan dengan selisih nilai yang tidak terlalu besar.

Dalam pola umum pembanguan Provinsi Jambi dijelaskan bahwa sektor pertanian merupakan sektor prioritas dalam pembangunan daerah. Dijadikannya sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan karena dalam penyerapan tenaga kerja sektor pertanian mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah yang cukup besar. Pembangunan di Provinsi Jambi khsusnya Kabupaten Tebo mempunyai peranan yang cukup penting dalam pembangunan ekonomi daerah, terutama sebagai pengasil devisa, kontribusi terhadap PDRB, penyediaan lapangan kerja, dan memacu pertumbuhan wilayah.

Kabupaten Tebo memiliki sumberdaya potensial yang cukup besar dibidang subsektor perkebunan. Apabila dilihat dari sumbangannya terhadap PDRB sektor pertanian dan PDRB Provinsi Jambi, sebagian komoditi subsektor perkebunan merupakan komoditi unggulan yang dijadikan sebagi bahan baku industri dan diterima dipasar internasional, artinya subsektor perkebunan memiliki potensi yang cukup besar dalam penunjang pembangunan ekonomi Kabupaten Tebo.

Bertitik tolak dari latar belakang dan uraian diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Berapa kontribusi subsektor perkebunan terhadap PDRB Kabupaten Tebo.
2. Apa saja produk subsektor perkebunan yang mempunyai keunggulan komparatif di Kabupaten Tebo.
3. Apakah subsektor perkebunan merupakan sektor basis di Kabupaten Tebo

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk membahas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui besarnya kontribusi subsektor perkebunan di Kabupaten Tebo
2. Untuk mengetahui produk subsektor perkebunan yang mempunyai keunggulan komparatif di Kabupaten Tebo
3. Untuk mengetahui sektor basis subsektor perkebunan di Kabupaten Tebo

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TINJAUAN PUSTAKA

Pembangunan merupakan suatu transformasi dalam arti perubahan struktural, yaitu perubahan dalam struktur ekonomi masyarakat yang meliputi perubahan pada pertimbangan-pertimbangan keadaan yang melekat pada landasan kegiatan ekonomi dan bentuk susunan ekonomi. Dalam istilah ekonomi, pembangunan biasanya diartikan sebagai kapasitas dari suatu perekonomian nasional yang kondisi awalnya lebih kurang statis dalam jangka waktu yang cukup lama untuk berupaya mengkasilkan dan mempertahankan kenaikan tahunan Produk Domestik Bruto [2].

Peningkatan produksi merupakan salah satu ciri pokok dalam proses pembangunan. Dalam hal ini, selain segi peningkatan produksi secara kualitatif, proses pembangunan juga mencakup perubahan pada komposisi penduduk, perubahan pola penggunaan (Alokasi) sumber daya produksi diantara sektor-sektor kegiatan ekonomi, perubahan pola pembagian kekayaan dan pendapatan diberbagai golongan pelaku ekonomi, perubahan kerangka kelembagaan dalam kehidupan masyarakat [3].

Sedangkan pembangunan ekonomi merupakan usaha memperbesar pendapatan perkapita dan menaikan produktivitas perkapita dengan jalan menambah peralatan modal dan menambah skill [4]. Dengan demikian pembangunan ekonomi pada umumnya didefenisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka panjang. Jadi dalam pengertian ini terdapat 3 (tiga) unsur penting dalam pengertian pembangunan ekonomi, yaitu : (1) Suatu proses yang berarti perubahan yang terus menerus. (2) Usaha dan keberhasilan meningkatkan pendapatan perkapita. Dan (3) Kenaikan pendapatan perkapita itu berlangsung terus menerus dalam jangka panjang. Pertumbuhan ekonomi seharusnya membawa partisipasi akhir dalam kegiatan yang bersifat produktif oleh semua masyarakat yang ingin dan mampu untuk berperan serta dalam proses kegiatan ekonomi. Salah satu hal yang penting dalam proses pembangunan ekonomi adalah semakin luasnya kesempatan kerja yang produktif.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses dimana terjadi kenaikan produk nasional bruto riel atau pendapatan nasinal riel [5]. Pengukuran pertumbuhan ekonomi dinyatakan dalam angka persentase. Angka persentase ini juga sering disebut sebagai laju pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi dapat diukur juga melalui indikator perkembangan PDRB atau GNP dari tahun ketahun. Keadaan atau posisi kesejahteraan ekonomi dalam jangka panjang dipengaruhi oleh tingkat atau besarnya PDRB serta besarnya laju pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari perhitungan pertumbuhan ekonomi adalah untuk melihat apakah kondisi perekonomian membaik atau sebaliknya. Pertumbuhan ekonomi sangat penting karena dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan, kesempatan kerja dan distribusi pendapatan.

Menurut Syafrizal [6], pendapat tentang pertumbuhan ekonomi regional dibedakan menjadi tiga kelompok yang masing-masing didasarkan pada asumsi yang berbeda. Kelompok pertama dinamakan sebagai model basis ekspor (Ekspor Base Model), pendekatan ini dikemukakan oleh Douglas C. North. Apa yang dikemukakan oleh kelompok ini adalah suatu pemikiran yang paling akurat, dimana kelompok ini menyatakan bahwa tumbuhnya perekonomian wilayah disebabkan karena adanya lokasi-lokasi strategis yang memiliki oleh setiap wilayah. Disebabkan karena disetiap wilayah mempunyai sumberdaya dan keadaan geografis yang berbeda. Lokasi strategis ini dapat diartikan sebagai kemapuan dari sumberdaya yang dimiliki dan menguntungkan bagi daerah tersebut yang tidak dimiliki oleh daerah lain. Dengan demikian, dengan adanya lokasi-lokasi yang strategis itu memungkinkan terjadinya kegiatan ekspor antar daerah. Dasar pemikiran kelompok ini adalah teori lokasi dan berdasrkan pada pendekatan keunggulan komparatif.

Kelompok kedua dinamakan Neo-Classic Model yang dipelopori oleh Borth Steins. Pendekatan ini menyatakan bahwa factor produksi :Modal, tenaga kerja, dan tekhnologi sangat menentukan pertumbuhan ekonomi wilayah, juga dibahas secara mendalam dalam model ini tentang hubungan antara migrasi dan lalu lintas modal dengan pertumbuhan ekonomi regional. Suatu pernyataan yang banyak mendapat tanggapan dari lain yaitu pernyataan dari Neo-Classic yang menyatakan secara tegas bahwa pada awalnya proses pembangunan disuatu negara akan terjadi ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah yang tinggi sehingga timbul suatu kondisi divergence (ketimpangan tinggi), dan pada saat pertumbuhan ekonomi berjalan sesuai dengan yang direncanakan, dengan sendirinya sendirinya ketimpangan antar wilayah akan mengecil yang dikenal dengan convergence (ketimpangan rendah). Divergensi terjadi karena pada awal proses pembangunan ketersediaan infrastruktur dan suprastruktur social ekonomi sangat terbatas terutama untuk wilayah-wilayah terpencil sehingga pertumbuhan ekonomi sangat lamban.

Kelompok ketiga dinamkan Cummulative Causation Model yang dipelopori oleh Gunar Mydral. Pada prinsipnya ia menolak apa yang terjadi pola piker Neo-Classic, bahwa ia tidak percaya denagn sendirinya ketimpangan dalam proses pembangunan ekonomi sudah berada pada jalur yang tepat dan wilayah sejak dahulu

maju akan mengalami kemajuan pertumbuhan yang sangat lamban. Hal ini akan menciptakan kondisi stagnan yang menyebabkan ketimpangan yang terjadi akan menjadi lebih besar lagi. Oleh karena itu untuk mengatasi hal tersebut maka campur tangan aktif pemerintah sangat diperlukan dalam proses pembangunan melalui program-program pembangunan wilayah.

Model Basis Ekonomi ini pertama dikemukakan oleh North, yang merupakan kritiknya terhadap pendapat Hoover dan Fisher mengenai proses pertumbuhan daerah. Menurut kedua ahli ini pertumbuhan daerah dapat dibedakan dalam lima tahap (tahap-tahap pertumbuhan Rostow), namun dari pengamatan North ternyata pertumbuhan ekonomi suatu daerah tidaklah selalu mengikuti tahapan seperti itu, oleh sebab itu North mengemikakan teori mengenai peranan ekspor yang didasarkan pada kenyataan bahwa ekspor sangat penting sekali peranannya dalam pembangunan daerah, karena sektor tersebut dapat memberikan dua sumbangan penting kepada perekonomian suatu daerah. Pertama ekspor akan langsung menimbulkan kenaikan pada pendapatan faktor-faktor produksi daerah dan pendapatan daerah. Kedua, perkembangan ekspor dapat menciptakan permintaan atas produksi industry lokal yaitu industri-industri didaerah tersebut yang produksinya terutama digunakan untuk memenuhi pasaran didaerah tersebut [7].

Inti dari model basis ekonomi ini adalah bahwa arah dan pertumbuhan suatu wilayah ditentukan oleh ekspor wilayah tersebut. Ekspor tersebut berupa barang-barang dan jasa termasuk tenaga kerja. Tenaga kerja dan pendapatan pada sektor basis adalah fungsi permintaan dari luar (Exogeneus), yaitu permintaan dari luar yang mengakibat terjadinya ekspor wilayah tersebut [8]. Untuk mengetahui apakah suatu sektor merupakan sektor basis atau non basis dapat digunakan beberapa metode yaitu : Metode pengukuran langsung dan metode pengukuran tidak langsung.

Metode pengukuran langsung dapat dengan survey langsung untuk mengidenfikasikan sektor mana yang menjadi sektor basis. Metode ini dapat menentukan sektor basis dengan tepat. Akan tetapi metode ini memerlukan biaya, waktu, dan tenaga kerja yang banyak. Mengingat hal diatas maka sebagian besar pakar ekonomi menggunakan metode pengukuran tidak langsung. Metode pengukuran tidak langsung tersebut yaitu : (1) Metode melalui pendekatan asumsi. (2) Metode location quotient. (3) Metode kombinasi 1 dan 2. (4) Metode kebutuhan minimum.

Pembangunan suatu wilayah dapat berhasil dengan baik apabila didukung oleh suatu perencanaan yang mantap sebagai dasar suatu strategi, pengambilan keputusan dan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan yangbaik perlu menggunakan data-data statistik yang memuat informasi tentang kondisi riel suatu wilayah pada saat tertentu sehingga kebijaksanaan dan strategi yang telah atau akan diambil dapat dilihat dan dievaluasi hasil-hasilnya.

Salah satu indikator untuk mengukur keberhasilan ekonomi dapat dilihat melalui data Produk Doestik regional Bruto (PDRB) yang biasanya digunakan untuk mengevaluasi hasil-hasil pembangunan disuatu wilayah dalam lingkup kabupaten dan kota serta data ini juga dapat digunakan untuk memonitor sektor apa saja yang menyebabkan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi suatu wilayah (BPS Provinsi Jambi).

PDRB atas dasar harga pasar adalah jumlah nilai tambah bruto (*gross value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian wilayah tersebut. Nilai tambah bruto adalah nlai produksi (*output*) dikurangi dengan nilai antara (*intermediate cost*). Nilai tambah bruto mencakup komponen-komponen faktor pendapatan (upah dan gaji, bunga, sewa tanah, dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menghitung nilai tambah bruto dari masing-masing sektor dan menjumlahkannya, akan menghasilkan PDRB atas dasar harga pasar.

Pendapatan regional atas dasar harga berlaku adalah pendapatan regional yang didalamnya masih ada unsur inflasi. Harga konstan artinya harga pokok didasarkan atas harga pada tahun tertentu. Kenaikan pendapatan hanya disebabkan oleh meningkatnya jumlah fisik produksi karena harga dianggap tetap (konstan). Laju pertumbuhan ekonomi umumnya diukur dari kenaikan nilai konstan karena dengan menggunakan harga konstan pengaruh perubahan harga (inflasi) tidak ada lagi atau sudah dihilangkan.

Subsektor perkebunan merupakan bagian dari sektor pertanian dimana subsektor perkebunan ini memberikan kontribusi atau peranan yang sangat besar terhadap perekonomian di Provinsi Jambi yang dapat dilihat dengan PDRB. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai salah satu alat untuk mengetahui struktur ekonomi suatu wilayah, diyakini masih merupakan indikator penting dalam menentukan arah pembangunan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dengan memperhatikan besarnya peranan dari subsektor perkebunan ini dalam PDRB merupakan cerminan tingkat keberhasilan pembanguan yang dilaksanankan. Oleh karena itu hasil perhitungan PDRB diharpakan mampu memberikan gambaran keadaan perekonomian suatu wilayah yang sesungguhnya.

Tingkat pertumbuhan ekonomi ini juga merupakan salah satu indikator bagi penyusunan kebijakkan pembangunan dalam bidang ekonomi makro, karena indikator tersebut mengukur hasil-hasil pembanguna secara kuantitas, dan pada dasarnya pertumbuhan ekonomi yang dapat dipengaruhi oleh komoditas perkebunan. Apabila produksi dari komoditas tersebut meningkat maka akan meningkat pula kontribusinya terhadap PDRB yang secara langsung berpengaruh terhadap perumbuhan ekonomi Provinsi Jambi.

Menurut Dumairy [9] tanaman perkebunan merupakan pendukung utama sektor pertanian dalam menghasilkan devisa. Ekspor komoditi kita yang utama adalah hasil-hasil perkebunan. Hasil-hasil perkebunan yang selama ini telah menjadi komoditas ekspor komersial terdiri atas karet, the, kopi, dan tembakau. Masih ada beberapa jenis tanaman perkebunan yang diekspor, namun porsinya relative kecil. Dari hasil komoditi tersebutlah sangat berperan dalam pembentukan ekonomi suatu wilayah, kontribusi dari komoditi andalan subsektor perkebunan ini juga sangat berperan karena memberikan kontribusi yang cukup besar bagi Provinsi Jambi. Peranan dari subsektor perkebunan ini dapat dilihat dari nilai LQ dan nilai analisis Pengganda (Multiplier).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tebo sebagai wilayah studi. Dipilhnya Kabupaten Tebo karena sektor perkebunan di Kabupaten Tebo memiliki potensi dan salah satu sektor andalan di Kabupaten Tebo dan peran sektor perkebunan dalam pembangunan ekomoni wilayah di Kabupaten Tebo. Penelitian ini menggunakan data skunder yang merupakan data perekonomian Provinsi Jambi dan Kabupaten Tebo dari tahun 2007 – 2015. Data dikumpulkan dengan metode penelusuran dokumen dan data – data yang diperoleh dari berbagai publikasi regional yang diambil dari beberapa instansi terkait. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kuantitatif. Analisis deskriptif kuantitatif merupakan analisis yang dilakukan berdasarkan perkembangan data yang dianalisis secara deskriptif.
Untuk mengetahui kontribusi subsektor perkebunan dalam PDRB menggunakan formula :

$$Ks = \frac{\text{PDRB Subsektor Perkebunan Kab .Tebo}}{\text{PDRB Kab .Tebo}} \text{ x } 100\%$$

Untuk mengetahui apakah subsektor perkebunan merupakan sektor basis menggunakan formula :

$$LQ = \frac{\text{vi}/\text{vt}}{\text{Vi}/\text{Vt}}$$

Dimana :
vi = Jumlah PDRB Subsektor Perkebunan Kabupaten Tebo
vt = Jumlah PDRB Kabupaten Tebo
Vi = Jumlah PDRB Subsektor Perkebunan Provinsi Jambi
Vt = Jumlah PDRB Provinsi Jambi

Bila hasil perhitungan LQ > 1, maka digolongkan sebagai sektor basis yang menunjukkan surplus dalam daerah tertentu, karena itu produksinya dapat diekspor atau produk yang dihasilkan sebagai untuk memenuhi kebutuhan konsumsi (1) sedangkan sisanya untuk diekspor (nilai LQ – 1). Bila hasil perhitungan LQ < 1, maka digolongkan sebagai sektor non basis yang menunjukan suatu daerah itu defisit. Sehingga daerah tersebut memerlukan impor dari darah lain.

Sedangkan untuk menghitung atau menentukan produk yang mempunyai keunggulan komparatif, akan digunakan *Formula Revealed Comparative Advantage* dengan rumus sebagai berikut :

$$RCA = \frac{q_i \,/\, q_j}{Q_i \,/\, Q_j}$$

Dimana :
qi = Nilai produk di Kabupaten Tebo
qj = Total nilai produk di Kabupaten Tebo
Qi = Nilai Produk di Provinsi
Qj = Total nilai produk di Provinsi

Sehingga dapat diketahui produk yang mempunyai keunggulan komparatif ditunjukkan dengan nilai RCA yang lebih besar dari satu (RCA > 1). Sedangkan produk tidak unggul komperatif apabila nilai RCA lebih kecil dari satu (RCA < 1).
Konsepsi Pengukuran :

1. PDRB Kabupaten Tebo adalah jumlah nilai tambah bruto seluruh kegiatan ekonomi di Kabupaten Tebo berdasarkan harga konstan 2000 selama periode 2007 – 2015.
2. Pendapatan Sektor Basis adalah pendapatan yang mampu dihasilkan oleh sektor yang menjadi unggulan dalam perekonomian Kabupaten Tebo dalam hal ini subsektor perkebunan berdasarkan harga konstan selama periode 2007 – 2015 dalam juta rupiah
3. Pertumbuhan ekonomi kondisi ekonomi suatu negara yang ditandai dengan adanya perkembangan perekonomian tiap tahun (%).
4. PDRB sebagai salah satu alat untuk memenuhi struktur perekonomian suatu wilayah diyakini masih merupakan indikator yang penting dalam menentukan arah pembangunan
5. Kontribusi subsektor perkebunan merupakan besaran sumbangan atau peranan yang diberikan oleh subsektor perkebuanan terhadap PDRB
6. Kontribusi subsektor perkebunan adalah besarnya yang diberikan subsektor perkebunan terhadap perekonomian Kabupaten Tebo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Kabupaten yang mempunyi nilai LQ >1 yaitu Kabupaten Tebo merupakan daerah basis untuk tanaman perkebunan, ini memnggambarkan bahwa subsektor perkebunan di Kabupaten Tebo dapat memberikan kontribusi yang besar bagi pertumbuhan ekonomi wilayah dan untuk dapat menjadikannya sebagi wilayah basis diperlukan peningkatan dari segi perluasan area perkebunan dan peningkatan produksi maupun produktivitas dari sektor perkebunan, sehingga dapat memberikan kontribusi bagi wilayah itu sendiri maupun untuk Kabupaten Tebo. Sedangkan Kabupaten Tebo memiliki keunggulan komparatif hanya terdapat pada komoditi karet. Untuk komoditi kelapa sawit, kelapa, kopi, kakao dan pinang Kabupaten Tebo tidak mempunyai keunggulan komparatif. Dapat dilihat pada tabel berikut.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1. Hasil Kontribusi, Location Quotient (LQ) Subsektor Perkebunan di Kabupaten Tebo

Tahun	Kontribusi
2007	27,7
2008	27,5
2009	28,2
2010	29,0
2011	29,6
2012	26,7
2013	27,6
2014	27,8
2015	28,1

Tabel 2. Hasil Perhitungan RCA Subsektor Perkebunan di Kabupaten Tebo

Tahun	RCA					
	Karet	Kelapa Sawit	Kelapa	Kopi	Kakao	Pinang
2007	2,07	0,78	0,06	0,34	0,28	0,10
2008	2,25	0,69	0,06	0,36	0,79	0,05
2009	2,10	0,64	0,06	0,27	0,48	0,06
2010	1,89	0,87	0,05	0,25	0,28	0,05
2011	1,87	0,86	0,05	0,25	0,0	0,05
2012	1,87	0,91	0,04	0,25	0,0	0,05
2013	1,82	0,87	0,05	0,30	0,0	0,02
2014	1,93	0,87	0,04	0,25	0,0	0,01
2015	1,93	0,83	0,04	0,25	0,0	0,02

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 3. Hasil Location Quotient (LQ) Subsektor Perkebunan di Kabupaten Tebo

Tahun	LQ
2007	1,9
2008	1,9
2009	1,9
2010	2,0
2011	2,1
2012	2,1
2013	2,1
2014	2,0
2015	2,1

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah diuraikan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kontribusi subsektor perkebunan Kabupaten Tebo relatif tinggi, tingginya kontribusi subsektor perkebunan ini ditandai dengan rata – rata pertahunnya sebesar 28,02 % kontribusinya terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo . Keadaan demikian juga menggambarkan adanya keterkaitan antara produksi hasil pertanian dengan keberadaan industri pengolahan dalam rangka meningkatkan nilai tambah dalam pembentukan PDRB.
2. Komoditi subsektor perkebuan yang mempunyai keunggulan komparatif di Kabupaten Tebo adalah karet, sedangkan kelapa sawit, komoditi kelapa, kopi, dan pinang tidak mempunyai keunggulan komparatif. Sehingga ini menunjukkan bawah Kabupaten Tebo merupakan daerah yang dapat ditanam tanaman perkebunan karet untuk meningkatkan perekonomian Kabupaten Tebo.
3. Subsektor perkebunan merupakan sektor basis dalam perekonomian Kabupaten Tebo, dimana hasil perhitungan LQ terhadap perekonomian Kabupaten Tebo lebih besar dari satu (>1). Ini menunjukkan bahwa subsektor perkebunan merupakan penggerak utama perekonomian Kabupaten Tebo dan telah mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo.

Berdasrkan kesimpulan yang diperoleh, maka saran yang dapat diuraikan yaitu :

1. Menurut hasil analisis. Perlu adanya kebijakan – kebijakan pemerintah serta adanya perbaikan sarana yang dapat menunjang kegiatan perkebunan dan peraturan daerah yang melindungi kelestarian lahan yang membatasi adanya alih fungsi lahan secara bijaksana agar usaha dibidang perkebunan tetap terjaga.
2. Perlu dilakukan peningkatan kualitas perkebunan Kabupaten Tebo, serta diupayakan peningkatan mutu tenaga kerja yang bekerja di sektor perkebunan dalam pengolahan tanaman perkebunan agar kualitas tetap terjaga dan dapat dimanfaatkan secara optimal demi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo.
3. Untuk meningkatkan pendapatan petani yang pada akhirnya akan memberikan hubungan yang positif antara subsektor perkebunan terhadap pembentukan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tebo diperlukan kerjasama antara pemerintah Provinsi Jambi dan pemerintah Kabupaten agar pendapatan petani dapat terus meningkat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arsyad, L, 1999. Ekonomi Pembangunan Pertanian. Yogyakarta
[2] Todaro. MP. 1995. Pembangunan Ekonomi Dunia Kerja, Erlangga, Jakarat
[3] Djojohadikusumo. S. 1994. Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Dasar Teori Ekonomi Pertumbuhan dan Ekonomi Perkembangan, LP3ES, Jakarta
[4] Siagian. 1989. Pembangunan Ekonomi Dalam Cita-cita dan Realita. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
[5] Faried Wijaya.1990.Seri Pengantar Ekonomika: Ekonomikamakro Edisi 2. BPFE. Yogyakarta
[6] Syafrizal. 2008. Ekonomi Regional: Teori dan aplikasi. Baduose Media. Padang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[7] Sukirno, S . 1985. Beberapa Aspek dalam pembangunan Ekonomim Daerah. Lembaga Penelitian Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
[8] Budiharsono. S. 1997. Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Lautan. PT.Pradnya Paramita. Jakarta
[9] Dumairy. 1997. Perekonomian Indonesia, Jakarta Pers, Jakarta
[10]
[11] Badan Pusat Statistik. 2016. Perekonomian Indonesia. BPS Propinsi Jambi
[12] Badan Pusat Statistik. 2016. BPS Kabupaten Tebo.
[13] Dinas Pertanian. 2016. Statistik Pertanian. Propinsi Jambi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS KEBUTUHAN LUAS LAHAN PERTANIAN PANGAN SEBAGAI DASAR PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN LAHAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

Hasbullah Syaf[1)], M.Tufaila[2)], Lukman Yunus[2)],La Baco[3)], Jufri Karim[4)]M.Aris Rauf[5)]

[1]Program Studi Perencanaandan Pengembangan Wilayah PPs dan Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo
[2]Fakultas Pertanian Universitas Halu Oleo;
[3]Fakultas Kehutanan dan Ilmu Lingkungan Universitas Halu Oleo
[4]FakultasTeknologi dan Ilmu Kebuminan UniversitasHalu Oleo;
[5]KomunitasTeras Kendari

Email :hassyaf@yahoo.co.id

Naskah diterima :25 Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Perlindungan terhadap lahan pertanian utamanya lahan tanaman pangan merupakan isu paling ramai diperbincangkan. Hal ini terjadi karena alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi pada berbagai daerah, sehingga daerah-daerah yang potensial sebagai lahan pertanian beralih menjadi kawasan peruntukan bangunan atau fungsi-fungsi lainnya di luar pertanian. Seiring dengan pertumbuhan penduduk setiap tahun akan meningkatkan kebutuhan pangan oleh masyarakat, maka diperlukan perencanaan pengembangan dan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan. Tujuan penelitian ini adalah (a) mengidentifikasi lahan yang tersedia dan potensinya, (b) menganalisis kebutuhan luas lahan pertanian pangan dan (c) menyusun rencana pengelolaan dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah survei lahan pertanian pangan meliputi lahan sawah dan tegalan baik eksisting maupun potensi yang berada di Kabupaten Konawe Selatan. Analisis kebutuhan lahan areal pencadangan pertanian pangan Kabupaten Konawe Selatan hingga 35 tahun ke depan didasarkan pada kebutuhan lahan sawah untuk produksi beras lestari. Hasil analisis data, laboratorium dan survei lapangan adalah (1) lahan pertanian pangan saat ini di Kabupaten Konawe Selatan menyebar seluruh kecamatan seluas 17.371,33 Ha; (2) potensi lahan untuk pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Konawe Selatan seluas 9.031,77 Ha menyebar hampir seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Andoolo Barat, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Wolasi, Ranomeeto, Ranomeeto Barat dan Benua; dan (3) kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan seluas 23.430,49 Ha, sehingga masih terdapat lahan yang tersedia hingga tahun 2050 seluas 2.972,60 Ha. Kegiatan penyusunan PERDA Lahan pertanian pangan Kabupaten Konawe Selatan merupakan rencana utama dalam pengelolaan dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan. Selain itu, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya mempertahankan lahan pertanian pangan di masa akan datang.

***Kata Kunci** : Perlindungan Lahan dan Pertanian Pangan Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Lahan pertanian memiliki peran dan fungsi strategis bagi masyarakat Indonesia yang bercorak agraris karena terdapat sejumlah besar penduduk Indonesia yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Dengan demikian, lahan tidak saja memiliki nilai ekonomis, tetapi juga sosial bahkan memiliki nilai religius. Dalam rangka pembangunan pertanian yang berkelanjutan, lahan merupakan sumber daya pokok dalam usaha pertanian, terutama pada kondisi yang sebagian besar bidang usahanya masih bergantung pada pola pertanian berbasis lahan. Lahan merupakan sumber daya alam yang bersifat langka karena jumlahnya tidak bertambah, tetapi kebutuhan terhadap lahan selalu meningkat.

Perlindungan terhadap lahan pertanian utamanya lahan tanaman pangan merupakan isu paling ramai diperbincangkan. Hal ini terjadi karena alih fungsi lahan pertanian yang marak terjadi pada berbagai daerah, sehingga daerah-daerah yang potensial sebagai lahan pertanian beralih menjadi kawasan peruntukan bangunan atau fungsi-fungsi lainnya di luar pertanian. Sebagai bentuk kekhawatiran akan semakin berkurangnya lahan pertanian tanaman pangan, telah dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B). Untuk mengimplementasikan secara efektif Undang-Undang tersebut perlu adanya kajian yang mendalam dan terintegrasi antara kebijakan perlindungan lahan pangan dengan kebijakan pembangunan daerah pada level nasional, provinsi dan kabupaten. Integrasi kebijakan melalui upaya perlindungan lahan pangan produktif dan mencegah laju konversi lahan pertanian ke peruntukan lahan untuk non pertanian/pangan, akan mendukung terciptanya kemandirian, ketahanan dan kedaulatan pangan[1], [2].

Kelangkaan lahan ini dipengaruhi oleh pertambahan penduduk serta perkembangan ekonomi maupun industri yang menyebabkan permintaan lahan semakin meningkat setiap tahunnya, sehingga berpeluang menyebabkan terjadinya degradasi lahan, alih fungsi serta fragmentasi lahan pertanian pangan. Kondisi ini akan mengancam daya dukung wilayah secara lokal, regional dan nasional di dalam menjaga kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan[3].

Kabupaten Konawe Selatan merupakan salah satu sentra pengembangan pertanian tanaman pangan, dengan potensi tanah untuk persawahan cenderung meningkat setiap tahun, yaitu tahun 2009 seluas 20.535 ha menjadi 25.875 ha tahun 2013. Sementara lahan pangan menurut jenis pengairan terlihat meningkat namun kecil yaitu dari 23.662 ha (2011) menjadi 24.046 ha (2013) (Konsel Dalam Angka, 2014). Dilihat dari pertumbuhan penduduk, Konawe Selatan juga mengalami peningkatan yaitu dari 264.587 (2010) menjadi 289.815 (2014) atau meningkat rata-rata 1,59%/tahun (2013-2014). Peningkatan jumlah penduduk ini juga relatif lebih besar dibandingkan dengan pertambahan lahan pangan (sawah), sehingga ada potensi dalam jangka panjang untuk terjadinya rawan pangan, apabila tidak dilakukan upaya perlindungan dan peningkatkan terhadap ketersediaan lahan pertanian pangan di Kabupaten Konawe Selatan.

Berdasarkan fakta-fakta diatas mengenai potensi untuk terjadinya konversi lahan Mencermati data-data yang ada diatas, maka diperlukan upaya nyata untuk mempertahankan, melindungi dan bahkan meningkatkan ketersediaan lahan pertanian pangan di Kabupaten Konawe Selatan. Salah satu upaya untuk mempertahankan lahan pertanian pangan yang ada saat ini yaitu dengan mengimplementasikan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan melalui Kebijakan Peraturan Daerah agar keberadaan lahan pangan berkelanjutan dapat dipertahankan dalam jangka panjang [4].

Untuk menetapkan kebijakan peraturan daerah tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, perlu adanya data-data yang lengkap dan akurat mengenai kondisi lahan pangan yang ada saat ini. Oleh itu perlu dilakukan analisis kebutuhan lahan pertanian pangan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan.

METODOLOGI

Analisis kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan telah dilakukan selama empat bulan dengan satuan pengamatan seluruh Kecamatan, desa/kelurahan yang berada di Kabupaten Konawe Selatan. Metode penelitian ini menggunakan metode survei bebas. Penentuan area pengamatan menggunakan unit-unit lahan terpilih berdasarkan data citra satelit dan informasi penelitian sebelumnya. Unit lahan terpilih meliputi lahan sawah, lahan tegalan, dan lahan mangrove. Pengujian awal unit-unit terpilih dilakukan pada 10% dari banyaknya titik pengamatan. Jika unit-unit pengamatan memperoleh akurasi >90% maka peta kerja dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan data dilapangan. Unit-unit lahan terpilih meliputi sawah eksisting, lahan-lahan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian pangan [5].

Lahan sawah eksisting selanjutnya dilakukan pengukuran dan pengambilan data koordinat lapangan hingga membentuk poligon. Sementara, lahan yang berpotensi dilakukan pengukuran yang sama dengan lahan sawah eksisting dan pengambilan sampel tanah serta lingkungan sekitarnya. Untuk memperkirakan lahan berpotensi maka dilakukan analisis kesesuaian lahan untuk tanaman pangan (padi, jagung dan kedele)[6], [7].

Analisis kebutuhan lahan areal pencadangan pertanian pangan Kabupaten Konawe Selatan hingga 35 tahun ke depan didasarkan pada kebutuhan lahan sawah untuk produksi beras lestari. Data perkembangan penduduk menggunakan data statistik Kabupaten Konawe Selatan tahun 2015. Asumsi-asumsi yang diterapkan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dalam analisis ini adalah (a) pertambahan penduduk 1,95%; (b) jumlah penduduk Kabupaten Konawe Selatan 289. 815 jiwa; (c) kebutuhan beras per kapita 120 kg; (d) rasio gabah dan beras 60%; (e) produksi gabah kering per ha 4 ton (satu kali panen per tahun). Selanjutnya, ketersediaan lahan ditetapkan dengan basis desa/kecamatan. Analisis ini digunakan untuk memprediksi kebutuhan lahan hingga tahun 2050 dan sebagai dasar perencanaan dan pengembangan lahan pertanian berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penggunaan Lahan Pertanian

Analisis penggunaan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan diperoleh dari data pengukuran lapangan dan alih fungsi lahan yang terjadi menjadi lahan pertanian secara umum. Luas pangan saat ini adalah lahan sawah dan lahan kering yang saat ini secara fungsional berfungsi dengan baik. Alih fungsi lahan adalah lahan yang mengalami perubahan fungsi dari lahan semak belukar menjadi lahan pertanian. Jumlah luasan lahan eksisting adalah luasan lahan sawah dan lahan kering serta alih fungsi lahan. Kondisi lahan pangan saat ini dan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Kondisi Lahan Pangan Saat Ini dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan

No	Kecamatan	Luas Lahan Pangan Saat ini	Alih Fungsi Lahan	Total Lahan Pangan Berkelanjutan Saat ini
		(Ha)		
1	Tinanggea	1.505,04	61,17	1.566,21
2	Lalembuu	1.006,88	8,23	1.015,11
3	Andoolo	1.096,99	119,38	1.216,37
4	Buke	864,61	18,45	883,06
5	Andoolo Barat	-	-	-
6	Palangga	1.282,31	4,32	1.286,63
7	Palangga Selatan	312,78	1,86	314,64
8	Baito	834,92	12,7	847,62
9	Lainea	218,72	11,72	230,44
10	Laeya	1.758,87	121,68	1.880,55
11	Kolono	207,18	9,72	216,9
12	Kolono Timur	-	-	-
13	Laonti	31,08	-	31,08
14	Moramo	2.841,44	480,83	3.322,27
15	Moramo Utara	60,36	10,87	71,23
16	Konda	2.841,44	480,83	3.322,27
17	Wolasi	288,01	91,84	379,85
18	Ranomeeto	927,18	378,26	1.305,44
19	Ranomeeto Barat	887,49	180,52	1.068,01
20	Landono	684,5	5,24	689,74
21	Mowila	1.875,72	3,47	1.879,19
22	Sabillakoa	-	-	-
23	Angata	827,79	75,08	902,87
24	Benua	199,23	-	199,23
25	Basala	237,63	5,81	243,44
Jumlah		**20.790,17**	**2.081,98**	**22.872,15**

Sumber: Citra Resolusi Tinggi dan Hasil Survei, 2016

Analisis penggunaan lahan pangan berkelanjutan yang terdiri dari lahan pangan saat ini dan alih fungsi lahan disajikan pada Tabel 1. Tabel ini menunjukkan bahwa analisis penggunaan lahan sawah dan lahan kering sebagai lahan pertanian pangan di Kabupaten Konawe Selatan hingga saat ini seluas 20.790,17 Ha sedangkan luas alih fungsi lahan 2.081,98 Ha sehingga total lahan pangan berkelanjutan seluas 22.872,15 Ha. Hal ini memberikan keleluasaan pemerintah dan masyarakat dalam menjaga ketersediaan lahan agar kebutuhan pangan masyarakat tetap tersedia dari kuantitas dan terjamin dari kualitasnya. Selanjutnya, agar terjaminnya ketersediaan ini hingga tahun 2050 maka disetiap Kecamatan hingga desa dibuat batasan yang sangat ketat agar tidak dialihfungsikan dengan penggunaan lainnya.

Analisis Potensi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Berdasarkan hasil survey lapangan, data analisis laboratorium, analisis evaluasi kesesuaian lahan serta dipadukan dengan hasil analisis spasial GIS maka diperoleh lahan berpotensi untuk pengembangan LP2B di Kabupaten Kolaka. Hasil Analisis Potensi LP2B di Kabupaten Kolaka disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Hasil Analisis Potensi LP2B di Kabupaten Kolaka

No	Desa/Kelurahan	PotensiLahan	
		Ha	%
1	Baula	-	-
2	Iwoimendaa	-	-
3	Kolaka	-	-
4	Latambaga	-	-
5	Polinggona	84.55	41.66
6	Pomalaa	-	-
7	Samaturu	-	-
8	Tanggetada	3.49	1.72
9	Toari	22.63	11.15
10	Watubangga	19.43	9.57
11	Wolo	67.83	33.42
12	Wundulako	5.01	2.47
Jumlah		**202.94**	**100.00**

Sumber: Hasil Survei dan Analisis Laboratorium, 2016

Tabel 2. menunjukkan bahwa potensi LP2B pangan di Kabupaten Kolaka seluas 202,94 Ha. Potensi ini tidak menyebar secara merata di seluruh kecamatan yan berada di Kabupate Kolaka. Potensi lahan tertinggi diperoleh di Kecamatan Polinggona seluas 84,55 Ha atau 41,66% dari luas potensi di Kabupaten Kokala. Sementara Kecamatan Baula, Iwomendaa, Kolaka, Latambaga, Pomalaa dan Samaturu tidak memiliki lahan yang berpotensi sebagai LP2B. Kondisi ini selain disebabkan ruang-ruang telah terisi oleh peruntukan lain seperti IUP perkebunan serta kondisi lahan yang tidak memungkinkan untuk dikembangkan.

Analisis Kebutuhan dan Ketersediaan Lahan Pertanian Pangan

Analisis kebutuhan lahan areal pencadangan pertanian pangan Kabupaten Konawe Selatan hingga 35 tahun ke depan didasarkan pada kebutuhan lahan sawah untuk produksi beras lestari. Hasil analisis perkiraan kebutuhan lahan pertanian di Kabupaten Konawe Selatan dan perkiraan laju pertumbuhan penduduk, proyeksi jumlah penduduk, kebutuhan beras, dan target produksi beras untuk produksi beras lestari kabupaten konawe selatan 2016-2050 disajikan pada Tabel 3.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 3. Kebutuhan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan hingga tahun 2050 di Kabupaten Konawe Selatan

No	Kecamatan	Eksisting	Alih Fungsi Lahan	Potensi Lahan	Kebutuhan Lahan Hingga Tahun 2050	Ketersediaan lahan Hingga Tahun 2050
		(Ha)				
1	Tinanggea	1.505,04	61,17	6.175,31	2.294,34	5.447,18
2	Lalembuu	1.006,88	8,23	260,94	1.679,13	-403,08
3	Andoolo	1.096,99	119,38	193,7	955,84	454,23
4	Buke	864,61	18,45	160,12	799,94	243,24
5	Andoolo Barat*	-	-	-	-	-
6	Palangga	1.282,31	4,32	195,16	1.322,32	159,47
7	Palangga Selatan	312,78	1,86	306,53	660,62	-39,45
8	Baito	834,92	12,7	-	813,73	33,89
9	Lainea	218,72	11,72	359,18	954,67	-365,05
10	Laeya	1.758,87	121,68	385,9	2.045,50	2.061,95
11	Kolono	207,18	9,72	141,05	998,85	-640,9
12	Kolono Timur*	-	-	-	-	-
13	Laonti	31,08	-	-	1.016,32	-985,24
14	Moramo	2.841,44	480,83	-	1.396,35	1.370,97
15	Moramo Utara	60,36	10,87	-	772,03	-700,8
16	Konda	2.841,44	480,83	-	1.951,30	1.370,97
17	Wolasi	288,01	91,84	-	509,06	-129,21
18	Ranomeeto	927,18	378,26	-	1.745,85	-440,41
19	Ranomeeto Barat	887,49	180,52	-	701,4	366,61
20	Landono	684,50	5,24	258,71	727,63	220,82
21	Mowila	1.875,72	3,47	120,32	1.203,53	795,98
22	Sabillakoa*	-	-	-	-	-
23	Angata	827,79	75,08	158,76	1604,02	-542,4
24	Benua	199,23	-	-	1.027,78	-828,55
25	Basala	237,63	5,81	316,11	877,53	-317,98
Total		**20.790,17**	**2.081,98**	**9.031,79**	**24.771,70**	**7.132,24**

*Kecamatan Pemekaran
Sumber: Hasil Analisis Data, 2016

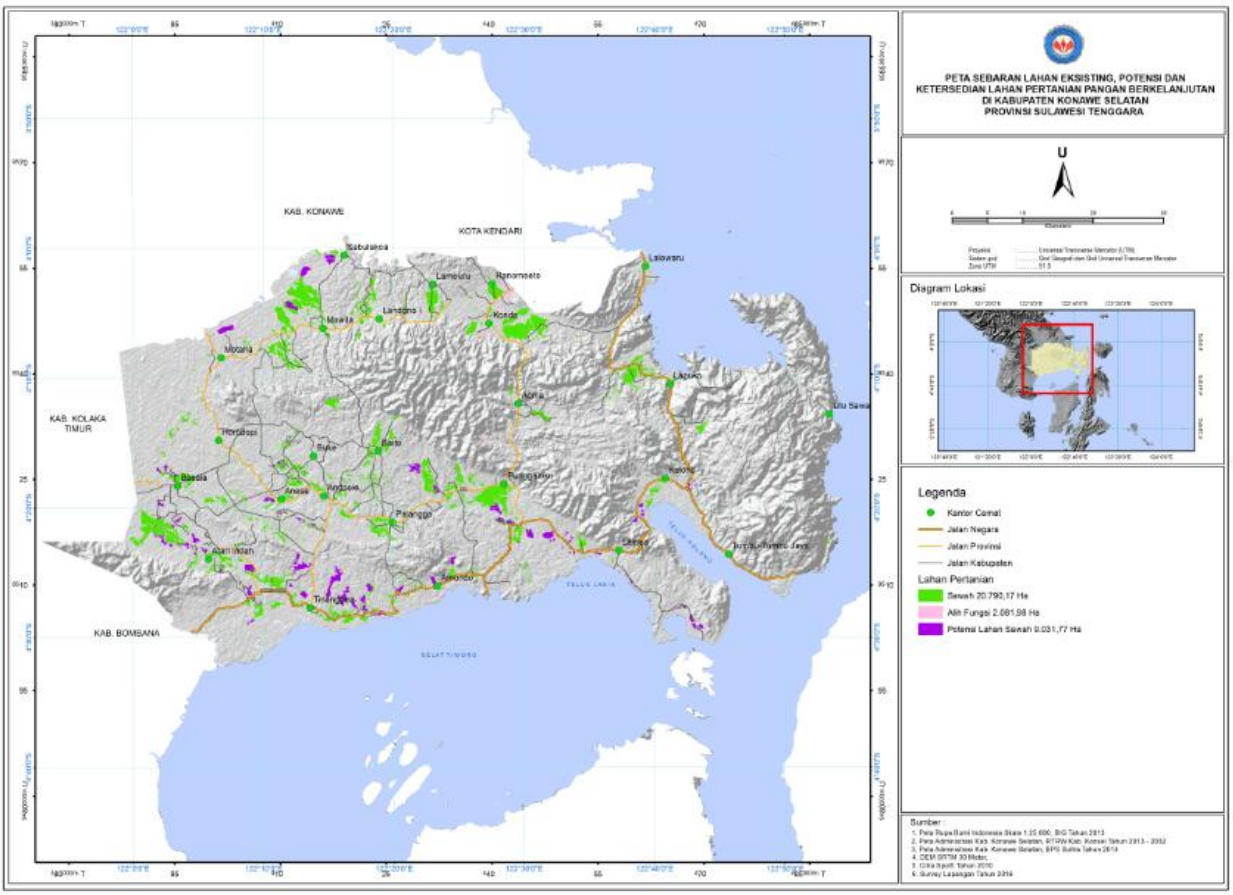

Gambar 1. Peta sebaran eksisting, potensi dan kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan

Berdasarkan Tabel 3., menunjukkan bahwa lahan pangan yang tersedia saat ini di Kabupaten Konawe Selatan adalah 20.790,17 Ha yang tersebar diseluruh kecamatan. Potensi lahan pangan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Konawe Selatan adalah 9.031,79 Ha. Alih fungsi lahan seluas 2.081,98 Ha. Kebutuhan lahan panganberkelanjutanseluas24.771,70 Ha hingga tahun 2050. Hal ini menunjukkan bahwa hingga tahun 2050 Kabupaten Konawe Selatan masih mampu menyediakan lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 7.132,24 Ha. Ini menunjukkan bahwa lahan pangan di Kabupaten Konawe Selatan dapat mensubsitusibantuan pangan bagi daerah disekitarnya. Khususnya bagi Kecamatan pemekaran di Kabupaten Konawe Selatan. Peta sebaraneksisting, potensidankebutuhanlahanpertanianpanganberkelanjutan di KabupatenKonawe Selatan disajikanpadaGambar 1.

Selanjutnya berdasarkan Tabel 3, maka dapat dilakukan rencana pengelolaan dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan di KecamatanTinanggea, Andoolo, Buke, Palangga, Baito, Laeya, Moramo, Konda, Ranomeeto Barat, LandonodanMowila. Kecamatan ini dilakukan tindakan perlindungan lahan melalui kegiatan penyusunan PERDA Lahan pertanian pangan berkelanjutan Kabupaten Konawe Selatan. Selain itu di kecamatantersebutdilakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat pentingnya mempertahankan lahan pertanian pangan di masa akan datang. Sementara bagi kecamatan lainnya dilakukan pengelolaan lahan yang intensif dan memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data dan survei lapangan diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Lahan pertanian pangan saat ini di Kabupaten Konawe Selatan menyebar seluruh kecamatan seluas 20.790,17 Ha untuk lahan pangan pertanian.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

2. Potensi lahan untuk pertanian pangan berkelanjutan yang dapat dikembangkan di Kabupaten Konawe Selatan seluas 9.031,77 Ha menyebar hampir seluruh kecamatan kecuali Kecamatan Andoolo Barat, Kolono Timur, Laonti, Moramo, Moramo Utara, Konda, Wolasi, Ranomeeto, Ranomeeto Barat dan Benua.
3. Kebutuhan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan seluas 24.771,70 Ha, sehingga masih terdapat kelebihan lahan 7.132,24 Ha. Kebutuhan lahan pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan hingga tahun 2050 masih mencukupi.
4. Kegiatan penyusunan PERDA Lahan pertanian pangan Kabupaten Konawe Selatan merupakan rencana utama dalam pengelolaan dan perlindungan lahan pangan berkelanjutan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka disarankan untuk segera dilakukan peraturan daerah yang ketat akan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan untuk mempertahankan kebutuhan pangan bagi masyarakat melalui PERDA Pertanian Lahan Pangan Berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Syaf, H., M. Tufaila, La Baco, Jufri K., 2014. Pemetaan Lahan Pertanian dan Alih Fungsi Lahan di Kabupaten Konawe Selatan. Laporan Studi Kerjasama BAPPEDA Kabupaten Konawe Selatan dan Fakultas Pertanian UHO.

[2] Syaf, H., Lukman Y., La Baco, Jufri K., 2016. Identifikasi dan Pemetaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan di Kabupaten Konawe Selatan. Laporan Studi Kerjasama Dinas Pertanian dan Peternakan Provinsi Sulawesi Tenggara dan LPPM UHO.

[3] Ritung S, Wahyunto, Agus F, Hidayat H., 2007. Land Suitability Evaluation: With a Case Map of Aceh Barat District. Indonesian Soil Research Institute and World Agroforestry Centre. Bogor.

[4] Undang-Undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan an. *Jurnal Fakultas Kehutanan*, (1), 1–7.

[5] Sitorus, SP. 1986. Survei Tanah dan Penggunaan Lahan. Bogor: Lab. Survei Tanah dan Evaluasi Lahan.

[6] FAO. 1976. A Framework for Land Evaluation. Soil Resources Management and Conservation Service Land and Water Development Division. FAO Soil Bulletin No. 32. FAO-UNO, Rome.

[7] Hardjowigeno, S. dan Widiatmaka. 2007. Evaluasi Kesesuaian Lahan dan Perencanaan Tataguna Lahan. Gadjah Mada University Press. Yogyakarta.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN "KAMPUNG BIBIT" SEBAGAI KAWASAN RUMAH PANGAN LESTARI (KRPL) DAN PERTANIAN ORGANIK PERKOTAAN (STUDI KASUS: RW 3, KELURAHAN LOWOKWARRU, KOTA MALANG)

Aris Subagiyo[1)], Abdul Wahid Hasyim[1)], Armei Rapudin[1)]

[1] Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Email : arissubagiyo@ub.ac.id

Naskah diterima :25 Maret 2017 Naskah direvisi : 27 Maret 2017 Disetujui terbit : 29 Maret 2017

ABSTRAK

Kampung RW 3 Lowokwaru adalah salah satu kawasan permukiman perkotaan padat penduduk di Kota Malang yang memiliki potensi dalam kegiatan pertanian perkotaan (urban farming). Terdapat usaha pembibitan beserta pembesaran sayuran dan budidaya ikan lele. Usaha pembibitan sayur siap tanam yang dilakukan sejak tahun 2012 dengan produksi ± 25.000 bibit per 20 hari jauh dibawah permintaan ± 50.000 bibit. Budidaya ikan lele dilakukan dengan semi intensif dengan kapasitas kolam 1.250 ekor untuk sekali tebar. Namun perkembangannya memiliki masalah berupa minimnya ketersediaan lahan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi pengoptimalan sumberdaya lahan, sumberdaya manusia serta infrastruktur pendukungnya dalam mendukung kegiatan pertanian perkotaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan metode deskriptif yang terdiri dari identifikasi subsistem komoditas hulu-hilir, kelayakan usaha, dan prospek kesiapan sosial kelembagaan. Rekomendasi dalam optimalisasi pertanian perkotaan di RW 3 yaitu 1) memanfaatkan lahan di sepanjang ruas jalan kampung dengan vertical farming tanpa mengganggu sirkulasi kendaraan, 2) perbaikan dan penambahan kapasitas green house di lahan eksisting, 3) kombinasi ruang untuk kolam budidaya lele dan pembibitan sayuran dengan model bertingkat, 4) peningkatan kemampuan SDM melalui pelatihan teknik pembibitan sayur, budidaya sayur organik, budidaya lele dan pengolahan sampah organik menjadi pupuk, serta 5) menyusun konsep pengembangan kampung wisata belanja sayur organik di Kota Malang.

Kata kunci: *kampung bibit, pertanian perkotaan, vertical farming*

PENDAHULUAN

Kampung RW 3 merupakan kawasan permukiman perkotaan padat di Kota Malang dengan luas kawasan 2,78 Ha. Peruntukan lahan didominasi permukiman sebagai lahan terbangun sebesar 2,73 Ha (98,20%) dan lahan tidak terbangun sebesar 0,05 Ha (1,80%). Jumlah penduduk yang terus meningkat dan keterbatasan lahan tidak mengurangi upaya urban farming di RW 3 Lowokwaru. Kampung RW 3 Lowokwaru ini memiliki potensi pertanian organik perkotaan berupa usaha pembibitan sayur siap tanam, budidaya sayuran organik serta budidaya ikan lele. Bibit tanaman sayur dan budidaya sayuran organik yang dikembangkan antara lain cabe besar, cabe kecil, tomat, terong, okra, sawi, brongkol. Budidaya ikan lele dilakukan dengan semi intensif dengan kapasitas kolam 1.250 ekor untuk sekali tebar. Usaha pembibitan sayur siap tanam yang dilakukan sejak tahun 2012 dengan produksi ± 25.000 bibit per 20 hari jauh dibawah permintaan ± 50.000 bibit untuk memenuhi kebutuhan petani di Kota Batu dan Kecamatan Pujon Kabupaten Malang yang memang memprioritaskan wilayahnya pada pengembangan sektor pertanian. Pertanian perkotaan terbentuk atas kerjasama antara pengelola RW dengan ibu-ibu kelompok tani di kampung menumbuhkan semangat yang kuat dalam pengembangan urban farming dengan konsep kawasan rumah pangan lestari (KRPL).

Kelompok ibu-ibu kelompok Tani ini dikenal dengan nama "Lotigama" yang berasal dari singkatan "Lowokwaru Tiga Malang". Keberadaan Lotigama ini terus berkembang. Setiap tahunnya sejak 2012, keanggotaannya semakin bertambah. Perlu adanya suatu konsep untuk memecahkan masalah terkait lahan dan mengotimalkan pemberdayaan masyarakat RW 3.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi sumberdaya lahan, sumberdaya manusia serta infrastruktur pendukung dalam pengembangan urban farming. Kendala utama

yang dihadapi adalah terbatasnya lahan untuk pertanian perkotaan dan mengoptimalkan sumberdaya manusia yang terbatas kemampuannya dalam kegiatan pertanian.

Kota adalah permukiman dan kegiatan penduduk yang mempunyai batasan wilayah administrasi yang diatur dalam perunndang-undangan serta permukiman yang telah memperlihatkan watak dan ciri kehidupan kekotaan. Sedangkan perkotaan adalah suatu kumpulan pusat-pusat permukiman yang berperan di dalam suatu wilayah pengembangan dan atau wilayah nasional sebagi simpul jasa [1]. Kota dapat berfungsi sebagai tempat pelayanan, pemasaran, kegiatan industri, peribadatan, pendidikan dan sebagainya *Urban farming* merupakan konsep pertanian perkarangan, yakni bercocok tanam yang dilakukan dan dikelola di lingkungan sekitar rumah dan pemukiman perkotaan [2]. FAO mendefinisikan pertanian urban sebagai sebuah industri yang memproduksi, memproses serta memasarkan produk dan bahan nabati, terutama dalam menanggapi permintaan sehari-hari konsumen di perkotaan yang menerapkan metode produksi intensif, memanfaatkan dan mendaur ulang sumber daya dan limbah perkotaan, serta menghasilkan beragam tanaman dan ternak.

Pemanfaatan lahan pekarangan yang dilakukansecara optimal tidakhanya dapat memenuhikebutuhan pangan dan gizi keluarga, namunberpeluang juga dalam memberikan tambahanpendapatan bagikeluarga. Pengembangan ModelKawasan Rumah Pangan Lestari (M-KRPL)adalah salah satu upaya pemerintah dalam percepatankemandirian dan ketahanan pangan rumah tangga,melaluipeningkatan diversifikasi pangan.
Prinsip utama dalam pengembanganKawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) diantaranya [3]

1. Ketahanan dan kemandirian pangan keluarga.
2. Diversifikasi pangan berbasis sumberdaya lokal.
3. Konservasi tanaman pangan untuk masa depan.
4. Peningkatan kesejahteraan keluarga.

METODE PENELITIAN

Ruang lingkup penelitian yang akan dijadikan sebagai lingkup perencanaan yaitu di wilayah RW 3 Lowokwaru.

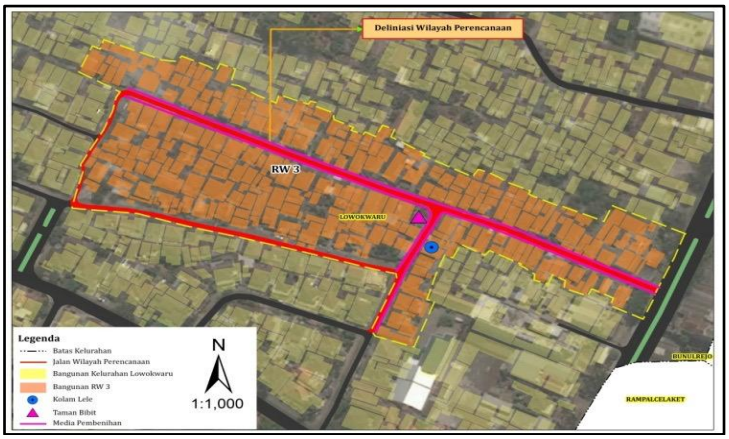

Gambar 1. Peta Delineasi Wilayah RW 03 Lowokwaru

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode survei primer. Teknik yang dilakukan adalah dengan cara observasi dan wawancara. Observasi dilakukan terhadap kawasan perencanaan dari kondisi fisik dan non fisik. Sednagkan wawancara dilakukan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai kondisi sosial, ekonomi, dan strategi yang perlu dilakukan. Hal ini berdasar pada perencanaan perlu dilakukan dengan cara*bottom-up* guna menampung aspirasi masyarakat.Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi, lingkungan, dan modal sosial. Beberapa metode analisis yang digunakan untuk merumuskan rekomendasi pengembangan RW 03 adalah analisis deskriptif sub sistem hulu-hilir komoditas, kelayakan usaha, prospek modal sosial dan kelembagaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

RW 3 Kelurahan Lowowaru terletak di BWP Malang Utara dengan fungsi kegiatan utama adalah pendidikan, perdagangan dan jasa, industri kecil, dan wisata budaya. Berdasarkan pada peta penggunaan Lahan di BWP Malang Utara diketahui bahwa Kelurahan Lowokwaru terdiri dari guna lahan perdagangan dan jasa, permukiman dan RTH (Ruang Terbuka Hijau).Secara spesifik, RW 3 di Kelurahan Lowokwaru merupakan kawasan yang diperuntukkan sebagai zona perumahan jenis rumah tunggal dengan fungsi sebagai rumah

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

tinggal. Fungsi rumah tinggal ini menandakan bahwa RW 03 merupakan salah satu dari kampung perkotaan yang terdapat di Kota Malang. Dengan kondisi penataan permukiman yang rapi dan berderet memberikan keuntungan tersendiri bagi pengembangan *urban farming* di Kampung bibit ini. Dengan kondisi permukiman yang berjajar rapi ini memberi kemudahan warga untuk saling berkomunikasi, berdiskusi dan berinteraksi.

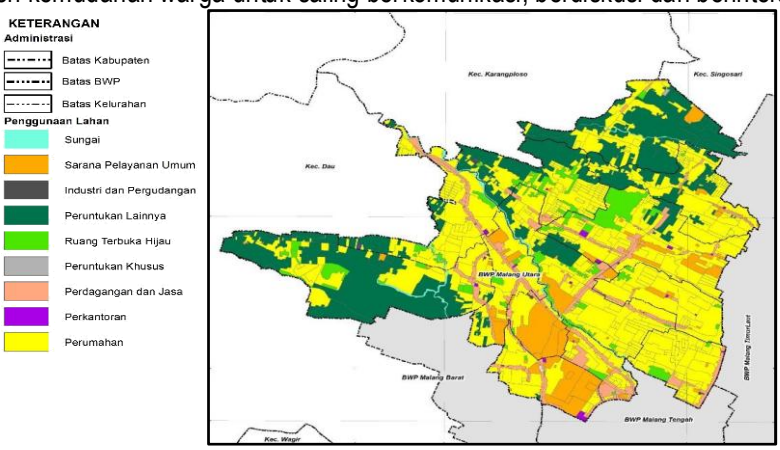

Gambar 2. Peta Penggunaan Lahan BWP Malang Utara

Kampung RW 3 merupakan kawasan permukiman perkotaan padat di Kota Malang dengan luas kawasan 2,78 Ha. Peruntukan lahan didominasi permukiman sebagai lahan terbangun sebesar 2,73 Ha (98,20%) dan lahan tidak terbangun sebesar 0,05 Ha (1,80%). Beberapa site yang ada adalah terdapat lahan yang dimanfaatkan oleh warga menjadi kebun seluas 0,05 ha dan kolam lele yang berwadahkan terpal. Dalam kebun bibit tersebut terdapat kegiatan pembibitan dan pembesaran.

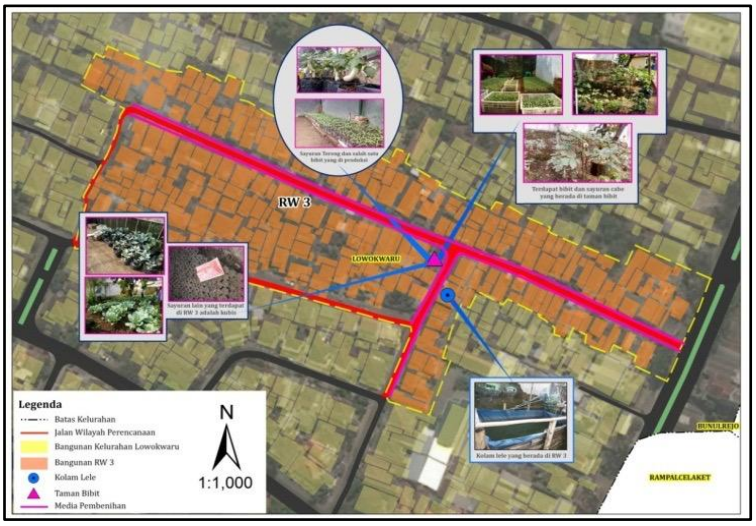

Gambar 3. Foto Mapping Kondisi Rona Alam RW 3

Analisis Sub Sistem Hulu-Hilir

Kegiatan pertanian di RW 3 ini terdiri dari aktifitas pembibitan dan pembesaran. Aktifitas pembibitan sekarang ini dikerjakan berdasarkan order dari pasar. Berikut adalah alur.

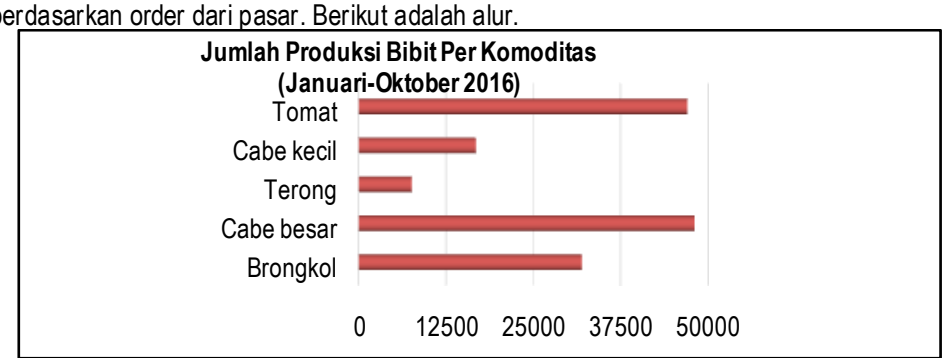

Gambar 5. Grafik Perbandingan Jumlah Produksi Bibit

ISBN : 978-602-73463-1-4

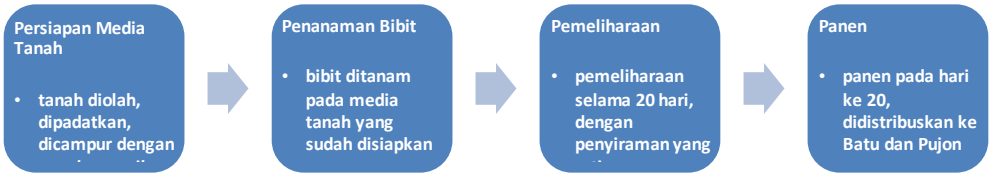

Gambar 4. Sub Sistem Alur Komoditas

Tabel 1. Penghasilan Kotor Hasil Penjualan Bibit

No	Komoditas	Produksi Bibit (Tanaman)	Pennjualan (RP)
1	Brongkol	31.963	Rp 5.405.525
2	Cabe besar	48.090	Rp 7.708.575
3	Terong	7.601	Rp 760.100
4	Cabe kecil	16.814	Rp 1.681.400
5	Tomat	47.047	Rp 8.233.225
Total		**151.515**	Rp 23.788.825

Berdasarkan pada Tabel 1, menunjukkan bahwa dalam 1 tahun total produksi bibit di Kampung Bibit RW 03 Kelurahan Lowokwaru telah mencapai 151.515 bibit, dengan harga jual mencapai Rp. 23.788.825. Dengan membandingkan total penjualan dan produksi bibit, dapat diketahui bahwa harga rata-rata setiap bibitnya mencapai Rp. 150,-. Sehingga dapat dihitung nilai kelayakan dari usaha tanaman bibit sebagai berikut.

Analisis Kelayakan Usaha

1. Produksi, Pendapatan, dan Keuntungan

Potensi produksi bibit tanaman sayur dalam 1 kali produksi perbulan mencapai 25.000 bibit dengan harga rata-rata setiap bibit adalah Rp.150,-, maka, pendapatan produksi bibit dapat dihitung sebagai berikut :

1) Pendapatan 25.000 bibit @ Rp.150,00 Rp. 3.750.000,00
2) Biaya Total produksi Rp. 1.241.500,00
3) Keuntungan bersih perbulan Rp. 2.508.500,00

2. Analisa Tingkat Kelayakan Usaha Tani (B/C Ratio)

B/C ratio adalah perbandingan antara total pendapatan dan total biaya yang di keluarkan.
B/C ratio = 3,021 = 3 (dibulatkan)

Pengeluaran biaya sebesar Rp. 1.241.500 setiap bulannya akan menghasilkan penerimaan sebesar 3 kali lipat. Berdasarkan perhitungan tersebut, dapat diketahui bahwa saat ini kegiatan usaha bibit di Kampung Bibit RW 03 Kelurahan Lowokwaru layak untuk dikembangkan. Karena dengan luasan lahan yang terbatas tersebut telah dapat menghasilka keuntungan mencapai tiga kali lipat dari biaya produksi. Sehingga, untuk dapat meningkatkan nilai ekonomi dari usaha ini, perlu dilakukan peningkatan kuantitas produksi bibit melalui pengembangan *vertical farming* di kampung ini

Analisis Prospek Kesiapan Sosial Kelembagaan

Pengembangan Kampung Bibit RW 03 Kelurahan Lowokwaru sudah memiliki modal sosial untuk pengembangan kampung kedepan, salah satu aspek modal sosial yang sudah dimiliki yaitu kepercayaan dimana warga Kampung Bibit RW 03 Kelurahan Lowokwaru sangat mempercayai pengelolaan bagi hasil yang didapatkan dari Kampung bIbit ini karena adanya aspek terbukaan satu sama lain di dalam pengelolaan

Kelembagaan yang ada di RW 03 Kelurahan Lowokwaru terdiri dari PKK, KarangTaruna, dan LOTIGAMA. Sedangkan dalam pengembangan Kampung Bibit di RW 03 Kelurahan Lowokwaru, kelembagaan yang masih berperan penuh yaitu LOTIGAMA dibantu oleh PKK dimana pemberdayaan yang selama 4 tahun berjalan hanya menggunakan sumber daya perempuan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

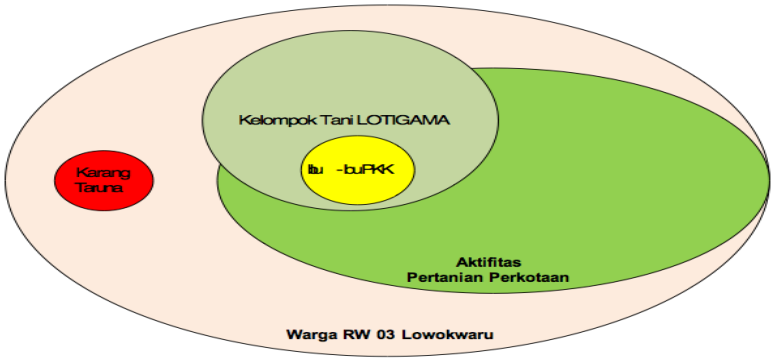

Gambar 6. Diagram Venn Kelembagaan RW 3

Selain itu Karang Taruna juga salah satu kelembagaan yang memiliki prospek untuk diberdayakan. Hal itu terjadi jika suplai bibit yang akan di produksi tidak cukup hanya berasal dari ibu-ibu PKK. Masuknya karang taruna sebagai salah satu anggota yang ikut turun dalam kegiatan pengembangan bibit akan memberdayakan kaum pemuda. Masuknya pemuda akan memunculkan gagasan-gagasan baru baik itu berupa inovasi dan ide kreatif.

Rencana Pengembangan

Branding Kampung

Branding merupakan salah satu yang penting dalam strategi promosi suatu produk. Dalam hal ini pengembangan kampung RW 3 Lowokwaru perlu ada branding sebagai ;langkah mempromosikan kawasan dan mudah diingat. Nama kampung dinamakan "Kampung Bibit".

Pengembangan KRPL melalui peningkatan Hulu-Hilir

a. Hulu
   1. Pengembangan media tanam menjadi *vertical garden*
   2. Media tanam (modular) ditempatkan di depan rumah warga
   3. Pengembangan teknologi pertanian organik
   4. Sosialisasi, pelatihan, dan pemberdayaan anggota Lotigama khususnya dan warga RW 03 umumnya dalam pengetahuan pertanian perkotaan

b. Proses (*on farm&off farm*)
   1. Adanya media atau media tempat pembuatan kompos dan pupuk cair organik
   2. Perekrutan anggota dalam pengolahan limbah hasil pertanian

c. Hilir
   1. Menjaga hubungan yang baik dengan pasar
   2. Jika terdapat berlebihan suplai dari hasil rencana maka dapat bekerjasama dengan mitra penjualan bibit lainnya

Rencana Detail Kawasan

a. Site 1 (Penataan Tapak Kebun Bibit)

Gambar 7. Pra dan Pasca Perancangan Site

ISBN : 978-602-73463-1-4

b. Site 2 (Penataan Tapak Kolam Lele)

Gambar 8. Pra dan Pasca Perancangan Site 2

c. Site 3 (Pemanfaatan Ruang Gang Kampung Bibit)

Gambar 9. Pra dan Pasca Perancangan Gang Kampung Bibit

Pengembangan Wisata Belanja Sayur Organik

Beberapa strategi yang dapat dilakukan dalam pengembangan kampung wisata pembelian sayur organik adalah diantaranya:

1. Pembangunan lokasi-lokasi pendukung aktivitas wisata pembelian sayur organik seperti kios penjulaan
2. Pembentukan kepengurusan pengelola kampung wisata bibit pembelian sayur organik yang bersal dari tenaga lokal
3. Adanya promosi wisata yang dilakukan oleh warga bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang
4. Pendampingan oleh pemerintah Kota Malang dan akademisi

KESIMPULAN DAN SARAN

Masalah utama yang dihadapi kampung bibit yaitu keterbatasan lahan. Namun potensi yang ada masyarakat sudah memiliki modal sosial berupa keberdayaan kelompok tani Lotigama dalam aktifitas pertanian perkotaan. Oleh karena itu beberapa strategi yang dilakukan adalah dengan membrandingkan RW 3 menjadi kampung bibit, pengembangan hulu-hilir guna mewujudkan menjadi M-KRPL, penataan tapak, dan strategi promosi wisata belanja sayur organik.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Rudi Azis, A. 2014. *Pengantar Sistem dan Perencanaan Transportasi.* Sleman, Yogyakarta: Deepublish.

[2] Janti Wignjopranoto, S. R. 2015. Rumah Organik: Memanfaatkan Setiap Sudut Rumah untuk Bertanam *Secara Organik*. Jagakarsa, Jakarta Selatan: PT. Agromedia Pustaka

[3] Sugihono, et al. 2013. Petunjuk Teknis Pengembangan Model Kawasan Rumah pangan Lestari (M-KRPL) Maluku Utara. Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Maluku Utara Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian Kementerian Pertanian.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERUBAHAN PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN DI KECAMATAN WATANG SAWITTO KABUPATEN PINRANG PROVINSI SULAWESI SELATAN

Muhammad Anshar[1)], Patris[1)]

[1]Fakultas Sains dan Teknologi/Jurusan Teknik , Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email : ansharakhul@yahoo.co.id

Naskah diterima :25 Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan: a) Faktor Kependudukan: Pertumbuhan dan kepadatan penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahun memerlukan lahan permukiman, b) Faktor Ekonomi : Produktivitas pertanian ,mata pencaharian kurang berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan pertanian, dan nilai jual lahan dan aksesibilitas berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan pertanian, c) Faktor Sarana dan Prasarana : Kondisinya semakin membaik ditinjau dari segi pelayanan terhadap masyarakat, d) Faktor Kebijakan : Konsistensi dalam melaksanakan Arahan Rencana Detail tata Ruang (RDTR) sebagai pedoman pemanfaatan lahan.

Kata kunci: *Perubahan Pemanfaatan, Lahan, Pertanian*

PENDAHULUAN

Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 45.764,53 km^2, memiliki sumber daya lahan dan iklim (jenis tanah, bahan induk, fisiologi dan bentuk wilayah, ketinggian tempat, dan iklim) yang sangat bervariasi. Keragaman karakteristik sumber daya lahan dan iklim merupakan potensi untuk memproduksi komoditas pertanian unggulan di masing-masing wilayah sesuai dengan kondisi agro ekosistemnya. terdapat 399.173 ha luas lahan yang tersedia dan dapat di kembangkan untuk kegiatan pertanian. Dari luas lahan tersebut. 266.045 ha (66%) di arahkan untuk komoditas tanaman tahunan, 69.725 ha (17,5%) untuk komoditas tanaman semusim dan 63.403 (15,9%) diarahkan untuk komoditas padi sawah. Optimalisasi penggunaan sumber daya lahan merupakan suatu alternatif untuk meningkatkan produktivitas lahan. Penggunaan lahan di Sulawesi Selatan umumnya masih di dominasi untuk usaha pertanian baik untuk tanaman semusim maupun tahunan, juga untuk peternakan dan perikanan [1].

Kabupaten Pinrang merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di Propinsi Sulawesi Selatan dari dua puluh empat kabupaten/kota yang ada dengan luas wilayah 1.961,77 km^2. Secara fisik, wilayah Kabupaten Pinrang merupakan wilayah pegunungan yang potensial untuk pengembangan sektor pertanian khususnya padi dan perkebunan. Wilayah ini di kenal sebagai bagian wilayah Bone, Soppeng, Wajo, Sidrap, Pinrang, Luwu (BOSOWASIPILU). Yang merupakan kawasan utama Sulawesi-selatan sebagai "lumbung pangan nasional". Sesuai Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029 [2].

Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pinrang tahun 2010-2030 [3], Kecamatan Watang Sawitto masuk dalam kawasan Agropolitan lebih tepatnya kawasan Klaster dataran rendahpengembangan komoditas pengembangan komuditas tersebut diarahkan pada komoditas unggulan yang banyak dikelola oleh masyarakat petani di wilayah dataran rendah sejak lama. Sesuai arahan rencana strategi (Renstra) pembangunan pertanian Kabupaten Pinrang, komoditas dataran rendah yang perlu dikembangkan dengan model agribisnis dan agroindustri

Kecamatan Watang sawitto selaku ibu kota Kabupaten Pinrang mengalami perkembangan yang cukup pesat, pembangunan pusat-pusat kegiatan di beberapa titik di kota Pinrang membuat perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi kawasan permukiman dan komersil sangat cepat perkembanganya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut tersebut. maka penulis beranggapan bahwa penelitian mengenai"**Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan"**penting untuk dilakukan.Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitiian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan

METODOLOGI

Jenis penelitian sifatnya *deskriptif kualitatif* denganlokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang dengan objek penelitian yakni Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini berupa jenis data kuantitatif maupun data kualitatif yang dianggap relavan dengan penelitianSumber Data data yang dibutuhkan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang di peroleh dari pengamatan langsung ke lapangan atau kawasan penelitian kondisi eksisting dari penggunaan lahan, data sekunder yaitu data yang digunakan untuk mengetahui perubahan pemanfaatan lahan. Data sekunder di peroleh dari Dinas Pertanian Kabupaten Pinrang, Dinas Pekerjaan Umum Bidang Tata Ruang Kabupaten Pinrang, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pinrang, Kantor Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang, serta dinas-dinas terkait lainnya. Data sekunder berupa data kebijakan pembagunan wilayah, perubahan pemanfaatan lahan, harga lahan, kependudukan, serta data-data lain dianggap mendukung dalam menjawab pertayaan penelitian.Metode pengumpulan data yang di lakukan dalam penelitian ini dibagi atas dua, yaitu:Pengumpulan Data Primer Teknik pengumpulan data primer yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: Observasi Langsung, Studi Dokumentasi. Pengumpulan Data Sekunder Teknik pengumpulan data sekunder yang di gunakan dalam penelitian ini adalah: Survei Institusional, Studi Literatur

Definisi Operasional penelitian ini adalah, antara lain:

1. Pemanfaatan lahan dapat di pahami sebangai suatu usaha penggunaan lahan yang berkaitan dengan aktivitas manusia yang secara langsung berhubungan dengan lahan. Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian berupa pemanfaatan lahan pertanian yang banyak terjadi perubahan akibat dari pembangunan fisik ruang.;
2. Lahan pertanian merupakan sawah yang memproduksi padi selama 3 bulan sekali;
3. Lahan bukan pertanian adalah lahan yang pemanfaatan bukan termasuk lahan pertanian;
4. Perubahan pemanfaatan lahan pertanian adalah berubahya aktivitas lahan pertanian ke aktivitas non pertanian yang di sebabkan oleh pembangunan fisik, salah satunya. Perubahan terhadap pemanfaatan lahan dapat di ukur dengan menjumlahakan frekuensi skor yang di peroleh dari hasil koesioner masing-masing indikator instrumen yaitu persepsi pertanian terhadap perubahan ekonomi, perubahan taraf sosial, produktivitas lahan pertanian, dan dukungan pemerintah saat mengkonversi lahan tersebut;
5. Faktor kependudukan lahan, untuk kegiatan non pertanian antara lain pembangunan real estate, kawasan industri, kawasan perdangangan, dan jasa-jasa lainnya yang mem jumlahkan frekuensi skor dari indikator a) Nilai lahan dan b) Lokasi lahan;
6. Faktor ekonomi karena faktor kebutuhan keluarga petani yang terdesak oleh kebutuhan modal usaha atau keperluan keluarga lainnya (pendidikan, mencari pekerjaan non pertanian, atau lainnya), sering kali menbuat petani tidak menpunyai pilihan selain menjual sebangai lahan pertanian;
7. Aksebilitas adalah suatu ukuran kenyamanan bagaimana lokasi tata guna tanah beriteraksi satu sama lain bagaimana mudah susahnya lokasi tersebut di capai melalui sisten trasportasi atau kemudahan masyarakat menjangkau tempat;
8. Faktor kebijakan di tentukan dengan indikator yang terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pengelolahan lahan, yaitu aspek arahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Metode Analisis Data untuk rumusan masalah "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Provinsi Sulawesi Selatan" yakni : analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan atau mendukung analisis statistic dengan mengembangkan konsep dan menghimpun fakta dari analisis statistic yang disajikan dalam bentuk metode evaluative, Tabulasi Silang (*Crosstabulation*) dan analisis Lickert.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perubahan pemanfaatan lahan pertanian yang terjadi merupakan dari aktifitas penduduk. Karena itu, pola pemanfaatan lahan merupakan pencerminan dari bentuk hubungan antara penduduk dengan lingkungannya. Di samping itu pemanfaatan lahan merupakan indikator yang menggambarkan aktifitas utama penduduk, juga merupakan pencerminan terhadap potensi kegiatan yang berlangsung di atas lahan tersebut.

Lahan adalah areal atau kawasan yang di peruntukkan untuk penggunaan tertentu yang biasanya di nyatakan dalam satuan hektar (Ha). Sedangkan pola penggunaan lahan adalah areal model atau bentuk penggunaan lahan diterapkan, seperti perladangan, tegalan, hutan, penghijauan, perkampungan, dan lain-lain [4].

Secara umum bentuk pemanfaatan lahan di Kecamatan Watang Sawitto dibagi atas dua yaitu urban area terdiri dari pemukiman, fasilitas umum dan perdangangan sedangkan non urban area terdiri dari persawahan, trasportasi dan pemanfaatan lahan lainnya.

Berdasarkan tulisan di atas maka untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 1. Pemanfaatan Lahan Kecamatan Watang Sawitto Tahun 2014

No	Pemanfaatan Lahan	Luas(Ha)	%
1	Hutan kota	0.146	8.9
2	Industri	0.402	2.47
3	Jalan eksisting	75.118	4.62
4	Jasa	1.092	67.2
5	Kebun campuran	577.073	35.5
6	Kesehatan	4.107	25.2
7	Lapangan	3.09	19.0
8	Pemakaman	2.745	16.9
9	Pendidikan	19.657	1.21
10	Perdangangan	35.274	2.17
11	Pergudangan	2.627	16.1
12	Peribadatan	5.92	36,4
13	Perkantoran	17.732	1.09
14	Permukiman	360.812	22.2
15	Pusat energi	1.594	98.1
16	Sawah	5045.752	31.0
17	Sungai	5.617	34.6
18	TPA	2.163	13.3
Jumlah		**6.160,92**	**100**

Sumber : Data Hasil Overlay Tahun 2015.

Pemanfaatan lahandi Kecamatan Watang Sawitto pada tahun 2014 yang terdiri atas perumahan dan pekarangan, fasilitas umum, perkantoran, perdagangan dan areal persawahan, jalan dan pemanfaatan lahan lainnya. Perubahan pemanfaatan lahan yang paling dominan di Kecamatan Watang Sawitto dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yaitu kebun campuran seluas 577.073 ha (35.5 %) dan sawah seluas 5045.752 ha (31.0%), area kebun campuran dan sawah merupakan lahan yang terbesar yang berubah fungsi menjadi lahan permukiman. Hal ini sesuai dengan arahan pemanfaatan lahanyang telah di tetapkan dalam RDTR Kecamatan Watang Sawitto. Berkaitan dengan perubahan pemanfaatan lahan pertanian yang berpengaruh pada perkembangan jumlah penduduk yang ada selama kurang waktu lima tahun (tahun 2010 - tahun 2014). Adapun perubahan pemanfaatan lahan di Kecamatan Watang Sawitto khususnya pada sektor pemukiman mengalami

peningkatan sebesar pada tahun 2010 seluas 322.591 ha atau 119.8% dalam seluruh pemanfaatan lahan pertanian. Menjadi 360.812 ha pada tahun 2014 sedangkan sektor pertanian (kebun dan sawah) pada tahun 2010 seluas 56.78.397 ha menjadi 5622.825 ha pada tahun 2014 sehinga mengalami penurunan sebesar 55,572 ha. Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel sebagai berikut berikut:

Tabel 2. Perubahan Pemanfaatan Lahan di Kecamatan Watang Sawitto Tahun 2010-2014

No	Jenis Pemanfaatan Lahan	Tahun 2010		Tahun 2014		Perub. (Ha)
		Luas	%	Luas	%	
1	Hutan kota	0.146	8.9	0.146	8.9	
2	Industri	0402	24.76	0.402	24.76	
3	Jalan eksisting	72.011	4.43	75.118	4.62	-3.107
4	Jasa	1.092	67.2	1.092	67.2	
5	Kebun campuran	598.836	368.8	577.073	35.5	21,763
6	Kesehatan	4.107	252	4.107	252	
7	Lapangan	3.09	190	3.09	190	
8	Pemakaman	2.745	169	2.745	169	
9	Pendidikan	16.311	1.00	19.657	1.21	-3.346
10	Perdangangan	35.136	2.16	35.274	2.172	-0.138
11	Pergudangan	2.627	161	2.627	161	
12	Peribadatan	5.692	350	5.92	364	-0.228
13	Perkantoran	7.202	443	17.732	1.092	-10.53
14	Permukiman	322.591	119.8	360.812	22.2	-38.221
15	Pusat energi	1.594	98.1	1.594	98.1	
16	Sawah	5079.561	312	5045.752	310	33.809
17	Sungai	5.617	346	5.617	346	
18	TPA	2.163	133	2.163	133	
Jumlah		*6.160,92*	100	6.160,92	100	

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2015

Berdasarkan hasil analisis yang telah di lakukan, perkembangan perubahan pemanfaatan lahan di Kecamatan Watang Sawitto pada tahun 2010 masih di dominasi oleh kegiatan kebun campuran dan lahan sawah dengan persentase masing-masing 3.68% dan 3.12% dan pada tahun 2014 mengalami penurunan, di mana pemanfaatan lahan kebun campuran dan sawah berubah menjadi 35.5% dan 3.10%. Sedangkan untuk lahan permukiman mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2010 sekitar 322 ha menjadi 360 ha pada tahun 2014 menjadi peningkatan 22.2% .

Proses perubahan pola pemanfaatan lahan juga dapat diikuti dengan membandingkan potret udara atau citra satelit dari berbagai tahun, dari perbandingan itu dapat dilihat bertambahnya luas daerah permukiman dan berkurangnya lahan pertanian [5].

Untuk dapat mengontrol perubahan pemanfaatan lahan ini di perlukan adanya suatu pola pemanfaatan lahan yang di harapkan dapat menjadi pedoman pemanfaatan lahan yakni Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kawasan Perkotaan Kecamatan Watang Sawitto. Adanya pedoman tersebut di harapkan dapat meningkatkan efesiensi perubahan pemanfaatan lahan sehingga memberikan hasil yang optimal dan berdaya guna terhadap perubahan yang terjadi. Agar nantinya tidak terjadi kecenderungan kota dalam artian pedoman tersebut berisi kan aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah daerah yang kemudian di sepakati. sehingga apabila perubahan yang terjadi tidak sesuai dengan pedoman rencana yang telah dibuat, dapat di berlakukan pemberian sanksi kepada yang melanggarnya. Peraturan di buat dengan maksud masyarakat mengetahui bahwa perubahan yang tidak sesuai rencana akibatnya dapat menimbulkan berbagai macam permasalahan buruk seperti kemacetan lalu lintas dan banjir.

Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Perubahan Pemanfaatan Lahan Pertanian, yaitu:

a. Faktor kependudukan

Jumlah penduduk di Kecamatan Watang Sawitto mengalami peningkatan. Pada tahun 2010 berjumlah 44.647 jiwa dan pada tahun 2014 terjadi penambahan sebanyak 54.307 jiwa. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel sebagai berikut :

Tabel 3. Perkembangan Jumlah Penduduk di KecamatanWatang Sawitto Tahun 2010 – 2014

No	Tahun	Jumlah penduduk (jiwa)	Perubahan (%)
1	2010	44.647	
2	2011	50.974	3.90
3	2012	51.044	70
4	2013	54.112	3.06
5	2014	54.307	1,95

Sumber :Kecamatan Watang Sawitto 2014/2015

Kecamatan Watang Sawitto setiap tahun mengalami peningkatan jumlah penduduk. Pada tahun 2010 jumlah penduduk sebesar 44.647 jiwa, dan pada tahun 2011 mengalami peningkatan menjadi 50.974 jiwa, kemudian pada tahun 2012 dan 2013 berturut-turut mengalami peningkatan jumlah penduduk menjadi 51.044 jiwa dan 54.112 jiwa, kemudian pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang lebih tinggi yaitu 54.307 jiwa.

Penduduk di Kecamatan Watang Sawitto tersebar dalam 8 (Delapan) kelurahan. Kelurahan Penrang adalah kelurahan yang memiliki jumlah penduduk yang tertinggi yakni 12.773 jiwa. dan kelurahan Siparappe memiliki jumlah penduduk terkecil yaitu sebesar 2.885 jiwa. Sedangkan di tinjau berdasarkan luas wilayah, maka Kelurahan Siparappe merupakan Kelurahan terluas di Kecamatan Watang Sawitto yaitu 24,21 luas($km^{2)}$ dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 130 jiwa/km^2. Dan kelurahan Sawitto merupakan kelurahan yang memiliki luas wilayah terkecil yaitu 0,90 km^2 dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 5.244 jiwa/km^2. Adapun kepadatan penduduk tiap kelurahan di Kecamatan Watang Sawitto dapat dilihat pada tabel berikut:

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 4. Kepadatan penduduk di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2014

No	Kelurahan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas (Km2)	Kepadatan penduduk (jiwa/Km^2)
1	Siparappe	2.885	24,21	130
2	Salo	4.288	9,17	521
3	Sipatokkong	2.889	7,46	438
4	Penrang	12.773	2,37	5.092
5	Jaya	8.399	1,22	6.579
6	Sawitto	4.491	0,90	5.244
7	Macorawalie	12.176	4,35	2.757
8	Bentengnge	6.406	9,29	651
	Jumlah	50.307	58.97	63.3

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang Tahun 2015

Berdasarkan data di atas kelurahan yang terpadat penduduknya yaitu kelurahan Jaya 6.579 jiwa/km^2 dan kelurahan yang memiliki kepadatan terendah adalah kelurahan Siparappe yaitu 130 jiwa/km^2

Perkembangan jumlah penduduk tersebar di kelurahan yang dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Perkembangan Jumlah Penduduk Kelurahan di Kecamatan Watang Sawitto Tahun 2010 – 2014

No	Kelurahan	Tahun				
		2010	2011	2012	2013	2014
1	Siparappe	2.630	2.786	2.829	3.149	2.885
2	Salo	3.769	4.113	4.235	4.781	4.288
3	Sipatokkong	2.579	2.726	2.791	3.267	2.889
4	Penrang	10.120	12.071	11.896	12.128	12.773
5	Jaya	7.466	8.170	8.049	8.026	8.399
6	Sawitto	4.243	4.513	4.435	4.720	4.491
7	Maccorowalie	9.597	11.018	11.262	11.994	12.176
8	Bentengnge	4.243	5.577	5.547	6.047	6.406
	Jumlah	21.672	50.974	51.044	54.112	54.307

Sumber :Kecamatan Watang Sawitto dalam Angka Tahun 2014/2015

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kelurahan Siparappe yang memiliki jumlah penduduk yang sangat sedikit yaitu sebesar 2.885 jiwa sedangkan kelurahan Penrang yang memiliki jumlah penduduk yang terbesar dengan jumlah penduduk sebesar 12.773 jiwa.

b. Faktor Ekonomi

Produktivitas Pertanian

Produktivitas pertanian di Kecamatan Watang Sawitto mengalami penurunan setiap tahunnya hal ini terjadi akibat semakin sempitnya lahan pertanian yang akan di kelola oleh petani di Kecamatan Watang Sawitto jumlah produksi padi tahun 2010 sebanyak 81.343,000 ton dari luas 10.167,82 hektar panen bersih. Sedangkan tahun 2014 produksi padi sebanyak 88.560 ton dengan luas panen 85.728 ha. Selain dari pada itu terdapat jenis tanaman pangan yang di usahakan di Kecamatan Watang Sawitto yaitu tanaman jagung yang menpunyai luas panen pada tahun 2014 seluas 200 ha dengan jumlah produksi 1.180 ton.

Mata Pencaharian

Mata pencaharian di kecamatan Watang Sawitto pada umumnya adalah pedagang/ wiraswasta serta pegawai/PNS, sedangkan untuk petani yang menggarap lahan pertanian di Kecamatan Watang Sawitto adalah pemilik lahan sendiri selain itu ada sebagian pemilik lahan yang menggunakan jasa petani penggarap. Ini dapat di lihat karena Kecamatan Watang Sawitto adalah pusat dari Kabupaten pinrang (Ibu Kota Kabupaten),

Harga Lahan

Harga lahan pertanian di Kecamatan Watang Sawitto mengalami peningkatan setiap tahunnya dan penduduk yang memiliki lahan pertanian mereka cenderung untuk menjual tanah mereka. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya harga lahan dari Rp 750.000/meter dan akibat adanya pemanfaatan lahan pertanian kini berubah menjadi Rp 3.000.000 sampai >Rp 5.000.000/meter. Dan para pemilik lahan bisanya melakukan pengkavling-kavling. pemanfaatan lahan pertanian menjadi kawasan terbangun berpengaruh terhadap harga lahan di Kecamatan Watang Sawitto.

Aksesibilitas (Kemudahan Pencapaian)

Suatu permukiman sangat di pengaruhi oleh ketersediaan fasilitas-fasilitas. Selain adanya fasilitas yang menunjang, aksesibilitas juga merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap lokasi fasilitas-fasilitas tersebut yakni tersedianya kemudahan-kemudahan yang ada. Faktor aksessibilitas ini jelas sekali mempengaruhipermukiman dalam kemudahan masyarakat menjangkau fasilitas-fasilitas yang ada. Aksesibilitas di Kecamatan Watang Sawitto cukup mudah, karena banyaknya jumlah kendaraan umum yang beroprasi dan hampir seluruh jalan yang ada sudah teraspal. Adapun jenis jalan dan kualitas aspal yang dipakai adalah jenis jalan yang masih berkerikil/ telford.

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas Pemerintahan

Fasilitas pemerintahan atau kantor pemerintahan yang ada di Kecamatan Watang Sawitto antara lain Kantor Bupati 1 unit, kantor kecamatan 1 unit, Kantor Lurah 8 unit, Dinas Pariwisata 1 unit, Dinas Pertanian 1 unit, dinas PU (Pekerjaan Umum) 1 unit, Kantor Pengadilan Negeri Kabupaten Pinrang 1 unit, Kantor Pertahanan Nasional 1 unit, Pos Lantas 3 unit, Kantor Perhubungan 1 unit, Kantor Samsat 1 unit, Polsek Kepolisian Watang Sawitto 2 unit, Kantor Pos 1 unit, Kantor Bappeda 1 unit, Kantor PLN 1 unit, Kantor Statistik 1 unit, Kantor Kesehatan 1 unit, Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Pinrang 1 unit, Kantor DPRD 1 unit dimana perkantoran tersebut melayani lingkup Kabupaten maupun Kecamatan Watang Sawitto.

Fasilitas Perdagangan

Fasilitas perdagangan merupakan tempat/wadah dalam rangka melangsungkan proses jual beli baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder penduduk. Adapun distribusi penyebaran fasilitas perdagangan yang ada di Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari pasar yang berada pada di pusat kota dan serta pertokoan, kios dan warung yang terletak di seluruh wilayah kelurahan.

Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan yang terdapat di Kecamatan Watang Sawitto yaitu Mesjid yang memiliki jumlah 46 unit kemudian langgar/ musolla 12 uni dan gereja 6 unit.

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang ada di Kecamatan Watang Sawitto cukup memadai, di antaranya terdapat rumah sakit 3 unit 1 di kelolah oleh pemerintah dan 2 di kelolah oleh swasta, puskesmas (postu) 3 unit, rumah sakit bersalin/Bkia 2 unit, dan posyandu 36 unit.

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas pendidikan di Kecamatan Watang Sawitto terdiri dari TK 23 unit, SD/ibtidayah 35 unit. SMP/tsanawiyah 7 unit, SMA/SMK/aliyah 7 unit. Dan perguruan tinggi 3 unit. Dimana jumlah SD/tsanawiyah lebih banyak di bandingkan jenjang pendidikan lainnya yaitu 35 unit SD.

Fasilitas Kesehatan

Fasilitas olah raga adalah salah satu penunjang suatu wilayah/kota sebagai tempat bermain/rekreasi bagi masyarakat, selain itu juga berfungsi sebagai ruang terbuka hijau. Di Kecamatan Watang Sawitto terdapat beberapa fasilitas olah raga diantaranya lapangan sepak bola 1 unit,bola voly 18 unit, tennis lapangan 8 unit, bulu tangkis 14 unit, tennis meja 9 unit, lainnya(Takrow) 5 unit serta fasilitas olah raga lainnya.

Fasilitas Jaringan Jalan

Jaringan jalan yang terdapat pada Kecamtan Watang Sawitto terbagi atas jalan utama yang menghubungkan antara jalan poros Pare-pare dengan Sulawesi Barat dengan lebar 8-9 meter dengan panjang 500 meter dengan kondisinya sudah baik dengan aspal. Namun masih ada ada jalan yang kondisi rusak yaitu jalan yang menghubungkan antara Kecamatan Mattiro Sompedengan lebar 6-7 dengan panjang 300 meter. Jalan yang ada di pusat kota kondisi jalan sudah baik dengan konstruksi jalan sudah teraspal sepanjang 1300 meter jalan lokal merupakan poros utama di lingkungan permukiman dan penghubung antar unit rumah dengan konstruksi aspal sepanjang 700 meter dan pengerasan sepanjang 300 meter.

Fasilitas Jaringan Drainase

Prinsip dasar pembuangan/pengairan air hujan (permukaan) adalah bahwa air harus secepat mungkin di buang dan secara terus menerus (Continue), serta di lakukan seekonomis mungkin. Dengan demikian, penyediaan saluran pembuangan merupakan usaha untuk mengatasi masalah banjir atau genangan air pada suatu kawasan. Jaringan drainase yang ada di Kecamatan Watang Sawitto menggunakan saluran drainase terbuka yang mengikuti ruas jalan yang ada, saluran drainase adalah 2.100 meter yang di arahkan ke sungai saddang yang selanjutnya menuju ke laut.

Fasilitas Jaringan Air Minum

Prasarana dan sarana air bersih merupakan suatu kebutuhan yang harus di kembangkan secara berkelanjutan untuk dapat melayani kebutuhan penduduk air minum yang merupakan kebutuhan primer dalam kehidupan manusia.Pelayanan air bersih saat ini sudah memadai penggunaan air bersih di kecamatan watang sawitto dengan mengunakan air bor untuk yaitu 65% penduduk mengunakan kebutuhan sehari-hari dan ada juga yang memasak untuk di minum, manfaatkan air bersih yang pelayanannya dilakukan oleh PDAM Kabupaten Pinrang mencapai 20% dan menggunakan sumur gali 15%. Dengan demikian Kecamatan Watang Sawitto belum sepenuhnya memanfaatkan air belum sesuai standar teknis dan kesehatan. Di harapkan pemerintah Kabupaten pinrang memaksimalkan PDAM untuk melayani masyarakat dalam air minum sehari-hari.

Fasilitas Jaringan Telpon

Jaringan telepon tidak sepenuhnya terlayani karena kebanyakan orang sudah mengunakan jaringan telkomonikasi dengan menggunakan handphone untuk berkomonikasi dengan cukup aman dan bisa di bawah kemana-mana.

Fasilitas Jaringan Listrik

Listrik merupakan salah satu kebutuhan primer, karena dengan listrik penduduk dapat meningkatkan produktivitasnya, misalnya dengan adanya penerangan lampu listrik penduduk dapat belajar di waktu malam hari, termasuk perjalanan di malam hari, dengan adanya listrik penduduk dapat mengefisiensikan pekerjaan kantor dengan penggunaan komputernisasi dan peralatan lainnya yang menggunakan listrik. Di Kabupaten Pinrang terdapat dua sungai besar yaitu sungai Mamasa dan Sungai Bakaru sebenarnya masih merupakan anak sungai

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

saddang saat ini sungai mamasa di manfaatkan untuk keperluan pembangkit listrik tenaga Air (PLTA) Bakaru yang berlokasi di desa ulu saddang kecamatan lembang PLTA yang ada ini selain untuk memenuhi kebutuhan listrik di kabupaten pinrang, juga untuk memenuhi kebutuhan listrik di provinsi sulawesi selatan sedangkan sungai saddang di manfaatkan untuk pengairan pertanian dengan cakupan pelayanan selain Kabupaten Pinrang juga melayani Kabupaten Sidenreng Rappang.

c. Faktor Arahan Pengembangan Kota berdasarkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)

Merencanakan suatu kota akan berhasil dalam pelaksanaannya jika di barengi dengan dasar dan konsepsi yang rasional, dengan menerapkan konsep perencanaan komprehensif berdasarkan potensi dan permasalahan kota serta di namika perubahan sosial ekonomi masyarakat. Pertimbangan tersebut menjadi dasar dalam penetapan arahan pola pemanfaatan ruang kota di masa yang akan datang. Merencanakan suatu kota bukan merupakan ke inginan yang idealistik akan tetapi di dasarkan pada kemampuan,kegiatan dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Kota dalam proses di namikanya di identikkan sebagai pusat akumulasi berbagai kegiatan yang terus berkembang, seiring dengan perkembangan teknologi, ekonomi, transportasi, perumahan, tata guna lahan dan aktifitas kota lainnya, sehingga d iperlukan perencanaan terpadu untuk menghindari pembauran fungsi ruang pola pemanfaatan lahan yang tidak terencana. Kawasan perkotaan merupakan wadah/ruang untuk mengakomodasikan kegiatan perkotaan yang selalu berkembang dengan kedinamisan-nya. Kegiatan-kegiatan tersebut mencakup permukiman jasa dan perdangangan perkantoran pemerintah dan swasta, industri, pendidikan dan fasilitas sosial umum lainya.

Penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No. 26 Tahun 2007 terdiri dari kegiatan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Perencanaan tata ruang dalam pelaksanaannya di tujukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang meliputi Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan/serta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota, sedangkan untuk rencana rinci tata ruang terdiri atas Rencana Tata Ruang Pulau/Kepulauan dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional, Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi serta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Kabupaten/Kota. Hal tersebut menjelaskan sekaligus menegaskan bahwa pelaksanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah harus menetapkan dan memiliki rencana tata ruang, sehingga upaya pengelolaannya dapat di lakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna.

Untuk skala kabupaten/kota di haruskan menyusun atau memiliki sebuah Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota, dan berdasarkan PP No. 15 Tahun 2010 kemudian di rincikan lagi dengan menetapkan suatu Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) pada bagian dari wilayah Kabupaten/kota. Adapun yang di maksud dengan Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota yaitu rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten/kota yang di lengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten/kota. Bagian dari wilayah kabupaten/kota yang di susun RDTR-nya merupakan kawasan perkotaan atau kawasan strategis kabupaten/kota.

Kawasan perkotaan di Kabupaten Pinrang merupakan titik pertemuan keanekaragaman budaya serta kegiatan perekonomian masyarakat yang berpusat di Kecamatan Watang Sawitto. Pada kawasan perkotaan Kabupaten Pinrang memiliki beberapa kawasan yang di antaranya memiiki pertumbuhan fisik yang cepat namun perkembangannya kurang tertib, tidak selaras dan serasi dengan lingkungannya. Untuk meminimalisir perkembangan yang demikian sehingga di perlukan suatu pengaturan yang secara tegas membatasi pertumbuhan yang tidak terencana. Diharapakan melalui upaya penataan dengan di siapkannya Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), selain untuk mencapai kualitas lingkungan yang lebih baik, sekaligus juga dapat memberikan arahan terhadap pemanfaatan lahan sesuai dengan Tata Ruang yang berlaku. Selain itu, seiring perkembangan dan genjarnya upaya pembangunan di Kabupaten Pinrang secara keseluruhan dan kawasan perkotaannya secara khusus, maka perlu diadakan upaya penataan ruang yang berkelanjutan dan lebih spesifik lagi hingga dapat menyentuh unsur-unsur ruang yang lebih mikro lagi.

Sebagai wujud pelaksanaan amanat UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan dalam rangka menyusun suatu produk yang dapat menjadi dasar bagi pengendalian pemanfaatan ruang di kawasan perkotaan Kabupaten Pinrang yang sedang berkembang, maka Pemerintah Kabupaten Pinrang melakukan kegiatan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kawasan Perkotaan Pinrang. Rencana ini adalah produk yang menjabarkan lebih lanjut dari produk Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang dan di harapkan dapat menghasilkan produk yang dapat menjadi acuan yang tegas dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang.

Kawasan Perkotaan Pinrang sebagai salah satu kawasan strategis di cepat tumbuh di Kabupaten Pinrang dalam satu dasa warsa terakhir telah mengalami pertumbuhan relatif cukup pesat, sehingga mendorong terjadinya perubahan fungsi penggunaan lahan yang sering kali tidak dapat terantisipasi dan tidak sejalan dengan pola penggunaan ruang yang telah di rencanakan baik di dalam RTRW Kabupaten Pinrang. Dalam lingkup internal, Kota Pinrang diperhadapkan pada berbagai permasalahan yang secara langsung berpengaruh pada upaya perwujudan kawasan perkotaan yang diharapkan, antara lain: urbanisasi, penyediaan lapangan kerja, konflik pemanfaatan ruang (budidaya dan non budidaya), permukiman kumuh dan sanitasi lingkungan. Oleh karena itu, pertumbuhan Kota Pinrang di arahkan dengan berpedoman pada rencana rinci yang integral dan terpadu ini, sehingga Kota Pinrang akan tumbuh dan berkembang dengan pengawasan dan pengendalian yang lebih manusiawi.

Kegiatan penyusunan rencana tata ruang dalam bentuk Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Pinrang di harapkan mampu memenuhi dinamika perkembangan Kota Pinrang, sehingga memerlukan pengkajian serta penelahan yang mendalam yang mengarah pada pembangunan yang berkelanjutan (*suistainable development*) dan kelestarian lingkungan, berkeadilan dan transparansi menuju terwujudnya Visi dan Misi Kabupaten Pinrang.

Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan (RDTR) merupakan rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut.

Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Perkotaan Pinrang pada prinsipnya merupakan pedoman dan arahan pengendalian pembangunan khususnya terhadap kawasan fungsional kota. Rumusan rencana detail tersebut akan bersifat operasional dalam kerangka pelaksanaan kegiatan pembangunan dan program pengalokasian pemanfaatan ruang sesuai tuntutan perkembangan serta dinamika sosial ekonomi masyarakat[6]

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan pemanfaatan lahan pertanian menjadi lahan pemukiman yakni a) pertumbuhan penduduk yang mengalami peningkatan setiap tahun memerlukan lahan pemukiman, b) faktor ekonomi terhadap pemanfaatan lahan pertanian dengan indikator produktivitas pertanian kurang berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan pertanian dan Faktor kebutuhan lahan dengan nilai jual lahan berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan, aksebilitas berpengaruh terhadap pemanfaatan lahan pertanian, c). Faktor prasarana dan sarana yang semakin baik di tinjau sesergi pelayanan minimal terhadap masyarakat serta d) Faktor kebijakan dengan indikator Arahan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), sebagai pedoman melaksanakan pemanfaatan lahan pertanian.

Saran

1. Pemerintah agar lebih menperhatikan permasalahan pemanfaatan lahan pertanian dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar lebih patuh terhadap perizinan dari pemerintah sehingga pembangunan yang di lakukan sesuai dengan fungsi kawasannya sebagai bagian upaya peningkatan kesadaran lingkungan.
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pinrang agar dapat menerbitkan suatu kebijakan tentang perubahan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai peruntukannya, khususnya di Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik Kabupaten Pinrang, Kecamatan Watang Sawitto Dalam Angka, 2015.
[2] Perda Provinsi Sulawesi Selatan No. 9 tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009-2029.
[3] Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2030.
[4] Haeruddin, Analisis perubahan penggunaan lahan di kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa, Program Pascasarjana, Universitas Hasanuddin Makassar. 1997
[5] Soemarwoto,Ekologi Lingkungan Hidup dan Pembangunan ,(Bandung: Djambatan, 1994), h. 212.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[6] Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Pinrang Tahun 2010-2030.

Lampiran 1. Peta Administrasi Kabupaten Pinrang

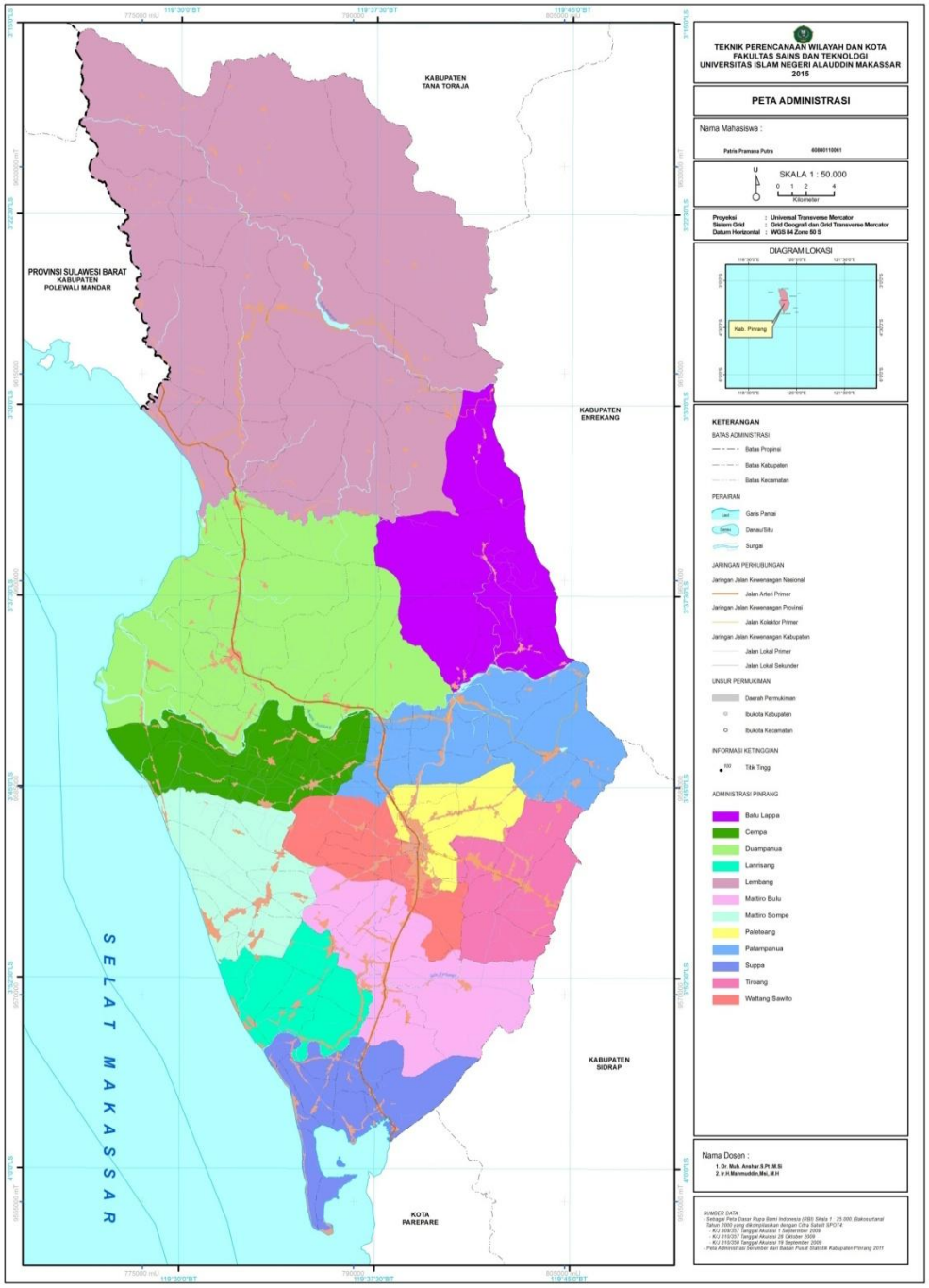

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Lampiran 2. Peta Administrasi Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

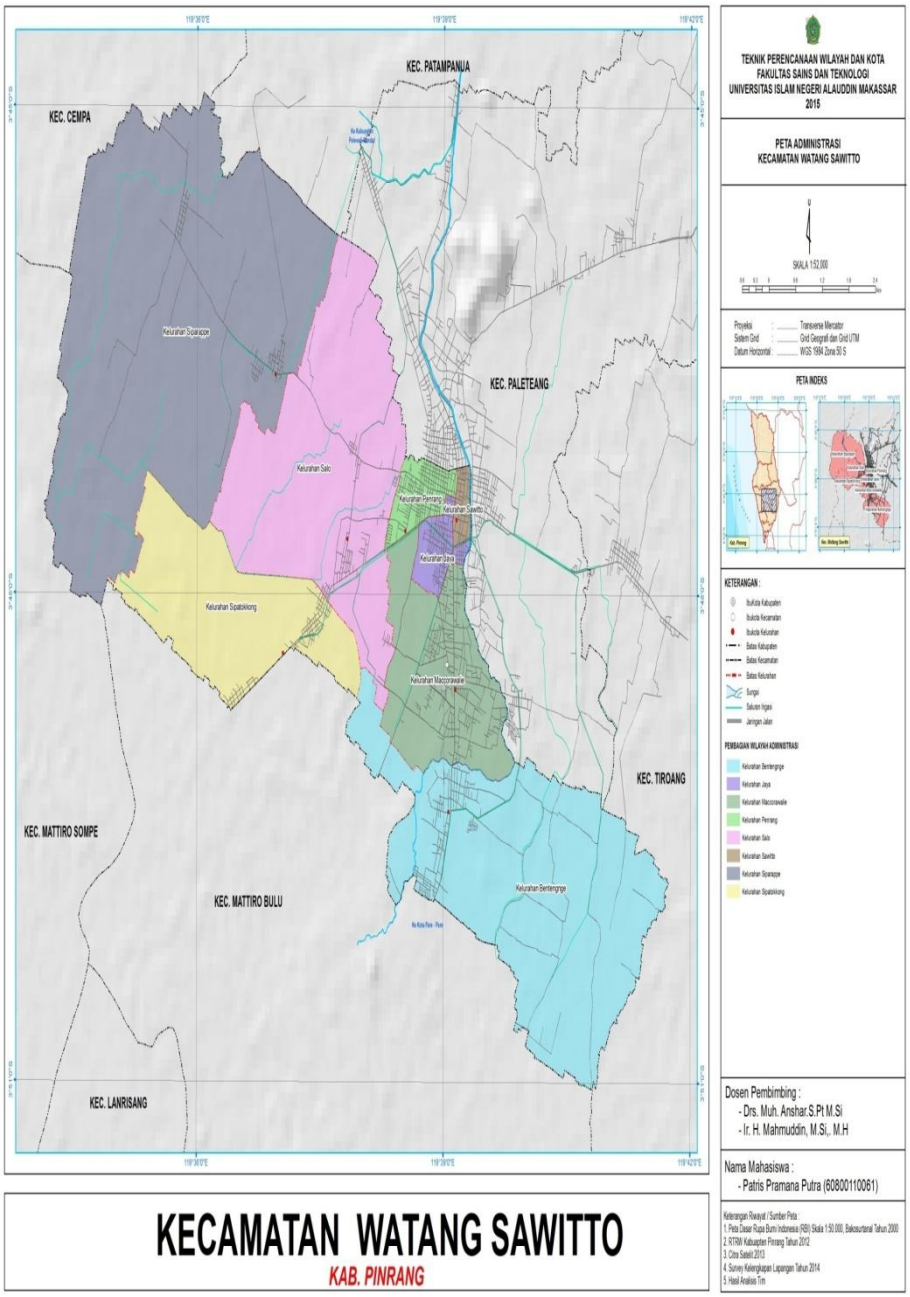

Lampiran 3.Peta Perubahan Penggunaan Lahan Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2015

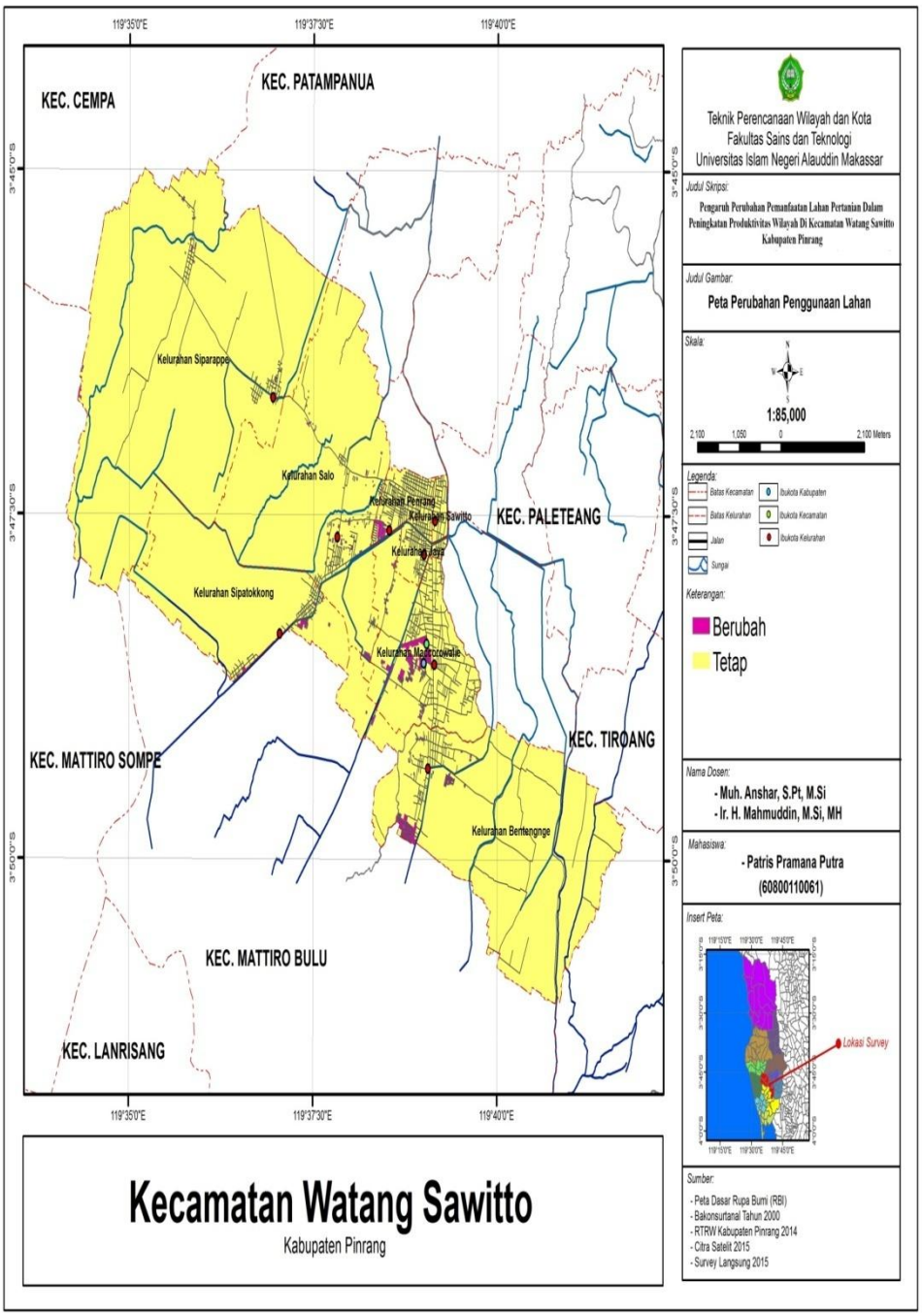

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Lampiran 4.Peta Kepadatan Penduduk Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang Tahun 2014-2015

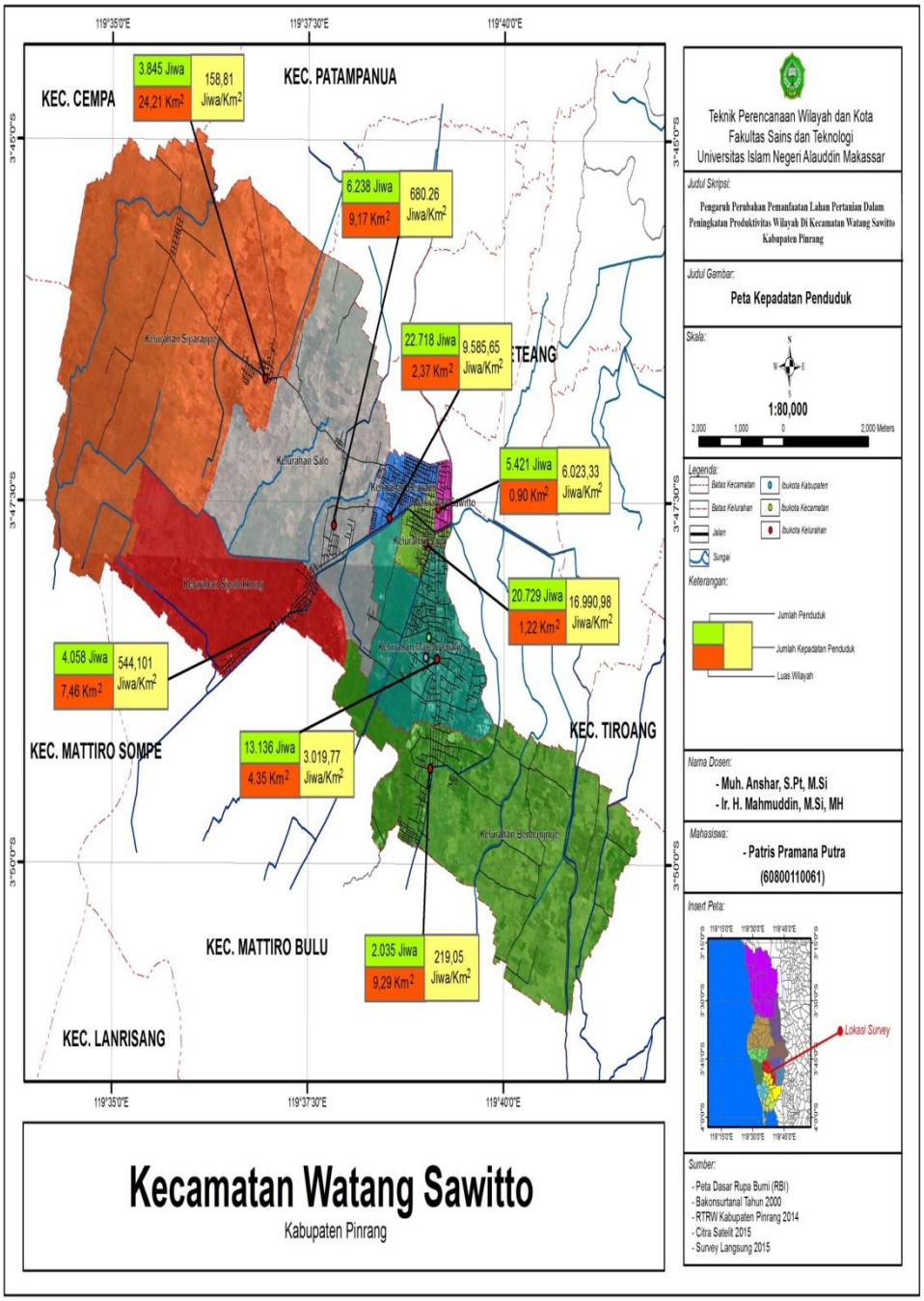

Lampiran 5.Peta Penggunaan Lahan Tahun 2010 Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang.

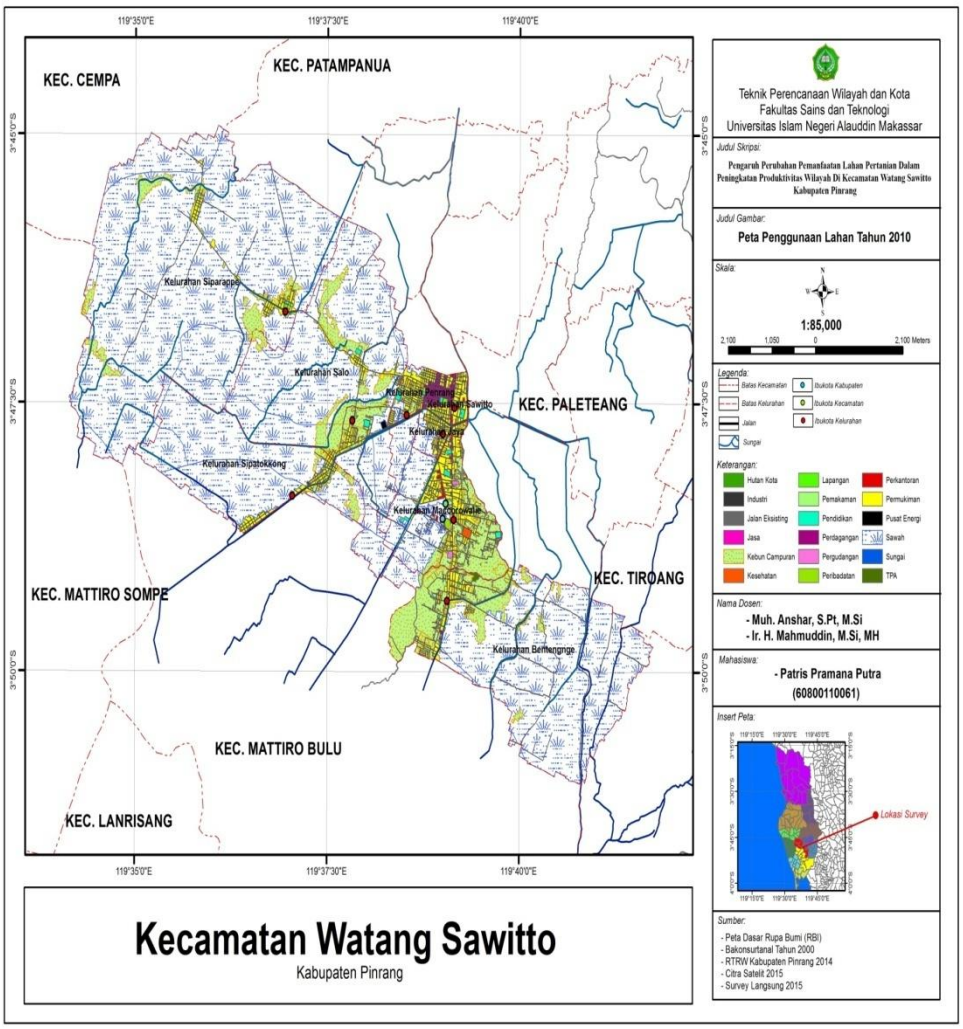

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Lampiran 6. Peta Penggunaan Lahan Tahun 2014 Kecamatan Watang Sawitto Kabupaten Pinrang

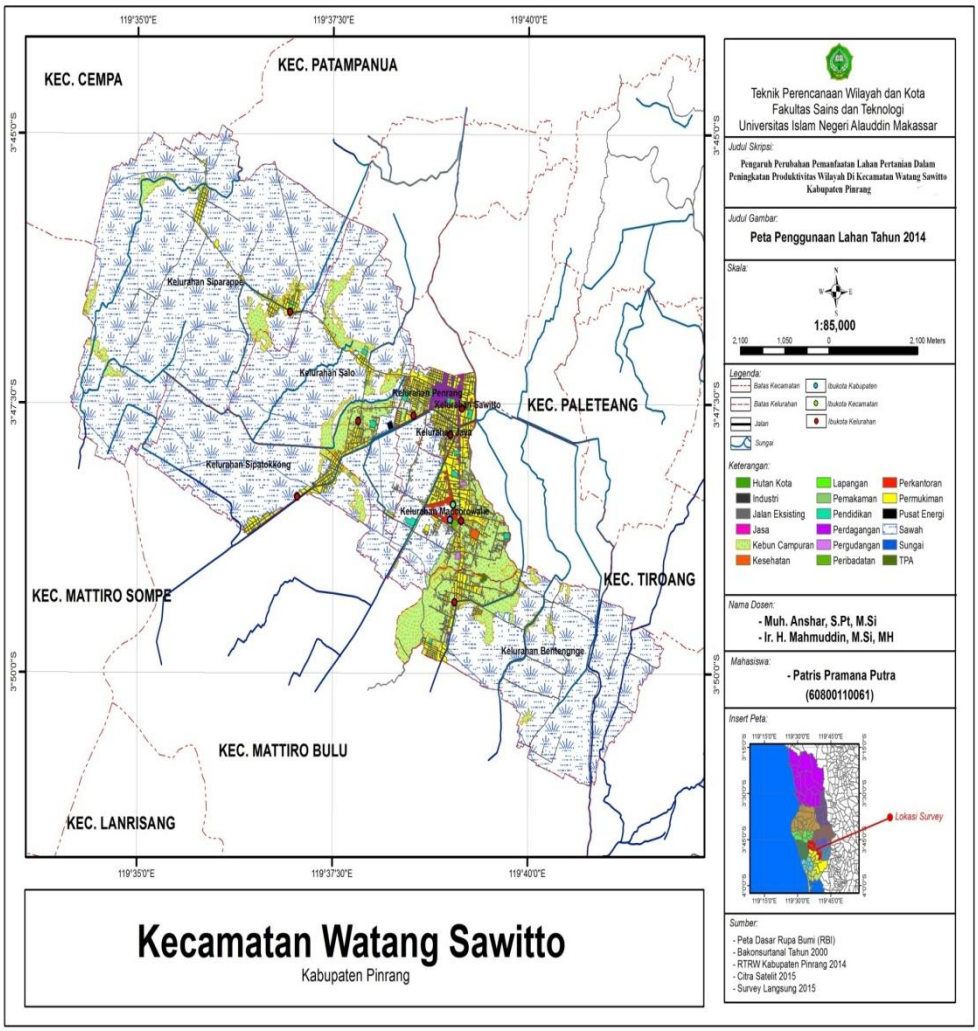

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS KESIAPAN MASYARAKAT NAGARI PARU KECAMATAN SIJUNJUNG KABUPATEN SIJUNJUNG DALAM PROGRAM PENCETAKAN SAWAH BARU

Nuraini Budi Astuti[1)], Ira Wahyuni Syarfi[1)], Edwin[1)]

[1] Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

Email : nurainibudiastuti96@gmail.com

Naskah diterima :23 fEBRUARI 2017 Naskah direvisi : 1 Maret 2017 Disetujui terbit : 6 Maret 2017

ABSTRAK

Nagari Paru di Kecamatan Sinjunjung, Kabupaten Sijunjung merupakan salah satu nagari yang mendapatkan program pencetakan sawah Baru yang kegiatan pencetakannya sudah selesai namun belum digunakan. Dengan hadirnya program ini diharapkan masyarakat dapat mendukung program pemerintah mewujudkan ketahanan pangan nasional melalui pemanfaatan lahan yang selama ini tidak atau kurang produktif menjadi lahan produktif. Hal ini tentu menuntut kesiapan dari masyarakat itu sendiri baik kesiapan mental, pengetahuan maupun keterampilan di samping kesiapan lahan tentunya. Penelitian menggunakan metode penelitian Survey data dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Hasil penelitian secara umum menggambarkan bahwa masyarakat kurang siap untuk menjadi petani padi sawah. Hal ini terutama disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan keterampilan dalam berusahatani padi sawah. Meskipun kurang didukung oleh pengetahuan dan keterampilan yang memadai, namun petani penerima program tetap antusias menerima program ini yang tampak pada sikap mereka yang hampir semuanya menyatakan setuju dengan adanya program ini. Saran, karena pengetahuan dan keterampilan berusahatani padi sawah masih kurang sebaiknya program pencetakan sawah baru dilengkapi dengan kegiatan pendampingan dan penyuluhan.

***Kata kunci**: pengetahuan, keterampilan dan sikap*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang berdampak pada peningkatan permintaan terhadap pangan, terutama padi atau beras sebagai makanan pokok. Impor beras merupakan salah satu kebijakan yang telah ditempuh pemerintah Indonesia untuk mengatasi kurangnya pasokan beras dalam negeri. Namun tahun 2017 pemerintah RI telah mencanangkan untuk mewujudkan swasembada pangan. Berbagai strategi telah dipilih dan diterapkan oleh pemerintah Indonesia baik dengan penerapan inovasi teknologi hingga perbaikan pola penguasaan dan pemanfaatan lahan melalui strategi ekstensifikasi yaitu sebuah upaya untuk meningkatkan produksi melalui penambahan atau pengembangan lahan pertanian.

Shcroll [1], mengungkapkan terdapat dua jenis strategi yang dapat dipergunakan dalam pembangunan pertanian, yang pertama strategi yang bertujuan untuk memperbesar kemampuan produksi (Shcroll mengistilahkannya dengan produksi agraria) dan yang kedua strategi yang bertujuan merubah pola penguasaan tanah agraria (perubahan-perubahan agraria).

Pembangunan pertanian Indonesia terutama yang ditujukan untuk meningkatkan produksi padi, sejak tahun 2012 menerapkan strategi ekstensifikasi melalui program pencetakan sawah baru. Program ini bertujuan untuk memperbesar luas tanah pertanian yang tersedia bagi petani untuk pertanian padi sawah. Tersedianya lahan pertanian untuk padi sawah diharapkan dapat menggenjot laju pertumbuhan produksi padi di Indonesia. Kementrian pertanian, melalui mentri pertanian menyatakan bahwa untuk tahun 2016 ini akan ditargetkan pencetakan sawah baru seluas 200.000 ha untuk seluruh Indonesia yang difokuskan di luar Jawa. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding tahun 2015 yang hanya mencapai 23.000 ha (Kompas.com, 2016).

Keberhasilan penerapan kebijakan pembangunan pertanian melalui berbagai program dipengaruhi

oleh setidaknya empat faktor yaitu pemerintah sebagai pelaksana, petani penerima manfaat, program itu sendiri dan infrastruktur penunjang. Penelitian ini sendiri akan fokus kepada petani sebagai penerima maanfaat program pembangunan. Kesiapan petani dalam menentukan keberhasilan pembangunan pertanian telah dinyatakan dengan jelas dalam UU SP3K No 16 tahun 2006 dengan menempatkan petani sebagai pelaku utama.

Tahun 2016 ini, Provinsi Sumatera Barat menjadi salah satu yang mendapatkan program pencetakan sawah baru dengan terget 15.000 ha. Program ini rencananya akan dilaksanakan di lima kabupaten yaitu: Solok, Agam, 50 Kota, Sijunjung dan Dharmasraya .

Penelitian ini sendiri akan difokuskan di Nagari Paru Kabupaten Sijunjung. Kabupaten Sijunjung tahun 2016 2016 ini telah mengusulkan lahan untuk sawah baru seluas 100 Ha pada tahap 1 [2]. Sementara di Nagari Paru sendiri telah berhasil dicetak seluas 40 Ha sawah baru, namun belum ditanam.

Hadirnya program pencetakan sawah baru di Nagari Paru Kabupaten Sijunjung, tentunya diharapakan dapat meningkatkan produksi pertanian terutama padi. Sebagai sebuah program baru, tentu ada banyak hal yang harus diidentifikasi guna kelancaran program. Mulai dari aspek teknis hingga aspek sosial ekonomi dari masyarakat, khususnya petani sebagai penerima manfaat program tersebut.

Penelitian ini sendiri akan fokus kepada aspek sosial masyarakat terutama yang terkait dengan:

1. Bagaimana kesiapan petani dalam menerima program pencetakan sawah baru.
2. Bagai mana sikap masyarakat sekitar non penerima program dalam menyikapi rencana pencetakan sawah baru

Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian adalah:

1. Menilai kesiapan petani dalam menerima program pencetakan sawah baru
2. Menilai sikap masyarakat non penerima terhadap program pencetakan sawah baru

METODE PENELITIAN

Penilitian ini dilaksanakan di Nagari Paru Kabupaten Sijunjung, Bulan Agustus hingga Oktober. Metode penelitian yang digunakan adalah survey. Menurut Fowler (1988) dalam Creswell [3] disain survey memberikan uraian kuantitatif maupun numerik sejumlah pecahan populasi – sampel – melalui proses pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan pada orang.

Sampel untuk petani calon penerima dipilih dengan menggunakan teknik *sampling jenuh* 40 orang, namun pada saat penelitian tidak semua petani dapat ditemui, maka sampel akhirnya berjumlah 35 orang. Untuk masyarakat non penerima jumlahnya diquota sebanyak 25 orang diambil secara *acsidental sampling.* Variabel penelitian akan diukur dengan menggunakan skor, berikut rinciannya:

Tabel1. Variabel penelitian dan skor penilaian

variabel	Alternatif jawaban	Skor pernyataan	
		positif	negatif
Tingkat pengetahuan petani (10 pernyataan)	a. Mengetahui b. Kurang mengetahui c. Tidak mengetahui	3 2 1	1 2 3
Tingkat keterampilan (10 pernyataan)	a. Terampil b. Kurang terampil c. Tidak terampil	3 2 1	1 2 3
Sikap petani (18 pernyataan)	a. Setuju b. Ragu c. Tidak setuju	3 2	1 2

ISBN :
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

		1	3
Sikap masyarakat (10 pernyataan)	a. Setuju b. Ragu c. Tidak setuju	3 2 1	1 2 3

Kesiapan petani penerima program merupakan rata-rata skor dari pernyataan terkait pengetahuan, keterampilan dan sikap, akan dinilai dengan kategori berikut:

Tabel 2. Penilaian kesiapan masyarakat

Rentang skor	Penilaian
2,34 – 3,00	Siap
1,67 – 2,33	Kurang siap
1 - 1,66	Tidak siap

HASIL DAN PEMBAHASAN

Nagari Paru berpenduduk sebesar 1883 jiwa dimana sebagain besar masyarakatnya adalah petani pekebun. Daerah ini memili luas ± 24.026 ha, 21990 ha (91,5%) diantaranya merupakan kawasan hutan. Kawasan pertanian hanya sebesar 1750 ha (7,3%), 1080,20 ha diantaranya perkebunan sementara sawah seluas 480,20 ha (Profil Nagari Paru, 2015). Dari angka tersebut terlihat bahwa pertanian di daerah ini didominasi oleh komoditi perkebunan yaitu karet yang diupayakan secara turun temurun .

Tahun 2016 Nagari ini menjadi salah satu daerah yang mendapatkan program pencetakan sawah baru dan telah tercetak sawah seluas 40 ha yang dimiliki oleh 40 orang petani. Untuk dapat mengolahnya tentu diperlukan kesiapan sumberdaya manusia dalam hal ini petani penerima program.

A. Karakteristik responden

Berikut ini adalah profil petani penerima program pencetakan sawah baru di Nagari Paru.

Tabel 3. Profil Petani

No	Keterangan	Jumlah (%) (orang)
1	Jenis kelamin	
	a. Laki-laki	31 (88,6%)
	b. Perempuan	4 (11,4%)
2	Umur	
	a. 26 – 38	11 (31,5%)
	b. 39 – 51	15 (42,8%)
	c. 52 - 64	9 (25,7%
3	Pendidikan	
	a. Tidak sekolah – SD	30 (85,7%)
	b. SMP	3 (8,6%)
	c. SMA	2 (5,7%)
4	Pengalaman berusahatani	
	a. 10 – 22	12 (34,2%)
	b. 23 – 35	15 (42,8%)
	c. 36 - 48	7 (20%)
5	Bertani sebagai:	
	a. Pekerjaan utama tanpa pekerjaan sampingan	33 (94,3%)
	b. Pekerjaan utama tapi ada pekerjaan sampingan yang lain	2 (5,7%)
	c. Pekerjaan sampingan	0 (0%)

Sumber: profil nagari Paru tahun 2015

ISBN : 978-602-73463-1-4

Dari data di atas terlihat bahwa petani di Nagai Paru sebagian besar berpendidikan setingkat SD dan lebih dari 90% tidak punya pekerjaan lain selain bertani.

Petani peserta program pencetakan sawah baru di Nagari Paru, sebanyak 85,7 % adalah petani pemilik penggarap, sedangkan sisanya 14,3% adalah petani penggarap di lahan orang lain dengan system bagi hasil. Berikut adalah profil usahatani petani peserta program di nagari Paru

Tabel 4. profil usahatani petani peserta program di Nagari Paru

No	Keterangan	Jumlah (%) (orang)
1	Luas lahan padi yang dimiliki saat ini	
	a. 0 ha	12 (34,3%)
	b. 0,25 ha	16 (45,7%)
	d. 0,5 ha	3 (8,6%)
	c. 1 ha	4 (11,4%)
2	Indeks Pertanaman (IP): 2	35 (100%)
3	Komoditi yang diusahakan saat ini	
	a. Padi saja	1 (2,8%)
	b. Karet saja	13 (40%)
	c. Padi dan karet	21 (57,2%)
4	Rata-rata produktifitas padi: 4 Ton/Ha	

Dari tabel di atas terlihat bahwa ada 34,3% petani yang tidak memiliki lahan padi sawah sebelumnya. Sedangkan yang memiliki lahan padi sendiri sebagian besar luasnya adalah 0,25 Ha. Indeks pertanaman padi adalah sebesar 2 dengan kondisi irigasi umumnya adalah tadah hujan.Selain komoditi padi sawah petani juga mengusahakan komoditi karet dari 35 responden 34 orang diantaranya memiliki kebun karet. Sebelumnya karet memang menjadi komoditi unggulan di Kabupaten Sijunjung.

B. Kesiapan petani dalam menerima program pencetakan sawah baru

Kesiapan petani dalam hal ini dilihat dari aspek pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan budi daya padi sawah serta sikap terhadap program pencetakan sawah baru. Dari hasil penelitian didapatkan data sebagai berikut:Pengetahun mengenai budidaya padi sawah mendapatkan skor sebesar 2,24 yang masuk kategori kurang mengetahui. Lebih rinci mengenai jumlah petani berdasarkan tigkat pengetahuan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5. Jumlah petani penerima program berdasarkan pengetahuan berusaha tani padi sawah

No	Tingkat pengetahuan	Jumlah (orang)
1.	Mengetahui	17 (48,5%)
2.	Kurang mengetahui	16 (45,7%)
3.	Tidak mengetahui	2 (5,8%)
	Jumlah	35 (100%)

Aspek pengetahun atau aspek kognitif merupakan ranah penting yang membentuk peilaku petani dalam berusahatani. Pengeahuan petani umumnya didapat secara turun temurun ditambah dengan hasil interaksi dengan sesama petani dan kegiatan penyuluhan. Karena sebagian besar petani berasal dari keluarga petani pekebun (komoditi karet) maka pengetahuan yang mereka dapatkan secara turun temurun sebagian besar adalah pengetahuan berusahatani karet. Begitu pula dengan lingkungan sosialnya yang juga adalah para petani karet. Jadi dapat dipahami jika sebagian besar petani tidak atau kurang memiliki pengetahuan dalam berusahatani padi sawah.

Keterampilan didapatkan dari hasil praktek berusahatani. Biasanya semakin banyak pengalaman dalam berusahatani maka keterampilan petani akan meningkat. Keterampilan masuk kategori atau ranah psikomotorik dari aspek perilaku. Rata-rata skor petani untuk aspek keterampilan adalah sebesar 2,14 yang berarti masuk kategori kurang terampil. Berikut rincian jumlah petani berdasarkan tingkat keterampilan

ISBN :
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 6. Jumlah petani penerima program berdasarkan keterampilan berusaha tani padi sawah

No	Tingkat keterampilan	Jumlah (orang)
1.	Terampil	17 (48,5%)
2.	Kurang terampil	12 (34,5%)
3.	Tidak terampil	6 (17%)
	Jumlah	35 (100%)

Data di atas menunjukan bahwa lebih dari separo petani merasa kurang hinga tidak terampil. Keterampilan bisa ditingkatkan melalui pelatihan.

Berikutnya penilaian terhadap sikap. Sikap merupakan merupakan kecenderungan untuk berperilaku dengan cara tertentu terhadap objek sikap (Sobur, 2013). Dengan kata lain Baldwin (1905) dan Allport [4] mengatakan bahwa sikap adalah kesiapan untuk bereaksi atau berperilaku. Jadi jika kita bisa mengetahui bagaimana sikap seseorang atau sekelompok orang terhadap objek tertentu, maka hal tersebut dapat dijadakan dasar untuk menduga reaksi yang akan ditimbulkan terhadap objek sikap. Dalam hal ini perlu untuk menilai sikap petani terhadap program pencetakan sawah baru sebagai dasar untuk memprediksi bagai mana reaksi atau perilaku petani ketika menerima program tersebut. Secara umum petani menampakan sikap yang positif terhadap program ini terlihat dari rata-rata skor sebesar 2,5. Berikut rincian sikap petani terhadap program pencetakan sawah baru.

Tabel 7. Sikap petani terhadap program pencetakan sawah baru

No	Sikap	Jumlah (orang)
1.	Setuju	32 (91%)
2.	Kurang setuju	3 (9%)
3.	Tidak setuju	0 (0%)
	Jumlah	35 (100%)

Dari tabel di atas terlihat bahwa hampir semua petani (91%) setuju dengan adanya program pencetakan sawah baru ini. Hal ini dapat dipahami karena saat ini komoditi karet yang biasa mereka tekuni harganya sedang tidak menggembirakan (Rp 5000/kg). Jadi dengan hadirnya program pencetakan sawah baru ini, memberikan harapan dan peluang kepada petani untuk meningkatkan pendapatan dengan beralih kekomoditi tanaman pangan.

Sikap positif yang ditunjukan oleh petani memberikan indikasi bahwa petani mendukung program ini. Informasi tersebut dapat dijadikan dasar mengambil kesimpulan bahwa dukungan positif yang diberikan oleh petani merupakan satu langkah maju untuk keberhasilan program.Dari ketiga indikator yang digunakan untuk menilai kesiapan petani, didapatkan rata-rata skor sebesar 2,32 yang berarti masyarakat kurang siap dalam menerima program. Tidak optimalnya skor yang diperoleh terutama disebabkan oleh skor pengetahuan dan keterampilan mengenai budidaya yang secara umum masuk kategori kurang.

Dari data tersebut perlu dipertimbangkan bahwa dengan kondisi tingkat pengetahuan dan keterampilan yang masuk kategori kurang, maka ini tentu berdampak pada ketersediaan tenaga kerja yang akan bekerja di usahatani padi sawah. Selain menyediaakan lahan yang siap untu diolah, pemerintah perlu melengkapi program dengan kegiatan pendampingan dan pelatihan budidaya usahatani padi sawah.

C. Sikap masyarakat umum mengenai program pencetakan sawah baru

Keberhasilan suatu program juga tidak terlepas dari dukungan masyarakat sekitar. Berdasarkan hasil penelitian, maka diperoleh rata-rata skor sikap masyarakat sekitar adalah sebesar 2 artinya masyarakat merasa ragu akan keberhasilan dan keberlanjutan program dimasa datang. Hasil analisa data memang menunjukan bahwa 100% responden masyarakat umum yang bukan penerima merasa ragu akan keberhasilan dan keberlanjutan program pencetakan sawah baru ini. Keraguan ini bisa jadi karena informasi mengenai pencetakan sawah baru memang lebih banyak disosialisasikan kepada petani penerima saja. Sehingga wajar jika masyarakat yang kurang mendapatkan informasi dan penjelasan mengenai program merasa ragu dengan keberhasilan program ini.

Pernyataan yang paling banyak mendapatkan jawaban setuju dari responden adalah:

1. Lahan yang ada lebih baik dimanfaatkan untuk tanaman perkebunan karena lebih menguntungkan.
2. Program pencetakan sawah baru ini mungkin akan menimbulkan masalah di masa depan karena kebutuhan pemukiman terus meningkat sementara lahan yang ada tidak bisa lagi digunakan kerena sudah terikat dengan perjanjian dalam program untuk tidak dialihfungsikan.
3. Keberlanjutan program ini disangsikan karena tidak akan ada yang mengawasi jika masyarakat menggunakan lahan tersebut untuk keperluan lain.

Pernyataan di atas memang tidak ditanyakan kepada petani penerima program. Hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa jawaban yang lebih objektif terhadap pernyataan tersebut lebih mungkin didapatkan dari masyarakat sekitar yang tidak menerima program.

Data ini perlu diperhatikan oleh pemerintah, karena ke depan mengandung potensi masalah. Secara umum petani memiliki kebun karet, jika harga komoditi karet membaik, maka akan ada kemungkinan besar masyarakat lebih memilih intensif mengelola karet dibanding padi sawah, yang berarti lahan sawah akan terlantar. Pontensi masalah berikutnya terkait kemungkinan ke depan akan terjadi alih fungsi lahan sawah karena kebutuhan akan pemukiman dan bisa juga karena tidak adanya pengawasan

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Petani penerima program pencetakan sawah baru kurang siap menerima program karena kurangnya tingkat pengetahuan dan keterampilan petani dalam budidaya padi sawah.
2. Masyarakat meragukan keberlanjutan program di masa datang karena akan ada kemungkinan pengalihan lahan sawah dan tidak adanya pengawasan

B. Saran

1. Pemerintah sebaiknya melengkapi program dengan pelatihan dan pendampingan untuk mengatasi masalah kurangnya pengetahuan dan keteramplan petani dalam berusahatani.
2. Untuk memastikan keberlanjutan program, perlu dibuat sebuah mekanisme atau aturan yang dapat memastikan agar lahan sawah yang sudah dicetak dimasa depan tidak dialihfungsikan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Schoorl. J.W,. Modernisasi, Pengantar Sosiologi negara-negara Sedang Berkembang,. Gramedia, Jakarta. 1980.Sobur. Alex, Psikologi Umum, Pustaka Setia, Bandung. 2003

[2] Hudaya, zusnan Hadi. Kodim 0310/SSD Sawah baru siap Cetak 100Ha. Diunduh dari www.harianhaluan.com/mobile/detailberita/48515/kodim tanggal 17 Maret 2016.

[3] Creswell. Jonh. W, Research Desighn, Penerbit KIK Press Jakarta, 1994.

[4] Sobur. Alex, Psikologi Umum, Pustaka Setia, Bandung. 2003.

[5] Kompas.com. Mentan:2016 Pemerintah Cetak sawah baru lebih Banyak. Diunduh dari www.bisniskeuangan.kompas.com/ tanggal 1 Maret 2016..

ISBN :
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH PERTANIAN TERHADAP PENGEMBANGAN AGROINDUSTRI DI KABUPATEN LIMAPULUH KOTA

Rini Hakimi[1], Melinda Noer[2], Nofialdi[2], Hasnah[2]

[1]Program Studi Ilmu-ilmu Pertanian, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas
[2]Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Andalas

E-mail: *rini.hakimi@gmail.com*

Naskah diterima : 16 Februari 2017Naskah direvisi : 10 Maret 2017Disetujui terbit : 13 Maret 2017

ABSTRAK

Perencanaan pemanfaatan ruang di Indonesia pada setiap daerah dituangkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Setiap RTRW idealnya memuat zona pemanfaatan ruang untuk seluruh kegiatan yang memerlukan ruang secara detail, yang menjadi acuan bagi penggunaan ruang pada suatu daerah, sehingga rencana pengembangan wilayah yang dilakukan tepat sasaran. Selain itu, keterkaitan perencanaan pemanfaatan ruang antar sektor juga perlu diselaraskan dalam perencanaan pengembangan wilayah. Diantaranya keterkaitan rencana pengembangan wilayah pertanian yang berkaitan dengan rencana pengembangan agroindustri sebagai industri olahannya yang dapat meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Berkaitan dengan hal tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan rencana pengembangan wilayah pertanian dengan pengembangan agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dari data dan informasi yang dikumpulkan melalui studi dokumen, pengamatan lapangan dan indepth interview. Berdasarkan hasil penelitian ini terlihat bahwa rencana pengembangan wilayah pertanian di Kabupaten Limapuluh Kota sudah tertuang dalam sebuah kebijakan yang memuat lokasi kawasan yang terdiri dari beberapa kecamatan, namun belum detail titik-titik lokasinya. Sedangkan rencana pengembangan agroindustri masih sangat umum, belum dinyatakan dengan tegas jenis agroindustri yang dikembangkan berdasarkan potensi kawasan pertanian maupun potensi komoditi pertanian yang tersedia di Kabupaten Limapuluh Kota, juga belum ditetapkan secara rinci lokasi pengembangan agroindustri.

Kata kunci: *pengembangan wilayah, pertanian, agroindustri*

PENDAHULUAN

Pembangunan pertanian merupakan bagian dari pembangunan ekonomi dan masyarakat secara menyeluruh yang dilaksanakan secara terencana [1]. Upaya pembangunan pertanian dilaksanakan oleh setiap daerah dalam upaya meningkatkan perekonomian domestik guna meningkatkan dan memperluas kesejahteraan rakyat. Perencanaan pembangunan suatu daerah harus memiliki sinergi antara berbagai dokumen mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) [2]. Sektor pertanian di Kabupaten Limapuluh Kota menjadi sektor unggulan dan memberikan kontribusi yang tinggi terhadap PDRB Kabupaten Limapuluh Kota [3].

Pendekatan pembangunan pertanian yang dilaksanakan di Indonesia adalah pengembangan wilayah [4, 5]. Pengembangan wilayah pertanian pada suatu daerah seharusnya berpedoman pada dokumen perencanaan pembangunan yang selaras dengan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang ada di suatu daerah yang kemudian didukung dengan peraturan atau kebijakan daerah terkait dengan pengembangan yang dilakukan. Zona pemanfaatan ruang untuk pertanian secara detail sebaiknya dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) agar pengembangan wilayah pertanian yang dilakukan tepat sasaran dan

berkelanjutan. Selain itu, pengembangan wilayah pertanian sangat erat kaitannya dengan kebijakan pengembangan industri olahan atau agroindustri di suatu wilayah. Namun dalam pelaksanaannya, pengembangan wilayah pertanian sering tidak berkelanjutan karena adanya pergeseran penggunaan ruang pada suatu wilayah. Selain itu, pengembangan wilayah pertanian belum memperhatikan keterkaitannya dengan pengembangan lokasi industri olahannya. Hal ini diduga karena lemahnya peraturan yang berkaitan dengan lahan pertanian berkelanjutan serta belum adanya keselarasan antara dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJPD, RPJMD, RKPD) dengan dokumen RTRW dan RDTR serta Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) yang dibuat oleh suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Oleh karena itu perlu dilakukan sebuah kajian yang membahas tentang perencanaan pengembangan wilayah pertanian dalam kaitannya dengan pengembangan agroindustri di suatu wilayah.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Penggunaan metode ini karena penelitian ini ingin memperoleh pemahaman yang mendalam tentang keterkaitan antara perencanaan pengembangan wilayah pertanian dengan pengembangan agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota. Hal ini sejalan dengan pernyataan yang menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan sebuah penelitian yang menekankan pada pemahaman dengan analisis yang mendalam terhadap suatu masalah atau fenomena sosial [6, 7]. Teknik pengumpulan data dan informasi melalui studi dokumentasi, observasi dan *indept interview*. Studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen perencanaan pembangunan baik yang sifatnya nasional, propinsi maupun kabupaten; dokumen tata ruang, dokumen peraturan; dokumen rencana strategis dan rencana kerja dari dinas pertanian dan dinas perindustrian dan perdagangan Kabupaten Limapuluh Kota. Observasi dilakukan di beberapa wilayah yang menjadi sentra komoditi pertanian dan kegiatan agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota. Sedangkan wawancara mendalam (indepth interview) dilakukan terhadap aparatur Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Perindustrian, Dinas Pekerjaan Umum (PU), serta beberapa aparatur Kecamatan dan Nagari yang terdapat di Kabupaten Limapuluh Kota. Data yang dikumpulkan berupa data primer yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara serta data sekunder yang diperoleh dari hasil studi dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perencanaan Pengembangan Ruang Wilayah

Dasar hukum penyusunan Rencana Pembangunan (RP) adalah UU No. 25 Tahun 2004, UU 32 Tahun 2004 dan UU 33 Tahun 2004, sedangkan dasar hokum penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) adalah UU No. 26 Tahun 2007. Keempat UU tersebut kemudian didetailkan dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden dan Peraturan Menteri.

RPJPN menjadi pedoman dalam merumuskan RPJPD. Selanjutnya RPJPN menjadi pedoman dalam merumuskan RPJMN yang dijabarkan lebih lanjut dalam RKP. Sementara itu, RPJPD menjadi pedoman dalam merumuskan RPJMD yang selanjutnya dijadikan acuan dalam merumuskan Renstra SKPD. Adapun keterkaitan antara dokumen perencanaan daerah dapat dilihat pada gambar dibawah ini

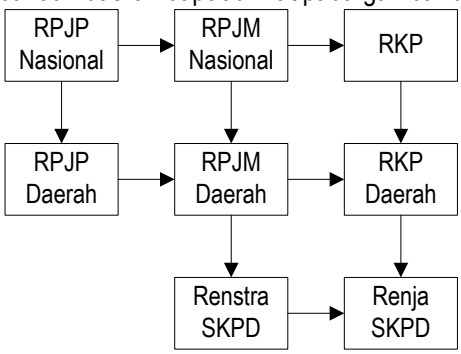

Gambar 1. Keterkaitan Dokumen Rencana Pembangunan

Berdasarkan gambar diatas terlihat bahwa dokumen rencana pembangunan saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sehingga pembuatan dokumen seharusnya dilakukan pada waktu yang berjenjang. Namun kenyataan di lapangan, dokumen rencana pembangunan tersebut terkadang harus diselesaikan pada waktu yang bersamaan, sehingga terjadi ketidaksinkronan antara dokumen tersebut, misalnya pada dokumen RPJP Kabupaten Limapuluh Kota terdapat pernyataan bahwa komoditi unggulan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

adalah padi, ubi kayu, gambir, pisang, jagung, karet, cabe, hal ini tidak ditindaklanjuti dalam RPJM Kabupaten. Dimana dalam RPJM belum dinyatakan dengan tegas bahwa komoditi palawija dan buah-buahan juga merupakan komoditi yang menjadi unggulan untuk ditingkatkan pemasaran dan pengembangannya. Pada RPJM hanya menyebutkan komoditi unggulan pertanian, namun tidak diikuti dengan penjelasan jenis atau kategori komoditi unggulan.

Selanjutnya berkaitan dengan upaya pengembangan wilayah termasuk wilayah untuk pertanian, maka dokumen perencanaan pembangunan harus selaras dengan RTRW suatu wilayah. RTRW disusun secara hirarki dengan memperhatikan kepentingan nasional, propinsi dan kabupaten/kota. Lebih lanjut dalam UU no 26 tahun 2007 tentang penataan ruang dapat diilustrasikan keterkaitan antara berbagai dokumen penataan ruang seperti yang terlihat pada Gambar 2.

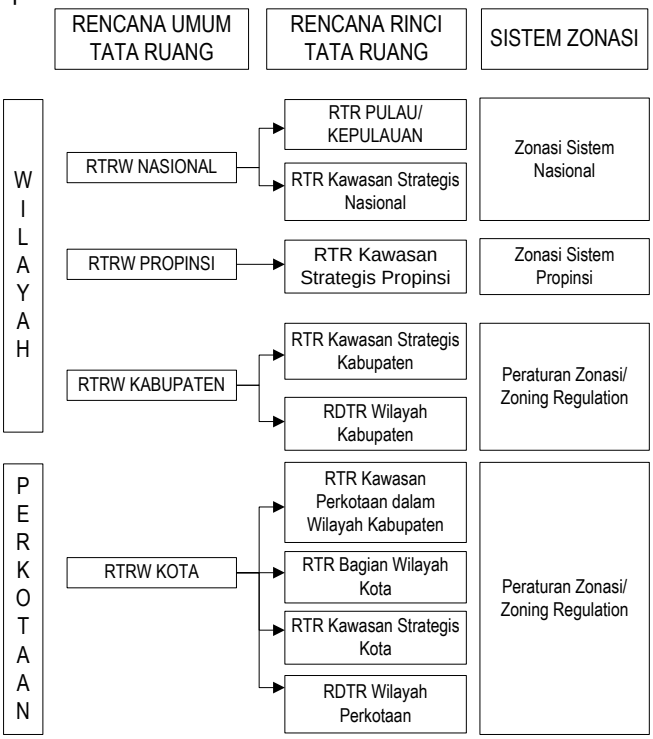

Gambar 2. Hirarki Perencanaan Tata Ruang

Berdasarkan Gambar 2 diatas terlihat bahwa dokumen RTRW Kabupaten diikuti dengan dokumen RTR Kawasan Strategis dan RDTR Wilayah Kabupaten, namun kenyataan di Kabupaten Limapuluh Kota, belum ada dokumen RDTR yang lengkap yang dapat dipedomani dalam penataan ruang dan wilayah di Kabupaten Limapuluh Kota, sehingga penyimpangan penggunaan ruang terjadi dibeberapa wilayah misalnya lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan non pertanian.

Proses rencanapembangunan daerah diharapkan memiliki keterpaduan dengan proses perencanaan tata ruang yang mengarahkan pada perencanaan pengembangan wilayah [8]. Hal ini memberikan arti bahwa dokumen RTRW harus selaras dengan dokumen rencana pembangunan baik RPJP, RPJM dan RKPD.

RTRW merumuskan pemanfaatan ruang suatu wilayah yang menjadi lokasi pembangunan yang dilakukan oleh sektor, sehingga dalam merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang harus mengacu pada visi pembangunan wilayah. Visi pembangunan wilayah diturunkan menjadi misi dan arah pembangunan wilayah yang dituangkan Rencana Pembangunan (RP) dan menjadi acuan bagi arahan pemanfaatan ruang yang dituangkan dalam RTRW.

Selanjutnya, peruntukan ruang wilayah seharusnya memuat detail zona agar pemanfaatan ruang tepat sasaran. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik lingkungan yang spesifik, maka zona dipastikan memiliki suatu identitas atau ciri yang berbeda dari area lain disekitarnya. Zona yang ditetapkan dalam sebuah RTRW Propinsi menjadi pedoman untuk wilayah pengembangan yang ditetapkan dalam RPJP propinsi dan RPJM propinsi, yang didetailkan melalui renstra SKPD. Selanjutnya pada masing-masing kabupaten dan kota ditetapkan renstra masing-masing SKPD yang berkaitan dengan RTRW kabupaten/kota.

Keterkaitan antara rencana pembangunan dan rencana tata ruang dapat dilihat pada Gambar 3.

ISBN : 978-602-73463-1-4

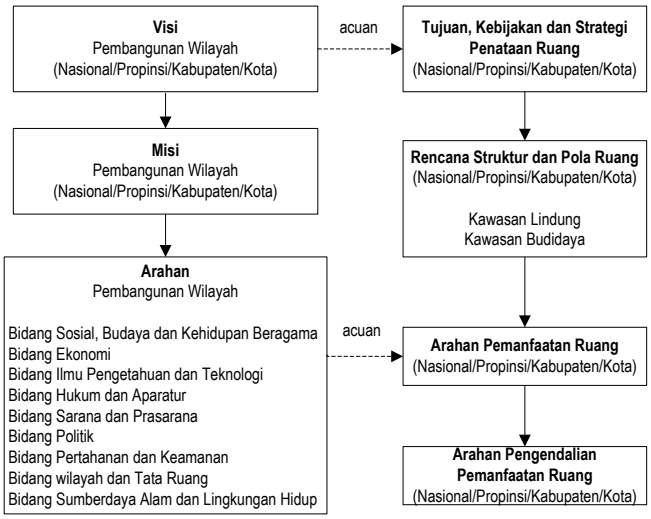

Gambar 3. Keterkaitan Antara Rencana Pembangunan (RP) dengan Rencana Tata Ruang (RTR) [9]

Perencanaan Pengembangan Wilayah Pertanian di Kabupaten Limapuluh Kota

Konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumberdaya merupakan salah satu konsep pengembangan wilayah yang diterapkan di Indonesia. Konsep ini memiliki beberapa pendekatan, yaitu pengembangan wilayah berbasis sumberdaya, pengembangan wilayah berbasis komoditas unggulan, pengembangan wilayah berbasis efisiensi, pengembangan wilayah berbasis pelaku pembangunan [10]. Berdasarkan konsep ini, maka perencanaan pengembangan wilayah pertanian berpedoman pada potensi komoditi unggulan di suatu daerah.

Komoditi pertanian yang memiliki produksi potensial di Kabupaten Limapuluh Kota sebanyak 27 komoditi (Tabel 1). Potensi ini dihitung berdasarkan pada potensi produksi yang dibandingkan dengan produksi rata-rata Propinsi Sumatera Barat, kecenderungan produksi per tahun dan sebaran wilayah produksi dari komoditi yang bersangkutan.

Diantara komoditi potensial ini yang menjadi komoditi unggulan adalah padi, jagung, ubi kayu, cabe, pisang, gambir dan karet [11].

Tabel 1. Potensi Produksi Komoditi Pertaniandi Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2014 (Ton)

No	Komoditi	KabupatenLimapuluh Kota	PropinsiSumbar	Rata-rata PropinsiSumbar
	TanamanPangan			
1	Padi	217.366	2.519.020	132.580
	TanamanPalawija			
1	Jagung	20.793	605.352	31.861
2	UbiKayu	73.249	217.962	11.472
3	UbiJalar	12.635	159.865	8.414
4	Kacang Tanah	492	7.410	390
	Hortikultura		-	-
1	Kacangpanjang	1.025	11.292	594
2	Caberawit	561	7.496	395
3	Cabe	3.521	59.390	3.126
4	Terung	2.589	34.585	1.820
5	Buncis	1.291	22.918	1.206
6	Ketimun	2.313	20.693	1.089
	Buah-buahan		-	-
1	Pisang	13.906	138.912	7.311
2	Jeruk	8.229	55.180	2.904
3	Rambutan	2.238	14.899	784

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

4	Alpokat	625	4.621	243
5	Manggis	1.553	14.913	785
6	Sirsak	163	1.218	64
7	Jengkol	386	6.454	340
	Perkebunan			-
1	Karet	12.427	151.145	7.955
2	Kelapadalam	6.152	82.904	4.363
3	Tembakau	920	1.349	71
4	Kopi arabika	1.415	15.656	824
5	Gambir	10.722	17.160	903
6	Enau	373	1.228	65
7	Kakao	4.650	81.044	4.265
8	Pinang	917	9.201	484
9	Kopi robusta	1.233	17.966	946

Sumber : [12, 13]

Rencana pengembangan wilayah komoditi pertanian berbasis komoditi unggulan ini telah dituangkan dalam RPJPD, RPJMD dan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota [11, 14, 15]. Lebih lanjut didukung dengan Surat Keputusan Bupati Kabupaten 50 Kota No 678 tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota yang menetapkan kawasan pengembangan komoditi unggulan melalui program Kawasan Sentra Produksi (KSP). Kawasan pengembangan yang ditetapkan dikategorikan pada tiga kelompok yaitu kawasan pengembangan pangan, hortikultura dan perkebunan [16]. Namun terdapat beberapa komoditi potensial yang belum termasuk dalam kawasan pengembangan seperti ubi jalar, kacang tanah, kacang panjang, cabe rawit, terung, buncis, ketimun, rambutan, alpokat dan pinang. Selain itu juga belum ditetapkan detail wilayah atau zonasi yang dijadikan pusat pengembangan.

Terkait dengan pengembangan wilayah pertanian, dalam RTRW baru dinyatakan beberapa kawasan strategis seperti kawasan pertanian lahan basah yang terdapat di Kecamatan Payakumbuh Nagari Sungai Beringin, yang terdapat di Kecamatan Suliki yaitu Nagari Sungai Rimbang dan untuk Akabiluru terdapat di Nagari Batu Hampa, kawasan agropolitan yang ditetapkan di Kecamatan Mungka dan kawasan taram sebagai kawasan yang memiliki potensi pertanian dan wisata [17]. Penetapan kawasan ini ada yang sudah menguraikan lokasi nagarinya namun ada juga yang belum detail. Selain itu, belum ditetapkan dalam RTRW dan RDTR kawasan pertanian hortikulura, tanaman palawija dan tanaman perkebunan. Hall iniah yang menjadi penyebab kekeliruan pemanfaatan rungag. Untuk mengatasinya maka dalam penataan ruang sangat diperlukan koordinasi dari beberapa instansi melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) [18].

Pada umumnya komoditi unggulan Kabupaten Limapuluh Kota lebih banyak dijual dalam bentuk segar atau bahan setengah jadi yang menjadi bahan baku bagi industri lanjutan seperti gambir mentah. Salah satu pasar utama komoditi pertanian Kabupaten Limapuluh Kota adalah Propinsi Riau karena Kabupaten Limapuluh Kota terletak pada jalur strategis sebagai penghubung kota-kota di Propinsi tersebut. Hal ini sangat disayangkan karena adanya potensi peningkatan nilai tambah dari komoditi pertanian melalui kegiatan agroindustri baik pada tingkatan/level 1 (pembersihan, pengelompokkan), level 2 (pemintalan, penggilingan, pemotongan, pencampuran), level 3 (pemasakan, pasteurisasi, pengalengan, penguapan, pembekuan, pen enunan, ekstraksi, perakitan) maupun pada level 4 (perubahan kimia , pembentukan) [19].

Rencana Pengembangan Agroindustri Berbasis Komoditi Unggulan di Kabupaten Limapuluh Kota

Pengembangan kawasan pertanian memiliki beberapa tujuan, salah satunya adalah peningkatan nilai tambah melalui peningkatan kontinuitas dan kualitas untuk pemenuhan kebutuhan industri pengolahan [5]. Pengembangan kawasan industri yang dikembangkan di Indonesia diantaranya Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) dan Kawasan Agropolitan [5, 20].

Industri pengolahan hasil pertanian dikenal dengan istilah agroindustri, dimana dalam pengembangannya sangat ditentukan oleh ketersediaan sumberdaya komoditi pertanian yang digunakan sebagai bahan baku untuk menghasilkan sebuah produk [19, 21-23]. Produk agroindustri dapat berupa produk akhir yang siap untuk dikonsumsi ataupun sebagai produk bhan baku industri lain [19].

Pengembangan industri pengolahan produk pertanian (agroindustri) dan peningkatan kemampuan teknologi industri menjadi salah satu rencana pembangunan yang dilaksanakan di Kabupaten Limapuluh Kota. Hal ini tertuang dalam RPJPD, RPJMD dan Rencana Strategis Dinas Perindustrian Kabupaten Limapuluh Kota. Dalam dokumen yang tersedia menyatakan bahwa salah satu agroindustri yang menjadi prioritas adalah industri pengolahan gambir [11, 14, 24]. Hal ini memperlihatkan bahwa SKPD terkait yaitu Dinas Perindustrian belum menindaklanjuti dengan detail apa yang dirumuskan dalam RPJPD dan RPJMD karena dalam kedua dokumen tersebut dinyatakan bahwa belum berkembangnya industri pengolahan sehingga perlu dilakukan program pengembangan sentra-sentra industri potensial melalui strategi membangun industri unggulan yang berpedoman pada komoditi unggulan, dimana komoditi unggulan Kabupaten Limapuluh Kota adalah padi, ubi kayu, gambir, pisang, jagung, karet, cabe. Namun dalam dalam dokumen renstra Dinas Perindustrian belum dituangkan pengembangan industri olahan padi, ubi kayu, pisang, jagung, karet dan cabe. Industri olahan yang dituangkan pengembangannya dalam renstra adalah gambir.

Padahal dengan tegas dinyatakan bahwa komoditi unggulan seperti padi, jagung, ubi kayu, cabe, pisang, karet juga berpotensi dikembangkan agroindustrinya. Agroindustri yang mungkin dikembangkan adalah pembuatan tepung beras, pakan ternak, makanan, bumbu dapur, crumb rubber. Ubi kayu sebagai komoditi yang paling produktif dapat dikembangkan menjadi industri makanan ringan seperti keripik, kerupuk, tepung ubi, dakak-dakak, kue sarang balam dan lain-lain. Apalagi di Kabupaten Limapuluh Kota banyak potensi UKM yang bergerak dibidang pengolahan ubi kayu. Selain itu, roadmap pengembangan industri unggulan Propinsi Sumatera Barat juga menyatakan bahwa salah satu industri unggulan Sumatera Barat adalah industri makanan ringan seperti kerupuk, kripik, peyek dan lain-lain [25]. Oleh karena itu, perumusan rencana pengembangan agroindustri ubi kayu ini perlu dicermati dengan seksama oleh Dinas Perindustrian Kabupaten Limapuluh Kota.

Terkait wilayah pengembangan agroindustri, Dinas Perindustrian Kabupaten Limapuluh Kota belum menguraikan dengan detail wilayah pengembangan agroindustri yang berpedoman pada pengembangan wilayah pertanian dan peningkatan kemampuan teknologi seperti apa yang diperlukan untuk pengembangan agroindustri di Kabupaten Limapuluh Kota. Hal ini memperlihatkan masih terbatasnya dokumen perencanaan pengembangan agroindustri yang berbasis komoditi unggulan di Kabupaten Limapuluh Kota.

Jika ditelaah dari dokumen RTRW, dalam RTRW juga belum diuraikan wilayah strategis pengembangan agroindustri, padahal dalam RPJP dan RPJM dinyatakan dengan tegas perlunya rencana pengembangan industri pengolahan hasil pertanian (agroindustri). Hal ini juga memperlihatkan masih terbatasnya informasi yang disediakan pada dokumen perencanaan pemanfaatan ruang di Kabupaten Limapuluh Kota.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Perencanaan pengembangan wilayah pertanian di Kabupaten Limapuluh Kota ditetapkan berdasarkan komoditi unggulan di daerah tersebut, hal ini sudah dilakukan oleh pemerintah daerah yang diawali dengan pembuatan RPJPD dan RPJMD, selanjutnya Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan juga telah menindaklanjuti bahkan pengembangan kawasan pertanian ini didukung dengan SK Peraturan Bupati Kabupaten Limapuluh Kota. Namun demikian, belum semua komoditi unggulan dinyatakan dengan tegas dalam dokumen perencanaan yang ada. Demikian juga dengan dokumen RTRW baru menyatakan beberapa wilayah strategis pengembangan pertanian, selain itu belum tersedia dokumen tata ruang yang menetapkan zonasi pengembangan wilayah pertanian di Kabupaten Limapuluh Kota.

Rencana pengembangan wilayah pertanian seharusnya sejalan dengan pengembangan industri olahannya (agroindustri), namun Dinas Perindustrian sebagai dinas terkait belum menindaklanjuti dengan detail agroindustri yang seharusnya dikembangkan, masih ada agroindustri komoditi unggulan yang belum dinyatakan dalam dokumen rencana pengembangan industri di Kabupaten Limapuluh Kota, walaupun dalam RPJPD dan RPJMD sudah dinyatakan dengan tegas perlunya pengembangan agroindustri komoditi unggulan yang terdapat di Kabutaen Limapuluh Kota. Selain itu, dalam dokumen RTRW juga belum dinyatakan wilayah strategis pengembangan agroindustri.

Saran

Berkaitan dengan hasil penelitian ini, beberapa hal yang disarankan adalah :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan perlu lebih mendetailkan komoditi dan wilayah pengembangan pertanian yang didukung dengan perbaikan dokumen tata ruang melalui penetapan zonasi wilayah pengembangan komoditi pertanian di Kabupaten 50 Kota.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

2. Dinas Perindustrian perlu melakukan identifikasi lebih detail tentang agroindustri yang sebaiknya dikembangkan dan lokasi pengembangannya dengan berpedoman pada komoditi unggulan daerah, hal ini juga memerlukan dukungan dokumen tata ruang terkait dengan wilayah strategis pengembangan agroindustri

DAFTAR PUSTAKA

[1] A. Mosher, Getting Agricultural Moving. New York: A Praegr, Inc Publisher, 1966.

[2] BPPN, Buku Pegangan Perencanaan Pembangunan Daerah 2012-2013 : Memperkuat Perekonomian Domestik bagi Peningkatan dan Perluasan Kesejahteraan Rakyat. Jakarta: Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 22012.

[3] Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 P. D. K. Kota, 2011.

[4] BAPPENAS, Tata Cara Perencanaan Pengembangan Kawasan : Untuk Percepatan Pembangunan Daerah. Jakarta: BAPPENAS, 2004.

[5] Kementan, Manajemen Pengembangan Kawasan Pertanian. Jakarta: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia, 2015.

[6] J. W. Creswell, Research Design : Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches. nited States of America: SAGE Publications, Inc., 2014.

[7] L. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.

[8] E. Rustiadi, S. Saefulhakim, and D. R. Panuju, Perencanaan dan Pengembangan Wilayah. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2011.

[9] BAPPENAS, "Integrasi Rencana RTRW, RPJP dan RPJM," B. P. P. N. (BAPPENAS), Ed., ed. Jakarta: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2012.

[10] BAPPENAS, Pengembangan Ekonomi Daerah Berbasis Kawasan Andalan : Membangun Model Pengelolaan dan Pengembangan Keterkaitan Program. Jakarta: Direktorat Pengembangan Kawasan Khusus dan Tertinggal Deputi Bidang Otonomi Daerah dan Pengembangan Regional. BAPPENAS., 2006.

[11] Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor : 10 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2005-2025 P. K. L. Kota, 2011.

[12] BPS, "Kabupaten Lima Puluh Kota dalam Angka 2016," ed. Kabupaten Lima Puluh Kota: Badan Pusat Statistik Kabupaten Lima Puluh Kota, 2016.

[13] BPS, Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2015. Padang, Sumatera Barat.: Badan Pusat Statistik, Provinsi Sumatera Barat, 2015.

[14] Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2016-2021, P. K. L. Kota, 2016.

[15] Rencana Strategis Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota, H. d. P. K. L. K. Dinas Tanaman Pangan, 2015.

[16] Keputusan Bupati Limapuluh Kota Nomor 678 Tahun 2013 tentang Penetapan Kawasan Pertanian Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Limapuluh Kota, 2013.

[17] Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Limapuluh Kota Tahun 2011-2031, B. P. P. D. B. K. L. Kota, 2010.

[18] MENDAGRI, "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Pedoman Koordinasi Penataan Ruang Daerah ", ed. Jakarta: Kementerian Dalam Negri, Pemerintah Republik Indonesia, 2009.

[19] J. E. Austin, Agroindustry Project Analysis. USA: The Johns Hopkins University Press, 1981.

[20] Kementan, Metode Perencanaan Pertanian. Jakarta: Biro Perencanaan, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pertanian, Republik Indonesia 2014.

[21] J. G. Brown, Agroindustrial Investment and Operations. Washington D.C: The World Bank, 1994.

[22] S. Henson and J. Cranfield, "Building the Political Case for Agro-industries and Agribusiness in Developing Countries," in Agro-Industries For Development, C. A. d. Silva, D. Baker, A. W. Shepherd, C. Jenane, and S. Miranda-da-Cruz, Eds., ed USA: The Food and Agriculture Organization of the United Nations and The United Nations Industrial Development Organization, CAB International, 2009.

[23] Soekartawi, Pengantar Agroindustri. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2001.

[24] Rincana Strategis Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Limapuluh Kota, P. d. P. K. K. Dinas Koperasi, 2010.
[25] Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia NOMOR : 93/M-IND/PER/8/2010 tentang Peta Panduan (Road Map) Pengembangan Industri Unggulan Provinsi Sumatera Barat 2011.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TEMA C

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR DAN KEMARITIMAN

KAJIAN DAYA DUKUNG LAHAN TERHADAP TEKANAN PENDUDUK DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

Fitriana Syahar[1)]

[1]Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Geografi, Universitas Negeri Padang

Email: fitriana.syahar@gmail.com

Naskah diterima :10 Desember 2016 Naskah direvisi : 8 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Di Kecamatan Nanggalo, pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya membutuhkan luasan lahan yang lebih. Kondisi ini, berakibat pada tekanan lahan tertentu dengan fungsi dan peruntukkannya.Ditambah pula dengan kebijakan pembangunan tentang arahan pengembangan kawasan permukiman Kota Padang yang salah satu wilayah tujuan pengembangannnya adalah Kecamatan Nanggalo.Didasari kondisi ini, mengemuka beberapa hal yang perlu diamati dan dianalisis terkait tekanan, alih fungsi lahan serta kemampuan lahan di Kecamatan Nanggalo.Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah mengetahui daya dukung lahan di Kecamatan Nanggalo dan mengukur tingkat tekanan penduduk terhadap lahan pertaniannya. Metode yang digunakan untuk mencapai maksud dan tujuan penelitian dengan pendekatan tematis kuantitatif, formula dan konsep Otto Soemarwoto diadobsi untuk mengetahui daya dukung lahan di Kecamatan Nanggalo yang merupakan nilai kebalikan dari tekanan penduduk terhadap lahan pertaniannnya. Data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari dinas/instansi terkait. Hasil yang diperoleh tentang daya dukung lahan pertanian Kecamatan Nanggalo adalah Daya Dukung Lahan (DDL) < 1, atau daya dukungnya rendah pada rentang waktu (2010 – 2013), dengan indeks berkisar 0.1 hingga 0.2. Kemudian, terjadi tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di Kecamatan Nanggalo pada rentang waktu (2010 – 2013) dengan nilai TP > 1.

***Kata Kunci**: Daya dukung lahan, tekanan penduduk, perkembangan kota*

PENDAHULUAN

Perkembangan suatu daerah dapat terjadi akiba berbagai faktor.Salah satunya yang sangat menentukan adalah kebijakan pemerintah terhadap arahan pengembangan dan pembangunan daerah tersebut. Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Padang Tahun 2010 – 2030, Kota Padang menuju kota metropolitan memuat arahan – arahan pengembangan dan pembangunan kota. Salah satu amanat dari kebijakan ini adalah pengembangan dan pembangunan permukiman. Dalam rangka menyiapkan Kota Padang sebagai kota metropolitan dan menjadi pusat perekonomian khususnya perdagangan, kedepan harus siap menampung peningkatan jumlah penduduk. Kecamatan Nanggalo adalah salah satu wilayah yang menjadi tujuan arahan pengembangan dan pembangunan permukiman di Kota Padang sesuai RTR 2010 – 2030.

Konsekuensi perkembangan dan aktivitas pembangunan adalah kebutuhan lahan yang meningkat, oleh karena aktivitas pembangunan berlangsung di atas lahan dan lahan adalah wadah bagi pelaksanaan pembangunan. Akibat kebijakan pengembangan kota, Kecamatan Nanggalo saat ini sudah mengalami perkembangan yang berdampak pada pengurangan lahan pertanian dan semakin meningkatnya luasan lahan terbangun.

Penelitian terdahulu tentang konversi lahan pertanian (sawah) tahun 2003 – 2013 di Kecamatan Nanggalo adalah 7.2489 Ha dan luas konversi lahan pertanian (sawah) menjadi lahan terbangun (permukiman) sebesar 7.0298 Ha (2003 – 2013). Artinya 96.97% lahan yang terkonversi adalah lahan pertanian (sawah) menjadi lahan permukiman, sedangkan sisanya 3.02% terkonversi ke bentuk penggunaan lahan lainnya. Data publikasi BPS Kota Padang tahun 2013 [1] menyatakan luas lahan Kecamatan Nanggalo sebagian besar

dimanfaatkan untuk lahan pertanian padi sawah dan palawija[1]. Pada tahun 2012 hasil produksi 3.037 ton dan di tahun 2013 hasil produksi padi sawah berkurang menjadi 2.830 ton.Hal ini memberikan gambaran bahwa konsekuensi aktivitas pembangunan di Kecamatan Nanggalo terhadap peningkatan kebutuhan lahan mengakibatkan berkurangnya aktivitas di sektor pertanian. Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2013, penurunan terlihat dari komposisi rumah tangga pertanian atau rumah tangga yang bergerak di bidang pertanian baik usaha maupun jasa dari angka 2.20% tahun 2003 menjadi 1.22% di 2013. Kondisi ini tentunya harus diimbangi dengan ketersediaaan lahan atau daya dukung lingkungan.Dengan demikian jelas bahwa unsur lingkungan/lahan harus menjadi faktor pertimbangan utama dalam aktivitas pembangunan karena pembangunan bersifat dinamis sedangkan daya dukung lingkungan/lahan (*carrying capacity*) bersifat terbatas.

Konsep Daya Dukung Lingkungan

Dalam perkembangan ilmu tanah, pada tahun 1970-an, para pakar mulai banyak mengggunakan istilah lahan (tanah).lahan dalam bahasa Inggrisnya *land*.[12]mengemukakan bahwa lahan merupakan lingkungan fisis dan non fisik yang berkaitan dengan daya dukungnya terhadap perikehidupan dan kesejahteraan hidup manusia. Lingkungan fisik terkait dengan segala faktor yang mempengaruhinya meliputi lereng, kesuburan dan lainnya. Lahan sebagai sumberdaya pokok dalam pembangunan bersifat statis sedangkan kebutuhan akan lahan bersifat dinamis. Oleh karena itu kebutuhan haruslah diimbangi dengan ketersediaan.

Bicara daya dukung adalah perbandingan antara *demand* dan *supply* terkait lahan dan pertumbuhan penduduk serta konsekuensinya dalam memenuhi kebutuhan hidup, dimana ketersediaan lahan bersifat statis harus mampu memenuhi permintaan yang cenderung dinamis. Walaupun dengan kemajuan teknologi kebutuhan akan lahan tersebut bisa diantisipasi. Namun konsekuensinya adalah anggaran yang lebih besar dan technology yang tinggi.

Pada dasarnya kondisi lingkungan tanpa ada faktor katalisator yang mempercepat penurunan kualitasnya yang dalam hal ini adalah manusia, tetap saja lambat laun akan mengalami penurunan kualitas. Oleh karenanya sifat daya dukung lingkungan tidaklah mutlak, tetapi selalu berubah karena keberadaan dan perkembangan teknologi.Namun yang kebanyakan terjadi adalah daya dukung lingkungan kea rah kondisi yang lebih buruk. Kondisi ini akan lebih diperparah oleh tekanan pendudu yang terus meningkat, pada akhirnya akan mempengaruhi kesejahteraan.

Undang – Undang No. 23 tahun 1992 tentang konsep lingkungan hidup, membedakan daya dukung lingkungan menjadi daya dukung alam, daya tamping lingkungan binaan dan daya tamping lingkungan sosial sebagai berikut :

1). Daya dukung alam adalah kemampuan lingkungan alam beserta segenap unsure dan sumberdaya untuk menunjang peri kehidupan manusia serta makhluk lain secara berkelanjutan.
2). Daya tamping lingkungan binaan adalah kemampuan lingkungan manusia dan kelompok penduduk yang berbeda – beda untuk hidup bersama – sama sebagai satu masyarakat secara serasi, selaras, seimbang, rukun, tertib dan aman.

Ruang lingkup daya dukung lingkungan dalam Undang - Undang No. 23/1997, daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain. Menurut Soemarwoto([14] Soemarwoto Otto, 2003), daya dukung lingkungan pada hakekatnya adalah daya dukung lingkungan alamiah, yaitu berdasarkan biomas tumbuhan dan hewan yang dapat dikumpulkan dan ditangkap per satuan luas dan waktu di daerah itu. Undang – Undang terbaru No.32 tahun 2009 tentang pengelolaan lingkungan hidup menyatakan bahwa daya dukung lingkungan hidup diartikan sebagai kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perkehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya[9].

Carrying capacity dalam konteks ekologis adalah jumlah populasi atau komunitas yang dapat didukung oleh sumberdaya dan jasa yang tersedia dalam ekosistem tersebut (Rees dalam Nurhayati, 2009). Hal lain yang terkait defenisi daya dukung adalah lingkup daya dukung, meliputi daya dukung biofisik adalah jumlah penduduk maksimum yang dapat didukung oleh sumberdaya dengan tingkat teknologi tertentu[10].

Kota dan Perkembangannya

Kota sebagai suatu zona atau daerah yang merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintahan serta pemusatan penduduk, kota akan berkembang dengan cepat dengan perubahan – perubahan di segala bidang. Salah satunya adalah perubahan pada kenampakan fisik kekotaannya. Konsekuensi perkembangan kota secara horizontal disebut juga dengan gerakan sentrifugal [16]. Untuk melihat perkembangan kota melalui pendekatan morfologi kota dalam tinjauan fisik atau morfologi menekankan pada bentuk-bentuk kenampakan fisikal dari lingkungan kota[3], memperkenalkan 3 unsur morfologi kota sebagai ciri identifikasi fisik/morfologi kota yaitu

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

penggunaan lahan, pola-pola jalan dan tipe atau karakteristik bangunan. Sementara itu[6] juga mengemukakan unsur -unsur yang serupa dengan dikernukakan conzen, yaitu *plan, architectural style and land use.*
Menilik hal tentang kota merupakan topik yang menarik, karena sebagian besar penduduk dunia bertempat tinggal dan bekerja di kota. Prediksi habitat menurut ungkapan[7] pada tahun 2020, jumlah penduduk kota dunia mencaai 57% dan dari seluruh negara berkembang, 34% urbanisasi disumbangkan "hanya" oleh lima negara yang salah satunya termasuk Indonesia. Hal ini wajar terjadi karena adanya pandangan terhadap perbedaan tingkat penghidupan (*livelihood*) kota dan desa, adanya perilaku: keinginan untuk meningkatkan taraf hidup dan keterbatasan sumberdaya alam, keterbatasan akses kepada aset ekonomi.

Perkembangan kota ditandai dengan bertambah luasnya area perkotaan /terbangun dari tahun ke tahun, seperti dikatakan dalam penelitian([5] Iswandi, U, 2010)mengenai konversi lahan pertanian di Kota Padang. Aspek perkembangan dan pengembangan wilayah tidak dapat lepas dari adanya ikatan – ikatan ruang perkembangan wilayah secara geograris. Proses perkembangan ini dalam arti luas [11]mengemukakan ada 2 hal yang mempengaruhi tuntutan kebutuhan ruang yang selanjutnva menyebabkan perubahan penggunaan lahan yaitu :

1. Adanya perkembangan penduduk dan perekonomian,
2. Pengaruh sisterm aktivitas, sistem pengembangan, dan sistem lingkungan.

Variabel yang berpengaruh dalam proses perkembangan kota diantaranya adalah:

1. Lokasi yang strategis, sehingga aksesibilitasnya tinggi
2. Faktor kesesuaian lahan
3. Faktor kemajuan dan peningkatan bidang teknologi yang mempercepat proses pusatkota mendapatkan perubahan yang lebih maju
4. Penduduk;
5. Fungsi kawasan perkotaan;
6. Kelengkapan fasilitas sosial ekonomi;
7. Kelengkapan sarana dan prasarana transportasi;.

Berawal dari pertumbuhan penduduk dan segala aktifitasnya memiliki konsekuensi terhadap luasan spasial yang bersifat tetap dan terbatas di wilayah kota. Hal inilah yang memicu terjadinya perkembangan spasial secara horizontal di kota. Dinamika yang terjadi di kota memiliki konsekuensi secara spasial. Ditinjau dari prosesnya perkembangan spasial secara fisikal ada 2 :

1) Proses perkembangan spasial secara horizontal, proses ini menjadi penentu bertambah areal kekotaan dan makin padatnya bangunan di dalam kota. Secara definitif dapat diartikan suatu proses penambahan ruang yang terjadi secara mendatar dengan cara menempati ruang-ruang yang masih kosong baik di daerah-daerah pinggiran kota maupun di bagian dalam kota.
2) Proses perkembangan spasial secara vertikal, adalah proses penambahan ruang kota dengan menambahkan jumlah lantai bangunan pada bangunan tertentu.

Melihat perkembangan kota yang dapat diamati melalui indikator – indikator diatas cepat atau lambat akan berdampak kepada kondisi lingkungan setempat, karena aktivitas kota berlangsung di atas ruang atau lingkungan. Dengan demikian peran lingkungan/lahan sangat penting sebagai salah satu unsur penting dalam pembangunan, sehingga lingkungan perlu menjadi perhatian khusus karena sifat keterbatasannya sedangkan aktivitas pembangunan selalu mengalami perubahan dan bersifat dinamis.

Kebijakan Pengembangan Kota

Peranan utama dari pengembangan wilayah adalah menggarap langsung persoalan – persoalan fungsional yang berkaitan dengan tingkat regional/wilayah. Hal ini menimbulkan dua cara pendekatan, yaitu disatu pihak pengembangan wilayah merupakan perencanaan wilayah sebagai erluasan dari perencanaan kota, terutama menangani masalah – masalah yang hanya dapat diputuskan oleh wilayah yang lebih besar dari pada kota. Mengingat perencanaan suatu kota tidak dapat mengabaikan perkembangan wilayah lainnya. Dipihak lain, pengembangan wilayah merupakan perencanaan mengenai bagaimana mengalokasikan sumberdaya yang dimiliki, baik sumberdaya alam, sumberdaya manusia maupun kesempatan hubungan interregional terkait prospek ekonomi jangka panjang[4].

Rencana pengembangan kawasan permukiman menurut RTRW 2010 – 2030 dengan tujuan menyediakan ruang untuk pengembangan perumahan pegawai, serta masyarakat luas dengan tingkat kepadatan

bangunan dan tipologi rumah yang bervariasi dalam upaya mewujudkan pengembangan kawasan permukiman yang serasi dan berimbang. Sebaran alokasi ruang tersebut meliputi :

- Pengembangan perumahan kepadatan tinggi
- Pengembangan perumahan kepadatan sedang
- Pengembangan perumahan kepadatan rendah

Pengembangan perumahan kepadatan tinggi di kembangkan di kawasan pusat kota yaitu di Kecamatan; Padang Utara, Padang Barat, Padang Timur, Padang Selatan, Nanggalo.

Pembangunan dan Lingkungan

Masalah lingkungan menjadi perhatian serius sejak tahun 1970an. Melalui amanat Undang – Undang tentang lingkungan hidup di Amerika Serikat yang dikenal dengan *National Environmental Policy Act (NEPA)*.Di Indonesia masalah lingkungan mulai serius dibicarakan sejak pelita ke IV dan dibentuknya Kementrian Kependudukan dan Lingkungan Hidup tahun 1978 pada cabinet ke tiga (1978 – 1983). Bentuk perhatian pemerintah terhadap lingkungan saat ini adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk menekan dampak negative industri diantaranya dengan menganjurkan penggunaan teknologi bersih, memasang alat pencegah pencemaran, melakukan proses daur ulang dan menetapkan wajib melakukan pengolahan limbah bagi industry [8]. Konsep pembangunan berkelanjutan perlu menjadi jargon setiap aktivitas pembangunan kota. Menurut *World Commission on Environmental and Development* pembangunan berkelanjutan adalah sebagai pembangunan yang ditunjukan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri[17]. Terdapat dua konsep utama yang diapungkan dalam konsep pembangunan berkelanjutan, yaitu kebutuhan (*concept of needs*) dan keterbatasan (*concept of limitations*).Dengan demikian diperlukan pengaturan agar lingkungan tetap mampu mendukung kegiatan pembangunan dalam rangka memnuhi keutuhan manusia. Emil Salim menjelaskan hal perlu diperhatikan dalam konsep pembangunan berkelajutan adalah :

1. Pembangunan berkelanjutan menghendaki penerapan perencanaan tata ruang (*spatial planning*)
2. Perencanaan pembangunan menghendaki adanya standar lingkungan
3. Penerapan mengenai analisis dampak lingkungan (AMDAL).

Terdapat empat prinsip etika berkelanjuan untuk mendasari etika *sustainable society* [2]yaitu :

1. *Sustainable society* memgang teguh etika bahwa bumi ini memiliki sumber – sumber yang terbatas dan digunakan oleh semua organism, dengan kata lain bukan semua untuk kita tapi satu untuk semua.
2. Manusia merupakan bagian dari alam dan juga merupakan subyek dari hokum – hokum alam dan tidak kebal terhadap hokum alam. Dengan kata lain manusia bukan merupakan puncak atau penguasa alam tetapi merupakan satu anggota dari jarring – jarring kehidupan yang saling berkaitan dan terpengaruh oleh hokum dan keterbatasn – keterbatasan alam.
3. Manusia yang berhasil adalah manusia yang mampu bekerjasama dengan kekuatan – kekuatan alam bukan manusia yang mendominasi alam.
4. Memegang prinsip yang tegas bahwa ekosistem yang sehat yang berfungsi baik adalah sangat penting untuk semua bentuk kehidupan.

Berikut dampak pembangunan terhadap lingkungan :

Dampak akibat fakor internal dapat berupa; bajir, longsor, badai, kebakaran hutan, dll. Dampak akibat faktor eksternal atau akibat campur tangan manusia:

- 50 sampai 100 species tumbuhan dan binatang punah akibat penggundulan hutan. Meningkatnya populasi manusia yang puluhan bahkan ratusan orang per hari telah meningkatkan kebutuhan untuk air, makanan dan sumber lainnya. Akibatnya planet bumi menjadi panas, hujan menjadi asam, jaringan kehidupan menjadi tercabik – cabik
- Efek kenaikan rumah kaca, peningkatan suhu bumi
- Pencemaran udara akibat industry; CO dapat menyebabkan gangguan otak, SO2, NO2 dapat menimbulkan gangguan pernafasan dan iritasi mata. Debu bila beracun dapat menggangu syaraf, menyebabkan anemia, debu mengandung serat asbes dapat memicu kanker.
- Pencemaran daratan oleh limbah padat/barang bekas.

Tekanan Penduduk Terhadap Lingkungan dan Alih Fungsi Lahan

Pertumbuhan penduduk disebabkan oleh dua hal yaitu kelahiran dan kematian serta faktor migrasi. Pemberitaan Kompas (27/6/2012), sekretaris daerah Kota Padang, Emzalmi mengatakan bahwa setiap tahun

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

penyusutan areal pertanian diakibatkan oleh pembangunan kawasan perumahan mencapai 150 hektar hingga 200 hektar. Untuk mengantisipasi terjadinya alih fungsi lahan ini pemerintah Kota Padang telah membuat peraturan dengan mengacu pada Perda No. 04 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Tata Bangunan (RTRW 2012 – 2032 yang melarang alih fungsi lahan produktif untuk lahan perumahan oleh para pengembang.

Saat ini bisa dikatakan fenomena alih fungsi lahan terjadi hamper di seluruh kota. Perlu diketahui faktor apa saja yang menjadi penyebab atau pendorong terjadinya alih fungsi lahan agar dapat membantu mermuskan strategi pengendaliannya. Faktor – faktor pendorong alih fungsi lahan menurut Strategi Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian, Dirjen Pangan dan Pertanian Kementrian[13]:

1. Faktor kependudukan; peningkatan jumlah penduduk dan taraf hidup penduduk
2. Kebutuhan lahan untuk kegiatan non pertanian meningkat. Adanya sawah terjepit atau sawah yang berada di antara perumahan sehingga si petani sulit memperoleh air, tenaga kerja dan sarana produksi lainnya yang memaksa mereka untuk menjual lahan mereka.
3. Faktor ekonomi, yaitu *land rent* untuk aktivitas non pertanian dibandingkan untuk sektor pertanian. Rendahnya insentif untuk berusaha tani karena tingginya biaya produksi sementara harga hasil pertanian rendah atau fluktuatif.
4. Fakor sosial budaya, keberadaan hokum waris yang menyebabkan terfragmentasinya lahan pertanian, sehingga tidak memenuhi batas minimum skala ekonomi usaha yang menguntungkan.
5. Degradasi lingkungan, kemarau, penggunaan pestisida berlebihan, pecemaran air irigasi
6. Otonomi daerah, yang mengutamakan pembangunan sektor yang menjanjikan keuntungan lebih tinggi dalam jangka pendek.
7. Lemahnya perundang – undangan dan penegakan hukum.

METODOLOGI

Desain Penelitian

Jika disigi berdasarkan pendekatan analisisnya, penelitian ini termasuk jenis penelitian deskriptif kuantitatif.Oleh karena memanfaatkan dan mengolah data – data kuantitatif untuk mencapai tujuan penelitian.

Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kota Padang dengan unit analisis kecamatan yaitu Kecamatan Nanggalo dengan pertimbangan bahwa kecamatan ini menjadi salah satu wilayah peruntukan untuk pengembangan zona permukiman padat (RTRW Kota Padang 2010 – 2030). Disamping itu sebagian besar dari luas lahan Kecamatan Nanggalo dimanfaatkan untuk lahan pertanian padi sawah dan kebun palawija. Dengan demikian kondisi ini menarik untuk dikaji.

Variable Penelitian

Variabel *dependent* adalah daya dukung lingkungan, sedangkan variabel *independent* adalah luas lahan minimal untuk hidup layak, luas lahan pertanian, jumlah penduduk petani, pertumbuhan penduduk, luas lahan pertanian.

Data, Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data

Data pada penelitian ini adalah data sekunder yang bersumber dari BPS, Balai Penyuluhan Petani, Kelompok P3A, Kantor Kecamatan, Dinas Tata Ruang. Data lainnya adalah data sekunder berupa dokumen kebijakan RTRW bersumber dari Dinas/Instansi Tata Ruang dan atau dokumen pendukung lainnya dari instansi terkait.Keseluruhan data yang diperlukan diperoleh melalui pencatatan, inventarisir dan pendokumentasian data berupa angkadan gambar. Survey dilakukan dalam rangka pengamatan kondisi alih fungsi lahan secara langsung di lapangan.

Teknik Analisa Data

- Pengukuran daya dukung lahan mengadopsi konsep Otto Soemarwoto yang merupakan nilai kebalikan dari tekanan penduduk terhadap pertanian, dimana nilai DDL adalah sebagai berikut :
  DDL = jika nilai,
  DDL >1 : Daya dukung lahan tinggi
  DDL = 1 : Daya dukung lahan optimum
  DDL <1 : Daya dukung lahan rendah
- Tingkat tekanan penduduk diketahui melalui model Otto Soemarwoto berikut :

  $$TP = Zt \frac{\text{ft.P0 } (1+\text{r})\text{t}}{\text{Lt}}$$

- Laju pertumbuhan penduduk menggunakan formula berikut :

$$r = \left(\frac{Pt}{Po}\right) 1/t - 1$$

- Persentase petani dalam populasi penduduk :

$$\mathrm{f} = \frac{\text{jumlah petani dan buruh tani}}{\text{jumlah penduduk}} \mathrm{x}100\%$$

- Luas lahan minimal untuk hidup layak :

$$Z = \frac{(0.25LS12) + (0.5LS11) + (0.5LST) + (0.76LLK)}{(LS12 + LS11 + LST + LLK)}$$

Keterangan :

TP = tekanan penduduk terhadap lahan pertanian
t = periode waktu perhitungan
Zt = luas lahan yang diperlukan untuk mendukung kehidupan seorang petani pada tingkat hidup yang diinginkan
f = persentase petani di dalam populasi
Po = besarnya penduduk pada waktu tertentu
r = rata – rata tingkat pertumbuhan penduduk
l = luas lahan pertanian yang ada
z = luas lahan minimal untuk hidup layak
LS12=luas sawah irigasi panen > 2x/tahun
LS11=luas sawah irigasi panen 1 x per/tahun
LST= luas sawah tadah hujan
LLK= luas lahan kering

Diagram Alir Kerangka Pikir

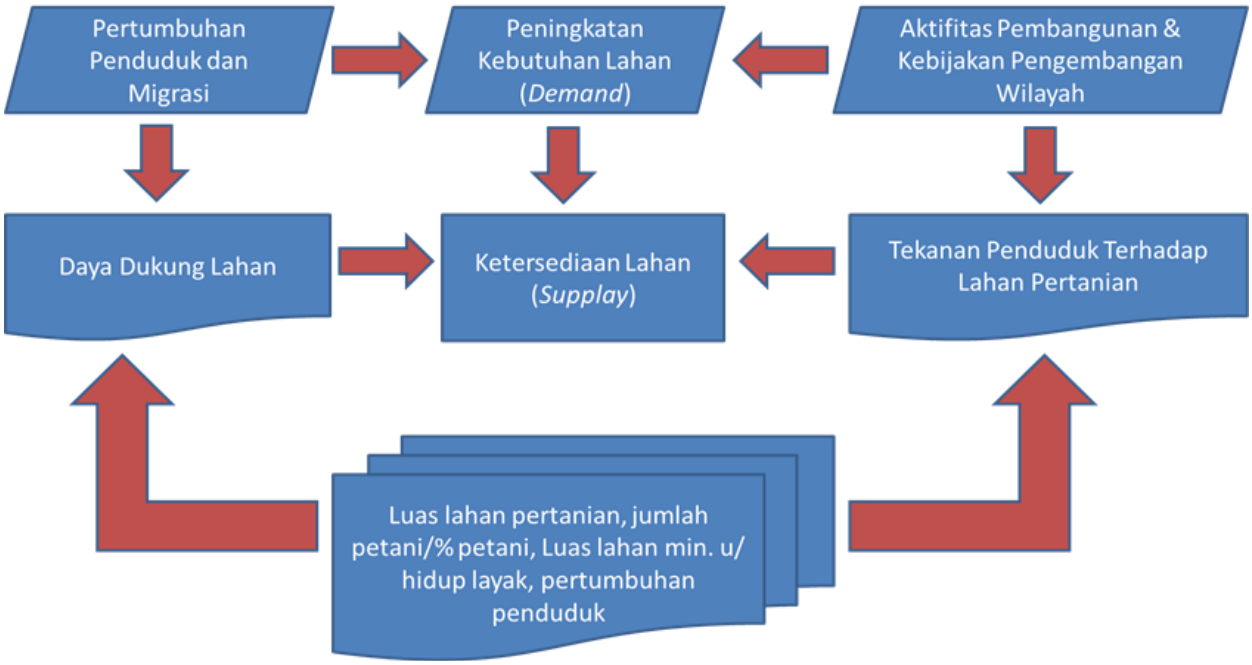

Gambar 1. Kerangka Konseptual Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kecamatan Nanggalo memiliki luas wilayah 8.07km^2 atau 1.16% dari luas Kota Padang. Data publikasi Kecamatan Dalam Angka tahun 2013 jumlah penduduk terdata 58.371 jiwa.Kecamatan Nanggalo berada di bantaran sungai Batang Kuranji, kondisi ini memungkinkan wilayah ini untuk mengairi lahan pertanian. Luas lahan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian padi sawah sebesar 250 ha, lading 2 ha, lainnya 23 ha. Belum termasuk lahan kering lainnya seperti tegalan, kebun, pekarangan. Berikut peta Kecamatan Nanggalo:

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

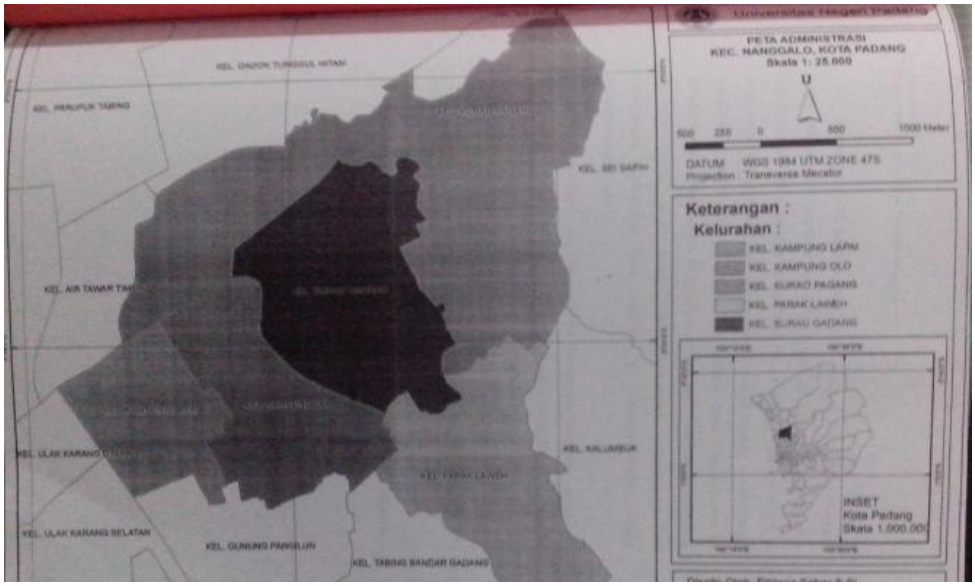

Gambar 2.Peta Administrasi Kecamatan Nanggalo

Hasil produksi padi dan palawija Kecamatan Nanggalo mengalami penurunan khususnya satu tahun terakhir yaitu tahun 2013 sebesar 2.836 ton setara dengan 5.4% dibandingkan 2012 sebesar 3.027 ton atau 5.10%. Berikut tabel perkembangan hasil produksi padi, palawija, sayuran dan buah – buahan di Kecamatan Nanggalo 2012 – 2013 :

Tabel 1.Luas Panen dan Produksi Padi, Palawija, Sayuran dan Buah – Buahan Kecamatan Nanggalo Tahun 2012 – 2013

Komoditi	Luas Panen (Ha)		Produksi (Ton)	
	Th 2012	Th 2013	Th 2012	Th 2013
Padi	55.60	55.60	3.027	2.835
Ubi Kayu	52	52	1.918	1.918
Ubi Jalar	6	6	90	90
Sayuran	89	89	204	204
Buah – buahan	13.07	13.07	124.6	124.6

Sumber: Kecamatan Nanggalo Dalam Angka 2012 dan 2013

Penggunaan lahan kering yang tersebar di Kecamatan Nanggalo dapat mencerminkan aktivitas warga. Penggunaan lahan berdasarkan luasannya jika dibandingkan tahun 2012 dengan 2013 mengalami perubahan pada jenis penggunaan lahan pekarangan dengan luas 268 ha, berkurang menjadi 103 ha, sedangkan untuk sawah penurunan luasannya sebesar 251 ha menjadi 250 ha.

Analisis Tekanan Penduduk dan Daya Dukung Lingkungan

Perhitungan tekanan penduduk pada penelitian ini menggunakan formula Otto Soemarwoto. Variabel lainnya yang diperlukan untuk mengetahui seberapa besar tekanan penduduk terhadap lahan pertanian ini adalah laju pertumbuhan penduduk (r), jumlah penduduk, luas lahan pertanian (L), banyaknya petani, persentase petani dari jumlah penduduk seluruhnya (f), luas minimal lahan untuk hidup layak (Z).

Data di atas dapat dilihat pada tabel berikut :

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 2.Data Laju Pertumbuhan Penduduk, Jumlah Penduduk, Luas Lahan Pertanian, Jumlah Petani dan Persentase, Luas Lahan Minimal Hidup Layak

Kategori	2010	2011	2012	2013
Jumlah Penduduk (jiwa)	52.878	57.943	58.371	59.137
Laju Pertumbuhan Penduduk (r)	0	0,09	0,0073	0,013
Luas Lahan Pertanian (ha)/L	387	387	300	275
Jumlah Petani (jiwa)	339	331	324	313
% Petni (f)	0,64	0,57	0,55	0,53
Luas Lahan minimal untuk hidup layak (ha)/Z	0,6	0,6	0,6	0,6
Hasil Produksi (ton)	3,214	3,214	3,027	2,833

Sumber: BPS Kota Padang, Nanggalo Dalam Angka dan Hasil Olah Data Sekunder, Tahun 2014.

Terjadi peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Nanggalo setiap tahunnya. Tingkat pertumbuhan penduduk dari tahun 2010 hingga 2013 sebesar 3.79%, sedangkan untuk tahun 2012 ke 2013 saja sebesar 1.3%. angka ini lebih tinggi dari pertumbuhan penduduk nasional yaitu 1.5%. jumlah dan pertumbuhan penduduk dapat menjadi indicator terjadinya tekanan terhadap lahan pertaian dan daya dukung lahan dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang terus meningkat. Luas lahan yang semakin berkurang persentase jumlah petani dan luas lahan yang diperukan untuk hidup layak, serta jenis komoditas yang ada di wilayah setempat.

Berikut ini contoh perhitungan untuk laju perumbuhan penduduk :

$$r_{2013} = \left(\frac{59.137}{58.371}\right)^{\frac{1}{1}} - 1$$
$$r_{2013} = (1.013123)^{1} - 1$$
$$r_{2013} = 0.013123\ atau\ 1.3\ \%$$
$$r_{2010\ -2013} = \left(\frac{59.137}{58.371}\right)^{\frac{1}{3}} - 1$$
$$r_{2010\ -2013} = (1.118367)^{0.33} - 1$$
$$r_{2010\ -201\,3} = 1.037955 - 1$$
$$r_{2010\ -2013} = 0.0379\ atau\ 3.79\%$$

- Diperoleh nilai r besar dari 0, artinya jika r > 0, maka pertumbuhan penduduk positif atau terjadi penambahan jumlah penduduk dari tahun sebelumnya. Pada contoh perhitungan di atas terjadi pertumbuhan penduduk dari tahun 2012 ke 2013.
- Luas lahan pertanian di Kecamatan Nanggalo sebesar 387 ha pada tahun 2010 dan terus menurun tiap tahunnya menjadi 275 ha di tahun 2013. Pengurangan luas lahan pertanian ini diiringi pula dengan penurunan jumlah petani. Hal ini mengindikasikan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Persentase petani (f) dari jumlah penduduk seluruhnya di Kecamatan Nanggalo hanya berkisar 0.5 hingga 0.6%. angka ini sebagian kecil dari total penduduk kecamatan. Artinya bahwa di Kecamatan Nanggalo jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian tidak banyak, walaupun luas lahan pertanian cukup besar.
- Luas lahan minimal untuk hidup layak

$$Z = \frac{(0{,}25\ LS12) + (0{,}5\ LS11) + (0{,}5\ LST) + (0{,}76\ LLK)}{(LS12 + LS11 + LST + LLK)}$$

Kondisi sistem pengairan lahan padi sawah di Kecamatan Kuranji yang masih tergantung pada hujan tanpa ada bendungan dan irigasi teknis menyebabkan lahan padi sawah hanya mampu memproduksi dengan frekuensi 1 kali dalam setahun. Bahkan lahan padi sawah sering mengalami kekeringan atau dalam kondisi bero selama musim kemarau.Dengan demikian, nilai Z hanya memiliki komponen LS11 dan LLK. Berikut ini contoh perhitungan nilai Z tahun 2013:

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

$$Z = \frac{(0{,}25\ LS12) + (0{,}5\ LS11) + (0{,}5\ LST) + (0{,}76\ LLK)}{(LS12 + LS11 + LST + LLK)}$$
$$Z = \frac{(0{,}25 * 0) + (0{,}5 * 556) + (0{,}5 * 0) + (0{,}76 * 382)}{(556 + 382)}$$
$$Z = \frac{278 + 290{,}32}{938}$$
$$Z = 0{,}6$$

- Tekanan penduduk (TP)

Dihitung dengan menggunakan rumus Otto Soemarwoto.Perhitungan tekanan penduduk memperhitungkan laju pertumbuhan penduduk agar dapat memprediksi tahun berikutnya.
Berikut ini contoh perhitungan TP tahun 2013 :

$$TP_{2013} = Z\left(\frac{f.P0(1+r)t}{L}\right)$$
$$TP_{2013} = 0{,}6\left(\frac{317501}{275}\right)$$
$$TP_{2013} = 0{,}6(115{,}455)$$

TP_{2013} = 69.3, TP > 1, terjadi tekanan penduduk melebihi batas kemampuan lahan
DDL = 1/69.3
= 0.014, DDL < 1, daya dukung lahan rendah.

Nilai tekanan penduduk atas lahan (TP) dan Daya Dukung Lahan (DDL) selama empat tahun terakhir 2010 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.Tekanan Penduduk Terhadap Lahan Pertanian di Kecamatan Nanggalo

Tahun	TP	Klasifikasi	DDL	Klasifikasi
2010	52,5	Tp >1	0,02	DDL < 1
2011	55,8	Tp >1	0,02	DDL < 1
2012	65,3	Tp >1	0,02	DDL < 1
2013	69,3	Tp >1	0,01	DDL < 1

Sumber: hasil olah data sekunder, 2014

Berdasarkan hasil olah data diperoleh nilai TP tiap tahunnya dari empat tahun terakhir memiliki angka > 1, yaitu mulai dari 52.5 dan terus naik ke angka 69.3 di tahun 2013. Nilai TP tersebut menunjukkan bahwa adanya tekanan penduduk terhadap lahan pertanian. Artinya luas lahan yang tersedia untuk menyokong kebutuhan fisik manusia sudah tidak seimbang, dengan luas wilayah Nanggalo (8.07 km^2) dan lahan pertanian seluas 275 ha di tahun 2013, sedangkan jumlah penduduk 59.137 jiwa menyebabkan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan bahan pangan.

Luas lahan untuk pertanian cukup besar yaitu 34.1% dari total luas wilayah Nanggalo, namun data jumlah petani menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil masyarakat yang bekerja sebagai petani, pada tahun 2010 0.64% dan terus menurun hingga 0.52% dari total jumlah penduduk Nanggalo.

Terdapat beberapa sebab yang mengakibatkan nilai TP > 1, pertama, pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Konsekuensinya adalah kebutuhan lahan untuk permukiman dan aktivitas sosial ekonomi yang lainnya juga bertambah.Berdasarkan tabel 1. Angka pertumbuhan penduduk meningkat dari tahun 2012 – 2013 sebesar 1.3%, begitu juga dengan luas lahan pertanian mengalami penurunan, rata – rata selama empat tahun terakhir sebesar 3% atau seluas 28 ha. Kedua, disebabkan oleh posisi atau letak Kecamatan Nanggalo secara administrative yang berada dekat dengan pusat kota. Lahan yang berada dekat dengan pusat kota memiliki alih fungsi yang tinggi dan tidak produktif untuk lahan pertanian.

- Nilai Daya Dukung Lahan (DDL)

Penurunan daya dukung lahan menurut Hardjasoemantri dalam Ariyani, dkk (2012) dapat diatasi dengan cara :

1. Konversi lahan yaitu merubah jenis penggunaan lahan kea rah usaha yang lebih menguntungkan, namun tetap memperhatikan kesesuaian lahan.

2. Intensifikasi lahan, penggunaan teknologi baru dalam usaha tani.
3. Konservasi lahan, yaitu usaha untuk mencegah terjadinya kerusakan lahan sehingga manusia dapat menglola lahan untuk memenuhi keuntungan dan dapat diperbaharui oleh generasi yang akan dating.

Kegiatan konservasi diantaranya adalah erosi, banjir, reboisasi, irigasi, drainase, pengatur pembuangan limbah, penghijauan.

Daya dukung dikatakan seimbang apabila suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum penduduknya.Nilai daya dukung lahan merupakan nilai kebalikan dari tekanan penduduk terhadap pertanian. Jika nilai,

DDL >1 : daya dukung lahan tinggi

DDL = 1 : daya dukung lahan optimum

DDL <1 : daya dukung lahan rendah berdasarkan hasil perhitungan data pada tabel 1 menunjukan bahwa nilai indeks, daya dukung lahan di Kecamatan Nanggalo atau DDL < 1 selama empat tahun terakhir, yaitu berkisar antara 0.1 – 0.2. artinya bahwa daya dukung lahan dinyatakan rendah.

Nilai daya dukung lahan dapat berubah atau tidak bersifat mutlak apabila ada perlakuan pada lahan, terutama pada lahan pertanian, seperti telah diungkapkan sebelumnya.Sebelumnya nilai daya dukung lahan pertanian dapat dipengaruhi oleh letak Kecamatan Nanggalo secara administrasi atau bisa disebut dengan letak relative. Letak Kecamatan Nanggalo berada dekat dengan pusat kota yaitu Padang Timur yang wilayahnya memiliki densitas tinggi setelah Padang Barat, baik dari segi penduduk dan bangunan. Bagian timur yang berbatasan dengan Kuranji yang merupakan wilayah pengembagan pusat kota. Dengan demikian Kecamatan Nanggalo terkena imbas atau efek perkembangan pusat kota. Hal ini diindikasikan dengan lebih banyaknya penduduk Kecamatan Nanggalo yang bekerja di sektor jasa. Wilayah yang letaknya dengan jalur transportasi dan pertumbuhan ekonomi akan memiliki nilai daya dukung lahan yang rendah. Fakor lain yang mempengaruhi rendahnya nilai indeks DDL adalah lahan pertanian yang ada tidak digarap secara maksimal. Sistem pengairan sawah yang belum memanfaatkan teknologi atau irigasi teknis ([15] www.bpn.go.id, 2014), sehingga pada saat musim hujan, sawah kelebihan air, bahkan karena faktor cuaca seperti badai dapat merusak tanaman padi sawah yang berdampak pada penurunan hasil produksi panen.Sebaliknya saat musim kemarau, sawah banyak yang kekeringan dan sering kali sawah dalam kondisi tidak produktif atau bero.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa daya dukung dikatakan seimbang, apabila suatu wilayah mampu memenuhi kebutuhan fisik minimum kebutuhan penduduknya.Kebutuhan pokok fisik minimum dikatakan terpenuhi apabila terpenuhinya kebutuhan dasar yang menunjukan seseorang dapat hidup sehat secara normal.Suatu wilayah dapat dikatakan memenuhi kebutuhan penduduk dan hidup layak dalam hal ini adalah terpenuhinya kebutuhan beras setara dengan 265 kg beras/orang/tahun atau 1600 kalori/orang/hari. Hasil produksi beras Kecamatan Nanggalo tahun 2010 sebesar 3.214 ton/tahun atau 60.78 kg beras/orang/tahun. Artinya bahwa terjadi deficit beras karena produksi padi yang sedikit dan terus menurun selama empat tahun terakhir di tiap tahunnya.Kondisi ini bisa diakibatkan oleh makin sempitnya lahan pertanian yang berubah menjadi lahan non pertanian. Khususnya untuk pengembangan permukiman, seperti wilayah Surau gadang, Gurun Laweh, sedangkan wilayah Kampung Lapai, Kurao Pagang, merupakan pusat Kecamatan Nangaalo yang penggunaan lahannya di dominasi oleh lahan terbangun.

Faktor kebijakan pengembangan wilayah juga menjadi faktor penyebab terjadinya penurunan produksi padi di Kecamatan Nanggalo. Sejak terjadinya bencana gempa tahun 2009 di Kota Padang dan dikeluarkannya peta zonasi tsunami, banyak penduduk yang penduduk yang memilih tinggal dilokasi yang jauh dari pantai (barat Kota Padang), sehingga wilayah bagian timur menjadi destinasi tempat tinggal. Kecamatan Nanggalo memiliki letak yang strategis, selain jauh dari pantai, dekat dengan pusat kota dan merupakan wilayah tujuan pengembangan kota (RTRW 2010 – 2030 Kota Padang).

KESIMPULAN

Kecamatan Nanggalo memiliki DDL < 1 atau daya dukung rendah selama empat tahun terakhir (2010 – 2013) dengan nilai indeks berkisar antara 0.1 – 0.2 Terjadi tekanan penduduk terhadap lahan pertanian di Kecamatan Nanggalo dengan nilai TP > 1 selama empat tahun terakhir (2010 – 2013)

Temuan penelitian

- Kecamatan Nanggalo belum mampu berswasembada beras, dikarenakan luas lahan pertanian yang cukup besar tidak diimbangi dengan upaya maksimal dalam pengelolaannya, sehingga hasil produksi rendah/tidak memenuhi kebutuhan pokok penduduk terhadap beras dengan nilai layak.
- System pengairan sawah yang belum memanfaatkan irigasi teknis, meskipun Kota Padang sudah menjalankan kegiatan *Water Irrigation System Mangemen Project (WISMP)* sejak tahun 2006.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kajian ini dapat ditindaklanjuti dengan melakukan penelitian mengenai motivasi petani dalam melakukan alih fungsi lahan pertanian dan studi tentang apakah terdapat korelasi antara alih fungsi lahan dengan kerentanan wilayah terhadap banjir.

DAFTAR PUSTAKA

[1] BPS Kota Padang. 2013. Kecamatan Dalam Angka (KDA) Nanggalo. Padang.
[2] Chiras, D.D. 1991. Environmental Science: Action for a sustainable future. Redwood City CA: Benjamin Cumming.
[3] Hadi Sabari Yunus. 1994. House Use Orientation un The Urban Fringe Areas: The Case of Ngestiharjo Subdistrict. The Indonesia Journal of Geography, vol. 26/ 27.
[4] Hadi. 2010. World Commision on Environmental and Development – Environment, Health, Sustainable Development. USA .
[5] Iswandi, U. 2010. Konversi Lahan Pertanian di Kota Padang. Fakultas Ilmu Sosial, Jurusan Geografi.
[6] J.W.R. Whitehand. 2001. British urban morphology: the Conzenian tradition,. Urban Morphology 5(2), 103-109.
[7] Jawoto Sih Setyono. 2010. Lingkup Perencanaan Kota, Handout, Department of Urban and Regional Planning. Diponegoro University.
[8] Kristanto, Philip. 2015 . Ekologi Industry. Yogyakarta.
[9] Muta'ali Lutfi. 2012. Daya Dukung Lingkugan untuk Perencanaan Pengembangan Wilayah. BPFG – UGM.
[10] Muta'ali Lutfi. 2011. Kapita Selekta, Pengembangan Wilayah. Badan Penerbit Fakultas Geografi – UGM (BPFG).
[11] Ridha, M, Azzaki dan Sugiono Soetomo. 2015. Perkembangan Kawasan Permukiman Akibatnya Terhadap Ruang Terbuka di Kota Semarang. Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Biro Penerbit Planologi UNDIP, Vol 11 (4); 430-443.
[12] Ritohardoyo. 2002. Penggunaan dan Tata Guna Lahan. Yogyakarta: Fakultas Geografi UGM.
[13]Setiawan A, dan Purwadio H. 2013. Arahan Pengendalian Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Menjadi Perkebun Kelapa Sawit di Kabupaten Katingan. Jurnal Teknik Pomits, Vol. 2, No. 3, ISSN: 2337-3539 (2301-9271 Print) ejournal.its.ac.id.
[14] Soemarwoto Otto. 2003. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
[15] www.bpn.go.id. 2014. Publikasi.
[16] Yunus Hadi Sabari. 2000. Struktur Tata Ruang Kota. Pustaka Pelajar.
[17] Yunus HS. 2005. Manajemen Kota (perspektif spasial). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN KAWASAN PESISIR PANTAI DENGAN KONSEP AGRIBISNIS MINAPOLITAN

Mohammad Agung Ridlo[1)]

[1)]Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota (Planologi),
Fakultas Teknik, Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA)

Email address: agungridlo@unissula.ac.id

Naskah diterima : 26Desember 2016 Naskah direvisi : 21 Februari 2017 Disetujui terbit : 6 Maret 2017

ABSTRAK

Tantangan dan tuntutan lingkungan strategis, baik lokal maupun regional, dalam negeri maupun global, berkaitan dengan kondisi keterpurukan ekonomi menimbulkan imbas (multiplier effect) yang sangat besar dan negative terhadap kawasan perdesaan khususnya kegiatan agribisnis. Kemudian pada era otonomi daerah, persaingan antar wilayah akan terus berlangsung antar daerah otonom. Daerah otonom yang miskin akan tiga pilar pengembangan wilayah (SDA, SDM, dan teknologi), akan berupaya keras melaksanakan berbagai strategi untuk meningkatkan daya saingnya agar tidak tenggelam diantara daerah otonom yang kaya akan ketiga pilar tersebut. Paradigma pembangunan dewasa ini menempatkan pembangunan perdesaan sebagai upaya menciptakan kesejahteraan masyarakat. Dinamika pembangunan pertanian dan perdesaan, dari waktu ke waktu dituntut untuk terus berkembang. Oleh karenanya, maka kawasan perdesaan yang merupakan kawasan basis kegiatan ekonomi daerah, potensinya perlu dikembangkan selaras dengan pertumbuhan kota terdekat sebagai suatu sistem kawasan. Site desa-desa dan kota terdekat merupakan basis kegiatan ekonomi yang seharusnya menjadi kawasan andalan pertumbuhan ekonomi daerah. Pengembangan kawasan agribisnis diharapkan mampu menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi yang akan memberikan "spread effect" terhadap wilayah sekitarnya (hinterland). Strategi pengembangan sistem dan usaha agribisnis sudah waktunya ditingkatkan menjadi strategi yang mensinergikan pengembangan agribisnis dengan pendekatan wilayah. Pengembangan pertanian perlu dipersiapkan secara matang, dengan memperhatikan katerkaitan aktifitas yang akan dikembangkan, baik backward maupun forwardlinkage (agribisnis sebagai suatu system). Perlu disediakan infrastruktur dasar dan pendukung, misalnya jaringan jalan, air bersih, sarana pengolahan, pemasaran, serta perlu adanya kemandirian sumber daya manusia dan kelembagaan yang memadai (suprastruktur) dan berakar kuat. Artinya bahwa membangun kawasan perdesaan dengan kegiatan utama agribisnis. Khusus untuk kawasan perdesaan pesisir dan pantai di negara kita, maka sistem yang perlu dikembangkan dapat melalui konsep agribisnis minapolitan.Agribisnis minapolitan merupakan salah satu upaya mempercepat pembangunan perdesaan di wilayah pesisir pantai, sehingga tidak lagi bertumpu pada pusat-pusat pertumbuhan yang biasanya terletak di pusat-pusat kota. Melalui agribisnis minapolitan, desa pesisir pantai dengan fasilitas kota akan tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem agribisnis, mampu melayani, mendorong, menarik, menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) wilayah sekitarnya, sehingga merupakan sistem kawasan yang komplementer dan sinergik.Pengembangan kawasan perdesaan pesisir pantai dengan konsep agribisnis minapolitan adalah pendekatan Bottom Up Planning, oleh karenanya, partisipasi aktif serta keterlibatan seluruh stakeholderdi kawasan minapolitan (masyarakat agribisnis, investor dan pemerintah daerah) sangat menentukan. Sebagai suatu prakarsa masyarakat (people created) perlu fasilitasi Pemerintah Daerah utamanya dari dimensi perencanaan, pembangunan prasarana dan sarana dasar dan monetesi perdesaan

Kata kunci: *Pesisir, Agribisnis, Minapolitan*

1. PERMASALAHAN DI WILAYAH PESISIR PANTAI

Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia. Luas wilayah territorial sebesar 7,1 juta km² didominasi laut kurang lebih 5,4 juta km². Wilayahnya 33 provinsi, 440 Kab/Kota, berada di pesisir

Laut sebagai *common property*, memiliki keanekaragaman hayati yang tinggi. Secara geografis, struktur & tipologi ekosistem didominasi lautan.Panjang garis pantai keempat terpanjang didunia setelah Amerika Serikat, Kanada dan Federasi Rusia.Sumberdaya pesisir dan kelautan merupakan kekayaan alam yang sangat potensial untuk dimanfaatkan secara efektif bagi pembangunan ekonomi dan kemakmuran bangsa.

Perubahan orientasi pembangunan bangsa Indonesia dari *"Land Based Orientation"* (Orientasi Daratan) ke *"Ocean Based Orientation"* (Orientasi Kelautan) adalah merupakan suatu keniscayaan, Sebagai "Prime Mover" pertumbuhan perekonomian nasional.

Dasar perubahan paradigma pembangunan Indonesia:

- Memiliki sumberdaya laut yang besar, ditinjau dari sisi kuantitas maupun diversitas (mega-biodiversity).
- Memiliki daya saing yang tinggi *(competitive advantage*) di bidang kelautan, ditinjau dari bahan baku yang dimiliki serta produk yang dihasilkan.
- Industri di bidang Kelautan dan Perikanan memiliki keterkaitan *(backward andforward linkage*) yang kuat dengan industri lainnya
- Sumberdaya kelautan dan perikanan merupakan sumberdaya yang selalu dapat diperbaharuhi (*renewable resources*) sehingga ketersediaan bahan baku dapat bertahan sampai jangka panjang asal dikelola secara arif
- Investasi di bidang kelautan dan perikanan memiliki efisiensi yang tinggi [1].

Potensi sumberdaya pesisir dan laut :

- Sumberdaya yang dapat pulih *(renewable-resources*),
- Sumberdaya yang tidak dapat pulih *(unrenewable-nesources*),
- Energi kelautan : gelombang, pasang surut, OTEC, angin
- Jasa-jasa lingkungan : media transportasi dan komunikasi, wisata bahari, penyerapan limbah dan lain lain

Kendala-kendala yang dihadapi dalam pembangunan sektor kelautan antara lain yaitu:

- keterbatasan modal
- kurang efektifnya penegakan hukum,
- rendahnya kualitas sumber daya manusia dan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi,
- kurangnya ketersediaan data dan informasi,
- kurang terpadunya perencanaan dan pelaksanaan antar sektor dan antar wilayah,
- pembangunan kelautan kurang berorientasi pada pelestarian lingkungan,
- kurangnya sarana dan prasarana untuk menopang kegiatan yang berkaitan dengan pemanfaatan dan pendayagunaan sumber daya kelautan, dan
- rendahnya jiwa bahari

Untuk mencapai target pertumbuhan produksi perikanan baik pada tingkat Kabupaten, Propinsi dan Nasional, maka Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai payung hukum koordinasi lintas sektor, perlu menetapkan kawasan strategis nasional yang berpotensi pengembangan sektor pertanian (dalam hal ini perikanan).

2. TIPOLOGI KAWASAN BUDIDAYA PERIKANAN

Kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan sebagai budidaya perikanan disusun berdasarkan potensi sumberdaya perikanan/usaha perikanan yang sudah berjalan untuk mendukung produksi komoditas unggulan,yaitu:

- Kawasan Budidaya Air laut (Rumput Laut, Kerapu, Kekerangan dan Ikan Laut lainnya)
- Kawasan Budidaya Air Payau (Udang, Bandeng, Grasilaria, Kepiting)
- Kawasan Budidaya Air Tawar (Nila, Mas, Patin, Lele)

ISBN : ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Karakteristik Budidaya Air Laut:

- Hamparan perairan laut (luasan kecil s/d besar)
- Jauh dari pengaruh air tawar (muara sungai)
- Kondisi gelombang air laut tenang
- Kedalaman < 50 m
- Memerlukan kawasan di darat untuk manajemen, handling space dan penangganan pertama hasil produksi
- Ada arus laut
- Sarana budidaya pembesaran: KJA, Jaring Tancap, Rumpon, dll
- Komoditas unggulan: kerapu, rumput laut, kekerangan dan ikan laut lainnya

Karakteristik Budidaya Air Payau

- Tersedia air tawar (dekat dengan muara sungai) dan air laut yang memadai
- Berupa hamparan yang landai dengan slope < 5 %
- Lahan terjangkau pasang-surut
- Komoditas unggulan udang, bandeng, rumput laut

Karakteristik Budidaya Air Tawar

- Tersedia air tawar yang cukup (dekat dengan sumber air: sungai, irigasi dan sebagainya)
- Pengembangannya berupa spot/spot lokasi perkolaman, hamparan yang luas ada pada budidaya di waduk dan danau
- Budidaya dapat dilakukan di sungai dan saluran (keramba jaring apung, dan lain-lain)

3. KONSEP AGRIBISNIS MINAPOLITAN

Konsep Agribisnis Minapolitan merupakan suatu konsep pengembangan pertanian (dalam hal ini perikanan) yang menurut John Friedmann [2] pengembangan pertanian dalam arti luas dikenalkan dengan konsep **"agropolitan"**. Dalam pengembangannya khusus untuk sektor perikanan konsep yang ditawarkan dengan menggunakan konsep agribisnis **"minapolitan".**Minapolitan adalah Kota Perikanan, artinya bahwa kawasan pesisir yang berbasis perikanan dikembangkan dengan penyediaan infrastruktur perkotaan.Bukan mengkotakan kawasan pesisir pantai, tapi aktivitas di kawasan pesisir pantai dan untuk mengembangkan sektor perikanan perlu disupplay infrastruktur perkotaan. Dengan kata lain kawasan minapolitan merupakan kawasandengan sistem fungsional desa-desa di pesisir pantai, dengan hierarkhi desa pusat pertumbuhan (DPP) dengan desa-desa di sekitarnya (*hinterland*).

Didalam [7] Undang-undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, paragraf 2, pasal 51, dimuat tentang pengembangan pertanian dikenal dengan **"Kawasan Agropolitan".** Kawasan agropolitan adalah kawasan yang terdiri dari satu atau lebih pusat kegiatan pada wilayah perdesaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumberdaya alam tertentu yang ditunjukkan oleh adanya keterkaitan-keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan satuan sistem permukiman dan sistem agribisnis.Struktur dan hierarkhi pengembangan kawasan minapolitan dapat terdiri dari:

- Kota Kabupaten sebagai kota strategis (*strategic City*).
- Kota Perikanan (*Minapolis*) yang secara administratif dapat berupa Kecamatan atau desa.
- Lokasi Produksi atau desa-desa sentra produksi perikanan, secara administratif dapat berupa desa atau kawasan. Desa-desa atau kawasan produksi perikanan ini memiliki infrastruktur perkotaan, namun tidak di desain untuk menjadi kota.

Pada perkembangannya kawasan minapolitan diharapkan akan terbentuk sebuah panorama desa perikanan yang asri, sejuk dan damai dengan infrastruktur perkotaan, seperti jaringan jalan, lembaga keuangan, pasar, perkantoran, lembaga penyuluhan dan alih teknologi, lembaga pendidikan serta penelitian yang di sela-sela hamparan lahan perikanan. Di sini nantinya juga tersedia sarana air bersih, kantor kelembagaan perikanan, lembaga kesehatan dan sarana sosial dan umum.

Artinya bahwa, pembangunan pertanian (perikanan) dilakukan dengan pendekatan agribisnis yang terkait erat dengan industrialisasi pertanian (pembangunan agroindustri).Pembangunan agribisnis tersebut

meliputi: *sub system* agribisnis hulu (*upstream*), budidaya pertanian (*on farm system*), agribisnis hilir (*downstream*) dan layanan pendukung (*support system institution*).

Sebagai motor penggerak agribisnis adalah *sub system* agribisnis hilir (*down stream*) dalam hal ini adalah agroindustri, bukan sekedar pada sub *on farm system* saja. Strategi tersebut dilaksanakan dengan asumsi bahwa pembangunan agribisnis/agroindustri:

- merupakan kelanjutan strategi pembangunan sektor pertanian yang telah diimplementasikan sebelumnya.
- pendekatan agribisnis/agroindustri dan tata ruangnya ber orientasi pada sistem peningkatan produksi berbasis sumber daya hayati (*farming system production*) dan pada permintaan pasar (*market oriented);*
- merupakan kegiatan ekonomi yang menjadi tumpuan sebagian besar rakyat;
- mampu mengakomodasi dam memberdayakan *stakeholder* danadanya keterkaitan antara kinerja gatra ekonomi makro dan mikro.

Menurut Ridlo [4] pada Pedoman Penyusunan Masterplan& RPJM Kawasan Agropolitan, yang disampaikan pada acara Diseminasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Agropolitan, di Denpasar Bali, 15-16 Oktober 2008,*"Agropolitan adalah pengembangan wilayah dengan pendekatan bottom up planning, maka partisipasi aktif serta keterlibatan seluruh stakeholder (masyarakat agribisnis, investor dan pemerintah daerah) sangat menentukan"*, Pengembangan kawasan minapolitan dapat menjadi program unggulan daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah (Perda) dan dilaksanakan berdasarkan suatu Masterplan/RPJM dan RPIJM (Rencana Pembangunan Infrastruktur Jangka Menengah) serta Detail Desain. Prinsip dasar pengembangan kawasan minapolitan adalah:

a. Minapolitan merupakan pendekatan pembangunan kawasan pesisir pantai berbasis agribisnis;
b. Kawasan minapolitan perlu ditetapkan oleh Bupati dan Gubernur, serta penetapan kawasan minapolitan secara nasional oleh Menteri Kelautan & Perikanan;
c. Pengembangan minapolitan merupakan program utama dan kegiatan terpadu lintas sektor dengan pendekatan bottom up;
d. Dibentuknya Pokja Pengembangan Kawasan Minapolitan (pusat, popinsi, kabupaten);
e. Perencanaan disusun secara bersama antara instansi pemerintah, masyarakat dan swasta/dana usaha dan modal.
f. Pendanaan dapat bersumber dari Dana Sharing APBD, dana stimulan dari Cipta Karya atau DKP (APBN) untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur .

Pengembangan agribisnis minapolitan adalah suatu pendekatan pembangunan melalui gerakan masyarakat dalam membangun ekonomi berbasis pertanian (agribisnis) secara terpadu dan berkelanjutan pada kawasan terpilih melalui pengembangan infrastruktur perdesaan yang mampu melayani, mendorong, dan memacu pembangunan pertanian di wilayah sekitarnya. Oleh karenanya, pengembangan agribisnis minapolitan perlu dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan berikut:

a. Perlu didukung kebijakan-kebijakan antar instansi pemerintah (Pusat, Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam memfasilitasi pengembangan sistem dan usaha agribsinis;
b. Perlu pengembangan infrastruktur dan sarana yang diperlukan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis;
c. Perlu adanya lembaga-lembaga yang menangani permodalan, pengelolaan, pemasaran, dan penyedia jasa yang dibutuhkan untuk pengembangan sistem dan usaha agribisnis;
d. Perlu adanya jejaring kerjasama usaha di antara pelaku-pelaku usaha agribisnis;
e. Perluadanya suatu unit manajemen khusus yang solid yang mengelola kawasan minapolitan.

ISBN : ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KONSEP AGRIBISNIS MINAPOLITAN

4. DASAR PENGEMBANGAN KAWASAN DENGAN KONSEP MINAPOLITAN

Beberapa hal yang perlu dijadikan dasar kajian meliputi dasar hukum, kebijakan maupun kesepakatan bersama tentang agropolitan dan minapolitan, antara lain seperti:

- Undang-Undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.`
- [5] 4-15 Desember 2007, Pernyataan Bersama tentang Agropolitan/Minapolitan, Kaliurang Magelang.
- [6] SK Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Keputusan Mentan Nomor : 467/Kpts/OT.160/8/2006
- Hasil Audiensi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Se-Indonesia dengan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian Dan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,19 Maret 2008, [3]Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Ruang Rapat Graha Sawala– Jakarta

Menurut hasil kesepakatan dalam Temu Koordinasi Agropolitan/Minapolitan di Kaliurang, 14 Desember 2007, dihasilkan Sembilan Butir Kesepakatan antara lain:

1. Agropolitan sebagai pendekatan pembangunan wilayah berorientasi perdesaan, yang mencakup didalamnya MINAPOLITAN dan KOTA TERPADU MANDIRI, secara keseluruhan mendukung *Triple Track Strategy* yang *pro growth, pro job* dan *pro poor*
2. Penetapan Kawasan Agropolitan oleh Pemerintah Daerah harus diikuti dengan penataan rencana detail kawasan, yang selanjutnya perlu ditetapkan melalui Peraturan Daerah (PERDA)
3. Penetapan kawasan agropolitan harus memenuhi skala ekonomi dan skala usaha dalam satuan wilayah kabupaten/kota, propinsi dan nasional
4. Gubernur dan Bupati/Walikota harus menyusun Master Plan Pengembangan Kawasan Agropolitan sebagai penjabaran dari RPJMD yang selanjutnya dijabarkan dalam matriks kegiatan tahunan lintas sektor/lintas SKPD
5. Matriks kegiatan lintas sektoral/lintas SKPD merupakan acuan daerah dalam mekanisme perencanaan pembangunan daerah melalui Musrenbang Kab/Kota dan Propinsi
6. Perlu disepakati pemantapan kelembagaan Pengembangan Kawasan Agropolitan diberbagai tingkatan dan mengefektifkan pertemuan regular antar POKJA Agropolitan Pusat dan Daerah untuk mengevaluasi perkembangan Agropolitan
7. Dalam rangka mengembangkan etalase Kawasan Agropolitan sebagai *show window,* maka perlu ditetapkan 1 (satu) kawasan pada setiap propinsi sesuai daya dukung dan potensi sumber daya alam
8. Dalam rangka memantapkan Pengembangan kawasan Agropolitan diperlukan Komitmen Pemerintah dalam bentuk dukungan kebijakan bagi pengembangan kawasan agropolitan
9. Untuk menjamin terarahnya pengembangan kawasan agropolitan perlu Pedoman Umum sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

Selanjutnya dari hasil Pernyataan Bersama Sarasehan Nasional Agropolitan/ Minapolitan [5] dihadapan 5 Menteri di Magelang 15 Desember 2007disepakati bahwa:Pengembangan kawasan agropolitan diyakini sebagai pendekatan pembangunan wilayah berbasis pertanian, yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan pekerjaan, dan pengentasan masyarakat dari kemiskinan.

Oleh karena itu, diperlukan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan untuk dapat mewujudkan kawasan agropolitan sesuai dengan daya dukung dan potensi sumber daya lokal.Pernyataan ini dikemukanan di Desa Sewukan, Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah.Pernyataan bersama diikuti Oleh kurang lebih 600 peserta yang meliputi Pokja Agropolitan dari 32 Propinsi. Pokja Agropollitan dari 176 Kabupaten/Kota, PPK Satker Agropolitan DPU dari 32 Propinsi, Departemen/Kementrian terkait pendukung Agropolitan, Pemda Propinsi/Kabupaten/Kota pelaksana Agropolitan, dan swasta serta kelompok masyarakat Bersama Lima Menteri: (1) Menteri Dalam Negeri, (2) Menteri Pekerjaan Umum, (3) Menteri Pertanian, (4) Menteri Kelautan dan Perikanan, (5) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

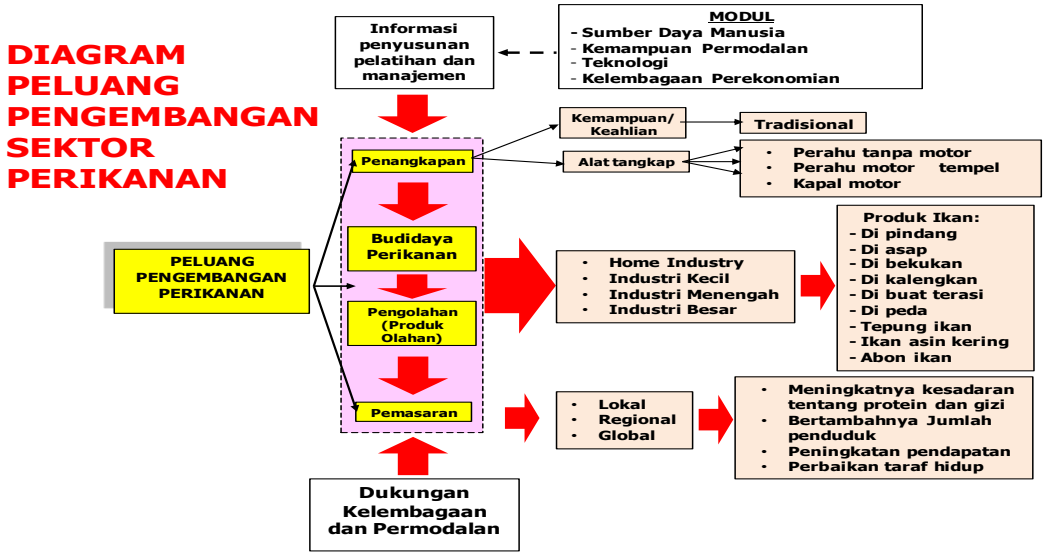

5. MEKANISME PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN

Mekanisme pengembangan kawasan minapolitan terdapat beberapa tahapan, antara lain meliputi:

- Sosialisasi program (di tingkat pusat, propinsi, kabupaten dan kawasan)
- Pemilihan dan penetapan lokasi (oleh Bupati, Gubernur dan Menteri)
- Penyusunan POKJA MINAPOLITAN Kabupaten (oleh Bupati)
- Penyusunan MASTER PLAN / RPJM MINAPOLITAN (oleh pemda dan diasistensi POKJA)
- Penyusunan DETAIL DESAIN
- Pelaksanaan pembangunan minapolitan (pendanaan secara lintas sektor dengan stimulan dari pusat)
- Monitoring dan evaluasi (oleh tim pokja agro/minapolitan pusat, popinsi, kabupaten)
- Pengembangan minapolitan pasca 3 tahun fasilitasi (Menuju Minapolitan Mandiri oleh Masyarakat dengan fasilitasi PEMDA Setempat).
-

6. PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PERIKANAN BUDIDAYA

Pengembangan kawasan pesisir pantai dengan konsep agribisnis minapolitan diharapkan dapat melayani kawasan produksi pertanian dalam hal ini perikanan dan dapat menjadi pusat kegiatan agribisnis untuk daerah di sekitarnya yang menjadi kawasan *hinterland.*

Adapun infrastruktur yang perlu disediakan antara lain meliputi:

1. **Infrastruktur yang bersifat software**
   - Aturan kebijakan terkait dengan infrastruktur minapolitan (tata ruang, masterplan/RPJM, RPIJM, DED)
   - Layanan Pemberdayaan Pembudidaya yaitu Penyuluhan teknologi, model pemberdayaan kelembagaan
2. **Infrastruktur Lingkungan/Budidaya**
   - Budidaya Laut (jankar Kolektif, KJA, Jaring Tancap, Dermaga hasil panen, handling space, kantor management/saung meeting/gudang, penjemuran rumput laut
   - Budidaya Tambak/Kolam (pintu air, jaringan irigasi pemasukan dan pembuangan, jalan produksi, jembatan, gorong-gorong dan handling space, pabrik es mini/gudang es

ISBN : ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3. Infrastruktur Kawasan

Jalan akses (jembatan, jalan, gorong-gorong), jaringan listrik, jaringan telepon, jaringan drainase dan jaringan air bersih

4. Infrastruktur Pendukung

- Input Sarana Produksi: seperti pupuk, bibit, obat-obatan, peralatan, dan lain-lain
- Pendukung Produksi: Sarana produksi pembesaran, Sarana perbenihan, pabrik pakan, toko obat-obatan, pabrik es, brodstock centre
- Pendukung Pengolahan: Kawasan Industri perikanan, cold storage, sarana transportasi, packing industry untuk perikanan
- Pendukung Pemasaran: seperti terminal agribisnis (dapat berupa pasar ikan lokal, pasar induk ikan dilengkapi dengan *cold storage, freezer truck*, pabrik es, pasar benih), moda transportasi, tempat promosi, pusat informasi pasar dan lainnya. Lokasinya bisa di sentra-sentra pasar konsumen atau sub terminal di sentra-sentra produksi
- Sarana Penunjang Produksi: seperti lembaga perbankan, koperasi dan lain-lain

7. PENGEMBANGAN USAHA BERBASIS PEMBERDAYAAN KELOMPOK

Untuk mewujudkan pengembangan agribisnis minapolitan, perlu adanya pengembangan usaha berbasis pemberdayaan kelompok.Hal ini merupakan upaya untuk mewujudkan sistem usaha terpadu dalam kemandirian. Pengembangan usaha berbasis pemberdayaan kelompok, antara lain meliputi:

- PENGUATAN KELEMBAGAAN (kelompok pembudidaya ikan)
- PENDAMPINGAN (Balai, Dinas Propinsi, Dinas Kabupaten/Kota, Bank,)
- KEMITRAAN(supplier sarana, eksportir)
- SUBSIDI(Benih/bibit, pupuk, pakan, pabrik pakan, alat pengolah rumput laut)
- PENGUATAN MODAL (melalui APBN, APBD, Bank, BUMN)

DAFTAR PUSTAKA

[1] Dahuri, Rokhmin et all. 2004. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. PT Pradnya Paramitra. Jakarta.

[2] Friedmann, J, M. Douglass, 1975, Agropolitan Development: Towards a New Strategy for Regional Development in Asia. Makalah disampaikan pada United Nation Centre for Regional Development, Nagoya, November 1975.

[3] Hasil Audiensi Dinas Perikanan dan Kelautan Propinsi Se-Indonesia dengan Deputi Bidang Koordinasi Pertanian Dan Kelautan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,19 Maret 2008, Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Perikanan, Ruang Rapat Graha Sawala - Jakarta

[4] Ridlo, Mohammad Agung,*Pedoman Penyusunan Masterplan& RPJM Kawasan Agropolitan "Agropolitan adalah pengembangan wilayah dengan pendekatan bottom up planning, maka partisipasi aktif serta keterlibatan seluruh stakeholder (masyarakat agribisnis, investor dan pemerintah daerah) sangat menentukan"*, Disampaikan pada acara Diseminasi Pedoman dan Petunjuk Teknis Agropolitan, di Denpasar Bali, 15-16 Oktober 2008.

[5] Sarasehan Nasional, 14-15 Desember 2007, Pernyataan Bersama tentang Agropolitan/Minapolitan, Kaliurang Magelang.

[6] SK Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Kawasan Agropolitan Keputusan Mentan Nomor : 467/Kpts/OT.160/8/2006

[7] Undang-Undang Republik Indonesia No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang.`

ISBN : ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KARAKTERISTIK POLA PENGGUNAAN LAHAN KAWASAN PESISIR KOTA MAKASSAR STUDI KASUS: DELTA SUNGAI JENEBERANG

Mukti Ali[1)], Slamet Trisutomo[1)], Sri Aliah Ekawati[1)], Resti Kharisma[1)]

[1)]LaboPerencanaandanPengembangan Wilayah Pesisir, Program StudiPengembanganWikayahdan Kota, FakultasTeknik, UniversitasHasanuddin

Email :mukti_ali93@yahoo.com

Naskah diterima :10 Maret 2017 Naskah direvisi : 10 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Wilayah pesisir Kota Makassar menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata. Hal tersebut mempunyai konsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada khususnya wilayah pesisir serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi. Kendala di wilayah pesisir antara lain munculnya permukiman kumuh dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada. Tujuan penelitian ini untuk mengidentifikasi karakteristik pola penggunaan lahan di Delta Sungai Jeneberang, sebagai upaya menjadikan wilayah pesisir kota Makassar lebih tertata dengan pengelolaan lingkungan sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan kawasan pesisir bagi pembangunan yang berkelanjutan. Delta sungai Jeneberang merupakan daerah pariwisata dan komersil yang kepadatan penduduk saat ini terus berkembang. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif dan kuantitatif.Hasil Penelitian menunjukkan topografi kawasan penelitian berada pada rentang 0-2 mdpl, pola permukiman cenderung linier, orientasi bangunan pada umumnya mengarah pada jalan dan pantai, terdapat bangunan yang berorientasi menghadap panai dan jalanl, jenis bangunan bersifat permanen dan semi permanen serta non-permanen, pola jaringan jalan cenderung linear dan grid, kondisi jalan baik pada lokasi penelitian yang didominasi materialpaving blockdan jenis vegetasi yang berada pada lokasi penelitian, pepohonan, rerumputan, bakau dan perdu. Pemanfaatan ruang pada lokasi penelitian adalah Penggunaan lahan pada kawasan penelitian yaitu pada Delta Sungai Jeneberang, didominasi oleh permukiman dengan persentase 42% dan terendah dengan lahan yang berfungsi sebagai jasa penginapan.

Kata kunci: *PolaLahan, Delta Sungai Jeneberang, Makassar*

PENDAHULUAN

Sumberdaya pesisir dan lautan Indonesia merupakan salah satu modal dasar pembangunan Indonesia yang sangat potensial disamping sumberdaya alam darat. Sumberdaya wilayah pesisir diprediksi akan semakin meningkat peranannya dimasa-masa mendatang dalam mendukung pembangaunan ekonomi nasional sehingga di wilayah pesisir mengalami perkembangan dan pertambahan penduduk yang pesat. Perkembangan dan pertumbuhan kota disebabkan oleh pertumbuhan penduduk baik secara alami maupun migrasi serta pertumbuhan dan perkembangan kegiatan usahanya yang disebabkan oleh perubahan pola sosial budaya dan sosial ekonomi penduduk di perkotaan. Selain itu adanya migrasi dengan alasan bahwa wilayah pesisir merupakan kawasan alternatif permukiman kota bagi kaum miskin, peluang bagi kemudahan transportasi, menjadi pintu gerbang alami untuk perdagangan antar tempat yang terpisahkan oleh laut, sehingga wilayah pesisir memiliki daya tarik untuk dijadikan sebagai daerah permukiman[2].

Wilayah pesisir yang berdasarkan sejarah merupakan titik tumbuh Kota Makassar. Kota Makassar, memiliki areal seluas 175,77 kilometer persegi dengan panjang pesisir mencapai ±35,52 km (Perda RTRW Makassar 2005-2035), wilayah pesisir kota Makassar menyediakan sumberdaya alam yang produktif baik

sebagai sumber pangan, tambang mineral dan energi, media komunikasi maupun kawasan rekreasi atau pariwisata[1].Hal tersebut mempunyai konsekuensi bagi Pemerintah Kota Makassar dalam mengelola berbagai potensi yang ada khususnya wilayah pesisir serta mengatasi kendala dan tantangan yang dihadapi.

Kendala di wilayah pesisir antara lain munculnya permukiman kumuh dan penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan rencana yang ada, tantangan yang dihadapi selanjutnya dimasa yang akan datang agar dapat menjadikan wilayah pesisir kota Makassar lebih tertata dengan pengelolaan lingkungan dalam wilayah pesisir sesuai dengan konsep yang ada harus dilakukan secara terencana, rasional, bertanggungjawab sesuai dengan kemampuan daya dukungnya dengan mengutamakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat serta memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan kawasan pesisir bagi pembangunan yang berkelanjutan[5].

Dengan isu yang telah dipaparkan pada paragraf sebelumnya, tujuan dari penelitian ini yaitu mengidentifikasi karakteristik pola penggunaan lahan kawasan pesisir Kota Makassar untuk studi kasus Delta Sungai Jeneberang.

METODOLOGI

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian deskriptif.Dalam penelitian ini, deskriptif dilakukan secara kualitatif (data dalam bentuk kalimat, skema dan gambar) dan kuantitatif (data dalam bentuk angka). Deskriptif kualitatif dan kuantitatif dalam penelitian ini digunakan untuk analisis karakteristik kawasan pesisir (lingkungan alam dan buatan).

Dalam hal ini penulis memperoleh dua jenis data yaitu data primer dan data sekunder.Data Primer, diperoleh secara langsung dengan melakukan observasi di lapangan serta wawancara langsung yang berhubungan dengan data-data yang dibutuhkan berupa data tentang karakteristik perumahan dan permukiman, prasarana jalan, jenis vegetasi.Data Sekunder, diperoleh dari kantor instansi terkait (dokumentasi) yang mengetahui fisik lingkungan berupa topografi kawasan, serta referensi-referensi lainya yang relevan dengan masalah pokok dalam penelitian ini.(4)

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut;analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif, digunakan untuk mengetahui karakteristik pola penggunaan lahan kawasan pesisir kota Makassar berupa karakteristik fisik lingkungan, karakteristik permukiman, karakteristik prasarana jalan, jenis vegetasi; dan analisis desktriptif juga digunakan untuk mengetahui pengaruh eksistensi laut/pesisir terhadap pola pengguna lahan di sekitar kawasan pesisir Kota Makassar

Analisis spasial merupakan analisis keruangan menggunakan data yang diinterpretasikan dalam bentuk peta. Analisis ini menggunakan alat bantu *software* terutama ArcGIS.([3].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pesisir zona Muara Sungai Jeneberang memiliki luas 125,6 hektar.Luasan tersebut terdiri atas lahan yang tidak terbangun dan lahan terbangun.Lahan terbangun di wilayah zona Muara Sungai Jeneberang ini cenderung meningkat cukup pesat dalam 10 tahun terakhir.Pada tahun 2006 luas lahan terbangun adalah 9,8 hektar atau sebesar 7,8% dari jumlah luas lahan di zona Muara Sungai Jeneberang.Sisanya atau 92,2% adalah lahan tidak terbangun. Luas lahan terbangun kemudian meningkat pada tahun 2016 menjadi 36,1 hektar atau 28,7% dari jumlah luas lahan zona Muara Sungai Jeneberang. Berdasarkan angka-angka tersebut, perubahan lahan dari lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun di zona Muara Sungai Jeneberang dalam 10 tahun (2006-2016) meningkat 20,9%.Perubahan fungsi lahan didominasi oleh pembangunan kawasan perumahan dan pusat perbelanjaan di sepanjang Jalan Metro Tanjung Bunga, ke bagian Selatan Kota Makassar.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gambar 1 Perubahan Guna Lahan Pada Zona Muara Sungai Jeneberang
Sumber: Citra Google Earth, 2016

Topografi atau elevasi kawasan penelitian berada pada rentang 0-2 mdpl.Hal ini dikarenakan lokasi penelitian berada pada pesisir pantai sehingga tidak menutup kemungkinan ketinggian maksimal berada pada angka 2.Ketinggian yang relatif rendah ini mempunyai sisi positif dan negatif tentunya. Dengan ketinggian 0-2 mdpl tersebut, tidak perlu merekayasa ketinggian agar aman dalam membangun, tetapi sisi negatifnya adalah memungkinkan kejadian banjir atau banjir rob terjadi.

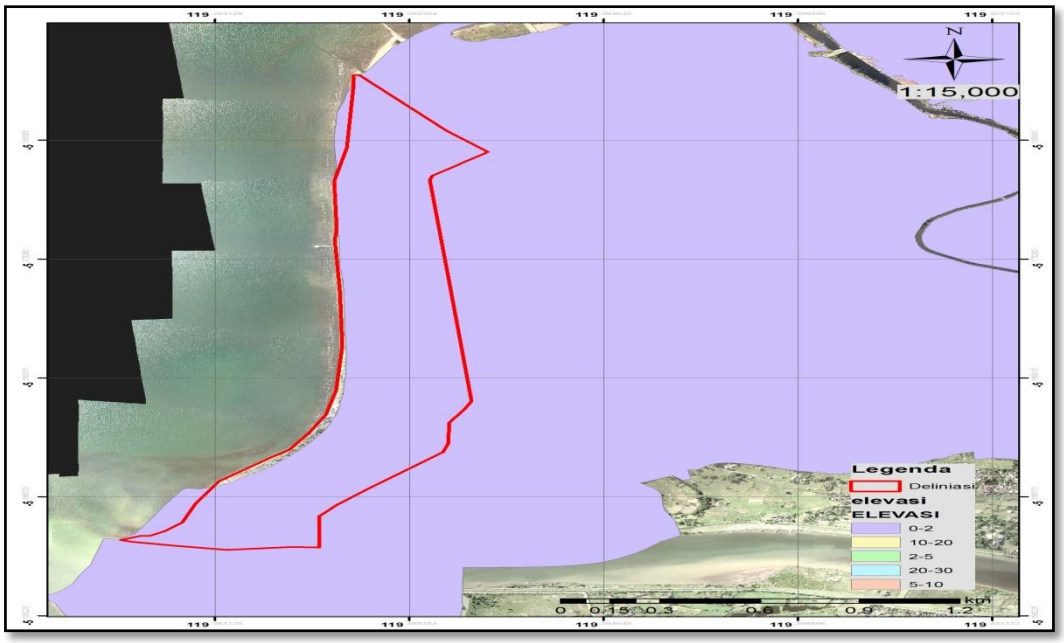

Gambar 2 Peta Topografi Kawasan Penelitian

Lokasi penelitian berada pada kawasan pesisir yang identik dengan pertemuan antara darat dan laut. Kawasan ini merupakan kawasan yang menarik untuk masyarakat bermukim, salah satu alasan yaitu kawasan alternatif permukiman kota bagi kaum urbanisasi dan akses terhadap pusat tarikan (tempat bekerja) cepat dan mudah.

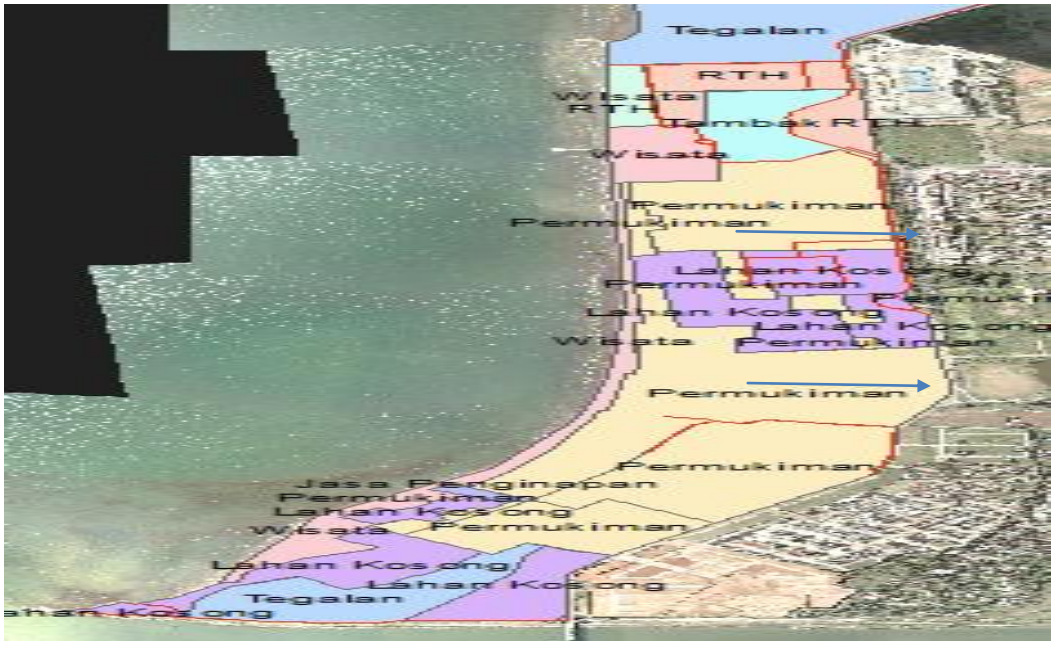

Gambar 3 Pola Permukiman DeltaSungai Jeneberang

Sejarah dahulu menyebutkan bahwa Kota Makassar merupakan kota yang berkembang dan berada di tepi laut (pantai). Pola permukiman pada lokasi tersebut teridentifikasi mengikuti garis pantai dalam hal ini pola *linear* dengan perkembangan ke arah timur, berbatasan dengan Jalan Tanjung Bunga yang merupakan jalan yang menghubungkan Kota Makassar dengan Kabupaten Gowa. Berdasarkan citra satelit perubahan guna lahan 10 tahun *series*, diperoleh perubahan sangat signifikan dari pola perumahan dan jalan.Dimana tahun 2006, pola perumahan dan jalan cenderung *linear*.Sedangkan pada tahun 2016, pola jalan dan permukiman telah mengalami perkembangan yang pesat sehingga mengarah pada pola permukiman *linear* dan memusat serta pola jalan berubah menjadi pola *linear* dan *grid*.Dengan kondisi jalan menuju permukiman masyarakat di sekitar Sungai Jenebenrang berupa *paving block* dan beberapa jalan tersebt tertutup pasir.
Orientasi bangunan pada lokasi penelitian terbagi menjadi dua orientasi yaitu jalan dan pantai.Berdasarkan gambar di bawah ini,

Tabel 1 Orientasi Bangunan

No.	Lokasi	Orientasi Bangunan	Keterangan
1	Kawasan Tanjung Bayang-Sungai Jeneberang		Orientasi bangunan menghadap jalan untuk bangunan yang berada jauh dari pesisir pantai

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

No.	Lokasi	Orientasi Bangunan	Keterangan
			Bangunan yang berada di pesisir laut orientasinya menghadap laut

Sumber: Dokumentasi Penelitian 2016

Untuk jenis bangunan pada Delta Sungai Jeneberang, mayoritas bangunan merupakan kelompok bangunan rumah tinggal.Jenis bangunan rumah tinggal ini terdiri atas bangunan permanen dan semi permanen.

Gambar 4 Jenis bangunan non permanen untuk rumah tinggal di wilayah Jeneberang

ISBN : 978-602-73463-1-4

Gambar 5 Jenis bangunan permanen untuk rumah tinggal di wilayah Jeneberang

Ilustrasi di bawah ini, menunjukkan jenis bangunan yang diperoleh dari hasil observasi pada lokasi penelitian.Karakteristik jenis bangunan baik non permanen, semi dan permanen terdapat pada lokasi penelitian.Semakin mengharah ke laut, jenis bangunan lebih atau mendominasi pada jenis bangunan non permanen.Sedangkan peralihan dari laut ke pesisir, masih dijumpai jenis bangunan non permanen dengan persentase kurang lebih 30%. Tetapi semakin
kearah pesisir sampai ke darat, jenis bangunan akan bersifat semi dan permanen.

Gambar 6 Ilustrasi Jenis Bangunan

Berbeda dengan ilustrasi pada gambar sebelumnya yang berbatasan langsung dengan laut, ilustrasi di atas menunjukkan bahwa terdapat tarikan seperti Pantai Losari dan Pelabuhan Soekarno Hatta yang bangunannya berada di atas atau sebelum ruang luat.Selain itu antara bangunan dan kawasan pusat tarikan tersebut, terdapat jalan arteri dan kolektor yang memisahkan antara kawasan tersebut dengan kawasna lainnya. Sehingga bangunan yang berada langsung di depan jalan tersebut merupakan bangunan yang bersifat

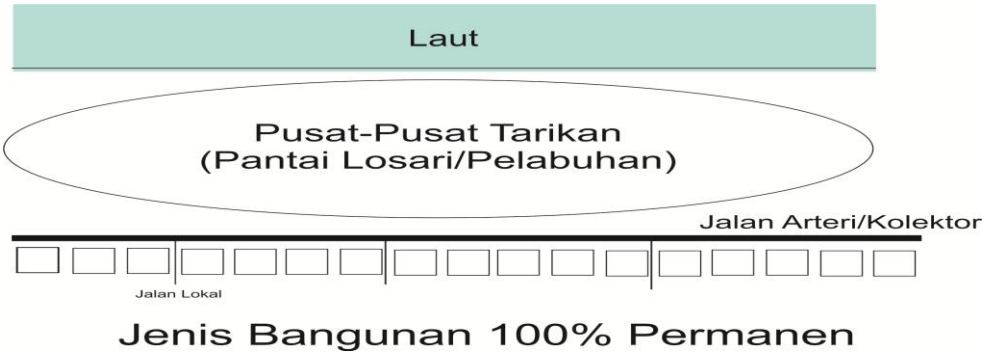

permanen.

Gambar 7 Ilustrasi Jenis Bangunan Jika Terdapat Tarikan

Berdasarkan hasil observasi dan memandingkan dengan Rencan Tata Ruang Kota Makassar, masih terdapat bangunan yang melanggar garis sempadan pantai.Hal ini berdasarkan hasil wawancara yang mengatakan bahwa sejak kurang lebih 20-40 tahun yang lalu mereka bermukim di lokasi tersebut dan diturunkan kepada keturunan-keturunannya.Sehingga semakin banyanya pelaku urbanisasi yang datang baik sanak saudara dan lainnya untuk mencari pekerjaan dan membangun permukiman pada lokasi-lokasi tersebut.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

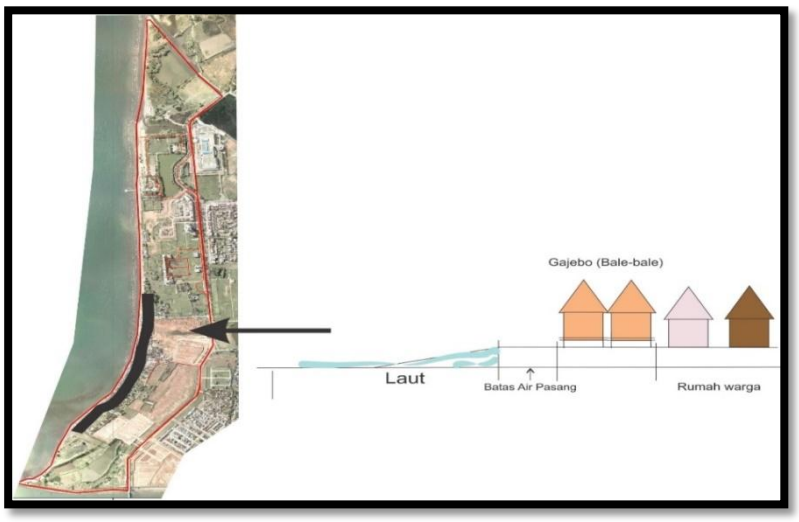

Gambar 8 Sempadan Pantai Muara Sungai Jeneberang

Selain itu wawancara lain disebutkan pula khususnya pada Delta Sungai Jeneberang, pendatang yang bersuku Bugis Makassar, Majene, Jawa dan Toraja mengaku murah menyewa rumah, sehingga banyak dari masyarakat pendatang tersebut bermukim dengan waktu lama di lokasi tersebut. Selain dikarenakan murah dan akibat turun-temurun tinggal di lokasi tersebut, aspek pekerjaan juga mendasari masyarakat untuk lama bermukim di lokasi tersebut.Banyak masyarakat yang menggunakan sempadan pantai (dimana dalam RTRW Kota Makassar 2015-2035 berfungsi sebagai RTH) untuk aktivitas pariwisata seperti gajebo tradisional atau penginapan.

Pola jalan yang ada di wilayah penelitian umumnya merupakan pola grid.Pola jalan grid ini pada umumnya memang terjadi di sebagian kota-kota besar.Pola ini sangat cocok untuk situasi pola perjalanan yang sangat terpencar serta dengan layanan transportasi di setiap areanya.Namun terdapat pula pola jalan linear di wilayah Zona Muara Sungai Jeneberang.

Vegetasi *mangrove*dapat dijumpai pada kawasan penelitian ini yaitu berada pada pengunaan lahan tambak.Selain itu terdapat beberapa penggunaan lahan yang belum disentuh pembangunan seperti tambak/ tegalan, lahan kosong berumput, kebun, atau pun ruang terbuka hijau yang dipenuhi jenis-jenis pepohonan dan perdu yang sering dijumpai pada lokasi ini pula.

Tabel 2.KondisiVegetasiPadaLokasiPenelitian

No	Gambar	Keterangan
1		Perdu dan Pepohonan serta bakau merupakan vegetasi yang berada pada muara sungai Jeneberang yang umumnya berada pada guna lahan tambak, tegalan dan ruang terbuka.
2		Guna lahan berupa tanah berumputan yang berada pada zona muara Sungai Jeneberang

Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2016

Penggunaan lahan pada kawasan penelitian yaitu pada Delta Sungai Jeneberang, didominasi oleh permukiman dengan persentase 42% dan terendah dengan lahan yang berfungsi sebagai jasa penginapan.

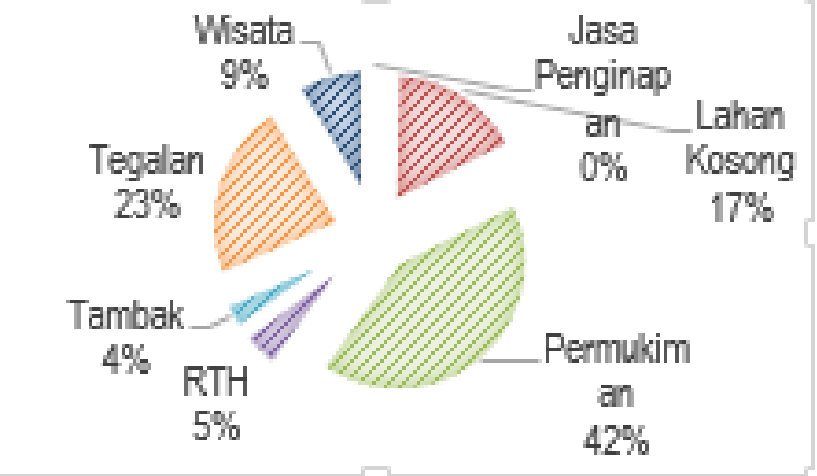

Gambar 9 Persentase Penggunaan Lahan Kawasan Penelitian

Berikut adalah tabel penggunaan lahan pada kawasan penelitian dengan fungsi yang berbeda-beda seperti permukiman, ruang terbuka hijau dan lain sebagainya (gambar 2).Sedangkan berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota Makassar 2015-2035, diarahkan sebagai kawasan campuran bisnis, perdagangan dan jasa, permukiman, RTH, sempadan danau, sungai, dan pariwisata.

Tabel 3 Pola Penggunaan Lahan Eksisting

No	Penggunaan Lahan	Luas (m^2)
1	Jasa Penginapan	3,674
2	Lahan Kosong	202,737
3	Permukiman	498,103
4	RTH	58,033
5	Tambak	40,558
6	Tegalan	268,443
7	Wisata	103,150
Total		1,174,698

Sumber: Hasil Pemetaan Peneliitian, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Klasifikasi jalan berdasarkan fungsinya pada kawasan penelitian terbagi menjadi jalan kolektor primer dan jalan lokal.Jalan kolektor primer yaitu berada pada kawasan penelitian Sekitar Jeneberang yang menghubungkan Kota Makassar dan Kabupaten Gowa.Selain itu terdapat pula jalan arteri pada kawasan penelitian yang merupakan Jalan Nusantara (Kawasan Pelabuhan Soekarno Hatta). Jalan kolektor yang menghubungkan kawasan-kawasan ini merupakan jalan lingkar luar Kota Makassar, sehingga jika ditarik garis lurus maka akan mengkoneksikan Kota Makassar dan *hindterland*nya seperti Kabupaten Maros, Takalar dan Gowa.

Gambar 10 Kondisi jalan berkerikil kecil di sekitar Sungai Jeneberang

Arahan Penggunaan Lahan pada Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2035

Tabel di bawah ini menunjukkan arahan dari Rencana Tata Ruang Kota Makassar Tahun 2015-2035. Pada zona muara Sungai Jeneberang terdapat beberapa pemanfaatan ruang yang diarahkan pada rencana tata ruang kota, pemanfaatan ruang tersebut seperti kawasan campuran bisnis yang luasnya 68,73% dari luas deliniasi zona penelitian tersebut. Selanjutnya terdapat kawasan perdagangan dan jasa, permukiman kepadan rendah, ruang terbuka hijau, sempadan danau, sungai dan wisata.

Tabel 4 Arahan RTRW Tahun 2015-2035 Pada Zona Muara Sungai Jeneberang

No	Arahan RTRW	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	Kawasan Campuran Bisnis	710.9759	68.73
2	Perdangan dan Jasa	12.27122	1.19
3	Permukiman Kepadatan Rendah	249.8749	24.16
4	RTH	17.13446	1.66
5	Sempadan Danau	36.8469	3.56
6	Sungai	0.426792	0.04
7	Wisata	6.909601	0.67
		1034.44	100.00

Sumber: RTRW Kota Makassar 2015-2035

KESIMPULAN

Hasil Penelitian menunjukkan topografi kawasan penelitian berada pada rentang 0-2 mdpl, pola permukiman cenderung linier dan menuju memusat, orientasi bangunan pada umumnya mengarah pada jalan dan pantai, terdapat bangunan yang berorientasi menghadap panai dan jalan, jenis bangunan bersifat permanen

dan semi permanen serta non-permanen, pola jaringan jalan cenderung *linear* dan *grid*, kondisi jalan baik pada lokasi penelitian yang didominasi material *paving block* dan jenis vegetasi yang berada pada lokasi penelitian, pepohonan, rerumputan, bakau dan perdu. Pemanfaatan ruang pada lokasi penelitian adalah Penggunaan lahan pada kawasan penelitian yaitu pada Delta Sungai Jeneberang, didominasi oleh permukiman dengan persentase 42% dan terendah dengan lahan yang berfungsi sebagai jasa penginapan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] BAPPEDA. 2005. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar 2005 -2035.
[2] Dahuri Rokhiman. 2001. Pengelolaan Sumber Daya Pesisir Dan Lautan Secara Terpadu. Pradnya Paramita.
[3] Prahasta, Eddy. 2009. Sistem Informasi Geografis Tutorial Arcview. Bandung: Penerbit Informatika.
[4] Sevilla,Consuelo G et. al. 1993. Pengantar Metode Penelitian. Universitas Indonesia.
[5]Trisutomo, Slamet . 1997. Kota Tepi Air. Karakteristik Spasial Di Ujung Pandang Indonesia.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PLACE-BASED MANAGEMENT SEBAGAI SALAH SATU PENDEKATAN DALAM PENGELOLAAN RUANG LAUT DI INDONESIA

Putu Oktavia[1)]

[1)]Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota / Sekolah Arsitektur, Perencanaan, dan Pengembangan Kebijakan / Institut Teknologi Bandung

Email :putu.oktavia@students.itb.ac.id; putu.oktavia@gmail.com

Naskah diterima : 5Desember 2016 Naskah direvisi : 1 Maret 2017 Disetujui terbit : 13 Maret 2017

ABSTRAK

Berbagai permasalahan kerusakan lingkungan laut terkait dengan praktek-praktek pemanfaatan yang tidak berkelanjutan semakin meluas, salah satunya karena sifatnya yang open access. Berbagai studi menyimpulkan bahwa penanganan kerusakan lingkungan laut tersebut membutuhkan perhatian untuk prioritas penanganan dan perubahan signifikan dalam kebijakan yang memberikan pengaruh terhadap interaksi manusia dengan lingkungan laut.Salah satu permasalahan dalam pengelolaan ruang laut adalah penetapan skala.Kompleksitas ruang laut menyebabkan pendefinisian batas ekosistem laut secara geografis merupakan tugas yang berat bagi pengelola ruang laut karena variasi yang sangat besar, mulai dari yang mikro hingga makro. Di sisi lain, pengelolaan ruang laut juga terkait dengan masalah administrasi kepemerintahan. Padahal, batas lingkungan dengan batas wilayah administrasi seringkali tidak saling berhimpitan.Place-based management merupakan salah satu pendekatan yang diambil untuk mengatasi permasalahan skala dan konektivitas dalam pengelolaan ruang laut.Paper ini membahas berbagai contoh penerapan place-based management dalam berbagai tingkatan skala berdasarkan penelitian yang dilakukan Olsen et.al [7[.Hasil kajian dari studi tersebut kemudian digunakan untuk mendiskusikan tantangan dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia. Kesimpulan yang bisa ditarik dari hasil kajian ini adalah perlunya mengakomodasi konsep ekoregion dalam penataan ruang laut di Indonesia, perlunya pengakuan terhadap hak dan kewajiban institusi di tingkat lokal, perlunya pendekatan yang adaptif dan kolaboratif dalam pengelolaan ruang laut, serta perlunya melengkapi data dan informasi dan membangun kolaborasi dan konsensus antarstakeholder dalam berbagai tingkatan skala.

Kata kunci: *place-based management, skala, laut.*

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan ruang laut, masalah skala dan konektivitas menjadi hal yang penting.[5]menyatakan bahwa sifat ruang laut yang terbuka akan menyulitkan bagi para pengelola ruang untuk membatasi antara satu ruang dengan ruang lainnya, seperti di wilayah daratan. Keterkaitan antara satu kawasan dengan kawasan lainnya dalam siklus hidup hewan laut dalam wilayah yang luas merupakan salah satu hal yang menjadi tantangan tersendiri dalam pengelolaan ruang laut. Laporan UNEP[8] menyimpulkan bahwa dalam 20 tahun mendatang, kebutuhan untuk merencanakan dan mengimplementasikan pengelolaan laut dengan skala ekosistem (ecosystem scale) dan berdasarkan pengelolaan ekosistem (ecosystem based management) di lingkungan laut merupakan hal yang penting jika masyarakat ingin menghindari penurunan kualitas keanekaragaman hayati di laut secara substansial dan konsekuensi negatif yang akan timbul akibat penurunan kualitas tersebut terhadap negara-negara pantai

Salah satu permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan ruang untuk kepentingan perlindungan lingkungan, termasuk ruang laut, adalah adanya perbedaan dalam penetapan batas administrasi pemerintahan dengan batas ekosistem.[6]mendefinisikan batas administrasi sebagai "… lines that separate different ownerships, jurisdictions, or responsibilites, and often different management philosophies, goals, and practices." Menurut Landres et.al, batas administrasi seringkali diletakkan di suatu ruang tanpa memperhatikan

diskontinuitas atau transisi alamiah, seperti peralihan antara hutan dengan padang rumput, karena hanya mempertimbangkan kompromi politik, sosial, dan ekonomi (ibid.: 40). Akibatnya, karena ekosistem baik di darat maupun laut umumnya bersifat terbuka (open system) yang membutuhkan aliran energi dan material secara konstan untuk menjaga keberlanjutannya, perbedaan prinsip pengelolaan dan pemanfaatan ruang yang diterapkan di sepanjang batas administrasi antara dua wilayah berbatasan akan mengganggu aliran energi dan material tersebut dan pada akhirnya akan mengubah kondisi dan proses ekologis yang terjadi dalam suatu ekosistem. Lebih lanjut, batas administrasi menyebabkan terjadinya fragmentasi sistem ekologis dengan konsekuensi yang beragam, antara lain terjadinya perubahan komposisi spesies di sepanjang kawasan yang berbatasan dan terjadinya isolasi ekosistem (ibid.)

Dengan kompleksitas yang terkait dengan pengelolaan ruang laut, terutama terkait dengan masalah skala dan konektivitas, yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana menetapkan batas yang efektif untuk kepentingan pengelolaan ruang laut? Tujuan dari paper ini adalah untuk mendiskusikan masalah pengelolaan ruang laut dalam berbagai skala, yaitu di tingkat lokal (mikro), meso, dan makro dengan menggunakan pendekatan place based management.

Place-based management lahir seiring dengan perkembangan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan lingkungan (ecosystem approach to management/EAM) sejak tahun 1980an dan 1990an (Browman dan Stergiou 2004 dalam[7]. Ekosistem adalah "tempat" di permukaan bumi sehingga pengelolaannya secara inheren merupakan bentuk place-based management [7]Menurut Crowder et.al (2008 dalam [7], cara termudah untuk memasukan dimensi spasial dalam EAM adalah dengan membuat tempat tertentu sebagai fokus pengelolaan. Yang dimaksud dengan "tempat" dalam hal ini adalah ekosistem tertentu, termasuk ekosistem laut yang kompleks.

METODOLOGI

Paper ini menggunakan kajian literatur untuk membahas kasus yang terkait dengan penerapan pendekatan place based management dalam pengelolaan ruang laut. Metode ini digunakan karena dapat memenuhi berbagai tujuan, seperti yang disampaikan oleh[3], yaitu "It share with the reader results of other studies … It provides a framework for establishing the importance of the study as well as a benchmark for comparing the results with other findings."

Paper ini distrukturkan sebagai berikut: Pertama, tulisan ini membahas kasus-kasus penerapan place based management yang didasarkan pada tulisan [7] Hal hal yang dibahas terkait dengan tantangan penerapan pendekatan tersebut dalam pengelolaan ruang laut.Hasil kajian ini kemudian menjadi dasar untuk mendiskusikan tantangan yang terkait dengan pengelolaan ruang laut di Indonesia, yang disajikan di bagian ketiga hasil dan pembahasan.Bagian kedua hasil dan pembahasan membahas pengelolaan ruang laut di Indonesia berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.Paper ini diakhiri dengan kesimpulan terkait.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Penerapan *place based management* dalam pengelolaan ruang laut di Northeast Atlantic Ocean

Dalam tulisannya, [7]menjelaskan 3 (tiga) skala pengelolaan ruang laut, yaitu :

1. Skala lokal, biasanya mencakup tindakan pengelolaan di tingkat lokal seperti zonasi wilayah pesisir dan kawasan konservasi perairan (KKP; Marine Protected Areas/MPA) yang dirancang untuk melindungi *feature* laut tertentu atau sebagai kawasan yang berfungsi memberikan perlindungan terhadap spesies tertentu;
2. Skala regional menengah/meso, mencakup KKP yang lebih besar dan meliputi *feature* laut yang lebih luas dan habitat yang penting; dan
3. Skala regional makro, mencakup rencana pengelolaan ekosistem berskala besar, seperti yang disebut sebagai Ekosistem Laut Besar (Large Marine Ecosystem / LME) [1].

Untuk menjelaskan perbedaan dalam pengelolaan ruang laut di setiap skala pengelolaan tersebut, [7]memberikan 3 (tiga) contoh kasus di Samudera Atlantik bagian Timur Laut (Northeast Atlantic Ocean), terutama yang terkait dengan Norwegia.Ketiga kasus dipilih berdasarkan kesamaan bahwa seluruhnya menggunakan pendekatan sistematis dimana identifikasi fungsi dan batasan ekosistem kunci mendapatkan

[1] Large Marine Ecosystem (LME) adalah bentang alam laut yang memiliki luas rata-rata 0,5 – 1 juta km2; didelineasi dengan menggunakan kriteria ekologis yang mencakup karakteristik topografi dasar laut, hidrografi, produktivitas, dan populasi yang berhubungan secara trofikal (terkait dengan rantai makanan). Skala LME seringkali ditentukan oleh rentang spasial dan dinamika komponen ekosistem yang penting seperti populasi ikan komersial.(Olsen et al., 2011: 263)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

bobot yang besar dalam penetapan batasan wilayah yang dikelola.Ringkasan dari kasus-kasus yang dikemukakan Olsen et.al [7] dapat dilihat pada Tabel 1.

Beberapa poin penting yang dapat ditarik dari tulisan[7] terkait dengan pelaksanaan *place-based management* di berbagai tingkatan skala, adalah sebagai berikut:

1. Kompleksitas pengelolaan lingkungan semakin meningkat seiring dengan peningkatan skala dan ketidakpastian.
2. Di tingkat meso dan makro, penetapan kawasan yang akan dikelola melibatkan lebih banyak proses ilmiah yang membutuhkan pengetahuan yang lebih banyak dan beragam tentang ekosistem yang akan dikelola. Selain itu, tujuan pengelolaan di tingkat ini akan lebih sulit dikomunikasikan kepada stakeholder karena banyaknya sektor dan kepentingan yang terkait.
3. Membangun kesepakatan dan konsensus di antara berbagai kementerian terkait dalam skala meso, serta antar negara dalam skala makro, merupakan tantangan signifikan dalam pengelolaan ruang laut..
4. Di tingkat makro (LME), *place-based management* cenderung fokus pada basis ilmiah penetapan kawasan dan tujuan yang lebih luas, sementara implementasi dan isu pengelolaan yang lebih detail (seperti zonasi) diserahkan kepada masing-masing negara yang terkait.
5. Partisipasi stakeholder secara langsung lebih terlihat di skala mikro. Di tingkat meso, stakeholder hanya dilibatkan dalam proses konsultasi, sementara di tingkat makro partisipasi stakeholder jauh lebih terbatas. Secara singkat, pelibatan stakeholder secara langsung akan semakin sulit seiring semakin meningkatnya skala.

Untuk mengatasi masalah kompleksitas seiring dengan peningkatan skala, [7] menyarankan *place-based management* yang integratif dengan mempertimbangkan beragam sektor, apapun skala perencanaannya. Selain itu, pengetahuan ilmiah terkait dengan kawasan yang akan dikelola, pelibatan stakeholder dalam proses untuk memperoleh legitimasi dan pengakuan terhadap rencana pengelolaan yang disusun, *good governance*, pengakuan politis, dan pengelolaan yang adaptif merupakan kunci keberhasilan pengelolaan berbasis kawasan di semua skala.

2) Pengelolaan ruang laut di Indonesia

Di Indonesia, kesadaran akan nilai strategis penataan ruang laut telah tercantum secara legal dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Khusus untuk ruang laut, upaya pengelolaan ruang laut telah dilakukan Indonesia sejak tahun 2007, ditandai dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 yang kemudian diubah dan diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Selanjutnya, pada tahun 2014, Pemerintah juga telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan yang secara spesifik mengatur tentang aspek kelautan di Indonesia.

Ketentuan mengenai rencana tata ruang laut diatur dalam UU 32/2014 dan UU 27/2007 *juncto* UU 1/2014. UU 32/2014 menegaskan bahwa perencanaan ruang laut meliputi: perencanaan tata ruang laut nasional, zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, dan perencanaan zonasi kawasan laut. Perencanaan tata ruang laut nasional merupakan proses perencanaan untuk menghasilkan Rencana Tata Ruang Laut Nasional (RTRLN). Sedangkan perencanaan zonasi kawasan laut merupakan perencanaan untuk menghasilkan Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional (RZ KSN), Rencana Zonasi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (RZ KSNT), dan Rencana Zonasi Kawasan Antar Wilayah (RZ KAW).

Pemerintah Daerah wajib menyusun semua rencana sesuai dengan kewenangannya masing-masing.Dari keempat jenis rencana pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang termasuk ke dalam rencana tata ruang laut adalah Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K).RZWP-3-K merupakan arahan pemanfaatan sumber daya di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota.RZWP-3-K diserasikan, diselaraskan, dan diseimbangkan dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi atau Kabupaten/Kota. Mengingat Pemerintah Kabupaten/Kota tidak lagi mempunyai kewenangan dalam pengelolaan wilayah laut, sebagaimana diatur dalam UU 23/2014 Pasal 27 dan Pasal 28, maka hanya ada RZWP-3-K Provinsi (RZWP3K-P) dengan lingkup pengaturan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil meliputi daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut, ke arah darat mencakup wilayah administrasi kecamatan dan ke arah laut sejauh 12 mil laut diukur dari garis pantai.

3) Diskusi

Berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku, Indonesia menganut pola pengelolaan ruang laut yang dibatasi oleh wilayah administrasi, dimana wilayah laut dan pengelolaannya dibagi-bagi menurut tingkatan kewenangan pemerintahan.Rencana pengelolaan ruang laut yang disusun baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi sesuai kewenangannya kemudian membagi habis wilayah laut Indonesia berdasarkan batasan administratif.

Tabel 1. Perbandingan Kasus Pengelolaan Ruang Laut di Samudera Atlantik bagian Timur Laut Berdasarkan Skala Pengelolaan

	Skala lokal: kawasan perlindungan untuk lobster di Skagerrak, Norwegia	**Skala meso: Laut Norwegia dan Laut Barents**	**Skala makro: Large Marine Ecosystem di Atlantik Utara**
Tujuan	Perlindungan spesies lobster Eropa (*Homarus gammarus*)	Mengintegrasikan dan menyeimbangkan seluruh kegiatan dan pemanfaatan ruang laut secara berkelanjutan yang menjamin kesehatan (*health*) dan kesejahteraan (*well-being*) seluruh ekosistem laut dalam jangka panjang.	Mengembangkan pendekatan ekosistem (*ecosystem approach*) sebagai *guiding principle* untuk mengintegrasikan pengelolaan perikanan dan pengelolaan lingkungan laut di Norwegia dan Eropa.
Metode /proses penetapan kawasan	1. Kriteria biologis dan kriteria pengelolaan kawasan untuk perlindungan lobster ditetapkan oleh peneliti dan pemerintah lokal untuk menyeleksi lokasi potensial; 2. Nelayan komersial diminta untuk menominasikan kawasan potensial berdasarkan kriteria tersebut,	1. Kawasan yang dianggap bernilai (*valuable*) diidentifikasi berdasarkan satu set kriteria yang diadaptasi dari proses yang sama di tingkat nasional dan internasional, namun dengan penyesuaian sesuai konteks dan lokasi. 2. Kawasan yang dianggap rentan (*vulnerable*) ditetapkan berdasarkan nilai lingkungan (keanekaragaman hayati dan tingkat kepentingan terhadap produksi biologis) terkait dengan gangguan yang mungkin disebabkan oleh sektor perikanan, transportasi, dan migas. 3. Penetapan kriteria dilakukan oleh tenaga ahli (*expert*). Pemilihan lokasi dilakukan dengan diskusi dan konsultasi dengan stakeholder	1. Didelineasi dengan menggunakan kriteria ekologis yang mencakup karakteristik topografi dasar laut, hidrografi, produktivitas, dan populasi yang berhubungan secara trofikal (terkait dengan rantai makanan) 2. Proses penetapan melibatkan pemerintah negara yang termasuk dalam lingkup LME dan organisasi internasional (Uni Eropa, Arctic Council, OSPAR, ICES)
Stakeholder yang dilibatkan	Peneliti, pemerintah lokal, nelayan komersial	Peneliti dan pengelola berbagai sektor terkait (perikanan, transportasi laut, dan migas); stakeholder lain untuk konsultasi; pemerintah sebagai penentu akhir.	Pemerintah pusat; negara tetangga yang terkait; organisasi internasional

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

	Skala lokal: kawasan perlindungan untuk lobster di Skagerrak, Norwegia	**Skala meso: Laut Norwegia dan Laut Barents**	**Skala makro: Large Marine Ecosystem di Atlantik Utara**
Tantangan	Implementasi pengelolaan belum melibatkan seluruh stakeholder (mengecualikan recreational fishers).	1. Ukuran kawasan yang dipilih sangat bervariasi karena adanya perbedaan faktor yang memengaruhi kerentanan tiap kawasan sehingga sulit untuk menarik batas kawasan yang akan dikelola. 2. Kurangnya pengetahuan terkait faktor-faktor yang memengaruhi identifikasi kawasan yang dianggap bernilai (misalnya distribusi spesies). 3. Kesulitan dalam menilai faktor-faktor yang memengaruhi kerentanan dan dampaknya terhadap ekosistem secara kumulatif. 4. Kesulitan dalam membedakan tekanan yang disebabkan alam dan yang disebabkan manusia.	Seluruh negara yang termasuk dalam lingkup LME harus menyepakati deklarasi dan rencana strategis yang terkait dengan pengelolaan LME, serta menerjemahkannya ke dalam rencana pengelolaan kawasan laut di negara masing-masing yang terintegrasi dengan rencana LME.
Faktor penentu keberhasilan	1. Perilaku positif seluruh stakeholder (termasuk yang tidak dilibatkan dalam proses) terkait kawasan yang ditetapkan; 2. Ukuran kawasan yang relatif kecil (0,5-1 km2); 3. Kurangnya tradisi untuk melibatkan stakeholder lokal dalam pengelolaan perikanan di Norwegia.		

Pendekatan pengelolaan ruang laut berbasis wilayah administratif ini memiliki keuntungan dalam hal kemudahan proses administrasi isu dan identifikasi stakeholder yang harus dilibatkan dalam mengatasi isu tersebut. Selain itu, pembatasan secara administratif juga memudahkan dalam proses pengumpulan data dan informasi yang dibutuhkan untuk menyusun rencana, mengingat data dan informasi yang saat ini tersedia di Indonesia sebagian besar terbagi secara administratif pula. Namun demikian, pengelolaan ruang laut berbasis wilayah administratif ini kemudian berpotensi mengabaikan keterkaitan antarkomponen dalam suatu ekosistem yang melampaui batasan administratif, terutama dalam ekosistem yang bersifat terbuka seperti ruang laut. Seperti yang dikemukakan([6] Landres, 2013), penerapan tindakan pengelolaan yang berbeda di kawasan yang secara administratif berbatasan akan menimbulkan dampak dengan konsekuensi berbeda yang mungkin merugikan bagi keberlanjutan ekosistem secara keseluruhan.

Peraturan yang terkait dengan pengelolaan ruang laut di Indonesia juga belum mengadopsi pendekatan pengelolaan berbasis ekosistem dengan berfokus pada satu tempat tertentu seperti yang dikemukakan oleh Olsen et.al [7].Padahal, pendekatan berbasis ekosistem ini telah diatur dalam UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu dengan konsep ekoregion.

Penggunaan pendekatan ekoregion yang berupaya untuk melihat kesatuan ekosistem antara laut dengan ekosistem lainnya dalam pengelolaan ruang laut, memungkinkan terjadinya keterpaduan antar wilayah pengembangan.Dalam hal ini wilayah tidak lagi dianggap sebagai wilayah administratif, tapi juga wilayah fungsional yang memiliki kesamaan fungsi. Ekoregion adalah batas darat dan perairan dimana batas tersebut tidak ditentukan oleh batas secara politik, tetapi oleh batas geografis dari komunitas manusia dan sistem lingkungan (UU 32/2009), sehingga penetapan ekoregion akan menghasilkan batas (boundary) sebagai satuan unit analisis dengan mempertimbangkan ekosistem pada sistem yang lebih besar guna mempertahankan integritas komunitas biologi wilayah tersebut, habitat dan ekosistem untuk menyokong proses-proses ekologi yang penting seperti siklus nutrien dan limbah, migrasi dan aliran arus. Dengan demikian, penetapan wilayah ekoregion ini akan menjadi dasar dan memiliki peran yang sangat penting dalam melihat keterkaitan, interaksi, interdependensi, dan dinamika pemanfaatan berbagai sumber daya alam antar ekosistem di wilayah ekoregion. Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga bertujuan untuk memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.

Permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia adalah pengelolaan ruang pada tingkat lokal. Kewenangan pengelolaan terendah untuk ruang laut berdasarkan UU 23/2014 ada di tangan pemerintah provinsi.Implikasinya adalah bahwa untuk itu diperlukan konsentrasi kekuasaan pengelolaan sumberdaya kelautan di tangan pemerintah provinsi. Namun, dengan membangun birokrasi secara sentralistis, kita berasumsi bahwa pengelolaan lingkungan dapat di-scaled up walaupun tidak banyak bukti yang menyatakan bahwa proposisi atau model dalam sistem skala mikro dapat diterapkan di skala makro. Argumentasi ini berlaku untuk arah sebaliknya, yaitu bahwa pengelolaan lingkungan dapat di-scaled down. Mengenai hal ini, ([9] Young, 1995) menyatakan, "macro-scale systems are not merely small-scale systems writ large. Nor are micro-scale systems mere microcosms of large-scale systems".

Ada trade-off dalam pengelolaan lingkungan secara sentralisasi (dalam hal ini di tingkat provinsi) atau desentralisasi (di tingkat lokal). ([2] Berkes, 1998)menunjukkan bahwa institusi di tingkat lokal dapat belajar dan mengembangkan kemampuan untuk merespon feedback dari lingkungan lebih cepat dibandingkan dengan institusi di tingkat pusat. Dengan demikian, jika institusi yang ada terlalu tersentralisasi, informasi berharga berupa feedback dari lingkungan akan terhambat atau hilang karena adanya ketidaksesuaian (mismatch) dalam skala ([4] Holling, 2001). Sebaliknya, jika pengelolaan suatu sumberdaya terlalu terdesentralisasi, maka feedback antara kelompok pengguna sumberdaya lainnya, atau antara wilayah yang berbatasan, mungkin akan hilang([1] Berkes, 2002). Hal ini karena adanya keterkaitan antarkomponen dan hubungan ketergantungan antara berbagai proses dalam ekosistem.

Tantangan berikutnya adalah adanya kebutuhan untuk mengarah pada analisis ruang laut sebagai common property resource (CPR) yang bersifat kompleks, multi-level dalam ruang dan waktu, termasuk saling keterkaitannya dalam berbagai tingkatan([10] Young, 2008).Keterkaitan lintas skala (cross-scale interplay) melibatkan kaitan horizontal (antarruang) dan vertikal (antar tingkatan governance), termasuk interaksi antara sistem governance nasional, bahkan internasional, dengan institusi (tradisional) di tingkat lokal dalam pengelolaan CPR ([1] Berkes, 2002).Satu temuan penting oleh ([10] Young, 2008)terkait dengan hal ini adalah bahwa 324ocal324 pengelolaan CPR berskala kecil yang didasarkan pada praktik-praktik tradisional yang bekerja dengan baik di tingkat 324ocal, seringkali mengalami kegagalan pada saat sistem tersebut dipengaruhi secara drastis oleh sistem yang lebih besar, misalnya perdagangan global dan internasional. Dalam hal ini, pemahaman tentang heterogenitas konteks sosial ekonomi penting untuk memberikan gambaran tentang bagaimana suatu CPR memberikan pengaruh pada masyarakat dan sebaliknya, termasuk trade-off yang mungkin terjadi dalam upaya menyeimbangkan pembangunan dan perlindungan lingkungan.

KESIMPULAN

Pengelolaan ruang laut merupakan sebuah upaya strategis yang diperlukan untuk meminimalisir konflik spasial dan temporal dalam pemanfaatan ruang dan sumberdaya laut.Kompleksitas ekosistem laut, yaitu masalah ketidaklinieran dan ketidakpastian yang disebabkan oleh perbedaan skala seperti dikemukakan dalam banyak literatur memiliki implikasi terhadap berbagai pendekatan pengelolaan ruang laut.Pendekatan place-based management yang mempertimbangkan ekosistem di suatu kawasan tertentu dianggap sebagai komponen kunci alam penerapan pendekatan ekosistem untuk pengelolaan lingkungan (ecosystem approach to management/EAM). [7]dalam tulisannya telah menjelaskan berbagai aspek yang perlu diperhatikan dalam pendekatan place-based management di berbagai tingkatan skala.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dalam konteks Indonesia, nilai strategis dari penataan ruang laut telah tercantum secara legal dalam berbagai peraturan perundangan.Namun, pendekatan pengelolaan ruang laut Indonesia yang didasarkan pada batasan administratif, dan bukannya batas ekosistem, berpotensi menimbulkan masalah.Untuk dapat menata ruang laut secara efektif, efisien, dan berkelanjutan serta memberikan manfaat kesejahteraan sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat; Indonesia memerlukan langkah-langkah strategis baik dari sisi legal maupun politis.

Beberapa langkah yang perlu dilakukan antara lain:

1. Mengakomodasi konsep ekoregion ke dalam pengelolaan ruang laut di Indonesia. Penggunaan ekoregion sebagai satuan unit analisis dalam pengelolaan ruang laut akan lebih menjamin integritas ekosistem di suatu wilayah ekoregion. Secara prinsip, pendekatan ekoregion juga akan memperkuat dan memastikan terjadinya koordinasi horizontal antar wilayah administrasi yang saling bergantung (hulu-hilir) dalam pengelolaan dan perlindungan sumberdaya alam maupun permasalahan lingkungan hidup.
2. Mengakui hak dan kewajiban institusi di tingkat lokal dalam pengelolaan ruang laut untuk mengakomodasi adanya feedback dari satuan lingkungan terkecil dan menghindari ketidaksesuaian (mismatch) dalam skala.
3. Menerapkan pendekatan yang adaptif dan kolaboratif dalam pengelolaan ruang laut untuk mengatasi permasalahan yang timbul karena kompleksitas ruang laut, termasuk keterkaitan antar skala dan ketidakpastian.
4. Melengkapi data dan informasi yang dibutuhkan untuk pengelolaan ruang laut, terutama dalam penetapan batas kawasan yang akan dikelola, serta membangun komitmen dan konsensus antara seluruh stakeholder yang terlibat di berbagai tingkatan skala.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Berkes, F. 2002. Cross-Scale Institutional Linkages: Perspectives from the Bottom up. The drama of the commons. 293–321.

[2] Berkes, F. K. 1998. Exploring the Basic Ecological Unit: Ecosystem-like Concepts in Traditional Societies. Ecosystems, 409–415.

[3] Creswell, J. W. 2014. Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches 4th Edition. SAGE Publications Ltd.

[4] Holling, C. S.(2001. Understanding the Complexity of Economic, Ecological, and Social Systems. Ecosystems, 390–405.

[5] Jones, P. J. S. 2014. Governing Marine Protected Areas: Resilience Through Diversity. Taylor & Francis.

[6] Landres, P. B. 2013. Ecological Effects of Administrative Boundaries, in: Stewardship across boundaries. Island Press.

[7] Olsen, E. K. 2011. Place-Based Management at Different Spatial Scales. Journal of coastal conservation, 15(2), 257–269.

[8] UNEP. 2010. Global Synthesis - a Report from the Regional Seas Conventions and Actions Plans for the Marine Biodiversity Assessment and Outlook Series. UNEP Regional Seas.

[9] Young, O. R. 1995. The Problem of Scale in Human/environment Relationships, in: Keohane, R. and Ostrom, E. (Eds.), Local Commons and Global Interdependence. SAGE Publications Ltd.

[10] Young, O. R. 2008. Institutions and Environmental Change: Principal Findings, Applications, and Research Frontiers. The MIT Press.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TEMA D

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN

EKSPLORASI POLA HIDUP MASYARAKAT BUGIS SEBAGAI DASAR PENYUSUNAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN INKLUSIF PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KOTA MAKASSAR

Arifuddin Akil[1)]

[1)]Fakultas Teknik/Prodi Pengembangan Wilayah dan Kota, Universitas Hasanuddin

Email :arifuddinak@yahoo.co.id

Naskah diterima :23 Februari 2017 Naskah direvisi : 27 Februari 2017 Disetujui terbit : 7 Maret 2017

ABSTRAK

Searah dengan dinamika perkembangan Ipteks modern saat ini, diperlukan arahankebijakan pembangunan perumahan dan permukiman perkotaan yang berbasis padaparadigma baru pendekatan pembangunan inklusif.Pembangunan inklusif bertumpu pada berbagai aspek, proaktif mengatasi kemiskinan, menciptakan solidaritas dan pelibatan masyarakat, serta mereduksi eksklusifitas segelintir masyarakat. Penelitian ini bertujuan mengungkapkan pandangan pola hidup masyarakat Bugis di kota Makassar. Studi ini dimaksudkan untuk mempertajam pedoman penataan spasial sesuai perkembangan modernisasi dan globalisasi dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat perkotaan dengan berbagai permasalahannya menuju pada penciptaan kawasan permukiman yang layak huni, produktif, dan berwawasan lingkungan. Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatifdengan mengumpulkan data opini pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui pengedaran angket dan observasi pada kawasan perumahan yang dihuni masyarakat Bugis di Kota Makassar. Data-data dianalisis secara deskriptif berdasarkan teori kebutuhan dasar manusia. Studi ini menemukan beberapa pola hidup masyarakat yang relevan dengan nilai-nilai budayanya danpatut dipertimbangkan dalam penentuan kebijakan penataan spasial di kota Makassar.Pola hidup tersebut berimplikasi positif terhadap ide-ide pembangunan berbasis pendekatan inklusif di kota Makassar: 1) pengembangan fasilitas perbelanjaan dengan suasana kekeluargaan, terbuka serta rekreatif, termasuk pengadaan pasar-pasar malam dengan konsep multifungsi; 2) mengadopsi konsep makan bersama sebagai metode kebersamaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan; 3) pengembangan ruang publik dalam permukiman yang dilengkapi sarana olahraga berupa jalur pedestrian dan taman; 4) peningkatan pengetahuan, pendapatan,dan pengembangan usaha sektor informal seperti PKL; 5) pengembangan sarana angkutan umum massal mudah diakses dengan pelayanan efisien dan tepat waktu;6) perencanaan permukiman dengan konsep permukiman humanis dan religius.

Kata kunci: *Pola hidup, Masyarakat perkotaan, Pembangunan inklusif*

PENDAHULUAN

Pendekatan pembangunan inklusif merupakan sebuah paradigma baru dalam perencanaan kota. Pembangunan inklusif berupaya mengarahkan proses pembangunan secara berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat sebagai suatu sistem sosial menuju suatu kondisi inklusi sosial, yakni suatu kehidupan yang lebih baik atau lebih manusiawi [12]. Pembangunan Inklusif ingin mengembangkan keterbukaan, mengajak dan mengikutsertakan setiap elemen masyarakat dengan berbagai latar belakang kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya dalam proses pembangunan. Penerapan pembangunan inklusif di perkotaan merupakan kajian menarik karena terkait dengan berbagai fenomena yang dapat bermuara pada banyaknya kesenjangan sosial.Hal tersebut menjadi sebuah tantangan besar yang perlu dipikirkan penanganan masalahnya menuju terciptanya kehidupan yang rukun, kondusif dan dapat meningkatkan daya kerja dan kualitas masyarakat secara berkelanjutan.Salah satu aspek yang menjadi fokus dalam kajian ini adalah upaya memahami harapan dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat yang hidup di perumahan dan permukiman perkotaan. Masyarakat etnik diperkotaan tentu saja tetap berkembang seiring perkembangan Ipteks modern, namun tidak dapat dilupakan bahwa mereka tetap memiliki latarbelakang pemahaman budaya yang susah untuk dilepaskan dari

pandangan, perilakunya sesuai harapan dan pandangannya. Karena itu setiap etnik dominan di perkotaan perlu majadi narasumber sosial dalam rangka pemenuhan kebijakan dan rencana pembangunan di sekitarnya.

Pengertian inklusif digunakan sebagai sebuah pendekatan untuk membangun sebuah lingkungan, mengikutsertakan semua orang dengan berbagai perbedaan latar belakang, kemampuan, status, kondisi, etnik, budaya dan lainnya [12].Lingkungan inklusif adalah lingkungan sosial masyarakat yang terbuka, ramah, meniadakan hambatan, dan menyenangkan setiap masyarakat tanpa terkecuali.Konsep lingkungan inklusif, memungkinkan masyarakat dapat beraktivitas secara kondusif dalam lingkungan keluarga, aman dan nyaman, serta peningkatan kualitas hidupnya.Konsep pembangunan inklusif memperjuangkan sektor pendidikan, kesehatan, lapangan kerja, pemberantasan kemiskinan, perbaikan lingkungan, kebebasan individual, dan kehidupan budaya.

Budaya merupakan suatu pola pikir yang terungkap dalam perilaku dan aktifitas manusia sebagai bentuk reaksi terhadap tantangan alam yang terjadi secara turun temurun[5].Setiap individu dalam masyarakat mempunyai peluang untuk mengungkapkan nilai budaya dan sikap yang dianutnya.Dalam setiap morfologi sosial yang berbeda terdapat logika budaya yang berlainan berikut nilai sosial yang diwujudkan. Nilai-nilai budaya merupakan pola-pola pemikiran serta tindakan tertentu yang terungkap dalam aktifitas, yang pada akhirnya akan berdampak pada hasil karya manusia termasuk wujud fisik bangunan perumahan, permukiman dan perkotaan pada umumnya [2]. [1]juga mengungkapkan bahwa budaya muncul dalam lingkungan binaan seperti desain rumah, perletakan rumah, dan berbagai bangunan umum lainnya.Untuk melakukan pembangunan fisik maupun non fisik di lingkungan permukiman perkotaan, diperlukan kajian-kajian spesifik sesuai harapan berbagai masyarakatnya. Menurut [10] terdapat beberapa elemen utama yang dianggap sebagai core culture berupa etnik, sistem keluarga dan kekerabatan, pola perumahan, status tanah, makanan, ritual dan sistem simbol, status sosial, komunikasi, skema kognitif, privasi, penguasaan, teritorial, perilaku di rumah dan bertetangga, dan kelembagaan.

Argumentasi umum dapat dipahami bahwa masyarakat sangat membutuhkan fasilitas permukiman atau perkotaan yang berbasis pada kebutuhannya. Namun demikian, perkembangan modernisasi dan globalisasi ternyata membawa muatan lain yang kadang berbda antara perkembangan perkotaan dengan masyarakatnya. Masyarakat Bugis yang berdomisili di kota Makassar misalnya, memiliki konsep-konsep unik kearifan budaya lokal khususnya dalam perumahan yang berbeda dengan masyarakat lainnya, sehingga menuntut sebuah pemenuhanfasilitas yang berbeda. Masyarakat Bugis di kota Makassar merupakan masyarakat dominan, namun hingga kini kondisinya masih relatif terbatas sehingga membutuhkan pemenuhan fasilitas. Sebagai indikator kondisi masyarakat Bugis yang terdata awal tahun 2016 dapat dilihat dengan tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat yang relatif rendah yaitu rata - rata Rp.2.600.000,-/bulan/kepala keluarga, dan pendidikan dominan SMA.Fakta lain bahwa secara umum terjadi di Indonesia bahwa banyak keberhasilan program pembangunan yang dicapai, namun masih banyak persoalan pembangunan yang belum dapat dipecahkan secara optimal seperti penyelesaian persoalan pengangguran, kemiskinan, disparitas[12]. Sebagai contoh akhir-akhir ini terdapat kecenderungan pemusatan pengembangan program pemerintah di kota Makassar dengan melibatkan sektor pengusaha lebih pada sektor pembangunan eksklusif seperti pembangunan hotel, mal, apartemen, pertokoan, serta perkantoran yang berdampak semakin mengurangi respan air, ruang hijau, dll. Di lain pihak terdapat berbagai kebutuhan yang sangat mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat bawah namun belum terpenuhi.

Perencanaan yang terlanjur teraplikasi selama ini cenderung berorientasi pada paradigma yang menekankan aspek ekonomi.Pendekatan pembangunan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata telah menghasilkan kondisi ekslusifitas pada tiga krisis besar, berupa kekerasan, kemiskinan, dan kerusakan lingkungan. Ketiga persoalan ini sangat kompleks, dan jika ingin keluar dari permasalahan tersebut dibutuhkan paradigma baru yang mengutamakan dimensi sosial budaya dalam proses pembangunan sosial. Konsep baru ini selanjutnya sisebut pembangunan inklusif [7].

Pembangunan inklusif merupakan pembangunan yang tidak hanya bertumpu kepada pertumbuhan ekonomi tetapi juga berpihak kepada aspek sosial budaya.Pembangunan inklusif di perkotaan bertujuan untuk melahirkan kota yang menyejahterakan warganya, menciptakan ruang kota yang memberi kebebasanberinteraksi sosial, dan berpartisipasi dalam perencanaan dan pelaksanakan pembangunan. Pembangunan ekonomi harus disertai dengan pemerataan ekonomi melalui formulasi program-program konkrit yang membumi.Pertumbuhan ekonomi harus ditandai dengan semakin berkurangnya jumlah masyarakat miskin dan pengangguran. Karena itu, pendekatan pembangunan inklusif tersebut perlu menjadi pertimbangan dalam memenuhi harapan masyarakat serta terwujudnya pelayanan kota secara inklusif. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, perlu dilakukan langkah awal berupa identifikasi pandangan pola hidup masyarakat yang dominan dalam suatu kawasan perkotaan agar dapat menemukenali pola hidupnya yang tergolong unik sebagai dasar penyusunan kebijakan perencanaan perkotaan yang layak huni, produktif, dan berwawasan lingkungan. Menurut[6] perlu dilakukan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

kajian tentang pembangunan inklusif dengan mengupdate data dan memperbaiki metode yang ada untuk meningkatkan kualitas kebijakan dan kualitas pembangunan.

METODOLOGI

Penelitian kualitatif ini berupaya mengungkapkan gambaran pola hidup masyarakat Bugis di kota Makassar yang diharapkan dapat menjadi masukan dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang berbasis pendekatan inklusif khususnya pada kawasan perumahan dan permukiman masyarakat Bugis. Data diperoleh melalui observasi dan pengedaran angket sebanyak 574 KK khusus pada kawasan yang dominan dihuni masyarakat etnik Bugis di kota Makassar. Untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimana pandangan pola hidup masyarakat Bugis terkait kebutuhan hidupnya sehari-hari berdasarkan perkembangan modernisasi dan globalisasi digunakan teknik analisis statistik dengan metode scoringberdasarkan teori Maslow.Di samping itu dilakukan wawancara kepada masyarakat dan pemerintah.Selanjutnya dibahas dalam kerangka penelitian deskriptifterkaitberdasarkan teori pembangunan inklusif.

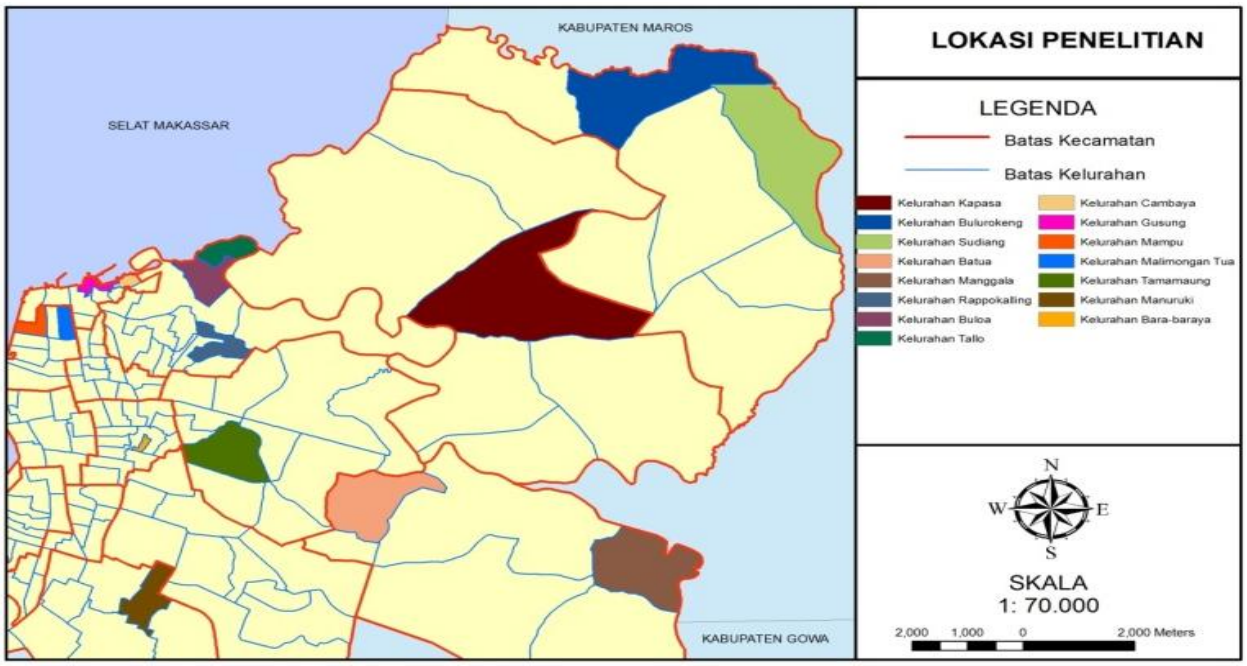

Gambar 1. Peta lokasi wilayah penelitian di Kota Makassar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Masyarakat Bugis di Kota Makassar

Masyarakat Bugis tergolong cukup dominandi kota Makassar, namun sebagian besar dikategorikan sebagaimasyarakat miskin, sebagian tinggal di kawasan kumuh dengan fasilitas dan prasarana terbatas, tingkat pendapatan kepala keluarga yang relatif rendah (rata-rata Rp. 2.600,000,- per bulan), tingkat pendapatan rata-rata tamat SMA, serta tinggal pada rumah yang tidak layak huni. Di samping itu memiliki akses rendah terhadap sumberdaya ekonomi, serta tergolong kurang memiliki ketrampilan memadai terlibat dalam proses perencanaan. Tingkat pendapatan masyarakat Bugis tergolong sangat rendah yaitu 62,5% ≤Rp 2.5 juta; 25,4%Rp 3 s/d Rp 4 juta; 6,4% Rp 4,5 s/d Rp. 5,5 juta; dan 5,6% ≥ Rp 6 juta. Demikian pula tingkat pendidikan masyarakat Bugis rata-rata tergolong masih sangat rendah yaitu tamat SD 22,3%, tamat SMP 18,12%, tamat SMA 34,32%, dan tamat sarjana S1/S2 hanya 24,74%. Untuk jelasnya tingkat pendapatan dan pendidikan masyarakat Bugis di kota Makassar dapat dilihat pada gambar berikut:

ISBN : 978-602-73463-1-4

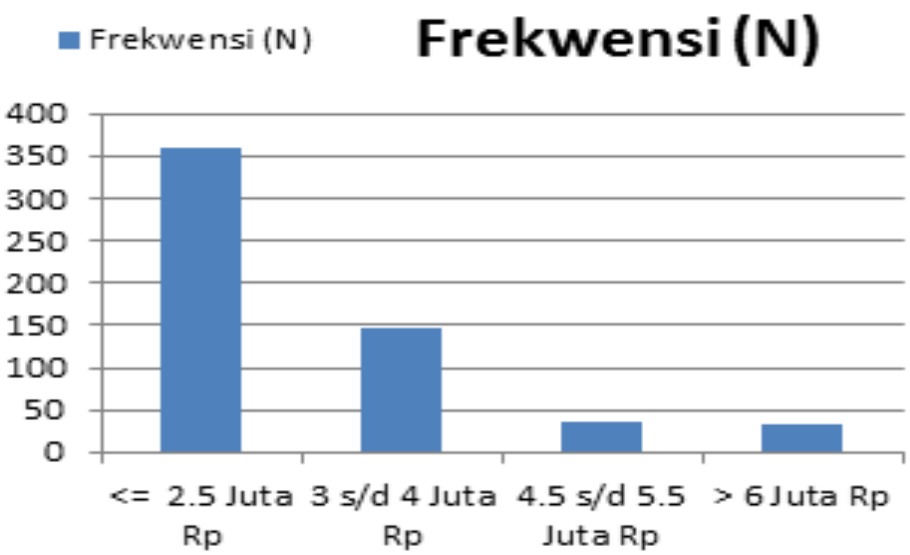

Gambar.2 Tingkat Pendapatan Masyarakat

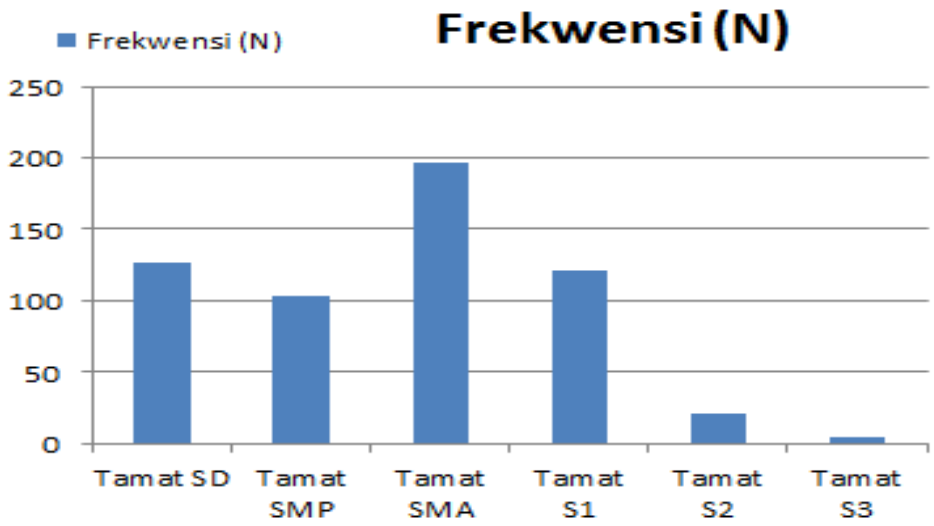

Gambar.3Tingkat Pendidikan Masyarakat

Nilai-Nilai Sosial Budaya dalam Masyarakat Perkotaan

Dalam kehidupan masyarakat kota yang semakin heterogen, terlihat kecenderungan yang semakin melemah terutama dalam hal: semangat kebersamaan, loyalitas komunitas, dan rasa tanggungjawab terhadap kesejahteraan bersama. Individu merasa lebih loyal kepada keluarganya, kepada tempat kerjanya, kepada kelompoknya, atau kepada sesama etnik.Situasi yang terdapat pada komunitas perkotaan tersebut cenderung tidak menganut sistem nilai bersama. Bahkan masyarakat kota terdiri atas beberapa individu atau kelompok terisolasi yang cenderung menuju pada kondisi disorganisasi. Menurut [11]bahwa situasi yang terjadi pada masyarakat kota yang ditandai dengan pembedaan orang berdasarkan teknologi, kekuasaan, dan kepemilikan, serta tidak adanya sistem nilai bersama, merupakan situasi yang secara alamiah berkembang sesuai kebutuhan masyarakat.

Dalam kaitan peran masyarakat dalam pembentukan perumahan, faktor internal yang berpengaruh adalah budaya.Sedang faktor eksternal meliputi aspek modernisasi dan globalisasi [3].Modernisasi dan globalisasi dapat berpengaruh positif, juga dapat menjadi ancaman negatif terhadap integritas suatu masyarakat. Pengaruh positif yang dapat terlihat secara jelas adalah proses terbentuknya sebuah kota secara bertahap. Sedangkan dampak lain yang disebabkan lebih lanjut khususnya di daerah perkotaan meliputi aspek urbanisasi dan aspek kesenjangan sosial ekonomi.Kepribadian modern dicirikan oleh: empati, mobilitas dan kemampuan beradaptasi[13].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tinjauan Nilai Budaya Masyarakat Bugis

Dalam Lontara Bugis, diungkapkan tentang konsep *siri' na pesse* sebagai sebuah simbolisasi dari berbagai nilai-nilai dasar yang dipahami oleh masyarakat Bugis. Nilai-nilai dasar yang melekat dalam pribadi tersebut mengandung nilai-nilai umum dan nilai-nilai khusus, dan bersama dengan gagasan dan ide, selanjutnya berpengaruh terhadap tingkah laku manusia[9].Pola tingkah laku orang Bugis yang terlihat dalam kehidupan sehari-harinya, merupakan suatu perwujudan tindakan yang berkaitan erat dengan nilai budaya yang terangkum dalamkonsep*siri' na pesse* (disarikan dari: [9][8]. Nilai-nilai tersebut meliputi nilai *siri*', nilai *were*, dan nilai *pesse*. Nilai *siri*" sebagai harga diri, filosofi, etika moral, motivasi jiwa dalam bertindak dan berprestasi. Nilai *were* sebagai pendorong berprestasi dan kreatif, memulihkan keseimbangan hidup, pendorong membuat perencanaan, dan taruhan citra diri. Nilai *Pesse* sebagai nilai kemanusiaan, perekat hubungan sesama, dan semangat persaudaraan.

Pandangan Masyarakat Bugis di Kota Makassar

Berdasar pada teori kebutuhan Maslow, diungkapkan beberapa elemen kebutuhan masyarakat Bugis di kota Makassar yang selanjutnya menjadi pola hidupnya sehari-hari. Beberapa variabel dari kebutuhan masyarakat tersebut menunjukkan pandangan yang bervariasi sbb:

1. Dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup setiap hari mereka dominan melakukan kegiatan belanja di pasar tradisional, walaupun tetap sesekali ke tempat perbelanjaan modern.
2. Dalam hal konsumsi makanan setiap hari mereka cenderung makan makanan rumahan dengan caramemasak sendiri atau beli di luar.
3. Dalam hal memilih tempat makan setiap hari mereka cenderung makan bersama keluarga di rumah dan sesekali makan di luar.
4. Dalam hal pola hidup sehat setiap hari mereka cenderung mengkonsumsi makanan sehat, melakukan olahraga, dan istirahat secukupnya.
5. Dalam hal kesehatan secara umum mereka berkunjung ke fasilitas kesehatan, jika menemukan gejala sakit. Mereka jarang mengontrol kesehatan ke fasilitas kesehatan.
6. Dalam hal pola perjalanan setiap hari mereka cenderungmenggunakan sarana transportasi yang dapat tepat waktu. Dalam hal ini mereka sangat mengatur waktu secara tepat, karena umumnya mereka memiliki lebih dari satu pekerjaan (bisnis).
7. Dalam hal pola keamanan rumah secara umum mereka melakukan dengan membuat pembatas rumah yang aman dengan bentuk yang bervariasi (tidak berkesan tertutup). Mereka memperhatikan keamanan rumah tetapi dengan konsep terbuka.
8. Dalam interaksi sosial setiap hari, mereka cenderung menerima tamu dengansukarela walaupun tanpa penyampaian sebelumnya dan tanpa batas waktu. Mereka sangat memperhatikan hubungan solidaritas dengan masyarakat lainnya secara kekeluargaan.
9. Dalam mencapai harga diri (kehormatan) mereka cenderung menghasilkan prestasi melalui kerja keras tanpa harus dikenal (popular). Mereka memang butuh kehormatan namun mereka juga tetap rendah hati dan tidak bertujuan utama untuk mendapat kepopuleran.
10. Dalam mencapai aktualisasi hidup mereka berpandangan tentang pentingnyamencapai ketaqwaan kepada Tuhan serta banyak bermanfaat pada manusia dan alam. Walaupun motivasi kerjanya tergolong tinggi, mereka tetap hidup sederhana dengan prinsip keseimbangan kehidupan dunia dan akhirat.

Tabel 1 Pandangan Pola Hidup Masyarakat Bugis

No		Pandangan Pola Hidup Masy. Bugis	Frek (N)	%
1		2	3	4
A		Pemenuhan kebutuhan primer/sekun		
	1	Belanja kebutuhan sek/primer di mall/SM	75	13.07
	2	Mengunjungi butik, salon	20	3.48
	3	Mengunjungi toko Kebugaran/OR	9	1.57
	4	Belanja kebutuhan primer/ sek di pasar tradisional	470	81.88
		Jumlah	574	100
B		Konsumsi makan setiap hari		
	1	Makanan praktis, fleksibel, cepat saji	2	0.35
	2	Pesan makanan dari luar	13	2.26

ISBN : 978-602-73463-1-4

	3	Makanan rumahan dan pesan di luar	241	41.99
	4	Makanan tradisional dimasak di rumah	318	55.40
		Jumlah	574	100
C		Memilih tempat makan		
	1	Secara rutin makan di luar	35	6.10
	2	Secara rutin pesan makananan	33	5.75
	3	Sesekali makan di luar	223	38.85
	4	Secara rutin makan di rumah bersama keluarga	283	49.30
		Jumlah	574	100
D		Pola hidup sehat		
1		Mengkonsumsi makanan sehat, olahraga, & istirahat	287	50.00
2		Mengkonsumsi makanan sehat & istirahat, tapi kurang olahraga	188	32.75
3		Mengkonsumsi makanan sehat tapi kurang istirahat	46	8.01
4		makan/minum belum terjamin sehat, olahraga, & istirahat	53	9.23
		Jumlah	574	100
E		Menjaga kesehatan keluarga		
1		Kontrol kesehatan rutin setiap min 6 bln	77	13.41
2		Kontrol kesehatan rutin min/thn	57	9.93
3		Berobat jika ada gejala	379	66.03
4		Jarang mengunjungi fasilitas kesehatan	61	10.63
		Jumlah	574	100
F		Pola perjalanan		
1		Menggunakan angkutan umum tepat waktu	96	16.72
2		Menggunakan angkutan pribadi tepat waktu	299	52.09
3		Menggunakan angkutan umum tidak tepat waktu	112	19.51
4		Menggunakan angkutan pribadi tidak tepat waktu	67	11.67
		Jumlah	574	100
G		Pola keamanan rumah		
1		Menggunakan pagar tinggi & permanen	136	23.69
2		Menggunakan pagar pendek & permanen	164	28.57
3		Menggunakan pagar pendek tidak permanen	107	18.64
4		Menggunakan pagar terbuka (tanaman)	167	29.09
		Jumlah	574	100
H		Interaksi Sosial		
1		Menerima tamu sesuai kesepakatan dgn waktu terbatas	40	6.97
1		2	3	4
2		Menerima tamu sesuai kesepakatan dan tanpa dibatasi waktu	60	10.45
3		Sukarela menerima tamu walau tanpa penyampaian sebelumnya dgn waktu terbatas;	158	27.53
4		Sukarela menerima tamu walau tanpa penyampaian sebelumnya dan tanpa batas waktu.	316	55.05
		Jumlah	574	100
I		Pencapaian Harga Diri		
1		Keberhasilan pribadi, terkenal, tanpa harus kerja keras;	1	0.17
2		Keberhasilan pribadi, terkenal, harus kerja keras	75	13.07
3		Prestasi pribadi atau bersama-sama melalui kerja keras	192	33.45
4		Mendapat kehormatan tanpa harus terkenal;	306	53.31
		Jumlah	574	100
J		Pencapaian aktualisasi Hidup		
1		Mencapai prestasi hidup dan kesenangan dunia	13	2.26
2		Materi pendukung hidup layak	113	19.69
3		Banyak bermanfaat pd manusia & alam	133	23.17
4		Mencapai ketaqwaan kepada Tuhan	315	54.88
		Jumlah	574	100

Sumber: Hasil analisis, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Implikasi Pola HidupMasyarakat sebagai Alternatif Pembangunan Inklusif

Masyarakat Bugis yang bermukim di kota Makassar, ternyata masih tetap memegang nilai-nilai budaya yang mereka pahami sebagaimana yang tercermin dalam pola hidupnya saat ini [4]. Walaupun adanya perkembangan modernisasi dan globalisasi yang sangat cepat, mereka tetap berpegang pada prinsip hidup yang telah berkembang membentuk prilaku.Pola hidup yang terbentuk tersebut tentu saja telah mengalami perpaduan dengan perkembangan ipteks modern saat ini.Pola hidup yang telah berpola sesuai dengan pandangan mereka, selayaknya dapat menjadi dasar berfikir dalam memenuhi kebutuhannya menuju aplikasi inklusi sosial.

Beberapa implikasi ungkapan pola hidup masyarakat Bugis di kota Makassar dapat menjadi dasar penerapan pembangunan inklusif sebagai berikut:

1) Mereka dominan melakukan kegiatan belanja di pasar tradisional walau sesekali ke fasilitas modern, menunjukkan bahwa pasar tradisional dengan perilaku jual beli yang khas mutlak perlu dipertahankan diperkotaan. Pola fasilitas yang akrab penuh kekeluargan dan pola bentuk terbuka tersebut selayaknya menjadi dasar filosofi pengembangan tempat belanja modern di Makassar;

2) Mereka cenderung makan makanan rumahansecara bersama. Konsep tersebut dapat menjadi dasar filosofi sebagai metode kebersamaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan;

3) Mereka menunjukkan pola hidup sehat dengan selektif dalam hal makanan, olahraga, danwaktu istirahat. Hal ini berimplikasi pada pentingnya jaminan konsumsi makanan sehat, serta ketersediaan fasiltas olahraga alami dalam lingkungan permukiman seperti jalur pedestrian dan taman;

4) Dalam hal kesehatan mereka terkesan masih sederhana karena belum melakukan kontrol kesehatan secara berkala. Kondisi ini terkait dengan tingkat pendidikan dan pendapatan yang masihtergolong menengah ke bawah.Karena itu menjadi masukan kepada pemerintah untuk menyediakan fasilitas pendidikan berkualitas secara merata, penyediaan lapangan kerja baru, serta memfasilitasi pengembangan wirausaha dalam setiap permukiman;

5) Mereka cenderung menggunakan sarana transportasi yang dapat tepat waktu untuk menyukseskan berbagai kegiatannya. Dalam hal ini dipandang perlu kebijakan pengembangan sarana umum transportasi umum massal yang dapat diakses dengan mudah dan memberikan pelayanan yang aman, tepat waktu, dan efisien ;

6) Mereka cenderung mengamankan rumah seperti melengkapi pagar dengan konsep terbuka (kesan menerima)yang berimplikasi pada penerapan konsep permukiman yang aman dari kejahatan namun tetap terbuka (berkesan mengundang);

7) Mereka hidup rukun, saling berinteraksi sosial dengan penuh rasa kekeluargaan. Hal ini berimplikasi pada perlunya penyediaan ruang-ruang publik dalam sebuah permukiman sesuai dengan hirarki secara demokratis;

8) Mereka memandang prestasi sebagai sebuah kehormatan walaupun harus kerja keras, yang berimplikasi pada perlunya kebijakan pengembangan lapangan kerja yang berdampak pada tingkat pendapatan masyarakat;

9) Mereka mengutamakanbudaya hidup spiritual (Islam) serta meningkatkan muamalah kepada sesama manusia. Hal ini berimplikasi pada pentingnya perencanaan permukiman masyarakat Bugis dengan konsep humanis dan religius.

Implikasi-implikasi yang ditawarkan tersebut kesemuanya berbasis pada perlunya pendekatan pembangunan inklusif di kawasan hunian dan perkotaan.Pada saat ini pendekatan inklusif telah diterapkan oleh pemerintah kota Makassar dengan melibatkan masyarakat bawah dalam berbagai program/kegiatan pembangunan seperti peningkatan kualitas permukiman kumuh, perbaikan kualitas permukiman dan lorong, dan penataan jalur pedestrian. Kegiatan tersebut melibatkan masyarakat namun tingkat partisipasinya relatif masih rendah.Namun demikian pengetahuan lokal yang telah membudaya dalam bentuk pola hidup masyarakat Bugis dan implikasi kegiatan yang diterapkan dalam kesehariannya di permukiman perkotaan, seharusnya dapat diadopsi atau menjadi dasar penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunanInklusifdi kota Makassar. Dengan demikian pemenuhan kebijakan tersebut diharapkan dapat menjawab kebutuhan masyarakatnyaseperti meminimalisasi potensi kumuh, dan sebaliknya menjadi kawasan yang menarik, layak huni, berwawasan lingkungan, dan pengembangan produktifitas masyarakat.

Indikator keberhasilan pembangunan inklusif tercapai ketika berkembangnya transformasi dari sebuah paradigma pembangunan eksklusif ke arah inklusif yang melibatkan berbagai unsur (Warsilah, 2015).Kondisi tersebut akanberpengaruh pada terjadinya keterhubungan ruang secara terpadu antara kawasan-kawasan perkotaan terutama antara kawasan permukiman dan kawasan perdagangan, perkantoran, maupun fungsi-fungsi lainnya; serta berpengaruh terhadap meluasnya interaksi sosial berbasis budaya masyarakat.Keterhubungan antar ruang perkotaan disertai dengan pembangunan prasarana perkotaan sesuai kebutuhan masyarakat setempat maupun pendatang.Program tersebut perlu didukung oleh adanya kebijakan pemerintah yang pro rakyat yang diterapkan dengan tegas.

KESIMPULAN

Pendekatanpembangunan inklusif merupakan penerapan konsep pembangunan yang membumi, mengimbangi pembangunan yang hanya bertumpu pada aspek ekonomi, proaktif mengatasi kemiskinan, tercipta kolaborasi pemerintah dan masyarakat, menciptakan solidaritas dan pelibatan masyarakat, serta dapat mereduksieksklusifitas segelintir masyarakat.Karena itu diperlukan pemahaman sosio-kultural masyarakat kota terutama kelas menengah ke bawah.Masyarakat Bugis merupakan salah satu warga dominan kota Makassar yang sebagian tertinggal dalam hal pendapatan, pendidikan, dan hidup layak. Mereka memiliki kebutuhan hidup yang perlu mendapat pelayanan untuk hidup layak melalui pendekatan pembangunan inklusif.

Beberapa kebijakan atau program pembangunan inklusif sebagai implikasi pandangan pola hidup masyarakat Bugis di kota Makassar sebagai berikut: 1) Pengembangan fasilitas perbelanjaan dengan suasana kekeluargaan, terbuka serta rekreatif, termasuk pengadaan pasar-pasar malam dengan konsep multifungsi; 2) mengadopsi konsep makan bersama sebagai metode kebersamaan dan pelibatan masyarakat dalam pembangunan; 3) pengembangan ruang publik dalam permukiman yang dilengkapi sarana olahraga berupa pedestrian dan taman; 4) peningkatan pengetahuan dan pendapatan melalui perencanaan fasilitas pendidikan, pengembangan usaha sektor informal seperti PKL; 5) pengembangan sarana angkutan umum massal mudah diakses dengan pelayanan efisien dan tepat waktu;6) perencanaan permukiman dengan konsep permukiman humanis dan religius.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Altman, I. a. 1984. Culture and Environment, Brooks/Cole Publishing Company. First Published by Canbridge University Press.
[2] Altman, I. R. 1980. Cross-Cultural Aspects of Environmentak Design, Advances in Theory and Research, Environment and Culture. Plenum Press, New York and London (Vol. 4), 7-46.
[3] Antariksa. 2007. Perencanaan dan Pengembangan Kota-Kota Pantai. Architecture Articles.
[4] Arifuddin dan Darjosanjoto, E.. 2011. Implications of Socio-Cultural Values in The City Form with Special Reference to Bugis Society – Indonesia. International Journal of Academic Research, Vol 3, Number 2, March, 2011, Part IV, 1118-1125.
[5] Daeng, H.J. 2008. Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan, Tinjauan Antropologis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
[6] Haryanto. 2015. Analisis Pertumbuhan Inklusif.
[7] Korten, D. 2006. The Great Turning. San Fransisco: Berret Koehler Publisher Inc.
[8] Mattulada. 1975. La Toa: Satu Lukisan Analitis Terhadap Antropologi - Politik Orang Bugis. Jakarta: Disertasi S3 Universitas Indonesia.
[9] Mustafa, Y. 2003. Siri' dan Pesse, Harga Diri Orang Bugis, Makassar, Mandar, Toraja. Makassar: Pustaka Refleksi.
[10] Rapoport, A. 1993. Development, Culture Change and Supportive Design. USA: University of Wisconsin-Milwaukee.
[11] Tang, M. 1996. Aneka Ragam Pengaturan Sekuritas Sosial di Bekas Kerajaan Berru, Sulawesi Selatan. ISBN 90-5485-594-0, Grafisch Service Centrum Van Gils B.V, Wageningen.
[12] Warsilah, H. 2015. Pembangunan Inklusif Sebagai Upaya Mereduksi Eksklusi Sosial Perkotaan: Kasus Kelompok Marjinal Di Kampung Semanggi, Solo, Jawa Tengah. Jurnal Masyarakat & Budaya, Volume 17 No. 2.
[13] Widodo, S. 2008. Modernisasi dan Pembangunan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

VALUASI SUMBER DAYA LAHAN DI PINGGIRAN KOTA MALANG (Studi Kasus : Wilayah Pinggiran Kota Malang, Kelurahan Tunggulwulung Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang)

Dimas Wisnu Adrianto[1)], Abdul Wahid Hasyim[1)], Dian Dinanti[1)], Januar Dwi Hari Sandy[2)], Raihanah Rizky Ananda[2)]

[1)] Staff pengajar di Jurusan Perencaaan Wilayah dan Kota – FTUB
[2)] Mahasiswa di Jurusan Perencaaan Wilayah dan Kota – FTUB

Naskah diterima : 23Maret 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 24 Maret 2017

ABSTRAK

Kota Malang sebagai kota pendidikan, industri dan pariwisata telah menyebabkan perkembangan kota ke wilayah pinggiran (urban fringe) karena kondisi akumulasi berbagai aktivitas kegiatan fungsi dasar dan kegiatan-kegiatan lain yang tumbuh akibat dorongan kegiatan fungsi dasar tersebut. Kebijakan pengelolaan lahan, termasuk lahan sawah lebih menekankan aspek pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.Kondisi tersebut berdampak buruk terhadap kelestarian lahan sawah.Valuasi ekonomi terhadap manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan.Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analiis deskriftif dan evaluatif. Analisis deskriptif meliputi analisis karakteristik fisik dasar, analisis harga lahan, analisis keterkaitan pusat kota dengan wilayah pinggiran dan analisis perkembangan kota. Sedangkan analisis evaluatif meliputi analisis kebijakan, analisis proyeksi penduduk, dan analisis valuasi ekonomi. Berdasarkan hasil analisis tersebut diharapkan digunakan sebagai bahan masukan dalam pengendalian perkembangan fisik ke arah pinggiran kota yang dapat mengancam kelestarian lingkungan dan ketahanan pangan.

Kata kunci: *valuasi, pinggiran, konversi*

PENDAHULUAN

Sebagai daerah urban, pada umumnya Kota Malang didominasi oleh kawasan terbangun yang terdiri dari perumahan, fasilitas umum, dan industri. Fasilitas ini tersebar pada kawasan pusat kota yang meliputi Kecamatan Klojen, Sukun, dan Blimbing, sedangkan komponen guna lahan sawah dan tegalan terletak di pinggiran kota.

Kota Malang sebagai kota pendidikan, industri dan pariwisata telah menyebabkan perkembangan kota ke wilayah pinggiran (*urban fringe*) karena kondisi akumulasi berbagai aktivitas kegiatan fungsi dasar dan kegiatan-kegiatan lain yang tumbuh akibat dorongan kegiatan fungsi dasar tersebut[1]. Salah satunya adalah fasilitas permukiman/ perumahan yang merupakan fasilitas pokok dalam pengembangan perkotaan sehingga harus mendapat prioritas didalam penanganannya.Saat ini, fasilitas perumahan yang dilakukan oleh para pengembang lebih diarahkan pada wilayah pinggiran Kota Malang. Mengingat penyediaan lahan di kawasan kota telah mengalami kejenuhan karena mengalami perubahan untuk kawasan terbangun, selain itu harga lahan disekitar kawasan terbangun kota saat ini sangat mahal maka struktur pertumbuhan kota mulai bergerak menjauh dari pusat kota menyebar dan menggeser wilayah pinggiran.

Perkembangan kota ke kawasan pinggiran kota sering kali tanpa kendali karena pengadaan lahan diselenggarakan tanpa mengindahkan dampaknya. Kawasan pinggiran yang pada awalnya dialokasikan untuk kegiatan pertanian dan buffer zone kota cenderung mengalami perubahan fungsi tanpa memperkirakan dampak sosial, ekonomi dan lingkungan terhadap kondisi awal dan keberlangsungan pembangunan kawasan perkotaan itu sendiri (*sustainable development*). Menurut Kementrian PU dalam Pengendalian Konservasi Lahan Petanian, dampak konversi lahan pertanian dapat dipandang dari dua sisi:

1.Dari fungsinya, adanya konversi lahan pertanian ke fungsi lain akan menurunkan produksi padi nasional.

2.Dari bentuknya, perubahan lahan pertanian ke pemukiman, perkantoran, prasarana jalan dan lainnya berimplikasi pada besarnya kerugian akibat sudah diinvestasikannya dana untuk mencetak sawah, membangun waduk dan sistem irigasi.

Valuasi ekonomi terhadap manfaat dan dampak yang ditimbulkan dari pengelolaan sumberdaya alam dan lingkungan sangat diperlukan bagi pengambilan kebijakan[2].Dalam valuasi ekonomi sumberberdaya alam dan lingkungan, manfaat dan dampak faktor yang perlu diperhatikan adalah determinasi manfaat dan dampak fisik dan valuasinya dalam aspek moneter. Penilaian manfaat dan dampak secara moneter harus berdasarkan pada penilaian yang tepat akan manfaat dan dampak fisik dan keterkaitannya, karena dampak yang ditimbulkan mengakibatkan perubahan produktivitas maupun perubahan kualitas lingkungan.

METODOLOGI

1. Metode Analisis

Setelah data terkumpul, selanjutnya data dianalisis dengan menggunakan beberapa metode.Adapun analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif, analisis evaluatif, dan analisis preskriptif.

2. Kerangka dan Prosedur Valuasi Ekonomi Lahan Sawah

Kerangka dan prosedur penilaian ekonomi sumberdaya alam dan lingkungan pada ekosistem lahan sawah tidak berbeda dengan kerangka dan prosedur penilaian pada ekosistem lainnya, seperti valuasi ekonomi pada ekosistem hutan, mangrove, terumbu karang.Namun, yang membedakan adalah fungsi dan manfaat dari masing-masing sumberdaya alam pada ekosistem tersebut.

Lahan sawah memiliki nilai ekonomi yang sangat besar[3].Nilai ekonomi tersebut dapat dihitung melalui identifikasi fungsi dan manfaat lahan sawah, baik secara total maupun secara parsial sesuai tujuan dilakukannya valuasi ekonomi. Pendekatan perhitungan dilakukan mengikuti tahapan valuasi ekonomi fungsi sumberdaya alam dan lingkungan pada ekosistem lahan sawah, sebagai berikut:

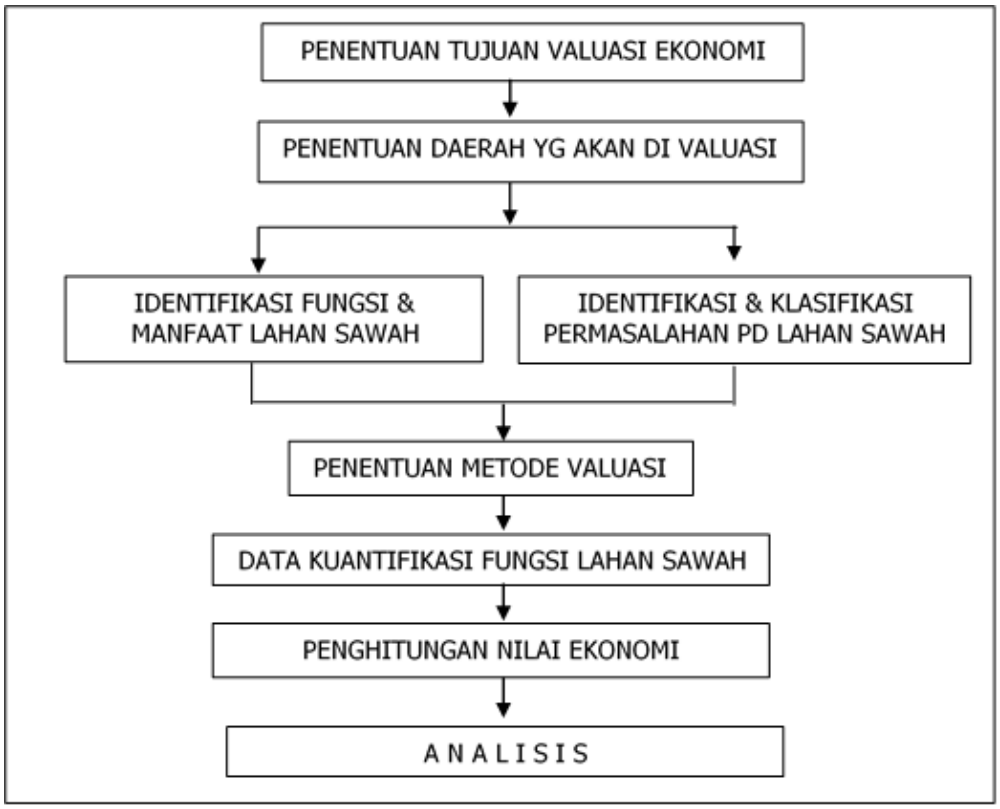

Gambar 1. Kerangka Valuasi Ekonomi Lahan Sawah.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Analisis Perubahan Guna Lahan Kelurahan Tunggulwulung

Kelurahan Tunggulwulung memiliki luas 1124 km2 secara topografis Kelurahan Tunggulwulung berada pada ketinggian 400 – 600 meter di atas permukaan air laut. Analisis yang digunakan dalam perubahan guna lahan di Kelurahan Tunggulwulung dengan hasil olahan citra berdasarkan temperatur. Citra yang digunakan adalah Landsat 7 ETM+,

Kota Malang tahun 1989-2013.Suhu permukaan atau Land Surface Temperature dapat mengindikasikan bahwa daerah tersebut memiliki guna lahan yang berbeda dengan asumsi lahan terbangun merupakan lahan kedap air yang menghasilkan suhu lebih tinggi daripada lahan tidak terbangun.

Berikut hasil olahan citra Landsat 7 ETM+, Kota Malang tahun 1989-2000 menggunakan teknikanalisis *Land Surface Temperature*.Pada gambar berikut *Land Surface Temperature* Kota Malang masih berpusat di tengah wilayah, suhu tertinggi rata-rata pada tahun 1989 yaitu 30^{o}C dengan suhu terendah 18^{o}C, kemudian pada tahun 2000 mengalami perubahan dimana suhu permukaan yang memiliki temperature tinggi semakin meluas dengan adanya gradasi warna merah muda hingga merah pada wilayah Kota Malang.

Indikasi dari olahan citra tersebut pada tahun 2000 semakin banyak lahan yang berubah menjadi terbangun sehingga menimbulkan suhu permukaan yang lebih tinggi dari sebelumnya.Peta citra olahan tersebut menunjukkan pada tahun 2000 suhu tertinggi rata-rata adalah 29^{o}C dan suhu terendah 16^{o}C.Perubahan yang terjadi antara rentang Tahun 1989 dan tahun 200 masih relatif stabil.

Kelurahan Tunggulwulung yang berada di bagian utara Kota Malng masih memiliki suhu permukaan yang masih rendah, hal tersebut menunjukkan bahwa Kelurahan Tunggulwulung masih didominasi oleh lahan tidak terbangun.Perubahan suhu permukaan terjadi sangat signifikan pada tahun 2011 hingga 2013.Berikut gambar peta citra olahan berdasarkan suhu permukaan pada tahun 2011 hingga 2013.

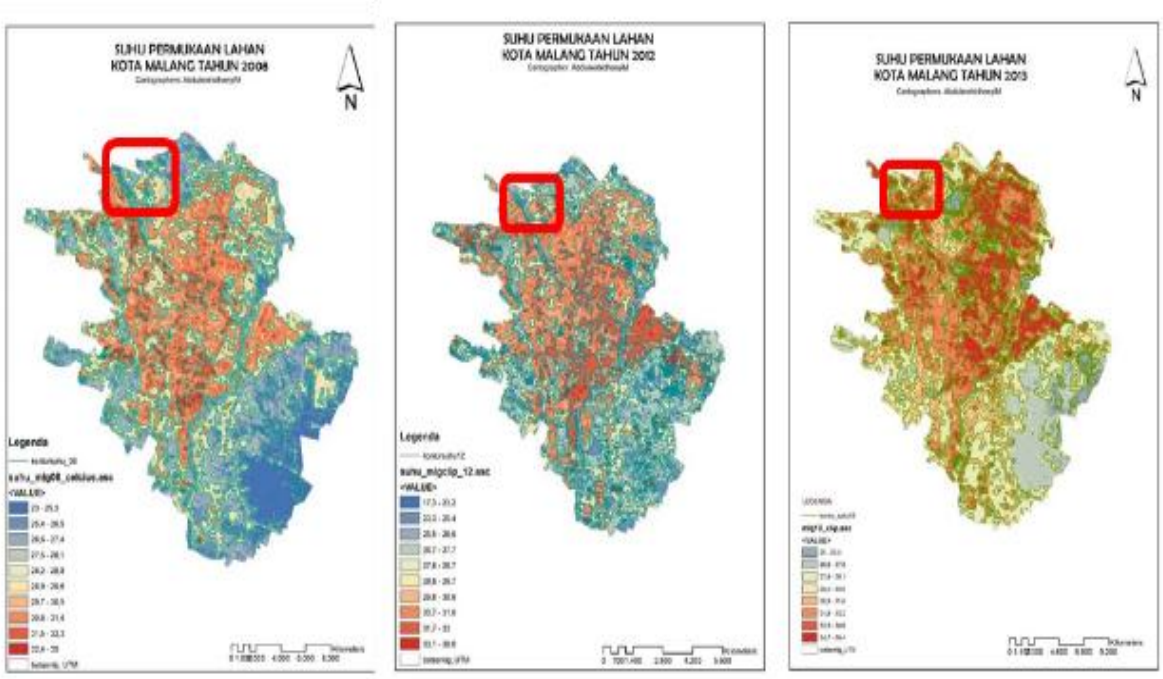

Gambar 2.*Land Surface Temperature* Kota Malang Tahun 1983-2000

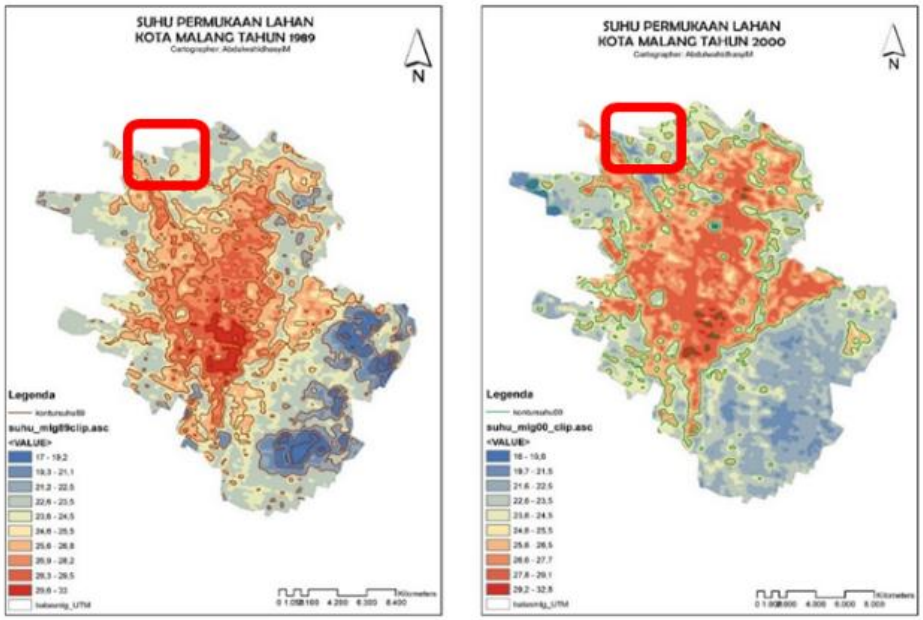

Gambar 3.*Land Surface Temperature* Kota Malang Tahun 2011-2013.

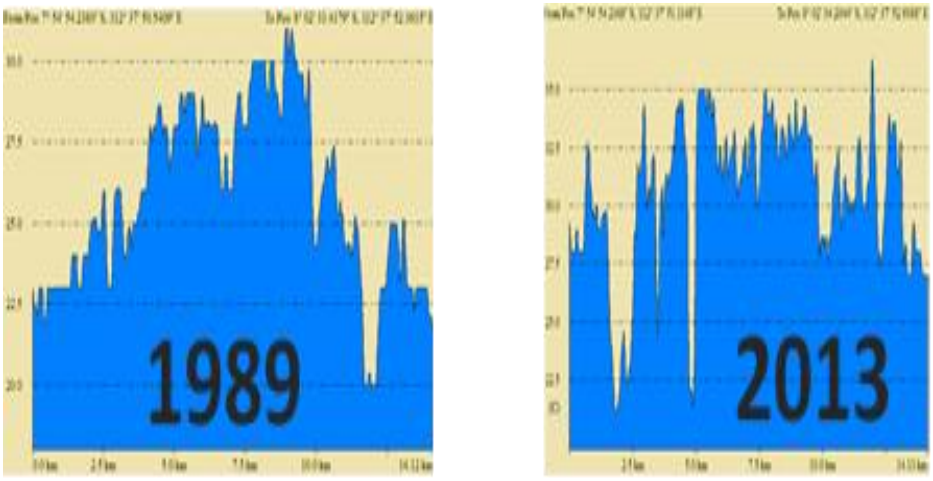

Gambar 4. Grafik Perubahan Suhu Kota Malang pada Tahun 1989 dan 2013

Pada gambar diatas dapat dilihat warna merah yang mengindikasikan peningkatan suhu permukaan semakin meluas ke daerah pinggiran kota. Hal ini menguatkan bahwa perkembangan kota dan perubahan guna lahan dari tidak terbangun menjadi terbangun menyebar ke daerah peripheral (pinggiran). Kelurahan Tunggulwulung mengalami perubahan suhu, pada tahun 1989 masih didominasi oleh warna biru hingga biru, pada tahun 2013 perubahan warna terjadi menjadi gradasi merah muda menuju merah. Hal ini menunjukkan adanya perubahan suhu akibat lahan yang kedap air sehingga suhu yang dihasilkan lebih tinggi daripada lahan yang masih kosong. Hasil olahan citra tersebut dapat disimpulkan menjadi 2 hal bahwa suhu permukaan yang tinggi dihasilkan oleh lahan yang terbangun yang relatif sangat minimum dalam menyerap air dan perkembangan wilayah kota ke daerah pinggiran Kota Malang semakin tinggi karen disebabkan lahan diperkotaan yang sudah padat. Berikut grafik perubahan suhu dari tahun 1983 hingga 2013.

2) Analisis Valuasi Lahan Kelurahan Tunggulwulung.

Dengan menggnakan Metode Valuasi Kontingen (CVM), analisis tersebut bertujuan mengetahui harga atau nilai dalam membeli barang atau menjual barang.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui nilai keuntungan yang diinginkan para petani atau penggarap lahan dalam kegiatan pertaniannya. Data mengenai responden akan mendukung analisis tersebut. Beberapa responden memiliki keinginan dalam menjual lahan yang mereka miliki berikut data hasil survei wawancara langsng terhadap warga di Kelurahan Tunggulwulung.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gambar 5. Grafik Responden menurut Pengeluaran/bulan

Gambar 6. Diagram Prosentase Responden menurut Pendapatan/bulan

Dalam penelitian ini mencari keterikatan antara variabel satu dan lainnya yang dilihat dari nilai korelasi variabel.Korelasi adalah salah satu analisis dalam statistik yang dipakai untuk mencari hubungan antara dua variabel yang bersifat kuantitatif.

Nilai pada perhitungan korelasi yaitu berkisar pada interval -1 sampai 1, jika nilanya positif maka menunjukan hubungan dari variabel tersebut yang bersifat searah. Jika nilainya negatif bersifat berlawaan arah..Variabel-variabel penelitian daiatas kemudian menjadi acuan dalam perhitungan korelasi antara variabel satu dan lainnya.

Pola korelasi terdiri dari tiga bentuk, pertama apabila nilai koefisien korelasi mendekati +1 (positif satu) berarti pasangan data variabel x dan variabel y memiliki korelasi linear positif yang kuat/erat.Kedua adalah nilai koefisien korelasi mendekati -1 (negatif satu) maka hal ini menunjukan pasangan data variabel x dan variabel y memiliki korelasi linear negatif yang kuat/erat.Ketiga, apabila nilai koefisien korelasi mendekati 0 (nol) berarti pasangan data variabel x dan variabel y memiliki korelasi yang sangat lemah atau berkemungkinan tidak berkorelasi. Untuk memudahkan melakukan interpretasi mengenai kekuatan hubungan antara dua variabel penulis memberikan kriteria sebagai berikut:

1. 0 :Tidak ada korelasi antara dua variabel
2. >0 – 0,25 :Korelasi sangat lemah
3. >0,25 – 0,5 : Korelasi cukup
4. >0,5 – 0,75 : Korelasi kuat
5. >0,75 – 0,99: Korelasi sangat kuat
6. 1 : Korelasi sempurna

ISBN : 978-602-73463-1-4

Berikut hasil korelasi antar variabel-variabel dalam penelitian valuasi sumber daya lanan di Kelurahan Tunggulwulung.

Tabel 1. Tabel korelasi antar variabel penelitian

No	Variabel (X)	Variabel (Y)	Korelasi	Kategori
1	Jumlah Anggota Keluarga	Rata-rata pengeluaran	0,644528738	Korelasi Kuat
2	Jumlah Anggota Keluarga	Luas Lahan	0,061094438	Korelasi Sangat Lemah
3	Jumlah Anggota Keluarga	Pendapatan yang diinginkan	0,076562688	Korelasi Sangat Lemah
4	Jumlah Anggota Keluarga	Harga Lahan yang diinginkan	0,375236355	Korelasi Cukup Kuat
5	Rata-rata pengeluaran	Luas Lahan	0,174337311	Korelasi Sangat Lemah
6	Rata-rata pengeluaran	Pendapatan yang diinginkan	0,21965732	Korelasi Sangat Lemah
7	Rata-rata pengeluaran	Harga Lahan yang diinginkan	0,345614494	Korelasi Cukup Kuat
8	Luas Lahan	Pendapatan yang diinginkan	0,989323212	Korelasi Sangat Kuat
9	Luas Lahan	Harga Lahan yang diinginkan	-0,2207771	Korelasi Sangat Lemah
10	Pendapatan yang diinginkan	Harga Lahan yang diinginkan	-0,201502344	Korelasi Sangat Lemah

Sumber : Hasil Analisis

Dari hasil analisis diatas dapat dilihat bahwa nilai koefisien tertinggi yaitu 0,9893 antara variabel rata-rata pengeluaran dan harga lahan yang diinginkan. Luas lahan yang dimiliki responden sangat berpengaruh terhadap pendapatan yang diinginkan.Semakin luas lahan yang dimiliki maka semakin tinggi pendapatan yang diinginkan, hal ini termasuk kategori korelasi linear positif.Dari analisis diatas, perlu adanya perbaikan dalam pengelolaan sistem pertanian dam dukungan dari pemerintah dalam keberlanjutan kegiatan pertanian di wilayah pinggiran Kota Malang.

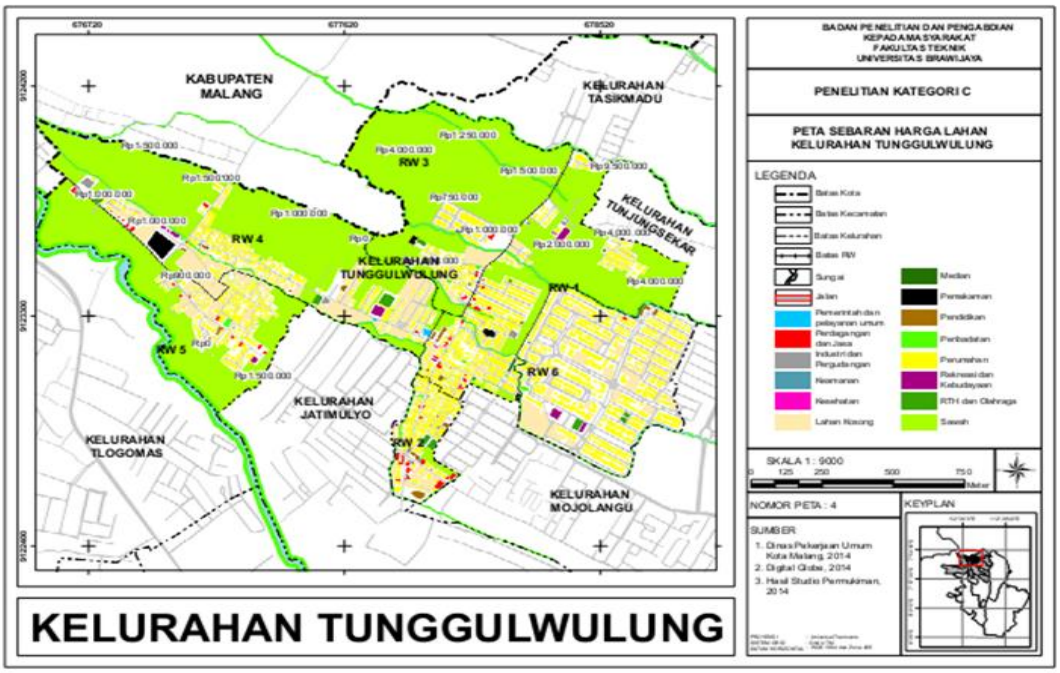

Gambar 4. Peta Sebaran Harga Lahan 2015

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KESIMPULAN

Perkembangan Kota di Malang menyebabkan perubahan guna lahan di Kelurahan Tunggulwulung yang awalnya adalah guna lahan pertanian sawah produktif menjadi lahan permukiman penduduk. Pada saat ini penduduk masih ingin bertahan dengan kegiatan pertanian, namun pada saat produktifitas dirasa mulai menurun 89,47% petani akan lebih memilih menjual lahannya untuk menggantinya dengan lahan di daerah Kabupaten Malang.

Kegiatan pertanian di Keluruhan Tunggulwulung di dominasi oleh usia produktif antara 45-65 Tahun, rentang umur 51-55 Tahun memiliki prosentase terbanyak dengan 26,32% dari total keseluruhan responden.
Kelurahan Tunggulwulung merupakan wilayah yang strategis untuk dijadikan lokasi tempat tinggal, selain jarak dengan pusat kota yang dekat, harga lahan di Kelurahan Tunggulwulung masih memiliki nilai lebih rendah dapat dilihat dari prosentase responden akan menjual tanahnya pada rentang harga Rp. 500.000,00 - Rp. 1.000.000,00/m2. Perubahan guna lahan disebabkan terjadinya supply-demand pada sektor perumahan.
Kebijakan pemerintah menjadi salah satu faktor berubahnya guna lahan dan perkembanagan wilayah perkotaan.Dengan adanya permintaan yang sangat tinggi untuk perumahan pemerintah memberikan kebijakan untuk daerah pinggiran sebagai upaya dalam memenuhi kebutuhan permukiman.\

Kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi dampak negatif dari perkembangan wilayah ke daerah pinggiran Kota Malang terkait dengan kebutuhan permukiman yang tinggi serta keberlanjutan pertanian sebagai upaya dalam mengurangi dampak degradasi lingkungan serta kontibusi dalam memenuhi kebutuhan pangan.Pemerintah harus memiliki perhatian terhadap peningkatan dan pemutakhiran teknologi pertanian, sehingga diharapkan petani dapat bertahan dengan keuntungan yang maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

.

[1] Masum, F. 2009. Urban Fringe Management and Role of Good Governance: Integrating Stakeholdrs in Land Management Process. Hanoi, Vietnam, 19-22 October.

[2] Soemarno, M. 2010. Metode Valuasi Ekonomi Sumberdaya Lahan Pertanian. Malang: PDIP PPS FPUB.

[3] Sudhirman, S. 2012. Valuasi Ekonomi Dampak Konversi Lahan Pertanian Di Pinggiran Kota Yogyakarta. Yogyakarta: AGRIKA.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PARTISIPASI MASYARKAT PADA PENGELOLAAN SAMPAH DENGAN KONSEP 3R DI KOTA BUKITTINGGI

Dona Amelia[1)], **Juarsa Badri**[1)]

[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi El Hakim, Solok

Email : dona_elhakim2009@yahoo.co.id

Naskah diterima :25 Februari 2017 Naskah direvisi : 8 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Sampah merupakan bagian dari penelitan Strategi Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat dengan Optimalisasi Implementasi 3R dan Implikasinya terhadap Perekonomian Kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan partisipasi masyarakat pada pengelolaan sampah dengan konsep 3R di kota Bukittinggi. Pengelolaan sampah di kota Bukittinggi pada awalnya menggunakan metode Open Dumping di TPA Panorama Baru. Setelah dikeluarkan Undang-undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka sampah yang ada di kota Bukittinggi dibuang ke daerah Limbukan, Payakumbuh. Jenis penelitian deskriptif kualitatif . Hasil penelitian ini memperlihatkan tingginya keinginan masyarakat kota Bukittinggi untuk berpartisipasi pada program 3R. Sumber informasi dari kegiatan 3R juga beragam dimana hasil penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar responden memperoleh informasi tentang 3R dari sosial media dan penyuluhan. Terdapat beberapa alasan masyarakat belum berpartisipasi dalam kegiatan 3R diantranya yang paling menonjol adalah belum tahu cara melakukan 3R dan belum tahu manfaat dari program 3R. Ketersediaan sarana pendukung 3R juga masih terbatas dimana responden sebesar 86% menyatakan sarana pendukung kegiatan 3R masih belum mencukupi. Agar program 3R berhasil dijalankan dengan baik diperlukan kecukupan sarana pendukung, penegakan aturan serta kampanye yang intensif untuk keberlanjutan program 3R.

Kata kunci: *sampah, 3R (reduce, Reuse, Recyle), partisipasi masyarakat*

PENDAHULUAN

Pada saat ini terutama di kota besar peningkatan timbulan sampah perkotaan (2–4 %/tahun) yang tidak diikuti dengan ketersediaan prasarana dan sarana persampahan yang memadai, berdampak pada pencemaran lingkungan yang selalu meningkat dari tahun ke tahun. Dengan mengandalkan pola kumpul-angkut-buang, maka beban pencemaran akan selalu menumpuk di lokasi TPA dan pengelolaan sampahnya tidak memenuhi standard yang telah dipersyaratkan [4].

Kota Bukittinggi selama ini menangani masalah sampah dengan melakukan pembuangan secara open dumping di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Panorama Baru, yang dianggap menyalahi aturan dan harus segera dilakukan penutupan karena tidak dapat dimanfaatkan dalam jangka panjang. Setelah dikeluarkan Undang-Undang nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah, maka pemerintah Kota Bukittinggi melakukan pembuangan sampah di Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Regional kota Payakumbuh sesuai dengan nota kesepakatan yang disetujui oleh Pemerintah Provinsi sebagai fasilitator dan 5 kabupaten/kota dalam kesepakatan tersebut [3].

Sampah terbesar di kota Bukittinggi dihasilkan oleh perumahan sebanyak 218,90m3 dan dari pasar sebanyak 72,96m3 dari 446 ,27 m3 timbunan sampah per hari, timbulan rata-rata sampah domestik kota bukittinggi adalah 1,49 liter/orang /hari untuk satuan volume atau 0,2 kg /orang/hari untuk satuan berat [7]

Sampai saat ini, pengelolaan sampah yang ada di kota Bukittinggi dikelola oleh Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) memang kesulitan menangani masalah persampahan. Kendala yang dihadapi diantanya

kesadaran masyarakat untuk meminimalisir produksi sampah yang dimulai dari diri pribadi, keluarga dan lingkungan.

Sejak tanggal 5 Mei 2013 pembuangan sampah di TPA Panorama Baru tidak boleh dilakukan lagi dengan alasan apapun. Hal ini dilakukan mengacu kepada UU nomor 18 tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yang melarang pengelolaan sampah secara Open dumping di TPA yang selama ini dilakukan oleh Pemerintah kota Bukittinggi. Pemerintah Pemko Bukittinggi yang difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan kerjasama dalam pengelolaan sampah bersama kota payakumbuh yang memiliki lahan seluas 23 hektar di Limbukan. Pengaturan pengelolaan sampah bertujuan menjaga kelestarian dan fungsi lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat serta menjadikan sampah sebagai sumber daya [8]

Sampah yang dibuang dari kota Bukittinggi mencapai 120-130 ton per hari. Konsekuensi dari kerjasama tersebut pemerintah kota Bukittinggi mesti membayar kompensasi berupa restribusi 1 ton sampah yang dikirim ke Limbukan, Payakumbuh dihargai Rp.20.000, ditambah biaya operasional angkutan dari Bukittinggi ke Limbukan dan sebaliknya. Jika diakumulasikan per tahun pemerintah kota Bukittinggi mesti mengalokasikan dana sebesar Rp.864.000.000 per tahun untuk biaya restribusi sampah saja belum termasuk biaya angkutan dari Bukittinggi ke Limbukan Payakumbuh [9]. Pengelolaan saampah saat ini yang banyak terjadi yang masih menggunakan konsep end of pipe mengancam kesehatan, keselamatan dan lingkungan, dan menimbulkan biaya tidak langsung bagi masyarakat [2]

Pengelolaan sampah yang baik dan terencana dari kota Bukittinggi bisa membawa kontribusi yang positif terhadap masyarakat, Sehingga dana yang semula dialokasikan untuk biaya pembuangan sampah dari kota Bukittinggi ke Limbukan Payakumbuh bisa dialokasikan ke bidang lain yang bisa lebih bermanfaat. Apabila pegelolaan sampah bisa diterapkan dengan melibatkan partisipasi masyarakat dengan konsep 3R diharapkan akan membawa nilai ekonomi bagi masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan di kota Bukittinggi selama bulanJuli-Agustus 2016 Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder, Data primer diperoleh dari Kepala Kantor Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Bukittinggi, reponden , Petugas kebersihan di kota bukittinggi serta stakeholder yang memberikan informasi berupa jawaban atas kuesioner yang dibagikan .Data sekunder diambil dari laporan , jurnal , artikel, publikasi yang terkait dengan pengelolaan sampah di kota Bukittinggi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah kepala keluarga yang berdomisili di Kota Bukittinggi sebanyak 3 kecamatan dengan jumlah 106 RW dan 336 RT. Pengambilan samel dilakukan dengan teknik simple random sampling. Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah wawancara, kuesioner dan FGD.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian terlihat masyarakat kota Bukittinggi masih dengan konsep end of pipe dimana masyarakat membuang sampah di TPS dan selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan ke TPA Limbukan di Payakumbuh. Masyarakat Kota Bukittinggi dihimbau untuk mengumpulkan sampah pada pukul 18.00 – 06.00 WIB setiap harinya. Sistem pengumpulan sampah di Kota Bukittinggi terbagi atas beberapa pola sebagai berikut. Yaitu pola individual langsung masyarakat membuang langsung ke TPS terdekat yang kemudian sampah dari TPS tersebut dikumpulkan oleh truk sampah diangkut ke TPA Regional. Biasanya pola ini umum di daerah perumahan seperti di Perumahan Guguak Bulek. Hasil penelitian di lapangan memperlihatkan bahwa 53% responden membuang sampah dalam frekwensi 2 sampai 3 hari dalam seminggu, sebesar 28% persen respon melakukan pembuangan sampah setiap hari dalam seminggu. Hal ini dapat dilihat pada gambar :

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

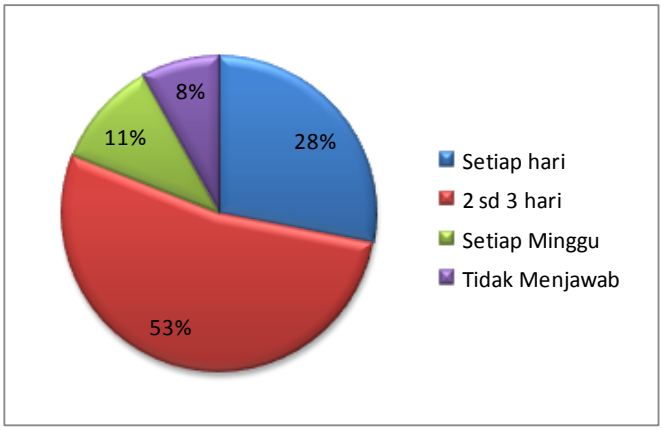

Sumber : data diolah

Gambar 1. Frekwensi Pembuangan Sampah Masyarakat

Pola pengangkutan sampah selanjutnya yang ada di kota Bukittinggi adalah Pola Individual Tidak Langsung dimana Masyarakat memanfaatkan jasa petugas yang mengambil sampah dari rumah ke rumah dengan memakai alat pengumpul dan pengangkut (gerobak sampah/ becak sampah/ gerobak motor/ truk sampah). Sampah yang sudah dijemput kemudian dibawa ke TPS dan/ atau langsung diangkut menuju TPA Regional Payakumbuh. Pola ini selain di komplek pemukiman juga dilakukan pada komplek non pemukiman. Komplek Cendana Garegeh contohnya, memakai gerobak sampah untuk mengangkut sampah. Kota Bukittinggi lebih banyak menerapkan pola seperti ini dari pada memperbanyak TPS. Masyarakat akan meletakkan sampahnya di pinggir jalan atau di luar halaman, kemudian truk sampah akan berkeliling mengumpulkan sampah dari rumah ke rumah. Tujuan pemerintah kota menerapkan ini agar bisa mengurangi jumlah sampah dari masyarakat luar (Kabupaten Agam) yang cukup sering membuang sampah dengan memanfaatkasn fasilitas wadah sampah di Kota Bukittinggi.

Pola kebersihan kota Bukittinggi yang ketiga adalah pola penyapuan jalan, Pola Pihak DKP telah menyebarkan penyapu jalan di tiap kecamatan. Hasil sapuan jalan akan dikumpulkan dengan gerobak sampah/ becak sampah/ becak motor yang akan dibawa ke kontainer terdekat dan nantinya untuk dibawa menuju TPA Regional oleh truk sampah. Jadwal penyapuan jalan terdiri atas 2 (dua) shift yaitu pagi hari dan sore hari.

Keberhasilan program pengelolaan sampah dengan konsep 3R sangat ditentutukan oleh pertisipasai masyarakat untuk menyukseskan program tersebut. Partisipasi masyarakat diawali dengan pengetahuan dan informasi yang diperoleh masyarakat atas program yang akan dilakakukan pemerintah. Survey terhadap masyarakat mengenai pengetahuan mereka tentang pengelolaan sampah dengan konsep 3R memperlihatkan :

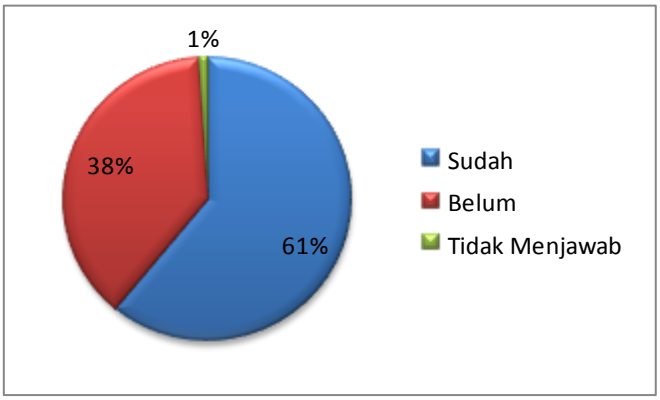

Gambar 2. Mengetahui Konsep 3R

Sumber : data diolah

Berdasarkan penelitian terlibat sebagaian besar masyarakat kota Bukittinggi sudah mengetahui tentang konsep pengelolaan sampah 3R, dimana sebesar 61% responden sudah mengetahui konsep tersebut. Hal ini selanjutnya dapat didorong dengan serangkaian kegiatan atau program untuk keberhasilan program pengelolaan sampah 3R. Namun demikian , sebesar 38% responden belum mengetahui konsep pengelolaansampah 3R, sehingga hal ini perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar informasi mengenai konsep pengelolaan sampah 3R dapat diterima oleh masyarkat secara merata.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Dukungan masyarakat terhadap program pengelolaan sampah dengan konsep 3R sangat diperlukan untuk keberhasilan program. Dalam hal ini pemerintah kota Bukittingggi mendapat dukungan dari masyarakat dimana berdasarkan survey sebanyak 96 % masyarakat Bukittinggi setuju dengan pengelolaan sampah dengan konsep 3R.

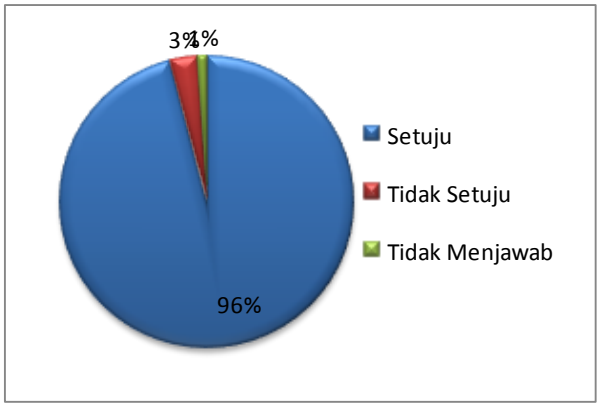

Sumber : data diolah

Gambar 3. Respon terhadap Konsep 3R

Selanjutnya hasil penelitian yang dilaksanakan di kota Bukittinggi diperoleh temuan dari para responden terkait dengan keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan sampah dengan konsep 3R. Untuk kesadaran lingkungan dari masyarkat Bukittinggi diperoleh temuan bahwa 92% responden mempunyai kesadaran bahwa jika sampah tidak dikelola dengan baik akan menyebabkan kerusakan lingkungan.

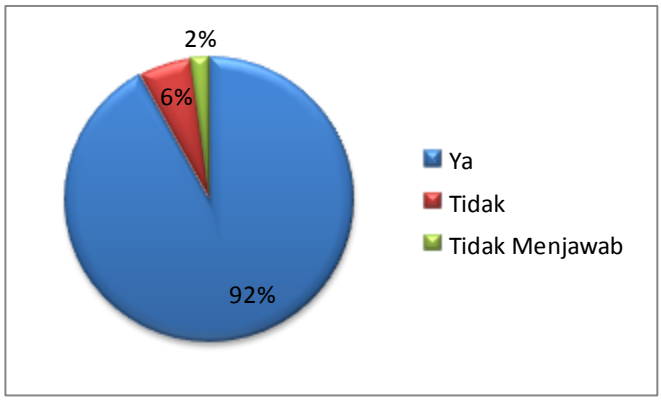

Sumber : data diolah

Gambar 4. Kesadaran Lingkungan Masyarakat

Selanjutnya mengenai pemanfaatan media sebagai sarana informasi bagi masyarakat mengenai pentingnya pengelolaan sampah dengan konsep 3R, sosial media bisa menjadi sarana informasi informasi yang diperlihatkan sebanyak 38% mendapat informasi ttg 3R dari sosial media, penyuluhan sebanyak 24%. Hal ini dapat dilihat pada gambar :

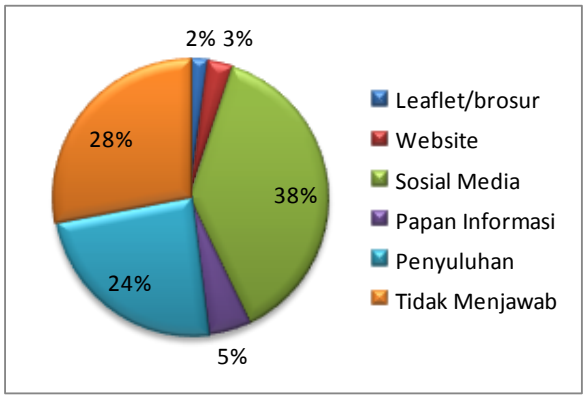

Sumber : data diolah

Gambar 5. Sumber Informasi 3R

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Sosialisasi dan edukasi masyarakat merupakan faktor yang penting untuk keberhasilan program pengelolaan sampah 3R. Hasil penelitian memperlihatkan 52 % responden belum melakukan pengelolaan sampah 3 R karena belum tahu caranya, 26 % menyatakan tidak mengetahui manfaat dari pengelolaan sampah 3R, sedangkan 12% menyatakan bahwa penanganan sampah 3R akan menghabiskan waktu.

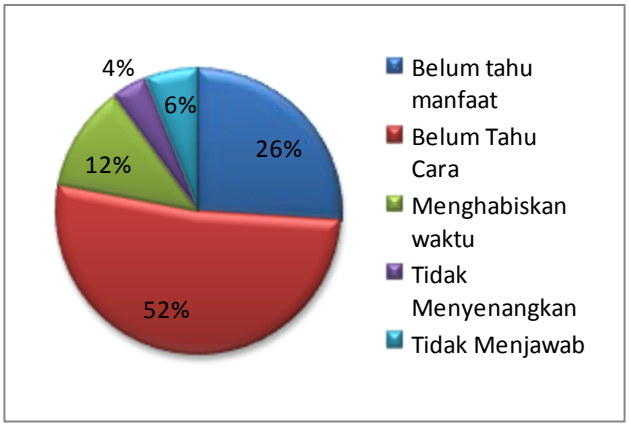

Sumber : data diolah

Gambar 6. Alasan Belum Melakukan 3R

Komitmen dan kesediaan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan sampah dengan konsep 3R di kota Bukittinggi berdasarkan survey memperlihatkan respon positif. Sebesar 69,8 % masyarkat yakin bahwa jumlah sampah di kota Bukittinggi dapat dikurangi, sebesar 75,8% masyarakat menyatakan bahwa mereka bersedia untuk mendukung program pengelolaan sampah 3R dengan memisahkan sampah basah dan sampah kering. Selanjutnya 74,2% masyarakat bersedia bekerja sama dengan pemerintah kota Bukittinggi dalam upara pengelolaan sampah 3R. Hal ini dapat dilihat pada gambar:

Masih banyaknya masyarkat yang belum mengetahui cara mengolah sampah menjadi kompos merupakan salah satu kelemahan dari keberhasilan program sampah 3R [6]

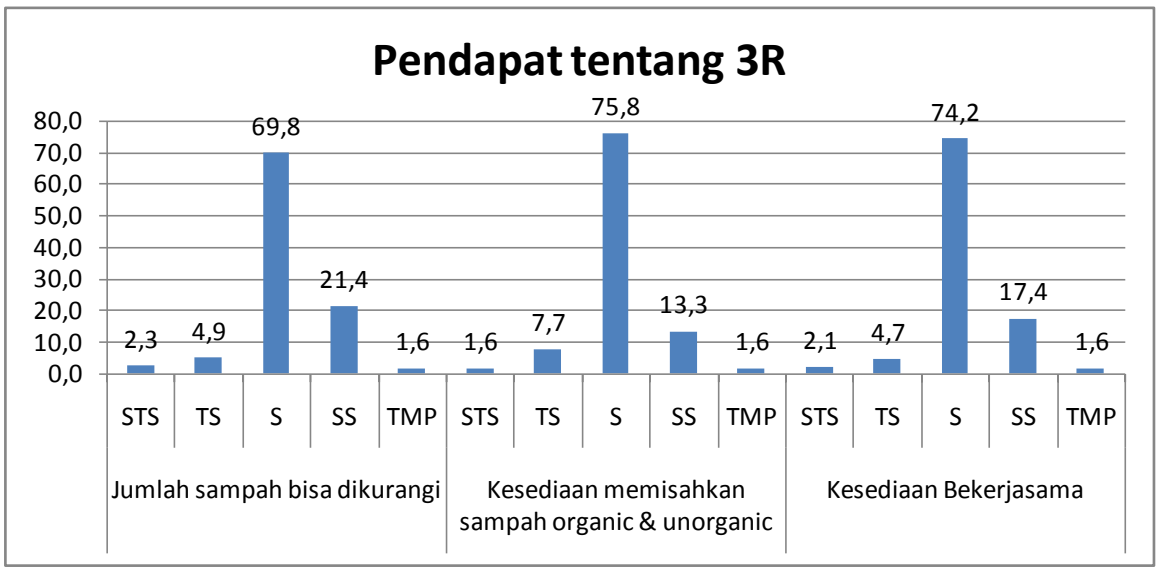

Sumber : data diolah, Ket : STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
TMP= Tidak Memberi Pilihan

Gambar 7. Pendapat Masyarakat tentang 3R

ISBN : 978-602-73463-1-4

Seperti diuraikan sebelumnya kesedian masyarkat untuk berpartisipasi dan bermitra dengan pemerintah untuk melaksanakan pengelolaan sampah dengan konsep 3R merupakan salah satu kunci keberhasilan program. Survey yang telah dilakukan memperlihatkan bahwa 56% sangat setuju dan 30% menyatakan setuju dari responden bersedia untuk berpartisipasi untuk bekerjasama untuk menciptakan pengelolaan sampah yang lebih ramah lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari grafis berikut :

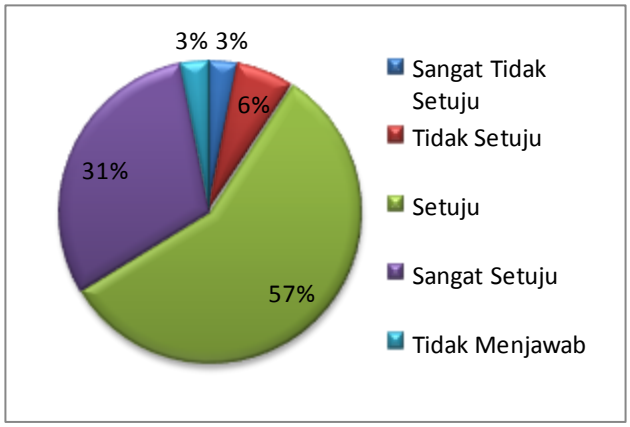

Sumber : data diolah

Gambar 8. Kesediaan Masyarakat Bekerjasama Program 3R

Penelitian ini juga memperlihatkan masyarakat kota Bukittinggi secara indivividu telah melakukan beberapa upaya untuk mengurangi jumlah sampah. Sebesar 56,6% responden menyatakan pernah membawa kantong belanja untuk mengurangi sampah plastik dan sebesar 56 % responden menyatakan pernah membeli produk daur ulang. Begitu juga untuk memperbaiki produk yang rusak dan kemudian menggunakan kembali sebesar 67,4 % responden pernah melakukannya.

Namun hal ini masih menjadi persoalan karena masyarkat kota Bukittinggi belum terbiasa untuk menggunakan kantong belanja dan pembeli produk daur ulang dalam upaya pengurangan sampah. Berdasarkan survey terlihat bahwa untuk membawa kantong belanja baru 27,4% responden jyang melakukannya, begitu juga dengan membeli produk daur ulang baru sebesar 5.1% responden yang menjadikan hal itu sebagai kebiasannya.

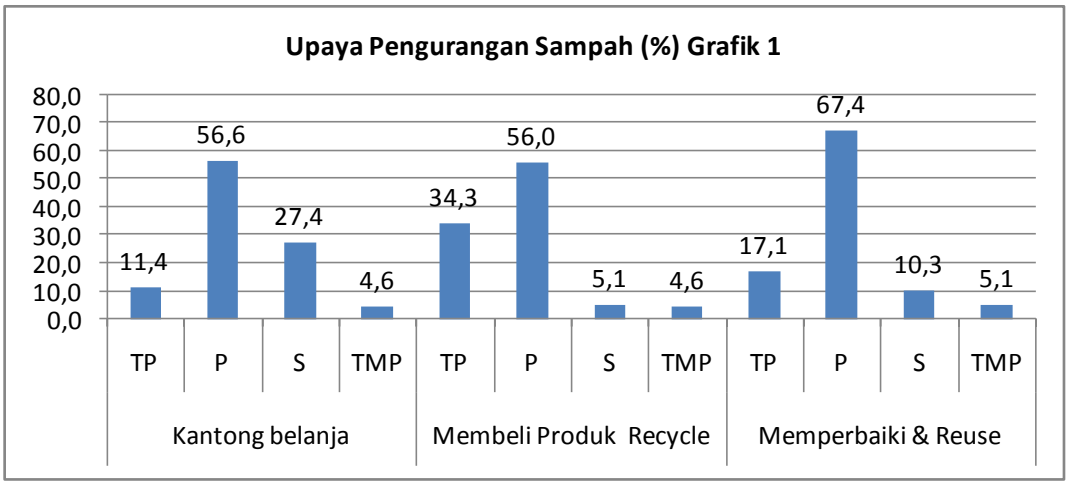

Sumber : data diolah, Ket : STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
TMP= Tidak Memberi Pilihan

Gambar 9. Upaya Pengurangan Sampah I

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

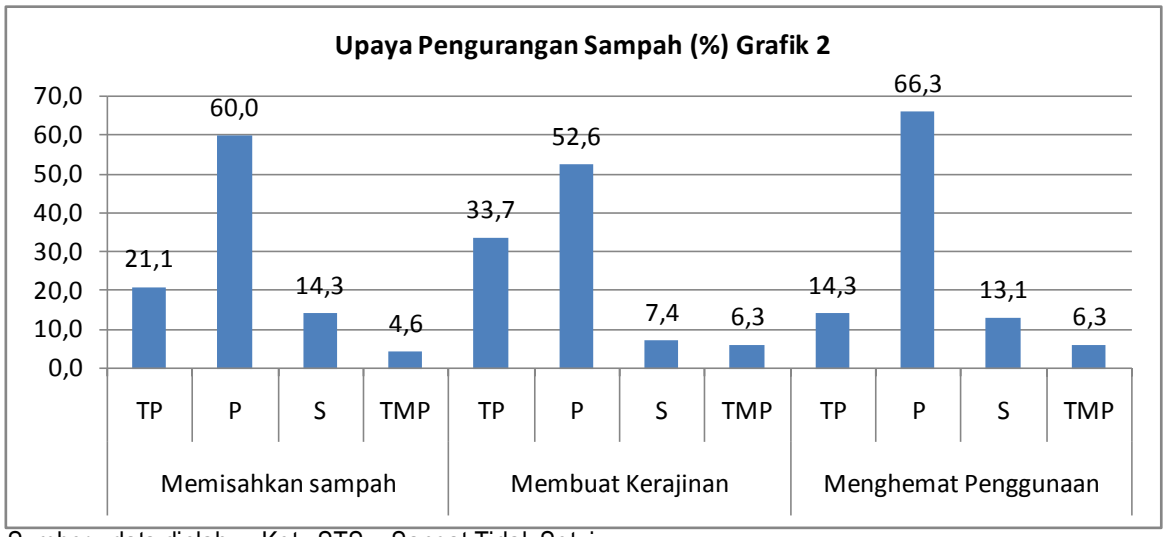

Sumber : data diolah, Ket : STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
TMP= Tidak Memberi Pilihan

Gambar 10. Upaya Pengurangan Sampah II

Pemisahan sampah basah dan sampah kering atau yang biasa disebut sampah organic dan sampah unorganik berdasarkan penelitian sebesar 60% pernah dilakukan oleh masyarakat. Pemanfaatan bahan sisa atau sampah untuk dijadikan kerajinan sebesar 52,6% respon pernah melakukannya. Begitu juga dengan penghematan penggunakaan bahan/konsumsi untuk mengurangi jumlah sampah pernah dilakukan oleh responden sebesar 66,3%.

Hasil survey juga memperlihatkan bahwa masyarakat kota Bukittinggi belum terbiasa untuk memisahkan sampah kering dan sampah basah. Hasil survey memperlihatkan bahwa hanya sebesar 14,3% yang menyatakan sering menisahkan sampah basah dengan sampah kering. Begitu juga dengan membuat kerajinan dari barang bekas, berdasarkan survey terlihat hanya sebesar 7,4% responden yang sering membuat kerajinan dari barang bekas.

Upaya penghematan pemakaian bahan untuk mengurangi sampah juga belum begitu menggembirakan. Hasil survey memperlihatkan bahwa 13,1% responen terbisa untuk menghemat pemakaian bahan atau barang. Tentunya hal ini perlu mendapatkan perhatikan dan ada upaya untuk mendorong pengurangan jumlah sampah di kota Bukittinggi.

Aspek Regulasi dan Aturan juga memainkan peranan penting untuk keberhasilan pengelolaan sampah 3R. hasil penelitian memperlihatkan bahwa 34% respon setuju agar masyarakat yang enggan melakukan pengelolan sampah 3R diberikan hukuman/denda. Respon mayarkat ini ditambah lagi dengan 10 % masyarakat sangat setuju adanya penegakan aturan pengelolaan sampah melalui mekanisme denda. Sebesar 34% responden tidak setuju dengan adanya mekanisme denda dalam pengelolaan sampah 3R.

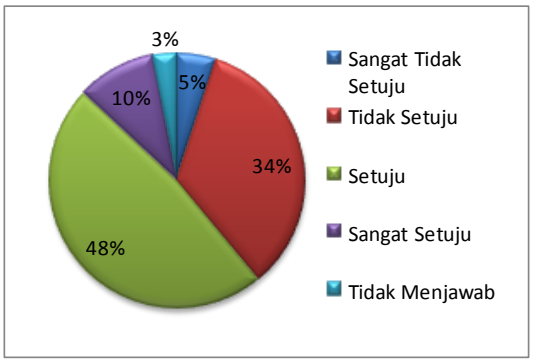

Sumber : data diolah

Gambar 11. Penegakan Aturan 3R

Partisipasi dan kesediaan masyarkat untuk berpartisipasi pada program pengelolaan sampah 3R perlu didukung dengan ketersedian sarana dan prasarana. Namun sampai survey ini dilaksanakan sebagian besar responden yaitu sebesar 86% menyatakan tidak mempunyai keranjang sampah/ sarana yang digunakan untuk pengomposan. Bukittinggi sebagai kota Wisata dalam upayanya untuk mengurangi jumlah sampah sudah sepantasnya mulai menyediakan sarana dan fasilitas untuk pengurangan sampah dalam hal ini ketersediaan wadah untuk membuat kompos dengan skala rumah tangga. Manfaat yang diharapkan selain untuk pengurangan sampah juga bisa dimanfaatkan sebagai pupuk organic yang bias langsung digunakan oleh masyarakat. Penerapan Kebijakan pengelolaan sampah dengan prinsip 3R tidak didukung oleh sarana pendukung membuat program 3R tidak berjalan dengan baik [1]

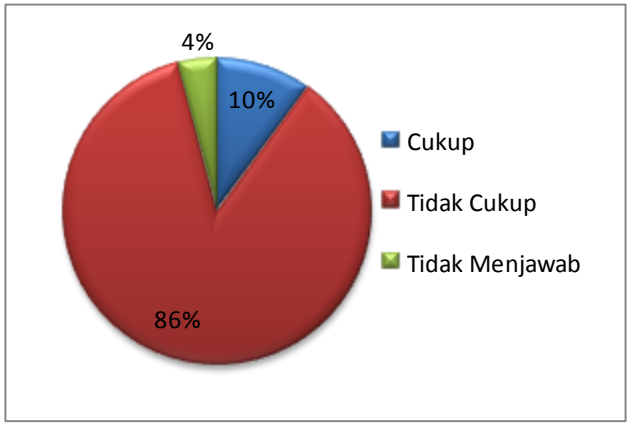

Sumber : data diolah

Gambar 12. Ketersediaan tempat kompos sampah

Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung agar pengolahan sampah dengan konsep 3R berhasil dengan baik dikota Bukittinggi sebagaimana yang diperlihatkan grafik berdasarkan survey kepada responden:

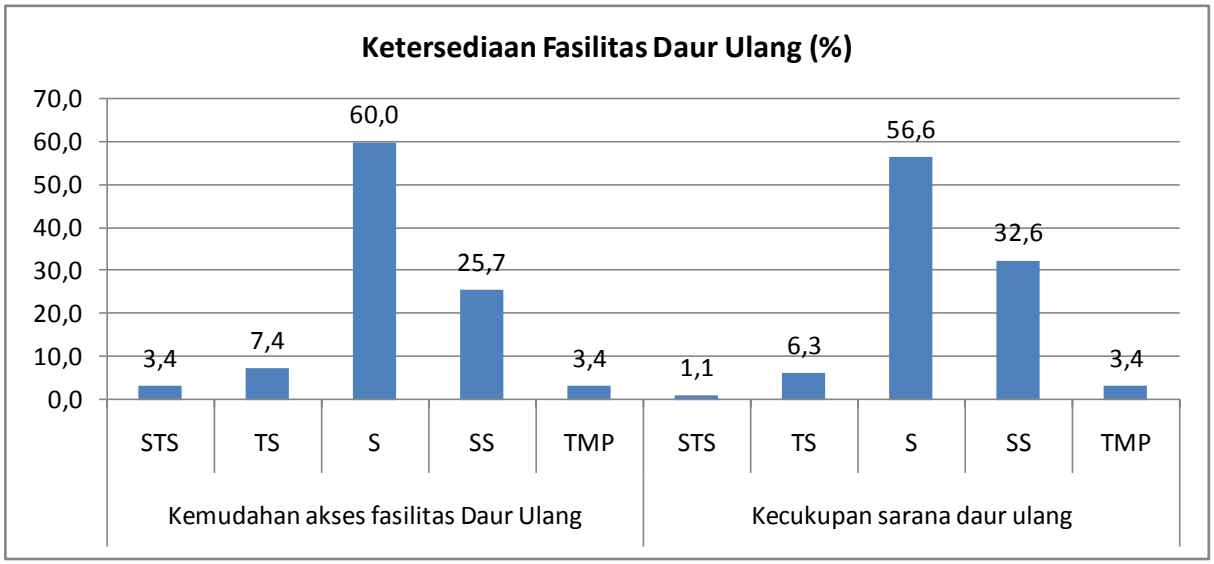

Sumber : data diolah, Ket : STS = Sangat Tidak Setuju
TS = Tidak Setuju
S = Setuju
SS = Sangat Setuju
TMP= Tidak Memberi Pilihan

Gambar 13. Ketersediaan Fasilitas Daur Ulang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel diatas memperlihatkan bahwa masyarkat kota Bukittinggi sangat berharap atas ketersediaan sarana pendukung program pengelolaan sampah 3R. Hasil survey memperlihatkan sebesar 60% responden mengharpakan kemudahan akses untuk mendapatkan fasilitas daur ulang sampah. Hal ini diperkut lagi dengan keinginan masyarkat masyarakat sebesar 56,6% yang menyatakan pentingnya kecukupan sarana untuk daur ulang sampah.

Terkait dengan sosialisasi peraturan mengenai 3R, sebanyak 34% responden menyatakan bahwa aturan mengenai pengelolaan sampah dengan 3R sudah disosialisasikan dengan baik. Sebanyak 64 % menyatakan bahwa menyatakan bahwa aturan mengenai pengelolaan sampah dengan 3R belum disosialisasikan dengan baik Sisanya sebanyak 3 % responden tidak memberikan pilihan.

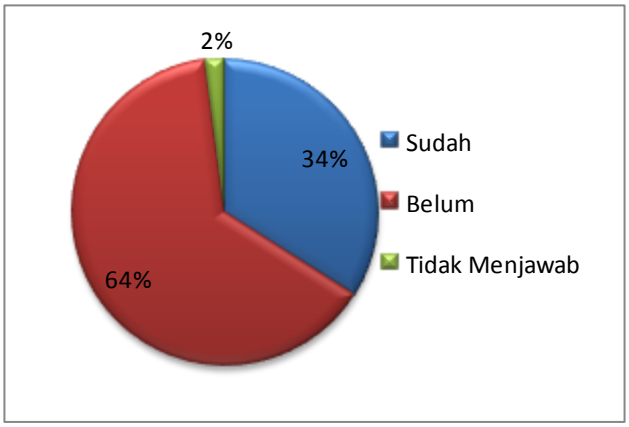

Sumber : data diolah

Gambar 14. Ketersediaan Fasilitas Daur Ulang

Keberhasilan Pemerinth kota Bukittinggi untuk melaksanakan program 3R tidak terlepas dari dukungan masyarakat. Terkait dengan hal ini, sebanyak 94% responden menyatakan dukungan agar pengelolaan sampah dengan konsep 3R di kota Bukittinggi harus dilanjutkan . Hanya sebesar 3 % menyatakan tidak memberikan dukungan pengelolaan sampah dengan konsep 3R.Sisanya sebanyak 3% responden tidak memberikan pilihan.

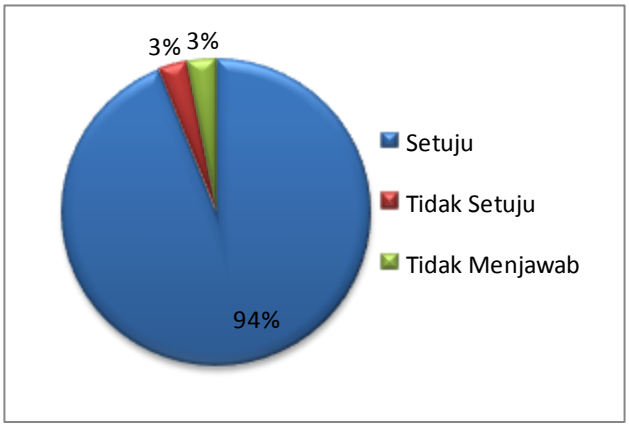

Sumber : data diolah

Gambar 15. Kampanye Keberlanjutan Program 3R

KESIMPULAN DAN SARAN

Sampai saat ini Pemerintah Kota Bukittinggi masih menggunakan konsep End of Pipe (Kumpul Angkut dan Buang) dalam pengelolaan sampah di kota Bukittinggi. Konsep pengelolaan sampah dengan 3R (Reduce, Reuse,Recyle) belum dikalksanakan dengan baik. Hasil penelitian memperlihatkan dukungan yang tinggi dari masyarakat kota Bukittinggi untuk kegiatan pengurangan sampah dan daur ulang sampah. Namun program 3R belum dapat terlaksana dengan baiknya karena masih kurangnya perhatian serius dari pemerintah kota

ISBN : 978-602-73463-1-4

Bukitinggi, sosialisasi dan sarana prasarana.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Faizah, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga berbasis Masyarakat (Studi kasus Kota Yogyakarta), Tesis, Universitas Diponegoro, 2008

[2] Fahzy Abdul Rahman, Reduce, Reuse, Recycle : Alternatives for Waste Management, Guide New Mexico State University G-314, 2006

[3] Sri Dzarrah Hayati Manvi, Efektifitas Pelaksanaan Pembuangan Sampah Kota Bukittinggi ke Tempat Pemprosesan Akhir (TPA) Regional Kota Payakumbuh nenurut Undang-Undang No.18 tentang Pengelolaan Sampah, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, 20014

[4] Sri Subekti, Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 3R Berbasis Masyarakat ,Prosiding Seminar Nasional sains dan Teknologi, 2010

[6] Yeni Marleni, Rohidin Mersyah, Bieng Brata, Strategi Pengelolaan Sampah Rumah Tangga di kelurahan kota Medan Kecamatan Kota Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, Naturalis, Jurnal penelitian pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, 2012

[7]Yenni Nurlinda, Shinta Indah, Widya Laylani, Studi Timbulan, Komposisi dan karakteristik sampah Domestik Kota Bukittinggi, Jurnal Teknik Lingkungan UNAND, 2012

[8] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga

[9] www.harianhaluan.com, 25 Februari 2014

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGEMBANGAN DESA BERKELANJUTANMELALUI KONSEP MANDIRI ENERGIDI DESA PARAKANMUNCANG KABUPATEN BOGOR

Eneng Dayu Saidah[1)] dan Indarti Komala Dewi[2)]

[1)] Mahasiswa Prodi PWK-FT Universitas Pakuan
[2)] Dosen Prodi PWK-FT Universitas Pakuan

Email : enengdayu@gmail.com

Naskah diterima :7 Maret 2017 Naskah direvisi : 8 Maret 2017 Disetujui terbit : 15 Maret 2017

ABSTRAK

Indonesia memiliki 74.000 desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke.Setiap desa yang tersebar di Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang sangat beragam. Potensi tersebut akan meningkatkan pertumbuhan perekonomian suatu wilayah apabila dikelola dengan baik melalui pembangunan berkelanjutan. Pembangunan desa berkelanjutan dapat diwujudkan melalui konsep desa mandiri. Desa mandiri dapat dikembangkan sesuai dengan potensi sumberdaya alam yang dimiliki desa tersebut. Sebagai suatu kebutuhan utama (basic needs), energi khususnya listrik sangat dibutuhkan masyarakat desa agar mampu meningkatkan kualitas hidupnya. Bahan baku energi listrik sangat berlimpah di desa-desa pertanian. Tujuan penelitian ini adalah mengidentifikasi sumber bahan baku limbah pertanian untuk energi listrik dan membuat konsep pengembangan desa mandiri energi. Dalam hal ini digunakan metoda kualitatif deskriptif berdasarkan data primer seperti observasi lapangan dan data sekunder berupa dokumen dan telaah literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Parakanmuncang sebagai ibukota kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor memiliki potensi dalam menerapkan konsep pengembangan desa mandiri energi melalui pemanfaatan limbah hasil pertanian sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan melalui konsep mandiri energi.

***Kata kunci**: Desa Mandiri, Energi Listrik, Limbah Pertanian*

PENDAHULUAN

Indonesia memiliki 74.000 desa yang tersebar dari Sabang hingga Merauke. Setiap desa memiliki potensi yang berbeda satu sama lain. Apabila pembangunan desa dikelola dengan baik dan berkelanjutan, maka lapangan pekerjaan di desa akan meningkat dan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat desa dengan memanfaatkan Sumber Daya Alam melalui pembangunanberkelanjutan.Pembangunan desa yang berkelanjutandapat mempertahankan fungsi lain desa yaitu sebagai penyedia dan cadangan pangan nasional serta mempertahankan kualitas lingkungan. Dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan diperlukan adanya kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam upayapenyediaan infrastruktur berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa. Namun faktanya, penyediaan infrastruktur desa tidak menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional sehingga kualitas kehidupan di perdesaan tidak meningkat bahkan semakin menurun.Dalam mewujudkan pembangunan desa berkelanjutan diperlukan pengembangan desa mandiri dengan memanfaatkan sumberdaya yang tersedia.

Desa mandiri yaitu desa yang dapat memenuhi kebutuhan akan prasarana dasar, dan kebutuhan pokok, serta dapat mensejahterakan masyarakatnya secara berkelanjutan yaitu menggunakan dan memanfaatkan sumberdaya untuk memenuhi kebutuhan saat ini dengan memperhatikan aspek sosial, ekonomi, serta lingkungan sehingga tidak mengorbankan kebutuhan untuk generasi yang akan datang. Desa mandiri dapat dikembangkan sesuai dengan potensi desa tersebut antara lain pertanian, pertambangan, pariwisata alam, dan lain-lain.

Di sisi lain, kenaikan harga bahan bakar minyak dan menipisnya cadangan sumberminyak bumi di Indonesia dapat menjadi penghambat pembangunan desa berkelanjutan. Atas dasar masalah tersebut, maka diperlukan upaya untuk mencarisumber-sumber energi alternatif. Salah satu potensi energi alternatif adalah

limbah pertanian yang dihasilkan dari aktivitas produksi pertanian yang jumlahnya sangatbesar.Limbah pertanian sangat mudah didapatkan hampir di setiap desa yang memiliki pertanian.Dengan demikian, maka sangat mudah dijadikan energi terbarukan.Selain dapat menjadi energi alternatif, pemanfaatan limbah pertanian juga dapat menjaga lingkungan desa terutama terkait pengelolaan sampah.

Biogas adalah salah satu energi terbarukan yang dapat dibuat dari limbah pertanian[3][1].Penelitian pembuatan biogas telah banyak dilakukan. Namun, informasi limbah pertanian apa saja yang dapat dijadikan bahan baku biogas masih kurang. Sehingga menghambat masyarakat desa untuk membangun desa mandiri energi.Berdasakan pertimbangan aspek kebutuhan Desa Parakanmuncang, maka dalam penelitian ini difokuskan pada instalasi berbasis sumber energi listrik dengan harapan dapat memenuhi kebutuhan listrik di daerah yang belum memiliki aliran listrik.

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi sumber bahan baku limbah pertanian yang dapat dijadikan energi listrik dan membuat konsep pengembangan desa mandiri energi. Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan pemerintah desa dalam mengembangkan desa mandiri energi.

METODOLOGI

Lokasi penelitian yaitu di Desa Parakanmuncang Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor.Pertimbangan pengambilan lokasi penelitian ini yaitu karena sebagian besar penggunaan lahan desa ialah lahan pertanian dan ada beberapa wilayah yang belum memiliki aliran listrik. Orientasi wilayah studi lihat Gambar 1.

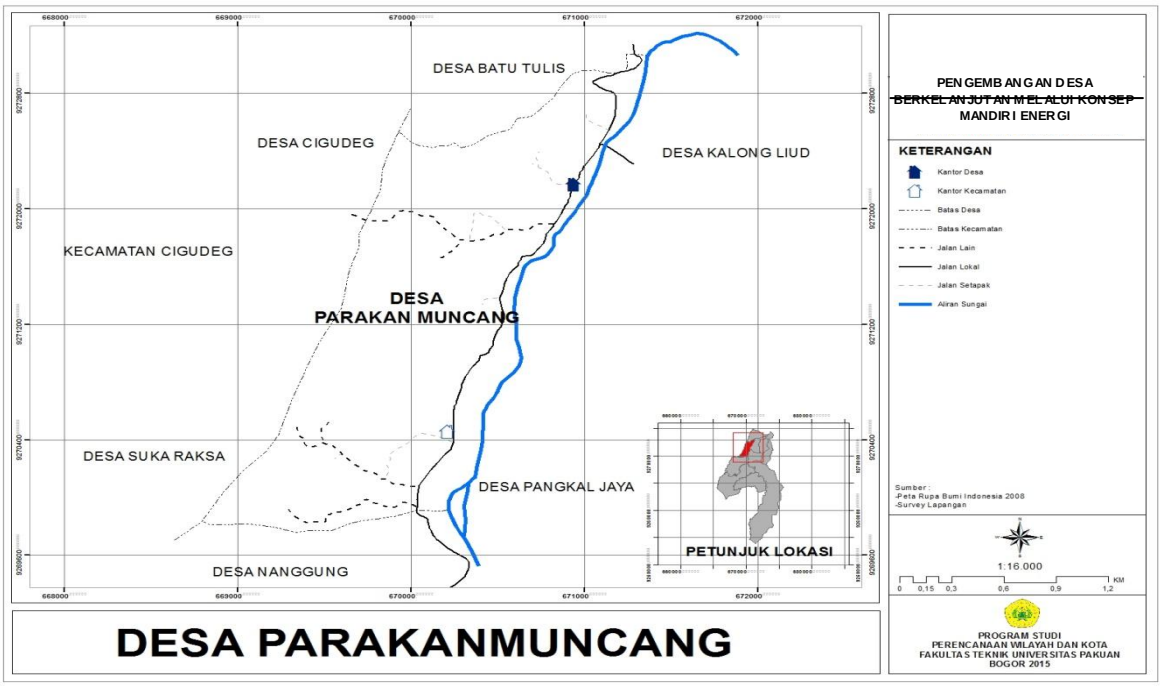

Gambar.1 Orientasi Wilayah Studi

Penelitian ini menggunakan metoda kualitatif deskriptif berdasarkan data primer dan data sekunder. Data primer dihasilkan dari observasi lapangan untuk mendapatkan informasi kondisi eksisting Desa Parakanmuncang. Sedangkan data sekunder dihasilkan dari studi literatur untuk mendapatkan informasi penggunaan lahan, potensi desa, produktivitas pertanian, dan proses pengolahan limbah pertanian menjadi energi listrik.

Pengembangan Konsep Desa Mandiri Energi di Desa Parakanmuncang melalui pembuatan biogas yang kemudian menjadi energi listrik.Energi biogas didominasi oleh gas Metana(CH_4) 60%-70%, Karbon Dioksida (CO_2) 30%-40%, dan beberapa gas lainseperti Oksigen(O_2), Hidrogen (H_2), Nitrogen (N_2), dan Hidrogen Sulfida (H_2S)dalam jumlah yang lebih kecil.1m^3 biogas memiliki tingkat panas/energisekitar 20-22 MJ (≈6 KWh) .Pada prinsipnya gas metan (biogas) mengandung unsur karbon (C) danHidrogen (H). Dengan demikian semua bahan organik yang memilikikandungan kedua unsur diatas dapat digunakan sebagai bahan bakupembentukan biogas [4].Dalam proses pembentukan biogas, perbandingan antara jumlah unsurkarbon dan nitrogen sangat menentukan keberhasilan proses pembentukanbiogas. Perbandingan antara karbon dan nitrogen disebut “rasio

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

C/N".Secara empiris diketahui, bahwa rasio C/N yang palingmenguntungkan adalah pada kisaran 10-30. Jika rasio C/N terlalu tinggi, berartikandungan karbonnya tinggi, produksi gas tidak optimal. Sebaliknya, jika rasioC/N terlalu rendah (< 9) akan terbentuk amoniak yang akan mengakibatkanproses penguraian tidak dapat berjalan secara optimal.

Jumlah biogas yang dihasilkan dari setiap jenis limbah pertanian tidak memiliki nilai yang sama. Hal ini dikarenakan setiap jenis limbah pertanian memiliki kadar karbon dan nitrogen yang berbeda. Untuk lebih jelasnya mengenai rasio C/N dan produksi biogas limbah pertanian dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1.Rasio C/N dan Produksi Biogas Limbah Pertanian

No	Limbah Pertanian	Rasio C/N			Produksi Biogas Limbah Pertanian			
		(%)C	(%) N	Rasio C/N	Kotoran harian (Kg)	% Kadar air	Produk Gas (L/kg)	Produk Gas setelah 50 hari (L/kg)
1	Jerami Padi	18	0,3	60	Td	Td	Td	Td
2	Kerbau	30	1,7	18	15	80-85	40	600
3	Kambing	84	3,8	22	2	75-80	50	100
4	Domba	35	1.69	21	5	75-80	50	250
5	Ayam	54	2	27	0,15	70-80	60	9
TOTAL		221	9,5	148				

Sumber: ([4] Wibawa, 2001)

Berikutnya yaitu periode penyimpanan bahan organik memiliki peran penting dalam proses produksi biogas. Lama waktu yang diperlukan olehsuatu bahan organik atau limbah pertanian dalam tangkiuntuk menghasilkan sedikitnya 80%dari totalgas yang bisa dihasilkan. Jikaperiode penyimpanannyadiasumsikan 50 hari, maka kedalam tangki harus dimasukkan cairan kotoransebanyak *50 hari x 50 liter/hari = 2.500 liter (= 2,5 m^3)*[4].

Dalam pembuatan energi listrik dari limbah pertanian membutuhkan investasi awal yang telah dikeluarkan untuk membangun instalasi biogas dan biaya untuk pemeliharaan. instalasi biogas. Adapun estimasi pembiayaan yang dibutuhkan untuk instalasi biogas dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Estimasi Biaya Pengeluaran

No	JenisPengeluaran	Biaya (Rp.)
1.	Investasi reaktor biogaskapasitas 3 m^3	7.500.000
2.	Komponen instalasi listrik biogas -GenSet 1KVA	8.950.000
3.	Biaya komponen pendukung	432.500
4.	Pembelian Starter (Aktivatorpembangkitmedan)	550.000
5.	PemeliharaanFasilitas/Tahun	10% dariinvestasiawal

Sumber: [4]

ISBN : 978-602-73463-1-4

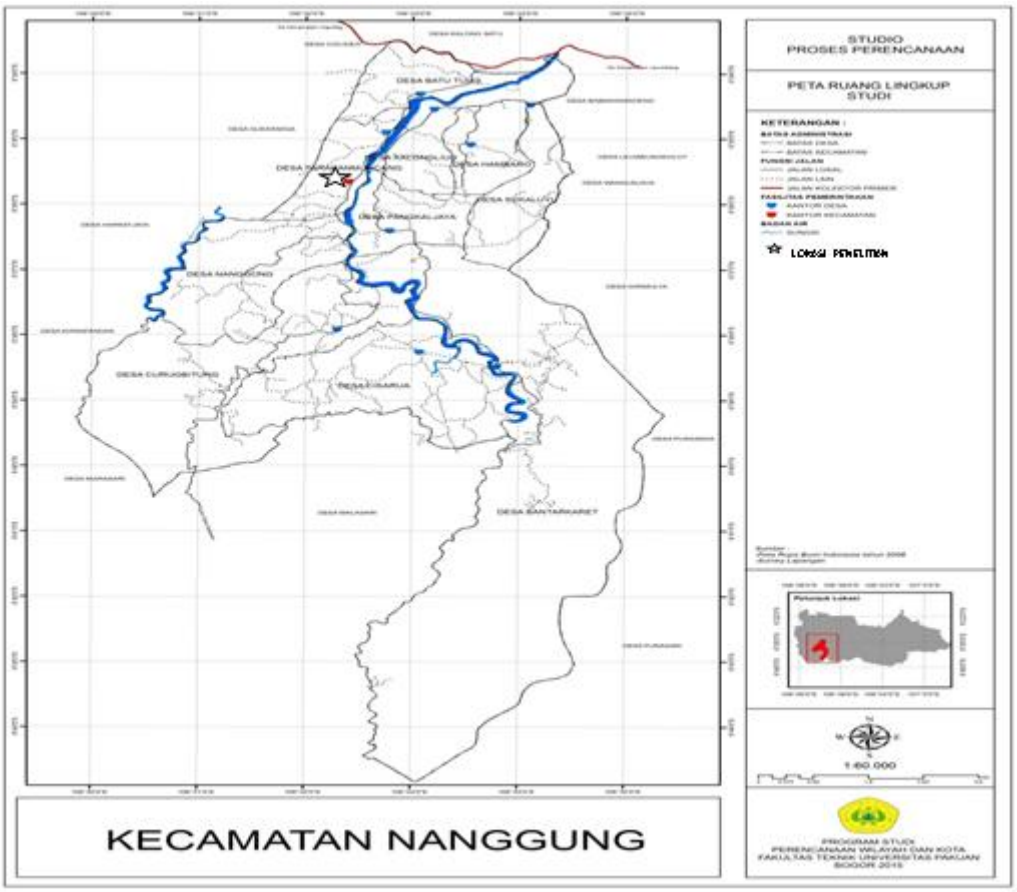

Gambar.2Lokasi Studi

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum Desa

Desa Parakanmuncang merupakan Ibu Kota Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. Desa Parakanmuncang memiliki luas wilayah 314,2 Ha. Secara geografis Desa Parakanmuncang terletak pada ketinggian 3500 mdpl.Adapun curah hujan rata-rata 100/600 mm pertahun dan suhu rata-rata berkisar antara 26,30^{o}C. Secara administrasi, Desa Parakanmuncang dibagi menjadi dua (2) dusun dan sembilan (9) RW serta tiga puluh satu (31) RT. Pada Tahun 2014, jumlah penduduk Desa Parakanmuncang yaitu 6.368 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.102 jiwa/Km^2. Penggunaan lahan di Desa Parakanmuncang cukup beragam[1]. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 3.

Tabel 3.Penggunaan Lahan Desa Parakanmuncang

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)	Presentase (%)
1	Sawah, Kebun, dan Ladang	159.4	50,7
2	Hutan dan Tanah Kosong	65.5	20,8
3	Permukiman	60.3	19,2
4	Perdagangan dan Jasa	27.5	8,8
5	TPU	1.5	0,5
	Jumlah	314,2	100

Sumber : Hasil Survey Lapangan, Tahun 2015 [1]

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

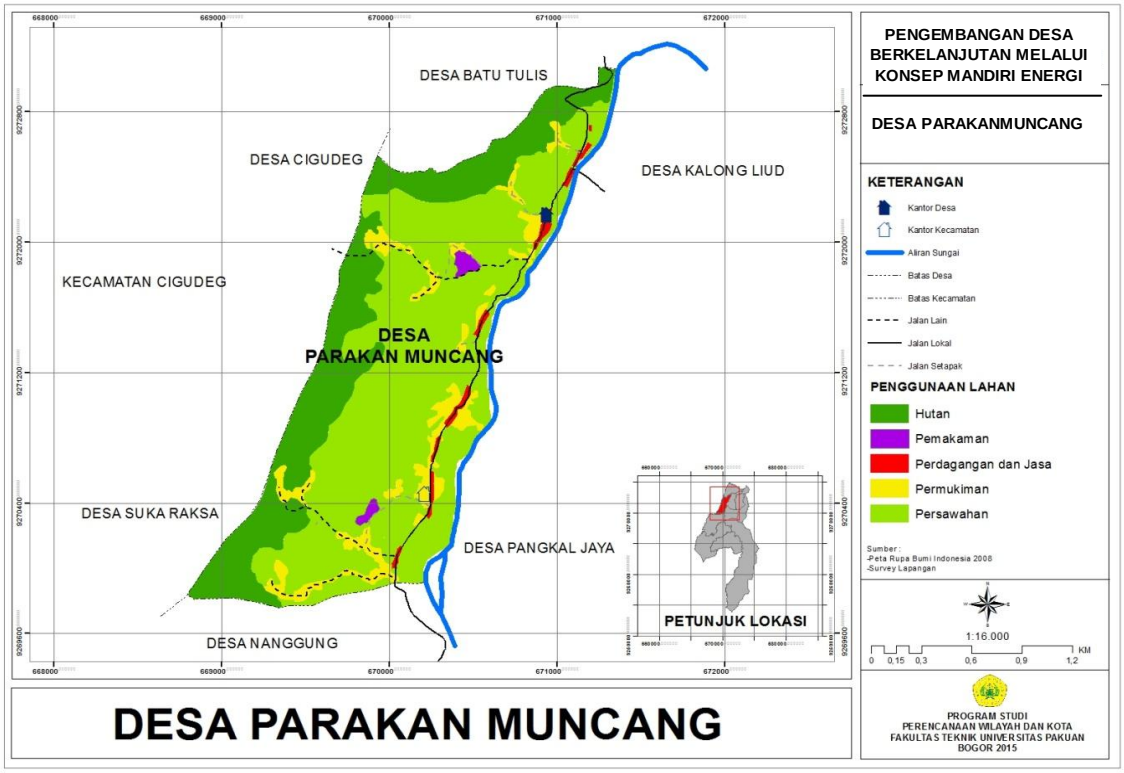

Gambar 3. Peggunaan lahan

Berdasarkan Tabel 3, dapat dilihat bahwa penggunaan lahan Desa Parakanmuncang didominasi oleh sawah, kebun, dan ladang sebesar 159,4 Ha atau 51% dari total luas wilayah. Dengan demikian, maka Desa Parakanmuncang memiliki lahan pertanian yang luas dan tentunya memiliki limbah pertanian yang banyak.Saat ini di Desa Parakanmuncang belum melakukan pemanfaatan limbah pertanian.Berdasarkan observasi lapangan yang telah dilakukan, ada beberapa rukun tetangga (RT) di Desa Parakanmuncang belum teraliri listrik.Hal ini dikarenakan kurangnya biaya untuk pemasangan listrik. Dengan demikian, akan sangat berguna apabila limbah pertanian yang selama ini dibakar langsung tanpa ada manfatnya, dikelola dan diolah menjadi energi listrik untuk mengaliri listrik ke masyarakat yang belum memiliki aliran listrik. Sehingga limbah pertanian di Desa Parakanmuncang akan berguna. Selain dapat mengurangi kerusakan lingkungan akibat limbah pertanian, juga dapat membantu dan mensejahterakan masyarakat Desa Parakanmuncang yang belum teraliri listrik.

2) Sumber Limbah Pertanian untuk Energi Listrik

Limbah pertanian adalah bagian tanaman pertanian di atas tanah atau bagian pucuk, batang yang tersisa setelah dipanen atau diambil hasil utamanya.Adapun limbah pertanian yang dihasilkan di Desa Parakanmuncang terdiri atas limbah yang berasal dari sawah, perkebunan, hutan, dan hewan ternak. Mengacu pada Tabel 1 di atas, perbandingan antara jumlah unsurkarbon dan nitrogen limbah pertanian sangat menentukankeberhasilan proses pembentukanbiogas. Adapun berdasarkan analisis yang dilakukan dapat dilihat bahwa rasio C/N limbah pertanian di Desa Parakanmuncang dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Hasil Analisis Rasio C/N Limbah Pertanian Desa Parakanmuncang

No	Limbah Pertanian	Berat(kg)	(kg) C	(kg) N	Rasio
1	Jerami Padi	251,6	7	0	60
2	Kerbau	15	200	11	18
3	Kambing	364	23	1	22
4	Domba	409	9	0	21
5	Ayam	3.188	2	0	27
Jumlah		4227,6	240	13	19

Sumber: Hasil Analisis, Tahun 2016.

Berdasarkan Tabel 3 di atas dapat diketahui bahwa limbah pertaniandi Desa Parakanmuncang memiliki rasio C/N yang beragam, rasio yang paling tinggi yaitu jerami padi sebesar 60 sedangkan yang paling kecil yaitu kerbau sebesar 18. Dengan demikian, maka rata-rata rasio C/N Desa Parakanmuncang yaitu 19, artinya limbah pertanian di Desa Parakanmuncang dapat dijadikan bahan baku untuk pembuatan biogas.

3) Produksi Biogas dari Limbah Pertanian

Perhitungan produksi biogas dari limbah pertanian yang terdapat di Desa Parakanmuncang mengacu pada Tabel 1 di atas. Adapun hasil analisis yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

- Sumber bahan baku limbah pertanian sebanyak 4.227,6 kg.
- Produksi biogas yang dapat dihasilkan sebesar 3.000 L.
- Biogas setelah 50 hari didiamkan dapat menghasilkan produk gas 10.451 L.

Untuk lebih jelasnya mengenai produksi biogas dan limbah pertanian dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Hasil Analisis Produksi Biogas dari Limbah Pertanian Desa Parakanmuncang

No	Limbah Pertanian	Kotoran (kg)	Produk Gas(L)	Produk Gas setelah 50 hari (L)
1	Jerami Padi	251,6	Td	Td
2	Kerbau	15	600	9000
3	Kambing	364	750	200
4	Domba	409	750	1250
5	Ayam	3.188	900	1
Jumlah		4.227,6	3000	10.451

Sumber : Hasil Analisis, tahun 2016 [4], [2]

Pada Tabel 5 dapat dilihat bahwa produk biogas yang dihasilkan yaitu 3000 L kemudian setelah didiamkan selama 50 hari, produksi biogas menjadi 10.451 L atau 10,5 m^3 artinya memiliki tingkat panas/energi sebesar 63 KWh (63.000 Watt) atau 63 KVa. Periode penyimpanan limbah pertanian memiliki peran penting dalam proses produksi biogas. Lama waktu yang diperlukan untuk bahan organik atau limbah pertanianDesa Parakanmuncang dalam tangkiuntuk menghasilkan sedikitnya 80%dari totalgas yang bisa dihasilkan yaitu 3.000 L. Jikaperiode penyimpanannyadiasumsikan 50 hari, maka kedalam tangki harus dimasukkan cairan kotoransebanyak *50 hari x 3000 liter/hari = 150.000 liter (= 150 m^3)*[4].

Dengan mengacu pada Perusahaan Listrik Negara (PLN) bahwa energi listrik sebesar 63 KWh dapat dialirkan ke 49 Rumah dengan asumsi 1 rumah memiliki daya listrik 1.300 VA (1.300 Watt) untuk Gol Tarif R-1/TR. Aplikasi penggunaan energi listrik di Desa Parakanmuncang yaitu dengan mengacu pada Tarif Dasar Listrik (TDL), dimana untuk Gol Tarif R-1/TR batas daya 1.300 VA biaya pemakaian (Rp/kWh) sebesar 1.461,80. Ditetapkan Rekening Minimum: RM1 = 40 (jam nyala) x (daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian. Dalam hal ini, asumsi penggunaan listrik selama 10 jam nyala, dengan perhitungan sebagai berikut:

- RM1 = 40 (jam nyala) x (daya tersambung (kVA) x biaya pemakaian
  = 10 jam x 1.300 Watt x Rp. 1.461,80 = 19.003.400 Watt (Rp. 19.003/hari/rumah).

- Apabila diestimasikan untuk 1 tahun
  Rp. 19.003 x 365 hari = Rp. 6.936.095

- Total untuk 49 rumah / tahun
  Rp. 6.936.095 x 49 rumah = Rp. 339.868.655/tahun

Dengan demikian, maka energi listrik yang dihasilkan dari pemanfaatan limbah pertanian di Desa Parakanmuncang dapat dialirkan ke 49 rumah dengan Gol Tarif R-1/TR batas daya 1.300 VA yang dapat menghemat listrik sebesar Rp. 19.003/hari/rumah atau menghemat biaya listrik masyarakat Desa Parakanmuncang sebanyak 49 rumah sebesar Rp. 339.868.655/tahun.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Investasi awal yang harus disediakan dengan mengacu pada Tabel 2. mengenai estimasi biaya pengeluaran antara lain untuk biaya reaktor biogaskapasitas 3 m^3 sebesar Rp. 7.500.000, komponen instalasi listrik biogas -GenSet 1KVA sebesar Rp. 8.950.000, Biaya komponen pendukung sebesar Rp. 432.500. Sehingga total biaya yang harus disediakan adalah Rp. 16.882.500. Kemudian untuk biaya starter (aktivator pembangkit medan) sebesar Rp. 550.000 dan pemeliharaan fasilitas (diasumsikan 10% dari investasi awal) yaitu sebesar Rp. 1.688.250. Biaya starter dan pemeliharaan fasilitas ini dikeluarkan per tahun yaitu sebesar Rp. 2.238.250/tahun. Maka, biaya yang harus dikeluarkan untuk investasi awal dan (starter dan pemeliharaan untuk tahun pertama) sebesar Rp. 19.120.750.

Keuntungan yang diperoleh dari pemanfaatan limbah pertanian menjadi energi listrik ini yaitu sebagai berikut:

- Pemanfaatan limbah pertanian sebesar 3.000 L/hari. Apabila di Desa Parakanmuncang limbah yang dibutuhkan tidak tersedia, maka dapat memanfaatkan limbah pertanian yang ada di daerah lain. Sehingga program ini dapat menjadi salah satu solusi dalam penanganan masalah limbah di Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Nanggung.
- Pengeluaran biaya untuk investasi awal untuk tahun pertama sebesar Rp. 19.120.750 dapat menghemat biaya listrik Rp. 339.868.655/tahun.

KESIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Parakanmuncang sebagai ibukota kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor memiliki potensi dalam menerapkan konsep pengembangan Desa Mandiri Energi melalui pemanfaatan limbah hasil pertanian. Berdasarkan kondisi limbah pertanian di Desa Parakanmuncang yang dapat dimanfaatkan untuk energi listrik diketahui terdapat potensi pengolahan limbah menjadi energi listrik sebesar 63 KWh atau 63 KVa yang diperkirakan dapat mengalirkan listrik bagi 49 Rumah dengan asumsi 1 rumah memiliki daya listrik 1.300 VA yang dapat menghemat biaya listrik sebesar Rp. 6.936.095/tahun/rumah.

Dengan demikian, maka diharapkan ke depannya masyarakat Desa Parakanmuncang teraliri listrik secara merata.Sehingga dapat melakukan aktivitas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta dengan menjaga lingkungan melalui pengelolaan limbah pertanian.

Adapun saran yang kami ajukan berdasarkan penelitian yang telah dilakukan yaitu sebagai berikut:

1. Optimalisasi pemanfaatan limbah pertanian sangat mungkin dilakukan dengan dukungan fasilitasi pembiayaan dari pemerintah atau swasta dalam hal penyediaan infrastruktur dan teknologi pengolahan limbah menjadi energi listrik yaitu dengan penyediaan anggaran sebagaimana yang telah diperhitungkan dalam penelitian ini.
2. Penyediaan limbah pertanian sangat tergantung kepada bahan baku. Sehingga pemerintah perlu membuat kebijakan untuk mempertahankan sumber bahan baku antara lain luasan kawasan pertanian dan peternakan atau dengan melakukan kerjasama dengan daerah sekitar dalam hal penyediaan bahan baku berupa limbah pertanian.
3. Pengembangan desa berkelanjutan melalui konsep desa mandiri energi dapat dilakukan dengan mengikutsertakan peran masyarakat setempat dalam hal penyediaan bahan baku serta pemeliharaan fasilitas. Dengan demikian, maka perlu adanya dukungan dan kontribusi dari seluruh lapisan masyarakat Desa Parakanmuncang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik. 2015. *Kecamatan Nanggung Dalam Angka 2015.* Bogor: Badan Pusat Statistik-Kabupaten.

[2] Heliyanto, B. 2007. Konsep Desa Mandiri Energi. *Prosiding Lokakarya Nasional III, 5 November 2007.* Malang: Balai Penelitian Tanaman.

[3] Herawati, A. d. 2010. Pengaruh Pretreatment Jerami Padi pada Produksi Biogas dari Jerami Padi dan Sampah Sayur Sawi Hijau Secara Batch. *Jurnal Rekayasa Proses vol 4 no 1*.

[4] Wibawa, U. 2001. *Sumber Daya Energi Alternatif.* Malang: Jurusan Teknik Elektro FT Universitas Brawijaya .

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS RESIKO BENCANA MULTI BAHAYA (*MULTI HAZARD*) DAN ARAHAN MITIGASINYA DI KOTA BUKITTINGGI

Firmansyah[1)], Jajan Rohjan[1)], Deden Syarifudin[1)]

[1)] Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik - Universitas Pasundan

Email: sangkuriangperfekta@yahoo.com

Naskah diterima : 25 Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah/longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, kebakaran dan banjir. Kota Bukittinggi tumbuh dan berkembang di sepanjang jalur patahan aktif Sumatera yang lebih dikenal dengan Ngarai Sianok. Diperkirakan patahan ini bergeser 11 sentimeter per tahun. Kota ini juga dikelilingi oleh dua buah gunung berapi, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Melihat potensi bencana yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi, menjadikan hal tersebut sebagai isu permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi, karena bencana dalam bentuk apapun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Berdasarkan kondisi Kota Bukittinggi yang memiliki potensi bencana, maka diperlukan studi yang dapat dijadikan masukan dalam upaya mengurangi resiko bencana.Untuk mengurangi resiko tersebut, terlebih dahulu perlu diidentifikasi wilayah-wilayah yang beresiko tinggi terhadap bencana gempa bumi, longsor, kebakaran dan banjir serta bagaimana merumuskan implikasi resiko bencana tersebut terhadap tindakan mitigasi bencana agar dapat mengurangi resiko. Penelitian ini mengacu pada beberapa penelitian sebelumnya dimana ada 3 (tiga) faktor yang mempengaruhi tingkat resiko bencana yaitu faktor bahaya, kerentanan dan ketahanan. Metode analisis yang digunakan pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu perhitungan nilai faktor dengan model standarisasi Davidson serta metode superimpose. Selain itu untuk memperoleh tingkat kepentingan faktor-faktor resiko bencana digunakan pembobotan dengan menggunakan metode proses hierarki analitik (Analytical Hierarchy Process/AHP).

Kata Kunci: *Bahaya, Resiko, Mitigasi*

PENDAHULUAN

Kota Bukittinggi merupakan salah satu kota di Provinsi Sumatera Barat yang berada di kawasan rawan bencana gerakan tanah/longsor, letusan gunung berapi, gempa bumi, kebakaran dan banjir. Kota Bukittinggi tumbuh dan berkembang di sepanjang jalur patahan aktif Sumatera yang lebih dikenal dengan Ngarai Sianok. Diperkirakan patahan ini bergeser 11 sentimeter per tahun. Kota ini juga dikelilingi oleh dua buah gunung berapi, yaitu Gunung Singgalang dan Gunung Marapi. Kondisi ini menyebabkan secara alamiah Kota Bukittinggi menghadapi bahaya gempa bumi yang dapat memicu bencana gerakan tanah [3].

Wilayah Pulau Sumatera berada pada daerah subduction yang merupakan pertemuan 2 lempeng kerak bumi aktif/tektonik, yaitu Lempeng Eurasia dan Lempeng Indo-Australia. Bencana gempa bumi juga menimbulkan bahaya ikutan (collateral hazard), yaitu: diantaranya adalah bahaya longsor dan kebakaran. Untuk Kota Bukittinggi, bencana longsor juga potensial terjadi karena faktor topografi yang berbukit-bukit.

[1] memberikan penjelasan mengenai bahaya alam (natural hazard) dan bencana (disaster) sebagai berikut: "Natural hazards, as part of our environment, can occur anywhere. Earthquakes, floods, volcanoes and violent weather variations, as well as other extreme natural events, can trigger disaster when they interact with vulnerable conditions[1]

Menurut [2]), mitigasi mengacu kepada tindakan sebelum terjadinya bencana untuk mengurangi kerusakan dan korban cedera dari bahaya alam: "The term "mitigation" has a long history in the field of emergency management, where it refers predisaster actions to reduce damage and injury from natural hazard, a definition that includes both adaptation and mitigation measures." [4]menggambarkan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap bencana adalah sebagai berikut.

Gambar 1. Faktor Terjadinya Bencana

Melihat potensi bencana yang dimiliki oleh Kota Bukittinggi, menjadikan hal tersebut sebagai isu permasalahan yang harus dipertimbangkan dalam setiap perencanaan pembangunan Kota Bukittinggi, karena bencana dalam bentuk apapun dapat terjadi kapan saja dan dimana saja. Bencana tersebut ada juga yang datang dengan didahului oleh peringatan namun ada juga yang datang secara tiba-tiba, sehingga diperlukan pengelolaan bencana yang lebih sistimatis secara bersama-sama baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka perlu dilakukan kajian mengenai Analisis Resiko Bencana Multi Bahaya (Multi Hazard) dan Arahan Mitigasinya di Kota Bukittinggi, sehingga dapat memberikan panduan operasional pembangunan pada kawasan-kawasan yang dianggap sebagai kawasan rawan bencana, yang pada akhirnya akan menciptakan rasa aman, nyaman bagi penduduk Kota Bukittinggi untuk tinggal dan beraktivitas.

Kota Bukittinggi secara potensial memiliki resiko bencana longsor/gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran dan banjir. Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya untuk mengurangi resiko bencana tersebut. Untuk itu tujuan khusus yang ingin di capai adalah:

1. Identifikasi faktor-faktor kawasan rawan bencana akibat dari bencana longsor/gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran dan banjir.
2. Identifikasi sub faktor dari faktor-faktor bencana longsor/gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran dan banjir yang telah ditetapkan.
3. Identifikasi indikator untuk menilai sub-sub faktor bencana longsor/gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran dan banjir yang telah ditetapkan.
4. Identifikasi kondisi dari faktor, sub faktor dan indikator bencana longsor/gerakan tanah, gempa bumi, kebakaran dan banjir yang telah ditetapkan terhadap wilayah studi.
5. Analisis tingkat resiko bencana untuk setiap jenis bahaya (hazard), yaitu tingkat resiko bencana gempa bumi, tingkat resiko bencana longsor, tingkat resiko bencana kebakaran dan tingkat resiko bencana banjir.
6. Analisis tingkat resiko bencana Multi Bahaya (Multi Hazard).
7. Arahan mitigasi berdasarkan kondisi tingkat resiko bencana.

METODOLOGI

Metode pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini melalui beberapa pentahapan sebagai berikut:

1. Perumusan faktor dan sub faktor yang mempengaruhi tingkat resiko bencana gempa bumi, longsor/gerakan tanah, kebakaran dan banjir. Faktor dan sub faktor ini ditentukan berdasarkan penelitian literatur, yang terdiri atas tiga faktor, yaitu: faktor bahaya (hazard), faktor kerentanan (vulnerability) dan faktor ketahanan/kapasitas (capacity).
2. Selanjutnya dilakukan perumusan indikator-indikator resiko dari setiap sub-sub faktor yang sebelumnya telah dirumuskan, berdasarkan pengkajian literatur.
3. Penentuan bobot dari tiap faktor, sub faktor dan indikator yang telah terbentuk dengan menggunakan proses hierarki analitik (Analitycal Hierarchy Process/AHP).
4. Melakukan perhitungan nilai resiko bencana gempa bumi, longsor/gerakan tanah, kebakaran dan banjir, yang terdiri atas tiga faktor yaitu bahaya, kerentanan dan ketahanan.
5. Melakukan perhitungan indeks resiko dan merumuskan tingkat resiko bencana gempa bumi, longsor/gerakan tanah, kebakaran dan banjir untuk setiap kelurahan di seluruh wilayah Kota Bukittinggi.
6. Perumusan arahan tindakan mitigasi yang sesuai untuk pengembangan wilayah Kota Bukittinggi, untuk mengurangi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana gempa bumi, longsor/gerakan tanah, kebakaran dan banjir berdasarkan hasil analisis tingkat resiko bencana alam tersebut.

   Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai setiap faktor resiko bencana adalah:

   B = WB1X'B1 + ... + WBnX'Bn
   R = WR1X'R1 + ... + WRnX'Rn
   K = WK1X'K1 + ... + WKnX'Kn

   Dimana :

   B = Nilai Faktor Bahaya (hazards)
   R = Nilai Faktor Kerentanan (Vulnerability)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

K = Nilai Faktor Ketahanan/Kapasitas (Capacity)
X'i = Nilai Setiap Indikator yang telah dibakukan
Wi = Bobot Setiap Indikator

Tabel 1. Faktor, Sub Faktor dan Indikator Tingkat Resiko Bencana Berdasarkan Jenis Bencana

No	Faktor	Sub Faktor	Indikator (Berdasarkan Jenis Bencana)			
			Gempa Bumi	**Longsor**	**Kebakaran**	**Banjir**
A	Bahaya (Hazard)	Rawan Bencana	▪ Rawan Bencana Gempa Bumi Tinggi ▪ Rawan Bencana Gempa Bumi Sedang ▪ Rawan Bencana Gempa Bumi Rendah	▪ Rawan Bencana Longsor Tinggi ▪ Rawan Bencana Longsor Sedang ▪ Rawan Bencana Longsor Rendah	▪ Rawan Bencana Kebakaran Tinggi ▪ Rawan Bencana Kebakaran Sedang ▪ Rawan Bencana Kebakaran Rendah	▪ Rawan Bencana Banjir Tinggi ▪ Rawan Bencana Banjir Sedang ▪ Rawan Bencana Banjir Rendah
B	Kerentanan (Vulnerability)	Kerentanaan Fisik	▪ Kepadatan Bangunan	▪ Curah Hujan ▪ Kepadatan Bangunan ▪ Kemampuan Lahan	▪ Kepadatan Bangunan ▪ Kondisi Fisik Bangunan	▪ Curah Hujan ▪ Luas Genangan ▪ Jumlah Titik Genangan
		Kerentanan Sosial Kependudukan	▪ Kepadatan Penduduk ▪ % Penduduk Wanita ▪ % Penduduk Tua & Balita	▪ Kepadatan Penduduk ▪ % Penduduk Wanita ▪ % Penduduk Tua & Balita	▪ Kepadatan Penduduk ▪ % Penduduk Wanita ▪ % Penduduk Tua & Balita	▪ Kepadatan Penduduk ▪ % Penduduk Wanita ▪ % Penduduk Tua & Balita
		Kerentanan Ekonomi	▪ Pusat Kegiatan Ekonomi	▪ Pusat Kegiatan Ekonomi	▪ Pusat Kegiatan Ekonomi	▪ Pusat Kegiatan Ekonomi
C	Ketahanan (Capacity)	Sumberdaya Buatan	▪ Rasio Lapangan : Penduduk ▪ Rasio RTH : Penduduk ▪ Rasio Tempat Evakuasi : Penduduk ▪ Rasio Fasilitas Kesehatan : Penduduk ▪ Rasio Dokter : Penduduk	▪ Rasio Lapangan : Penduduk ▪ Rasio RTH : Penduduk ▪ Rasio Tempat Evakuasi : Penduduk ▪ Rasio Fasilitas Kesehatan : Penduduk ▪ Rasio Dokter : Penduduk	▪ Rasio Lapangan : Penduduk ▪ Rasio RTH : Penduduk ▪ Rasio Tempat Evakuasi : Penduduk ▪ Rasio Fasilitas Kesehatan : Penduduk ▪ Rasio Dokter : Penduduk ▪ Jumlah Hidrant	▪ Rasio Lapangan : Penduduk ▪ Rasio RTH : Penduduk ▪ Rasio Tempat Evakuasi : Penduduk ▪ Rasio Fasilitas Kesehatan : Penduduk ▪ Rasio Dokter : Penduduk
		Mobilitas			Aksesibilitas	

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Posisi Kota Bukittinggi terletak antara $110^{0}20'$ - $100^{0}25'$ BT dan 00^{0} 16' - 00^{0} 20' LS dengan ketinggian 780-950 m dari permukaan laut, luas daerah lebih kurang 25.239 Km^2 merupakan 0,06 % dari luas Provinsi Sumatera Barat, Kota Bukittingi terdiri dari 3 Kecamatan dan 24 Kelurahan. Kota Bukittinggi secara administratif berbatasan dengan:

- Utara : Nagari Gadut kec.Tilatang Kamang Kab.Agam.
- Selatan : Taluak Nagari IV Suku Kec Banuhampu Kab Agam.
- Timur : Tanah Alam Nagri Biaro Gadang Kec IV Angkek Canduang Kab Agam.
- Barat : Nagari Sianok dan Koto Gadang Kec IV Koto Kab Agam.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Untuk menghitung tingkat resiko bencana dilakukan dengan menghitung tingkat kerentanan dan tingkat ketahanan dengan menggunakan statistik dan dengan bantuan perangkat lungak GIS (Geographic Information System), resiko bencana alam di Kota Bukittinggi dihitung berdasarkan jenis bencana di Kota Bukittinggi yang meliputi bencana longsor, bencana gempa bumi dan bencana kebakaran.

1) Analisis Tingkat Resiko Bencana Gempa Bumi

Tingkat resiko bencana gempa bumi di Kota Bukittinggi yang memiliki tingkat resiko bencana tinggi berada pada Kelurahan Bukik Apit Puhun, Pulai Anak Air, Maggih Ganting, Campago Ipuh, Puhun Pintu Kabun, Kubu Gulai Bancah, dan Belakang Balok.

Tabel 2. Analisis Tingkat Resiko Bencana Gempabumi

No	Kecamatan/ Kelurahan	Bahaya		Kerentanan		Ketahanan		Nilai Resiko	Tingkat Resiko Bencana
		Nilai	Nilai x Bobot Bahaya (0,50)	Nilai	Nilai x Bobot Kerentanan (0,25)	Nilai	Nilai x Bobot Ketahanan (0,25)		
A	**Kecamatan Guguak Panjang**								
1	Bukik Cangang Kayu Ramang	0,77	0,39	1,8	0,45	4,4	1,10	1,94	Rendah
2	Tarok Dipo	1,83	0,92	3,16	0,79	4,4	1,10	2,81	Rendah
3	Pakan Kurai	1,34	0,67	1,93	0,48	4,4	1,10	2,25	Rendah
4	Aur Tajungkang Tengah Sawah	0,93	0,47	2,84	0,71	4,4	1,10	2,28	Rendah
5	Benteng Pasar Atas	0,56	0,28	2,6	0,65	4,4	1,10	2,03	Rendah
6	Kayu Kubu	2,26	1,13	1,09	0,27	4,4	1,10	2,50	Rendah
7	Bukit Apit Puhun	6,83	3,42	1,15	0,29	4,4	1,10	4,80	Sedang
B	**Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**		0,00						
8	Pulai Anak Air	2,4	1,20	1,59	0,40	4,53	1,13	2,73	Rendah
9	Koto Selayan	1,14	0,57	0,68	0,17	4,53	1,13	1,87	Rendah
10	Garegeh	1,4	0,70	1,58	0,40	4,53	1,13	2,23	Rendah
11	Maggih Ganting	2,21	1,11	2,25	0,56	4,53	1,13	2,80	Rendah
12	Campago Ipuh	2,19	1,10	1,93	0,48	4,53	1,13	2,71	Rendah
13	Puhun Tembok	1,24	0,62	3,14	0,79	4,53	1,13	2,54	Rendah
14	Puhun Pintu Kabun	16,91	8,46	1,25	0,31	4,53	1,13	9,90	Tinggi
15	Kubu Gulai Bancah	3,77	1,89	1,61	0,40	4,53	1,13	3,42	Rendah
16	Campago Guguk Bulek	2,75	1,38	1,76	0,44	4,53	1,13	2,95	Rendah
C	**Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh**								
17	Belakang Balok	2,49	1,25	1,81	0,45	4,45	1,11	2,81	Rendah
18	Sapiran	0,49	0,25	1,59	0,40	4,45	1,11	1,76	Rendah
19	Birugo	1,83	0,92	1,3	0,33	4,45	1,11	2,35	Rendah
20	Aur Kuning	1,34	0,67	2,94	0,74	4,45	1,11	2,52	Rendah
21	Pakan Labuah	1,58	0,79	1,3	0,33	4,45	1,11	2,23	Rendah
22	Kubu Tanjung	1,17	0,59	1,05	0,26	4,45	1,11	1,96	Rendah
23	Ladang Cangkiah	0,79	0,40	1,24	0,31	4,45	1,11	1,82	Rendah
24	Parit Antang	0,74	0,37	1,33	0,33	4,45	1,1125	1,82	Rendah

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

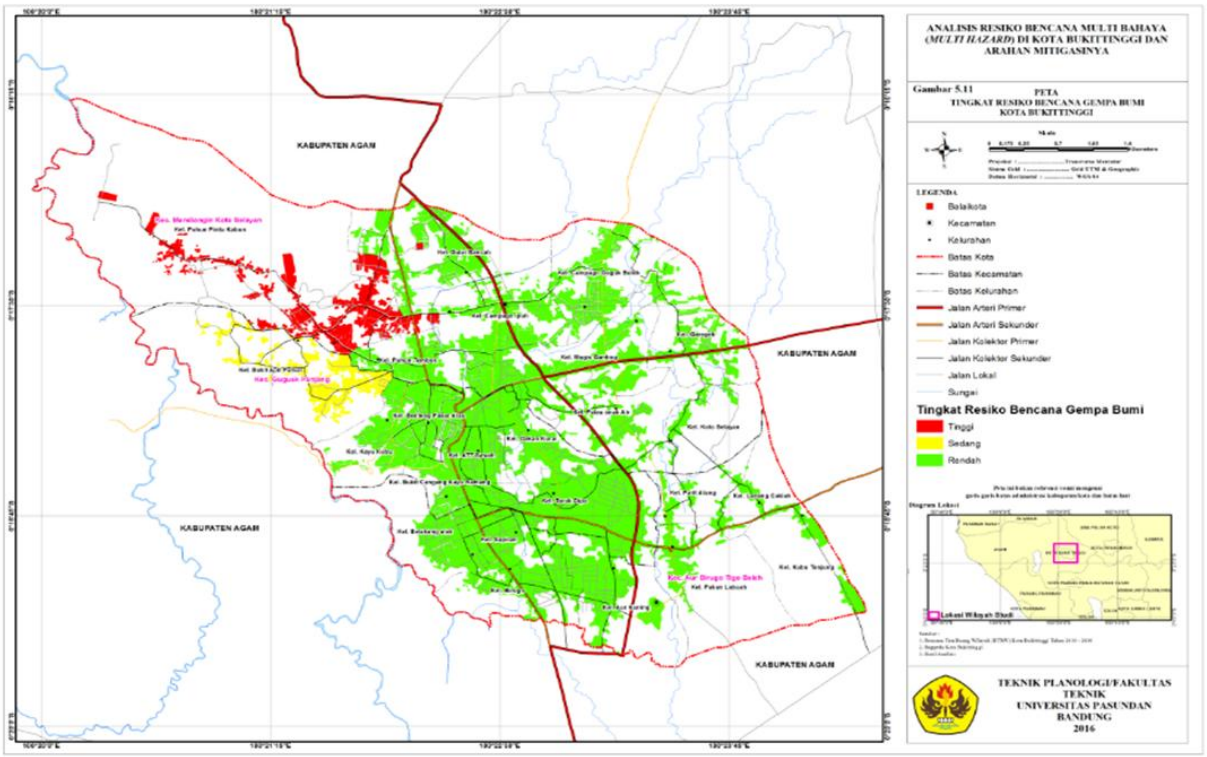

Gambar 2. Peta Tingkat Resiko Bencana Gempabumi

2) Analisis Tingkat Resiko Bencana Longsor

Tingkat resiko bencana longsor di Kota Bukittinggi yang memiliki tingkat resiko bencana paling tinggi berada pada Kelurahan Kayu Kubu, Bukik Apit Puhun, Pulai Anak Air, Maggih Ganting

Tabel 3. Analisis Tingkat Resiko Bencana Longsor

No	Kecamatan/ Kelurahan	Bahaya		Kerentanan		Ketahanan		Indeks Resiko	Tingkat Resiko Bencana
		Nilai	Nilai x Bobot Bahaya (0,50)	Nilai	Nilai x Bobot Kerentanan (0,25)	Nilai	Nilai x Bobot Ketahanan (0,25)		
A	**Kecamatan Guguak Panjang**								
1	Bukik Cangang Kayu Ramang	0,21	0,11	2,13	0,53	5,2	1,30	1,94	Rendah
2	Tarok Dipo	0,1	0,05	1,71	0,43	5,2	1,30	1,78	Rendah
3	Pakan Kurai	0,14	0,07	1,57	0,39	5,2	1,30	1,76	Rendah
4	Aur Tajungkang Tengah Sawah	0,12	0,06	1,64	0,41	5,2	1,30	1,77	Rendah
5	Benteng Pasar Atas	0,43	0,22	2,32	0,58	5,2	1,30	2,10	Rendah
6	Kayu Kubu	0,47	0,24	2,73	0,68	5,2	1,30	2,22	Rendah
7	Bukit Apit Puhun	1,37	0,69	2,88	0,72	5,2	1,30	2,71	Sedang
B	**Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**								
8	Pulai Anak Air	0,6	0,30	1,61	0,40	5,33	1,33	2,04	Rendah
9	Koto Selayan	0,06	0,03	1,12	0,28	5,33	1,33	1,64	Rendah
10	Garegeh	0,14	0,07	1,69	0,42	5,33	1,33	1,83	Rendah
11	Maggih Ganting	0,71	0,36	2,18	0,55	5,33	1,33	2,23	Rendah

ISBN : 978-602-73463-1-4

12	Campago Ipuh	0,47	0,24	2,15	0,54	5,33	1,33	2,11	Rendah
13	Puhun Tembok	0,25	0,13	2,06	0,52	5,33	1,33	1,97	Rendah
14	Puhun Pintu Kabun	3,95	1,98	3,46	0,87	5,33	1,33	4,17	Tinggi
15	Kubu Gulai Bancah	1,08	0,54	2,03	0,51	5,33	1,33	2,38	Rendah
16	Campago Guguk Bulek	0,8	0,40	2,05	0,51	5,33	1,33	2,25	Rendah
C	**Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh**								
17	Belakang Balok	0,47	0,24	2,92	0,73	5,25	1,31	2,28	Rendah
18	Sapiran	0,03	0,02	2,34	0,59	5,25	1,31	1,91	Rendah
19	Birugo	0,41	0,21	2,12	0,53	5,25	1,31	2,05	Rendah
20	Aur Kuning	0,03	0,02	2,24	0,56	5,25	1,31	1,89	Rendah
21	Pakan Labuah	0,03	0,02	1,42	0,36	5,25	1,31	1,68	Rendah
22	Kubu Tanjung	0,03	0,02	1,25	0,31	5,25	1,31	1,64	Rendah
23	Ladang Cangkiah	0,03	0,02	1,13	0,28	5,25	1,31	1,61	Rendah
24	Parit Antang	0,06	0,03	1,07	0,27	5,25	1,31	1,61	Rendah

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016.

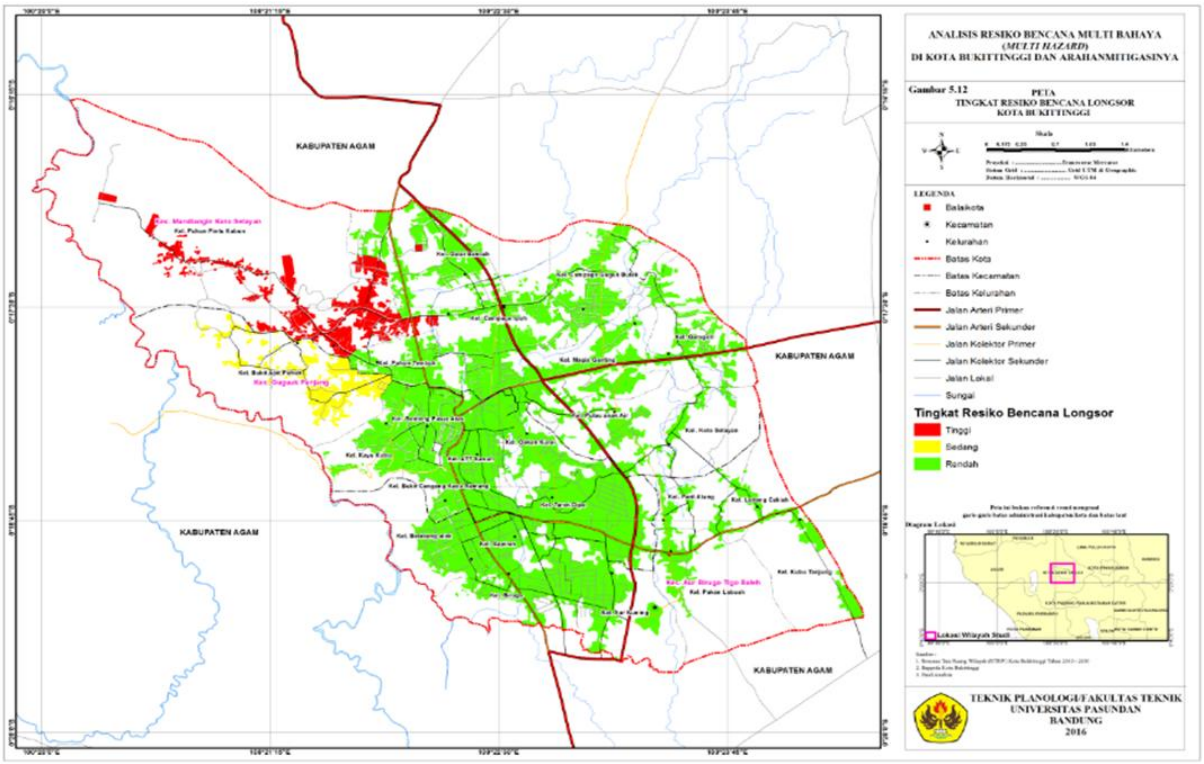

Gambar 3. Peta Tingkat Resiko Bencana Gempabumi

3) Analisis Tingkat Resiko Bencana Kebakaran

Tingkat resiko bencana kebakaran di Kota Bukittinggi yang memiliki tingkat resiko bencana paling tinggi berada pada Kelurahan Bukit Cangang Kayu Ramang. Ramang, Tarok Dipo, Benteng Pasar Atas, Kayu Kubu, dan lain-lain, yang secara lebih rinci disajikan pada tabel dan gambar berikut.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 4. Analisis Tingkat Resiko Bencana Kebakaran

No	Kecamatan/ Kelurahan	Bahaya		Kerentanan		Ketahanan		Nilai Indeks Resiko	Tingkat Resiko Bencana
		Nilai	Nilai x Bobot Bahaya (0,50)	Nilai	Nilai x Bobot Kerentanan (0,25)	Nilai	Nilai x Bobot Ketahanan (0,25)		
A	**Kecamatan Guguak Panjang**								
1	Bukik Cangang Kayu Ramang	13,46	6,73	0,77	0,19	6,28	1,57	8,49	Tinggi
2	Tarok Dipo	13,46	6,73	2,9	0,73	6,28	1,57	9,02	Tinggi
3	Pakan Kurai	13,46	6,73	2,94	0,74	6,28	1,57	9,03	Tinggi
4	Aur Tajungkang Tengah Sawah	13,46	6,73	2,76	0,69	6,28	1,57	8,99	Tinggi
5	Benteng Pasar Atas	13,46	6,73	2,81	0,70	6,28	1,57	9,00	Tinggi
6	Kayu Kubu	13,46	6,73	2,47	0,62	6,28	1,57	8,92	Tinggi
7	Bukit Apit Puhun			1,69	0,42	6,28	1,57	1,99	Rendah
B	**Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**								
8	Pulai Anak Air			2,05	0,51	5,94	1,48	2,00	Rendah
9	Koto Selayan			0,84	0,21	5,94	1,48	1,69	Rendah
10	Garegeh			1,11	0,28	5,94	1,48	1,76	Rendah
11	Maggih Ganting	13,46	6,73	2,95	0,74	5,94	1,48	8,95	Tinggi
12	Campago Ipuh	13,46	6,73	1,56	0,39	5,94	1,48	8,60	Tinggi
13	Puhun Tembok	13,46	6,73	2,53	0,63	5,94	1,48	8,85	Tinggi
14	Puhun Pintu Kabun			1,51	0,38	5,94	1,48	1,86	Rendah
15	Kubu Gulai Bancah			1,68	0,42	5,94	1,48	1,90	Rendah
16	Campago Guguk Bulek			1,13	0,28	5,94	1,48	1,77	Rendah
C	**Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh**				0,00				
17	Belakang Balok	13,46	6,73	2,73	0,68	5,24	1,31	8,72	Tinggi
18	Sapiran	13,46	6,73	3,02	0,76	5,24	1,31	8,79	Tinggi
19	Birugo	13,46	6,73	2,82	0,71	5,24	1,31	8,74	Tinggi
20	Aur Kuning	13,46	6,73	2,31	0,58	5,24	1,31	8,62	Tinggi
21	Pakan Labuah			1,59	0,40	5,24	1,31	1,71	Rendah
22	Kubu Tanjung			1,46	0,37	5,24	1,31	1,67	Rendah
23	Ladang Cangkiah			0,93	0,23	5,24	1,31	1,54	Rendah
24	Parit Antang			0,81	0,20	5,24	1,31	1,51	Rendah

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016.

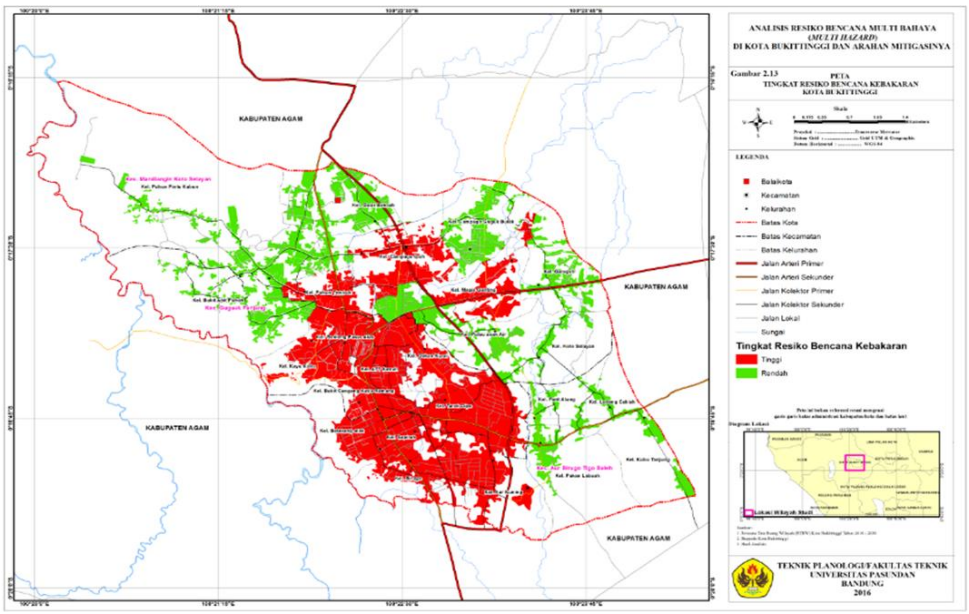

Gambar 4. Peta Tingkat Resiko Bencana Kebakaran

4) Analisis Tingkat Resiko Bencana Genangan Air

Tingkat resiko bencana banjir di Kota Bukittinggi yang memiliki tingkat resiko bencana paling tinggi berada pada Kelurahan Bukit Cangang K. Ramang, Tarok Dipo, Benteng Pasar Atas, Garegeh, dan lain-lain.

Tabel 5. Analisis Tingkat Resiko Bencana Genangan Air

No	Kecamatan/ Kelurahan	Bahaya		Kerentanan		Ketahanan		Nilai Bobot Resiko	Tingkat Resiko Bencana
		Nilai	Nilai x Bobot Bahaya (0,50)	Nilai	Nilai x Bobot Kerentanan (0,25)	Nilai	Nilai x Bobot Ketahanan (0,25)		
A	**Kecamatan Guguak Panjang**								
1	Bukik Cangang Kayu Ramang	0,33	0,17	0,81	0,20	6,87	1,72	2,09	Rendah
2	Tarok Dipo	8,76	4,38	1,17	0,29	6,87	1,72	6,39	Sedang
3	Pakan Kurai	0,43	0,22	0,84	0,21	6,87	1,72	2,14	Rendah
4	Aur Tajungkang Tengah Sawah	0,35	0,18	1,1	0,28	6,87	1,72	2,17	Rendah
5	Benteng Pasar Atas	0,33	0,17	0,88	0,22	6,87	1,72	2,10	Rendah
6	Kayu Kubu	0,35	0,18	1,47	0,37	6,87	1,72	2,26	Rendah
7	Bukit Apit Puhun	10,41	5,21	1,38	0,35	6,87	1,72	7,27	Sedang
B	**Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**								
8	Pulai Anak Air	0,55	0,28	1,13	0,28	7,00	1,75	2,31	Rendah
9	Koto Selayan	0,42	0,21	0,44	0,11	7,00	1,75	2,07	Rendah
10	Garegeh	0,5	0,25	0,68	0,17	7,00	1,75	2,17	Rendah
11	Maggih Ganting	11,58	5,79	1,26	0,32	7,00	1,75	7,86	Sedang
12	Campago Ipuh	0,48	0,24	1,22	0,31	7,00	1,75	2,30	Rendah
13	Puhun Tembok	1,01	0,51	1,07	0,27	7,00	1,75	2,52	Rendah
14	Puhun Pintu Kabun	18,02	9,01	1,63	0,41	7,00	1,75	11,17	Tinggi
15	Kubu Gulai Bancah	0,55	0,28	0,94	0,24	7,00	1,75	2,26	Rendah
16	Campago Guguk Bulek	0,48	0,24	1	0,25	7,00	1,75	2,24	Rendah
C	**Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh**								
17	Belakang Balok	0,44	0,22	1,92	0,48	6,57	1,64	2,34	Rendah
18	Sapiran	0,34	0,17	1,23	0,31	6,57	1,64	2,12	Rendah
19	Birugo	0,5	0,25	0,88	0,22	6,57	1,64	2,11	Rendah
20	Aur Kuning	0,51	0,26	0,96	0,24	6,57	1,64	2,14	Rendah
21	Pakan Labuah	0,54	0,27	0,58	0,15	6,57	1,64	2,06	Rendah
22	Kubu Tanjung	0,46	0,23	0,51	0,13	6,57	1,64	2,00	Rendah
23	Ladang Cangkiah	0,37	0,19	0,49	0,12	6,57	1,64	1,95	Rendah
24	Parit Antang	0,38	0,19	0,43	0,11	6,57	1,64	1,94	Rendah

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

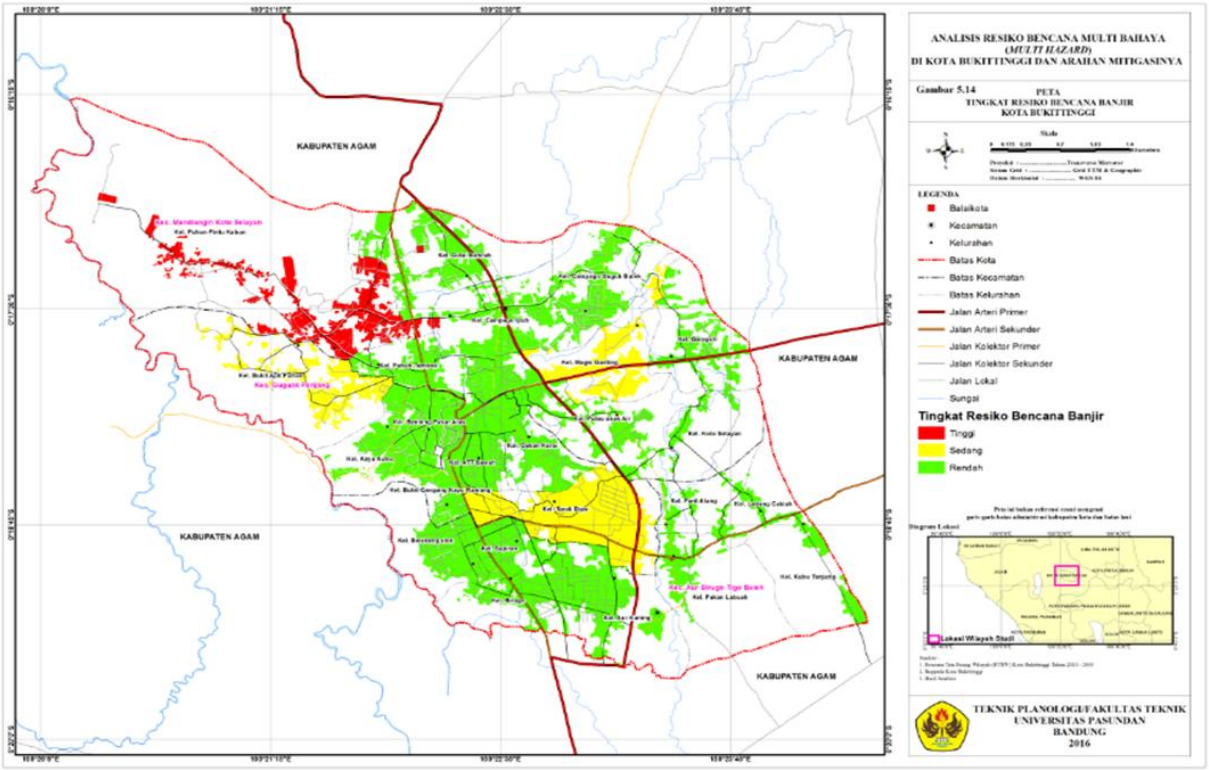

Gambar 5. Peta Tingkat Resiko Bencana Genangan Air

5) Analisis Resiko Kebencanaan / Multihazard

Tingkat resiko bencana longsor, bencana gempa bumi dan bencana kebakaran, maka bisa disimpulkan wilayah/kelurahan mana yang memiliki tingkat kebencanaan paling tinggi..

Tabel 6. Analisis Resiko Kebakaran

No	Kecamatan/ Kelurahan	Tingkat Resiko Bencana Gempa Bumi	Tingkat Resiko Bencana Longsor	Tingkat Resiko Bencana Kebakaran	Tingkat Resiko Bencana Genangan	Multihazard
A	**Kecamatan Guguak Panjang**					
1	Bukik Cangang Kayu Ramang	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
2	Tarok Dipo	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Kebakaran
3	Pakan Kurai	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
4	Aur Tajungkang Tengah Sawah	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
5	Benteng Pasar Atas	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
6	Kayu Kubu	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
7	Bukit Apit Puhun	Sedang	Sedang	Rendah	Sedang	Gempa Bumi, Longsor dan Genangan
B	**Kecamatan Mandiangin Koto Selayan**					
8	Pulai Anak Air	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kebakaran
9	Koto Selayan	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kebakaran
10	Garegeh	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kebakaran
11	Maggih Ganting	Rendah	Rendah	Tinggi	Sedang	Kebakaran dan

ISBN : 978-602-73463-1-4

						Genangan
12	Campago Ipuh	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
13	Puhun Tembok	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
14	Puhun Pintu Kabun	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi	Gempa Bumi, Longsor dan Genangan
15	Kubu Gulai Bancah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	
16	Campago Guguk Bulek	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	
C	**Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh**					
17	Belakang Balok	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
18	Sapiran	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
19	Birugo	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
20	Aur Kuning	Rendah	Rendah	Tinggi	Rendah	Kebakaran
21	Pakan Labuah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kebakaran
22	Kubu Tanjung	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kebakaran
23	Ladang Cangkiah	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kebakaran
24	Parit Antang	Rendah	Rendah	Rendah	Rendah	Kebakaran

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016.

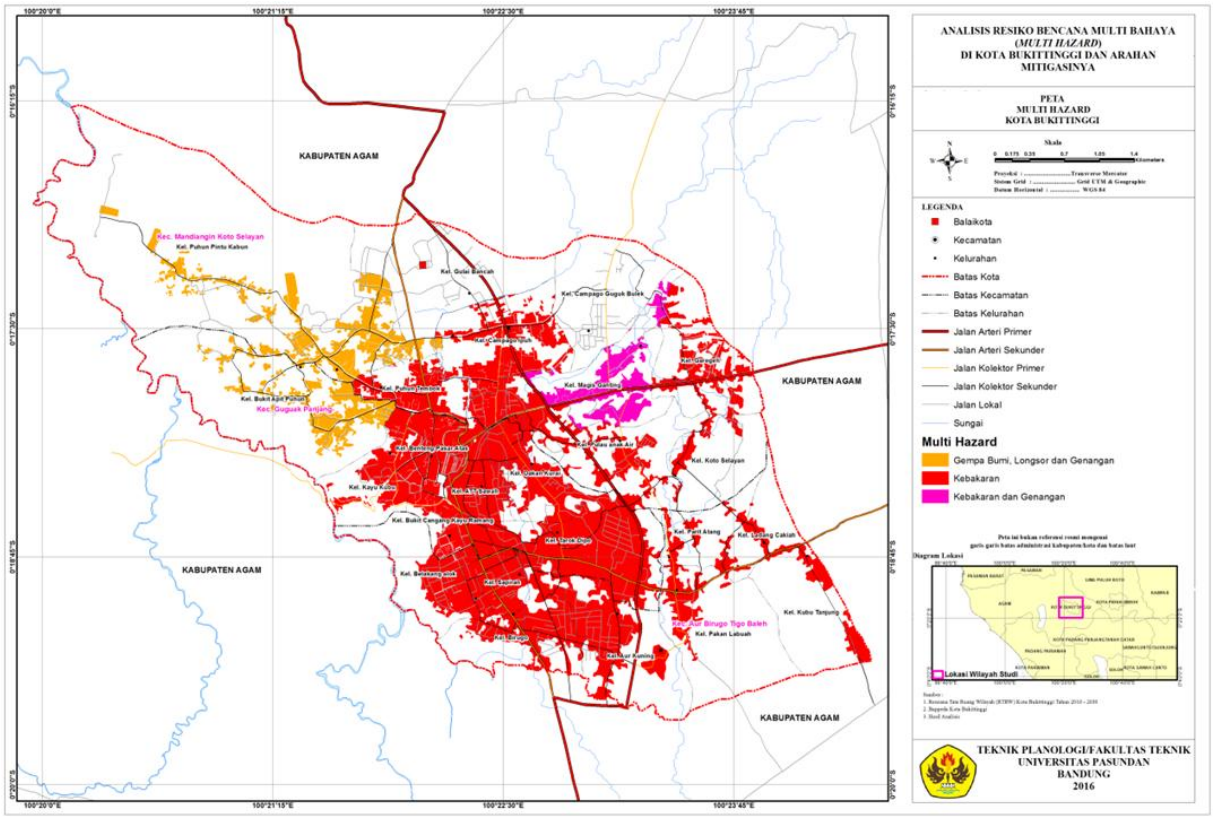

Gambar 6. Peta Hasil Analisis Multihazard KotaBukittinggi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini adalah berupa jenis dan lokasi bencana di Kota Bukittinggi yang secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1. **Jenis dan Lokasi Bencana**

No	Jenis Bencana	Lokasi
1	Gempa Bumi	Klaster Bukit Apit Puhun, Klaster Puhun Pintu Kabun,
2	Longsor	Klaster Bukit Apit Puhun, Klaster Puhun Pintu Kabun,
3	Banjir	Klaster Tarok Dipo, Klaster Apit Puhun, Klaster Maggih Genting, Klaster Puhun Pintu Kabun
4	Kebakaran	klaster Bukik Cangang Kayu Ramang, Klaster Tarok Dipo, Klaster Pakan Kurai, Klaster Air Tajungkang Tengah Sawah, Klaster Benteng Pasar Atas, Klaster Bukit Kayu Kubu, Klaster Maggih Ganting, Klaster Campago Ipu, Klaster Puhun Tembok, Klaster Belakang Balok, Klaster Sapiran, Klaster Birugo, dan Klaster Aur Kuninng

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016.

Saran dari penelitian ini adalah berupa arahan mitigasi bencana di Kota Bukittinggi yang secara lebih rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2. Arahan Mitigasi Berdasarkan Jenis Bencana

No	Jenis Bencana	Lokasi	Arahan Mitigasi
1	Gempa Bumi	Klaster Bukit Apit Puhun, Klaster Puhun Pintu Kabun,	• Harus dibangun dengan konstruksi tahan getaran/gempa khususnya di daerah rawan gempa • Perkuatan bangunan dengan mengikuti standar kualitas bangunan • Perkuatan bangunan-bangunan vital yang telah ada • Rencanakan penempatan pemukiman untuk mengurangi tingkat kepadatan hunian di daerah rawan gempa bumi
2	Longsor	Klaster Bukit Apit Puhun, Klaster Puhun Pintu Kabun,	• Slope reshaping lereng terjal (pembentukan lereng lahan menjadi lebih landai) pada daerah yang potensial longsor. • Penguatan lereng terjal dengan bronjong kawat pada kaki lereng. • Penanaman vegetasi kawasan longsor • Penutupan rekahan/retakan tanah dengan segera karena pada musim penghujan rekahan bisa diisi oleh air hujan yang masuk ke dalam tanah sehingga menjenuhi tanah di atas lapisan kedap. • Bangunan rumah dari konstruksi kayu (semi permanen) lebih tahan terhadap retakan tanah dibanding dengan bangunan pasangan batu/bata pada lahan yang masih akan bergerak.
3	Banjir	Klaster Tarok Dipo, Klaster Apit Puhun, Klaster Maggih Genting, Klaster Puhun Pintu Kabun	• membuat tanggul sungai yang memadai serta membuat waduk atau tandon air untuk mengurangi banjir puncak

ISBN : 978-602-73463-1-4

No	Jenis Bencana	Lokasi	Arahan Mitigasi
			• menambah saluran pembuangan air dengan saluran sudetan atau normalisasi sungai atau floodway • Pemeliharaan drainase
4	Kebakaran	klaster Bukik Cangang Kayu Ramang, Klaster Tarok Dipo, Klaster Pakan Kurai, Klaster Aur Tajungkang Tengah Sawah, Klaster Benteng Pasar Atas, Klaster Bukit Apit Puhun, Klaster Maggih Ganting, Klaster Puhun Tembok, Klaster Belakang Balok, Klaster Sapiran, Klaster Birugo, Klaster Aur Kuning	• Hidran dan pembuatan reservoar • Hidran porttable • Pembuatan jalur akses cepat tanggap terhadap kebakaran

Sumber: Hasil Analisis Tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Awotona, A. 1997. Reconstruction After Disaster : Issues and Practices. Aldershot : Ashgate.
[2] Campanella, T. J. 2012. Resilience. the Oxford Handbook of Urban Planning. Weber, Rachel and Crane, Randa. Oxfor University Press.
[3] Pemerintah Kota Bukittinggi. 2010. RTRW Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
[4] Sanderson, D. (1997). Building Bridges to Reduce Risk. Dalam Reconstruction After Disaster : Issues and Practices. Awotona, Adenrale.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KETAHANAN PANGAN RUMAH TANGGA DAN WILAYAH BERBASIS PANGAN LOKAL SAGU, KELADI DAN PISANG DI KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI

Erwin

Program Pascasarjana Universitas Andalas

Erwin_antro@yahoo.com

Naskah diterima :13 Maret 2017 Naskah direvisi :22 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Kondisi persediaan pangan di Indonesia, didominasi pangan beras sebagai makanan pokok, hal ini ditopang oleh beberapa kebijakan pemerintah yang memberikan bantuan pangan dalam bentuk beras. Pada hal negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati, yang menjadi ciri khas pangan pokok setiap daerah di Indonesia. Kabupaten Kepulauan Mentawai misalnya, pangan pokoknya sagu, keladi dan pisang. Ketersediaan pangan lokal sagu, keladi dan pisang sesuai dengan daya dukung lingkunga; bentang alam, iklim, Ph tanah dan lain sebagainya. Kebutuhan pangan rumah tangga tersedia setiap waktu, melebihi kebutuhan rumah tangga. Kebijakan raskin dari pemerintah (bantuan beras untuk rumah tangga miskin) dan adanya kebijakan untuk swasembada beras oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk menanam tanaman padi perlu dikaji ulang. Mengalihkan pangan lokal (sagu, keladi dan pisang) ke pangan beras, akan mengancam ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Penelitian ini dilakukan di empat desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yaitu ; Desa Muntei, Desa Madobag, Desa Goeseinan dan Desa Taikako. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode dan teknik pengumpulan data kualitatif; observasi, wawancara terstruktur dan diskusi kelompok terfokus (FGD). Penarikan informan menggunakan teknik purposive yang terdiri dari 4 orang informan kunci pada setiap desa, yakni; kepala desa, sekretaris desa dan tokoh masyarakat lokal dan informan biasa sebanyak 10 kepala rumah tangga.

Temuan penelitian menunjukkan : 1) Potensi dan ragam pangan lokal sagu, keladi dan pisang, tersedia dalam jumlah yang melebihi kebutuhan setiap rumah tangga; 2) Introdusir beras untuk mengalihkan sumber pangan lokal akan mengancam ketahanan pangan rumah tangga di Kabupaten Kepulauan Mentawai. 3) Untuk memperkuat penyediaan pangan lokal, diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai menyediakan bibit pangan lokal unggul dan pemberian bimbingan teknis dalam pemeliharaan tanaman, dengan menggunakan pupuk organik. 4) Masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai memiliki ketahanan pangan lokal pada tingkat rumah tangga dan wilayah.

Kata-Kata Kunci: Ketahanan pangan, Pangan local: sagu, keladi dan pisang

1. Pendahuluan

Kebijakan pemerintah, sejak pemerintahan orde baru ada kesan memaksakan beras sebagai makanan utama pada masyarakat Mentawai. Hal ini terlihat, dari bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah melalui Departemen Sosial. Sampai hari, program bantuan pangan yang diberikan oleh pemerintah untuk keluarga miskin adalah bantuan beras. Adanya kebijakan tersebut telah mengakibatkan lahirnya stratifikasi sosial baru dalam masyarakat. Dimana warga masyarakat Mentawai yang mengkonsumsi beras, dianggap lebih maju diandingkan dengan warga masyarakat Mentawai yang mengkonsumsi sagu dan keladi.

Target swasembada beras yang diprogramkan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga 2016 tidak tercapai, sebab hasil produksi beras dari program rehabilitasi dan cetak sawah hanya memenuhi 50 persen dari kebutuhan masyarakat. Menurut data Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan (Dispertakbun) Mentawai, luas sawah yang berhasil dibuka seluas 1.029. Areal sawah tersebut bertambah dari luas yang ditargetkan seluas 1000 hektar.

Menurut Kepala Dispertabun Mentawai, kebutuhan beras masyarakat Mentawai sebanyak 9.900 ton per tahun. Rata-rata hasil produksi padi petani berkisar 1.800-3.500 ton per tahun. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Kepulauan Mentawai hingga 2016, target cetak sawah mencapai 1,029 hektar, namun kebutuhan pemenuhan beras di Mentawai masih 50 persen dari kebutuhan per tahunnya. Program cetak sawah yang dilakukan oleh Pemda Mentawai tersebar hampir di 10 kecamatan yang ada di daerah tersebut. Data hasil produksi padi Mentawai pada 2012 dengan luas 100 hektar hanya 1,8 ton, kemudian pada 2013 dengan luas 227 hektar hasi produksi justru menurun menjadi 1,6 ton. Pada 2014 dengan luas sawah baru 170 hektar menghasilkan panen 3,6 ton, 2015 dari 744 hektar mendapat panen 5,5 ton sementara pada 2016 luas sawah yang mau dibuka 285 masih dalam proses penanaman.

Komoditas pangan lokal dapat diandalkan untuk menjamin suatu rumah tangga dan wilayah memiliki ketahanan pangan. Kebutuhan pangan masyarakat; sagu, keladi/talas, pisang dan umbi-umbian tersedia dalam jumlah yang melebihi kebutuhan. Masyarakat Mentawai tidak ada yang kelaparan, walaupun masyarakatnya banyak yang tergolong miskin menurut data BPS 2013. Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan salah satu daerah di Sumatera Barat yang memiliki keragaman sumber pangan lokal yang tinggi. Komoditas pangan lokal tersebut seperti sagu, pisang, talas, dan umbi-umbian lainnya sudah menjadi sumber pangan utama bagi penduduk Mentawai.

Usaha mengembangkan budidaya tanaman padi pada masyarakat Mentawai, membutuhkan keseriusan dari pemerintah daerah, mengingat budidaya tanaman padi berbeda dengan budaya tanaman sagu, keladi dan pisang yang sudah lama dikembangkan oleh masyarakat Mentawai. Disamping faktor perilaku masyarakat dalam bercocok tanam dan faktor kualitas tanah (kesesuaian lahan), topografi dan iklim akan menentukan implementasi dari kebijakan pemerintahan daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Disamping itu, salah satu indikator kemiskinan yang dikemukakan oleh BPS, jumlah makan dalam satu hari (satu atau dua kali). Apabila rumah tangga hanya bisa makan nasi satu kali dalam satu hari akan dikatagorikan miskin dan kalau dua kali dalam satu hari akan dikatagorikan hampir miskin. Artinya, ukuran berapa kali makan beras juga bertentangan dengan semangat PP No. 68 tahun 2002, pentingnya diversifikasi pangan.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, dimana setiap rumah tangga dan wilayah memiliki ketahanan pangan (*food security*) karena ketahanan pangan rumah tangga dan ketahanan pangan wilayah berkaitan dengan ketahanan sosial (*social security*) dan ketahanan sosial berkaitan dengan ketahanan nasional (*national security*). Ketahanan pangan seyogianya dibangun atas kemampuan sendiri dengan mengoptimalisasikan pemamfaatan yang berbasisi pada keragaman sumber daya lokal. Ketahanan pangan harusnya mencakup tiga sub sistem utama yaitu ketersediaan (*food availability*), aksesibilitas (*food access*), dan penyerapan pangan (*food utilization*). Dengan dasar itu, penelitian ini akan menggambarkan ketahanan pangan rumah tangga dan ketahanan pangan wilayah yang berbasis pangan lokal di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

2. Tinjauan Pustaka

Pada masyarakat Mentawai, sagu, talas dan pisang merupakan sebagai sumber karbohidrat masyarakat yang tersedia dalam jumlah yang melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat, sementara tanaman padi merupakan tanaman yang sebagian besar masyarakat di Kepulauan Mentawai belum melakukannya. Artinya, budidaya tanaman padi hanya dilakukan oleh sebagian kecil masyarakat atau beberapa kepala keluarga di beberapa desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan pada masyarakat Mentawai maka nilai-nilai dan kebiasaan yang merupakan bentuk dari kearifan lokal perlu diperkuat dan dikembangkan. Dengan cara itu, maka nilai-nilai dan kebiasaan tersebut akan internalisasi oleh generasi ke generasi dan tetap menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Mentawai dengan norma-norma sosialnya. Kearifan lokal ini dapat sekaligus menjadi penyaring modernisasi yang dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, dalam bentuk lain akan dapat merusak lingkungan alam (Erwin, 2015).

Pemantapan ketahanan pangan terkait erat dengan pembangunan kualitas sumberdaya manusia. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar bagi manusia, karenanya merupakan hak asasi manusia untuk tidak mengalami kekurangan pangan. Oleh karena itu, peningkatan ketahanan pangan merupakan prioritas utama dalam pembangunan.

Ketahanan pangan diartikan sebagai terpenuhinya pangan dengan ketersediaan untuk kebutuhan masyarakat secara nasional, tersedia, mudah memperoleh aman dikonsumsi dan harga terjangkau oleh lapisan masyarakat, yang dapat diwujudkan dengan bekerjanya sub sistem ketersediaan, sub sistem distribusi dan sub sistem konsumsi. Soedjana. (2007). Pangan dalam arti luas mencakup pangan yang berasal dari tanaman pangan, ternak dan ikan untuk memenuhi kebutuhan karbohidrat, protein dan vitamin serta mineral yang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

bermanfaat untuk pertumbuhan dan kesehatan manusia. Selanjutnya Mewa, (2004). Pentingnya program peningkatan ketahanan pangan dimaksudkan untuk mengopreasionalkan pembangunan dalam rangka mengembangkan sistem ketahanan pangan baik ditingkat nasional maupun ditingkat rumahtangga.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan pasal 9 menyebutkan: (1) penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, (2) penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dengan, meningkatkan keragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pertanian dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan prinsip gizi berimbang.

Strategi dalam penguatan ketahanan pangan dan mengingat krisis pangan akan bisa berulang pada tahun-tahun mendatang maka perencanaan pembangunan pertanian membutuhkan *political will* pemerintah dan tidak sekedar wacana dalam pidato-pidato politik partai tetapi harus ada aksi nyata yang membutuhkan kerja keras dan program kerja yang masuk akal dan pro petani. Swastika (2004), menyatakan bahwa, ketahanan pangan harus ditempatkan sebagai aktor utama pembangunan pertanian yang akan menyelamatkan dari krisis pangan di masa datang.

Kekhawatiran semakin parahnya krisis pangan menghantui sebagian besar negara-negara di dunia termasuk Indonesia, Organisasi Pangan dan Pertanian (FAO) PBB mengingatkan krisis pangan seperti yang terjadi pada 2007/2008 bisa berulang pada tahun 2013 untuk mencegah krisis pangan di Indonesia, ketahanan pangan mutlak diperkuat Siswono (2001). Komoditas seperti kedelai dan daging menurut FAO krisis pangan terjadi karena komoditas pangan tidak terkelola dengan baik, setiap negara diharapkan dapat mengupayakan penyelamatan sendiri negara-negara yang dikenal pengekspor beras seperti Thailand dan Vietnam, ternak sapi dari Australia mulai mengamankan terlebih dahulu kebutuhan dalam negeri, mencermati

Mengembangkan tanaman pangan dan menjamin ketahanan pangan di masa depan merupakan pekerjaan yang relatif sulit dan membutuhkan biaya besar. Kondisi lahan pertanian, termasuk persawahan, selama ini sangat mengkhawatirkan karena terus dikonversi atau beralih fungsi menjadi non pertanian, seperti permukiman, perdagangan, industri, dan jalan, berkurangnya lahan sudah pasti berpengaruh pada aktivitas sektor pertanian dan berkorelasi positif pada defisit kebutuhan tenaga kerja yang dapat melahirkan lebih banyak lagi pengangguran karena lahan pertanian semakin sempit yang memaksa pelaku meninggalkan sektor pertanian. Banyak petani yang hidup secara subsisten dengan mengkonsumsi komoditi pertanian hasil produksi mereka sendiri. Mereka adalah petani yang memiliki luas sawah sangat kecil, atau buruh tani yang mendapat upah berupa pangan, seperti padi, jagung, ataupun ketela.

Berbagai pemikiran di atas memberikan indikasi secara nyata bahwa agribisnis merupakan salah satu pilar ketahanan pangan. Kegiatan agribisnis pangan akan memberikan pengaruh terhadap ketersediaan pangan, baik dari sisi jumlah, keragaman dan juga untuk diakses masyarakatnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tingkat aktivitas agribisnis di suatu wilayah jelas akan berpengaruh terhadap pola ketersediaan pangan yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap keaneka ragaman konsumsi pangannya.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di empat desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Penentuan lokasi penelitian dilakukan secara *purposive* dengan pertimbangan; desa yang dipilih dapat menggambarkan kondisi masyarakat pada setiap pulau. Desa-desa yang dimaksud adalah Desa Madobag, Desa Muntei di Pulau Siberut; Desa Goeseinan di Pulau Sipora dan Desa Taikako di Pulau PagaiUtara.

Penelitian yang menggunakan pendekatan kualitatif, dimana peneliti menjadi instrumen utama dalam penelitian. Dalam pengumpulan data, peneliti turun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, FGD dan dokumentasi di desa penelitian.

Data sekunder dan primer yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis sejalan dengan tujuan yang akan dicapai dari kegiatan ini. Sintesis data dan informasi dilakukan dengan cara *emic* dan *etic*. Analisis data dimulai pada saat pengumpulan data di lapangan, kemudian mengelompokkan data ke dalam kategori-kategori tertentu, data direduksi dan ditampilkan. Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan data hasil FGD dianalisis melalui pendekatan emik. Analisis etik dilakukan dengan menyederhanakan data sesuai dengan variabel-variabel yang ada dalam konsep, kemudian melihat kesesuaiannya dengan hasil analisa emik.

4. Gambaran Umum Daerah Penelitian

Kabupaten Kepulauan Mentawai lahir di era reformasi, pada tahun 2001 hasil pemekaran dari Kabupaten Padang Pariaman. Pada awal terbentuknya kabupaten, terdiri dari 4 kecamatan, pada tahun 2002

terjadi pemekaran kecamatan menjadi 10 kecamatan. Data tahun 2013, di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 10 kecamatan, 43 desa dan 266 dusun. Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Mentawai 6.011, 35 Km2, terdiri dari 4 pulau besar; Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan. Sebagian besar kawasan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan kawasan hutan sekitar 86, 19 % atau sekitar 512.044 Ha.

Penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai tahun 2012, berjumlah 78.511 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk 13,06 jiwa/Km^2. Di lihat dari laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai, periode 2009-2010 dibandingkan dengan 2010-2011 mengalami penurunan dari 2,07% menjadi 1,19%. Faktor penyebab, adanya penurunan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sulit dijelaskan apakah disebabkan karena faktor bencana alam atau karena tingginya angka mortalitas, atau disebabkan karena pemerintah berhasil menekan laju pertumbuhan penduduk.

Kabupaten Kepulauan Mentawai terisolasi dari dataran Sumatera selama lebih dari 500 ribu tahun. Proses isolasi yang panjang dengan dataran Sumatera, menjadi penyebab adanya kolonisasi Fauna dan Flora. Dan inilah yang mendorong terbentuknya keendemisan yang sangat tinggi, dengan tingkat keunikan ekologis yang luar biasa. Tingkat keedemisan dan keunikan ekologis tampak pada beberapa kelompok Fauna dan Flora, seperti; mamalia, burung, reptilia, amphibi dan invetebrata (WWF, 1990).

Adanya kekhasan dari masyarakat Mentawai disebabkan oleh isolasi geografis, terbatasnya sarana dan pra-sarana transportasi masyarakat yang tinggal di Pulau Siberut dengan masyarakat yang tinggal di daratan Pulau Sumatera. Sarana dan pra-sarana transportasi yang menghubungkan kota kecamatan dengan desa-desa yang ada di Pulau Siberut, menggunakan sungai yang dilayari dengan menggunakan perahu dayung dan beberapa penduduk sudah menggunakan perahu dengan mesin (masyarakat menyebut perahu ber-mesin dengan sebutan pong-pong dan boat). Terbatasnya sarana dan pra-sarana transportasi antar desa dalam pulau dan dengan Kota Padang di Pulau Sumatera, menjadi penyebab rendahnya mobilitas sosial penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai.

5. Hasil Penelitian dan Pembahasan

a. Dinamika Sosial Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai, kalau dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota dalam Provinsi Sumatera Barat masih rendah. Data BPS Provinsi Sumatera Barat tahun 2012, memperlihatkan petumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai masih di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Barat. Namun, data pertumbuhan pendapatan perkapita penduduk Kabupaten Kepulauan Mentawai mengalami peningkatan yang siginifikan, di atas rata-rata pendapatan perkapita penduduk Provinsi Sumatera Barat. Mengingat angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kepulauan Mentawai di bawah rata-rata Provinsi Sumatera Barat, sementara angka pertumbuhan PDRB Kabupaten Kepulauan Mentawai berada di atas rata Provinsi Sumatera Barat, data tersebut memperlihatkan kecendrungan terbalik. Dengan adanya peningkatan PDRB per-kapita meningkat, apakah sudah terjadi peningkatan kesejahteraan masyarakat Mentawai, sementara Kabupaten Kepulauan Mentawai masih memiliki rumah tangga miskin terbanyak di bandingkan dengan kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Sumatera Barat.

Mata pencaharian utama masyarakat berkebun dan berladang, dengan tanaman utama adalah Sagu, Pisang, Keladi, Ubi Jalar, Kelapa dan beberapa jenis tanaman yang berorientasi pasar, antara lain; seperti; coklat, pinang, cengkeh, manau dan nilam. Kondisi sosial ekonomi masyarakat Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut, dengan ciri-ciri sebagai berikut: (1) Kehidupan ekonomi bersifat subsistensi, bersumber pada kegiatan-kegiatan seperti; berburu, meramu hasil hutan, menangkap ikan dan berladang. (2) Teknologi yang digunakan masih sederhana, akan tetapi tepat guna (*appropriate technology*) dalam mengolah sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. (3) Populasi penduduk relatif kecil dibandingkan dengan luas wilayah. Hidup dalam satuan keluarga terkecil yang disebut dengan *lalep*, dan sebagian besar tinggal di pedalaman dalam kelompok-kelompok keluarga luas patrilineal (*Uma*), kecuali pada beberapa lokasi pemukiman penduduk yang dikelola Departemen Sosial, yang disebut dengan PKMT (Pemukiman kembali masyarakat terasing). (4) Pengelompokkan masyarakat relatif kecil, tertutup dan homoen, dan diikat oleh organisasi sosial yang bertumpu pada ikatan kekerabatan.

Makanan pokok masyarakat adalah sagu, talas dan pisang. Sumber makanan pokok tersedia dalam jumlah yang cukup. Pada tahun 1990, diperkirakan luas areal perladangan sagu yang dusahakan secara tradisional oleh masyarakat lebih kurang 14.839 hektar. Sistem pertanian yang dikembangkan masyarakat masih sangat sederhana, dan diperkirakan setiap keluarga inti (keluarga yang tinggal dalam satu *lalep*), hanya memerlukan 0,75 atau maksimal 1 hektar untuk lahan yang dikelola secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga. Proses pembukaan lahan dilakukan sederhana; melalui penebangan kayu dan membersihkan permukaan tanah yang akan ditanami dengan peralatan cangkul. Masyarakat Mentawai, secara

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

tradisional tidak mengenal sistem pembakaran dalam pembukaan hutan yang akan dijadikan sebagai areal perladangan.

b. Ekologi dan Pola Usaha Tani

Kalau dilihat dari asal usul orang Mentawai, suku bangsa Mentawai termasuk kelompok proto melayu (melayu tua) yang menyebar dari wilayah Tonkin (Indo Cina), sekitar 2000 tahun SM. Perpindahan kelompok Melayu tua dari Tonkin Indo Cina ke wilayah Sumatera, termasuk juga ke Kepulauan Mentawai, juga membawa budaya tanaman padi, sebagaimana sebagian suku bangsa yang tinggal menetap di dataran Sumatera, seperti; Batak, Melayu, Minangkabau dan lainnya. Pertanyaannya, kenapa budidaya tanaman padi berkembang didataran Pulau Sumatera, akan tetapi tidak berkembang, bahkan bisa dikatakan hilang di daerah Kepulauan Mentawai. Interaksi masyarakat masyarakat Mentawai dengan suku-suku bangsa lainnya, seperti Minangkabau, Batak dan Nias cukup intensif, bahkan ketiga suku bangsa tersebut sudah tinggal menetap Kepulauan Mentawai empat sampai lima generasi atau sekitar seratus tahun, namun juga tidak bisa mengembangkan budidaya tanaman padi. Pertanyaan-pertanyaan tersebut akan terjawab, apabila kondisi ekologis; bentang alam, struktur tanah, Iklim dan tipologi pemukiman tradisional masyarakat Mentawai dipahami.

Julian Steward dalam Keesing (1989) mendalilkan bahwa ada bagian inti dari sistem sosial budaya yang tanggap terhadap adaptasi ekologis; pembagian kerja; ukuran dan stabilitas dari kelompok-kelompok lokal dan penyebarannya dalam suatu wilayah; dan ketentuan-ketentuan pemukiman. Tekanan ekologis dalam bentuk, Iklim, ketersediaan air dan kesuburan tanah, akan menentukan beberapa banyak orang dapat tinggal di satu lokasi pemukiman dan bagaimana masyarakat mengatur usaha produktif mereka.

Alam Kepulauan Mentawai atau kondisi ekologis Kepulauan Mentawai menjadi salah satu faktor penyebab tidak berkembangnya tanaman padi di Kepulauan Mentawai. Bentang alam Kepulauan Mentawai sebagian besar dataran rendah, berupa daerah rawa dan bergambut. Lahan rawa-rawa dan lahan gambut, sangat baik untuk tumbuh kembang tanaman sagu secala alami. Lahan rawa-rawa dan lahan gambut, tidak sesuai dengan persyaratan yang dibutuhkan tanaman padi untuk tumbuh secara alamiah. Pemanfaatan lahan rawa-rawa dan lahan gambut untuk dijadikan lahan tanaman padi, memerlukan banyak perlakukan terhadap lahan. Artinya, tantangan alam agar budidaya tanaman padi bisa menguntungkan, siapa saja baik suku bangsa Mentawai, Minangkabau, Batak,Nias dan Jawa, harus melakukan banyak perlakuan terhadap tanah, dan ini akan berimplikasi terhadap biaya produksi.

Proses adaptasi ekologis berlangsung untuk semua suku bangsa yang tinggal menetap di Kepulauan Mentawai. Pada awalnya, masyarakat Mentawai melakukan penyesuaian makanan pokok dengan tanaman-tanaman yang sesuai dengan tatanan ekologi daerah kepulauan. Tanaman-tanaman yang dapat tumbuh secara alamiah adalah sagu, keladi dan pisang. Dalam perkembangannya, suku bangsa lain yang tinggal di Mentawai akan beradaptasi dengan pangan lokal, dalam hal ini; sagu, keladi dan pisang.

Peraturan Pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, pasal 9 menyebutkan: (1) penganekaragaman pangan diselenggarakan untuk meningkatkan ketahanan pangan dengan memperhatikan sumber daya, kelembagaan, dan budaya lokal, (2) penganekaragaman pangan sebagaimana dimaksudkan dalam ayat 1 dilakukan dengan, meningkatkan keragaman pangan, mengembangkan teknologi pengolahan dan produk pertanian dan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi anekaragam pangan dengan prinsip gizi berimbang. Masyarakat Mentawai sudah sejak lama menjalankan peraturan pemerintah No.68 Tahun 2002 tentang ketahanan pangan, dimana masyarakatnya memiliki pangan lokal; sagu, keladi dan pisang yang tersedia dalam jumlah yang lebih dari cukup. Handewi. *et al*. (2010), mengemukakan bahwa ketahanan pangan terdiri dari tiga aspek yaitu, aspek ketersediaan (*food availibility*), aspek stabilitas ketersediaan atau pasokan (*access of supplies*), dan aspek keterjangkauan *(access to utilization*). Keempat aspek tersebut mengindikasikan bahwa pangan harus tersedia dalam jumlah cukup dan terjangkau oleh orang yang miskin sekalipun dan aman serta bermutu.

Kebijakan Raskin yang dilakukan pemerintah, telah mempengaruhi cara pandang masyarakat Mentawai dan memposisikan rumah tangga yang mengkonsumsi beras pada posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan rumah tangga yang mengkonsumsi pangan lokal, dalam hal ini sagu, keladi dan pisang. Kebijakan pemerintah tersebut, telah menafikan keberagaman pangan lokal Indonesia. Keberagaman pangan lokal, berkaitan erat dengan keberagaman budaya dan kebiasaan masyarakat di berbagai tempat di Indonesia. Sagu, Talas, Pisang, Jagung dan Beras yang dijadikan sebagai pangan utama dalam rumah tangga, seyogyanya tidak dilihat sebagai cerminan dari keadaan sosial ekonomi rumah tangga, akan tetapi lebih didasarkan pada kebiasaan dan kearifan masyarakat, yang bersumber dari hasil adaptasi masyarakat dengan sistem lingkungan yang diwariskan dari generasi ke generasi. Pada masyarakat Mentawai keberadaan pangan lokal memperlihatkan keselarasan dan penyesuaian masyarakat dengan daya dukung lingkungan.

Pada masyarakat Mentawai, sagu, keladi dan pisang merupakan sumber karbohidrat masyarakat yang tersedia dalam jumlah yang melebihi kebutuhan konsumsi masyarakat. Secara tradisional, sumber protein masyarakat berasal dari ikan, siput, lokan, udang, kerang, ayam, dan babi yang merupakan hasil budidaya dan tangkapan di sungai dan pinggiran pantai. Adapun untuk sumber mineral dan vitamin, didapat dari buah-buahan dan sayuran yang tersedia di pinggiran sungai, pekarangan rumah dan kebun di sekitar pemukiman (Erwin, 2013).

Dalam upaya meningkatkan produktivitas pertanian tanaman pangan pada masyarakat Mentawai maka nilai-nilai dan kebiasaan yang merupakan bentuk dari kearifan lokal perlu diperkuat dan dikembangkan. Dengan cara itu, maka nilai-nilai dan kebiasaan tersebut akan internalisasi oleh generasi ke generasi dan tetap menjadi bagian dari gaya hidup masyarakat Mentawai dengan norma-norma sosialnya. Kearifan lokal ini dapat sekaligus menjadi penyaring modernisasi yang dapat berdampak negatif bagi kehidupan sosial dan budaya masyarakat setempat, dalam bentuk lain akan dapat merusak lingkungan alam. Mewujudkan ketahanaan pangan pada masyarakat Mentawai melalui peningkatan produksi komoditas pangan lokal akan memperkuat norma - norma sosial budaya, dan tetap mengedepankan daya dukung dan kelestarian alam. Pengenalan pangan beras, melalui program Raskin, bagi masyarakat Mentawai akan merusak ketahanan sosial budaya dan bisa saja akan menimbulkan kerusakan lingkungan alam.

Keberadaan pangan lokal perlu diperkuat dan dikembangkan oleh pemerintah dan dunia usaha di bidang pertanian, terutama pangan lokal sagu, keladi dan pisang. Peran dunia usaha mendorong pemasaran pangan local, sedangkan peran pemerintah, menyiapkan regulasi dan penyediaan infrastruktur pertanian. Dengan demikian ketahanan pangan pada masyarakat terpelihara. Diversifikasi makanan olahan yang bersumber dari sagu, keladi dan pisang yang perlu diupayakan, agar masyarakat Mentawai memiliki kebanggaan dengan terhadap pangan lokal yang menjadi jati diri orang Mentawai.

Terminologi kata *Simagebak* dan *Simalilimai*, secara literate artinya tidak punya apa-apa. Masyarakat Mentawai menyebut untuk rumah tangga rentan pangan. Kepemilikan tanah dijadikan salah satu ukuran kerentanan atau ketidaktahanan pangan pada masyarakat di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Apabila rumah tangga tidak memiliki tanah maka rumah tangga yang dimaksud tidak akan memiliki kebun sagu, kebun keladi, kebun pisang, kebun kelapa dan kebun lainnya, serta tidak memiliki ternak babi. Bagi masyarakat Mentawai tanah memiliki fungsi untuk ; berkebun, beternak dan membangun rumah.

Makanan pokok masyarakat adalah sagu, keladi dan pisang, ketiga jenis makanan pokok tersebut tersedia dalam jumlah yang cukup. Temuan penelitian menunjukan ada perbedaan yang siginifikan untuk jenis makanan pokok antara masyarakat yang tinggal di Pulau Siberut dengan masyarakat yang tinggal di tiga pulau besar lainnya. Masyarakat Mentawai yang tinggal di Pulau Siberut menjadikan sagu sebagai makanan utama, kemudian diikuti oleh keladi dan pisang. Sedangkan masyarakat yang tinggal di tiga pulau lainnya; menempatkan keladi sebagai makanan utama, kemudian oleh pisang dan sagu. Salah seorang informan kepala desa di Goseinan mengatakan, rumah tangga di Goseinan sudah semakin berkurang mengkonsumsi sagu, ada rumah tangga yang mengkonsumsi sagu hanya satu kali sebulan ada rumah tangga yang sudah tidak mengkonsumsi sagu lagi, makanan mereka hanya keladi, pisang dan nasi. Hal ini menurut tokoh masyarakat lebih disebabkan karena tanaman sagu sudah semakin berkurang jumlahnya, dan usaha budi daya tanaman sagu di Pulau Sipora dan Pulau Sikakap tidak berkembang.

Pada tahun 1990, diperkirakan luas areal perladangan sagu yang dusahakan secara tradisional oleh masyarakat lebih kurang 14.839 hektar. Sistem pertanian yang dikembangkan masyarakat masih sangat sederhana, dan diperkirakan setiap keluarga inti (keluarga yang tinggal dalam satu *lalep*), hanya memerlukan 0,75 atau maksimal 1 hektar untuk lahan yang dikelola secara terbatas untuk memenuhi kebutuhan hidup satu keluarga. Proses pembukaan lahan dilakukan sederhana; melalui penebangan kayu dan membersihkan permukaan tanah yang akan ditanami dengan peralatan cangkul. Masyarakat Mentawai, secara tradisional tidak mengenal sistem pembakaran dalam pembukaan hutan yang akan dijadikan sebagai areal perladangan.

Pola pemamfaatan lahan yang biasa dilakukan masyarakat adalah sebagai berikut; lahan yang sudah dibersihkan pada mulanya ditanami dengan tanaman keladi dan pisang; apabila tingkat kesuburan tanah sudah mulai berkurang, maka secara bertaham areal perladangan tersebut akan ditanami dengan tanaman tua, seperti; tanaman buah-buahan dan tanaman-tanaman yang berorientas pasar seperti cengkeh. Pada beberapa perkampungan, terutama perkampungan di utara, masyarakat juga telah melakukan penanaman tanaman rotan dan manau. Dengan demikian secara berangsur-angsur kawasan hutan asli berubah menjadi hutan buatan.

c. Sagu, Keladi dan Pisang

Sagu merupakan makanan pokok orang Mentawai. Tanaman ini banyak terdapat dan tumbuh di sekitar pemukiman mereka. Sekarang mereka telah mulai menanam sagu sekitgar daerah pinggiran sungai yang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

berawa-rawa atau areal hutan milik suku (clan) mereka. Tanaman sagu merupakan tanaman yang; 1) Sesuai dengan ekosistem Kepulauan Mentawai yang sebagian besar merupakan daeran rawa-rawa yang dipengaruhi oleh aliran pasang naik dan pasang surut, dan menjadi mekanisme alami dalam penyediaan air. 2) Kebutuhan agronomi tanaman sederhana; 3) Panen tanaman sagu tidak tergantung musim dan juga tidak dibatasi oleh fase pertumbuhan tanaman; 4) bagian batang yang telah diambil hasilnya dapat disimpan selama beberapa minggu di dalam air tampa mengalami pembusukan yang berarti; 5) tanaman sagu juga bisa digunakan sebagai pakan ternak.

Pohon sagu yang telah dapat ditebang dan diolah menjadi tepung sagu apabila telah berumur 8 hingga 12 tahun. Setelah pohon sagu ditebang dan dipotong-potong menjadi empat bagian, kulit batangnya dilepas dengan alat pengungkit yang terbuat dari kayu pohon aren, lalu isinya dikikis dan ditumbuk dengan sebuah alat yang bernama *kuikuilo*. Disamping itu digunakan juga jenis kayu lain yaitu kayu *poula*, fungsinya sebagai pegangan yang diikat dengan rotan *madora.*

Isi sagu yang telah dikikis dan ditumbuk dengan *kuikuilo* kemudian diolah menjadi tepung sagu, dimana isi sagu yang telah dikikis dimasukkan ke dalam kotak kayu, dibawahnya terdapat saringan sagu *(karuk)* yang terbuat dari serat pangkal kelopak daun pohon kelapa. Kemudian isi sagu diinjak-injak dan diberi air yang diambil dari aliran sungai, sampai tepung yang halus terpisah dan ikut menetes bersama air ke bawah saringan. Cairan berwarna keputih-putihan itu dialirkan melalui sebuah talang yang dibuat dari kayu ke sebuah saringan lagi dan dari situ ke tempat penampungan yang terbentuk seperti sampan. Disitulah tepung sagu mengendap.

Setelah hampir 3 minggu tepung sagu diendapkan baru dapat dipungut dan dimasukkan ke dalam tabung *(tampin)* dengan tinggi kira-kira 1 meter yang terbuat dari daun sagu yang dianyam. Berat sebuah *tampin* sekitar 80 s/d 100 kg setelah diisi dengan tepung sagu. Pohon sagu dewasa rata-rata menghasilkan 8 sampai 10 tabung (tampin) tepung sagu dapat mencukupi kebutuhan *seuma* selama 2 sampai 3 bulan.

Ketersediaan pangan sagu dalam setiap rumah tangga lebih dari cukup. Menurut informan, mengolah batang sagu menjadi tepung sagu, saat sekarang hanya memerlukan waktu paling lama sepuluh hari.Kerja sepuluh hari akan dapat menghasilkan tepung sagu tujuh sampai delapan *tampin*. *Tampin* adalah alat tempat penyimpanan sagu secara tradisional, terbuat dari pelepah pahon sagu dan pinang). Satu *tampin* bisa memuat tepung sagu 80 Kg s/d 100 Kg. Artinya, apabila setiap rumah tangga mengolah pohon sagu, dengan tenaga kerja 2 atau 3 orang, selama sepuluh hari akan menghasilkan tepung sagu sebanyak 650 Kg sampai dengan 700 Kg, dan hasil tersebut sudah dapat mencukupi kebutuhan 5 sampai dengan 6 anggota rumah tangga 4 sampai 5 bulan. Artinya, kebutuhan pangan lokal, sagu, keladi dan pisang masih lebih dari cukup.

Penanaman keladi biasanya dilakukan di areal yang berada tidak jauh dari *uma* atau *sapou*. Mereka membuat semacam kolam-kolam kecil yang digenangi air, lalu ditanamlah bibit keladi. Lamanya proses mulai dari menanam hingga panen memakan waktu kurang lebih 4 bulan.

Keladi adalah makanan pokok disamping sagu. Keladi direbus lalu ditumbuk dengan *tutuduk* supaya halus dan kadangkala juga mereka campur dengan pisang rebus.Menanam tanaman keladi di beberapa tempat menjadi keharusan bagi masyarakat Mentawai. Rata-rata setiap rumah tangga memiliki tiga tempat kebun keladi. Tanaman Keladi/Talas adalah sumber makanan yang setiap hari dikonsumsi. Biasanya keladi atau talas direbus, kemudian ditumbuk dan dicampur dengan parutan kelapa, masyarakat Mentawai menyebut makakanan tersebut dengan sebutan *subbe*.

Disamping Keladi/Talas, setiap rumah tangga juga menanam tanaman ubi jalar dipekarangan rumah atau dikebun-kebun disekitar perkampungan, paling jauh jarak satu km. Di Kabupaten Kepulauan Mentawai terdapat 12 jenis keladi/talas. Dari 12 jenis tersebut, biasanya yang dikonsumsi masyarakat ada lima jenis. Menurut Informan, jenis kelasi/talas yang dibudidayakan masyarakat adalah keladi/talas lokal. Tanaman ubi jalar biasanya memerlukan waktu empat sampai lima bulan sejak ditanam baru bisa di panen. Menurut informan, jenis tanaman ubi jalar yang ada di Kabupaten Kepulauan Mentawai ada empat jenis (merah, kuning, putih dan biru), dan jenis yang banyak disukai masyarakat adalah ubi jalar biru. Biasanya, ubi jalar cukup direbus atau digoreng dan langsung bisas di konsumsi.

Pisang juga merupakan tanaman yang biasanya mereka konsumsi. Penanaman pisang ini mereka lakukan di sepanjang pinggiran sungai, anak sungai maupun di ladang. Pisang baru dapat diambil buahnya kira-kira setelah berumur 6 bulan. Selama sebelum panen kegiatan perawatan berupa penyiangan atau membuang rerumputan yang ada biasanya dilakukan oleh kaum perempuan. Rerumputan itu dibiarkan membusuk hingga menjadi pupuk bagi tanaman pisang tersebut.

Produksi pisang di Kabupaten Kepulauan Mentawai merata di setiap pulau. Jenis pisang lokal lebih banyak untuk dikonsumsi oleh setiap rumah tangga. Hal ini disebabkan karena pisang lokal, memiliki tandan kecil sehingga harga jual Rp 8.000 s/d Rp 10.000,- Dalam sepuluh tahun terakhir, masyarakat Mentawai sudah menanam pisang Medan, memiliki tandan dan buah besar.

5.1. Kesimpulan

a) Masyarakat Mentawai memiliki ketahanan pangan rumah tangga dan wilayah yang kuat (tinggi). Ketersediaan pangan lokal (sagu, keladi dan pisang) pada setiap rumah tangga, lebih dari cukup. Setiap rumah tangga pada masyarakat Mentawai, memiliki cadangan pangan dalam bentuk tepung sagu untuk empat sampai lima bulan. Satu rumah tangga hanya memerlukan 3 s/d 4 batang pohon sagu dalam satu tahun, pada hal setiap rumah tangga memiliki 40-50 batang pohon sagu yang layak untuk di panen. Hal yang sama berlaku untuk keladi dan pisang, setiap rumah tangga memiliki kebun keladi dan kebun pisang di dua atau tiga tempat, sehingga setiap rumah tangga bisa panen setiap hari.
b) Pengenalan beras kepada masyarakat Mentawai melalui berbagai program pembangunan, antara lain; program pembinaan masyarakat terasing dari Kementerian Sosial; program bantuan untuk keluarga miskin, sebagai makanan pokok. Pada rumah tangga tertentu, posisi beras sebagai makanan pokok mulai menggeser pangan lokal (sagu, keladi dan pisang) dan mulai terbangun sistem nilai baru dalam masyarakat beras modern sedangkan sagu, keladi dan pisang tradisional.
c) Ketergantungan masyarakat Mentawai akan pangan beras telah mengakibatkan semua desa di Kabupaten Kepulauan Mentawai rentan pangan beras, hal ini disebabkan terbatasnya aksesibilitas rumah tangga terhadap pangan beras (rantai distribusi yang sulit); ketidaksesuaian lahan (sebagian besar lahan di Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan lahan gambut, dengan kedalaman 2 sampai dengan 3 meter; teknis budidaya padi dan penanganan pasacapanen yang sangat jauh berbeda dengan pangan lokal.

5.2. Saran

a. Kebijakan dan program pengembangan pangan di Kabupaten Kepulauan Mentawai, sudah saatnya diarahkan pada pangan lokal (sagu, keladi dan pisang). Penyediaan bibit unggul dan pengenalan pupuk organik, agar hasil yang diperoleh setiap rumah tangga mengalami peningkatan. Kebijakan ini sejalan dengan amanah Undang-Undang tentang Pangan Nomor 18 tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi.

b. Sarana dan prasarana transportasi antar desa semakin dikembangkan di Kabupaten Kepulauan Mentawai. Keadaan ini akan memudahkan masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian. Sejalan dengan itu, kehadiran pasar tradisional sangat dibutuhkan oleh masyarakat, disamping untuk memasarkan hasil pertanian, pasar digunakan sebagai tempat interaksi antara sesama petani, petani dengan pedagang dan petani dengan pihak luar lainnnya.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Mentawai 2013. Pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai, 2014. Tua Pejat.

Erwin, (2015) Model Pemberdayaan Masyarakat Mentawai melalui Penguatan Kelembagaan Lokal di Pulau Siberut, Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Sosio-Konsepsia Kementerian Sosial RI, Volume 4 No. 02 Januari-April 2015.

Mewa Ariani. 2004. Analisis Keterkaitan dan Konsumsi Pangan Hewani, Monograp Series No. 24 Pusat Penelitian dan Pengembangan Sosial Ekonomi Pertanian Bogor, Agustus 2004, Hal. 67-83

Roger M.Kessing (1984) *Cultural Anthropology: A Contemporary Perspective*

Soekartawi .1986. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian untuk PengembanganPetani Kecil*. UI-Press. Jakarta.

----------,1995, Analisis Usahatani, UI Press, Jakarta

Siswono Yudo .Husodo. 2001. Kemandirian di Bidang Pangan Kebutuhan Negara Kita, Makalah Kunci pada Seminar Nasional Teknologi Pangan, Semarang, 9-10 Oktober 2001

Soedjana.T.D. 2009. Masalah dan Kebijakan Peningkatan Produk Peternakan untuk Pemenuhan Gizi Masyarakat. Prosiding Seminar Nasional Hari Pangan Sedunia XXVII. Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian, Jakarta. Bogor 27 Nopember 2007, hal.2-4

Swastika.D.K.S. 2004. Developing Maize For Imporving Poor Farmers Income in Indonesia. Shot Article. CGPRT Flash Vol. 2. No. 4, April 2004, hal. 45-53

WWF. 1990. Laporan Ekologi Pulau Siberut Kepulauan Mentawai.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

EVALUASI KERAWANAN BENCANA TANAH LONGSOR DI KAWASAN PERMUKIMAN DI DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS) CILIWUNG HULU

Indarti Komala Dewi[1)], dan Faisal Abdi[1)]

[1)] Prodi PWK – Fak.TeknikUniversitasPakuan

Email :indarti@unpak.ac.id

Naskah diterima :9 Maret 2017 Naskah direvisi : 10 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung Hulu merupakan daerah rawan bencana longsor dan gerakan tanah yang disebabkan oleh faktor kondisi fisik alaminya. Di lain pihak, pertumbuhan penduduk dan kegiatan perekonomian, menyebabkan perkembangan permukiman di DAS Ciliwung tidak terkendali dan rawan mengalami bencana tanah longsor. Upaya mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan melalui penilaian potensi kerawanan.Tujuan studi adalah mengevaluasi tingkat kerawanan bencana tanah longsor di kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu.Metoda yang digunakan adalah Sistem Informasi Geografis (SIG) dengan teknik tumpang susun peta menggunakan bantuan softwareArcMap 10.1. Hasil analisis menunjukkan 61,55% kawasan permukiman eksisting berlokasi pada kawasan rawan longsor dengan klasifikasi sedang sampai sangat tinggi. Kawasan permukiman existing yang lokasinya sudah sesuai sebesar 38,45%.

Kata kunci: *Rawanlongsor, Mitigasibencana, Permukiman*

PENDAHULUAN

Tanah longsor adalah salah satu bentuk dari gerakan massa tanah atau batuan, atau percampuran keduanya, yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng tersebut [6]. Massa tanah mengalami longsor karena terjadi gangguan pada kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng[3]. Salah satu faktor yang mempengaruhi Ketidakstabilan lereng adalah curah hujan [10]. Oleh karena itu peristiwa tanah longsor biasanya terjadi di tempat dengan lereng curam terutama pada saat musim hujan[12].

Meskipun tanah longsor merupakan gejala fisik alami, namun kegiatan penduduk yang tidak terkendali dalam memanfaatkan sumberdaya alam, dapat menjadi faktor penyebab lereng menjadi tidak stabil, yang mengakibatkan longsor. Kegiatan penduduk yang dapat memicu ketidakstabilan lereng antara lain: pemotongan lereng sehingga lereng kehilangan penyangga, pembangunan rumah dan bangunan yang berpotensi membebani lereng dan drainase yang terhambatsehingga terjadi peningkatan kandungan air pada lereng [6],[11].

Mengacu pada Peraturan Menteri PU no 22/PRT/M/2007,Daerah aliran sungai (DAS)Ciliwung Hulu dapat digolongkan dalam kriteria kawasan rawan tanah longsor Zona tipe B. Hal tersebut karena DAS Ciliwung Hulu merupakan daerah kaki pegunungan dengan ketinggian 300-2040m, sebagian besar (70%)dari wilayah DAS Ciliwung Hulu mempunyai kemiringan lereng lebih besar dari 25% dan curah hujan rata-rata lebih besar dari 3000 mm/tahun [2].Lereng dengan kemiringan lebih besar dari 40% sangat rentan terhadap tanah longsor[8] . Oleh karena itu semakin besar kemiringan lereng, maka semakin besar pula potensi tanah longsor.Demikian pula dengan jenis tanah, jenis tanah dengan permeabilitas rendah dapat menambah tingkat kerawanan terhadap tanah longsor. Tanah memiliki sifat menyerap air/permeabilitas, dalam hal ini jenis tanah yang memiliki permeabilitas tinggi dan tekstur yang gembur (berpasir) akan lebih tahan longsor dibandingkan dengan jenis tanah yang padat (debu dan liat), karena fraksi pasirmampu meloloskan air sehingga tidak berkumpul didalam tanah[1].

Populasi penduduk sangat berpengaruh terhadap kinerja DASCiliwung Hulu. Jumlah penduduk DAS Ciliwung Hulu dari tahun 2007 sampai dengan tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 2,34% pertahun. Pertumbuhan penduduk yang tinggi tersebut memicu perkembangan kawasan permukiman. Peningkatan kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu sangat pesat, selama kurun waktu 15 tahun (1992-2013), telah terjadi peningkatan 5(lima) kali lipat yaitu dari 3,96%[4]menjadi 20,37 %. Padahal salah satu faktor pembatas perkembangan kawasan permukiman adalah kondisi morphologi DAS Ciliwung Hulu.

Berdasarkan penelitian, lahan yang dapat digunakan untuk kawasan permukiman hanya ± 20% dari luas DAS Ciliwung hulu [4]. Hal tersebut menunjukkan terdapat penggunaan lahan permukiman di kawasan yang tidak sesuai untuk permukiman. Kondisi tersebut akan berpengaruh pada tingkat kerawanan tanah longsor. Penggunaan lahan permukiman pada lereng curam sangatrawanterhadap terjadinya tanah longsor. Hal tersebut karena daya resap air kedalam tanah akan tertahan akibat perkerasan tanah menggunakan semen, beton dan aspal sehingga air akan sulit diloloskan. Apabila sistem drainase tidak memadai, maka air akan tertahan pada lereng dan dapat menjadi pemicu tanah longsor.

Dalam Peraturan Menteri PU no 22/PRT/M/2007disebutkan bahwa keberadaan bangunan dikawasan dengan kemiringan lereng curam (>15%) hingga kemiringan lereng terjal (40%) dapat menganggu kestabilan lereng dan mengakibatkan terjadinya gerakan tanah. Terkait dengan hal tersebut, DAS Ciliwung Hulu yang sebagian wilayahnya mempunyai kemiringan lereng curam(>15%) hingga kemiringan lereng terjal(40%), mempunyai frekuensi bencana tanah longsor di kawasan permukiman cukup besar.Selama tahun 2013 terjadi bencana tanah longsor sebanyak 16 kali dan tahun 2014 terjadi bencana tanah longsor sebanyak 25 kali atau meningkat sebesar 56,25%.

Dampak bencana tanah longsor di kawasan permukiman dapat berupa korban jiwa ,kerusakan rumah, dan kerusakan sarana prasarana permukiman, karena tertimpa, tertimbun, dan terseret oleh material longsor. Dampak bencana tanah longsor tersebut tentunya tidak diinginkan. Untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor perlu dilakukan upaya mitigasi bencana.

Mitigasi bencana tanah longsor dapat dilakukan secara struktural dan non structural [5]. Dalam mengurangi dampak bencana, mitigasi non struktural dianggaplebih berkelanjutan karena memberikan keamanan dalam jangka panjang [5].Bentuk mitigasi non struktural untuk bencana tanah longsor antara lain adalah pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor. Pemetaan kawasan rawan bencana tanah longsor tersebut dimaksudkan sebagai antisipasi bagi pemerintah daerah maupun masyrakat yang berada di kawasan tersebut untuk mempersiapkan diri atau melakukan upaya-upaya agar tidak terjadi tanah longsor.

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk mengurangi dampak bencana tanah longsor, diperlukan kajian atau evaluasi kerawanan bencana tanah longsor di kawasan permukiman.Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara memetakan kawasan rawan tanah longsor. Evaluasi terhadap kerawanan bencana tanah longsor diharapkan mampu mengurangi dan mencegah kerugian yang lebih besar. Dengan demikian tujuan studi adalah mengevaluasi kerawanan bencana tanah longsor di kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu..

METODOLOGI

Lokasi penelitian adalah Daerah aliran sungai (DAS) Ciliwung Hulu. Meliputi 6 kecamatan, 2 kecamatan di Kota Bogor yaitu : sebagian kecil Kecamatan Bogor Timur dan Kecamatan Bogor Selatan. Sisanya 4 kecamatan di Kabupaten Bogor yaitu :KecamatanCiawi, Kecamatan Cisarua, Kecamatan Megamendung dan sebagian kecil Kecamatan Sukaraja.

Secara geografis wilayah penelitian terletak pada koordinat 106°49'34" - 107°00'26"Bujur Timur (BT) dan 6°37'23" - 6°46'11"Lintang Selatan (LS). Luas wilayah DAS Ciliwung Hulu adalah ±15.160,69 ha. Orientasi wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

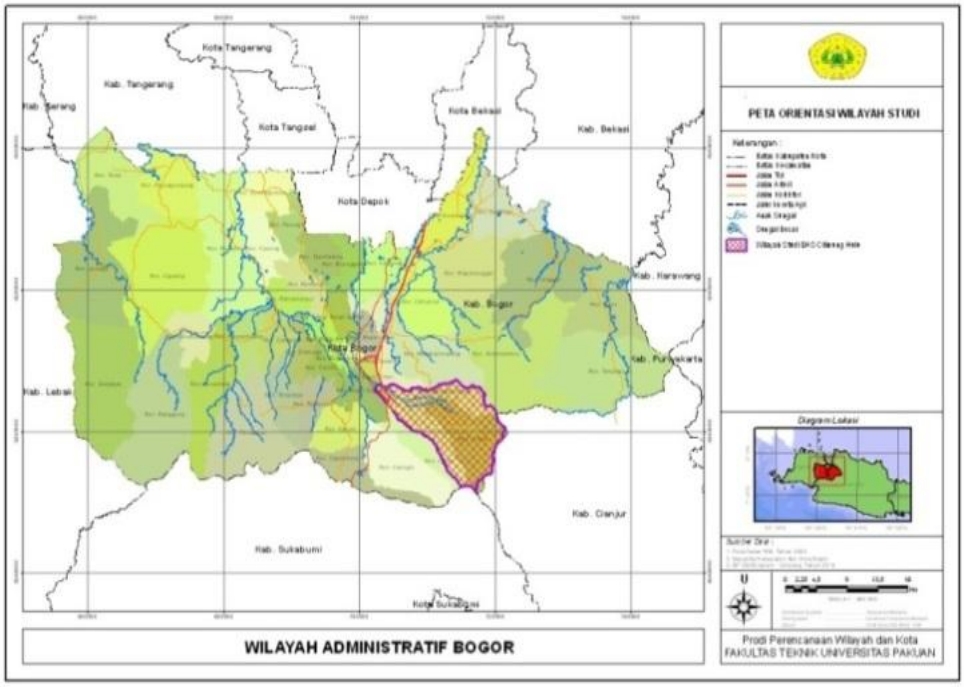

Gambar.1 Orientasi Wilayah Studi

Data yang digunakan terdiri atas: peta DAS Ciliwung Hulu skala 1:25.000 ; peta Kemiringan Lereng skala 1:25.000; peta Curah Hujan skala 1:250.000; peta Penggunaan Lahan Permukiman Eksisting tahun 2013 skala 1:25.000 ;peta Geologi skala 1:100.000; peta Tanah skala 1:250.000; Peta Sungai 1:25.000: dan data Bencana Tanah Longsor tahun 2013 dan tahun 2014 skala 1:25000.

Analisis menggunakan metoda kuantitatif dan kualitatif. Metoda kuantitatif menggunakan analisis SIG (*Sistem Informasi Geografis*). Parameter analisis SIG untuk evaluasi kerawanan bencana tanah longsor menggunakan Peraturan Menteri PU No. 22/PRT/M/2007tentang Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor; dan SK Menteri Pertanian No: 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung, serta beberapa hasil kajian([3] Faizana, 2015), ([9] Mubekti, 2008), ([7] Izhom, 2012)yang berkaitan dengan penentuan parameter tingkat kerawanan tanah longsor.Selanjutnya parameter kawasan rawan tanah longsor dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1 Parameter Kawasan Rawan Tanah LongsorDAS Ciliwung Hulu

No	Parameter	Bobot	Nilai Ter tinggi	Nilai Ter Rendah	NKB Tinggi	NKB Ren dah
		[a]	[b]	[c]	[a x b]	[a x c]
1	Kemiringan Lahan	3	5	1	15	3
2	Curah Hujan	2	5	4	10	8
3	Penggunaan Lahan	2	5	1	10	2
4	Satuan Geologi	2	5	1	10	2
5	Permeabilitas Tanah	1	5	1	5	1
6	Kedalaman Tanah	1	4	3	4	3
7	Kerapatan Sungai	2	5	1	10	2
8	Bekas Longsor Lama	2	5	1	10	2
	Jumlah				74	23

Sumber :SK Menteri Pertanianan No: 837/Kpts/Um/11/1980 tentang Kriteria Dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung; Peraturan Menteri PU No. 22 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Kawasan Bencana Longsor; ([3] Faizana, 2015); ([9] Mubekti, 2008); ([7] Izhom, 2012).

ISBN : 978-602-73463-1-4

Setiap parameter diberi bobot yang terdiri atas tinggi (T) =3, sedang (S) =2, dan rendah (R) =1 .Semakin tinggi bobot, menunjukkan parameter tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap potensi longsor.Selanjutnya setiap parameter diberi nilai mulai dari sangat rendah (SR) nilai =1 sampai sangat tinggi (ST) nilai =5. Nilai setiap parameter menunjukkan besar atau kecil pengaruh dari masing-masing parameter terhadap potensi tanah longsor. Hasil perkalian bobot dengan nilai adalah skor. Skor yang tertinggi adalah 15 dan yang terendah adalah 1. Jumlah kelas ditetapkan 5(lima) mulai dari sangat rendah (SR) sampai sangat tinggi (ST). Hasil perhitungan menunjukkan skor tertinggi 74 dan skor terendah 23. Nilai interval dihitung berdasarkan skor tertinggi dikurangi skor terendah dibagi 5 (lima).Selanjutnya berdasarkan hasil perhitungan diperoleh tingkat kerawanan tanah longsor sebagai berikut :

Sangat Tinggi (ST) = 63,80 – 74,00;
Tinggi (T)= 53,60-63,70;
Sedang (S) =43,40-53,70;
Rendah (R) = 33,20-43,50;
Sangat rendah(SR) = 23,00-33,10.

Analisis selanjutnya adalah kesesuaian antara kawasan permukiman dengan tingkat kerawanan tanah longsor . Dalam hal ini digunakan standar teknis permukiman yang berpedoman pada Peraturan Menteri PU No. 41/PRT/M/ 2007 tentang KriteriaTeknis Kawasan Budidaya.

Perangkatlunak yang digunakanuntuk menganalisis tingkat kerawanan tanah longsor adalah ArcMap 10.1. Dalam hal ini dilakukan tumpang tindih (*overlay*)beberapa peta yang merupakan parameter kawasan rawan tanah longsor. Peta yang di tumpang tindihkan adalah : peta kemiringan lereng, peta curah hujan, peta penggunaan lahan, peta satuan geologi, peta permeabilitas tanah, peta kedalaman tanah, peta sungai, dan peta bencana tanah longsor. Selanjutnya untuk interpretasi hasil digunakan metoda kualitatif deskriptif berdasarkan kondisi fisik permukiman di DAS Ciliwung Hulu.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Luas kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu tahun 2013 adalah 3.088,74 ha atau ± 20,37% dari luas DAS Ciliwung Hulu. Sebagian besar berlokasi di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung. Kawasan permukiman tidak hanya menempati daerah dengan lereng landai, tetapi juga menempati daerah dengan lereng curam dan sangat curam. Kemiringan lereng sangat berpengaruh terhadap kerawanan bencana tanah longsor.Hal tersebut terlihat dari banyaknya kejadian tanah longsor di dua kecamatan tersebut.

Hasil analisis terhadap kerawanan bencana tanah longsor di kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu menunjukkan tingkat kerawan tanah longsor di kawasan permukiman di DAS Ciliwung Hulu terdiri atas: rendah(R), sedang(S), tinggi (T) dan sangat tinggi (ST). Sebagian besar (61,55 %) kawasan permukiman berada pada tingkat rawantanah longsor sedang(S) sampai tinggi (T). Tidak ditemukan tingkat kerawanan tanah longsor sangat rendah (SR). Hal ini menunjukkan bahwa kawasan permukiman di DAS CiliwungHulu berada pada kawasan rawan bencana tanah longsor. Selanjutnya lihat Tabel 2 dan Gambar 2

Tabel 2 Tingkat Kerawanan Tanah Longsor di Kawasan Permukiman Eksisting di DAS Ciliwung Hulu

No	Tingkat Kerawanan TanahLongsor	Luas (ha)	%
1	Sangat Rendah	0	0
2	Rendah	1.187,86	38,46
3	Sedang	1.755,6	56,84
4	Tinggi	142,33	4,61
5	Sangat Tinggi	2,95	0,10
Luas Kawasan Permukiman DAS Ciliwung Hulu		3.088,74 (20,37%)	100

Sumber: Hasil Analisa

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

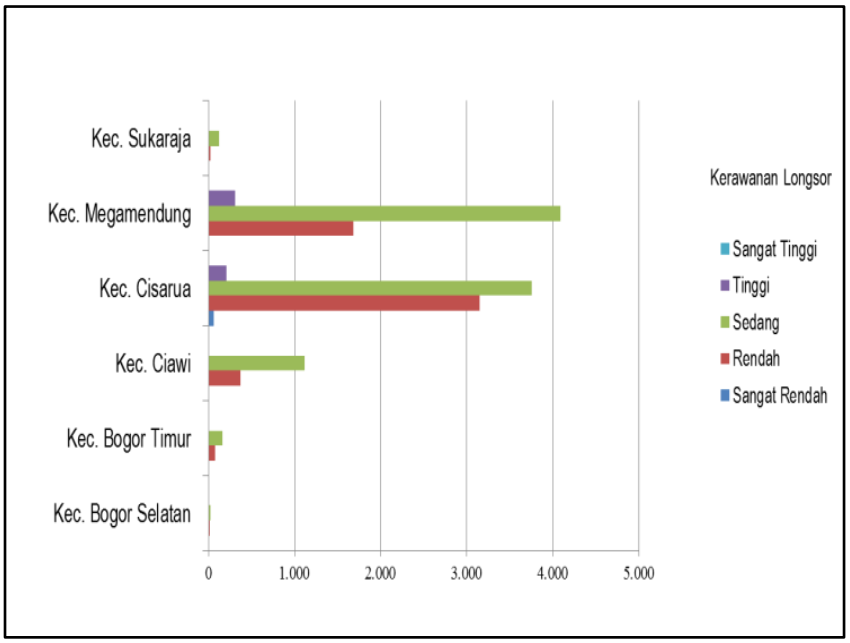

Gambar 2. Tingkat Kerawanan Tanah Longsor Di Setiap Kecamatan di DAS Ciliwung Hulu

Kawasan permukiman dengan tingkat kerawanantanah longsor rendah (R) meliputi 38, 46 % dari luas kawasan permukiman. Faktor dominan yang berpengaruh adalah : Kemiringan lereng yang landai (8-15%); Curah hujan yang tinggi; Satuan geologi Qvpo (endapan batuan gunung api tua – vulkanik tua) kerawanan tanah longsor rendah; permeabilitas moderat; kerapatan sungai sedang (1-2,5 km^2/grid) yang berpotensi longsor pada tebing sungai. Kawasan rawan tanah longsior rendah sebagian kecil berlokasi di Kecamatan Megamendung, dan Kecamatan Ciawi, serta sebagian besar Kecamatan Cisarua.

Kawasan permukiman dengan tingkat kerawanantanah longsor sedang (S), cukup besar meliputi 56,84% dari luas kawasan permukiman. Potensi tanah longsor dikawasan ini mengancam kawasan permukiman yang berada pada lereng yang agak curam hingga curam dan yang berada dekat dengan sungai. Faktor-faktor dominan yang berpengaruh adalah :kemiringan lereng sebagian besar agak curam (15-25%); curah hujan tinggi(>3000mm/tahun); penggunaan lahan permukiman; satuan geologi Qvk(Breksi dan lava Gunung Kencana dan Gunung Limo – vulkanik muda); kerawanan tanah longsor sedang; permeabilitaslambat; kerapatan sungai dominan halus (>2.5 km^2/grid). Kawasan rawan tanah longsor sedang sebagian besar berlokasi di kecamatan Ciawi, dan Kecamatan Megamendung, serta sebagian kecil di Kecamatan Cisarua.

Kawasan permukiman dengan tingkat kerawanantanah longsor tinggi (T) meliputi 4,61 % dari luas kawasan permukiman. Potensi tanah longsor dikawasan ini mengancam permukiman khususnya yang berada pada lereng yang curam dan permukiman yang berada dekat dengan sungai. Faktor-faktor dominan penyebab tanah longsor adalah :kemiringan lereng curam (25-40%); curah hujantinggi(>3000mm/tahun); penggunaan lahan permukiman; Satuan geologi Qvk(Breksi dan lava Gunung Kencana dan Gunung Limo – vulkanik muda); kerawanan tanah longsor sedang; kerapatan sungai halus (>2.5 km^2/grid); bekas longsoran lama dominan, dan berpengaruh sangat tinggi pada radius 0-200 m dari lokasi tanah longsor. Sebagian besar berlokasi di Kecamatan Cisarua dan Kecamatan Megamendung.

Kawasan permukiman dengan tingkat kerawanan tanah longsor sangat tinggi (ST) meliputi 0,1% dari luas kawasan permukiman. Potensi tanah longsor dikawasan ini mengancam kawasan permukiman yang berada pada lereng yang curam dan permukiman yang berada dekat dengan sungai. Faktor-faktor dominan penyebab tanah longsor adalah: kemiringan lereng yang curam (25-40%); curah hujan yang tinggi (>3000 mm/tahun); penggunaan lahan permukiman; satuan geologi Qvk(Breksi dan lava Gunung Kencana dan Gunung Limo – vulkanik muda); kerawanan tanah longsor sedang; kerapatan sungai halus yaitu >2,5 km^2/grid ; terdapat bekas longsoran lama yang berpengaruh sangat tinggi pada radius 0-100m dari lokasi longsor. Selanjutnya lokasi penyebaran tingkat kerawanan tanah longsor diperlihatkan Gambar 3.

ISBN : 978-602-73463-1-4

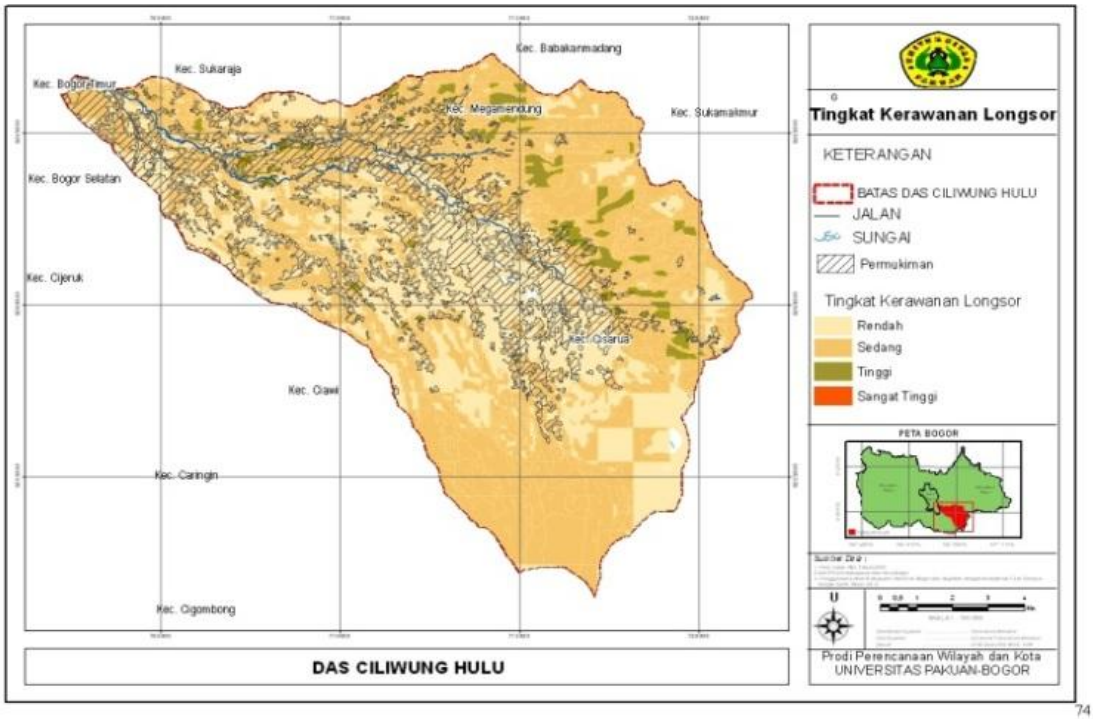

Gambar 3. Lokasi Penyebaran tingkat Kerawanan Tanah Longsor Kawasan Permukiman di DAS Ciliwung Hulu

Berdasarkan hasil analisis terlihat bahwa, kerawanan longsor tinggi (T) dan sangat tinggi(ST) ditandai oleh adanya faktor-faktor yang membuat gangguan kestabilan pada tanah/batuan penyusun lereng. Selanjutnya hal tersebut membuat kondisi suatu lereng menjadi rentan atau siap bergerak ([8] Karnawati, 2007).Kawasan rawan tanah longsor sangat tinggi (ST) tersebut berlokasi di Kecamatan Megamendung dan Kecamatan Cisarua. Kedua kecamatan tersebut selama tahun 2013-2014 mengalami kejadian bencana tanah longsor dengan frekuensi yang cukup besar.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap tingkat kerawanan tanah longsor, maka lokasi kawasan permukiman eksisting dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu: kawasan permukiman yang sesuai; kawasan permukiman yang tidak sesuai dan kawasan permukiman yang sesuai tapi bersyarat.

Kawasan permukiman yang sesuai seluas 1.187,86 ha (38,46%). Artinya penggunaan lahan permukiman eksisting telah sesuai terhadap klasifikasi bahaya tanah longsor, yaitu permukiman berlokasi pada kawasan dengan tingkat kerawanan tanah longsor rendah. Permukiman tersebut telah sesuai berdasarkan acuan kriteria teknis kesesuaian lahan untuk permukiman antara lain berada dikawasan dengan kemiringan lereng datar sampai landai (0-15%). Kawasan permukiman yang sudah sesuai tersebar di seluruh kecamatan di DAS Ciliwung Hulu, terutama di Kecamatan Cisarua.

Kawasan permukiman yang tidak sesuai, seluas 189,89 ha (6,15%). Artinya penggunaan lahan permukiman berlokasi pada kawasan dengan tingkat kerawanan tanah longsor sedang, tinggi, hingga sangat tinggi.Selain itu lokasi permukiman tersebut tidak sesuai berdasarkan kriteria teknis kesesuaian lahan permukiman.Permukiman yang tidak sesuai berlokasi pada lahan dengan kelerengan agak curam, curam hingga sangat curam.Permukiman tidak sesuai tersebar di Kecamatan Ciawi, Cisarua, Megamendung dan Sukaraja.

Kawasan permukiman yang sesuai bersyarat seluas 1.710,99 ha (55,39 %). Artinya permukiman dapat berlokasi pada lahan dengan tingkat kerawanan tanah longsor sedang.Namun kawasan permukiman tersebut berlokasi pada lereng datar hingga landai (0-15%), sehingga masih dapat diusahakan dengan beberapa persyaratan.Oleh karena itu agar permukiman yang sesuai bersyarat saat ini aman dari bahaya longsor perlu mitigasi struktural melalui rekayasa teknologi.Kawasan permukiman yang sesuai bersyarat ini berlokasi tersebar di seluruh Kecamatan di DAS Ciliwung Hulu. Selanjutnya lihatTabel 3 dan Gambar 4

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 3. Penyebaran Kesesuaian Kawasan Permukiman Eksisting di DAS Ciliwung Hulu

Kecamatan	Kawasan Permukiman Eksisting					
	Sesuai		Tidak Sesuai		Bersyarat	
	ha	%	ha	%	ha	%
Bogor Selatan	11,22	32,90	0	0	22,88	67,10
Bogor Timur	20,82	12,93	0	0	140,23	87,06
Ciawi	104,91	37,25	0,05	0,02	176,63	62,72
Cisarua	881,73	55,05	83,77	5,23	635,9	39,70
Mega Mendung	168,82	17,04	103,29	10,43	718,22	72,51
Sukaraja	0,2	1,01	2,75	13,85	16,9	85,14
DAS Ciliwung Hulu	1187,7	38,45	189,86	6,15	1710,76	55,39

Sumber : Hasil analisa

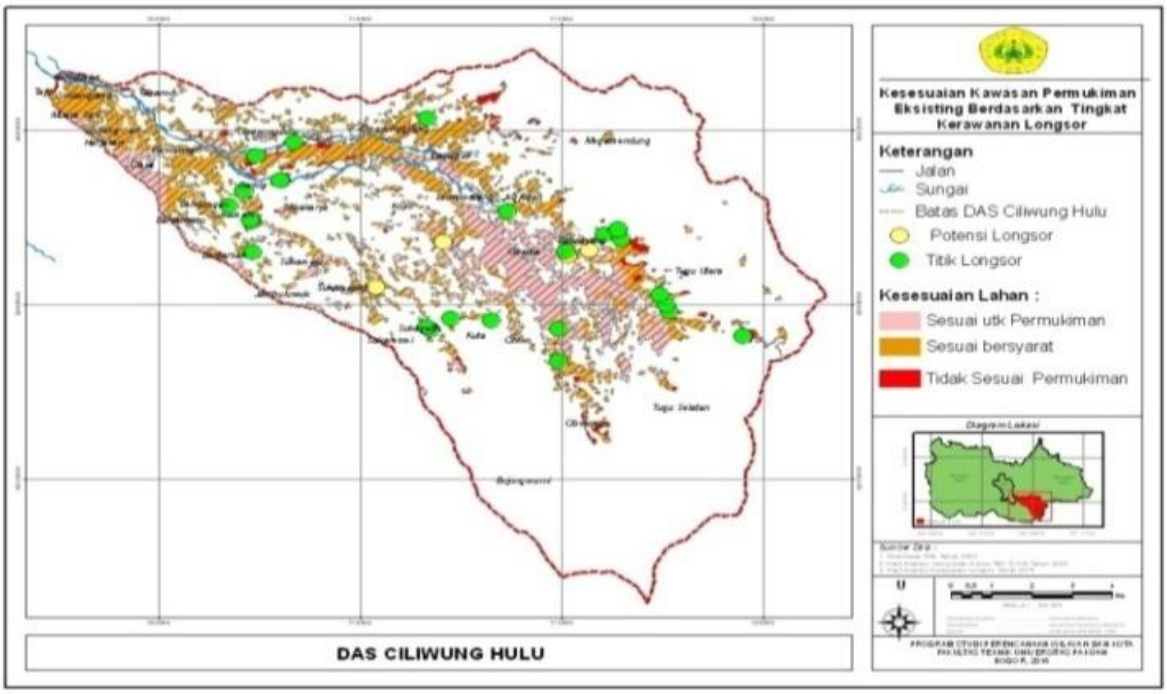

Gambar 4 Kesesuaian Permukiman Berdasarkan Tingkat Kerawanan Longsor

KESIMPULAN

Hasil analisis menunjukkan sebagian besar (61,55%) kawasan permukiman eksisting berlokasi pada kawasan rawan tanah longsor dengan klasifikasi sedang(S) sampai sangat tinggi(ST). Berdasarkan kesesuiannya, hanya 38,45% kawasan permukiman eksisting yang lokasinya sudah sesuai, sisanya sebesar 55, 39 % adalah sesuai bersyarat. Artinya kawasan permukiman eksisting yang sesuai bersyarat tersebut memerlukan mitigasi struktural melalui rekayasa teknologi, agar aman dari bahaya longsor. Permukiman eksisting yang berlokasi di kawasan tidak sesuai selain memerlukan mitigasi struktural juga memerlukan penelaahan lebih mendalam tentang perijinannya, karena berindikasi lokasi permukiman tersebut tidak sesuai berdasarkan kriteria teknis kesesuaian lahan permukiman.

Berbagai mitigasi struktural yang dianjurkan antara lain pembuatan teras-teras agar tebing menjadi relatif lebih landai; penguatan kaki tebing di beberapa tempat menggunakan bronjong atau tanggul penahan

longsor, membuat drainase agar air tidak tertahan di lereng; melakukan pemadatan tanah di sekitar bangunan dan memperkuat fondasi bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Hanafiah, A. K. 2007. Dasar – dasar Ilmu Tanah. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

[2] Dewi, K. d. 2015. Evaluation of Land Use Change in the Upstream of Ciliwung Watershed to Ensure Sustainability of Water Resources. Asian Journal of Water, Environment and Pollution, Vol 12 no 1, 11–19.

[3] Faizana, A. N. 2015. Pemetaan Risiko Bencana Tanah Longsor Kota Semarang. Jurnal Geodesi Undip Vol 4 no 1, 223-234.

[4] I.K Dewi, S. S. 2010. Sistem Informasi Geografis untuk Lokasi dan Alokasi Kawasan Permukiman di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung Hulu Kabupaten Bogor. Jurnal Komputasi vol 7 no 1, 17-23.

[5] I.K. Dewi, d. Y. 2016. Mitigasi Bencana Pada Masyarakat Tradisional Dalam Menghadapi Perubahan Iklim Di Kampung Naga Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Jurnal. Manusia Dan Lingkungan.Vol 23 no 1, 1-7.

[6] Ishak, S. 2011. Memetakan Gerakan Tanah di Jawa Barat. Jurnal Penanggulangan Bencana,Vol 2 no 2, 24-33.

[7] Izhom, B. 2012. Kerentanan Wilayah Tanah Longsor Di Daerah Aliran Ci Catih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Depok: Skripsi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Departemen Geografi. Universitas Indonesia.

[8] Karnawati, D. 2007. Mekanisme Gerakan Massa Batuan Akibat Gempabumi; Tinjauan dan Analisis Geologi Teknik. Yogyakarta: Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Jurusan Teknik Sipil dan Jurusn Teknik Geologi.

[9] Mubekti, d. F. 2008. Mitigasi Daerah Rawan Tanah Longsor Menggunakan Teknik Pemodelan Sistem Informasi Geografis; Studi Kasus: Kecamatan Sumedang Utara Dan Sumedang Selatan. Jurnal Teknik. Lingkungan vol 9 no 2, 121-129.

[10] Nio, A. 2008. Appraisal Of Landslides Due To Rainfall. Jurnal Teknik SipilVol 4 no 1.

[11] Triutomo, B. M. 2007. Pengenalan Karakteristik Bencana Dan Upaya Mitigasinya Di Indonesia edisi II. Jakarta: Pelaksana Harian Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana.

[12] V.G.M. Pangemanan, A. T. 2014. Analisis Kestabilan Lereng Dengan Metode Fellenius (Studi Kasus: Kawasan Citraland). Jurnal Sipil StatikVol 2 no 1, 37-46.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PERANAN TANAH ULAYAT SEBAGAI *LAND BANKING* DALAM PERKEMBANGAN KOTA BUKITTINGGI

Ira Safitri Darwin[1)], Haryo Winarso[2)], Denny Zulkaidi[3)]

[1)]Program Studi Doktoral Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan/PWK/ITB
[2,3)] Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengambilan Kebijakan/PWK/ITB

Email :[1)]pithok.vie@gmail.com, [2)]haryowinarso@pl.itb.ac.id, [3)]denny@pl.itb.ac.id

Naskah diterima :23 Maret 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 24 Maret 2017

ABSTRAK

Kota Bukittinggi merupakan kota kedua terpenting di Provinsi Sumatera Barat setelah Kota Padang dengan luas 2.524 ha. Kota Bukittinggi memiliki permasalahan yang sangat kompleks, terutama dalam ketersediaan lahan.Terbatasnya lahan membuat perkembangan Kota Bukittinggi merembet ke arah luar (hinterland) dengan menggunakan tanah ulayat yang telah diperjualbelikan. Tanah ulayat di Minangkabau pada hakekatnya merupakan land banking bagi generasi selanjutnya yang dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan ladang. Sebagai land banking lahan akan terus berkurang ketika anak cucu terus berkembang. Fenomena saat ini memperlihatkan pergeseran pemanfaatan dan kepemilikan tanah ulayat, dari lahan tidak terbangun menjadi lahan terbangun, dari milik kaum, suku, nagari menjadi milik individu. Tujuan dari penelitian adalah mengkaji sejauh mana peranan tanah ulayat dalam perkembangan Kota Bukittinggi, khususnya ke arah Selatan yang pesat pertumbuhannya (Kecamatan Banuhampu). Kecamatan Banuhampu dengan cepat meng"kota", sangat kontras dengan alasan penolakan terhadap PP No. 84 Tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi.Penelitian ini menggunakan metode pendekatan interview dan literature review, sedangkan metoda analisa yang digunakan adalah metoda komparatif dan eksploratif yang bertujuan membandingkan dan mengeksplorasi peranan tanah ulayat sebagai land banking dalam perkembangan Kota Bukittinggi .Hasil penelitian menunjukan: 1) Peranan tanah ulayat sangat tinggi dalam proses pengkotaan ke arah luar, walaupun secara legal gagal terwujud, 2) tanah ulayat semakin berkurang dan belum ada solusi untuk land banking kedepannya, 3) perembetan kota ke arah luar berdampak pada pengembangan ekonomi Bukittinggi dan masyarakat setempat, 4) Peranan penghulu dalam mempertahankan tanah ulayat sebagai landbanking semakin berkurang seiring tidak ketatnya peralihan tanah pusaka dan pudarnya budaya matrilineal.

Kata kunci: *Tanah Ulayat, Land Banking, Bukittinggi*

PENDAHULUAN

Bukittinggi sebagai kota kedua di Sumatera Barat memiliki pertumbuhan ekonomi dan penduduk yang cukup pesat (walaupun luas kotanya kecil). Tercatat ditahun 2014 laju pertumbuhan ekonomi Bukittinggi mencapai 6,14 % dan tahun 2015 jumlah penduduknya mencapai 122.621 jiwa. Fenomena meningkatnya penduduk perkotaan di Indonesia, terjadi juga di Sumatera Barat dan Kota Bukittinggi. Tahun 2015 Jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan Sumatera Barat mencapai 43,86% dari total penduduk atau sekitar 2.278.914 jiwa. Sementara penduduk yang tinggal di Kota Bukittinggi telah merambat ke arah luar kota (Sumatera Barat dalam Angka Tahun 2015 dan 2016).

Dari segi jumlah penduduk, Kota Bukittinggi berhasil bertransformasi dari kota kecil ke kota menengah. Namun dari luas lahan, Kota Bukittinggi gagal melakukan perluasan secara legal setelah PP No. 84 tahun 1999 tentang perluasan Kota Bukittinggi dari 2.524 ha menjadi 14.529,90 ha ditolak masyarakat Kabupaten Agam karena disinyalir cacat hukum, merupakan daerah potensial penyumbang APBD di Kabupaten Agam, dan demi menjaga budaya dan tradisi masyarakat setempat dari pengaruh modernisasi kota[16]. Kondisi yang sangat kontras dengan fakta di lapangan. Secara teoritis, ketika luas lahan di kota semakin terbatas, jumlah penduduk

dan pembangunan terus meningkat, maka akan mendorong perkembangan kota ke arah luar/ *hinterland* (Zulkaidy, 1991). Pengembangan kota secara legal tidak terjadi, tapi proses pengkotaan/ perembetan ke arah luar terus terjadi. Proses perambatan kota hampir 90% menggunakan tanah ulayat yang berfungsi sebagai *landbanking* di Kabupaten Agam, tepatnya pada Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Perbatasan Kota Bukittinggi dengan Kabupaten Agam. Akibatnya alih fungsi lahan pertanian tidak dapat dihindari.

Pada prinsipnya lahan cadangan/ *land banking*akan habis ketika dipakai terus menerus tanpa dicarikan lahan penggantinya. Tanah ulayat nagari biasanya digunakan untuk membangun fasilitas pemerintahan, pelayanan umum, dan dihitung sebagai aset nagari. Demikian juga dengan tanah ulayat kaum/ suku. Ketika jumlah penduduk dalam suatu kaum/ suku bertambah banyak, maka tanah ulayat akan semakin sedikit karena dibagikan kepada masyarakat adat yang membutuhkan lahan. Secara teoritik, lahan memiliki 3 (tiga) fungsi, yaitu fungsi social, fungsi ekonomis, dan fungsi ekologis[3]. Sementara tanah ulayat hanya memiliki fungsi sosial dan fungsi ekonomi (Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008).Fungsi sosial tanah ulayat diwujudkan sebagai cadangan lahan dan fungsi ekonomi diwujudkan dalam pemanfaatan tanah yang bernilai ekonomis (hasil pertanian/ ladang).

Tanah ulayat pada dasarnya dapat digunakan untuk pembangunan, tidak hanya sebagai *land banking* yang diperuntukan sebagai sawah dan ladang. Tanah ulayat yang terkena kegiatan pembangunan akan mendapatkan ganti rugi sesuai dengan UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum. Ganti rugi tanah ulayat diberikan dalam bentuk tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan. Tanah ulayat di Provinsi Sumatera Barat terdiri atas; 1) tanah ulayat rajo, 2) tanah ulayat nagari, 3) tanah ulayat suku, 4) tanah ulayat kaum (Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008). Tanah ulayat merupakan harta pusako tinggi yang hakekatnya tidak boleh diperjualbelikan, kecuali ada empat hal yang menyangkut aib, yaitu; 1) *Rumah gadang katirisan* (rumah gadang ketirisan), 2) *Mayik tabujua ditangah rumah* (mayat terbujur di tengah rumah), 3) *Gadih gadang tak balaki* (anak gadis belum kawin), dan 4. *Membangkik batang tarandam* (menegakkana gelar pusaka) (Achir, 2011). Saat ini justru banyak tanah ulayat kaum/ suku yang diperjualbelikan (Asri, 2001; Yulis, 2011; Irza, 2015).

Tanah Ulayat memiliki kedudukan sebagai cadangan lahan/ *landbanking* bagi anak cucu masyarakat adat (Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008). Jika dibandingkan dengan teori mengenai bank tanah, tanah ulayat memiliki fungsi ke 2 dan 4 dari teori berikut, yaitu 1) penghimpun tanah atau pencadangan tanah (*land keeper),* 2) pengamanan tanah untuk berbagai kebutuhan pembangunan di masa yang akan datang (*land warrantee),* 3) pengendalian tanah (*land puchaser),* 4) penditribusian tanah untuk berbagai keperluan pembangunan *(land distributor)* (Dijk, etc, 2005 dalam Sungkana 2015).

Peranan tanah ulayat (*in* dan *out city*) terhadap Perkembangan Kota Bukittinggi telah banyak yang mengkaji, baik dari sisi pemilik lahan dan penghulu; maupun dari ilmu sejarah dan politik. Makalah ini bertujuan menilai peranan tanah ulayat sebagai *land banking* didaerah *hinterland* Kota Bukittinggi (*rural-urban)* dalam perspektif yang berbeda, yaitu dari perspektif ruang dan perspektif pembeli lahan (pemilik modal/ kapitalis). Sebagaimana diketahui latar belakang peneliti akan mempengaruhi hasil penelitian[4]. Sasaran dari penelitian ini adalah: 1) Diketahuinya sejauh mana peranan tanah ulayat dalam perkembangan Kota Bukittinggi dari waktu–ke waktu 2) Teridentifikasinya preferensi pemilik modal terhadap tanah ulayat yang dijual dan penyebab tanah ulayat terjual dari pengalaman pemilik modal 3) Teridentifikasinya seberapa besar perubahan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun dan pengaruh alih fungsi lahan bagi perkembangan Kota Bukittinggi, 4) Teridentifikasinya peranan penghulu adat dalam mempertahankan tanah ulayat sebagai *land banking* bagi anak cucunya.

Makalah ini disajikan dalam pendahuluan; metoda analisa; hasil dan pembahasan; dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan dipaparkan dalam empat bagian, yaitu: 1) peranan tanah ulayat dalam perkembangan nagari dan Kota Bukittinggi, 2) Preferensi pemilik modal terhadap tanah ulayat yang akan dibeli dan factor pelepasan tanah ulayat, 3) Pengaruh alih fungsi lahan terhadap perkembangan Kota Bukittinggi dan besaran alih fungsi lahan, 4) Peranan penghulu dalam mempertahankan tanah ulayat.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan interview danliterature review untuk mendapatkan data yang dibutuhkan. Interview dilakukan dengan wawancara terbatas jarak jauh dengan para pemilik modal (pembeli tanah ulayat) melalui sosial media (whatsapp). Metoda analisa yang digunakan meliputi metoda analisa komparatif dan eksploratif, dengan tujuan membandingkan dan mengeksplorasi peranan tanah ulayat sebagai land banking dalam perkembangan Kota Bukittinggi berdasarkan perspektif ruang pemilik modal/ pembeli tanah ulayat. Metoda komparatif digunakan untuk membandingkan hasil penelitian penulis dengan hasil penelitian

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

sebelumnya, sehingga bisa memperkaya keilmuan dari objek yang diteliti [5] dan terlihat perkembangan fenomena yang berkembang di lapangan.

Wilayah penelitian berada di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam yang terdiri dari 7 (tujuh) nagari, yaitu nagari Cingkariang, Kubang Putiah, Ladang Laweh, Padanglua, Pakan Sinayan, Sungai Tanang, dan Taluak IV Suku. Lokasi penelitian tepatnya berada pada Koridor Jalan Raya Bukittinggi-Padanglua (jalan menuju Kota Padang) sepanjang 4,73 km dengan luas wilayah 94,6 ha. Nagari yang dilalui koridor jalan utama meliputi Nagari Taluak IV Suku, Padang Laweh, Padanglua, dan Cingkariang.Daerah ini dipilih karena bagian dari Kawasan Strategis Kabupaten (KSK) Perbatasan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam serta bagian dari KSK Poros Barat-Timur yang cepat perkembangannya.Wilayah penelitian ini dapat dilihat pada gambar 1.

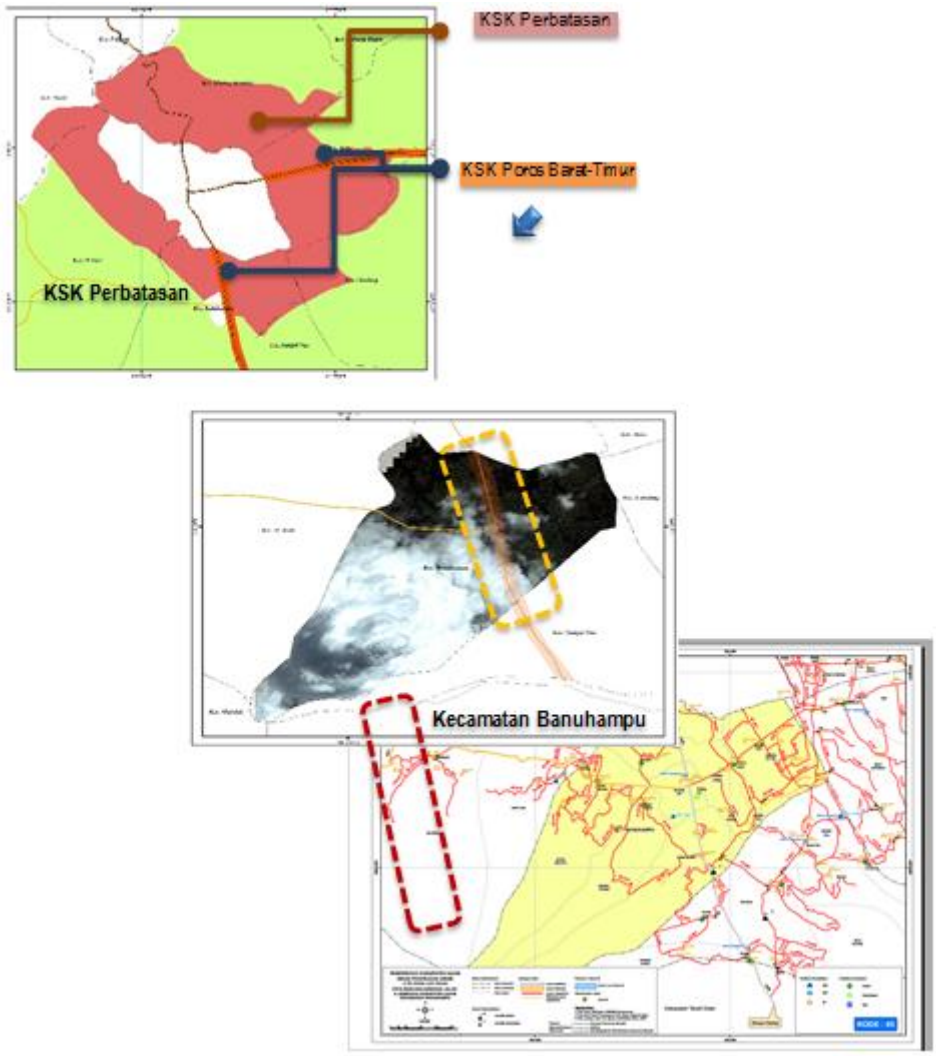

Gambar 1 Wilayah Penelitian

Definisi operasional dari kata kunci penelitian ini meliputi:

1) Tanah ulayat adalah bidang tanah pusaka beserta sumber daya alam yang ada di atasnya dan didalamnya diperoleh secara turun menurun merupakan hak masyarakat hukum adat di Provinsi Sumatra Barat (Perda Provinsi Sumbar No. 16 Tahun 2008)
2) *Land banking is the structural acquisition and temporary management of land in rural area by an impartial state agency with the purpose to redistribute and/or lease out this land with a view to iprove the agricultural structure and/or reallocate the land for other purposes with a general public interest* (Dijk, etc , 2005 dalam Sungkana 2015)

ISBN : 978-602-73463-1-4

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Peranan Tanah Ulayat dalam Perkembangan Nagari dan Kota Bukittinggi

Kota Bukittinggi telah berkembang semenjak zaman prakolonial dengan nama Nagari Kurai V Jorong. Perkembangan kota ini disinyalir dari sebuah pasar/ pakan [7] sama halnya dengan beberapa kota-kota lain yang ada di Sumatera Barat (Zed 1996 dalam Dalil 1997). Pada masa ini, tanah yang digunakan untuk pengembangan pakan dan nagari berasal dari tanah ulayat.Tanah ulayat yang dimiliki nagari, suku, dan kaum masih sangat luas dan aturan adat mengenai penguasan dan pemilikan tanah ulayat masih dipegang teguh (Zulqayyim, 2006).Pada prinsipnya tanah ulayat dari zaman prakolonial berfungsi sebagai tanah cadangan (land banking) (Perda Prov. Sumbar No.16 Tahun 2008) dan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian dan ladang.

Masuknya Belanda di Dataran Tinggi Agam tahun 1823 (Citra Bukittinggi dalam Arsip; ANRI, 2015) membuat penguasaan dan pemilikan tanah ulayat sedikit bergeser.Tanah ulayat mulai ada yang disewakan, dijual oleh para penghulu kepada Pemerintah Kolonial Belanda, bahkan ada yang diambil sepihak oleh pihak Belanda. Status tanah ulayat mulai bias, apalagi semenjak Bukittinggi dijadikan gementee/ kota berdasarkanStaatsblad tahun 1918. Setelah menjadi gementee, arus urbanisasi ke Kota Bukittinggi semakin tinggi.Hal ini ditunjang dengan kebijakan Pemerintah Kolonial Belanda dalam memberi peluang kepada pendatang untuk memiliki tanah dan bangunan rumah, dimana sebelumnya pendatang relative sulit untuk membeli tanah karena status tanahnya merupakan tanah ulayat (kaum, suku, dan nagari) yang tidak boleh diperjualbelikan (Zulqayyim, 2006).Tanah yang banyak diperjualbelikan adalah di Jorong Guguk Panjang.Jorong ini sekaligus menjadi pusat pemerintahan Belanda (Asri, 2001).

Setelah kemerdekaan, Kota Bukittinggi menghadapi masalah luas kota. Terdapat 3 (tiga) versi luas kota, yaitu: 1) versi Nagari Kurai, 2) versi Pemerintah Belanda, dan 3) versi pemerintah Kolonial Jepang (perluasan kota dengan memasukan 16 nagari disekitarnya). Penyelesaian luas lahan ini dibahas dalam rapat pleno Komite Nasional Indonesia (KNI) Sumbar di Bukittinggi tanggal 4-6 Januari 1947 dan diputuskan berdasarkan naskah Kayu Bulek tanggal 29 Mei 1947, yaitu seluas 25,24 km2 atau sama dengan luas Nagari Kurai [1] [18] Tahun 1978-1983 ketika Bukitiinggi dipimpin Walikota Oemar Gafar, perkembangan Kota Bukittinggi masih dioptimalkan pada wilayah yang masih kosong (intertisial). Namun di Tahun 1990-an perkembangan Kota Bukittinggi sudah mulai merambat ke arah luar kota (hinterland). Tanah ulayat didaerah ini mulai terimbas untuk diperjualbelikan dan beralih fungsi menjadi kawasan terbangun, terutama bagian Selatan Kota Bukittinggi (Jalur ke Kota Padang). Perkembangan dan perambatan yang terjadi di Kota Bukittinggi memanfaatkan tanah ulayat suku dan tanah ulayat kaum. Peranan tanah ulayat ini sangat tinggi dalam perkembangan Kota Bukittinggi, termasuk ke arah Selatan (Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam). Jika perambatan ini tidak diijinkan dan tidak terjadi, maka ke crowded-an di Kota Bukittinggi akan semakin parah dan terjadi penurunan kualitas lingkungan secara besar-besaran. Secara ekonomi berdampak pada kemajuan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam, secara lingkungan menyebabkan berkurangnya ruang terbuka hijau dan lahan pertanian yang berimbas kepada dampak lingkungan bagi kedua wilayah.Peranan tanah ulayat dalam perkembangan Kota Bukittinggi dari waktu ke waktu dapat dilihat dalam gambar 2.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gambar 2. Peranan Tanah Ulayat dalam Perkembangan Kota Bukittinggi

2) Preferensi Pemilik Modal terhadap Tanah Ulayat dan Faktor Pelepasan Tanah Ulayat

Preferensi pembeli/ pemilik modal terhadap tanah ulayat dilakukan dengan interview terbatas sebanyak 5 (lima) orang narasumber. Hasil preferensi pemilik modal adalah sebagai berikut:

1. Pemilik modal cenderung membeli tanah ulayat yang dilalui jalur utama (strategis) yang telah dilengkapi jaringan infrastruktur pendukung untuk perdagangan/ perkantoran.
2. Tanah ulayat yang dipilih adalah tanah ulayat kaum/ suku yang tidak memiliki banyak konflik dan harga murah atau komitmen yang saling menguntungkan
3. Lebih cenderung membeli tanah ulayat dalam bentuk sawah/ ladang (memperkecil biaya pembangunan)
4. Lebih cenderung pada tanah ulayat yang sudah milik individu dan memiliki sertifikat/ surat-surat lengkap
5. Tanah Ulayat yang memiliki sumber air

Sebagai pembanding, terdapat perbedaan antara tahapan konversi tanah ulayat di Kota Bukittinggi dan Kota Padang Panjang. Pada koridor Jalan Raya Bukittinggi-Padanglua, konversi lahan dari sawah/ ladang langsung menjadi ruko, toko, rukan, dan kantor (hamper tidak ada yang dijadikan rumah). Sedangkan di Kota Padang Panjang memiliki rantai konversi yang panjang; 1) dari sawah menjadi tanaman campuran, lalu rumah, ruko/ tempat usaha lain. 2) dari sawah menjadi tanah tidak tergarap (terjadi penurunan kesuburan tanah), lalu menjadi ruko/ tempat usaha lain (Irza, 2015). Perbedaan rantai konversi ini lebih disebabkan oleh perbedaan percepatan pengembangan kota/ dinamika kota serta harga lahan yang tinggi. Pengembangan kota tidak bisa dipisahkan dari pengembangan lahan. Value added yang didapatkan dari pengembangan lahan sangatlah besar dan berpengaruh pada ekonomi kota (Winarso, 2016). Hal ini yang terjadi di Bukittinggi ketika konversi lahan terjadi, dimana konversi lahannya jauh lebih besar dan lebih cepat dari pada Kota Padang Panjang.

Pemilik modal yang diwawancara umumnya para investor/ developer yang bergelut dalam jual beli ruko dan tanah ulayat dalam pembangunan.Data para narasumber dapat dilihat dalam daftar pustaka. Faktor pelepasan tanah berdasarkan pengalaman pemilik modal dan hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut:

Tabel 1. Faktor Pelepasan Tanah Ulayat di Kecamatan Banuhampu

No.	**Pengalaman Pemilik Modal**	**Penelitian Sebelumnya (Pemilik Tanah Ulayat)**
1	Garis turunan yang punah (tidak memiliki anak perempuan)	Untuk menghindari pertengkaran dan bunuh membunuh antar kaum, karena tanah ulayat yang semakin berkurang (Irwandi, 2010)
2	Harga lahan yang tinggi dan untuk Penyambung Hidup	Harga lahan yang tinggi dan untuk Penyambung Hidup (Irwandi, 2010)
3	Perputaran uang (kongsi dengan pemilik modal) -> lahan disewakan Lahan dijual dengan komitmen nanti pemilik lahan mendapatkan ruko dari pemilik modal	Tingginya harga jual tanah dan tidak ketatnya persyaratan peralihan tanah pusaka (Asri, 2001; (Irwandi, 2010)
4	Oknum Ninik Mamak yang tamak dan ingin menguasai lahan	Mamak yang tidak bisa mengemban tanggung jawab yang diamanahkan kepadanya (Asri, 2001)
5	Tidak adanya garis turunan yang bermukim di kampung (bermukimnya dirantau), dibagi biar tidak ribut	Mamak yang memakan harta pusaka (memakan hak generasi yang akan datang (Asri, 2001)
6	Untuk sekolah anak	Modal investasi untuk merantau (Asri, 2001)
7	-	Untuk sekolah anak (Yulis, 2011)
8	-	Semakin dangkal system kekerabatan matrilineal dalam pola hubungan mamak dan kemenakan (Asri, 2001)

Sumber: Hasil Interview dan Hasil Penelitian Sebelumnya

1) Pengaruh Alih Fungsi Lahan terhadap Perkembangan Kota Bukittinggi dan Besaran Alih Fungsi Lahan

Luas wilayah penelitian ini adalah 94,6 ha dengan panjang koridor mencapai 4,73 km dan lebar kiri-kanan jalan masing-masing 100 m ditarik dari as jalan. Dasar penarikan ini adalah banyaknya bangunan pada lapis pertama koridor jalan. Dengan menggunakan GIS dan data citra bing satelit 2016, didapatkan luas lahan terbangun 61,5 ha atau 65 % dari luas wilayah penelitian, dengan rincian: 35,9 ha disisi kanan koridor jalan dan 25,6 ha disisi kiri koridor jalan. Artinya alih fungsi tanah ulayat menjadi lahan terbangun sangat tinggi.
Pengaruh perkembangan Kota Bukittinggi ke arah luar memberikan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi Kabupaten Agam (khususnya di wilayah penelitian) dan Kota Bukittinggi.

Dampak dari sektor ekonomi, peningkatan pendapatan masyarakat sekitarnya, pembukaan lapangan pekerjaan, peningkatan PAD Kabupaten Agam.Ruko dan toko yang dibangun umumnya menjual makanan dan cenderamata khas Bukittinggi. Sedangkan Rukan dan kantor umumnya dalam bentuk jasa dan pelayanan umum, seperti biro travel, bank, kantor konsultan/kontraktor, dan sebagainya. Pemilik ruko, toko, rukan, dan kantor umumnya orang kota, namun sekarang pemilik tanah ulayat sudah banyak yang menggunakan sistim kongsi, dimana mereka juga mendapatkan ruko sesuai dengan komitmen (terjadi pergeseran dari penelitian sebelumnya). Secara detail dampak/ pengaruh alih fungsi tanah ulayat ini dapat dilihat pada tabel 2.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 2. Pengaruh Alih Fungsi Tanah Ulayat

No	Dampak	Kota Bukittinggi	Hinterland Kota Bukittinggi
1	Ekonomi	• Peningkatan Pendapatan Masyarakat • Pembukaan Lapangan Kerja • Percepatan Pembangunan	• Peningkatan PAD Kabupaten Agam • Peningkatan pendapatan penduduk disekitarnya • Pembukaan lapangan kerja • Percepatan pembangunan • Hilangnya lahan produktif (sawah)
2	Sosial	• Semakin biasnya batas kota dan desa • Cakupan aktivitas kota semakin luas • Jaringan social ekonomi budaya semakin luas • Dinamika kota semakin tinggi	• Berkurangnya ketersediaan tanah ulayat • Mengurangi konflik tanah ulayat (setelah dijual/dilepas) • Menurunnya peran ninik mamak dalam menguasai dan mengatur pemanfaatan tanah ulayat (pudarnya budaya matrilineal) • Perubahan pola fikir dan pola hidup menjadi modern (Yulis, 2011) • Hilangnya status asal nagari bagi si penjual (tidak punya tanah)
3	Lingkungan	• Mengurangi beban kepadatan bangunan di kota • Pembangunan lebih kepada penataan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup	• Berkurangnya lahan pertanian di Kabupaten Agam • Meningkatnya lahan terbangun → pengembangan lahan dalam luas yang besar diarahkan keluar kota • Berkurangnya daerah resapan • Semakin tingginya suhu udara dan pencemaran udara • Cadangan air semakin turun

Sumber: Hasil Analisa, 2016

2) Peranan penghulu dalam mempertahankan tanah ulayat.

Hasil penelitian dari interview mendalam kepada narasumber yang memiliki beberapa lahan ruko/ rukan disepanjang koridor tersebut menunjukan peranan ninik mamak/ penghulu dalam dalam mempertahankan tanah ulayat semakin berkurang, terlihat dari hasil penelitian.Berkurangnya peranan ninik mamak dalam mempertahankan tanah ulayat ini tidak lepas dari tuntutan kebutuhan lahan yang semakin tinggi, dan kebijakan pelepasan tanah yang semakin dipermudah. Menurunnya peranan ninik mamak/ penghulu dalam mempertahankan tanah ulayat ini terlihat dari: 1) terdapatnya ninik mamak yang tamak yang menjual harta pusako tinggi/ tanah ulayat tanpa persetujuan kaum/ sukunya; 2) terdapatnya ninik mamak yang tidak menjalan tugas yang diamanatkan kepadanya, sehingga pelepasan tanah ulayat sangatlah gampang; 3) ninik mamak yang tidak mau dipusingkan dengan masalah kaum/ sukunya, sehingga lebih memilih untuk melepas tanah ulayat (menghindari konflik). Tanah ulayat yang sulit dilepaskan adalah tanah ulayat milik nagari.

Kebijakan pelepasan tanah ulayat saat ini banyak yang dipermudah, jika tanah ulayat tetap dipertahankan sebagai sawah/ ladang maka akan terjadi konflik ruang oleh anak cucu masyarakat adat (tuntutan kebutuhan ruang). kebijakan yang tidak ketat, dinamis mengikuti fenomena dilapangan, dan posisi aman yang ingin diambil pemerintah agar tidak terjadi keributan antara anak cucu masyarakat adat, mendorong percepatan alih fungsi tanah ulayat.Tanah ulayat yang digunakan untuk pembangunan akan mendapatkan ganti rugi. Ganti rugi ini akan dibagikan kepada masyarakat adat yang memiliki ha katas tanah tersebut (biasanya terdiri dari beberapa keluarga/ turunan). Terdapat pergeseran fenomena pelepasan dan alih fungsi tanah ulayat dari penelitian sebelumnya, dimana hasil penelitian Asri, 2001 menyatakan "semakin tinggi pendidikan dan status sosial, semakin kuat memegang prinsip adat dalam pemilikan tanah".Penelitian ini menunjukan bahwa alih fungsi tanah ulayat dan pelepasan hak atas tanah banyak dilakukan untuk menghindari konflik harta pusako.Tanah ulayat dipertahankan kepemilikannya dengan mengkonversi lahan pertanian menjadi ruko/rukan, agar *value added* dari tanah tadi semakin tinggi; atau disewakan.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa 1) Tanah ulayat nagari masih memegang peranan penting dalam perkembangan Kota Bukittinggi (*in city)*, baik dalam pembangunan fasilitas pemerintah maupun fasilitas untuk pelayanan umum, 2) Peningkatan jumlah penduduk berbanding terbalik dengan ketersedian tanah ulayat sebagai *landbanking* dan berbanding lurus dengan alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan terbangun, 3) proses pengkotaan tetap berjalan, walaupun perluasan Kota Bukittinggi secara legal tidak berhasil, 4) Tanah ulayat yang dikonversi umumnya untuk kepentingan komersil, memberikan dampak terhadap ekonomi, social, dan lingkungan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam yang dapat dirasakan langsung masyarakat pada kedua kawasan tersebut 5) Tanah ulayat sebagai *land banking* semakin habis dan belum ada solusi penggantiannya, 6) Semakin berkurangnya peranan penghulu dalam mempertahankan tanah ulayat sebagai *landbanking* dan semakin tidak ketatnya peralihan tanah pusaka dan memudarkan budaya matrilineal.
Penelitian ini masih banyak kekurangan, sehingga bagi peneliti lain dapat melanjutkan dengan: 1) menambah jumlah sample dari sisi pemilik modal/ kapitalis. 2) meneliti koridor lain pada KSK Perbatasan, sehingga terdapat data percepatan perkembangan antara koridor yang satu dengan yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Achir, Mohd, "Menelusuri Jejak Sejarah Nagari Kurai Beserta Lembaga Adatnya," Kristal Multimedia, Bukittinggi, 2011
[2] Asri Zul, "Bukittinggi 1945-1980: Perkembangan Kota secara Fisik dan Hubungannya dengan Pemilikan Tanah," Tesis, Program Studi Ilmu Sejarah, UI 2001
[3] Chaphin, F.Stuart, Jr & Kaiser, E.J., "Urban Land Use Planning," third Edition, University of Illionis Press, USA, 1995.
[4] Citra Bukittinggi dalam Arsip; ANRI, 2015
[5] Creswell, J. W., "Research Design: Qualitative, Quantitative, Aand Mixed Methods Approaches, " 4th Edition. SAGE Publications Ltd, 2014.
[6] Dalil, Firman, "Kajian Perubahan Pemanfaatan Ruang Kota Studi Kasus Kotamadya Bukittinggi," Tesis, Program Studi Magister Perencanaan Kota dan Daerah, UGM, 1997.
[7] Fuadi, Al Busyra, " Perkembangan Payakumbuh dari Pakan Akad menjadi Kota," Tesis, Program Studi Arsitektur, UGM, 2008
[8] Fogel, Alan, "Change Processes in Relationships: A Relational-Historical Research Approach," Cambridge University Press, 2006
[9] http://www.bukittinggi.info/ 2014/12/tokoh-masyarakat-bukittinggi.html
[10] Irwandi," Pergeseran Hukum Adat dalam Pemanfaatan Tanah Ulayat Kaum di Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam Provinsi Sumatera Barat, " Tesis Program Studi Magister Kenotariatan, UNDIP, 2010.
[11] Irza, Hamdi, "Kajian Perubahan Guna Lahan Kota Padang Panjang (Studi Kasus: Jalan Lingkar Utara)," Tesis Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, ITB, 2015
[12] Perda Provinsi Sumatera Barat No. 16 Tahun 2008 tentang Tanah Ulayat dan Pemanfaatannya
[13] Sungkana, " Mengenal Bank Tanah / Land Banking twww.djkn.kemenkeu.go.id, 21 Agustus 2015
[14] Undang-undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Kepentingan Umum
[15] Winarso, Haryo, " Pengembangan Lahan dan Perumahan yang Berpihak pada Masyarakat Miskin," Orasi Ilmiah Guru Besar ITB, Balai Pertemuan Ilmiah ITB, 2016.
[16] Yulis, Erma, "Konflik Perluasan Kota Bukittingggi (1999-2004)," Skripsi Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra, Unand, 2011
[17] Zulkaidy, Deni, " Masalah Perluasan Kota," Jurnal PWK Nomor 1/Triwulan1/Januari 1991
[18] Zulqayyim, "Boekittinggi Tempo Doeloe," Andalas University Press, 2006.
[19] Narasumber (pemilik modal:) 1) Risbianto Malin Bagindo, 2) Zulhendri Basa, 3) Tarmidzi Sutan Permato, 4) Deri Adrian Taufik Sutan Rajo Ameh, 5) Donna Rahmawati

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS POTENSI SUMBER DAYA KAWASAN TRANSMIGRASI DAN KAWASAN INDUSTRI PERKOTAAN BARU BUMI ASRI DUSUN TANGAH UNTUK MEMPERCEPAT PEMBANGUNAN SOLOK SELATAN SEBAGAI DAERAH TERTINGGAL DI SUMATERA BARAT

KARDIMAN[1)]

[1)]Fakultas Pertanian Universitas Borobudur Jakarta

Naskah diterima : 25 Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

*Analisis struktur dan pemanfaatan kawasan dilakukan dengan mengamati dan mengkaji struktur dan pemanfaatan kawasan, baik pada masa sekarang, masa lalu, maupun kecenderungannya di masa depan, akan tetapi dalam lingkup internal wilayah. Penentuan orde kota, skala wilayah pelayanan, dan penstrukturan wilayah agar lebih efektif dan efisien merupakan sasaranyang didapat dari hasil analisis aspek ini.Penelitian ini memiliki tujuan yaitu menentukan sector unggulan dan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta merumuskan konsep terpadu agar Kabupaten Solok Selatan keluar dari kategori daerah tertinggal tahun 2019. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan survey dengan alat analisis adalah Location Quotient (LQ) dan analisis tataruang, struktur kawasan perencanaan mengikuti kebijakan yang telah digariskan oleh RTRWN, RTRWP, dan RTRW; kedudukan dan skala dari sistem pergerakan, pemusatan kegiatan, dan peruntukan lahan; Arah perkembangan pembangunan kawasan; memperhatikan karakteristik dan daya-dukung fisik lingkungan serta dikaitkan dengan tingkat kerawanan terhadap bencana.Lokasi penelitian adalah di KabupatenSolok Selatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 5 sektor unggulan dengan nilai LQ >1 yaitu sector pertanian, kehutanan dan perikanan, sector pertambangan dan penggalian, sector konstruksi, perdagangan dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, jasa kesehatan dan kegiatan social. Dari lima sector unggulan, sektor yang memiliki keunggulan terbesar adalah sector Pertambangan dan Penggalian yang memilikinilai LQ melebihi 2 artinya, sector ini memiliki prospekdua kali lebih besar dibandingkan sektor yang sama di seluruh Sumatera Barat, dan berikutnya adalah sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai LQ mencapai 1,4, artinya sector ini memiliki keunggulan 1,4 kali lebih besar dibandingkan sektor yang sama di seluruh Sumatera Barat. Sektor lain yang memiliki keunggulan adalah sector perdagangan Besar dengan nilai LQ 1,24, artinya pusat Grosir dan Perdagangan Besar memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan dimasa dating Pusat Perdagangan dan Bisnis KPB-BAD. Di sisi lain ada dua kelompok komoditi unggulan pada sector Pertanian, Kehutanandan Perikanan di wilayah RKT KPB yaitu, pertama Komoditi Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, Kakao) yang memiliki nilai LQ 1,33, artinya sector perkebunan lebih unggul sebesar 1,33 kali dari pada komoditi lain pada sector ini dibandingkan wilayah lain di propinsi Sumatera Barat, selain itu komoditi tanaman pangan juga memiliki nilai LQ 1,02, artinya diatas rata-rata dibandingkan komoditi lainnya di Propinsi Sumatera Barat. Kedua, komoditi yang memiliki prospek bagus adalah komoditi peternakan dengan nilai LQ = 1.Konsep pembangunan yang dapat ditawarkan agar Solok Selatan keluar dari daerah tertinggal dan maju yaitu dengan perencanaan pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai kawasan hinterland diintegrasikan dengan perencanaan kawasan perkotaan baru sebagai pusat industri (**Vallue Added Centre**).Petani di wilayah studi 3 Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Batang Hari termasuk petani dengan kategori berlahan sempit dengan rata-rata luas lahan 0,6 Ha per jiwa dengan jumlah penduduk 48.949 orang, maka dalam perencanaan diperlukan upaya keras untuk menciptakan lapangan usaha non pertanian (Agro Industri, jasa dan perdagangan, pertambangan dan penggalian bahkan industry peleburan logam dasar) serta diperlukan transformasi lapangan usaha dari sector pertanian kepada sector industri, industry kreatif jasa dan perdagangan.*

Kata Kunci :KawasanTransmigrasi, Kawasan Industri Perkotaan Baru, Kawasan Strategis Cepat Tumbuh.

PENDAHULUAN

Pembangunan transmigrasi merupakan salah satu upaya percepatan pembangunan kota-kota kecil terutama diluar pulau Jawa, untuk meningkatkan perannya sebagai motor penggerak pembangunan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah yang masih rendah sebagai akibat dari ; (1) lebarnya kesenjangan pembangunan antar wilayah, terutama antara kawasan perdesaan-perkotaan, kawasan pedalaman-pesisir, Jawa, luar Jawa dan antara kawasan Timur-Barat, serta (2) rendahnya keterkaitan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang (hinterland), termasuk antara kota dan desa.

Keberadaan Transmigrasi tidak bisa dipungkiri telah memberikan pengaruh terhadap perkembangan yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Solok yang diresmikan pada tanggal 7 Januari 2004. Program transmigrasi di Solok Selatan telah dilaksanakan sejak tahun 1986 sampai tahun 2006 dengan penempatan transmigrasi sebanyak 2.294 KK = 9.694 jiwa yang tersebar di 6 UPT pada 2 kecamatan. Salah satu kontribusi dari adanya transmigrasi terhadap perkembangan kabupaten Solok Selatan antara lain pembentukan 1 kecamatan dan 3 nagari baru dari daerah ekstransmigrasi, yakni kecamatan Sangir Balai Janggo (SBJ) serta 3 nagari baru yakni; Sungai Kunyit, Talunan Maju dan Sungai Kunyit Barat.

Rencana pengembangan masyarakat transmigrasi dan kawasantransmigrasiberdasarkan Peraturan Pemerintah RI No.3 Tahun 2014 meliputi rencanapengembangan a) SP, b)Pusat SKP, c) SKP, d) KPB dan e) Kawasan Transmigrasi.Dimana setiap rencana pengembanganmemuat rencana kegiatan bidang ekonomi,sosial budaya, mental spiritual, kelembagaanpemerintahan dan pengelolaan sumber daya alam serta masing-masing dilengkapi dengan rencanateknik detail pengembangan sarana dan prasarana.Untuk mewujudkan kawasan transmigrasi yang bernuansa perkotaan dan memilikiperencaaan pengembangan kawasan yangterarah maka diperlukan perencanaan tekhnis kawasantransmigrasi agar dapat menghasilkan perencanaan yang sesuai dengan yang diharapkan. Kegiatanperencanaan kawasan transmigrasi ini dinamakan rencana tekhnis kawasan (RKT).

1.2. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang, berikut ini permsalahan yang ingin diajawab dalam penelitian ini :

a. Sektorapasaja yang memiliki prospekuntukdikembangkan di Solok Selatan?
b. Bagamaimanakah struktur dan typology petani di Solok Selatan dalam kaitannya dengan pilihan komoditi dan kepemilikan lahan usaha tani ?
c. Dalam kaitan dengan Konsep pengembangan wilayah, bagaimanakah Perencanaan Kawasan Perkotaan Baru dapat dijadikan pusat nilai tambah (*valluae added centre*) dan pusat pertumbuhan ekonomi di Solok Selatan dimasa datang?

1.3. Tujuan

Menentukansektor unggulan dan strategi pengembangan wilayah dalam rangka pengentasan kemiskinan serta konsep terpadu agar Kabupaten Solok selatan keluar dari kategori daerah tertinggal tahun 2019. Penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan kawasan, khususnya kawasan transmigrasi menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten Solok Selatan dan menjadi satu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah sesuai dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bersangkutan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

2.1. Pendekatan Pelaksanaan Kegiatan Penelitian

Pendekatan dalam pelaksanaan pekerjaan adalah kajian aspek-aspek atau faktor-faktor apa saja yang berkaitan dengan atau menentukan dalam pelaksanaan pekerjaan. Dalam hal ini pendekatan dalam pelaksanaan pekerjaan akan mendasari penyusunan metodologi, rincian kegiatan maupun rencana pelaksanaan pekerjaan.

2.2. Pendekatan Hukum

a. PP No. 3 Tahun 2014 Pasal 36 dan penyesuaian materi berdasarkan UU No 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang
b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
c. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah;
d. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun2005-2025;
e. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang PenanggulanganBencana;

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

f. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang PenataanRuang;
g. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan LingkunganHidup;
h. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang InformasiGeospasial;
i. PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian
j. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah DaerahKabupaten/Kota;
k. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
l. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
m. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam PenataanRuang;
n. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan KawasanLindung;
o. Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang KawasanStrategis.
p. Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)2011-2025.
q. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan 2012-2032.

2.3. Pendekatan Ekonomi Sektor Unggulan

Untuk menganalisis sektor ekonomi unggulan maka digunakan metode analisis LQ dan shift share yang berguna untuk melihat pertumbuhan/ perkembangan dari suatu kegiatan tertentu pada suatu daerah tertentu. Dapat puladitujukan untuk melihat tingkat perkembangandan kedudukan suatu daerah dalam sistem yang lebih luas.

a) ***Analisis Location Quotient***

Metode analisis *Location Quotient* (LQ) yang dimaksud dalam sub bab ini adalah metode analisis perbandingan kuantitatif produktivitas beberapa komoditi pertanian di tiap Kecamatan terhadap produktivitas Kabupaten.

LQ = (Vik/Vk) / (Vip/Vp)

Keterangan:

- Vik :Nilai output (PDRB) sektor i daerah studi k (kabupaten/kota misalnya) dalam pembentukan Produk Domestik Regional Riil (PDRR) daerah studi k.
- Vk :Produk Domestik Regional Bruto total semua sektor di daerah studi k
- Vip :Nilai output (PDRB) sektor i daerah referensi p (provinsi misalnya) dalam pembentukan PDRR daerah referensi p.
- Vp :Produk Domestik Regional Bruto total semua sektor di daerah referensi p.

Berdasarkan hasil perhitungan Location Quotient (LQ), dapat diketahui konsentrasi suatu kegiatan pada suatu wilayah dengan kriteria sebagai berikut:

1. Nilai LQ di sector i=1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah sama dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p;
2. Nilai LQ di sector lebih besar dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih besar dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i merupakan sektor unggulan daerah studi k sekaligus merupakan basis ekonomi untuk dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k; dan
3. Nilai LQ di sector lebih kecil dari 1. Ini berarti bahwa laju pertumbuhan sektor i di daerah studi k adalah lebih kecil dibandingkan dengan laju pertumbuhan sektor yang sama dalam perekonomian daerah referensi p. Dengan demikian, sektor i bukan merupakan sektor unggulan daerah studi k dan bukan merupakan basis ekonomi serta tidak propektif untuk **dikembangkan lebih lanjut oleh daerah studi k.**

ISBN : 978-602-73463-1-4

III HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Arah Kebijakan Struktur Ruang Kabupaten Solok Selatan

Pusat-pusat kegiatan yang ada di Kabupaten Solok Selatan, terdiri atas:

a. PKL;yaitu Padang Aro.
b. PKLp;yaitu Muara Labuh dan Abai
c. PPK; terdiri atas :
   - ✓ kawasan perkotaan Pakan Rabaa di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   - ✓ kawasan perkotaan Pakan Salasa di Kecamatan Pauh Duo;
   - ✓ kawasan perkotaan Sungai Kalu di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   - ✓ kawasan perkotaan Lubuk Malako di Kecamatan Sangir Jujuan;
   - ✓ kawasan perkotaan Sungai Kunyit di Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
   - ✓ kawasan perkotaan Lubuk Ulang-aling di Kecamatan Sangir Batang Hari.
d. PPL; terdiri atas :
   - ✓ Balun di Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh;
   - ✓ Luak Kapau di Kecamatan Pauh Duo;
   - ✓ Liki di Kecamatan Sangir;
   - ✓ Bidar Alam di Kecamatan Sungai Jujuan;
   - ✓ Sungai Gadiang di Kecamatan Sangir Balai Janggo;
   - ✓ Talunan di Kecamatan Sangir Balai Janggo;
   - ✓ Talao di Kecamatan Sangir Balai Janggo; dan
   - ✓ Sitapus di Kecamatan Sangir Batang Hari.

Untuk Lebih jelasnya, Struktur Ruang Kabupaten Solok Selatan dapat dilihat pada **gambar 4.1.**

3.2. Arah Kebijakan Pola Ruang Kabupaten Solok Selatan

Rencana pola ruang wilayah terdiri atas rencana kawasan lindung dan kawasan budidaya.

1. Rencana kawasan lindung terdiri dari :
   a) Kawasan Hutan Lindung
   b) Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya
   c) Kawasan Perlindungan Setempat
   d) Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya
   e) Kawasan Rawan Bencana Alam
   f) Kawasan Lindung Geologi
2. Rencana kawasan Budidaya terdiri dari :
   a) Kawasan Peruntukan Hutan Produksi;
   b) Kawasan Peruntukan Pertanian;
   c) Kawasan Peruntukan Perikanan;
   d) Kawasan Peruntukan Pertambangan;
   e) Kawasan Peruntukan Industri;
   f) Kawasan Peruntukan Pariwisata; Dan
   g) Kawasan Peruntukan Permukiman.

   Kawasan peruntukan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g terdiri atas:
   1) kawasan peruntukan permukiman perkotaan; dan
   2) kawasan peruntukan permukiman perdesaan.
      - ✓ Kawasan peruntukan permukiman perkotaan, yaitu ditetapkan di Padang Aro, Muara Labuh, Pakan Rabaa, Pakan Salasa, Lubuk Malako, Sungai Kunyit, Abai, Sungai Kalu, dan Lubuk Ulang Aling dengan luasan kurang lebih 17.005 (tujuh belas ribu lima) hektar.
      - ✓ Kawasan peruntukan permukiman perdesaan, yaitu ditetapkan di seluruh nagari dalam wilayah Daerah Kabupaten Solok Selatan terdiri atas:
        a. kawasan permukiman penduduk perdesaan yang tumbuh secara swadaya;
        b. kawasan transmigrasi Batu Kadunduang di Nagari Abai dan Sitapus Kecamatan Sangir Batang Hari dengan luasan kurang lebih 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) hektar;
        c. Kawasan transmigrasi Lubuk Ulang Aling Kecamatan Sangir Batang Hari dengan luasan kurang lebih 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar;

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

d. Kawasan transmigrasi Kandi di Kecamatan Sungai Pagu dan Koto Parik Gadang Diateh seluas 2.500 (dua ribu lima ratus) hektar dengan mengusulkan penurunan status kawasan dari hutan produksi terbatas; dan
e. Rencana Peruntukan kawasan permukiman seluas 2.075 Ha dengan melakukan pengusulan penurunan status kawasan hutan dari TNKS menjadi kawasan pemukiman pada zona khusus Tandai dan Sungai Manau.

3.3. Analisis Komoditas Unggulan Lokasi (*Location Quotient)*

Pekerjaan analisis dimaksudkan untuk mengkaji daya dukung dan daya tampung lahan lokasi perencanaan sebagai sistem produksi pertanian dan pengelolaan sumber daya alam yang memiliki keterkaitan fungsional dan hierarki keruangan dengan pusat pertumbuhan dalam satu kesatuan sistem pengembangan.

Jumlah lahan milik masyarakat di tiga Kecamatan tersebut adalah 27.665Ha, dengan jumlah penduduk pada tahun 2016 sebanyak 48.956 orang, maka Rata-rata kepemilikan lahan masyarakat untuk budidaya pertanian hanya 0,54 Ha/ jiwa atau dapat dikategorikan pertanian dengan lahan sempit.

Sempitnya lahan masyarakat disebabkan oleh dua peruntukkan lahan oleh pemerintah yaitu perkebunan swasta besar sebanyak 38 %, fungsi hutan lindung 24 %, sedangkan lahan garapan masyarakat hanya 10 % (27.665 Ha).

Sehubungan dengan fungsional dan ketataruangan di 3 Kecamatansebagai calon 3 SKP dalam Rencana Kawasan Transmigrasi/Kawasan Perkotaan Baru Bumi Asri Dusun Tangah hanya 10 % dari luas areal lahan yang ada, maka perlu dilakukan terobosan dalam program pengembangan melalui gabungan program KPB sebagai pusat nilai tambah (*Vallue Added Centre*) dari Kemendes PDTT dengan program Sentra Industri Kecil dan Menengah program dari Kementrian Perindustrian minimal 1 SIKIM di setiap Kabupaten di Indonesia sesuai dengan PP RINO. 14 Tahun 2015TentangRencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 dan program listrik 35.000 Mw dari Kementrian ESDM.

Berdasarkan tabel dibawah 4.12.mengenai Analisis SWOT, dapat dilihat bahwa pada areal deliniasi KPB di 3 SKP (Kec. SJJ, SBJ dan SBH) memiliki nilai keunggulan yang lebih dominan baik dari letak geografis, jenis lahan, ketersediaan lahan, keadaan lahan, sumber air maupun perencanaan ketenagalistrikan dari pada Kecamatan lain di Kabupaten Solok Selatan, sedangkan hasil análisis dari sisi kelemahan dapat diupayakan peningkatan dan dapat diminimalisir dengan perencanaan terpadu yaitu program 17 Kementrian RI dalam mendukung suksesnya pembangunan Kawasan Perkotaan Baru-BAD yaitu (KPB, Industri SIKIM, Program Ketenagalistrikan, Program pembuatan Jalan baru dari Kementrian PU, Kementrian Sosial, Kementrian Perhubungan, Kementrian Pariwisata dan lainnya).

3.4. Analisa Fungsi Ruang

Tujuan, membentuk pola kawasan yang terstruktur dalam peran dan fungsi bagian-bagian kawasan, yang memperhatikan konsentrasi dan skala kegiatan binaan manusia dan alami.

Berdasarkan peta Infrastruktur Indonesia Kabupaten Solok Selatan, dapat dilihat bahwa wilayah Kawasan Perkotaan Baru – BAD telah diperuntukkan untuk berbagai fungsi seperti sawah beririgasi di Kecamatan Sangir Jujuan dan fungsi perkebunan besar swasta di daerah sangir Balai Janggo dan Sangir Batang Hari dan kawasan hutan lindung, hutan produksi, hutan konversi dan lainnya.

3.5. Analisis Sumber Daya dan Kemampuan Lahan

Seperti yang diuraikan pada Tabel bahwa luas kampung atau perumahan yang telah terbangun sekitar 1.600 Ha, yang berasal dari bangunan milik rakyat diperkirakan 1.500 Ha sedangkan bangunan milik pemerintah sekitar 100 Ha berupa; sekolah, puskesmas, jalan, mesjid, Surau, dan sebagainya. Sedangkan sekitar 17.199 Ha adalah lahan masyarakat diluar kawasan hutan.Dari luasan lahan masyarakat dapat dikategorikan sebagai pusat sektor perkebunan karet, sawit dan kakao, jagung, tanaman obat, tanaman pangan, pusat wisata, pusat bisnis dan perdagangan serta pusat industri dan tenaga listrik.

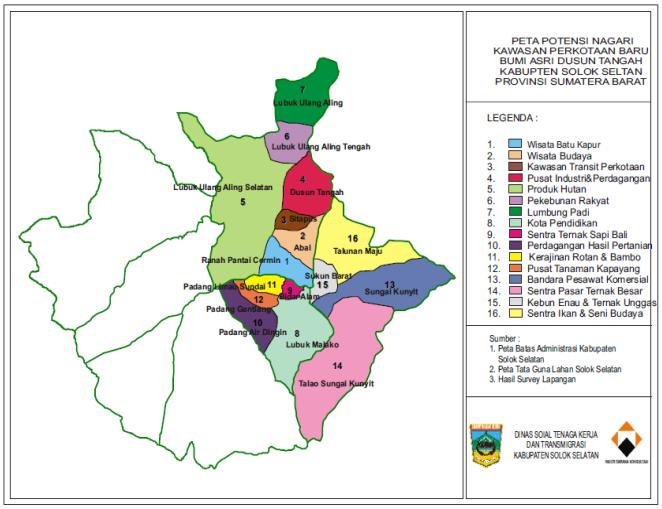

Gambar 1 :Peta Potensi 16 Nagari menurut Analisa OVOP

Menurut data, diuraikan program satu Nagari Satu Produk Unggul (***one village one product***) dengan uraian sebagai berikut; Nagari RPC unggul pada Wisata Batu Kapur, Nagari Abai Wisata Budaya (Rumah Panjang), Nagari Sitapus Kawasan Transit Perkotaan, Nagari Dusun Tangah sebagai Pusat Industri dan Perdagangan, Nagari Lubuk Ulang Aling Selatan sebagai penghasil produk hutan, Nagari Lubuk Aling Tengah sebagai penghasil Perkebunan Rakyat, Nagari Lubuk Ulang Aling sebagai lumbung padi dan penghasil Batu Galian C, Nagari Lubuk Malako sebagai Kota Pendidikan, Nagari Bidar Alam sebagai sentra sapi bali, Nagari Padang Air Dingin sebagai pusat hijauan pakan ternak dan sentra perdagangan hasil sayur mayur, Nagari Padang Limau Sundai sebagai sentra kerajinan rotan dan bambu, Nagari Padang Gantiang sentra minyak nabati (kapecong), gaharu dan tanaman obat, Nagari Sungai Kunyit sebagai tempat Bandar udara, Nagari Talao Sungai Kunyit sebagai pusat pasar ternak, Nagari Sukun Barat sebagai sentra tanaman enau dan ternak unggas, Nagari Talunan Maju sebagai sentra ikan dan seni budaya.

Selain dari data komoditi unggulan diatas, dapat dilihat data iklim dan curah hujan dilokasi proyek. Biasanya kondisi iklim diperlukan untuk menunjang kelancaran pekerjaan lapangan dan konstruksi. Secara umummusim hujan terjadi antar bulan Januari sampai bulan Mei sebagai bulan terbasah dengan suhu rata-rat 29^0 C dan bulan Juni dan Agustus curah hujan mulai menurun, sedangkan musim kemarau berlangsung antara bulan September sampai Desember. Secara umum, musim hujan berlangsung lebih lama dari musim kemarau. Jenis iklim di daerah setempat termasuk tipeiklim B yaitu tipe basah atau iklim hujan tropis.

Data curah hujan diperlukan untuk analisa hujan, analisa banjir dan analisa kesediaan air. Hujan harian dikumpulkan dari stasiun hujan terdekat dari lokasi studi. Stasiun hujan tersebut dikelola oleh Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG). Stasiun tersebut merupakan stasiun hujan manual yang biasanya mengamati sekali sehari pada jam 7: 00 pagi. Stasiun hujan yang ada harus dalam kondisi baik dan masih beroperasi. Stasiun hujan tersebut boleh berada di luar atau di sebelah hulu daerah Aliran Sungai Batang Sangir yaitu di Sampu Kecamatan sangir. Jumlah hari hujan pada tahun 2013 sekitar 109 hari dalam setahun, dengan jumlah curah hujan maksimal sekitar 261 mm terjadi pada bulan Februari 2013 dengan total curah hujan setiap tahun sekitar 1.819 mm, sedangkan jumlah hari hujan pada tahun 2010 sebanyak 196 hari dengan curah hujan tertinggi setinggi 127 mm yaitu terjadi pada bulan April dengan jumlah curah hujan dalam setahun 3.428 mm. Jumlah hujan ini dapat dikategorikan tinggi dan dapat diandalkan sebagai daerah simpanan air tanah (CAT). Berikut ini dapat dilihat Peta Hidrogeologi dan data curah hujan pada lampiran Curah Hujan.

Berdasarkan peta diatas, lahan akuifer tinggi dan akuifer produktif terdapat pada Kecamatan Sangir Balai Janggo dan di Kecamatan Sangir Batang Hari.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3.6. Analisis Pengembangan Ekonomi KawasanTransmigrasi

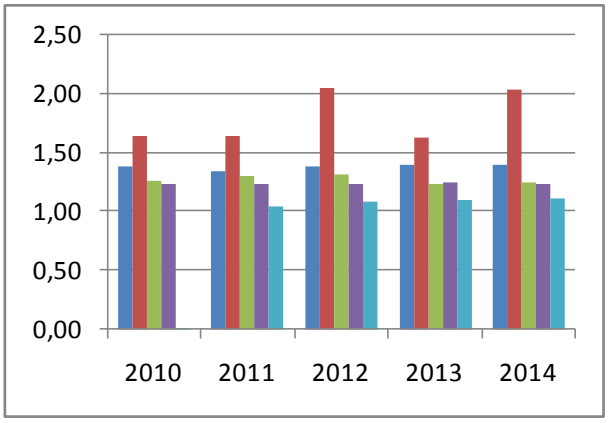

Gambar2 : Lima Sektor Unggulan pada PDRB Solok Selatan

Berdasarkan Grafik pada Gambar 2. dapat dilihat 5 sektor unggulan yang dibandingkan sektor yang sama di provinsi Sumatera Barat, yaitu sektor dapat memberikan nilai tambah di lokasi kawasan yaitu sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, perdagangan dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, jasa kesehatan dan kegiatan sosial. Nilai LQ paling tinggi adalah pada sektor pertanian, kehutanan dan perikanan mencapai angka 2, artinya sumbangan sektor ini mencapai dua kali lipat sektor ini pada PDRB provinsi Sumatera Barat pada tahun 2015, atau sektor yang mampu memberikan efek ganda terbesar bagi PDRB Kabupaten Solok Selatan dan memiliki yaitu komoditi sawit yang berasal dari 10 perkebunan swasta besar seperti PT. TKA, PT. KSI, PT.PN 6, PT. INCASI RAYA GROUP, PT. SJAL, Perkebunan TEH PT. MITRA KERINCI dengan luas hamper 83.000 Ha HGU dan lainnya. [1]

Berdasarkan data dapat diuraikan, terdapat 5 sektor unggulan yang memiliki kontribusi terbesar pada PDRB Solok Selatan yaitu; sektor Pertanian,Kehutanan dan Perikanan, sektor Pertambangan dan Penggalian, sektor Konstruksi, sektor perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dan sektor Jasa, Kesehatan dan Kegiatan Sosial. Dari lima sektor unggulan, sektor yang memiliki keunggulan terbesar adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yang memiliki nilai LQ melebihi 2 artinya, sektor ini memiliki prospek dua kali lebih besar dibandingkan sektor yang sama di seluruh Sumatera Barat, dan berikutnya adalah sektor sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan nilai LQ mencapai 1,4, artinya sektor ini memiliki keunggulan 1,4 kali lebih besar dibandingkan sektor yang sama di seluruh Sumatera Barat. Sektor lain yang memiliki keunggulan adalah sektor perdagangan Besar dengan nilai LQ 1,24, artinya pusat Grosir dan Perdagangan Besar memiliki prospek yang bagus untuk dikembangkan dimasa datang Pusat Perdagangan dan Bisnis KPB-BAD.

Berdasarkan gambar 2 dapat dilihat bahwa ada dua kelompok komoditi unggulan pada sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan di wilayah RKT KPB yaitu, pertama Komoditi Perkebunan (Karet, Kelapa Sawit, Kakao) yang memiliki nilai LQ 1,33, artinya sektor perkebunan lebih unggul sebesar 1,33 kali dari pada komoditi lain pada sektor ini dibandingkan wilayah lain di propinsi Sumatera Barat, selain itu komoditi tanaman pangan juga memiliki nilai LQ 1,02, artinya diatas rata-rata dibandingkan komoditi lainnya di Propinsi Sumatera Barat. Kedua, komoditi yang memiliki prospek bagus adalah komoditi peternakan dengan nilai LQ = 1.

Komoditi Pertambangan dan penggalian secara umum memiliki nilai LQ sekitar 1,18, artinya komoditi pertambangan memberikan nilai yang bagus dibandingkan komoditi lain di sektor ini di Solok Selatan.

Lokasi potensi Bijih besi Kadar Fe2O3 46,00% - 76,13% adalah: Nagari Lubuk Gadang Kecamatan Sangir (Sumber Daya) dengan Luas Wilayah 5.000 Ha (Prakiraan Potensi: 112.500.000 ton), Sungai Kunyit Kec. Sangir Jujuhan (Sumber Daya) dengan Luas Wilayah 1.789 Ha (Prakiraan Potensi: 35.799.00 ton) ; Nagari Koto Baru Kec. Sungai Pagu (Sumber Daya) ; Batang Pasampan Kec. Koto Parik gadang Diateh (Sumber Daya) ; Ulu Suliti Kecamatan Koto Parik Gadang Diateh (Sumber Daya) ; Jorong Pekonina, Kec. Sei Pagu dengan Luas Wilayah 1.155 Ha (Prakiraan Potensi: 22.434.500 ton) ; Kenagarian Ulu Suliti, Kec. Sei Pagu dengan Luas Wilayah 3.000 Ha (Prakiraan Potensi: 58.696.000 ton). Total potensi diketahui sekitar 230 juta ton,namun Potensi Luas zona mineralisasi yg belum diketahui depositnya ± 193.800 Ha*semangka folt) Bukit Barisan.*Potensi Biji Besi Solok Selatan Dalam Berbagai Bentuk.

Selain potensi indusri logam dasar, pada sektor Industri dan Pengolahan komoditi yang memiliki keunggulan yang tinggi adalah pada industri karet, barang dari karet danplastik dengan nilai LQ sekitar 1,5, artinya komoditi ini telah banyak memberikan nilai ekonomi 1,5 kali lebih besar dibandingkan komoditi pertanian

lainnya di Solok Selatan, sedangkan industri makanan dan minuman memiliki keunggulan peringkat kedua yaitu rata-rata 1,06 dibandingkan komoditi lainnya.

3.7. Analisis Eksternal

Kawasan Sentra Pertanian

Aktualisasi Permen No.50 tahun 2012 tentang Pedoman Pengembangan Kawasan Pertanian meliputi Tujuh Gema Revitalisasi Pertanian yaitu 1. Lahan, 2. Perbenihan dan Perbibitan, 3. Infrastruktur dan Sarana, 4. SDM, 5. Kelembagaan, 6. Pembiayaan, 7. Teknologi Hilir.

Kawasan pertanian adalah "Gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah". Kriteria Kawasan Tanaman Pangan dalam aspek luas agregat kawasan untuk masing-masing komoditas unggulan adalah:

• padi, jagung, dan ubi kayu minimal 5.000 hektar;
• kedelai minimal 2.000 hektar;
• kacang tanah minimal 1.000 hektar;
• kacang hijau dan ubi jalar minimal 500 hektar.

A. Kriteria Kawasan Perkebunan

Kriteria khusus kawasan perkebunan diantaranya :

- Pengusahaannya dilakukan sebagai usaha perkebunan rakyat dan/atau sebagai usaha perkebunan besar dengan pendekatan skala ekonomi;
- Usaha perkebunan besar bermitra dengan usaha perkebunan rakyat secara berkelanjutan, baik melalui pola perusahaan inti - plasma, perkebunan rakyat dengan perusahaan mitra (kemitraan), kerjasama pengolahan hasil dan bentuk-bentuk kerjasama lainnya; dan
- Arah pengembangannya dilaksanakan dalam bingkai prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan, diantaranya: kelapa sawit menerapkan system ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil), kakao menerapkan sustainable cocoa dan prinsip-prinsip berkelanjutan lainnya.

B. Kriteria Kawasan Hortikultura

Kriteria khusus kawasan hortikultura mencakup berbagai aspek teknisyang bersifat spesifik komoditas baik untuk tanaman buah, sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias.

C. Kriteria Kawasan Peternakan

Batasan minimal penguasaan populasi per peternak dalam kawasan : sapi potong 2-3 ekor, 1 klaster = 2.000 ekor; kerbau 2 ekor, ayam buras 30 ekor; domba/ kambing 6 ekor; babi 3 ekor; itik 15 ekor.

Berdasarkan Analisa Kawasan, maka peringkat Kabupaten Solok Selatan berada pada 232, dengan kelas kegiatan 2 untuk kawasan penghasil Padi Nasional dengan prioritas kegiatan pada budidaya (*on farm*). Sedangkan sebagai Kawasan penghasil jagung berada pada peringkat 230 dengan kelas kegiatan 2 sebagai kawasan penghasil Jagung Nasional dengan fokus kegiatan pada peningkatan budidaya jagung (*on farm*).

Pada Gambar 3. dapat dilihat bahwa jumlah penduduk terbanyak pada tahun 2016 berada pada Kecamatan Sangir Batang Hari yaitu 19.076, pada hal sebelumnya jumlah penduduk kecamatan ini berada pada peringkat ke dua, terjadi pertambahan penduduk yang signifikan pada tahun 2013 sebanyak 3.101 orang, terindikasi terjadinya ledakkan penduduk disebabkan perpindahan penduduk karena serapan sektor pertambangan dan galian emas sepanjang sungai Batang Hari dari luar Sangir Batang Hari bekerja sebagai buruh tambang, dan juga adanya penambahan karyawan lapangan di perusahaan HTI PT. BRM dan perkebunan Besar PT. INCASI RAYA GROUP. Dilain pihak lonjakan penduduk juga terjadi di Kecamatan Sangir Balai Janggo pada tahun 2010 dengan pertambahan 2.973, diindikasikan hal ini terjadi karena adanya rekruitmen tenaga buruh harian di 6 perusahaan besar swasta perkebunan sawit di Sungai Kunyit dan Talao Sungai Kunyit.

Pertumbuhan penduduk secara total dapat dilihat pada tahun 2010 sebesar 13,3 %, tahun 2011 sebesar 2,1 % dan tahun 2012 sebesar 1,9%, tahun 2013 sebesar 8,3 %, tahun 2014 1,9% dan pada tahun 2015 pertumbuhan penduduk menjadi 5,6 %. Sehubungan dengan pertumbuhan penduduk yang berfluktuasi secara tajam, maka perkiraan jumlah penduduk untuk 15 tahun yang akan datang dipakai angka pengganda rata-rata berdasarkan kelahiran rata-rata per 1.000 penduduk sebesar 2 %, dengan menggunakan regresi atau system bunga-berbunga, maka jumlah penduduk 48.949 orang, dapat diperkirakan jumlah penduduk menjadi 65.879 orang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

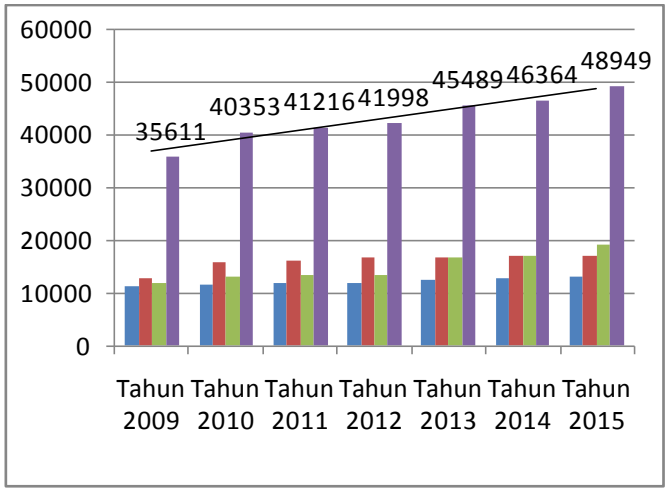

Gambar3 :Grafik perkiraan Jumlah Penduk Kecamatan (Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo)

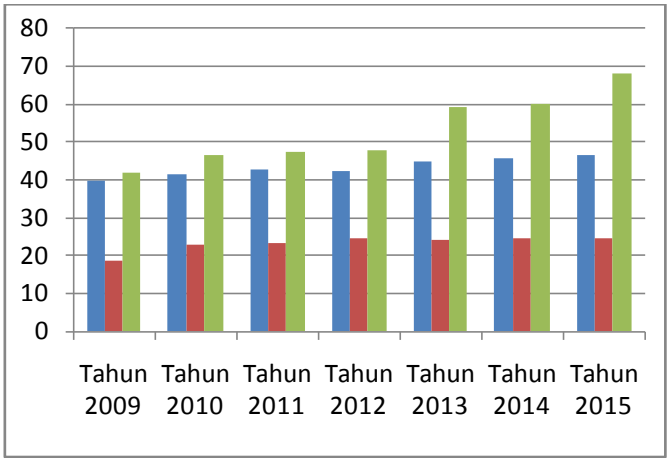

Gambar4 :Grafik Jumlah Kepadatan Penduduk Kecamatan (Sangir Jujuan, Sangir Balai Janggo) orang/km2

3.8. Analisis Sosial

Dalam upaya mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat, perlu dilakukan analisis aspek sosial dan kependudukan suatu Rencana Kawasan Transmigrasi (RKT).Analisis sosial dan kependudukan pada hakekatnya adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam mengembangkan kawasan untuk mencapai pemanfaatan sumberdaya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.Pada hakekatnya indikator sosial kependudukan tidak berdiri sendiri melainkan terkait erat dengan kegiatan lainnya, yaitu aspek ekonomi dan kelembagaan.Seringkali sulit untuk menemukan indikator yang sederhana dan hanya mengukur satu aspek saja karena keberhasilan pengembangan suatu kawasan sangat ditentukan oleh kinerja sektoral dan berbagai pelaku utama pembangunan (*stakeholders*) seperti pemerintah, swasta dan masyarakat sendiri.Analisis sosial dapat diperoleh melalui hasil pengukuran beberapa indikator sosial (*urban social indicator*) yaitu berupa kualitas sumberdaya manusia, Indikator komposit yang digunakan adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM/*Human Development Indeks (HDI*).

3.9. Program Keluarga Harapan (PKH) dan Millenium Developmen Goals (*MDGS*) terdiri dari :

1. Menanggulangi kemiskinan dan kelaparan kelaparan (MDGs & PKH)
2. Mencapai pendidikan dasar untuk semua (MDGs & PKH)
3. Mendorong kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan (MDGs & PKH)
4. Menurunkan angka kematian anak (MDGs & PKH)
5. Meningkatkan kesehatan ibu (MDGs & PKH)
6. Memerangi HIV/AIDS, malaria, dan penyakit menular lainnya (PKH)
7. Memastikan kelestarian lingkungan hidup (PKH)
8. Mengembangkan kemitraan global untuk pembangunan (PKH)

a. Angka kemiskinan dan penduduk miskin 2010-2015

ISBN : 978-602-73463-1-4

Penurunan Angka Kemiskinan Solok selatan dari tahun 2009 sampai tahun 2014 yaitu; angka kemiskinan tahun 2009 adalah 11.66 % dari total jumlah penduduk , tahun 2010 turun menjadi 11.11%, tahun 2011 turun menjadi 10.61%, tahun 2012 turun menjadi 9.38 %, tahun 2013 turun lagi menjadi 8.12 %, dan pada tahun 2014 turun menjadi 7.36 %.

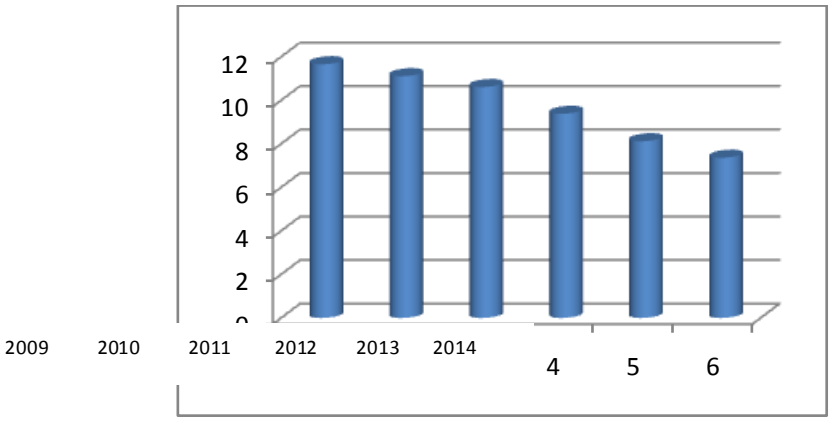

Gambar 5 : Penurunan Angka Kemiskinan 2009 s/d 2014

b. Pendidikan dasar untuk semua (MDGs & PKH)

Pada tahun 2014,berdasarkan data dari DinasPendidikan Kabupaten SolokSelatan, Taman Kanak-kanak(negeri dan swasta) sebanyak 84 .Sekolah Dasar, baik negeri danswasta dari 143 sekolah padatahun 2013menjadi 146 padatahun 2014. Lalu SekolahMenengah Pertama (negeri danswasta) pada tahun 2014sebanyak36 sekolah, sedangkan SekolahMenengah Atas (negeri danswasta) sebanyak 9 sekolah padatahun 2014. Sementara untuklembaga perguruan tinggi tidakmengalami banyak penambahandari tahunsebelumnya hanya 1 unit.

c.Kesehatan

Berdasarkan data dariDinas Kesehatan Kabupaten SolokSelatan, pada tahun 2014 terdapat 8puskesmas, 49 puskesmaspembantu, dan 269 posyandu.Jumlah Dokter pada tahun2014 sebanyak 54 orang,sedangkanbidan dari 90 orang pada tahun2013 menjadi 82 orang pada tahun2014. Jumlah perawat sebanyak 207orang pada tahun 2014.

d.Agama

Kehidupan beragama diKabupaten Solok Selatan didominasioleh penduduk yang menganutagama Islam.Berdasarkan data diKantor Kementrian Agama KabupatenSolok Selatan, hingga tahun2014 penduduk yangmenganutagama Islam, sebanyak 99,36 persen.Pada tahun 2014, terdapat 175masjid, 120 langgar dan 127mushalla.

e. Kesetaraan Jender Bidang Kesempatan Kerja (PKH dan MDGs)

Masih terdapat kesenjangan kesempatan kerja antara laki-laki dengan perempuan yaitu; laki-laki bekerja sebanyak 41.859 orang (63.4 %), sedangkan peluang kerja bagi perempuan 24.187 orang (36,7 %). Angka ketimpangan ini tidak banyak perubahan dari tahun-tahun sebelumnya, dimana tahun 2012, peluang bagi laki-laki adalah (66,7 %) dan perempuang (33,3 %). Semestinya kesempatan kerja bagi perempuan harus ditingkatkan pada masa datang.

3.10. Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Untuk mengukur kenaikan kualitas sumber daya manusia indikator yang dapatdipakai yaituIndeks Pembangunan Manusia (IPM). Indeks Pembangunan Manusia dapatmenunjukan kemajuan pembangunan manusia, baik dibidang kesehatan, pendidikan danekonomi. Kabupaten Solok Selatan berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia jikadibandingkan dari tahun 2008 sampai 2009 menunjukkan trend menaik yaitu dari 68,06 tahun 2008 menjadi 68,67 pada tahun 2009 belum mampu melampauibeberapa kabupaten kota di Provinsi Sumatera Barat dan berada dibawah rata-rata IPMProvinsi Sumbar. Menurut UNDP nilai IPM < 50 termasuk rendah, 50 > IPM ≤ 66 menengahbawah, 66 < IPM < 80 menengah atas, dan > 80 tinggi). Hal ini menunjukkan bahwa nilai IPMKabupaten Solok Selatan 68,67 termasuk kategori menengah atas. Berdasarkan Ranking IPMKab/Kota Di Sumatera Barat Se Sumatera Tahun 2009, Kabupaten Solok Selatan mendudukirangking ke 17

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dari 19 Kabupaten/kota se Sumatera Barat . Hal ini masih dapat ditingkatkanlagi untuk menaikkan IPM melalui potensi-potensi yang dimiliki Kabupaten Solok Selatan.

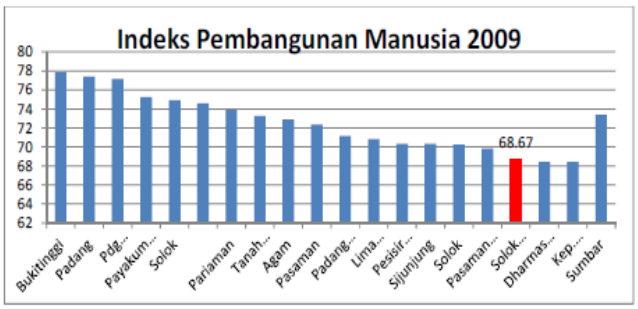

Gambar 3.1. Index Pembangunan Manusia Tahun 2008

Sumber: Bappeda Provinsi Sumbar 2010

Gambar 6 : Indeks Pembaangunan Manusia

KESIMPULAN

1. Kabupaten Solok Selatan merupakan salah satu dari 46 daerah tertinggal di Sumatera, memiliki potensi untuk dapat keluar dari status tertinggal pada tahun 2019 melalui program terpadu untuk menciptakan pusat nilai tambah dengan program pengembangan kawasan perkotaan baru Dusun Tangah dengan daerah hinterland 3 kecamatan yaitu Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Batang Hari).
2. Berdasarkan analisis LQ, Terdapat 5 sektor unggulan yang dapat dijadikan sebagai basis pengembangan ekonomi kawasan yaitu ; sektor pertanian, kehutanan dan perikanan, sektor pertambangan dan penggalian, sektor konstruksi, perdagangan dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, jasa kesehatan dan kegiatan sosial.
3. Konsep pembangunan yang dapat ditawarkan agar status Kabupaten Solok Selatan sebagai daerah tertinggal dapat keluar dan maju dimulai dengan perencanaan pengembangan Kawasan Transmigrasi sebagai kawasan hinterland dan dilanjutkan dengan perencanaan kawasan perkotaan baru sebagai pusat industri (***Vallue Added Centre***).
4. Petani di wilayah studi 3 Kecamatan Sangir Jujuan, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kecamatan Sangir Batang Hari termasuk kategori petani berlahan sempit dengan kepemilikan lahan hanya 0,6 Ha per jiwa dengan jumlah penduduk 48.949 orang, maka diperlukan upaya keras untuk menciptakan lapangan usaha non pertanian (Agro Industri, jasa dan perdagangan, pertambangan dan penggalian bahkan industri peleburan loham dasar).
5. Diperlukan penelitian lebih lanjut yaitu perencanaan rinci tentang potensi dan lokasi agar dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan terutama bagi Pemda Solok Selatan, pemerintah Provinsi Sumatera Barat bahkan pemerintah Republik Indonesia.
6. Sehubungan dengan keterbatasan kandungan RTRW Solok Selatan 2012-2032, perlu dilakukan revisi sesuai dengan perkembangan dan kebijakan pemerintah dan perkembangan wilayah sekitar baik Pusat Kegiatan Nasional, Pusat Kegiatan Wilayah maupun Pusat Kegiatan Kabupaten.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik KabupatenSolok Selatan. 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015. Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Solok Selatan. BPS. Kabupaten Solok Selatan.

[2] Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung

[3] Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Solok Selatan 2012-2032.

[4] Peraturan Pemerintah RI No 34 tahun 2006 tentang Jalan

[5]Peraturan Presiden Nomor. 28 Tahun 2008 tentang

[6] Peraturan Presiden Republik Indonesia N0 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Sumatera

[7] Peraturan Presiden RI No 3 tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional

[8] Peraturan Presiden RI Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI)2011-2025.

[9] Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis;
[10] Permen PU Nomor : 15/PRT/M/2012, tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis.
[11] PP Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian;
[12] Undang-Undang No. 29 Tahun 2009 Tentang Ketransmigrasian yang mengatur perencanaan pembangunan kawasan transmigrasi;
[13] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KAWASAN BANJIR DAN POLA ALIRAN SUNGAI BERDASARKAN MORPHOMETRI PADA DAERAH ALIRAN (DAS) BATANG KURANJI SUMATERA BARAT

Lusi Utama[1)], Amrizal Saidi[2)], Isril Berd[2)], Zuherna Mizwar[3)]

[1)] Ilmu-Ilmu Pertanian/Universitas Andalas Padang/ mahasiswa S3 Universitas Andalas
[2)]Ilmu-Ilmu Pertanian/Universitas Andalas Padang/dosen Universitas Andalas
[3)]Fakultas Teknik Sipil/Universitas Bung Hatta Padang/ dosen Universitas Bung Hatta

lusi_utamaindo115@yahoo.co.id

Naskah diterima :21 Februari 2017 Naskah direvisi : 21 Februari 2017 Disetujui terbit : 2 Maret 2017

ABSTRAK

Banjirtelah melanda Batang Kuranji pada tanggal 24 Juli 2012 dan 12 September 2012 yaitu berupa air yang bercampur lumpur telah memporakporandakan rumah. Pemerintah Kota Padang mengklaim kerugian Rp 263,9 Milyar (Padang Ekspres, 28 Juli 2012). Penelitian ini bertujuan mengetahui zona banjir berdasarcurah hujan, parameter banjir dan morphometri DAS. Parameter banjir: ketinggian, kemiringan, jenis tanah, buffer dan tata guna lahan. Morphometri: kerapatan aliran, luas DAS, keliling DAS, kemiringan DAS, kemiringan sungai, panjang sungai, ketinggian DAS, dan ordo sungai.

Dengan menggunakan metoda Gumbel, Hasper dan Wedwen, dan data hujan tahun 2003 sampai tahun 2015, didapat tinggi curah hujan 310 mm. Besar debit dihitung menurut Melchior dan Hasper 1125.86 m³/detik.

Penggunaan software Watershed Modelling System (WMS), ditentukan bobot dan skor yang dibagi 5 tingkatan pembagian kerentanan berdasar interval kontur dan kelerengan yaitu 0%-2% (Datar), 2%-8% (Landai), 8%-15% (agak Curam), 15%-40% (Curam), dan >40% (Sangat Curam). Didapat dari 15 kelurahan, 3 kelurahan dengan tingkat kerentanan rendah, artinya aman dari bahaya banjir karena mempunyai kemiringan lereng yang tajam (>15%), sehingga mampu mengalirkan air yaitu kelurahan Gunung Sarik, Kapalo Koto danLimau Manis, tetapi rawan terhadap longsor. 12 kelurahan lainnya dengan kerentanan sedang.

Melalui peta Citra Landsat serta menggunakanARGIS 10.1,diperoleh morphometri DAS Kuranji: Luas DAS 202,7 km2, Panjang sungai utama 32.41 km, panjang anak sungai 242.34 km. Kerapatan aliran 1,36/km. Kemiringan DAS besar 40% seluas 13.118,18 ha, ketinggian DAS besar 1000 m adalah 5.208,86 ha, keliling DAS 74.13 km, luas lahan pemukiman 3.896,59 ha. Batang Kuranji termasuk ordo lima dengan pola aliran dendritik.

***Kata kunci**: Banjir, Morphometri, DAS*

PENDAHULUAN

Bencana banjir dapat dikategorikan sebagai fenomena alam, yang disebabkan oleh beberapa faktor antara lain:

a. Fenomena alam, seperti curah hujan, iklim, morphometri wilayah
b. Aktivitas manusia (Proses Man-Made) yang tidak terkendali dalam mengeksploitasi alam, yang mengakibatkan kondisi alam dan lingkungan menjadi rusak.

Sehubungan dengan masalah banjir yang terjadi di Kota Padang bahwa dari tahun 2012, dengan intensitas hujan yang tinggi akan terjadi banjir. Seperti diketahui bahwa penyebab banjir selain intensitas hujan yang tinggi juga disebabkan oleh kondisi alam (letak geografis wilayah,kondisi toporafi, peristiwa alam (curahhujan dan lamanyahujan, pasang, arus balik dari sungai utama, pembendungan aliran sungai akibat longsor,sedimentasi dan aliran lahar dingin), dan aktifitas manusia(pembudidayaan daerah dataran banjir), peruntukan tata ruang di dataranbanjir yang tidak sesuai dengan fungsi lahan, belum adanya pola pengelolaan danpengembangan dataran banjir, permukiman di bantaran sungai, sistemdrainase yang tidak memadai, terbatasnya tindakan mitigasi banjir,kurangnya kesadaran masyarakat di sepanjang alur sungai,penggundulan hutan di daerah hulu. Fenomena alam berupa kerapatan aliran, luas DAS, kemiringan DAS, kemiringan sungai,

panjang sungai dan ordo sungai akan sangat berpengaruh pada debit yang terjadi pada sebuah DAS. Mengetahui faktor penyebab banjir, maka perlu dilakukan penelitian bentuk Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji. Ada beberapa hal yang harus diteliti adalah :

1. Bagaimana karakteristik Daerah Aliran Sungai (DAS) Batang Kuranji saat sekarang yang menyebabkan banjir
2. Apakah ada keterkaitannya dengan parameter penyebab terjadinya banjir, seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang
3. Penentuan Zona yang rentan banjir di sepanjang Batang Kuranji

Untuk lebih mempertajam fokus penelitian pembatasan substansi dilakukan sebagai berikut:
Ditinjau dari segi phisik, pengaruh parameter banjir yaitu ketinggian, kemiringan, jenis tanah, curah hujan, buffer dan tata guna lahan. Meski telah dilakukan perbaikan berupa normalisasi sungai, memperbaiki drainase, serta membuat bangunan pengendali sedimen berupa tanggul menurutJian Chen [5], banjir masih tetap terjadi. Beberapa peneliti telah melakukan penelitian berdasar parameter banjiryaitu Emeka Daniel Oruonye [1], Hanna Hajdukiewicz [2],and Surabhi Bhatt [7]dilakukan penelitian berdasar morphometri. Hal ini disebabkan karena banjir terjadi akibat peristiwa yang sangat kompleks yaitu dari parameter banjir, morphometri dan geometri DAS .
Menurut [3], bahwa :

- DAS adalah Daerah Aliran Sungai, merupakan wilayah yang dikelilingi dan dibatasi oelh topografi berupa punggung bukit, dimana hujan yang jatuh diatas DAS mengalir melalui titik keluar (outlet) yang nantinya bermuara ke laut. Satu DAS dapat terdiri dari beberapa Sub DAS. DAS merupakan tempat berkumpulnya air hujan ke suatu sistem aliran sungai. Sehingga bentuk DAS sangat mempengaruhi pola aliran dan ketajaman puncak aliran sungai.
- Karakteristik bentuk DAS adalah jalur sungai yang mengalir ke sungai utama. Terbagi dalam bentuk DAS Bulu Burung dimana jalur anak sungai mengalir menuju sungai utama, debit banjir kecil dan banjir berlangsung lama. Bentuk DAS Radial dimana bentuk DAS menyerupai kipas atau lingkaran. Anak sungai berkonsentrasi ke satu titik secara radial. Banjir besar terjadi pada setiap titik pertemuan anak-anak sungai, dan DAS Paralel berbentuk 2 (dua) jalur yang sejajar bersatu di bagian hilir. Banjir sering terjadi pada titik pertemuan anak sungai.Karakteristik bentuk DAS menurut[8], dapat ditentukan menggunakan peta topografi

Morphometri sungai yaitu jaringan phisik DAS secara kuantitatif yaitu luas DAS, panjang sungai, lebar DAS, tingkat percabangan DAS, kerapatan sungai, ordo dan kemringan sungai.

- Panjang sungai, dihitung sebagai jarak datar dari muara (outlet) ke hulu sungai. Seluruh data untuk morphometri dalam menentukan parameter menggunakan peta Citra dan peta topografi.
- Lebar sungai adalah pembagian luas DAS dengan panjang sungai
- Ordo disebut juga percabangan sungai adalah posisi percabangan alur sungai didalam urutannya terhadap induk sungai. Alur sungai paling hulu yang tidak memiliki cabang disebut ordo pertama, pertemuan dua ordo pertama disebut ordo kedua atau pertemuan ordo pertama dengan ordo kedua disebut ordo ketiga dan seterusnya
- Kerapatan sungai adalah indeks yang menunjukkan banyaknya anak sungai dalam suatu DAS. Indeks tersebut dihitung dari rasio total panjang jaringan sungai terhadap luas DAS yang bersangkutan. Semakin tinggi tingkat kerapatan aliran sungai, berarti semakin banyak air yang dapat tertampung di badan-badan sungai.Kerapatan aliran sungai adalah suatu angka indeks yang menunjukkan banyaknya anak sungai di dalam suatu DAS. Indeks tersebut dapat diperoleh dengan persamaan:

$$Dd = L/A$$

dimana:
Dd= indeks kerapatan aliran sungai (km/km)
L= jumlah panjang sungai termasuk panjang anak-anak sungai (km)
A= luas DAS (km^2)
Indeks kerapatan aliran sungai diklasifikasikan sebagai berikut:
Dd: < 0.25 km/km : rendah
Dd: 0.25 - 10 km/km : sedang
Dd: 10 - 25 km/km : tinggi
Dd: > 25 km/km : sangat tinggi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Berdasarkan indeks tersebut dapat dikatakan bahwa indeks kerapatan sungai menjadi kecil pada kondisi geologii yang permeable, Resiko banjir rendah, alur sungai yang melewati batuan dengan resistensi keras yang mengakibatkan angkutan sedimen yang terangkut kecil, demikian sebaliknya.

- Pola Aliran menurut Soewarno, 1991 [6], dapat berupa percabangan pohon (dendritik), Memiliki tekstur atau kerapatan sungai yang dikontrol oleh jenis batuan.
- Tekstur sungai adalah panjang sungai persatuan luas.
- Pola aliran radial merupakan pola aliran yang menyebar secara radial dari suatu titik tetentu. Pola Aliran Trellis adalah pola aliran berbentuk pagar dan dikontrol oleh geologi, berpola sejajar, mengalir searah kemiringan lereng dan tegak lurus dengan saluran utama. Pola aliran paralel adalah aliran yang terbentuk oleh lereng yang curam, dikarenakan morphologi lereng terjal, maka bentuk aliran sungai akan berbentuk lurus mengikuti arah lereng. Pola aliran dapat dilakukan dengan menggunakan peta Citra
- Luas DAS merupakan luasan DAS yang diperhitungkan melalui peta topografi dengan menghubungkan punggung kontur terdekat dengan sungai utama. Keliling DAS adalah panjangnya garis hubung punggung kontur yang terdekat dengan sungai utama.
- Kemiringan Lereng DAS adalah perbandingan ketinggian dan panjang suatu unit DAS.
- Gradien Sungai Utama adalah kemiringan sungai yang merupakan perbandingan perbedaan tinggi hulu dan hilir sungai dengan panjang sungai.

Berdasar Parameter-parameter kerawanan banjir, Kombinasi parameter yang digunakan pada penelitian-penelitian umumnya berbeda-beda.Hal ini lebih disebabkan dari pengaruh karakteristik daerah yang diteliti.Perbedaan jenis parameter dan jumlah parameter yang digunakan pada pemetaan kerawanan banjir menyebabkan proporsi atau besarnya nilai bobot disesuaikan dengan jumlah parameter yang digunakan dan pengaruh parameter tersebut terhadap kejadian banjir.Peta zona kerentanan dengan menggunakan peta Citra tahun 2012, digunakan sebagai dasar analisa penentuan tingkat kerawanan banjir. Adapun parameter banjir yang akan diteliti adalah berdasar : Jenis tanah, curah hujan, kemiringan lereng, ketinggian, tutupan lahan dan buffer sungai, dengan menggunakan metoda analisa adalah : dalam memberikan nilai tiap jenis sifat atau besaran dari parameter penyebab banjir bandang, semakin kecil nilai yang diberikan berarti tingkat kerentanan atau kerusakan, semakin baik. Bobot diberikan berdasar dari tingginya pengaruh parameter yang menyebabkan terjadinya banjir.

METODOLOGI

1. Metode Pengumpulan Data

1. Metode pengumpulan data primer pada Batang Kuranji, didapat dengan melakukan observasi, pengukuran dan pengamatan dilapangan, wawancara serta melakukan pengamatan visual sekaligus melakukan dokumentasi (foto).
2. Penggunaan peta Citra Landsat
3. Survey pengumpulan data sekunder melalui instansi dan institusi terkait seperti Dinas Pengembangan Sumber Daya Air, Bappeda, Dinas Kelautan dan Perikanan, BPS Kota Padang dan Propinsi Sumatera Barat, guna mendapatkan data-data yang terkait.
4. Peta topografi dan satelit

2. Metode Analisis dan Deskriptif Analisis

Menggunakan teori, dan kemudian membandingkan hasil yang dianalisa secara teori dengan keadaan eksisting untuk dapat diambil suatu kesimpulan baik secara kualitatif maupun kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Menentukan kawasan banjir

KELURAHAN AIR PACAH (LUAS = 47.29119 HA)

Tabel I. Tutupan Lahan (Hasil Analisa)

Jenis	Skor	Luas (Ha)	Luas Total (Ha)
1.Tegalan/Tanah Gambut	100		
2.Sawah	80	15.09595+0.14643	15.242025
3.Pemukiman	60	22.0425+0.01714	22.05964
4.Kebun	40	9.96917	9.96917
5.Hutan	20		

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 2: Tingkat Banjir Batang Kuranji (Hasil Analisa)

Lokasi	Luas Genangan(Ha)	Nilai Skoring Berdasar Luas Genangan	Nilai Skoring Berdasar Parameter Banjir	Tingkat Kerawanan Berdasar Parameter Banjir
I. Kec. Koto Tangah	**157,13257**			
I.1 Kel. Aie Pacah	47,2712	442.01	6800	Sedang
I.2 Kel. Dadok Tunggul Hitam	34,35521	431.06	6400	Sedang
I.3 Kel. Lubuk Minturun	75,50616	442.36	6600	Sedang
Ii. Kec. Kuranji	**141,44005**			
Ii.1 Kel. Gunung Sarik	41,12543	449.763	4500	Rendah
Ii.2 Kel. Kalumbuk	0,06325	460	7200	Sedang
Ii.3 Kel. Kuranji	82,95131	425.98	4900	Sedang
Ii.4 Kel. Pasar Ambacang	3,74869	440	5900	Sedang
Kel. Sei Sapih	13,55137	459.55	6400	Sedang
Iii. Kec. Nanggalo	**56,69358**			
Iii.1 Kel. Kurao Pagang	55,81243	458.44	6400	Sedang
Iii.2kel. Surau Gadang	0,88115	460	7200	Sedang
IV. Kec. Pauh	**97,97834**			
Iv.1 Kel. Cupak Tangah	0,39502	420	5500	Sedang
Iv.2 Kel. Kampung Dalam	11,75065	432.09	5100	Sedang
Iv.3 Kel. Kapalo Koto	2,70149	439.744	4200	Rendah
Iv.4 Kel. Lambung Bukik	59,57248	379.18	5600	Sedang
Iv.5 Kel. Limau Manis	23,5587	398.37	4500	Rendah
Grand Total	**453,24454**	**6538.547= 6539**		

Rentang skoring 2000 – 4667 berada pada tingkat kerawanan rendah dan rentang 4668 – 7335 berada pada tingkat kerentanan sedang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

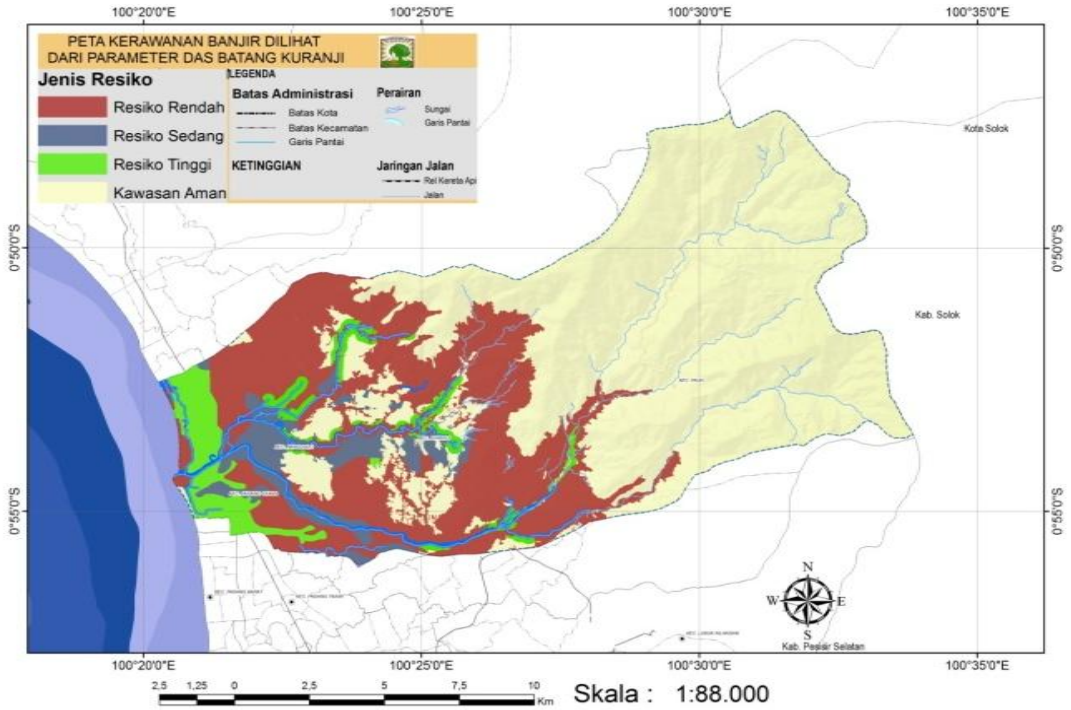

Gambar 1. Kawasan banjir berdasar parameter curah hujan, buffer, kemiringan, ketinggitutupan lahan, jenis tanah(Hasil analisa)

2.Morphometri:

Peta DAS Kota Padang
Hijau = DAS Air Dingin, Coklat = DAS Batang Kuranji , Hijau muda = DAS Batang Arau

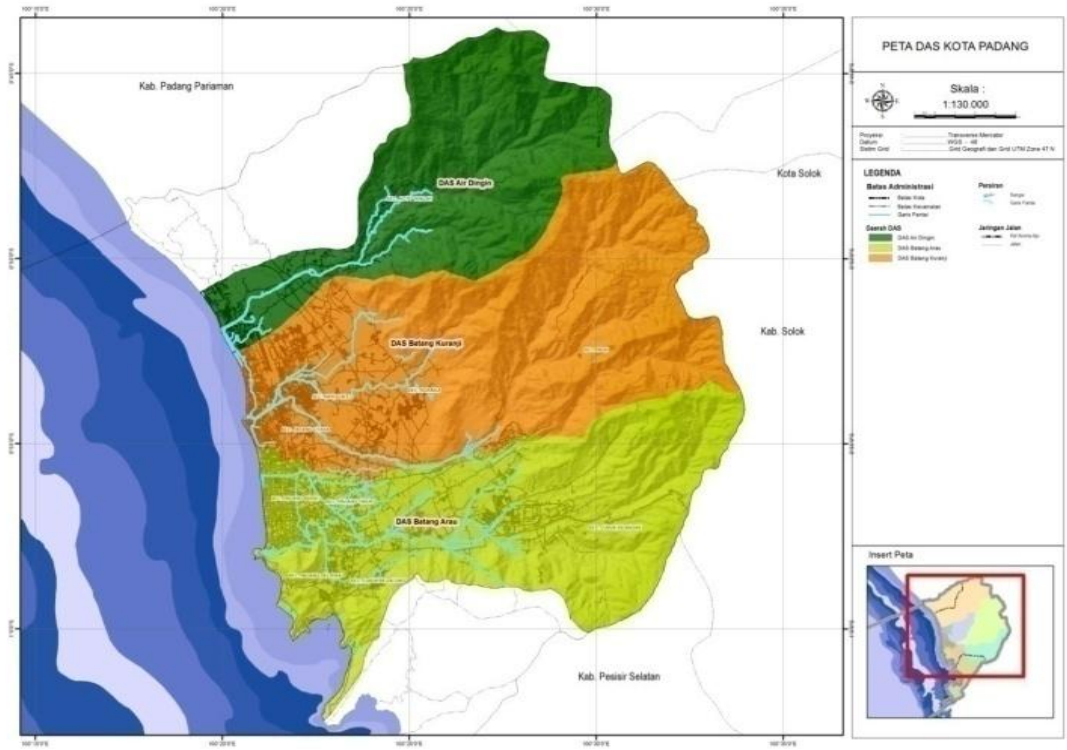

Gambar 2. DAS Air Dingin, DAS Batang Kuranji danDAS Batang Arau (Hasil Analisa)

ISBN : 978-602-73463-1-4

Morphologi DAS Batang Kuranji berdasar peta 2014

1. Karakteristik DAS Batang Kuranji

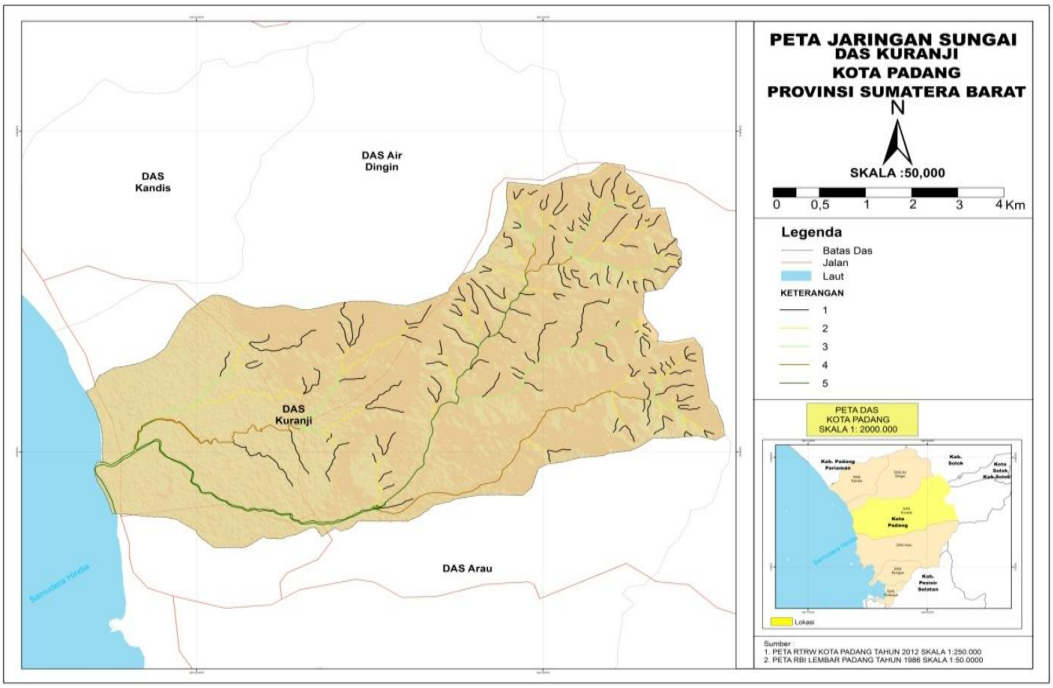

Gambar 3. Jaringan DAS Kuranji (Hasil analisa)

Daerah Aliran Sungai Batang Kuranji mempunyai luas 202,7 km^2 dengan 5 sub-sub daerah aliran sungai yang mengalir pada Batang Kuranji. DAS Batang Kuranji berada dalam wilayah utuh Kota Padang:

- Bagian Upstream / Hulu berada pada puncak Bukit Tinjau Laut dengan Elevasi (El.) + 1.605 m diatas muka laut (d.p.l) dan Gunung Bonsu El. 1.500 m d.p.l, Kec. Pauh;
- Bagian Middle Stream / Tengah berada diantara Gunung Nago El. 100 m dan Koto Tuo El. 80 m hingga El. 30 m, Kecamatan Kuranji;
- Bagian Down Stream / Hilir berada di Kecamatan Nanggalo El. 30 m hingga Muara Bt. Kuranji, Kecamatan Padang Utara.

2. **Perhitungan luas DAS / Sub DAS dan panjang sungai berdasarkan hasil digitasi software.**

Perhitungan panjang sungai utama Batang Kuranji dari hulu yaitu Puncak Bukit Tinjau Laut dengan ketingggian 1.605 m d.p.l hingga muara sepanjang ± 32,41 km. Lebar adalah 80 meter

Kerapatan drainase DAS atau kerapatan aliran yaitu panjang aliran sungai per kilo meter persegi luas DAS. Dengan total panjang keseluruhan sungai utama dan anak-anak sungai Batang Kuranji sepanjang ± 274,75 km per luas DAS Batang Kuranji 202,7 km^2.

Dd (kerapatan drainase DAS) =

$$\frac{\text{L (panjang sungai utama \& anak-anak sungai km)}}{\text{A (luas DAS km}^2\text{)}}$$

= 274,75 km/202,7 km^2 = 1,36 km/km^2. Kerapatan Batang Kuranji adalah kerapatan sedang .

Tabel 3. Kemiringan Lereng DAS Batang Kuranji (Hasil analisa)

Kemiringan lereng	Luas (ha)
DAS Batang Kuranji	22067,78
> 40 %	13118,18
0 - 2 %	6239,61
15 - 40 %	2019,78
2 - 15 %	690,21

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

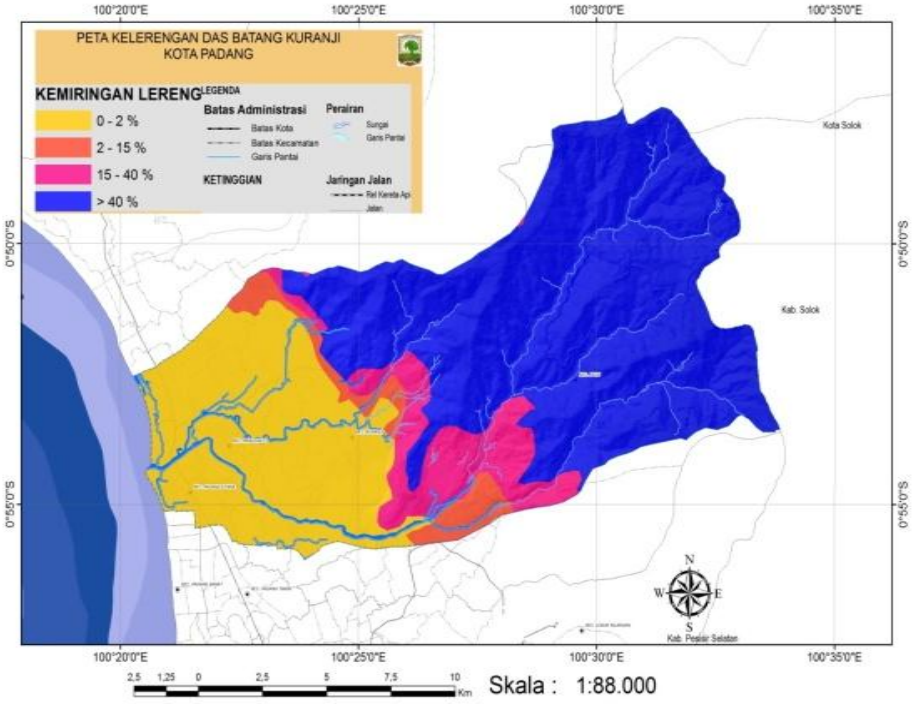

Gambar 4: Kemiringan DAS (Hasil analisa)

Tabel 4. Ketinggian DAS Batang Kuranji (hasil analisa)

Ketinggian	Luas (Ha)
DAS Batang Kuranji	**22067,78**
> 1000 m	5208,86
0 - 25 m	5923,33
100 - 500 m	4192,46
25 - 100 m	1307,33
500 - 1000 m	5435,80

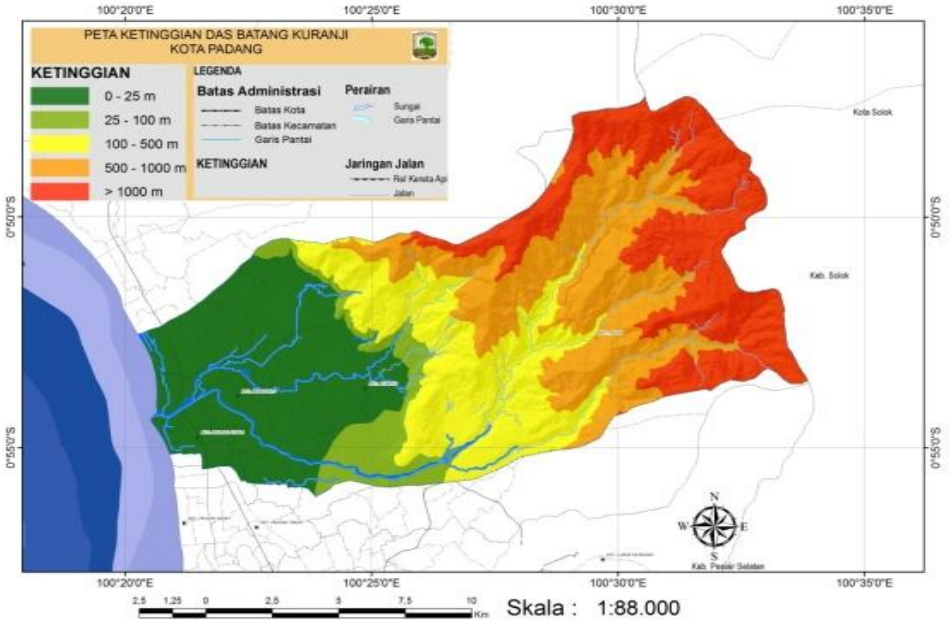

Gambar 5 : Peta Ketinggian (Hasil analisa)

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 5. Geologi DAS Batang Kuranji

DAS Batang Kuranji	22067,78 (ha)
Aluvium	8051,54 (ha)
Batuan gunung api	14016,24 (ha)

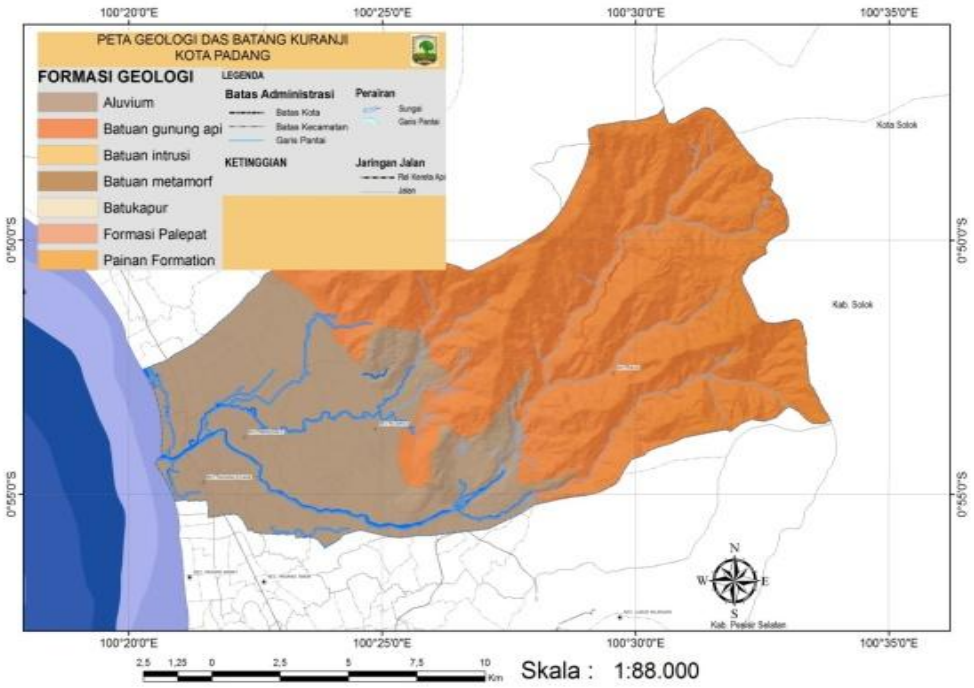

Gambar 6 : Geologi DAS (Hasil analisa)

Tabel 6 .Penggunaan lahan DAS (Hasil Analisa)

DAS Batang Kuranji	**22067,78 (ha)**
Bandara	116,47 (ha)
Betinggisik	5,12 (ha)
Hutan	14860,70 (ha)
Kebun	834,74 (ha)
Ladang	10,11 (ha)
Lahan Kosong	16,78 (ha)
Permukiman	3896,59(ha)
Sawah	2289,42 (ha)
Semak/Belukar	37,86 (ha)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

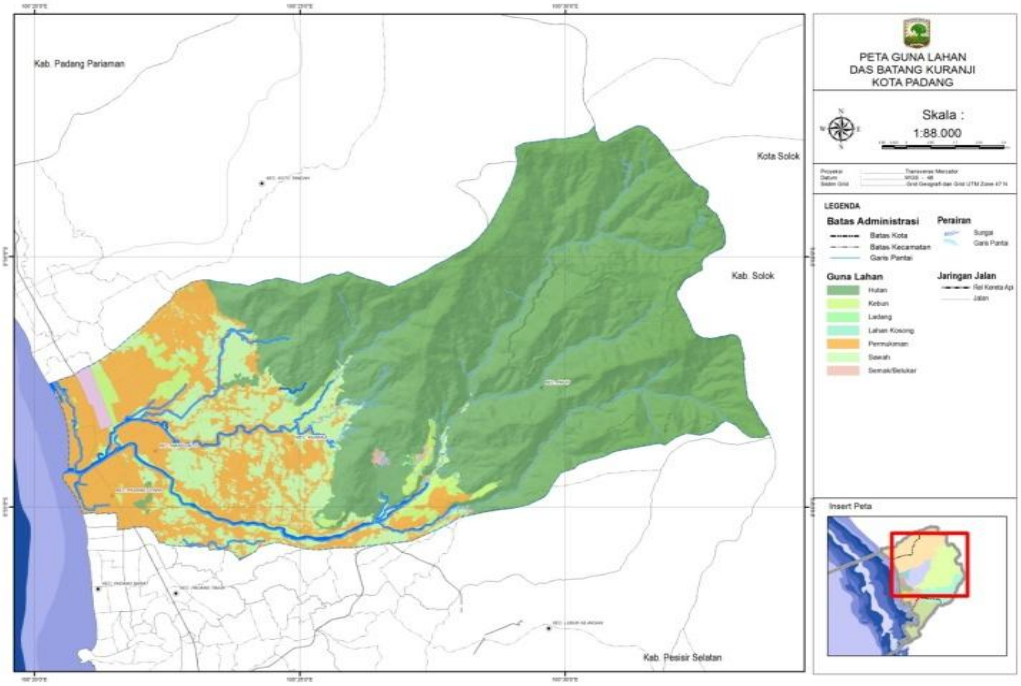

Gambar 7: Penggunaan lahan DAS (Hasil analisa)

Tabel 7. Jenis tanah DAS Batang Kuranji (Hasil analisa)

DAS Batang Kuranji	**22067,78 (ha)**
Aluvial	5445,90 (ha)
Andosol	2917,00 (ha)
Latosol	12921,16 (ha)
Organosol dan Glei Humus	499,85 (ha)
Regosol	283,86 (ha)

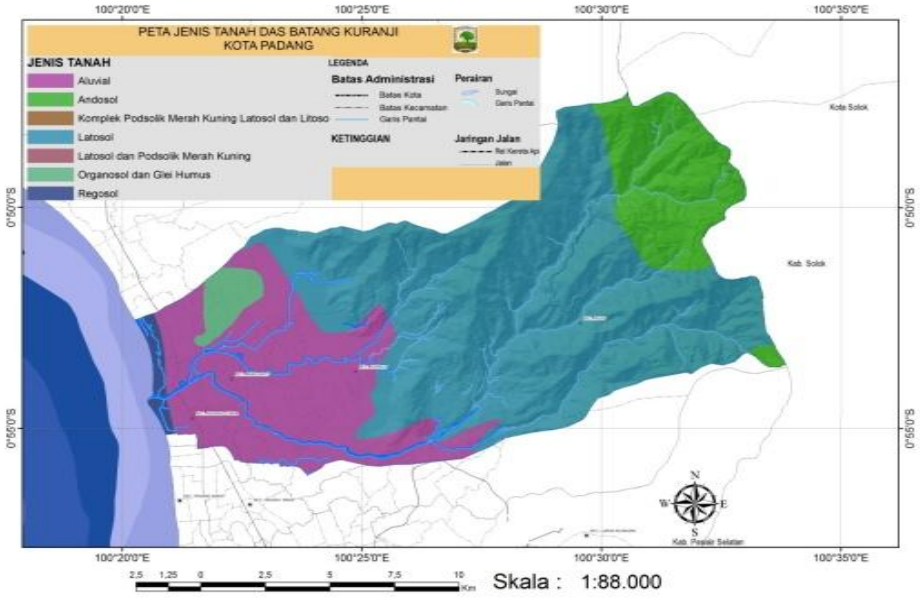

Gambar 8 : Jenis Tanah (Hasil Analisa)

ISBN : 978-602-73463-1-4

Ordo dan Pola aliran Batang Kuranji:
Termasuk Pola Dendritik ordo 5

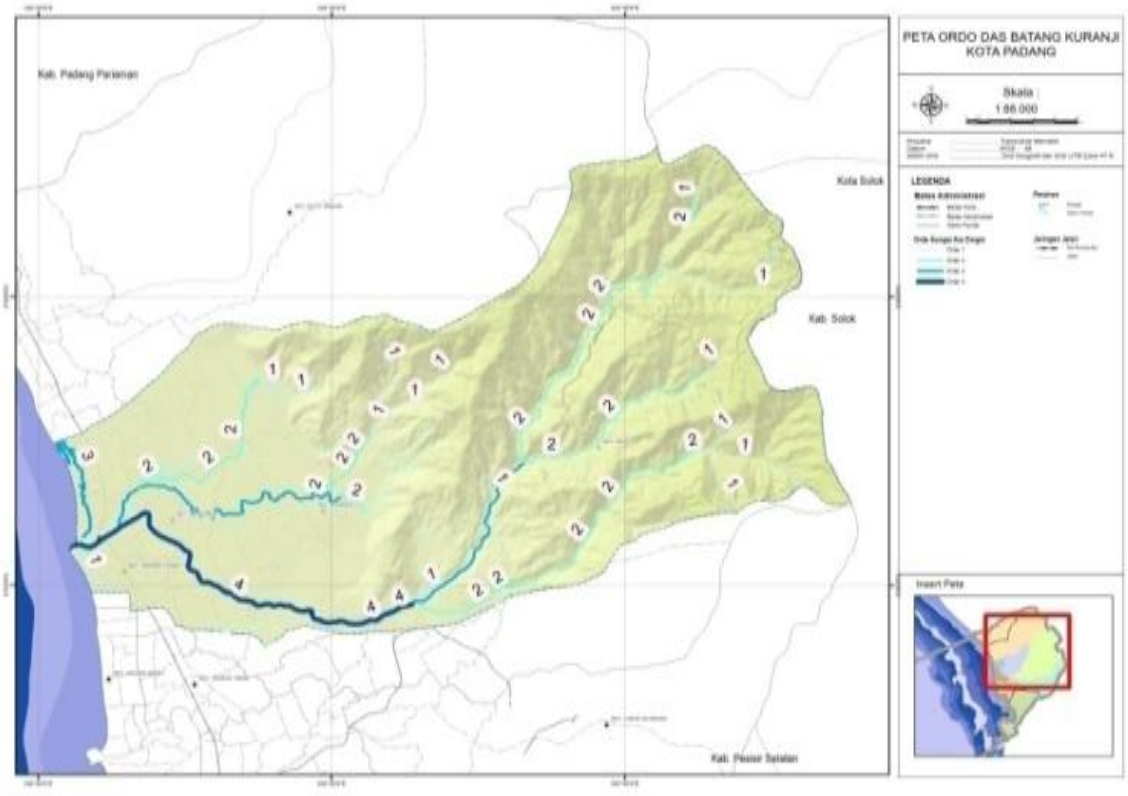

Gambar 9. Pola Aliran Batang Kuranji (Hasil Analisa)

Kesimpulan

1. Daerah rawan banjir umumnya terdapat di daerah tengah dan hilir, dengan kemiringan lereng datar. Sedang daerah yang berpotensi mengakibatkan terjadinya banjir adalah daerah hulu, karena mempunyai tingkat kelerengan yang tajam dan berbukit. (tabel 2)
2. Terdatanya luas genangan, skoring dan tingkat kerawanan banjir. Dari hasil skoring disimpulkan daerah Batang Kuranji merupakan daerah yang berada pada kerentanan sedang. (tabel 2)
3. 12 kelurahan merupakan daerah dengan tingkat kerentanan sedang. (tabel 2)
4. Kemiringan dan ketinggian DAS yang tajam serta jenis tanah latosol yang sulit menyerap air akan mempermudah terjadinya banjir
5. Pola aliran adalah dendritik dimana pola aliran yang menyebar secara radial dimulai dari titik tertinggi dan mengalir ke arah hilir yang kemudian menyatu dalam satu aliran. Hal ini akan mempermudah terjadinya banjir.
6. Kerapatan drainase 1,36km/km^2, termasuk kerapatan sedang.
7. Kemiringan lereng DAS besar dari 40% seluas 13.118,18 ha, berarti pengaliran air curam (tabel 3)
8. Ketinggian DAS besar dari 1000 m adalah 5.208,86 ha, tremasuk kelas jelek (tabel 4)
9. Jenis tanah berupa latosol seluas 12.921,16 ha, merupakan jenis tanah jelek
10. Luas penggunaan lahan untuk pemukiman 3.896,59 ha, merupakan kelas sedang
11. Termasuk ordo 5 (lima), artinya batang Kuranji termasuk sungai yang telah lama terbentuk. Biasanya untuk jenis sungai ini, proses sedimentasi, dan bentuk penampang sungai tidak mampu menampung air, karena mengalami banyak perubahan akibat hujan dan klimatologi (terjadinya sedimen)
12. Morphometri DAS Batang Kuranji

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Parameter	Batang Kuranji
Luas DAS	202.7 km^2
Jumlah Sub Das	5
Elevasi Hulu, di....	1.605 m di Gunung Bonsu
Elevasi Hilir, di....	30 m di Kuranji
Panjang sungai utama	32.41 km
Panjang anak-anak sungai	242.34 km
Lebar rata-rata	80 m
Kerapatan aliran	1,36km/km^2 (sedang)
Kemiringan lereng DAS **>40%** **15 – 40%** **2 - 15%** **0 - 2 %**	 13.118,18 ha 2019,78 ha 690,21 ha 6239,61 ha
Ketinggian DAS ➢ **1000 m** **500 – 1000 m** **100 – 500 m** **25 – 100 m** **0 – 25 m**	 5.208,86 ha 5.435,80 ha 4.192,46 ha 1.307,33 ha 5.923,33 ha
Geologi DAS **Aluvium** **Batuan Gunung Api**	 8.051,54 ha 14.016,24 ha
Penggunaan lahan **Bandara** **Betinggisik** **Hutan** **Kebun** **Ladang** **Lahan kosong** **Pemukiman** **Sawah** **Semak/Belukar**	 116,47 ha 5,12 ha 14.860,70 ha 834,74 ha 10,11 ha 16,78 ha 3.896,59 ha 2.289,42 37,86 ha
Jenis tanah **Aluvial** **Andosol** **Latosol** **Organosol dan Glei humus** **Regosol**	 5.445,90 ha 2.917,00 ha 12.921,16 ha 499,85 ha 283,86 ha
Keliling DAS	74,13 km
Kemiringan Sungai Utama	0.002531
Pola aliran	Dendritik
Ordo	5

DAFTAR PUSTAKA

[1] Emeka Daniel Oruonye, Taraba State University, Morphometry and Flood in Small Drainage Basin: Case Study of Mayogwoi River Basin in Jalingo, Taraba State Nigeria, 2016

[2] Hanna Hajdukiewicz, Bartłomiej Wyżga, Paweł Mikuś, Joanna Zawiejska, Artur Radecki-Pawlik, Impact of a large flood on mountain river habitats, channel morphology, and valley infrastructure, 2015

[3]Hikmat Ramdan, M.Si, Prinsip Dasar Pengelolaan Daerah Aliran Sungai,Laboratorium Ekologi Hutan Fakultas Kehutanan Universitas Winaya Mukti Agustus, 2004.

[4]Himawan, dalam Brady. 1974. Tekstur tanah. dalam www. Google.Com. Diakses pada tanggal24 Oktober 2011.

[5]Jian Chen, , Arleen A. Hill , Lensyl D. Urbano,A GIS-based model for urban flood inundation, University of Memphis in Memphis, 2009

[6]Soewarno. Hidrologi : Pengukuran dan Pengolahan Data Aliran Sungai (Hidrometri). Penerbit Nova. Bandung, 1991

[7] Surabhi Bhatt&S.A. Ahmed, Morphometric analysis to determine floods in the Upper Krishna basin using Cartosat DEM, 2013

[8] Sosrodarsono, S dan Takeda, K. Hidrologi Untuk Pengairan.Penerbit PT. Pradnya Paramita. Jakarta, 2003

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KUALITAS PELAYANAN ANGKUTAN UMUM TRANS SARBAGITA SEBAGAI SARANA PILIHANANGKUTAN UMUM DI PROVINSI BALI

Ni Nyoman Rai Sriasih[1)], Ni Gusti Agung Gde Eka Martiningsih[2)]

[1)] P2WL Universitas Mahasaraswati Denpasar
[2)] Fakultas Pertanian, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email :raisriasih313@gmail.com
ekamartini@gmail.com

Naskah diterima :27 Februari 2017 Naskah direvisi : 8 Maret 2017 Disetujui terbit : 15 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualitas pelayanan angkutan umum trans sarbagita dan untuk faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan berdasarkan kepuasan penumpang .Lokasi penelitian dilakukan pada koridorI dan koridor II dengan jumlah sampel sebanyak 100 orang.Metode pengambilan data melalui kuisioner dan wawancara. Analisis indeks jawaban menggunakan skala likert dan untuk mengetahui kualitas pelayanan digunakan analisis deskriptif dan analisis regersi linier berganda. Dari hasil analisis diketahui bahwa bukti fisik, kehandalan, daya tanggap, keamanan dan empati, secara bersama – sama memberi pengaruh signifikan terhadap kualitas pelayanan angkutan umum trans sarbagita berdasarkan kepuasan penumpang. Hal ini terlihat dari rata – rata nilai responden untuk kelima dimensi menunjukkan nilai indeks antara 75,20 – 80,80, walaupun pada dimensi dan indikator-indikator tertentu harus lebih diberikan perhatian serta perbaikan pelayanan, khususnya pada dimensi kehandalan, dimana penumpang tidak puas terhadap waktu tunggu dan jadwal keberangkat bus, dengan nilai indeks sebesar 50,60. Untuk itu yang perlu ditingkatkan kualitasnya adalah waktu mulai dan akhir pelayanan,jadwal kedatangan dan keberangkatan bus dan perkiraan lama waktu perjalanan bus di setiap rute agar disesuaikan dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga penumpang akan semakin percaya untuk memilih angkutan umum trans sarbagita sebagai sarana angkutan di Provinsi Bali.

***Kata kunci** : kualitas pelayanan, kepuasan penumpang, kehandalan*

PENDAHULUAN

Kemacetan lalu lintas adalah situasi atau keadaan tersendatnya atau bahkan terhentinya lalu lintas yang disebabkan oleh banyaknya jumlah kendaraan melebihi kapasitas jalan. Kemacetan lalu lintas ini bukan lagi hanya masalah bagi ibukota, tetapi juga menjadi masalah bagi masyarakat yang berada di kota-kota besar lainnya, termasuk kawasan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Sarbagita).

Fenomena pergerakan ulang-alik (komuter) dengan volume cukup besar dan berdampak pada kemacetan lalu lintas mendorong disepakatinya MOU antara pemerintah pusat (Kementerian Perhubungan) dengan Gubernur Bali serta 3 kabupaten di Bali yaitu Badung, Gianyar dan Tabanan dan 1 kota yaitu Kota Denpasar, dimana angkutan massal ini diberi nama "Trans Sarbagita". Kemudian, realisasi dari MOU itu maka pada tanggal 17 Agustus 2011, Gubernur Bali secara resmi meluncurkan layanan Angkutan Umum Trans Sarbagita, dengan 2 trayek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kualitas pelayanan angkutan umum trans sarbagita di Provinsi Bali berdasarkan kepuasan penumpang dan Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan angkutan umum trans sarbagita [2].

METODOLOGI

Populasi dalam penelitian ini adalah penumpang yang merupakan bagian dari masyarakat yang menggunakan bus angkutan umum Trans SarbagitaPenentuan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik non *probability* sampling, dengan total sample sebanyak 100 orang.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.Analisis indeks jawaban responden dilakukan untuk mendapatkan gambaran deskriptif penelitian yang dilakukan terhadap tiap indikator dari masing-masing variabel.Analisis ini berguna untuk mengetahui respon responden terhadap

setiap pertanyaan yang diajukan. Teknik *scoring* yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan skala *likert* [1].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Distribusi Frekuensi Variabel Bukti Fisik/ Tangible

Dari rata-rata total nilai variabel bukti fisik/ *tangible* yang terdiri dari pernyataan kondisi bus Trans Sarbagita, halte dan identitas pramudi / pramujasa, tempat duduk atau perlengkapan penumpang berdiri cukup memberikan rasa aman, sebanyak 80,00 % menyatakan setuju dan 10,2 % menyatakan sangat setuju, dengan nilai skor rata-rata sebesar 3,99 atau total nilai indek rata-rata 79,80 % hal ini menunjukan bahwa bukti fisik kualitas pelayanan dapat dinyatakan baik, sehingga perlu untuk dipertahankan bahkan untuk ditingkatkan dimasa yang akan datang

Distribusi Frekuensi Variabel Kehandalan ($_{X2}$)

Dari rata-rata total variabel kehandalan / *realibility* (X2) yang meliputi waktu dan jadwal pelayanan, rute perjalanan dan kecepatan bus, kondisi ruangan di dalam bus, Pelayanan Pramudi/ Pramujasa, perilaku permintaan Pramujasa dalam pembayaran Tarif, sebanyak 62,0 % menyakatan setuju dan 10,0 % menyatakan sangat setuju, dengan rata-rata nilai skor 3,62 atau nilai indeks 72,44 %. Hal ini menunjukan bahwa variable kehandalan/ realibility (X_2) kualitas pelayanan dapat dinyatakan cukup baik.

Distribusi Frekuensi Variabel Daya Tanggap (X_3)

Dari rata-rata total jawaban variabel Daya Tanggap / *Responsiveness* (X_3) yang meliputi pernyataan bahwa respon terhadap keluhan penumpang selalu mendapat tanggapan cukup baik dan cepat dari Pramudi/Pramujasa dan para Petugas, kesigapan pramudi/pramujasa dalam memberikan pelayanan kepada penumpang cukup baik, sebanyak, 76,0 % menyakatan setuju dan 13,0 % menyatakan sangat setuju, dengan nilai skor rata-rata 4,05 dan nilai indeks 80,10 %. Hal ini menunjukan bahwa variable Daya Tanggap / *Responsiveness* (X_3) kualitas pelayanan penumpang angkutan umum trans sarbagita yang mencakup respon terhadap keluhan penumpang dan kesigapan pramudi / pramujasa maupun para petugas dalam memberikan pelayanan kepada penumpang dapat dinyatakan cukup baik.

Distribusi Frekuensi Variabel *Anssurance* (X_4)

Dari rata-rata total variabel Jaminan / *Anssurance* (X_4) yang meliputi pernyataan tanggung jawab Pramudi/Pramujasa terhadap keamanan, keselamatan dan kenyaman penumpang selama perjalanan cukup baik , Informasi pelayanan bus Trans Sarbagita yang tersedia cukup lengkap dan jelas / baik, perilaku Pramudi/ Pramujasa dalam memberikan pelayanan cukup terampil, baik dan sopan, tanggung jawab Pramudi/Pramujasa terhadap keamanan, keselamatan dan kenyaman penumpang selama perjalanan cukup baik , Informasi pelayanan bus Trans Sarbagita yang tersedia cukup lengkap dan jelas / baik, perilaku Pramudi/ Pramujasa dalam memberikan pelayanan cukup terampil, baik dan sopan, sebanyak 66,3 % menyatakan setuju dan 11,7 % menyatakan sangat setuju, dengan nilai rata-rata skor 3,88 atau nilai indeks 78,00 %. Hal ini menunjukan bahwa variabel Jaminan / *Anssurance* (X_4) kualitas pelayanan penumpang angkutan umum Trans Sarbagita dapat dinyatakan cukup baik.

Distribusi Frekuensi Variabel *Emphaty* (X_5)

Dari rata-rata total variabel empati (X_5) yang meliputi pernyataan perilaku pramudi/pramujasa dalam memberikan pelayanan cukup ramah, pramudi/pramujasa selalu siap memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya, sebanyak 79,5 % menyatakan setuju dan 5,5 % menyatakan sangat setuju, dengan nilai rata-rata skor 3,74 atau nilai indeks 74,80 %. Hal ini menunjukan bahwa variable empati (X_5) kualitas pelayanan penumpang cukup baik.

Distribusi Frekuensi Variable Kepuasan Pelanggan (Y)

Distribusi frekuensi jawaban atas item-item pernyataan variable kepuasan pelanggan, dapat diketahui bahwa nilai indeks item-item variabel kepuasan minimal adalah 50,60 % yaitu item pernyataan merasa puas dengan ketepatan waktu dan jadwal pelayanan bus, sedangkan nilai indeks maksimal 80,80 % yaitu pernyataan merasa puas dengan pelayanan Pramudi / Pramujasa yang cukup baik dan sopan selama dalam perjalanan. Dengan demikian secara umum variable-variable kualitas pelayanan angkutan umum Trans Sarbagita yang dilaksanakan memberikan pengaruh cukup baik terhadap kepuasan pelanggan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Analisis Korelasi antar Variable

Variabel bukti fisik / *Tangible* (X_1) berpengaruh terhadap kepuasan pelanggan dengan nilai korelasi sebesar 0,619 atau tampilan kondisi bus yang kelihatan bagus, halte, tampilan pramudi/pramujasa dan tempat duduk di dalam memberikan pengaruh terhadap kepuasan pelanggan sebesar 61,90 %. Hal ini menunjukan bahwa dengan penampilan fisk yang baik, para calon penumpang tidak perlu malu atau menurunkan gengsi dan percaya pelayanan yang akan diberikan juga akan lebih baik.

VariabelKehandalan/ *Reliability* (X_2) terhadap kepuasan pelanggan angkutan umum Trans Sarbagita mempunyai korelasi sebesar 0,450 atau *variable reliability* yang meliputi rute dan kecepatan perjalanan bus, waktu dan jadwal pelayanan bus, kondisi ruangan di dalam bus, cara dan perilaku pelayanan pramudi/ pramujasa mempunyai pengaruh terhadap kepuasan pelanggan 45,00 %. Hal ini menunjukan bahwa variable kehandalan/ *reliability* dalam pelayanan jasa kepada pelanggan masih sangat rendah, sesuai dengan hasil wawancara terhadap responden yang menyatakan bahwa kecepatan perjalanan bus dan waktu tunggu bus tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

VariabelDaya Tanggap / *Responsiveness* (X_3) terhadap kepuasan pelanggan mempunyai korelasi sebesar 0,681 atau pengaru*h variable responsiveness* yang meliputi kesigapan pelayanan dan respon terhadap keluhan penumpang terhadap kepuasan pelanggan sebesar 68,10 %. Hal ini menunjukan bahwa daya tanggap dan kesigapan pelayanan para pramujasa mempunyai pengaruh terhadap kepuasan para pelanggan. kenyamanan, pelayanan informasi, ketrampilan dan kesopanan pelayanan terhadap kepuasan pelanggan sebesar 79,20 %. Hal ini menunjukan bahwa kualitas jaminan /*assurance* terhadap kepuasan pelanggan mempunyai pengaruh yang kuat.

VariabelEmpati /*Emphaty* (X_5) terhadap kepuasan pelanggan mempunyai korelasi 0,713 atau pengaruh *variable emphaty* yang meliputi kesiapan dan keramahan dalam pelayanan kepada para penumpang terhadap kepuasan pelanggan adalah 71,30 %, artinya bahwa variable Empati/ *Emphaty* dalam pelayanan jasa mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kepuasan pelanggan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan angkutan umum trans sarbagita berdasarkan kepuasan penumpang sebagai berikut :

Dari hasil analisis factor-faktor menunjukkan bahwa bukti fisik berpengaruh positif (searah) terhadap kepuasan penumpang yang artinya semakin baik pelayanan pada dimensi bukti fisik maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan.

Variabel Kehandalan (X_2) berpengaruh positif pada taraf 5 % terhadap kepuasan penumpang angkutan umum trans sarbagita. Data tersebut menunjukkan bahwa kehandalan berpengaruh positif (searah) terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya semakin baik pelayanan pada dimensi kehandalan maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan.

Variabel Daya Tanggap (X_3) berpengaruh positif pada taraf 1 % terhadap kepuasan penumpang angkutan umum trans sarbagita.. Data tersebut menunjukkan bahwa daya tanggap berpengaruh positif (searah) terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya semakin baik pelayanan pada dimensi daya tanggap maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan.

Variabel Jaminan (X_4) berpengaruh positif pada taraf 1 % terhadap kepuasan penumpang angkutan umum trans sarbagita. Data tersebut menunjukkan bahwa variable jaminan berpengaruh positif (searah) terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya semakin baik pelayanan pada dimensi jaminan maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan.

Variabel Empaty (X_5) berpengaruh positif pada taraf 1 % terhadap kepuasan penumpang angkutan umum trans sarbagita. Data tersebut menunjukkan bahwa variabel empati berpengaruh positif (searah) terhadap kepuasan pelanggan, yang artinya semakin baik pelayanan pada dimensi empati maka semakin tinggi pula kepuasan pelanggan.

Penelitian yang searah dengan hasil penelitian ini adalah penelitian [3] dengan judul "Analisis Persepsi Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Bus Malam Cepat Sedya Mulya", menyatakan bahwa keseluruhan dimensi kualitas pelayanan yang diteliti (tangibles, reliability, responsiveness, assurance dan emphaty) secara individu maupun bersama-sama berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepuasan penumpang yang berarti dimensi kualitas pelayanan beserta indikator-indikatornya memberikan pengaruh nyata terhadap kepuasan penumpang bus malam Sedya Mulya.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Kualitas Pelayanan Angkutan Umum Trans Sarbagita Berdasarkan Kepuasan Penumpang.

Dalam mengukur kualitas pelayanan terhadap tingkat kepuasan penumpang, belum ada standar baku yang dapat dijadikan pedoman. Hal ini disebabkan karena kepuasan itu sifatnya relatif , serta harapan dan interpretasi pelanggan berbeda-beda. Tetapi secara empiric, kepuasan pelanggan dapat dipahami oleh perusahaan dengan meneliti 5 (Lima) dimensi kualitas pelayanan yaitu: bukti fisik (*tangible*),keandalan*(reliability*), jaminan *(assurance*), daya tanggap *(responsiveness*), dan empati (*emphaty*).

Dari hasil analisis maka hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat adanya gap atau kesenjangan persepsi penilaian kehandalan / *reliability* terhadap kepuasan pelanggan.Gap atau kesenjangan persepsi penilaian pengaruh kehandalan / *reliability* terhadap kepuasan pelanggan terjadi karena beberapa hal seperti waktu tunggu bus dan kecepatan bus dalam perjalanan tidak sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimum (SPM), sehingga banyak pelanggan yang mengeluh mengalami keterlambatan sampai di tempat tujuan, sehingga terjadi gap antara jasa yang dialami dengan persepsi jasa yang diharapkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis dan pembahasan hasil penelitian tentang Kualitas Pelayanan berdasarkan kepuasan penumpang angkutan umum Trans Sarbagita di Provinsi Bali, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut :

1. Secara keseluruhan kelima dimensi kualitas pelayanan yang diteliti meliputi Bukti Fisik, Kehandalan, Daya Tanggap, Keamanan dan Empati, secara bersama – sama memberi pengaruh terhadap kualitas pelayanan angkutan umum trans sarbagita berdasarkan kepuasan penumpang.
2. Kualitas dimensi empati merupakan indokator yang paling dominan berpengaruh terhadap kualitas pelayanan angkutan umum trans sarbagita

DAFTAR PUSTAKA

[1] Augusty, F. 2006.Metode Penelitian Manajemen: Pedoman Penelitian untuk skripsi, Tesis dan Disertai Ilmu Manajemen. Semarang: Universitas Diponegoro.

[2] Dinas Perhubungan Provinsi Bali. 2008. Penataan Angkutan Umum Trans Sarbagita,Jilid I,Edisi I. Denpasar: PT.Kencana Adhi Karya.

[3] Nugroho, W. 2009.Analisis Persepsi Kualitas Pelayanan Jasa Terhadap Kepuasan Konsumen Pengguna Bus Malam Cepat Sedya Mulya.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MODEL PENGGUNAAN LAHAN BERBASIS BUDAYA DI DAS TUKAD PAKERISAN BALI

Nyoman Utari Vipriyanti[1)]

[1]Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan pengelolaan Lingkungan
Program Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: mangtiutari@yahoo.com

Naskah diterima :24 Februari 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Kegiatan sosial ekonomi masyarakat seringkali mengintervensi sistem alami DAS, seperti pengembangan perkotaan, pembuatan bangunan air, pengembangan lahan kawasan lindung dan budidaya.Hal ini disebabkan oleh semakin meningkatnya tuntutan atas sumber daya alam (air, tanah, dan hutan).Kawasan DAS Pakerisan merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD) yang melintasi dua kabupaten di Provinsi Bali.Bagian hulu DAS Pakerisan berada di Kabupaten Bangli tepatnya di Kecamatan Kintamani dan bagian hilirnya berada di Kabupaten Gianyar.Saat ini, terjadi perubahan tata guna lahan di bagian hulu yang dapat mengancam keberadaan kondisi DAS di bagian hilir.Penelitian ini mengkaji mengenai model penggunaan lahan di DAS Pakerisan yang menekankan pada aspek budaya masyarakat Bali.Hasil analisis daya dukung di DAS Pakerisan diperoleh nilai sebesar 79,75 dan berdasarkan klasifikasi kondisi daya dukung DAS, maka kondisi daya dukung DAS Pakerisan termasuk kategori "Baik". Hal ini disebabkan oleh faktor budaya masyarakat yang memiliki keterikatan kuat dengan Agama dalam pengelolaan lahan

Kata kunci: *Penggunaan Lahan, Daerah Aliran Sungai, Budaya*

PENDAHULUAN

Daerah aliran sungai (DAS) dapat dipandang sebagai sistem alami yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang kompleks.Seringkali kegiatan sosial ekonomi masyarakat mengintervensi sistem alami DAS, seperti pengembangan perkotaan, pembuatan bangunan air, pengembangan lahan kawasan lindung dan budidaya.Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tuntutan atas sumber daya alam (air, tanah, dan hutan) yang menyebabkan meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan yang membawa akibat pada perubahan kondisi DAS (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014).

Perubahan kondisi DAS sebagai dampak pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan degradasi lahan. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya dan penurunan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014).

Kawasan DAS Pakerisan merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD).DAS Pakerisan merupakan salah satu DAS lintas kabupaten yang ada di Provinsi Bali.Bagian hulu DAS Pakerisan berada di Kabupaten Bangli tepatnya di Kecamatan Kintamani dan bagian hilirnya berada di Kabupaten Gianyar.Jika terjadinya perubahan tata guna lahan di bagian hulu maka dapat mengancam keberadaan kondisi DAS di bagian hilir.Penelitian ini mengkaji mengenai model penggunaan lahan di DAS Pakerisan yang menekankan pada aspek budaya masyarakat Bali.

Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengkaji mengenai pola penggunaan lahan di DAS Pakerisan Hulu, Tengah dan Hilir
2. Merumuskan model penggunaan lahan yang berbasis budaya di DAS Pakerisan

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif (Azwar, S. 2001) terhadap penggunaan lahan dan pengaruh budaya terhadap penggunaan lahan di DAS pakerisan. Lokasi pengamatan dilakukan di tiga lokasi yaitu di hulu, tengah dan hilir.Wawancara dilakukan secara mendalam terhadap informan dengan metode snowball.Hasil wawancara dikaji dan dianalisis secara deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Wilayah DAS Pakerisan memiliki luas total 9.091,89 hektar, secara administrasi terletak di Kabupaten Bangli seluas 1.851,83 hektar (20,37 %) dan Gianyar seluas 7.240,06 hektar (79,63 %). Di Kabupaten Bangli meliputi Kecamatan Kintamani seluas 561,00 hektar dan Kecamatan Susut seluas 1.290,83 hektar. Di Kabupaten Gianyar meliputi Kecamatan Blahbatuh seluas 2.493,46 hektar, Kecamatan Gianyar seluas 2.801,62 hektar dan Kecamatan Tampaksiring seluas 1.944,98 hektar.

Analisis kondisi sosial ekonomi bertujuan untuk mengetahui perubahan atau dinamika sosial dan ekonomi masyarakat sebelum, selama dan setelah adanya kegiatan pengelolaan DAS, baik secara swadaya maupun melalui program bantuan.

Berdasarkan peran/pengaruh kondisi sosial ekonomi terhadap kondisi daya dukung DAS (Puspitasari,. A, 2011) maka bobot kondisi sosial ekonomi ini adalah 20, sedangkan untuk masing-masing sub kriteria adalah sebagai berikut: tekanan penduduk (10), tingkat kesejahteraan penduduk (7) dan keberadaan dan penegakan aturan (3).

1. Tekanan Penduduk

Tekanan penduduk didekati dengan indeks ketersediaan lahan yang merupakan perbandingan antara luas lahan pertanian dengan jumlah keluarga petani di dalam DAS. Data luas lahan pertanian diperoleh dari data penutupan lahan dan data jumlah keluarga petani bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2014 dan sebaran jumlah penduduk di wilayah DAS Pakerisan. Kondisi tekanan penduduk di wilayah DAS Pakerisan sebagaimana perhitungan berikut :

$$IKL = \frac{A}{P}$$

$$= \frac{7.997{,}32 \text{ ha}}{9.627 \text{ kk}}$$

$$= 1{,}20 \text{ ha/kk}$$

Hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa di wilayah DAS Pakerisan tekanan penduduk terhadap lahan pertanian masih termasuk kategori kelas sedang, dinama nilai hasil perbandingannya sebesar 1,20 ha/kk. Nilai total tekanan penduduk di wilayah DAS Pakerisan adalah 10.

Kondisi tekanan penduduk terhadap lahan pertanian yang sedang maka perlu upaya untuk mencari alternatif pekerjaan lain selain usaha pertanian, sehingga diharapkan dengan adanya pekerjaan lain maka tekanan terhadap lahan pertanian akan berkurang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

2. Tingkat kesejahteraan penduduk (TKP)

Dalam analisis ini tingkat kesejahteraan penduduk akan didekati dengan persentase perbandingan keluarga miskin dengan jumlah kepala keluarga. Data jumlah keluarga miskin dan jumlah kepala keluarga bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Bali Tahun 2014. Perhitungan tingkat kesejahteraan penduduk berdasarkan jumlah keluarga miskin sebagai berikut :

$$TKP = \frac{\text{Jumlah KK miskin}}{\text{Jumlah Total KK}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{2.001}{45.030} \times 100\ \%$$

$$= 4{,}4\ \%$$

Hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa tingkat kesejahteraan penduduk di wilayah DAS Pakerisan masih sangat tinggi, ini dapat dilihat dari persentase keluarga miskin yang hanya 4,4 % dari jumlah kepala keluarga yang ada di wilayah DAS Pakerisan. Nilai 4,4 % tersebut maka tingkat kesejateraan penduduk di wilayah DAS Pakerisan termasuk ke dalam kelas sangat baik sehingga total nilai adalah 3,5.

3. Keberadaan dan penegakan norma

Keberadaan norma masyarakat, baik formal maupun informal, yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air sangat diperlukan. Adanya norma tersebut dan pelaksanaannya secara luas dalam kehidupan masyarakat diharapkan memberikan dampak yang baik dalam peningkatan daya dukung DAS. Data mengenai keberadaan dan penegakan norma di wilayah DAS Pakerisan diperoleh dari Balai Pengelolaan DAS Unda Anyar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa laporan Identifikasi Kelembagaan yang Mendukung Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan di Provinsi Bali.

Berdasarkan laporan tersebut diketahui bahwa di wilayah DAS Pakerisan terdapat norma atau aturan di masyarakat yang berkaitan dengan konservasi tanah dan air. Pelaksanaan dari norma atau aturan di lapangan telah dipraktekan secara luas, ini dapat dilihat dari penerapan pembuatan teras yang bertujuan untuk menahan laju erosi, selain itu kegiatan penanaman tanaman kayu-kayuan diantara tanaman semusim juga merupakan upaya konservasi tanah dan air. Berdasarkan data tersebut kelas keberadaan dan penegakan norma di wilayah DAS Pakerisan termasuk sangat baik dengan skor 0,5 sehingga nilai total adalah 1,5.

4. Investasi Bangunan

Nilai investasi bangunan yang dilakukan analisis meliputi keberadaan dan klasifikasi kota dan nilai terkini bangunan air. Berdasarkan peran/pengaruh investasi bangunan tersebut maka pembobotan untuk kriteria nilai investasi bangunan dalam analisis ini adalah 10 dan untuk masing-masing sub kriteria adalah klasifikasi kota (5) dan klasifikasi bangunan air (5).

4.1 Klasifikasi Kota

Data mengenai informasi data klasifikasi kota diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan (BAPPEDA: 2014) Provinsi Bali. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa di wilayah DAS Pakerisan hanya terdapat kota kecil yaitu Kota Gianyar yang merupakan ibu kota Kabupaten Gianyar. Hanya terdapat kota kecil maka nilai klasfikasi kota di wilayah DAS Pakerisan adalah 3,75.

4.2 Klasifikasi Nilai Investasi Bangunan Air

Data yang digunakan dalam analisis nilai investasi bangunan air yaitu besarnya nilai investasi bangunan air (waduk, bendungan, saluran irigasi) dalam nilai rupiah.Data nilai investasi bangunan air tersebut diperoleh dari Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bali, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Gianyar dan Bangli dan Balai Wilayah Sungai Bali-Penida.Berdasarkan data tersebut diperoleh nilai investasi bangunan air di wilayah DAS Pakerisan sebesar Rp. 20.421.124.000,00. Nilai investasi bangunan air di wilayah DAS Pakerisan termasuk kelas rendah dan total nilai adalah 3.75.

4.2 Pemanfaatan Ruang Wilayah

Analisis pemanfaatan ruang wilayah bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi kawasan lindung dan kawasan budidaya terkait ada tidak adanya kecenderungan pemanfaatan lahan yang menyebabkan kawasan dimaksud terdegradasi dari waktu ke waktu.Semakin sesuai kondisi lingkungan dengan fungsi kawasan maka kondisi DAS semakin baik dan sebaliknya apabila tidak sesuai fungsinya maka kondisi DAS semakin jelek (Arsyad, 2006).

Dalam analisis ini pembobotan untuk kriteria pemanfaatan ruang wilayah ini adalah 10 dan untuk masing-masing sub kriteria adalah Kawasan lindung (5) dan Kawasan budidaya (5).

1. Kawasan lindung

Berdasarkan Peta Arahan Klasifikasi Fungsi Kawasan dari Balai Pengelolaan DAS Unda Anyar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, di wilayah DAS Pakerisan terdapat kawasan lindung seluas 826,36 ha yang terdiri dari hutan lindung seluas 32,58 ha dan kawasan lindung di luar kawasa lindung seluas 795,78 ha. Berdasarkan data penutupan lahan hasil interpretasi citra landsat dan survey lapangan diketahui bahwa luas liputan vegetasi pada kawasan lidung tersebut berupa vegetasi tetap rapat seluas 32,58 ha, kebun campuran rapat seluas 307,23 ha, dan kebun campuran sedang seluas 488,55 ha.

Perhitungan analisis Kawasan Lindung (PTH) berdasarkan Persentase Luas liputan vegetasi terhadap Kawasan Lindung di dalam DAS (%) yaitu :

$$KL = \frac{\text{Luas liputan vegetasi}}{\text{Luas Kawasan Lindung di dalam DAS}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{826{,}36}{826{,}36} \times 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

Berdasarkan hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa kondisi penutupan vegatasi pada kawasan lindung di wilayah DAS Pakerisan masih sangat baik, itu dapat dilihat dari nilai penutupan vegetasi yang 100 % dari total luas kawasan lindung. Dengan demikian maka nilai kriteria kawasan lindung di wilayah DAS Pakerisan termasuk kelas sangat baik yaitu 2,5.

2. Kawasan budidaya

Analisis kondisi kawasan budidaya dilakukan untuk mengetahui persentase luas lahan dengan kelerengan 0-25% pada kawasan budidaya, yang merupakan perbandingan luas total lahan dengan kelerengan 0-25% yang berada pada kawasan budidaya dengan luas kawasan budidaya dalam DAS.

Kelas kelerengan 0-25% merupakan kelas lereng yang paling sesuai untuk budidaya tanaman sehingga akan cocok berada pada kawasan budidaya. Semakin tinggi persentase luas lahan dengan kelerengan 0-25% pada kawasan budidaya maka kondisi DAS semakin baik. Sebaliknya semakin rendah persentase luas unit lahan dengan kelerengan 0-25% pada kawasan budidaya, atau dengan kata lain semakin tinggi persentase luas unit lahan dengan kelerengan >25% pada kawasan budidaya maka kondisi DAS semakin tinggi.

Berdasarkaan Peta Arahan Fungsi Klasifikasi Kawasan diketahui bahwa luas kawasan budidaya di wilayah DAS Pakerisan seluas 8.263,53 ha dan berdasarkan Peta Kemiringan Lereng seluruh wilayah DAS PAkerisan merupakan kemiringan lereng 0-25 % .

Analisis perhitungan kawasan budidaya di wilayah DAS Pakerisan sebagai berikut :

$$KB = \frac{\text{Luas total lahan dengan kemiringan lereng 0-25\%}}{\text{Luas Kawasan Budidaya di dalam DAS}} \times 100\ \%$$

$$= \frac{8.263{,}53}{8.263{,}53} \times 100\ \%$$

$$= 100\ \%$$

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Berdasarkan analisis di atas diperoleh hasil sebesar 100 %, hal tersebut menunjukan bahwa di wilayah DAS Pakerisan merupakan wilayah yang sangat baik dan cocok untuk kegiatan budidaya pertanian. Hal ini juga dapat dilihat dari luasnya lahan sawah di wilayah DAS Pakerisan yang mencapai 50,51 % dari luas DAS Pakerisan atau 4.592,00 ha.

Hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa nilai kawasan budidaya di wilayah DAS Pakerisan termasuk kelas sangat rendah dengan total nilainya adalah 2,5.

3. Kondisi Daya Dukung DAS

Analisis terhadap kondisi daya dukung DAS dilakukan secara terintegrasi terhadap kelima kriteria: lahan, tata air, sosial ekonomi, investasi bangunan dan pemanfaatan ruang wilayah. Nilai skor analisis kondisi daya dukung DAS diperoleh dari hasil analisis terhadap masing-masing nilai bobot dan skor dari indikator dan parameter-parameternya. Analisis daya dukung DAS di DAS Pakerisan sebagaimana tersaji pada Tabel 1 dan klasfikasi kondisi Daya Dukung DAS sebagaimana Tabel 2

Tabel 1. Analisis Daya Dukung DAS di DAS Pakerisan

No	Kriteria/Sub Kriteria	Bobot		Nilai
1.	Kondisi Lahan	40		35
	a. Persentase Lahan Kritis		20	10
	b. Persentase Penutupan Vegetasi		10	12,5
	c. Indeks Erosi		10	12,5
2.	Kondisi Tata Air	20		17,25
	a. Koefisien Rejim Aliran (KRA)		5	3,75
	b. Koefisien Aliran Tahunan (KAT)		5	2,5
	c. Muatan Sedimen		4	6
	d. Banjir		2	3
	e. Indeks Penggunaan Air (IPA)		4	2
3.	Kondisi Sosial Ekonomi	20		15
	a. Tekanan Penduduk		10	10
	b. Tingkat Kesejahteraan Penduduk		7	3,5
	c. Keberadaan dan Penegakan Norma		3	1,5
4.	Investasi Bangunan	10		7,5
	a. Klasifikasi Kota		5	3,75
	b. Klasifikasi Nilai Bangunan Air		5	3,75
5.	Pemanfaatan Ruang Wilayah	10		5
	a. Kawasan Lindung		5	2,5
	b. Kawasan Budidaya		5	2,5
	Jumlah Nilai			79,75

Sumber Data: Hasil Pengolahan Data Primer dan Sekunder

ISBN : 978-602-73463-1-4

Hasil analisis daya dukung di DAS Pakerisan diperoleh nilai sebesar 79,75 dan berdasarkan klasifikasi kondisi daya dukung DAS sebagaimana Tabel 2, maka kondisi daya dukung DAS Pakerisan termasuk kategori "Baik". Kondisi yang masih baik tersebut diharapkan pengelolaan DAS Pakerisan ke depan akan lebih baik lagi. Upaya-upaya yang dapat dilakukan baik oleh pemerintah, swasta maupun masyarakat dalam rangka tetap menjaga kelestarian DAS Pakerisan sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi antar sektor, antar instansi dan antar daerah
2. Menghilangkan egosektoral antar instansi/lembaga/daerah
3. Meningkatkan pemahaman semua pihak tentang artinya pentingnya pengelolaan DAS
4. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan DAS
5. Mengendalikan alih fungsi lahan
6. Melakukan kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan yang bertujuan untuk memulihkan lahan kritis.

Tabel 2. Klasifikasi Kondisi Daya Dukung DAS

No.	Nilai	Kategori
1	DDD ≤ 70	Sangat Baik
2	70 < DDD ≤ 90	Baik
3	90 < DDD ≤ 110	Sedang
4	110 < DDD ≤ 130	Buruk
5	DDD > 130	Sangat Buruk

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan Hasil dan Pembahasan dapat disimpulkan:

1.kelas keberadaan dan penegakan norma di wilayah DAS Pakerisan termasuk sangat baik dengan skor 0,5 sehingga nilai total adalah 1,5. Hal ini menunjukkan bahwa norma memegang peranan penting dalam upaya menjaga keberlanjutan tata guna lahan pertanian di DAS Pakerisan

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arsyad, S. 2006. *Konservasi Tanah dan Air*, Bogor : IPB Press.
[2] Asrida Puspitasari, 2011, *Analisa Daya Dukung Lingkungan Di Wilayah Pesisir Kabupaten Kendal,* Skripsi S1, Jurusan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Semarang.
[3] Azwar, Saifudin, 2001, *Metode Penelitian,* Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
[4] Bappeda Kabupaten Gianyar, 2014. Rencana Detail Tata Ruang Kawasan DAS Pakerisan. Gianyar. Bali
[5] Bappeda Kabupaten Gianyar, 2014. Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Gianyar. Gianyar. Bali
[6] Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2014. Statistik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Tahun 2014. Jakarta

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

WATER POVERTY INDEX DI KECAMATAN KEDUNGKANDANG

Septiana Hariyani[1)], Ismu Rini Dwi Ari [1)]

[1)]Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya

Email : septianahariyanipwk@yahoo.co.id

Naskah diterima :13 Desember 2016 Naskah direvisi : 21 Februari2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Indeks kemiskinan manusia (IKM) di Indonesia yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) salah satunya adalah penduduk tanpa akses terhadap air bersih.Jumlah penduduk Kota Malang sebanyak lebih dari 800.000 jiwa dan setiap tahun meningkat menyebabkan pemerintah Kota Malang harus memberikan perhatian terhadap kebutuhan permukiman baru beserta kebutuhan infrastruktur penunjangnya seperti air bersih juga meningkat.Kecamatan Kedungkandang adalah satu kecamatan dengan wilayah terluas di Kota Malang, dengan jumlah penduduk 182.342 jiwa.Kelurahan yang tergolong tertinggal pada Kecamatan Kedungkandang adalah Kelurahan Wonokoyo dan Kelurahan Cemorokandang, ditinjau dari tingginya pengangguran, banyaknya rumah kumuh, dan rendahnya tingkat pendidikan pada kedua kelurahan tersebut.Tujuan dari penelitian ini adalah mengidentifikasi kemiskinan air melalui metode penentuan nilai Indeks Kemiskinan Air water poverty index (WPI) di Kecamatan Kedungkandang.Metode water poverty index merupakan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi kemiskinan air bersih dengan memperhatikan kondisi lingkungan dan social pada Kecamatan Kedungkandang.Variabel yang digunakan dalam metode WPI antara lain sumberdaya air, aksesibilitas, kapasitas air, penggunaan air, dan lingkungan. Berdasakan hasil analisis WPI di kedua kelurahan di Kecamatan Kedungkandang, Kelurahan Wonokoyo adalah 66 dan Kelurahan Cemorokandang adalah 79.37, yang berarti wilayah studi Kecamatan Kedungkandang termasuk dalam kategori aman dari kerentanan air bersih.

***Kata Kunci**: Kemiskinan, Water Poverty Index.*

PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia disebabkan oleh kurangnya infrastruktur yang merupakan penunjang kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur yang baik akan memudahkan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi maupun sosial masayarakat. Indeks kemiskinan manusia (IKM) di Indonesia yang dirumuskan oleh Badan Pusat Statistika (BPS) salah satunya adalah penduduk tanpa akses terhadap air bersih [1]

Air bersih merupakan kebutuhan dasar manusia untuk memenuhi aspek kesehatan disamping sebagai faktor pendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatkan derajat secara nasional sangat tergantung pada kemampuan dalam pelayanan penyediaan air bersih.

Masalah kemiskinan terkait dengan akses air bersih terjadi pada beberapa wilayah perkotaan, sepertiKecamatan Kedungkandang. Hal ini dikarenakan semakin bertambah jumlah penduduk di Kota Malang, menyebabkan semakin bertambah kebutuhan air bersih untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari[7]

Ditinjau dari angka kebutuhan yang semakin meningkat setiap tahunnya, maka akan terjadi peningkatan kebutuhan terhadap air baik dari segi kualitas dan kuantitas[3]. Oleh sebab itu, dibuatlah perencanaan di Kecamatan Kedungandang sistem penyediaan air bersih secara efektif dan efisien, dengan tujuan dapat meningkatan pelayanan kepada masyarakat melalui prasarana penyediaan air bersih. Dengan adanya pembangunan prasarana diharapkan mampu meningkatkan pembangunan dari berbagai bidang, seperti ekonomi, sosial dan budaya. Pembangunan sistem jaringan pipa distribusi air bersih ini dapat memenuhi kebutuhan air bersih untuk masyarakat.

Jumlah penduduk Kota Malang yang setiap tahun meningkat dengan laju pertumbuhan rata-rata penduduk Kota Malang sebesar 1,6 per tahun, membutuhkan perumahan dan pemenuhan akan air baik dari segi kualitas dan kuantitas.

Analisis *water poverty index (WPI)* merupakan alat manajemen, untuk menentukan prioritas tindakan untuk memantau kemajuan pencapaian target [6], [5]. Sehingga penelitian ini menggunakan analisis WPI untuk memberikan pemahaman tentang hubungan antara tingkat fisik ketersediaan air, kemudahan, dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Variabel-variabel yang digunakan adalah aksesibilitas, lokasi sumber, penggunaan sumber, kondisi lingkungan, kapasitas air bersih[5].

METODOLOGI

JenisPenelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif.Penelititan kuantitatif merupakan penelitian yang menggunakan rancangan penelitian yang berdasarkan prosedur statistik atau dengan kuantifikasi pengukuran terhadap suatu variabel.

Metode Pengumpulan Data

Survei primer yang dilakukan terkait pengambilan data berupa kondisi eksisting air bersih, sarana prasarana, kondisi sosial masyarakat dan aktivitas terkait pengolaan air bersih. Survei primer yang dilakukan dalam penelitian ini antara lain:

Tabel 1 Desa Survei Primer

No	MetodeSurvei	Sumber Data	DatayangDiperlukan
1	Observasi	Pengamatan langsung terkait penyediaan air bersih	Kondisisaranaprasarana air bersih
2	Kuisioner	Masyarakat di Kelurahan Cemoro kandang dan Kelurahan Wonokoyo	Akses mayaraka tterhadap air bersih Akses masyarakat terhadap sanitasi Akses masyarakat terhadap limbah Tingkat pendapatan masyarakat Data kebutuhan air

Survei sekunder dilakukan pada penelitian ini diperoleh dengan menggunaakan data-data berupa dokumen atau dapat pula dilakukan melalui wawancara.

Tabel 2Kebutuhan Data Sekunder

No	Data	Instansi
1	[1] Monografi Kabupaten Malang 2016 [2] Kota Malang dalam Angka tahun 2016 [3] Kecamatan Kedungkandang dalam Angka tahun 2016	BPS
2	a. Data pengguna air bersih 2016 b. Data pengembangan jaringan distribusi air bersih 2016 c. Data kondisi sarana dan prasarana air bersih 2016 d. Data Ketersediaan air bersih 2016	PDAM
4	a. RTRW Kabupaten Malang 2011 b. Luas lahan irigasi 2016 c. Luas lahan RTH 2016	Bappeda
5	a. Data penduduk miskin 2016	Kantor Kelurahan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Metode Analisis

Indeks Kemiskinan Air (*Water Poverty Index*) merupakan metode yang digunakan unutk mengidentifikasi kemiskinan dan mengukur tingkat kesehjateraan masyarakat menggunakan ketersediaan air bersih di daerah Kecamatan Cemorokandang.Perhitungan WPI dapat dihitung menggunakan rumus berikut.

$$WPI = \frac{wr\,.R + wa\,.A + wc\,.C + wu\,.U + we\,.E}{wr + wa + wc + wu + we} \qquad (1)$$

Keterangan:
w = faktor bobot untuk masing-masing komponen
R = sumberdaya
A = akses
C = kapasitas
U = pemanfaatan

1. Sumberdaya

Ketersediaan air dihitung dengan menggunakan pendekatan per kapita ketersediaan air tahunan.Per kapita ketersediaan air tahunan diadopsi dari perhitungan Indeks Ketersediaan Air (Water Avalability Index, WAI).

2. Akses

Perhitungan untuk variabel akses memliki 2 subvariabel yang dapat dihitung menggunaan presentase pengguna air bersih, persentase pengguna sanitasi sehat dan persentase pengguna limbah sehat.

3. Kapasitas

Komponen kapasitas terdiri atas empat variabel, yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat, tingkat kesehatan masyarakat dan tingkat distribusi pendapatan daerah.

4. Pemanfataan

Komponen pemanfaatan terdiri atas tiga penggunaan air yang berbeda, yakni pemanfaatan air domestik dan pertanian.

5. Lingkungan

Pada variabel lingkungan terdapat dual hal yang dihitung yaitu kualitas air dan tutupan vegetasi. Kualitas air yang diukur meliputi kualitas air perpipaan, kualitas air permukaan dan kualitas air tanah.

Hasil dari perhitungan WPI tersebut didapatkan angka 0-100 yang nantinya akan terklasifikasikan menjadi golongan kelas kekritisan air bersih ([2] Khairuddin, 2014).

Tabel 3 Skala Tolak Ukur WPI

Skala	Kondisi
≥ 62	*Safe*
56 – 61,9	*Low Safe*
48 – 55,9	*Unsafe*
35 – 47,9	*Critical*

Sumber : [2]

Teknik Sampling

Penggunaan *purposive sampling* ditujukan karena penelitian mengambil sampel menggunakan kriteria-kriteria tertentu. Penggunaan rumus Slovin dalam penentuan jumlah total sampel adalah sasaran pengambilan sampel diambil secara acak dengan menentukan kriteria sampel terlebih dahulu. Sasaran sampel penelitian adalah pengguna air bersih dari berbagai sumber, yaitu HIPPAM, dan PDAM.Pengambilan sampel menggunakan rumus slovin yang dikemukakan oleh ([4] Sevilla, 1993).Berikut merupakan perhitungan ukuran sampel menggunakan rumus slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} \qquad (2)$$

Keterangan:
n = Number of samples (jumlah sampel)

N = Total population (jumlah seluruh anggota populasi)
e = Error tolerance (toleransi terjadinya galat; taraf signifikansi) menggunakan 0.5

A. Kelurahan Wonokoyo
Berikut adalah jumlah sampel pada Kelurahan Wonokoyo

Tabel 4 Jumlah Sampel Menggunakan Rumus Slovin Tiap RW di Kelurahan Wonokoyo

RW	Jumlah Unit Rumah	Presentase Jumlah Penduduk (%)	Jumlah Sampel
1	430	21	70
2	602	29	98
3	549	27	90
4	293	14	48
5	172	8	28
Total	**2.046**	**100**	**335**

Sumber: Hasil Perhitungan, 2016

B. Kelurahan Cemorokandang
Beirkut adalah jumlah sampel di Kelurahan Cemorokandang

Tabel 5 Jumlah Sampel Menggunakan RumusSlovin Tiap RW pada Kelurahan Cemorokandang

RW	Jumlah Unit Rumah	PresentaseJumlahPenduduk (%)	JumlahSampel
1	248	5%	19
2	331	7%	25
3	407	8%	31
4	542	11%	42
5	530	11%	41
6	137	3%	11
7	415	9%	32
8	703	15%	54
9	796	17%	61
10	376	8%	29
11	317	7%	24
Total	**4802**	100%	369

Sumber: Hasil Perhitungan, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Gambaran Umum

Luas Kecamatan Kedungkandang 39,89 km^2., terletak pada 112^{o}36’14” - 112^{o}40’42” Bujur Timur, dan 077^{o}36’38” – 008^{o}01’57” Lintang Selatan. Batas administrasi Kecamatan Kedungkandang, dapat dilihat dalam Gambar 1.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

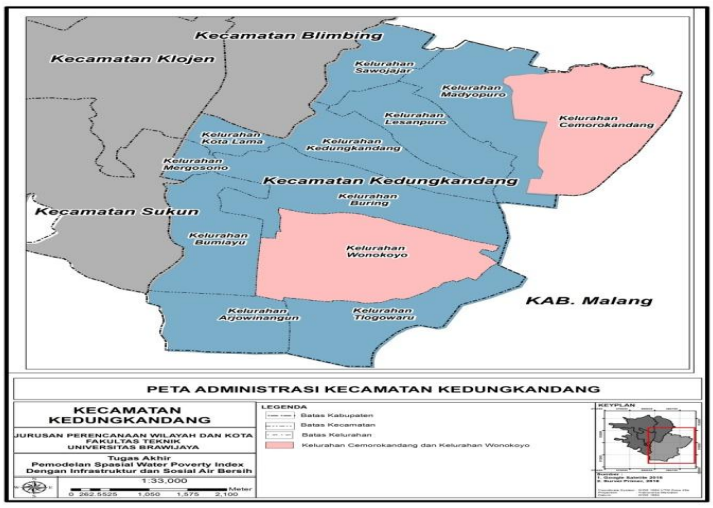

Gambar 1. Peta Administrasi Kecamatan Kedungkandang

2) Gambaran Umum Kemiskinan dan Air Bersih

Kelurahan Wonokoyo terdiri 5 RW dengan 26 RT. Berdasarkan hasil survey primer didapatkan data kependudukan seperti pada Tabel 6.

Tabel 6 Persebaran Penduduk Setiap RW Kelurahan Wonokoyo dan Cemorokandang

RW	Jumlah RT	Jumlah KK	Jumlah KK Miskin	JumlahPenduduk (Jiwa)
1	6	430	48	1341
2	5	602	81	1904
3	7	549	76	1622
4	5	293	13	821
5	3	172	36	350
Subtotal	**26**	**2046**	**254**	**6038**
1	5	321	8	1007
2	4	365	17	964
3	7	454	19	940
4	9	638	57	1837
5	5	388	24	1261
6	2	166	5	400
7	3	260	1	811
8	5	322	3	1076
9	6	363	2	1111
10	8	300	-	820
11	8	189	-	761
Subtotal	**62**	**3766**	**136**	**10988**
Total	**88**	**5182**	**390**	**17026**

Sumber: Monografi Kelurahan Wonokoyo dan Cemorokandang, 2016

Sumber air PDAM di Kelurahan Wonokoyo digunakan oleh beberapa RW seperti RW 1, RW 2, dan RW 3. Berikut adalah tabel pengguna air bersih di Kelurahan Wonokoyo

Tabel 7 Pengguna Air Bersih di Kelurahan Wonokoyo

RW	Jumlah KK	Pengguna PDAM (Rumah)	Pengguna HIPPAM (Rumah)	Keterangan
1	430	430	-	Terlayani PDAM Kota Malang
2	602	602	-	Terlayani PDAM Kota Malang
3	549	449	100	Terlayani PDAM Kota Malang dan HIPPAM PerumahanGriyaTelagaPermai
4	293	-	293	Terlayani HIPPAM TirtaPesonaMandiri
5	172	-	172	Terlayani HIPPAM BaranWonokoyo
Total	**2046**	**1581**	**465**	

Sumber: Survei Sekunder, 2015

Berikut adalah gambaran untuk masing-masing sumber air yang digunakan di Kelurahan Wonokoyo, yaitu:

Tabel 8. Sumber Air di Kelurahan Wonokoyo

Sumber Air	LokasiSumber	Volume Air (m^3)	Debit (L/detik)	Kedalaman (m)
PDAM	Wendit 3	5750	560	-
HIPPAM RW 3	Wonokoyo	500	-	80
HIPPAM RW 4	Wonokoyo	1000	-	140
HIPPAM RW 5	Wonokoyo	750	-	140

Sumber: Survei Sekunder, 2015

Sumber air di Kelurahan Cemorokandang disuplai oleh Himpunan Penduduk Pengguna Air Minum (HIPPAM) dan air sumur. Terdapat 3 HIPPAM yaitu HIPPAM yang dikelola oleh PT. Bukit Barisan dan HIPPAM yang dikelola oleh Bina Tirta dan HIPPAM Tirta Lestari.

Tabel 9 Sumber Air di Kelurahan Cemorokandang

RW	1	2	3	4	5	6	7
1	248	94	138	37.9%	55.8%	94%	16
2	331	273	45	82.5%	13.5%	96%	13
3	407	0	383	0%	94%	94%	24
4	542	16	401	3%	74%	77%	125
5	530	248	250	46.8%	47.2%	94%	32
6	137	0	137	0%	100%	100%	0
7	415	415	0	100%	0%	100%	0
8	703	703	0	100%	0%	100%	0
9	796	796	0	100%	0%	100%	0
10	376	376	0	100%	0%	100%	0
11	317	317	0	100%	0%	100%	0
Total	**4802**	**3238**	**1.086**	**67.44%**	**28.19%**	**96%**	**4%**

Sumber : Data Sekunder,2015

Keterangan Tabel 9:

1. Jumlah sambungan pelanggan
2. HIPPAM Bukit Barisan
3. HIPPAM Kelurahan
4. Cakupan pelayanan HIPPAM Bukit Barisan
5. Cakupan pelayanan HIPPAM HIPPAM Kelurahan
6. Total cakupan pelayanan perpipaan
7. Pengguna air sumur

Tabel 10 Nilai WPI di Kelurahan Wonokoyo dan Cemorokandang

ISBN : 978-602-73463-1-4

	R	A	C	U	E	B	NW	KET
KelurahanWonokoyo								
RW 1	100	94	58,9	50	37,6	0,2	68,1	Aman
RW 2	100	94	57,7	50	37,5	0,2	67,8	Aman
RW 3	75	93	62,5	50	37,5	0,2	63,6	Aman
RW 4	75	87	64,3	50	37,6	0,2	62,8	Aman
RW 5	100	90	60,8	50	37,5	0,2	67,7	Aman
Rata-Rata	**90**	**91.6**	**60,8**	**50**	**37,5**		**66**	**Aman**
KelurahanCemorokandang								
RW 1	100	99	84,7	70,5	48,9	0,2	80,6	Aman
RW 2	100	100	84,7	95,5	49,9	0,2	86,0	Aman
RW 3	100	100	84,7	70,5	49,1	0,2	80,9	Aman
RW 4	100	100	81,3	95,5	48,6	0,2	85,1	Aman
RW 5	100	100	88,3	95,5	50	0,2	86,8	Aman
RW 6	100	100	86,3	45,5	51	0,2	76,6	Aman
RW 7	100	100	85,0	45,5	53,5	0,2	76,8	Aman
RW 8	100	100	74,7	45,5	50	0,2	74,0	Aman
RW 9	100	100	76,3	45,5	50,1	0,2	74,4	Aman
RW 10	100	100	78,3	45,5	53,2	0,2	75,4	Aman
RW 11	100	100	87,0	45,5	50	0,2	76,5	Aman
Rata-Rata	**100**	**99,9**	**82,8**	**63,7**	**50,4**		**79,4**	**Aman**
Rata-Rata	**95**	**95,8**	**71,8**	**56,8**	**44**		**72,7**	**Aman**

Sumber: Hasil Analisis, 2016

Keterangan Tabel 10:

R = *Resource,* A = *Access,* C = *Capacity,* U = *Use,* E = *Environment*

B = Bobot

N W = Nilai WPI

KET = Keterangan

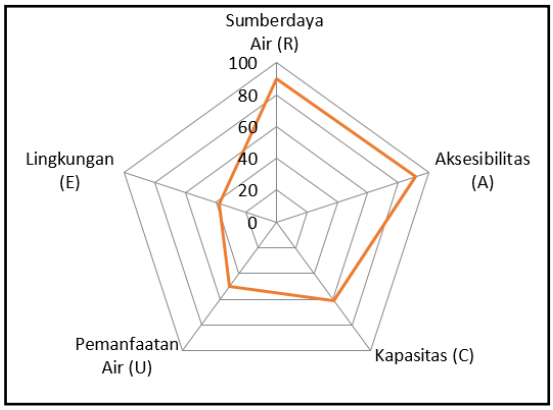

Gambar 2WPI di KelurahanWonokoyo

Hasil analisis WPI di Kelurahan Wonokoyo didapatkan pentagram seperti pada Gambar 2 komponen yang memiliki nilai terkecil adalah komponen pemanfaatan air. Hal ini dikarenakan kecilnya nilai pemanfaatan air untuk lahan pertanian, yaitu rata-rata perbandingan antara luas area irigasi dan luas area kultivasi adalah 37,55 Ha. Area irigasi hanya terdapat pada RW 2 dan RW 3 sehingga luas area irigasi pada RW 1, 4, dan 5 adalah 0. Komponen dengan nilai tertinggi adalah aksesibilitas, ditinjau dari akses terhadap air bersih, sanitasi, dan limbah sehat. Hampir seluruh rumah di Kelurahan Wonokoyo sudah memiliki MCK pribadi, akan tetapi masih terdapat MCK komunal yang terletak di RW 3 di pinggir sungai, dan 1 MCK Umum yang ada di RW 5. Selain itu rumah di Kelurahan Wonokoyo sebagian besar sudah terdapat septictank, baik itu septic tank pribadi maupun komunal sehingga dapat dikatakan bahwa rumah-rumah di Kelurahan Wonokoyo sudah melakukan upaya pengolahan air limbah.

ISBN : 978-602-73463-1-4

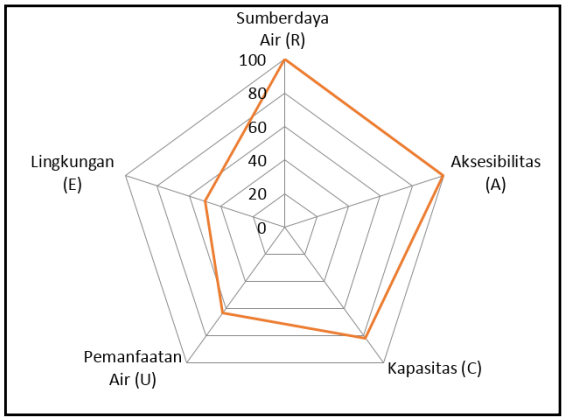

Gambar 3 WPI di Kelurahan Cemorokandang

Nilai indeks kemiskinan air yang dihitung dari dengan WPI di Kelurahan Cemorokandang memiliki nilai WPI diatas 62 pada seiap RW sehingga dapat dinyatakan bahwa Kelurahan Cemorokandang tidak mengalami krisis air walaupun Kelurahan Cemorokandang 100% tidak dialiri oleh jarigan PDAM. Dari lima variabel yang dihitung untuk mengatahui nilai WPI dapat diketahui bahwa nilai terendah yaitu pada variabel lingkungan. Hal tersebut terjadi karena pada Kelurahan Cemorokandang masih kurang RTH. Luas RTH dibandingkan dengan luas wilayah masih tergolong rendah yaitu berkisar 0 – 3,5 %.

Nilai WPI Kelurahan Cemorokandang 79,37 yang berarti aman dari kerentanan air bersih, meskipun Kelurahan Cemorokandang tidak termasuk dalam wilayah yang krisis air namun Kelurahan Cemorokandang harus tetap memerhatikan keberlanjutan dari pelayanan air bersih mengingat Kelurahan Cemorokandang merupakan daerah dengan pembangunan perumahan yang cukup pesat dan jaringan PDAM belum melayani Kelurahan Cemorokandang

Nilai WPI pada Kelurahan Wonokoyo dan Kelurahan Cemorokandang dapat dilihat pada Gambar 4 dan Gambar 5.

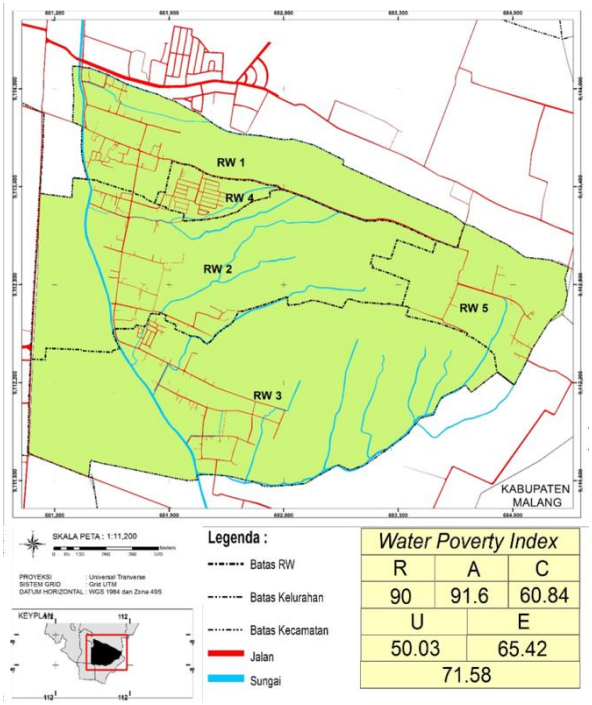

Gambar 4 Peta WPI Kelurahan Wonokoyo, Kecamatan Kedungkandang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

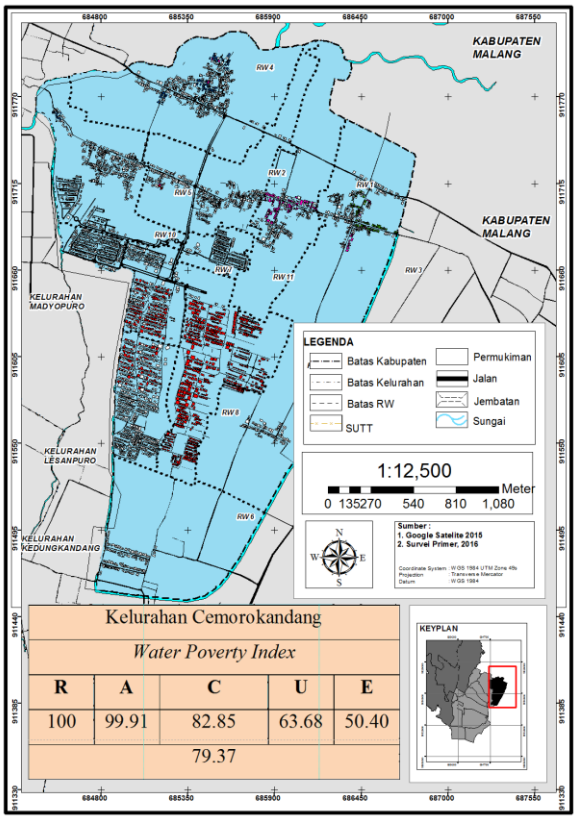

Gambar 5 Peta WPI Kelurahan Cemorokandang, Kecamatan Kedungkandang

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian WPI di Kecamatan Kedungkandang sebagai berikut.

1. Nilai rata-rata WPI di Kelurahan Wonokoyo adalah 66,00 yang menunjukkan nilai aman, artinya aman dari kerentanan air bersih 5 komponen memiliki nilai masing-masing, akan tetapi terdapat 1 komponen yang nilainya kecil yaitu komponen lingkungan. Komponen lingkungan meliputi luasan RTH dengan rincian 4 RW memiliki RTH dengan luasan yang kecil, dan terdapat 1 RW yang tidak memiliki RTH.
2. Nilai rata-rata WPI di Kelurahan Cemorokandang adalah 79,37 yang menunjukkan nilai aman, artinya aman dari kerentanan air bersih 5 komponen WPI yang dihitung untuk mengetahui nilai WPI dapat diketahui bahwa nilai terendah yaitu pada variabel lingkungan. Hal tersebut terjadi karena pada Kelurahan Cemorokandang masih kurang RTH. Luas RTH dibandingkan dengan luas wilayah masih tergolong rendah yaitu berkisar 0 – 3,5 %.

Nilai rata-rata WPI Kecamatan Kedungkandang yang diwakili oleh Kelurahan Wonokoyo dan Kelurahan Cemorokandang menunjukkan nilai 72,68 yang berarti aman dari kerentanan air bersih. Nilai rata-rata WPI di Kecamatan Kedungkandang dipengaruhi oleh 2 kelurahan yang memiliki nilai lingkungan yang kecil, yaitu luasan RTH yang sangat kecil.

TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih yang sebesarnya kami sampaikan kepada rekan 1) Dr. Ir. Budi Sugiarto W., MSP.,dan 2) Kartika Eka S. ST., MT serta mahasiswa 1) Nidyaul Elya, dan 2) Anestia Lairatri Prabandari yang telah membantu dalam proses pengumpulan data primer, sekunder di lapangan, dan proses kompilasi data.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistika. 2014. Kriteria Miskin. Jakarta: BPS.
[2] Khairuddin, e. a. 2014. Identifikasi Kondisi Kemiskinan Air di Daerah Kabupaten Dompu, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bandung: Universitas Padjadjaran.
[3] Maryono. 2007. Menilai Aksesibilitas Air Minum (Studi Kasus: Aksesibilitas Air Bersih Bagi Masyarakat Miskin Di Kota Semarang). Universitas Diponegoro.Volume 3 No. 2.
[4] Sevilla, C. J. 1993. Research Methods, Rex Printing Co. Inc. Quezon City.
[5] Sullivan, C. A. 2002. Calculating a Water Poverty Index. Inggris: Centre for Ecology & Hydrology Wallingford, Oxfordshire . Vol. 30 (7).
[6] Sullivan, C. A. 2003. The Water Poverty Index: Development and Application at the Community Scale. Natural Resources Forum, (189-199).
[7] Undang-Undang Republik Indonesia. 2004. nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PEMANFAATAN POSTER Y UNTUK MENGEKSPLORASI GAGASAN MAHASISWA PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DALAM MENGELOLA KAWASAN LANSKAP BUDAYA DUNIA

Sang Putu Kaler Surata[1)]

[1)]Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan
Universitas Mahasaraswati Denpasar;

Email: kalersurata@gmail.com

Naskah diterima :27 Februari 2017 Naskah direvisi : 8 Maret 2017 Disetujui terbit : 15 Maret 2017

ABSTRAK

Pada tahun 2012 UNESCO telah menetapkan beberapa kawasan lanskap budaya padi (LBP) di Bali sebagai warisan budaya dunia.Akan tetapi sejauh ini partisipasi akademisi dalam pengelolaan kawasan tersebut belum memadai. Kajian ini bertujuan mengeksplorasi pandangan mahasiswa terhadap problem dan potensi LBP sebagai wisata edukasi, sebagai langkah awal mendorong partisipasi mereka dalam pengelolaan LBP. Sebuah studi kasus telah dilakukan dengan meminta 25 mahasiswa menyusun poster Y untuk mengungkap pilar ekologi, ekonomi dan sosial LBP pada masa lalu, kini, kemungkinan keadaan pada masa depan, dan harapan agar kawasan LBP tetap lestari. Selanjutnya mereka diminta melakukan diskusi kelompok terarah untuk merumuskan langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam upaya merealisasikan harapan.Hasil analisis isi secara kualitatif dilakukan terhadap poster Y dan rekaman diskusi kelompok terarah, serta rekomendasi hasil kajian dipaparkan dalam paper ini.

Kata kunci: *poster Y, lanskap budaya, ekonomi, ekologi, sosial, dan wisata edukasi*

PENDAHULUAN

Lanskap budaya merupakan bentang yang dibentuk dari perpaduan antara faktor alam dan perilaku manusia secara berkelanjutan dalam kurun waktu yang panjang sehingga dari interaksi tersebut terbentuk keanekaragaman hayati yang khas dan unik.Salah satu lanskap budaya yang telah diakui sebagai warisan dunia adalah lanskap budaya subak di Bali[1].Subak merupakan organisasi tradisional para petani Bali yang mengakui bahwa air adalah pemberian *Dewi Danu* (Tuhan dalam manifestasinya sebagai pelingdung danau dan sungai) karena itu wajib dibagi pada semua petani. Dengan berbagai nilai universal luarbiasa lanskap budaya subak merupakan sumber belajar yang penting bagi pelajar dan mahasiswa dari berbagai bidang ilmu, termasuk bidang perencanaan wilayah dan pengelolaan lingkungan[2][3][4]. Lanskap budaya subak yang telah terbentuk lebih dari satu milenium dan sampai saat ini tetap lestari disebabkan oleh adaptasi kompleks dan dinamis terutama dalam perencanaan pengembangan dan wilayah dan pengelolaan lingkungan [5][6].

Akan tetapi, walaupun kawasan subak kaya dengan berbagai prinsip kehidupan berkelanjutan tetapi tidak menjamin kawasan tersebut tetap lestari menjadi kawasan konservasi abadi. Bahkan kawasan lanskap subak yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia (WBD) pun tidak terlepas dari berbagai ancaman dan tantangan ditemukan dalam pengelolaan kawasan lanskap budaya tersebut. Pada saat diusulkan sebagai kawasan WBD lanskap budaya dunia (bersama-sama dengan Pura Ulun Danu Batur dan Danau Batur di Kabupaten Bangli, Kawasan Catur Angga Batukaru di Kabupaten Buleleng dan Tabanan, dan Pura Taman Ayun Mengwi di Kabupaten Badung) disebutkan bahwa pengelolaan secara lestari kawasan lanskap budaya dilakukan melalui Badan Pengelola WBD yang dibentuk dari berbagai pemangku kepentingan tingkat bawah terutama para petani anggota subak yang telah ditetapkan sebagai WBD

Badan pengelola inilah yang menentukan bentuk pengelolaan kawasan WBD dan sekaligus menerima manfaat (termasuk pendapatan dari sektor pariwisata) yang layak agar mereka dapat hidup layak dan mampu mengelola secara lestari kawasan WBD. Akan tetapi sejauh ini badan tersebut tidak pernah terbentuk. Penulis beberapa kali memang pernah dilibatkan dalam kegiatan seminar, lokakarya dan diskusi kelompok terarah yang melibatkan pekaseh (peminpin subak) kawasan WBD, namun tindak lanjut pembentukan badan pengelola belum

pernah terwujud. Berdasarkan hasil dua kali kunjungan ICOMOS (organisasi yang ditugaskan oleh UNESCO untuk memantau perkembangan WBD) diperoleh informasi kesimpulan "badan pengelola belum terbentuk" sehingga tidak sesuai dengan usulan yang diajukan ke UNESCO. Jika dalam badan tersebut tidak terbentuk dan segera melakukan kegiatan, dikhawatirkan status WBD bagi lanskap budaya di Bali akan dinyatakan *endangered* (terancam), sebelum akhirnya dicabut. Apa konsekuensi? Salah satu adalah "kesan, citra atau image" bagi masyarakat internasional bahwa mereka tidak mampu memelihara kawasan unik dengan berbagai nilai universal luar biasa (*outstanding universal values*), atau nilai universal luar biasa yang melewati batas perbedaan negara, agama, politik dan generasi. Salah satu konsekuensi yang kemungkinan bisa terjadi adalah penurunan wisata ke kawasan WBD. Sejak ditetapkan sebagai WBD, kunjungan wisatawan ke beberapa destinasi wisata seperti Pura Tirta Empul, Pura Gunung Kawi, Pura Ulun Danu Batur dan kawasan sawah berundag-undag di Jatiluwih meningkat tajam. Dapat dipastikan kunjungan tersebut akan menurun drastic jika UNESCO sampai menetapkan lanskap budaya subak di Bali berada dalam status terancam, dan apalagi jika sampai dicabut.

Akan tetapi sejauh ini lanskap budaya subak belum banyak dijadikan sumber belajar. Kegiatan ini bertujuan mengeksplorasi kemampuan mahasiswa dalam memetakan tiga pilar pembangunan berkelanjutan antara masa lalu, saat ini, kemungkinan keadaan dan harapan. Hasil penelitian di samping memperkaya cakrawala perencanaan pembangunan wilayah dan pengelolaan lingkungan berbasis keunggulan lokal (*local genius*) melalui pemetaan partisipatif, juga dapat memberikan kontribusi praktis dalam implementasi kebijakan, program dan strategi konservasi kawasan strategis internasional, seperti lanskap budaya yang telah diakui sebagai warisan dunia.

METODE PENELITIAN

Kajianini merupakan studi kasus dengan menggunakan kawasan DAS Tukad Pakerisan Hulu Gianyar Bali sebagai subjek penelitian.Gambar 1 menunjukkan kawasan DAS Tukad Pakerisan Hulu.

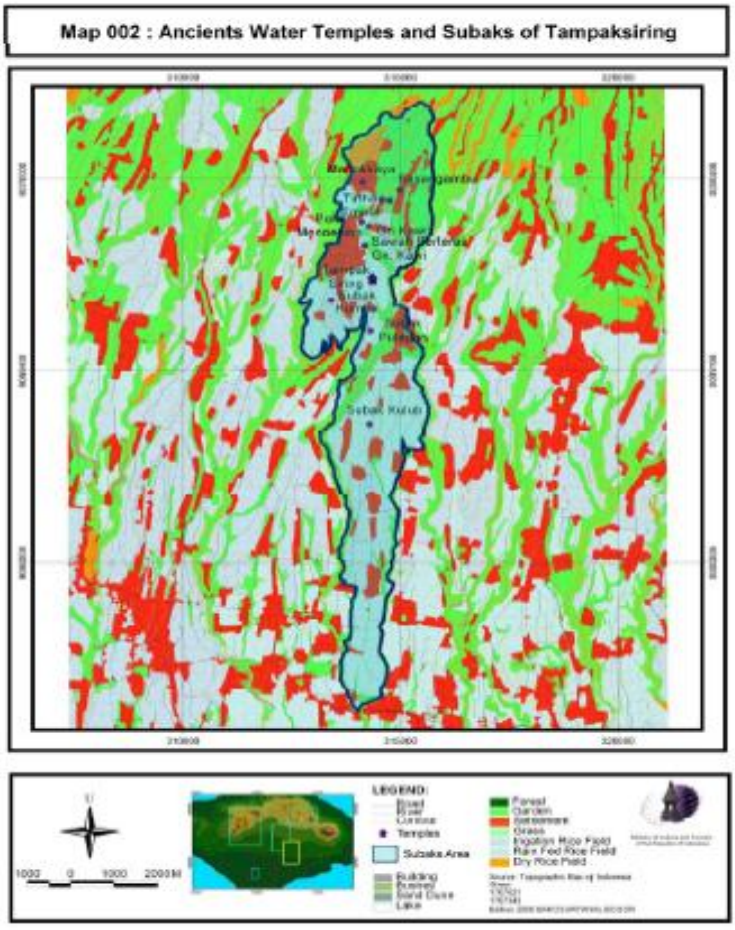

Gambar 1. Peta Lanskap Budaya DAS Tukad Pakerisan.[7]

Kawasan tersebut terletak pada bagian tengah Pulau Bali, dan menjadi pemisah antara Kecamatan Tampaksiring Gianyar dengan Kecamatan Susut Kabupaten Bangli. DAS Pakerisan Hulu (Kabupaten Gianyar), bersama-sama dengan Pura Ulun Danu dan Danau Batur (Kabupaten Bangli), kawasan Catur Angga Batu Karu

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

(Kabupaten Buleleng dan Tabanan dan Pura Taman Ayun (Kabupaten Badung) telah ditetapkan sebagai warisan budaya dunia [1]. Luas kawasan ini sekitar 884,88 hektar yang mencakup empat pura dan tiga subak (Subak Pulagan, Subak Kulub atas dan Subak Kulub bawah). Selain pura dan subak, kawasan tersebut bercampur dengan kebun, hutan, jalan dan pemukiman penduduk.

Semua pura yang termasuk warisan budaya dunia merupakan pura peninggalan para raja jaman Bali Kuno yang terkait dengan kawasan irigasi subak, dan tiga kawasan subak. Yang dimaksud dengan jaman Bali Kuno adalah era kerajaan sebelum Pulau Bali dikuasai oleh Kerajaan Majapahit dari Pulau Jawa. Keempat pura tersebut adalah Pura Tirtha Empul (dengan sumber mata air yang sangat besar), Pura Pegulingan (dengan stupa buda sebagai simbul akulturasi agama sudah terbentuk sejak jaman purba), Pura Mangening (memiliki mata air dan sumber dari air irigasi Subak Kulub), dan Pura Gunung Kawi (dengan ornamen yang unik dan berbeda dengan pura lainnya).

Pura Tirta Empul dikenal sebagai sumber air dari Tukad Pakerisan telah mendukung irigasi subak sejak lebih dari seribu tahun lalu. Salah satu prasasti menyebutkan pembangunan bendung di sekitar pura tersebut pada 962 Masehi. Alhi purbakala John Schoenfelder (2003)menyebutkan saluran irigasi subak di sekitar Pura Tirta empul termasuk saluran irigasi pertama di pulau ini. Pura Tirta Empul sampai saat ini merupakan pura yang banyak dikunjungi oleh wisatawan domestika dan mancanegera baik untuk rekreasi maupun persembahyangan. Istilah subak tentu tidak asing lagi bagi sebagian besar pembaca. Subak merupakan organisasi tradisional para petani di Bali yang meyakini bahwa air merupakan pemberian *Ida Shang Hyang Widhi Wasa* (Tuhan yang Maha Esa) dalam wujud beliau sebagai *Dewi Danu* (Tuhan dalam manifestasinya sebagai pelindung danau dan hutan), karena itu wajib dibagi pada semua petani. Sampai saat ini terdapat lebih dari seribu subak di Bali, dan setiap subak yang masih aktif sekurang-kurangnya memiliki ciri: (a) memiliki batas wilayah yang jelas dengan subak atau kawasan lain, (b) memiliki organisasi dengan perangkat pengurus (*prajuru*), anggota (*krama*) dan peraturan baik tertulis (*awig-awig*) maupun lisan (*perarem*), (c) memiliki sumber air dengan bangunan irigasinya, (d) mempunyai beberapa pura subak yang saling berhubungan satu dan yang lain, yang oleh Stephen Lansing [6]. disebut dengan jejaring kerja pura subak (*water temple networking*)

Sebanyak 28 mahasiswa peserta mata kuliah Perencanaan Pembangunan yang Berwawasan Ekologis, Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan, Program Paska Sarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar, dilibatkan dalam pembelajaran aktif lanskap budaya subak sebagai model perencanaan wilayah dan pengelolaan lingkungan yang berwawasan berkelanjutan. Pembelajaran aktif mencakup kegiatan, diskusi, tugas dan presentasi, mulai Agustus sampai Oktober 2016. Data dikumpulkan dengan menugaskan setiap mahasiswa membuat poster Y tentang dugaan pilar ekonomi, ekologi dan sosial budaya DAS Tukad Pakerisan pada masa lalu (1916), keadaan pada saat ini (2016), kemungkinan keadaan 100 tahun yang akan datang jika kondisi saat ini terus berlanjut, dan keadaan yang diharapkan pada 100 tahun yang akan datang (2016) (Gambar 2).

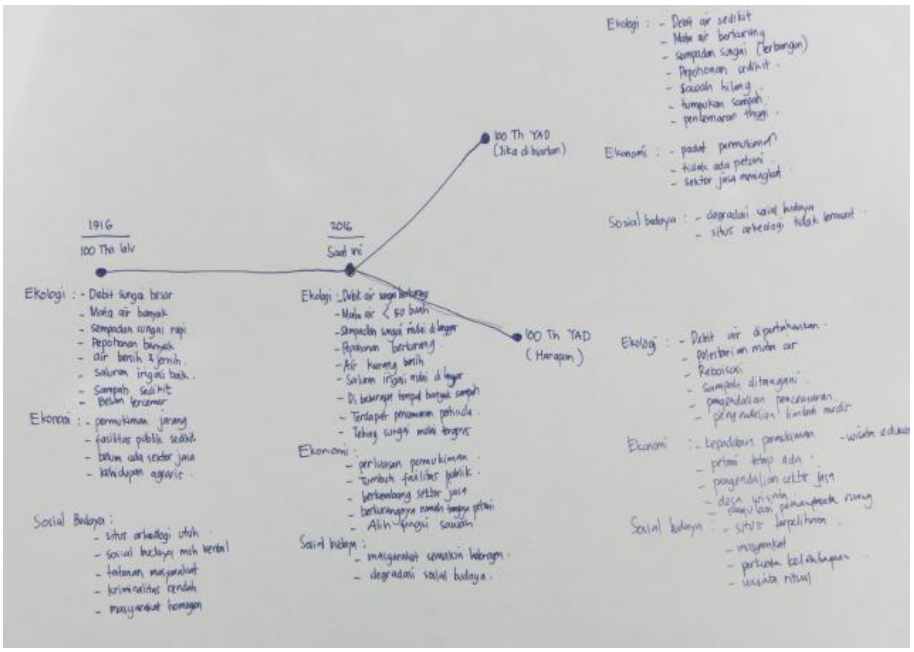

Gambar 2. Poster Y tentang perkiraan keadaan ekologi, ekonomi dan sosial budaya kawasan DAS Tukad Pakerisan, 100 tahun lalu, saat ini, kemungkinan keadaan dan harapan pada 100 tahun yang akan datang.

Selanjutnya poster Y dianalisis secara kualitatif.Validitas data diperoleh melalui triangulasi dengan melalui diskusi kelompok terarah (DKT).Kegiatan DKT terutama diarahkan untuk menggali strategi untuk merealisasikan agar

100 tahun yad tercapai kondisi yang diharapkan.Selanjutnya setelah diberikan kode, lalu data direduksi, dipaparkan dalam bentuk narasi dan gambar sebelum disimpulkan.Berdasarkan poster Y lalu dilakukan diskusi kelompok terarah (DKT), setiap kelompok terdiri atas 6-10 mahasiswa.Moderator ditunjuk dari salah satu mahasiswa, sedangkan penulis hanya menjelaskan maksud dan tujuan DKT dan beberapa topik penting yang perlu dibahas selama diskusi.Sebanyak enam kelompok DKT telah terbentuk dengan setiap kelompok, dengan durasi waktu sekitar 120 menit.Data direkam dalam bentuk video dan catatan tertulis yang dilakukan oleh seorang anggota DKT dan penulis.Hasil DKT dianalisis secara kualitatif-deskreptif terutama untuk mendukung data dalam bentuk kata-kunci yang ditulis dalam Poster Y.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sosiodemografi.

Sebanyak 28 mahasiswa yang berpartisipasi dalam penelitian ini, terdiri atas 16 laki-laki dan 12 perempuan, dengan usia berkisar 27-58 tahun. Semua mahasiswa telah memiliki pekerjaan tetap, sebagian besar adalah pegawai negeri sipil, sisanya bekerja pada sektor swasta, konsultan dan wiraswasta.

Pilar Ekologi.

Pilar ekologi yang paling banyak mendapat perhatian adalah masalah air, tanah dan keanekaragaman flora dan fauna. Partisipan menduga sekitar 100 tahun lalu debit sungai besar, mata air banyak, hutan masih luas dengan aneka ragam burung. Salah satu yang menjadi pembahasan adalah kemungkinan pasokan air irigasi tiga subak di sebelah hilir Pura Tirta Empul berkurang, karena air yang besumber dari mata air di pura tersebut makin banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Belum lagi masalah sumur bor yang makin banyak dibangun di sebelah hulu Pura Tirta Empul yang juga dikhawatirkan berpotensi menurunkan debit mata air (Gambar 3)

Gambar 3. Mata air yang terletak di Pura Tirta Empul merupakan sumber air irigasi utama bagi Subak Pulagan, Kulub Atas dan Kulub Bawah.

Akan tetapi pada saat ini, air selain berkurang juga tercemar oleh pestisida, deterjen dan sampah.Tebing sungai selain tidak asri juga mulai tergerus dan pada beberapa tempat terdapat sampah yang berserakan.Udara di sekita DAS Pakerisan mulai tercemar, kualitas tanah dan keanekaragaman hayati berkurang, di samping alih fungsi lahan meningkat.Jika dibiarkan maka 100 tahun yad.sawah akan hilang, air kering, flora dan fauna punah. Ancaman yang tidak kalah serius pada masa mendatang adalah introduksi spesies asing (berasal dari daerah lain). Karena itu, pelestarian mata air, reboisasi, pengendalian pencemaran, termasuk sampah medis merupakan harapan dari mahasiswa dapat dicapai pada 100 tahun yad. Upaya merealisasikan harapan antara lain dapat dilakukan dengan aplikasi virtual teknologi.

Pilar Ekonomi.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Menurut perkiraan mahasiswa, 100 tahun laluperkekonomian masyarakat di sekitar kawasan bertumpu pada bidang agraris (pertanian dan perkebunan) dan perdagangan.Sedangkan sektor jasa belum berkembang.Pada saat ini sebagian petani beralih profesi terutama karena penghasilan dari sektor pertanian yang tidak memadai.Sektor jasa berkembang dan fasilitas publik meningkat. Jika dibiarkan 100 tahun yang akan datang persaingan dalam bidang ekonomi makin tidak sehat, terlebih populasi manusia makin bertambah sehingga menimbulkan krisis ekonomi. Mereka berharap pada 100 tahun yad, ekonomi kreatif yang berwawasan lingkungan (misalnya wisata edukasi) dapat berkembang.Selain itu diharapkan pula terwujud swasembada pangan, optimalisasi transportasi masa, pembatasan alih fungsi lahan, dan kembali ke sistem perdagangan lokal.

Terkait dengan upaya peningkatan pendapatan petani, beberapa partisipan mengungkapkan tentang perlunya upaya revitalisasi sistem tumpang-sari padi sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi yang lebih banyak bagi para petani. Gambar 4 menunjukkan dengan sistem pertanian terintegrasi itik-padi, selain meningkatkan manfaat ekonomi dan memperbaiki kualitas tanah, juga berpotensi dikembangkan menjadi wisata edukasi untuk memberikan pembelajaran yang menarik, menyenangkan dan tidak terlupakan, terutama bagi siswa sekolah.

Gambar 4.Sistem pertanian terintegrasi itik-padi berperan dalam meningkatkan aspek ekonomi, ekologi dan sosial komunitas lokal, misalnya melalui wisata edukasi.

Pilar Sosial-Budaya.

Pada masa lalu situs arkeologi masih utuh, ritual keagamaan dan gotong royong sangat kuat, kriminalitas rendah, masyarat relatif homogen. Pada saat ini, masyarakat makin heterogen, terjadi degradasi sosial budaya, Masalah kriminalitas dan individualisme berpotensi menjadi ancaman kehidupan masyarakat pada masa depan. Situs arkeologi yang banyak bertebaran di kawasan dikhawatirkan pula tidak terawat. Oleh karena itu diharapkan adanya gerakan untuk melibatkan generasi muda dalam menghidupkan dalam membangkitkan nilai-nilai luhur adat-istiadat antara lain dengan memperkuat kelembagaan tradisional (seperti subak dan desa adat), dan revitalisasi gotong-royong dalam bentuk yang sesuai dengan perubahan kehidupan masyarakat. Salah satu harapan tersebut adalah menggunakan pura kuno seperti Pura Gunung Kawi sebagai media untuk mempromosikan aspek sosial-budaya dari lanskap budaya (Gambar 5).

Gambar 5.Pura Gunung Kawi sebagau model dalam wisata edukasi, terutama terkait dengan aspek sosial-budaya.

Tabel 1 menunjukkan mahasiswa berpendapat kondisi ketiga pilar keberlajutan DAS Tukad Pakerisan cenderung menurun antara masa lalu (1916), kini (2016) dan nanti (2016).Jika terhadap kondisi masa lalu, hampir semua mahasiswa berpendapat kondisi ekologi dan sosial budaya masih terawat dengan baik, hanya pada pilar ekonomi sekitar separuh mahasiswa menganggap kondisi ekonomi masa lalu kurang baik dibandingkan dengan saat ini. Akan tetapi pada saat ini, kondisi ketiga pilar berkelanjutan cenderung menurun, dan jika kecenderungan seperti saat ini dibiarkan tetap berlanjut maka sekitar seratus tahun yang akan datang, kondisi ketiga pilar keberlanjutan akan sangat buruk.

Tabel 1. Pendapat mahasiswa dalam poster Y tentang tiga pilar berkelanjutan DAS Tukad Pakerisan

Pilar Keberlanjutan	**Kondisi**	**% Pendapat mahasiswa (n=28)**		
		(1916)	**(2016)**	(2116)
Ekologi	Positif	89,3	0,0	0,0
	Netral	10,7	3,6	0,0
	Negatif	0,0	94,6	100
Ekonomi	Positif	10,7	17,9	7,1
	Netral	42,9	39,3	29,6
	Negatif	46,4	42,9	64,3
Sosial-budaya	Positif	89,3	14,3	0,0
	Netral	10,7	7,1	0,0
	Negatif	0,0	78,6	100

Keterangan: positif (kondisi baik); negatif (kondisi buruk); netral (tidak disebut baik/buruk).

Upaya Merealisasikan Harapan

Mahasiswa menyatakan permasalahan hidrologi harus mendapatkan prioritas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan (a) pengaturan air untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan pertanian dan konsumsi masyarakat; (b) manajemen air juga mencakup upaya melindungi sumber daya air dan sungai dari limbah, sampah dan sedimen akibat erosi tanah; (c) reboasasi terutama sepanjang sempadan sungai perlu memprioritaskan tumbuhan pohon dengan karakteristik dapat menyerap air hujan, mempertahankan tanah dari resiko longsor, sekaligus juga memiliki nilai ekonomi; (d) upaya konservasi kawasan perlu diintegrasikan dengan peraturan tradisional baik dalam bentuk *awig-awig* (tertulis) maupun *perarem* (lisan); (e) terkait dengan poin 4, alih fungsi lahan dan jual beli lahan harus diatur dalam *awig-awig* atau *perarem*, misalnya setiap pembeli harus bersedia menjadi karma (anggota) desa adat setempat; (f) potensi pariwisata terutama wisata edukasi (misalnya agrowisata dan pariwisata spiritual) dan desa wisata perlu didukung dengan upaya peningkatan pendapatan masyarakat lokal, seperti UMKM, industri rumah tangga; (g) kelembagaan, kebijakan, program, rencana dan regulasi seyogyanya secara konsisten dan berkelanjutan mengarah kepada sasaran menuju kawasan konservasi abadi.

Gambar 6 menunjukkan hasil analisis aspek ekologi, ekonomi dan sosial budaya dari poster Y. Mahasiswa berpendapat lebih banyak factor negatif yang diestimasikan akan terjadi terhadap DAS Tukad Pakerisan jika keadaan sekarang dibiarkan tetap berlanjut

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

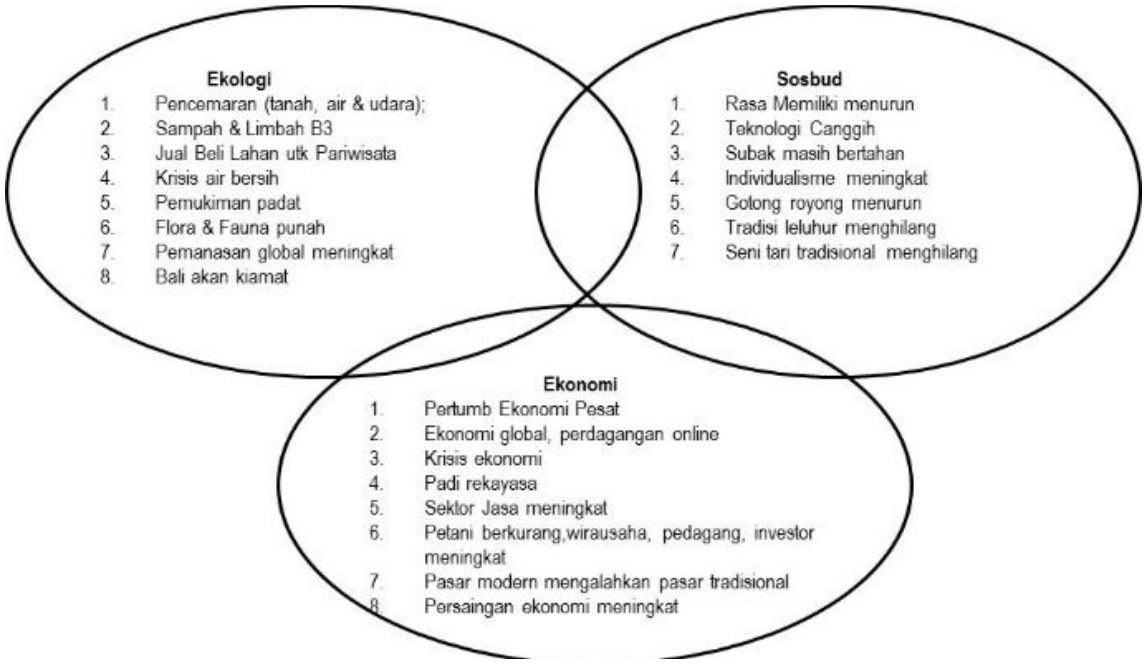

Gambar 6. Diagram Venn aspek ekologi, ekonomi dan sosial-budaya subak dari poster Y mahasiswa.

PEMBAHASAN

Hasil eksplorasi pendapat mahasiswa terhadap pilar ekologi, ekonomi dan sosial-budaya DAS Pakerisan menunjukkan adanya pergeseran keseimbangan ketiga pilar kehidupan berkelanjutan.Jika pada masa lalu, ketiga pilar berkembang secara seimbang (yang ditandai dengan sedikitnya terjadi pencemaran lingkungan biofisik maupun sosial), namun pada saat ini fokus pada kepentingan fungsi ekonomi cenderung memarjinalkan pilar ekologi dan sosial-budaya. Penurunan kualitas dan kuantitas air, pencemaran tanah pertanian akibat aplikasi pertanian tidak ramah lingkungan, meningkatnya alih fungsi lahan, kriminalitas dan individualisme dapat menimbulkan krisis air, defisiensi udara segar pada masa depan. Padahal lanskap budaya tetap dapat berkelanjutan karena menempatkan budaya sebagai instrument dalam menjaga keseimbangan antara modal ekonomi dan integritas ekologi[8].Subak (atau lanskap budaya lain dengan berbagai keunggulan lokal) tepat dijadikan model pembangunan berkelanjutan. Walapun Gangguan dan ancaman kemungkinan datang setiap saat, tetapi petani memiliki "kemampuan yang lentur" untuk mengubah bentuk pertanian, atau memproduksi pangan sesuai dengan daya dukung ekologi, dan menggunakan inovasi serta teknologi sebagai target luaran[9]. Lanskap budaya pertanian bukan hanya produksi makanan, tetapi juga menyediakan habitat hidupan liar, kawasan berkembang-biak, tempat tinggal, lokasi mencari makanan, dan berbagai jasa yang lain [10]. Pemetaan poster Y merupakan langkah awal dalam meningkatkan partisipasi mahasiswa dalam melakukan pemetaan terhadap ancaman, tantangan dan strategi konservasi kawasan warisan budaya dunia secara partisipatif. Karena itu, kegiatan longitudinal dalam bidang pemetaan perlu dilanjutkan dengan teknik pemetaan partisipatif yang lain, seperti pemetaan jejaring kerja sosial dan aset komunitas.[10][11]. Wisata edukasi memperoleh perhatian mahasiswa, hal ini perlu ditindaklanjuti dengan memetakan secara lebih terinci tentang kemungkinan pengembangan model alternatif yaitu wisata edukasi berbasis masyarakat.

Wisata edukasi mengacu pada kegiatan pendidikan yang diimplementasikan melalui pariwisata. Termasuk dalam wisata edukasi adalah kegiatan, perkuliahan atau aktivitas yang lain, yang mana peserta sebagai sebuah kelompok mengambil bagian dalam wisata dengan tujuan utama pendidikan yang terkait dengan bidang disiplin ilmu tertentu [7]. Sementara itu, Ritchie [12]. mengklasifikasi wisata edukasi dalam dua bentuk. Bentuk pertama adalah perjalanan umum dengan berbagai bentuk pendidikan atau pembelajaran menjadi bagian yang sangat penting (dan seringkali menjadi sumber motivasi) dari pengalaman berwisata. Katagori wisata edukasi ini menempatkan wisata sebagai tujuan utama dan pendidikan tujuan kedua, contoh yang paling umum adalah wisata studi (*study tour*) yang dilakukan oleh berbagai sekolah di Indonesia menjelang akhir semester atau liburan sekolah. Sedangkan katagori kedua berupa wisata sekolah (bisa berupa pertukaran program, kunjungan ke kampus atau wisata untuk belajar bahasa) yang pengalaman berwisata merupakan tujuan kedua, sedangkan pendidikan merupakan tujuan utamanya. Contoh yang paling sering digunakan adalah penyelenggaraan seminar, konferensi yang dilanjutkan dengan kegiatan kunjungan ke lapang (*field trip*).

Adapun wisata edukasi yang berpotensi dikembangkan di kawasan DAS Tukad Pakerisan adalah agrowisata, ekowisata dan wisata budaya.Agrowisata terutama sepanjang jalan dari arah Tampaksiring Gianyar menuju Kintamani Bangli.Hampir semua agrowisata menggunakan kopi dengan suguhan kopi luwak sebagai daya tariknya.Belum ada

agrowisata yang bertumpu pada tanaman padi. Oleh karena itu terbuka peluang untuk mengembangkan agrowisata berbasis tanaman padi terutama di sekitar Subak Pulagan, baik dalam bentuk wisata pasif maupun aktif Agrowisata pasif berarti kepada wisatawan disuguhkan atraksi atau penjelasan tentang segala sesuatu yang terkait dengan budidaya dan budaya padi, sebaliknya agrowisata aktif dilakukan dengan melibatkan wisatawan untuk berpartisipasi langsung dalam berbagai aktivitas bertani padi sawah. Berbagai ragam agrowisata aktif perlu dikembangkan agar di samping memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan, menghibur dan tidak terlupakan, namun dapat pula meningkatkan pendapatan para petani, sekaligus memperbaiki kualitas lingkungan dan kohesi sosial masyarakat sekitarnya.

Berbagai kegiatan ekowisata dapat dikembangkan baik dengan melibatkan wisatawan secara pasif maupun aktif (Gambar 7).Sejauh ini ekowisata yang berkembang di kawasan tersebut, adalah wisata naik sepeda dengan mengelilingi areal persawahan Subak Pulagan mengikuti jalan setapak yang telah dibeton. Ekowisata lain yang dapat dikembangkan adalah wisata mengamati burung (*birdwatching*). Berbagai spesies burung bisa diamati di areal persawahan maupun sepanjang kanan-kiri Tukad Pakerisan.Spesies dan kelimpahan populasi burung tersebut berubah sesuai dengan perubahan pertumbuhan padi sawah. Pada masa olah tanah kemungkinan jenis burung yang banyak ditemukan adalah burung pemakan ikan dan binatang air lainnya, seperti kuntul kerbau (*Bubulcus ibis*), kuntul perak (*Egretta intermedia*), dan kuntul kecil (*Egretta garzetta*), yang dengan warna bulunya yang putih dengan mudah bisa diamati di sekitar lahan sawah. Namun ketika tanaman padi mulai berbiji maka populasi burung granivora (pemakan biji-bijian) akan semakin meningkat, seperti perit (*Lonchura leucogastroides*), petingan (*Lonchura punctulata*) dan bondol (*Lonchura malacca*). Burung granivora berukuran relatif kecil namun mudah dikenali dari paruhnya yang berbentuk yang besar dan tebal untuk memecahkan kulit biji padi. Selain itu dengan mudah masih bisa ditemukan spesies burung yang lain, misalnya spesies burung pemakan madu seperti burung sesap madu (*Nectaria jugularis*) atau burung pemakan serangga di udara, misalnya burung walet sapi (*Collocalia linci*). Jika kita lagi beruntung, pada siang hari wisatawan bisa mengamati burung elang yang terbang melingkar di udara sambil mengeluarkan suara lengkingan yang khas. Semua ini memberikan jaminan bahwa ekowisata pengamatan burung akan menimbulkan daya tarik tersendiri jika dikembangkan di sekitar DAS Pakerisan. Apalagi jika ekowisata burung bisa melibatkan wisatawan secara aktif untuk berpartisipasi langsung dalam konservasi burung atau membantu petani dalam bercocok tanam padi.Misalnya mengintegrasikan wisata pengamatan burung dengan upaya konservasi gelatik jawa (*Padda oryzivora*).

Burung pemakan biji-bijian terutama padi (sesuai dengan namanya) sekitar empat dasa warsa lalu dengan mudah bisa diamati pada lahan persawahan di Pulau Jawa dan Bali sedang mencari makan bersama-sama dengan spesies burung granivora yang lain. Akan tetapi perburuan secara besar-besaran terhadap gelatik terutama untuk dijadikan binatang peliharaan menyebabkan burung tersebut pada saat ini jarang sekali dapat ditemukan hidup secara *in situ* (pada habitat alaminya) terutama di kawasan persawahan. Gelatik disenangi sebagai binatang peliharaan karena selain mundah memelihara, morfologi tubuh dengan bulu dominan biru, paruh dan kaki berwarna merah, disertai dengan bercak putih pada kedua pipinya, dan ditambah pula dengan tingkah lakunya yang senantiasa aktif menimbulkan daya tarik tersendiri untuk senantiasa dapat melihatnya setiap saat. Sayangnya kegemaran tersebut telah menyebabkan gelatik pada saat ini telah dinyatakan berada dalam status rentan (*endangered*) yang berarti jika populasinya di alam terus diburu maka dalam waktu sekitar 100 tahun populasi burung tersebut akan punah dari habitat alaminya. Gambar 4 menunjukkan beberapa kegiatan ekowisata dan agrowisata yang dapat dikembangkan di kawasan DAS Tukad Pakerisan.

Gambar 7. Beberapa jenis ekowisata dan agrowisata yang dapat dikembangkan di kawasan DAS Tukad Pakerisan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

.

KESIMPULAN

Isu ekologi paling banyak tereksplorasi melalui poster Y adalah masalah krisis air dengan harapan dilakukan konservasi sumberdaya air secara teintegrasi;isu ekonomi pergeseran dari ekonomi yang bertumpu pada pasar tradisional menjadi pasar modern, dan diharapkan kembali memprioritaskan pertumbuhan ekonomi lokal;pilar sosial-budaya tentang menguatnya individualisme, kriminalitas,dan karenanya perlu dilakukan revitalisasi keunggulan lokal, terutama Tri Hita Karana agar keharmonisan dan semangat kekeluargaan dapat dipertahankan.

Upaya konservasi yang perlu dikembangkan adalah meningkatkan pendapatan masyarakat lokal yang sekaligus dapat mendorong masyarakat berpartisipasi aktif dalam pelestarian pilar ekologi dan sosial-budaya.Upaya tersebut dapat dicapai melalui pengembangan wisata edukasi berbasis masyarakat, seperti agrowisata, ekowisata dan wisata spiritual. Oleh karena itu disarankan agar kawasan WBD DAS Tukad Pakerisan dijadikan pusat pengembangan kawasan wisata edukasi, dengan tujuan, pertaam meningkatkan kepekaan terhadap anak usia sekolah dan generasi muda tentang pola hidup berkelanjutan dengan menyediakan kegiatan/pendidikan non-formal untuk memperkaya proses belajar-mengajar tentang lingkungan dan konservasi, yang kemudian digunakan sebagai masukan dalam kurikulum sekolah dan perguruan tinggi. Secara bertahap, diharapkan pusat wisata edukasi menjadi sumber yang bernilai untuk membantu pembelajaran, kegiatan dan pendidikan lingkungan, baik yang diintegrasikan ke dalam ruangan kelas maupun menggunakan pusat pendidikan wisata edukasi sebagai kegiatan di luar ruangan.Kedua, pusat wisata edukasi sebaiknya juga dapat memberikan pembelajaran secara menyenangkan, menghibur dan tidak terlupakan bagi berbagai kelompok masyarakat luas dengan menyediakan berbagai materi sumber untuk meningkatkan kesadaran untuk mengkonservasikan lanskap budaya tradisional, sebagai kawasan WBD DAS Tukad Pakerisan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO). 2012. *Cultural landscape of Bali Province: The subak system as manifestation of the Tri Hita Karana philosophy*. (http://www.unesco.org/en/list/1194).

[2] Surata, S.P.K. 2013. Lanskap budaya *subak*. *Belajar dari masa lalu untuk membangun masa depan.* Denpasar: Unmas Press.

[3] Surata, S.P.K. (2013). Pembelajaran lintas budaya: Penggunaan subak sebagai model “ecopedagogy”. *Jurnal Kajian Bali*, 3(2), 181-198 (http://ojs.unud.ac.id/index.php/kajianbali/article/view/15687).

[4] Surata, S.P.K., Jayantini I G.A.S, & Lansing, J.S. 2015. Engaging student teachers in designing ecopedagogy learning modules for Bali’s *subak* cultural landscape. *NACTA JOURNAL,* 52(2), 139–143. (http://www.nactateachers.org/component/attachments/download/2254.html*).*

[5] Falk, I., Surata, S.P.K. 2007. Real social capital in Bali: Is it difference from literature? *Rural Society*: *The Journal of Social Capital and Rural Society*, *17*(3), 201-312.

[6] Lansing, J.S. 2006. Perfect order: Recognizing complexity in Bali. Princeton: Princeton University Press.

[7] The Ministry of Culture and Tourism of the Republic of Indonesia & the Government of Bali Province, 2009. Cultural Landscape of Bali Province.

[8] Almo, F. 2000. The cultural landscape as a model for the integration of ecology and economics. *Bioscience*, 50(4), 313-320

[9] Darnhofer, I., Fairweather, J. & Moller, H. 2010. Assessing a farm’s sustainability:Insights from resilience thinking. *International Journal of Agricultural Sustainability,* 8(3), 186-198.

[10] Surata, S.P.K, Vipriyanti, N.U., & Falk, I. 2010. Social network analysis for assessing social capital in biosecurity ecoliteracy. *Jurnal Ilmu Pendidikan,17(3), 238-244.*

[11] Surata, S.P.K. Jayantini, G.A.R.S., Lansing, J.S. (2014). Exploring community capital of the Balinese subak cultural heritage: a content analysis of participatory maps. *International Journal of Technical Research and Applications*, 2(7): 28-34.**e**-ISSN:2320-8163, http://www.ijtra.com/ijtra-special-issue07.php

[12] Ritchie, B. W. 2003. *Aspect of Tourism.* Managing Educational Tourism (Kindle Version). Sydney: Channel View Publications

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KEARIFAN BUDAYA LOKAL KAMPUNG ADAT CIREUNDEU DAN KONSEP SWASEMBADA PANGAN

Saraswati[1)], Reiza Permanda Gulfa[1)]

[1)]Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik, Universitas Islam Bandung

Email : sarasshasta111@gmail.com; reiza.permanda@yahoo.com

Naskah diterima :25Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 25Maret 2017

ABSTRAK

Kampung Adat Cireundeu, berlokasi di Kota Cimahi, berjarak ± 15 km dari Kota Bandung. Kebiasaan masyarakat di kampung ini terbilang unik, karena makanan pokoknya bukan nasi sebagaimana masyarakat lain di sekitarnya. Mereka juga memiliki tata cara pengelolaan lingkungan, konsep tata ruang, dan aturan adat yang cukup kuat, khususnya dalam pembangunan kawasan, pola diversifikasi pangan, makanan pokok, dan kegiatan lainnya yang ditaatinya secara ketat secara turun temurun. Makanan pokok masyarakat ini adalah rasi (beras singkong). Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan terhadap pola konsumsi dan produksi pangan pada Masyarakat Kampung Adat Cireundeu dalam upaya ketahanan pangan lokal, serta melakukan analisis terhadap faktor-faktor yang menguatkan dan melemahkan terkait swasembada pangan di kampung tersebut. Metode yang dilakukan yaitu survey primer dengan observasi, wawancara dengan tokoh adat, penyebaran kuesioner kepada 36 responden lokal. Metode analisis lainnya adalah analisis tata ruang dan perhitungan surplus defisit pangan. Hasil Penelitian menunjukan bahwa Kearifan Budaya Lokal Kampung Adat Cireundeu memiliki kontribusi terhadap swasembada dan diversifikasi pangan yang baik dengan angka kecukupan bahkan surplus produksi pangan, kegiatan ikutan dari swasembada pangan ini adalah tumbuhnya ekonomi lokal berbasis bahan baku setempat, kemandirian pangan, dan tumbuhnya industri rumahan serta kegiatan pariwisata. Tata Ruang kampung ini mendapatkan penguatan secara internal kampung, namun terancam karena kurangnya dukungan dari kebijakan tata ruang regional.

Kata kunci: *Budaya Lokal Cireundeu, Swasembada Pangan.*

PENDAHULUAN

Berdasarkan UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Rencana Tata Ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan ketahanan nasional dengan terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, keterpaduan dalam penggunaaan sumber daya alam serta sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat penataan ruang ([4] Undang Undang republik Indonesia, 2007).

Kampung Cireundeu, adalah kampung adat yang terletak di Kota Cimahi, tidak jauh dari Ibukota Jawa Barat, Kota Bandung. Masyarakatkampung ini masih mempertahankan adat kebudayaannya dalam pengelolaan ruang wilayah dan konsep ketahanan pangannya.

Kampung Cireundeu adalah sebuah bukit kecil yang dihuni oleh± 80 KK atau± 400 jiwa yang memiliki tradisi berbeda dari masyarakat kampung lain di sekitarnya. Masyarakat kampung ini merupakan suatu komunitas adat kesundaan memelihara, melestarikan adat istiadat secara turun temurun dan memiliki perbedaan dengan budaya masyarakat di sekitarnya. Sebagian penduduk Cireundeu, sejak ratusan tahun silam (sejak tahun1918), makanan pokonya bukan beras atau nasi seperti lainnya. Mereka hingga saat ini makanan pokoknya adalah berbagai panganan dari rasi atau beras singkong.

Slogan hidup yang dipertahankan oleh masyarakat kampung adat ini, di antaranya adalah:

"teu boga sawah asal boga pare, teu boga pare asal boga beas, teu boga beas asal nyangu, teu nyangu asal dahar, teu dahar asal kuat".

Yang artinya: "tidak punya sawah asal punya padi, tidak punya padi asal punya beras, tidak punya beras asal menanak, tidak menanak asal makan, tidak makan asal kuat " (Sumber, dicuplik dari tokoh masyarakat Kampung Adat Cireundeu, survey primer, dan diintrepretasi oleh penulis, 2016)
Secara geografis, Kampung Adat Cireundeu terletak di lembah Gunung Kunci, Gunung Cimenteng, dan Gunung Gajah Langu, yang secara administratif masuk ke dalam Kelurahan Leuwigajah, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Provinsi Jawa Barat.

METODOLOGI

Penelitian bertujuan untuk mengekplorasi tata nilai adat Masyarakat Kampung Cireundeu, menggunakan dua cara pendekatan atau metode, yaitu metoda kualitatif untuk mengeksplor tata cara adat dan proses pembelajaran dalam pengelolaan pangan dan adat istiadatnya, dan kedua adalah metoda kuantitatif untuk menghitung konsumsi dan produksi pangan sebagai upaya ketahanan pangan setempat. Tujuan dari penelitian ini adalah:

a. Mengamati adat kebiasaan masyarakat terkait keruangan dan pembangunan kawasan.
b. Menganalisis surplus produksi, angka konsumsi, dan produksi, serta diversifikasi pangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1) Landasan Teoritis

Deklarasi UNCHS di Nairobi pada tahun 1994, menyepakati bahwa Penyusunan perencanaan pembangunan daerah atau wilayah seharusnya mempertimbangkan partisipasi komunitas (*community participation*), keterlibatan semua kelompok yang terkait (*involvement of all interest groups*), koordinasi secara horizontal dan vertikal (*horizontal and vertical coordination*), keberlajutan (*sustainability*), kelayakan keuangan (*financial feasibility*), subsidi (*subsidiary*), dan interaksi antara perencanaan fisik dan ekonomi (*interaction of physical and economic planning*). Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat merupakan target sekaligus subjek dari program-program publik. Hal ini karena masyarakatlah yang akan meraskan pengaruh secara langsung dari perencanaan pembangunan yang terjadi. Oleh sebab itu, masyarakat berhak terlibat dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan publik.

Dalam sejarah perencanaan pembangunan wilayah, selama ini muncul berbagai pendekatan terkait dengan keterlibatan masyarakat seperti perencanaan dari bawah (*bottop-up planning*) atau disebut juga dengan *grass root planning*, perencanaan melalui parisipatif (*participatory planning*), perencanaan melalui demokrasi (*democratic planning*), perencanaan kolaboratif (*collaborative planning*), perencanaan melalui advokasi (*advocacy planning*), dan sebagainya yang menunjukkan adanya kesamaan bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan berperan serta di dalam proses pengambilan keputusan untuk menentukan masa depan mereka.
[1] memberikan definisi lebih luas mengenai perencanaan (*planning*) sebagai upaya menghubungkan antara pengetahuan ilmiah dan teknik (*scientific and technical knowledge*) kepada tindakan – tindakan yang lingkupnya publik.

Definisi ini menunjukkan peran serta masyarakat dalam perencanaan mengalami suatu pergeseran yaitu dari ‘untuk masyarakat’ berubah menjadi ‘oleh masyarakat’ sebagai sifat perencanaan dalam pembelajaran sosial (*social learning*). Kemudian [1] mengklasifikasikan sistem perencanaan sebagai berikut :

1. Perencanaan sebagai perubahan sosial (*social reform*). Dalam sistem perencanaan ini, peran pemerintah lebih dominan, sifat perencanaan ini adalah terpusat dari atas ke bawah (*top-down*) dan berjenjang.
2. Perencanaan sebagai analisis kebijakkan (*policy analysis*). Dalam system perencanaan ini, pemerintah bersama *stakeholder* lain memutuskan persoalan dan menyusun alternative kebijakan. Sifat perencanaan ini desentralisasi dan ilmiah (*scientific*)
3. Perencanaan sebagai pembelajaran sosial (*social learning*). Dalam sistem perencanaan ini pemerintah bertindak sebagai fasilitator. Sifat perencanaan adalah desentralisasi, dari masyarakat, dan dari bawah ke atas (*bottom up*).
4. Perencanaan sebagai transformasi sosial (*social transformation*). Perencanaan ini merupakan suatu bentuk kolektif gerakan warga.

Kearifan budaya lokal (*local genius*) adalah kebenaran yang telah mentradisi atau ajeg dalam suatu daerah. Kearifan budaya lokal merupakan perpaduan antara nilai-nilai suci, seperti firman Tuhan dan berbagai nilai yang dianggap baik. Kearifan budaya lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan budaya lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

secara terus-menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung didalamnya dianggap sangat universal.

Swasembada dapat diartikan sebagai kemampuan untuk memenuhi segala kebutuhan. Pangan adalah bahan-bahan makanan yang di dalamnya terdapat hasil pertanian, perkebunan dan lain-lain. Jadi swasembada pangan adalah kemampuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan bahan makanan sendiri tanpa perlu mendatangkan dari pihak luar atau swasembada pangan adalah keadaan di mana suatu daerah atau negara dapat memenuhi tingkat permintaan akan suatu bahan pangan sendiri tanpa perlu melakukan impor dari pihak luar. Swasembada pangan juga berarti terhindarnya suatu daerah atau negara dari kelaparan [5].

2) Profil Wilayah Kajian

Cireundeu merupakan suatu kampung yang dihuni oleh komunitas adat, terletak di Kota Cimahi, yang mayoritas penduduknya memiliki beberapa keunikan, di antaranya adalah 1). Makanan pokoknya adalah singkong atau ubi kayu; 2) Kegiatan ekonominya didominasi oleh hasil olahan singkong,3). dikelilingi dengan bukit-bukit dan hutan yang dijaga kelestariannya dengan aturan adat, melalui pembagian hutan adat; dengan lahan budidaya didominasi dengan tanaman singkong sebagai bahan makanan pokok dan kegiatan ekonomi lokal4). komunitasnya masih mempertahankan adat kebiasaannya secara turun temurun, 5). wujud atefak-artefak yang ada (dalam balesaresehan) untuk mewujudkan kehidupan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan sehingga hal ini menjadi menarik dan memiliki ketaatan yang lebih tinggi.

Gambar.1. Gambaran Umum Wilayah Kampung Adat Cireundeu.

- Masyarakat adat paling banyak terdapat di RT.02. Terdapat ± 80 KK (Masyarakat Adat), namun jumlah keseluruhan Kampung Cireundeu, karena terdapat masyarakat umum juga, berjumlah sekitar ±300 KK.
- Luas permukiman ± 6 ha
- Luas permukiman + Hutan = ± 60 ha (hanya tanah adat, tanah adat tidak sama dengan tanah pemerintah
- Mereka mempunyai 2 hutan :
  a. Hutan Larangan (Stok Air)
  b. Hutan Baladah (pertanian)
- Memiliki tempat ririungan yang dinamakan “Bale Sarasehan”

ISBN : 978-602-73463-1-4

- Salah satu makna mereka memakan singkong yaitu merupakan suatu keyakinan. Masyarakat Kampung Adat Cireundeu menganggap bahwa kekuatan itu bukan hanya datang dari padi saja.
- Sebagian besar masyarakat adat kampung ini menganut kepercayaan sunda wiwitan. Namun banyak pula yang sudah beragama Islam, khususnya masyarakat yang sudah asimilasi atau menikah dengan orang luar kampunglainnya. Masyarakat adat menyebut pemahaman sunda wiwitan sebagai penghayatan.
- Masyarakat Cireundeu memiliki kalender tahunan, dimana mereka sering melakukan upacara adat yang biasanya diselenggarakan dengan pagelaran budaya dan wayang golek.
- Dalam pengendalian pemanfaatan ruang kawasan, masyarakat adat Kampung Cireundeu memiliki filsafat hidup yang menyatakan bahwa: jangan terbawa oleh zaman, sehingga pada masyarakat Adat ini memiliki pamali-pamali (istilah sunda) yang tidak boleh dilakukan.
- Dari segi bangunan pada umumnya sudah modern, hanya pada rumah pamitren dan beberapa bangunan adat yang menggunakan bangunantradisional beratap julang ngapak
- Istilah-Istilah yang dijadikan pedoman masyarakat adat:ngindung kawaktu, mi bapa ka zaman. Mengindung ke waktu memiliki makna bahwa keyakinan itu harus kuat dan memiliki pondasi yang kokoh agar tidak mudah roboh. Mi Bapa Ka Zaman memiliki makna: Agama sebagai Aturan, Gawean, Manusa. SUNDA (Semua Umat Nabi Adam)
- Pola permukiman:
  - Pintu menghadap pada tenggelamnya matahari
  - Jendela menghadap pada terbitnya matahari

3) Aturan adat dalam pengelolaan Lahan

Masyarakat Adat Cireundeu memiliki aturan-aturan dalam ketata-ruangan, dengan membagi wilayah ke dalam tiga fungsi utama, yaitu *leueweung larangan* (hutan lindung), *leuweung tutupan* (hutan penyangga), dan *leuweung baladahan* (hutan produksi).

Seperti perkampungan adat di beberapa daerah di Indonesia, ketaatan dalam menjaga kelangsungan dan perlindungan terhadap hutan merupakan salah satu alasan mengapa kampung adat ini relatif tetap lestari.Pembagian wilayah hutan di Kampung Clreundeu, dapat digambarkan sebagai berikut.

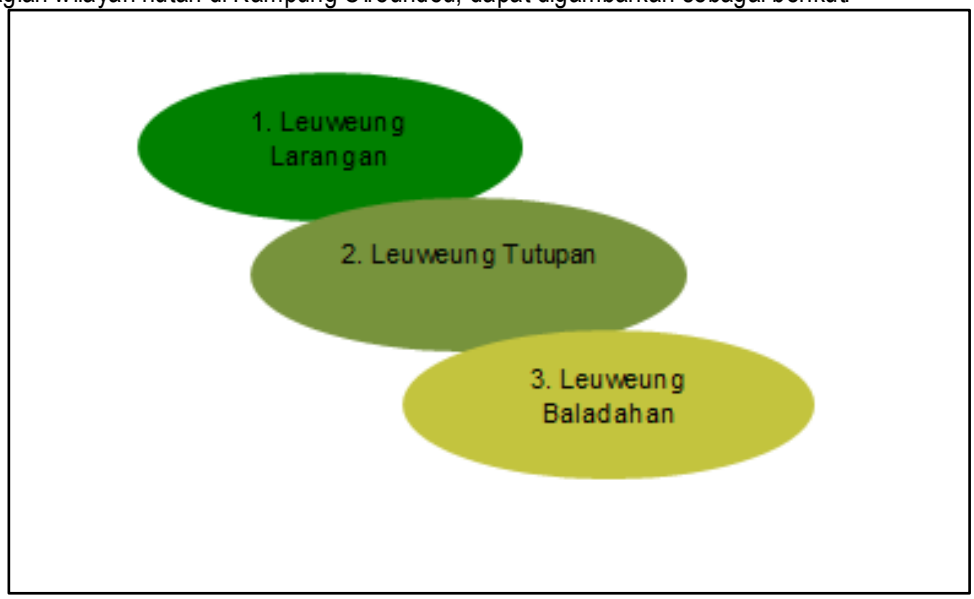

Gambar. 2. Pembagian Fungsi Ruang di Kampung Adat Cireundeu.

Gambar di atas menunjukan *Leuweung* atau hutan yang memiliki arti penting bagi masyarakat Cireundeu. leuweung larangan adalah kawasan lindung seperti hutan resapan dan mata air. Kawasan lindung tersebut tidak boleh diganggu kegiatan manusia sama sekali apalagi untuk memasuki dan merusaknya. Leuweung baladahan adalah hutan penyangga yang berfungsi sebagai penyangga kawasan lindung dan budidaya, yang terdiri atas fungsi antara lindung dan budidaya. Pada kawasan penyangga ini terdapat tanaman tahunan seperti pohon pinusdan dominasi tanaman keras lainnya. Sedangkan*Leuweung baladahan* adalah kawasan budidaya yang berfungsi sebagai kawasan pertanian yang pada umumnya ditanami tanaman singkong, jagung, dan tanaman-tanaman perkebunan lainnya, serta permukiman.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Pembelajaran Sosial

Masyarakat adat Cireundeu memelihara kepatuhan terhadap adat istiadat dilakukan secara turun menurun dan secara terus menerus, sebagai suatau proses pembelajaran sosial, dimana kegiatan utamanya direfleksikandalam keunikantertentu dalam mengkaitkan ilmu pengetahuan ke dalam tindakan budaya. Bagi sebagian lain, pembelajaran sosial merupakan suatu teknologi sosial. Pembelajaran sosial merupakan suatu proses yang terus menerus terjadi dalam masyarakat bila antar anggota saling berinteraksi, memelihara kebersamaan untuk mengatasi dan mengubah realitas masalah [1], [3] mengemukakan bahwa pembelajaran sosial atau observasional adalah pembelajaran yang meliputi perolehan keterampilan, strategi dan keyakinan dengan cara mengamati orang lain secara terus menerus.

Pembelajaran sosial menekankan potensi menyelesaikan masalah yang ada dalam kelompok, komunitas dan organisasi. Pembelajaran sosial beorientasi pada tindakan dan pengalaman. Pembelajaran sosial bersifat reflektif, dimana terjadi intensitas komunikasi antar pelaku terhadap pendapat-pendapat, penilaian, strategi, tindakan, perasaan, dan sebagainya. Pembelajaran sosial adalah suatu kerja sama dan komunikasi yang berarti terjadi dialog antara pelaku pembelajaran dalam berorganisasi baik secara implisit maupun eksplisit. Selanjutnya [2] menyatakan bahwa peran pelaku dan objek dalam pembelajaran sosial dilakukan secara bersama-sama. Artinya, bahwa di antara mereka saling memberi dan menerima informasi. Di antara mereka saling mengajar dan diajar. Di antara mereka saling memahami dan saling memerlukan.Melalui pembelajaran seperti ini, pelaku dan objek saling menerima difusi pengetahuan, pengalaman, bahkan inovasi-inovasi pengetahuan yang tertuang dalam tindakan. Dengan tambahan pengetahuan tersebut, lambat laun mereka memiliki kemampuan secara kolektif dalam memecahkan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan mereka seperti kemampuan mengatasi masalah sosial kemasyarakatan. Kemampuan secara kolektif disebut sebagai kapasitas komunitas.

Dalam tradisi pembelajaran sosial di Kampung Cireundeu mensyaratkan masyarakat melakukan transaksi *face-to-face* yang memunculkan dialog interaktif diantara mereka. Untuk mencapai tujuan ini, tentunya juga diperlukan kondisi yang memungkinkan hubungan partisipatif dalam proses pembelajaran agar dicapai berbagai kesepahaman tujuan pembangunan lingkungan komunitas tersebut.

Pengolahan Pangan dan Sumberdaya Alam

Sebagai makanan pengganti beras, singkong yang telah menjadi rasi (beras singkong), dianggap memiliki kecukupan gizi dan karbohidrat yang sama dengan beras, selain itu rasi memiliki banyak serat dan rendah gula (sangat cocok untuk terapi diabetes dan untuk diet) akan tetapi singkong rendah protein, untuk mengatasi rendah protein tersebut masyarakat Kampung Adat Cireundeu memakan protein nabati seperti tahu, tempe dan protein hewani seperti daging ayam, sapi dan protein-protein hewani lainnya.

Untuk menghitung pemenuhan pangan setempat, sebagai cara menghitung surplus-defisit dan kecukupan pangan, penelitian inimelakukan perhitungan surplus-defisit, dan hasil perhitungan menunjukan bahwa Kampung Cireundeu mengalami surplus hingga bisa menjual bahan baku rasi ke luar daerah, dan hasil olahannya juga dapat dijual ke daerah lain di luar Cireundeu, di antaranya ke Kota Bandung dan daerah lainnya.

Perhitungan surplus-defisit adalah sebagai berikut:

- Jumlah Penduduk (Adat) dan jumlah pendudukyang ada di Kampung Cireundeu adalah 80 KK, dari hasil kuesioner setiap keluarga mengkonsumsi rasi
- ± 0,5 kg/hari, maka kebutuhan per tahun adalah 80 x 0,5 x 360 = 14.400 kg = 14,40 ton/thn.
- Sedangkan produksi yang ada rata-rata dihasilkan sekitar 43,20 ton/thn.
- Sisa produksi rasi dijual ke luar daerah, baik dalam bentuk bahan baku maupun hasil olahan berupa makanan, kue-kue kering, dan produk lainnya.

Dari produksi rasi, juga telah menghasilkan produk olahan makanan lainnya, yang menjadi kegiatan ekonomi sampingan bagi perkumpulan ibu-ibu di kampung ini sebagai industri rumahan. Beberapa produk tersebut, di antaranya adalah: tepung beras singkong (rasi), keripik singkong, kue kering,*egg-roll, chees-stick*, pastel, keripik, dan masih banyak lagi. Seperti terlihat pada gambar berikut:

ISBN : 978-602-73463-1-4

Gambar. 3. Foto Beberapa produk Kampung Cireundeu yang terbuat dari rasi (bahan baku singkong). Hasil Survey Primer, 2016.

Dari segi pemasaran dan tata niaga, Kampung adat Cireundeu sudah memiliki koperasi bersama yang dikelola oleh masyarakat setempat (UMKM). Untuk meningkatkan daya tarik pariwisata, di tengah-tengah kampung terdapat ruang pagelaran budaya, saung serba guna atau bale saresehan, museum kampung adat, koperasi, dan ruang budaya lainnya. Atraksi budaya khas kampung ini juga cukup menarik bagi para wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, dan dapat digelar untuk acara-acara adat maupun bila menerima kunjungan dari beberapa tamu yang memerlukan gelaran budaya lokal Cireundeu.

Gambar. 4. Foto Beberapa ruang budaya Kampung Cireundeu. Hasil Survey Primer, 2016.

Sehubungan dengan keberhasilan ekonomi lokal masyarakat Kampung Cireundeu ini maka berdasarkan Surat Keputusan Walikota Cimahi, Cireundeu telah ditetapkan sebagai salah satu Desa Mandiri Pangan (Demapan). Program demapan ini terdiri dari 3 (tiga) komponen dasar, yaitu :

1. Pertanian
2. Peternakan
3. *Home Industry* (kuliner)

Program demapan ini mendapat apresisi dan Bantuan Sosial yang ditujukan kepada kelompok Afinitias (kelompok masyarakat miskin) dan kelompok lainnya yang sudah terbentuk di kampung ini. Ketua RW sebagai tokoh masyarakat (saat ini dipimpin oleh Pak Yuyun) menyampaikan bahwa di Kampung Adat Cireundeu ini bukan hanya ada tata cara adat, akan tetapi sudah berkembang kedalam pengembangan ekonomi lokal, baik dalam pariwisata, atraksi budaya, pengembangan lingkungan, dan kulinernya, yang dikelola oleh ibu-ibu dalam bentuk*home industry*. Hasil *home industry* ini berupa makanan-makanan yang berbahan dasar singkong atau dikenal dengan istilah serba singkong yang kemudian dijual sebagai oleh-oleh dan*merchandise* untuk pengunjung yang datang ke Kampung Adat Cireundeu ini.

Disamping itu, pembicaraan adat hanya terbuka pada laki-laki karena sebagai pimpinan keluarga yang memiliki peran dominan dalam pengambilan keputusan. Dari tingkat pendidikan masyarakat adat masih ada penduduk yang tidak mengenyam bangku pendidikan. Berdasarkan temuan dilapangan, masih ada anggapan bahwa ilmu tidak didapatkan melalui pendidikan formal saja melainkan dapat belajar dengan alam.

Dari tingkat penghasilan masyarakat adat, walaupun makanan pokoknya singkong, pendapatan dan tanggungan per-bulannya masuk dalam kategori cukup sejahterakarena tidak harus menyiapkan dana untuk makanan pokok seperti masyarakat lainnya karena bahan pokok sudah tersedia di dalam kampung.Dari status kepemilikan lahan, masyarakat adat masih ada yang menyewa lahan kepada pemilik lahan yang ada disekitar

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

lokasi pertaniannya. Disamping itu, untuk tenaga kerja, masyarakat adat menggunakan tenaga kerja orang lokal Cireundeu. Pada umumnya upah yang dibayar bukan berupa uang melainkan singkong, karena masyarakat adat beranggapan bahwa singkong yang dihasilkan sebagai pemenuh kebutuhan pokok dan sangat berharga. \

Dalam pengelolaan lahan pertanian, seperti pemupukan, masyarakat adat menggunakan pupuk organik atau pupuk kandang (untuk lahan 1-2 ha) yang dihasilkan dari ternak hewan setempat dan penggunaan pupuk kimia hanya diperuntukan pada lahan >2ha. Hasil panen singkong rata-rata mencapai 7,04 ton/tahun/ha. Jumlah lahan pertanian singkong di kampung ini mencapai sekitar 44 ha.

Kelembagaan Adat

Berdasarkan hasil wawancara, didapat informasi dari beberapa tokoh lokal, bahwa Kampung adat Cireundeu sudah ada sejak tahun 1918. Dalam Kampung Cireundeu terdapat struktur kelembagaan adat yang menjadi salah satu pendukung terlaksananya pelaksanaan aturan dan kesepakatan adat. Struktur kepemimpin adat yang mereka hormati terdiri atas sesepuh atau tetua adat, pangampih, panitren, dan masyarakat adat mnya itu sendiri. Komposisi kelembagaan adat di Kampung Cireundeu, adalah seperti terlihat dalam gambar berikut:

Gambar. 5. Struktur Kelembagaan Adat Kampung Cireundeu. Hasil Wawancara, Survey Primer, 2016.

KESIMPULAN

Desa Swasembada pangan atau Desa Mandiri Pangan (Demapan) adalah predikat yang diperoleh Kampung Adat Cireundeu karena wilayah inimampu mengatur dan mempertahankan Lahan kampung untuk memenuhi kebutuhan pangan lokalnya, memiliki tata cara dan aturan yang ketat dalam pengendalian pemanfaatan ruang, ditata untuk menyediakanbahan baku singkong untuk makanan pokok mereka secara berkelanjutan. Untuk surplus produksi, masyarakat menggunakannya untuk makanan lain yang bernilai ekonomi sebagai nilai tambah dan tambahan penghasilan warganya. Diversifikasi pangan dengan menjaga produksi dan lingkungan pendukungnya secara berkelanjutan melalui pendidikan sosial yang diterapkan secara ketat dan turun temurun yang dapat merencanakan, memanfaatkan, dan mengendalikan pemanfaatan ruang yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan makanan pokoknya dan surplusnya bisa di ekspor ke luar daerah.

Tradisi leluhur Kampung Adat CIreundeu telah mengajarkan pada masyarakat lokalnya untuk tidak ada ketergantungan terhadap padi dan import dari daerah lain. Kampung Adat Cireundeu sangat menjaga tradisi leluhur sehingga sekarang kampung adat tersebut menjadi potensi desa swasembada pangan menuju desa mandiri pangan. Ini adalah potensi yang menguatkan Kampung Adat Cireundeu yang. Salah satu hal-hal yang menguatkan Kampung Adat Cireundeu yaitu: Adanya kepemimpinan tetua adat yang selalu ditaati, masyarakatnyataat pada tradisi leluhur dan selalu menjaga kelestarian lingkungan, sebagai pendukung kegiatan pertanian tanaman pangan mereka.

Secara kebijakan, Kota Cimahi telah menetapkan Kampung Adat Cireundeu sebagai kawasan strategis wisata alam dan wisata buatan. Namun untuk pengembangan ke depan, disarankan dukungan kebijakan, baik program maupun tata ruang kawasan kampung ini harus mendapat dukungan kuat. Hal ini cukup

menghkhawatirkan karena pernah terjadi longsor besar TPA Leuwigajah yang menerjang kawasan sekitar kampung adat ini. Demikian juga dengan kebijakan dan strategi Penataan ruang Kota Cimahi (Bappeda 2010-2030, hal 2 kolom G) Peningkatan pelayanan persampahan Kota Cimahi berbunyi Pengamanan TPSA Leuwigajah melalui upaya mewujudkan kawasan hijau atau Buffer Zone di arela TPA Leuwigajah, dapat menjadi ancaman bagi kampung adat jika tidak dilakukan dukungan terhadap kawasan kampung adat secara terpadu.

Masyarakat Kampung Adat Cireundeu tidak akan kuat menghadapi derasnya permintaan pengembangan dari investor dan developer dalam upaya pengembangan kawasan ini karena sangat menarik, berpemandangan indah pegunungan, udara yang sejuk, selain berlokasi tidak jauh dari kegiatan perkotaan, lingkungan yang masih asri dengan lembah yang hijau nan asri, dengan suasana kebudayaan lokal yang kental dengan berbagai kegiatan upacara dan tata cara aturan adat, juga sudah memiliki infrastruktur yang memadai.

Untuk itulah diperlukan dukungan kebijakan dari pemerintah lokal dan regional agar keberadaannya tidak terdesak oleh permintaan dari berbagai kepentingan lainnya yang kurang mendukung kelestarian kearifan budaya lokal.

Demikian juga dengan aturan Tata Ruang, khususnya dalam RTRW dan RDTR perlu adanya ketegasan alokasi kawasan di sekitar kampung ini untuk ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya atau kawasan heritage yang dilindungi dengan aturan atau kebijakan daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Friedman, J. 1987. Planning in The Public Domain, From Knowledge to Action. Princeton University Press.
[2] Friedman, J. 1992.. Empowerment, The Politics of Alternative Development. Blackwell. Cambridge MA &Oxford UK.
[3] Santrock, J. 2007. Psikologi Pendidikan (edisi kedua). (Penerj. Tri Wibowo B.S). Jakarta: Kencana.
[4] Undang Undang republik Indonesia. 2007. No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
[5] Undang-Undang Republik Indonesia. 1997. No 7 Tahun 1996 Tentang Pangan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS PENGELOLAAN DAERAH ALIRAN SUNGAI PEKERISAN DITINJAU DARI DAYA DUKUNG BIOFISIK LAHAN

Wayan Sudiani[1)], I Ketut Sumantra[2)]

[1)]Mahasiswa Prodi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan (P2WL)
Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar.
[2)]Dosen Prodi Perencanaan dan Pembangunan Wilayah dan Pengelolaan Lingkungan (P2WL)
Pascasarjana Universitas Mahasaraswati Denpasar.

Email :ketut.sumantra61@gmail .com

Naskah diterima :27 Februari 2017 Naskah direvisi : 8 Maret 2017 Disetujui terbit : 15 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan diDAS Pakerisan yang memiliki luas total 9.091,89 hektar, secara administrasi terletak di Kabupaten Bangli seluas 1.851,83 hektar (20,37 %) dan Gianyar seluas 7.240,06 hektar (79,63 %). Di Kabupaten Bangli meliputi Kecamatan Kintamani seluas 561,00 hektar dan Kecamatan Susut seluas 1.290,83 hektar. Di Kabupaten Gianyar meliputi Kecamatan Blahbatuh seluas 2.493,46 hektar, Kecamatan Gianyar seluas 2.801,62 hektar dan Kecamatan Tampaksiring seluas 1.944,98 hektar. Penelitian ini bertujuan untuk mengatahui indikator yang berpengaruh dalam pengelolaan DAS dan untuk mengatahui kondisi daya dukung dari DAS Pakerisan.Hasil penelitian menunjukkan , kondisi daya dukung DAS Pakerisan termasuk katergori "Baik" dengan nilai sebesar 79,75 dengan indikator a) Tidak terdapat lahan kritis; b) persentase penutupan vegetasi: buruk (31,81 %); dan c) indeks erosi : tinggi (1,37). Kondisi tata air yang meliputi : a) koefisien rezim aliran : baik (41,57);b) koefisien aliran tahunan : sangat baik (0,09);c) muatan sedimen : sangat tinggi (536 ton/ha/th); d) kejadian banjir : lebih 2 x dalam setahun; dan e) indeks penggunaan air : sangat baik (0,15).
Kata kunci: *Daya Dukung, Kinerja, Daerah Aliran Sungai*

PENDAHULUAN

Kerusakan lingkungan di Indonesia telah menjadi keprihatinan banyak pihak, baik di dalam negeri maupun oleh dunia internasional.Hal ini ditandai dengan meningkatnya bencana alam seperti banjir, tanah longsor di musim penghujan dan kekeringan di musim kemarau. Rendahnya daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai suatu ekosistem diduga merupakan salah satu penyebab utama terjadinya bencana alam yang terkait dengan air (*water related disaster*) tersebut. Kerusakan DAS dipercepat oleh peningkatan pemanfaatan sumberdaya alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan dan kurang keterpaduan antar sektor, antara wilayah hulu-tengah-hilir[1],[2].Pada era otonomi daerah, sumberdaya alam ditempatkan sebagai sumber Pendapatan Asli daerah[3]

Daerah aliran sungai (DAS) dapat dipandang sebagai sistem alami yang menjadi tempat berlangsungnya proses-proses biofisik hidrologis maupun kegiatan sosial-ekonomi masyarakat yang kompleks. Proses-proses biofisik hidrologis DAS merupakan proses alami sebagai bagian dari suatu daur hidrologi atau yang dikenal sebagai siklus air. Sedang kegiatan sosial ekonomi masyarakat merupakan bentuk intervensi manusia terhadap sistem alami DAS, seperti pengembangan perkotaan, pembuatan bangunan air, pengembangan lahan kawasan lindung dan budidaya.Hal ini tidak lepas dari semakin meningkatnya tuntutan atas sumber daya alam (air, tanah, dan hutan) yang menyebabkan meningkatnya tekanan penduduk terhadap lahan yang membawa akibat pada perubahan kondisi DAS.

Perubahan kondisi DAS sebagai dampak pemanfaatan lahan yang tidak terkendali tanpa memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air dapat mengakibatkan peningkatan erosi dan sedimentasi, penurunan penutupan vegetasi, dan percepatan degradasi lahan[3]. Hasil akhir perubahan ini tidak hanya berdampak nyata secara biofisik berupa peningkatan luas lahan kritis, penurunan kuantitas, kualitas dan kontinuitas aliran, namun juga secara sosial ekonomi menyebabkan masyarakat menjadi semakin kehilangan kemampuan untuk berusaha di lahannya dan penurunan kesejahteraan masyarakat[4].

Daerah Aliran Sungai (DAS) merupakan kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir.DAS bukan hanya sungai tetapi mencakup wilayah daratan di atas badan sungai yang batasnya di daratan berupa pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktifitas daratan.Seluruh wilayah daratan terbagi habis dalam DAS dan semua orang hidup di dalam DAS.Untuk itu DAS perlu dilindungi dan kelola dengan sebaik-baiknya serta wajib dikembangkan dan didayagunakan secara optimal dan berkelanjutan melalui upaya pengelolaan DAS untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Kawasan DAS Pakerisan merupakan salah satu kawasan yang telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai Warisan Budaya Dunia (WBD).DAS Pakerisan merupakan salah satu DAS lintas kabupaten yang ada di Provinsi Bali.Bagian hulu DAS Pakerisan berada di Kabupaten Bangli tepatnya di Kecamatan Kintamani dan bagian hilirnya berada di Kabupaten Gianyar.Jika terjadinya perubahan tata guna lahan di bagian hulu maka dapat mengancam keberadaan kondisi DAS di bagian hilir.

Seiring dengan perkembangan waktu, wilayah DAS Pakerisan juga telah mengalami perubahan, baik yang disebabkan salahsatunya dengan terus bertambahnya jumlah penduduk. Bertambahnya jumlah penduduk tersebut maka akan terjadinya alih fungsi lahan, hal ini dikarenakan kebutuhan akan ruang untuk pemukiman akan terus bertambah. Selain itu perkembangan pariwisata yang cukup pesat di Provinsi Bali khusunya di wilayah DAS Pakerisan telah juga mengakibatkan terjadinya alih fungsi lahan yang sangat cepat, lahan yang seharusnya merupakan kawasan lindung diubah oleh para investor untuk dikembangkan mejadi usaha jasa akomodasi wisata seperti hotel dan restoran maupun villa-villa.

Untuk menjaga kelestarian dan kondisi DAS Pakerisan tersebut maka diperlukan sistem pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan. Secara nasional upaya-upaya yang telah dilakukan untuk menjaga kelestarian dan kondisi DAS telah dilakukan sejak tahun 1970-an, akan tetapi dengan melihat fenomena saat ini keberhasilan dari pengelolaan DAS tersebut patut untuk dipertanyakan. Indikator dari keberhasilan pengelolaan DAS ditunjukan dengan kinerja DAS yang baik atau daya dukung DAS yang baik, sebaliknya apabila penngelolaan DAS yang tidak atau kurang berhasil maka kinerja DAS buruk atau daya dukung DAS buruk.Daya dukung DAS adalah kemampuan DAS untuk mewujudkan kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatnya kemanfaatan sumberdaya alam bagi manusia dan makhluk hidup lainnya secara berkelanjutan [5].

Untuk mengetahui kondisi pengelolaaan DAS Pakerisan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul "Analisis Pengelolaan DAS Pakerisan Ditinjau Dari Daya Dukung Biofisik. Faktor biofisik yang sangat berpengaruh terhadap indikator keberhasilan pengelolaan DAS[5] adalah : 1) kondisi lahan, terdiri dari : a) persentase lahan kritis; b) persentase tutupan vegetasi; dan c) indeks erosi; 2) Kondisi tata air, terdiri dari : a) koefesien regim aliran (KRA); b) koefisen aliran tahunan (KAT); c) muatan sedimen; d) kejadian banjir; dan e) indek kebutuhan air (IPA); 3) investasi bangunan, terdiri dari : a) klasifikasi kota; dan b) klasifikasi nilai bangunan air; dan 4) pemanfaatn ruang wilayah, terdiri dari : a) kawasan lindung; dan b) kawasn budidaya. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui perubahan kondisi daya dukung lahan di DAS Pekerisan.

METODOLOGI

Penelitian ini dilaksanakan di DAS Pakerisan, secara geografis DAS Pakerisan terletak diantara 8°16'46,579" - 8°36'50,012" LS dan 115°17'50,051" - 115°21'53,445" BT. Secara administratif wilayah DAS Pakerisan teletak di wilayah Kabupaten Bangli dan Gianyar dengan luas 9.091,89 Ha. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan September sampai dengan Desember 2015.

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder .Data primer meliputi :data tentang kondisi tutupan lahan, jenis vegetasi dan tindakan konservasi tanah yang merupakan faktor untuk menentukan nilai pengelolaan tanaman (C) dan dan nilai pengelolaan lahan (P), diperoleh dengan melakukan pengecekan lapangan di wilayah DAS Pakerisan. Nilai pengelolaan tanaman (C) dan dan nilai pengelolaan lahan (P) diperlukan untuk menentukan indeks erosi. Sedangkan data skunder meliputi : data debit,b.Data jumlah penduduk, c.Data kejadian banjir, e. Peta-peta tematik yang berkaitan dengan lokasi penelitian dan topik penelitian, adalah :1).Peta administrasi DAS Pakerisan 2).Peta lahan kritis DAS Pakerisan3).Peta indeks erosi DAS Pakerisan 4).Peta penutupan lahan DAS Pakerisan; 5).Peta erosi DAS Pakerisan; 6).Peta arahan klasifikasi fungsi kawasan DAS Pakerisan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Lahan Kritis

Lahan kritis adalah lahan yang masuk kategori kritis dan sangat kritis. Perhitungan presentase lahan kritis yaitu :

$$PLK = \frac{LK}{A} \text{x } 100\%$$

Dimana :PLLK : Persentase luas lahan kritis; LK: Luas lahan kritis dan sangat kritis (ha): A: Luas DAS (ha)

Tabel 1. Kriteria lahan kritis

No.	Nilai (%)	Skor	Kelas
1.	0 < PLK ≤ 5	0,50	Sangat rendah
2.	5 < PLK ≤ 10	0,75	Rendah
3.	10 <PLK ≤ 15	1,00	Sedang
4.	15 < PLK ≤ 20	1,25	Tinggi
5.	PLLK > 20	1,50	Sangat tinggi

Penutupan vegetasi $\text{PPV} = \frac{LV}{A}$

dimana : PPV= persentase penutupan vegetasi, LV =Luas penutupan lahan vegetasi (ha), A = Luas DAS

Tabel 2. Kriteria penutupan vegetasi

No.	Nilai (%)	Skor	Kelas
1.	80 < PPV	0,50	Sangat Baik
2.	60 < PPV ≤ 80	0,75	Baik
3.	40 < PPv ≤ 60	1,00	Sedang
4.	20 < PPV ≤ 40	1,25	Buruk
5.	PPV ≤ 20	1,50	Sangat Buruk

Data erosi aktual diperoleh dari perhitungan erosi dengan metode*Universal Soil Loss Equation* (USLE). Indeks erosi merupakan perbandingan erosi aktual dengan erosi yang ditolerasi dalam DAS.
IE = Erosi actual / Erosi yang ditoleransi

Tabel 3. Kriteria erosi

No.	Nilai	Skor	Kelas
1.	IE ≤ 0,5	0,50	Sangat rendah
2.	0,5<IE ≤ 1,0	0,75	Rendah
3.	1,0<IE ≤ 1,5	1,00	Sedang
4.	1,5 <IE ≤ 2,0	1,25	Tinggi
5.	IE>2,0	1,50	Sangat tinggi

Kondisi Tata Air

Analisis kondisi tata air meliputikoefisien rezim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir danindeks penggunaan air. Berdasarkan peran/pengaruhkondisi tata air terhadap daya dukung DAS maka pembobotan untuk kriteriatata air ini adalah 20,sedangkan bobot untuk masing-masing sub kriteria adalah sebagai berikut :koefisien rezim aliran (5), koefisien aliran tahunan (5), muatan sedimen (4),banjir (2) dan indeks penggunaan air (4).

a. Koefisien Rejim Aliran
b. (KRA)

Analisis KRA disajikan seperti pada Tabel 4 dan cara perhitungan KRA yaitu

$$\text{KRA} = \frac{\text{Q Max}}{\text{Q Min}}$$

Keterangan :
KR : Koefisien rejim aliran
Q Max : Debit harian rata-rata tahunan tertinggi
QMin : Debit harian rata-rata tahunan terendah

Tabel 4.Kriteria Analisis Koefisien Rejim Aliran

No.	Nilai	Skor	Kelas
1.	KRA ≤ 20	0,50	Sangat rendah
2.	20< KRA ≤ 50	0,75	Rendah
3.	50 < KRA ≤ 80	1,00	Sedang
4.	80< KRA ≤ 110	1,25	Tinggi
5.	KRA >110	1,50	Sangat tinggi

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2014

Koefisien Aliran Tahunan (KAT)

Koefisien Aliran Tahunan (KAT) adalah perbandingan antara tebalaliran tahunan (Q, mm) dengan tebal hujan tahunan (P, mm) di DAS ataudapat dikatakan berapa persen curah hujan yang menjadi aliran (*runoff*) diDAS.
Tebal aliran (Q) diperoleh dari volume debit (Q, dalam satuan m3)dari hasil pengamatan SPAS di DAS selama satu tahun atau perhitunganrumus dibagi dengan luas DAS (ha atau m2) yang kemudian dikonversi kesatuan mm. Sedangkan tebal hujan tahunan (P) diperoleh dari hasilpencatatan pada Stasiun Pengamat Hujan.Kriteria analisis koefisien aliran tahunan disajikan pada (Tabel 5) dan cara perhitungan KATyaitu :

$$KAT = \frac{Q\ Tahunan}{P\ Tahunan}$$

Tabel 5.Kriteria analisis koefisien aliran tahunan

No.	Nilai	Skor	Kelas
1.	0 <KAT ≤ 0,2	0,50	Sangat rendah
2.	0,2 <KAT ≤ 0,3	0,75	Rendah
3.	0,3 <KAT ≤ 0,4	1,00	Sedang
4.	0,4 <KAT ≤ 0,5	1,25	Tinggi
5.	KAT> 0,5	1,50	Sangat tinggi

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2014

Muatan Sedimen

Sedimentasi adalah jumlah material tanah berupa kadar lumpurdalam air oleh aliran air sungai yang berasal dari hasil proses erosi di hulu,yang diendapkan pada suatu tempat di hilir dimana kecepatan pengendapanbutir-butir material suspensi telah lebih kecil dari kecepatan angkutannya. Berdasarkan proses sedimentasi, hanya sebagian material aliran sedimen di sungaiyang diangkut keluar dari DAS, sedang yang lain mengendap di lokasitertentu di sungai selama menempuh perjalanannya.
Indikator terjadinya sedimentasi dapat dilihat dari besarnya kadarlumpur dalam air yang terangkut oleh aliran air sungai, atau banyaknyaendapan sedimen pada badan-badan air dan atau waduk. Makin besar kadarsedimen yang terbawa oleh aliran berarti makin tidak sehat kondisi DAS.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Muatan sedimen dapat diperoleh melalui pendekatan hasil prediksierosi, dengan menggunakan rumus :

MS= A x SDR

Keterangan :

MS : Muatan Sedimen (ton/ha/th)
A : nilai erosi (ton/ha/th)
SDR : nisbah penghantaran sedimen

Nilai total erosi ditentukan dengan menggunakan rumus USLE,sedangkan nisbah hantar sedimen (*Sediment Delivery Ratio/SDR*) dapatditentukan dengan menggunakan matrik sebagaimana Tabel 6.

Tabel 6. Hubungan antara luas DAS dengan rasio penghantaran sedimen

No.	Luas DAS (ha)	Rasio penghantaran sedimen (%)
1	10	53
2	50	39
3	100	35
4	500	27
5	1.000	24
6	5.000	15
7	10.000	13
8	20.000	11
9	50.000	8,5
10	2.600.000	4,9

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2014

Adapun kriteria analisis muatan sedimen pada suatu DAS sebagaimana tersaji pada Tabel 7..

Tabel 7.Kriteria analisis muatan sedimen (MS)

No.	Nilai (ton/ha/th)	Skor	Kelas
1.	0 < MS ≤ 5	0,50	Sangat rendah
2.	5 < MS ≤ 10	0,75	Rendah
3.	10 < MS ≤ 15	1,00	Sedang
4.	15 < MS ≤ 20	1,25	Tinggi
5.	MS > 20	1,50	Sangat tinggi

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2014

Banjir

Banjir dalam pengertian umum adalah debit aliran air sungai dalamjumlah yang tinggi, atau debit aliran air di sungai secara relatif lebih besardari kondisi normal akibat hujan yang turun di hulu atau di suatu tempattertentu terjadi secara terus menerus, sehingga air tersebut tidak dapatditampung oleh alur sungai yang ada, maka air melimpah keluar danmenggenangi daerah sekitarnya. Banjir bandang adalah banjir besar yangdatang dengan tiba-tiba dan mengalir deras menghanyutkan benda-bendabesar seperti kayu dan sebagainya.Banjir harus dilihatdari besarnya pasokan air banjir yang berasal dari air hujan yang jatuh dandiproses oleh DTA-nya (*catchment area*), serta kapasitas tampung palungsungai dalam mengalirkan pasokan air tersebut.Data kejadian banjir dapat diperoleh dari laporan kejadian bencana ataupengamatan langsung. Perhitungan frekuensi kejadian banjir menggunakanklasifikasi nilai sebagaimana Tabel 8 :

Tabel 8.Kriteria analisis kejadian banjir

No.	Frekuensi Banjir	Skor	Kelas
1.	Tidak pernah	0,50	Sangat rendah
2.	1 kali dalam 5 tahun	0,75	Rendah
3.	1 kali dalam 2 tahun	1,00	Sedang
4.	1 kali tiap tahun	1,25	Tinggi
5.	> 1 kali dalam 1 tahun	1,50	Sangat tinggi

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2014

Indeks Penggunaan Air

Indikator indeks penggunaan air dalam pengelolaan tata air DAS sangat pentingkaitannya dengan mitigasi bencana kekeringan tahunan di DAS.Kriteria analisis indeks penggunaan air sebagaimana disajikan pada Tabel 9 dan caraperhitungan indeks penggunaan airyaitu :

$$IPA = \frac{\text{Kebutuhan Air}}{\text{Persedian Air}}$$

Tabel 9.Kriteria analisis indeks penggunaan air (IPA)

No.	Nilai (M^3)	Skor	Kelas
1.	IPA >0,25	0,50	Sangat rendah
2.	0,25< IPA ≤ 0,50	0,75	Rendah
3.	0,50< IPA ≤ 0,75	1,00	Sedang
4.	0,75< IPA ≤ 1,00	1,25	Tinggi
5.	IPA ≤ 1.00	1,50	Sangat tinggi

Sumber : Kementerian Kehutanan, 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi lahan dalam DAS ditunjukkan dari kondisilahan kritis, tutupan vegetasi dan tingkat erosi. Berdasarkan peran/pengaruh lahan terhadap kondisi daya dukung DAS makauntuk kondisi lahan ini memilikibobot 40, dan untuk masing-masing sub kriteria adalahpersentase lahan kritis (20), persentase penutupan vegetasi (10)dan indeks erosi (10).

1. Lahan Kritis

Sesuai Surat Keputusan Gubernur Bali Nomor : 1030/02-C/HK/2014 tanggal 29 April 2014, bahwa yang dimaksud dengan lahan kritis adalah lahan dengan tingkat kekritisan lahan kritis dan sangat kritis. Berdasarkan Seurat keputusan tersebut di wilayah DAS Pakerisan tidak terdapat lahan kritis. Di wilayah DAS Pakerisan hanya terdapat lahan dengan tingkat kekritisan lahan agak kritis seluas 506,33 ha (5,57 %), potensial kritis seluas 1.782,28 ha (19,60 %) dan tidak kritis seluas 6.803,28 ha (74,83 %). Sesuai dengan kriteria analisis persentase lahan kritis, DAS Pakerisan memiliki presentase lahan kritis kelas sangat rendah dengan skor 0,5 dan nilai total 10.

Dengan kondisi lahan kritis yang rendah atau sedikit, DAS Pakerisan termasuk DAS dengan kondisi lahan yang masih sangat baik, akan tetapi apabila tidak dikelola dengan baik atau terjadi kesalahan dalam pengelolaannya maka lahan yang awalnya tidak kritis akan berubah kearah yang lebih buruk. Untuk itu perlu dilakukan pengelolaan lahan yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air untuk tetap menjaganya agar tetap baik.Partisipasi dari semua pihak baik itu pemerintah, swasta maupun masyarakat sangat diperlukan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

2. Penutupan vegetasi

Persentase penutupan vegetasi diperoleh dari hasil perbandingan luas lahan bervegetasi permanen denganluas DAS.Data penutupan lahan dengan vegetasi permanen diperoleh dari datahasil interpretasi citra satelitberupa citra landsat 8 dan hasil survey lapangan. Jenis penutupan vegetasi pada DAS Pakerisan sebagaimana disajikan pada tabel 4.2

Berdasarkan tabel 4.2 di atas secara beurutan jenis penutupan vegetasi di DAS Pakerisan sebagai berikut : sawah seluas 4.592,00 ha atau 50,51 %, kebun campuran sedang seluas 2.845,25 ha atau 31,29 %, pemukinan seluas 1.061,99 ha atau 11,68 %, kebun campuran rapat seluas 334,94 ha atau 3,68 %, kebun campuran jarang seluas 225,13 ha atau 2,48 % dan vegetasi tetap rapat seluas 32,58 atau 0,36 %.

Jenis penutupan lahan yang merupakan vegetasi tetap adalah kebun campuran sedang seluas 2.845,25 ha atau 31,29 %, kebun campuran rapat seluas 334,94 ha atau 3,68 %, kebun campuran jarang seluas 225,13 ha atau 2,48 % dan vegetasi tetap rapat seluas 32,58 atau 0,36 %. Sehingga luas total penutupan vegetasi permanen di DAS Pakerisan seluas 3.437,90 ha atau 37,81 %. Persentase penutupan vegetasi sebagai berikut :

Hasil perhitungan di atas menunjukan bahwa persentase penutupan vegetasi di DAS Pakerisan sebesar 37,81 %, termasuk kelas buruk dengan skor 1,25 sehingga nilai total persentase penutupan vegetasi di DAS Pakerisan adalah 12,5.

Keadaan penutupan vegetasi di DAS Pakerisan termasuk ketegori kelas buruk, hal ini dapat dimaklumi dikarenakan di wilayah DAS Pakerisan didominasi lahan sawah.Sehingga dalam penghitungan persentase penutupan vegetasi yang dihitung hanya berupa lahan dengan vegetasi permanen saja, sedangkan sawah tidak dihitung.

3. Indeks Erosi (IE)

Indeks erosi merupakan perbandingan erosi aktual dengan erosi yang ditolerasi dalam DAS.Data erosi aktual diperoleh dari perhitungan erosi dengan menggunakan persamaan *Universal Soil Loss Equation (USLE).* Hasil pengolahan data dengan menggunakan persamaan*Universal Soil Loss Equation (USLE)*di wilayah DAS Pakerisanerosi aktualsebesar 4.119,45 ton/ha/tahun sedangkan jumlah erosi yang ditoleransi sebesar 3.000 ton/ha/tahun. Analisis perhitungan erosi aktual dan erosi yang diperkenankan (Edp) di Wilayah DAS Pakerisan sebaigaiman Lampiran 1.

Berdasarkan hasil perbandingan di atas, indeks erosi di wilayah DAS Pakerisan sebesar 1,37, ini menunjukan bahwa laju erosi yang terjadi di wilayah DAS Pakerisan telah melebihi batas erosi yang diperkenankan terjadi. Untuk menekan supaya tidak terjadi yang lebih parah lagi maka perlu dilakukan kegiatan konservasi tanah dan air di wilayah DAS Pakerisan. Nilai indeks erosi di wilayah DAS Pakerisan termasuk kelas tinggi dengan skor 1,25 sehingga nilai total indeks erosinya adalah 12,5.

Keadaan indeks erosi di wilayah DAS Pakerisan termasuk kelas tinggi, hal ini terjadi dikarenakan erosi aktual yang terjadi lebih besar dari erosi yang diperkenankan di wilayah DAS Pakerisan.Erosi aktual yang terjadi sebesar 4.119,45 ton/ha/tahun sedangkan erosi yang diperkenankan atau yang ditolerasi hanya sebesar 3.000 ton/ha/tahun.Keadaan tersebut perlu upaya untuk melakukan pengelolaan tanaman dan pengelolaan lahan yang memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air, sehingga erosi yang terjadi dapat dikurangi atau bahkan dapat dibawah batas yang ditolerasi.

B. Kondisi Tata Air

Kondisi tata air meliputikoefisien rezim aliran, koefisien aliran tahunan, muatan sedimen, banjir danindeks penggunaan air.Bobot kondisi tata airini adalah 20,sedangkan bobot untuk masing-masing sub kriteria adalah sebagai berikut :koefisien rezim aliran (5), koefisien aliran tahunan (5), muatan sedimen (4),banjir (2) dan indeks penggunaan air (4).

1. Koefisien Rejim Aliran (KRA)

Hasil pengolahan data debit di DAS Pakerisan dalam 10 tahun terakhir (2005-2015) yang bersumber dari Balai Pengelolaan DAS Unda Anyar, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, debit maksimum yang terjadi adalah sebesar 26,63 m^3/detik dan debit minimum sebesar 0,64 m^3/detik, sehingga nilai koefisien rejim aliran di DAS Pakerisan sebesar 41,57, nilai tersebut menunjukan koefisien rejim aliran masih sangat baik.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Berdasarkan nilai tersebut maka koefisien rejim aliran DAS Pakerisan termasuk kelas rendah dengan skor 0,75 sehingga total nilai koefisien rejim aliran adalah 3,75.

Kondisi koefisien rejim aliran DAS Pakerisan yang masih sangat baik, maka dapat dikatakan bahwa DAS Pakerisan masih memiliki daya resap lahan yang baik yang mampu menahan dan menyimpan air hujan yang jatuh dan mengeluarkannya pada saat musim kemarau.

2. Koefisien Aliran Tahunan (KAT)

Koefisien Aliran Tahunan (KAT) adalah perbandingan antara tebalaliran tahunan (Q, mm) dengan tebal hujan tahunan (P, mm) di DAS ataudapat dikatakan berapa persen curah hujan yang menjadi aliran (*runoff*) diDAS.

Semakin besar nilai koefisien *runoff* pada suatu DAS maka kesehatan DAS dimaksud semakin memburuk karena semakin banyak curah hujan yang jatuh di atas DAS yang mengalir menjadi *runoff* sehingga kurang/tidak mampu menambah cadangan air tanah/*groundwater storage*.

Berdasarkan analisis koefisien Aliran Tahunan (KAT) di wilayah DAS Pakerisan termasuk kelas sangat rendah artinya di wilayah DAS Pakerisan sangat sedikit terjadinya *runoff* karena curah hujan yang jatuh ke tanah sebagian besar masuk ke dalam tanah (infiltrasi). Nilai Koefisien Aliran Tahunan (KAT) di wilayah DAS Pakerisan adalah 2,5.

3. Muatan Sedimen

Hasil perhitungan tersebut diketahui bahwa muatan sedimen di DAS Pakerisan sebesar 536 ton/ha/th.Dengan nilai sebesar itu maka di wilayah DAS telah terjadi sedimentasi yang sangat besar.Untuk itu maka perlu dilakukan tindakan konservasi tanah dan air supaya tidak semakin tinggi. Nilai muatan sedimen di DAS Pakerisan termasuk kelas sangat tinggi dengan skor 1,50 sehingga nilai total muatan sedimen adalah 6.

4. Banjir

Data kejadian banjir selama 5 tahun terkahir (2010-2014) di wilayah DAS Pakerisan diperoleh dari Badan Penangulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.Berdasarkan data tersebut diperoleh fakta bahwa di wilayah DAS Pakerisan telah terjadi kejadian banjir lebih dari 1 dalam 1 tahun.Sering terjadinya banjir maka diperlukan upaya yang bertujuan untuk mengurangi terjadinya banjir tersebut salah satunya berupa tindakan konservasi tanah dan air yaitu kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan. Nilai kejadian banjir di wilayah DAS Pakerisan termasuk kelas sangat tinggi sehingga total nilai adalah 3.

5. Indeks Penggunaan Air

Hasil perhitungan tersebut menunjukan bahwa untuk penyedian air di wilayah DAS Pakerisan masih sangat baik dan mampu memenuhi kebutuhan akan air. Indek Penggunaan Air (IPA) di DAS Pakerisan termasuk kelas rendah dengan skor 0,50 sehingga nilai total adalah 2.

KESIMPULAN

Kondisi Biofisik DAS Pakerisan adalah sebagai berikut :

a. Kondisi lahan di DAS Pakerisan: 1) tidak diketemukan lahan kritis; 2) penutupan vegetasi dalam kondisi buruk (31,81 %) karena di DAS Pakerisan merupakan wilayah budidaya pertanian yang dominan merupakan areal persawahan; dan 3) indeks erosi tergolong tinggi (1,37), dikarenakan erosi aktual sebesar 4.119,45 ton/ha/tahun yang terjadi melebihi erosi yang diperkenankan sebesar 3.000 ton/ha/tahun.
b. Kondisi tata air di DAS Pakerisan meliputi : 1) koefisien rezim aliran tergolong baik (41,57); 2) koefisien aliran tahunan sangat baik (0,09); 3) muatan sedimen sangat tinggi (536 ton/ha/th); 4) kejadian banjir lebih 2 x dalam setahun: dan 5) indeks penggunaan air sangat baik (0,15).
c. Pemanfaatan ruang wilayah meliputi: 1) kawasan lindung sangat baik (100 %); 2) kawasan budidaya sangat rendah (100 %).

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arsyad, S. 2010. Konservasi Tanah & Air. Edisi Kedua. . IPB Press: Bogor.
[2] Asdak, C. 2010. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Edisi kelima. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
[3] Balai Pengelolaan DAS unda Anyar. 2013. Rencana Teknik Rehabilitasi Hutan dan Lahan Daerah Aliran Sungai (RTk-RHL DAS) Wilayah Kerja BPDAS Unda Anyar. Denpasar: Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai Unda Anyar.
[4] Dradjad, M. d. 1982. Prosedur Standar Pengawetan Tanah dan Air. Yogyakarta: Departemen Ilmu Tanah fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada.
[5] Kementerian Kehutanan. 2014. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor: P.61/Menhut-II/2014 tentang Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daerah Aliran Sungai. Jakarta: Kementerian Kehutanan RI.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TEMA E

PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN

STUDI AWAL TINGKAT KEPUASAN PENGHUNI RUSUN JATINEGARA BARAT DI DKI JAKARTA DAN KESEMPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN

Akhmad Gunawan[1)], **Haryo Winarso**[1)], **Teti Armiati Argo**[1)]

[1)]Institut Teknologi Bandung

Email : akhmadgunawan97@gmail.com

Naskah diterima :25 Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Ketidakmampuan masyarakat berpendapatan rendah dalam membangun rumah telah menyebabkan munculmya kantong-kantong permukiman kumuh di lokasi marginal seperti bantaran sungai Kampung Pulo. Keberadaan permukiman kumuh Kampung Pulo merupakan persoalan menaun yang perlu diselesaikan segera oleh Pemda DKI Jakarta. Sampai saat ini, pendekatan klasik disebut sebagai pendekatan pertama, yaitu partisipasi sejak awal dari proses perencanaan, pembangunan dan pemanfaatan masih diyakini sebagai cara terbaik dalam mengatasi permasalahan permukiman kumuh. Dengan partisipasi sejak awal diyakini akan memberikan rasa memiliki dan kepuasan bagi masyarakat yang direlokasi.

Pemda DKI Jakarta dalam 2 -3 tahun terakhir ini telah melakukan slum upgrading di bantaran sungai dengan pendekatan yang berbeda disebut sebagai pendekatan kedua, yaitu dengan memaksa memindahkan masyarakat miskin ke dalam rusun yang sudah disediakan terlebih dahulu tidak jauh berjarak sekitar 1 km dari lokasi semula. Berbagai fasilitas dan program telah disediakan Pemda DKI Jakarta bagi penghuni rusun agar kehidupannya lebih baik dibandingkan dengan pada saat berada di kampung kumuh bantaran sungai Kampung Pulo. Fasilitas dan program yang disediakan adalah transportasi sekolah gratis, kesehatan, pendidikan, peribadatan serta fasilitas usaha, ruang terbuka, dan lain-lain. Kedua pendekatan tersebut belum diketahui mana yang lebih memberikan harapan keberhasilan dalam pengentasan kemiskinan jika dilihat dari biaya dan sumberdaya yang dikeluarkan . Makalah ini akan menyampaikan hasil studi awal di Rusun Jatinegara Barat dengan hypotesa pendekatan kedua memiliki kemungkinan berhasil lebih besar dalam melakukan slum upgrading dan upaya pengentasan kemiskinan. Studi dilakukan dengan menggunakan metoda wawancara semi terstruktur terhadap penghuni rusun yang dilakukan secara snowballing. Hasil dari studi awal ini akan merupakan hypotesa mengenai waktu yang tepat untuk melakukan partisipasi masyarakat dalam slum upgrading jika tujuannya adalah pengentasan kemiskinan.

Kata kunci: *masyarakat miskin, partisipasi, pengentasan kemiskinan*

PENDAHULUAN

Data jumlah permukiman kumuh atau squatter dari tahun ke tahun menunjukkan terus mengalami peningktan baik di dunia maupun di Indonesia. Pada Tahun 1990, jumlah penduduk dunia yang tinggal di permukiman kumuh sebesar 715 juta jiwa. Sedangkan pada tahun 2005, jumlah penghuni dunia yang tinggal di permukiman sebesar 998 juta jiwa [1]. Dari Tahun 1990 sampai dengan Tahun 2005, jumlah penghuni di permukiman kumuh mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah pada tahun-tahun mendatang. Di Indonesia, jumlah penduduk miskin yang tinggal di permukiman kumuh sebesar 34,4 juta jiwa [2], tersebar di 415 kabupaten/kota terutama yang paling banyak adalah DKI Jakarta. Jumlah RW/kampung kumuh yang terdapat di DKI Jakarta sebanyak 416 RW pada Tahun 2008[3].

Tingkat urbanisasi dan pertumbuhan penduduk setempat yang tinggi di DKI Jakarta serta ketidak mampuan masyarakat miskin menyebabkan munculnya permukiman kumuh di lahan marginal seperti bantaran sungai. Permukiman kumuh identik dengan permukiman masyarakat miskin[4]. Permukiman ini merepresentasikan permukiman migran dimana penduduknya berasal dari berbagai daerah yang bekerja

sebagai buruh (*labor*), pegawai (*work*), pedagang, buruh lepas (*action*) dan lain-lain [5]. Permukiman kumuh memiliki kualitas fisik yang rendah, adanya ketimpangan terhadap akses pelayanan dasar, air bersih, sanitasi, kualitas rumah, dan keamanan kepemilikan [6]. Selain itu pada permukiman kumuh sering terjadi permasalahan sosial, kriminalitas, seks bebas, dan lingkungan yang tidak sehat.

Partisipasi Sejak Awal dalam Slum Upgrading

Pendekatan partisipasi sejak awal memiliki tiga hukum Turner [7] yaitu: 1) memberikan pijakan atau stimulan fisik, sosial, ekonomi pada masyarakat miskin agar bisa mengatasi permasalahan kemiskinan yang dihadapi dan mampu membangun rumahnya sendiri; 2) masyarakat miskin tidak memperdulikan kondisi tempat tinggal yang penting ada tempat yang bisa ditempati; 3) masyarakat miskin adalah tanggung jawab bersama. Menurut Midgley[8], yang dimaksud dengan pendekatan secara partisipatif yaitu: melibatkan masyarakat miskin berkontribusi dalam penyediaan sumberdaya di dalam keseluruhan proses pembangunan; terjadi pembangian secara adil keuntungan yang diperoleh dari pembangunan tersebut; seluruh masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan dalam menyusun tujuan, perumusan kebijakan dan perencanaan dan pelaksanaan program-program pengembangan sosial dan ekonomi.

Program-program slum upgrading yang ada selama ini baik di dunia maupun di Indonesia hampir semua dilakukan menggunakan pendekatan partisipasi sejak awal. Di Indonesia hampir semua program slumu grading menggunakan konsepsi Turner yaitu dengan pendekatan partisipasi sejak awal [9]. Dalam hal ini, pemerintah memberikan bantuan stimulan peningkatan kualitas infrastruktur, sosial dan ekonomi, selanjutnya masyarakat diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraannya dan membangun rumahnya sendiri. Program partisipatif dalam slum upgrading yang telah dilakukan antara lain yatiu: UNEP, KIP, BUDP, P2BPK, CoBILD, KSSNP, NUSSP, P2KP, dan P2L-P2BPK [21,19, 7,18]. Program slum upgrading ini telah mengalami beberapa kali evolusi. Menurut Winarso[10], terdapat tiga generasi dalam program slum upgrading yaitu pertama, generasi fisik; kedua, generasi fisik, sosial, ekonomi dengan konsep tribina; ketiga, generasi fisik, sosial, ekonomi dengan konsep tridaya. Namun demikian, sampai saat ini belum ada penelitian yang menjelaskan berapa besar tingkat keberhasilan pendekatan tersebut jika diukur dari besarnya biaya dan sumber daya yang dikeluarkan dan rumah yang berhasil dibangun sendiri oleh Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), apalagi jika dibandingkan dengan banyaknya MBR yang bisa lepas dari kemiskinan.

Fenomena Relokasi MBR ke dalam Rusun di DKI Jakarta

Pemda DKI Jakarta dalam 2-3 tahun terakhir ini memiliki kebijakan melakukan relokasi pada masyarakat berpendapatan rendah yang tinggal dikawasan marginal ke dalam rumah susun yang telah disediakan terlebih dahulu dan akan tetap dilakukan pada tahun-tahun mendatang selama pemerintah sanggup menyediakan rumah susun[6]. Januardy dan Demadevina[11], mengatakan dalam penelitiannya sejak Januari hingga Desember 2015, telah terjadi 113 kasus penggusuran paksa dengan 8.145 KK dan 6.283 unit usaha yang terdampak., Proses penggusuran dan relokasi dilakukan tanpa melalui musyawarah dan dialog antara Pemda DKI Jakarta dengan masyarakat yang akan direlokasi[12]. Oleh sebagian kelompok, Pemda DKI Jakarta dinilai tidak demokratis, top down dan melanggar hak asasi manusia. Dalam Human Right Watch, 2006, dikatakan bahwa terjadi kegagalan musyawarah dan adanya paksaan dalam proses kompensasi didalam pelaksanaan penggusuran.

Salah satu wilayah yang direlokasi oleh Pemda DKI Jakarta pada Tahun 2015 adalahpermukiman kumuh Kampung Pulo ke Rusun Jatinegara Barat. Kampung Pulo merupakan salah satu permukiman padat dan kumuh di Jakarta yang berada di bantaran Sungai Ciliwung. Kampung Pulo masuk ke dalam Kelurahan Bidara Cina, Kec. Kampung Melayu, Jakarta Timur. Wilayah Kampung Pulo merupakan wilayah banjir yang terjadi setiap tahun dengan kerugian yang cukup besar. Kerugian yang diderita oleh warga ketika terjadi banjir cukup besar baik secara materiil maupun non materiil. Setiap terjadi banjir, warga Kampung Pulo mengungsi selama beberapa minggu ke tempat lain yang lebih aman. Banjir di Kampung Pulo terjadi disebabkan oleh 3 hal yaitu: debit sungai di hulu, hujan lokal yang airnya tidak mampu diserap tanah, banjir rob dari laut [13].

Pemda DKI Jakarta menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu dengan "memaksa" memindahkan masyarakat miskin ke dalam rusun yang sudah disediakan terlebih dahulu tidak jauh berjarak sekitar 1 km dari lokasi semula. Berbagai fasilitas dan program telah disediakan Pemda DKI Jakarta bagi penghuni rusun agar kehidupannya lebih baik dibandingkan dengan pada saat berada di kampung kumuh bantaran sungai Kampung Pulo. Fasilitas dan program yang disediakan adalah transportasi sekolah gratis, kesehatan, pendidikan, peribadatan serta fasilitas usaha, ruang terbuka, dan lain-lain. Pemda DKI Jakarta mensubsidi sebsar 80 % biaya operasional rusun termasuk pengelolaan sampah dan perawatan fisik gedung. Sedangkan 20 % biaya

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

operasional dan perawatan dibebankan kepada iuran penghuni rusun. Pemda DKI Jakarta meyakini bahwa memindahkan MBR ke dalam rusun merupakan solusi yang terbaik tidak hanya bagi penghuni rusun namun juga bagi masyarakat yang lebih luas yaitu mengurangi adanya kerugian banjir [14]. Sampai saat ini pendekatan yang dilakukan oleh Pemda DKI Jakarta masih menjadi perdebatan, sebagian kelompok setuju bahwa pendekatan yang dilakukan oleh Pemda DKI dengan memaksa memindahkan MBR ke rusun sudah tepat, namun sebagian yang lain meyakini bahwa yang terbaik adalah melakukan slum upgrading secara partisipatif sejak awal tidak dengan merelokasi terlebih dahulu.

Partisipasi dalam Slum Upgrading dan Pengentasan Kemiskinan

Belum ada penelitian yang menjelaskan tingkat keberhasilan pendekatan partisipasi yang dilakukan sejak awal jika diukur dari besarnya biaya dan sumberdaya yang dikeluarkan dan rumah yang berhasil dibangun sendiri oleh MBR. Konsepsi partisipasi juga mendapat kritikan dari beberapa pakar. Burges[15], mengkritik pendekatan partisipatif sejak awal dengan mengatakan bahwa konsepsi *self help* tidak berarti MBR harus membangun rumahnya sendiri; self help bisa diartikan secara individual mau kolektif; *self help* memiliki konotasi ideologi yang berbeda. Midgley, [16], mengatakan bahwa naif jika komunitas bisa menyelesaikan persoalan kemiskinan yang sangat serius melalui sumberdaya sendiri. Midgley melihat diperlukan adanya outsider untuk membantu MBR bisa keluar dari kemiskinan. Kondisi ideal dalam partisipasi adalah adanya tindakan spontan dari MBR untuk berpartisipasi mengorganisasikan diri menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi tanpa bantuan pihak lain. Dalam praktiknya program-program yang dilakukan secara partisipatif sering ditentukan bahkan diarahkan oleh pelaku-pelaku dari luar masyarakat sehingga terjadi partisipasi semu [8, 17]. Program-program partisipasi yang ada lebih cenderung melihat partisipasi sebagai *Ends not Means* sehingga ketika program berhenti maka partisipasi juga ikut berhenti[3, 18, 19], mengkritik bahwa partisipasi murni sulit dilakukan, berpotensi terjadinya manipulasi perencanaan dan membutuhkan waktu yang panjang, biaya yang besar namun hasil yang dicapai tidak signifikan. World Bank sendiri mengakui bahwa kemiskinan menyangkut multi dimensi dan memerlukan strategi tersendiri mengentaskan kemiskinan[20].

Pemda DKI Jakarta meyakini bahwa dengan merelokasi secara "paksa" MBR Kampung Pulo ke dalam Rusun Jatinegara Barat yang sudah disediakan terlebih dahulu dan kemudian dalam meningkatkan kesejahteraan penghuni, pemda DKI mensubsidi dan memberi bantuan pendidikan, kesehatan, usaha, dan lain-lain, kehidupan MBR menjadi lebih meningkat dan nantinya bisa keluar dari kemiskinan. Namun baik pendekatan pertama yaitu partisipasi sejak awal maupun pendekatan kedua seperti yang dilakukan n oleh Pemda DKI dengan merelokasi terlebih dahulu baru kemudian dilakukan partisipasi, keduanya masih belum diketahui mana yang lebih memberikan keberhasilan MBR keluar dari kemiskinan.

Studi awal ini dilakukan dengan hypotesa bahwa pendekatan kedua yaitu partisipasi dilakukan setelah merelokasi MBR ke dalam rusun dapat memberikan kemungkinan yang lebih besar dalam pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*). Tujuan dari studi awal ini adalah untuk mengetahui tingkat kepuasan dan perubahan-perubahan yang dialami oleh penghuni rusun dibandingkan dengan ketika berada di permukiman kumuh Kampung Pulo. Hasil dari studi awal ini akan merupakan hypotesa mengenai waktu yang tepat untuk melakukan partisipasi dalam slum upgrading, jika pengentasan kemiskinan (*poverty alleviation*) merupakan tujuan utama.

METODOLOGI

Metode yang digunakan adalah kualitatif. Data diperoleh dengan melakukan pengumpulan data skunder dan data primer. Data sekunder berupa data penghuni yang diperoleh dari pengelola rusun dan data primer yang diperoleh dengan wawancara semi terstruktur terhadap 15 penghuni rusun secara *snowballing*.Lingkup studi untuk mengetahui tingkat kepuasan penghuni Rusun Jatinegara Barat dilihat dari lima aspek livelihood yaitu fisik, ekonomi, sosial/jaringan, alam/lingkungan dan pendidikan/sumber daya manusia[21].

Responden dalam studi ini adalah penghuni rusun yang dipilih secara acak dengan mendatangi satu-persatu dan dilakukan di setiap lantai. Selain menanyakan mengenai perubahan aspek SUL, juga dilakukan eksplorasi terkait dengan pandangan masa depan, usulan dan gagasan, serta keinginan dan cita-cita di masa yang akan datang. Responden juga diminta untuk menilai rusun dalam skala 0-10. Teknik analisis yang digunakan dalam studi adalah analisis isi (*content analysis*). Dalam mengeksplorasi perubahan yang terjadi teknik analisis lain yang digunakan yaitu dengan membadingkan kondisi sebelum dan sesudah berada di rusun.

Gambar 1 Lokasi Kampung Pulo

HASIL DAN PEMBAHASAN

Rusun Jatinegara Barat dibangun pada Tahun 2013 dan dihuni pada Tahun 2015. Rusun terdiri dari 2 tower yaitu tower A dan Tower B dengan jumlah lantai 16. Jumlah unit rusun Jatinegara Barat adalah 518 unit dan 2 unit untuk difabel. Luas tiap unit 30 M² yang terdiri dari 2 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang jemur, pantry, dan ruang tamu. Fasilitas yang terdapat dalam rusun antara lain: air bersih PAM, listrik PLN 900 watt/unit, perpustakaan, puskesmas, masjid, tempat jualan, mobil bank DKI, antar jemput sekolah, lift, kebersihan dan sampah. Fasilitas bersama lainnya yang disediakan dalam rusun yaitu taman, mainan anak-anak, fasilitas olah raga.

Data yang dihimpun oleh pengelola rusun, dari data yang masuk menunjukkan bahwa pelajar/mahasiswa merupakan kelompok yang jumlahnya paling besar pertama 528 (24 %). Kelompok yang jumlahnya paling besar kedua adalah mengurus rumah tangga 485 (22 %). Sedangkan kelompok belum bekerja dan karyawan swasta menempati urutan ketiga 359 (17 %) dan keempat 326 (15 %). Wiiraswasta sebanyak 160 (7 %) dan buruh harian lepas sebanyak 124 (6 %). Dari data menunjukkan bahwa sebagian besar penghuni memiliki mata pencaharian yang tidak tetap. Jumlah pengangguran cukup tinggi.

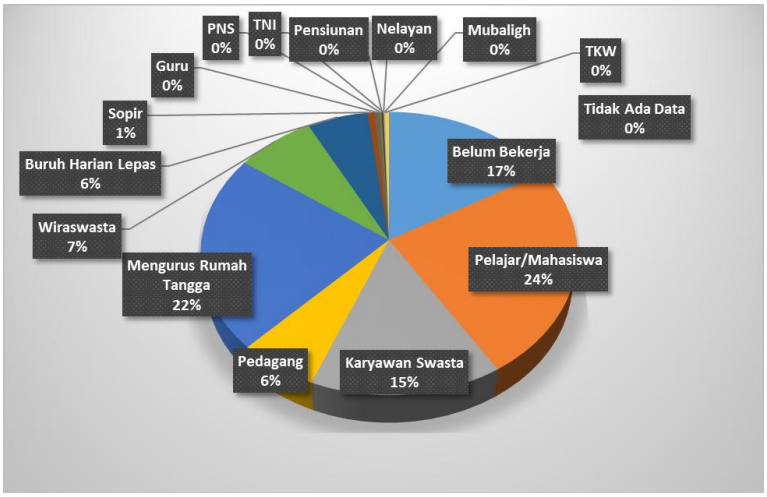

Gambar 2 Jumlah Penghuni Berdasarkan Mata Pencaharian

Berdasarkan tingkat pendidikan, jumlah penghuni sebanyak 738 (35 %) memiliki pendidikan SLTA/sederajat, 346 (16 %) belum/tidak sekolah, 333 (16 %) tamat SD/sederajat, 331 (15 %) SLTP/sederajat. Sedangkan penghuni yang memiliki pendidikan tinggi hanya sebesar 66 (4 %). Dari data menunjukkan bahwa SDM penghuni rusun memiliki pendidikan yang masih rendah.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

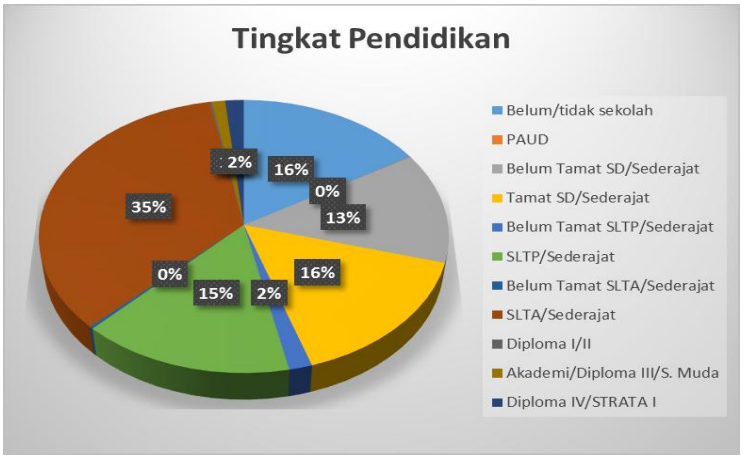

Gambar 3 Jumlah Penghuni Berdasarkan Tingkat Pendidikan.

Penghuni rusun berasal dari berbagai daerah yaitu Jakarta, Bandung, Garut, Depok, Sumedang, Tangerang, Jogjakarta, Surabaya, Purwokerto, Pemalang, Jombang, dan lain-lain. Wawancara dilakukan secara s*nowballing* pada 15 orang penghuni dari lantai 1 sampai dengan lantai 16. Perubahan yang terjadi jika mengalami penurunan diberi tanda (-), sedangkan jika mengalami peningkatan diberi tanda (+). Jika kondisi sebelum dan sesudah di rusun tidak ada perubahan diberi tanda (=). Adapun hasil dari wawancara tersebut terlihat pada tabel.

Tabel 1 Perbandingan Sebelum dan Sesudah di Rusunawa Aspek Fisik, Ekonomi dan Sosial

No	Nama	Kondisi					
		Fisik Hunian		Ekonomi		Sosial/Jaringan	
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah
1	Diah	-	+	-	+	+	_
2	Siti	+	-	=	=	=	=
3	Tina	-	+	+	-	=	=
4	Sariati	-	+	-	+	=	=
5	Zidan	-	+	-	+	+	-
6	Siti Salbiyah	-	+	=	=	+	-
7	Karima	-	+	+	-	+	-
8	Bayi	-	+	-	=	=	=
9	Siti	-	+	+	-	+	-
10	Sobar	+	-	-	+	+	-
11	Sunarsih	-	+	+	-	=	=
12	x	-	+	-	+	-	+
13	Wiranah	-	+	=	=	=	=
14	Nurfadila	+	-	+	-	+	-
15	Saani	-	+	=	=	+	-
	Keterangan :	-	Lebih Jelek				
		+	lebih bagus				
		=	sama				

Dari hasil pengolahan data, terlihat bahwa hampir semua penghuni cukup puas tinggal di rusun. Perubahan positif yang paling terasa adalah perubahan fisik bangunan dan lingkungan. Kondisi fisik bangunan di rusun lebih baik dibandingkan dengan pada saat di Kampung Pulo. Material bangunan yaitu lantai keramik, dinding, plafon, kamar mandi dibuat dengan kontruksi dan material yang baik. Perubahan yang paling terasa adalah bencana banjir yang dialami setiap tahun tidak ditemui lagi. Secara lebih luas relokasi telah memberikan manfaat bagi masyarakat Kampung Pulo lainnya dimana bencana banjir yang setiap tahun terjadi dapat berkurang drastis.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 2 Perbandingan Sebelum dan Sesudah di Rusunawa dan Tingkat Kepuasan secara Keseluruhan

No	Nama	Lingkungan		Pendidikan		Nilai Kepuasan
		Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah	
1	Diah	-	+	=	=	7
2	Siti	-	+	=	=	7
3	Tina	-	+	=	=	7
4	Sariati	-	+	=	=	7
5	Zidan	-	+	=	=	8
6	Siti Salbiyah	-	+	=	=	7
7	Karima	+	-	-	+	8
8	Bayi	-	+	=	=	8
9	Siti	-	+	=	=	7.5
10	Sobar	-	+	=	=	3
11	Sunarsih	-	+	-	+	10
12	x	-	+	=	=	8
13	Wiranah	-	+	=	=	6
14	Nurfadila	-	+	-	+	6
15	Saani	-	+	+	-	7
	Keterangan :	-	Lebih Jelek			
		+	lebih bagus			
		=	sama			

Secara sosiologi dan ekonomi, masih menjadi masalah bagi penghuni rusun. Kebiasaan sosial di *landed house* seperti berama tamah, ngobrol di warung kopi dan kegiatan sosial seperti pengajian sangat berkurang di rusun. Hal ini disebabkan karena penghuni harus naik turun tangga atau lift. Untuk Ibu-ibu yang memiliki bayi atau anak kecil cukup sulit jika harus naik turun tangga. Kalau di Kampung pulo mereka bisa menitipkan anaknya dan mudah beraktivitas. Secara ekonomi, kebanyakan adalah pedagang informal penjual gorengan, makanan, dan pekerja serabutan. Setelah pindah ke rusun, mereka tidak bisa lagi leluasa berdagang. Meskipun disediakan lahan usaha di lantai bawah, mereka enggan untuk berdagang. Hal ini dsebabkan karena harus naik turun tangga dan pembeli terbatas.

Pengeluaran rutin bulanan yaitu biaya iuran wajib sebesar Rp. 300.000. untuk perawatan ditambah dengan biaya listrik dan air masih menjadi beban bagi penghuni rusun dikarenakan belum adanya pekerjaan. Pada aspek Sumber Daya Manusia, perubahan sebelum dan sesudah di rusun tidak terlalu besar, kecuali untuk penghuni yang memiliki anak SD. Bagi anak SD disediakan fasilitas antar jemput dan bagi penghuni yang tidak mampu diberi kartu KJP (Kartu Jakarta Pintar) sampai tingkat SLTA. Bagi anak-anak, tinggal di rusun sangat menyenangkan, lingkungan belajar lebih baik, adanya tempat bermain, dan tidak banyak nyamuk sehingga bisa konsentrasi dalam belajar. Secara keseluruhan penghuni rusun merasa cukup puas, namun mereka bercita-cita tetap ingin memiliki rumah sendiri dan tidak perlu memikirkn uang iuran bulanan, serta bisa diwariskan ke anak-cucu.

Gambar 4. Taman Bermain Anak

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KESIMPULAN

Studi ini berkontribusi pada hypotesa mengenai waktu yang tepat untuk melakukan partisipasi masyarakat dalam slum upgrading, jika pengentasan kemiskinan merupakan tujuan utama. Secara umum, telah ditunjukkan bahwa relokasi telah memberikan dampak positif bagi penghuni rusun. Namun hal ini bukan berarti tidak ada kekurangan dalam. Permasalahan sosiologis dan ekonomi masih menjadi tantangan yang harus segera dicarikan jalan keluar agar penghuni rusun bias meningkat kesejahterannya dan keluar dari kemiskinan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] UN-Habitat, 2010. The Challenge of Slums: Global Report on Human Settlements 2003, revisited and updated version (April 2010).

[2] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015. *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh / 2015.*

[3] DKI Jakarta, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 -2017,* 2017

[4] Arimah, *Slums as Expressions of Social Exclussion: Explaining The Prevalence of Slums In African Countries,*2001.

[5] Harjoko, 2004. *Penggusuran or Eviction in Jakarta: Solution Lacking Resolution for Urban Kampung.*

[6] Turner, *Housing by People*, 1976, 1991.

[7] Sudaryono, *Self-help housing in Indonesia: Empirical Investigation of a theoritical Debate*, 1992.

[8] Midgley, Hall, Hardiman, Narine,. *Community Participation, Sosial Development and The State*,1986.

[9] Sudaryono, *Self-help housing in Indonesia: Empirical Investigation of a theoritical Debate*, 1992.

[10] Winarso, Haryo.et.al, *The Generations of Slum Upgrading Programmes: Lesson from Bandung, Indonesia.* Forthcoming.

[11] Januardy, Demadevina,*Atas Nama Pembangunan: Laporan Penggusuran Paksa di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015*, 2016

[12] Agsa, Purnama, *Atas Nama Pembangunan Laporan Penggusuran Paksa Di Wilayah DKI Jakarta Tahun 2015,* Lembaga Bantuan Hukum, 2016.

[13] Khomarudin, et al., *Evaluasi Kejadian Banjir Kampung Pulo DKI Jakarta dan Analisis Pengurangan Resikonya Berbasis Data Unmanned Air Vehicle (UAV) dan Penginderaan Jauh Resolusi Tinggi*, 2014.

[14] www.youtube.com/user/PemprovDKI, Diunduh 7 April 2016.

[15] Burgess, *Petty Commodity Housing or Dweller Contor? A Critique of John Turner's Views on Housing Policy,* 1978.

[16] Moser, *Reducing Global Poverty: The Case for Asset Accumulation*, 2007.

[17] Cooke & Kothari, Bill & Uma. *Participation : The New Tyranny?*, 2001.

[18] Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 2015. *Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh / 2015.*

[19] DKI Jakarta, *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013 -2017,* 2017

[20] Abad, *Civil Society Participation in Poverty Reduction Strategy Paper*, 2004.

[21] Nas, *The Indonesian City: Studies in Urban Development and Planning*. 1986.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PERUBAHAN RUANG SAKRAL WILAYAH KUTA, BALI

Ari Djatmiko[1)] dan Zulphiniar Priyandhoko[1)]

[1)]Dosen Prodi Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik. Universitas Pasundan Bandung,

email : aridjat@gmail.com; email ' zulphiniar@gmail.com

Naskah diterima :8 Maret 2017 Naskah direvisi : 15 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Ruang sakral dinyatakan sebagai bangunan atau obyek utama yang memiliki nilai sakral. Perubahan ruang sakral dapat dinilai dari sisi internal sebagai adanya perubahan unsur-unsur fisik pada ruang atau obyek tersebut seperti perubahan fungsi baik penambahan ataupun pengurangan; perubahan tata letak dan orientasi serta perubahan luas ruang. Selain itu perubahan ruang sakral dapat dinyatakan pula dari sisi eksternal dengan mempertimbangkan perubahan ruang sekitarnya/berbatasan yang dapat mempengaruhi nilai kesakralan bangunan atau obyek sakralnya, seperti perubahan radius jarak dengan bangunan terdekat, perubahan ketinggian bangunan terdekat dan daya pandang bangunan terdekat ke arah bangunan/obyek sakralnya. Pentingnya mempertahankan ruang sakral sebagai bentuk menjaga pluralisme masyarakat tradisional dalam konteks perencanaan keruangan.Penelitian ini bertujuan untuk menjawab permasalahan penelitian tentang perubahan ruang sakral Kuta dengan mempertimbangkan konsepsi ruang relasional. Dalam mencapai tujuan studi ini, maka dilakukan pengumpulan data baik primer maupun sekunder. Teknik analisis yang melandasi penelitian ini adalah analisis deskriptif, dan interpretatif yang dilakukan sejak pengumpulan data dimulai.Berdasarkan kajian terhadap 7 (tujuh) jenis ruang-ruang sakral (Pura Dalem Kahyangan, Pura Dalem Tunon, Pura Pesanggaran, Sanggah, Pekarangan, Bale Banjar dan Catus Patha) pada 3 zona kesakralan (parahyangan, pawongan dan palemahan) di wilayah Desa Adat Kuta menunjukkan kecenderungan perubahan ruang. Terdapat beragam pola perubahan ruang sakral baik publik maupun privat terutama mencakup perubahan fungsi; perubahan tata letak dan orientasi; perubahan radius jarak dengan bangunan terdekat; perubahan ketinggian bangunan terdekat dan daya pandang bangunan terdekat ke arah bangunan/obyek sakralnya; serta perubahan lokasi ruang sakral. Perubahan tersebut mengindikasikan mulainya kemunculan kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya lokal.

Kata Kunci : *Ruang Sakral, Perkembangan dan Perubahan Ruang Sakral*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Perubahan budaya dapat mempengaruhi perubahan ruang [1]. Ruang merupakan simbolisasi dari kesepakatan bersama sebagai wadah untuk beraktivitas baik bekerja, rekreasi, ataupun bertempat tinggal, serta aspirasi/cara pandang hidup masyarakat dalam mengelola ruang secara bersama-sama. Perubahan ruang dapat memberikan pengaruh terjadinya perubahan pandangan dan pola aktivitas masyarakat serta timbulnya dampak sosial ekonomi dan sosial budaya yang bersifat menguntungkan maupun merugikan.

Ruang dapat dikelompokkan menjadi dua bagian sesuai dengan aktivitas masyarakat yang memanfaatkannya, yakni ruang sakral (berkaitan dengan kegiatan agama) dan ruang profan (berkaitan dengan kegiatan sosial) [2[dan [3].

Perubahan ruang sakral dapat digambarkan sebagai relasi dari triad ruang menurut pandangan Levebvre [4], yakni relasi tiga elemen berupa ruangpersepsi (*perceived space*) atau praktek ruang (*spatial practice*)[1]; ruang

[1]Persepsi ruang dan praktik ruang merujuk pada ruang manusia yang relatif obyektif dan nyata yang dihadapi dalam lingkungan sehari-hari [5] [6]. Elemen ini digunakan untuk mengeksplorasi dasar pertimbangan, persepsi masyarakat dalam merubah atau mempertahankan ruang, aktivitas dalam memanfaatkan ruang dan respon/upaya dalam mempertahankannya.

konsep (*conceived space*) atau representasi ruang (*representation of space*)[2] dan ruang hidup (*lived space*) dan ruang representasi (*representational space*)[3]. Ketiga elemen tersebut saling berelasi dan saling mempengaruhi dalam mewujudkan perubahan ruang sakral.

Menurut Sukawati [1], dalam konteks Bali, perubahan ruang sakral sangat terkait dengan Konsep *Tri Hita Karana*. Konsep tersebut mengandung maksud filosofis berupa pencapaian keselarasan hidup dalam tiga hubungan, yaitu (1) manusia dengan Tuhan, (2) manusia dengan alam, dan (3) manusia dengan manusia, yang secara umum juga diterapkan pada tata ruang dan arsitektur tradisional Bali. Trilogi ini diberlakukan sebagai pedoman pembagian ruang wilayah pemukiman (kawasan) yang dipilah menjadi tiga *privacy* sebagaimana azas dasar dari konsep *Tri Hita Karana*, yaitu spasial *parhyangan* (tempat suci desa), spasial *pawongan* (wilayah pemukiman penduduk desa) yang dalam penelitian ini ditransformasikan menjadi spasial *pawongan* dalam bentuk ruang-ruang atau wadah sosial, dan spasial *palemahan* (wilayah pendukung kehidupan/mata pencaharian penduduk desa).

Pentingnya mempertahankan ruang sakral sebagai bentuk menjaga pluralisme masyarakat tradisional dalam konteks perencanaan keruangan diungkapkan oleh Sudaryono [5]. Sudaryono [5] menyampaikan pula bahwa pendekatan keruangan yang selama ini bersifat deterministik-rasionalistik telah banyak menuai kritik, khususnya karena ketidakmampuan mengakomodasi nilai-nilai pluralisme dan kepentingan masyarakat pada skala komunitas dan lokal. Oleh karena itu, Sudaryono [5] mengungkapkan perhatiannya terhadap konsep penguatan ruang lokal termasuk ruang sakral sebagai sebagai bagian dari ruang-ruang lokal.

Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan uraian sebelumnya maka tujuan penelitan ini adalah menjawab permasalahan penelitian tentang perkembangan dan perubahan ruang sakral Kuta. Adapun sasaran dalam penelitian ini yakni mengidentifikasi pola perubahan ruang sakral yang terjadi pada ketiga zona (zona *parahyangan*, zona *pawongan*, dan zona *palemahan*).

METODOLOGI

Penelitian ini berupa studi kasus. Dari segi tempat pelaksanaannya, penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) sehingga dapat ditemukan realitas atau fenomena yang terjadi pada ruang sakral Desa Kuta dalam bentuk gejala atau proses sosial. Lokasi penelitian ini adalah wilayah Desa Adat Kuta yang diarahkan sebagai salah satu kawasan wisata. Pemilihan lokasi penelitian didasari oleh pertimbangan-pertimbangan bahwa kawasan Kuta telah menunjukkan perkembangan yang pesat. Pada penelitian ini, ruang sakral yang dikaji mencakup 7 jenis ruang terdiri atas 4 jenis pada zona *parahyangan*, 2 jenis pada zona *pawongan* dan 1 jenis pada zona *palemahan*. Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposif (bertujuan), yaitu yang memiliki pengetahuan dan pengalaman berkaitan dengan perubahan ruang sakral di Desa Adat Kuta.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Kawasan Kuta

Menurut Wicakasana [7], perkembangan kawasan Kuta dimulai sejalan dengan invasi Majapahit yang dipimpin Gajahmada sekitar tahun 1343. Dalam rangka mempersatukan Nusantara, Gajahmada berusaha menaklukan Bali melalui pengiriman pasukan ke beberapa pantai di Bali, salah satunya ke pantai yang kini disebut Kuta. Pasukan Gajahmada tersebut yang disebut sebagai para *arya* juga bermukim dan mengembangkan kawasan Kuta. Pada periode selanjutnya sampai tahun 1846, perkembangan kawasan Kuta terkait dengan perkembangan kerajaan di Bali secara keseluruhan. Pada periode tersebut terdapat fase perkembangan kerajaan mulai dari Dinasti Gelgel, Dinasti Klungkung dan pecahnya Kerajaan Klungkung menjadi beberapa kerajaan kecil. Pada periode berikutnya yakni 1846 sampai 1945 merupakan fase penjajahan Belanda, Jepang dan terjadinya penyerahan kemerdekaan. Kemudian berlanjut sampai saat ini berupa fase paska kemerdekaan.

Wicaksana [7] menambahkan pula bahwa perkembangan pemerintahan Kuta dipengaruhi pula perkembangan Kawasan Kuta. Pada periode awal invasi Majapahit tahun 1334 sampai dengan tahun 1839,

[2]Konsep ruang dan representasi ruang mengacu pada konstruksi mental ruang, dan ide-ide kreatif tentang dan representasi ruang [5] [6]. Elemen ini digunakan untuk memahami konsepsi rencana ruang menurut pemerintah serta upaya pemerintah dan pelaku usaha dalam mempertahankan atau melemahkan.

[3]Ruang hidup dan ruang representasional mengacu pada kombinasi kompleks dirasakan dan ruang dikandung [5] [6]. Ruang hidup merupakan ruang seseorang yang sebenarnya. Pengalaman ruang dalam kehidupan sehari-hari atau lebih elemen penyusun kehidupan sosial [5] [6].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

pemerintahan Kuta memiliki keterkaitan dengan pemerintahan kerajaan di Bali. Menurut Wicaksana (2014), menyebutkan bahwa kepala desa atau *perbekel* merupakan wakil raja di daerah. Pada tahun 1839, Raja Kesiman di Badung memberi kepercayaan Mads Johansen Lange, seorang warga negara Denmark sebagai *prebekel* (kepala desa) di Kuta, karena hubungan yang sangat baik dengan Raja Kesiman. Pada periode selanjutnya sampai jaman paska kemerdekaan, diketahui beberapa *prebekel* yang memimpin desa Kuta. Kemudian pada tahun 1980an, terdapat perubahan dari *prebekel* menjadi kelurahan.

Selain pemerintahan dinas, Kawasan Kuta juga memiliki pemerintahan adat dalam wadah desa adat. Hubungan antara pemerintahan dinas dan pemerintahan adat bersifat koordinatif. Menurut sejumlah penelitian, organisasi desa adat di Bali diarsiteki oleh Mpu Kuturan pada abad 11. Khusus kawasan Kuta, pembentukan desa adat secara lebih terorganisir dimulai tahun 1916 dengan terbentuknya *bendesa* dan perangkat desa [7].

Menurut Wicaksana [7], perkembangan Desa Kuta pada sekitar 1334 M tersebut, juga sejalan dengan pembangunan fasilitas ibadah berupa pura*kahyangan tiga*. Pembangunan pura *kahyangan tiga* merupakan salah satu syarat keabsahan desa adat [8]. Pola pembangunan nya mengikuti pola tata ruang tradisional Bali, yaitu pura *puseh* pada bagian hulu desa (bagian timur), puradesa (*bale agung*) di tengah-tengah desa, dan pura *dalem* di *teben* desa (bagian barat).

Perkembangan kawasan Kuta terutama pada periode 1970-an, bersifat dukungan terhadap kebutuhan wisatawan pada skala terbatas. Kondisi tersebut mendorong pula perkembangan ruang-ruang kegiatan berbasis wisata, disamping keberadaan ruang tradisional Bali [9].

Pada periode tersebut sebelum *icon* pariwisata menjadi komoditas utama, tanah-tanah adat (aset desa) di kawasan Kuta berfungsi sebagai lahan-lahan pertanian khususnya perladangan/*tegalan*, yang ditanami tanaman jeruk, jagung, kedelai, kacang tanah, ubi kayu, dan lain sebagainya. Tanah pertanian tersebut saat ini sudah tidak produktif lagi, karena merupakan tanah perbukitan dengan kontur yang berbatu. Oleh sebab itu tanah tersebut beralih fungsi sebagai penunjang obyek pariwisata seperti *art shop*, kafe, mall, pusat oleh-oleh, dan waralaba. Hal tersebut membuktikan terjadinya peralih fungsian lahan pertanian disebabkan oleh industri pariwisata yang sangat berkembang pesat di Kuta. Jika dihitung secara lebih luas merebaknya perkembangan pariwisata membawa pengaruh pada berkurangnya lahan pertanian yang beririgasi teknis rata-rata 1.000 Ha pertahunnya [9].

Seperti diuraikan oleh Darmadi [9], perkembangan pariwisata pada kawasan Kuta selama 1970-2014 menyebabkan kemunculan hotel-hotel yang tidak terkendali. Tetapi, sebelum menjadi pusat wisata pada tahun 1970-an kawasan Kuta dikenal pula sebagai perkampungan nelayan. Masyarakat Kuta hanya membuat penginapan sederhana dengan menyewakan sebagian kamar rumah mereka, dan juga membuat warung dengan struktur dasar bambu untuk kebutuhan makanan bagi wisatawan lokal maupun mancanegara yang berkunjung ke daerah tersebut. Kelengangan kawasan Kuta dari bangunan-bangunan hotel tampak jelas terlihat. Selain itu tergambarkan pula kondisi kawasan pada saat itu.

Pada periode 1970-an tersebut, warga juga telah melakukan interaksi awal dalam memenuhi kebutuhan wisatawan/pengunjung. Lebih jauh, salah seorang mantan bendesa adat Kuta, yakni Made Wendra mengungkapkan bahwa penduduk Kuta 'belajar' dan mendapat 'pengetahuan' dari pengunjung/wisatawan tentang penyediaan sarana MCK pada rumah-rumah yang ditempati wisatawan. Selain itu penduduk juga mendapat keuntungan atas biaya sewa yang diberikan wisatawan atas rumah-rumah penduduk yang ditempati oleh mereka.

Darmadi [9] menambahkan bahwa masa kemerdekaan Indonesia hingga tahun 1970-an. Turisme tumbuh dari embrio hasil interaksi yang semakin lama antara warga desa dan pelancong asing. Dengan referensi artikel dan informasi di negaranya, para wisatawan menemukan sendiri pantai Kuta dengan datang sebagai pelancong yang datang ke Bali dan khususnya menyenangi pantai Kuta. Keadaan ini dapat digambarkan melaui perkembangan kepariwisataan Kuta yang cepat dan tanggapnya para wisatawan usia muda (*young traveller*) terutama yang berasal dari Australia yang datang ke Kuta semakin ramai pada masa-masa akhir dasa warsa 60-an.

Perubahan Ruang Kawasan Kuta

Pada bahasan di bawah ini diuraikan perubahan ruang pada obyek-obyek kajian di Kawasan Kuta dalam konteks salah satu desa adat di Bali.

A. Pura *Dalem Kahyangan*

Pola perubahan ruang pada Pura *Dalem Kahyangan* menunjukkan terjadinya pengurangan radius jarak pura dengan bangunan terdekat, ketinggian bangunan terdekat melebihi batas, serta daya pandang bangunan terdekat yang tidak dibatasi dan menghadap langsung pura. Bangunan terdekat dengan pura tersebut berupa

ruko untuk kegiatan usaha. Kondisi ini menggambarkan adanya kecenderungan kemunculan dominasi ruang ekonomi, tetapi respon negatif masyarakat juga besar untuk mempertahankan ruang sakral.

Dari uraian tersebut terdapat kecenderungan kontestasi ruang antara ruang sakral dan non sakral (jasa). Kontestasi ini menggambarkan pula masih lebih kuatnya pengaruh politik ekonomi yang mempengaruhi terjadinya perubahan ruang dan penurunan nilai sakral Pura *Dalam Kahyangan* dibandingkan dengan resistensi dari masyarakat adat dalam bentuk pemaknaan dan strategi dalam mempertahankan ruang sakralnya. Walaupun demikian struktur budaya dan adat serta aktivitas upacara masih tetap bertahan dilakukan di Pura *Dalem Kahyangan*. Dapat dikatakan bahwa ruang dominasi atau abstrak-yang dikembangkan Lefebvre sudah mulai terlihat, tetapi respon masyarakat sebagai bentuk *apropiasi* (penyelarasan) dan pertahanan niai lokal juga kuat.

B. Pura *Dalem Tunon*

Pola perubahan ruang sakral di Pura *Dalem Tunon* menunjukkan terjadinya pengurangan radius jarak pura dengan bangunan terdekat, tetapi terjadi kesepakatan dengan pihak hotel mengenai radius jarak tersebut. Dominasi ruang ekonomi mulai muncul, tetapi terdapat kesepakatan dengan masyarakat mengenai radius jarak pura.

Perubahan ruang fisik pura *Dalem Tunon* diindikasikan dengan pengurangan radius jarak dengan bangunan hotel terdekat. Radius jarak sekarang menjadi 15 m, dari semula yang lebih besar dari 15 m. Permasalahan yang timbul pada saat awal (sekitar tahun 2000), yakni keinginan pihak hotel untuk memperluas bangunan hotel berada pada jarak yang lebih dekat (5-10m).

Dapat diungkapkan pula bahwa terdapat konsensus antara pihak puri dengan pihak pengelola pura keluarga mengenai keberadaan pura *Dalem Tunon*. Kondisi ditunjukkan dengan adanya kesepakatan tentang radius jarak pura dengan bangunan hotel terdekat.

C. Pura *Pesanggaran*

Adapun pola perubahan ruang pura *Pesanggaran* menunjukkan terdapat perubahan radius jarak pura dengan bangunan terdekat (hotel). Keberadaan pura *Pesanggaran* ini seperti pura lainnya juga lebih dahulu berdiri dibandingkan dengan hotel *Kartika Plaza* sebagai hotel yang berada paling dekat dengan pura. Sejalan dengan waktu, saat ini pura *Pesanggaran* tersebut menjadi bagian areal hotel *Kartika Plaza*.

Pada saat awal, radius jarak pura lebih besar dibandingkan saat ini, tetapi sejalan perkembangan hotel terjadi pengurangan radius pura. Saat ini berdasarkan wawancara dengan tokoh masyarakat diketahui bahwa jarak radius pura tersebut masih sesuai dengan aturan *bishama*, yakni bahwa pagar bangunan hotel terdekat berada tepat dengan *penyengker*/pagar pura. Selain itu, bangunan hotel Kartika Plaza tersebut juga masih sesuai dengan aturan bishama (maksimal 4 lantai).

D. Pura Keluarga *(Sanggah)*

Terdapat perubahan ruang sakral pada beberapa pura keluarga akibat peningkatan kebutuhan ruang hunian khususnya penambahan anggota keluarga juga dorongan ekonomi untuk mengembangkan kegiatan produktif. Terdapat kecenderungan pemindahan lokasi *sanggah* dari lantai 1 ke lantai 2 atau 3. Terdapatnya upaya menambah daya tampung lahan tersebut sebagai akibat dorongan kekuatan sosial dan ekonomi dari pemilik pekarangan dalam memaknai ruang *sanggah*, tidak mempengaruhi pemaknaan masyarakat terhadap ruang sakral melalui upaya tetap mempertahankan ruang sakral.

E. Pekarangan

Pola perubahan ruang sakral berupa pekarangan menunjukkan peningkatan kebutuhan perumahan akibat penambahan anggota keluarga serta dorongan ekonomi yang berimplikasi pada pemfungsian sebagian lahan perumahan untuk kegiatan produktif. Dengan kata lain, terdapat beberapa perubahan fungsi hunian serta penambahan fungsi komersial pada lahan pekarangan. Walaupun demikian, fungsi keagamaan (*parahyangan*) tetap bertahan pada zona yang seharusnya.Berdasarkan penyebaran kuesioner dan wawancara diketahui bahwa perubahan ruang pekarangan dipengaruhi oleh perkembangan gaya hidup yang lebih modern (komersial) serta kebutuhan ruang tambahan akibat penambahan anggota keluarga. Secara umum terdapat perubahan ruang pekarangan tetapi dengan tetap mempertimbangkan tata aturan adat sehingga perubahan kesakralan dapat diminimasi. Terjadinya perubahan atau penurunan kesakralan diwujudkan dengan posisi pekarangan dan bangunan yang dilarang menurut aturan adat. Upaya meminimasi dampak buruk tersebut dilakukan dengan melakukan upacara atau usaha-usaha lain secara adat. Perubahan pekarangan akibat peningkatan kebutuhan penambahan ruang untuk kegiatan ekonomi, tetapi dengan tetap menjaga nilai kesakralan merupakan wujud warga adat yang masih teguh memegang aturan adat tetapi tetap adaptif terhadap perkembangan. Konsep *desa-kala-patra* menjadi dasar pertimbangan dalam perubahan ini.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

F. Tempat pertemuanbanjar *(Bale Banjar)*

Kajian pola perubahan ruang menunjukkan adanya dorongan menambah pembiayaan kegiatan *banjar* melalui pemanfaatan sebagian ruang bale banjar untuk kegiatan komersial. Terdapat penambahan fungsi komersial pada areal *banjar*. Walaupun demikian fungsi *bale banjar* sebagai kegiatan agama, sosial dan budaya tetap terjaga. Terdapat kemunculan ruang sebagai dorongan ekonomi, tetapi ruang sakral masih bertahan. Penambahan fungsi perdagangan pada *bale banjar* selain fungsi utamanya dalam bidang sosial budaya, menunjukkan adanya upaya dari warga adat menambah pendanaan untuk mendukung keberlangsungan kegiatan warga *banjar* termasuk kegiatan yang berhubungan dengan *bale banjar*. Upaya ini menunjukkan pula rasa memiliki warga banjar dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial budaya yang ada.

G. *Catus Patha (pempatan agung)*

Kajian pola perubahan ruang sakral,menunjukkan bahwa *Catus Patha* sekarang sebagai lokasi baru yang lebih layak dari segi adat dibandingkan pada lokasi sebelumnya. Pada *Catus Patha* tersebut keleluasaan ruang upacara masih terjaga, walaupun terdapat perkembangan ruang pada kawasan sekitarnya.*Catus patha* (*pempatan agung*) Kuta mengalami perpindahan lokasi sekitar tahun 1990 an. Perubahan ini dilakukan karena lokasi sebelumnya kurang memenuhi syarat adat sebagai *pempatan agung*. Lokasi yang sekarang di perempatan *Bemo Corner* dianggap lebih sesuai sebagai *Catus Patha*.

Menurut Bagus Rai-sejarawan Kuta, perkembangan kegiatan jasa dan perdagangan di sekitar *Catus PathaBemo Corner* tidak menjadi masalah, justeru melalui upacara *nangluk merana* (tolak bala) yang dilakukan akan dapat menghilangkan berbagai energi negatif kegiatan-kegaitan yang ada. Hal yang perlu dipertahankan adalah keleluasan ruang pada saat pelaksanaan upacara nya sehingga memudahkan pencapaian dan penggunaan *catus patha.*

Fungsi *catus patha* (pempatan agung) tidak berubah dan masih bertahan dapat digunakan untuk kegiatan upacara. Walaupun secara fisik kegiatan di sekitar perempatan yang termasuk pada kawasan *pempatan agung* tersebut berbeda dengan tata ruang adat yang lama.

KESIMPULAN

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini yakni :

1. Berdasarkan kajian terhadap 7 (tujuh) jenis ruang-ruang sakral (Pura *Dalem Kahyangan*, Pura *Dalem Tunon*, Pura *Pesanggaran*, *Sanggah*, Pekarangan, *Bale Banjar* dan *Catus Patha*) pada 3 zona kesakralan (*parahyangan*, *pawongan* dan *palemahan*) di wilayah Desa Adat Kuta menunjukkan kecenderungan perubahan ruang. Terdapat beragam pola perubahan ruang sakral baik publik maupun privat terutama mencakup perubahan fungsi; perubahan tata letak dan orientasi; perubahan radius jarak dengan bangunan terdekat; perubahan ketinggian bangunan terdekat dan daya pandang bangunan terdekat ke arah bangunan/obyek sakralnya; serta perubahan lokasi ruang sakral.
2. Pada zona parahyangan pola perubahan umumnya berupa perubahan fungsi, berkurangnya radius jarak dengan bangunan terdekat, ketinggian bangunan terdekat dan pandangannya ke arah obyek sakral yang melebihi batas serta orientasi arah. Pada zona pawongan berupa perubahan fungsi, perletakan bangunan, orientasi vertikal dan pada zona palemahan berupa perubahan lokasi (catus patha). Perubahan tersebut mengindikasikan mulainya kemunculan kekuatan dominasi ekonomi dan politik yang mempengaruhi nilai-nilai sosial budaya lokal. Kondisi tersebut memberikan gambaran tentang Dapat dikatakan bahwa ruang dominasi atau abstrak-yang dikembangkan Lefebvre sudah mulai terlihat, tetapi respon masyarakat sebagai bentuk *apropiasi* (penyelarasan) dan pertahanan nilai lokal juga kuat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Sukawati, (2008): *Perubahan Spasial Desa Adat Ubud, Gianyar Bali, dalam Era Globalisasi : Sebuah Kajian Budaya, Program Doktor Kajian Budaya, Unud, Bali*

[2] Sasongko, I. 2006. Pembentukan Ruang Berdasarkan Budaya Ritual. Disertasi. ITS: Surabaya

[3] Santhyasa, I Komang Gede Dan Wahyudi Arimbawa (2010) : *Perspektif Ruang Sebagai Entitas Budaya Lokal :Orientasi Simbolik Ruang Masyarakat Tradisional Desa Adat Panglipuran, Bangli-Bali*, Local Wisdom-Jurnal Ilmiah Online, 2, (4) : 01-09.

[4] Lefebvre, H. (1991): *The Production of Space, Donald Nicholson-Smith traans, Oxford :* Basil Blackwell, Originally published 1974
[5] Sudaryono, (2006) : Paradigma Lokalisme dalam Perencanaan Spasial, Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol 17/No 1, April 2006.
[6] Purcell, M., (2002) : *Excavating Lefebvre: The Right To The City And Its Urban Politics Of The Inhabitant,* GeoJournal, 58, 99–108.
[7] Wicaksana, I Nyoman Graha, (2014): *Kuta Berdaya 2 :Jejak PengabdianLPM Kelurahan Kuta 2011- 2014*, LPM Kelurahan Kuta.
[8] Geriya, I Wayan. (2000): *Transformasi Kebudyaan Bali Memasuki Abad XX1.* Denpasar : Unit Percetakan Daerah Bali
[9] Darmadi, (2011): *Representasi Budaya Masyarakat Lokal Dan Politik Identitas Desa Adat Kuta Dalam Poskolonialitas Kawasan Industri Pariwisata* , *Tesis, Bidang* Kajian Budaya | Ubud, Bali.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

STRATEGI PENYEDIAAN KAWASAN KOMERSIAL DI LINGKUNGAN KAMPUS ITS SURABAYA

Arwi Yudhi Koswara[1)], Sardjit [1)] dan Adjie Pamungkas[1)]

[1)]Lecture of PWK ITS

e-mail: arwiyudhi@gmail.com, sardjito@urplan.its.ac.id, adjieku@gmail.com

Naskah diterima :23 Maret 2017 Naskah direvisi : 24 Maret 2017 Disetujui terbit : 24 Maret 2017

ABSTRAK

Institute Technology of Sepuluh Nopember (ITS) has been established as a Legal Entity State University (PTN-BH). ITS can obtain funds from operations by establishing and/or business entity, full fund management, and management of state property right management granted by the government and/or regional government in accordance with the provisions of the legislation. The policy is a reference for ITS stakeholders in planning commercial areas in the Master Plan of ITS 2015. Considering that ITS has the potential of indeveloped land in the profision of commercial area, procurement of commercial area are opportunities for ITS. Commercial area is expected to help empower and utilization of ITS for the benefit of all parties.

The purpose of this research is to formulate a strategy of providing commercial areas on campus of ITS. The results show that there are 14 procurement influence variables of commercial area which are devided into 7 indicators. Exploration of these variables have told the potential dan problems for provision of ITS Comercial Area internally (IFAS), which consists of strengths and weaknesses and externally (EFAS) consisting of opportunities and threaths. These results have shown that the formulation of procurement strategy of ITS Comercial Area located in Quadrant II, requires the support of an aggressive strategy. To sum up, the generated key strategies include: undertake further studies on environmental conditions, the target market, the cost, and the the type of activities that will be commercialized; formulate the role of stakeholder; and make cooperation with external parties and branding the region as a follow-up. This formulation is expected to be a trigger for the ITS to build the ITS Comercial Area building.

Keywords*: ITS, commercial, strategy, SWOT*

PENDAHULUAN

Bangunan komersial merupakan bangunan yang direncanakan dan dirancang untuk mendatangkan keuntungan bagi pemilik maupun penggunanya dengan mempertimbangkan beberapa aspek. Kawasan komersial menurut Kamus Tata Ruang diartikan sebagai area yang mempunyai fungsi dominan untuk kegiatan komersial atau disebut sebagai kawasan pusat perniagaan/usaha kota, letaknya tidak selalu di tengah-tengah kota dan mempunyai pengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi kota. Dari pengertian tersebut maka dalam konteks lingkungan kampus, kawasan komersial merupakan area di dalam lingkungan kampus yang direncanakan untuk memberikan penghasilan yang berkelanjutan.

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) merupakan salah satu perguruan tinggi negeri di Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan TinggiNegeri Badan Hukum, ITS resmi berubah statusnya dariPerguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN BLU) menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). Dengan demikian, ITS memiliki wewenang untuk mengelola secara mandiri beberapakebijakan, baik di bidang akademik maupun non akademik [1].

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum, menerangkan dalam pasal 10 ayat 1bahwa "PTN Badan Hukum dapat memperoleh dana dari kegiatan usaha dengan mendirikandan/atau memiliki badan usaha, pengelolaan dana abadi, dan pengelolaan hak kekayaan negara yang hak pengelolaannya diberikan oleh Pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang dilakukansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan." Kemudian

diperjelas di ayat 2 bahwa,"Kegiatan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan layanan penunjangTridharma Perguruan Tinggi." Artinya kebijakan tersebut memberikan dukungan kepada PTN-BH, termasuk ITS dalam hal penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus [2].

Kebijakan penyediaan kawasan komersial tersebut telah diterapkan di beberapa institusi kampus PTN-BH lainnya. Universitas Indonesia dan Universitas Gadjah Mada memanfaatkan kewenangannya melalui pengadaan unit usaha dan pengembangan asset. Universitas Indonesia memiliki dua unit usaha komersil yang dibentuk untuk menjadi sumber pendanaan tambahan. Kedua unit usaha komersil tersebut adalah PT Daya Makara yang bergerak di bidang konsultan dan PT Makara Mas yang bergerak di bidang perdagangan umum.(http://www.dayamakaraui.co.id/ dan http://www.makaramas.com/ diakses tanggal 25 Maret 2016). Universitas Gajah Mada mendirikan suatu badan usaha bernama PT. Gama Multi Usaha Mandiri, yang membawahi berbagai unit usaha milik Universitas Gajah Mada. Usaha-usaha tersebut antara lain gedung pertemuan, jasa konsultansi, jasa layanan keuangan, rumah sehat dan apotek, layanan servis kendaraan, kantor pos waralaba, plaza agro, pengelolaan hutan, *broadcasting*, layanan travel, toko buku, dsb. (gamamulti.com/main diakses tanggal 25 Maret 2016).

Kampus ITS Sukolilo menempati areal seluas 180 Ha, dengan luas bangunan seluruhnya kurang lebih 150.000 m^2.Hal ini menunjukkan bahwa ITS memiliki potensi lahan yang belum terbangun dalam hal penyediaan kawasan komersial. Sebaliknya seiring perkembangan pendidikan, untukmewujudkan kemandirian sebagai Badan Hukum Milik Negara (BHMN), ITS perlu mengembangkan unit-unit usaha untuk mengelola dan meningkatkan nilai sumber daya dan potensi yang ada dengan professional dan bertanggungjawab. Selain itu integrasi unit-unit usaha dalam kawasan komersial ini dapat berperan sebagai *Project Management Center* bagi ITS dan memfasilitasi kontribusi aktif civitas akademika ITS dalam pelaksanaan proyek-proyek dengan pihak luar. Kawasan komersial ini diharapkan dapat membantu pemberdayaan dan pemanfaatan potensi ITS bagi kepentingan semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa untuk mewujudkan pembangunan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS guna mendukung ITS sebagai BMHN, luas lahan kosong yang ada berpotensi untuk dibangun. Namun agar penyediaan kawasan komersial tersebut dapat berfungsi optimal diperlukan kajian mengenai penetapan strategi penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS.

Tujuan penelitian ini adalah merumuskan strategi penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS. Adapun sasarannya terbagi atas:

1. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS.
2. Menggalipotensidanpermasalahandalampenyediaankawasankomersial di lingkungankampus ITS berdasarkanpersepsi*stakeholders.*
3. Merumuskanstrategipenyediaankawasankomersial di lingkungankampus ITS

METODOLOGI

Berdasarkan jenis permasalahan yang diselidiki, penelitian ini bersifat kualitatif.Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memaparkan, menuliskan, dan melaporkan suatu peristiwa.Populasi diartikan sebagai keseluruhan unit analisis yang merupakan sasaran penelitian.Populasi dalam penelitian ini adalah narasumber dari para pihak yang memiliki pengaruh dan berkepentingan terhadap penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS.Pengambilan sampel dalam penelitian ini digunakan metode non probability sampling, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak didasarkan oleh peluang karena populasi tidak diketahui.Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam kasus penelitian ini adalah melalui pengambilan sampel bersyarat atau *purposive sampling*.

Pemilihan responden secara *purposivesampling* merupakan pemilihan secara sengaja dengan syarat bahwa responden dianggap mempunyai kemampuan dan mengertipermasalahan atau informasi yang dibutuhkan peneliti terkait dengan penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS. Adapun kelompok responden yang dipilih dalam kegiatan penelitian ini antara lain:

a. Kepala Badan Inovasi dan Bisis Ventura ITS;
b. Kepala UPT Fasilitas Olahraga ITS;
c. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Keuangan, dan Sarana Prasarana ITS;
d. Kepala Laboratorium Perencanaan Wilayah Jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota ITS.

Metode pengumpulan data terdiri atas data primer dan data sekunder. Pengumpulan data primer bertujuan untuk mendapatkan gambaran umum lingkungan kampus ITS serta persepsi dan preferensi *stakeholder*s tentang penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS. Pengumpulan data primer

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dalam penelitian ini menggunakan *Focus Group Discussion* (FGD) dan kuisioner. Sedangkan pengumpulan data sekunder dilakukan dengan survei literature, terdiri atas buku, hasil penelitian, dokumen rencana tata ruang (*Master Plan* ITS, Rencana Kota), peraturan perundang-undangan, serta artikel di internet dan media massa.

Tabel 1. Teknik Analisis Data

TUJUAN	INPUT	ALAT ANALISIS	OUTPUT
Melakukan konfirmasi variable pengaruh penyediaan kawasan komersial ITS	Variabel hasil tinjauan pustaka	*Secondary Analysis*	Variabel pengaruh penyediaan kawasan komersial ITS
Mengeidentifikasi potensi dan permasalahan penyediaan kawasan komersial ITS	Variabel pengaruh	Analisis SWOT	Matriks Strategi (IFAS dan EFAS) dan Matriks SWOT
Mengintepretasikan matriks hasil perhitungan SWOT kedalam strategi penyediaan kawasan komersial ITS	Matriks SWOT	Intepretasi dan Deskriptif	Strategi prioritas penyediaan kawasan komersial ITS

Sumber: Tim Peneliti, 2016

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan tinjauan terhadap Masterplan ITS, lokasi kawasan komersial ITS berada pada sisi utara kampus ITS. Penentuan lokasi tersebut merupakan pilihan lokasi yang paling strategis karena memperhatikan dengan kedekatan terhadap aksesibilitas jalan dan kedekatan terahadap beberapa pusat kegiatan yang strategis. Berdasarkan hasil survei lapangan terhadap keberadaan lokasi menunjukkan bahwa saat ini lahan yang diarahkan sebagai kawasan komersial ITS adalah berupa lahan kosong yang ditumbuhi rumput dan alang-alang. Kondisinya nampak kering ketika musim kemarau dan sangat lebat rumput ketika musim penghujan.

Gambar 1. Lokasi Kawasan Komersial berdasarkan Masterplan ITS dan Kenampakan Eksisting di Lapangan

Sumber: Master Plan ITS dan Survei Primer, 2016

1. Hasil Identifikasi Variabel Pengaruh Penyediaan Kawasan Komersial ITS

Variabel-variabel pengaruh penyediaan kawasan komersial didapatkan berdasarkan hasil kajian terhadap tinjauan pustaka yang kemudian dieksplorasi. Hasil eksplorasi tersebut kemudian ditelaah kembali dan disimpulkan menjadi variabel pengaruh penyediaan kawasan komersial ITS. Pada tahapan eksplorasi dan diskusi juga dihasilkan beberapa variabel baru terkait yang berpengaruh terhadap penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS.

Tabel 2. Eksplorasi Variabel Pengaruh Menurut *Stakeholder*

INDIKATOR	VARIABEL	PRINSIP
Variansi	Jenis kegiatan	Keragaman aktifitas dan layanan usaha
		Merefleksikan identitas dan budaya lokal kampus berbasis teknologi
		Representatif untuk mewadahi kegiatan segala jenis kondisi
Aksesibitas	Jalan	Memiliki jalan dengan akses ke segala arah
	Jalur pedestrian	Mengakomodasi dan memberi kenyamanan pejalan kaki
	Moda transportasi	Kemudahan akses moda transportasi
Prasarana pendukung	Ketersediaan jaringan listrik	Terjangkau oleh jaringan listrik
	Ketersediaan sumber air	Terjangkau oleh sumber air
	Pembuangan limbah	Tersedia sistem pembuangan limbah yang memadai
	Parkir	Menyediakan area parkir
	Ruang publik	Masyarakat dapat melakukan aktifitas bersama pada ruang publik
Kelayakan fisik	Fisik lokasi	Kelayakan lokasi ditinjau dari segi fisik (daya dukung lahan)
	Alokasi lahan	Alokasi lahan sesuai dengan kebijakan internal (Master Plan ITS)
		Alokasi lahan sesuai dengan kebijakan eksternal (Rencana Kota)
	Status kepemilikan lahan	Penguasaan yang jelas hak atas tanah
	Penetapan zonasi	Penjabaran pemanfaatan lahan sesuai dengan kebijakan internal (Master Plan ITS)
		Penjabaran pemanfaatan lahan sesuai dengan kebijakan eksternal (Rencana Kota)
Pengelolaan	Wewenang pengelolaan	Adanya pihak yang berwenang mengelola
	Karakter pengelola	Pengelolaan yang professional dan bertanggung jawab
VARIABEL BARU		
Pembiayaan	Keuangan internal	Ketersediaan uang untuk alokasi pengadaan kawasan komersial tanpa mengganggu pemenuhan kebutuhan lainnya
	Potensi Mitra	Jenis dan jumlah mitra yang diajak bekerjasama
	Kinerja ekonomi kota	Kesesuaian keuntungan kawasan komersial dalam mendukung perekonomian kota
Potensi market	Sasaran pengguna	Terdapatnya target pasar yang sesuai

Sumber: Hasil Kajian, 2016

2. Hasil Penggalian Potensi dan Permasalahan dalam Penyediaan Kawasan Komersial ITS

Setalah dirumuskan variabel-variabel yang mempengaruhi penyediaan kawasan komersial di lingkungan kampus ITS di atas, maka langkah selanjutnya adalah menggunakan hasil rumusan variabel-variabel tersebut untuk menggali potensi dan permasalahan yang timbul selama ini. Hasil penggalian potensi dan permasalahan didasarkan pada isu apa yang sedang terjadi dan memutuskan tindakan apa yang harus segera dilakukan untuk memecahkan masalah tersebut. Eksplorasi potensi dan permasalahan yang dilakukan dikelompokkan berdasarkan pengaruh dari kondisi internal (IFAS) dan eksternal (EFAS) kawasan. Eksplorasi dilakukan dengan menanyakan kepada *stakeholder* terpilih dengan menggunakan metode wawancara langsung. Adapun hasil penggalian potensi dan permasalahan dapat dijabarkan sebagai berikut:

a. KEKUATAN (STRENGHT)

1. Kebutuhan dasar mahasiswa yang beragam sesuai dengan bidang keahlian teknik masing-masing membuka peluang variasi jenis barang yang dikomersilkan. (V1)
2. Aktivitas dan layanan usaha yang potensial dikembangkan dapat berupa mall, jasa penginapan, travel agent, dan jasa komersial lainnya yang mendukung kegiatan kampus berkarakter teknik (V1)
3. Reputasi ITS sebagai kampus berkarakter teknologi telah diakui di kawasan regional bahkan nasional. (V1)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

4. Telah tersedia akses jalan di dalam kampus dengan lebar jalan memadai dan menjangkau seluruh areal kampus. (V2)
5. Terdapat sepeda kampus dan shelternya sebagai pendukung aksesibilitas. (V3)
6. Tersedianya lahan kosong yang belum dibangun dan cukup untuk dikembangkan menjadi kawasan komersial. (V4)
7. Lokasi telah ditentukan berdasarkan hasil kajian dan analisis yang tertuang pada Master Plan ITS, sehingga mampu menjamin optimalisasi kegiatan pembangunan kawasan komersial ITS dan tentunya sudah ada alokasi dana. (V5)
8. Kegiatan komersial ITS dapat bermitra dengan badan usaha-badan usaha yang bergerak di bidang perdagangan dan jasa (V10)
9. Sasaran pengguna adalah civitas akademika dan masyarakat skala lokal maupun regional. (V12)
10. Adanya visi mandiri secara ekonomi dari kebijakan kampus.(V9)

b. KELEMAHAN (WEAKNESS)

1. Kondisi jalan dengan lebar kurang lebih 15 meter dua jalur empat lajur dengan volume kendaraan cukup tinggi pada jam sibuk (*rush hour*). (V2)
2. Kondisi ketersediaan lahan berupa tanah kering dan berumput serta belum dianalisis daya dukung lahannya. (V4)
3. Lokasi lahan berada di area Politeknik (berbatasan dengan asrama mahasiswa Politeknik) (V4)
4. Belum tersusun secara spesifik pemanfaatan lahan (zonasi) untuk kawasan komersial di dalam Master Plan ITS. (V6)
5. Belum diatur pembagian tugas dan wewenang pengembangan kawasan komersil di ITS baik dari segi internal (kampus) maupun eksternal (non kampus). (V7)
6. Kebutuhan biaya pengembangan (gedung) kawasan komersial cukup besar. (V9)
   Status kepemilikan lahan belum jelas dan rawan konflik. (V13)

c. PELUANG (OPPORTUNITY)

1. Kebutuhan masyarakat di sekitar kampus baik sebagai konsumen maupun produsen membuka peluang variasi jenis barang yang dikomersilkan. (V1)
2. Direncanakan dilewati moda transportasi *mass rapid transit* berupa monorail Surabaya. (V3)
3. Lahan di sekitar rencana lokasi kawasan merupakan kawasan permukiman dan perdangangan jasa komplek (Mulyosari, Pakuwon, dan Keputih). (V4)
4. Lokasi kawasan komersial yang sesuai dengan peraturan zonasi (V6)
5. Peluang kerjasama dengan pihak swasta dalam pengadaan bangunan di kawasan komersil dari eksternal kampus. (V10)
6. Citra kawasan kampus ITS yang baik pada lingkup eksternal turut mempromosikan kawasan komersial. (V12)
   Suda ada tata cara perizinan di Kota Surabaya melalui SKRK yang mengakomodasi perizinan kawasan komersial. (V14)

d. ANCAMAN (THREAT)

1. Berada pada akses penghubung Jalan Kertajaya dengan Jalan Mulyosari sehingga memiliki kepadatan lalu lintas tinggi dan rawan kemacetan. (V2)
2. Kompetitor perdagangan jasa di sekitar kampus, antara lain Pakuwon city, East coast, Galaxy mall, dan retail di sekitar kampus (V12)
3. Isu penolakan masyarakat lokal karena pembangunan menyebabkan polusi lingkungan dan kebisingan (V14)

Secara garis besar, potensi penyediaan kawasan komersial ITS didorong berdasarkan tingkat kebutuhan mahasiswa ITS. Terdapatnya daya saing kegiatan perdagangan dan jasa yang telah berjalan saat ini disekitar kampus menjadikan tantangan dan juga peluang terutama perlunya integrasi agar dalam implementasinya dapat optimal. Telah dituangkannya alokasi rencana pengembangan kawasan komersial ITS didalam Master Plan ITS semakin memperkuat realisasi pembangunan agar sesuai dengan kebijakan internal kampus. Untuk meningkatkan peluang usaha yang nantinya akan dikembangkan, maka dapat dilakukan melalui penerapan kegiatan kerjasama terutama dengan pihak swasta dalam rangka pembiayaan dan pengelolaan kawasan komersial ITS.

ISBN : 978-602-73463-1-4

3. HASIL RUMUSAN STRATEGI PENYEDIAAN KAWASAN KOMERSIAL ITS

Strategi penyediaan kawasan komersial ITS dirumuskan dengan menggunakan teknik analisis SWOT. Analisis SWOT terhadap strategi penyediaan kawasan komersial ITS dilakukan dengan melakukan pembobotan terhadap hasil rumusan potensi dan permasalahan. Pembobotan dilaksanakan berdasarkan tingkat kepentingan faktor dengan rentang nilai bobot 1 sampai 4. Nilai 1 menunjukkan kondisi prioritas yang kurang penting untuk diimplementasikan, begitu seterusnya hingga nilai 4 menunjukkan prioritas yang sangat penting dilakukan penanganannya.

Setelah diketahui besar pembobotan pada masing-masing potensi dan permasalahan, dilanjutkan dengan penentuan rating untuk masing-masing variabel tersebut. Rating didapatkan berdasarkan hasil penilaian rata-rata dari stakeholder yang terpilih yang nantinya akan dikalikan dengan bobot untuk mendapatkan skor pembobotan.Matriks SWOT pada intinya adalah mengkombinasikan peluang, ancaman, kekuatan dan kelemahan sebuah matriks. Dengan demikian, matriks tersebut terdiri atas 4 (empat) kuadran, dimana masing-masing kuadran memuat masing-masing strategi. Matriks komparasi ini menggambarkan secara jelas bagaimana peluang dan ancaman eksternal yang dihadapi terhadap strategi penyediaan kawasan komersial ITS. Hasil perhitungan terhadap kuadran penentuan strategi penyediaan kawasan komersial ITS menunjukkan nilai positif pada Sumbu X (S-W) dan nilai positif pada Sumbu Y (O-T). Sehingga, kuadran stretagi penyediaan kawasan komersial ITS berada pada Kuadran II atau kuadran mendukung strategi agresif.

Setelah diketahui posisi strategi penyediaan Kawasan Komersial ITS, selanjutnya adalah mengidentifikasi variabel-variabel mana saja yang penting untuk dilakukan penangangan prioritas dan bukan prioritas. Strategi urutan diketahui melalui urutan kinerja strategi penyediaan Kawasan Komersial ITS dengan melakukan komparasi terhadap masing-masing nilai IFAS dan EFAS.Perumusan strategi penyediaan Kawasan Komersial ITS dilakukan hanya pada variabel-variabel yang berada pada kategori “sangat penting” yang akan dibahas sebagai berikut:

1. S7-O3
   Kondisi sekitar kampus ITS memiliki kemiripan jenis penggunaan dengan rencana kawasan komersial ITS yakni berupa kegiatan perdagangan dan jasa. Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan jenis kegiatan di sekitar area kampus ITS, maka perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai jensi kegiatan komersial yang sesuai untuk diterapkan di ITS yang selanjutnya hasil kajian tersebut dituangkan kedalam Master Plan ITS sebagai penyempurnaan. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *“Melakukan kajian lebih lanjut dalam merumuskan jenis kawasan komersial yang akan dikembangkan di Kampus ITS”*

2. W4-O3
   Adanya dominasi jenis penggunaan lahan berupa permukiman dan perdagangan jasa kompleks disekitar kawasan kampus ITS, maka perlu dirumuskan jenis kegiatan yang sesuai untuk diterapkan di kawasan komersial ITS agar dapat berjalan selaras dengan kondisi di sekitar kampus. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *“Melakukan pembagian tugas dan wewenang pihak pengembangan Kawasan Komersial ITS dengan memperhatikan kondisi sekitar”*

3. W5-O3
   Jenis kompleksitas penggunaan lahan di sekitar area Kampus ITS yang didominasi oleh kegiatan permukiman dan perdagangan jasa menjadikan semakin tingginya kegiatan di kawasan tersebut. Dengan melakukan pendekatan terhadap jenis penggunaan lahan disekitar kawasan Kampus ITS, dapat dijadikan sebagai *branch mark* jenis bangunan seperti apa yang sesuai untuk diterapkan pada kawasan komersial ITS. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *“Melakukan perencanaan lebih lanjut terhadap besar kebutuhan biaya pengembangan Kawasan Komersial ITS”*

4. S2-O5
   Arahan pengembangan kawasan komersial dengan kompleksitas jenis yang beragam tentunya tidak dapat berjalan sendiri terutama dari segi pembiayaan. Perlu dilakukan kerjasama dengan berbagai pihak terutama swasta untuk turut mendukung dari segi pembiayaan salah satunya melalui kegiatan *CSR*. Adanya kerjasama dengan pihak swasta juga tidak hanya menguntungkan dari segi finansial, melainkan turut dapat mempromosikan jenis kegiatan kawasan komersial ITS melalui pencitraan oleh pihak swasta yang bekerja sama. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *“Membuka peluang kerjasama dalam menentukan jenis kegiatan yang akan dikembangkan dalam Kawasan Komersial ITS”*

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

5. S7-O5
   Berdasarkan hasil kajian dan anaisis dari Master Plan ITS, lokasi pengembangan kawasan komersial ITS berada pada lokasi yang berbatasan dengan kawasan permukiman dan perdagangan jasa. Kerjasama dengan pihak swasta juga dapat semakin memperkuat dari segi perencanaan. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *"Membuka peluang kerjasama dengan pihak luar untuk kajian kawasan lebih lanjut dalam penyediaan Kawasan Komersial ITS"*

6. S9-O5
   Semakin beragam sasaran kegiatan kawasan komersial ITS, maka harus diimbangi dengan penyediaan barang dan jasa yang semakin beragam pula. Pengadaan kerjasama dengan pihak tertetntu terutama swasta diproyeksikan mampu mendorong jenis penyediaan kegiatan perdangan dan jasa. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *"Mensinkronisasikan peran antara pihak swasta dengan masyarakat luar dalam hal kersama"*

7. W2-O5
   Pentingnya pembagian tugas dan wewenang pihak-pihak yang mengelolah kawasan komersial ITS sebaiknya tidak tertutup pada pengelolah dari lingkup internal kampus, melainkan dapat membuka kerjasama dengan pihak luar. Sehingga, sistem pengelolaan dapat lebih maksimal dengan pengawasan kinerja dari lingkup internal kampus maupun eksternal kampus. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *"Turut melibatkan pihak swasta dalam sebagai pihak yang turut memiliki tugas dan wewenang pengembangan Kawasan Komersial ITS"*

8. W5-O5
   Tingginya besar biaya yang harus dikeluarkan dalam rangka realisasi pembangunan gedung komersial ITS yang baru dapat dioptimalkan dengan pengadaan kegiatan kerjasama terutama dengan pihak swasta. Adanya kerjasama dapat mendukung finansial pembangunan gedung komersial ITS yang akan menguntungkan kedua belah pihak. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah:*"Menentukan metode kerjasama yang tepat dalam hal pembiayaan realisasi pembangunan gedung Kawasan Komersial ITS"*

9. S2-T2
   Agar tidak terjadi tumpang tindih dengan jenis kegiatan di sekitar Kampus ITS, maka perumuskan jenis kegiatan kawasan komersial ITS hendaknya menyesuaikan dengan kondisi sekitar. Diperlukan kajian dampak lingkungan agar semakin memperkuat hasil rumusan kegiatan kawasan komersial di Kampus ITS. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *"Kajian lebih lanjut dan sinkronisasi jenis kegiatan komersial yang akan dikembangkan di Kawasan Komersial ITS"*

10. S2-T2
    Terdapatnya kompetitor terutama pada kegiatan perdagangan dan jasa tentunya akan berdampak aktivitas komersial di Kampus ITS. Agar dapat berjalan selaras, maka perlu dilaksanakan kajian lebih lanjut mengenai jenis kegiatan kawasan komersial ITS. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *"Melakukan peninjauan kembali kondisi eksisting alokasi pengembangan Kawasan Komersial ITS dengan kesesuaian lingkungan sekitar"*

11. S9-T2
    Variasi sasaran pengguna kawasan komersial ITS menjadikan kompleksitas jenis kegiatan terutama perdagangan dan jasa. Kondisi demikian juga selaras dengan penggunaan lahan pada sekitar kampus ITS yang juga berupa perdagangan dan jasa. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *"Jenis barang yang akan dikomersialkan tidak hanya kebutuhan mahasiswa di kampus saja melainkan juga menyesuaikan dengan kondisi di sekitar Kampus ITS"*

12. W4-T2
    Dalam pembagian tugas dan wewenang pengembangan kawasan komersial ITS juga diperlukan peninjauan terhadap kompetitor di sekitar kampus ITS. Pembagian tugas dan wewenangan hendaknya dapat juga memperhatikan kondisi di sekitar kawasan Kampus ITS. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *"Melakukan identifikasi tugas dan wewenang pihak dengan memperhatikan kondisi di sekitar Kampus ITS"*

13. W5-T2

Tingginya kebutuhan biaya pengembangan gedung kawasan komersial ITS hendaknya perlu disesuaikan dengan model gedung yang akan dibangun. Penyesuaian ini dapat disesuaikan dengan memperhatikan kompetitor di sekitar kawasan kampus ITS yang juga didominasi pada kegiatan perdangan dan jasa. Strategi yang diusulkan berdasarkan pembahasan tersebut adalah: *"Penyesuaian jenis bangunan kawasan komersial yang memiliki karakter agar dapat menjawab tantangan kompetitor di sekitar kampus"*

Agar rumusan strategi pengembangan kawasan komersial dapat berjalan optimal, maka perlu dituangkan kedalam *road map* strategi pengembangan Kawasan Komersial ITS sebagai berikut:

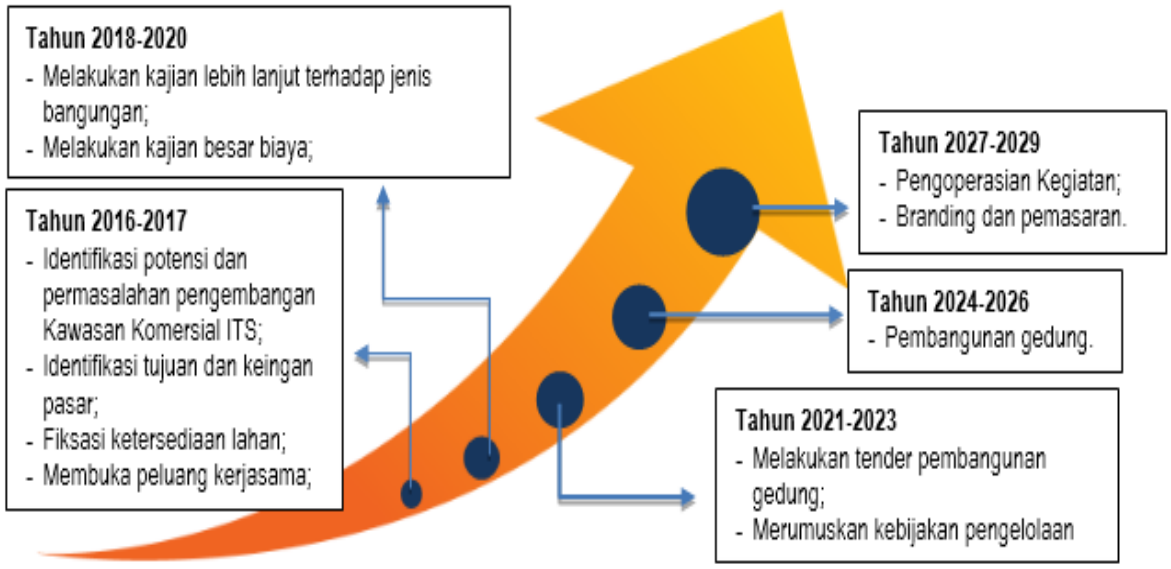

Gambar 2. *Road Map* Rencana Implementasi Kawasan Komersial ITS

Sumber: Hasil Analisis, 2016

KESIMPULAN

Kesimpulan yang dihasilkan dari kegiatan penelitian ini adalah terdapat beberapa variabel penting yang berpengaruh terhadap penyediaan kawasan komersial ITS antara lain jenis kegiatan, jalan/akses utama, moda transportasi umum, fisik lokasi, alokasi lahan, penetapan zonasi, wewenang pengelolaan, karakter pengelola, keuangan internal, potensi mitra, kinerja ekonomi kota, sasaran pengguna, status kepemilikan lahan dan perizinan. Potensi penyediaan kawasan komersial ITS antara lain tingginya tingkat kebutuhan mahasiswa ITS, daya saing kegiatan perdagangan dan jasa di sekitar kampus serta alokasi rencana pengembangan kawasan komersial di dalam Master Plan ITS. Untuk meningkatkan peluang usaha yang nantinya akan dikembangkan, maka dapat dilakukan melalui penerapan kegiatan kerjasama terutama dengan pihak swasta dalam rangka pembiayaan dan pengelolaan kawasan komersial ITS.

Sedangkan strategi penyediaan kawasan komersial ITS secara garis besar adalah identifikasi dan kajian awal serta membuka peluang kerjasama implementasi dengan berbagai pihak; melakukan kajian lebih lanjut mengenai bangunan, besar biaya, dan dampak terhadap lingkungan; implementasi pembangunan dan perumusan kebijakan implementasi; serta pengoperasian dan branding kawasan.

Berdasarkan uraian tersebut, maka saran dari penelitian ini adalah perlunya sosialisasi terhadap berbagai pihak pelaksana dalam implementasi perwujudan pengembangan kawasan komersial ITS; koordinasi dan komunikasi antar berbagai *stakeholder* terkait; mulai \mengadakan kegiatan publikasi kepada publik mengenai pembangunan kawasan komersial ITS sebagai wujud keseriusan dan upaya penggalian kerjasama dengan pihak swasta; serta segera melaksanakan kajian terutama kajian teknis pembangunan kawasan komersial ITS.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

DAFTAR PUSTAKA

[1] Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2014 tentang Penetapan Institut Teknologi Sepuluh Nopember sebagai Perguruan TinggiNegeri Badan Hukum
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2013 tentang Bentuk dan Mekanisme Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum.
[3] Rangkuti,Freddy. 2004.Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis, Jakarta: PT. Gramedia

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KEBIJAKAN PENGEMBANGAN AREA PERMUKIMAN MELAYU MODEREN DI SIAK SRI INDRAPURA, PROVINSI RIAU

Fiki Angga Putra[1)] dan Puji Astuti[1)]

[1)]Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia

Email: fikiangga03@gmail.com

Naskah diterima :7 Maret 2017 Naskah direvisi : 12 Maret 2017 Disetujui terbit : 22 Maret 2017

ABSTRACT

Tak kan hilang melayu di bumi. Budaya Melayu Riau dijadikan sebagai tolak ukur dan pedoman didalam pembangunan permukiman yang dilaksanakan di Provinsi Riau.Akan tetapi seiring berkembangnya zaman, karakterisitk budaya Melayu pada tiap – tiap bangunan yang berada di kawasan permukiman *heritage* mulai menghilang. Hal tersebut menjadi masalah utama dalam pengembangan permukiman *heritage* di Kota Siak Sri Indrapura, dengan permintaan permukiman yang semakin meningkat menjadikan tuntutan pembangunan permukiman menjadi semakin besar di kawasan permukiman tersebut, dimana pada tahun 2013 jumlah rumah yang tersedia adalah 5.483 unit sedangkan kebutuhan rumah mencapai angka 6.854 unit sehingga dibutuhkan pembangunan perumahan sebanyak 1.371 unit.Tujuan dari perencanaan ini adalah untuk mewujudkan permukiman *heritage* yang maju, moderen, teratur, dan tetap mempertahankan nilai – nilai kebudayaan Melayu di setiap aspek pembangunan permukiman. Metode yang digunakan didalam penelitian ini menggunakan kaidah deduktif dengan menganalisis kebutuhan pembangunan permukiman dan infrastruktur dari tingkat kabupaten hingga kawasan permukiman *heritage*.Pembangunan permukiman moderen Melayu Riau di Kota Siak Sri Indrapura sangat dipengaruhi oleh faktor budaya / historis dengan melakukan penyeragaman bentuk depan rumah bersandar pada ciri khas rumah Melayu Riau, serta perlunya pengembangan transportasi air dan pengembangan *waterfront city* agar memiliki nilai ekonomis dan wisata bagi masyarakat setempat..
Kata Kunci : Heritage, Kebijakan, Melayu, Pengembangan, Perlindungan, Permukiman

PENDAHULUAN

Seiring dengan perkembangan zaman dan masuknya arus globalisasi menyebabkan seluruh sektor pada suatu kawasan atau wilayah terus mengalami pertumbuhan dan perkembangan dari waktu ke waktu.Salah satu sektor yang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah sektor permukiman.Pembangunan dan pemenuhan kebutuhan permukiman menjadi salah satu permasalahan utama di berbagai daerah terutama di Kota Siak Sri Indrapura.Kota ini merupakan ibukota dari Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang terkenal dengan budaya tradisional Melayu.Budaya melayu menjadi dasar dalam melaksanakan aktivitas masyarakat setempat baik dalam aktivitas ekonomi, sosial, budaya, serta kegiatan pembangunan. Sesuai dengan visi Kota Siak Sri Indrapura yaitu menjadi pusat budaya Melayu di Provinsi Riau menyebabkan seluruh kegiatan pembangunan di kota ini harus bertumpu pada budaya dan adat melayu Riau. Perkembangan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura tidak terlepas dari keberadaan istana kerajaan siak yang terdapat di pusat kota dan terletak dekat dengan Sungai Siak.

Seluruh aktivitas terpusat disekitar istana tersebut.Walaupun istana tidak lagi menjadi pusat pemerintahan dari Kota Siak Sri Indrapura, namun masyarakat setempat masih berpegang teguh terhadap adat istiadat dan kebijakan adat terkait dengan pembangunan permukiman.Salah satunya adalah tidak dibenarkan membangun permukiman atau rumah yang lebih tinggi dari pada istana tersebut.Masing – masing rumah harus mempertahankan bentuk rumah tradisional yaitu berbentuk rumah panggung dan menggunakan atas khah suku Melayu “Selaso Jatuh Kembar”.Beberapa gejala negatif yang tampah dari perkembangan zaman adalah hilangnya unsur – unsur budaya melayu pada masing – masing rumah masyarakat setempat.Hal ini didukung dengan kebijakan pembangunan permukiman di Kota Siak yang sekranag lebih berorientasi pada aspek moderinitas dan aspek teknis, sehingga aspek non teknis seperti aspek budaya dan sosial mulai memudar.

Hal ini menyebabkan permukiman heritage semakin tergusur dengan permukiman moderen yang lebih bersifat minimalis dan lebih hemat biaya. Beberapa kebijakan pembangunan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura juga cenderug setengah hati dalam melaksanakan kegiatan preservasi dan konservasi terhadap

kawasan permukiman hertigae di kota tersebut, salah satunya adalah Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D) Kabupaten Siak tahun 2014 yang belum mengakomodir pembangunan dan konservasi permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura. Beberapa kawasan permukiman heritage di kota ini mulai mengalami pengurangan luasan. Disuatu sisi, pembangunana permukiman heritage menjadi sangat penting karena permukiman ini menjadi symbol budaya yang dapat dikembangkan tidak hanya sebagai permukiman tetapi juga memiliki nilai lainnya terutama nilai ekonomi dan nilai pariwisata. Kebijakan pengembangan permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura akan dikembangkan berdasarkan budaya melayu menjadi kawasan permukiman melayu moderen melalui pendekaran preservasi dan konservasi. Kebijakan ini dilakukan guna menciptakan lingkungan permukiman melayu moderen yang nyaman dan juga dapat dijadikan peluang pariwisata agar masyarakat dapat hidup sejahtera untuk mewujudkan visi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah Kabupaten Siak.

KAJIAN PUSTAKA

Melayu Riau

Melayu Riau adalah salah satu dari banyak rumpun melayu yang ada di nusantara.Mereka berasal dari daerah Riau yang menyebar di seluruh wilayah sampai ke pulau-pulau terkecil yang termasuk dalam wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau.Wilayah kediaman mereka utama adalah di daerah Riau kepualuan, sebagian besar di Bengkalis, Indragiri Hulu, Kampar dan wilayah Pekanbaru yang merupakan kekuatan kerajaan Riau di masa lampau.Impreum Melayu Riau juga merupakan penyambung warisan Kedatuan Sriwijaya yang berbasis agama Buddha.Ini bukti ditemukannya Candi Muara Takus yang diduga merupakan pusat pemerintahan Sriwijaya, yang berasitektur menyerupai candi-candi di India.Kerajaan Melayu dimulai dari Kerajaan Bintan-Tumasik abad ke-12, disusul dengan periode Kesultanan-kesultanan melayu Islam.Kota Siak Sri Indrapura merupakan salah satu pusat pengembangan budaya melayu Riau di Provinsi Riau.

Bangunan Tradisional

Permukiman heritage secara umum dapat diartikan sebagai kawasan permukiman yang memiliki karakteristik bangunan tradisional berdasarkan budaya lokal setempat. Menurut Machmud (2006:180), rumah tradisional dapat diartikan sebuah rumah yang dibangun dengan cara yang sama oleh beberapa generasi. Istilah lain untuk rumah tradisional adalah rumah adat atau rumah rakyat. Kriteria dalam menilai keaslian rumah-rumah tradisional antara lain kebiasaan-kebiasaan yang menjadi suatu peraturan yang tidak tertulis saat rumah didirikan atau digunakan.ada ritual-ritual tertentu misalnya upacara pemancangan tiang pertama, selamatan/kenduri dan penentuan waktu yang tepat [6]. Selain hal tersebut, masih banyak tata cara atau aturan yang dipakai, misalnya arah hadap rumah, bentuk, warna, motif hiasan, bahan bangunan yang digunakan, tinggi rumah, sesajen, doa atau mantera yang harus dibaca dan sebagainya sangat erat dengan rumah tradisional [7].

Kajian Kebijakan Pembangunan

Kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura tidak terlepas dari kebijakan pembangunan permukiman yang telah ada dan berlaku di kota tersebut. secara umum kebijakan pembangunan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura terbagi menjadi dua yaitu kebijakan tradisional dan kebijakan pemerintahan. Masing – masing kebijakan memiliki hubungan satu sama lainnya, walaupun terdapat beberapa kebijakan pemerintah yang tidak sesuai dengan kebijakan tradisional yang ada di kota tersebut.

Kebijakan Tradisional

Kebijakan tradisional untuk pembangunan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura bersumber dari paraturan kerajaan siak.Namun kebijakan ini tidak lagi bersifat mengikat. Beberapa kebijakan tradisional terkait dengan pembangunan permukian heritage di kota ini adalah masing – masing rumah harus berbentuk rumah panggung dan tidak boleh lebih tinggi dari rumah raja, masing – masing rumah dilengkapi dengan motif melayu seperti pucuk rebung dan lain – lain dengan pewarnaan yang disesuikan dengan status sosial masyarakat, dan memiliki atap khas melayu yang disebut “Selaso Jatuh Kembar”. Kebijakan ini merupakan kebijakan umum yang telah diketahui oleh masyarakat di Kota Siak Sri Indrapura.Namun sebagai besar developer di Kota Siak Sri Indrapura tidak lagi membangun permukiman dengan nuansa Melayu tetapi lebih cenderung menggunakan tipe minimalis untuk menghemat biaya.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kebijakan Pemerintah

Kebijakan pemerintah terkait dengan pembangunana permukiman heritage bersumber pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. Dimana perlu dilakukan kegiatan preservasi dan konservasi terhadap kawasan perumahan dan permukiman yang bertipologi heritage dan berada pada kawasan cagar budaya.Kawasan permukiman ini berada di sekitar Istana Siak yang merupakan cagar budaya di Kabupaten Siak.Selain itu kegiatan pembangunana permukiman di Kota Siak juga merujuk pada RPJPD Kabupaten Siak Tahun 2005 – 2025, RPJMD Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2016, RTRW Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2031, dan RP4D Kabupaten Siak Tahun 2014. Beberapa kebijakan pembangunan dari pemerintah sudah mendukung kebijakan pembangunan tradisional dengan memprioritaskan kegiatan preservasi dan konservasi terhadap permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura, namun beberapa kebijakan lagi seperti RP4D Kabupaten Siak Tahun 2014 tidak sinkron dengan kegiatan pengembangan permukiman heritage di kota tersebut, karena kebijakan tersebut lebih beroeritentasi pada aspek teknis. Oleh karena itu perlu disusun kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura untuk menciptakan permukiman heritage yang tetap melestarikan budaya melayu, bernilai ekonomi, dan wisata [3].

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalan penelitian ini adalah pendekatan deduktif dengan menguraikan secara umum mengenai permukiman di Kota Siak Sri Indrapura kemudian menjelaskan secara rinci mengenai kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen sebagai salah satu permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura.Metode analisis yang digunakan bersifat kuantitatif dan kualitatif dengan analisis utama adalah analisis deskriptif, analisis scoring, analisis SWOT, analisis layout, analisis backlog, dan analisis infrastruktur permukiman[10].

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menyusun kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura dengan mempertahankan nilai tradisional melayu riau pada masing – masing bangunan rumah dan menjadi ciri khas tersendiri yang membedakan kawasan permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura dengan kawasan permukiman heritage lainnya. Hasil akhir dari penelitian ini adalah ditetapkannya kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen dan konsep pengembangan yang akan diterapkan pada kawasan permukiman heritage prioritas.

Objek Penelitian

Objek penelitian dalam penyusunan kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura berada pada kawasan administrasi Kota Siak Sri Indrapura.Kota Siak Sri Indrapura terdiri dari 10 desa / kelurahan. Kawasan perencanaan merupakan kawasan permukiman heritage yang terdapat di delapan lokasi yang berbeda pada masing – masing desa / kelurahan yang kemudian ditentukan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan yaitu kawasan permukiman heritage yang terdapat di Desa Kampung Dalam yang berbatasan langsung dengan Sungai Siak dan berada dekat dengan Istana Kerajaan Siak Sri Indrapura. Kota Siak Sri Indrapura berada di antara dua kecamatan yaitu Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura.

Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penyusunan kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen di Desa Kampung Dalam Kota Siak Sri Indrapura adalah data yang berkaitan erat dengan variabel penelitian yang telah ditentukan sebelumnya. Data – data tersebut berupa data kependudukan, jumlah perumahan, luas lahan permukiman heritage, tata guna lahan, lokasi dan kondisi permukiman heritage dan juga data infrastruktur permukiman di Kota Siak Sri Indrapura. Data – data tersebut kemudian akan dianalisis sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian ini. Data – data tersebut juga didukung dengan data kebijakan pembangunan permukiman yang diperoleh dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan instanti lainnya yang terkait dengan pengembangan dan pembangunan kawasan permukiman.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 1.Kerangka Metodologi Penelitian dari Kebijakan Pengembangan Permukiman Melayu Moderen di Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau

Tujuan: Menciptakan permukiman melayu modern yang layak huni di Kota Siak Sri Indrapura		
Aspek	Sasaran 1	Sasaran 2
Sasaran	Pembangunan rumah heritage melalui swadaya ataupun pengembangan yang tertata dengan baik dengan memperhatikan unsur budaya Melayu	Penyediaan sarana dan prasarana untuk meningkatkan kapasitas dan aksesibilitas permukiman heritage yang moderen
Variable	Pusat kegiatan Permukiman heritage	Infrastruktur permukiman Pusat kegiatan
Tujuan	Membangun permukiman yang bernilai melayu Riau	Memperbaiki dan menciptakan sarana dan prasarana permukiman melayu moderen yang memadai.
Teknik analisis	Analisis kependudukan, analisa backlog, analisa overlay	Analisa sarana dan prasarana
Jenis data	Data perumahan, data kependudukan	Data sarana dan prasarana

Sumber : Hasil Identifikasi Penulis, 2016.

Kerangka Penelitian

Data – data yang telah diperoleh baik melalui survei primer dan survei skeunder akan dianalisis untuk menentukan kebutuhan penangananan, strategi, dan program pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura. Selain itu juga akan ditentukan visi dan misi rencana pembangunan untuk menentukan arahan kebijakan dan sasaran pembangunan yang harus sesuai dengan dokumen pembangunan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura. Berdasarkan strategi dan program tersebut didapat konsep pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura sesuai dengan kebutuhan penanganan. Pada dasarnya konsep pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura ini memadukan konsep tradisional dan konsep water front city, sehingga kawasan permukiman tersebut juga memiliki nilai ekonomi dan nilai wisata. Jadi, pengembangan kawasan permukiman tersebut tidak hanya memenuhi kebutuhan akan perumahan dan permukiman tetapi juga melestarikan budaya melayu dan meningkatkan daya tarik wisata pada Kota Siak Sri Indrapura.

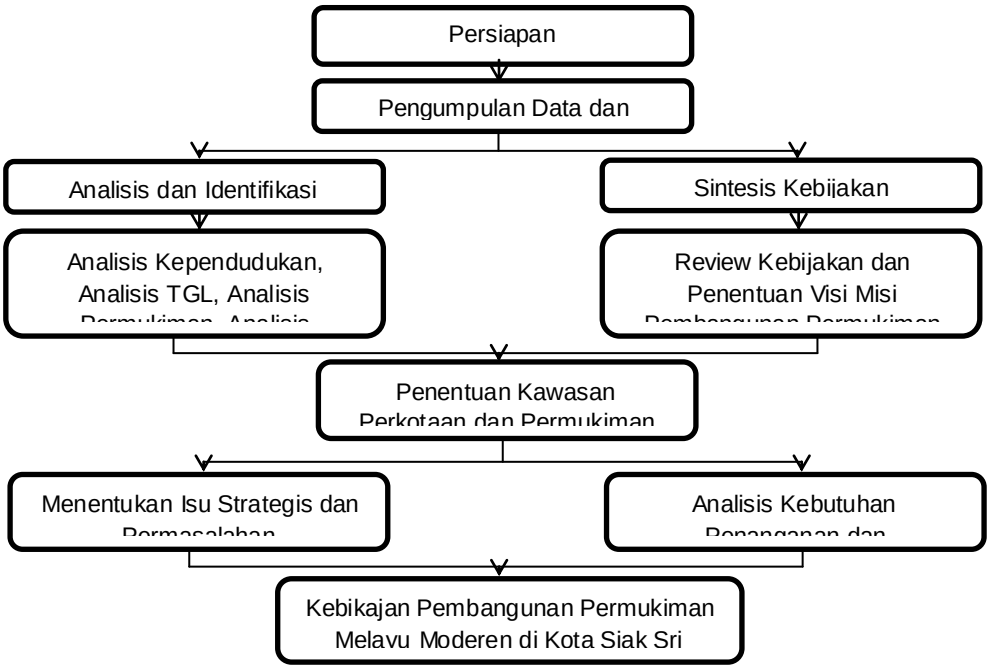

Gambar 1. Kerangka Penelitian dari Kebijakan Pengembangan Area Permukiman Melayu Moderen di Siak Sri Indrapura, Provinsi Riau

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

HASIL PENELITIAN

Kondisi Kependudukan dan Penggunaan Lahan

Sebagain besar penduduk di Kota Siak Sri Indrapura berupakan suku melayu asli yang sudah lama bertempat tinggal di kawasan ini.Penduduk tersebut berkelompok dan membentuk kawasan permukiman tersendiri dengan tetap mempertahankan budaya melayu pada masing – masing bangunan tempat tinggalnya.Masyarakat tradisional di kecamatan ini masih berkerja sebagai nelayan dan petani dengan memanfaatkan Sungai Siak sebagai sumber mata pencaharian utama dan sumber air untuk kegiatan pertanian maupun perkebunan. Pada tahun 2013 jumlah penduduk di Kota Siak Sri Indrapura berjumlah 31.708 Jiwa dan angka tersebu diperkirakan akan terus meningkat mencapai 69.214 jiwa pada tahun 2032 atau dengan persentase peningkatan jumlah penduduk sebesar 5% [5].

Tabel 2.Proyeksi Penduduk di Area Permukiman Melayu Siak Sri Indrapura dari 2013 – 2032

No.	Desa / Kelurahan	Luas (M^2)	Jumlah Penduduk (Jiwa)				
			2013	2017	2022	2027	2032
1.	Kampung Dalam	800	7.015	8.526	10.364	12.597	15.312
2.	Kampung Rempak	1.200	4.559	5.542	6.736	8.188	9.953
3.	Langkai	12.701	2.687	3.267	3.971	4.826	5.866
4.	Paluh	13.701	2.928	3.559	4.326	5.259	6.392
5.	Benteng Hulu	11.230	3.270	3.974	4.831	5.872	7.137
6.	Benteng Hilir	14.321	2.391	2.906	3.532	4.294	5.219
7.	Sei mempura	44.321	4.784	5.815	7.068	8.592	10.443
8.	Kampung Tengah	10.721	355	431	524	637	775
9.	Kota Ringin	4.620	1.200	1.458	1.773	2.154	2.619
10.	Suak Lanjut	15.600	2.519	3.061	3.721	4.523	5.498
Jumlah		129.215	31.708	38.541	46.847	56.942	69.214

Sumber : Hasil Analisis, 2016.

Tingkat ketergantungan di kecamatan ini cukup tinggi yaitu mencapai 78,4%. Kondisi ini menunjukkan jika jumlah penduduk tidak produktif yaitu penduduk usia>65 tahun atau <15 tahun dan penduduk tidak bekerja cukup tinggi. Dengan jumlah penduduk yang terus meningkat maka kebutuhan permukiman di kecamatan ini juga cenderung meningkat setiap tahunnya.Kepadatan penduduk yang belum cukup tinggi mendukung kegiatan pengembangan lahan untuk pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura.Kota Siak Sri Indrapura berada diantara dua kecamatan yaitu Kecamatan Siak dan Kecamatan Mempura [4]. Pusat kegiatan perekonomian berada di sekitar Istana Siak sedangkan pusat pemerintahan berada di wilayah selatan kota yang secara administrasi merupakan kawasan Kecamatan Mempura.

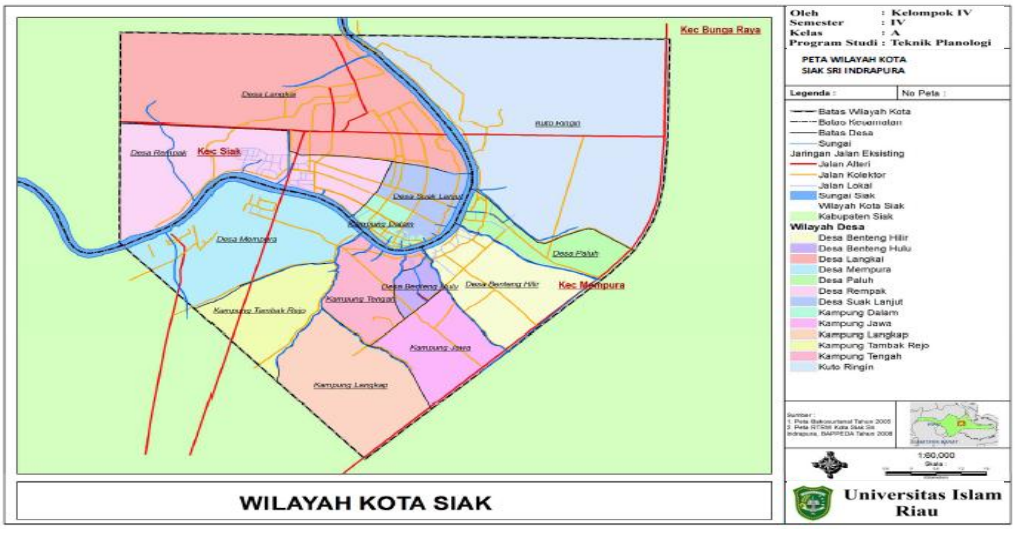

Gambar 2. Wilayah Administrasi Kota Siak Sri Indrapura (Sumber : Bappeda Kabupaten Siak Sri Indrapura, 2013)

ISBN : 978-602-73463-1-4

Disisi lain penggunaan lahan di Kota Siak Sri Indrapura juga sangat mendukung proses pembangunan dan pengembangan permukiman khususnya permukiman heritage. Dimana kawasan permukiman umumnya dijumpai dekat dengan pinggir sungai.Namun beberapa kawasan permukiman juga dapat dijumpai secara terpencar di bagian pedalam Kecamatan Sungai Siak.Penggunaan lahan di Kota Siak Sri Indrapura terdiri dari beberapa jenis pengunaan lahan yaitu kawasan budidaya da kawasan lindung. Dimana kawasan budidaya adalah kawasan permukiman, perdagangan, pertanian .perkebunan, dan Hutan Produksi. Kawasan lindung adalah kawasan sempadan sungai dan kawasan resapan air. Kawasan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura cukup luas yaitu mencapai 15% dari total luas lahan yaitu 19.382 M^2. Kondisi ini cukup mendukung kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman.Pada peta diatas dapat dilihat bahwa sebagai besar kawasan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura berada di kawasan pinggiran sungai dan tergolong kedalam kawasan permukiman heritage yang merupakan peninggalan masyarakat melayu asli Siak. Lokasi pengembangan dan pembangunan permukiman melayu moderen yang akan dilakukan berada dekat dengan Istana Siak dan berada di dekat tepian sungai siak. Pengembangan permukiman ini mengintegrasikan konsep permukiman tradisional dengan konsep water front city sehingga kawasan ini menjadi kawasan yang bernilai ekonomi dan wisata.Lokasi tersebut juga bebas banjir dan tidak rawan bencana.

Lokasi permukiman heritage yang akan dikembangkan di Kota Siak Sri Indrapura (Tanda Merah) berada pada lokasi yang sesuai untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman. Lokasi ini cukup strategis dan berada dekat dengan kawasn cagar budaya Kabupaten Siak yaitu Komplek Permukiman Raja. Jadi, penggunaan lahan di Kota Siak Sri Indrapura secara umum sangat mendukung untuk kegiatan pengembangan dan pembangunan permukiman melayu moderen dimasa yang akan datang.

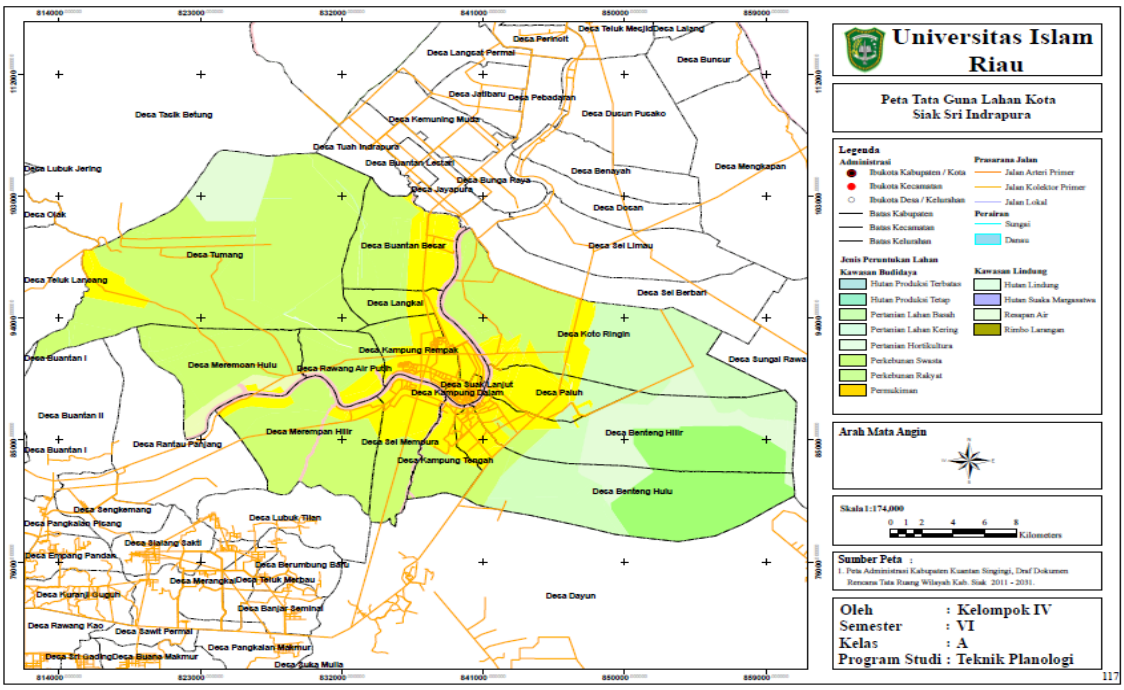

Gambar 3.Penggunaan Lahan Wilayah Kecamatan Siak (Sumber : Bappeda Siak, 2011)

The Priority of Heritage settlement Area

Kawasan permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura terdiri dari 6 area yang tersebar pada wilayah utara dan selatan kota. Kawasan permukiman heritage ini dapat dijumpai di Kota Ringin, Desa Langkai, Desa Kampung Dalam, Desa Rempak, Desa Kampung Tengah, dan Desa Benteng Hilir. Penetuan kawasan permukiman heritage yang akan dikembangkan sebagai kawasan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura menggunakan beberapa variabel dan indikator yaitu status kepemilikan lahan, tingkat aksesibilitas dan mobilitas, kondisi sarana dan prasarana, dan. aspek budaya melayu di masing – masing kawasan permukiman.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 3. Hasil Analisis Permukiman Melayu Prioritas

No.	Permukiman Heritage	Point	Rentang Orde	Orde
1.	Kota Ringin	103	Orde I (220 – 268), Orde II (172 – 267), Orde III (125 – 171), Orde IV (77 – 124)	IV
2.	Lankai	156		III
3.	Kampung Dalam	268		I
4.	Rempak	148		III
5.	Kampung Tengah	134		III
6.	Benteng Hilir	189		II

Sumber : Hasil Analisis, 2016.

Kawasan permukiman yang akan dikembangkan sebagai kawasan permukiman melayu moderen adalah kawasan permukiman heritage yang terdapat di Desa Kampung Dalam. Kawasan permukiman ini berada sangat dekat dengan Sungai Siak, Strategis, kawasan cagar budaya rumah raja, dan istana siak.Bangunan yang terdapat di kawasan permukiman ini masih menunjukkan unsur – unsur budaya melayu, namun sudah mulai tergeser oleh kawasan permukiman padat yang cenderung bersifat minimalis yang terdapat di sekitarnya.Beberapa rumah di kawasan ini merupakan rumah hulubalang kerajaan dan pembantu kerajaan siak.Kawasan permukiman heritage Kampung Dalam merupakan kawasan permukiman heritage yang paling tua jika dibandingkan dengan kawasan permukiman heritage lainnya di Kota Siak Sri Indrapura.Sebagian besar penduduk yang bertempat tinggal di kawasan ini berkerja sebagai nelayan dan pedagang.Penduduk setempat masih memegang adat setempat dan membangun rumah berbentuk panggung.Beberapa penduduk merupakan keturunan pembantu raja dari Kerajaan Siak Sri Indrapura atau termasuk kedalam permukiman tua.Berdasarkan hasil analisis skoring yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa keenam kawasan permukiman heritage terbagi menjadi empat orde, dimana orde satu menunjukkan kawasan prioritas.

a. Orde I (220 – 268) adalah Permukiman Heritage Kampung Dalam
b. Orde II (172 – 267) adalah Permukiman heritage Benteng Hilir
c. Orde III (125 – 171) adalah Permukiman Heritage Langkai, Rempak, dan Kampung Tengah.
d. Orde IV (77 – 124) adalah Permukiman Heritage Kota Ringin.

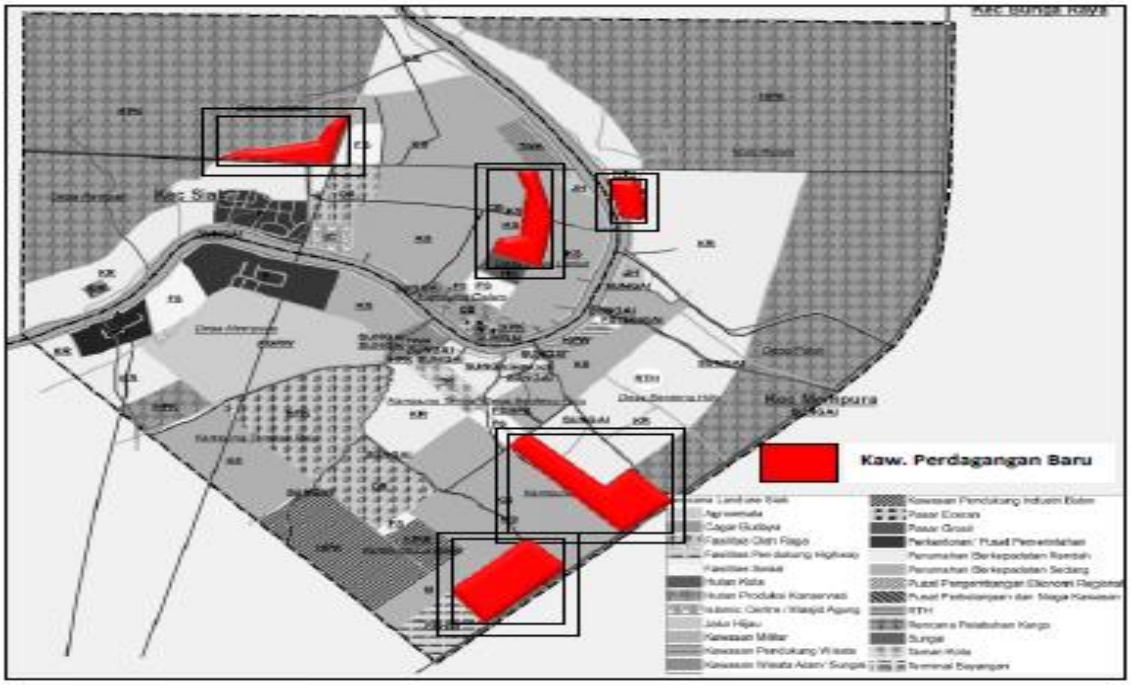

Gambar 4. Kawasan Permukiman Melayu Siak Sri Indrapura (Sumber : Survei, 2016).

Heritage Settlement Development Needs

Jumlah rumah heritage yang akan di bangun dan direservasi juga sangat penting terkait dengan kegiatan pembangunan kawasan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura. Analisis yang digunakan untuk mengetaui jumlah rumah heritage yang harus dibangun dan direservasi adalah analisis baklog.

Laju pertumbuha rumah tangga di Kota Siak Sri Indrapura adalah rata – rata sebesar 1,31%. Jumlah rumah tangga di Kota Siak Sri Indrapura pada tahun 2017 diperkirakan mencapai 9.635 KK sedangkan pada tahun 2032 adalah 17.304 KK. Jadi tentu dibutuhkan penyediakan rumah baru untuk memenuhi kebutuhan perumahan yang terus meningkat setiap tahunnya.Jumlah rumah yang tersedia pada tahun 2013 adalah berjumlah 6.854 unit.Berdasarkan analisis yang telah dilakukan sebelumnya diperoleh hasil bahwa kebutuhan untuk pembangunan dan pengembangan permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura terus meningkat setia tahunnya.Kebutuhan ini harus diakomodasi oleh strategi dan program pembangunan permukman di Kota Siak Sri Indrapura, sehingga konservasi dan preservasi terhadap permukiman heritage dapat terjaga.Setiap pembangunan perumahan di Kota Siak Sri Indrapura harus memiliki ciri khas Melayu Riau sebagai identitas lokal.Peningkatan kebutuhan pembangunan perumahan dan permukiman ini juga harus didukung oleh ketersediaan infrastruktur permukiman heritage.

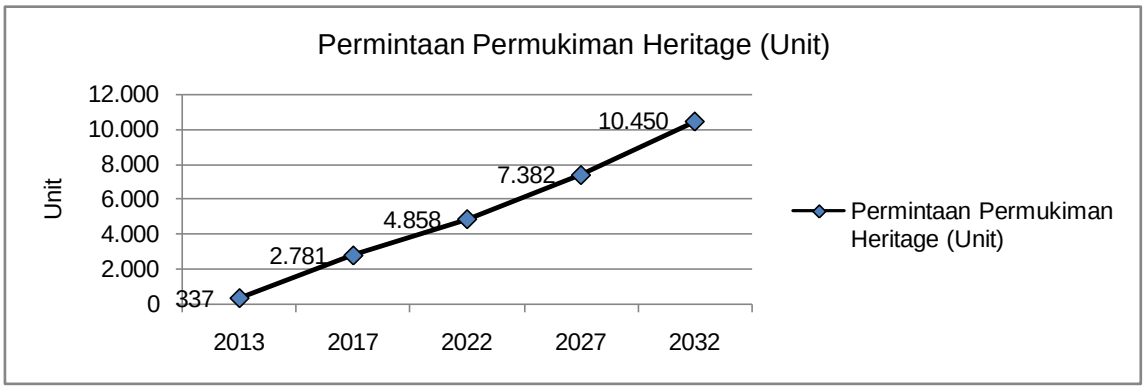

Gambar 5. Permintaan Permukiman Melayu Moderen Siak (Sumber : Analisis Backlog, 2016)

Kebutuhan Infrastruktur Permukiman Heritage Melayu Moderen Siak

Infrastruktur menjadi aspek penunjang dan pendukung berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan di Kawasan permukiman heritage. Analisis terhadap kebutuhan infrastruktur dilakukan dengan menggunakan Standar Negara Indonesia (SNI) 03 – 1733 – 1989 Tentang Tata Cara Perencanaan Kawasan Perumahan Kota.secara umum kondisi infrastruktur di kawasan permukiman heritage Kampung Dalam cukup baik dan mendukung kegiatan pembangunan permukiman melayu moderen di kawasan ini.

Tabel 4. Kebutuhan Infrastruktur Permukiman Melayu Moderen Tahun 2032

No.	Infrastructur	Kebutuhan Infrastruktur Tahun 2032
1.	Sarana Pendidikan	14 Unit Taman Kanak – Kanak, 6 Unit Sekolah Dasar, dan 4 Unit Sekolah Menengah Atas
2.	Sarana Kesehatan	10 Unit Posyandu
3.	Sarana Peribadatan	1 Unit Gereja dan Vihara
4.	Jalan dan Drainase	Pembangunan 196 Km Jalan dan 392 Km Drainase
5.	Instalasi Air Bersih	Penyediaan 1.576.420 Liter/ Hari Air Bersih
6.	Managemen Sampah	21 Unit Bin Sampah dan 1 Unit Instalasi Pengolah Sampah
7.	Instalasi Sanitasi	1 Unit Instalasii Sanitasi
8.	Listrik dan Telekomunikasi	1 Unit PLTD dan 1 Unit Pusat Internet

Sumber : Hasil Analisis Infrastruktur Permukiman Kampung Baru Heritage, 2016.

Secara fungsional, Kawasan permukiman ini berada dekat dengan pusat pemerintahan Kabupaten Siak sehingga distribusi infrastruktur di kawasan permukiman ini cukup baik dan merata, jika dibandingkan dengan kawasan permukiman lainnya di Kota Siak Sri Indrapura.Kawasan permukiman ini telah terintegrasi dengan sistem persampahan, sanitasi, dan air bersih Kota Siak Sri Indrapura.Jadi kawasan permukiman ini sangat layak untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman melayu yang moderen didukung dengan infrastruktur permukiman yang memadai.Seluruh infrastruktur permukiman di kawasan permukiman ini sudah terbilang lengkap.Permasalahan terkait dengan infrastruktur permukiman adalah tingkat pelayanan yang belum optimal

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

khususnya infrastruktur dasar yaitu air bersih dan sanitasi yang belum mencapai 80% pelayanan.Kondisi dari masing – masing infrastruktur permukiman di Kota Siak Sri Indrapura dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

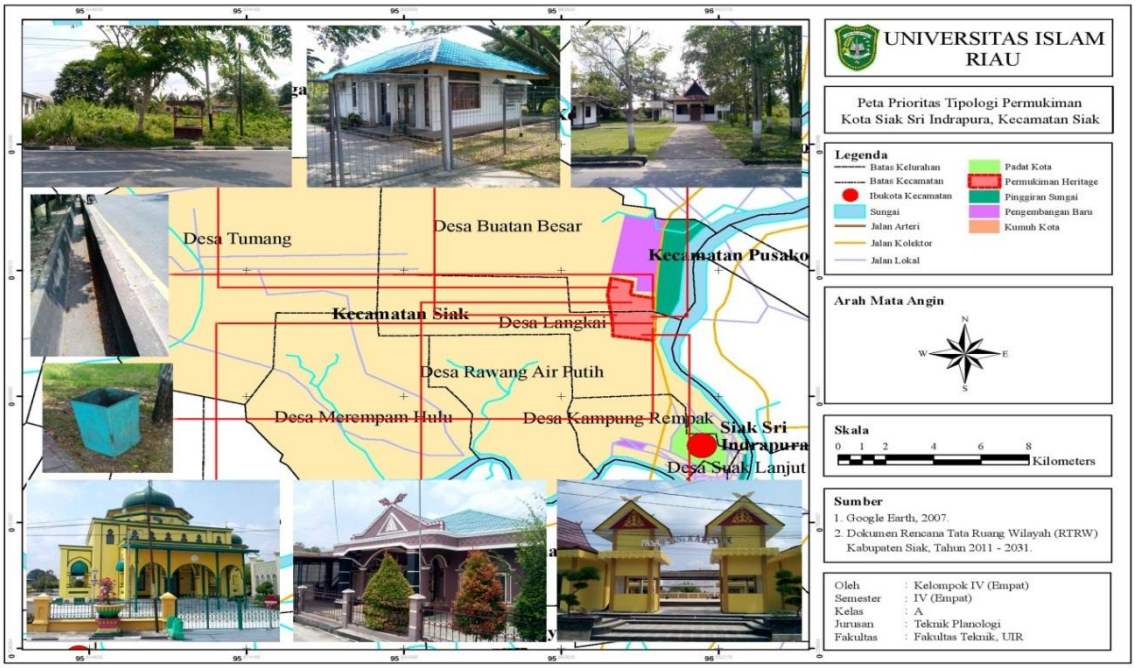

Gambar 6. Kondisi Infrastruktur Permukiman Heritage di Siak Sri Indrapura (Sumber : Observasi dan Dokumentasi Penulis, 2016)

Strategi dan Program Pengembangan Permukiman Melayu Moderen Siak

Strategi dan program pembangunan permukiman melayu moderan didapat dari analisis SWOT yang dilakukan pada kawasan permukiman heritage Kampung Dalam yang berlokasi di Jalan DR. Soetomo Kota Siak Sri Indrapura.Analisis ini melibatkan faktor internal yang terdiri dari kekuantan dan kelemahan dan juga faktor eksternal yang terdiri dari peluang dan ancaman.Kawasan permukiman heritage Kampung Dalam pada dasarnya berpeluang untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman melayu moderen karena potensinya yang besar dan dapat dikembangkan sebagai kawasan pusat pertumbuhan ekonomi.Kawasan permukiman ini juga dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan di Kota Siak Sri Indrapura.Analisis SWOT dilakukan untuk mengetahui kebutuhan penanganan dan pembangunan yang paling tepat sesuai dengan kondisi pada kawasan permukiman heritage yang terdapat di Kampung Dalam.Hasil analisis ini kemudian dijadikan rujukan dalam penyusunan strategi dan program pembangunan permukiman melayu moderndi Kota Siak Sri Indrapura [8].

Table 5.Analisis SWOT Kebijakan Pengembangan Permukiman Melayu Moderen di Siak Sri Indrapura

		Faktor Eksternal	
		Opportunity (Peluang)	*Threats* (Ancaman)
Faktor Internal	*Strenghts* (Kekuatan)	A. Meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya melayu pada bangunan permukiman heritage yang ada di Kota Siak Sri Indrapura. B. Perlunya pembangunan permukiman layak huni untuk mengatasi permasalahan permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura. C. Perlunya peningkatan kualitas kelembagaan masyarakat untuk mengatasi permasalahan permukiman heritage. D. Mengoptimalkan kondisi lingkungan permukiman karena lokasi yang cukup strategi, sehingga mendukung perkembangan dan pembangunan kawasan.	A. Perlunya pembangunan taman bermain anak agar kawasan permukiman menjadi layak bagi anak. B. Perlunya pembangunan jaringan drainase untuk mengatasi ancaman banjir yang mungkin terjadi. C. Perlunya perluasan jaringan jalan untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas permukiman. D. Perlu adanya pembangunan Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) untuk menyelesaikan permasalahan timbulan sampah di kawasan permukiman heritage kota di Kota Siak Sri Indrapura.
Faktor Internal	*Weakness* (Kelemahan)	A. Perlu dilakukannya konsolidasi lahan untuk menata kembali kawasan permukiman heritage kota agar menjadi lebih teratur. B. Pengawasan terhadap penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). C. Perlunya revitalisasi bangunan yang bersifat tidak permanen dan tidak layak huni. D. Perlunya kegiatan sosialisasi mengenai pentingnya kepemiliki surat tanah dan hak guna bangunan bagi masyarakat.	A. Harus adanya peningkatan kuantitas dan kualitas terhadap infrastruktur pendukung di kawasan permukiman heritage B. Melakukan perawatan secara berkala terhadap sarana dan prasarana permukiman untuk mengurangi dampak negative yang mungkin akan timbul pada kawasan permukiman heritage kota. C. Perlunya perencanaan kawasan permukiman heritage kota dengan memperhatikan aspek fisik dan non fisik kawasan

Sumber : Hasil Analisis, 2016.

Berdasarkan analisis dan identifikasi kondisi internal dan eksternal maka dapat dirumuskan visi dan beberapa misi sebagai wujud kebijakan pembangunan permukiman heritage moderen di Kota Siak Sri Indrapura.Visi dan misi tersebut menjadi dasar dalam penentuan strategi dan program pembangunan permukiman heritage prioeritas di Kampung Dalam. Visi dari pembangunan ini adalah "Terwujudnya Permukiman Melayu Moderen di Kota Siak Sri Indrapura yang Teratur, Berwawasan Melayu, dan Berkelanjutan didukung dengan Infrastruktur Permukiman yang Baik Tahun 2032". Visi tersebut kemudian dijabarkan menjadi beberapa misi.Misi prioritas adalah mewujudkan permukiman heritage yang bercirikan melayu di Kpta Siak Sri Indrapura yang layak huni dengan tetap menjunjung tinggi adat istiadat setempat.Kebijakan pembangunan permukimam melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura diimplementasikan dalam strategi dan program pembangunan permukiman melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 6. Strategi dan Program Pengembangan Permukiman Melayu Moderen di Siak Sri Indrapura

Strategi	Program	Periode				Pelaksana	Sumber Dana	Lokasi
		I	II	III	IV			
Meningkatkan dan mempertahankan nilai-nilai budaya melayu pada bangunan permukiman *heritage* yang ada di Kota Siak Sri Indrapura.	Program pembangunan rumah yang berbasis budaya Melayu Siak	X	X	X	X	Bankim dan PU	APBD	Jalan DR. Sutomo, Kota Siak Sri Indrapura
Membangun jaringan transportasi berupa kanal untuk meningkatkan transportasi lokal dan penunjang pariwisata	Program pembangunan jaringan transprtasi perairan.	X		X		Bappeda dan PU	APBD	

Sumber : Hasil Analisis, 2015

Strategi dan program pada tabel diatas akan dilaksanakan sesuai dengan periode, pelaksana, sumber dana, dan lokasi yang telah ditetapkan dan juga menjadi induk strategi dan program pembangunan permukiman melayu moderen yang akan dilaksanakan di Kota Siak Sri Indrapura. Strategi dan program tersebut memiliki orientasi pada aspek fisik dan non fisik untuk menunjang perkembangan permukiman melayu moderen Kampugn Dalam.Program pembangunan permukiman melayu moderen menjadi program unggulan dalam dokumen Strategi Pembangunan Permukiman dan Infrastruktur Permukiman di Kota Siak Sri Indrapura.Strategi dan program ini kemudian direalisasikan kedalam konsep pengembangan yang menjadi acuan dalam pengembangan permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura.yaitu konsep pembangunan dan pengembangan permukiman melayu moderen di kota tersebut. Strategi dan program ini juga bertujuan untuk mereservasi dan melestarikan nilai budaya yang terdapat pada masing – masing bangunan di Kota Siak Sri Indrapura. Jadi, pembangunan yang dilaksanakan tidak akan mengancam budaya lokal dan tradisional setempat.

Konsep Pengembangan Permukiman Melayu Moderen Siak Sri Indrapura

Berdasarkan strategi dan program pembangunan permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura tidak hanya terfokus pada kegiatan pembangunan infrastruktur yang merupakan aspek fisik dari perumahan tetapi juga aspek non fisik yaitu sektor budaya dan sosial. Konsep ini bertujuan untuk mempertahaknkan nilai luhur budaya Melayu Riau . Berdasarkan teknik overlay yang dilakukan maka kawasan permukiman heritage kampung dalam cukup potensial untuk dikembangkan sebagai kawasan permukiman melayu modern. Lokasi ini sangat strategis.Jika dilihat melalui pola perkembangannya maka dari awal wilayah studi tumbuh secara linear yang tumbuh di sepanjang jalan utama, dan sepanjang pinggir Sungai Siak. Rute-rute transportasi dari segala penjuru memusat ke zona ini sehingga zona ini merupakan zona dengan derajat aksesibilitas tinggi.Kawasan ini umumnya dilewati oleh sungai terdalam di Indonesia yaitu Sungai Siak. Kawasan permukiman *heritage* yang direncanakan ini dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu kawasan permukiman, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan peruntukkan fasilitas sosial dan hiburan [1].

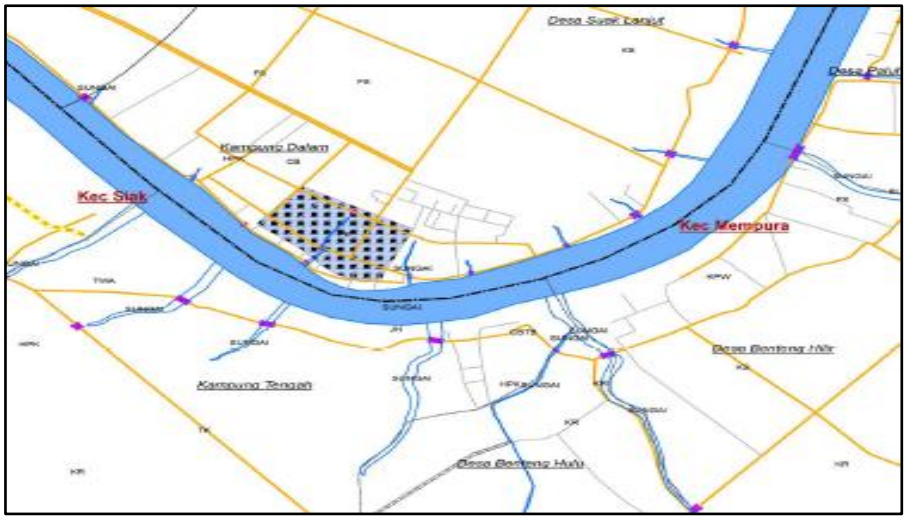

Gambar 7. Lokasi Permukiman Melayu Moderen Prioritas (Sumber : Hasil Perencanaan, 2016)

ISBN : 978-602-73463-1-4

Di dalam perencanaan ini juga, dirancang sebuah kanal yang dapat menghubungkan daratan ke sungai besar, kanal ini berguna untuk mengaktifkan kembali transportasi lokal yang bisa menjadi penunjang pariwisata yang ada di kawasan tersebut, juga memudahkan masyarakat pedalaman menuju ke pusat kegiatan. Kawasan permukiman *heritage* yang dikembangkan dan dibangun dengan berlandaskan pada nilai-nilai budaya Melayu dengan membuat komplek rumah panggung yang dapat digunakan sebagai penunjang pariwisata, juga sebagai rumah bantuan bagi masyarakat miskin.Kawasan permukiman *heritage* yang direncanakan sangat menjunjung tinggi nilai-nilai budaya Melayu, yaitu melalui bentuk fisik bangunan yang dirancang berbentuk panggung dengan corak Melayu. Menurut analisis yang dilakukan, akan dibangun sekitar 24.006 unit rumah tahun 2013, pembangunan permukiman *heritage* ini berada di bagian hulu dan hilir kawasan rencana, dengan masing-masing luas 14,5 × 15,5 m^2 [2]. Pada kawasan perencanaan juga direncanakan pembangunan perdagangan dan jasa berupa toko-toko yang menjual kerajinan tangan dan barang-barang yang berciri khas Melayu Siak, di kawasan ini juga dibangun *homestay* yang masing-masing bangunannya melambangkan semua rumah adat yang ada di Provinsi Riau, dibangun *homestay* di kawasan ini, karena selain digunakan untuk peruntukkan perdagangan dan jasa juga diperuntukkan sebagai lokasi wisata, karena bangunan perdagangan dan jasa ini terletak di sepanjang kanal yang akan dibuat, serta di tengah kanal yang direncanakan akan dibangun tempat pusat kesenian budaya Melayu.

(a) (b)

Gambar 8. Konsep Pengembangan Permukiman Melayu Moderen Siak Sri Indrapura (a) dan Pusat Kebudayaan Melayu Siak Sri Indrapura (b) (Sumber : Hasil Perencanaan, 2016)

DISKUSI TOPIK

Perbandingan Kebijakan Permukiman Antara Kebijakan Adat dan Pemerintah

Kebijakan pembangunan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura mengacu kepada kebijakan pembangunan dari pemerintah dan kebijakan pembangunan tradisional[9].Perlu dilakukan integrasi antara kebijakan pembangunan dari pemerintah dan kebijakan tradisional yang sudah ada di masyarakat tradisional Melayu Riau.Kebijakan pembangunan permukiman dari pemerintah cenderung bersifat teknis sedangkan kebijakan pembangunan tradisional yang bersifat non teknis berupa budaya dan sosial.Jadi dengan mengitegrasikan antara kedua kebijakan ini maka kegiatan pembangunan permukiman melayu moderen dapat dilaksanakan di Kota Siak Sri Indrapura.Walaupun sekarang ini antara kedua kebijakan tersebut masih saling bertolak belakang, namun sudah terdapat kesadaran dari pemerintah untuk kembali merevitalisasi dan melestarikan permukiman heritage [11].

Tantangan dalam Mengembangkan Permukiman Melayu Moderen Siak

Pembangunan dan pengembangan permukiman Melayu moderen di Kota Siak Sri Indrapura menghadapi beberapa permasalahan berupa kurangnya kesadaran pihak developer untuk membangun kawasan permukiman heritage atau mempertahankan nilai – nilai Melayu pada setiap bangunan.Hal ini disebabkan oleh beberapa alasan seperti biaya, efisiensi lahan, dan tuntutan zaman. Luas lahan permukiman heritage khususnya di Kampung Dalam telah mengalami pengurangan, karena sebagian besar rumah telah menjadi permukiman padat kota. Selain itu biaya untuk membangun dan merawat rumah dengan karakteristik melayu membutuhkan biaya yang lebih besar. Status tanah disekitar istana juga merupakan milik kerajaan sehingga upaya perluasan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

kawasan permukiman juga akan menghadapi beberapa permasalahan. Selain itu tantangan lainnya adalah pengembangan sisten transportasi air terpadu di kawasan tersebut.

(a)

(b)

Gambar 9. Permasalahan Ketersediaan Lahan (a) dan Tantangan Pengembangan Transportasi Air Terintegrasi (Sumber : Hasil Rencana, 2016)

Dampak Konsep Terhadap Ekonomi

Pengembangan permukiman melayu moderen tentu akan menarik wisatawan untuk berkunjung di kawasan ini. Kawasan permukiman Melayu moderen yang akan dibangun berada tepat ditepian Sungai Siak dan berada pada kawasan cagar budaya Istana Siak. Jadi, kawasan ini akan menjadi destinasi utama di Kota Siak Sri Indrapura. Selain itu, kawasan permukiman ini juga memiliki nilai ekonomis, dimana pada kawasan ini akan dibangun pusat perdagangan dan jasa bernuansa melayu yang menjual cinderamata dan makana khas Melayu Riau. Perekonomian masyarakat setempat juga akan terus mengalami petumbuhan dan kesejahteraan masyarakat akan meningkat. Pertumbuhan ekonomi ini juga didukung dengan dimanfaatkan kanak – kanal kerajan sebagai saluran transportasi perahu kecil yang menghubungkan permukiman penduduk bagian pedalaman dengan pusat permukiman melayu moderen. Jadi kegiatan perekonomina akan terus berkembang melalui penerapan konsep heritage ini[12].

KESIMPULAN

Kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen sangat dibutuhkan untuk mengembangan dan melindungi kawasan permukiman heritage yang terdapat di Kota Siak Sri Indrapura. Kawasan permukiman melayu moderen yang akan dikembangkan adalah kawasan permukiman heritage yang terdapat di Kampung Dalam. Kawasan ini sangat berpotensi untuk dikembangkan baik dari aspek fisik dan non fisik. Pengembangan kawasan permukiman melayu moderen juga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut melalui pengitegrasian kawasan permukiman dengan perdagangan dan jasa di kawasan tersebut. Nilai – nilau budaya Melayu pada masing – masing bangunan di permukiman heritage akan menjadi peluang ekonomi dan wisata yang dapat meningkatkan pendapat penduduk setempat. Selain itu, dibutuhkan pengitegrasikan kebijakan pemerintah saat ini dengan kebijakan tradisional yang berlaku dalam masyarakat melayu tradisional sehingga kegiatan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.Pada dasarnya kebijakan pembanguan permukiman melayu moderen ini beroritentasi pada upaya untuk mereservasi dan melestariakn permukiman heritage di Kota Siak Sri Indrapura, sehingga kawasan permukiman heritage menjadi kawasan yang menarik, layak huni, dan berketahanan. Prioritas dari kebijakan pembangunan permukiman melayu moderen adalah meningkatkan dan mempertahankan nilai budaya melayu pada bangunan permukiman di Kota Siak Sri Indrapura dan membangun jaringan transportasi berupa kanal untuk mengembangkan transportasi lokal dan juga menunjang kegiatan ekonomi dan pariwisata.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada Ibu Puji Astuti dan Ibu Cihe Aprilia Bintang yang telah memberikan pendapat, saran dan kritik terhadap paper ini hingga selesai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bapppeda Kabupaten Siak, (2007).Dokumen Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) kecamatan di Kabupaten Siak.Siak Sri Indrapura, Bappeda Kabupaten Siak.

[2]Bappeda Kabupaten Siak, (2011).Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2016. Siak Sri Indrapura, Bappeda Kabupaten Siak.

[3]Bappeda Kabupaten Siak, (2005). Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Siak Tahun 2005 – 2025.Siak Sri Indrapura, Bappeda Kabupaten Siak.

[4]Bappeda Kabupaten Siak, (2011).Dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Siak Tahun 2011 – 2031.Siak Sri Indrapura, Bappeda Kabupaten Siak.

[5]Bappeda Kabupaten Siak, (2013). Profil Kota Siak. Siak Sri Indrapura, Bappeda Kabupaten Siak.

[6]BPS, (2014). Kabupaten Siak Dalam Angka 2014. Siak Sri Indrapura : Badan Pusat Statistik Kabupaten Siak.

[7]Direktorat Pengembangan Permukiman, (2007). Buku Panduan Pengembangan Permukiman. Jakarta ,Kementerian Pekerjaan Umum.

[8]Direktorat Pengembangan Permukiman., (2014). Kebijakan dan Strategi Pengembangan Permukiman Tahun 2014. Jakarta, Kementerian PU.

[9]Direktorat Pengembangan Permukiman, (2006). Konsep Pedoman Identifikasi Kawasan Permukiman Kumuh. Jakarta, Kementerian Pekerjaan Umum.

[10]Machmud, (2006). Bangunan – Bangunan Tradional Melayu. Seroja Press, Pekanbaru.

[11]Kementerian Pekerjaan Umum, (2013). Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perkotaan. Sari Ater : Kementrian Pekerjaan Umum.

[12]Kementerian Negara Perumahan dan Permukiman, (1999). Keputusan Menteri Negara Perumahan dan Permukiman No.09/KPTS/M/IX/1999 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman di Daerah (RP4D).Jakarta, Kementerian Negara Perumahan dan Permukiman.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

SPIRITUALITAS RUANG TONGKONAN KAMPUNG ADAT TUA SILLANAN – TORAJA

Imam Indratno[1)], Sudaryono[2)], Bakti Setiawan[3)], Kawik Sugiana[4)]

1) Mahasiswa program S3, Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gajah Mada
2), 3), 4) Promotor dan Ko Promotor, Departemen Arsitektur dan Perencanaan, Universitas Gajah Mada

Email : akudandiriku1@gmail.com

Naskah diterima :15 Desember 2016 Naskah direvisi : 2 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Paradigma fenomenologi mulai mengisi bagian paradigma perencanaan pada dua dekade belakangan. Paradigma fenomenologi meletakkan kesadaran transendental sebagai obyek kajian. Kesatuan subyek dan obyek dalam memandang realitas telah mentransformasi pandangan positivisme yang memiliki konsep dualitas realitas. Kesadaran transendental merupakan dimensi terpenting dari spiritualitas yang menjadi fokus dari penelitian. Dengan mengambil tongkonan sebagai obyek penelitian di Sillanan Kabupaten Tana Toraja.Hasil penelitian memperoleh berbagai fenomena, kesakralan, arti dan makna terdalam dari tongkonan, serta konsep lokal berbasis budaya tongkonan. Penelitian menunjukkan bahwa realitas tongkonan terbentuk atas dua lapisan ruang yaitu lapisan horisontal dan lapisan vertikal. Pada lapisan horisontal terdapat ruang sakral pada Tongkonan Doa sedangkan pada lapisan vertikal terdapat empat lapisan yang berbentuk holarki yaitu : ruang tondok, ruang ada', ruang aluk, dan ruang penawa. Adapun spirit kebudayaan berbasis tongkonan dibangun oleh kecintaan kepada leluhur (madoang) sebagai bentuk kesadaran transendental individu dan persekutuan (toma'rapu) sebagai bentuk kesadaran transendental komunal.

Kata kunci: *kesadaran, tongkonan, fenomenologi*

PENDAHULUAN

Sudaryono selalu menjelaskan bahwa setiap penelitian perlu mengenali payung filsafatnya [1]. Paradigma yang memayungi teori perencanaan dimulai dari utopianisme, positivisme, rasionalisme, postmodernisme, sampai fenomenologi. Dalam bidang perencanaan, paradigma utopianisme muncul seiring dengan respon terhadap revolusi industri yang tidak memperhatikan aspek ruang (lingkungan). Paradigma ini mendorong munculnya gagasan tentang *Garden City* oleh Ebenezer Howard pada tahun 1898. Teori berikutnya yang berkembang adalah *City Development* dari Patrick Geddes pada tahun 1904, *Planning the Modern City* dari Lewis Mumford tahun 1916 dan *The City of Tomorrow and Its Planning* dari Le Corbusier pada tahun 1929 [2].

Pada tahap berikutnya, teori perencanaan berkembang berbasis pada paradigma positivisme yang ditandai dengan munculnya perencanaan prosedural dari Faludi pada tahun 1973. Perencanaan yang berbasis pada positivisme selanjutnya berkembang dengan munculnya gagasan tentang perencanaan komprehensif dari Beauregard pada tahun 1984. Beberapa tipe perencanaan yang berbasis pada paradigma kritik dikembangkan oleh Friedmann (1987), Innes (1994), Sager (1994), Healey (1996), dan Forester (1999).Pada dua dekade terakhir, perencanaan diilhami oleh dua paradigma yang berkembang yaitu paradigma postmodernisme dan fenomenologi. Pandangan dunia postmodernisme telah melahirkan beberapa pandangan dimulai dari Beaureregard (1989) diikuti oleh Almendinger (2001), dan Ines (2010). Dalam *Toward Cosmopolis*, Sandercock menjelaskan [3] bahwa matinya peramalan dalam perencanaan modern, berimplikasi pada kebutuhan akan pertimbangan lingkungan, komunitas, diversitas budaya, dan spirit manusia dalam proses perencanaan. Model perencanaan lama yang mendasarkan pada pengambilan keputusan publik secara rasional, pendekatan komprehensif, paradigma sains positif yang menekankan analisis kuantitatif, perencanaan langsung oleh otoritas negara, dan mengoperasikan pada domain publik telah mengalami pergeseran ke arah perencanaan kosmopolis yang menyarankan pentingnya diversitas dalam komunitas. Apabila paradigma postmodernisme telah mendorong perencanaan ke arah pertimbangan keragaman budaya ataupun pengetahuan lokal subyek perencanaan, maka paradigma fenomenologi menitikberatkan pada kesenjangan subyek dan obyek

perencanaan. Husserl [4] secara epistemologis berusaha menunjukkan pentingnya dunia yang dihayati melalui konsep *evidenz* (kehadiran). Kehadiran didapat melalui tindak kesadaran pada obyek pikiran. Sedangkan perspektif ontologi dalam fenomenologi telah dikembangkan oleh Heidegger.

Di samping kesadaran, spiritualitas juga menjelaskan tentang pencarian nilai terdalam ataupun arti untuk mendapatkan kehadiran Ilahiah dalam kehidupan sehari-hari. Spiritualitas akan berkaitan dengan pencarian kesakralan yang lebih bersifat transenden ataupun transpersonal. Transenden sendiri merupakan sebuah dimensi hendak dicapai diluar kategori bahasa manusia atau indera manusia. Dari beberapa uraian tersebut tampak bahwa spiritualitas adalah kompleksitas dimensi batin (esoterik) yang termanifestasi dalam kehidupan manusia, biasanya menjelaskan pertanyaan-pertanyaan dasar kehidupan. Tujuan penulisan makalah ini adalah **menemukenali spiritualitas ruang *tongkonan*KampungAdat Tua Sillanan- Tana Toraja**.

KAJIAN TEORITIS

Konsepsi dasar spiritualitas meletakkan pemahaman bahwa realitas membentang dari sesuatu yang bersifat fisik sampai metafisik. Dalam pandangan Ibnu Arabi bahwa rasio mempunyai dua kekuatan yaitu kekuatan bawah dan kekuatan atas. Kekuatan bawah berhubungan dengan panca indera dan pikiran. Kekuatan atas merupakan akal murni pemberian dari *Al Haqq* karena *ma'rifat* kepadanya [5]. Spiritualitas merupakan pencarian arti, suatu keinginan untuk mengetahui hidup dalam hubungan dengan keberadaan yang paling tinggi (*Ultimate Being*). David Steindl – Rast (1591) dalam Canda (2010) mendefinisikan spiritualitassebagai " sebuah wawasan yang mana pencarian terus menerus untuk menemukan tempatnya". Spiritualitas juga diartikan sebagai sebuah pencarian bagi peleburan diri, sebuah pertemuan dengan misteri, atau sebuah perasaan tentang *interkoneksi* universal. Spiritualitas juga dapat dipandang sebagai perhatian kepada kehadiran Ilahiah dalam setiap orang dan dalam semua aspek kehidupan sehari – hari. Faiver, Ingersall, O'Brien & Mc Nally (2001) dalam Canda [6]mengaitkan spiritualitas dengan *sense* yang lebih dalam tentang keseluruhan (*wholeness*), keterhubungan dan keterbukaan pada yang tak terbatas (*the infinite*).

Spiritualitas dalam kebudayaan Toraja tercermin dalam sistem kepercayaan masyarakat. Perwujudan dari kepercayaan *Aluk Todolo* secara nyata dapat dijumpai pada bangunan tradisional masyarakat Toraja yang dikenal dengan nama *tongkonan*. *Tongkonan* sendiri berasal dari bahasa Toraja "*tongkon*" yang berarti duduk. Masyarakat Toraja sendiri mengartikan *tongkonan*sebagai "rumah yang diberi fungsi, tugas dan kewajiban", atau suatu sistem kelembagaan dalam keluarga.Kobongmenjelaskan [7] bahwa *tongkonan* tidak sekedar rumah keluarga besar atau rumah adat, tetapi *tongkonan* juga berfungsi sebagai tempat orang membicarakan atau menyelenggarakan urusan adat maupun memelihara persekutuan kaum kerabat.

Orientasi *tongkonan* selalu menghadap ke utara sebagai simbol penghormatan pada *PuangMatua*. Bagian selatan menghadap ke arah *pollo'banua* atau *puya*, sebagai representasi hubungan dengan para leluhur dan kehidupan setelah kematian. Arah barat dan timur menggambarkan bagian kiri dan kanan tubuh, selain itu bagian timur juga melambangkan hubungan dengan para dewa, sedangkan di bagian barat melambangkan hubungan dengan para leluhur yang dihormati. Kehidupan pada suatu kesatuan adat dalam *tongkonan* (persekutuan keluarga) dan dalam diri individu setiap orang dianggap sebagai simbol dari mikrokosmos. Klasifikasi mikrokosmos sebagai replika dari makrokosmos atas timur-barat, utara-selatan, atas-tengah-bawah, dianggap berpusat di *tongkonan* dalam satu kesatuan adat. Untuk satu keluarga disimbolkan oleh *tongkonan* berpusat pada tiang utama (*aririposi'*) dari *tongkonan* tersebut dan pada diri individu dianggap berpusat pada pusat manusia.Klasifikasi kosmos tersebut dimanifestasikan dalam mikrokosmos seperti diri manusia dan *tongkonan*. Manusia dianggap sebagai simbol dari kosmos, yaitu kepala dianggap sebagai *ulunnalino*, bagian bawah manusia dianggap sebagai *pollo'nalino*, bagian kanan manusia dianggap *matallo* dan bagian kiri dianggap sebagai *matampu'*. Pembagian berdasarkan alam atas-tengah-bawah, disimbolkan pada diri manusia yaitu kepala dianggap sebagai alam atas, bagian tengah (perut) dianggap sebagai alam tengah, dan bagian bawah (kaki) dianggap sebagai alam bawah. Dalam bangunan *tongkonan* klasifikasi tersebut juga berlaku, dimana *tongkonan* harus selalu menghadap ke utara. *Tongkonan* sebagai pusat dari mikrokosmos maka semua aktivitas manusia terutama yang berkaitan dengan upacara ritual, harus berpatokan kepada *tongkonan.*

METODOLOGI

Fokus penelitian yang dipilih terdapat di *Lembang* (Desa) Sillanan, Kecamatan Gandangbatu Sillanan, Kabupaten Tana Toraja pun menjadi dasar pertimbangan untuk menggunakan pendekatan fenomenologi. Dengan fenomenologi Husserl, peneliti lebih menekankan pada eksplorasi berbagai tindakan dan objek kesadaran komunitas adat Sillanan. Pengamatan peneliti dilakukan pada aspek kesejarahan, budaya dalam *tongkonan*, relasi manusia dan alam, dan hubungan antar aspek pengamatan. Disinilah fenomenologi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

hermeneutik digunakan dalam perencanaan bukan untuk membedah sebuah teks menggunakan bahasa tetapi usaha untuk menyingkap tabir dengan proses pemaknaan pada sebuah realitas ruang.

Studi pendahuluan diawali dengan pengamatan fenomena pada Kampung Adat (*Tangga Tondok*) Sillanan. Fenomena keunikan *Tangga Tondok* Sillanan. Kegiatan awal penelitian dilakukan dengan melakukan *grand tour* dengan melakukan observasi dan wawancara mendalam dengan kepala Lembang Sillanan sekaligus seorang tokoh masyarakat. Beberapa tokoh masyarakat yang ditemui adalah seorang mantan dosen dari Menado yang sementara waktu sudah menetap di Sillanan sebagai kampung halaman, seorang penjaga kampung adat tua Sillanan yang ternyata mempunyai kedudukan sebagai juru bicara adat, pihak birokrasi pemerintah Kabupaten Tana Toraja, tokoh masyarakat yang masih menganut kepercayaan *Aluk Todolo*, dan kaum muda yang juga masih menganut ajaran *Aluk Todolo*. Integrasi aspek spiritualitas akan menjadi fokus dalam eksplorasi dalam bidang perencanaan wilayah dan kota.

Pada proses pendataan penelitian beberapa hal dilakukan, yaitu : pedoman wawancara, pemilihan informan, telaah dokumen, data dan unit analisis, serta validitas data. Hasil dari proses penyingkapan hakekat realitas *Tangga Tondok* Sillanan disusun dalam bentuk konsep-konsep ruang *tongkonan*. Konsep-konsep tersebut pada hakekatnya adalah bentuk kesadaran spiritualitas komunitas adat Sillanan yang termanifestasi dalam ruang *tongkonan* di *Tangga Tondok* Sillanan. Teori lokal pada proses eksplorasi ruang *tongkonan* di *Tangga Tondok* Sillanan dan tata permukiman Lembang Sillanan dibangun berdasarkan proses konseptualitasi realitas yang ditemukan pada penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahapan awal dari penyusunan konsep sistem *tondok* dibangun sebuah relasi teks dan konteks.Teks terdapat dalam tema sejarah dan tema perkembangan permukiman. Konteks dari dua tema tersebut dijelaskan dalam persepektif kebudayaan berbasis *tongkonan*, pergeseran peran, dan pertemuan dua identitas. Konsep sistem *tondok* dibangun oleh tiga konsep yaitu : *silau'na*, *toma'rapu*, dan *madoang*. Konsep kedua adalah *toma'rapu* atau persekutuan yang dibentuk atas dasar etnis Sillanan dalam wujud persaudaraan berbasis pada sebuah *tongkonan*. *Toma'rapu* yang terdapat di Sillanan terbangun oleh tiga kategori persekutuan yaitu : persekutuan berdasarkan pada sejarah etnis Sillanan atau yang dikenal dengan *ma'lele*, persekutuan yang dibangun atas dasar kesamaan adat atau *ada'*, dan persekutuan atas kesamaan agama atau *pekaalukan*. Konsep ketiga adalah sebuah konsep yang lebih bersifat transenden yang menjadi basis bagi seluruh gerak atau eksistensi sistem *tondok* yang ada yaitu *madoang*.

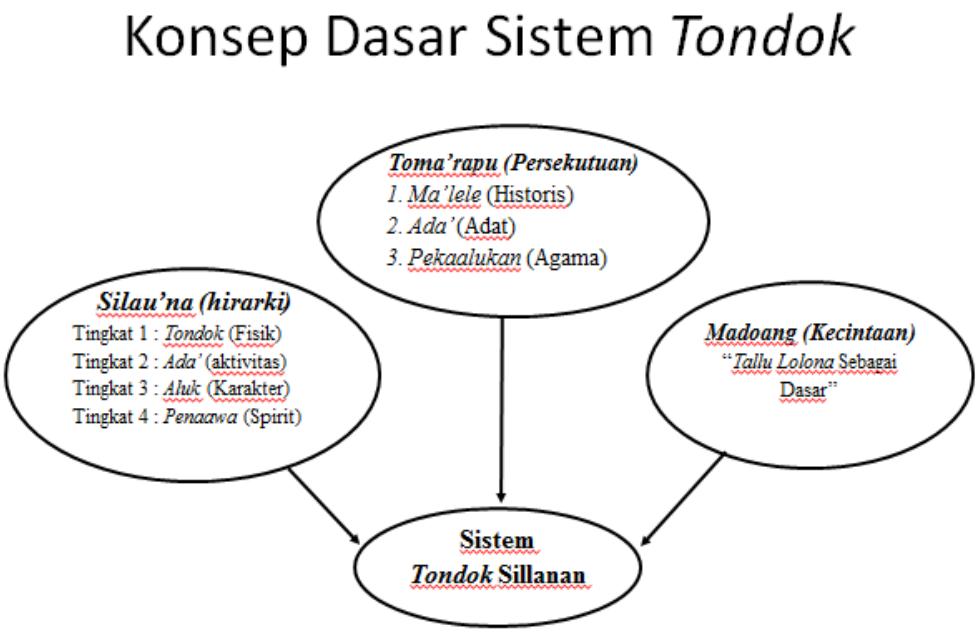

Gambar 1 Konsep yang Mendasari Sistem *Tondok*
Sumber: Refleksi, 2015

Ruang sakral merupakan ruang komunal adat yang digunakan untuk melakukan ritual. Ruang permukiman tradisional merupakan kumpulan *tongkonan* yang merupakan simbol kolektifitas komunitas dalam

ISBN : 978-602-73463-1-4

bentuk konsensus menjalankan kepemerintahan adat. Ruang permukiman lama merupakan ruang penyangga permukiman tradisional dimana perangkat pendukung *tongkonan* berada. Permukiman baru merupakan pengembangan permukiman paska kemerdekaan, dimana akses jalan sudah mulai dibuka Dari lapisan ruang horizontal tersebut tampak beberapa hal yang cukup menarik, yaitu: pertama, adanya ruang pertahanan sebagai manifestasi dari kebutuhan keamanan. Ke-dua, struktur *tongkonan* juga berkorelasi dengan lapisan ruang horizontal Ke-tiga, perangkat pendukung *tongkonan* berada di lapisan permukiman lama. Ke-empat, *Buntu* Suriak sebagai *polo'na lino* menjadi penanda utama dari komunitas Sillanan. Ke-lima, akses jalan masuk dari arah *matallo*(terbit matahari). Pada lapisan ruang vertikal tampak adanya sebuah kesatuan dari realitas ruang.. Lapisan tersebut merupakan kategorisasi dari tema dan konsep pembentuk sistem *tondok*. Kategori spirit merupakan manifestasi atau penyingkapan dari sifat atau nama Sang Pencipta

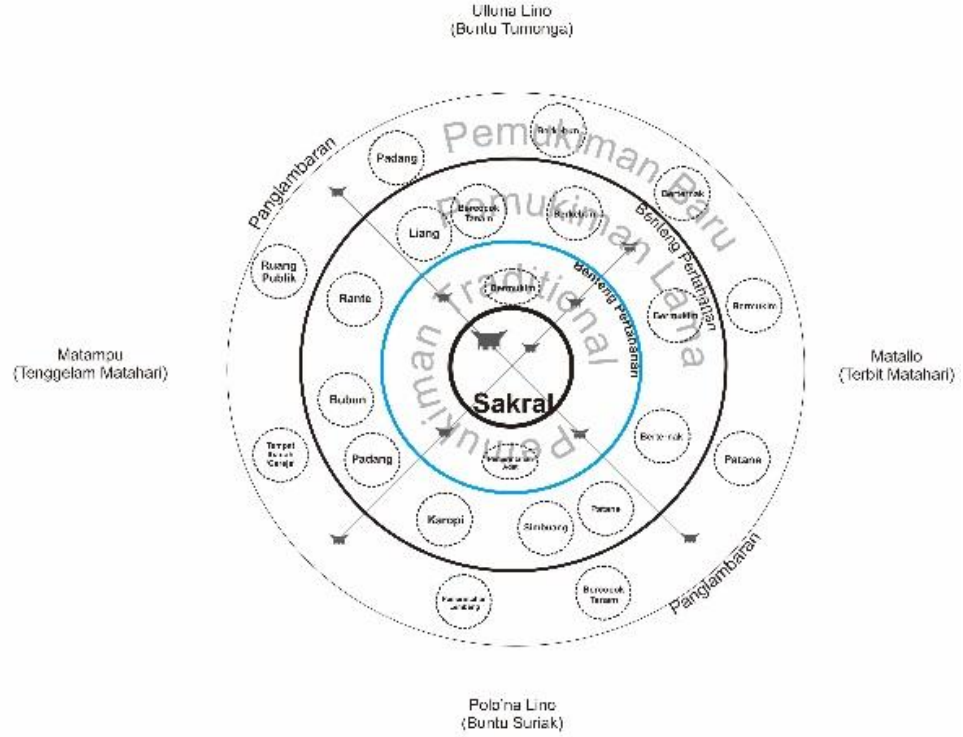

Gambar 2 Lapisan Ruang Horisontal
Sumber: Refleksi, 2015

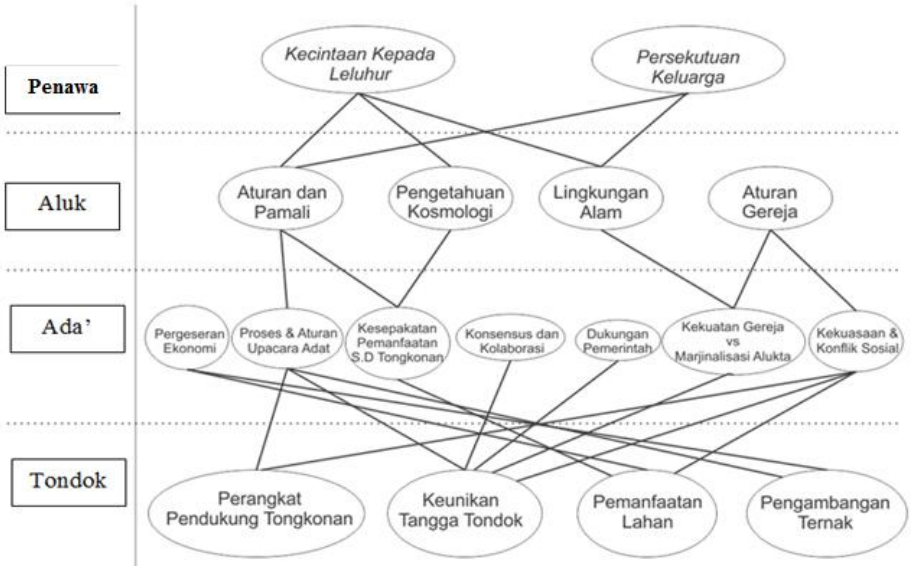

Gambar 3 Lapisan Ruang Vertikal
Sumber: Refleksi, 2015

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dalam pembangunan *tongkonan* keluarga, nilai *toma'rapu* (persekutuan) muncul sebagai bentuk kesadaran kolektif dalam suatu keluarga besar. Kesadaran kolektif yang sudah mengalami penurunan adalah upaya untuk mengelola *Tangga Tondok*. Revitalisasi kawasan pun perlu mendapat perhatian dari seluruh pemangku kepentingan baik masyarakat, pemerintah, dan pihak lain seperti perguruan tinggi. Kesadaran kolektif ini harus ditumbuhkan mengingat pola tata kelola tongkonan di *Tangga Tondok* berbeda dengan *tongkonan* lain di Toraja.

Tongkonan merupakan komponen utama dari sistem *tondok*. Eksistensi sistem *tondok* tidak akan terlepas dari eksistensi dari *tongkonan*. Hakekat struktur realitas *tongkonan* ditinjau dari sudut ontologi terdiri dari : hakekat "ada *tongkonan*", "mengada *tongkonan*" dan "keberadaan *tongkonan*". Hakekat "ada *tongkonan*" terletak pada ruang spirit atau *penaawa* yang merupakan kesadaran transendental adanya *tongkonan* di Sillanan. Adanya konsep *madoang* (cinta pada leluhur) yang ada pada masing-masing individu dan *toma'rapu* (persekutuan) yang ada pada kesadaran komunal masyarakat merupakan kesadaran tertinggi dari masyarakat Sillanan. Kesadaran tertinggi ini dilandasi oleh falsafah *Tallu Lolona* sebagai pandangan holistik dari masyarakat Toraja secara umum.

Proses "mengada *tongkonan*" dapat dilihat pada konsistensi dan komitmen komunitas Sillanan dalam menjalankan seluruh pandangan hidup yang bersumber pada ajaran *AlukTodolo*. Kesadaran mengada juga tampak pada komitmen komunitas Sillanan untuk melakukan prosesi upacara *rambu solo'* dan *rambu tuka'* meskipun secara pandangan telah berubah menjadi umat Kristiani. Kesadaran mengada ini tetap bersumber eksistensi *madoang* dan *toma'rapu* yang secara terus menerus mempengaruhi gerak pengetahuan dan kebudayaan masyarakat Sillanan.

Kesadaran "mengada *tongkonan*" baik pada tingkatan intelektual maupun pada tingkatan kebudayaan merupakan proses pengembangan Sillanan yang menjadi pegangan atau panduan bagi pemangku kepentingan yang ada di *Lembang* Sillanan. "Keberadaan *Tangnga Tondok*" (*tongkonan* beserta perangkat pendukung) secara spasial telah menunjukkan bukti bahwa struktur *ulluna lino* di *Buntu* Tumonga dan *polo'na lino* di *Buntu* Suriak menjadi "penanda" perkembangan *Lili'na* Sillanan. Berbagai penanda yang terdapat pada *Tangnga Tondok* dan sekitarnya telah menjadi kesadaran eksistensial dari *tongkonan* di *Lembang* Sillanan. Eksistensi *tongkonan* tidak dapat dilepaskan dari masyarakat Sillanan sebagai manusia. Adanya *tongkonan* disebabkan oleh adanya manusia Sillanan sebagai *dasein* (yang ada - dalam - dunia) dalam konsepsi Heidegger. Manusia Sillanan sebagai mahluk yang terlempar dalam dunia yang dengannya *tongkonan* tidak lepas dari eksistensi manusia Sillanan. *Tongkonan* mempunyai makna *madoang* ataupun *toma'rapu* karena adanya manusia yang menyingkap eksistensinya. Sehingga hal yang terpenting dalam melihat *tongkonan* adalah menemukenali manusia Sillanan sebagai *dasein*nya.

Dengan demikian, eksistensi *tongkonan* pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari manusia Sillanan. *Tongkonan* dan manusia Sillanan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Analogi dengan *tongkonan*, eksistensi obyek-obyek lain dalam sistem *tondok* merupakan obyek yang tidak dapat dipisahkan dari manusia Sillanan. Dengan dasar pemahaman bahwa manusia Sillanan sebagai ada-dalam-dunia, realitas tentang *tongkonan* maupun sistem *tondok* akan semakin jelas untuk dipahami. Sistem *tondok* akan selalu bersama-sama dengan manusia Sillanan dalam lingkup aktivitas sehari-hari. Artinya, sistem *tondok* merupakan bagian integral yang tak terpisahkan dari manusia Sillanan.

Sistem *tondok* merupakan totalitas obyek yang bermakna yang memperoleh maknanya dari masing-masing komponen pada posisinya dari seluruh jaringan aktivitas budaya masyarakat Sillanan. Dalam pandangan Heidegger, makna *tongkonan* atau sistem *tondok* dilakukan dengan "manusia Sillanan (ada) yang memahami masing-masing obyek dalam sistem *tondok*. Dalam pandangan Heidegger, keberadaan manusia Sillanan bersifat ontologis. Disinilah titik perbedaan dengan pandangan rasional yang masih mengandaikan keterpisahan antara manusia Sillanan sebagai subyek dan sistem *tondok* sebagai obyek dengan pola berpikir yang bersifat representasional. Representasional (pembentukan gagasan-gagasan) artinya, proses keberadaan *tongkonan* merupakan hasil dari pemahaman dalam bentuk tindakan memahami (*mode of knowing*). Dalam pemikiran Heidegger, *tongkonan* menjadi suatu proses manifestasi meng-ada (*mode of being*).

Eksistensi *tongkonan* diperoleh melalui pelibatan perasaan dan emosi yang intensional dalam menangkap *tongkonan* sebagai obyek yang menjadi sumber emosi. Makna *tongkonan* yang sebenarnya akan terungkap ketika masyarakat Sillanan mampu meruntuhkan entitas *tongkonan* pada "dirinya sendiri". *Tongkonan* menjadi wujud yang tak bermakna. Dalam wujud inilah menurut Heidegger, keotentikan *tongkonan* akan dapat disaksikan. Pelibatan dan perasaan terhadap *tongkonan* selanjutnya diolah dan dipahami bagaimana *tongkonan* dikaitkan sistem pengetahuan yang ada pada masyarakat Sillanan. Langkah terakhir untuk mendapatkan eksistesi *tongkonan* dilakukan dengan melakukan proses penafsiran terhadap hakeket *tongkonan*. Dari pendekatan Heidegger inilah dapat ditafsirkan bahwa *tongkonan* merupakan sebuah jalan bagi manusia Sillanan untuk kembali kepada Sang Pencipta. Jalan tersebut diperuntukkan terutama bagi para leluhur masyarakat

ISBN : 978-602-73463-1-4

Sillanan pada sebuah keluarga dalam *tongkonan* tertentu. Pengorbanan yang dilakukan dilandasi oleh nilai kecintaan kepada leluhur dalam sebuah persekutuan keluarga. Nilai kecintaan lebih bersifat ke dalam diri setiap individu masyarakat Sillanan, sedangkan persaudaraan merupakan nilai yang bersifat keluar dari seorang individu dalam satu keluarga.

Gambar 4 Tafsir *Tongkonan* sebagai Jalan
Sumber: Refleksi, 2015

Dalam paradigma fenomenologi terutama transendental tampak bahwa makna transenden atau eksistensi diperoleh setelah peneliti sebagai subyek mengkonstruksi obyek lewat representasi dalam bentuk *forma* ataupun konsep mental peneliti. Artinya, forma internal konsep mental (obyek) bersatu dengan forma meterial (ekternal). Pengetahuan ini ditandai dengan keterlibatan peneliti dalam obyektivitas bermakna ganda. Peneliti mempunyai obyek subyektif yaitu obyek yang ada pada peneliti lewat repesentasi dan obyek obyektif yaitu obyek eksternal yang dipersepsi oleh peneliti. Peneliti berusaha menyatuan dua forma untuk mendapatkan eksistensi dari obyek yang diamati.

Dalam konteks sistem *tondok*, pengetahuan capaian atau korespondensi ditandai dengan keterlibatan suatu obyektivitas bermakna ganda. Hal ini disebabkan pengetahuan tentang sistem *tondok* diperoleh melalui representasi (contoh) dalam bentuk forma ataupun konsep mental sistem *tondok* di dalam pikiran. Semua unit informasi didapat melalui proses representasi terhadap berbagai obyek eksternal. Forma eksternal selanjutnya disatukan dengan konsep mental untuk mendapatkan tiga konsep yang ada yaitu *silau'na*, *toma'rapu*, dan *madoang*. Artinya, eksistensi yang diperoleh merupakan proses integrasi antara subyektifitas peneliti dan obyektivitas *tondok*. Validitas dari konsep ini terjadi apabila obyek subyektif berkorespondensi dengan obyek obyektif. Bentuk eksternal *tongkonan* berikut dengan komponen pendukung dalam sistem *tondok* diintegrasikan dengan konsep mental bahwa *tongkonan* adalah bentuk persaudaraan sedarah setulang untuk mendapatkan makna ada *tongkonan* yaitu kecintaan dan persaudaraan yang ada dalam sistem *tondok*.

KESIMPULAN

Kesimpualan penelitian terbagi atas tiga kelompok yaitu : hasil tema dan konsep, hasil teori lokal, dan terakhir hasil dialog teori. Dari ketujuh tema tersebut terbangun tiga konsep sistem *tondok* yang merupakan hasil dari proses kategorisasi tema-tema. *Silau'na* dalam terminologi masyarakat berarti bertingkat atau berhirarki. Pada tingkat terendah dari hirarki kesadaran terdapat lapisan ruang horisontal yang terdapat dalam sistem *tondok*. Lapisan tersebut adalah lapisan ruang sakral yang berada di *Tangga Tondok* berada di sebelah *Tongkonan* Doa', lapisan permukiman tradisional yang berada di *Tangga Tondok* berupa kumpulan *tongkonanToma'rapu*' yang berarti persekutuan. Konsep *toma'rapu* ini terdiri dari tiga bentuk persekutuan yaitu persekutuan yang dibentuk berdasarkan histori (*ma'lele*), persekutuan adat (*ada'*), dan persekutuan keagamaan (*pekaalukan*). Konsep ketiga yang dibangun adalah madoang yang bermakna kecintaan pada leluhur. Lapisan ruang horisontal pada permukiman Sillanan merupakan bentuk terendah dari kesadaran masyarakat. Artinya lapisan ini merupakan manifestasi keberadaan dari permukiman. Lapisan ruang vertikal terbagi empat ruang yaitu : ruang fisik dalam bentuk *tondok* atau permukiman, lapisan ruang kebudayaan (*ada'*), lapisan ruang keagamaan (*aluk*), dan lapisan ruang spirit yang bersifat transenden dan tak terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Allmendinger, P. (2001). *Planning in Postmodern Time*s. Routledge. London.
[2] Bagir, H. (2011). *Mengungkap yang Tak Terungkap : Pengalaman Mistis DalamPandangan Mulla Sadra dan Heidegger*. Penerbit Mizan. Bandung

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[3] Canda, R.E., Furman,D.L. (2010). *Spiritual Diversity in Social Work Practice.Oxford University Press*. New York.
[4] Faludi, A. (1973). *Planning Theory.* Pergamin. London.
[5] Forester, J. (1999). *The Deliberative Practioner : Encouraging Participatory Planning Process*. MIT Press : Cambridge.
[6] Friedmand, J. (1987). *Planning in the Public Domain from Knowledge to Action.Priceton University Press.* New Jersey.
[7] Gahrial, Donny, A. (2010). *Pengantar Fenomenologi. Penerbit Koekoesan*.Depok.
[8] Healey, P. (1996). *The Communicative turn in Planning Theory and Its Implications for Spatial Strategy Formation, Environmen and Planning and Design*. Mac Millan Press. London.
[9] Husserl, E. (1900). *Logical Investigations*. Tranlated by J.N. Findlay (2001). Routledge. London
[10] Innes ,E.J., Booher, E.D. (2010). *Planning With Complexity: An Introduction toColllaborative Rationality for Public Policy*. Routledge. Oxon.
[11] Kobong, T. (2008). *Injil dan Tongkonan (Inkarnasi, Kontekstualisasi danTransformasi*). BPK Gunung Mulia. Jakarta.
[12] Kuswanjono, A. (2010). *Integrasi Ilmu dan Agama : Perspektif Filsafat Mulla Sadra. Yogyakarta*. Badan Penerbitan Filsafat UGM.
[13] Nooy-Palm, H. (1979). *The Sa'dan-Toraja : Study of Their Social Life and Religion Vol I Organization, Symbols and Beliefs. KITLV*. The Hague : Nijhoff.
[14] Purbadi, Y.D (2010). *Tata Suku dan Tata Spasial pada Arsitektur Permukiman Suku Dawan di Desa Kaenbun di Pulau Timor*. Program Pascasarjana Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
[15] Sager, T. (1994). *Communicative Planning Theory*. Aldershot. Ashgate.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGELOLAAN PERMUKIMAN BERKELANJUTAN DI KAWASAN PINGGIRAN METROPOLITAN JABODETABEK

Janthy Trilusianthy Hidayat

Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota - Universitas Pakuan Bogor

Email :janthyhidayat@unpak.ac.id

Naskah diterima :25 Maret 2017 Naskah direvisi : 25 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Wilayah metropolitan menghadapi tingkat suburbanisasi yang tinggi ke arah kawasan pinggirannya (urban fringe). Peranan permukiman dalam pengembangan kawasan pinggiran metropolitan sangat besar. Pertumbuhan kawasan permukiman ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah yang menyebabkan lemahnya institusi penataan ruang yang tidak terlepas dari lemahnya kapasitas kontrol para pemegang otoritas kebijakan tata ruang sehingga koordinasi antar sektor dan kerja sama antar wilayah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, padahal wilayah pinggiran metropolitan merupakan kawasan yang paling dinamis dan tumbuh pesat serta multi administratif. Ketidaksiapan kelembagaan pengelolaan permukiman di kawasan pinggiran metropolitan ini ternyata mempercepat penurunan kenyamanan dan kualitas hidup penghuni kawasan.Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi struktur yang berkaitan dengan pengelolaan permukiman di kawasan pinggiran metropolitan.Analisis dilakukan melalui metode Interpretative Structural Modelling. Hasil analisis menyimpulkan bahwa pengelolaan permukiman di wilayah penelitian akan melibatkan berbagai instansi terkait dan multi administratif, maka kerjasama mutlak dibutuhkan oleh karena itu harus ada komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan permukiman di wilayah penelitian. Kerjasama antar pemerintah daerah dan koordinasi antara instansi terkait harus dapat memperkuat posisi rencana tata ruang, serta peraturan zonasi sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan permukiman.

Kata kunci: *kawasan pinggiran, permukiman, pengelolaan. ,*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan kawasan permukimandi wilayah pinggiran metropolitan Jabodetabek yang terjadi secara cepat dan acak menurut Firman [1]disebabkan oleh faktor yang secara umum terdiri dari faktor pendorong dan faktor penarik.Sedangkan menurut Hudalah [2] lemahnya pengendalian pemerintah terhadap tata ruang menjadi penyebab terjadinya pertumbuhan yang cepat dan acak di wilayah pinggiran metropolitan.Keadaanseperti ini kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah sehingga menyebabkan lemahnya institusi penataan ruang yang tidak terlepas dari lemahnya kapasitas kontrol para pemegang otoritas kebijakan tata ruang, koordinasi antar sektor dan kerja sama antar wilayah tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, padahal wilayah pinggiran metropolitan merupakan kawasan yang paling dinamis dan tumbuh pesat serta multi administrative seharusnya mendapatkan perhatian yang

Keterbatasan kemampuan pemerintah menyebabkan pelaksanaan arahan perencanaan dan pengendalian tata ruang tidak dilakukan sebagaimana mestinya. Kenyataannya wilayah pinggiran kota metropolitan merupakan zona transisi yang diatur oleh struktur institusional yang kompleks dan saling tumpang tindih dengan otonomi, visi, gaya pemerintahan dan kapasitas yang masing-masing berbeda[2]. Selain itu, beberapa tugas perencanaan dibagi dengan pemerintah diatasnya yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan antar masalah perencanaan lokal.Kondisi ini memungkinkan insiatif swasta dan lokal tidak terkoordinasi sehingga fragmentasi institusional di wilayah pinggiran metropolitan menjadi meningkat.Keadaan seperti ini menyebabkan wilayah tersebut mendapat sebutan sebagai wilayah pinggiran yang tidak bertuan/*no man's land of the periphery*[3].

Ketidaksiapan kelembagaan pengelolaan permukiman menurut Uguy [4] ternyata mempercepat penurunan kenyamanan dan kualitas hidup penghuni kawasan.Tujuan penelitian adalah mengidentifikasi struktur yang berkaitan dengan program pengelolaan permukiman di kawasan pinggiran metropolitan.

METODOLOGI

Metode penelitian menggunakan *Interpetative Structural Modelling* (ISM) dimana menurut Eriyatno dan Sofyar [5] metode ini cukup efektif untuk menangani dan menstrukturkan issue yang komplek, dalam hal ini kondisi pengelolaan permukiman di pinggiran kota metropolitan.

Data yang digunakan terdiri atas data primer dan sekunder, Sumber data primer dari hasil wawancara terstruktur dengan responden yang merupakan pakar dengan kriteria memiliki wawasan pengetahuan tentang perkembangan kota dan pengelolaan kawasan permukiman, sumber data sekunder dari instansi terkait, perpustakaan dan media elektronik.

Kendala yang dihadapi dan perubahan yang diharapkan dalam pengelolaan kawasan permukiman di pinggiran metropolitan merupakan elemen yang dianalisis dengan menggunakan metode ISM, selanjutnya elemen tersebur dijabarkan dalam beberapa sub elemen yang akan distrukturkan hubungannya dan dianalisis untuk mendapatkan elemen kunci dan faktor penggerak yang menjadi keberhasilan pengelolaan kawasan permukiman yang berkelanjutan di pinggiran metropolitan Jabodetabek.

Wilayah studi dipilih berdasarkan proses suburbanisasi dan fenomena *urban sprawl* yang paling cepat di JABODETABEK [7]yaitu sepanjang jalur transportasi utama jalan tol jarak 15 – 30 km dari pusat kota Jakarta. (Hidajat 2004)Merupakan wilayah pinggiran kota meliputi beberapa wilayah administratif kota dan kabupaten saling berbatasan yaitu : Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; Kecamatan Cimanggis dan Kecamatan Tapos, Kota Depok; Kecamatan Jati Sempurna, Kota Bekasi.

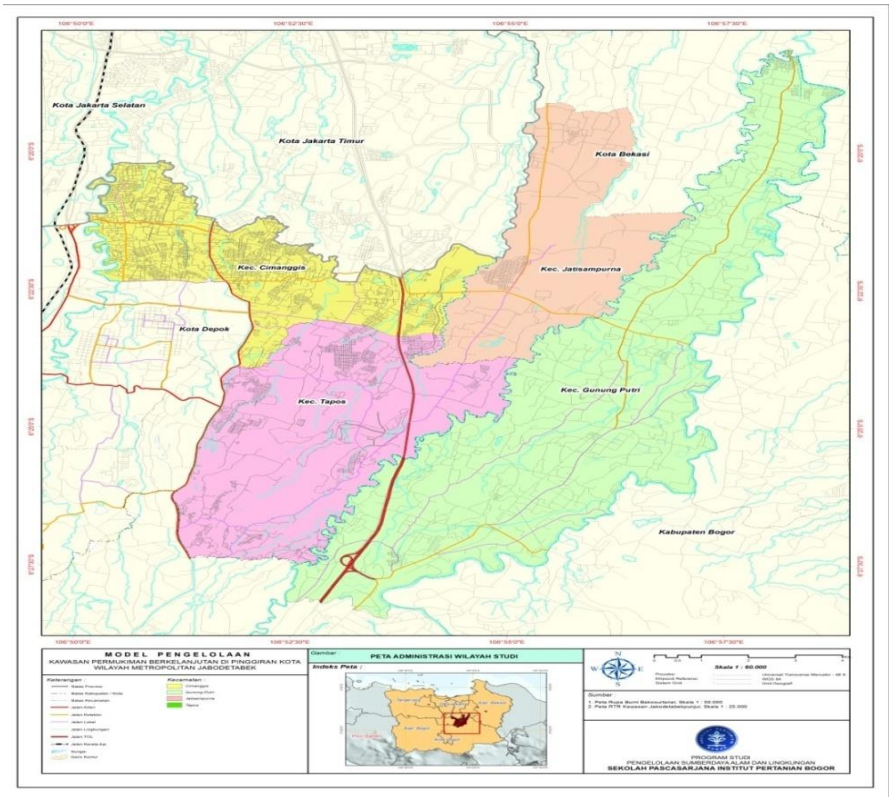

Gambar 1. Wilayah Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan analisis didapatkan bahwa sub elemen kunci dan faktor penggerak dari elemen kendala yang dihadapi dalam pengelolaan kawasan permukiman di wilayah penelitian yaitu :

a. Koordinasi dan/atau kerjasama antar instansi/*stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan kawasan permukiman masih lemah.
b. Peraturan zonasi sebagai alat pengendalian penataan dan pengelolaan kawasan permukiman belum ada.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Sedangkan sub elemen kunci dan faktor penggerak dari elemen perubahan yang diharapkan dalam pengelolaan kawasan permukiman di wilayah penelitian yaitu :

a. Peningkatan koordinasi/kerjasama antar *stakeholder.*
b. Penetapan peraturan bangunan dan peraturan zonasi sebagai alat pengendalian serta peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruanng terkait pengelolaan kawasan permukiman.

Keberhasilan pembangunan di wilayah pinggiran dapat dilakukan dengan menghilangkan kendala utama yaitumeningkatkan koordinasi dan/atau kerjasama antar lembaga/*stakeholder* yang terlibat dalam pengelolaan pembangunan di wilayah pingiran atau perbatasan dalam metropolitan Jabodetabek masih lemah. Hal ini sesuai dengan penelitian Hudalah [2]menyatakan bahwa tumbuhnya kawasan permukiman di wilayah pinggiran metropolitan yang tidak terencana dan terkendali merupakan kombinasi berbagai kepentingan dari *stakeholder* sehingga diperlukan penguatan peran dan fungsi *stakeholder* tersebut dalam pengelolaan kawasan permukiman serta koordinasi yang lebih efektif diantara para *stakeholder*.

Mengingat wilayah pinggiran metropolitan berada pada daerah multi-administratif maka diperlukan koordinasi antar *stakeholder* dengan membuka peluang kerjasama antar pemerintah daerah serta menguatkan koordinasi diantara instansi yang terkait.Hal ini harus dilakukan karena tidak mungkin membangun wilayah dan mengelola wilayah secara efektif dan efisien tanpa melihat konteks wilayah yang lebih luas dan tanpa kerjasama dengan daerah perbatasan sekitarnya untuk membangun sinergi.

Rencana Tata Ruang merupakan alat yang dapat digunakan untuk koordinasi dan kerjasama antar pemerintah lokal, pemerintah provinsi/wilayah dan provinsi, serta untuk berbagai sektor dan para pemangku kepentingan.Kebijakan kerjasama antar daerah sudah diamanatkan dalam Undang Undang Pemerintah Daerah No 34 Tahun 2004; Undang Undang Penataaan Ruang No 26 Tahun 2007 dan Undang Undang PengelolaanPelestarian Lingkungan Hidup No 34 Tahun 2009. Kerjasama ini dalam pelaksanaannya memerlukan kesiapan pemerintah daerah yang akan bekerjasama dan dukungan pemerintah pusat karena dimungkinkan adanya konflik kepentingan antar daerah administratif maka diperlukan pemerintah pusat untuk mengatur koordinasinya.

Terkait dengan keberadaan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek dimana tugas dan fungsi lembaga ini adalah menjadi forum kerjasama antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat agar tugas-tugas koordinasi dan konsultasi terakomodasi, namun demikian lembaga ini tidak memiliki otoritas yang cukup dalam pelaksanaan pembangunan karena kewenangan masih berada pada masing-masing pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah sehingga peran Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek menjadi kurang efektif. Keberadaan Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek secara politis sudah diterima oleh seluruh pemerintah daerah di wilayah metropolitan JAbodetabek sehingga harus dipertahankan. Namun demikian dalam hal kerjasama di wilayah pinggiran harus ada kerjasama yang jelas dan diinisiasi oleh masing-masing pemerintah daerah artinya selain mengacu pada ketentuan yang telah ada sebelumnya dan yang memayunginya juga diperlukan suatu kerjasama untuk koordinasi pengelolaan dan pembangunan kawasan di wilayah pinggiran yang didasari oleh upaya mengatasi masalah yang ada.

Kerjasama antar daerah dimaksudkan untuk memperkuat koordinasi dan konsistensi dalam implementasi tata ruang. Kebijakan kerjasama antar daerah sudah diamanatkan dalam Undang undang Pemerintah Daerah No 32 Tahun 2004; Undang undang Penataan Ruang No 26/2007 dan Undang undang Pengelolaan Lingkungan Hidup No 34 Tahun 2009 dan ditindaklanjuti oleh Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2007 tentang kerjasama antar daerah.

Selama otonomi daerah diterapkan berdasarkan Undang Undang Pemerintah Daerah No 32 Tahun 2004, dimana pemerintah daerah menjalankan otonomi yang seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi. Dampak dari keadaan ini adalah perhatian pemerintah daerah terhadap pengembangan kawasan permukiman disesuaikan dengan prioritas dan kepentingan masing-masing pemerintah daerah.Tuntutan otonomisasi menghendaki penyelenggaraan pembangunan kawasan permukiman menerapkan pola secara desentralisasi. Di sisi lain perkembangan kawasan pinggiran metropolitan tidak mengenal batas administratif sehingga keadaan ini menyebabkan terjadinya pertumbuhan seolah-olah berada di wilayah tidak bertuan karena terjadi fragmentasi institusi tersebut. Kebijakan kerjasama antar daerah memerlukan kesiapan pemda yang akan bekerjasama serta dukungan pemerintah pusat dalam hal perencanaan

dan implementasinya. Kesiapan pemerintah daerah dalam melakukan kerjasama ini dapat dilihat dari indikasi program dalam Rencana Tata Ruang Wiayah (RTRW) dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dimana hanya tercantum dalam bentuk rapat koordinasi dengan wilayah yang berbatasan. Hal ini menandakan kebijakan kerjasama antar pemerintah daerah belum sepenuhnya diinginkan.

Beberapa hambatan dalam rangka mewujudkan kerjasama antar daerah adalah:

1. Belum adanya kepastian hukum mengenai peraturan khusus yang mengatur mekanisme kerjasama pelayanan antar pemerintah daerah dalam satu atau beberapa provinsi,
2. Pemerintah Daerah masih ragu dalam mengimplementasikan kerjasama antar pemerintah daerah sampai pada tahap operasional walaupun sebenarnya keinginan sudah ada,
3. *Political will* Pemerintah Pusat belum berkembangnya dalamrangka memfasilitasi dan mendorong pemerintah daerah untuk mengembangkan kerjasama antar daerah,
4. Disinyalir daerah lebih mengedepankan perbedaan kepentingan bukan kesamaan kepentingan,
5. Jenjang peraturan perundangan yang mewadahi kerjasama antar daerah sampai saat ini masih diaraskan belum jelas.

Mengingat kompleksnya permasalahan pengelolaan kawasan permukiman yang ada di wilayah pinggiran serta berbagai hambatan yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama yang diinisiasi oleh pemerintah pusat dalam hal ini Badan Kerja Sama Pembangunan (BKSP) Jabodetabek, maka di wilayah penelitian ini dapat dilakukan melalui inisiasi dari pemerintah daerah (*bottom up*). Mengacu pada model pengelolaan infrastruktur kota melalui kerjasama antar daerah dan permasalahan yang ada, maka pengelolaan dan pembangunan permukiman di wilayah pinggiran dapat berupa kerjasama beberapa pemerintah lokal yang berbatasan membentuk perjanjian kerjasama untuk mengatasi masalah-masalah yang ada dan dilakukan dalam rangka mewujudkan kawasan permukiman berkelanjutan serta mengakomodasi permasalahan-permasalahan yang ada. Kerjasama ini memiliki tiga jenjang pengelolaan yaitu pada tingkat tertinggi yaitu Bupati dan Walikota, tingkat kedua pengelolaan dilaksanakan bersama oleh pejabat teras kota/kabupaten dan tingkat ketiga dilakukan oleh para pejabat teknis.

Kebijakan kerja sama antar daerah tersebut dapat dilakukan dalam bentuk program sebagai berikut:

a. Peningkatan koordinasi instansi antar Pemda dalam pengelolaan kawasan permukiman yang berkaitan dengan penataan ruang.
b. Penyusunan studi kelayakan
c. Pelaksanaan MOU
d. Penyusunan *action plan*
e. Pembentukan badan kerja sama yang diinisiasi oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
f. peningkatan konsistensi dalam pelaksanaan penataan ruanng terkait pengelolaan kawasan permukiman.

KESIMPULAN

Pengelolaan kawasan permukiman di wilayah penelitian akan melibatkan berbagai instansi terkait dan multi administratif, maka kerjasama mutlak dibutuhkan oleh karena itu harus ada komitmen dari semua pihak yang terlibat dalam pengelolaan kawasan permukiman di wilayah penelitian. Kerjasama antar pemerintah daerah dan koordinasi antara instansi terkait yang dapat memperkuat posisi rencana tata ruang, serta peraturan zonasi sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pengelolaan kawasan permukiman.

DAFTAR PUSTAKA

[1] T. Firman, "The Spatial Pattern of Population Growth in Java, 1990-2001: Continuity and Change in Extended Metropolitan Region Formation", IDPR 25(1):185-193, 2003.

[2] D. Hudalah."Peri-urbanization and the regional economic performance of Jakarta Metropolitan Region"Paper presentedat *Eastern Regional Organisation for Planning and Human Settlements (EAROPH)Congress,*Adelaide: 1-5 November 2010.

[3] R. Zetter, and R. White, "Planning in Cities : Sustainability and Growth in the Developing World", London: ITDG Publishing, 2002.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[4] Uguy, M.J.H, Pengembangan Lingkungan *Peri-Urban* yang Menuju Keberlanjutan : Suatu Analisis tentang *Urban Sprawl* sebagai Akibat Suburbanisasi, Disertasi, PascaSarjana Universitas Indonesia*, 2006.*

[5] Eriyatno dan Sofyar, "Riset kebijakan : Metode Penelitian untuk Pascasarjana", Bogor: IPB Press, 2006.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KAJIAN POTENSI EKONOMI WILAYAH DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN UNTUK MENDORONG PEMBAGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI DI KTM LABANGKA KABUPATEN SUMBAWA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Lilis Sri Mulyawati[1)] dan Inna Sri Supina Adi[2)]

[1]Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Pakuan
[2]Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Pakuan

Email :lilissrimulyawati@unpak.ac.id , innasubanu@yahoo.com

Naskah diterima :28 Februari 2017 Naskah direvisi : 13 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Pembangunan transmigrasi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan yang masih tertinggal karena terisolasi dan sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. Kota Terpadu Mandiri (KTM) Labangka di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat. merupakan salah satu kawasan transmigrasi yang dibangun dalam upaya revitalisasi pengembangan permukiman transmigrasi yang sudah ada, sebagai upaya mempercepat terwujudnya pusat pertumbuhan baru atau mendukung pusat pertumbuhan yang telah ada atau yang sedang berkembang. Pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di KTM Labangka terus diupayakan untuk mendorong peningkatan pertumbuhan potensi ekonomi yang ada terutama potensi sektor unggulan komoditi jagung. Besarnya potensi komoditi jagung memerlukan ekstensifikasi produk yang dihasilkan, tidak hanya berupa bahan mentah tetapi dapat berupa produk setengah jadi atau produk yang sudah jadi, sehingga akan meningkatkan nilai ekonomi komoditi unggulan ini.Metode yang digunakan dalam penelitian ini meliputi Analisis Pohon Industri komoditi unggulan, yang dilakukan untuk mengetahui bermacam-macam produk lain yang memiliki nilai ekonomi tinggi, Analisis Finansial komoditi unggulan untuk menghitung seberapa besar keuntungan komoditi unggulan jika dihitung dalam kurun waktu tertentu, serta Analisis Kelayakan Komoditi Unggulan melalui perhitungan Break Even Point (BEP), Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR),Benefit Cost Ratio (BCR). Di samping itu digunakan juga Analisis deskriptif untuk menyusun Bussiness Plan berdasarkan perhitungan analisis pohon industri, analisis finansial dan analisis kelayakan di KTM Labangka. Analisis deskriptif juga dilakukan dalam pengembangan kebijakan di KTM Labangka melalui penguatan kelembagaan dalam mengelola KTM. Dari metode tersebut diketahui bahwa komoditi jagung di KTM memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan dapat menjamin keberlangsungan perekonomian masyarakat. Besarnya potensi ekonomi yang dimiliki perlu ditunjang dengan penguatan kelembagaan yang ada untuk menjaga keberlangsungannya di dalam mewujudkan KTM Labangka sebagai pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Sumbawa. Penguatan kelembagaan di KTM Labangka dilakukan melalui modifikasi model kelembagaan yang ada sehingga dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat di KTM. Penguatan kelembagaan di KTM Labangka dilakukan melalui pembentukan lembaga pengelola KTM sebagai sentral penggerak perekonomian masyarakat dan menjadi koordinator bagi LKM (Lembaga Keuangan Mikro), Gapoktan, LKB (Lembaga Keuangan Bermediasi) dan LKA (Lembaga Klinik Agribisnis).

***Kata Kunci** : transmigrasi, ekonomi, kelembagaan*

PENDAHULUAN

Pembangunan wilayah secara nasional harus mewujudkan keseimbangan antar wilayah baik antara pusat dan daerah maupun antara wilayah perkotaan dengan wilayah pedesaan. Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pembangunan wilayah melalui pembangunan kawasan transmigrasi pada wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Pembangunan transmigrasi pada hakekatnya merupakan bagian integral dari pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan terutama di kawasan

yang masih tertinggal karena terisolasi yang sekaligus dapat meningkatkan kesejahteraan para transmigran dan masyarakat sekitar. Hal ini seperti tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian [1] dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi [2], yang menyebutkan bahwa tujuan pembangunan transmigrasi adalah : meningkatkan kesejahteraan transmigran dan masyarakat sekitarnya; peningkatan dan pemerataan pembangunan daerah serta memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa.Selain itu, di dalam kedua peraturan perundangan tersebut juga menyatakan bahwa, "Peningkatan dan Pemerataan Pembangunan Daerah dapat dilakukan melalui Pembangunan Pusat-Pusat Pertumbuhan Ekonomi Baru" di kawasan transmigrasi dan sekitarnya. Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

Salah satu wilayah transmigrasi yang berbasis kawasan dengan konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM) yang terus didorong untuk menjadi pusat pertumbuhan baru, berada di Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu KTM Labangka. Sebagai kawasan transmigrasi KTM Labangka memiliki fungsi sebagai pusat pengembangan permukiman dan pusat pengembangan ekonomi wilayah. Pengembangan ekonomi wilayah di KTM Labangka diwujudkan dalam bentuk pembangunan infrasruktur ekonomi dan penggalian potensi ekonomi yang berbasis pertanian. Potensi sumberdaya wilayah yang berbasis pertanian dengan komoditi unggulan jagung di KTM Labangka belum dikembangkan secara komprehensif. Hal tersebut terjadi karena belum adanya dukungan kelembagaan yang mampu menjadi penggerak ekonomi wilayah di KTM Labangka..Pembangunan Infrastruktur fisik di KTM Labangka yang dibiayai dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi serta Pemerintah Daerah Kabupaten Sumbawa maupun Provinsi Nusa Tenggara Barat, juga belum mampu mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah di KTM. Besarnya biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk membangun infrastruktur di KTM Labangka belum memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi wilayah khususnya di KTM maupun di tingkat Kabupaten Sumbawa

Berdasarkan kondisi tersebut, kajian tentang potensi ekonomi wilayah dan penguatan kelembagaan di KTM menjadi penting.untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah terkait dengan fungsi KTM Labangka sebagai pusat pengembangan permukiman dan pusat pengembangan ekonomi wilayah di Kabupaten Sumbawa. Dengan pertimbangan kondisi yang demikian maka tujuan dari kajian ini adalah :(1). Mengidentifikasi produk yang dapat dihasilkan dari komoditi.unggulan KTM yaitu jagung (2). Menghitung keuntungan dan kelayakan ekonomi yang akan diperoleh jika komoditi unggulan dikembangkan dalam jangka waktu tertentu (3). Mengembangkan pendekatan kelembagaan yang dapat diterapkan di KTM Labangka.

METODOLOGI

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian ini maka dilakukan analisis sebagai berikut :

- Analisis Pohon Industri komoditi unggulan dilakukan untuk mengetahui bermacam-macam produk lain yang bisa dihasilkan dari komoditi unggulan yang tidak hanya merupakan barang mentah tetapi ada produk lain yang juga memiliki nilai ekonomi tinggi
- Analisis Finansial komoditi unggulan dilakukan untuk menghitung seberapa besar keuntungan komoditi unggulan jika dihitung dalam kurun waktu tertentu, biasanya dalam 20 tahun sehingga bisa diketahui laba usaha untuk setiap komoditi unggulan.
- Analisis Kelayakan Komoditi Unggulan melalui perhitungan *Break Even Point* (BEP), *Net Present Value* (NPV), *Internal Rate of Return* (IRR), *Benefit Cost Ratio* (BCR),
- Analisis deskriptif untuk menyusun *Bussiness Plan* berdasarkan perhitungan analisis pohon industri, analisis finansial dan analisis kelayakan di KTM Labangka. Analisis deskriptif juga dilakukan dalam pengembangan kebijakan di KTM Labangka melalui penguatan kelembagaan dalam mengelola KTM.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan survey dan pengolahan data yang dilakukan maka hasil penelitian ini dapat disajikan sebagai berikut[3]:

1. Analisis Pohon Industri Komoditi Unggulan

Telah disampaikan sebelumnya bahwa komoditi unggulan KTM Labangka Kabupaten Sumbawa adalah komoditi jagung, komoditi padi dan komoditi sapi. Untuk mengembangkan produk atau komoditi unggulan ini terutama jagung dilakukan dengan analisis pohon industri. Analisis pohon industri ini diperlukan untuk mengetahui keragaman produk yang akan dihasilkan dari komoditi ungglan tersebut yang memiliki nilai

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ekonomis. Dalam analisis ini diuraikan berbagai produk ikutan yang dihasilkan dari olahan komoditi jagung sesuai dengan nilai ekonomi dan manfaatnya sehingga diharapkan dapat membentuk agrobisnis berbasis jagung.

Jagung merupakan salah satu komoditas utama tanaman pangan yang mempunyai peranan strategis dalam pembangunan pertanian dan perekonomian Indonesia, mengingat komoditas ini mempunyai fungsi multiguna, baik untuk konsumsi langsung maupun sebagai bahan baku utama industri pakan serta industri pangan. Hampir seluruh bagian dari tanaman jagung mempunyai potensi nilai ekonomis (Gambar 1). Buah jagung pipilan, sebagai produk utamanya merupakan bahan baku utama (50%) industri pakan, selain dapat dikonsumsi langsung dan sebagai bahan baku industri pangan. Daun, batang, kelobot, tongkolnya dapat dipakai sebagai pakan ternak dan pemanfaatannya lainnya.

Pemanfaatan jagung berdasarkan Gambar Pohon Industri menunjukkan banyaknya manfaat yang didapat dari keberadaan jagung dan bagian-bagiannya. Jagung dapat bermafaat sebagai bahan pangan, sebagai produk olahan dari industri skala rumah tangga sampai dengan industri besart seperti bubur jagung, jagung campuran beras, dan banyak lagi makanan tradisional yang berasal dari jagung. Disamping itu menghasilkan juga tepung jagung, Industri giling kering, yaitu menghasilkan tepung jagung, pati, sirup, gula jagung, minyak dan sebagainya.

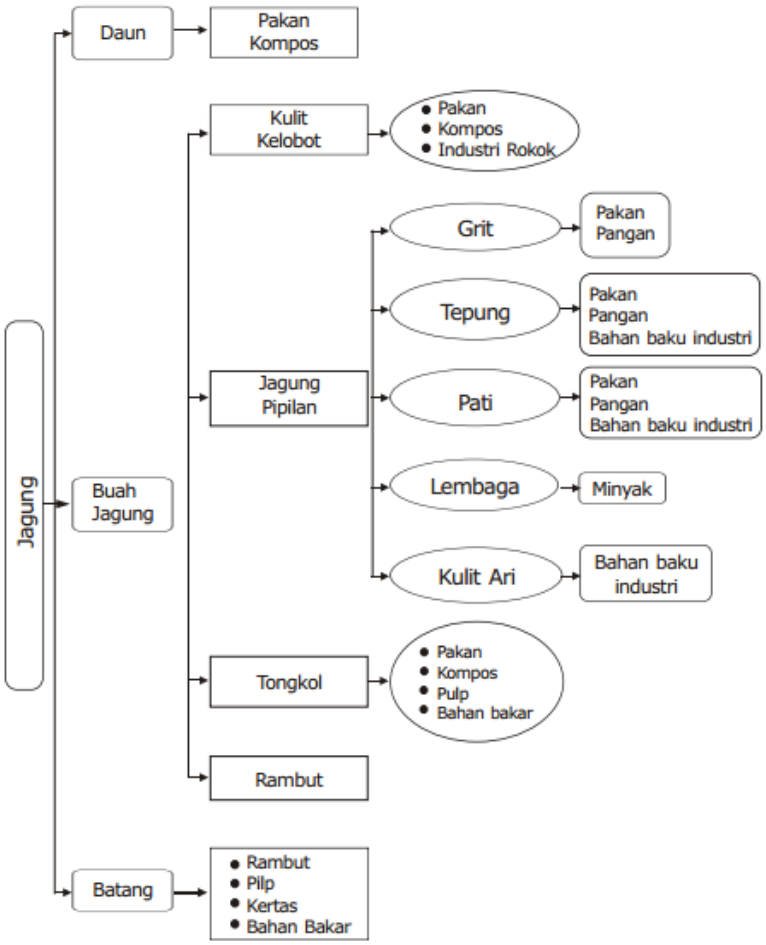

Sumber: Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, 2012 [4]

Gambar 1. Pohon Industri Jagung

Selain pemanfaatan sebagai bahan pangan juga dapat dihasilkan bahan pakan. Jagung merupakan salah satu bahan campuran pakan ternak. Di beberapa pedesaan jagung digunakan sebagai bahan pakan utama. Biasanya jagung dicampur bersama bahan pakan lain seperti dedak, sorghum hijauan dan tepung ikan. Disisi lain, pemanfaatan jagung juga diperuntukan sebagai bahan bakar nabati.Jagung sangat berpotensi menghasilkan biofuel sebagai sumber energi pengganti minyak bumi.

2. Analisis Finansial Komoditi Unggulan

Prospek pasar jagung baik di pasar domestik maupun pasar dunia sangat cerah. Pasar jagung domestik masih terbuka lebar, mengingat sampai saat ini produksi jagung Indonesia belum mampu secara baik memenuhi

kebutuhannya, yaitu baru sekitar 90%. Sekalipun semua biaya diperhitungkan, ternyata usahatani jagung terutama yang menggunakan varietas hibrida tetap memberikan keuntungan yang cukup menarik bagi petani (Rp 884 ribu - Rp. 2,1 juta per ha pada tingkat B/C berkisar 1,24 - 1,50.. Selain swasembada jagung, Indonesia juga diharapkan sebagai eksportir serta sekaligus mengembangan industri pati jagung, dan dalam program jangka panjang juga mengembangan industri yang berbasis pati jagung.

3. Analisis Kelayakan Komoditi Unggulan

Sesuai dengan teori rantai nilai, perolehan nilai tambah meningkat dengan meningkatnya tahap pemrosesan, sehingga pada jangka menengah, Kabupaten Sumbawa selayaknya mempertimbangkan pendirian pabrik pati jagung, yang akan menyerap tenaga kerja lebih banyak, sehingga menjadi daya tarik pertumbuhan wilayah. Pada bagian ini akan diperiksa kelayakan komoditi unggulan jagung (tongkol dan pipilan), terkait investasi alat dan peralatan pada kondisi eksisting ini hingga sepuluh tahun ke depan, setara umur ekonomis dari alat dan peralatan yang akan diterapkan. Prasanna mengidentifikasi hampir 25-30% hasil panen para petani di Asia hilang karena buruknya manajemen paska panen[5]. Hasil analisis kelayakan usaha komoditi unggulan didasarkan pada beberapa asumsi, sebagaimana Tabel 1, antara lain:

1. Analisis dihitung berdasarkan satuan hektar tanam, bibit hibrida yang ditanam di KTM Labangka.
2. Biaya Produksi per 1 hektar berdasarkan wawancara:
3. Biaya investasi terdiri dari alat pemipil, alat pengering dan bangunan gudang, dengan total investasi sebesar Rp 50,500,000
4. Tingkat diskonto yang digunakan sebesar 11.25%, nilai pasar saat ini. Pertumbuhan harga dan biaya sebesar 1% per tahun.

Asumsi-asumsi tersebut menghasilkan kelayakan usaha sebagaimana dalam Tabel 2.

A. Break Even Point (BEP)

Titik impas atau kondisi di mana tidak untung juga tidak rugi diperoleh pada jumlah jagung yang berhasil terjual 623.47 kg, dengan harga jual Rp. 4,583,57 rupiah, atau nilai penjualan sebesar Rp. 2,857,081.30. Hal ini berarti, apabila menginginkan penjualan harus di atas nilai tersebut, dapat dicapai apabila harga lebih tinggi, atau jumlah yang terjual lebih banyak. Titik impas (BEP) dapat dipakai sebagai alat pemberi informasi bagipelaku usaha secara sederhana dan singkat dalam mengambil keputusan terutama menyangkut biaya, pendapatan, dan perencanaan keuntungan.

B. Net Present Value (NPV)

Net Present Value (NPV) merupakan analisis yang digunakan untuk menghitung selisih antara *present value* dari penerimaan dengan *present value* dari biaya-biaya pengeluaran. Nilai *Net present value* yang diperoleh adalah sebesar 32223744, yang menunjukan nilai positif berdasarkan kriteria NPV, oleh karena itu usaha budidaya jagung di Kabupaten Sumbawa khususnya di KTM Labangka layak diupayakan, selama dayadukung lingkungan tersedia dan pola kegiatan pertanian mengikuti kaidah-kaidah pertanian secara benar.

C. Internal Rate Of Return (IRR)

Internal rate of return atau tingkat pengembalian investasi adalah sebesar 30.11%, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan yaitu sebesar 11.25%, maka berdasarkan kriteria inipun usaha budidaya jagung di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa layak diupayakan. *Accounting rate of return* atau tingkat laba akuntansi merupakan laba yang dihasilkan selama suatu periode akuntansi dibagi dengan jumlah uang yang diinvestasikan selama periode yang samamencapai 32%. Angkanya menunjukan nilai positif, lebih besar dari tingkat diskonto yang digunakan, sehingga lebih memperkuat kriteria IRR.

D. Net Benefit Cost Ratio (BCR)

Net Benefit Cost Ratio atau nisbah manfaat bersih terhadap biaya, yang merupakan angka perbandingan antara *present value* manfaat dengan *present value* biaya. Dari hasil perhitungan didapat angka sebesar 1.69, ditunjukkan oleh *Prifitability Index*. Nilai ini lebih dari satu menunjukkan bahwa berdasarkan kriteria BCR, usaha budidaya jagung dapat dilaksanakan, hingga skala besar dengan periode pengembalian investasi selama 3 tahun.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1 Asumsi Kelayakan Usaha Komoditi Unggulan

1	Pengolahan lahan; 10 orang; Rp. 100.000=	Rp.	1000000
2	Bibit, 15 kg; Rp. 250.000 per kg=	Rp.	750000
3	Pupuk Urea; 150 kg; Rp. 150000 per 50 kg	Rp.	300000
4	Pupuk NPK; 200 kg; Rp. 125000 per 50 kg	Rp.	500000
5	Herbisida; Rp. 500000 per 1 ha	Rp.	500000
6	Transport pupuk; 20 karung @ Rp. 10000	Rp.	100000
7	Penanaman; 20 orang; @ Rp. 15000	Rp.	300000
8	Pemupukan; 10 orang; @ Rp. 50000	Rp.	500000
9	Semprot herbisida, 50 tangki @ Rp. 5000	Rp.	250000
10	Panen, 20 orang @ Rp. 50000	Rp.	1000000
11	Pengangkutan ke mesin pipil; 20 karung @ Rp. 10000	Rp.	200000
12	Biaya mesin pipil, 20 karung@ 10000	Rp.	200000
13	Biaya Pemeliharaan	Rp.	400000
	Biaya Total Produksi Jagung per Hektar	Rp.	6000000

Sumber : Hasil Analisis, 2016

Tabel 2 Kelayakan Usaha

Kelayakan Usaha Tani Jagung		
Metode Non Discounted Cash Flow		
Average Benefit – Cost	16046770	layak, positif
Investasi	50500000	
Payback Periods	3 tahun	0 bulan
Accounting Rate of Return	32%	layak> tingkat diskonto
Metode Discounted Cash Flow		
Net Present Value	32223744	Layak
Profitability Index	1.69	layak, dapat diusahakan hingga skala besar
IRR	30.11%	layak> tingkat diskonto
ANALISIS BEP & RETURN ON INVESTEMENT		
Kuantitas produksi per tahun (kg)		5,100.50
Biaya variabel per kg		1,321.75
Harga jual per kg		4,582.57
BEP (kg)		623.47
BEP (Rp)		2,857,081.30
Return On Investment (%), tahun pertama		34%

Sumber : Hasil Analisis, 2016

4. *Bussiness Plan* KTM Labangka

KTM Labangka dapat terus bertumbuh kembang dengan mengandalkan komoditi jagung, mengingat seluruh wilayah memiliki produk unggulan jagung. Dengan demikian hanya dengan meningkatkan produksi hortikulturanya, maka KTM Labangka akan benar-benar menjadi wilayah mandiri yang menjadi basis komoditi jagung.

Dengan potensi yang dimiliki KTM Labangka sebagai produsen jagung yang cukup besar maka*Bussiness Plan* yang dapat dikembangkan secara komprehensif adalah sebagai berikut :

A. Pengembangan Rantai nilai

Rantai nilai jagung di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa melibatkan 3 (tiga) aktor utama, yaitu

- Petani: melakukan seluruh proses budidaya tanaman jagung di lahan-lahan pertanian, mulai dari penyiapan lahan – penanaman – pemeliharaan – panen;
- Pengumpul: mereka mengambil hasil panen dari para petani, mengumpulkannya dan menyetorkannya kepada para pedagang di tingkat kabupaten atau provinsi.
- Pedagang: menerima hasil panen dari petani atau pengumpul, dan mengirimkannya ke para pembeli, baik antar pulau maupun ekspor.

B. Pengembangan Produksi

Mayoritas produk jagung yang dijual oleh petani di KTM Labangka adalah dalam bentuk jagung kering pipilan dengan kadar air rata-rata 17%. Benih yang digunakan oleh sebagian besar petani adalah benih jagung hibrida. Produktivitas jagung di KTM Labangka sudah sangat baik, 6.67 ton per hektar pada tahun 2014, pada tahun 2013 sebesar 5, 73 ton per hektar dan tahun 2012 sebesar 5.46 ton per hektar, jauh lebih tinggi dari rata-rata produktivitas nasional, 4.5 ton per hektar. Namun demikian, produksi dan produktivitas masih dapat terus ditingkatkan melalui penerapan teknologi budidaya yang lebih baik, terkait benih, tehnik pemupukan dan penanaman yang lebih baik.

C. Perluasan Pasar

Pasar antar pulau mendominasi penjualan hasil produksi jagung di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa (sekitar 70%). Mayoritas hasil panen jagung dijual ke para pedagang di kabupaten dan atau provinsi, untuk selanjutnya dikirimkan ke para pedagang di Surabaya. Produk jagung berupa jagung pipilan dengan kadar air 17% sebagai bahan baku pakan ternak bagi industri-industri pakan ternak di Jawa. Jagung yang dibeli dari pedagang pengumpul kemudian dikapalkan melalui Pelabuhan Laut ke Surabaya, Jakarta, Lombok, Bali, bahkan ke luar Negeri Malaysia dan Australia. Dari total 400 ribu ton ekspor jagung Indonesia, kontribusi Kabupaten Sumbawa mencapai 40 persen, atau dengan kata lain, 134 ribu ton jagung ekspor berasal dari Kabupaten Sumbawa. Sebagian kecil hasil panen jagung (kurang dari 1%) juga dijual petani ke pasar tradisional di Kabupaten Sumbawa.

Perlu dicatat, pasar ekspor masih luas untuk jagung sebagai bahan baku utama pakan ternak dan industri lainnya, sementara pasar domestik juga masih *over supply*, sehingga masih terdapat impor jagung ke Indonesia untuk pakan ternak. Pemerintah memutuskan untuk mengimpor jagung sebanyak 2,4 juta ton untuk kebutuhan pakan ternak pada 2016. Impor itu akan direalisasikan secara bertahap sebanyak 200 ribu ton setiap bulan. Impor tahun depan hanya mencapai 30% dari total kebutuhan jagung nasional yang mencapai 8,6 juta ton per tahun atau sekitar 665 ribu ton per bulan. Sementara untuk tahun 2017 direncanakan sebesar 5.21 juta ton untukmenutupi kekurangan produksi domestik yang mencapai 19.83 juta ton.

D. Peningkatan Lingkungan Usaha

Isu penting terkait komoditi jagung saat ini adalah kualitas, pembentukan harga, kualitas, dan ketepatan waktu. Berbeda dengan harga padi, jagung tidak memiliki barometer harga standar atau patokan seperti halnya Harga Pembelian Pemerintah (HPP) seperti padi/beras., membuat petani kesulitan dalam menetapkan keputusan bisnis.Kondisi ini membuat harga jagung mengikuti mekanisme pasar bebas, dimana penentunya adalah hukum *supply* dan *demand*. Perkembangan harga domestik bahkan local mengikuti fluktuasi dan kecenderungan harga internasional. Ketidakstabilan harga ini kerap merugikan pedagang. Dalam hal ini diperlukan perlindungan pemerintah daerah untuk dapat menetapkan harga referensi regional di Kabupaten Sumbawa.

E. Peningkatan Keuangan/Modal

Akses petani ke sumber pembiayaan sangat terbatas. Selama ini petani memenuhi kebutuhan permodalan dari pinjaman bibit dan pupuk ke para pengumpul/pedagang. Dukungan lainnya mayoritas berasal dari Pemerintah dan Pemda, misalnya bantuan permodalan dari Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) dari Kementerian Pertanian yang disalurkan melalui Gapoktan. Masing-masing Gapoktan mendapatkan dana PUAP sebesar Rp. 100 juta, dimana peruntukan dana tersebut adalah 50% utk kegiatan budidaya dan 50% untuk non budidaya. Wawancara dengan salah satu Gapoktan menginformasikan bahwa,

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dana PUAP tersebut hanya cukup untuk 50 petani yang menjadi anggota Gapoktan.49. Artinya, tiap petani mendapatkan Rp. 2 juta untuk 1 tahun (2 kali musim tanam). Kebutuhan ekstensifikasi dan berbaikan kualitas produk melalui proses pasca panen yang telah dihitung kelayakannya memerlukan investasi sebesar 6 juta rupiah untuk proses produksi per musim tanam, dengan tambahan investasi alat dan peralatan sebesar Rp.50.5 juta rupiah.Dengan daya serap pasar yang sangat besar, masalah keuangan dan permodalan seyogyanya dapat diatasi melalui kebijakan.

F. Pengembangan Informasi

Informasi yang saat ini tersedia bagi petani dan pedagang adalah informasi mengenai harga jual. Namun, informasi mengenai kebutuhan pasar masih sulit untuk diperoleh, sehingga selama ini terjadi ketidaksesuaian (*mismatch*) antara pasokan dan permintaan, sehingga mengakibatkan terjadinya ketidakstabilan harga. Oleh karena itu peningkatan informasi mengenai kebutuhan pasar harus terus ditingkatkan.

5. Pengembangan Kebijakan Melalui Penguatan Kelembagaan

Dalam rangka menunjang penerapan konsep agropolitan dan business plan yang juga tidak kalah penting adalah pengembangan kelembagaan. Pengembangan kelembagaan di KTM Labangka merupakan upaya pemberdayaan dalam rangka menumbuhkan kemandirian masyarakat yang ada di KTM. Terdapat 3 hal pokok untuk pengembangan kelembagaan masyarakat yaitu: pihak yang terlibat (baik individual ataupun *social group*); tata hubungan di antara pihak yang terlibat (aspek struktur); aturan main di antara pihak yang terlibat (aspek kultur).

Model kelembagaan dikembangkan secara *bottom up*pendekatan *Participatory Assessment and Planning Approach.* Rancangan pengembangan model kelembagaan masyarakat tersebut terdiri atas 4 (empat) kelembagaan penting [6]. Secara rinci kelembagaan yang dikembangkan di KTM Labangka adalah sebagai berikut :

a) Pengelola KTM

Merupakan lembaga yang dibentuk oleh Pemda Kabupaten Sumbawa yang mempunyai tugas untuk mengelola seluruh kegiatan yang ada di KTM, terutama kegiatan perekonomian masyarakat. Pengelola KTM dapat berupa suatu Unit Pelaksana Teknis Dinas yang terkait dengan KTM misalnya Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau dinas teknis lainnya di lingkungan Kabupaten Sumbawa. Pengelola KTM akan menjadi sentral dalam ,mengembangkan*bussines plan* yang telah dirancang untuk kemudian diimplementasikan di dalam pembangunan KTM. Pengelola KTM akan menjadi koordinator bagi LKM (Lembaga Keuangan Mikro), Gapoktan, LKB (Lembaga Keuangan Bermediasi) dan LKA (Lembaga Klinik Agribisnis)...

b) Lembaga Keuangan Mikro(LKM):

Merupakan pelayanan jasa keuangan yang tidak hanya terbatas pada pemberian skim kredit tetapi juga kegiatan *savings mobilisation*(Ellis, 1992; Singh, 2002 dalam [6]. Pengembangan lembaga LKM di KTM secara mandiri dan berkesinambungan merupakan sesuatu yang penting untuk mendukung pengembangan Agribisnis Industrial Pedesaan(AIP), secara berkelanjutan . Kelembagaan lembaga keuangan mikro (LKM) juga ditujukan untuk mengembangkan kegiatan yang dilakukan oleh kelompok tani (Gapoktan), lembaga Klinik Agribisnis (LKA) dan lembaga Kemitraan Bermediasi (LKB), yang ketiganya berada dalam Lembaga Pengelola KTM. Sebaliknya, masing-masing lembaga tersebut juga diharapkan dapat memberikan dukungan bagi pengembangan LKM melalui *savings mobilization.* Lembaga keuangan mikro (LKM) ini dapat dikembangkan dari lembaga-lembaga permodalan masyarakat yang sudah ada. Pada awal penumbuhannya LKM disertai dengan dukungan skim modal kerja dan pembinaan dari berbagai pihak, seperti BUMD, BUMN, swasta dan instansi terkait seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Pertanian serta Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Sumbawa Pembinaan dan pendampingan LKM dilakukan oleh Pemda Kabupaten Sumbawa melalui Forum Komunikasi yang diprakarsai oleh Pengelola KTM.

c) Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan)

Kelembagaan gapoktan yang merupakan bagian dari kelembagaan Pengelola KTM merupakan kumpulan beberapa kelompok tani yang terdiri dari 20 hingga 25 kelompok tani, dalam satu desa maupun dari beberapa desa yang ada di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa. Fungsi dan peran Gapoktan adalah memfasilitasi pemecahan kendala/masalah yang dihadapi petani dariberbagai kelompok tani yang

tergabung dalam Gapoktan. Pembentukan Gapoktan disertai dengan pembentukan unit-unit usaha berdasarkan adanya kendala atau masalah yang dihadapi oleh petani dalam mengembangkan usaha agribisnisnya. Dengan demikian pembentukan unit usaha dalam Gapoktan bersifat kondisional dan tergantung pada kendala yang dihadapi petani di KTM. Keberadaan Gapoktan ditujukan untuk menunjang kegiatan: Agribisnis Industrial Pedesaan (AIP), Sistem Usahatani Intensifikasi dan Diversifikasi (SUID) serta untuk mendukung pengembangan: LKA, LKM (melalui *saving mobilization)*, dan LKB, dalam kerangka sistem dan usaha agribisnis yang dikembangkan. Anggota Gapoktan juga dapat dijadikan sebagai *focal point* untuk mengembangkan *farm model* di KTM . Posisi Kelembagaan peneliti, penyuluh, adalah memfasilitasi dan mendorong terjadinya *partitsipasi interaktif* antar kelompok tani/masyarakat dalam proses pengambilan keputusan mengenai perencanaan dan pengembangan usahanya..

d) Lembaga Kemitraan Bermediasi (LKB)

Lembaga Kemitraan Bermediasi (LKB) sebagai bagian dari Kelembagaan Pengelola KTM, membantu peningkatan pendapatan petani melalui pengembangan sistem pemasaran. Model LKB atau disebut sebagai model MOTRAMED [6] terdiri dari tiga lembaga yang bermitra, yaitu Gapoktan, pengusaha, dan mediator. Petani dan pengusaha menyepakati produk yang dinegosiasikan hanya yang memenuhi syarat (jumlah dan mutu), dan sedapat mungkin diikat dalam perjanjian kerjasama secara tertulis (*contract farming*). Dalam hal ini, pengusaha diharapkan dapat memberikan jaminan harga minimal pembelian atau rumus harga tertentu yang disepakati pada saat menjelang musim panen. Selanjutnya, mediator merupakan suatu lembaga netral yang memiliki pengetahuan dan kompetensi terhadap obyek yang dimitrakan, serta dikenal dan dipercaya oleh Gapoktan dan pengusaha. Mediator bertugas membuat kajian tentang peluang untuk membangun kemitraan, berusaha meyakinkan dan membangun kepercayaan Gapoktan maupun pengusaha tentang pentingnya dan manfaat membangun kemitraan bisnis. Dalam hal ini diperlukan dukungan dari LKM untuk mendukung secara finansial kebutuhan inovasi yang dikembangkan dalam kemitraan tersebut.

e) Lembaga Klinik Agribisnis

Lembaga Klinik Agribisnis yang merupakan bagian dari Kelembagaan Pengelola KTM, selain dikembangkan untuk memberdayakan masyarakat petani (*self empowerment*), juga merupakan pusat informasi agribisnis dan wadah "*collective learning*" untuk menumbuhkan dan meningkatkan kapabilitas petani di dalam menemukan solusi bagi persoalan usahatani, serta berfungsi sebagai proses "*social learning*" untuk merancang sistem kehidupan yang lebih baik di KTM. Lembaga ini berpengaruh kuat terhadap keberhasilan SUID dan AIP Untuk itu LKA bekerjasama dengan Balai Penyuluhan Pertanian menjadi salah satu sarana pusat pelayanan informasi untuk pengembangan agribisnis di KTM. Dalam LKA dapat dirancang berbagai bentuk kegiatan demplot hasil temuan paket teknologi yang sesuai dengan potensi dan daya dukung wilayah. Untuk mewujudkan berbagai kegiatan demplot di klinik agribisnis, dukungan finansial dari LKM sangat diperlukan. Di samping itu, peran lembaga penyuluh, lembaga penelitian dan Gapoktan dalam mendesain berbagai kegiatan demplot juga sangat menentukan keberhasilan pengembangan klinik agribisnis.

Dengan konsep pengembangan kelembagaan seperti diatas maka peranan Pengelola KTM menjadi sangat penting, sehingga pembentukannya harus menjadi prioritas Pemda Kabupaten Sumbawa

KESIMPULAN

Kesimpulan

- Komoditi jagung dapat menghasilkan berbagai produk sampingan yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi sehingga dapat meningkatkan perekonomian wilayah di Kawasan Labangka
- Berdasarkan perhitungan kelayakan ekonomi dan analisis finansial komoditi unggulan dperoleh hasil yang sangat signifikan bagi pengembangan komoditi unggulan jagung sebagai leading sector kegiatan ekonomi di Kawasan Agropolitan Labangka.
- *Blueprint Bussinnes Plan* untuk KTM Labangka dengan komoditi jagung sebagai leading sector dibangun secara komprehensif berdasarkan rantai nilai, produksi, pasar, lingkungan usaha, keuangan dan informasi yang terkait dengan komoditi jagung.
- Kebijakan yang akan diterapkan dalam pembangunan KTM Labangka dilakukan melalui penguatan kelembagaan yang ada di KTM seperti perlunya dibentuk lembaga pengelola KTM sebagai sentral dalam mengembangkan *bussines plan* yang telah dirancang dan menjadi koordinator bagi LKM (Lembaga Keuangan Mikro), Gapoktan, LKB (Lembaga Keuangan Bermediasi) dan LKA (Lembaga Klinik Agribisnis).

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Saran

Dalam rangka mencapai tujuan penelitian yang diharapkan, beberapa saran yang dapat diberikan adalah sebagai berikut :

- Pemerintah daerah perlu memberikan bantuan yang besar untuk terus meningkatkan komoditi jagung sebagai sektor unggulan di KTM Labangka melalui bantuan bibit unggul dan pupuk yang berkualitas. Hal penting lainnya juga perlu diberikan pelatihan bagi petani untuk terus meningkatkan kemampuan bertaninya melalui teknologi tepat guna sehingga komoditi jagung dapat ditanam dan panen setahun 2 kali.
- Dengan *Bussines Plan* yang dihasilkan, KTM Labangka dapat menerapkannya didalam pembangunan KTM terutama rangsangan bagi tumbuhnya usaha-usaha lanjutan dari komoditi jagung yang merupakan sumber penghidupan masyarakat KTM sehingga jagung yang dijual bukan produk mentah tetapi produk jadi ataupun setengah jadi.
- Penguatan kelembagaan menjadi sangat dibutuhkan untuk dapat menggerakkan perekonomian KTM Labangka, terutama lembaga pengelola KTM yang dibentuk oleh Pemda Kabupaten Sumbawa. KTM akan mendorong terbentuknya LKM, Gapoktan, LKB dan LKA.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 tahun 2009 tentang Ketransmigrasian
[2] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Transmigrasi
[3] Mulyawati, Lilis Sri dan Adi, Ina Sri Supina, 2016, Penerapan Model Agropolitan dalam Pengembangan Wilayah di KTM Labangka Kabupaten Sumbawa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Laporan Hasil Penelitian Hibah Bersaing, Simlitabmas Dikti-Universitas Pakuan.
[4] Anonimous, Litbang Pertanian, Kementerian Pertanian, 2012
[5] BM Prasanna Director, Global Maize Program, dalam presentasi Maize in the World: Trends, Challenges and Opportunities, IMC, Gorontalo 22 November 2012
[6] Hermanto, 2007, Rancangan Kelembagaan Tani Dalam Implementasi Prima Tani di Sumatera Selatan, Jurnal Kebijakan Pertanian Vol 5 No. 2, Juni 2007, 110-125

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KAJIAN PENATAAN EKSISTENSI AMPUNG TERJEPIT (*ENCLAVE*) AKIBAT PENGEMBANGAN PERUMAHAN SKALA BESAR

(Studi Kasus Kampung Lengkong Ulama Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang)

Medtry[1)], Budi Haryo [1)] dan Kusmalinda Madjid[1)]

[1]Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota – Institut Teknologi Indonesia

Email :medtry.sumatra@gmail.com, budiharyo@gmail.com, kusmalinda2013@gmail.com

Naskah diterima :7 Maret 2017 Naskah direvisi : 12 Maret 2017 Disetujui terbit : 21 Maret 2017

ABSTRAK

Wilayah Kabupaten Tangerang yang berbatasan dengan Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan merupakan kawasan dengan pertumbuhan tinggi. Pengaruh kota Inti Jakarta yang begitu kuat akan kebutuhan lahan untuk perumahan skala besar mengakibatkan banyak kampung-kampung yang tergusur. Kini para pengembang (developer) perumahan real estate "mengepung" wilayah tersebut. Tidak jarang terdapat permukiman padat perkotaan atau kampung kota di wilayah perbatasan khususnya yang tinggal di DAS atau sempadan sungai Cisadane terisolir, terjepit dan menjadi kantong-kantong (enclave), serta menjadi halaman belakang perumahan/permukiman real estate. Kampung Lengkong Ulama adalah salah satu kampung yang rawan tergusur akibat pengembangan perumahan elite di sekitar DAS Cisadane.Padahal kawasan ini memiliki situs sejarah dan budaya, banyak ulama dan santri yang belajar di kawasan ini.Cikal bakal perkampungan sudah ada sejak tahun 1628 terdapat perkampungan tua dan makam Raden Aria Wangsakara. Metode yang dilakukan dalam kajian ini dengan analisis aspek fisik, ekonomi dan sosial budaya.Melakukan social mapping untuk menjaring keinginan dari berbagai kelompok masyarakat.Dalam kajian ini berupaya agar eksistensi kampung tua bersejarah tidak tergusur dan tetap eksis dengan usaha mencegah timbulnya permukiman kumuh di sempadan Sungai Cisadane sekaligus menciptakan melting pot (ruang komunitas) untuk bersosial, berekreasi dan berbudaya bagi masyarakat perkotaan, peluang pengembangan ekonomi bagi warga kampung yang dapat berselaras dengan permukiman skala besar pada wilayah tersebut.

***Kata kunci** : kampung terjepit (enclave), eksistensi, ruang komunitas (melting pot)*

PENDAHULUAN

Sepanjang Sungai Cisadane menjadi kawasan permukiman perkotaan yang padat karena lokasinya strategis dan merupakan wilayah peri urban kota Jakarta.Kampung Lengkong Ulama RW 01, Desa Lengkong Kulon Kecamatan Pagedangan Kabupaten Tangerang merupakan kawasan yang menjadi kantong perumahan lama yang terjepi (*enclave*) oleh perumahan skala besar Bumi Serpong Damai (BSD). Letaknya strategis, berada di pinggiran Sungai Cisadane.Dengan perkembangan perkotaan yang cukup cepat saat ini, tidak menutup kemungkinan sempadan Cisadane kedepan akan menjadi kantong-kantong kumuh baru yang barang tentu tidak layak, tidak aman bahkan jauh dari nyaman. Kondisi saat ini Kampung Lengkong Ulama masih masih didiami penduduk suku Betawi keturunan Arab ada 54 marga, suku Sunda dan para pendatang.

Dahulu kawasan ini adalah permukiman yang awal dibangun oleh Raden Aria Wangsakara, beliau adalah keturunan bangsawan Kerajaan Sumedang yang diutus ke Banten yang kala itu ada perselisihan antara kerajaan Banten dengan kerajaan Mataram. Kampung ini berada di pinggiran sungai Cisadane karena sungai sebagai ases transportasi.

Kawasan sebuah kota mengalami fluktuasi dalam fase-fase kehidupan mulai dari terbentuk, tumbuh dan mengalami penurunan. Begitupun kawasan Lengkong Ulama ini, penurunan fungsi kawasan akibat menurunnya tingkat ekonomi, sirkulasi yang sempit, penataan bangunan tidak teratur, drainase yang tidak baik, serta sistem penyediaan air bersih dan sampah yang tidak baik yang dikhawatirkan kawasan ini berpotensi menjadi

kampung kumuh. Ditambah lagi ulah para developer perumahan *real estate* "mengepung" wilayah tersebut.

Oleh karena itu perlu peran pemerintah daerah khususnya pemerintah kabupaten Tangerang, berupaya agar eksistensi kampung dapat berperan dalam menciptakan hunian yang layak dan dibutuhkan oleh warga.Tidak harus kawasan ini digusur demi kepentingan developer yang mencari keuntungan menjadikan kawasan baru dengan pola penataan kawasan yang baru pula.

Penelitian ini bertujuan mencari solusi program apa yang bisa diwujudkan agar eksistensi kampung lama dapat bersanding dengan perumahan skala besar. Mencegah timbulnya permukiman kumuh di sempadan Sungai Cisadane sekaligus menciptakan *melting pot* (ruang komunitas) untuk bersosial, berekreasi dan berbudaya bagi masyarakat perkotaan.Serta menciptakan kegiatan ekonomi baru bagi masyarakat yang dapat meningkatkan kualitas hidup bagi warga kampung Lengkong Ulama.

METODE PENELITIAN

Penelitian atau riset pada hakikatnya bertujuan untuk memperoleh pengetahuan tentang sesuatu yang dianggap benar melalui proses bertanya dan menjawab (W. Gulo, 2000). Penelitian bertitik tolak dari pertanyaan yang muncul karena adanya keraguan dan keraguan ini menjadi dasar kenapa harus dilakukan studi atau kajian.

Studi kasus lebih dikehendaki untuk melacak peristiwa-peristiwa kontemporer, bila peristiwa-peristiwa yang bersangkutan tak dapat dimanipulasi (Yin Robert, 2002).Dalam kasus penelitian ini ada keraguan tentang eksistensi kampung apakah bisa di pertahakan dengan lokasi yang strategis dan pengaruh pasar akan kebutuhan rumah yang akan dibangun oleh developer yang mengincar tanah atau lahan pada lahan tersebut.

Lokasi penelitian berada di Kampung Lengkong Ulama RW 01, Kelurahan Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang.

Tujuan dari penelitian ini adalah melakukan kajian penataan permukiman sempadan Sungai Cisadane (Kampung Terjepit/*enclave*) memperkuat eksistensi sebagai kawasan budaya yang patut dilestarikan.

Adapun sasaran dari penelitian ini adalah sebagai berikut ;

a) Mengidentifikasi potensi dan masalah fisik, sosial dan ekonomi
b) Mengidentifikas potensi wisata Mengembangkan potensi ekonomi yang menjadi penompang hidup masyarakat
c) Menciptakan *melting point* (ruang komunitas) untuk bersosial, berekreasi dan berbudaya bagi masyarakat perkotaan

Tahapan dalam penelitian pertama adalah melakukan pemetaan Isu. Hal ini penting karena perlu diketahui lebih mendalam isu-isu apa yang ada dalam kawasan mikro maupun kawasan makronya serta menjaring isu dari semua lapisan masyarakat mulai dari tokoh yang berpengaruh, para remaja, orang tua, pekerja. Untuk mendapatkan isu strategis dilakukan kegiatan Focus Group Discussion.Metode ini merupakan penggalian data yang lebih akhir digali dan dikembangkan dan dikenal sebagai salah satu metode yang dianggap ilmiah dan diakui keandalannya dalam menggali data yang bersifat kualitatif (Herdiansyah, 2013).

Metode selanjutnja dengan melakukan metode *social mapping. Social Mapping*adalah proses penggambaran masyarakat yang sistematik serta melibatkan pengumpulan data dan informasi mengenai masyarakat termasuk di dalamnya profile dan masalah sosial yang ada pada masyarakat tersebut.

Mengapa perlu dilakukan *social mapping* hal ini dikarenakan beberapa hal yang dibutuhkan dalam penelitian ini antara lain;

a) Paham Karakeristik masyarakat yang akan dibina
b) Tahu potensi dan masalah masyarakat sasaran.
c) Mengetahui kebutuhan masyarakat
d) Sebagai dasar penentuan program agar tepat guna

Social mapping sebenarnya bisa dilakukan oleh siapa saja, asalkan tahu data apa yang akan dicari dan bagaimana mencarinya serta kemampuan komunikasi dan menggali informasi.

Sebelum melakukan analisis lapangan terlebih dahulu menentukan deliniasi kawasan. Ada beberapa pertimbangan dalam menentukan deliniasi kawasan antara lain dengan menentukan radius keunikan, yaitu radius rasa ruang dari pengaruh suatu eksistensi keunikan. Apabila pada suatu lokasi keunikan diintervensi dengan perubahan tersebut dapat menganggu nilai keunikan tersebut (Sadyohutomo, 2008). Pertimbangan selanjutnya adalah eksistensi spasial yaitu menggambarkan peran dan posisi suatu keunikan ruang terhadap

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

eksistensi-eksistensi ruang yang lain serta kapasitasnya memanggil perhatian masyarakat. Kapasitas memanggil ini merupakan jalinan kerja sama antara ruang, aktivitas dan sistem nilai.

Adapun tahapan analisis selanjutnya yang dilakukan yaitu;

a) Analisis fisik lingkungan (analisis tapak)
b) Analisis aksesibilitas (sirkulasi)
c) Analisis sarana dan prasarana
d) Analisis sosial dan kependudukan
e) Analisis potensi pengembangan ekonomi

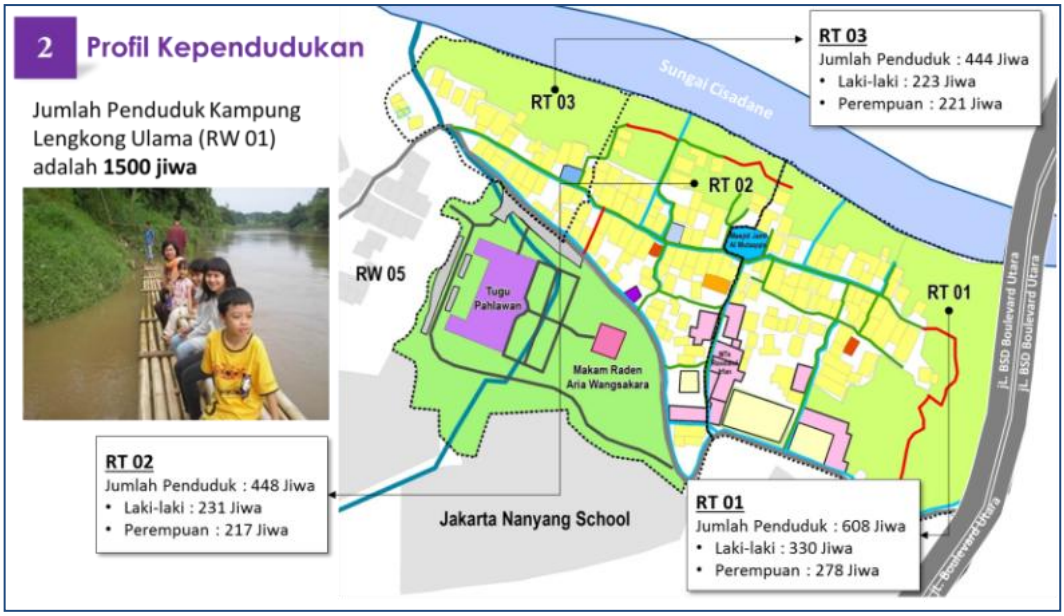

Gambar 2. Profil Kependudukan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejarah berdirinya kampung Lengkong Ulama pada tahun 1628 ada tiga tokoh yang berasal dari Sumedang yaitu Arya Santika, Arya Yudanegara dan Aria Wangsakara ketiganya merupakan utusan yang bertugas menyelesaikan perselisihan antara kerajaan Mataram dengan Kerajaan Banten.Setelah persoalan dapat diatasi mereka diminta untuk menetap di Lengkong dengan diberi imbalan berupa daerah bekas wilayah Pajajaran.Dalam perkembanganya kawasan ini menjadi kawasan pesantren yang berkembang juga di bagian barat sungai Cisadane.Pada masa penjajahan Belanda.Kampung ini beberapa kali diserang karena menjadi basis perlawanan terhadap Belanda.Pada tahun1640 santri-santri dari Pesantren Grendeng yang terusir Belanda, kemudian membangun masjid dan membuat pesantren baru di bawah kepemimpinan Aria Wangsakara.Pada tahun 1652-1653 M, VOC mendirikan benteng di sebelah timur Sungai Cisadane yang persis berseberangan dengan wilayah kekuasaan Aria Wangsakara.

Kampung Lengkong Ulama menjadi titik awal tumbuhnya jiwa patriotik rakyat Tangerang di bawah kepemimpinan Aria Wangsakara melawan penjajah Belanda.Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang saat ini memutuskan untuk menjadikan komplek makam Aria Wangsakara ini sebagai cagar budaya Kabupaten Tangerang.Komplek makam dan perkampungan Lengkong Ulama menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.Upaya mengusur atau mengubah kampung menjadi lahan terbangun baru merupakan upaya menghilangkan jejak sejarah. Untuk itu perlu menjaga agar eksistensi kampung Lengkong Ulama tetap ada dengan pengembangan kawasan ini lebih tertata dengan baik dari segi sirkulasi, ruang terbuka hijau, drainase, air bersih dan sarana prasarana publik.

Isu yang ada saat ini dapat diuraikan sebagai berikut;

a) Eksistensi Lengkong Ulama karena terjepit oleh perumahan besar
b) Cagar Budaya sebagai potensi lokal
c) Terdapat Paguyuban Masyarakat
d) Pemanfaatan wilayah sekitar bantaran sungai
e) Permasalahan Lingkungan

ISBN : 978-602-73463-1-4

f) Masih terdapat jalan rusak dan kondisinya masih tanah
g) Permasalahan Sampah
h) Sistem drainase belum terintegrasi
i) Permasalahan Sanitasi Lingkungan
j) Banjir luapan sungai Cisadane

Profil Kampung Lengkong Ulama akan uraikan dan di bahas sebagai berikut; Jumlah Penduduk Kampung Lengkong Ulama (RW 01) adalah 1500 jiwa. Dengan rincian RT 01 luas wilayah 4,28 hektar, jumlah penduduk 608 Jiwa, rincian Laki-laki330 Jiwa dan perempuan 278 Jiwa. Untuk RT 02 luas wilayah 4,99 hektar total jumlah penduduk 448 Jiwa dengan rincian laki-laki 231 Jiwa dan perempuan 217 Jiwa. Berikutnya RT 03 luas Wilayah 1,52 hektar total jumlah penduduk 444 Jiwa dengan rincian laki-laki 223 Jiwa dan perempuan 221 Jiwa.

Dengan mata pencaharian 50% pedagang, 35 % pegawai swasta, 5 persen PNS dan 10 % Pengangguran. Dapat dilihat pada gambar bagan berikut ini.

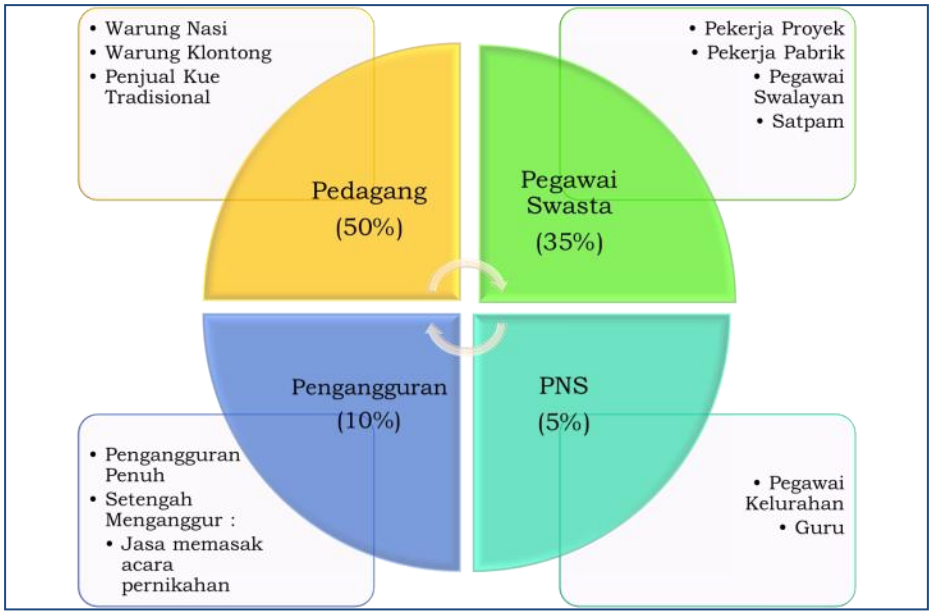

Bagan 1. Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Angka pengangguran cukup tinggi yaitu 10%, kondisi ini sangat rawan akan keberlangsungan eksistensi kampung karena kondisi ini dapat memicu warga mencari pekerjaan di tempat lain atau mereka menjual rumah dan tanah mereka untuk pindah ke tempat lain.

Untuk sirkulasi yaitu jaringan jalan terdapat jaringan jalan utama yang dapat di lewati kendaraan roda empat namun lapangan parkir sangat terbatas. Sirkulasi yang melewati rumah penduduk dengan lebar 1 – 2 meter yang telah paving blok. Masih terdapat jalan yang masih tanah di dekat sepadan sungai Cisadane. Jaringan jalan paving blok perlu ditingkatkan kenyamanan dan keamanannya terutama bagi pemakai sepeda. Saat ini banyak komunitas bersepeda di Tangerang yang berpeluang ditingkatkan pada kawasan kampung Lengkong Ulama ini sebagai pengembangan wisata yang ramah lingkungan. Berikut ini gambar profil kondisi jaringan jalan (Gambar 3)

Kondisi fisik lingkungan binaan di Kampung Lengkong Ulama terdapat sarana peribadatan berupa Masjid Al-Mutaqin, dan 2 Musholah, PAUD Talenta Iman, MI dan MTs Raudatul Irfan, Posyandu Melati dan Masjelis Ta'lim. Berikut ini gambar kondisi fisik binaan (Gambar 4)

Berikut ini kondisi sarana sosial, yaitu balai pertemuan permanen belum ada warga berkumpul di saung atau teras masjid.Untuk itu perlu dibuat gedung atau ruang tempat warga berkumpul sebagai tempat untuk mennyampaikan aspirasi.Berikut ini gambar ketersedian sarana sosial.Ketersedian ruang sosial sangat dibutuhkan oleh warga saat ini warga secara swadaya membuat saung untuk berkumpul dan berkreasi diantaranya mengembangkan seni kaligrafi Islam yang telah lama berkembang di Lengkong Ulama. Pengembangan seni kaligrafi Islam diwadahi paguyuban Kalijaga dengan memberikan ilmu dan belajar seni kaligrafi islam. Upaya ini patut menjadi perhatian agar terjalin terus kesinambungan agar seni kaligrafi tidak punah. Berikut ini gambar ketersediaan ruang sosial (Gambar 5)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Masalah yang tak kalah pentingnya adalah kondisi drainase.Pada kampung Lengkong Ulama masih terdapat jaringan drainase yang terputus tidak berkesinambungan dengan sistim jaringan.Hal ini berpotensi terjadi genangan pada saat musim hujan. Berikut ini gambar kondisi jaringan drainase (Gambar 6)

Letak Kampung Lengkong Ulama yang berada di pinggir sungai Cisadane sangat rawan terhadap banjir.Luapan air sungai pada musim hujan mengenanggi wilayah terutama di RT 01 dan RT 02. Berikut ini gambar peta banjir (Gambar 7)

Masalah lain adalah persampahan, pada kawasan ini masalah pengangkutan sampah dari rumah warga ke tempat pengumpulan sementera tidak terkendala. Yang menjadi kendala adalah tempat pengolahan dan pengangkutan sampah ke tempat akhir.Selain itu masalah prilaku warga yang membuang sampah ke Sungai yang menjadi serius karena menyakut sikap tidak peduli terhadap lingkungan.Perlu upaya mendidik warga dan sangsi yang tegas agar warga tidak membuang sampah sembarangan terutama ke sungai. Berikut ini gambar profil persampahan (Gambar 8)

Saat ini dari total luas lahan 10, 8 ha status kepemilikan lahan terdiri dari milik pemda kabupaten Tangerang 2,75 ha yang saat ini sebagai pemakaman dan tugu pahlawan, 7,12 ha milik masyarakat dan 0,93 ha milik developer Bumi Serpong Damai (BSD). Memang lahan di Lengkong Ulama ini sebagian besar milik warga masyarakat namun jika tidak ada peran kuat pemerintah menetapkan kawasan ini sebagai kawasan cagar budaya dalam RTRW kabupaten Tangerang maka kawasan ini rawan berubah fungsi.Untuk itu perlu pengawasan kuat agar eksistensi kampung lengkong ulama dapat dipertahankan.Tentunya juga penguatan peran ekonomi dan perwujudan penataan kampung yang baik dan dapat bersanding dengan kawasan *real estate* di sekitarnya.

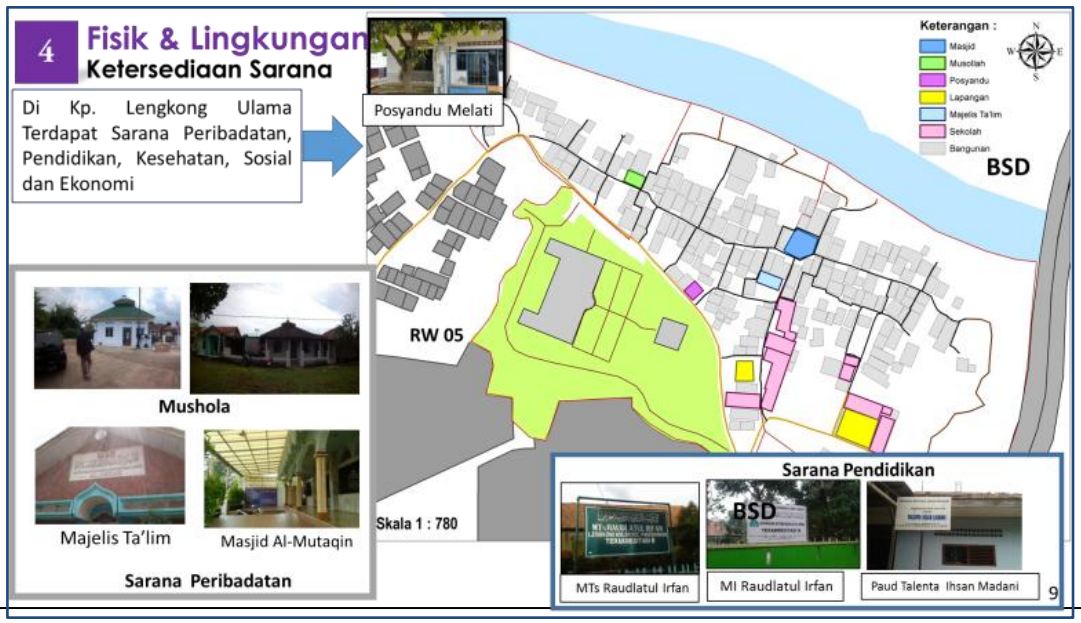

ISBN : 978-602-73463-1-4

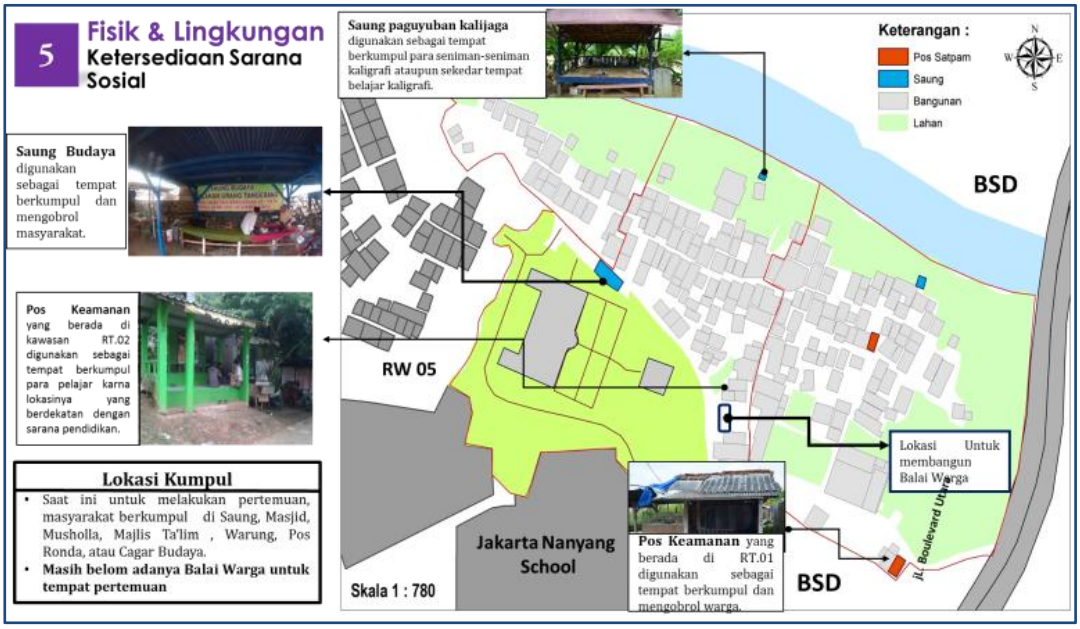

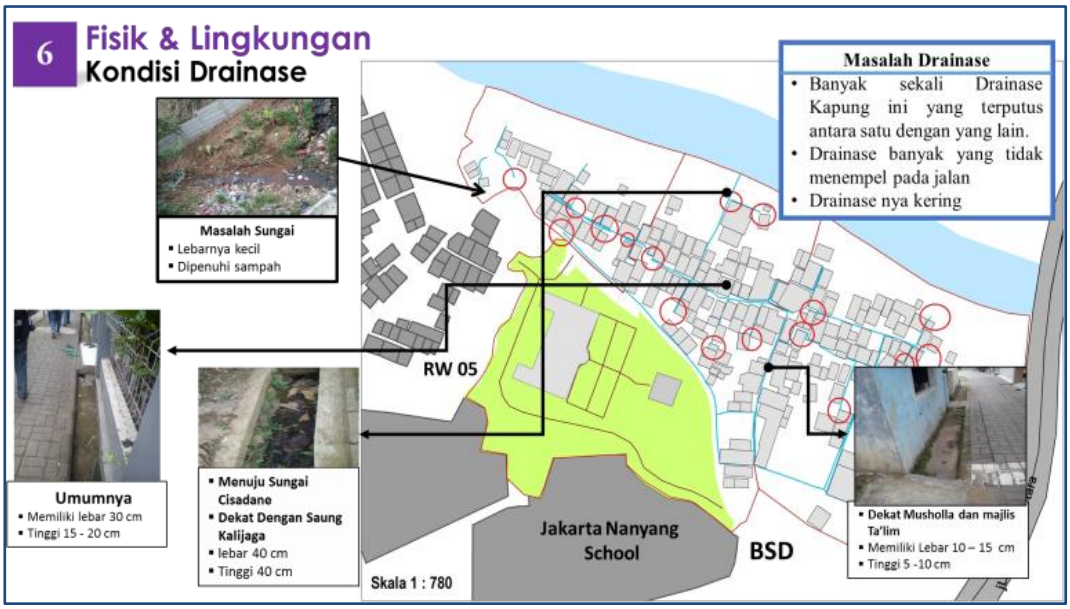

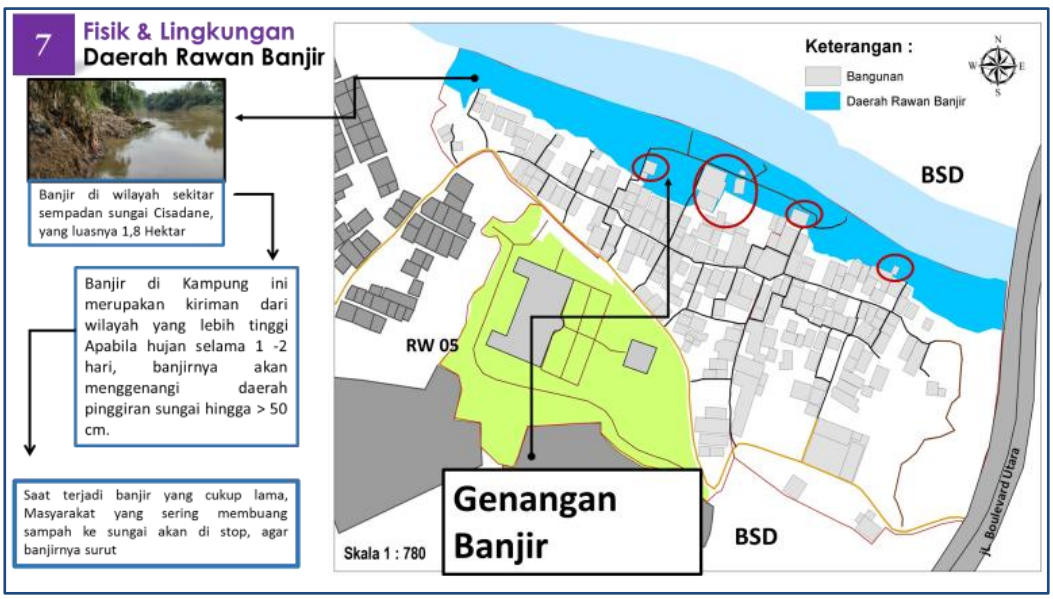

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

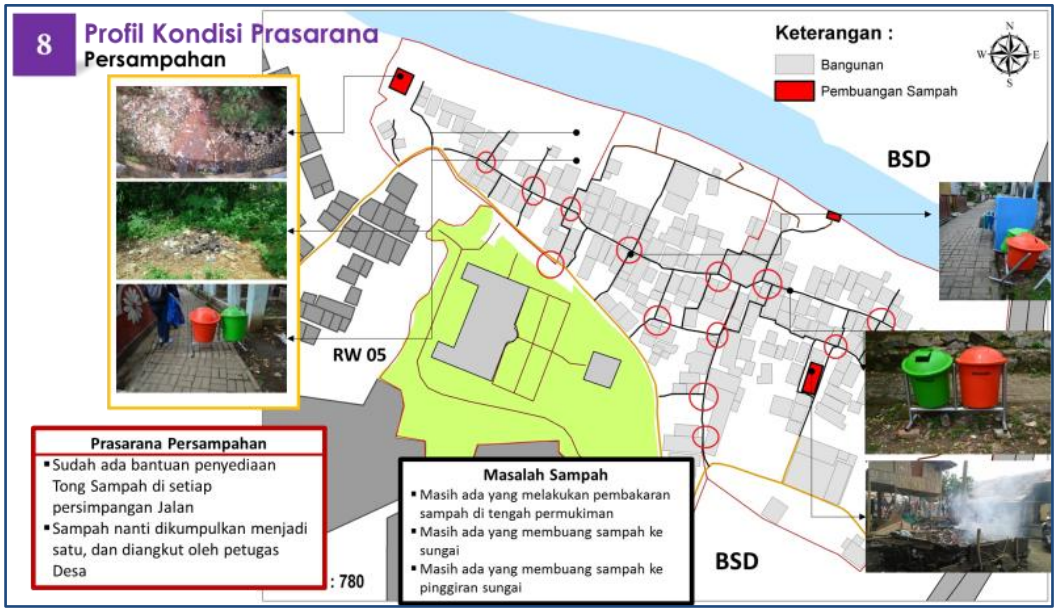

Dari hasil kajian *social mapping* terdapat tokoh-tokoh yang berperan yaitu:

a) Jaro Ahmad (Tokoh Paling Berpengaruh)
b) Bapak Baequni (Sejarahwan Kp. Lengkong Ulama)
c) Kyai Kusasih (Tokoh masyarakat yang dituakan)
d) Ustadz Mukri (Sejarahwan lengkong ulama {keagamaan})
e) Ketua RW & RT(Perangkat Desa)
f) Pemuda (Karang Taruna)
g) Majelis Ta'lim
h) Warga Masyarakat

Hasil *Social Mapping*
Wawacara : Bapak Baequni Banjir dahulu biasanya terjadi setiap 5 tahun sekali, namun saat ini terjadi setiap 1-2 tahun sekali dengan ketinggian banjir mencapai 2 m dan menggenani 2-7 rumah Jumlah penduduk dan rumah di Lengkong ulama tetap bertahan (yaitu 40 suhunan). Terdapat kurang lebih 54 marga keturunan Arab yang terdapat di Kampung Lengkong Ulama. Pada tahun 1960-an mata pencaharian penduduk yaitu sebagai PNS, Namun banyak yng mengundurkan diri karena tidak cocok bekerja dengan sistem perkantoran. Saat ini banyak yang bekerja di mall, pabrik, guru honorer dan guru mengaji. Pendapatan warga Kampung Lengkong ulama rata-rata UMR namun dengan filosofi bersyukur semuanya merasa tercukupi, seluruh kehidupan dilandasi oleh iman dan ketakwaan kepada Allah Tradisi dan acara rutin : PHBN, PHBI, Haulan Raden Aria Wangsakara, pengajian setiap 4 kali seminggu dan Palang Pintu (ketika acara pernikahan) Tradisi yang mulai hilang adalah tradisi memakai sarung untuk para laki-laki akibat perkembangan zaman warga lebih memilih memakai celana bahan atau jeans Kerajinan Kaligrafi (1970-an). Saat ini dilakukan oleh para pemuda/i dengan bimbingan para senior terdahulu. Sistem

ISBN : 978-602-73463-1-4

penjualan kaligrafi ini dilakukan dari mulut ke mulut dan pemesanannya sudah mencapai Amerika dan Arab Saudi. Ibu-ibu Kampung Lengkong Ulama ini memiliki kemampuan memasak berbagai macam kue dan masakan khas timur tengah seperti Nasi Kebuli, Roti Cane Di Lengkong Ulama terdapat situs cagar budaya seperti Makam Raden Arya Wangsakara dan Rumah Cagar Budaya. Terdapat pula benda bersejarah (peninggalan) yaitu berupa kitab yang berisi tulisan kuno seperti ajaran tauhid
Wawancara : Jaro Ahmad Permasalahan yang masih belum dapat diatasi di Lengkong Ulama adalah Permasalahan Persampahan, saat ini Pengelolaan sampah hanya baru pada tahap pembuangan saja itupun secara konvesional seperti dibakar dan dibuang ke sungai, dibutuhkan peran pemerintah untuk membina warga untuk mengolah sampah tersebut. Peran developer yang ada bagi lengkong ulama adalah berupa penyediaan lapangan pekerjaan dari pembangunan yang mereka lakukan seperti pekerja di mall, buruh konstruksi, pemelihara taman dan petugas keamanan Saat ini dilengkong ulama memiliki system ronda keamanan dengan memberlakukan *one door* (pembukaan satu pintu untuk masuk dan keluar) hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam pemantauan keluar masuk kendaraan di salah satu pintu pada malam hari

Dari aspek ekonomi yaitu pemberdayaan potensi masyarakat yang dapat di kembangkan antara lain;

a) Pengembangan kampung wisata, yakni wisata sungai dengan mengembangkan kuliner; kebab dan makanan nusantara sepanjang pingiran sungai Cisadane.
b) Pengembangan lingkungan kampung yang sehat dan bersih; untuk bersepeda, jogging dan jalan kaki
c) Pengembangan rumah kontrakan menjadi *homestay*untuk mendukung wisata
d) Revitalisasi rumah tua (cagar budaya)
e) Pembangunan gallery untuk pengembangan seni kaligrafi
f) Pembangunan gedung pertemua yang terintegrasi dengan lapangan parkir dan sistem sirkulasi sebagai *melting point* (ruang komunitas) untuk bersosial, berekreasi dan berbudaya bagi masyarakat perkotaan.
g) Pengembangan kerajinan bambu untuk menciptakan lingkungan yang berkarakter lokal dan sekaligus untuk mendukung kegiatan wisata (sebagai bahan baku kerajinan tangan dan kreatifitas).
h) Bambu dikembangkan sebagai bahan baku untuk interior dan bahan bangunan yang tradisonal maupun modern.
i) Keterlibatan semua lapisan masyarakat (Inklusif dan Partisipatif)

Saat ini pemerintah kabupaten Tangerang memiliki program yang bernama Program Gerakan Bersama Rakyat Berantas Rumah Kumuh dan Miskin disingkat GEBRAK PAKUMIS.Rumah-rumah yang tidak layak huni dan kumuh bisa dimasukan ke dalam program ini.Selain itu upaya pemerintah kabupaten Tangerang adalah membuat perda untuk menjaga eksistensi kampung terjepit (*enclave*) khususnya Kampung Ulama dari upaya pengalihan lahan untuk perumahan elit (*real estate*).

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari hasil penelitian kajian penataan eksistensi kampung terjepit (*enclave*) akibat pengembangan perumahan skala besar di Kampung Lengkong Ulama Desa Lengkong Kulon, Kecamatan Pagedangan, Kabupaten Tangerang sebagai berikut ;

a) Perlu upaya pemerintah kabupaten Tangerang membuat peraturan daerah menjadikan kawasan Kampung Lengkong Ulama sebagai Cagar Budaya dan memasukannya dalam RTRW dan turunannya ke RDTR - RTBL

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

b) Merealisasikan program penataan kampung mulai dari penataan fisik, peningkatan sirkulasi jaringan jalan, peningkatan sistem air bersih, peningkatan jaringan drainase tidak terputus dan berkesinambungan serta pengelolaan sampah dan sanitasi
c) Peningkatan kualtas lingkungan fisik menjadi lingkungan yang hijau, ramah dan berkreasi namun tetap menjaga karakter sebagai lingkungan Lengkong Ulama sebagai Cagar Budaya.
d) Pengembangan ekonomi warga masyarakat dengan membuka dan mengembangkan peluang-peluang bisnis seperti kampung wisata, kuliner, gallery, *homestay*, kerajinan, dengan melibatkan semua lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. Gulo *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT. Gramedia Widiasarana, 2010
[2] Yin Robert K*, Studi Kasus Desain & Metode,* PT. Raja Grafirindo Persada, Jakarta 2002
[3] Herdiansyah Haris, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups*, PT. Raja Grafirindo Persada, Jakarta 2013
[4] Sadyohutomo Mulyono, Manajemen Kota dan Wilayah, Realita dan Tantangan, Bumi Aksara, Jakarta 2008
[5] Website : http://www.tangeranghits.com/babad-banten/2761/aria-wangsakara-penyebar-agama-dan-pelopor-bela-negara
[6] http://www.kompasiana.com/ibuseno/kelak-makam-pahlawan-kab-tangerang-ada-di-lengkong-kulon

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KEBIJAKAN PENGENDALIAN RUANG PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN DI KOTA PADANG: STUDI KASUS PEMANFAATAN LAHAN UNTUK PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Melinda Noer[1)], Rian Hidayat[1)], Yushy[2)].

[1)]Dosen Fakultas Pertanian Universitas Andalas

[2)]Mahasiswa Program Studi Perumahan dan Pemukiman Pascasarjana Universitas Andalas

Email : melindanoer@yahoo.com; rianpiliang@yahoo.com; yushy@yahoo.com

Naskah diterima :17 Maret 2017 Naskah direvisi : 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentangimplementasi kebijakan di bidang perumahan dan permukiman yang akhir-akhir ini diamati semakin jauh jarak antara rencana tata ruang dan pemanfaatan ruang wilayah. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menggambarkan hasil kajian implementasi kebijakan pengendalian ruang wilayah dan menjelaskan permasalahan sejauh mana rencana tata ruang dipedomani dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Padang, khususnya di Kecamatan Pauh. Urgensi penelitian adalah pentingnya mempedomani rencana tata ruang wilayah dalam merencanakan program dan kegiatan pembangunan, sehingga pemanfaatan ruang wilayah dapat terlaksana secara tertib dan berkelanjutan sesuai dengan pola ruangnya. Lokasi penelitian di Kecamatan Pauh Kota Padang yang tercacat sebagai wilayah yang cepat perkembangannya dan termasuk tinggi laju pengalihfungsian lahan pertanian menjadi lahan perumahan dan permukiman. Metoda penelitian deskriptif kualitatif dipilih agar dapat menggambarkan dan menjelaskan proses terjadinya peralihan pemanfaatan lahan sehingga tidak lagi sesuai dengan peruntukannya melalui proses perizinan pembangunan atau pendirian perumahan dan bangunan yang dilakukan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pengendalian ruang pembangunan perumahan dan permukiman di lokasi studi belum terlaksanasecara efektif dan belum sepenuhnya mempedomani kebijakan penataan ruang wilayah yang berlaku. Pembangunan perumahan dan permukiman ditemukan juga menggunakan lahan pertanian yang kejadiannya diawali dengan perubahan kepemilikan lahan. Perubahan kepemilikan lahan pertanian tersebut dapat terjadi dalam jumlah yang luas dan berkelompok pada satu hamparan, namun dapat juga terjadi pada luas lahan yang kecil dan terpencar. Pengendalian ruang wilayah untuk pembangunan perumahan dan permukiman perlu ditegakkan secara tegas agar sesuai dengan rencana tata ruang wilayahagar pembangunan sektor perumahan dan permukiman tidak mengancam keberlanjutan pemanfaatan lahan untuk pembangunan sektor lain khususnya pembangunan pertanian sebagai sumber produksi pangan.

Kata kunci: *penataan ruang, alih fungsi lahan, perumahan, pertanian*

PENDAHULUAN

Tekanan jumlah penduduk yang mendorong pertumbuhan pembangunan bidang perumahan dan permukiman dirasakan di setiap kota sedang berkembang. Sebagian besar permintaan akan perumahan berasal dari penduduk luar kota, yang datang untuk tujuan pendidikan, pekerjaan atau untuk menikmati keuntungan ekologis tertentu seperti pada daerah ketinggian atau pengunungan. Kebutuhan rumah pada tahun 2015 telah mencapai 15,2 juta unitdan sebagian besar untuk mengisi kebutuhanmasyarakat berpenghasilan menengah ke bawah [1].

Perumahan dan pemukiman merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi dalam hidupnya, sehingga pemerintah harus menempatkan bidang pembangunan perumahan dan pemukiman sebagai salah satu prioritas dalam pembangunan. Untuk pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Padang sejak tahun 2009 lebih banyak berada pada daerah zona aman bencana *tsunami*, baik dilakukan perusahaan pengembang maupun masyarakat dan individu. Akibatnya, lahan yang sebelumnya digunakan sebagai lahan pertanian beralih fungsi menjadi lahan untuk perumahan. Berdasarkan data Dinas Pertanian,

Peternakan, Perkebunan dan Kehutanan (Dipernakbunhut) Kota Padang (2016), diketahui bahwa lahan sawah yang sudah beralih fungsi pada periode waktu 2009–2013 adalah sebanyak 106 Ha.

Kecamatan Pauh di dalam Perda Kota Padang No. 4 tahun 2012 tentang RTRW Kota Padang tahun 2012-2032, ditetapkan sebagai kawasan perumahan kepadatan rendah. Namun saat ini Kecamatan Pauh mengalami pertumbuhan perumahan yang tergolong cepat sejak tahun 2009. Kondisi ini terlihat dari beralih fungsinya lahan pertanian khususnya lahan sawah di Kecamatan Pauh seluas 35 Ha dalam periode waktu 2009 – 2013.Kecamatan Pauh merupakan kecamatan yang tergolong tinggi tingkat alih fungsi lahan sawahnya dibandingkan kecamatan lainya di Kota Padang [2].

Tulisan ini bertujuan untuk menggambarkan hasil kajian implementasi kebijakan pengendalian ruang wilayah pembangunan perumahan dan menjelaskan permasalahan sejauh mana rencana tata ruang dipedomani dalam pembangunan perumahan dan permukiman di Kota Padang.Proses perizinan pembangunan perumahan dan pemukiman penduduk dan beralih fungsinya lahan pertanian menjadi lahan perumahan di Kecamatan Pauh Kota Padang menjadi kasus studi untuk menjelaskan kajian kebijakan ini.

Tulisan ini berpendapat bahwa pengendalian pemanfaatan ruang wilayah perlu ditegakkan untuk menjamin keberlanjutan pembangunan melalui pemanfaatan ruang wilayah (lahan) yang sesuai dengan peruntukan atau pola ruang yang direncanakan. Diharapkan tulisan ini dapat menyumbang masukan kepada pemerintah dalam upaya penegakan kebijakan pengendalian ruang wilayah untuk terwujudnya pembangunan berkelanjutan sesuai yang diharapkan. Perlu upaya untuk menjaga konsistensi rencana penataan ruang dengan implementasi pemanfaatan ruang wilayah khususnya dalam pembangunan perumahan dan pemukiman dimasa depan dalam rangka menghindari persaingan lahan antar sektor pembangunan.

METODOLOGI

Penelitian menggunakan metoda studi kasus dengan mempelajari kasus pengendalian ruang pembangunan perumahan di Kecamatan Pauh di Kota Padang.Pemilihan kecamatan dilakukan secara sengaja (*purposive*)dengan pertimbangan Kecamatan Pauh merupakan Kecamatan yang cepat pertumbuhan pembangunan perumahan dan permukimannya. Kondisi ini terlihat dari alih fungsi lahan pertanian seluas 35 hektar pada periode tahun 2009-2013, sementara RTRW Kota Padang menetapkan Kecamatan Pauh sebagai kawasan perumahan dengan kepadatan rendah.

Penelitian menggunakan data primer dan sekunder. Untuk memperoleh data primer yang holistik dan integratif dan kuatnya relevansi data dengan fokus penelitian, maka pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik wawancara mendalam (*indepth interview*), observasi partisipasi, dan studi dokumentasi. Data primer diperoleh dari informan kunci yang terkait dengan pembangunan perumahan dan pemukiman di Kecamatan Pauh.Informan kunci dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dengan kejadian, proses dan keputusan implementasi kebijakan pengendalian ruang untuk pembangunan perumahan, baik di tingkat Kota Padang maupun di Kecamatan.Pemilihan informan kunci dikembangkan dengan tehnik bola salju *(snow ball)*.

Data sekunder yang dikumpulkan berupa dokumen dan peraturan yang berlaku terkait kebijakan pengendalian tata ruang, perizinan pembangunan perumahan, data alih fungsi lahan pertanian, peraturan dan perundangan tentang pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Padang. Sumber data sekunder adalah Bappeda Kota Padang, Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Padang, Dinas Pertanian Kota Padang, Kantor Camat Pauh, UPT Pertanian Kecamatan Pauh.

Data difokuskan pada: (a) Peraturan perundangan yang mengatur proses perizinan pemanfaatan ruang sesuai RTRW Kota Padang 2010-2030; (b) Proses dan keputusan yang dibuat institusi dalam perizinan pembangunan perumahan dan permukiman di lokasi kasus studi; (c) Proses dan keputusan *stakeholders*(pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam mengimplementasi kebijakan pengendalian ruang untuk pembangunan perumahan di lokasi kasus studi.

Penelitian menggunakan analisa deskriptif kualitatif untuk mengkaji implementasi kebijakan pengendalian ruang pembangunan perumahan, dan pendekatan yang digunakan pada analisa deskriptif kualitatif ini adalah evaluasi formal [3].Evaluasi formal merupakan pendekatan yang menggunakan metoda deskriptif untuk menghasilkan informasi yang valid dan cepat dipercaya mengenai hasil-hasil implementasi kebijakan atas dasar tujuan kebijakan yang telah diumumkan secara formal oleh pembuat kebijakan dan adminsitrator.Evaluasi formal menggunakan undang-undang, dokumen, program, dan wawancara dengan pembuat atau pelaksana kebijakan untuk mengidentifikasi, mendefenisikan, dan menspesifikasikan tujuan dan target kebijakan.

Fungsi evaluasi dalam penelitian ini adalah untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya mengenai kinerja kebijakan pengendalian pembangunan perumahan, yaitu seberapa jauh kebutuhan, nilai, dan kesempatan membangun rumah telah dapat dicapai melalui tindakan publik. Kajian ini diperlukan untuk menguji

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

apakah pemanfaatan ruang perumahan dan permukiman sudah mempedomani rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan pemerintah Kota Padang, khususnya di lokasi kasus studi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Lokasi Penelitian

Kecamatan Pauh merupakan salah satu dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang.Kecamatan Pauh terdiri dari 9 kelurahan. Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Koto Tangah, sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Lubuk Kilangan, sebelah Timur dengan Kabupaten Solok, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Kuranji dan Padang Timur (lihat Gambar 1).

Gambar 1. Batas wilayah Kecamatan Pauh [4].

Luas wilayah Kecamatan Pauh adalah 146.29 km^2 dan berada pada ketinggian 10-1.600 meter di atas permukaan lautdengan suhu berkisar antara 22^0 C – $31,7^0$ C.Kecamatan Pauh Berada di kawasan barat Kota Padang yang terletak pada posisi $0^0$58’ Lintang Selatan dan $100^0$21”11’ Bujur Timur.

Lebih kurang 82% dari total luas wilayah Kecamatan Pauh berupa hutan, terutama hutan lindung. Sisanya berupa lahan pertanian, tegal, ladang, dan lahan bukan pertanian. Luas lahan bukan pertanian hanya berkisar 582 hektar yang terdiri dari lahan perumahan dan permukiman, perkantoran, dan jalan(Kecamatan Pauh dalam Angka, 2015).

Penduduk Kecamatan Pauh Kota Padang pada tahun 2015 sebanyak 68.448 jiwa. Tabel 1 memperlihatkan jumlah penduduk di Kecamatan Pauh Kota Padang periode tahun 2011–2015 yang terus meningkat.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 1. Perkembangan Jumlah Penduduk Kecamatan Pauh tahun 2011 - 2015

Tahun	Jumlah Penduduk (Jiwa)
2015	68.448
2014	64.863
2013	61.755
2012	61.006
2011	59.216

Sumber: Kecamatan Pauh Dalam Angka Tahun 2016

Terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kecamatan Pauh Kota Padang dipicu oleh keinginan masyarakat Kota Padang untuk memilih tempat tinggal di kawasan zona aman *tsunami*. Peningkatan jumlah penduduk juga didorong oleh ketertarikan masyarakat untuk melanjutkan pendidikannya di Universitas Andalas dan Politeknik Negeri Padang yang juga berlokasi di kecamatan Pauh.

Gambaran Perubahan Pemanfaatan Ruang Di Kota Padang

Penambahan jumlah penduduk mendorong permintaan yang meningkat akan lahan perumahan dan permukiman. Kebutuhan lahan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman yang meningkat ini telah berdampak kepada pengurangan jumlah lahan sawah.Tabel 2 memperlihatkan angka alih fungsi lahan sawah yang tertinggi di Kota Padang pada periode 2009-2013 adalah di Kecamatan Pauh.

Tabel 2. Luas Alih Fungsi Lahan Sawah di Kota Padang periode tahun 2009-2013

No.	Kecamatan	Luas alih fungsi lahan sawah(Hektar)
1	Bungus Teluk Kabung	4
2	Lubuk Kilangan	3
3	Lubuk Begalung	33
4	Padang Selatan	0
5	Padang Timur	8
6	Padang Barat	0
7	Padang Utara	0
8	Nanggalo	0
9	Kuranji	23
10	Pauh	35
11	Koto Tangah	0
	Jumlah	106

Sumber : Dipernakbunhut Kota Padang (2016)

Jumlah lahan sawah yang beralih fungsi menjadi lahan perumahan dan pemukiman di Kota Padang periode waktu 2009-2013 adalah 106 Ha. Sementara, kecamatan Pauh dengan tingkat alih fungsi lahan sawah tertinggi, didalam RTRW Kota Padang tahun 2012 termasuk lingkungan dengan tingkat kepadatan rendah. Dengan demikian, hal ini menunjukkan telah terjadi perubahan pola ruang wilayah, dimana pemanfaatan ruang wilayah tidak lagi sesuai dengan rencana tata ruang wilayah di kecamatan Pauh, khususnya untuk kawasan perumahan dan permukiman. Untuk itulah perlunya studi implementasi kebijakan pengendalian ruang wilayah di lokasi studi ini.

Perubahan pola pemanfaatan ruang wilayah di Kecamatan Pauh yang disebabkan oleh peningkatan permintaan luas lahan perumahan, juga ditunjukkan oleh data perkembangan jumlah Rukun Tetangga (RT).Sejak tahun 2012, telah terjadi penambahan jumlah RT sebanyak 4 RT. Namun dari tahun 2011 sebenarnya telah bertambah 1 RW dan 7 RT. Perkembangan jumlah RT dan RW menurut Kelurahan di kecamatan Pauh tahun 2012 dan 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.Pemekaran RT terjadi di kelurahan Limau Manih Selatan sebanyak 3 RT dan di kelurahan Cupak Tangah bertambah sebanyak 1 RT.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 3. Jumlah Rukun Tetangga (RT) menurut Kelurahan di Kecamatan Pauh Tahun 2012 dan 2015

Kelurahan	RukunTetangga (RT)	
	Tahun 2012	Tahun 2015
1. Pisang	23	23
2. BinuangKampuangDalam	18	18
3. PiaiTangah	12	12
4. CupakTangah	20	21
5. Kapalo Koto	15	15
6. Koto Lua	25	25
7. LambungBukik	13	13
8. LimauManih Selatan	28	31
9. LimauManih	18	18
Jumlah	172	176

Sumber: Kecamatan Pauh Dalam Angka, 2013 dan 2016

Kebijakan Pengendalian Ruang Pembangunan Perumahan di Kota Padang

Proses implementasi kebijakan penataan ruang wilayah, baik melalui pendekatan top-down yang sentralistis maupun bottom-up yang lebih demokratis atau pendekatan gabungan keduanya, haruslah disertai dengan instrumen kebijakan. Instrumen kebijakan yang diperlukan adalah instrumen yang lebih bersifat teknis dan impelementatif. Setiap instrumen kebijakan memiliki sifat yang membatasi kemungkinannya untuk mempengaruhi perilaku setiap pelaku yang mengimpelementasikan kebijakan. Instrumen yang dapat digunakan bisa berupa pengaturan (hukum) bertujuan untuk menormalisasi perilaku para pelaku kepentingan, insentif finansial yang tidak bersifat memaksa misalnya subsidi, atau penyebaran (transfer) informasi.

Implementasi kebijakan di bidang perumahan dan permukiman untuk individu atau badan komersial oleh perseorangan/perusahaan selama ini adalah mengikuti peraturan (hukum) yang berlaku, yakni dengan menetapkan sejumlah prosedur perizinan pembangunan sehingga memenuhi persyaratan perumahan sesuai yang diatur Undang-Undang. Penyelenggaraan pembangunan gedung (rumah) diatur dan dibina berdasarkan rencana tata ruang wilayah demi kelangsungan dan peningkatan kehidupan serta penghidupan masyarakat.Oleh karena itu, pengaturan pembangunan perumahan dan pemukiman harus mengacu pada pengaturan penataan ruang sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Di dalam RTRW Kota Padang 2010-2030 disebutkan bahwa kawasan perumahan adalah kelompok rumah yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana lingkungan, sementara kawasan permukiman adalah kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung bagi peri kehidupan dan penghidupan. Kebijakan penataan ruang wilayah kota termasuk mengatur pengembangan kawasan perumahan yang aman dan nyaman sesuai dengan jumlah penduduk kota sampai akhir tahun perencanaan. Strategi yang digunakan untuk itu antara lain adalah dengan membatasi perkembangan secara horisontal agar tidak mengokupasi lahan pertanian yang beririgasi teknis.

Pemerintah Kota Padang telah menerbitkan peraturan daerah No. 7 tahun 2015yang mengatur penyelenggaraan bangunan gedung (rumah)tersebut [5]. Setiap bangunan yang didirikan harus sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung, peruntukan lokasi yang diatur dalam RTRW dan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Padang, dan juga memenuhi persyaratan administratif dan teknis bangunan gedung.Upaya pengendalian ruang wilayah guna menjamin pemanfaatan ruang wilayah kota Padang agar sesuai dengan rencana peruntukannya, dikeluarkanlah Peraturan Walikota (perwako) Padang nomor 15 tahun 2013 [6]. Setiap orang atau badan harus mendapatkan izin dari Walikota supaya terjamin pemanfaatan ruang yang sesuai dengan rencana tata ruang. Izin-izin yang harus dipenuhi oleh setiap orang atau badan dalam pemanfaatan ruang wilayahFdi Kota Padang adalah:

1. Izin Prinsip

Izin prinsip ini menyatakan bahwa pembangunan perumahan diperkenankan untuk diselenggarakan atau beroperasi berdasarkan kepada kesesuaian dengan RTRW.Batasan pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan yang wajib memiliki izin prinsip adalah minimal seluas satu hektar. Instansiyang bertanggung-jawab dalam mengelola izin prinsip ini adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Padang.

2. Izin Lokasi

Izin Lokasi adalah izin yang diberikan kepada orang atau badan untuk memperoleh ruang yang diperlukan dalam rangka melakukan aktivitasnya.Izin Lokasi merupakan dasar untuk pembebasan lahan dalam rangka pemanfaatan ruang dan mendirikan bangunan termasuk rumah. Izin lokasi diperlukan untuk pemanfaatan ruang paling sedikit satu hektar untuk kegiatan bukan pertanian dan paling sedikit 25 (dua puluh lima) hektar untuk kegiatan pertanian. Izin Lokasidiberikan setelah mendapatkan atau berdasarkan atas Izin Prinsip yang diterbitkan.Instansi yang bertugas dan bertanggungjawab mengelola izin lokasi adalah Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.

3. Izin Penggunaan Pemanfaatan Tanah

Izin penggunaan pemanfaatan tanah merupakan Keterangan Rencana Kota yang didasarkan pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).Instansi yang bertanggungjawab mengelola izin penggunaan pemanfaatan tanah adalah Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.

4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

Izin Mendirikan Bangunan (IMB) merupakan dasar untuk mendirikan bangunan dalam rangka pemanfaatan ruang.Instansi yang bertanggungjawab mengelola IMB adalah Dinas Tata Ruang, Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang.

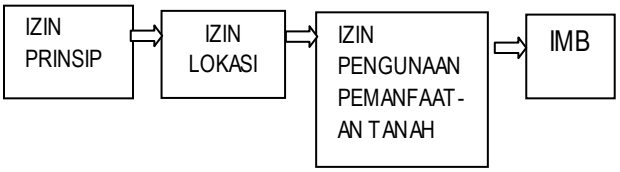

Gambar 1.Proses Perizinan Pemanfaatan Ruang untukPerumahandan Pemukiman di Kota Padang

Gambar 1 memperlihatkan tahapan perizinan pemanfaatan lahan di Kota Padang. Untuk memperoleh izin prinsip, pemohon harus memenuhi persyaratan teknis dan persyaratan administrasi, dan mendapatkan persetujuan Walikota dalam hal ini dikelola oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Bappeda Kota Padang melibatkan Tim BKPRD (Badan Koordinasi Pengendalian Ruang Daerah) mengadakan rapat Koordinasi dengan instansi terkait untuk memberikan pertimbangan atas rencana kegiatan yang diajukan yang disertai dengan peninjauan lapangan. Setelah Izin Prinsip terpenuhi, tahap berikutnya adalah izin Lokasi, Izin Pengunaan Pemanfaatan Tanah, dan terakhir adalah Izin Mendirikan Bangunan (IMB). IMB baru diterbitkan setelah Izin Prinsip, Izin Lokasi dan Izin Pengunaan Pemanfaatan Tanah terpenuhi oleh pemohon.

Untuk kondisi saat ini dalam penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Pemerintah Kota Padang merujuk kepada serangkaian aturan antara lain Peraturan Pemerintah nomor 15 tahun 2010 tentang Penyelenggaran Tata Ruang, Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2012 tentang RTRW, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung, Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2011 tentang Retribusi, Peraturan Walikota No. 15 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang..

RealitasPengendalian Ruang Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Kecamatan Pauh

Pada prosedur pemanfaatan ruang yang diatur dalam peraturan Walikota Padang Nomor 15 tahun 2013 masih tedapat celah bagi setiap orang atau badan untuk dapat memanfaatkan lahan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Untuk pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Padang, tahap izin prinsip hanya wajib dengan batasan pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan dan pemukiman adalah minimal seluas 1 (satu) Ha, sehingga ketika setiap orang atau badan akan memanfaatkan lahan untuk perumahan dan pemukiman kurang dari 1 Ha maka tidak dibutuhkan persyaratan izin prinsip. Gambar 2 memperlihatkan proses perizinan pendirian bangunan berdasarkan luas lahan dibangun di kecamatan Pauh.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gambar 2. Alur Proses Perizinan Pendirian Bangunan berdasarkan Luas Lahan Dibangun (sumber: kecamatan Pauh, 2016)

Izin pemanfaatan ruang untuk perumahan dan pemukiman ternyata juga ada yang menjadi bagian kewenangan pemerintah tingkat Kecamatan yaitu dengan batasan luas lahan dibawah 100 M^2. Dalam memberikan izin pemanfaatan lahan dibawah 100 M^2, pemerintah Kecamatan belum memperhatikan atau belum mempedomaniRencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang. Kenyatan pemanfaatan ruang dalam pembangunan perumahan dan pemukiman yang tetap berlanjut seperti saat ini tentu akanberdampak terhadap terganggunya rencana tata ruang dan pemanfaatan lahan di Kota Padang dalam jangka panjang.

Hal ini juga telah berdampak pada perubahan fungsi lahan dari fungsi lahan pertanian ke lahan perumahan seperti yang terjadi di Kecamatan Pauh. Luas lahan sawah di Kecamatan Pauh memperlihatkan jumlah yang berkurang sebanyak 5 hektar kondisi tiga tahun terakhir (UPT Dipernakbunhut, Kecamatan Pauh, 2016). Semua lahan sawah di Kecamatan Pauh merupakan lahan sawah beririgasi, dengan luas panen padi tahun 2015 adalah 3.208 hektar dengan jumlah produksi 17.089 Ton(Kecamatan Pauh dalam Angka, 2016). Artinya, alih fungsi yang terjadi pada lahan sawah menjadi lahan perumahan di kecamatan ini adalah pada lahan sawah beririgasi. Hal ini tentu akan berpengaruh kepada tujuan program ketahanan pangan, lahan pertanian pangan berkelanjutan, dan pemanfaatan infrastruktur irigasi di lahan pertanian beririgasi yang telah dibangun.

Berdasarkan proses, implementasi kebijakan yang ditemukan dalam hal pengendalian ruang wilayah seperti digambarkan di atas, tentu saja tidak terlihat apakah terjadi atau tidak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang wilayah untuk perumahan dan permukiman di lokasi studi. Namun dalam kenyataannya, yang diperoleh melalui wawancara mendalam dengan *key informan* di kecamatan, rencana tata ruang wilayah (RTRW) 2010-2030 Kota Padang belum dipedomani oleh kecamatan sebagai dasar pemberian izin untuk bangunan di atas luas lahan ≤ 100 M^2. Dengan demikian, jumlah izin yang dikeluarkan juga tidak akan terhubung dengan status lahan yang tercatat sebagai lahan yang mengalami pengalihfungsian lahan dari sawah menjadi lahan perumahan. Pemilik lahan mengajukan permohonan izin setelah mendapatkan hak penguasaan lahan sebagai pemilik atas lahan yang akan dibangun yang diperoleh dari kaumnya. Lahan tersebut merupakan lahan bersertifikat dengan status hak milik dan tidak lagi berfungsi sebagai sawah. Lahan sawah dikeringkan dan diberakan beberapa lama sebelum dialihkan hak kepemilikannya.

Mengingat realita implementasi kebijakan perumahan dan kawasan permukiman seperti di atas, termasuk jumlah aktor yang terlibat didalam proses implementasi kebijakan pengendalian ruang pembangunan perumahan, hasil kajian implementasi kebijakanini menjadi sumbangan pemikiran untuk perbaikan implementasi selanjutnya di masa datang. Kenyataan bahwa pihak pengambil keputusan perizinan dalam hal ini bukan hanya satu aktor yang menentukan, tetapi terkait dengan kebijakan dari aktor lain yang saling terkait. Arti penting aktor-aktor tersebut seharusnya mampu memunculkan *collective decision making* sehingga ikatan antar pembuat keputusan dalam rangka penegakan aturan menjadi penting dan sejalan.

Dampak negatif yang ditimbulkan yang terkait dengan pengendalian ruang wilayah ini dalam jangka menengah dan panjang antara lain adalah:

a. sulitnya untuk mewujudkan lingkungan perumahan dan permukiman yang sehat dan berkelanjutan sebagaimana yang diamanatkan Undang-Undang Tata Ruang dan Undang-Undang Perumahan dan Permukiman
b. sulitnya mewujudkan kota metropolitan sebagaimana yang diembankan kepada kota Padang sebagai kota inti dan kota pelayanan yang tertib, teratur dan berkelanjutan

c. sulitnya mewujudkan kehidupan perkotaaan dengan estetika tata ruang yang baik, indah dan nyaman
d. sulitnya nuntuk mewujudkan ketahanan pangan karena lahan pangan berkelanjutan sulit dicapai.
e. sulitnya untuk membangun kawasan pertanian dengan konsep pertanian perkotaan karena ketidakpastian kepemilikan lahan pertanian berkelanjutan.

Agar kebijakan dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya, beberapa strategi yang berbasis pemberdayaan masyarakat sesungguhnya dapat digunakan, antara lain:

a. strategi fasilitasi; digunakan ketika masyarakat yang menjadi target pembangunan mengetahui ada masalah dan membutuhkan perubahan, ada keterbukaan terhadap bantuan dari luar dan keinginan pribadi untuk terlibat.
b. strategi persuasif, berupaya membawa setiap perubahan melalui kebiasaan, dimana pesan distruktur dan dipresentasikan.
c. strategi re-edukasi melibatkan proses justifikasi rasional atas aksi yang dilakukan.
d. strategi kekuasaan, efektif apabila fasilitator memiliki sumber-sumber untuk memberikan insentif atau sanksi pada target serta memiliki kemampuan untuk memonopoli akses.

KESIMPULAN

Kesimpulan

Pemanfaatan lahan untuk pembangunan perumahan dan pemukiman di kecamatan Pauh khususnya dan Kota Padang secara umum belum sesuai dengan rencana tata ruangnya, sehingga implementasi kebijakan pengendalian ruang masih terkendala.Kendala ini disebabkan oleh belum terintegrasinya sistem pengendalian ruang dan belum sama pemahaman setiap tingkat pemerintahan yang memberi izin pembangunan tersebut. Selain itu peraturan yang ada dan berlaku juga masih terbatas, karena perizinan pemanfaatan lahan dapat dilakuan pada beberapa tingkat pemerintahan yang koordinasinya juga belum optimal. Izin prinsip hanya wajib dengan batasan pemanfaatan ruang untuk kawasan perumahan dan pemukiman minimal seluas satu Hektar.Ketika setiap orang atau badan perizinan di Kota Padang tidak melewati izin prinsip, maka setiap orang atau badan tersebut berpeluang untuk memanfaatkan lahan tidak sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang.

Saran

Pemanfaatan ruang untuk pembangunan perumahan dan pemukiman di Kota Padang perlu memperhatikan dan berpedoman kepada RTRW dengan proses perizinannya tidak hanya pada luas lahan yang akan dimanfaatkan. Perlu sosialisasi RTRW kepada semua stakeholders di setiap tingkat pemerintahan agar masyarakat dan stakeholders pengendalian ruang memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya penataan ruang wilayah.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementerian Pekerjaan Umum. Kebijakan dan Strategi Nasional Perumahan dan Pemukiman. 2015.
[2] Pemerintah Kota Padang. Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang Tahun 2010 – 2030.
[3] Dunn, W.N. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta. Gadjah Mada University Press. 2000.
[4] Badan Pusat Statistik Kota Padang. Kecamatan Pauh Dalam Angka Tahun 2016.
[5] Pemerintah Kota Padang. Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.
[6] Pemerintah Kota Padang. Peraturan Walikota Padang No. 15 Tahun 2013 tentang Izin Pemanfaatan Ruang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENGARUH STRUKTUR RUANG BERDASARKAN TATAGUNA LAHAN CAMPURAN (MIX USED) DI KOTA BANDA ACEH

Noer Fadhly[1)], Rahim Matondang[2)], Sirojuzilam[2)] dan Sofyan M. Saleh[3)]

[1)]Mahasiswa Program Doktor Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasrjana, University of Sumatera Utara, Indonesia
[2)]Program Doktor Perencanaan Wilayah Sekolah Pascasrjana, University of Sumatera Utara, Indonesia,
[3)]Fakultas Teknik Jurusan Sipil Universitas Syiah Kuala, Indonesia,

Email : noer6637@unsyiah.ac.id

Naskah diterima :14Maret 2017 Naskah direvisi : 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 24 Maret 2017

ABSTRAK

Berdasarkan kondisi Kota Banda Aceh pasca tsunami pada tahun 2004, mengalami perubahan pada struktur ruang yang awalnya berpola radial menjadi "pola radial simetris",hal ini terlihat dari pemusatan kegiatan dengan konsentrasi kepadatan di pusat kota, dimana kegiatan tersebut memanjang hampir linier mengikuti pola jaringan jalan utama dan pola lahan yang ada, hal ini dapat dilihatdari pengembangan pusat utama kota yang didukung oleh beberapa sub pusat pelayanan pusat utama dan sub pusat pelayanan, pembangunan ini menjadi daya tarik bagi sistem pergerakan atau perangkutan di Kota Banda Aceh diakibatkan struktur ruang yang pada saat ini sudah mix used. Interaksi pusat dan sub pusat memberikan dampak yang cukup besar terhadap tata gunalahan campuran, karena pada pusatdan sub pusat tersebut didukung oleh kegiatan perdagangan dan jasa, perkantoran, restoran dan aktivitas lainnya dengan karakteristik yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan variabel terikatnya yaitu karakteristik tata guna lahan campuran dan varibel bebasnya yaitu struktur ruang yang terdiri dari beberapa indikator variabel yaitu: biaya perjalanan, konektivitas jaringan, waktu perjalanan mencapai tujuan, keragaman fasos/fasum, frekuensi perjalanan dan maksud perjalanan. Hasil yang didapat dari penelitian ini adalah suatu formulasi yaitu hubungan karakteristik tata guna lahan campuran terhadap struktur ruang, adapun formula yang diperoleh yaitu: $Y = -1{,}103 + 0{,}703_{X1} + 0{,}122_{X2} + 0{,}202_{X3} + 0{,}445_{X4} + 0{,}418_{X5} - 0{,}107_{X6}$.

Kata Kunci: *Tata Guna Lahan Campuran, Struktur Ruang, Pengembangan Pusat Kota*

PENDAHULUAN

Struktur ruang kota Banda Aceh sesuai dengan strategi pembangunan kota Banda Aceh RTRW 2009-2029 yang berupa *"multi-center"* dan*"linear- growth"*, dari struktur ruang yang ada terlihat bahwa arah kecenderungan perkembangan perkotaan (Kota Banda Aceh) mengarah ke selatan (berbatasan langsung dengan Aceh Besar) maka pusat pelayanan kota (perdagangan dan jasa), *sport center* (Pusat Olahraga) berada diperbatasan antara wilayah Kota BandaAceh dengan wilayah Kabupaten Aceh Besar. Dengan demikian, kecenderungan pusat perkotaan Banda Aceh untuk mendatang diperkirakan mengarah ke Selatan di Kawasan Batoh/Lamdom bahkan sampai ke wilayah Kabupaten Aceh Besar [1].

Rencana kawasan budidaya yang berupa kawasan untuk mewadahi aktifitas warga beraktifitas masih berupa blok-blok, yang terdiri dari blok kawasan perumahan, perdagangan, perkantoran, pariwisata, pusat olah raga, ruang ruang terbuka hijau dan non hijau, hal ini akan memepengaruhi pola pergerakan orang untuk beraktifitas sehingga berdampak terhadap arus lalu lintas dan berakibatkan pada kemacetan pada kawasan-kawasan tertentu karena tidak seragamnya ketersedian fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum) pada penelitian ini merupakan indikator strukrur ruang yang berpengaruh kepada biaya perjalanan, konektivitas jaringan, waktu perjalanan mencapai tujuan, frekuensi perjalanan dan maksud perjalanan, dan juga penaguruh struktur ruang terhadap tata guna lahan campuran. [2].

Pada artikel ini akan melihat model pengaruh dampak pergerakan terhadap struktur ruang terhadap tata guna lahan campuran di kota Banda Aceh.

METODOLOGI

Penelitian ini berada pada wilayah administratif Kota Banda Aceh, Pemerintah Aceh, Letak geografis Kota Banda Aceh berada antara 05º30' – 05º35' LU dan 95º30' – 99º16' BT, yang terdiri dari 9 kecamatan. Penelitian ini bersifat kuantitatif, data diperoleh dari questioner yang disebarkan pada 9 Kecamatan di Kota Banda Aceh dengan jumlah responden 407, dengan menggunakan rumus Slovin [3] sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Pengambilan sampel dari populasi dengan teknik *probability sampling (stratified sampling)*. Jumlah sampel per Kecamatan dapat dilihat pada Gambar 1. di bawah ini.

Gambar 1. Jumlah Sampel per Kecamatan

Data diolah dengan menggunakan analiis jalur (*path analysis*), model diagaram jalur pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

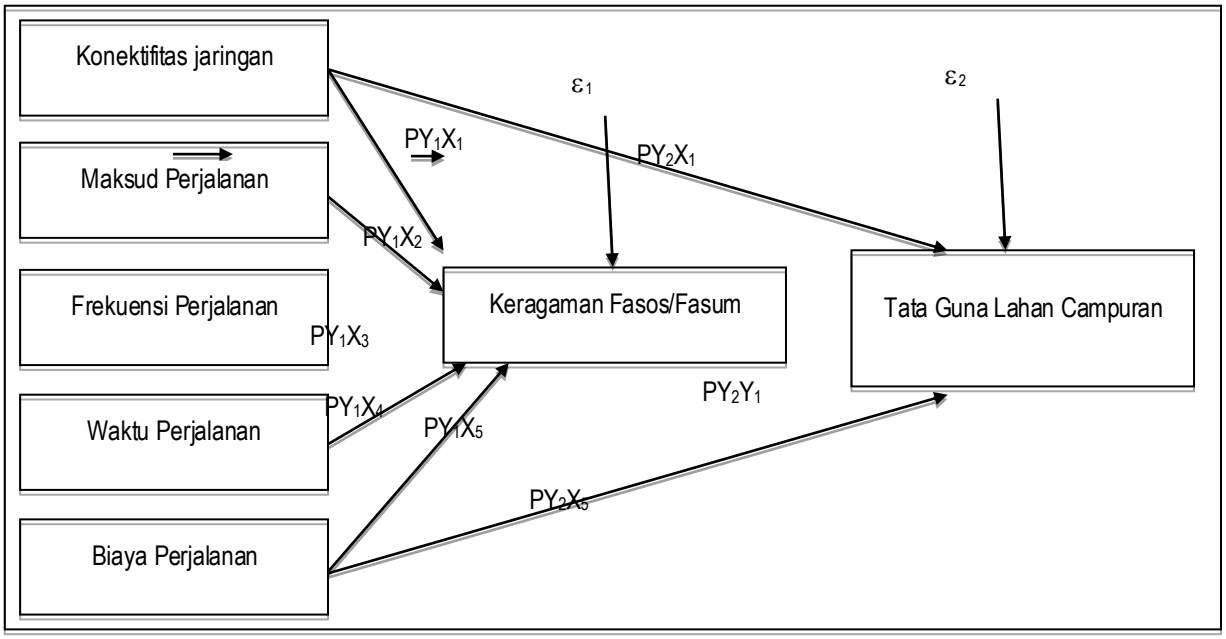

Gambar.2 Alur Pikir Penelitan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Output dan interprestasi hasil path analysis untuk struktural 1 (keragaman fasos/fasum) tampak bahwa koefisien determinasi model 1 (R^2) sebesar 0,598, model 2 (R^2) sebesar 0,593, dan model 3 (R^2) sebesar 0,595. Sehingga error model 2, $\varepsilon = 1 - R^2 = 1 - 0{,}593 = 0{,}407$ dan error model 3, $\varepsilon = 1 - R^2 = 1 - 0{,}595 = 0{,}405$

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,773[a]	,598	,593	,39127	,598	119,417	5	401	,000
2	,773[b]	,597	,593	,39120	-,001	,849	1	401	,357
3	,771[c]	,595	,592	,39196	-,003	2,565	1	402	,110

a. Predictors: (Constant), Biaya Perjalanan, Konektivitas Jaringan, Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan, Frekuensi Perjalanan, Maksud Perjalanan
b. Predictors: (Constant), Konektivitas Jaringan, Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan, Frekuensi Perjalanan, Maksud Perjalanan
c. Predictors: (Constant), Konektivitas Jaringan, Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan, Maksud Perjalanan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	91,410	5	18,282	119,417	,000[b]
	Residual	61,391	401	,153		
	Total	152,801	406			
2	Regression	91,280	4	22,820	149,115	,000[c]
	Residual	61,521	402	,153		
	Total	152,801	406			
3	Regression	90,888	3	30,296	197,199	,000[d]
	Residual	61,913	403	,154		
	Total	152,801	406			

a. Dependent Variable: Keragaman Fasos/Fasum
b. Predictors: (Constant), Biaya Perjalanan, Konektivitas Jaringan, Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan, Frekuensi Perjalanan, Maksud Perjalanan
c. Predictors: (Constant), Konektivitas Jaringan, Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan, Frekuensi Perjalanan, Maksud Perjalanan
d. Predictors: (Constant), Konektivitas Jaringan, Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan, Maksud Perjalanan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, diperoleh model 1, Fo = 119,417; db1 = 5; db2 = 401, p-value = 0,000 < 0,05 atau Ho ditolak, model 2, Fo = 149,115; db1 = 4; db2 = 402, p-value = 0,000 < 0,05 atau Ho ditolak dan model 3, Fo = 197.199; db1 = 3; db2 = 403, p-value = 0,000 < 0,05 atau Ho ditolak. Dengan demikian, secara simultan baik model 1, 2 dan 3, variabel remunerasi (X_1) konektivitas jaringan, waktu perjalanan dan maksud perjalanan berpengaruh terhadap variabel keragaman fasos/fasum. Adapun pengaruh langsung positif dapat dilihat pada output berikut.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	,509	,108		4,730	,000
	Konektivitas Jaringan	,056	,025	,106	2,266	,024
	Maksud Perjalanan	,324	,030	,544	10,804	,000
	Frekuensi Perjalanan	-,092	,055	-,083	-1,670	,096
	Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan	,343	,057	,290	6,020	,000
	Biaya Perjalanan	,021	,022	,030	,921	,357
2	(Constant)	,585	,069		8,460	,000
	Konektivitas Jaringan	,056	,025	,105	2,258	,025
	Maksud Perjalanan	,321	,030	,538	10,777	,000
	Frekuensi Perjalanan	-,088	,055	-,079	-1,602	,110
	Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan	,349	,057	,295	6,184	,000
3	(Constant)	,582	,069		8,401	,000
	Konektivitas Jaringan	,051	,025	,096	2,077	,038
	Maksud Perjalanan	,311	,029	,520	10,664	,000
	Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan	,299	,047	,253	6,360	,000

a. Dependent Variable: Keragaman Fasos/Fasum

Dengan menggunakan metode *Backward*, diperoleh koefisien jalur yang ditunjukkan oleh kolom *Standardized Coefficients* (beta). Sehingga:

1. P_{y1X1} = 0,096; t_o = 2,077, p-value = 0,038/2 = 0,019 < 0,05, H_o ditolak, yang berarti Remunerasi berpengaruh lansung positif terhadap fasos/fasum
2. P_{y1X2} = 0,5208; t_o = 10,664, p-value = 0,000 < 0,05, H_o ditolak, yang berarti Remunerasi berpengaruh lansung positif terhadap fasos/fasum
3. P_{y1X4} = 0,,253; t_o = 6,360, p-value = 0,000 < 0,05, H_o ditolak, yang berarti Remunerasi berpengaruh lansung positif terhadap fasos/fasum

Output dan interprestasi hasil path analysis untuk struktural 2 (tataguna lahan campuran) tampak bahwa koefisien determinasi (R^2) sebesar 0,618, berarti bahwa 61,8% variabilitas tata guna lahan campuran dapat dijelaskan oleh variabel Remunerasi, Sehingga error model, $\varepsilon = 1 - R^2 = 1 - 0{,}618 = 0{,}382$

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,786[a]	,618	,612	,82505	,618	107,768	6	400	,000

a. Predictors: (Constant), Biaya Perjalanan, Konektivitas Jaringan, Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan, Keragaman Fasos/Fasum, Frekuensi Perjalanan, Maksud Perjalanan

ANOVA[a]

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	440,150	6	73,358	107,768	,000[b]
	Residual	272,283	400	,681		
	Total	712,432	406			

a. Dependent Variable: Karakteristik Tata Guna Lahan Campuran
b. Predictors: (Constant), Biaya Perjalanan, Konektivitas Jaringan, Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan, Keragaman Fasos/Fasum, Frekuensi Perjalanan, Maksud Perjalanan

Berdasarkan hasil analisis pada tabel di atas, Fo = 107,768; db1 = 6; db2 = 400, p-value = 0,000 < 0,05 atau Ho ditolak. Dengan demikian, variabel Remunerasi secara simultan berpengaruh terhadap tata guna lahan campuran, adapun pengaruh langsung positif dapat dilihat pada output di bawah ini.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Coefficients[a]

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-1,103	,233		-4,730	,000
Keragaman Fasos/Fasum	,703	,105	,326	6,676	,000
Konektivitas Jaringan	,122	,052	,107	2,327	,020
Maksud Perjalanan	,202	,072	,156	2,801	,005
Frekuensi Perjalanan	,445	,116	,186	3,821	,000
Waktu Perjalanan Mencapai Tujuan	,418	,125	,163	3,329	,001
Biaya Perjalanan	-,107	,047	-,072	-2,257	,025

a. Dependent Variable: Karakteristik Tata Guna Lahan Campuran

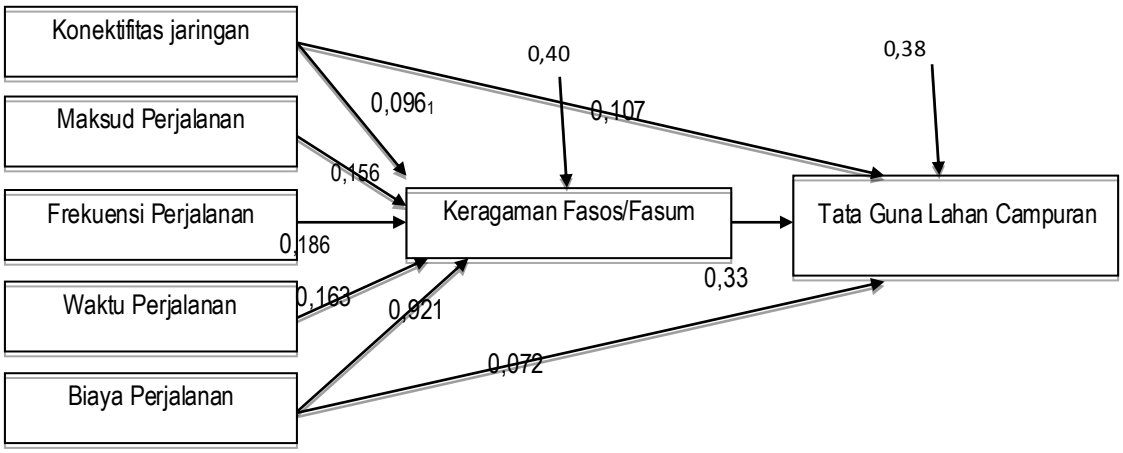

Gambar 3. Hasil P*ath Analysis*

Untuk model yang diperoleh dari analisis jalur adalah: $Y = -1{,}103 + 0{,}703_{X1} + 0{,}122_{X2} + 0{,}202_{X3} + 0{,}445_{X4} + 0{,}418_{X5} - 0{,}107_{X6}$.

KESIMPULAN

Struktur ruang yang di indikasikan dengan $P_{y1y2} = 0{,}326$; $t_o = 6{,}676$, p-value = 0,000 < 0,05 H_O ditolak, yang berarti Remunerasi berpengaruh langsung positif terhadap tata guna lahan campuran, dan korelasi (R) secara simultan antra variabel konektivitas jaringan, maksud perjalanan, frekuensi perjalanan, waktu perjalanan, biaya perjalanan dan keragaman fasos/fasum (struktur ruang) di peroleh 0,786. Kontribusi yang diberikan oleh ke 6 variabel bebas terhadap tata guna lahan campuran (Y). Yaittu 61,78%, dan dari model yang diperoleh tata guna lahan campuran, jika tanpa adanya variabel-variabel struktur ruang (X = 0), maka fungsi dari tata guna lahan campuran berkurang sebesar 1,103 satuan, dan apa bila semua variabel struktur ruang bertambah 1 point (X = 10) maka fungsi tata guna lahan campuran akan bertambah 15 satuan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Pemerintah Kota Banda Aceh, 2009. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029, Pemerintah Kota Banda Aceh

[2] Fadhly Noer, dkk, Hubungan Strukutur Ruang Terhdap Bangkitan Perjalanan di Kota Banda Aceh, FSTPT 2016

[3] Siregar, Metode Penelitian Kuantitatif, Kencana, Jakarta, 2013.Nasution, R. A., Purwoko, A., & Hartini, K. S. (2015). Analisis Potensi dan Strategi Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Silimalima di Kabupaten Tapanuli Selatan. *Jurnal Fakultas Kehutanan*, (1), 1–7.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KAJIAN DAMPAK PERKEMBANGAN PERMUKIMAN BERDASARKAN DEBIT AIR LIMPASAN DI KECAMATAN MEDAN JOHOR

Rahmad Dian[1)] dan Muhamad Abdul Soleh[1)]

[1]Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota, Institut Teknologi Medan

Email : rdians@yahoo.com dan muhammadabdulsoleh@gmail.com

Naskah diterima :7 Maret 2017 Naskah direvisi : 10 Maret 2017 Disetujui terbit : 13 Maret 2017

ABSTRAK

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menganalisis dampak perkembangan permukiman, terutama yang diarahkan oleh Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), terhadap keseimbangan lingkungan, potensi terjadinya genangan/banjir akibat berkurangnya resapan air yang mengakibatkan meningkatnya limpasan air permukaan. Kecamatan Medan Johor terletak pada bagian selatan (Hulu) Kota Medan yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Deli Serdang. Perkembangan pada kawasan ini cukup pesat, baik secara alami maupun karena arahan dari rencana tata ruang. Kajian ini dilakukan dengan membandingkan perhitungan debit limpasan yang terjadi Q awal (Q tahun 2013) dengan Q akhir RDTRK (Q tahun 2028) sehingga di peroleh nilai ∆Q (debit aliran) yang harus diamankan agar tidak terjadi kenaikan jumlah air limpasan sebagai penyebab terjadinya banjir/genangan. Dengan menggunakan metode rasional yaitu metode yang digunakan dalam penentuan debit puncak pada suatu kejadian hujan dan menggunakan parameter intensitas curah hujan, koefisien limpasan, dan luas daerah tangkapan. Hasilnya diketahui debit pada tahun rencana (Q tahun 2028 = 159,39 m³/s) lebih besar dari pada debit awal (Q tahun 2013 = 116,88 m³/s). Sehingga terdapat selisih 91,04 m³/s air limpasan yang akan terjadi dan harus diamankan untuk menghindari terjadinya banjir/genangan. Berdasarkan hasil kajian ini pemerintah Kota Medan diharapkan untuk menerapkan kebijakan yang mempertahankan besaran debit limpasan walaupun terjadi perubahan pemanfaatan lahan yang diakibatkan oleh pengembangan dan pembangunan di Kecamatan Medan Johor.

Kata Kunci *:Dampak, Permukiman, Air Limpasan.*

PENDAHULUAN

Sebagai sebuah kota metropolitan Kota Medan telah berkembang secara fisik hinga melampai batas-batas administrasinya dan membentuk keterkaitan dengan pusat-pusat perkotaan disekitarnya. Di sisi lainnya, Kota Medan yang berperan sebagai kota inti (*city-centre*) juga mengalami ekspansi sektor perdagangan dan jasa yang sangat pesat, dimana perkembangan tersebut dipercepat dengan pertambahan jaringan jalan arteri. Dengan semakin ekstensifnya perkembangan kota inti, dan cenderung mengarah ke Selatan, menyebabkan kecamatan-kecamatan pinggiran di belahan selatan Kota Medan mengalami perkembangan fisik yang pesat khususnya dari pembangunan perumahan, pertokoan dan perkantoran.

Berdasarkan hasil pengamatan serta didukung oleh data aktual yang tersedia maka dapat diidentifikasi beberapa fenomena penting di Kecamatan Medan Johor yaitu:Pertumbuhan permukiman yang pesat dan berlangsung secara ekstensif. Pembangunan permukiman terutama dipicu oleh pengembang/developer sebagai responterhadap tingginya *demand* penduduk kota terhadap hunian, ketersediaan lahan, serta kemudahan akses menuju pusat kota (*city centre*).

Pembangunan permukiman belangsung secara ekstensif (horisontal) dan tersebar merata di hampir seluruh wilayah di Kecamatan Medan Johor hal ini dapat dilihat dengan menjamurnya pembangunan perumahan di di wilayah tersebut. Adanya arahan struktur ruang RTRW Kota Medan yang mengarahkan fungsi Kecamatan Medan Johor sebagai pusat kegiatan bisnis/perdaganagan dan pendidikan[1], kebijakan tersebut akan semakin membuat Kebutuhan lahan akan permukiman,kegiatanbisnis/perdagangan dan pendidikan akan semakin

bertambah meningkat. Dengan arahan tersebut maka pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akan lahan untuk di konversi menjadi lahan terbangun tidak dapat dihindari lagi, hal ini merupakan salah satu faktor perkembangan yang disebabkan oleh aktifitas kota yang terdapat di Kecamatan Medan Johor [2], dengan demikian maka debit air limpasan air hujan juga akan mengalami peningkatan disebabkan semakin berkurangnya kawasan resapan air, Hal ini tentu akan berdampak pada menurunya kualitas lingkungan apabila kondisi ini terus berlanjut dan tanpa diiringi dengan kebijakan pengembangan permukiman yang berwawasan lingkungan maka akan berdampak pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan latar belakang diatas maka perlu di ketahui bagaimana dampak perkembangan permukiman di Kecamatan Medan Johor berdasarkan besaran debit air limpasan air hujan yang terjadi di Kecamatan Medan Johor ? Setelah dirumuskan masalah yang harus dipecahkan maka tujuan atas dilakukan penelitian ini adalah untuk mengkaji dampak dari perkembangan permukiman berdasarkan besaran debit air limpasan air hujan yang terjadi di Kecamatan Medan Johor ?

Dalam menyelesaikan studi ini peneliti membuat Langkah-langkah dalam pengerjaan studi ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Curah Hujan Berdasarkan Curah hujan harian selama 10 Tahun
2. Analisis Curah Hujan Rancangan dengan menggunakan metode Distribusi Gumbel*(extreme value type* I)
3. Menghitung intensitas curah hujan dengan persamaan Mononobe
4. Menghitung jumlah penduduk pada masing-masing DTA Tahun 2016 dan proyeksi tahun 2028.
5. Analisis Karakteristik Perubahan penggunaan Lahan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2028
6. Menghitung nilai Koefisien *Run-off* (C) tahun 2013 berdasarkan Penggunaan lahan tahun 2013 dan nilai (C) tahun 2028 berdasarkan Rencana Pola Ruang RDTR Kecamatan Medan Johor
7. Analisis Debit Hujan Eksisting Tahun 2013 dan Rancangan Tahun 2028 dengan periode 15 (lima) tahun menggunakan metode Rasional
8. Menganalisis kapasitas saluran eksisting dengan debit rencana.
9. Menghitung nilai ΔQ yang harus diamankan.

METODOLOGI

1. Analisis Pertumbuhan Penduduk

Analisis pertumbuhan penduduk digunakan untuk mengetahui jumlah pertumbuhan penduduk dimasa yang akan datang [3]dan dalam penelitian juga untuk mengitung debit air buangan dimasa yang akan datang, dalam penelitian analisis pertumbuhan penduduk dengan menggunakan metode bunga berganda sebagai berikut.

$$Pn = Po\,(1+r)^{n} \quad (1)$$

Dimana:
Pn = Jumlah penduduk pada tahun ke n
Po = Jumlah penduduk para tahun awal
r = Tingkat pertumbuhan penduduk (%)
n = Periode waktu (tahun ke- n)

2. Analisis Tata Guna Lahan dengan menggunakan Metode *Overlay*

Untuk melihat perkembangan permukiman dan perubahan penggunaan lahan pada wilayah studi digunakan data citra satelit tahun 2013 untuk medapatkan informasi tentang penggunaan lahan aktual dan terbaru.kemudian data citra satelit tersebut di digitasi sesuai dengan pola yang terbentuk pada citra satelit tersebut. Analisa penggunaan lahan menggunakan aplikasi SIG (ArcGis 10.2), dan membandingkanya dengan Rencana pola ruang RDTR Kecamatan Medan Johor untuk mengetahui karakteristik perubahan penggunaan lahan yang akan terjadi di masa yang akan datang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3. Analisis Hidrologi

Analisis Hidrologi adalah suatu cara mempelajari, mengelola siklus air di bumi sebagai suatu pengetahuan impiris dan kemudian dipergunakan sebgai pedoman pendekatan prilaku fenomena siklus air untuk kebutuhan pendekatan prilaku fenomena siklus air yang akan datang [4].
Curah hujan rencana digunakan untuk menghitung debit banjir untuk setiap periode ulang yang diinginkan. Dalam hal ini akan dianalisis adalah curah hujan rencana untuk periode ulang 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun. Metode yang digunakan adalah Distribusi Gumbel *(extreme value type* I), sebagai berikut

$$R_{rt} = R_t + K * S_{n-1} \quad (2)$$

dengan
R_{rt}= Curah hujan rencana (mm/hari)
R_t = Curah hujan harian maximum rata-rata (mm/hari)
K = Faktor Frekwensi
S = Standard Deviasi

$$S_{n-1} = \sqrt{\frac{\sum_{i-1}^{n} (Ri - Rt)^2}{n-1}} \quad (3)$$

Dimana :
N= Jumlah tahun
I = Tahun ke I
R_i= Curah hujan harian
R_t= Curah hujan rata-rata.
Dengan Frekuensi faktor K

$$K = -\frac{\sqrt{6}}{\pi}\left[0.5772 + \ln * \ln\left(\frac{T}{T-1}\right)\right] \quad (4)$$

Atau

$$K = -0.7797\left[0.5772 + \ln * \ln\left(\frac{T}{T-1}\right)\right] \quad (5)$$

Dimana
T = Periode ulang (tahun)
Intensitas curah hujan dihitun dengan menggunakan rumus Mononobe :

$$I = \frac{R24}{24} * \left(\frac{24}{t}\right)^m \quad (6)$$

dimana :
I = Intensitas curah hujan (mm/jam)
t = Lamanya curah hujan (jam)
m = Tetapan diambil 2/3
R_{24}= Curah hujan maximum dalam 24 jam (mm)

4. Analisis Koefisien air limpasan hujan

Digunakan untuk mengetagui koefisien air limpasan hujan yang terjadi ketika terjadi hujan, untk menghitung, untuk menghitung nilai Koefisien C yang beragam [5]maka dapat di hitung dengan persamaan sebagai berikut :

ISBN : 978-602-73463-1-4

$$\overline{C} = \frac{A_1 * C_1 + A_2 * C_2 + \ldots + An * Cn}{A_1 + A_2 + \ldots + An} \quad (7)$$

Dengan :
$\overline{C}$ =Koefisien aliran permukaan rata-rata
C1, C2,C3,…Cn = Koefisien limpasan masing-masing DTA
A1, A2, A3,..An = Luas DTA dalam ha.

5. Analisis Debit Rancangan

Untuk menghitung debit rencana untuk saluran drainase atau air limpasan hujan di daerah perkotaan dapat dilakukan dengan menggunakan rumus Rasional. [6]Pemilihan atas metode yang digunakan untuk menghitung besarnya debit aliran permukaan dalam satuan internasional adalah Metode Rasional sebagai berikut:

$$Q = 0{,}00278 \times C \times I \times A \quad (8)$$

dimana:
Q = Debit rencana (m3/detik)
C = Koefisien aliran permukaan
Cs = Koefisien tampungan
I = Intensitas hujan (mm/jam)
A = Luas daerah pengaliran (Ha)

6. Perhitungan Nilai Delta Q

Berdasarkan penjelasan atas Perarturan Pemerintah no 26 tahun 2008 tentang RTRW Nasional yang dimaksud dengan "*Zero Delta Q Policy"* adalah keharusan agar setiap bangunan tidak boleh mengakibatkan bertambahnya debit air saluran drainae atau sistem aliran sungai.
Untuk menetukan besarnya nilai ΔQ yang harus di amankan adalah sebagi berikut :

- Jika Kapasitas Drainase < dari pada Debit yang Terjadi (Eksisting) maka ΔQ = Debit Rencana - Kapasitas Drainase
- Jika Kapasitas Drainase > dari pada Debit yang Terjadi (Eksisting) maka ΔQ = Debit Rencana -Debit yang Terjadi (Eksisting)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Hidrologi

Curah hujan tahunan maksimum yang diperoleh dengan menggunakan metode Thiesen seperti tercantum pada tabel 1.

Tabel 1 Curah Hujan Maximum

Tahun	Curah Hujan
2003	118
2004	236
2005	190
2006	62
2007	112
2008	69
2009	85
2010	85
2011	97
2012	100
Total	1154
Curah Hujan Maximum	236
Curah Hujan Minimum	69
Curah Hujan Rata-rata	115,40

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Hasil perhitungan Curah Hujan Rencana menggunakan Metode Distribusi Gumbel (extreme value type I), dengan Nilai Kepencengan (K) = 1,92 (Untuk kala ulang 15 Tahun) dan Nilai Simpangan Baku (S) = 55,33

Tabel 2 Curah Hujan Rancangan

Periode Ulang (Tahun)	**K**	**Curah Hujan Rencana *Xrt = Rt + K x Sn-1***
		(mm/hari)
2	-0,15	107,12
5	0,90	165,13
10	1,59	203,53
15	1,92	221,70
20	2,25	239,88

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Tabel 3 Harga Intensitas Curah Hujan

Nama DTA	**tc**	**I**
	(menit)	**(mm/jam)**
2	3	4
DTA I	110.4634	37.805
DTA II	514.3819	12.7152
DTA III	170.3103	26.52
DTA IV	254.2983	20.39389
DTA V	167.7676	27.25197
DTA VI	208.4375	23.13905
DTA VII	151.1731	28.79103
DTA VIII	226.7408	21.95518

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Analisis Pertumbuhan Penduduk

Untuk mengetahui jumlah penduduk di masing-masing DTA yang ada peneliti menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$JP\ DTA\ 2016 = \frac{Persentase Jumlah\ Bangunan x\ Jumlah\ Penduduk\ Tahun\ 2016}{100}$$

Untuk mengetahui pertumbuhan penduduk di masing-masing DTA dengan menggunakan metodeproyeksi bunga berganda.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 4 Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Johor

Nama Kelurahan	JP 2016 (BPS)	Jumlah Bangunan	Persentase Petak bangunan (%)	Nama DTA	JP 2016 (DTA)
Kwala Bekala	34.629	4572	17,72	DTA I	23.387
Gedung Johor	24.518	2998	11,62	DTA II	15.335
Kedai Durian	7.075	4769	18,48	DTA III	24.394
Suka Maju	10.285	6565	25,44	DTA IV	33.581
Titi Kuning	22.286	3524	13,65	DTA V	18.026
Pangkalan mahsyur	33.219	1293	5,01	DTA VI	6.614
		1192	4,62	DTA VII	6.097
		895	3,47	DTA VIII	4.578
	132.012	25.808	100		132.012

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Tabel 5 Pertumbuhan Penduduk Jumlah Penduduk Kecamatan Medan Johor

Nama DTA	JP 2016	JP 2028
DTA I	23.387	26954
DTA II	15.335	17674
DTA III	24.394	28115
DTA IV	33.581	38703
DTA V	18.026	20775
DTA VI	6.614	7623
DTA VII	6.097	7027
DTA VIII	4.578	5276
	132.012	152148

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Analisis Perubahan penggunaan lahan

Berdasarkan hasil dari analisa dan pengolahan data secara spasial menunjukkan karakteristik perubahan penggunaan lahan di dominasi dari lahan non pertanian dan lahan pertanian menjadi permukiman sebesar 263,2 Ha atau mengalami peningkatan sebesar 15,88% dari luas wilayah, setelah itu perubahan rencana peruntukan lahan yang cukup signifikan adalah perdagangan dan jasa dari 68,39 Ha menjadi seluas 145,45 Ha mengalami peningkatan sebanyak 77,06 Ha atau sebesar 4,65 % sedangkan untuk penggunaan lahan yang mengalami penurunan adalah lahan pertanian dan non pertanian yang mengalami penurnan sebesar 21,61% dari luas lahan pada tahun 2013 sedangkan lahan yang tidak mengalami perubahan adalah sungai. Untuk lebih jelasnya mengenai presentase peningkatan dan penurunan perubahan peruntukan penggunaan lahan dari tahun 2013-2028 dapat dilihat pada tabel 8 tabel penggunaan lahan tahun 2013 dan tabel 9 penggunaan lahan tahun 2028

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 6 Penggunaan lahan Tahun 2013

Penggunaan Lahan Tahun 2013		
Jenis Penggunaan Lahan	**Presntase (%)**	**Luas Ha**
Permukiman	52.62	872.35
Pasar	0.26	4.24
Perdagangan Dan Jasa	3.87	64.15
Pendidikan	1.75	29.09
Kesehatan	0.08	1.26
Peribadatan	0.43	7.05
Perkantoran	1.79	29.73
Pertanian	4.20	69.56
Non Pertaninan	26.37	437.22
TPU	1.06	17.56
Danau Buatan	0.43	7.18
Sungai	0.89	14.82
Jalan	6.25	17.56
	100.00	1571.77

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Tabel 7 Penggunaan lahan Tahun 2028

Rencana Pola Ruang Tahun 2028		
Rencana Pola Ruang	**Presntase (%)**	**Luas Ha**
Perumahan Kepadatan Padat	3.31	54.91
Perumahan Kepadatan Sedang	26.56	440.28
Perumahan Kepadatan Rendah	38.63	640.38
Fasilitas Perdagangan	8.77	145.45
Fasilitas Umum dan Sosial	3.93	65.18
Kawasan Khusus	0.43	7.07
Kawasan Perlindungan Setempat	3.53	58.48
Ruang Terbuka Hijau	6.49	107.56
Danau	0.15	2.48
Sungai	0.89	14.82
Jalan	7.21	119.6
Rel Kreta Api	0.10	1.68
Jumlah	100	1657.89

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Analisis Koefisien Limpasan Air Hujan (C)

Perhitungan nilai koefisien air limpasan di kecamatan Medan Johor dari Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 8 Nilai Koefisien Limpasan Tahun 2013 -2028

Nama DTA	Nilai Koefisien Pengaliran (c)	
	Tahun 2013	Tahun 2028
1	2	3
DTA I	0.43	0.60
DTA II	0.42	0.56
DTA III	0.37	0.48
DTA IV	0.43	0.54
DTA V	0.39	0.52
DTA VI	0.41	0.53
DTA VII	0.41	0.51
DTA VIII	0.35	0.44

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Hasil Analisi Debit Rancangan

Debit rancangan total merupakan penjumlahan debit air kotor (Qak) dan debit air hujan rancangan (Qs). Debit air kotor adalah debit yang berasal dari air buangan, Untuk mengetahui jumlah debit air kotor, terlebih dahulu harus diketahui jumlah kebutuhan air rata-rata Debit air kotor dihitung dengan asumsi 70% dari kebutuhan air bersih dengan persamaan : $Qak = \frac{Pn \cdot q}{A}$ (9)

Dimana :
Qak = Debit Air Kotor
Pn = Jumlah Penduduk (Jiwa)
q = Jumlah air buangan (l/dt/orang)
A = Luas Daerah/ wilayah (Ha)

Metode yang digunakan untuk perhitungan debit air hujan adalah metode rasional dengan persamaan Qs = 0,00278 C.I.A

Tabel 9 Debit Eksisting Tahun 2013

Nama DTA	C	Luas (A)	I 2013	Qp 2013
		(Ha)	(mm/jam)	(m3/dt)
1	2	3	4	5
DTA I	0,43	299,86	37,81	13,69
DTA II	0,42	128,46	12,72	1,92
DTA III	0,37	432,68	26,52	11,65
DTA IV	0,43	311,47	20,39	7,62
DTA V	0,39	266,94	27,25	7,94
DTA VI	0,41	62,57	23,14	1,64
DTA VII	0,41	62,26	28,79	2,04
DTA VIII	0,35	93,65	21,96	2,03

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 10 Debit Rancangan Kala Ulang 15 Tahun (2028)

Nama DTA	Koefisien *Run Off* (C)	Luas Areal (A) (Ha)	Intensitas Hujan (mm/jam)	Debit Hujan (m^3/s)
			I15	Q15
DTA I	0,6	299,86	69,02	34,46
DTA II	0,56	128,46	37,07	7,36
DTA III	0,48	432,68	70,27	40,74
DTA IV	0,54	311,47	58,2	27,15
DTA V	0,52	266,94	76,21	29,55
DTA VI	0,53	62,57	65,08	5,97
DTA VII	0,51	62,26	79,08	6,96
DTA VIII	0,44	93,65	54,67	6,25

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Tabel 11 Debit Air Kotor Kala Ulang 15 Tahun (2028)

Nama DTA	Luas Ha	Pn	q	Qak
	A			
DTA I	299,86	22.860	0,00121	0,092245
DTA II	128,46	14.990	0,00121	0,141195
DTA III	432,68	23.845	0,00121	0,066683
DTA IV	311,47	32.825	0,00121	0,127519
DTA V	266,94	17.620	0,00121	0,079869
DTA VI	62,57	6.465	0,00121	0,125022
DTA VII	62,26	6.460	0,00121	0,125548
DTA VIII	93,65	4.475	0,00121	0,057819

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

Hasil Analisis Kapasitas Drainase

Metode perhitungan kapasitas saluran drainase menggunakan rumus Metode Rasional dengan nilai c menggunakan nilai koefisien tampungan (Cs)

Tabel 12 Debit Air Kotor Kala Ulang 15 Tahun (2028)

Nama DTA	Cs	Luas (A)	Intensitas Hujan	Qs
		(Ha)	(mm/jam)	(m3/dt)
1	2	3	4	5
DTA I	0,67	299,86	37,81	21,01
DTA II	0,67	128,46	12,72	3,06
DTA III	0,67	432,68	26,52	21,47
DTA IV	0,67	311,47	20,39	11,91
DTA V	0,68	266,94	27,25	13,73
DTA VI	0,67	62,57	23,14	2,71
DTA VII	0,67	62,26	28,79	3,36
DTA VIII	0,67	93,65	21,96	3,85

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4

Perhitungan Nilai Delta Q

Untuk menentukan besarnya nilai delta Q yang harus diamankan adalah sebagai berikut :

- Jika Kapasitas Drainase < dari pada Debit yang Terjadi (Eksisting) maka ∆Q = Debit Rencana - Kapasitas Drainase
- Jika Kapasitas Drainase > dari pada Debit yang Terjadi (Eksisting) maka ∆Q = Debit Rencana -Debit yang Terjadi (Eksisting)

Tabel 13 Perhitungan Nilai Delta Q

Nama DTA	Kapasitas Drainase (Q eksisting)	Debit yang Terjadi (Q 2013)	Debit Rencana (Q 2028)	Nilai ∆Q harus diamankan
	(m^3/s)	(m^3/s)	(m^3/s)	(m^3/s)
DTA I	21,89	13,69	34,57	20,88
DTA II	5,1	3,18	7,53	4,36
DTA III	32,32	17,4	40,82	23,42
DTA IV	20,15	12,72	27,3	14,57
DTA V	21,87	12,45	29,64	17,19
DTA VI	4,39	2,64	6,11	3,47
DTA VII	5,48	3,29	7,1	3,81
DTA VIII	5,68	2,97	6,32	3,35

Sumber : Hasil Analisa Tahun 2016

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisa diatas dapat disimpulkan perkembangan permukiman di Kecamatan Medan berpotensi menyebab banjir/genangan di beberapa titik utamanya di wilayah cekungan yang ada di Kecamatan Medan Johor, Dari beberapa analisis yang telah dilakukan dalam kajian ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Arahan Rencana Struktur Tata Ruang dan Pola Ruang dalam RTRW yang mengarahkan Kecamatan Medan Johor sebagai pusat kegiatan perdagangan bisnis dan pendidikan menyebabkan permintaan lahan untuk perkembangan permukiman untuk mendukung kegiatan tersebut semakin meninggkat.
2. Rencana Pola Ruang Kecamatan Medan Johor di Kota Medan menunjukan adanya peningkatan trend koefisien pengaliran yang semakin meningkat dari tahun 2013 hingga tahun 2028 yang diikuti dengan meningkatnya debit pada masing-masing daerah tangkapan air dengan total debit yang terjadi ketika hujan di seluruh wilayah Kecamatan Medan Johor dari 68,35 m^3/s menjadi 159,39 m^3/s.
3. Berkurangnya jumlah lahan non terbangun yang berfungsi sebagai resapan air ketika terjadi hujan menyebabkan peningkatan air limpasan yang diakibatkan oleh perkembangan permukiman akan meningkatkan potensi genangan air/banjir.
4. Berdasarkan hasil analisis kapasitas saluran (116,88m^3/s) yang ada tidak mampu menampung selisih jumlah debit yang akan terjadi (159,39 m^3/s.).
5. Perhitungan yang dilakukan di dalam penelitian ini belum mempertimbangkan peningkatan debit air yang dapat terjadi pada sungai dan anak sungai pada kawasan penelitian. Jika hal ini diperhitungkan maka jumlah limpasan air akan semakin besar dan menimbulkan dampak genangan yang lebih luas.

Berdasarkan dampak yang dapat ditimbulkan karena perkembangan permukiman baik secara alami ataupun berdasarkan rencana tata ruang maka perlu dipertimbangkan beberapa saran berikut :

1. Diharapkan kebijakan pemerintah dalam meminimalisir atau mengurangi resiko bencana dibutuhkan kajian yang lebih efektif agar hasil yang didapat lebih tepat sasaran, seperti kebijakan mengenai pemanfaatan Kolam Resapan, Sumur Resapan dan Kolam Retensi. Tiap DTA sebagai upaya penganggulangan genangan dan pemanfaatan Kolam resapan, Sumur Resapan dan Kolam Retensi dengan memasukkannya sebagai salah satu syarat dalam penerbitan Ijin Mendirikan Bangunan (IMB).
2. Adapun tindakan yang dapat dilakukan dalam membatasi debit yang masuk ke dalam saluran drainase adalah sebagai berikut :

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

a) Pembuatan kolam resapan/ Kolam Retensi
b) Pembuatan Sumur Resapan
c) Membuat Suatu kebijakan yang mendukung kebijakan Zero Delta Q Policy.

3. Diharapkan untuk peneliti selanjutnya agar menambahkan kajian secara spesifik mengenai kebutuhan Kolam resapan, dan Kolam retensi[1]

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Medan, 2016. "Arahan Rencana Strutur Ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Medan Kota Medan".
[2] Catanese, Anthony J. & Snyder, James C. 1992. ''Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan kota'' Perencanaan Kota . Penerbit Erlangga.
[3] Dajan, Anto (1998), Pengantar Metode Statistik, Jilid 1, LP3ES Universitas Indonesia, Jakarta.
[4] Asdak Chay. 2002. Hidrologi dan Pengelolaan Daerah Aliran Sungai, Gajah Mada University Press, Yogyakarta
[5] Peraturan Pemerintah Pekerjaan Umum No. 12, 2014. Tentang Penyelenggaraan Sistem Drainase Perkotaan
[6] Suripin. 2003. Sistem Drainase Perkotaan yang berkelanjutan, Yogyakarta: Penerbit ANDI

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

GREEN CITY: SOLUSI PROBLEMATIKA PERKOTAAN DALAM DIMENSI PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Syarif Imam Hidayat[1)]

[1]Fakultas Pertanian UPN "Veteran" Jawa Timur

Email : syarifimamhidayat@yahoo.com

Naskah diterima :12 Desember 2016 Naskah direvisi : 18 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Populasi manusia terus meningkat jumlahnya, tidak terkecuali di Indonesia. Laju pertumbuhannya tidak diiringi dengan sarana pendukung yang memadai untuk kelayakan hidupnya. Sisi lain, ketersediaan sumber daya alam, seperti lahan, air bersih, komoditas pangan mengalami gejala kekurangan. Dalam kondisi demikian, wilayah perkotaan menjadi tumpuan dan idola masyarakat berpindah (urbanisasi) tidak hanya sekedar ingin mengadu nasib mencari pekerjaan, namun juga bertujuan untuk merubah keadaan agar dapat hidup lebih sejahtera. Fenomena ini di perkotaan menimbulkan banyak masalah dan tantangan seperti pada aspek sarana dan prasarana fisik dan lingkungan juga pada persoalan pemukiman kumuh, sampah, banjir, banyaknya gelandangan dan pengemis serta masalah keamanan dan ketertiban masyarakat.Menghadapi persoalan yang serba kompleks di perkotaan, maka sebaiknya ada upaya pembangunan perkotaan secara terpadu, sistematis dan berkelanjutan. Upaya strategi yang dapat dilakukan adalah dengan melaksanakan konsep Green City. Green City *(Kota hijau) adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan. Saatnya mewujudkan dan mengimplementasikan konsep Green City untuk membangun daerah perkotaan di Indonesia seiring tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan bersama demi kesejahteraan masyarakat*

Kata kunci: *Green City, Pembangunan Berkelanjutan*

PENDAHULUAN

Seiring dengan berjalannya waktu, jumlah penduduk di bumi kian bertambah sementara lahan untuk tempat tinggal tidak bertambah. Hal tersebut diperparah dengan masalah proporsi jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan semakian bertambah. Berdasarkan data dari PBB pada tahun 2014, sebanyak 54% dari 7,324 miliar penduduk dunia tinggal di daerah perkotaan bahkan diperkirakan pada tahun 2050 angka tersebut mencapai 66% dan sebagian besar terjadi di negara-negara Asia. Fenomena ini sejalan dengan lahirnya "*mega cities*" yaitu kota dengan jumlah penduduk melebihi 10 juta jiwa. Pada tahun 2014, telah tercatat 28 kota dunia merupakan *mega cities* dan 16 diantaranya berada di Asia termasuk di Indonesia. Jakarta telah menduduki posisi kedua sebagi kota dengan jumlah penduduk terbanyak yaitu mencapai 35 juta jiwa pada tahun 2015. Angka-angka tersebut bukannya tanpa arti, banyak tantangan dan masalah yang akan ditimbulkan dari fenomena ini yaitu penyediaan infrastruktur perkotaan seperti rumah, air bersih, dan transportasi; penyediaan energi; penyediaan pangan; dan tantangan pada pemerliharaan ligkungan hidup dan perubahan iklim [1].

Masalah-masalah tersebut akan menimbulkan efek domino terhadap masalah yang lainnya, contohnya permasalahan sosial-ekonomi yaitu pekerjaan, pendidikan, kemiskinan, kriminalitas, dan sebagainya. bahkan dengan menumpuknya penduduk di daerah perkotaan akan melahirkan kawasan pemukiman yang kumuh (*slum area*) terutama di Afrika dan Asia. Kawasan pemukiman yang kumuh ini sangat minim akses terhadap air bersih dan sanitasi, tidak memiliki legalitas untuk tinggal, serta memiliki tingkat kriminalitas yang tinggi.

Perencanaan kota pada awalnya hanya meliputi perencanaan fisik yang sebenarnya dapat kita lihat pada kota-koa lama bahkan pada zaman sebelum Yunani dan Romawi. Namun, konsep perencanaan fisik ini baru diperkenalkan secara formal pada tahun 1851 oleh Ebenezer Howard lewat ide cermelangnya "*Garden City of Tomorrow*". Ide tersebut timbul karena dijumpai menurunnya kualitas fisik perkotaan akibat adanya

urbanisasi dan industrialisasi pasca revolusi industri.

Pasca perang dunia pertama, tak hanya masalah fisik yang mendasari perencanaan kota namun juga memasukan aspek spasial (keruangan), organisasi metropolitan, perumahan, tenaga kerja, dan ruang terbuka sehingga munculah pemikiran perencanaan regional. Seiring dengan kesadaran terhadap kelestarian lingkungan lahirlah perencanaan kota yang didasarkan pada *sustainable developmen*t. Kemudian muncul perencanaan ruang (*spatial planning*), pengelolaan kota (*urban management*), hingga saat ini muncul konsep smart city yang memanfaatkan ICT (*information and communication technology*).

KONSEP *GREEN CITY*

Green City (Kota hijau) adalah konsep pembangunan kota berkelanjutan dan ramah lingkungan yang dicapai dengan strategi pembangunan seimbang antara pertumbuhan ekonomi, kehidupan sosial dan perlindungan lingkungan sehingga kota menjadi tempat yang layak huni tidak hanya bagi generasi sekarang, namun juga generasi berikutnya [2].

Green city bertujuan untuk menghasilkan sebuah pembangunan kota yang berkelanjutan dengan mengurangi dampak negatif pembangunan terhadap lingkungan dengan kombinasi strategi tata ruang, strategi infrastruktur dan strategi pembangunan sosial.

Green city terdiri dari delapan elemen, yaitu

1. *Green planning and design* (Perencanaan dan rancangan hijau)
   Perencanaan dan rancangan hijau adalah perencanaan tata ruang yang berprinsip pada konsep pembangunan kota berkelanjutan. Green city menuntut perencanaan tata guna lahan dan tata bangunan yang ramah lingkungan serta penciptaan tata ruang yang atraktif dan estetik.
2. *Green open space* (Ruang terbuka hijau)
   Ruang terbuka hijau adalah salah satu elemen terpenting kota hijau. Ruang terbuka hijau berguna dalam mengurangi polusi, menambah estetika kota, serta menciptakan iklim mikro yang nyaman. Hal ini dapat diciptakan dengan perluasan lahan taman, koridor hijau dan lain-lain.
3. *Green Waste* (Pengelolaan sampah hijau)
   Green waste adalah pengelolaan sampah hijau yang berprinsip pada reduce (pengurangan), reuse (penggunaan ulang) dan recycle (daur ulang). Selain itu, pengelolaan sampah hijau juga harus didukung oleh teknologi pengolahan dan pembuangan sampah yang ramah lingkungan.
4. *Green transportation* (Transportasi hijau)
   Green transportation adalah transportasi umum hijau yang fokus pada pembangunan transportasi massal yang berkualitas. Green transportation bertujuan untuk meningkatkan penggunaan transportasi massal, mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, penciptaan infrastruktur jalan yang mendukung perkembangan transportasi massal, mengurangi emisi kendaraan, serta menciptakan ruang jalan yang ramah bagi pejalan kaki dan pengguna sepeda.
5. *Green water* (manajemen air yang hijau)
   Konsep *green water* bertujuan untuk penggunaan air yang hemat serta penciptaan air yang berkualitas. Dengan teknologi yang maju, konsep ini bisa diperluas hingga penggunaan hemat *blue water* (air baku/ air segar), penyediaan air siap minum, penggunaan ulang dan pengolahan *grey water*(air yang telah digunakan), serta penjagaan kualitas *green water* (air yang tersimpan di dalam tanah).
6. *Green energy* (Energi hijau)
   Green energy adalah strategi kota hijau yang fokus pada pengurangan penggunaan energi melalui penghemetan penggunaan serta peningkatan penggunaan energi terbaharukan, seperti listrik tenaga surya, listrik tenaga angin, listrik dari emisi methana TPA dan lain-lain.
7. *Green building* (Bangunan hijau)
   Green building adalah struktur dan rancangan bangunan yang ramah lingkungan dan pembangunannya bersifat efisien, baik dalam rancangan, konstruksi, perawatan, renovasi bahkan dalam perubuhan. Green building harus bersifat ekonomis, tepat guna, tahan lama, serta nyaman. Green building dirancang untuk mengurangi dampah negatif bangunan terhadap kesehatan manusia dan lingkungan dengan penggunaan energi, air, dan lain-lain yang efisien, menjaga kesehatan penghuni serta mampu mengurangi sampah, polusi dan kerusakan lingkungan.
8. *Green Community* (Komunitas hijau)
   Green community adalah strategi pelibatan berbagai stakeholder dari kalangan pemerintah, kalangan bisnis dan kalangan masyarakat dalam pembangunan kota hijau. *Green community* bertujuan untuk

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

menciptakan partisipasi nyata stakeholder dalam pembangunan kota hijau dan membangun masyarakat yang memiliki karakter dan kebiasaan yang ramah lingkungan, termasuk dalam kebiasaan membuang sampah dan partisipasi aktif masyarakat dalam program-program kota hijau pemerintah.

KONSEP *GREEN CITY* UNTUK MENDUKUNG PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Gambar 1. : Ilustrasi Kota dengan Konsep *Green City*

Pertumbuhan kota yang cepat terjadi di negara-negara berkembang, salah satunya di Indonesia. Kota-kota besar di Indonesia seperti di Jakarta, Surabaya, Bandung, Makassar mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Perkembangan tersebut salah satunya dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang pesat pula, dan urbanisasi menjadi salah satu sebabnya. Peningkatan jumlah penduduk akan mengakibatkan kebutuhan lahan meningkat.

Realita kondisi pertumbuhan kota yang demikian tentu akan mengakibatkan pada degradasi lingkungan. Persebaran lahan terbangun yang sangat luas mengakibatkan inefisiensi jaringan transportasi yang berdampak pada meningkatnya polusi udara perkotaan, selain itu juga menimbulkan *costly* dan pemborosan. Lihat saja Jakarta yang merupakan ibukota Indonesia, kota tersebut sudah mengalami perkembangan yang terlalu pesat sehingga mengalami "*overload*", menjadikan kota tersebut sebagai kota yang tidak layak untuk ditinggali. Bahkan sempat muncul isu tentang pemindahan ibukota akibat ketidaklayakannya. Belum lagi kota-kota besar lain yang mulai berkembang seperti Surabaya, Bandung, dan lain-lain.

Berdasarkan keadaan itu, dalam melakukan perencanaan kota dibutuhkan pendekatan konsep perencanaan yang berkelanjutan. Ada beberapa konsep pengembangan kota yang berkelanjutan, salah satunya adalah konsep *Green City* yang selaras dengan alam [3].

Green City dikenal sebagai kota ekologis. Kota yang secara ekologis juga dapat dikatakan kota yang sehat. Artinya adanya keseimbangan antara pembangunan dan perkembangan kota dengan kelestarian lingkungan. Kota sehat juga merupakan suatu kondisi dari suatu kota yang aman, nyaman, bersih, dan sehat untuk dihuni penduduknya dengan mengoptimalkan potensi sosial ekonomi masyarakat melalui pemberdayaan forum masyarakat, difasilitasi oleh sektor terkait dan sinkron dengan perencanaan kota. Untuk dapat mewujudkannya, diperlukan usaha dari setiap individu anggota masyarakat dan semua pihak terkait (*stakeholders*).

Konsep ini sesuai dengan pendekatan-pendekatan yang disampaikan Hill, Ebenezer Howard, Pattrick Geddes, Alexander, Lewis Mumford, dan Ian McHarg. Implikasi dari pendekatan-pendekatan yang disampaikan diatas adalah menghindari pembangunan kawasan yang tidak terbangun. Hal ini menekankan pada kebutuhan terhadap rencana pengembangan kota dan kota-kota baru yang memperhatikan kondisi ekologis lokal dan meminimalkan dampak merugikan dari pengembangan kota, selanjutnya juga memastikan pengembangan kota yang dengan sendirinya menciptakan aset alami lokal [4].

ISBN : 978-602-73463-1-4

KRITERIA KONSEP *GREEN CITY*:

1. Pembangunan kota harus sesuai peraturan UU yang berlaku, seperti UU 24/2007: Penanggulangan Bencana (Kota hijau harus menjadi kota waspada bencana), UU 26/2007: Penataan Ruang, UU 32/2009: Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dll.
2. Konsep *Zero Waste* (Pengolahan sampah terpadu, tidak ada yang terbuang).
3. Konsep *Zero Run-off* (Semua air harus bisa diresapkan kembali ke dalam tanah, konsep ekodrainase).
4. Infrastruktur Hijau (tersedia jalur pejalan kaki dan jalur sepeda).
5. Transportasi Hijau (penggunaan transportasi massal, ramah lingkungan berbahan bakar terbarukan, mendorong penggunaan transportasi bukan kendaraan bermotor - berjalan kaki, bersepeda, delman/dokar/andong, becak.
6. Ruang Terbuka Hijau seluas 30% dari luas kota (RTH Publik 20%,RTH Privat 10%).
7. Bangunan Hijau.
8. Partisispasi Masyarakat (Komunitas Hijau)

Kota-kota besar di Indonesia perlu secara cermat mengatasi persoalan ledakan penduduk perkotaan akibat urbanisasi yang brutal, tidak tertahankan, apabila kita berharap bahwa kota-kota tersebut dapat menjadi layak huni di masa mendatang. Salah satunya adalah dengan pengendalian jumlah penduduk dan redistribusinya, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dengan konsep *Green City* krisis perkotaan dapat kita hindari, sebagaimana yang terjadi di kota-kota besar dan metropolitan yang telah mengalami obesitas perkotaan, apabila kita mampu menangani perkembangan kota-kota kecil dan menengah secara baik, antara lain dengan penyediaan ruang terbuka hijau, pengembangan jalur sepeda dan pedestrian, pengembangan kota kompak, dan pengendalian penjalaran kawasan pinggiran.

Terdapat beberapa pendekatan *Green City* yang dapat diterapkan dalam manajemen pengembangan kota. Pendekatan *Pertama*, adalah *Smart Green City Planning*. Pendekatan ini terdiri atas 5 konsep utama yaitu konsep kawasan berkeseimbangan ekologis yang bisa dilakukan dengan upaya penyeimbangan air, CO2, dan energi. Pendekatan *kedua* adalah konsep desa ekologis yang terdiri atas penentuan letak kawasan, arsitektur, dan transportasi dengan contoh penerapan antara lain: kesesuaian dengan topografi, koridor angin, sirkulasi air untuk mengontrol klimat mikro, efisiensi bahan bakar, serta transportasi umum. *Ketiga,* konsep kawasan perumahan berkoridor angin (*wind corridor housing complex*), dengan strategi pengurangan dampak pemanasan. Caranya, dengan pembangunan ruang terbuka hijau, pengontrolan sirkulasi udara, serta menciptakan kota hijau. *Keempat*, konsep kawasan pensirkulasian air (*water circulating complex*). Strategi yang dilakukan adalah daur ulang air hujan untuk menjadi air baku. *Kelima*, konsep taman tadah hujan (*rain garden*).Pendekatan kedua adalah Konsep CPULS (*Continous Productive Urban LandscapeS*. Konsep penghijauan kota ini merupakan pengembangan landscape yang menerus dalam hubungan urban dan rural serta merupakan *landscape productive.*

Pendekatan terakhir adalah *Integrated Tropical City*. Konsep ini cocok untuk kota yang memiliki iklim tropis seperti Indonesia. Konsep intinya adalah memiliki perhatian khusus pada aspek iklim, seperti perlindungan terhadap cuaca, penghutanan kota dengan memperbanyak vegetasi untuk mengurangi Urban Heat Island. Bukan hal yang tidak mungkin apabila Indonesia menerapkannya seperti kota-kota berkonsep khusus lainnya (Abu Dhabi dengan Urban Utopia nya atau Tianjin dengan *Eco-city* nya), mengingat Indonesia yang beriklim tropis.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

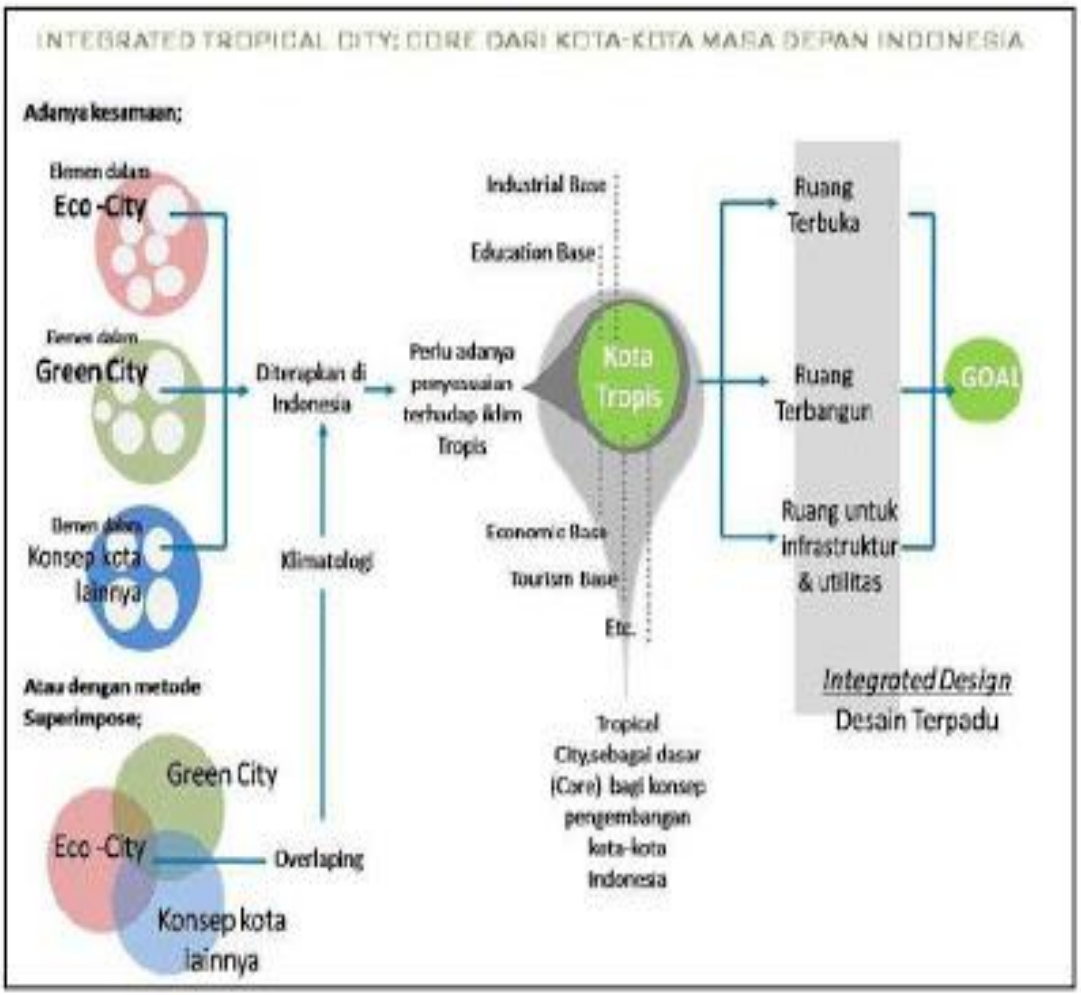

Gambar 2. : Ilustrasi *Integrated Tropical City*

Kelebihan dari konsep *Green City* adalah dapat memenuhi kebutuhan keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) di suatu kawasan, sehingga dapat mengurangi bahkan memecahkan masalah lingkungan, bencana alam, polusi udara rendah, bebas banjir, rendah kebisingan dan permasalahan lingkugan lainnya.

Namun disamping kelebihannya, konsep ini memiliki kelemahan juga. Penerapannya pada masing-masing kawasan tidak dapat disamaratakan karena tiap-tiap daerah memerlukan kajian tersendiri. Setidaknya harus diketahui tentang karakteristik lokal, iklim makro, dan sebagainya. Misalnya, daerah pegunungan RTH difungsikan untuk menahan longsor dan erosi, di pantai untuk menghindari gelombang pasang, tsunami, di kota besar untuk menekan polusi udara, serta di perumahan, difungsikan meredam kebisingan. Jadi RTH di masing-masing kota memiliki fungsi ekologis yang berbeda. Disamping itu, penerapannya saat ini kebanyakan pelaksanaan penghijauannya tidak terkonseptual, sehingga menimbulkan citra penghijauan asal jadi tanpa melihat siapa yang dapat mengambil manfaat positif dari penghijauan.

IMPLEMENTASI KONSEP *GREEN CITY*: *GREEN BUILDING, GREENSHIP*

GREEN BUILDING

Semakin cepatnya pembangunanan ekonomi akan berdampak pada kondisi infrastruktur suatu negara. Masifnya pembangunan gedung-gedung bertingkat akan semakin meminimalkan area hijau yang mana penting untuk kehidupan. Pentingnya pengembangan gedung dengan menerapkan konsep *green building* sangat dianjurkan oleh pemerintah untuk mengurangi dampak negatif dari hilangnya lahan hijau dalam kota. Sebuah bangunan yang berdiri dapat diakui oleh masyarakat umum sebagai bangunan hijau (*green building*) jika telah memperoleh pengakuan dari suatu lembaga. *Green Building Council Indonesia* (GBCI) merupakan lembaga mandiri (*non-government*) dan nirlaba (*non-for profit*) yang berkomitmen penuh dalam mengaplikasikan praktik-praktik terbaik lingkungan dan memfasilitasi transformasi industri bangunan global yang berkelanjutan. Lembaga GBCI menyelenggarakan kegiatan sertifikasi bangunan hijau di Indonesia berdasarkan perangkat

ISBN : 978-602-73463-1-4

penilaian *Greenship* . Menurut GBCI,*green building* adalah gedung berkinerja tinggi yang dibuat berwawasan lingkungan sehingga mampu mengurangi penggunaan energi serta dampak polusi sekaligus ramah lingkungan [5].

Masih terdapat harapan untuk menlindungi bumi ini selain dari pemanfaatan energi terbarukan yang sampai sekarang belum optimal.Tingginya permintaan kebutuhan bahan bakar minyak dan rendahnya produksi minyak dalam negeri tidak semata-mata menurunkan ritme tingkat konsumsi. Pemerintah terus mengimbanginya dengan impor yang semakin luar biasa besar. Sehingga upaya perlindungan terhadap lingkungan Bumi masih bisa dilakukan dari sektor *building* yang sampai sekarang sangat pesat pertumbuhannya. Pemerintah Indonesia sangat mendukung program ini yang bisa dikaitkan dalam UU dan PP.

Salah satu strategi dalam mengimplementasikan Konsep *Green Building* adalah dengan Teknik Vertikultur [6]. Teknik vertikultur merupakan cara bertanam yang dilakukan dengan menempatkan media tanam dalam wadah-wadah yang disusun secara vertikal, atau dapat dikatakan bahwa vertikultur merupakan upaya pemanfaatan ruang ke arah vertikal. Dengan demikian penanaman dengan sistem vertikultur dapat dijadikan alternatif bagi masyarakat yang tinggal di kota, yang memiliki lahan sempit atau bahkan tidak ada lahan yang tersisa untuk budidaya tanaman. Beberapa manfaat dari teknik vertikultur, antara lain: (a) hemat lahan dan air, (b) mendukung pertanian organik, (c) wadah media tanam disesuaikan dengan kondisi setempat, (d) umur tanaman relatif pendek, (e) pemeliharaan tanaman relatif sederhana, (d) dapat dilakukan oleh siapa saja yang berminat.

Pada bangunan gedung-gedung yang menjulang tinggi dimana sedikit sekali ruang lahan yang tersedia, maka keberadaan ruang-ruang di dalam gedung tersebut dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk pembudidayaan berbagai komoditas tanaman semusim, sejenis hortikultura. Jenis-jenis tanaman yang dibudidayakan biasanya adalah tanaman yang memiliki nilai ekonomi tinggi, berumur pendek atau tanaman semusim khususnya sayuran (seperti seledri, *caisism*, *pack-choy*, baby kalian, dan selada), dan memiliki sistem perakaran yang tidak terlalu luas [7].

GREENSHIP

Greenship merupakan perangkat penilaian tingkat green suatu bangunan dengan memperhatikan beberapa aspek penilaian berisi beberapa tolok ukur yang disesuaikan dengan peraturan/ketetapan pemerintah dan Standar Nasional Indonesia. Total nilai evaluasi akan menentukan kriteria tingkat green dengan kategori seperti dalam Tabel 1, dimana selanjutnya akan disahkan dalam bentuk sertifikasi.

Tabel 1. Ketentuan Poin Minimal Sertifikasi

Greenship		Poin
Bronze	35%	41-53
Silver	46%	54-66
Gold	57%	67-85
Platinum	73%	≥ 86

Sebagian besar evaluasi *green building* yang telah dilakukan yaitu pada gedung-gedung terbangun sehingga digunakan *Greenship Existing Building* (EB). Aspek yang memiliki komponen penilaian tertinggi adalah *Energy Efficiency & Conservation*. Oleh karena itu, kajian terhadap aspek ini menjadi prioritas utama, salah satunya dengan audit energi dan mengkaji potensi konservasi energi.

Dalam UU No. 30 Tahun 2007 tentang Energi dinyatakan bahwa konservasi sumber daya energi adalah pengelolaan sumber daya energi yang menjamin pemanfaatannya dan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Kemudian, dalam rangka mendukung pembangunan nasional secara berkelanjutan dan meningkatkan ketahanan energi nasional, tujuan pengelolaan energi antara lain adalah termanfaatkannya energi secara efisien di semua sektor.

Sementara dalam PP No. 70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi dinyatakan bahwa audit energi adalah proses evaluasi pemanfaatan energi dan identifikasi peluang penghematan energi serta rekomendasi peningkatan efisiensi pada pengguna energi dan pengguna sumber energi dalam rangka konservasi energi. Dalam SNI 03-6196-2000 audit energi didefinisikan sebagai teknik untuk menghitung besarnya konsumsi energi pada bangunan gedung dan mengenali berbagai cara penghematannya. Secara garis besar, berbagai cara penghematan tersebut dikenal pula sebagai*Energy Management Opportunities* (EMO).

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Audit energi pada bangunan diperlukan untuk mengetahui berapa jumlah energi yang digunakan selama kurun waktu setahun guna memenuhi seluruh fungsi pelayanan dan operasional sistem utilitas bangunan dengan memperhatikan terpenuhinya kenyamanan penghuni dalam beraktifitas di dalam bangunan tersebut. Salah satu rekomendasi InSGreeB yakni dengan menerapkan program manajemen energi yang efektif meliputi tiga komponen yaitu 1) pembelian energi yang efisien, 2) mengoperasikan peralatan dengan efisien, 3) mengganti peralatan dengan yang efisien. Ketiga komponen ini memiliki prioritas yang sama.

Sedangkan langkah-langkah dalam melaksanakan program manajemen energi bangunan untuk menuju konservasi energi yang efektif meliputi: 1) komitmen total dari pihak manajemen, 2) audit energi dalam bangunan yang mengidentifikasi karakteristik bangunan, mencatat konsumsi energi tiap bulannya (listrik, LPG, solar) dan membuat perkiraan pemakaian pada bulan berikutnya, dan distribusi konsumsi energi, 3) identifikasi masalah dan penyelesaiannya, 4) menentukan tujuan konservasi, misalkan 5 tahun ke depan dalam % penghematan atau kWh/m^2, 5) implementasi peluang penghematan energi yang layak dan pemantauan konsumsi energinya secara berkelanjutan, serta 6) membuat perubahan atau penyesuaian agar tujuan konservasi energi yang dicanangkan dapat tercapai.

Sistem penerangan untuk seluruh studi kasus di atas merupakan sistem utilitas bangunan yang mengkonsumsi energi listrik terbesar. Beberapa contoh solusi teknis dan non-teknis yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan penggunaan pencahayaan alami dan penerangan buatan. Penelitian di atas telah menunjukkan terpenuhinya tingkat pencahayaan yang diperlukan sekaligus hemat energi.
2. Menyalakan lampu saat diperlukan. Aktifitas penghuni yang sangat beragam dengan belum adanya budaya hemat energi menjadikan penerapan sistem otomasi penerangan suatu solusi yang penting. Penerapan sistem otomasi penerangan dapat menggunakan sensor okupansi dan*daylighting* sensor.
3. *Retrofit* komponen penerangan dengan menggunakan *green lighting* terutama jenis lampu LED yang bernilai efikasi tinggi. Efikasi adalah nilai perbandingan watt lampu yang dihasilkan dengan daya listrik yang dibutuhkan. Manajemen bangunan yang menerapkan beberapa kebijakan diantaranya penjadwalan, perawatan berkala, dan mengamati arus, tegangan, dan faktor daya secara terus menerus pada jaringan kelistrikan.

JAKARTA, SURABAYA: REPRESENTASI KOTA MODERN

Untuk melihat implementasi konsep *green* city, maka akan sangat menarik apabila dipilih kota Jakarta, untuk merepresentasikan suatu kondisi kota yang perkembangannya sangat luar biasa bahkan spektakuler di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, disamping itu pula dijumpai berbagai problematika terkait sarana dan prasarana, kebutuhan hidup warga, maupun masalah-masalah sosial akibat berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi tersebut. Jakarta menyandang gelar sebagai daerah khusus karena selain sebagai daerah provinsi, Jakarta juga berperan sebagai daerah administrasi negara. Kesan mewah selalu ada dalam pikiran masyarakat daerah lain ketika mendengar nama Jakarta.

Sebagai daerah yang diposisikan sebagai ibu kota negara, Jakarta memiliki sarana prasarana yang memadai seperti gedung pemerintahan, perkantoran dan sarana bisnis yang luas dan banyak, tempat usaha yang strategis, sarana publik dan olah raga yang memadai, bidang transportasi, keamanan, administrasi, dan lain-lain. Hali ini jauh berbanding terbalik dengan daerah-daerah provinsi lainnya di Indonesia. Kesenjangan ini disebabkan oleh fokus pembangunan negara Indonesia pada zaman orde lama tahun 1945-1965 hanya berfokus kepada Ibukota negara yaitu Jakarta. Tujuan awalnya hanya sebatas pencitraan kepada negara lain, khususnya negara Belanda dan Jepang bahwa negara Indonesia mampu menjadi negara mandiri dan sejahtera. Setelah zaman orde lama ke orde baru pemerintah tetap melanjutkan pembangunan hanya berpusat pada Jakarta.

Pada era reformasi pembangunan ke daerah-daerah provinsi mulai berjalan hal ini diwujudkan dengan adanya Undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah. Dari sistem dekonsentrasi menjadi ke sistem desentralisasi. Kurangnya perencanaan tata ruang untuk Ibukota Jakarta menjadikan Jakarta terkesan sebagai kota yang tidak teratur. Hal ini bisa dilihat dengan keberadaan lokasi gedung-gedung bertingkat tinggi dengan lokasi tempat tinggal penduduk Jakarta itu sendiri. Mudahnya izin untuk membangun pusat perbelanjaan dan perkantoran menjadi salah satu penyebab ketidakteraturan ruang di Jakarta ini. Tingginya tingkat pembangunan di Jakarta menjadikan daya magnet tersendiri bagi penduduk daerah lain di Indonesia untuk datang dan mencari pekerjaan di Jakarta. Tercatat pada tahun 2010 jumlah penduduk Jakarta sebanyak 9.607.787 jiwa (www.bps.go.id) namun kondisi demikian, kenyataannya tidak sebanding dengan luas wilayah 740, 3 km2. Hal ini menjadi indikasi populasi penduduk di Jakarta sangat besar berbanding terbalik dengan lokasinya yang sempit. Sebagai Ibukota negara sekaligus pusat perekonomian Indonesia menurut penulis seharusnya Jakarta tidak lupa dengan kondisi lingkungan di sekitarnya. Tingkat perekonomian Jakarta pada

triwulan pertama pada tahun 2014 sebesar 0,32 persen meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2013 sebesar 1,55 persen, berbanding terbalik dengan tingkat perekonomian di daerah-daerah di Indonesia yang cenderung berada dibawah Jakarta.

Disaat kondisi pembangunan dan perekonomian di Jakarta meningkat, maka ruang hijau di Jakarta semakin sedikit, tercatat Jakarta hanya memiliki 8 taman kota (sumber: www.data.jakarta.go.id). Hal ini tentu saja menjadikan Jakarta sebagai salah satu kota yang tidak ramah lingkungan. Tata ruang yang dinamis seharusnya dibutuhkan di Jakarta, bukan hanya berbasis *smart city*. Tapi diharapkan pemerintah Jakarta mampu menerapkan *Green City* untuk daerah perkotaan Jakarta. *Green city* bisa dilaksanakan salah satunya dengan adanya kepemilikan hutan kota.

Hari Habitat Dunia (HBD) menjadi momentum bagi Indonesia untuk dapat memiliki rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang baik. Pemerintah saat ini memfokuskan sasaran millennium development goals (MDGs) yaitu: *pertama* tahun 2015, 350 kota di Indonesia tidak lagi mempunyai kawasan kumuh dan diharapkan tahun 2020 semua kota bebas dari kawasan kumuh, *kedua* akses air minum yang aman dan *ketiga* akses air limbah sebesar 85% dari 24 juta jiwa penduduk perkotaan (sumber: www.ciptakarya.pu.go.id). Untuk menjalankan hal tersebut Kementerian Pekerjaan umum dan Perumahan rakyat (Kemenpupr) memiliki misi ingin meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni terpadu, andal dan berkelanjutan.

Disisi lain masyarakat kota Jakarta juga sangat menginginkan adanya hutan kota. Hutan kota adalah suatu lahan yang ditumbuhi dengan pohon-pohon yang rapat di dalam perkotaan. Hutan kota sangat di perlukan di DKI Jakarta, dikarenakan manfaatnya yang sangat besar, salah satu manfaatnya diantaranya dari segi estetika pembangunan maupun dari segi ekosistem. Dari segi estetika, maka akan terlihat perpaduan antara pembangunan yang tertata dengan pelestarian aneka tumbuhan di tengah kota. Hal ini tentu saja menjadikan keindahan sendiri bagi Jakarta. Sebagai contoh kota *central park* di New York, Amerika Serikat atau *garden by the bay* di Singapura. Meskipun mereka memiliki gedung-gedung pencakar langit namun mereka tidak lupa dengan keindahan alam.

Pembangunan lingkungan yang sehat sebagai landasan pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan didukung dengan rencana tata ruang wilayah (RTRW) yang baik. Berdasarkan Undang-undang No.26 Tahun 2007 setidaknya suatu wilayah harus memiliki ruang terbuka hijau (RTH) sebesar 30%. Hal ini bisa diwujudkan dengan pembentukan hutan kota. Pada Undang-undang No. 41 Tahun 2009 disebutkan bahwa hutan mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut dan memelihara kesuburan tanah. Selain itu peran dari hutan sangatlah besar dibidang penyeimbang ekosistem [8].

Manusia sebagai makhluk sosial juga membutuhkan ruang terbuka untuk menjaga keseimbangan dengan alam. Keseimbangan pola kehidupan manusia sebagai bentuk terwujudnya hak manusia untuk hidup sehat. Ruang terbuka hijau sangat dibutuhkan oleh Jakarta sebagai bentuk keseimbangan ekosistem dengan alam. Pembangunan gedung mengakibatkan semakin sempitnya lahan terbuka. Semakin sempitnya lahan terbuka menjadikan ketidakseimbangan wilayah ekosistem. Perpindahan fungsi awal suatu wilayah menjadikan rusaknya suatu ekosistem.

Didalam Undang-undang Dasar NRI 1945 pasal 28H ayat (1) disebutkan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Pada pasal ini jelas disebutkan bahwa kondisi lingkungan hidup yang sehat merupakan hak dari setiap warga negara Indonesia dan pemerintah berkewajiban untuk memberikan kondisi lingkungan hidup yang sehat. Artinya sangat diperlukan kondisi tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik, tidak lagi berfokus pada pembangunan gedung tapi juga berfokus pada pembangunan lingkungan yang sehat. Untuk menjalankan RTRW diperlukan sinergitas antar instasi terkait tata ruang. Setiap masyarakat mempunyai peran untuk mejaga perkotaan yang ramah dan nyaman untuk beraktivitas maupun ditinggalin. Selain itu peran masyarakat untuk menjaga keberlangsungan tata kota yang hijau juga diperlukan agar pencapaian ruang terbuka hijau bisa bertahan sampai puluhan tahun.

Kondisisi yang sama dialami di Kota Surabaya, seperti yang dilaporkan oleh Widigdo dan Canadarma (2003[9] bahwa RTH di Surabaya realitanya hanya 3.000 Ha dibandingkan dengan luasan kawasan yang terbangun, masih belum mencukupi bagi Surabaya yang luasnya 326 ribu Ha. Berdasarkan RTRWP Jawa Timur tahun 2005 – 2020, RTH di Surabaya seharusnya ada sekitar 6.500 Ha termasuk hutan kota. Bentuk RTH yang sudah ada di Surabaya, adalah hutan kota, taman kota, taman rekreasi kota, Area hutan kota di Surabaya, ada di Lakarsantri seluas 8 Ha, Kebun Bibit Wonorejo seluas 2 Ha dan waduk Wonorejo seluas 5 Ha. Taman rekreasi kota di Surabaya ada di Taman Surya, Taman Bungkul, dan Taman Flora Kebun Bibit, sedangkan bentuk RTH lainnya adalah taman kota dan jalur hijau ditepi atau ditengah jalan utama, misalnya jalan Raya Darmo, serta area hijau di bangunan-bangunan yang melestarikannya. Realisasi RTH di Surabaya, sama dengan kota-kota besar di Indonesia lainnya, yaitu kendala sulitnya ruang bagi RTH. Kesulitan ruang diperkotaan seringkali

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

disebabkan menjamurnya perumahan kumuh karena tingginya tingkat urbanisasai, keberadaan sector informal, akibat peningkatan kepadatan penduduk yang sangat cepat, atau pentingnya tujuan pembangunan berkelanjutan yang lain, sehingga banyak areal RTH terjadi alih fungsi lahan menjadi penggguna lahan yang lain. Sangat terbatasnya ketersediaan ruang bagi RTH di perkotaan, seperti di Surabaya juga disebabkan harga tanah yang tinggi, kurangnya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi, dan pelaksanaan regulasi perundangan-undangan yang kurang memperhatikan pentingnya RTH bagi kenyamanan hidup masyarakat didalam kota besar [10].

PENUTUP

a. Ledakan penduduk yang begitu cepat, membawa dampak pada kebutuhan lahan, perumahan, sandang, pangan dan sarana publik lain untuk dipenuhi. Sementara kondisi perkotaan tidak mampu mendukung kebutuhan penduduk secara keseluruhan. Akibatnya banyak persoalan terkait hal tersebut, baik problematika fisik maupun kondisi sosial masyarakat perkotaan.
b. Konsep Green City, menjadi alternatif solusi mengatasi problematika pemenuhan kebutuhan masyarakat dan upaya pelestarian lingkungan hidup
c. Saatnya mewujudkan dan mengimplementasikan konsep Green City untuk membangun daerah perkotaan di Indonesia seiring tujuan pembangunan berkelanjutan yang diinginkan bersama demi kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kompas cyber media (Kompas Gramedia Digital Group). 2014 “Pertumbuhan Penduduk Dunia Lampaui Prediksi”.
[2] Karyono, Tri Harso. 2010. Green Architecture: Pengantar Pemahaman Arsitektur Hijau di Indonesia. Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
[3] Lia Kian. 2014. Green City: Model dan Perspektif Ekonomi Islam. Sekolah Pascasarjana. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Disertasi.
[4] International Bank for Reconstruction and Development. 2012. Inclusive Green Growth: The Pathway to Sustainable Development.
[5] Utami, Sentagi Sesotya.2014. *Green Building Sebagai Green Icon Blue Campus Universitas Gadjah Mada.* Fakultas Teknik UGM : Yogyakarta.
[6] Temmy,D, Farida, Y.A., Endah, J. 2004. Teknik Bertanam di Lahan Sempit. Agromedia Pustaka, Jakarta.
[7] Sutarminingsih, L. 2003. Vertikultur: Pola Bertanam Secara Vertikal. Penerbit Kanisius, Jogjakarta. Cetakan ke 5.
[8] Dahuri, R. 2006. Pembangunan Wilayah.
[9] Widigdo dan Canadarma, 2003, Ruang Terbuka Hijau dan Perencanaan Tata Kota. Prosiding Seminar Nasional Arsitektur, Universitas Petra Surabaya.
[10] Winarno, S.T. 2003. Landscape dan Perencanaan Tata Kota. Prosiding Seminar Nasional Arsitektur, Universitas Petra Surabaya.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS LAJU PERTUMBUHAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN DI KAWASAN RAWAN BENCANA KOTA BUKITTINGGI

Tri Novi Arif[1)], Melinda Noer[2)] dan Yossyafra[2)]

[1] Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Universitas Andalas
[2] Staf Pengajar Program Studi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Universitas Andalas

Email :trinoviarief@gmail.com

Naskah diterima :14Desember 2016 Naskah direvisi : 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 7 Maret 2017

ABSTRAK

Sempadan Ngarai Sianok ditetapkan selebar 100 meter dari bibir ngarai dengan arah menjauhi ngarai ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH). Salah satu permasalahan perumahan di kota Bukittinggi adalah berupa permukiman yang terdapat pada daerah rawan bencana khususnya pada zona bahaya di sepanjang sempadan Ngarai Sianok. Tumbuh dan berkembangnya perumahan beserta prasarana pendukung pada kawasan ini berjalan seiring waktu yang dimulai pada tahun 1950 sebelum periode peraturan RUTRK berlaku, periode saat peraturan RUTRK 1997 – 2009 dan sampai saat ini pertumbuhan perumahan masih berlanjut pada periode peraturan RTRW 2010 - 2030 kota Bukittinggi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa laju pertumbuhan perumahan permukiman, yaitu: 1) Menghitung laju pertumbuhan perumahan dan permukiman pada kawasan rawan bencana Sempadan Ngarai Sianok, 2) Mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait tata ruang dan perumah permukiman. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan melakukan survei untuk mengevaluasi permasalahan, kebutuhan data diperoleh dengan melakukan sensus dengan jumlah objek penelitian sebanyak 153 rumah. Analisis data pada penelitian ini menggunakan statistik deskriptif. Prosedur kerja dalam penelitian ini dibagi atas beberapa tahapan seperti berikut: 1) riset data temuan awal, 2) penetapan responden, 3) penyebaran kuisioner, 4) pengolahan data kuisioner, 5) pembuatan peta digital dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG), 6) penyelesaian masalah menggunakan metode fishbone diagram. Hasil yang diperoleh yaitu persentase laju pertumbuhan perumahan permukiman mengalami penurunan dari 0,903% pada periode sebelum RUTRK menjadi 0,025% pada periode RUTRK 1997 – 2009, namun persentase laju pertumbuhan kembali naik menjadi 0,046% pada periode RTRW 2010 – 2030. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisa Fishbone, terdapat 9 faktor pengamatan yang mempengaruhi laju pertumbuhan perumahan, dari faktor yang diamati terdapat 14 masalah yang terjadi dan 15 rencana penanggulangan / implikasi kebijakan.

Kata kunci: *Laju Pertumbuhan, evaluasi Kebijakan, sempadan Ngarai Sianok*

PENDAHULUAN

Kawasan rawan bencana adalah suatu wilayah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi yang untuk jangka waktu tertentu tidak dapat atau tidak mampu mencegah, meredam, mencapai kesiapan, sehingga mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu[1]. Daerah rawan bencana merupakan daerah yang memiliki resiko tinggi terhadap ancaman terjadinya bencana baik akibat kondisi geografis, geologis, demografis maupun bencana alam yang ditimbulkan oleh ulah manusia. Berdasarkan jenis bencana alamnya, zona kerawanan bencana di Kota Bukittinggi adalah sebagai berikut [2].

Pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dan tingginya intensitas aktifitas manusia dalam mengubah tata guna lahan akan mempertinggi tingkat resiko pada daerah rawan bencana tanah longsor[3]. Sempadan Ngarai Sianok ditetapkan selebar 100 meter dari bibir ngarai dengan arah menjauhi ngarai. Sempadan Ngarai Sianok kemudian ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH) fungsi khusus dan kawasan strategis untuk kepentingan daya dukung lingkungan hidup di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah [4]. Permasalahan perumahan eksisting di Kota Bukittinggi intinya adalah berupa permasalahan yang disebabkan oleh permukiman

yang cenderung padat dan kumuh serta permasalahan yang disebabkan oleh permukiman yang terdapat pada daerah rawan becana, khususnya pada zona bahaya selebar 100 meter di sepanjang pinggiran Ngarai Sianok[2].

Analisis kebijakan adalah suatu bentuk analisis yang menghasilkan informasi sedemikian rupa sehingga dapat memberi landasan dari para pembuat kebijakan dalam membuat keputusan [5]. Analisis kebijakan dapat dapat diharapkan untuk menghasilkan informasi dan argumen-argumen yang masuk akal mengenai tiga macam pertanyaan [5]: 1) Nilai yang pencapaiannya merupakan tolak ukur utama untuk melihat apakah masalah telah teratasi; 2) Fakta yang keberadaannya dapat membatasi atau meningkatkan pencapaian nilai-nilai; 3) Tindakan yang penerapannya dapat menghasilkan pencapaian nilai-nilai.Menurut Bose [6]. Fishbone analysis adalah alat untuk menganalisa proses bisnis dan efektifitasnya. Fishbone analysis adalah alat yang hebat untuk masuk ke dalam kasus dan mencari tahu sebab akibatnya [6].Studi ini bertujuan untuk menghitung laju pertumbuhan perumahan dan permukiman pada kawasan rawan bencana Sempadan Ngarai Sianok dan mengevaluasi kebijakan pemerintah terkait tata ruang dan perumah permukiman.

METODOLOGI

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan melakukan survei untuk mengevaluasi permasalahan. Menurut Sugiyono [7],Selain itu penelitian ini juga merupakan penelitian survei. Penelitian survei merupakan penelitian yang menggunakan kuesioner sebagai instrumen penelitian, penelitian survei termasuk kelompok penelitian kuantitatif. Kuesioner dibutuhkan dalam penelitian ini guna menjaring data/informasi dengan responden masyarakat yang mendiami perumahan di daerah tersebut dan juga menjaring data/informasi dari pemerintah/dinas terkait yang berhubungan dengan peraturan dan kebijakan [8].

Pada penelitian ini peneliti menggunaan teknik Sampling Jenuh yang merupakan bagian pengelompokan dari teknik Nonprobability Sampling. Sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel [9]. Pemilihan objek penelitian diambil berdasarkan dengan kriteria batasan lokasi berada pada kawasan rawan bencana selebar 100 meter Sempadan Ngarai Sianok dengan fokus penelitian pada daerah kelurahan Belakang Balok Kecamatan Aur Birugo Tigo Baleh (ABTB) dengan jumlah objek penelitian sebanyak 153 rumah.

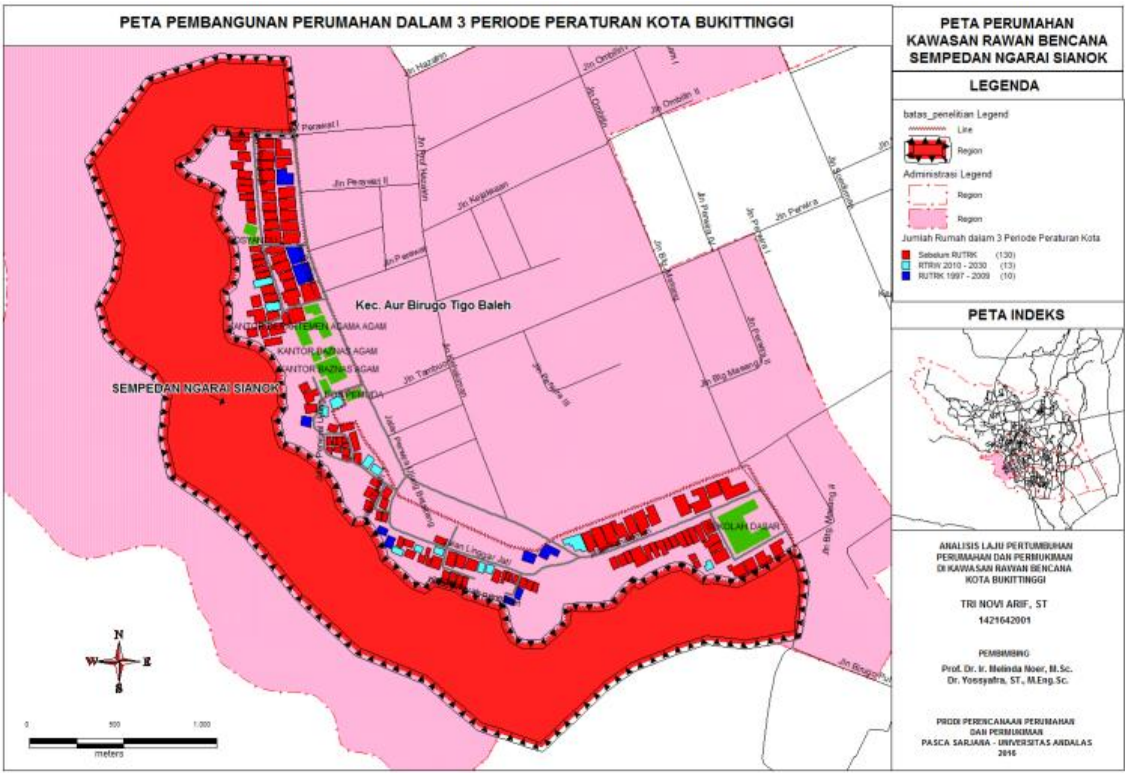

Gambar. 1Peta Lokasi Penelitian

Pada prinsipnya meneliti adalah melakukan pengukuran,maka harus ada alat ukur yang baik. Alat ukur dalam penelitian biasanya dinamakan instrumen penelitian.pada penelitian ini akan ditinjau 2 aspek yang selanjutnya akan disusun sebagai variabel penelitian. Variabel ini digunakan untuk mengidentifikasi laju pertumbuhan perumahan dan permukiman di kawasan rawan bencana kota Bukittinggi. Adapun kedua variabel

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

penelitian tersebut adalah: 1) Data teknis perumahan; 2) Prasarana, Sarana dan utilitas (PSU) pendukung perumahan.

Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh proses atau sumber data lain terkumpul, dalam penelitian kuantitatif ini menggunakan statistik untuk menganalisis data. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi [9]. Prosedur kerja dalam penelitian ini dibagi atas beberapa tahapan seperti berikut :

1. Riset data temuan awal, riset awal berdasarkan data perumahan permukiman yang berada pada zona 100 meter Sempadan Ngarai Sianok dapat memberikan gambaran awal terhadap jumlah dan batasan lokasi pengambilan data pada wilayah penelitian.
2. Penetapan responden, responden yang terdata sebanyak 153 responden/rumah yang berada pada 4 RT dalam cakupan 2 RW.
3. Penyebaran kuisioner, penyebaran kuisioner ini dilakukan dengan cara sensus dengan mendatangi setiap rumah yang menjadi responden pada penelitian ini.
4. Pengolahan data kuisioner, data diolah dan dilakukan tabulasi ke dalam tabel. Tabulasi adalah membuat tabel yang akan digunakan dalam pengolahan data. Tabulasi diperlukan untuk mentransformasikan keseluruhan alternatif jawaban responden (kuisioner) kedalam bentuk tabel dengan tujuan untuk mempermudah perhitungan frekuensi jawaban.
5. Pembuatan peta digital dengan pemanfaatan Sistem Informasi Geografis (SIG), SIG merupakan sistem yang dapat mengintegrasikan data spasial (peta vektor dan citra digital), atribut (tabel sistem basis data), dan properties penting lainnya, sehingga SIG dapat memberikan berbagai macam informasi [10].
6. Penyelesaian masalah menggunakan metode fishbone diagram, adapun langkah – langkah untuk menyelesaikan permasalahan dengan mengunakan metode fishbone diagram adalah:
   a. Mengidentifikasi masalah
   b. Pencarian kendala utama
   c. Mengidentifikasi penyebab yang memungkinkan terjadinya masalah
   d. Membuat diagram analisa permasalahan
   e. Penetapan target perbaikan / implikasi kebijakan

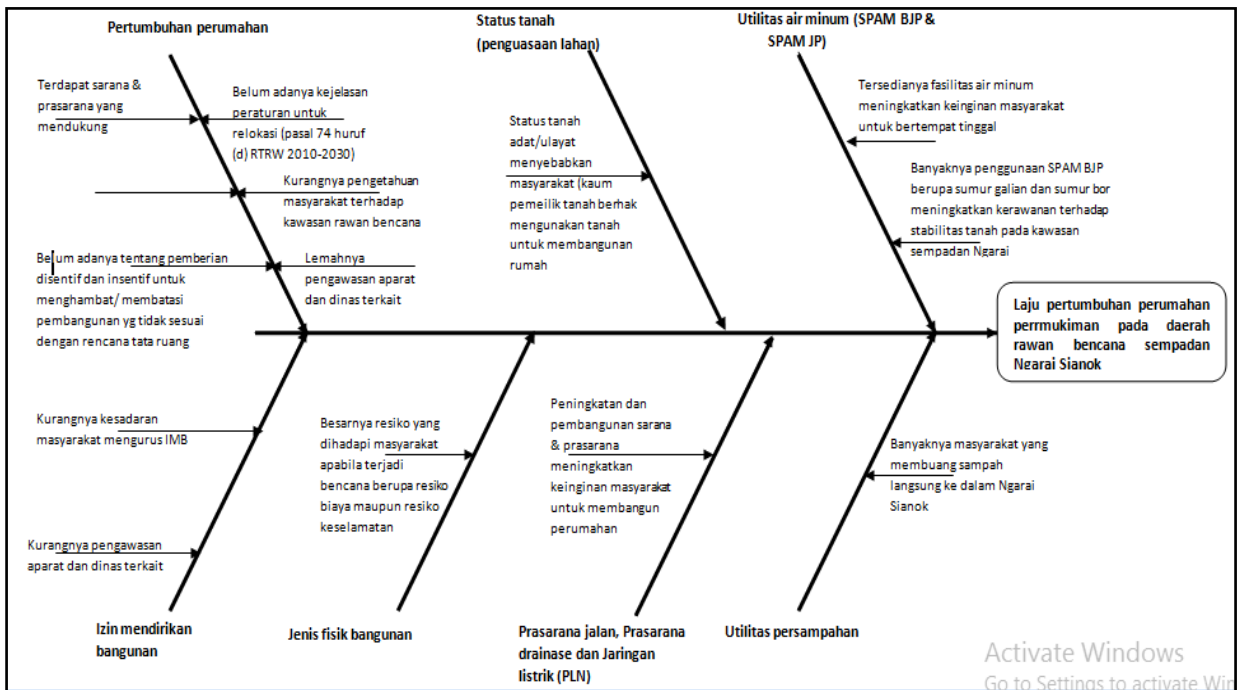

Gambar. 2 Analisis kebijakan dengan diagram *fishbone*

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Status Izin Pembangunan yang Dimiliki Perumahan

Terdapat 117 unit rumah atau 76% yang memiliki IMB saat pembangunan rumah dan sisanya sebanyak 36 unit rumah atau 24% dengan izin lainnya. Jadi secara keseluruhan, perumahan pada kawasan rawan bencana Sempadan Ngarai Sianok ini memiliki izin dan bukan perumahan ilegal.

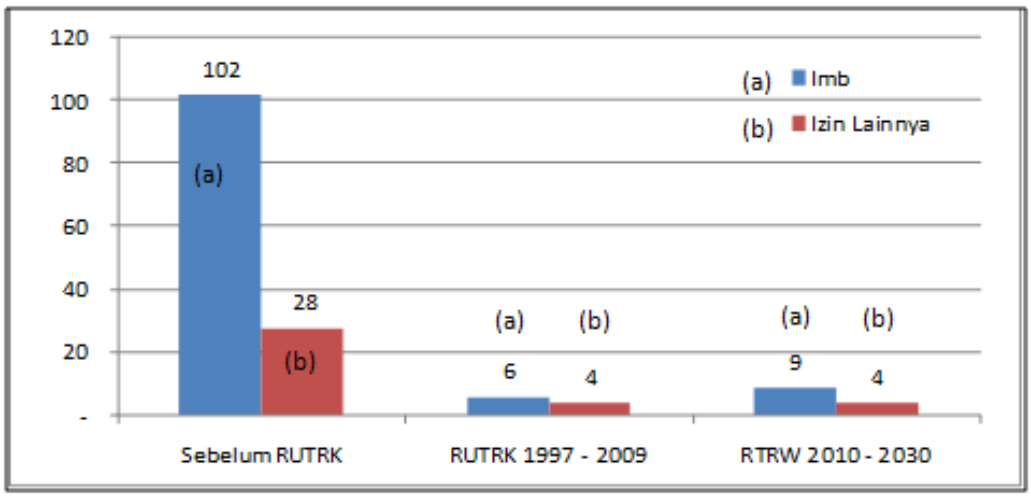

Gambar. 3 Status izin bangunan dalam 3 periode peraturan

Gambar 3 memperlihatkan persebaran izin pembangunan perumahan yang dibagi berdasarkan periode peraturan yang berlaku di kota bukittinggi. Berdasarkan dokumen RTRW 2010-2030 kota Bukittinggi terdapat 7 pasal yang mengatur tentang status izin mendirikan bangunan, dari 7 pasal terdapat 4 pasal yang membahas tentang kebijakan yaitu Pasal 74 huruf b; Pasal 123 ayat 1; Pasal 123 ayat 2; Pasal 125 ayat 4 huruf b dan c *(Lampiran A). 3 pasal yang membahas tentang batasan atau sanksi yaitu Pasal 129 ayat 2 huruf a; Pasal 131 ayat 2 huruf b; Pasal 131 ayat 3 RTRW.

2. Status Penguasaan Lahan

Status penguasaan lahan ini terkait dengan status izin yang dimiliki saat perencanaan pembangunan dimana 115 rumah atau 76% dibangun di atas tanah milik sendiri ditambah 2 rumah atau 1% dibangun di atas tanah negara memiliki IMB pada saat pembangunan perumahan, sedangkan 36 rumah atau 23% yang dibangun diatas tanah adat / ulayat / sewa tidak memiliki IMB atau hanya menggunakan izin lainnya. Gambar 4 memperlihatkan persebaran izin pembangunan perumahan yang dibagi berdasarkan periode peraturan yang berlaku di kota bukittinggi.

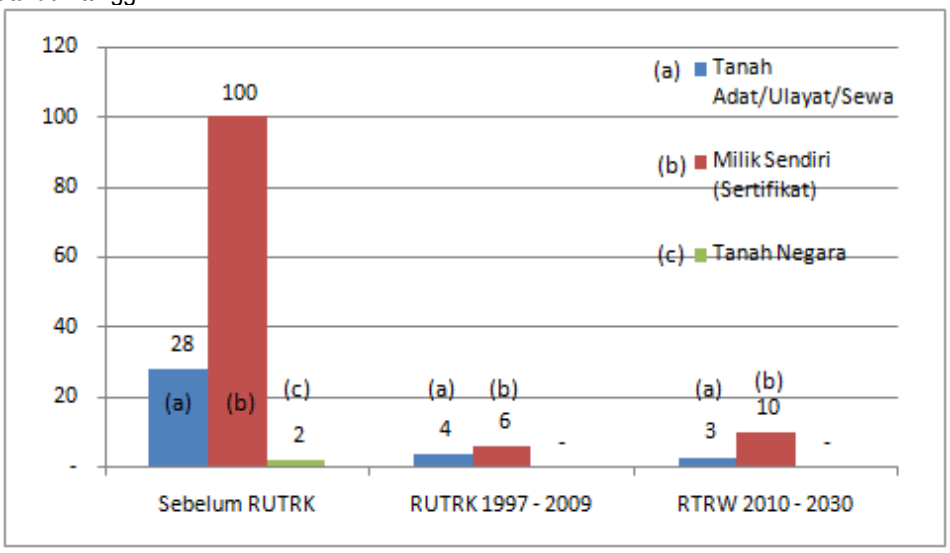

Gambar. 4Status penguasaan lahan dalam 3 periode peraturan

Berdasarkan dokumen RTRW 2010-2030 kota Bukittinggi terdapat 1 pasal yang membahas mengenai

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

status pengusaaan lahan yaitu terdapat pada Pasal 125 ayat 3 huruf c dan d RTRW kota Bukittinggi tentang tata cara pemberian izin pengunaan tanah, (c)apabila hasil usulan berdampak penting, maka usulan tersebut dilakukan uji publik; (d)apabila hasil dengar pendapat publik berakibat terhadap perubahan rencana, akan dilakukan penyesuaian rencana.

3. Kondisi Fisik Bangunan

89 unit rumah atau 60% terbangun merupakan rumah permanen, 38 unit rumah atau 24% merupakan rumah semi permanen dan 26 unit rumah atau 16% adalah rumah kayu. Dalam peraturan RTRW kota bukittinggi tidak terdapat pasal yang membahas mengenai kondisi fisik bangunan namun terdapat 1 permasalah yang bisa terjadi yaitu besarnya resiko yang akan dihadapi masyarakat apabila terjadi bencana pada kawasan rawan bencana sempadan Ngarai Sianok, resiko yang dihadapi berupa resiko biaya dan keselamatan.

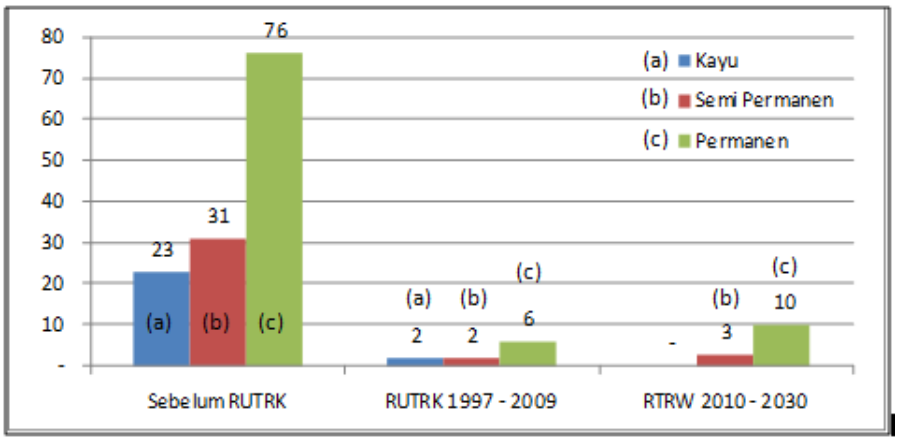

Gambar. 5Kondisi fisik bangunan dalam 3 periode peraturan

4. Prasarana Jalan Lingkungan Perumahan

Berdasarkan temuan data, 3 prasarana jalan merupakan jalan dengan jenis perkerasan beton dengan jumlah unit rumah yang terlayani fasilitas ini sebanyak 85 unit rumah dan 3 prasarana jalan merupakan jalan dengan jenis perkerasan aspalt dengan jumlah unit rumah yang terlayani fasilitas ini sebanyak 64 unit rumah, 4 unit rumah tidak memiliki prasarana jalan lingkungan perumahan.Penyedia prasarana jalan pada kawasan penelitian keseluruhannya disediakan oleh pemerintah dengan berbagai program pelaksanaan pembangunan prasarana jalan.

Berdasarkan dokumen RTRW 2010-2030 kota Bukittinggi terdapat 7 pasal yang mengatur tentang prasarana jalan. Dari 7 pasal terdapat 4 pasal yang membahas mengenai kebijakan terhadap prasarana jalan dan 3 pasal mengenai batasan atau sanksi, 4 pasal mengenai kebijakan prasarana jalan yaitu Pasal 8 huruf d; Pasal 21 ayat 2 huruf c ; Pasal 29 huruf a; Pasal 95 huruf a. Sedangkan 3 pasal mengenai batasan/ sanksi yaitu Pasal 112 huruf c ; Pasal 127 ayat 3 huruf b; Pasal 129 ayat 2 huruf d.

Ketersedian prasarana jalan pada kawasan sempadan ngarai menjadi permasalahan terkait penyedian prasarana pada kawasan rawan bencana sempadan ngarai seharusnya dilarang atau dibatasi karena dengan adanya prasarana jalan tersebut bisa meningkatkan keinginan masyarat untuk membangun dan bertempat tinggal pada daerah tersebut.

5. Prasarana Drainase Lingkungan Perumahan

dari 6 program pembagunan prasarana drainase terdapat 1 drainase yang berada di Jalan Perawat yang dibangun pada periode sebelum RUTRK pada tahun 1992 secara swadaya masyarakat. Selanjutnya pada periode RUTRK 1997 – 2009 terdapat 2 program pembangunan sarana drainase yang dilaksanakan oleh pemerintah kota yaitu prasarana drainase pada Jl. Perwiral Ujung Belakang yang dibangun oleh Dinas PU pada Tahun 2006 dan prasarana drainase pada Jl. Perwiral Ujung 1 yang dibangun dalam program P2KP pada tahun 2007, selanjutnya pada periode RTRW 2010 – 2030 terdapat 3 program pembangunan sarana drainase oleh pemerintah yaitu prasarana drainase yang terdapat pada Jl. Linggar Jati yang dibangun dalam program PNPM MP tahun 2012, prasarana drainase pada Jl. Perwiral Ujung 2 dibangun dalam program P4-IP pada tahun 2013

ISBN : 978-602-73463-1-4

dan prasarana drainase pada Jl. Kehakiman dalam program P2KKP pada tahun 2015.

Berdasarkan dokumen RTRW 2010-2030 kota Bukittinggi terdapat 7 pasal yang mengatur tentang prasarana jalan. Dari 8 pasal terdapat 5 pasal yang membahas mengenai kebijakan terhadap prasarana jalan dan 3 pasal mengenai batasan atau sanksi, 5 pasal mengenai kebijakan prasarana jalan yaitu Pasal 7 huruf e RTRW; Pasal 8 huruf d RTRW; Pasal 21 ayat 2 huruf c; Pasal 55 ayat 3; Pasal 95 huruf m. Sedangkan 3 pasal mengenai batasan/ sanksi yaitu Pasal 112 huruf c ; Pasal 127 ayat 3 huruf b; Pasal 129 ayat 2 huruf d .

Sama halnya dengan prasarana jalan, penyediaan prasarana drainase juga akan berdampak pada tumbuhnya keinginan masyarakat untuk membangunan perumahan pada kawasan rawan bencana sempadan ngarai Sianok tersebut. Untuk mencegah atau mengurangi pertumbuhan perumahan seharusnya penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pada daerah sempadan ngarai tersebut tidak ditambah lagi.

6. Utilitas Jaringan Air Minum Lingkungan Perumahan

Terdapat 3 jenis utilitas jaringan air minum yaitu: 1)Sistem penyediaan air minum bukan jaringan perpipaan (SPAM BJP) individual/komunal sebanyak 35% atau 54 unit rumah; 2)Pemerintah (PDAM) sebanyak 47% atau 73 unit rumah. 3)Campuran (SPAM BJP & PDAM) sebanyak 18% atau 27 unit rumah.

Berdasarkan 3 periode peraturan kota yang berlaku, kebiasaan masyarakat untuk mengunakan SPAM BJP masih tetap ada pada setiap periode peraturan yang berlaku. Namun trend penggunaan utilitas air minum SPAM BJP tidak setinggi pada periode sebelum peraturan RUTRK berlaku di kota Bukittinggi, Dimana pada periode tersebut terdapat 72 unit rumah menggunakan utilitas air minum berupa SPAM BJP pada daerah rawan bencana Sempadan Ngarai Sianok.

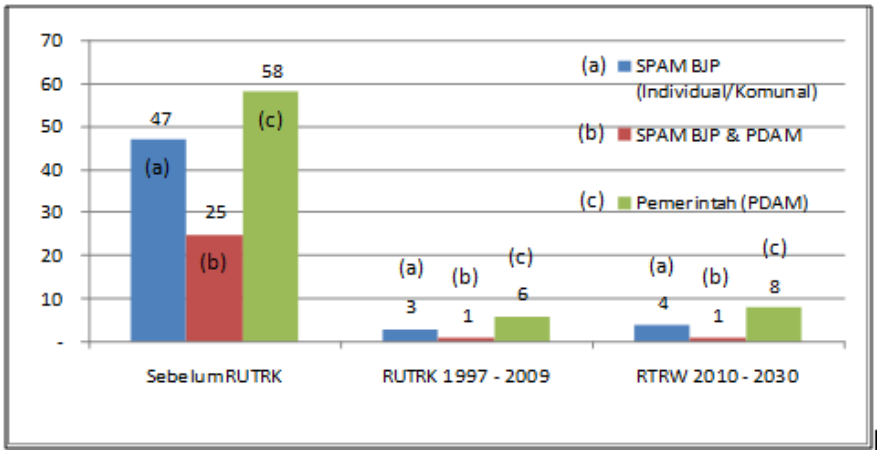

Gambar. 6Jenis pemasangan utilitas air minum dalam 3 periode peraturan

Berdasarkan data terdapat 81 unit rumah yang sampai saat ini masih memanfaatkan SPAM BJP berupa sumur galian dangkal dan sumur pompa, hal ini tentunya sangat berpengaruh terhadap kestabilan tanah pada lokasi perumahan meskipun longsor merupakan gejala fisik alami, namun hasil aktifitas manusia yang tidak terkendali dalam mengekspoitasi alam juga dapat menjadi faktor penyebab ketidakstabilan lereng yang dapat mengakibatkan longsor.

Berdasarkan dokumen RTRW 2010-2030 kota Bukittinggi terdapat 9 pasal yang mengatur tentang prasarana jalan. Dari 9 pasal terdapat 6 pasal yang membahas mengenai kebijakan dan 3 pasal mengenai batasan/sanksi. 6 pasal yang membahas mengenai kebijakan yaitu Pasal 7 huruf e; Pasal 8 huruf d; Pasal 21 ayat 2 huruf c; Pasal 47 ayat 1; Pasal 48 ayat 2 dan 3 dan Pasal 95 huruf o. Sedangkan 3 pasal yang membahas mengenai batasan/sanksi yaitu Pasal 112 huruf c; Pasal 127 ayat 3 huruf b dan Pasal 129 ayat 2 huruf d.

7. Utilitas Jaringan Listrik Lingkungan Perumahan

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan hanya terdapat 1 jenis pemasangan utilitas jaringan listrik rumah yang berada pada kawasan rawan bencana Sempadan Ngarai Sianok. Keseluruhan sambungan listrik rumah pada kawasan penelitian ini merupakan sambungan resmi dari PLN (pemerintah), tidak ada satupun rumah yang dibangun pada daerah penelitian yang melakukan sambungan listrik secara ilegal tanpa izin dari PLN.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Berdasarkan dokumen RTRW 2010-2030 kota Bukittinggi terdapat 7 pasal yang mengatur tentang prasarana jalan. 4 dari 7 pasal membahas mengenai kebijakan terkait jaringan listrik dan 3 pasal lainnya membahas tentang batasan/sanksi. Adapun 4 pasal yang membahas tentang kebijakan yaitu Pasal 7 huruf c; Pasal 8 huruf d; Pasal 21 ayat 2 huruf c dan pasal 39 ayat 1. Sedangkan 3 pasal yang membahas batasan atau sanksi mengenai utilitas jaringan listrik yaitu Pasal 112 huruf c; Pasal 127 ayat 3 huruf b dan Pasal 129 ayat 2 huruf d.

8. Utilitas Persampahan Lingkungan Perumahan

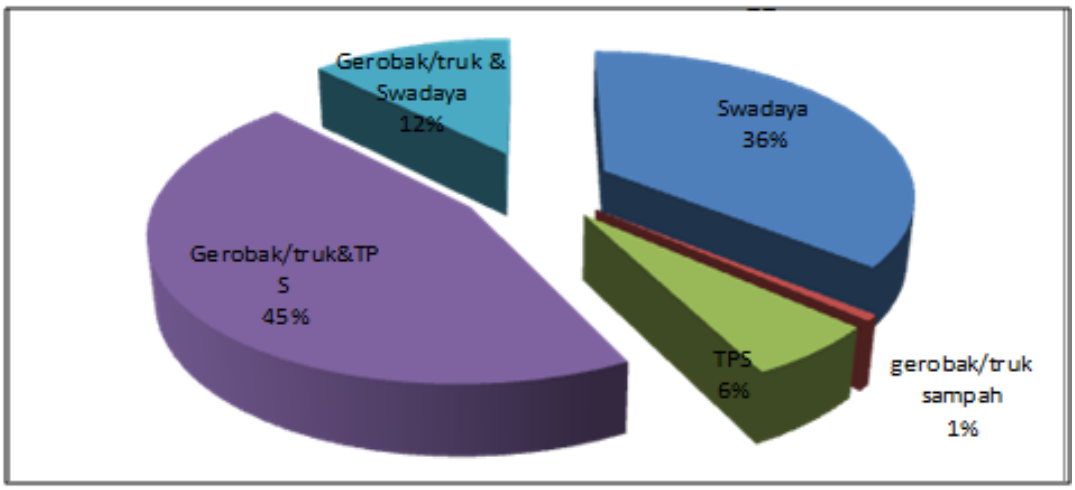

Gambar 7 Perentase jenis pemanfaatan utilitas persampahan

Berdasarkan hasil analisa penyedia utilitas persampahan pada kawasan rawan bencana diperoleh 5 macam cara pengelolaan dan pemanfaatan utilitas persampahan oleh masyarakat pada daerah penelitian. Sebanyak 45% masyarakat memanfaatkan gerobak/ truk & TPS untuk pengolahan sampah, 36% masyarakat mengolah sampah secara swadaya yaitu dengan membakar atau langsung membuang sampah kedalam Ngarai, 12% memanfaatkan gerobak sampah/ truk & swadaya, 6% masyarakat memanfaatkan TPS pada lingkunga perumahan dan 1% masyarakat memanfaatkan gerobak sampah/ truk sampah.

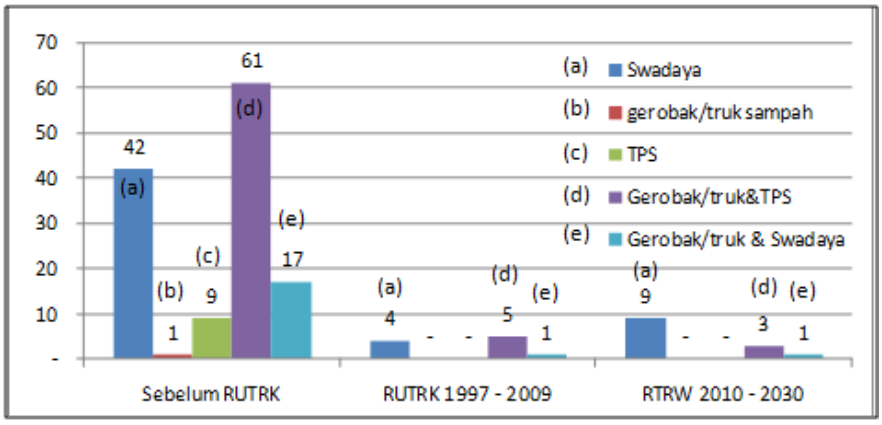

Gambar8 jenis pemanfaatan utilitas persampahan

Berdasarkan dokumen RTRW 2010-2030 kota Bukittinggi terdapat 7 pasal yang mengatur tentang prasarana jalan. 4 dari 7 pasal membahas mengenai kebijakan terkait jaringan listrik dan 3 pasal lainnya membahas tentang batasan atau sanksi. Adapun 4 pasal yang membahas mengenai kebijakan terkait persampahan adalah Pasal 7 huruf e; Pasal 8 huruf d; Pasal 21 ayat 2 huruf c dan Pasal 52 ayat 1. Sedangkan 3 pasal yang membahas mengenai batasan atau sanksi adalah Pasal 112 huruf c; Pasal 127 ayat 3 huruf b dan Pasal 129 ayat 2 huruf d.

Dari kelima jenis pemanfaatan utilitas persampahan, sebanyak 74 Unit rumah melakukan pengolahan sampah secara swadaya dengan cara membakar atau langsung membuang sampah ke dalam Ngarai Sianok, hal ini tentu berdampak tidak baik terhadap kebersihan dan kelestarian lingkungan.

ISBN : 978-602-73463-1-4

9. Laju Pertumbuhan Perumahan dan Pemukiman Pada Kawasan Rawan Bencana Sempadan Ngarai Sianok

Berdasarkan hasil survey lapangan diperoleh data tahun berdiri bangunan pada kawasan penelitian, data yang diperoleh kemudian dibagi kedalam periode 5 tahun, hal ini dimaksudkan untuk memudahkan peneliti untuk mengelompokkan data hasil temuan dan melakukan analisis hasil pembahasan, hal ini dikarenakan jumlah tahun pembangunan rumah yang beragam dari tahun 1950 – 2016 dan dari rentang waktu tersebut tidak semua tahun terdapat pembangunan.

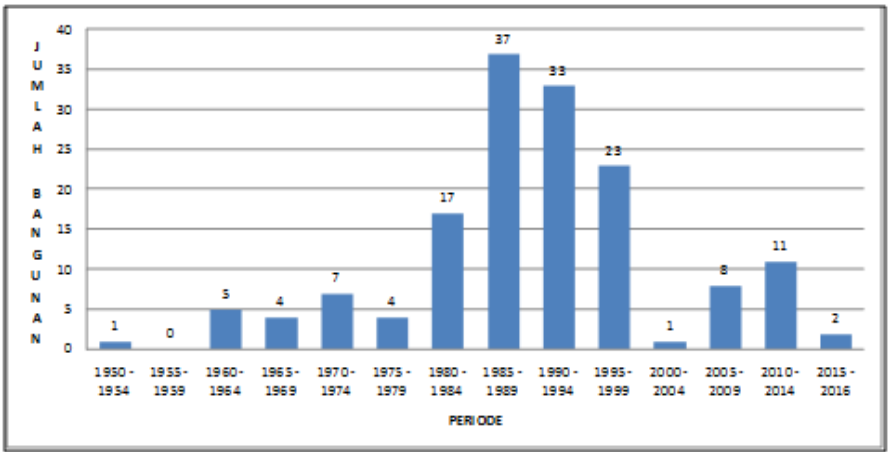

Gambar 9 Tahun berdiri bangunan (periode 5 tahun)

Grafik diatas mengambarkan bahwa daerah Sempadan Ngarai Sianok telah berdiri bangunan sejak tahun 1950 dan sampai saat ini dengan total rumah yang terbangun pada kawasan Sempadan Ngarai Sianok berjumlah 153 unit rumah pada tahun 2016. Periode 1985 - 1989 merupakan puncak dari pembangunan perumahan pada kawasan Sempadan Ngarai Sianok ini dengan jumlah rumah yang terbangun pada periode ini sebanyak 37 unit rumah.

Laju pertumbuhan perumahan merupakan persentase dari kumulatif jumlah rumah pada periode tahun sekarang *(x)* dikurang kumulatif jumlah rumah pada periode tahun sebelumnya *(y)* kemudian dibagi dengan kumulatif jumlah rumah pada periode tahun sebelumnya *(y)* dan terakhir dikalikan 100%. Adapun rumus untuk menghitung laju pertumbuhan perumahan adalah:

$$\%\ LajuPertumbuhan = \left(\frac{x-y}{y}\right) \times 100\%$$

Berdasarkan data da informasi yang diperoleh di kantor BAPPEDA Kota Bukittinggi, terdapat 3 periode peraturan rencana tata ruang kota yang berlaku di kota bukittinggi yaitu:

1. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Bukittinggi 2010 - 2030
2. Rencana Umum Tata Ruang Kota (RUTRK) 1997 – 2009
3. Sebelum RUTRK

Untuk melihat pengaruh efektifitas peraturan yang berlaku, maka persentase laju pertumbuhan perumahan dikelompokkan ke dalam 3 periode peraturan yang berlaku selama pertumbuhan perumahan pada kawasan penelitian (gambar 10).

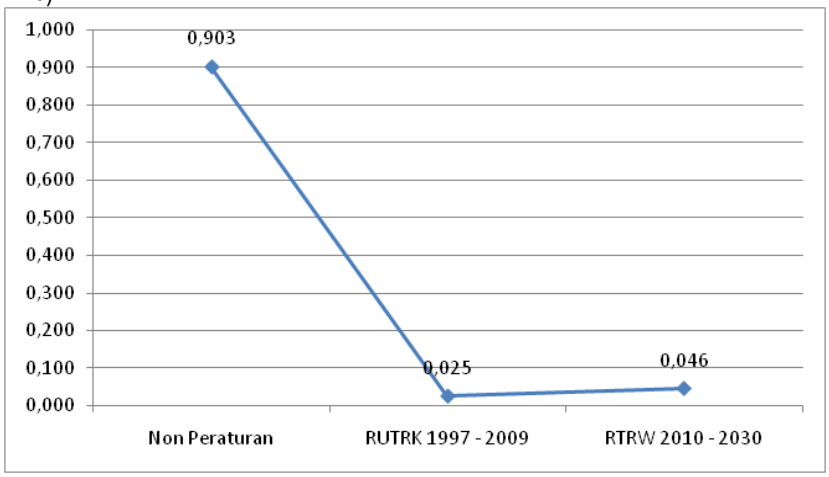

Gambar 10 Laju pertumbuhan rata-rata perumahan dalam 3 periode peraturan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gambar diatas menyatakan bahwa trend laju pertumbuhan perumahan terus menurun dengan nilai rata-rata persentase laju pertumbuhan perumahan tertinggi sebesar 0,903% yang terjadi pada periode sebelum peraturan RUTRK 1997 berlaku, kemudian dengan berlakunya peraturan RUTRK 1997 – 2009 tren laju pertumbuhan perumahan menurun sangat besar dengan nilai rata-rata persentase laju pertumbuhan sebesar 0,025%, namun pada periode peraturan RTRW 2010 – 2030 persentase laju pertumbuhan perumahan kembali naik pada angka 0,046%.

10. Evaluasi Kebijakan Pemerintah

Analisis hasil penelitian berupa analisis proses yang mempengaruhi laju pertumbuhan perumaha permukiman beserta sarana dan prasarana pendukung pada kawasan rawan bencana sempadan Ngarai Sianok kota Bukittinggi. Berdasarkan metode penelitian yang digunakan dan ditetapkan dalam penelitian ini yaitu: 1) Melakukan identifikasi masalah; 2) Penetapan penyebab masalah utama; 3) Penetapan target perbaikan / implikasi kebijakan.

Dalam proses identifikasi masalah yang pertama adalah menemukan persoalan dan tugas yang kedua adalah memilih persoalan dari banyak alternatif persoalan yang telah ditemukan, berdasarkan data temuan dilapangan diperoleh faktor yang diamati beserta masalah yang terjadi.

Tabel 1. Identifikasi masalah

No	Faktor yang Diamati	Masalah yang Terjadi
1.	Pertumbuhan Perumahan	• Terdapat sarana dan prasarana yang mendukung masyarakat untuk membangun perumahan. • Mudahnya pengurusan izin lokasi pembangunan perumahan. • Lemahnya pengawasan pemanfaatan ruang oleh aparat dan dinas instansi terkait. • Belum adanya kejelasan peraturan pemerintah untuk melakukan upaya relokasi perumahan pada kawasan sempadan Ngarai Sianok. • Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap kawasan yang mereka tempati merupakan kawasan rawan bencana. • Belum terlaksananya pemberlakuan sanksi disentif dan insentif untuk menghambat atau membatasi pembangunan
2.	Izin Mendirikan Bangunan	• Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus IMB. • Kurangnya pengawasan aparat dan dinas terkait terhadap rumah yang dibangun pada kawasan rawan bencana.
3.	Status tanah (pengusaan lahan)	• Status tanah adat/ulayat menyebabkan masyarakat/kaum adat pemilik tanah berhak mengunakan tanah untuk membangunan rumah walaupun berada di Sempadan Ngarai
4.	bentuk fisik bangunan	• Besarnya resiko yang akan dihadapi masyarakat apabila terjadi bencana pada kawasan rawan bencana sempadan Ngarai Sianok, resiko yang dihadapi berupa resiko biaya dan keselamatan.
5.	Prasarana jalan	• Peningkatan dan pembanguan fasilitas sarana dan prasarana berupa jalan, drainase, dan jaringan listrik menyebabkan meningkatnya keinginan masyarakat untuk memilih bertempat tinggal dan mendirikan rumah pada kawasan rawan bencana tersebut.
6.	Prasarana drainase	
7.	Jaringan listrik (PLN)	
8.	Utilitas air minum (SPAM BJP & SPAM JP)	• Penyediaan jaringan air minum SPAM JP berupa sambungan dari PDAM akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk memilih bertempat tinggal dan mendirikan rumah pada kawasan rawan bencana tersebut. • Banyak terdapat masyarakat yang menggunakan jaringan SPAM BJP berup sumur galian dangkat dan sumur bor pada kawasan sempadan Ngarai Sianok akan meningkatkan kerawan terhadap stabilitas tanah pada kawasan tersebut.
9.	Utilitas persampahan	• Banyak masyarakat yang membuang sampah langsung ke dalam Ngarai

Berdasarkan hasil identifikasi masalah diatas, maka dapat diketahui 7 faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perumahan pada kawasan rawan bencana Sempadan Ngarai Sianok beserta 14 masalah yang terjadi. Berdasarkan kegiatan identifikasi masalahan dan penetapan penyebab utama yang menyebabkan terus tumbuhnya perumahan pada kawasan sempadan Ngarai, dengan menggunakan analisis dengan diagram *Fishbone*

Setelah mendapat gambaran dari diagram *fishbone,* selanjutnya menetapkan rencana penanggulangan / target perbaikan berdasarkan masalah yang terjadi berdasarkan faktor yang diamati pada penelitian ini. Hasil analisa diperoleh 15 cara penanggulangan/ target perbaikan yang selanjutnya dapat

direkomendasikan sebagai kebijakan yang perlu dilaksanakan untuk mengatasi laju pertumbuhan perumahan permukiman pada sempadan Ngarai Sianok.

Tabel 2. Implikasi masalah

No	Faktor yang Diamati	Implikasi Kebijakan
1.	Pertumbuhan Perumahan	• Membatasi / tidak membangun lagi sarana & prasarana pendukung perumahan. • Menetapkan kebijakan oleh pemerintah / instansi terhadap batasan pemberian izin lokasi perumahan • Meningkatkan pengawasan pemanfaatan lahan dan ruang oleh aparat pemerintah dan instansi terkait • Mengatur strategi dan kejelasan sikap pemerintah dan instansi terkait untuk upaya relokasi perumahan yang berada pada kawasan rawan bencana sempadan Ngarai Sianok • Memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat tentang kawasan rawan bencana gempa dan longsor pada sempadan Ngarai Sianok. • Memberlakukan sanksi dengan tegas terkait pasal 127 ayat 1 huruf (b) RTRW kota Bukittinggi
2.	Izin Mendirikan Bangunan	• Memberikan pemahaman kepada masyarakat dan meningkatkan pengawasan oleh aparat dan instansi terkait izin bangunan
3.	Status tanah (pengusaan lahan)	• Merumuskan kebijakan bersama antara pemerintah kota dan pemangku adat setempat tentang tata guna lahan yang berkaitan dengan tanah adat/ulayat
4.	bentuk fisik bangunan	• Membatasi/ melarang pembangunan rumah pada kawasan rawan bencana sempadan Ngarai Sianok • Melakukan relokasi sesegera mungkin untuk mengurangi dampak yang bisa saja timbul akibat bencana yang bisa datang tiba-tiba
5.	Prasarana jalan	• Membatasi / melarang pembangunan / peningkatan kualitas sarana dan prasarana pada kawasan sempadan Ngarai Sianok
6.	Prasarana drainase	
7.	Jaringan listrik (PLN)	
8.	Utilitas air minum (SPAM BJP & SPAM JP)	• Melarang / membatasi masyarakat untuk mengambil / mengunakan air tanah dengan cara membuat sumur galian dangkal dan sumur galian bor. • Memberikan pemahaman terhadap masyarakat terhadap bahaya pemanfaatan air tanah pada kawasan sempadan Ngarai terhadap stabilitas tanah.
9.	Utilitas persampahan	• Memberikan penyuluhan dan pemahaman terhadap masyarakat terhadap pentingnya budaya hidup bersih dengan membuang sampah pada tempat yang sudah ditetapkan • Menyediakan utilitas persampahan

KESIMPULAN

Kesimpulan

a. Rata-rata laju pertumbuhan perumahan pada kawasan rawan bencana terbesar terjadi sebelum peraturan RUTRK 1997 – 2009 berlaku dengan nilai 0,903% dan jumlah rumah yang terbangun dari tahun 1950 – 1994 sebanyak 130 rumah.
b. Rata-rata laju pertumbuhan perumahan pada kawasan rawan bencana pada periode kedua yakni pada periode peraturan RUTRK 1997 – 2009 sebesar 0,025% dan jumlah rumah yang terbangun dari tahun 1995 – 2009 sebanyak 10 rumah.
c. Rata-rata laju pertumbuhan perumahan pada kawasan rawan bencana pada periode ketiga yakni pada periode peraturan RTRW 2010 - 2030 berlaku dengan nilai rata-rata persentase pertumbuhan sebesar 0,046% dan jumlah rumah yang terbangun dari tahun 2010 – 2016 sebanyak 13 rumah.
d. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan analisa *Fishbone,* analisa dalam laju pertumbuhan perumahan permukiman pada kawasan rawan bencana sempadan Ngarai Sianok terdapat 9 faktor yang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

diamati mempengaruhi laju pertumbuhan perumahan, dari faktor yang diamati terdapat 14 masalah yang terjadi dan 15 rencana penanggulangan / implikasi kebijakan.

Saran

a. Terkait pertumbuhan perumahan di kawasan sempadan Ngarai Sianok, pemerintah tidak boleh mengeluarkan izin lagi untuk pembangunan perumahan, aturan yang ada pada RTRW 2010 – 2030 di implementasikan dengan tambahan tidak boleh lagi ditampah prasarana, sarana dan utilitas pada tempat tersebut, karena dengan peningkatan PSU yang ada akan meningkatkan keinginan masyarakat untuk membangun perumahan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Tondobala, L. 2011. Pemahaman Tentang Kawasan Rawan Bencana Dan Tinjauan Terhadap Kebijakan Dan Peraturan Terkait. Jurnal Sabua Vol.3, No.1: 58-63, Mei 2011. Staf pengajar Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik. Universitas Sam Ratulangi.
[2] RP4D Kota Bukittinggi, 2010. Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman Daerah.
[3] Suranto, J. P. 2008. Kajian Pemanfaatan Lahan Pada Daerah Rawan Bencana Tanah Longsor Di Gunung lurah, Cilongok, Banyumas. Pasca Sarjana, Universitas Diponegoro.
[4] Perda Kota Bukittinggi Tahun 2011. tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bukittinggi Tahun 2010-2030.
[5] Dunn, W.N. 2012. Pengantar Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Penerbit Gadjah Mada University Press.
[6] Bose, T. K. 2012. Application of Fishbone Analysis for Evaluating Supply Chain and Business Process. International Journal of Managing Value and Supply Chains (IJMVSC), Vol. 3, No. 2.
[7] Sugiyono. 2008. Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung. Alfabeta. 456 hal.
[8] Prasetyo, Bambang dkk. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
[9] Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Manajemen: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Penelitian tindakan dan Penelitian Evaluasi. Bandung. Alfabeta. 806 hal.
[10] Priyanto. A. Dkk. 2013. Perancangan Sistem Informasi Geografis (SIG) Berbasis Web untuk Penyediaan Informasi Fasilitas dan Personalia di Universitas Lampung. Prosiding Semirata FMIPA, 6.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

EVALUASI PELAKSANAAN PROGRAM BEDAH RUMAH DI KOTA PADANG

Yushy[1)] ,Yossyafra[2)] dan Melinda Noer[2)]

[1] Mahasiswa Pascasarjana Program Studi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Universitas Andalas
[2]Staf Pengajar Program Studi Pembangunan Perumahan dan Permukiman Universitas Andalas

Email : yushyimr@gmail.com

Naskah diterima :15 Desember 2016 Naskah direvisi : 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Program Bedah Rumah merupakan program bantuan pemerintah daerah yang dijalankan dalam rangka mensejahterakan masyarakat miskin yang mempunyai RTLH (Rumah Tidak Layak Huni). Dalam implementasinya, ditemukan masalah seperti isu bahwa sebagian besar bantuan dari program ini belum dimanfaatkan warga karena bahan bangunan yangdiberikan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah. Tujuan penelitian ini yaitu, 1) untuk mendiskripsikan implementasi Program Bedah Rumah 2015 di Kota Padang dan, 2) untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bedah Rumah yang sasarannya masyarakat miskin yang mempunyai RTLH di Kota Padang. Penelitian ini terbagi atas empat tahapan yaitu : 1) Pengambilan data, terdiri dari data primer dan data sekunder, 2) Teknik Pengumpulan Data, 3) Teknik pengambilan sampel, dan 4) Analisis data. Perolehan data primer dilakukan menggunakan kuesioner dengan mengambil sampel dari populasi untuk mendapatkan identitas responden, kondisi rumah, dan responsivitas, sedangkan data sekunder didapatkan dari dinas terkait nama dan alamat responden. Selanjutnya data primer dan data sekunder dianalisis dengan PERWAKO Padang No 46 tahun 20015 [1] sehingga didapatkan analisis program menurut kriteria evaluasi Dunn [2] yaitu: efektifitas, efisiensi, kecukupan, responsivitas dan ketepatan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, didapatkan nilai efektifitas sebesar 92,9%, nilai efisiensi sebesar 81,5%, nilai kecukupan sebesar 58,1%, nilai responsivitas sebesar 64,9%, dan nilai ketepatan sebesar 96,8%.

Kata kunci : *Program Bedah Rumah, Rumah Tidak Layak Huni, Masyarakat Berpenghasilan Rendah*

PENDAHULUAN

Pesatnya pertumbuhan penduduk dan tingkat pendapatan MBR (Masyarakat Berpenghasilan Rendah) yang terbatas seringkali tidak diimbangi dengan kemampuan pemenuhan kebutuhan perumahan yang memadai. Fenomena ini terlihat pada masyarakat di Kota Padang yang tidak mampu untuk merehab rumah mereka akibat perekonomian yang terbatas, sehingga rumah tersebut dibiarkan menjadi lapuk dan tidak terurus. Rumah yang mereka huni jauh dari syarat keselamatan bangunan. Oleh sebab itu, perbaikan perumahan bagi masyarakat miskin sangat diperlukan.

Pentingnya perbaikan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah dijelaskan dalam UU RI No 1 tahun 2011 [3] yang menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah perlu memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah melalui program perencanaan pembangunan perumahan secara bertahap dalam bentuk pemberian kemudahan pembiayaan dan/atau pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum di lingkungan hunian. Salah satu program pembangunan perumahan dan permukiman yang telah dijalankan pemerintah daerah dan bertujuan untuk meringankan beban masyarakat miskin dalam memenuhi hak dasar berupa rumah yang layak huni adalah Program Bedah Rumah.

Namun dalam implementasinya ditemukan masalah dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kota Padang seperti isu bahwa sebagian besar bantuan dari program ini belum dimanfaatkan warga karena bahan bangunan yang diberikan tidak sesuai dengan kebutuhan. Masyarakat penerima bantuan kecewa karena pembangunan (RTLH) Rumah Tidak Layak Huni yang berjalan tidak efektif [4].Sasaran yang tepat dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah juga merupakan kunci utama keberhasilan program. Pentingnya sasaran program diungkapkan oleh anggota DPRD H. Maidestal Hari Mahesa yang mengatakan bahwa Program Bedah

Rumah yang dijalankan sebaiknya merata setiap masyarakat dan kecamatan, jangan ada bias sasaran pelaksanaan program yaitu masyarakat yang rumahnya sudah darurat tidak pernah dilirik, atau mengutamakan rumah masyarakat yang dekat dengan pejabat [5].

Pemerintah Kota Padang telah membuat kebijakan terkait pelaksanaan Program Bedah Rumah yang ditetapkan dalam PERWAKO Padang Nomor 46 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan RTLH Bagi MBR. Dengan adanya peraturan yang dibuat pemerintah tersebut, maka dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah tentu harus sesuai dengan pedoman pelaksanaan yang telah ditetapkan agar tercapai suatu kondisi pelaksanaan yang lebih baik. Oleh Karena itu, penelitian ini ditujukan untuk mendiskripsikan implementasi Program Bedah Rumah pada tahun 2015 di Kota Padang dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Bedah Rumah yang sasarannya masyarakat miskin yang mempunyai Rumah Tidak Layak Huni di Kota Padang.

METODOLOGI

Penelitian ini telah dilakukan di Kota Padang Sumatera Barat pada bulan Juli sampai dengan September 2016 pada Program Bedah Rumah tahun 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif dengan metode survei menggunakan kuesioner tertutup sebagai instrumen penelitian. Tahapan penelitian terbagi atas empat yaitu:

a. Pengambilan data
terdiri dari data primer (terkait dengan jumlah tanggungan keluarga, penghasilan, status pengerjaan rumah, keadaan luas rumah, atap, lantai, dinding, responsivitas terhadap program, dan lain-lain) dan data sekunder (terkait nama dan alamat penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang untuk bisa selanjutnya di lakukan survey dengan menggunakan kuesioner kepada penerima Program Bedah Rumah)

b. Teknik pengumpulan data
terdiri dari dokumentasi, kuesioner kepada penerima Program Bedah Rumah dan wawancara kepada fasilitator dan Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan tahun 2015

c. Teknik pengambilan sampel
Dari 11 kecamatan yang ada di Kota Padang, penulis mengambil 3 kecamatan yang mempunyai *database* yang lebih lengkap dibandingkan kecamatan lain (yaitu Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Timur).Besaran sampel ditetapkan dengan menggunakan Rumus Slovin sehingga didapatkan sampe sebesar 62 unit rumah dari 161 unit rumah yang tersebar pada Kecamatan Padang Utara, Kecamatan Padang Barat dan Kecamatan Padang Timur.

d. Analisis data.
Analisis penilaian pelaksanaan Program Bedah Rumah dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Table 1. Analisis Penilaian Pelaksanaan Program Bedah Rumah

No	Kriteria	Tolak Ukur
1	Efektifitas	Terbangun rumah yang layak huni dan/ atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR
2	Efisiensi	Kepanitiaan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
		Penggunaan bantuan sesuai dengan kebutuhan
		Mekanisme pengajuan pencairan bantuan
3	Kecuikupan	Mewujudkan rumah yang layak huni oleh MBR
4	Responsivitas	Tanggapan masyarakat terhadap pelaksanaan Program Bedah Rumah
5	Ketepatan	Sasaran: masyarakat berpenghasilan rendah yaitu masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni

Pengolahan data pada penelitian ini merupakan perpaduan antara data yang diperoleh secara kuesioner yang berpedoman dari tolak ukur dengan ketetapan yang PERWAKO No.46 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada kerangka pikir penelitian pada gambar 1 berikut:

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

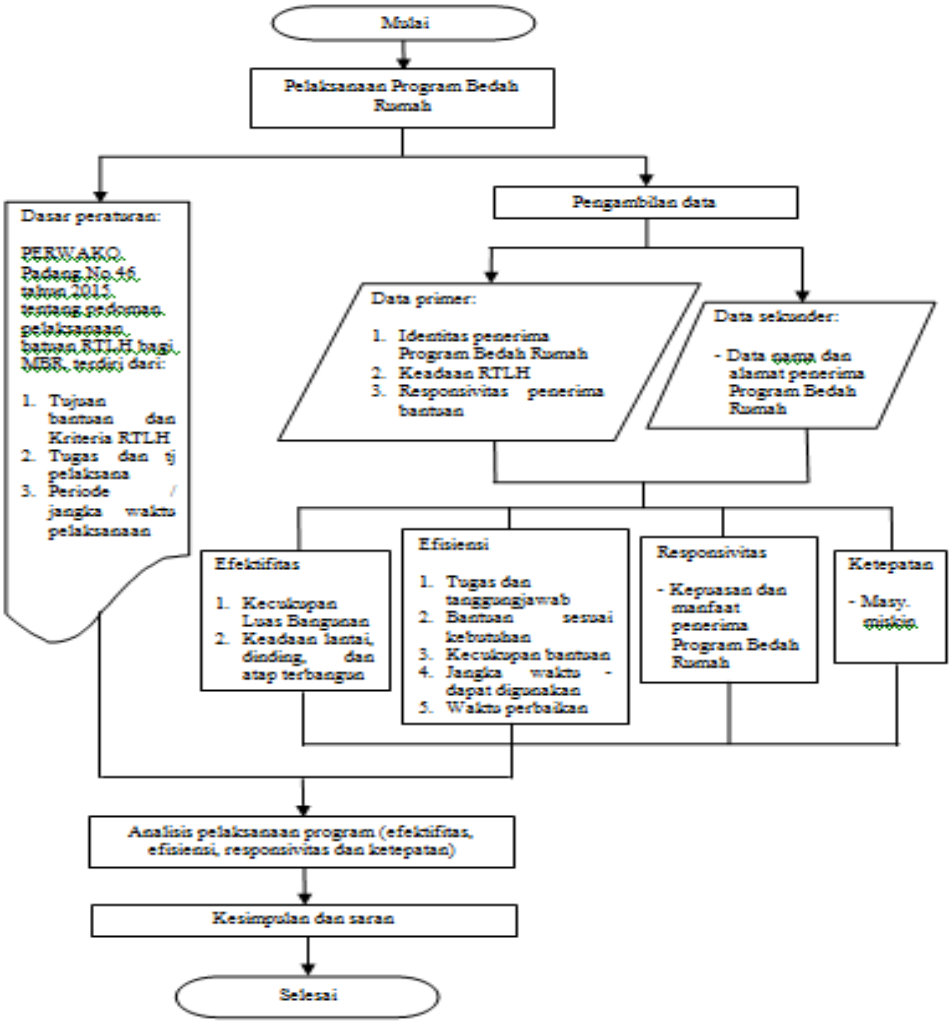

Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Identitas responden

1) Jenis kelamin

Perbandingan jenis kelamin penerima Program Bedah Rumah dapat dilihat pada tabel berikut:

Table 2. Jenis Kelamin Responden Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang Tahun 2015

No	Jenis kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	25	40,3
2	Perempuan	37	59,7
	Total	62	100

Jawaban yang diberikan melalui wawancara singkat dengan staff Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang mengenai dominannya penerima Program Bedah Rumah yang berjenis kelamin perempuan daripada laki-laki dikarenakan Kota Padang masih memegang hukum adat dimana tanah diwariskan kepada pihak perempuan sehingga tanah tersebut banyak yang masih menjadi tanah adat yang dikuasai oleh kaum perempuan.

2) Usia dan pekerjaan

Usia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap produktivitas seseorang dalam melakukan pekerjaan. Sebagaimana yang dikatakan oleh Putri [6], produktivitas seseorang dalam bekerja sangat

dipengaruhi oleh umur, umumnya seseorang yang berada pada umur produktif akan mampu memperoleh pendapatan yang lebih banyak daripada seseorang yang termasuk umur non produktif. Hubungan jenis pekerjaan dan umur penerima Program Bedah Rumah dapat dilihat pada table 3 berikut:

Table 3. Umur dan Jenis Pekerjaan Responden Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang Tahun 2015

J. pekerjaan	**Swasta**		**Buruh**		**dagang**		**Lainnya**		**Total**	
Umur	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%	jml	%
30-39	2	3.2	1	1.6	2	3.2	2	3.2	7	11.3
40-49	0	0	10	16.1	4	6.5	1	1.6	15	24.2
50-59	1	1.6	14	22.6	5	8.1	4	6.4	24	38.7
60-69	0	0	6	9.7	4	6.4	1	1.6	11	17.7
≥70	0	0	2	3.2	3	4.8	0	0	5	8.1
total	3	4.8	33	53.2	18	29	8	12.9	62	100

3) Tingkat Pendidikan

Menurut Prastyo [7], keterkaitan kemiskinan dan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan yang pada akhirnya akan meningkatkan produktivitas kerja dan memperbesar peluang kesempatan memperoleh pekerjaan yang lebih layak dan memperoleh kemakmuran.Hasil penelitian terhadap tingkat pendidikan dapat dilihat pada table 4 berikut:

Table 4. Tingkat Pendidikan Responden Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang Tahun 2015

No	**Tingkat pendidikan**	**Jumlah**	**%**
1	SD	28	45.2
2	SLTP	16	25.8
3	SLTA	18	29.0
	Jumlah	62	100

4) Jumlah tanggungan keluarga

Jumlah tanggungan kepala keluarga berdampak pada tingginya biaya hidup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan akhirnya akan berpengaruh pada kesejahteraan keluarga.Tabel 5 menunjukkan jumlah tanggungan kepala keluarga responden penerima Program Bedah Rumah.

Table 5. Jumlah Tanggungan Kepala Keluarga Responden Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang Tahun 2015

No	**Jumlah tanggungan**	**Jumlah**	**%**
1	Tidak ada	6	9.7
2	1-3 orang	27	43.5
3	4-6 orang	25	40.3
4	≥7 orang	4	6.5
	Jumlah	62	100
	Rata-rata jumlah tanggungan	3.612903	

5) Jumlah bantuan diterima

Selanjutnya tabel 6 memperlihatkan kisaran jumlah bantuan yang diterima berdasarkan kuesioner kepada responden penerima Program Bedah Rumah.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Table 6. Jumlah Bantuan Yang Diterima Responden Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang Tahun 2015

No	Jumlah bantuan	Jumlah	%
1	Tidak mengetahui	23	37.1
2	<7 juta	2	3.2
3	7-10 juta	31	50.0
4	>10	6	9.7
	Jumlah	62	100

Dominannya jumlah penerima bantuan sebanyak 7 juta sampai 10 juta seiring dengan pernyataan melalui wawancara singkat kepada Kepala Bidang Perumahan Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang yang menyebutkan bahwa rata-rata bantuan yang diterima oleh penerima Program Bedah Rumah sekitar 10 juta. Dari sisi lain tabel diatas juga menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui jumlah bantuan yang mereka terima karena bantuan tersebut dicairkan dalam bentuk bahan bangunan.

6) Sertifikat kepemilikan tanah

Sertifikat kepemilikan tanah penerima bantuan sebagian besar telah mempunyai sertifikat sendiri yang berarti tanah merupakan milik pribadi. Persentase kepemilikan tanah milik pribadi, milik kaum / adat dan yang tidak mempunyai sertifikat tanah dapat dilihat dari tabel 7 berikut:

Table 7. Status Sertifikat Lahan Responden Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang Tahun 2015

No	Status sertifikat	Jumlah	Persen
1	Belum ada sertifikat	9	14.5
2	Sendiri	34	54.8
3	Adat	19	30.6
	Jumlah	62	100

b. Implementasi Program Bedah Rumah Tahun 2015

Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kota Padang dilaksanakan pada Bulan Juli hingga bulan Desember 2015 oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang sesuai dengan ketetapan PERWAKO No. 46 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah. Maksud bantuan ini yaitu untuk mendorong MBR membangun rumah sendiri yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman dengan tujuan agar terbangun rumah yang layak huni dan/atau lingkungan yang sehat serta aman oleh MBR. Jenis bantuan yang diberikan yaitu berupa bahan bangunan kepada penerima Program Bedah Rumah sesuai dengan kebutuhan minimal rumah.

Syarat-syarat penerima bantuan ini antara lain dibuktikan dengan KTP, surat penghasilan yang keluarkan oleh kelurahan, dan melampirkan surat pernyataan sebagai pemohon bantuan Program Bedah Rumah. Kebijakan dan penetapan petunjuk teknis pelaksanaan bantuan RTLH dibuat oleh kepala Dinas Tata Ruang Tata Bangunan Dan Perumahan Kota Padang. Selain itu kepala dinas juga mempunyai tanggung jawab untuk menetapkan lokasi kecamatan dan kelurahan penerima bantuan RTLH sebelum tahun pelaksanaan kegiatan bantuan RTLH atau dengan istilah Tahun minus satu (T-1). Kepala dinas dibantu oleh PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) yang juga berperan dalam menyeleksi fasilitator lapangan yang akan membantu dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah kepada penerima bantuan Program bedah Rumah.

Fasilitator yang telah diseleksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk membuat laporan pekerjaan dan menghitung kebutuhan bahan bangunan yang dibutuhkan RTLH. Selama pelaksanaan, fasilitator lapangan dibantu oleh lurah dan lurah menunjuk satu orang kader yang akan membantu fasilitator lapangan untuk mendapatkan informasi mengenai rumah yang telah terdaftar untuk menerima bantuan. Bantuan tersebut diberikan kepada penerima Program Bedah Rumah melalui rekanan kerja yang dibuat oleh Dinas Tata Ruang Tata Bangunan dan Perumahan Kota Padang. Selanjutnya fasilitator yang akan menjadi penghubung antara

rekanan kerja yang akan mendistribusikan bahan bangunan dengan kelompok penerima bantuan yang telah ditetapkan oleh dinas.

Penyaluran bahan bangunan yang dilakukan oleh rekanan kepada masing-masing penerima bantuan harus melampirkan surat tanda terima pengiriman barang yang diketahui oleh fasilitator dan penerima bantuan. Satu orang fasilitator biasanya bertanggungjawab kepada 3 Kelompok Penerima Bantuan.

Fasilitator lapangan juga berinteraksi dengan penerima bantuan untuk mendapatkan kebutuhan rumah yang tepat. Laporan pekerjaan dilakukan setiap minggu oleh fasilitator yang ditujukan kepada PPTK. Bahan bangunan untuk kebutuhan rumah dibuat didalam RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan biaya perbaikan rumah tersebut bersumber dari APBD Kota Padang dengan besar batuan yang diberikan sesuai dengan rencana anggaran biaya kebutuhan minimal biaya pembangunan atau peningkatan kualitas untuk mencapai kualitas minimal rumah layak huni yaitu berkisar antara 8 juta hingga 13 juta tergantung kerusakan rumah. Jika penerima menginginkan lebih banyak bahan rumah untuk penambahan rumah yang melebihi RAB yang telah ditetapkan, maka hal tersebut termasuk diluar anggaran Program Bedah Rumah (dana/ bahan swadaya).

Pembuatan dinding sisi dalam bangunan, plester dinding, plafond, pengecatan, upah kerja hanya dapat menggunakan bahan swadaya penerima bantuan atau bersumber dari luar APBD. Namun karena dalam kenyataannya banyak penerima bantuan yang mempunyai dana terbatas untuk membiayai upah kerja tukang, maka dinas membantu dalam hal anggaran pembiayaan tukang tersebut sebesar satu juta rupiah.

Jumlah penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kota Padang pada tahun 2015 yaitu sebesar 663 rumah yang tersebar pada 11 kecamatan di Kota Padang. Kelompok penerima Program Bedah Rumah berjumlah 13 orang hingga 18 orang dalam satu KPB (Kelompok Penerima Bantuan) dengan total kelompok berjumlah 40 KPB dan harus melaksanakan kegiatan pembangunan rumah atau peningkatan kualitas rumah dengan proses paling sedikit 50% (lima puluh persen) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak penerimaan bahan bangunan bantuan RTLH dan peningkatan kualitas rumah atau penyelesaian pembangunan rumah 100% (seratus persen) paling lambat 60 hari sejak penerimaan bahan bangunan. Bantuan yang diterima oleh penerima Program Bedah Rumah meliputi kerusakan terhadap lantai, dinding dan atap.

c. Evaluasi Program Bedah Rumah Di Kota Padang

Hasil penilaian terhadap pelaksanaan Program Bedah Rumah yang dilakukan terkait efektifitas, efisien, kecukupan, responsivitas dan ketepatan dapat dilihat pada table 8 berikut:

Table 8. Evaluasi Pelaksanaan Program Bedah Rumah di Kota Padang

No	Kriteria	Indikator	Hasil penilaian
1	Efektifitas	Kecukupan luas bangunan 45m^2 atau 9 m^2 per anggota keluarga	92,9%
		Lantai terbangun dari rabat beton bertekstur halus	
		Dinding terbangun dari batu bata diupayakan terplester bagian luar, atau batako terpasang rapi tanpa plester, atau papan kelas II pakai alur serta lidah penyambung, atau triplek GRC tebal minimal 6 mm	
		Atap dari bahan seng gelombang atau asbes gelombang;	
2	Efisiensi	Tugas dan tanggung jawab yang dijalankan pelaksana Program Bedah Rumah	81,5%
		Pemberian bantuan sesuai dengan tujuan kebutuhan	
		Kecukupan bantuan dalam memenuhi kebutuhan rumah	
		waktu pengajuan bantuan hingga pencairan bahan	
		Waktu menyelesaikan perbaikan rumah	
3	Kecukupan	Keadaan bahan bangunan yang diberikan	58,1%
		pembangunan rumah yang sesuai dengan harapan	
4	Responsivitas	Kepuasan masyarakat	64,9%
		Manfaat yang diberikan program	
5	Ketepatan	Masyarakat miskin yang membutuhkan perbaikan rumah dan sudah dilakukan perbaikan	96,8%

Dari tabel diatas terlihat nilai yang paling rendah yaitu pada kriteria kecukupan sebesar 58,1% selanjutnya pada kriteria responsivitas sebesar 64,9%. Rendahnya pencapaian nilai kecukupan dan responsivitas

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

sebagian besar disebabkan oleh bahan bangunan yang kurang sesuai dengan kebutuhan rumah baik dari segi jumlah bahan bangunan yang diterima maupun dari segi kualitas bahan seperti yang dituliskan pada tabel 9.

Nilai yang paling tinggi yaitu pada kriteria ketepatan yang berarti sasaran Program Bedah Rumah yang tepat kepada MBR hampir mencapai 100%, selanjutnya disusul oleh nilai efektivitas dan efisiensi oleh para pelaksana Program Bedah Rumah yang sesuai dengan Perwako No 46 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan bantuan rumah tidak layak huni bagi MBR.

Pada kriteria responsivitas, didapatkan grafik kepuasan dan grafik manfaat yang dirasakan oleh penerima bantuan Program Bedah Rumah seperti pada gambar 2 dan gambar 3 berikut:

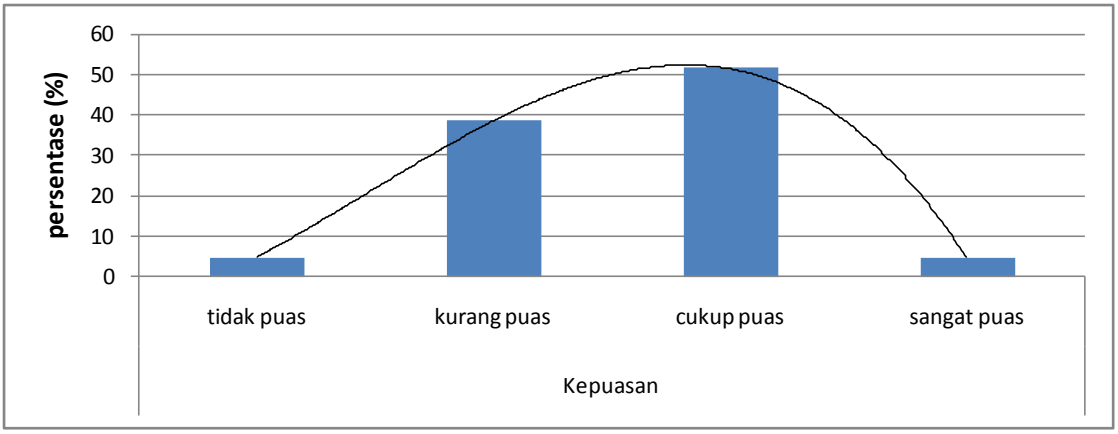

Gambar 2. Grafik Kepuasan Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang Tahun 2015

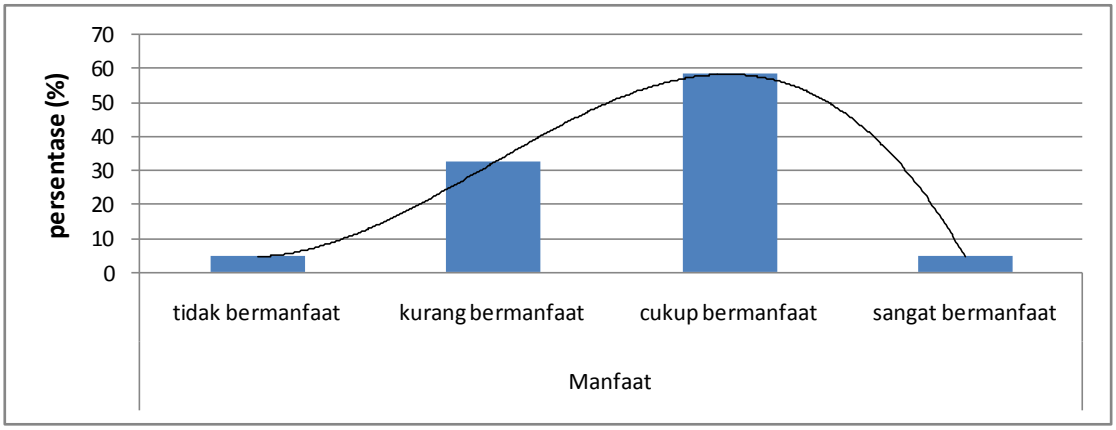

Gambar 3. Grafik Manfaat Penerima Program Bedah Rumah di Kota Padang Tahun 2015

Dari grafik responsivitas Program Bedah Rumah yang terdiri dari kepuasan dan manfaat, terlihat distribusi data yang lebih condong kearah kanan yang menjelaskan bahwa responsivitas masyarakat terhadap Program Bedah Rumah lebih condong kepada respon yang cukup puas dan cukup bermanfaat.

Tanggapan kepuasaan dan manfaat yang dirasakan terhadap kurang puas dan cukup puas tersebut disampaikan oleh responden melalui wawancara singkat yang dilakukan. Dari wawancara tersebut didapatkan jawaban bahwa responden merasa bahan bangunan yang diberikan tidak dapat digunakan secara optimal baik dari segi kualitas maupun jumlah bahan karena tidak memenuhi kebutuhan rumah atau bisa dikatakan berbeda harapan pada saat pemantauan dengan yang bahan yang diberikan pada saat pelaksanaannya.

Belum tercapainya nilai 100% pada setiap aspek penilaian mengartikan bahwa pelaksanaan program belum sepenuhnya efektif, efisien, cukup, responsive dan tepat. Berikut disajikan perbandingan masalah dan tidak ada masalah yang dirasakan responden dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah

Table 9. Perbandingan Masalah Pada Program Bedah Rumah

No	Tanggapan	Jumlah	%
1	Kurang bahan bangunan / dana masyarakat terbatas untuk memenuhi kekurangan bahan	37	60
2	Bahan dengan kualitas rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah	16	26
3	Kurang dana untuk upah tukang	12	19
4	Bahan tidak sesuai nominal	3	5
5	Kurang informasi mengenai kegiatan yang harus dikerjakan	1	2
No	**Tanggapan**	**Jumlah**	**%**
1	Tidak ada masalah	12	19

Dari penelitian yang dilakukan kepada penerima Program Bedah Rumah, ditemukan hanya sebesar 19% atau 12 responden dari 62 responden yang menjawab tidak ada masalah terhadap pelaksaan Program Bedah Rumah yang diterima. Selebihnya, 50 responden atau 81% dari 62 responden menjawab ada masalah dari segi dana upah tukang yang kurang, bahan rumah yang kurang cukup, kurang adanya informasi yang didapatkan, bahan yang tidak bagus dan tidak sesuai dengan nominal yang diterima.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data, dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut:

1. Program Bedah Rumah adalah program untuk MBR yang mempunyai RTLH dengan bantuan berupa bahan bangunan bukan berupa uang
2. Hasil penilaian empat kriteria evaluasi Program Bedah Rumah yaitu
   a. Nilai efektifitas yaitu 92,9%.
   b. Nilai efisiensi yaitu 81,5%
   c. Nilai kecukupan yaitu 58,1%
   d. Nilai responsivitas yaitu 64,9%
   e. Nilai ketepatan yaitu 98,4%.
3. Terdapat kendala pada pelaksanaan Program Bedah Rumah, antara lain:
   a. Kurang bahan bangunan / dana masyarakat terbatas untuk memenuhi kekurangan bahan
   b. Kurang dana untuk upah tukang
   c. Kurang informasi mengenai kegiatan yang harus dikerjakan
   d. Bahan dengan kualitas rendah dan tidak sesuai dengan kebutuhan rumah
   e. Bahan tidak sesuai nominal
4. Dari penelitian yang dilakukan kepada penerima Program Bedah Rumah, ditemukan sebesar 81% responden menjawab bahwa terdapat kendala dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah dan hanya sebesar 19% yang menjawab tidak ada masalah terhadap pelaksanaan Program Bedah Rumah.
5. Belum dicapainya nilai 100% dalam setiap analisis sebagian besar disebabkan oleh masalah-masalah yang terkait dengan pelaksanaan Program Bedah Rumah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, dapat dikemukakan saran sebagai berikut:

1. Dalam pelaksanaan Program Bedah Rumah sebaiknya para pelaksana lebih transparan agar tidak terjadi kesalahpahaman antara pelaksana Program Bedah Rumah dengan penerima program.
2. Masalah dan kendala-kendala yang dihadapi penerima Program Bedah Rumah sebaiknya lebih diperhatikan oleh para pelaksana Program bedah Rumah agar bahan bangunan yang diberikan lebih bermanfaat
3. Untuk penelitian selanjutnya disarankan melakukan penelitian lebih lanjut terhadap berbagai program perumahan bagi masyarakat miskin di Indonesia agar meningkatnya kehidupan yang lebih layak bagi masyarakat miskin.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Peraturan Walikota Padang nomor 46 tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[2] Dunn, William N., 2012. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (terjemahan). Yogyakarta, Gajah Mada University Press
[3] Undang-undang RI No 1 tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman
[4] Riyoon. 2016. *Bantuan Bedah Rumah Bermasalah*. diakses 20 februari 2016 (Padang Ekspres Digital Media)
[5] Harian Haluan. 2015. *Bedah Rumah Nompang Dalam Program Nasional*. Diakses 29 November 2015
[6] Putri, A. D. & Setiawina, N. D. 2013. Pengaruh Umur, Pendidikan, Pekerjaan Terhadap Pendapatan Rumah Tangga Miskin Di Desa Bebandem. Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, 2, 173-180.
[7] Prastyo, A. A. 2010. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Tingkat Kemiskinan. [Skripsi] Universitas Diponegoro

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TEMA F

KAJIAN KEMISKINAN DAN KETIMPANGAN PEMBANGUNAN

KETIMPANGAN PENDAPATAN DAN DEMOKRASI INDONESIA: FAKTA DARI NON-LINEAR ESTIMASI GMM

Abdul Khaliq[1)]

[1)]Jurusan Ilmu Ekonomi, Universitas Andalas

Email : khaliq@fekon.unand.ac.id

Naskah diterima :7 Maret 2017 Naskah direvisi : 15 Maret 201 Disetujui terbit : 18 Maret 2017

ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk menemukan apakah menurunnya ketimpangan pendapatan mendorong stabilitas demokrasi di Indonesia? Metode penelitian menggunakan spesifikasi estimasi panel data dinamis yang mengikuti prosedur estimasi generalized method of moments (GMM) untuk linear autoregressive baik first-differences GMM (FD-GMM atau AB-GMM) dan system GMM (Sys-GMM atau BB-GMM). Studi ini menemukan fakta pengaruh non-linear dari ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi di Indonesia. Secara khusus, temuan empiris mengungkapkan hubungan negatif dan secara statistik signifikan antara ketimpangan pendapatan dengan stabilitas demokrasi di Indonesia untuk sampel 33 provinsi pada periode 2009-2015. Temuan ini adalah robust antar berbagai level ketimpangan pendapatan dan berbagai pengukuran demokrasi yang digunakan. Ini artinya untuk memperkuat stabilitas demokrasi politik di Indonesia adalah penting menurunkan ketimpangan pendapatan antar pelaku, kelompok dan golongan pendapatan. Hasil testing empiris ini menunjukkan demokrasi politik harus beriringan dengan demokrasi ekonomi." Oleh karena itu, mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi politik di Indonesia.

Kata kunci: *Ketimpangan, Demokrasi, generalized method of moments (GMM)*

PENDAHULUAN

Didalam literatur akar ekonomi dari demokrasi, pembangunan ekonomi berkeadilan telah menjadi topik riset yang intensif didiskusikan saat ini. Untuk mewujudkan pembangunan yang merata dan berkeadilan memerlukan stabilitas demokrasi politik yang berbasis pada demokrasi ekonomi. Ini artinya demokrasi ekonomi yang tercermin pada penurunan ketimpangan merupakan faktor krusial dalam menciptakan stabilitas demokrasi politik. Namun, peranan ketimpangan pendapatan sebagai pra kondisi mewujudkan stabilitas demokrasi politik masih menjadi perdebatan dikalangan akademisi dan pengambil kebijakan. Perdebatan ini mengundang pertanyaan, apakah penurunan ketimpangan pendapatan akan mendorong berjalannya demokrasi politik atau sebaliknya? Bagaimana peran pemerataan ekonomi dalam menentukan stabilitas demokrasi politik?

Perbedaan tingkat kesejahteraan yang tercermin pada ketimpangan pendapatan sering menjadi diskusi ilmiah dalam membahas perkembangan stabilitas demokrasi [1][2][4]. Perdebatan ini belum menemukan kesimpulan yang jelas hubungan antara ketimpangan pendapatan dan stabilitas demokrasi [1][4][5]. Selain itu, kebanyakan publikasi ilmiah menganalisis determinasi demokrasi menggunakan data lintas negara dan relatif jarang yang mengkaji spesifik sebuah negara [1][6][7].

Indonesia merupakan salah satu negara demokratis terbesar didunia saat ini telah menarik perhatian para peneliti dan akademisi. Sebagai sebuah negara yang kaya budaya, suku, etnik, agama, dan bahasa serta tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang berbeda membuat keberlangsungan stabilitas demokrasi Indonesia menjadi penting untuk didiskusikan. Oleh karena itu, tulisan ini menjadi krusial untuk mengkaji pengaruh ketimpangan pendapatan terhadap perkembangan stabilitas demokrasi dengan fokus pada kasus Indonesia.

METODE PENELITIAN

Data

Pengukuran level demokrasi provinsi di Indonesia menggunakan indeks demokrasi Indonesia (IDI) yang bersumber dari *Indonesian Democracy Index Project* [8]. Ukuran ketimpangan pendapatan menggunakan indeks Gini yang bersumber dari Badan Pusat Statistik [9]. Selanjutnya, pendapatan riil per kapita (ln_yrealcapita) merupakan *gross domestic regional bruto* per kapita harga konstan 2010 dalam satuan miliaran rupiah yang telah di-*logarithma natural* bersumber dari BPS [9]. Sementara itu, literasi (*Illiteracy*) memanfaatkan data persentase penduduk 15 ke atas yang melek huruf bersumber dari BPS [9].

Semua Provinsi

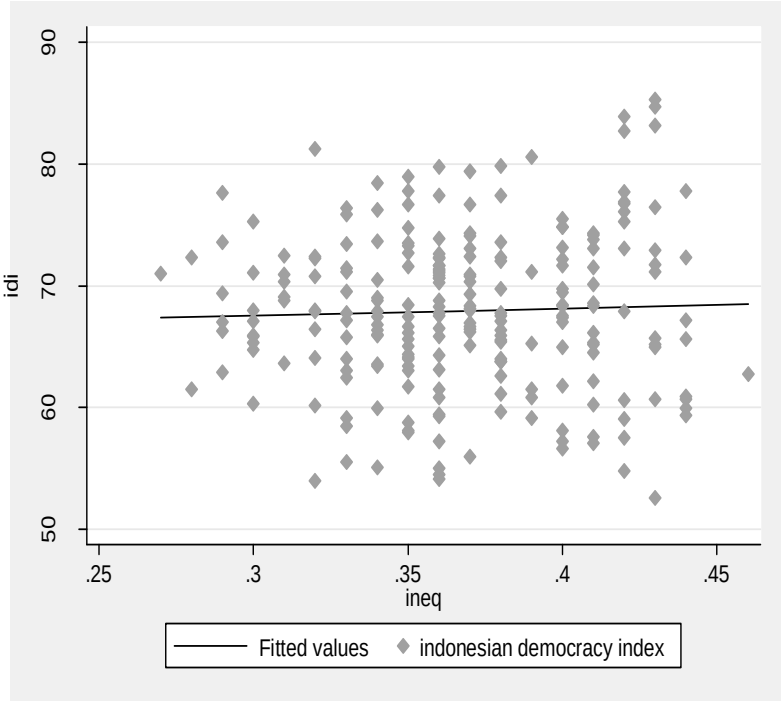

Provinsi Ketimpangan Rendah

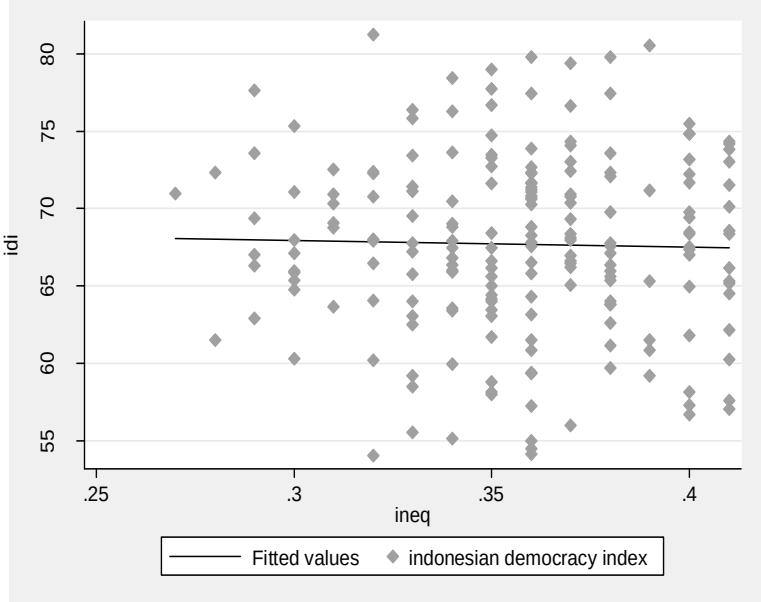

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Semua Provinsi

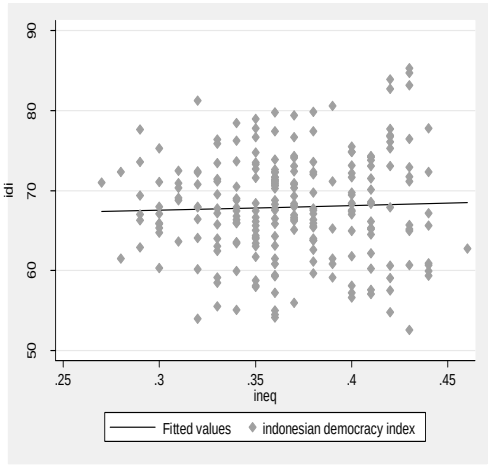

Provinsi ketimpangan rendah

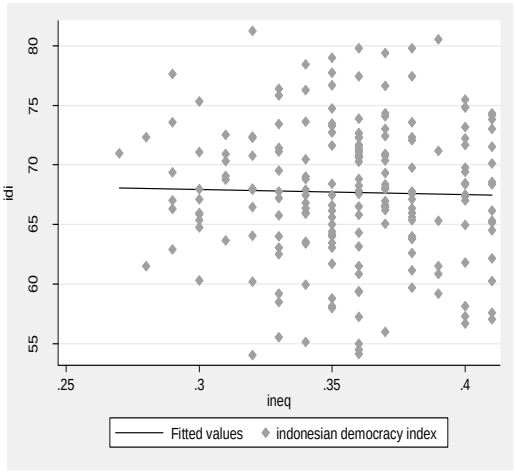

Provinsi ketimpangan tinggi

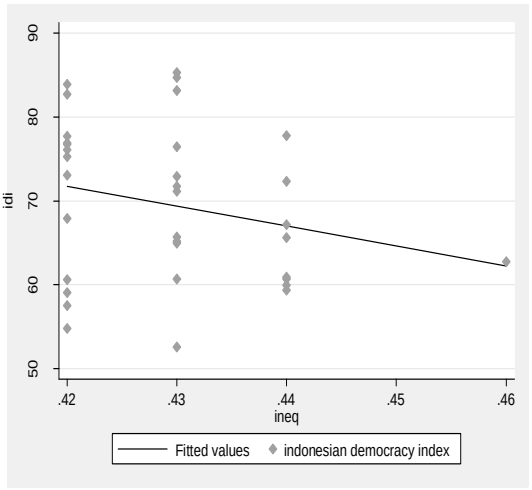

Gambar 1 Plot variasi ketimpangan dan demokrasi

Gambar 1 memperlihatkan plot variasi ketimpangan pendapatan dan tingkat demokrasi lintas provinsi di Indonesia pada periode 2009-2015. Korelasi variasi antara ketimpangan pendapatan dengan tingkat demokrasi (IDI) Indonesia secara keseluruhan memperlihatkan hubungan yang lemah. Sedangkan variasi ketimpangan pendapatan terhadap tingkat demokrasi pada provinsi ketimpangan rendah dan tinggi adalah negatif. Plot variasi ini pada pembahasan berikutnya diuji secara empiris menggunakan spesifikasi model analisis non-linear panel panel data dinamis.

Spesifikasi Model Ekonometrik

Spesifikasi model empiris yang digunakan dalam studi ini mengacu pada Lipset hypothesis dengan memfokuskan pada ketimpangan pendapatan [10]. Persamaan non-linear dari efek ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi adalah:

$$idi_{it} = \delta_t + \eta_i + \gamma_1 \text{ineq}_{it} + \gamma_2 \text{ineq}_{it}^2 + \mathbf{x}_{it}^{'}\beta + \nu_{it} \quad (1)$$

dimana idi_{it} adalah indeks demokrasi indonesia, ineq_{it} adalah ketimpangan pendapatan, $\mathbf{x}_{it}$ adalah vektor variabel kontrol (pendapatan real per capita dan pendidikan) dan ν_{it} adalah *independent identically distributed* (i.i.d) *error term* untuk provinsi i $(i = 1,\ldots,N)$ pada waktu t $(t = 1,\ldots,T)$, η_i adalah efek individu provinsi i yang mungkin berdampak pada demokrasi tetapi invarian dengan waktu, δ_t adalah efek waktu.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Persamaan (1) dapat ditulis kembali dengan memperkenalkan faktor dinamis $\text{idi}_{i,t-1}$ pada sisi kanan sehingga menjadi:

$$\text{idi}_{it} = \delta_t + \eta_i + \zeta\,\text{idi}_{i,t-1} + \gamma_1\,\text{ineq}_{it} + \gamma_2\,\text{ineq}_{it}^2 + \mathbf{x}_{it}'\beta + \nu_{it} \quad (2)$$

Dengan order pertama *lag* (tenggang waktu) variabel dependen idi_{it}, persamaan regresi (2) merupakan persamaan standar dinamis. Estimasi persamaan (2) memanfaatkan *balanced panel data* provinsi di Indonesia yang tersedia dari 2009-2015. Efek ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi adalah $\gamma_1 + 2\gamma_2\,\text{ineq}_{it}$, dimana secara linear tergantung pada ketimpangan pendapatan. Pada estimasi persamaan (2), koefisien yang terpenting yang menjadi fokus kajian adalah γ_1 dan γ_2. Persamaan (2) menggambarkan fungsi kuadratik dengan maksimum $\text{ineq}^* = -\dfrac{\gamma_1}{2\gamma_2}$. Demokrasi dibawah level ineq^* mengindikasikan demokrasi meningkat dengan penurunan ketimpangan pendapatan. Namun, ketika *threshold* ineq^* terlewati, negatif efek ketimpangan pendapatan menjadi positif.

Data Panel Dinamis

Secara umum model data panel dinamis pada persamaan (1) dan (2) ditandai dengan keberadaan *lag* variabel seperti diilustrasikan sebagai berikut:

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + x'_{it}\beta + u_{it}, \quad i = 1,\ldots,N; t = 1,\ldots,\mathrm{T} \quad (3)$$

dimana δ adalah skalar, x'_{it} merupakan matriks $1\times K$ dan β adalah matriks $K\times 1$. Selanjutnya, diasumsikan u_{it} mengikuti model *one way error component* berikut:

$$u_{it} = \mu_i + v_{it}, \quad \mu_i \sim iid\left(0,\sigma_u^2\right); v_{it} \sim iid\left(0,\sigma_v^2\right) \quad (4)$$

Jika menggunakan model data panel statis akan memunculkan inkonsistensi dan efisiensi pada FEM dan REM terkait dengan perlakuan μ_i. Sementara, dalam data panel dinamis kondisi ini sangat berbeda disebabkan y_{it} fungsi dari μ_i sehingga $y_{i,t-1}$ juga fungsi dari μ_i. Karena μ_i fungsi dari u_{it} maka $y_{i,t-1}$ berkorelasi u_{it}. Fakta ini membuat penggunaan penduga *least square* menjadi bias dan inkonsisten dan kondisi ini juga berlaku jika v_{it} tidak berkorelasi serial.

Kondisi diatas dapat dijelaskan dengan menggunakan model data panel autoregresif (AR(1)) tanpa variabel eksogen dibawah ini :

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + u_{it}, \quad |\delta| < 1; t = 1,\ldots,T \quad (5)$$

dengan $u_{it} = \mu_i + v_{it}, \quad \mu_i \sim iid\left(0,\sigma_u^2\right); v_{it} \sim iid\left(0,\sigma_v^2\right)$ saling bebas satu sama lain. Penduga *fixed effect* dibagi δ diberikan oleh

$$\hat{\delta}_{FE} = \frac{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(y_{it}-\bar{y}_i\right)\left(y_{i,t-1}-\bar{y}_{i,-1}\right)}{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(y_{i,t-1}-\bar{y}_{i,-1}\right)^2} \quad (6)$$

dengan $\bar{y}_i = \dfrac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} y_{it}$ dan $\bar{y}_{i,-1} = \dfrac{1}{T}\sum_{i=1}^{T} y_{i,t-1}$. Oleh karena itu, sifat $\hat{\delta}_{FE}$ diperoleh dari mensubstitusikan persamaan (5) ke persamaan (6) sehinga

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

$$\hat{\delta}_{FE} = \delta + \frac{\frac{1}{NT}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(v_{it} - \overline{v}_i\right)\left(y_{i,t-1} - \overline{y}_{i,-1}\right)}{\frac{1}{NT}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(y_{i,t-1} - \overline{y}_{i,-1}\right)^2} \qquad (7)$$

Penduga ini memiliki sifat *bias* dan inkonsisten untuk $N \to \infty$ dan T tetap dan tidak memiliki nilai ekspektasi nol dan tidak konvergen menuju nol bila $N \to \infty$. Verbeek [11] menjelaskan kondisi ini sebagai berikut

$$\begin{aligned} &\operatorname{plim}_{N\to\infty} \frac{1}{NT}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=1}^{T}\left(v_{it} - \overline{v}_i\right)\left(y_{i,t-1} - \overline{y}_{i,-1}\right) \\ &= -\frac{\sigma_v^2}{T^2}\frac{\left(T-1\right) - T\delta + \delta^T}{\left(1-\delta\right)^2} \neq 0 \end{aligned} \qquad (8)$$

sehingga untuk T tetap menghasilkan penduga yang inkonsisten.

Untuk mengatasi masalah ini, Arrelano dan Bond [12] menyarankan menggunakan *generalized method of moments* (GMM). Prosedur estimasi GMM untuk *linear autoregressive* adalah *first-differences* GMM (FD-GMM atau AB-GMM) dan *system* GMM (Sys-GMM atau BB-GMM).

***First Differences* GMM (Diff-GMM)**

Untuk menghasilkan estimasi δ yang konsisten dengan $N \to \infty$ dan T tertentu maka dilakukan *first-differences* pada persamaan (5) untuk mengeliminasi efek individu $\left(\mu_i\right)$ sebagaimana persamaan berikut

$$y_{it} - y_{i,t-1} = \delta\left(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}\right) + \left(v_{it} - v_{i,t-1}\right); t = 2,\ldots,T \qquad (9)$$

Penggunaan penduga *least square* untuk mengestimasi persamaan (9) akan menghasilkan δ yang inkonsisten. Untuk itu dilakukan transformasi *first difference* dengan menggunakan variabel instrumen seperti dibawah ini:

$$\hat{\delta}_{IV} = \frac{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=2}^{T} y_{i,t-2}\left(y_{it} - y_{i,t-1}\right)}{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=2}^{T} y_{i,t-2}\left(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}\right)} \qquad (10)$$

syarat perlu supaya penduga ini konsisten adalah

$$\operatorname{plim}_{\substack{N\to\infty \\ T\to\infty}} \frac{1}{N\left(T-1\right)}\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=2}^{T}\left(v_{it} - v_{i,t-1}\right)y_{i,t-2} = 0 \qquad (11)$$

Anderson dan Hsiao [13] mengemukakan penduga persamaan (10) dan juga mengusulkan penduga alternatif $\left(y_{i,t-2} - y_{i,t-3}\right)$ sebagai instrumen sehingga δ dapat ditampilkan sebagai berikut:

$$\hat{\delta}_{IV(2)} = \frac{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=3}^{T}\left(y_{i,t-2} - y_{i,t-3}\right)\left(y_{it} - y_{i,t-1}\right)}{\sum_{i=1}^{N}\sum_{t=3}^{T}\left(y_{i,t-2} - y_{i,t-3}\right)\left(y_{i,t-1} - y_{i,t-2}\right)} \qquad (12)$$

syarat perlu supaya penduga ini konsisten adalah

$$\operatorname*{plim}_{\substack{N\to\infty\\T\to\infty}} \frac{1}{N(T-2)} \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=3}^{T} \left(v_{it} - v_{i,t-1}\right)\left(y_{i,t-2} - y_{i,t-3}\right) = 0 \qquad (13)$$

Penduga variabel instrumen kedua $\left(IV(2)\right)$ membutuhkan tambahan *lag* untuk membentuk instrumen. Kondisi ini membuat amatan efektif menjadi berkurang (satu periode sampel hilang). Untuk menyatukan penduga dan menghilangkan kerugian dari pengurangan ukuran sampel maka digunakan metode momen. Tahap awal metode momen adalah mencatat

$$\operatorname*{plim}_{\substack{N\to\infty\\T\to\infty}} \frac{1}{N(T-1)} \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=2}^{T} \left(v_{it} - v_{i,t-1}\right) y_{i,t-2} = E\left[\left(v_{it} - v_{i,t-1}\right) y_{i,t-2}\right] 0 \qquad (14)$$

sebagai kondisi momen. Untuk tahap selanjutnya menggunakan cara yang sama sehingga diperoleh

$$\operatorname*{plim}_{\substack{N\to\infty\\T\to\infty}} \frac{1}{N(T-2)} \sum_{i=1}^{N}\sum_{t=3}^{T} \left(v_{it} - v_{i,t-1}\right)\left(y_{i,t-2} - y_{i,t-3}\right) = E\left[\left(v_{it} - v_{i,t-1}\right)\left(y_{i,t-2} - y_{i,t-3}\right)\right] 0 \qquad (15)$$

sebagai kondisi momen. Dalam pendugaan kedua estimator (IV dan $IV(2)$) dikenakan kondisi momen untuk meningkatkan efisiensi [12]. Lebih lanjut Arellano dan Bond [12] mengungkapkan bahwa daftar instrumen dapat dikembangkan dengan menambah kondisi momen dan membiarkan jumlahnya bervariasi menurut waktu t sebagai contoh untuk $T = 4$ maka,

$E\left[\left(v_{i2} - v_{i1}\right) y_{i0}\right] = 0$, untuk $t = 2$

$E\left[\left(v_{i3} - v_{i2}\right) y_{i1}\right] = 0$ dan $E\left[\left(v_{i3} - v_{i2}\right) y_{i0}\right] = 0$, untuk $t = 3$

$E\left[\left(v_{i4} - v_{i4}\right) y_{i3}\right] = 0$, $E\left[\left(v_{i4} - v_{i3}\right) y_{i2}\right] = 0$, dan $E\left[\left(v_{i4} - v_{i3}\right) y_{i0}\right] = 0$, untuk $t = 4$

Seluruh kondisi momen dapat dikembangkan ke dalam GMM. Sebagai contoh untuk ukuran sampel yang lebih umum sebesar T dapat dituliskan dalam bentuk

$$\Delta v_i = \begin{pmatrix} v_{i2} - v_{i1} \\ \cdots \\ v_{iT} - v_{iT-1} \end{pmatrix} \qquad (16)$$

sebagai vektor transformasi *error*, dan

$$Z_i = \begin{pmatrix} [y_{i0}] & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & [y_{i0} + y_{i1}] & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & [y_{i0} + y_{iT-2}] \end{pmatrix} \qquad (17)$$

sebagai matriks instrumen. Setiap baris pada matriks Z_i berisi instrumen yang valid untuk setiap periode sehingga himpunan semua kondisi momen dapat ditulis dalam bentuk ringkas dibawah ini

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

$$E\left(Z'_i \Delta v_i\right) = 0 \qquad (18)$$

sebagai kondisi untuk $1+2+\ldots+T-1$. Untuk mederivasi penduga GMM, persamaan (18) ditulis sebagai

$$E\left[Z'_i\left(\Delta y_i - \Delta y_{i,-1}\right)\right] = 0 \qquad (19)$$

Karena jumlah kondisi momen umum melebihi jumlah koefisien yang belum diketahui maka pendugaan δ menggunakan minimisasi kuadrat momen sampel bersesuaian berikut

$$\min\left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Z'_i\left(\Delta y_i - \Delta y_{i,-1}\right)\right]' W_N \left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Z'_i\left(\Delta y_i - \Delta y_{i,-1}\right)\right] \qquad (20)$$

dimana W_N adalah matriks penimbang definit positif simetris. Dengan menurunkan persamaan (20) terhadap δ maka diperoleh penduga GMM sebagai

$$\begin{aligned}\hat{\delta}_{GMM} = &\left[\left(\sum_{i=1}^{N} \Delta y'_{i,-1} Z_i\right) W_N \left(\sum_{i=1}^{N} Z'_i \Delta y_{i,-1}\right)\right]^{-1} \\ &\times \left[\left(\sum_{i=1}^{N} \Delta y'_{i,-1} Z_i\right) W_N \left(\sum_{i=1}^{N} Z'_i \Delta y_i\right)\right]\end{aligned} \qquad (21)$$

Sifat penduga GMM pada persamaan (21) tergantung pada pemilihan W_N yang konsisten sepanjang W_N definit positif.

Matriks penimbang optimal (*optimal weighting matrix*) akan memberikan penduga yang paling efisien dengan menghasilkan matriks kovarian asimtotik terkecil bagi $\hat{\delta}_{GMM}$ [11]. Untuk itu matriks penimbang harus memenuhi

$$\operatorname*{p\,lim}_{N\to\infty} W_N = V\left[Z'_i \Delta v_i\right]^{-1} = V\left[Z'_i \Delta\hat{v}_i \Delta\hat{v}'_i Z_i\right] \qquad (22)$$

Dalam kasus tidak ada restriksi pada matriks kovarian v_i , matriks penimbang dapat diestimasi menggunakan *first-step consistent estimator* bagi δ dan mengganti operator ekspektasi dengan rata-rata sampel, yakni (*two step estimator*)

$$\hat{W}_N^{opt} = \left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Z'_i \Delta\hat{v}_i \Delta\hat{v}'_i Z_i\right]^{-1} \qquad (23)$$

Dengan $\Delta\hat{v}_i$ merupakan vektor residual yang diperoleh dari *first-step consistent estimator.*

$$E\left[\Delta\hat{v}_i \Delta\hat{v}'_i\right] = \sigma_v^2 G = \sigma_v^2 \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & \cdots \\ -1 & 2 & \ddots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & -1 \\ \vdots & 0 & -1 & 2 \end{bmatrix} \qquad (24)$$

matriks penimbang optimal ditentukan sebagai (*one step estimator*)

$$\hat{W}_N^{opt} = \left[\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{N} Z'_i G Z_i\right]^{-1} \qquad (25)$$

ISBN : 978-602-73463-1-4

Persamaan (25) tidak mengandung parameter yang tidak diketahui sehingga penduga GMM yang optimal dapat diestimasi dalam satu langkah dengan mengasumsikan *error* v_{it} homoskedastis dan tidak memiliki autokorelasi.

Bila data panel dinamis memiliki variabel eksogen maka persamaan (3) ditulis sebagai

$$y_{it} = x'_{it}\beta + \delta y_{i,t-1} + \mu_i + v_{it} \quad (26)$$

Untuk mengestimasi persamaan (26) dapat menggunakan GMM yang tergantung pada asumsi terhadap x_{it}. Jika x_{it} diasumsikan *strictly exogenous* (tidak berkorelasi dengan sembarang *error* v_{it}) maka akan didapat

$$E\left[x_{is}, \Delta v_{it}\right] = 0 \text{ , untum setiap } s \text{ dan } t \quad (27)$$

Kondisi ini membuat $x_{i1}, \ldots, x_{iT}$ dapat ditambahkan ke daftar instrumen untuk persamaan *first difference* untuk setiap periode. Fakta ini membuat jumlah baris Z_i menjadi besar. Selanjutnya, menggunakan kondisi momen

$$E\left[\Delta x_{it}, \Delta v_{it}\right] = 0 \text{ , untuk setiap } t \quad (28)$$

dan matriks instrumen dapat ditulis sebagai

$$Z_i = \begin{pmatrix} \left[y_{i0}, \Delta x'_{i2}\right] & 0 & 0 & 0 \\ 0 & \left[y_{i0}, y_{i1}, \Delta x'_{i3}\right] & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \left[y_{i0}, \ldots, y_{i,T-2}, \Delta x_{iT}\right] \end{pmatrix} \quad (29)$$

Jika x_{it} diasumsikan tidak *strictly exogenous* tetapi ditentukan sebelumnya dimana x_{it} dan *lag* x_{it} tidak berkorelasi dengan error saat ini maka diperoleh $E\left[x_{it}, v_{is}\right] = 0$ untuk $s \geq t$. Pada kasus ini hanya $x_{i,t-1}, \ldots, x_{i1}$ instrumen yang valid untuk persamaan *first-difference* pada periode t. Sehingga kondisi momen yang dapat digunakan adalah

$$E\left[x_{it-j}\Delta v_{it}\right] = 0;\ j = 1, \ldots, t-1,\ \forall t \quad (30)$$

Dalam prakteknya, kombinasi *strictly exogenous* dan *predetermined* dari variabel x dapat terjadi lebih dari kedua kasus diatas sehingga matriks Z_i harus disesuaikan.

System GMM (Sys-GMM)

Metode *system* GMM berguna untuk mengestimasi *system* persamaan *first differences* dan *level* dimana instrumen yang digunakan pada *level* adalah *lag first differences* dari deret. Untuk menghasilkan penduga yang efisien pada data panel dinamis ketika T berukuran kecil maka penting memanfaatkan *initial conditions* [14]. Pertimbangkan model autoregresif data panel dinamis tanpa regressor eksogen berikut:

$$y_{it} = \delta y_{i,t-1} + \mu_i + v_{it} \quad (31)$$

dimana $E\left(\mu_i\right) = 0$, $E\left(v_{it}\right) = 0$, dan $E\left(\mu_i v_{it}\right) = 0$ untuk $i = 1, 2, \ldots, N$; $t = 1, 2, \ldots, T$. Untuk menjelaskan kondisi ini, [12] menggunakan $T = 3$, sehingga hanya ada satu kondisi ortogonal yang dihasilkan oleh $E\left(y_{i1}\Delta v_{i3}\right) = 0$ dimana δ tepat teridentifikasi (*just identified*). Untuk memahami persoalan ini, tahapan pertama regresi variabel instrumen didapat dari meregresi Δy_{i2} pada y_{i1} sehingga:

$$\Delta y_{i2} = \left(\delta - 1\right) y_{i,1} + \mu_i + v_{i2} \quad (32)$$

karena $E\left(y_{t1}\mu_i\right) > 0$, maka $\left(\delta - 1\right)$ akan bias ke atas (*upward biased*) dengan:

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

$$p\lim\left(\hat{\delta}-1\right)=\left(\delta-1\right)\frac{c}{c+\left(\sigma_{it}^{2}/\sigma_{u}^{2}\right)} \qquad (33)$$

dengan $c=\left(\delta-1\right)/\left(1+\delta\right)$. Munculnya bias dapat menyebabkan koefisien estimasi dari variabel instrumen y_{i1} mendekati nol dan nilai statistik-F regresi variabel instrumen tahap pertama konvergen ke χ_1^2 dengan parameter *non-centrality*

$$\tau=\frac{\left(\sigma_u^2 c\right)^2}{\sigma_u^2+\sigma_u^2 c}\to 0, \text{ dengan } \delta\to 1 \qquad (34)$$

karena $\tau\to 0$ maka variabel penduga menjadi lemah. Pada kondisi ini menghubungkan bias dengan lemahnya presisi dari penduga *first-difference* GMM dengan lemahnya instrumen yang terlihat dari parameter konsentrasi τ [14].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 merupakan hasil estimasi efek ketimpangan pendapatan demokrasi di Indonesia menggunakan pendekatan data panel dinamis. Panel data dinamis yang digunakan adalah *generalized moment of method* Arrelano-Bond atau *First*-GMM dan *generalized moment of method* Blundell-Bond atau *Sys*-GMM [12][14].

Tabel 1. Hasil Estimasi

Variabel	Semua Provinsi		Variabel Dependen: idi Ketimpangan rendah		Ketimpangan tinggi:	
	Diff-GMM (1)	Sys-GMM (2)	Diff-GMM (3)	Sys-GMM (4)	Diff-GMM (5)	Sys-GMM (6)
Lidi	0.123*** (0.0366)	0.199*** (0.0303)	0.0871*** (0.0298)	0.109*** (0.0197)	-0.0397 (0.0868)	0.0456 (0.0882)
Ineq	-158.0*** (26.61)	-143.3*** (43.12)	-210.3** (85.25)	-79.60* (46.61)	-328.3** (131.2)	-323.5** (126.1)
Ineq-sq	210.6*** (38.51)	226.8*** (67.86)	282.2*** (108.3)	79.96 (55.67)	464.1** (212.3)	409.1*** (153.3)
Literacy	1.867*** (0.310)	0.551*** (0.124)	2.835*** (0.433)	1.659*** (0.129)	0.632*** (0.234)	0.686*** (0.0884)
ln-yrealcapita	4.776*** (3.207)	11.55*** (1,139)	-9.239* (4.741)	-3.279*** (1.234)	32.91*** (7.270)	13.82*** (2.215)
Constant	-135.9*** (10.83)	-93.98*** (11.45)	-77.85** (35.33)	-46.23** (20.35)	-269.9*** (79.85)	-76.08** (35.87)
Saragan test	0.54	0.91	0.86	0.99	0.99	1.00
AR (1) test	0.00	0.00	0.00	0.01	0.11	0.04
AR (2) test	0.08	0.13	0.02	0.02	0.88	0.33
Observation	165	198	104	130	61	68
Provinces	33	33	25	28	18	19

Catatan:
Variabel dependen adalah indeks demokrasi Indonesia. Kolom (1), (3) dan (5) menampilkan hasil ketika mengaplikasikan panel GMM estimator yang didiskusikan Arellano and Bond (1991). Selanjutnya, kolom (2), (4) dan (6) memperlihatkan hasil ketika mengamplikasikan GMM estimator yang didiskusikan Arellano and Bover (1995). Provinsi dengan label ketimpangan tinggi (Keyimpangan rendah) jika tingkat ketimpangannya diatas atau sama (dibawah) 0.40 poin dari tingkat ketimpangan nasional. Periode sampel adalah 2009-2015. Untuk semua kasus, *standart errors* didalam tanda kurung ***p<0.01, ** p<0.1

Penggunaan Diff-GMM atau *first difference* GMM menghilangkan efek spesifik dari provinsi yang tidak mengalami perubahan terhadap waktu dan memunculkan variabel dependen sebagai instrumen dengan tenggang waktu (*lag*) 1 unit atau lebih. Penerapan Diff-GMM di kolom (1), (3) dan (5) dan Sys-GMM di kolom (2),

(4) dan (6) dapat menghasilkan estimasi yang konsisten dan efisien yang terungkap dari mengecilnya *standar errors*. Baik pada estimasi Diff-GMM di kolom (1), (3) dan (5) maupun *system* GMM atau Sys-GMM di kolom (2), (4) dan (6) tidak terdapat persoalan otokorelasi yang ditunjukkan oleh *AR(2) test* dan variabel instrumen tidak berkorelasi dengan *error term* yang terlihat dari hasil *sargan test*. Penggunaan Sys-GMM telah dapat mengatasi masalah *downward bias* yang mungkin muncul pada penggunaan Diff-GMM. Penggunaan Sys-GMM tidak menghilangkan *unobserved individual specific effect* sehingga berkorelasi dengan variabel dependen, tetapi asumsi Sys-GMM mensyaratkan *first difference* dependen variabel tidak berkorelasi dengan *unobserved individual specific effect* telah memungkinkan *lagged first difference* digunakan pada persamaan level. Hasil estimasi menggunakan Sys-GMM di kolom (2), (4) dan (6) telah dapat menurunkan *standard error* sebagian besar variabel eksogen dan terbebas dari persoalan otokorelasi pada level 5%.

Temuan estimasi Diff-GMM dan Sys-GMM pada kolom (1) dan (2) memperlihatkan konsistensi arah koefisien ketimpangan dalam mempengaruhi stabilitas demokrasi Indonesia. Secara statistik memperlihatkan efek non-linear dari ketimpangan pendapatan terhadap stabilitas demokrasi dan signifikan pada level 5%. Untuk menguji sensitivitas temuan empiris non-linear maka dipertimbangkan spesifikasi alternatif pada kolom (3)-(4). Secara umum, efek ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi adalah negatif. Temuan ini konsisten dengan arah koefisien ketimpangan pendapatan dalam mempengaruhi demokrasi Indonesia pada kolom (1) dan (2). Hasil ini merupakan temuan dari hipotesis akar ekonomi dari demokrasi antar tingkat ketimpangan yang berbeda.

Model non-linear yang digunakan dalam penelitian ini menemukan bahwa dibawah level ketimpangan pendapatan tertentu, penurunan tingkat ketimpangan pendapatan mendorong peningkatan stabilitas demokrasi. Namun, ketika *threshold* ketimpangan pendapatan terlewati, negatif efek ketimpangan pendapatan menjadi positif. Temuan ini mengkonfirmasi hipotesis Lipset [10][15]. Namun berlawanan dengan prediksi hubungan ketimpangan pendapatan dengan demokrasi membentuk *inverted U-shaped* [16]. Efek negatif ketimpangan ekonomi terhadap demokrasi terjadi pada konsilidasi demokrasi dan setelah itu ketimpangan akan berdampak positif demokrasi atau disebut masa pasca-material demokrasi [5]. Pada masa pasca-material demokrasi, redistribusi menjadi kurang penting dibandingkan dengan isu lingkungan, hak asasi manusia dan keadilan sosial global [17].

Hasil estimasi diatas mengimplikasikan bahwa untuk memperkuat demokrasi politik di Indonesia adalah krusial memperhatikan pemerataan pendapatan antar pelaku, kelompok dan golongan pendapatan serta antar provinsi di Indonesia. Ini bermakna bahwa mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan dan merata menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi politik di Indonesia [18]. Tidak hanya itu, peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia sebagai subjek sekaligus objek demokrasi ekonomi dan politik menjadi faktor esensial pula untuk menjadi perhatian. Temuan ini ditandai dengan konsistensi positif efek pendidikan (*literacy*) terhadap demokrasi. Demokrasi politik di Indonesia akan dapat berjalan bersamaan dengan demokrasi ekonomi yang didukung oleh pembangunan sumberdaya manusia yang makin berkualitas, merata dan berkeadilan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 2. *Robustness Checks*

	Semua Provinsi		**Ketimpangan rendah**		**Ketimpangan tinggi**	
	Diff- GMM (1)	**Sys-GMM (2)**	**Diff- GMM (3)**	**Sys-GMM (4)**	**Diff- GMM (5)**	**Sys-GMM (6)**
Vriabel dependen adalah *political rights* sebagai pengukuran demokrasi						
L.pr	0.447	0.650***	0.430***	0.531***	0.269***	0.538***
	(0.0329)	(0.0154)	(0.0230)	(0.0223)	(0.0548)	(0.0392)
ineq	-200.1	32.64	-182.5**	237.2**	-966.0***	-766.9***
	(65.73)	(55.45)	(75.21)	(115.9)	(262.1)	(249.9)
Ineq-sq	243.4	31.38	248.6**	-318.2***	1.294****	1.039***
	(95.77)	(65.77)	(102.8)	(123.4)	(401.3)	(362.7)
literacy	5.444	1.440***	7.628***	3.635***	1.892***	1.619
	(0.272)	(0.197)	(0.252)	(0.166)	(0.464)	(1.025)
ln-yrealcapita	2.764	14.37***	-35.63***	-7.743***	51.39***	4.459
	(5.310)	(1.696)	(3.726)	(2.769)	(17.95)	(7.616)
Constant	-469.3	-279.3***	-296.0***	-284.0***	-492.5***	-30.38
	(33.77)	(21.45)	(39.53)	(26.79)	(181.3)	(56.16)
Sangan test	0.60	0.92	0.94	0.99	0.99	1.00
AR (1) test	0.00	0.00	0.03	0.01	0.14	0.03
AR (2) test	0.23	0.85	0.12	0.09	0.72	0.26
Observations	1.65	1.98	104	130	61	68
Number of id	33	33	25	28	18	19
Variabel Dependen adalah *civil freed freedom* sebagai pengukuran demokrasi						
L.cf	0.51***	0.390***	0.0834***	0.450***	-0.0727	0.0443
	(0.0293)	(0.0413)	(0.0270)	(0.0245)	(0.0573)	(0.0666)
ineq	-84.01*	-96.31	-148.0**	-86.00	39.64	223.8*
	(46.10)	(84.50)	(75.29)	(97.52)	(56.44)	(130.0)
Ineq-sq	145.2**	129.9	210.8	121.3	-101.2	-324.5*
	(62.57)	(117.0)	(109.3)	(132.2)	(66.84)	(169.2)
literacy	0.510*	-0.190***	0.269	0.810***	0.106	-0.234**
	(0.263)	(0.0395)	(0.394)	(0.204)	(0.164)	(0.115)
ln-yrealcapita	-26.13***	-5.157***	-39.83***	-6.750***	4.716**	6.181***
	(3.725)	(1.464)	(4.206)	(1.735)	(2.249)	(2.284)
Constant	300.2***	138.9***	480.2	50.52***	36.05*	2.991
	(26.15)	(20.18)	(30.00)	(17.02)	(19.70)	(42.57)
Sangan test	0.63	0.94	0.97	0.99	0.99	1.00
AR (1) test	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.04
AR (2) test	0.18	0.31	0.19	0.35	0.81	0.76
Observations	165	1.98	104	130	61	68
Number of id	33	33	25	25	18	19

Catatan :
Standart errors didalam kurung
*** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1

Pengujian sensitivitas juga dilakukan dengan mengksplorasi *robustness* pengukuran demokrasi pada Tabel 2. Pengujian empiris dilakukan secara terpisah berdasarkan metode estimasi Diff-GMM dan Sys-GMM untuk alternatif pengukuran demokrasi, yakni hak-hak politik dan kebebasan sipil. Secara umum, efek ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi yang tercermin dari hak-hak politik dan kebebasan sipil adalah negatif. Temuan ini mengkonfirmasi konsistensi arah koefisien ketimpangan pendapatan dalam mempengaruhi demokrasi Indonesia.

KESIMPULAN DAN SARAN

Studi ini telah mengestimasi efek ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi di Indonesia. Penelitian menggunakan analisis non-linear panel data dinamis terhadap data tahunan periode 2009-2015 untuk 33 provinsi di Indonesia. Hasil estimasi memperlihatkan ketimpangan pendapatan berpengaruh negatif pada demokrasi Indonesia dan mengikuti pola *U-shaped*. Fakta ini dipertajam oleh hasil *robustness checks* menggunakan variabel hak-hak politik dan kebebasan sipil sebagai pengukuran demokrasi. Hasil *robustness checks* menemukan konsistensi kontribusi negatif signifikan ketimpangan pendapatan terhadap demokrasi di Indonesia.

Akhirnya, untuk memperkuat stabilitas demokrasi politik di Indonesia adalah penting menurunkan ketimpangan pendapatan antar pelaku, kelompok dan golongan pendapatan. Ini artinya mewujudkan demokrasi ekonomi yang berkeadilan menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas demokrasi politik. Demokrasi politik di Indonesia hanya dapat berjalan bersamaan dengan demokrasi ekonomi yang berkeadilan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] E.N. Muller, "Economic Determinants of Democracy," *American Sociological Review*, Vol. 60(6), pp. 966-982, 1995.

[2] B. Ansell and D. Samuels, "Inequality and Democracy," Comparative Political Studies, vol. 43 (12), pp. 1543-1574, 2010.

[3] F. Jung and U. Sunde, "Income, Inequality, and the Stability of Democracy – Another Look at the Lipset Hypothesis," *European Journal of Political Economy*, Vol. 35, pp. 52-74, 2014.

[4] E.N. Muller, "Democracy, Economic Development, and Income Inequality," *American Sociological Review*, Vol. 53(1), pp. 50-68, 1988.

[5] C. Houle, "Inequality and Democracy: Why Inequality Harms Consolidation but Does Not Affect Democratization," *World Politics,* Vol. 61(4), pp. 589-623, 2009.

[6] R.J. Barro, "Inequality and growth in a panel of countries," *Journal of Economic Growth*, Vol. 5, pp. 5-32, 1999.

[7] S. Hamanka, "Inequality and Authoritarianism in the Developing Countries," International Political Economy, Vol. 22, pp. 57-74, 2008.

[8] http://idiproject.org/

[9] www.bps.go.id

[10] S.M. Lipset, "Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy," *American Political Science Review*, Vol. 53(1), pp. 69-105, 1959.

[11] Verbeek, M, "A Guide to Modern Econometrics," 4 edition. John Wiley and Sons, 2012.

[12] M. Arellano and S. Bond, "Some Tests of Specification for Panel Data: Monte Carlo Evidence and an Application to Employment Equations," *Review of Economic Studies, Wiley Blackwell*, Vol. 58(2), pp. 277-97, 1991.

[13] Anderson, T.W. and Cheng Hsiao, "Estimation of dynamic models with error components," Journal of the American Statistical Association, 589-606, 1981.

[14] R. Blundell and S. Bond, "GMM Estimation with Persistent Panel Data: An Application to Production Functions," *The Institute for Fiscal Study Working Papers Series* W99/4, 1988.

[15] C. Houle, "Inequality, Economic Development, and Democratization," Studies in Comparative International Development, Vol. 51, pp. 1-27., 2016.

[16] D. Acemoglu and J.A. Robinson, "Economic Origins of Dictatorship and Democracy," New York: Cambridge University Press, 2006.

[17] R. Inglehart, "Modernization and Postmodernization: Cultural, Economic and Political Change in 43 Societies," Princeton: Princeton University Press, 1997.

[18] M. Hatta, "Colonial Society and The Ideals Social Democracy," http://kolomsejarah.wordpress.com/2009/01/04/colonial-society-and-the-ideals-of-social-democracy-hatta-1956/

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

INTEGRASI PEMBAGUNAN DESA-KOTA MENUJU KEMANDIRIAN PANGAN DAN MASYARAKAT SEJAHTERA

Asep Suherman[1)]

[1)] Fakultas Pertanian, Universitas Wiralodra

Jl. Ir. H. Juanda Km 3. Indramayu

Email : suhermanasep1106@gmail.com

Naskah diterima : 25 Maret 2017 Naskah direvisi : 28 Maret 2017 Disetujui terbit : 2 April 2017

ABSTRAK

Tulisan ini merupakan ide/gagasan dalam uapaya menata ruang wilayah pedesaan sebagai produsen utama hasil-hasil pertanian (makanan) yang mendukung kebutuhan kota sebagai konsumen sekaligus sebagai pusat pemasaran hasil-hasil produksi pertanian yang umumnya berada di pedesaan. Metode yang digunakan adalah studi pustaka atau kajian pustaka. Fenomena kemiskinan yang terjadi di pedesaan yang umumnya petani gurem adalah belum optimalnya pemanfaatan lahan pertanian yang disebabkan belum adanya kepastian atau jaminan pasar atas setiap produk pertanian yang dihasilkan petani. Petani sebagai makhluk sosial yang aktif, kreatif dan berpikir rasional, maka berpikir secara ekonomis juga. Petani akan memproduksi, jika bermanfaat bagi dirinya. Oleh sebab itu hingga saat ini pertanian di Indonesia pada umumnya masih bersifat subsisten (pertanian subsisten). Paradigma ini harus sudah ditinggalkan menuju pola pertanian yang komersial. Petani sebagai produsen, tidak diragukan lagi kemampuannya. Mereka cukup piawai, tetapi mereka sangat lemah dalam hal pemasaran dan infomasi pasar. Pembanguan desa harus dirancang penataan wilayahnya sebagai produsen hasil pertanian tertentu dengan konsep desa inovatif "one village, one product", yang tidak terpisahkan dalam suatu kawasan pengembangan ibu kota kecamatan. Dalam hal ini, produk pertanian tidak lagi dalam bentuk segar, tetapi sudah ada perlakuan (pengolahan). Pemasaran hasil-hasil pertanian harus terintegrasi dengan kota-kota sebagai tujuan pasarnya, baik itu kota kabupaten, kota provinsi, kota Negara maupun kota-kota besar di luar Indonesia (internasional), karena kota berfungsi sebagai tempat pelayanan, pemasaran, kegiatan industri, pendidikan, dan sebagainya. Di samping itu pembangunan desa inovatif dengan konsep "one village, one product" dapat dijadikan sebagai sarana wisata pertanian ("Agrowisata") dalam upaya atau alternatif pemasaran produk-produk pertanian ke depan.

***Kata kunci** : integrasi pembangunan desa kota, kemandirian pangan, one village-one product,*

PENDAHULUAN

Pendekatan pembangunan sektor pertanian selama Orde Baru adalah pendekatan komoditas yang lebih berorientasi pada peningkatan produksi dibanding peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani. Pembangunan sektor pertanian selama Orde Baru telah memberikan hasil yang menakjubkan khususnya dalam memacu pertumbuhan produksi beras yaitu dengan telah tercapainya swasembada beras pada tahun 1984. Namun setelah itu kita impor beras lagi dan kesejahteraan petani belum tercapai juga. Terlebih lagi dewasa ini, kebijakan pada banyak pemerintah Kabupaten/kota lebih berpihak pada peningkatan pertumbuh-an ekonomi dari pada pertumbuhan sektor pertanian. Hal ini dapat ditunjukkan dengan semakin maraknya konversi lahan pertanian produktif (terutama lahan sawah berirgasi) ke non pertanian. Fenomena ini tidak dapat dielakkan, karena pada dasarnya konversi lahan lebih menguntungkan bagi pemilik lahan lahan maupun bagi investor. Konversi fungsi lahan pertanian produktif ke non pertanian sawah tidak dapat dicegah, karena konversi lahan untuk kepentingan individu atau swasta, berproses menurut mekanisme pasar. Dengan perkataan lain konversi lahan pertanian produktif ke non pertanian pada satu sisi memacu pertumbuhan ekonomi tetapi pada sisi yang lain mengancam kemandirian pangan dan kedaulatan pangan [1].

Berdasarkan uraian di atas maka pendekatan komoditas tidak cocok lagi diterapkan dalam pembangunan pertanian ke depan. Desawa ini kita telah memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas. Kemampuan bersaing melalui proses produksi yang efisien untuk menghasilkan barang yang berkualitas merupakan pijakan utama bagi kelangsungan hidup usaha pertanian. Paradigma kebijakan pemerintah harus sudah berubah, bukan hanya berpikir bagaimana bisa memenuhi kebutuhan pangan secara nasional tetapi juga berpikir untuk memenuhi pangan internasional (dunia). Keberhasilan peningkatan pendapatan atau kesejahteraan petani sangat ditentukan oleh keberhasilan petani memasar-kan hasil pertaniannya dengan harga yang layak. Pada umumnya desa berfungsi sebagi penghasil pangan (produsen) sedangkan pasar hasil-hasil pertanian adalah ibu kota kecamatan, kabupaten, provinsi, ibu kota Negara bahkan kota-kota besar di luar negeri. Kota berfungsi sebagai tempat pelayanan, pemasaran, kegiatan industri, pendidikan, dan sebagainya [2]. Oleh sebab itu pembangunan pertanian ke depan harus terintegrasi antara desa dengan kota.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini merupakan gagasan atau ide dalam upaya menata ruang wilayah pedesaan sebagai produsen utama hasi-hasil pertanian yang berupa pangan untuk mendukung kebutuhan masyarakat kota sebagai konsumen sekaligus pusat pemasaran hasil-hasil pertanian. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka atau kajian literatur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Undang Undang Desa menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Dengan menjadi subyek pembangunan justru desa tidak lagi akan menjadi entitas yang merepotkan tugas pokok pemerintah kabupaten, provinsi bahkan pusat. Justru desa akan menjadi entitas negara yang berpotensi mendekatkan peran negara dalam membangun kesejahte-raan, kemakmuran dan kedaulatan bangsa baik di mata warga negaranya sendiri maupun negara lain.

Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Kawasan Pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Desa bersih dan sehat merupakan dambaan masyarakat desa untuk masa yang akan datang. Oleh sebab itu pembangunan pertanian kedepan adalah pembangunan pertanian tanpa limbah (zero waste). Desa bersih dan sehat harus menjadi suatu kebutuhan dan menjadi budaya masyarakat pedesaan.

Pendekatan Kawasan vs OVOP dalam Pembangunan Pedesaan

Kementerian Pertanian telah memperkenalkan kebijakan pembangunan pertanian dan perdesaan dengan pendekatan pengembangan kawasan. Sasaran langsung yang diharapkan dari kegiatan ini adalah diperolehnya peningkatan produksi berbagai komoditas pertanian, nilai tambah produk, dan pendapatan petani serta terbangunnya kawasan agribisnis terpadu oleh kelompok-kelompok masyarakat yang tergabung dalam suatu wadah kumpulan/lembaga tertentu. Pengembangan kelembagaan seperti ini merupakan dasar strategi pembangunan seluruh sektor, termasuk pengembangan kawasan berorientasi agribisnis [3].

Sebagai strategi kebijakan pengembangan kawasan, maka pengembangan kelembagaan pada masyarakat harus mengarah pada kerjasama antar kelompok dalam pelaksanaan kegiatan usaha ekonomi. Demikian juga koordinasi antar pemangku kepentingan lainnya di kawasan/wilayah yang bersangkutan. Dalam prakteknya, masalah kelembagaan masih merupakan kendala utama dalam pengembangan komoditas pertanian, khususnya dalam perencanaan dan pengintegrasian program/kegiatan. Pendekatan kawasan terintegrasi seperti ini pada dasarnya mirip dengan gerakan yang diperkenalkan pada pendekatan OVOP (*one village one product*) karena masing-masing mengandalkan sumber daya (alam,manusia dan kapital) daerah

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

setempat dengan bahan baku dan kearifan lokal untuk menghasilkan produk spesifik, unitk dan bernilai ekonomi tinggi.

Kedua pendekatan ini juga mengandalkan kehadiran pihak ketiga/perusahaan berbasis pertanian yang lebih maju untuk membantu usaha secara teknis dan komersial. Dalam kaitan inilah pengembangan kawasan identik dengan pengembangan desa dengan pendekatan OVOP. Dalam pendekatan OVOP yang menonjol adalah terintegrasinya semua lembaga terkait, masing-masing dengan kapasitasnya kedalam suatu perencanaan terfokus. Pemanfaatan sumber daya dan fasilitas yang tersedia, produk lokal yang dihasilkan untuk mampu memberi-kan nilai tambah dengan bantuan teknis dan pemasaran dari pihak ketiga (perusahaan).

Program OTOP (*One Tambon one Product*) di Thailand melakukan banyak strategi terapan (*applied strategies*) untuk mendorong peningkatan usaha ekonomi, sehingga program m dengan model ini perlu diadaptasi dalam pengembangan OVOP Indonesia. Diantara yang menonjol adalah kerjasama antar berbagai kalangan untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi para pelaku usaha mengembangkan produk unggulan spesifik lokasi hingga mencapai kualitas tertentu yang mampu bersaing di pasar global. Pendekatan OVOP yang dilakukan secara berkelom-pok lebih memungkinkan terjadinya sinergi usaha yang saling mendukung dan menguntungkan, seperti pengurangan biaya operasional usaha dan efisien si kinerja.

Prinsip-Prinsip pendekatan OVOP

Produksi Lokal di Pasar Global (*Local Yet Global*)

Mengupayakan pemanfaatan potensi sumber daya lokal untuk menghasilkan produk tertentu yang mampu mencapai reputasi global. Masing-masing daerah merevitalisasi potensi sumber daya dan memacu menghasilkan produk yang spesifik/unik, perpaduan antara potensi kearifan dan budaya lokal, yang bernilai tambah tinggi, sesuai dengan standar pasar internasional, dan tetap menjaga kelestarian lingkungan. Produk OVOP dapat dipasarkan secara internasional, namun tetap disukai di pasar lokal. Dengan perkataan lain dapat dikatakan produk lokal tetapi harga internasional karena mampu dipasarkan di tingkat internasional [4].

Kemandirian dan Kreativitas (*Self Reliance and Creativity*)

Mengandalkan kekuatan masyarakat sendiri dalam gerakan OVOP. Usaha ini dilakukan secara mandiri dengan kreativitas, inovasi, ketekunan, dan potensi sumber daya, serta tingkat pengetahuan masyarakat itu sendiri. Masyarakat yang menentukan produk apa yang akan dikembangkan karena memiliki kekhasan/keunikan lokal. Pemerintah memberikan dukungan dan fasilitasi serta kemudahan agar potensi yang ada menjadi lebih baik, termasuk advokasi teknis, mediasi, pedoman teknis cara berproduksi yang baik, mengembangkan produk agar lebih menarik, menerapkan teknologi dan metoda baru, standardisasi, serta informasi investasi dan akses pemasarannya [4].

Berorientasi Sumber Daya Manusia (*Human Resource Development*)

Pengembangan SDM dilakukan agar mempunyai motivasi tinggi untuk mentransformasikan tantangan menjadi peluang pada berbagai bidang dan sektor (pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata, serta bidang-bidang lainnya yang potensial dari daerahnya). SDM yang mapan tidak akan pernah menyerah dalam pencarian dan penggalian inovasi-inovasi, serta dengan ketekunannya tidak pernah putus asa dan dengan peluang yang dimiliki selalu siap menghadapi tantangan. Dengan prinsip di atas, maka pendekatan OVOP merupakan suatu pendekatan pengembangan daerah secara terintegrasi akan menghasilkan produk-produk berkelas global yang unik/khas daerah dan berkearifan lokal memanfaatkan ketersediaan sumber daya yang tersedia. Satu desa sebagaimana dimaksud di atas dapat diperluas mencakup wilayah administratif lainnya, seperti kecamatan, kabupaten/kota maupun kesatuan wilayah lainnya sesuai dengan potensi dan skala usaha ekonomis [4].

Secara umum, sasaran pembangunan perdesaan berbasis pertanian dengan pendekatan OVOP setidaknya dapat dirinci berikut : (a) Terciptanya lapangan kerja baru dan pendapatan masyarakat setempat yang lebih baik daripada sebelumnya; (b) Menguatnya kemampuan kemandirian masyarakat dalam pembangunan ekonomi wilayah; (c) Berkembangnya kearifan lokal/pengetahuan tradisional sebagai potensi sumber daya lokal yang dimiliki secara turun-temurun dan menjadi keunggulan SDM setempat; (d) Berkembangnya keterampilan dan pengetahuan masyarakat umum dengan karakteristik tertentu; (e) Berkembangnya motivasi dan kreativitas serta inovasi masyarakat dengan keunikan produk yang berciri khas bersifat lokal; dan (f) Berkembangnya kemampuan masyarakat yang dapat meningkatkan pendapatan kesejahteraan dan standar hidup pada berbagai tingkatan ekonomi.

Secara khusus aalah sasaran pembangunan agro-industri di perdesaan Indonesia dengan pendekatan OVOP memungkinkan: (a) Terdorongnya pertumbuhan industri perdesaan berbasis pertanian yang mandiri; (b)

ISBN : 978-602-73463-1-4

Dimungkinkannya kegiatan agro-industri sebagai motor penggerak pengembangan perekonomian daerah dan nasional; (c) Meningkatnya kemampuan pemasaran dan daya saing produk-produk berbasis pertanian menembus pasar global dan sesuai dengan standar pasar internasional dengan harga internasional; (d) Meningkatnya peran agro-industri dalam penciptaan lapangan kerja baru berbasis pertanian; (e) Meningkatnya perolehan nilai tambah produk agro-industri untuk memperbaiki dan meningkatkan pendapatan masyarakat; dan (f) Semakin meratanya pembangunan pedesaan di berbagai wilayah dengan kecenderungan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

STRATEGI PENGEMBANGAN AGRO-INDUSTRI DI PEDESAAN

Industri berbasis pertanian sangat berperan menggerakkan ekonomi rakyat. Kegiatan agroindustri tidak hanya menghasil-kan barang jadi, tetapi juga dapat berfungsi sebagai pemasok bahan baku (input) bagi perusahaan menengah dan besar. Artinya, gerakan roda ekonomi agroindustri dengan skala usaha mikro dan kecil dapat mendorong berkembangnya usaha besar yang diharapkan dapat membuka peluang kesempatan kerja baru. Harus diakui bahwa pada saat ini pertumbuhan kesempatan kerja pada skala usaha menengah dan besar tidak selalu menunjukkan kecenderungan penye-rapan tenaga kerja yang signifikan.

Walaupun terdengar sangat klasik beberapa pemikiran berikut ini perlu dipahami dalam konteks akselerasii pengem-bangan subsektor agro-industri skala mikro dan kecil : **Pertama**, adanya keberpihakan pemerintah kepada masyarakat yang dibuktikan dengan diperkenalkannya program-program yang menggerakkan dunia usaha di tingkat perdesaan yang mengolah produk-produk pertanian primer menjadi barang jadi atau setengah jadi yang mempunyai nilai jual yang tinggi. **Kedua**, adanya konsistensi dan kesinambungan pemban-gunan wilayah pedesaan dengan memperhatikan berbagai faktor dengan keterkaitan ke belakang (*backward linkage*) yang akan membantu menentukan arah pembangunan kedepan (*forward linkage*). Cara ini dinilai sangat layak untuk memberdayakan masyarakat pada level terbawah (*grassroot level*). **Ketiga**, tersedianya database dan informasi awal yang akurat tentang potensi wilayah pedesaan dengan komoditas unggulan spesifik lokasi yang bersangkutan. Database ini mencakup banyak sektor dan bidang, meski tidak terlalu rinci tetapi seyogyanya dapat disajikan dalam format yang mudah dibaca atau dipahami dan dapat diakses oleh siapa saja. Menurut Pongquan *dalam* Pasaribu [4], data tersebut akan sangat membantu peletakan dasar perencanaan yang memperlancar komunikasi pusat dan daerah karena memiliki informasi yang sama, serta memudahkan identifikasi target tertentu untuk merumuskan skala prioritas pembangunan.

Strategi pelaksanaan pengembangan agro-industri di perdesaan perlu memerhatikan sejumlah inisiatif berikut untuk menebar gerakan kolektif dan semangat kebersamaan :

a) Melakukan kolaborasi aktif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sektor swasta, perguruan tinggui setempat dan masyarakat lokal;
b) Memanfaatkan pengetahuan, tenaga kerja dan sumber daya lokal;
c) Mengutamakan perbaikan mutu dan penampilan produk-produk yang dihasilkan;
d) Meningkatkan promosi dan pemasaran secara aktif, baik pada tingkat lokal, regional, nasional maupun global (internasional); serta
e) Diutamakan bagi usaha agro-industri yang menghasilkan produk terbaik dan yang kualitasnya dapat ditingkatkan serta akses pasarnya dapat diperluas.

Dalam konteks ini, motor penggerak pelaksanaan kegiatan pengembangan agro-industri di perdesaan mencakup empat komponen kelembagaan, yakni :

a) Masyarakat lokal yang memanfaatkan kearifan lokal dan keahliannya untuk merancang, menciptakan,dan memproduksi serta mengembangkan produk lokal yang unik, bernilai tambah tinggi,dan mendapatkan pengakuan standar internasional;
b) Pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang bertugas mendukung, mendorong dan memfasilitasi kegiatan produksi melalui berbagai kebijakan, kegiatan penelitian, penyediaan sarana dan prasarana pengembangan SDM serta kegiatan promosi/pemasaran;
c) Sektor swasta yang secara aktif berpartisipasi mendorong kegiatan sesuai bidang,fungsi dan kemampuannya dalam pengembangan sumber daya manusia, produksi pengolahan dan pemasaran.
d) Perguruan tinggi setempat dengan Tri Dharma Perguruan Tingginya (Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat) dapat berfungsi sebagai fasilitator antara masyarakat pedesaan dengan pemerintah ataupun masyarakat desa dengan investor.

Secara konseptual hubungan koordinatif kegiatan antara keempat kelompok lembaga di atas dapat diilustrasikan dalam gambar dibawah ini :

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

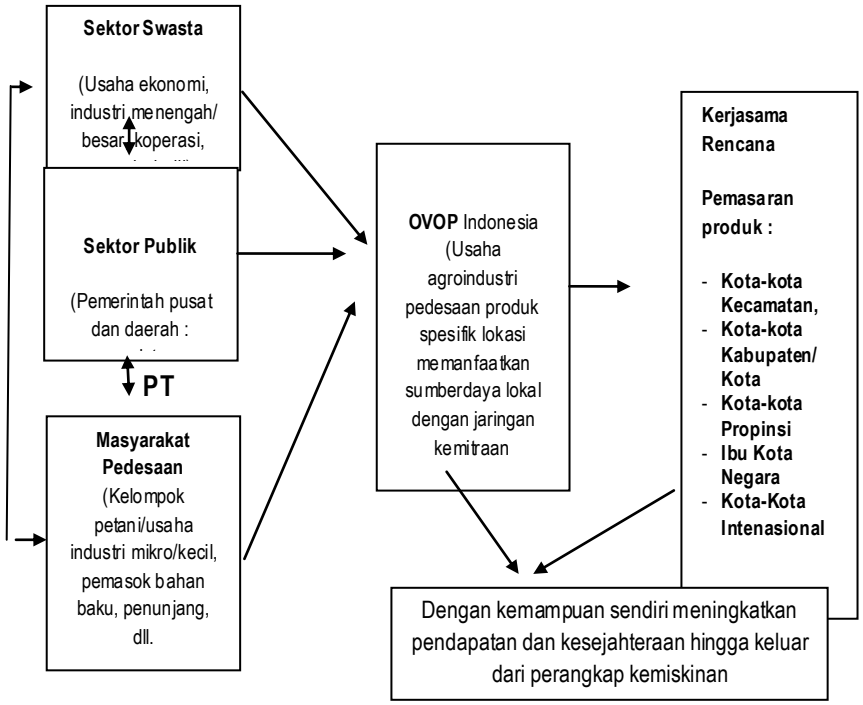

Gambar 1. Skema Integrasi Pembangunan Desa Kota (Sahat M. Pasaribu, 2011 dimodifikasi)

Dari Gambar 1. di atas beberapa contoh komoditas yang dapat dikembangkan melalui pendekatan OVOP adalah : (1) Pengolahan ubi porang (*Amorphophallus muelleri* Blume) menjadi tepung "*glukomanan*", yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi dan diperlukan di Negara-negara Asia seperti Jepang, Cina, Korea dan Taiwan [5], (2) Kopi Toraja dipasarkan ke Jepang; (3) Kopi Medan ke Eropa; (4) Tembakau Deli ke Jerman; (5) dan sebagainya.

Pada dasarnya manusia itu sebagai mahluk yang aktif, kreatif dan rasional [6]. Sebagai contoh : di beberapa daerah petani telah mampu mengolah ubi-ubian yang tumbuh di hutan-hutan, semak belukar atau tegalan sebagai makanan antara lain : Ganyong (*Canna edulis*), sagu/garut (*Maranta arundinacea*), uwi (*Dioscorea alata*), gembili (*Dioscorea esculenta*), dan gadung (*Dioscorea hispida*). Dalam bentuk segar komoditas ubi-ubian tersebut tidak atau tidak bernilai ekonomi, tetapi dalam bentuk tepung berpotensi sebagai komoditas ekspor yang benilai ekonomi internasional [7][8]. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa banyak petani yang telah mampu mengolah ubi-ubi tersebut menjadi tepung atau olahan lainnya sebagai pangan tetapi mereka tidak tahu harus dipasarkan kemana agar mempunyai nilai tambah yang tinggi agar mampu meningkatakan pendapatan mereka secara signifikan.

Dari aspek keruangan seperti yang telah diatur dalam UU No. 26 [9] tentang Penataan Ruang yang meliputi Rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana pola ruang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya. Kawasan budidaya meliputi : kawasan perdesaan, agropolitan, perkotaan, metropolitan,dan megapolitan. Kemudian penggunaan tersebut, terutama di sektor pertanian diperjelas dengan UU No. 41 [10] tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan yang meliputi : lahan pertanian, lahan pertanian pangan berkelanjutan, lahan cadangan pertanian berkelanjutan, kawasan pedesaan dan kawasan pertanian.

Permasalahannya, bagaimana Indonesia dengan kementian-kementrian yang ada mampu bersinergi menggerakkan masyarakat terutama petani dan investor (pengusaha) agar mampu memanfaatkan ruang yang telah ditetapkan oleh kedua Undang-undang tersebut di atas, untuk menghasilkan pangan bukan hanya skala nasional tetapi dalam skala internasional. Pertanian Indonesia ke depan harus berorientasi komersial (tidak subsisten) dengan mengembangkan pertanian dalam arti luas yang meliputi : pertanian tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan, perikanan, peternakan dan kehutanan. Ke enam subsektor pertanian ini dikelola terintegrasi dan bersinergi. Dari gambar di atas terlihat bahwa perencanaan kerjasama dan pemasaran suatu produk harus sudah jelas tergambarkan sejak dari awal. Karena keberhasilan dalam pemasaran suatu produk merupakan kunci utama untuk menuju keberlanjutan dan keberlangsungan suatu usaha dan meningkatkan pendapatan petani sebagai produsen menuju masyarakat petani yang sejahera.

Representasi pemerintah (instansi/dinas terkait), perusahaan inti/lembaga penghela (diupayakan berasal dari usaha dengan kegiatan sejenis dan karakteristik tertentu), dan kelompok usaha (usaha mikro dan

ISBN : 978-602-73463-1-4

kecil sejenis, termasuk pemasok bahan baku) diharapkan dapat menciptakan usaha bersama yang baru dan saling menguntungkan. Ketiga lembaga yang saling berkoordinasi ini, secara teoritis akan memajukan usaha, dan secara praktis akan meningkatkan produksi dan produktivitas, membuka peluang pasar, menciptakan lapangan kerja baru, dan meningkatkan pendapatan usaha [4]. Ini Juga berarti bahwa pola kemitraan dalam pendekatan OVOP ini akan mampu menggerakkan ekonomi lokal, regional, bahkan nasional. Namun demikian, fasilitasi yang disediakan pemerintah harus ditunjukkan dengan berbagai investasi infrastruktur pendukung sebagai strategi pendorong kegiatan agro-industri di perdesaan [4].

Syarat utama terjalinnya kemitraan adalah adanya kebutuhan bersama antara pihak-pihak yang bermitra. Industri besar memerlukan mitra kerja (usaha kecil), misalnya dalam menjamin pasokan bahan baku, pasokan produk setengah jadi atau barang jadi secara berkesinambungan, sementara usaha mikro dan usaha kecil (kelompok masyarakat) yang bersangkutan memerlukan jaminan pasar bagi produksinya. Saling ketergantungan atas produk yang dihasilkan ini akan membangun jaringan usaha bersama atau jaringan kemitraan yang dapat ditingkatkan dengan cara mengoptimalkan kemampuan dan kapasitas (ability and capacity) masing-masing pihak. Mengenali kemampuan sendiri dan memahami keunggulan mitra usaha biasanya akan menghasilkan suatu pola jaringan kemitraan yang berkelanjutan. Kejujuran dan kepercayaan (untuk suatu kesepakatan) umumnya cukup dipahami oleh kalangan dunia usaha yang dalam penerapan-nya, kedua faktor tersebut menjadi faktor penentu keberhasil-an usaha. Usaha/industri besar dan kecil diatas dapat disebut sebagai pihak pertama dan kedua yang membangun kemitraan.

Meskipun demikian, peranan pemerintah sebagai regulator dan sekaligus fasilitator tetap diperlukan untuk memperlancar dan menjamin kelangsungan usaha bersama tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat disebut sebagai pihak ketiga yang tergabung dan tidak terlepaskan didalam jaringan kemitraan ini. Konsep inilah yang disebut sebagai jaringan kemitraan dalam konsep pendekatan OVOP Indonesia dan dalam hal pengembangan agro-industri, pendekatan ini mampu membangun hubungan kerja sama ekonomi yang saling menguntungkan. Sebagaimana deskripsi diatas, ketiga aktor pelaku yang membangun jaringan kemitraan membutuhkan beberapa tahapan pembentukan kerjasama. Pada tahap awal, adanya komunikasi antara dua pihak yang akan bermitra merupakan situasi kritis karena pada tahap ini keduanya akan saling menjelaskan keadaan usaha masing-masing dan diharapkan dapat segera memahami simpul-simpul usaha yang akan dikembangkan bersama. Kesepakatan-kesepakatan bisnis yang mengikat dan saling menguntungkan akan dilakukan pada tahap berikutnya. Di sini, transaksi nyata atas suatu kemitraan telah terjadi dengan menangkap peluang bisnis yang tersedia secara berkesinambungan.Tahap akhir proses pembentukan jaringan kemitraan ini adalah diciptakannya suatu keseimbangan hubungan antar pihak yang bermitra. Pemeliharaan hubungan harmonis yang diikat oleh berbagai kesepakatan bisnis akan melahirkan sinergi ekonomi yang menguntungkan kedua pihak dan sekaligus bermanfaat bagi sebagian masyarakat di sekitarnya (misalnya, karena dapat menampung sejumlah tenaga kerja baru atau membuka peluang usaha baru karena multiplier effect yang ditimbulkan-nya).

Pendekatan *One Village One Product* (OVOP) pertama kali diinisiasi di Oita, Jepang, OVOP merupakan suatu pendekatan pengembangan potensi daerah di satu wilayah untuk menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global, dengan tetap memiliki ciri khas keunikan karakteristik dari daerah tersebut. Produk yang dihasilkan adalah produk yang memanfaatkan sumber daya lokal, baik sumber daya alam, maupun sumber daya manusia. Konsep *One Village One Product* (OVOP) sejak tahun 2006 mulai dipelajari dan diadopsi oleh berbagai negara, khususnya di Asia. Negara-negara yang mengadopsi OVOP di Asia diantaranya adalah Thailand (*One Tambon One Product*), Taiwan (*One Town One Product*), Malaysia (*Satu Distrik Satu Industri*), Filipina (*One Town One Product*), dan Kamboja (*One Village One Product*) [11].

Pendekatan komoditas tidak cocok lagi diterapkan untuk pembangunan pertanian ke depan. Kini telah memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas. Sehubungan dengan itu partisipasi dan kemampuan wirausaha petani merupakan faktor kunci keberhasilan pembangunan pertanian. Menyadari akan hal itu, maka pemerintah telah menetapkan untuk mengubah pendekatan pembangunan pertanian dari pendekatan komoditas menjadi pendekatan Sistem Usaha Pertanian (SUP)/agribisnis. Seiring dengan itu, orientasi pembangunan pertanian pun akan mengalami perubahan dari orientasi peningkatan produksi menjadi orientasi peningkatan pendapatan dan kesejahteraan petani [12].

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

1. Integrasi pembangunan desa - kota melalui pendekatan konsep OVOP (*One Village One Product*) merupakan pilihan yang tepat menuju kemandirian pangan dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

yang menghubungkan antara produsen (pedesaan) dengan konsumen (perkotaan).

2. Pendekatan OVOP, melalui peran pemerintah maka petani Indonesia dapat mengekspor hasil-hasil olahan komoditas petanian yang di Indonesia bersifat loka seperti tepung ubi porang (*Amorrphophallus mueleri Blume*) ke Jepang, Cina, Korea, Taiwan dan komoditas-komoditas lainnya sehingga dapat meningkat-kan kesejaheraan petani karena memiliki nilai jual yang sangat tinggi dan bersifat global.
3. Pemasaran produk-produk segar dapat dipasarkan melalui sub terminal agribisnis (STA) yang ada di kota-kota kecamatan.
4. Keberhasilan dan keberlangsungan usaha secara umum adalah adanya perencanaan pemasaran suatu produk yang sudah jelas tergambarkan dari awal.

SARAN

1. Pemerintah Indonesia melalui kementriannya harus aktif menggali peluang-peluang pasar global secara bersinergi, yang pemenuhan komoditasnya bisa dipenuhi oleh Indonesia.
2. Untuk menunjang pembanguanan integrasi desa-kota dengan pendekatan OVOP di Indonesia,, maka Pemerintah harus menjalankan komsep pembangunan agroindustri yang mengolah produk-produk primer bersifat lokal yang dapat menghasilkan produk-produk berskala globall (internasional).
3. Reforma Agraria harus dilaksanakan secara konsisten dan menuju kepada terciptanya jaminan penguasaan dan pemanfaatan lahan pertanian berkelanjutan (sepanjang hayat) dalam mengisi Undang-Undang yang telah ada dan bersinergi.
4. Pemerintah harus mulai memetakan potensi pangan untuk mengisi tata ruang yang telah ada dalam bentuk peta potensi wilayah.
5. Dalam integrasi pembangunan Desa-Kota, Pemerintah harus sudah mengembangkan agroindistri

DAFTAR PUSTAKA

[1] Suherman, A. 2013. Kehidupan Petani Pasca Konversi Lahan Sawah Beririgasi (Studi Kasus di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. The Farmers Livelihoold in The Affermath of Irrigated Land Conversion. A Case Study in Indramayu District, West Java. Disertasi. Program Pascasarjana Universitas Padjadjaran, Bandung.

[2] Johara T. Jayadinata. Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan Wilayah. Edisi ke-3. Penerbit ITB Bandung,

[3] Sumarno. 2011. Konsep Pengembangan Kawasan Agribisnis Komoditi Unggulan Wilayah. http//soemarno/multiply.com/journal/item/7/ pengembangan Kawasan Agribisnis komoditi unggulan. 18 Agustus 2011.

[4] Pasaribu, S, M,. 2011. Pengembangan Agro-Industri Perdesaan Dengan Pendekatan One Village One Product (OVOP). Developing Agro-Industry in Rural Area Using One Village One Product (OVOP) Approach. Forum Penelitian Agro Ekonomi. Volume 29. No. 1, Juli 2011. Pusat sosial Ekonomi dan Kebijakan pertanian. Bogor. 2011.

[5] Pusat Penelitian dan Pengembangan Porang Indonesia. 2013. Modul Desiminasi. Budidaya dan Pengembangan Porang (Amorphophallus Muelleri Blume) Sebagai Salah Satu Potensi Bahan Baku Lokal. Universitas Brawijaya Malang.

[6] Ritzer, G. 2011. Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda. Penerjemah Alimandan. Edisi pertama. Cetakan ke-9. Rajawali, Jakarta.

[7] eBookPangan.Com. 2009. Pengolahan Umbi non Konvensional (Ganyong, Garut, Gadung, Gembili, dan Uwi.

[8] Suherman, A. 2016. Potensi, Kendala dan Solusi Pengembangan Pangan Lokal Berbasis Tipologi Lahan Mendukung Ketahan Pangan dan Kedaulatan Pangan Nasional (Suatu Kasus di Kabupaten Indramayu). Makalah Seminar : Pengembangan pangan dan Budaya pangan Lokal Mendukung Percepatan Pencapaian Ketahanan Pangan yang mandidi dan Berdaulat. Badan penelitian dan pengembangan Pertanian. Cipayung/Bogor, 11-12 Oktober 2016.

[9] Undang Undang No 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

[10] Undang-Undang No. 41 tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelnjutan.

[11] Triharini, M., Larasati, D. dan S. R. 2014. Pendekatan One Village One Product (OVOP) Untuk Mengembangkan Potensi Kerajinan Daerah. Studi Kasus : Kerajinan Gerabah di Kecamatan plered, Kabupaten Purwakarta. ITB J. Vis. Art & Des, Vol. 6. No. 1. Progran Studi Magister Desain Fakultas Seni Rupa dan Desain. Institut Teknologi Bandung, 2014.

[12] Sudaryanto, T. 2005. Pantjar Simatupang, dan Ketut Kariyasa. Konsep Usaha Pertanian, Serta Peranan BPTP Dalam rekayasa Teknologi Pertanian Spesifik Lokasi. Analisis kebijakan Pertanian. Volume 3 No. 3, Desember 2005. Pusat analisis sosial Ekonomi dan kebijakan Pertanian. Bogor. 2005.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

IDENTIFIKASI TINGKAT PELAYANAN FASILITAS PUBLIK BERDASAR ASPEK PENYEDIAAN (*SUPPLY ASPECT*) STUDI KASUS: SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) DI KOTA MALANG

Deni Agus Setyono[1)], Denny Dwi Cahyono[1)] dan Dian Kusuma Wardhani[1)]

[1)] Jurusan Perencanaan Wilayah & Kota, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya

Email : deni.setyono08@gmail.com

Naskah diterima : 13 Maret 2017 Naskah direvisi : 22 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Fasilitas umum/fasilitas publik memiliki beragam tipe dan fungsi, dimana upaya penyediaan dan pengembangannya ditujukan untuk menunjang berbagai aktivitas masyarakat. Penyediaan fasilitas umum di Indonesia dilakukan dengan basis/pendekatan jumlah penduduk dan karakteristik spasial, yang mana pengembangan fasilitas baru atas dasar skala dan kapasitas pelayanan tiap fasilitas terkait. Dengan kata lain, pengukuran kapasitas pelayanan sebuah fasilitas dapat menggambarkan kelayakan fungsional dari fasilitas tersebut. Salah satu fasilitas umum yang penting untuk diukur adalah fasilitas pendidikan, sebagaimana fasilitas ini memiliki fungsi yang cukup penting dalam menunjang pengembangan kualitas sumber daya manusia pada tingkat lokal. Penelitian ini dilakukan untuk menggambarkan tingkat pelayanan sekolah menengah pertama (SMP) di Kota Malang berbasis pada aspek penyediaan (supply aspect), yang dipengaruhi lokasi dan jumlah sekolah eksisting. Secara umum, kegiatan identifikasi dilakukan dengan menggunakan administrasi kelurahan sebagai unit analisis dan pendekatan berbasis grid/cell digunakan sebagai metode untuk memperoleh hasil yang lebih akurat terkait dengan skala/tingkat pelayanan fasilitas umum perkotaan. Metode ini dipilih karena diharapkan dapat menggambarkan tingkat pelayanan yang lebih rinci. Berdasar hasil analisa, tingkat pelayanan fasilitas SMP di Kota Malang berdasar pada pendekatan berbasis batas administrasi kelurahan sebesar 520,69%. Hal ini berarti bahwa seluruh unit fasilitas SMP yang ada di Kota Malang melayani kebutuhan 5 kali lebih besar dari kapasitas yang ada. Atau dengan kata lain setiap anak usia sekolah dapat memilih paling tidak lebih dari 5 SMP secara bebas pada saat mereka mau bersekolah di tingkat SMP. Sementara itu, apabila menggunakan metode berbasis grid/cell maka tingkat pelayanannya menjadi sebesar 343,05%. Hal ini juga berarti bahwa bahwa penduduk di Kota Malang dapat mengakses fasilitas SMP tidak hanya yang berada di lingkungan batas administrasi mereka namun mereka dapat mengakses fasilitas di seluruh bagian wilayah Kota Malang.

Kata kunci: *fasilitas publik, tingkat pelayanan, sekolah menengah pertama (SMP).*

PENDAHULUAN

Pembangunan sektor pendidikan saat ini menjadi salah satu prioritas dalam agenda pembangunan nasional (RPJMN 2015-2019). Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pembangunan sektor pendidikan ini maka terdapat beberapa program yang harus dilakukan terutama pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, seperti penyediaan unit fasilitas pendidikan yang memadai, peningkatan kualitas kurikulum pendidikan, serta peningkatan kapasitas dan kualitas dari tenaga pendidik/guru pada tiap wilayah sehingga pada akhirnya kegiatan/proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan merata. Upaya-upaya tersebut penting terutama dalam meningkatkan pelayanan pendidikan di daerah, dan salah satunya menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu penyediaan fasilitas pendidikan (sekolah) secara memadai dan merata.

Sampai saat ini, fokus dari kegiatan penyediaan fasilitas pendidikan ini terkait dengan kondisi kependudukan dan karakteristik tiap wilayah atau daerah namun masih diperlukan upaya yang komprehensif dan mampu mengidentifikasi kebutuhan pengembangan terkaitfasilitas pendidikan/sekolah baru terutama didasarkan pada pertimbangan skala/tingkat pelayanan fasilitas pendidikan padatiap wilayah. Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini ditujukan untuk memperbandingkan metode yang digunakan dalam mengidentifikasi pola

dan tingkat pelayanan fasilitas pendidikan/sekolah secara presisi [1]. Kemudian digunakan untuk mengidentifikasi wilayah atau kawasan yang belum memperoleh pelayanan fasilitas pendidikan secara maksimal atau optimalserta pada akhirnya dapat digunakan untuk memperkirakan pola keterhubungan antar wilayah (*spatial connectivity*) berbasis dengan pelayanan fasilitas pendidikan.

Penelitian ini difokuskan pada fasilitas pendidikan pada jenjang menengah yakni SMP (Sekolah Menengah Pertama). Fasilitas ini cukup penting terutama dalam mendukung perwujudan program prioritaspembangunan nasional di bidang pendidikan "Wajib Belajar 9 Tahun"sertasaat ini pengelolaan fasilitas SMP masih menjadi kewenangan dari pemerintah kabupaten/kota [2]. Sampai saat ini,belum ada kebijakan pengembangan dan pengaturan pelayanan fasilitas pendidikan, mulai dari jenjang SD sampai dengan SMU sehingga di lapangan diperkirakan terjadi persaingan/kompetisi atau penumpukan dalam pelayanan fasilitas pendidikan ini sementara di sisi lain siswa memiliki pilihan yang terbatas dalam mengakses pendidikan secara layak di sekitar wilayah tempat tinggalnya. Pada akhirnya terjadi ketimpangan atau disparitas dalam pelayanan pendidikan, sebagaimana pada jenjang pendidikan menengah pertama (SMP). Pada wilayah Kota Malang, permasalahan terkait dengan pelayanan fasilitas SMP saat ini perlu mendapat perhatian terutama terkait dengan pemusatan pelayanan fasilitas SMP pada bagian wilayah kota tertentu. Berdasar kondisi eksisting terdapat wilayah yang memiliki fasilitas SMP cukup banyak sehingga diperkirakan memiliki tingkat pelayanan yang tinggi sementara juga terdapat wilayah dengan ketersediaan fasilitas SMP yang rendah. Jangkauan pelayanan fasilitas SMP sebagaimana ketentuan lebih luas dibandingkan dengan fasilitas SD [3], sehingga kapasitas layanannya juga diperkirakan cukup besar dan hal ini tentu saja mempengaruhi tingkat pelayanan fasilitas SMP ini.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini pada awalnya ditujukan untuk memperbandingkan metode perhitungan tingkat pelayanan fasilitas (*service rates*) antara yang metode basis/konvensional dengan metode modifikasi yang disebut sebagai *Cell/Grid Catchment Method*.Metode kedua diperkirakan memiliki hasil yang lebih akurat/presisi dalam menghitung tingkat pelayanan fasilitas, yang dalam penelitian ini adalah fasilitas pendidikan (sekolah). Metode ini diturunkan dari *Floating Catchment Method* (FCM) [1] dan sebatas sepengetahuan penulis metodeini pernah belum digunakan dalam perhitungan pelayanan fasilitas pendidikan selama ini. Setyono [3 dan 4] menggunakan metode *Cell/Grid Catchment* ini dalam menentukan perhitungan tingkat pelayanan fasilitas SD di Kota Malang dan dapat dikatanakan gambaran hasil yang diperoleh cukup bagus.Dalam operasionalisasinya, metode *Cell/Grid Catchment Method*ini diaplikasikan dengan menggunakan bantuan*software* GIS melalui perangkat (*tools*) *buffer & overlay*. Metode tersebut digunakan untuk menghitung jumlah *layer* sekolah pada tiap unit administrasi (kelurahan & kecamatan) di Kota Malang untuk menentukan tingkat pelayanan fasilitas sekolah.Kemudian sebagaimana ketentuan SNI, cakupan layanan untuk 1 (satu) unit fasilitas SMP dibutuhkan sekitar 2.400 jiwa [5]. Berikut metode perhitungan tingkat pelayanan fasilitas SMP di Kota Malang.

$$Tingkat\ Layanan = \frac{[\Sigma Layer\ *2400\ ]}{\Sigma\ Penduduk}\ x\ 100\% \qquad (1)$$

Selanjutnya, hasil dari perhitungan tingkat pelayanan fasilitas SMP akan diperoleh merupakan data dasar untuk mengkaji keterhubungan wilayah atau konektivitas spasial (*spatial connectivity*). Metode yang dapat digunakan dalam mengidentifikasi hubungan spasial antar bagian wilayah di Kota Malang melalui pelayanan fasilitas SMP ini adalah Indeks Moran' I [6]. Wilayah dengan nilai indeks yang tinggi mengindikasikan bahwa pada keterhubungan wilayah tersebut dengan wilayah lain cukup baik terutama dalam kaitan mengakses pelayanan fasilitas SMP.

Dalam penelitian ini, Kota Malang dipilih sebagai wilayah studi. Sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya, penelitian ini difokuskan terhadap fasilitas SMP sebagai salah satu fasilitas publik penting di Kota Malang terutama dalam mewujudkan program pendidikan bagi masyarakat secara berkualitas, memadai dan merata. Pada tahun 2015, terdapat 129 unit SMP yang tersebar pada berbagai wilayah di Kota Malang, yang meliputi 97 unit SMP dan 32 unit MTs [7]. Fasilitas pendidikan tersebut dikembangkan menyebar di berbagai kecamatan pada Kota Malang dengan tujuan yang memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat, begitu pula masyarakat di sekitar Kota Malang. Persebaran fasilitas SMP pada tiap kecamatan tidak terlalu berbeda, kecuali Kecamatan Sukun yang hanya memiliki 19 unit SMP dan paling sedikit dibandingkan kecamatan lainnya. Dari sebaran fasilitas SMP ini maka dapat dihitung pola dan tingkat pelayanannya. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1 Sebaran SMP di Kota Malang Tahun 2015

Kecamatan	SMP (Unit)	MTs (Unit)
Kedungkandang	16	14
Sukun	16	3
Klojen	26	5
Blimbing	22	2
Lowokwaru	21	6
Total	**101**	**30**

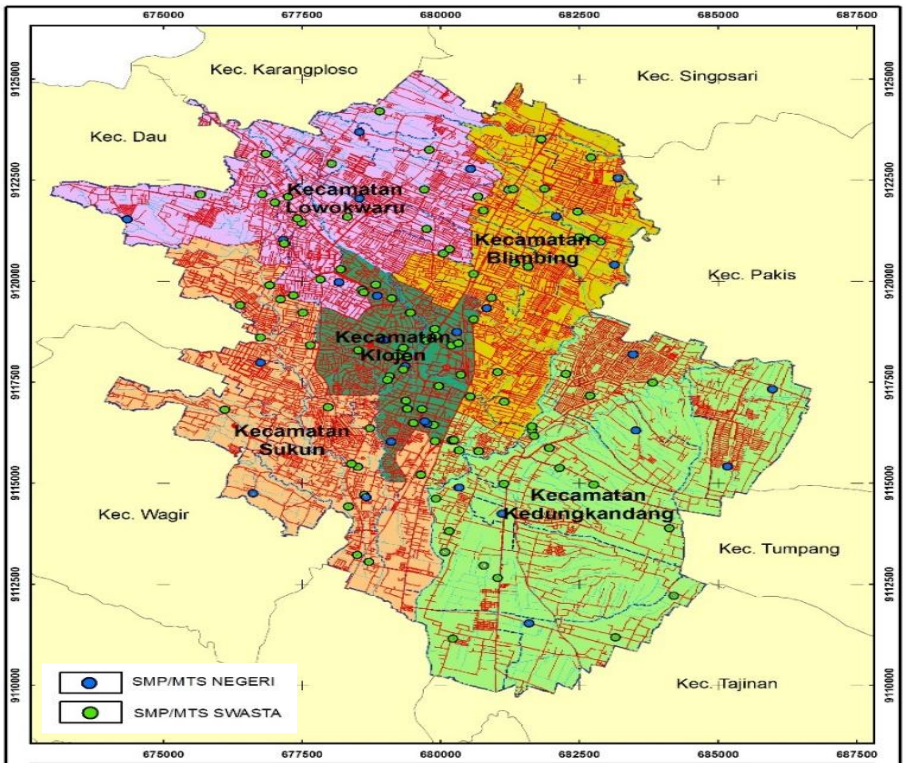

Gambar 1. Sebaran SMP di Kota Malang

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada tahap awal dalam penelitian, tingkat pelayanan fasilitas SMP dihitung dengan menggunakan metode basis/ konvensional. Perhitungan dalam metode ini hanya mempertimbangkan jumlah fasilitas SMP yang hanya ada dalam lingkup batas administrasi (kelurahan) atau dengan asumsi bahwa fasilitas SMP yang ada pada tiap unit administrasi hanya melayani penduduk/masyarakat yang berada dalam lingkup batas unitadministrasi yang bersangkutan saja. Hal ini tentu berbeda dengan kondisi realitas di lapangan, bahwa masyarakat dapat memilih secara bebas fasilitas SMP yang dikehendaki tanpa mempertimbangkan batas unit administrasi (kecamatan & kelurahan) dalam Kota Malang. Sebagaimana diuraikan sebelumnya, pada wilayah Kota Malang terdapat 131 unit SMP yang tersebar pada 54 kelurahan sampai dengan tahun 2015 [7]. Fasilitas SMP paling banyak terdapat di wilayah Kecamatan Klojen dan Kedungkandang mencapai 30-31 unit sekolah sehingga rata-rata terdapat 2-3 unit sekolah pada tiap kelurahan. Namun juga terdapat kelurahan yang tidak tersedia fasilitas SMP, meliputi Kelurahan Balearjosari, Bandulan dan Gadang.

Tingkat layanan dalam metode konvensional ini dihitung dari jumlah eksisting SMP dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di tiap kelurahan. Berdasar hasil perhitungan, diperoleh hasil bahwa rata-rata tingkat pelayanan SMP berdasar metode konvensional/ basis ini sebesar 42,46%. Hal ini berarti bahwa fasilitas SMP di Kota Malang belum mampu memenuhi kebutuhan seluruh penduduk kota karena kurang dari 50% dari kebutuhan total. Hal tersebut juga mengindikasikan bahwa setiap anak lulusan SD hanya dapat memilih 1 SMP saja. Pada tingkat kelurahan, Kelurahan Klojen memiliki tingkat pelayanan tertinggi mencapai 274% dan hal ini mengindikasikan bahwa fasilitas pendidikan/ sekolah pada kelurahan ini dapat melayani kebutuhan sebanyak 2 kali lipat dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di kelurahan tersebut. Dengan kata lain, siswa lulusan SD pada wilayah Kelurahan Klojen apabila lulus dapat memiliki 2-3 SMP di

sekitar wilayahnya. Wilayah lain yang memiliki tingkat pelayanan fasilitas SMP yang relatif tinggi adalah Kelurahan Kedungkandang sebesar 143%. Namun juga terdapat 3 (tiga) kelurahan meliputi Kelurahan Balearjosari, Bandulan dan Gadang. yang memiliki tingkat pelayanan sebesar 0% karena tidak terdapat fasilitas SMP pada kelurahan tersebut. Selengkapnya tingkat pelayanan fasilitas SMP berdasar jumlah fasilitas sekolah eksisting pada tiap kelurahan dapat dilihat sebagaimana gambar berikut.

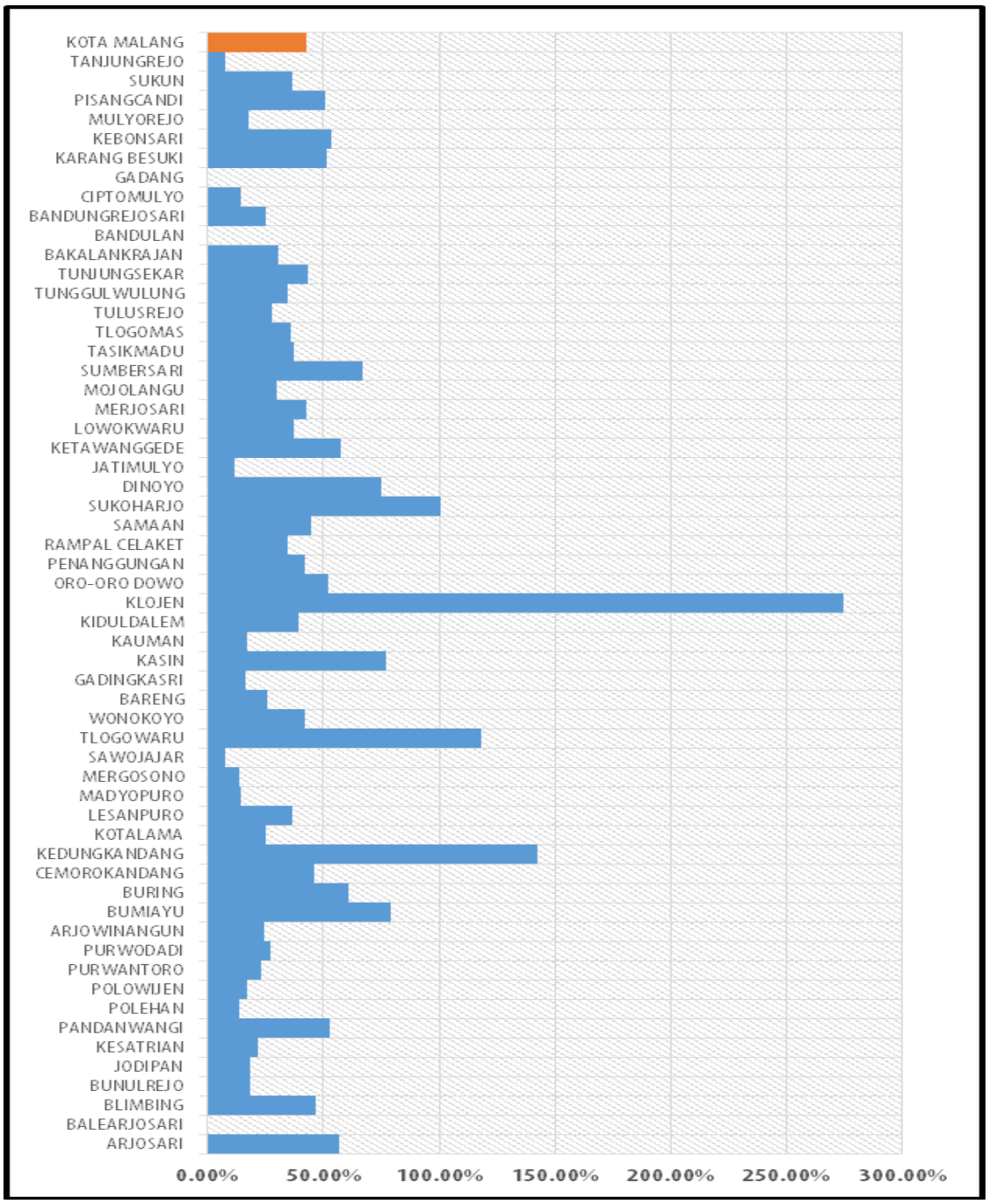

Gambar 2. Tingkat Pelayanan Fasilitas SMP Tiap Kelurahan di Kota Malang Berdasar Perhitungan Jumlah Sekolah Eksisting

Menurut distribusi fasilitas SMP yang ada, Kecamatan Klojen merupakan wilayah yang memiliki tingkat pelayanan tertinggi dibandingkan dengan kecamatan lain di wilayah Kota Malang yang sekitar 66%. Sementara itu, Kecamatan Sukun dan Blimbing memiliki tingkat pelayanan yang relatif rendah yang sekitar 26% dari total kebutuhan pelayanan pendidikan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 2 Tingkat Pelayanan SMP di Kota Malang berbasis Jumlah EksistingSekolah Tahun 2015

Kecamatan	Jumlah Sekolah (Unit)	Rerata Tingkat Pelayanan (%)
Kedungkandang	30	50,92
Sukun	19	26,18
Klojen	31	65,84
Blimbing	24	26,96
Lowokwaru	27	41,70
Total	131	42,46

Metode kedua yang digunakan adalah metode *Administrative Boundary Catchment* (ABC). Metode ini didasarkan pada teknik *overlay* dan *buffering*. Langkah awal yang dilakukan adalah menentukan wilayah pelayanan fasilitas pendidikan dari *buffering* dari titik fasilitas SMP yakni sekitar 1 kilometer di sekitarnya. Kemudian layer layanan semua fasilitas SMP di-*overlay* dengan peta wilayah Kota Malang sehingga diperkirakan seluruh SMP yang ada dapat melayani seluruh wilayah dan penduduk di Kota Malang. Untuk mengetahui seberapa banyak fasilitas SMP yang melayani atau dapat diakses pada suatu kecamatan atau kelurahan maka digunakan batas wilayah administrasi (*administrative boundaries*).

Berdasar proses ini dapat diketahui bahwa kelurahan-kelurahan yang berada di pusat Kota Malang memiliki paling tidak layer layanan dari41 – 55 unit SMP yang ada di Kota Malang meliputi Bareng, Oro-oro Dowo, Gadingkasri, Klojen, Kauman, Kasin, Sukoharjo, Kotalama, Penanggungan, Sumbersari, Kesatrian, Kidul Dalem, Jodipan, Sukun dan Tanjungrejo. Sementara itu, kelurahan yang berada di kawasan pinggiran Kota Malang memiliki layer layanan sekolah sekitar 6 – 10 unit SMP. Hasil analisa *Administrative Boundary Catchment* selengkapnya dapat dilihat pada Gambar 3.

Setelah diketahui jumlah layer layanan sekolah berdasar metode *Administrative Boundary Catchment* ini maka dapat diperhitungkan tingkat pelayanan SMP pada tiap kelurahan di Kota Malang. Tingkat layanan sekolah dengan metode *Administrative Boundary Catchment* ini berdasar jumlah layer layanan sekolah dibandingkan dengan jumlah penduduk yang ada di tiap kelurahan. Secara umum, tingkat layanan sekolah SMP di Kota Malang dengan menggunakan metode ABC ini sebesar 520,59% dan lebih besar dibandingkan dengan metode konvensional. Hal ini dapat digambarkan bahwa seluruh SMP yang ada mampu melayani kebutuhan sampai dengan 5 kali lipat jumlah penduduk di Kota Malang. Dengan kata lain, siswa SD yang lulus dapat memilih paling tidak 5 – 6 SMP di Kota Malang secara bebas. Kemudian tingkat layanan SMP pada kecamatan menggambarkan bahwa Kecamatan Klojen memiliki tingkat layanan fasilitas SMP paling tinggi mencapai 706%. Hal ini berarti bahwa seluruh sekolah (SMP) di Kecamatan Klojen dan sekitarnya mampu melayani kebutuhan sampai dengan 7 kali lipat dari jumlah penduduk yang ada di kecamatan tersebut. Sementara itu, Kecamatan Sukun dan Blimbing memiliki tingkat layanan terendah sebesar 400%.

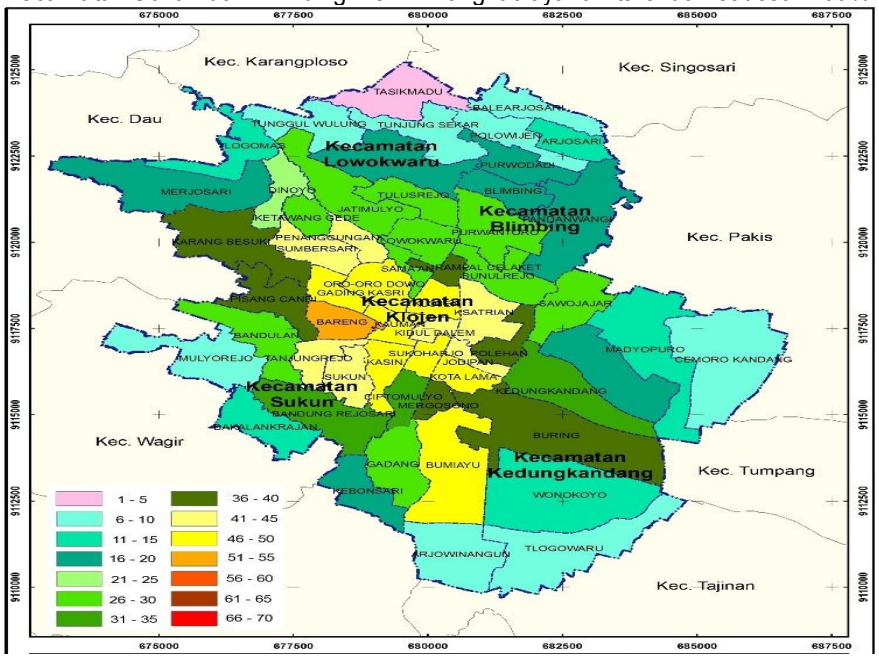

Gambar 3. Distribusi Jumlah *Layer* Pelayanan Sekolah Tiap Kelurahan dengan Metode *Administrative Boundary Catchment*

ISBN : 978-602-73463-1-4

Pada tingkat kelurahan, sebagian besar kelurahan memiliki tingkat pelayanan sekolah diantara 100 – 200%. Kelurahan dengan tingkat pelayanan paling tinggi adalah Kelurahan Kiduldalem mencapai 1.573% yang berarti bahwa SMP yang berada di sekitar wilayah kelurahan ini mampu melayani kebutuhan 15-16 kali lipat dari jumlah penduduk yang ada di kelurahan tersebut. Siswa yang baru lulus SD di wilayah Kidul Dalem paling tidak bisa memilih secara bebas 15 – 16 SMP yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggalnya. Wilayah lain yang juga memiliki tingkat pelayanan SMP cukup tinggi adalah Kelurahan Klojen dan Rampal Celaket dengan nilai masing-masing 1.451 dan 1.040%. Sementara itu, wilayah dengan tingkat pelayanan sekolah SMP paling rendah adalah Kelurahan Tasikmadu yang hanya sebesar 37%. Kelurahan yang berada di bagian paling utara Kota Malang ini diperkirakan berada dalam layanan hanya 1 – 2 unit SMP di sekitarnya.

Tabel 3 Tingkat Pelayanan SMP berbasis Metode *Administrative Boundary Catchment*

Kecamatan	Jumlah*Layer* Pelayanan Sekolah	Rerata Tingkat Pelayanan (%)
Kedungkandang	390	600,08
Sukun	257	399,67
Klojen	344	706,03
Blimbing	276	391,66
Lowokwaru	341	500,64
Total	1.608	520,69

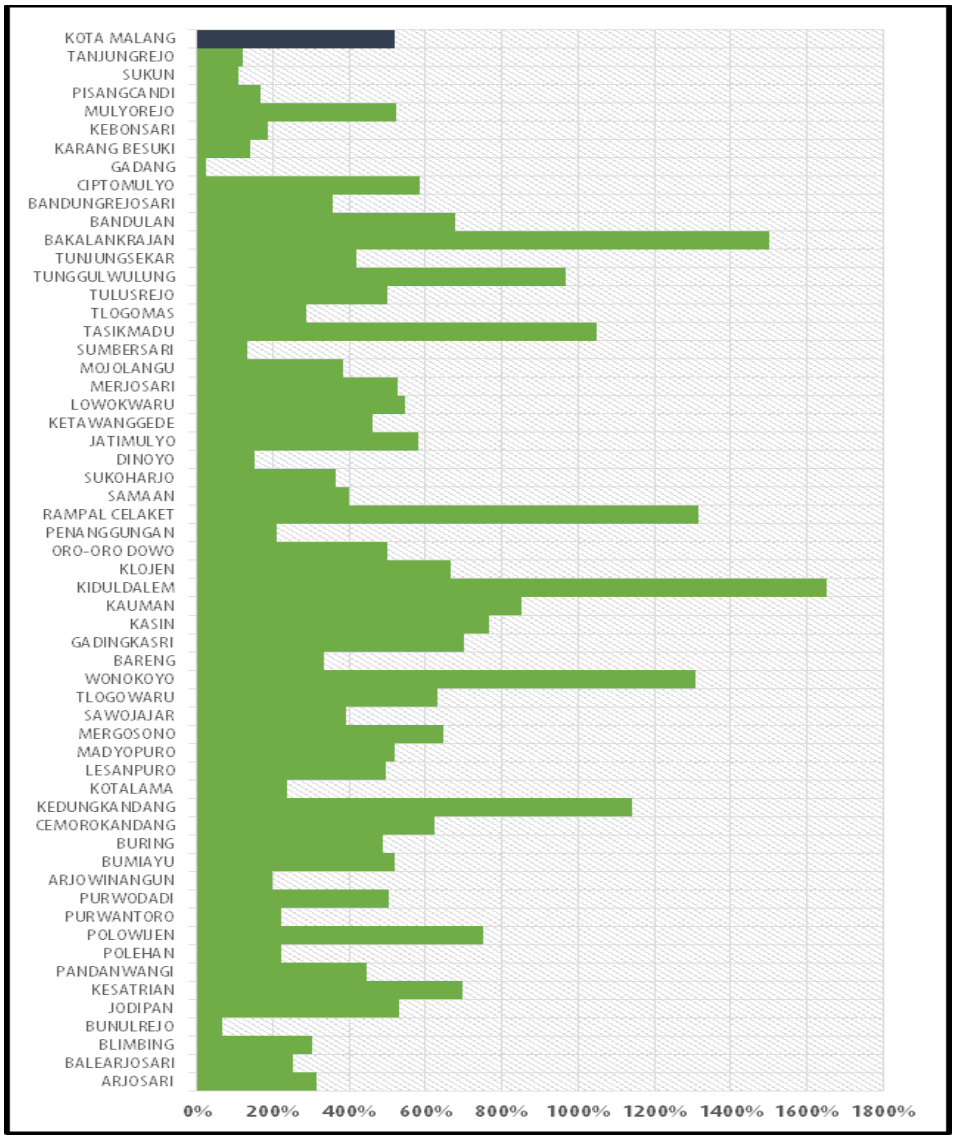

Gambar 4. Tingkat Pelayanan Fasilitas SMP Tiap KelurahanBerbasisMetode *Administrative Boundary Catchment*

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tahapan selanjutnya adalah mengidentifikasi tingkat pelayanan fasilitas SMP di Kota Malang dengan menggunakan pada metode*Cell/Grid Catchment*(CGC). Sistem *cell* atau *grid* dibentuk dengan mempertimbangkan karakteristik tiap wilayah kelurahan dengan membedakan kawasan yang memiliki guna lahan terbangun dan tidak terbangun. Perhitungan tangkapan (*catchment*) daerah pelayanan fasilitas sekolah ini hanya difokuskan *cell* yang memiliki karakteristik kawasan terbangun. Berdasar pada hasil, dapat dilihat bahwa kelurahan pada kawasan pusat kota memiliki jumlah *layer* pelayanan sekolah lebih tinggi namun jumlahnya lebih rendah dibandingkan dengan hasil dari metode sebelumnya. Wilayah yang memiliki *layer* pelayanan sekolah paling tinggi adalah Kelurahan Sumbersari, Penanggungan, Oro-oro Dowo, Kiduldalem, Klojen, Kauman, Sukoharjo, dan Jodipan yang sekitar 36 – 40 *layer* sekolah. Lebih lanjut, dapat dikatakan juga bahwa kelurahan pada kawasan perbatasan Kota Malang memiliki layer pelayanan sekolah yang lebih rendah yang berkisar antara 1 – 5 *layer* sekolah. Hal ini berbeda dengan hasil yang menggunakan *administrative boundary catchment*, dimana hanya Kelurahan Tasikmadu yang memiliki *layer* pelayanan sekolah paling rendah. Hasil perhitungan metode *Cell/Grid Catchment* dapat dilihat pada Gambar 5.

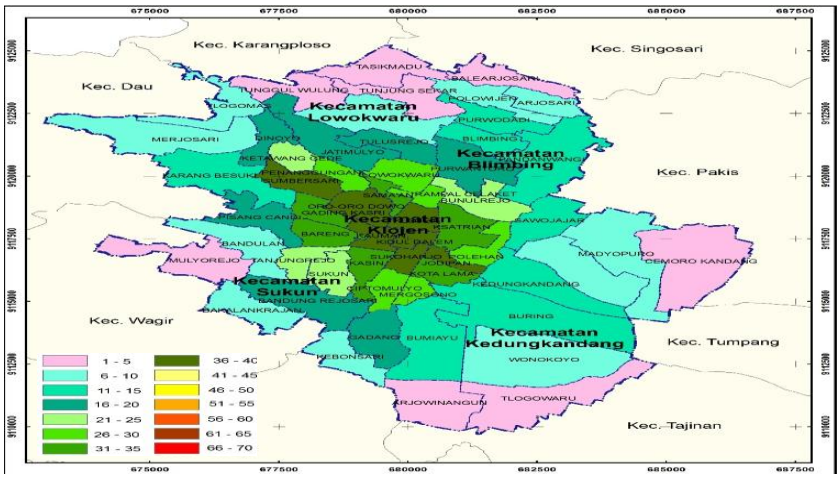

Gambar 5. Distribusi Jumlah *Layer* Pelayanan Sekolah Tiap Kelurahan dengan Metode *Cell/Grid Catchment*

Jumlah *layer* pelayanan sekolah tersebut akan digunakan untuk menghitung tingkat pelayanan fasilitas SMP pada tiap kelurahan di Kota Malang. Rata-rata tingkat pelayanan fasilitas SMP di Kota Malang dengan menggunakan metode *cell/grid* ini sebesar 343%. Hal tersebut berarti bahwa fasilitas SMP di Kota Malang dapat melayani 3 kali lipat dari kebutuhannormal (setara dengan jumlah penduduk eksisting). Kecamatan Klojen menjadi wilayah dengan tingkat pelayanan fasilitas paling tinggi dibandingkan kecamatan lain yang mencapai 800% dan nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan metode sebelumnya. Sementara itu, kecamatan dengan tingkat pelayanan yang paling rendah adalah Kecamatan Sukun dan Lowokwaru. Secara umum, hasil dari metode *cell/grid* ini memiliki hasil yang lebih rendah dikarenakan ada perbaikan hasil dari metode *administrative boundary catchment*.

ISBN : 978-602-73463-1-4

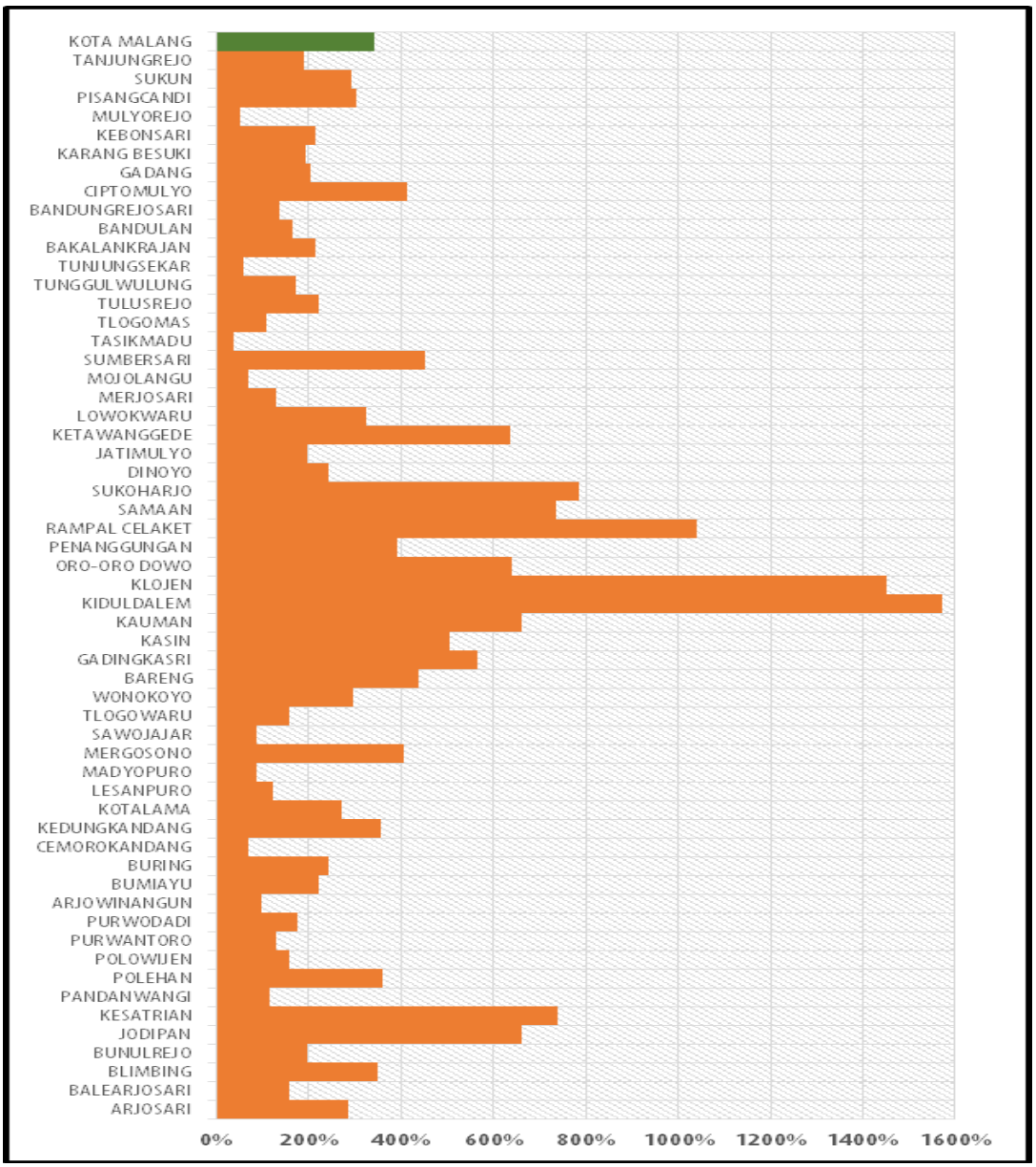

Gambar 6 Tingkat Pelayanan Fasilitas SMP Tiap KelurahanBerbasis Metode *Cell/Grid Catchment*

Tabel 4 Tingkat Pelayanan SMP berbasis Metode *Grid/Cell Catchment*

Kecamatan	Jumlah *Layer* Pelayanan Sekolah	Rerata Tingkat Pelayanan (%)
Kedungkandang	148	200,89
Sukun	170	216,36
Klojen	383	799,05
Blimbing	199	320,59
Lowokwaru	156	220,43
Total	1.056	343,05

KESIMPULAN DAN SARAN

Fasilitas publik terutama fasilitas pendidikan memiliki fungsi yang penting dalam mendukung agenda pembangunan sektor pendidikan nasional serta indeks pembangunan manusia (IPM) di Indonesia. Sampai saat ini, belum ada kebijakan untuk mengatur atau membatasi pelayanan fasilitas pendidikan terutama didasarkan pada konsep perwilayahan. Hal tersebut membuat tingkat kompetisi dalam mengakses pelayanan pendidikan pada fasilitas pendidikan menjadi cukup tinggi dan terkadang dapat memicu munculnya ketimpangan (disparitas) antar wilayah. Penelitian ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan dukungan dalam pengaturan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

pengembangan fasilitas pendidikan dan mewujudkan pelayanan pendidikan yang merata atau berimbang. Hasil dari penelitian ini menggambarkan adanya ketimpangan pelayanan pendidikan antara kawasan pusat kota dan kawasan pinggiran kota dengan menggunakan metode *cell/grid*.

DAFTAR PUSTAKA

[1] W. Luo. *Using a GIS-based floating catchment method to assess areas with shortage of physicians*. Health & Place. 2004.
[2] Kementerian Pendidikan Nasional (2007). Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 24 Tahun 2007 tentang Standar Fasilitas dan Infrastruktur Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).
[3] D.A. Setyono, S. Hariyani, & D.D. Cahyo. *Spatial Patterns of Public Facility Services based on Grid/Cell Supply Approach (Case study: Elementary School in Malang, Surakarta & Banjarmasin City). ETIC, 2016*.
[4] D.A. Setyono, D.D. Cahyo & M. Helmy. *Measuring service capacity of public facilities based on supply aspect (Case study: elementary school in Malang City). Procedia. 2016.*
[5] SNI 03-1733-2004 tentang Pedoman Perencanaan dan Pengembangan Permukiman pada Kawasan Perkotaan.
[6] R. Puspitasari & I. Susanto. Analisis Spasial Kasus Demam Berdarah di Kabupaten Sukoharjo dengan Menggunakan Indeks Moran. Prosiding Seminar Nasional Matematika dan Pendidikan Matematika, Yogyakarta. 2011.
[7] BPS Kota Malang. Kota Malang Dalam Angka 2015 – 2016.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KAJIAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGKAT KEMISKINAN (STUDI KASUS: KOTA PADANG PANJANG)

Eliza[1)] dan Siska Yulia Defitri[2)]

[1)]Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Putra Indonesia "YPTK" Padang
[2)]Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok

email: do.elizappn@yahoo.co.id; do.riza@yahoo.co.id

Naskah diterima :8 Maret 2017 Naskah direvisi : 15 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Pembangunan Nasional suatu negara bertujuan untuk memajukan kesejahteraan umum. Kesejahteraan Umum menurut Badan Pusat Statistik (2000) merupakan kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial penduduk negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosial dan ekonominya. Kemiskinan merupakan masalah yang muncul ketika seseorang atau sekelompok orang tidak mampu mencukupi tingkat kemakmuran ekonomi yang dianggap sebagai kebutuhan minimal dari standar hidup tertentu, sehingga terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih lanjut sejauh mana dengan banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Kemiskinan tersebut, diantaranya adalah Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk khususnya di Kota Padang Panjang. Teoritisnya, Pendapatan Regional adalah nilai produksi barang-barang dan jasa-jasa yang diciptakan dalam suatu perekonomian wilayah tertentu. Sedangkan, Penduduk adalah orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus/kontinu. Berdasarkan data yang diambil dari BPS Sumatera Barat beserta beberapa data pendukung lainnya untuk menjawab dan menemukan solusi terbaik dalam mengurangi Tingkat Kemiskinan. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan metode analisis dari kajian ini yaitu RLB menggunakan Software SPSS V.22, secara menyeluruh ditunjukkan dari hasil nilai Koefisien Determinasi dan didukung oleh Pengujian Simultan diperoleh masing-masing sebesar 99,6 persen dan 0,001 signifikansinya. Sisi lain, ditunjukkan dengan Pengujian Parsial, diperoleh masing-masingnya sebesar 0,001 dan 0,015 untuk signifikansi dari Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk, artinya kedua faktor tersebut secara signifikan mempengaruhi Tingkat Kemiskinan, baik secara bersama-sama maupun terpisah khususnya di Kota Padang Panjang. Masalah kemiskinan juga masih menjadi isu startegis baik daerah maupun nasional, seharusnya ada kebijakan-kebijakan yang lebih baik agar tingkat kemiskinan mampu diminimalisir pada masa yang akan datang untuk terciptanya kesejahteraan kepada seluruh masyarakat khususnya di Kota Padang Panjang. Untuk itu, lima tahun ke depan, kemiskinan tetap menjadi isu strategis Kota Padang Panjang, yang nantinya berbagai program dan kegiatan diluncurkan untuk menekan angka kemiskinan tersebut.

Kata Kunci: *Tingkat Kemiskinan, Pendapatan Regional, Jumlah Penduduk*

PENDAHULUAN

Ukuran kemiskinan yang sering digunakan untuk melihat fenomena kemiskinan di suatu daerah adalah insiden kemiskinan. Insiden kemiskinan dapat diartikan sebagai persentase penduduk yang memiliki pendapatan (atau proksi pendapatan) kurang dari jumlah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup. Walaupun demikian, kemiskinan memiliki banyak dimensi selain dimensi pendapatan. Dimensi lain kemiskinan dapat dilihat dari peluang memperoleh kesehatan dan umur panjang, peluang memiliki pengetahuan dan keterampilan, dan lain-lain. Intinya adalah kemiskinan sangat terkait dengan sempitnya kesempatan seseorang dalam menentukan pilihan-pilihannya dalam hidup. Jika kemiskinan berkaitan dengan semakin sempitnya kesempatan yang dimiliki, maka pembangunan manusia adalah sebaliknya. Konsep pembangunan manusia adalah memperluas pilihan manusia (enlarging choice) terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan

kemampuan daya beli. Dengan hubungan yang berkebalikan tersebut, suatu daerah dengan kualitas pembangunan manusia yang baik idealnya memiliki persentase penduduk miskin yang rendah [1].

Menurut BPS [2], bahwa penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan merupakan penjumlahan dari garis kemiskinan makanan dan garis kemiskinan non makanan. Garis kemiskinan makanan adalah jumlah nilai pengeluaran dari 52 komoditi dasar makanan yang riil dikonsumsi penduduk referensi yang kemudian disetarakan dengan 2100 kilo kalori perkapita perhari. Garis kemiskinan non makanan merupakan penjumlahan nilai kebutuhan minimum dari komoditi-komoditi non makanan terpilih yang meliputi perumahan, sandang, pendidikan dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar non makanan diwakili oleh 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di pedesaan.

Sementara itu di Sumbar angka kemiskinan juga menurun. Pada Maret 2015 jumlah penduduk miskin 379.610 orang, pada September 2015 menurun menjadi 349,530 orang. Jika ditulis persentasenya, pada Maret 2015 7,31 persen dan pada September 2015 6,71 persen. Yang cukup menarik dari angka kemiskinan di Sumbar pada tahun 2015 ini, ternyata jumlah penduduk miskin di pedesaan menurun dan penduduk miskin di perkotaan mengalami sedikit kenaikan. Jumlah penduduk miskin di perkotaan Sumbar pada Maret 2015 sebesar 118.030 orang, naik sedikit menjadi 118.480. Sementara jumlah penduduk miskin di pedesaan Sumbar pada Maret 2015 sebesar 261.580 orang, turun menjadi 231.050 orang pada September 2015. Berkurangnya jumlah penduduk miskin di pedesaan Sumbar ini bisa disebabkan oleh berbagai hal. Di antaranya adalah meningkatnya pendapatan masyarakat di pedesaan yang berarti meningkatnya juga pembangunan di bidang pertanian, peternakan, dan sektor lainnya yang selama ini menjadi program kerja pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Di samping itu, kemungkinan adanya perpindahan penduduk dari desa ke kota atau merantau. Namun demikian, menurunnya jumlah penduduk miskin di Sumbar pada tahun 2015 ini perlu disyukuri dan diapresiasi.

Lebih lanjut indikator garis kemiskinan di Sumbar pada Maret 2015 sebesar Rp384.277/kapita/bulan dan pada September 2015 naik menjadi Rp403.947/kapita/bulan. Ini merupakan angka gabungan garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan. Jika dipisahkan garis kemiskinan perkotaan dan pedesaan, maka untuk perkotaan pada Maret 2015 sebesar Rp406.335/kapita/bulan dan pada September 2015 sebesar Rp423.339/kapita/bulan. Sedangkan garis kemiskinan di pedesaan pada Maret 2015 Rp369.753/kapita/bulan, dan pada September 2015 Rp391.178/kapita/bulan. Menurunnya angka kemiskinan di Sumbar pada tahun 2015 juga bisa dilihat dari serapan anggaran yang bagus. Anggaran pemerintah adalah salah satu sumber bergeraknya perekonomian di Sumbar. pembangunan infrastruktur, seperti jalan dan jembatan di berbagai tempat menyebabkan semakin lancarnya arus orang dan barang serta jasa. Pada tahun 2014 misalnya, Pemprov. Sumbar mendapatkan anugrah dari Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA) dari Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) yang diketuai oleh Kuntoro Mangkusubroto. Sumbar termasuk enam provinsi yang dianggap baik serapan anggarannya [3].

Disamping itu, APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Sumbar dari tahun ke tahun juga mengalami kenaikan. Jika pada tahun 2014 APBD sebesar Rp3,7 triliun, maka pada tahun 2015 APBD sebesar Rp4,17 triliun. Dan pada tahun 2016 APBD Sumbar naik menjadi Rp4,5 triliun.Besarnya anggaran ini dan diikuti oleh serapan anggaran yang baik adalah salah satu indikator berjalannya roda ekonomi di Sumbar dan turut mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakat. Misalnya, pembangunan jalan. Untuk jalan provinsi, target nasional 65 persen, sudah terpenuhi 87 persen. Sedangkan untuk jalan nasional ditargetkan 90 persen, sudah dilaksanakan 98 persen.

Sisi lain yang perlu dikaji lebih lanjut, dimana pada penelitian ini adalah membahas mengenai beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Kota Padang Panjang. Bahwasanya di Kota Padang Panjang angka kemiskinan saat ini terdapat tiga tingkatan, yaitu mulai dari hampir miskin, miskin, dan sangat miskin dengan jumlah keseluruhannya mencapai sekitar 2.300 lebih KK, maka dalam hal ini, variabel Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk yang dijadikan faktor yang dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap Tingkat Kemiskinan. Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, rumusan dari permasalahan tersebut adalah:

1. Bagaimana pengaruh secara bersama-sama diantara Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang.
2. Bagaimana pengaruh secara terpisah atau masing-masing diantara Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang.
3. Rumusan diatas dari penelitian yang dilakukan bertujuan untuk: Mengkaji pengaruh secara bersama-sama diantara Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan di Kota Padang Panjang.
4. Mengkaji pengaruh secara terpisah atau masing-masing diantara Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan diKota Padang Panjang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Lebih lanjut, konsep-konsep yang digunakan untuk pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan, dimana pengertian kemiskinan secara umum dipahami dengan suatu permasalahan yang dikaitkan dengan sektor ekonomi masyarakat. Menurut ahli kemiskinan merupakan kondisi dimana seseorang hidup dibawah standar kebutuhan minimum yang telah ditetapkan berdasarkan kebutuhan pokok pangan yang membuat seseorang cukup untuk bekerja dan hidup sehat berdasarkan kebutuhan beras dan gizi [4].

Secara ekonomi kemiskinan mempunyai definisi sebagai kekurangan sumber daya yang dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidupnya menjadi lebih baik. Manusia (masyarakat) dikatakan miskin karena alasan ekonomi biasanya berkaitan dengan kemiskinan yang diperoleh tidak dapat mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan yang rendah sering kali berkaitan dengan pendidikan yang juga rendah. Suryahadi dan Sumarto [5], mengemukakan orang dengan pendidikan yang lebih tinggi maka akan memberikan peluang untuk mendapatkan pekerjaan yang baik dan gaji yang tinggi. Dengan memiliki kemiskinan yang tinggi maka daya beli masyarakat akan menjadi tinggi. Berdasarkan pengertian diatas maka kemiskinan dapat terjadi dikarenakan beberapa penyebab, Menurut Sharp et al. [6], kemiskinan terjadi dikarenakan beberapa sebab yaitu:

1. Rendahnya kualitas angkatan kerja.
2. Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.
3. Rendahnya masyarakat terhadap penguasaan teknologi.
4. Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.
5. Tingginya pertumbuhan penduduk.

Nugroho & Dahuri [7], menyatakan kemiskinan merupakan kondisi absolut dan relatif yang menyebabkan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu wilayah tidak mempunyai kemampuan untuk mencukupi kebutuhan dasarnya sesuai dengan tata nilai atau norma tertentu yang berlaku di dalam masyarakat karena penyebab natural, kultural dan struktural. Kemiskinan natural disebabkan keterbatasan kualitas sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Kemiskinan struktural disebabkan secara langsung maupun tidak langsung oleh berbagai kebijakan, peraturan, keputusan dalam pembangunan, kemiskinan ini umunya dapat dikenali dari transformasi ekonomi yang berjalan tidak seimbang. Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang lebih banyak disebabkan sikap individu dalam masyarakat yang mencerminkan gaya hidup, perilaku, atau budaya yang menjebak dirinya dalam kemiskinan. Dengan kata lain seseorang dikatakan miskin jika tingkat pendapatannya tidak memungkinkan orang tersebut untuk mentaati tata nilai dan norma dalam masyarakatnya.

Terdapat dua cara untuk mengukur tingkat kemiskinan, pertama pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang bersifat mutlak yang bermuara atau berwujud sebagai garis, titik, atau batas kemiskinan. Seseorang atau masyarakat yang tidak mampu keluar dari ukuran-ukuran tersebut dikelompokan sebagai miskin. Ukurannya antara lain berupa tingkat pendapatan, pengeluaran atau konsumsi, atau kalori seseorang atau keluarga dalam satu waktu tertentu dan hal-hal yang disetarakan dengan ukuran tersebut. Pendekatan ini lebih mudah diterapkan karena hanya membandingkan saja dengan batasan yang dikehendaki [7]. Kemiskinan ini dapat diartikan pula sebagai suatu keadaan dimana tingkat pendapatan dari suatu orang tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokoknya, seperti pangan, sandang, pemukinan, kesehatan dan pendidikan. Besarnya atau dimensi masalah kemiskinan absolut tercermin dari jumlah penduduk yang tingkat pendapatan atau tingkat konsumsinya berada di bawah “tingkat minimum” yang telah ditetapkan [8].

Kedua, pendekatan yang memandang kemiskinan dalam suatu ukuran yang dipengaruhi ukuran-ukuran lainnya yang berhubungan dengan proporsi atau distribusi. Misalnya garis kemiskinan adalah 20% pendapatan terendah, median dari distribusi pendapatan dan lain-lain [7]. Berdasarkan konsep kemiskinan ini garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila sekiranya seluruh tingkat kehidupan masyarakat mengalami perubahan. Hal ini jelas merupakan perbaikan dari konsep kemiskinan mutlak/absolut. Kelemahan konsep ini justru terletak pada sifatnya yang dinamis. Secara implisit akan terlihat bahwa “kemungkinan kemiskina akan selalu berada di antara kita”. Dalam setiap waktu akan selalu terdapat sejumlah penduduk dari total penduduk yang dapat dikategorikan sebagai miskin. Sehingga berbeda dengan konsep kemiskinan absolut jumlah orang miskin tidak mungkin habis sepanjang zaman [9].

Kajian Kemiskinan lainnya:

1. Kemiskinan adalah ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak [10]
2. Kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada di bawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan, yang disebut garis kemiskinan *(poverty line*) atau batas kemiskinan *(poverty threshold*). Garis kemiskinan adalah sejumlah rupiah yang diperlukan oleh setiap individu untuk dapat membayar kebutuhan makanan setara 2100 kilo kalori per orang per hari dan kebutuhan non-

makanan yang terdiri dari perumahan, pakaian, kesehatan, pendidikan, transportasi, serta aneka barang dan jasa lainnya [10].

3. Kemiskinan pada umumnya didefinisikan dari segi pendapatan dalam bentuk uang ditambah dengan keuntungan-keuntunan non-material yang diterima oleh seseorang. Secara luas kemiskinan meliputi kekurangan atau tidak memiliki pendidikan, keadaan kesehatan yang buruk, kekurangan transportasi yang dibutuhkan oleh masyarakat [10].
4. Fakir miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan atau orang yang mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak memenuhi kebutuhan pokok yang layak bagi kemanusiaan [10].
5. Kemiskinan adalah ketidaksamaan kesempatan untuk mengakumulasikan basis kekuasaan sosial. Basis kekuasaan sosial meliputi:
    a. modal produktif atau asset (tanah, perumahan, alat produksi, kesehatan),
    b. sumber keuangan (pekerjaan, kredit),
    c. organisasi sosial dan politik yang dapat digunakan untuk mencapai kepentingan bersama (koperasi, partai politik, organisasi sosial),
    d. jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang, dan jasa,
    e. pengetahuan dan keterampilan, dan
    (f) informasi yang berguna untuk kemajuan hidup [11].

Dimensi Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena yang berwayuh wajah. David Cox [12], membagi kemiskinan kedalam beberapa dimensi:

1. Kemiskinan yang diakibatkan globalisasi. Globalisasi menghasilkan pemenang dan pengkalah. Pemenang umumnya adalah negara-negara maju. Sedangkan negara-negara berkembang seringkali semakin terpinggirkan oleh persaingan dan pasar bebas yang merupakan prasyarat globalisasi
2. Kemiskinan yang berkaitan dengan pembangunan. Kemiskinan subsisten (kemiskinan akibat rendahnya pembangunan), kemiskinan pedesaan (kemiskinan akibat peminggiran pedesaan dalam proses pembangunan), kemiskinan perkotaan (kemiskinan yang sebabkan oleh hakekat dan kecepatan pertumbuhan perkotaan).
3. Kemiskinan sosial. Kemiskinan yang dialami oleh perempuan, anak-anak, dan kelompok minoritas.
4. Kemiskinan konsekuensial. Kemiskinan yang terjadi akibat kejadian-kejadian lain atau faktor-faktor eksternal di luar si miskin, seperti konflik, bencana alam, kerusakan lingkungan, dan tingginya jumlah penduduk.

Menurut SMERU (2001) dalam Suharto, dkk [12] kemiskinan memiliki berbagai dimensi:

1. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang dan papan)
2. Tidak adanya akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitasi, air bersih dan transportasi).
3. Tidak adanya jaminan masa depan (karena tiadanya investasi untuk pendidikan dan keluarga).
4. Kerentanan terhadap goncangan yang bersifat individual maupun massal.
5. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia dan keterbatasan sumber alam.
6. Tidak dilibatkannya dalam kegiatan sosial masyarakat.
7. Tidak adanya akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang berkesinambungan
8. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental.
9. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak telantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal dan terpencil) [12].

Menurut Winardi [13], Dimensi Kemiskinan terdiri atas 2 (dua) bagian, yaitu dalam Dimensi Pendapatan, adalah kemiskinan yang diderita akibat rendahnya pendapatan yang diterima. Sedangkan, Kemiskinan Non Pendapatan adalah dicirikan dengan adanya ketidakmampuan, ketiadaan harapan, dan ketidakterwakilkan, serta tidak adanya kebebasan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Hubungan Tingkat Kemiskinan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Syaratnya adalah hasil dari pertumbuhan ekonomi tersebut menyebar disetiap golongan masyarakat, termasuk di golongan penduduk miskin [14].

Hubungan yang negatif antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat kemiskinan. Hubungan ini menunjukan pentingnya mempercepat pertumbuhan ekonomi untuk menurunkan tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator untuk melihat keberhasilan pembangunan dan merupakan syarat keharusan bagi pengurangan tingkat kemiskinan. Adapun syarat kecukupannya ialah bahwa pertumbuhan ekonomi tersebut efektif dalam mengurangi tingkat kemiskinan. Artinya, pertumbuhan tersebut hendaklah menyebar disetiap golongan pendapatan, termasuk di golongan penduduk miskin. Secara langsung, hal ini berarti pertumbuhan itu perlu dipastikan terjadi di sektor-sektor dimana penduduk miskin bekerja yaitu sektor pertanian atau sektor yang padat karya. Adapun secara tidak langsung, diperlukan pemerintah yang cukup efektif mendistribusikan manfaat pertumbuhan yang mungkin didapatkan dari sektor modern, seperti: jasa yang padat modal.

Faktor Penyebab Peningkatan Ketimpangan Distribusi Pendapatan

Meningkatnya angka kemiskinan akibat rendahnya laju pertumbuhan ekonomi dan rendahnya pendapatan per kapita. Turunnya kontribusi sektor pertanian dan industri padat karya dengan indikasi turunnya kontribusi sektor pertanian, rendahnya pendapatan petani, turunnya daya beli bagi petani, usaha kecil dan rumah tangga. Kurang memadainya sektor informal dalam memberikan hasil dan pendapatan bagi pelaku ekonomi sektor informal akibat biaya modal dan produski serta rendahnya permintaan akibat turunnya pendapatan riil masyarakat karena inflasi. Adanya polarisasi perolehan pendapatan antara kelompok masyarakat berpendapatan terendah seperti petani, buruh dan pegawai kecil serta pelaku sektor informal dengan kelompok masyarakat berpendapatan tertinggi seperti pengusaha, wiraswastawan, dan profesional, sehingga kondisi ini meningkatkan ketimpangan distribusi pendapatan.

Kenaikan biaya produksi akibat kenaikan harga BBM sejak tahun 2005 dan inflasi yang terjadi berdampak pada rendahnya daya beli masyarakat dan pengeluaran investasi sehingga membuat iklim usaha yang kurang menguntungkan terutama bagi usaha kecil dan rumah tangga, petani dan sektor informal. Turunnys pendapatan relatif bagi kelompok masyarakat berpendapatan terendah dan tingginya pendapatan relatif bagi masyarakat berpendapatan tertinggi membuat ketimpangan distribusi pendapatan meningkat dengan indikasi meningkatnya Koefisien Gini.

Cara-Cara Penanggulangan Kemiskinan

1. Pemerintah harus mengurangi rasio ketergantungan penduduk.

Peningkatan rasio ketergantungan salah satunya dapat terjadi karena ledakan penduduk yang tidak terkendali. Ledakan penduduk akan menimbulkan rasio ketergantungan anak. Rasio ketergantungan anak merupakan persentase penduduk usia belum produktif (usia 0-14 tahun) terhadap penduduk usia peoduktif (usia 14-64 tahun). Rasio ketergantungan anak digunakan untuk menunjukan besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap anak-anak di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu penurunan rasio ketergantungan anak dapat dilakukan dengan mengendalikan tingkat kelahiran, misalnya melalui intensifikasi program KB, intensifikasi perawatan ibu hamil dan menyusui, pengaturan kelahiran, pengaturan batas usia menikah, dan lain-lain.

Peningkatan rasio ketergantungan juga dapat disebabkan karena ledakan penduduk usia lanjut (usia 65 tahun keatas). Ledakan penduduk lanjut usia akan menimbulkan rasio ketergantungan lanjut usia. Rasio ketergantungan lanjut usia merupakan persentase penduduk usia lanjut (usia 65 tahun ke atas) terhadap penduduk usia produktif (usia 14-64 tahun). Indikator ini digunakan untuk menggambarkan besarnya beban tanggungan penduduk usia produktif terhadap pendudukan lanjut usia di suatu daerah pada suatu waktu tertentu. Penurunan rasio ketergantungan lanjut usia dapat dilakukan dengan "menjaga" agar usia produktif penduduk semakin panjang. Tindakan yang dilakukan misalnya dengan memberikan keterampilan kepada penduduk, peningkatan kesehatan penduduk, perbaikan gizi sejak usia dini, dll. Penurunan rasio ketergantungan ini bersifat jangka panjang.

2. Pemerintah harus meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat.

Upaya peningkatan pendapatan per kapita masyarakat harus diikuti dengan pemerataan pendapatan. Karena pendapatan tanpa pemerataan justru akan menimbulkan ketimpangan. Upaya peningkatan pendapatan

per kapita masyarakat dapat dilakukan misalnya dengan perluasan lapangan kerja, pemberian bantuan usaha, perbaikan aturan pengupahan, dan lain-lain.

3. Pemerintah harus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi dapat dilakukan misalnya dengan perbaikan sarana dan prasarana usaha, pemberian bantuan usaha, penjaminan kepastian usaha, dll.

4. Pemerintahan harus meningkatkan persentase tenaga kerja di sektor pertanian (TKP).

Peningkatan persentase tenaga kerja di sektor pertanian dilakukan dengan cara membuat sektor pertanian dapat menjadi tempat untuk menggantungkan hidup sehingga sektor tersebut menjadi lebih menarik untuk dimasuki pekerja/calon pekerja. Cara tersebut dapat ditempuh dengan caraintensifikasi sektor pertanian, ekstensifikasi sektor pertanian, peningkatan/perbaikan nilai tukar petani, melibatkan petani dalam bisnis melalui kegiatan agro industri, dll. Pemerintah harus mampu merubah image bahwa sektor pertanian merupakan sektor tradisional yang kental dengan istilah produktifitas tenaga kerjanya rendah, upah rendah, sumber kemiskinan, konsumsi tenaga kerja sektor-sektor pertanian lebih rendah dibandingkan konsumsi tenaga kerja sektor industri, sektor subsisten yang kelebihan penduduk, dll. Sektor pertanian harus diciptakan lebih "sexy" agar menarik untuk dimasuki dan layak dijadikan sebagai gantungan hidup. Pemerintah harus melakukan pembangunan sektor pertanian melalui revitalisasi pertanian, perikanan, dan kehutanan serta pembangunan masyarakat pedesaan sebagai pijakan untuk membawa masyarakat Indonesia keluar dari permasalahan kemiskinan.

5. Pemerintah harus meningkatkan persentase tenaga kerja di sektor industri (TKI).

Selama ini sektor industri dianggap lebih menarik di banding sektor pertanian. Sektor industri juga lebih memberikan jaminan pendapatan per kapita yang lebih tinggi. Sektor industri juga lebih banyak menghasilkan jumlah konsumsi yang lebih tinggi. Namun serapan tenaga kerja sektor industri lebih kecil dibandingkan sektor pertanian. Salah satu penyebabnya adalah sektor ini memerlukan persyaratan khusus yaitu keterampilan (skill) bagi tenaga kerjanya. Oleh karena itu upaya peningkatan persentase tenaga kerja di sektor industri dapat dilakukan dengan cara intensifikasi balai latihan kerja (BLK), intensifikasi sekolah-sekolah yang secara nyata memiliki kompetensi keterampilan bagi lulusan (sekolah kejuruan), pendidikan vokasi, dll. Jika calon tenaga kerja ini dibekali dengan skill tertentu, maka diharapkan tenaga kerja akan lebih mudah diserap oleh dunia industri.

METODE PENELITIAN

Objek Penelitian

Penelitian ini, penulis memilih objek penelitian adalah Kota Padang Panjang. Untuk mendapatkan data yaitu melalui BPS (Badan Pusat Statistik) dan literatur-literatur lainnya yang berkaitan dengan Kajian Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemiskinan (Studi Kasus: Kota Padang Panjang.

Variabel Penelitian dan Defenisi Operasional

Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Variabel Dependen atau Terikat (Y)

Sebagai Variabel Dependen dalam penelitian adalah Tingkat Kemiskinan dengan Studi Kasus: Kota Padang Panjang. Tingkat Kemiskinan yang dimaksud adalah suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri dengan taraf kehidupan yang dimiliki dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya untuk memenuhi kebutuhannya.

2. Variabel Independen (X_1 dan X_2)

Dalam hal ini yang digunakan sebagai Variabel Independen adalah Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk.Pendapatan Regional adalah produk domestik regional neto atas dasar biaya faktor dikurangi dengan pendapatan yang mengalir keluar dan ditambah dengan pendapatan yang mengalir ke dalam, maka hasilnya akan menjadi Produk Regional Neto yang merupakan jumlah pendapatan yang benar-benar diterima. Jumlah Penduduk adalah jumlah penduduk yang berdomisili di Indonesia khususnya di Kota Padang Panjang dan yang sudah diakui secara sah sebagai warga negara dengan satuan / ukuran ribu jiwa.

Jenis Data

Sebagai jenis data dari penelitian yang penulis lakukan adalah data sekunder (*secondary data*) yaitu data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah ada yang dapat diperoleh dari BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Sumatera Barat dan Kota Padang Panjang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Metode Analisis

Untuk mengkaji pengaruh Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan Kota Padang Panjang dengan model regresi berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 \quad \text{.....(1)}$$

dimana:

Y = Tingkat Kemiskinan
X_1 = Pendapatan Regional
X_2 = Jumlah Penduduk
A = Konstanta
b_1, b_2 = Koefisien Regresi untuk masing-masing Variabel Independen (Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk

Pengujian Hipotesis

1. Pengujian t (t-test)

Yaitu untuk menguji hubungan regresi secara terpisah atau masing-masing. Pengujian dilakukan untuk melihat keberartian dari masing-masing variabel secara terpisah (parsial) terhadap variabel dependen dengan ketentuan hipotesis [15], sebagai berikut :

$$t = \frac{\beta n}{s\beta n} \quad \text{.....(2)}$$

dimana:

t = Nilai t yang dihitung
$s\beta n$ = Standar Error masing-masing Variabel
βn = Koefisien Regresi masing-masing Variabel Untuk pengujian ini digunakan hipotesis, sebagai berikut:
Ho : βi = 0, dimana: (tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya / koefisien regresi tidak signifikan)
Ha : βi ≠ 0, dimana : (ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebasnya/koefisien regresi signifikan)

Pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai-nilai t-hitung yang didapat dari Tabel *Coefficient* dengan tingkat kesalahan sebesar 5% (α = 0,05) dan derajat kebebasan atau *degree of freedom (*df) sebesar (n-k) dengan ketentuan pengambilan keputusan sebagai berikut:

- Jika t-hitung < t-tabel, maka Ho diterima dan Ha ditolak (tidak signifikan)
- Jika t-hitung > t-tabel maka Ho ditolak dan Ha diterima (signifikan)

2. Pengujian F (F-test)

Yaitu pengujian yang dilakukan dengan membandingkan nilai F-hitung dengan F-tabel. Pengujian ini bertujuan untuk melihat ada tidaknya pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel tidak bebas atau pengujian secara serentak. Nilai F-test atau F-hitung diperoleh dengan menggunakan model [15], sebagai berikut:

$$F = \frac{R^2 / k - 1}{(1 - R^2)/(n - tk)} \quad \text{.....(3)}$$

dimana:

F = Nilai F yang dihitung
R^2= Koefisien Determinasi
k = Jumlah Variabel
n = Jumlah Tahun Pengamatan

Nilai F-hitung yang dihasilkan dari perhitungan tersebut di atas (berdasarkan Tabel *ANOVA*) dengan tingkat kesalahan sebesar 5 persen dan derajat kebebasan atau *degree of freedom* (df) sebesar (n-k), (k-l): df_1 = (k-l), df_2 = (n-k) dengan ketentuan pengambilan keputusan, sebagai berikut:

- Jika F-hitung < F-tabel, maka hipotesa nol (Ho) diterima dan hipotesa alternatif (Ha) ditolak, berarti variabel bebas tidak mempunyai pengaruh atau tidak signifikan terhadap variabel terikat.

ISBN : 978-602-73463-1-4

- Jika F-hitung > F-tabel, maka Ho ditolak dan Ha diterima yang berarti variabel bebas mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap variabel terikat.

3. Pengujian R^2

Pengujian R^2 atau koefisien determinasi berguna untuk melihat seberapa besar proporsi sumbangan seluruh variabel bebas terhadap naik turunnya nilai variabel tidak bebas, yang dilihat dari tabel *Model Summary*

Hasil pengujian koefisien determinasi mencerminkan pengukuran:

- Merupakan ketetapan suatu garis regresi yang ditetapkan terhadap sekelompok data hasil observasi (*goodness of fit*), dimana makin besar nilai R^2 makin baik hasil suatu garis regresi, dan sebaliknya makin kecil nilai R^2 makin buruk hasil garis regresi. Nilai R^2 adalah $0 \leq R^2 \leq 1$. Jika $R^2 = 0$ atau mendekati nol, maka antara variabel bebas dengan variabel tidak bebas tidak saling berhubungan dan sebaliknya apabila $R^2 = 1$, maka variabel bebas dan variabel tidak bebasnya berhubungan sempurna.
- Merupakan pengukuran besarnya proporsi dari jumlah variasi dari variabel tidak bebas yang diterangkan oleh model regresi atau mengukur besarnya sumbangan dari variabel bebas terhadap naik turunnya variabel tidak bebas tersebut. Oleh karena itu, dalam penelitian ini jumlah variabel independen lebih dari dua (2), maka digunakan *Adjusted R square*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembuktikan adanya pengaruh variabel bebas yaitu Pendapatan Regional (X_1), Jumlah Penduduk (X_2), terhadap Tingkat Kemiskinan dengan Studi Kasus Kota Padang Panjang adalah dilakukan dengan perhitungan regresi linear berganda dan diolah dengan program SPSS versi 22. sesuai dengan metodologi yang digunakan, maka dapat dikaji pengaruh variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel tidak bebas (Y), baik secara individu (parsial) dengan menggunakan uji t (t-test), maupun secara keseluruhan dengan menggunakan uji F (F-test) dan seberapa besar sumbangan kontribusi variabel bebas (X_1, X_2) terhadap variabel tidak bebas Y digunakan uji R^2 (koefisien determinasi). Hal tersebut ditunjukkan pada tabel dibawah ini (Tabel.1)

Tabel.1 tersebut menunjukkan bahwasanya variansi naik turunnya pengaruh Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk terhadap Tingkat Kemiskinan yaitu sebesar 99,6 persen, sedangkan sisanya 0,4 persen merupakan faktor lain dil uar penelitian ini. Model yang dimaksud adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2$$
$$= -1{,}684 + 39{,}636\ X_1 + 12025{,}852X_2$$

dimana:

- Nilai Koefisien Regresi (X1) sebesar (39,636), ini berarti menyatakan bahwa Pendapatan Regional berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan.
- Nilai Koefisien Regresi (X2) sebesar (12025,852), ini berarti menyatakan bahwa Jumlah Penduduk juga berpengaruh positif terhadap Tingkat Kemiskinan, dengan asumsi faktor lain dianggap konstan

Artinya secara umum bahwasanya dengan meningkatnya Pendapatan Regional suatu daerah khususnya Kota Padang Panjang justru akan mengurangi Tingkat Kemiskinan di kota tersebut.

Tabel 1. Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square
1	0.999[a]	0.998	0.996
a. Predictors: (Constant), X2, X1			
b. Dependent Variable: Y			

Sumber:Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS V.22

Lebih lanjut pembahasan mengenai untuk pengujian simultan (F-hitung) dapat ditunjukkan pada Tabel.2 dibawah ini, yaitu singfikansi untuk F-hitung sebesar 0,001, ini berarti secara bersama-sama Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk mempunyai pengaruh dan signifikan terhadap Tingkat Kemiskinan.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 2. ANOVA

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig
Regressioon	4.298E9	2	2.149E9	3.473E5	.001[a]
Residual	6188.965	1	6188.965		
Total	4.298E9	3			

Predictors : (Constant), X2, X1
Dependent Variable: Y

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	4.298E9	2	2.149E9	3.473E5	.001[a]
	Residual	6188.965	1	6188.965		
	Total	4.298E9	3			

a. Predictors : (Constant), X2, X1
b. Dependent Variable: Y
Sumber: Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS V.22

Pengujian secara terpisah atau masing-masing diantara Pendapatan Regional dan juga Jumlah Penduduk ditunjukkan pada Tabel.3 dibawah ini. Hal ini dapat diartikan bahwasanya secara terpisah Pendapatan Regional berpengaruh signifikan sebesar 0,001, sedangkan Jumlah Penduduk berpengaruh signifikan sebesar 0,015. Dikatakan kedua variabel bebas tersebut berpengaruh signifikan yaitu masing-masing signifikansinya memiliki nilai yang kecil dari tingkat kesalahan atau alpha sebesar 0,05.

Tabel 3. Coefficient

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.684E6	3352.109		-502.411	.001
	X1	39.636	.049	1.014	809.791	.001
	X2	12025.852	283.887	.053	42.361	.015
a. Dependent Variable: Y						

Sumber: Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS V.22

Kajian normalitas dari penelitian ini ditunjukkan juga pada Gambar.1 dibawah ini (Normal P-Plots of Regression Standardized Residual). Gambar.1 memperlihatkan dari hasil olahan data dengan variabel bebasnya yaitu Pendapatan Regional dan Jumlah Penduduk, sedangkan sebagai varibel tidak bebasnya yaitu Tingkat Kemiskinan, dimana titik-titik yang terdapat pada Gambar.1 mendekati garis diagonal, ini berarti data dari ketiga variabel memiliki hubungan yang sangat kuat diantara satu dengan yang lainnya (normal).

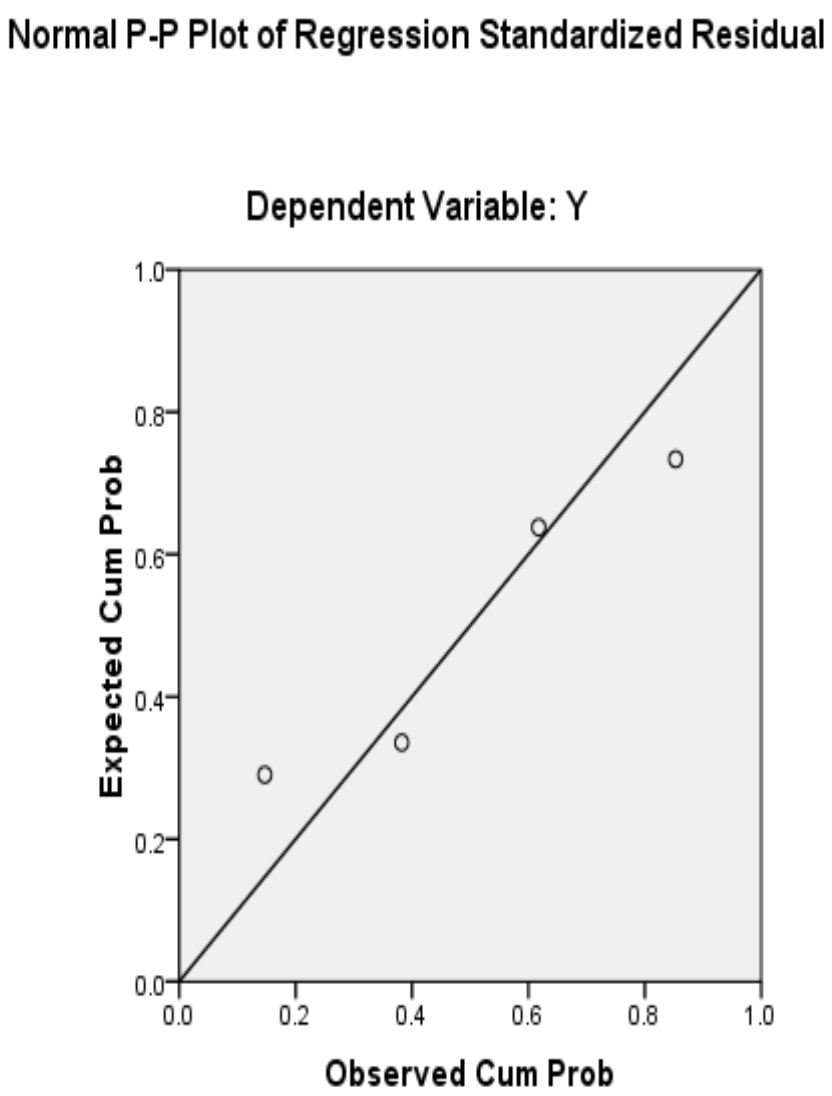

Gambar.1 Sumber: Hasil Olahan Data Menggunakan SPSS V.22

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwasanya dikaji lebih lanjut dari nilai koefisien determinasi diantara pengaruh pendapatan regional dan jumlah penduduk adalah sebesar 99,9 persen, sedangkan sisanya sebesar 0,1 persen merupakan faktor lain di luar model penelitian ini.
2. Pengujian secara bersama-sama (simultan) juga berpengaruh positif dan signifikan, hal ini ditunjukkan dari tingkat signifikansi sebesar 0,001 yang apabila dibandingan dengan tingkat kesalahan 0,05, maka 0,001 memiliki nilai lebih kecil daripada 0,05.
3. Begitu juga halnya dengan pengujian secara terpisah atau masing-masing (parsial) yang ditunjukkan dari tingkat signifikansi untuk variabel bebas pendapatan regional dan jumlah penduduk yang apabila dibandingkan dengan tingkat kesalah 0,05 juga memiliki nilai yang lebih kecil, yaitu 0,001 dan 0,015.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, terdapat bebeerapa saran untuk masa yang akan datang bagi Kota Padang Panjang, diantaranya:

1. Pemerintah diminta mampu membuat kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk dapat mendorong pencapaian terhadap pendapatan regional suatu daerah khususnya Kota Padang Panjang agar dapat mengurangi tingkat kemiskinan.
2. Hasil penelitian tersebut diatas dapat dijelaskan bahwasanya pendapatan regional dan jumlah penduduk berpengaruh signifikan dalam mengurangi tingkat kemisikinan khususnya Kota Padang Panjang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3. Dalam mengurangi kemiskinan, pemerintah Kota Padang Panjang hendaknya dapat berupaya meningkatkan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, serta Teknologi, sehingga tingkat kemiskinan dapat diminimalisir secara terarah pada masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Yoga P, "Analisis Pengaruh PDRB, Pengangguran, Pendidikan dan Kesehatan terhadapa Kemisikinan di Jawa Tengah Tahun 2004 – 2009. Skripsi S.1, Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Tahun 2012

[2] Badan Pusat Statistik, "Statistik Kesejahteraan Rakyat", Jakarta, 2010

[3] Badan Pusat Statistik dalam Berita Resmi Statistik (BRS) No.05/01 Th.XIX, 4 Januari 2016 "Profil Kemiskinan di Indonesia", September 2015

[4] Sajogyo, "Kemiskinan dan Indikator Kemiskinan", Penerbit Gramedia, Jakarta, 2000

[5] Suryahadi, A dan Sumarto, "Memahami Kemiskinan Kronis dan Kemiskinan Sementara di Indonesia" 2001, SMERU Newsletter, No.03. Mei – Juni 2001

[6] Sharp, A.M., Register C.A., Grimes, P.W, Economics Socila Issues 14th Edition, New York: Irwin/McGraw-Hill, 2000

[7] Nugroho, dan Rokhmin Dahuri, "Pembangunan Wilayah – Perspektif Ekonomi, Sosial dan Lingkungan, Edisi 5, Cetakan 4, Penerbit Erlangga, Jakarta, 2004

[8] Wie, Thee Kian, "Pembangunan Ekonomi dan Pemerataan: Beberapa Pendekatan Alternatif", LP3ES, Jakarta, 1983

[9] Hendra Esmara, "Perencanaan dan Pembangunan di Indonesia", Penerbit PT. Gramedia, Jakarta, 1986

[10] Badan Pusat Statistik dan Depsos/Departemen Sosial "Penduduk Fakir Miskin Indonesia", Jakarta, 2002 http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/PROS_2008_MAK3.pdf\

[11] Suharto, Edi dkk, "Kemiskinan dan Keberfungsian Sosial: Studi Kasus Rumah Tangga Miskin di Indonesia", Bandung: STKS Press, 2004

[12] David Cox (2004), "Outline of Presentation on Poverty Alleviation Programs in the Asia-Pacific Region" Makalah yang disampaikan pada International Seminar on Curriculum Development for Social Work Education in Indonesia, Bandung: Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial, 2 Maret 2004

[13] Winardi, *"Ekonomi Pembangunan"*, Penerbit, Gramedia, Jakarta, 2010

[14] Hermanto, S dan Dwi, W, "Dampak Pertumbunahan Ekonomi terhadap Penurunan Jumlah Penduduk Miskin, 2007

[15] Damodar N. Gujarati, "*Dasar-dasar Ekonometrika",* Penerbit Erlangga, Jakarta, 2006

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

TRANSFORMASI *TECHNOPARK* MENUJU *TECHNOPOLIS* : SEBUAH PENGALAMAN PENGEMBANGAN TECHNOPARK DI INDONESIA

Ery Supriyadi Rustidja[1)] dan Tuti Karyani [2)]

[1)]Institut Koperasi Indonesia (IKOPIN)

[2)]Faperta UNPAD

Email: erysupriyadi354@gmail.com

Naskah diterima :4 Maret 2017 Naskah direvisi : 18 Maret 2017 Disetujui terbit : 23 Maret 2017

ABSTRAK

Salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia dilakukan dengan pemerataan pemanfaatan teknologi pada beberapa daerah melalui pengembangan science park dan technopark sebagaimana tertuang pada RPJMN tahun 2015-2019. Technopark berfungsi sebagai center of excellence yang melibatkan kerjasama dunia usaha, pemerintah, lembaga penelitian maupun perguruan tinggi, yang akan mempercepat industrialisasi. Selain menjadi motor penggerak ekonomi, kawasan technopark menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekitarnya, dan sebagai pendorong daya saing komoditas unggulan daerah. Manajemen inovasi technopark berkorelasi kuat dengan pengembangan regional. Fenomena technopolis secara inherent mendorong penguatan ekonomi berbasis teknologi sekitar kawasan technopark dan sekaligus menghela kawasan yang semula perdesaan menjadi kawasan perkotaan. Isyu strategisnya adalah bagaimana proses transformasi technopark-technopolis. Sementara itu, tak dapat dipungkiri bahwa integrasi antara strategi manajemen inovasi dengan pengembangan kawasan technopark secara konseptual dan implementasinya menjadi kebutuhan. Oleh karenanya, perlu upaya merumuskan masterplan technopark menuju technopolis yang mensinergikan kepentingan industrialisasi, ekonomi wilayah, dan keterkaitan desa kota. Tulisan ini diturunkan dari riset partisipatif dan studi pustaka. Data dan informasi dikumpulkan dari hasil beberapa kegiatan focus group discussion dan workshop pada penyusunan masterplan technopark. Kerjasama multipihak pada kawasan technopark membentuk nilai keterkaitan, nilai percepatan, dan valuasi inovasi melalui clustering dan critical mass dari para aktor peneliti, akademisi, dan perusahaan.Temuan, inovasi, dan iptek yang berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga riset bersinergi dengan sediaan rantai nilai (value chain) dan rantai pasok (supply chain) dari dunia usaha. Kerjasama ini membangun jejaring dan kohesivitas antar multipihak yang tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas rantai nilai dan efisiensi rantai pasokan komoditas unggulan daerah, serta perolehan economic return yang memadai.

***Kata Kunci** :cooperation, technopark, technopolis*

PENDAHULUAN

Technopark dan *science park* di beberapa kabupaten/kota di setiap provinsi Indonesia menjadi salah satu bagian kebijakan pembangunan Indonesia yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019. Technopark ini memiliki fungsi sebagai *center of excellence* (kerjasama dunia usaha – Pemerintah – perguruan tinggi) yang akan memperkuat daya saing industri sesuai dengan potensinya. Selain menjadi motor penggerak pengembangan wilayah, kawasan technopark diharapkan mampu menjadi pusat dan pendorong pertumbuhan ekonomi bagi kawasan di sekitarnya serta memiliki daya saing di dalam dan luar negeri. Pengembangan produk unggulan kompetitif yang diikuti oleh dukungan kapabilitas sumber daya manusia, ketersediaan riset dan teknologi, informasi menjadi instrumen kunci mewujudkan technopark. Pertanyaannya adalah sejauhmana proses penyiapan technopark dan peran para pemangku kepentingan dalam merancangbangun technopark hingga menciptakan integrasi industri dan munculnya pusat pertumbuhan kawasan.

Rencana pengembangan technopark secara inherent diharapkan mampu mendorong penguatan kawasan berbasis teknologi dan pengembangan produk unggulan daerah, sehingga keberadaan technopark terintegrasi secara spasial, sosial ekonomi, dan sosial budaya dari kepentingan lokal dengan konteks global.Sinergi kepentingan pengembangan wilayah dengan sistem inovasi wilayah dan pengembangan sektoral menjadi satu kesatuan dalam pengembangan technopark menuju technopolis. Dengan demikian pertanyaan mendasar adalah bagaimana dapat terwujud. Tulisan ini mencoba membahas dinamika yang muncul dari rencana pengembangan technopark di Indonesia, yang dielaborasi berdasarkan *participatory reseach* dan studi literatur dari pengalaman technopark dan technopolis.

Dalam terminologi umum, *technopark* merupakan sebuah kawasan yang dikelola secara professional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui penciptaan dan peningkatan ekosistem yang mendukung inovasi untuk peningkatan daya saing dari industri-industri dan institusi-institusi yang berada naungannya. Keberadaan technopark bertujuan untuk merangsang dan mengelola arus pengetahuan dan teknologi di universitas, lembaga litbang, dan industri yang berada di lingkungannya; memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi melalui inkubasi bisnis dan proses *spinoff*, dan menyediakan layanan peningkatan nilai tambah lainnya, melalui penyediaan ruang dan fasilitas berkualitas tinggi pendukung.

Pengembangan technopark terdiri dari tiga pilar utama yaitu: inovator, kepakaran teknologi, dan temuan baru (*Best Practices*). Ketiga komponen input tersebut selanjutnya berinteraksi dalam suatu proses atau aktivitas di technopark baik dalam proses secara serial (*sequential*) maupun hanya proses tunggal, sehingga menghasilkan berbagai bentuk output antara lain: usaha kecil yang dilayani, teknologi baru yang didisseminasikan, hingga wirausaha baru berbasis inovasi yang diluluskan. Secara konseptual, technopark dapat merangsang dan mengelola arus pengetahuan dan teknologi di universitas, lembaga litbang, dan industri yang berada di lingkungannya, maka keberadaan Techno Park diharapkan dapat memfasilitasi penciptaan dan pertumbuhan perusahaan berbasis inovasi dan menyediakan layanan peningkatan nilai tambah lainnya. Secara praktis, *technopark* melakukan inkubasi bisnis dan proses *spin off*, serta penyediaan ruang dan fasilitas berkualitas tinggi yang mendukung fungsi technopark sebagai lembaga inovasi wllayah.

Pengembangan teknologi tetap memerlukan peran pemerintah untuk mendukung universitas mengembangkan UKM berbasis teknologi tinggi, jaringan riset, dan komersialisasi temuan/hasil riset. Dengan kata lain dukungan inovasi membutuhkan dan menempatkan pemerintah sebagai penggerak utamanya [1]. Faktor kunci keberhasilan universitas dalam mengembangkan technopolis adalah mampu menarik investasi dari luar dan mengintegrasikannya dengan ekonomi lokal [2]. Selain itu, technopolis harus mampu melibatkan investor dari luar dalam pendidikan dan penelitian, kebijakan investasi yang berorientasi implementatif. Menyatakan dalam mode produksi pengetahuan yang menyelesaikan masalah dalam konteks aplikasi, transdisipliner, heterogen, heterarchial, dan penjaminan kualitas lebih pada akuntabilitas sosial [3].

Reid etal [4], menyatakan bahwa keefektifan aliran penggunaan hasil temuan/teknologi kepada penggunanya terutama para pemuda, sangat ditentukan oleh kemampuan mengidentifikasi dan memanifestasikan temuan melalui proses *mentoring* dan *ambasador* penyajiannya dalam suatu pendidikan dan pelatihan.Hasil adopsi akan mempengaruhi jumlah sain yang dapat dipilih dan menentukan tingkat karitas yang dicapai oleh pengguna teknologi itu. Sedikitnya terdapat 6 indikasi faktor kunci yang dapat ditawarkan dari keberadaan suatu technopolis, yaitu ekosistem nilai industri dan pembangunan, insentif fiskal, layanan, bangkitan baru dari universitas, jaminan kualitas, bangunan fisik bagi para pakar.Kategori keberhasilan dari technopark-technopolis dapat dinilai dari kualitas riset, cakupan sosial ekonomi yang dipengaruhinya, serta keberlanjutannya dapat dilihat dari kombinasi riset, inovasi, dan masyarakat dengan hasil, indikator sistemik, dan keluaran/dampak [5]. Lebih spesifik, Stupar [6]. menyatakan bahwa *technopolis* adalah kota teknologi, kota untuk teknologi, kota oleh teknologi, kota dalam teknologi, kota melalui teknologi, dan kota fitur teknologi. Hal sejalan dengan pemikiran bahwa *technopolis* adalah kota cerdas.

Secara konseptual technopark merupakan wadah untuk mengkoneksikan dan menggabungkan kepentingan dunia industri, perguruan tinggi, lembaga penelitian, pusat pendidikan dan pelatihan, kewirausahaan, perbankan, pemerintah daerah dalam satu lokasi yang memungkinkan aliran informasi dan teknologi lebih efisien dan cepat. Pergeseran fenomena technopark menuju technopolis menjadi titik kritis, manakala pengembangan technopark berimbas pada pengembangan wilayah yang membentuk kawasan perkotaan baru, sehingga kawasan technopark memobilisasi struktur perdesaan menuju perkotaan.

Pengembangan technopark berkonsekuensi pada sinkronisasi pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan pembentukan kawasan perkotaan baru, sehingga kawasan technopark bergerak menjadi struktur kawasan perkotaan baru. Pertanyaan mendasarnya yaitu bagaimana proses transformasi technopark dan atau technopolis harus dipersiapkan dan bagaimana rencana keduanya dapat sejalan dalam implementasinya yang berkelanjutan. Integrasi strategi manajemen inovasi dan penyusunan masterplan technopark-technopolis menjadi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

sangat krusial. Artikel ini mencoba mengungkap upaya merumuskan masterplan technopark menuju technopolis yang mensinergikan kepentingan keduanya.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pendekatan riset participatif dan studi dokumentasi, tulisan ini disusun. Kelkutsertaan secara aktif dalam rancangan, pembahasan master plan technopark menjadi alat penggalian data dan informasi. Data dan informasi dikumpulkan dari interview dan hasil beberapa kegiatan *focus group discussion* dan *workshop* pada penyusunan masterplan technopark. Studi pustaka juga dilakukan terhadap dokumen perencanaan dan publikasi beberapa *technopark*, yaitu Lampung Tengah, Sragen, dan Solo.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks praktek, kegunaan temuan pada technopark bagi pengguna (binaan) di India berupa hemat energi, perluasan dan kehandalan, mudah dalam penggunaan dan pemeliharaan, kendali tunggal bagi kesatuan sistem. Sementara itu, Korea melakukan pengembangan technopolis melalui penyediaan jaringan transportasi yang nyaman, relokasi lembaga, sumber daya manusia berpendidikan tinggi, konvergensi teknologi, pengembangan utilitas (energi, air, komunikasi, pengolahan limbah), dan tersedianya dukungan fasilitas. Berdasar pada praktek ini, maka penyusunan masterplan technopark selayaknya memiliki kekhasan, terukur, dan berorientasi pada tujuan yang memberikan manfaat dan capaian bagi para pelaku yang terlibat maupun pengguna dalam pengembangan technopark dan technopolis.

Penyusunan masterplan dibutuhkan bagi multi pihak sebagai acuan pembangunan dan pengelolaannya. Walaupun penyusunan masterplan technopark di Indonesia berada dalam kewenangan lembaga riset, namun dalam substansi rumusannya melibatkan secara aktif peran pemerintah daerah, pemerintah provinsi, akademisi, dan dunia usaha.Secara praktek, proporsi peran pemerintah masih lebih dominan dibandingkan pihak lainnya.Terutama lembaga riset milik pemerintah dan pemerintah daerah. Ketika substansi masterplan mendapat sinyal tertentu dan respon positif dari pemerintah kabupaten, maka lembaga riset cenderung lebih menyetujuinya. Salah satu aspek pentingnya adalah mengingat bahwa lahan yang dialokasikan untuk technopark nantinya akan diserahkan dan dikelola oleh pemerintah daerah. Selanjutnya pemerintah daerah membangun kawasan technopark dan mengelolanya secara profesional.

Selain faktor ketersediaan lahan dan keberlanjutan anggaran pembangunan tecknopark, maka demi pengembangan dan dampak technopark di suatu wilayah perlu memperhatikan kelayakannya.Penilaian kelayakan pengembangan technopark dimaksudkan untuk melihat kemungkinan peluang dan tantangan keberadaan technopark dalam pengembangan iptek, kelembagaan, dan lingkungan dengan memperhatikan prinsip efektivitas, survival, dan produktivitas. Penilaian kelayakan dari pengembangan technopark dapat dilihat dari beberapa indicator utama, yaitu keberadaan universitas pada lokasi technopark, kapasitas iptek perguruan tinggi dan kapabilitas hasil risetnya, perangkat organisasi, perangkat riset dan pengembangan teknologi, perangkat pusat inovasi. Indikator lainnya berupa ketersediaan dan kememadaian lahan, tingkat dukungan aksesibilitas, tingkat dukungan program pemerintah daerah, tingkat dukungan program pemerintah pusat, tingkat dukungan kebijakan komoditas, keterkaitan rantai nilai komoditas dan produk, keterkaitan rantai pasok komoditas dan produk, keberadaan industri hulu, industri hilir, ketersediaan infrastruktur sebagai pelancar. Sementara indikator kesesuaian struktur dan pola ruang kawasan technopark dengan pola ruang wilayah, tingkat dukungan terhadap usaha skala kecil dan menengah, keberadaan keuangan dan permodalan, pengembangan sumber daya manusia, pemasaran dan promosi, serta pola kemitraan yang dibentuk menjadi penghela.

Selain faktor kelayakannya, proses penyusunan masterplan technopark juga dapat diukur dari tingkat komitmen dan inklusivitas para pemangku kepentingan yang terlibat, yaitu:

1. Kehadiran , yang dapat dilihat dari tingkat kehadiran, siapa yang hadir, konsistensi kehadiran aktor yang hadir, keikutsertaaan secara aktif dalam pembahasan substansi dan prosedural masterplan technopark, keterwakilannya dalam pengambilan keputusan substansi tentang technopark, berbagi sediaan informasi yang holistik bagi technopark, pendekatan optimasi sumberdaya dan informasi bagi perwujudan technopark.
2. Ikut andil dalam mengevaluasi kriteria technopark yang akan dikembangkan. Evaluasi ini menyangkut kewajaran dan kelayakan yang berisi akomodasi kepntingan pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, lembaga penelitian, akademisi, dan masyarakat pengguna. Selain itu juga menilai kesesuaian lokasi, nilai lahan, manfaat kawasan, serta fungsionalisasi keberadaan technpark.

ISBN : 978-602-73463-1-4

3. Penilaian kemanfaatan dan program pelaksanaan pembangunan kawasan dan bangunan technopark, mendorong sinkronisasi rencana pembangunan infratsruktur fisik maupuninvestasi technopark yang bersinergi antara kepentingan technopark, pengembangan daerah, dan pengembangan iptek.

Technopark sebagai sumber inovasi diharapkan dapat menyatu dengan kepentingan masyarakat sekitarnya, sehingga keberadaan technopark berperan tidak hanya sebatas lembaga atau menjadi menara gading bagi wilayah sekitar atau daerah, tetapi juga memberi dampak positif dan *multiplier effect* bagi intra dan inter kawasan. Technopark dapat dilihat dari peran , fungsi, hasil, dan dampak technopark dalam mengungkit nilai sosial ekonomi maupun pemberdayaan masyarakat lokal. Upaya ini didekati dengan mengakomodasi penyediaan akses teknologi dari dan bagi masyarakat lokal, akses penggunaan teknologi tepat guna, kebersamaan, dan kemengertian dari teknologi yang dikembangkan, serta memperkecil kesenjangan tingkat pengetahuan antara masyarakat sekitar dengan kegiatan technopark. Technopark tinggal bersama masyarakat, dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, bekerja bersama masyarakat, dan berbicara dengan masyarakat, sehingga teknologi yang dihasilkan *technopark* juga dapat dirasakan (*well inform*) dan diimplementasikan (*well accepted*) bagi masyarakat. Pembangunan technopark di daerah bermakna bahwa daerah mendapat dukungan teknologi dan berkembangnya wilayah dari keberadaan kawasan technopark.Dukungan teknologi bagi daerah berupa adopsi teknologi untuk menambah mata pencaharian masyarakat lokal, sehingga memperolah pendapatan dan atau nilai tambah lebih dari kegiatan technopark. Disamping itu, dukungan teknologi berarti mendekatkan teknologi dengan struktur sosial masyarakat yang cenderung terpinggirkan atau kurang melek teknologi, sehingga hal ini dapat rejai perubahan sosial ke arah yang lebih merata. Pembangunan technopark memiliki dampak bagi daerah, yaitu teknologi dapat meningkatkan daya saing bagi daerah.Teknologi yang dihasilkan oleh technopark dapat dimanfaatkan secara luas sesuai dengan kondisi daerah maupun *market driven*.

Penyusunan masterplan technopark juga berkait dengan praktek transparansi antar multipihak yang berkepentingan dengan pengembangan technopark di daerah. Proses penyusunan masterplan technopark mencakup terjaminnya tindakan yang telah dirumuskan, kesepakatan yang telah dibuat, berdasarkan komitmen, tanggung jawab, verifikasi, dan akuntabilitas dari berbagai rencana, pola, dan persepsi terhadap pengembangan *technopark*. Adapun cakupan penyusunan masterplan berisi komponen :*standard operating procedure* yang jelas, evaluasi dan pengendalian, investigasi, review, dan dokumentasi dalam lingkup spasial maupun non spasial. Substansi masterplan technopark juga menyangkut ukuran manfaat *technopark* berupa nilai tambah produk, hilirisasi produk, dan differensiasi produksi yang berkait dengan beberapa komoditas unggulan. Misalnya keterkaitan dan sistem pertanian yang terintegrasi antara ubi kayu, peternakan, padi, dan kopi di Lampung Tengah; pendidikan dan pelatihan perbengkelan automotif di Sragen atau manufaktur di Solo; pengembangan infrastruktur telekomunikasi (ICT) di DKI Bandung dan Jakarta;, serta agro-techno di Sumatera Selatan.

Mengacu pada pendapat Arnold and Giarracca [3], terdapat beberapa kombinasi pilihan tipe pengelolaan dan pengembangan *technopark* yang mungkin dilakukan di Indonesia baik dari unsur pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi. Aktor dominan yang mengusung usulan *technopark* berkonsekuensi untuk mengaktivasi pengelolaan dan pengembangan technopark. Tipe terpilih dari pengelolaan dan pengembangan technopark akan menentukan besaran anggaran, tingkat keefektifan capaian dari berbagai aktivitas technopark, termasuk hubungan hulu-hilir, hilirisasi produk, pengembangan ICT, pengembangan *smart town/city)*[7] [8], maupun keberlanjutan technopark.

Terdapat sejumlah tantangan yang dihadapi dalam pengembangan technopark di daerah, diantaranya melputi :

1. Kesenjangan posisi strategis dan visi dari pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dari suatu technopark,
2. Terbatasnya pendanaan publik terhadap pengembangan technopark,
3. Terbatasnya pengalaman mengelola aset technopark dan keuangan pengembangan kawasan technopark,
4. Sinergi dari saling berbagi dalam mengartikulasikan kepentingan daerah dan pusat, sulitnya mengimplementasikan technopark antara kepentingan prioritas daerah, nasional, dan global,
5. Kebutuhan dukungan dana pengembangan technopark memerlukan kejelasan aturan termasuk kedudukan swasta/dunia usaha dalam kegiatan operasional technopark.
6. Distorsi pemahaman dan kebijakan mengenai peran aktor dalam pengembangan technopark sebagai sebuah kawasan industri/ekonomi,
7. Kesulitan dukungan dari pimpinan akademik pihak universitas dalam mengimplementasikan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

program pengembangan technopark dan technopolis secara simultan.

Pergeseran dari Technopark ke Technopolis

Pengembangan technopark yang berbasis kepada pengembangan prasarana, inkubator, pengembangan klaster industri, dan manajemen inovasi tidaklah cukup memadai dalam mendukung keberlanjutan pengembangan sistem inovasi wilayah melalui technopark. Hal ini ternyata berkait erat dengan pengembangan wilayah secara internal dan eksternal.

Pengaruh keberadaan technopark juga menyangkut keterjangkauan akses dari dan menuju lokasi technopark dalam lingkup antar wilayah, nasional, dan global. Kondisi-kondisi kebutuhan manajemen inovasi pada tingkat daerah, provinsi, dan nasional dari pengembangan technopark berujung pada dibutuhkannya integrasi manajemen inovasi secara komprehensif antar sektor industri dan antar wilayah. Keberadaan technopark memicu perkembangan kegiatan industri, pengembangan ekonomi lokal, keterkaitan dengan pasar global, dan manajemen inovasi di dalam technopark itu sendiri. Dalam kurun waktu jangka panjang, pengembangan technopark berdampak pada perkembangan dinamika intra wilayah dan inter wilayah, sehingga masterplan technopark juga mengalami pergeseran.

Masterplan technopark bergeser dari berorientasi lokal menjadi nasional, dari berorientasi komoditas unggulan daerah menjadi klaster industri, serta dari berorientasi sistem inovasi wilayah menuju integrasi inovasi nasional bahkan internasional. Pergeseran ini berkonsekuensi pada strategi, para aktor (lokal, provinsi, pusat), dan perilaku terhadap upaya pengembangan technopark menuju *technopolis*. Sedikitnya terdapat tiga peran dari technopark, yaitu technopark berperan menjadi agen pembangunan sosial ekonomi , agen transfer ilmu dan teknologi, dan motor penggerak penyedia ipteks. Peran-peran technopark ini berdampak pada penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan, peningkatan produktivitas, mendukung tarik-dorong investasi. Kemanfaatan technopark menjadi resultansi dari proses transformasi ipteks, transformasi budaya, dan transformasi bisnis dari operasionalisasi technopark. Transformasi ini meliputi proses sediaan teknologi yang dihasilkan, kepedulian terhadap lingkungan, dan pembelajaran sosial dari tindak komunikatif internal maupun eksternal, termasuk proses inisiasi pengabdian kepada dan bersama masyarakat dari universitas.

Keberadaan technopark berdampak pada penyebaran hasil inovasi technopark dan pengembangan kapasitas lokal bagi masyarakat lokal dan UKM sekitar kawasan technopark, sehingga koefisien daya sebar menjadi tolok ukur hasil dan keluaran keberadaan technopark terhadap kawasannya dan wilayah jangkauannya. Kampus dengan technopar membentuk inter-relasi yang masif dalam proses transfer teknologi, interaksi program layanan, pengembangan teknologi tepat guna, perjanjian kerjasama, maupun layanan bisnis terhadap UKM, para petani, koperasi atau kelompok sasaran tertentu. Inter0realsi ini menghasilkan inovasi yang dapat diterima oleh para pengguna produk sebagai suatu kesempatan pasar, hingga interaksi kampus dengan technopark berkontribusi pada peningkatan produktivitas, efisiensi, dan daya saing ekonomi bagi kawasan.

Secara normatif, kinerja lembaga dan perilaku aktor di *technopark* diharapkan mampu menciptakan kesempatan pasar, memobilisasi sumber daya manusia, dan mendekatkan produk yang dihasilkan *technopark* kepada konsumen/pengguna. Fasilitas sediaan-layanan ipteks dan infrastruktur yang ada di technopark mendekatkan produk dengan pasar yang menawarkan berbagai variasi inovasi dan pelayanan yang bernilai tambah, sehingga praktek bisnis menjadi layak dan efisien dengan dukungan pengembangan manajemen yang handal, Kondisi ini memunculkan wirausaha baru (*business start-up)* mampu mengembangkan kemandirian, *self reliant*, tidak hanya bergantung pada induk semang peneliti/pelaku di technopark, tetapi juga berinteraksi secara resiproksikal.

Jalinan konektivitas antara teknologi dengan fungsi pendidikan tinggi, implementasi teknologi terapan, dan kerjasama yang padu antar kontributor teknologi dan bisnis (pemerintah, lembaga riset, perguruan tinggi, dunia usaha) di technopark akan meningkatkan kapasitas lokal dan pemberdayaan masyarakat dalam penerapan dan kesiapan penyerapan teknologi. Inkubasi bisnis dan teknologi menjadi media intermediasi transformasi teknologi, bisnis, dan budaya antar pemerintah, industri, masyarakat, dan universitas, sehingga terjadi konvergensi saling keterkaitan multipihak, *quadruple helix*.

Dari sisi birokrasi, pemerintah daerah berperan mengembangkan lingkungan dan menyediakan infrastruktur yang memadai, kerangka kebijakan, dan mengkatalisasi proses kerjasama antar swasta, UKM, perbankan, lembaga keuangan, industri pada kawasan technopark. Disamping itu, pemerintah daerah juga dapat menjadi akselerator technopark melalui kelembagaan pengelolaan yang didukung oleh regulasi (peraturan daerah) berupa Badan Layanan Umum Daerah ataupun Unit Pelaksana Teknis yang memfasilitasi dukungan dana bantuan awal sebagai dana awal, dana pemantik kegiatan R & D. Lembaga ini mengoptimalkan layanan publik bagi berbagai kegiatan transfer teknologi, transformasi bisnis, dan transformasi budaya akademik menuju

ISBN : 978-602-73463-1-4

wirausaha mandiri yang mampu mengakses teknologi dan produk yang dihasilkan technopark, melalui terobosan aksi komunikasi antar pelaku industri dengan technopark.

Peran Pemda juga sangat penting dalam memastikan bahwa tersedia keterjaminan kegiatan industrialisasi produk, pengembangan inovasi berbasis produk lokal, pengembangan teknologi tepat guna, kesiapan teknologi, jaringan pasar global, dan nilai tambah produk, maupun kemanfaatan seluruh rangkaian kegiatan di dalam kawasan maupun luar kawasan technopark. Aliansi strategis antara kampus dengan kegiatan technopark mensinergikan kohesivitas antara inkubator berbasis teknologi, lembaga penelitian, perguruan tinggi, dengan pemerintah daerah dan industri pada tingkat kawasan dan wilayah. Aliansi strategis ini menjadi embrio bagi kemitraan yang setara antar multipihak yang berkelanjutan, konstruktif, dan proaktif guna merespon peluang pasar dan mengantisipasi kebutuhan industri yang berorientasi global. Kondisi ini yang menempatkan technopark bergerak menuju technopolis, membangun kota teknopolitan, dampak keberadaan technopark menjangkau kawasan dan wilayah lainnya yang berinteraksi dengan technopark.

Pembelajaran Masterplan Technopark Lampung

Sebagai contoh pengembangan technopark Lampung Tengah, secara internal mendorong keberadaan technopark menyediakan infrastruktur wilayah di dalam wilayah kabupaten Lampung Tengah. Sementara itu, secara eksternal keberadaan infrastruktur technopark berdampak terhadap perkembangan wilayah, keterkaitan pasar input maupun output dari produk yang dihasilkan technopark, sehingga pengembangan technopark secara internal dan eksternal memerlukan ketersediaan dan kememadaian infrastruktur jalan, air, listrik, dan telekomunikasi dalam skala kawasan maupun wilayah.

Pengembangan technopark di Lampung Tengah, Sumatera ini berujung pada dibutuhkannya integrasi rencana sektor (pertanian, industri, perdagangan, teknologi, infrastruktur, energi, perumahan) dengan rencana wilayah (perdesaan dan perkotaan). Pengembangan technopark berkonsekuensi pula pada kemungkinan perubahan rencana ruang pada tingkat kabupaten, provinsi dan nasional. Keberadaan dan fungsionalisasi technopark dalam jangka panjang diduga akan membentuk kawasan baru, kawasan yang terdorong menjadi pusat pengembangan lokal sekaligus jaringan usaha terkoneksi dengan nasional dan internasional.

Analisis kelayakan rencana pengembangan technopark Lampung Tengah ditekankan pada [9]:

1) Pengembangan produk-produk utama hasil pengolahan pati ubi kayu berupa: *pregelatinized starch*, cassava *flakes*, *glucose syrup*, dan dextrin, bahan *intermediate* bagi keperluan industri makanan, farmasi, kertas, dan lem.
2) Produk-produk inovatif sebagai hasil pengolahan limbah baik padat maupun cair yaitu:
   - pupuk hayati dan biofungisida yang bermanfaat bagi peningkatan produktivitas budidaya pertanian tanaman pangan dan perkebunan,
   - pakan ternak untuk mendukung usaha pembibitan dan penggemukan sapi potong.
   - energi berupa biofuel (ethanol), tenaga listrik dan panas
3) Penerimaan pajak dari sektor ekonomi lokal berkait produk-produk inovatif komoditas unggulan daerah berupa berbagai potensi pajak, pajak tidak langsung netto, dan proporsi pajak terhadap nilai input/output sektor
4) Pendapatan dari pengembangan usaha pada kawasan technopark dan wilayah pengembangan industri berupa industri pengolahan pati ubikayu, industri pupuk hayati,industri biofungisida, industri pakan ternak sapi potong, budidaya tanaman ubi kayu, budidaya tanaman padi organik, budidaya bibit sapi potong dan sapi dewasa
5) Fiskal pengembangan technopark berupa pembangunan infrastruktur di dalam kawasan dan menuju (origin-destinasi) wilayah, penilaian investasi infrastruktur dalam rentang waktu 20 (dua puluh) tahun, biaya modal,sumber pendanaan pembangunan, biaya operasional lembaga layanan dan pemeliharaan aset, serta biaya umum.
6) Kelayakan Finansial Technopark berupa parameter *Benefit Cost Ratio* lebih dari satu, *Net Present Value* positif dan cukup besar, tingkat pengembalian investasi yang layak (*Internal Rate of Return* dan *Discount factor*), dan *payback periode* (pengembalian modal yang cukup singkat) dari seluruh investasi pengembangan technopark.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Hasil analisis dari pengembangan technopark Lampung dapat membangun format wilayah baru yang menekankan aksesibilitas dan mobilitas kegiatan ekonomi di intra daerah, antar daerah, antar wilayah dalam lingkup konektivitas transaksi produk yang dihasilkan *technopark* dengan berbagai turunannya, disertai dengan *multiplier effect* terhadap lingkungan yang semakin terbangun dari keberadaan technopark.

Salah satu dampak keberadaan technopark berupa berkembangnya kawasan perkotaan di sekitar technopark, yang semula berkarakter perdesaan dengan basis pertanian bertransformasi menjadi non pertanian, perdagangan, komersial, perdagangan, dan jasa. Dengan demikian, masterplan technopark bergeser menjadi masterplan technopolis.

KESIMPULAN DAN SARAN

Keberadaan suatu technopark dirancang sebagai sumber inovasi, juga berfungsi sebagai tempat menghasilkan tenaga terampil yang dilatih dan bekerja sama dengan industri. Technopark melakukan pelatihan secara periodik mengenai perkembangan teknologi dan sekaligus menyiapkan tenaga terampil yang mengikuti perkembangan terbaru mengenai teknologi mutahir. Kondisi berhubungan erat dengan usaha inti tenant dan atau masyarakat lokal dimana *technopark* berada.

Citra kawasan, nilai tambah kegiatan, sinkronisasi infrastruktur, dan nilai tambah ekonomi kawasan menjadi komponen dalam penetapan kawasan prioritas technopark. Citra kawasan *technopark* meliputi kondisi kawasan *technopark* sebagai destinasi, fasilitas permukiman yang menunjang kegiatan technopark, dan variasi kegiatan di kawasan technopark bagi masyarakat (lokal, penghuni technopark, dan pendatang). Aksesibilitas dan amenitas dari dan menuju kawasan technopark akan menentukan besaran nilai tambah kawasan technopark sebagai kawasan cepat tumbuh dan pusat pengembangan wilayah. Hal ini berkait erat dengan ketersediaan infrastruktur yang memadai dan sinkron antar kepentingan pengembangan daerah, pengembangan ekonomi, pengembangan sektor, terutama dalam sediaan air baku, air bersih, jalan, perumahan, drainase, air limbah, penanganan sampah, maupun penyediaan energi yang mendukung kegiatan technopark dan kawasan sekitarnya.

Keberadaan, manfaat, dan dampak kegiatan technopark, diikuti dengan kememadaian sediaan infrastruktur kawasan bermuara pada kebutuhan pengembangan technopolis. Kegiatan technopark dan pengembangan kawasannya memunculkan kebutuhan interaksi antar multipihak yang bersifat inklusif, sehingga masterplan *technopark* harusmemperhatikan pengembangan kawasan technopark dalam konteks technopolis, kota berbasis teknologi. Integrasi dan sinkronisasi antara pengembangan *technopark* sebagai sumber inovasi dengan pengembangan ekonomi kawasan sekitarnya menjadi satu kesatuan kepentingan. Keberadaan technopark berdampak terhadap ekonomi lokal menjadi komitmen bersama antar multipihak maupun antar multisektoral.

Komitmen dan konsistensi masterplan technopark dengan technopolis menjadi rancangbangun wilayah yang saling bersinergi dan memiliki keterkaitan fungsional dalam pengembangan inovasi wilayah maupun pengembangan infrastruktur wilayah. Proses interaksi multipihak dalam penyusunan masterplan *technopark*, berimplikasi pada hal-hal sebagai berikut :

1. Inklusivitas multipihak bersifat absolut guna menetapkan subtansi technopark yang akan dikembangkan pada suatu kawasan technopark dengan prinsip kemanfaatan dan keefektifan dari kegiatan internal technopark maupun fungsi kawasan pusat pertumbuhan wilayah.
2. Pergeseran arah rencana pengembangan *technopark* menuju *technopolis* disesuaikan dengan kebutuhan daerah, wilayah pengembangan strategis (WPS), kecenderungan perubahan maupun dinamika sistem inovasi wilayah dan ekonomi lokal.
3. Rencana *technopark* mengakomodasi kepentingan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah, lembaga riset, universitas, dunia usaha, danmasyarakat.

Kolaborasi multipihak sebagai roda technopolis menurut Smilor [10], dapat menciptakan kreasi nilai dan sistem inovasi pada pengembangan technopark. nilai keterkaitan, nilai percepatan, dan valuasi inovasi. Kolaborasi multipihak akan mampu mensinergikan temuan dan inovasi dengan sediaan rantai nilai (*value chain*) dan rantai pasok (*supply chain*). Kerjasama seperti ini membangun jejaring dan kohesivitas multipihak yang tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas rantai nilai dan efisiensi rantai pasokan komoditas unggulan daerah, serta perolehan *economic return* yang memadai.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Arnold, Erik, and Kuusisto, Jari, 2002. *Government Innovation Support for Commercialisation of Reseach, new R&D performers and R&D netwok.* Technology Review 121/2002. Tekes , National Technology Agency. Helsinki.
[2] Mannik, Katrin and Parna, Ott. 2013. "Estonia – The Business Paradise" How to Pool Forces to Transform Estonia into an International Business Centre – a Target Country for Talented People, Profitable Jobs, and Value Creating Foregign Investment ?. Estonia. Summary Review 25.06.2013.
[3] Arnold, Erik and Giarracca, 2012. Getting Balance Right. Basic Reasearch, Missions and Governance for Horizon 2020. Technopolis. Group , October 2012.
[4] Reid. Aladiar. 2007.Technopolis. Identification and dissemination best practice in science mentoring and science ambassador schemes across Europe/ European Commission.
[5] Mahieu Bea, Arnold Erik, and Kolarz Peter. 2014 Measuring scientific performance for improved policy making. Science and Technology Options Assessment
[6] Stupar, Aleksandra. 2007. *"Expressing the Power of Technology: Urban Challenge, Global Fashion or Imperative of Sustainability?".* 6 th Annual IAS-STS Conference "Critical Issues in Science and Technology Studies". Graz : Institute for Anvanced studies
[7] Deakin M, (ed). 2013. Smart Cities : governing, modelling and analysing the transition. *Rouledge. Oxon*
[8] Deakin M, 2012. Creating Smart-er cities . Rouledge.Oxon
[9] Badan Penerapan dan Pengkajian Teknologi. 2015. Penyusunan Masterplan Pengembangan Kawasan Technopark Lampung Tengah. Laporan Akhir. (tidak dipublikasikan).
[10] Smilor, R.W., Kozmetsky, O., and Gibson, D.V. 1988 .*Creating The Technopolis: Linking Technology Commercialization and Economic Development*. Boston : Baltinger Publishing Company.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS KETIMPANGAN PEMBANGUNAN SUMATERA UTARA

Faoeza Hafiz Saragih[1)] dan Endang Sari Simanullang[1)]

[1)]Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Medan Area

Email : saragihhafiz@gmail.com

Naskah diterima :10 Maret 2017 Naskah direvisi : 17 Maret 2017 Disetujui terbit : 20 Maret 2017

ABSTRAK

Salah satu upaya mengentaskan kemiskinan dan memperkecil disparitas antar wilayah di Indonesia dilakukan dengan pemerataan pemanfaatan teknologi pada beberapa daerah melalui pengembangan science park dan technopark sebagaimana tertuang pada RPJMN tahun 2015-2019. Technopark berfungsi sebagai center of excellence yang melibatkan kerjasama dunia usaha, pemerintah, lembaga penelitian maupun perguruan tinggi, yang akan mempercepat industrialisasi. Selain menjadi motor penggerak ekonomi, kawasan technopark menjadi pusat pertumbuhan ekonomi sekitarnya, dan sebagai pendorong daya saing komoditas unggulan daerah. Manajemen inovasi technopark berkorelasi kuat dengan pengembangan regional.Fenomena technopolis secara inherent mendorong penguatan ekonomi berbasis teknologi sekitar kawasan technopark dan sekaligus menghela kawasan yang semula perdesaan menjadi kawasan perkotaan. Isyu strategisnya adalah bagaimana proses transformasi technopark-technopolis. Sementara itu, tak dapat dipungkiri bahwa integrasi antara strategi manajemen inovasi dengan pengembangan kawasan technopark secara konseptual dan implementasinya menjadi kebutuhan. Oleh karenanya, perlu upaya merumuskan masterplan technopark menuju technopolis yang mensinergikan kepentingan industrialisasi, ekonomi wilayah, dan keterkaitan desa kota. Tulisan ini diturunkan dari riset partisipatif dan studi pustaka. Data dan informasi dikumpulkan dari hasil beberapa kegiatan focus group discussion dan workshop pada penyusunan masterplan technopark. Kerjasama multipihak pada kawasan technopark membentuk nilai keterkaitan, nilai percepatan, dan valuasi inovasi melalui clustering dan critical mass dari para aktor peneliti, akademisi, dan perusahaan.Temuan, inovasi, dan iptek yang berasal dari perguruan tinggi maupun lembaga riset bersinergi dengan sediaan rantai nilai (value chain) dan rantai pasok (supply chain) dari dunia usaha. Kerjasama ini membangun jejaring dan kohesivitas antar multipihak yang tinggi, sehingga meningkatkan efektivitas rantai nilai dan efisiensi rantai pasokan komoditas unggulan daerah, serta perolehan economic return yang memadai.

Kata Kunci *:cooperation, technopark, technopolis*

PENDAHULUAN

Proses pembangunan suatu negara untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang positif merupakan tujuan akhir dari pemerintahan yang berjalan. Keberhasilan pembangunan pada tingkat nasional tentunya tidak terlepas dari pembangunan yang berlangsung pada tingkat regional dikarenakan keduanya merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan. Pembangunan nasional yang telah dilakukan secara umum telah mampu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat namun pada pembangunan tersebut masih terdapat ketimpangan [1].

Pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi dan prosesnya yang berkelanjutan merupakan prasyarat utama bagi kelangsungan pembangunan ekonomi. Pertambahan penduduk akan terus terjadi dan berarti kebutuhan ekonomi juga akan bertambah besar, sehingga dibutuhkan penambahan pendapatan setiap tahun. Konsekuensi yang harus dihadapi atas fenomena di atas adalah pertumbuhan ekonomi harus lebih besar dari pertumbuhan penduduk agar pertumbuhan pendapatan per kapita dapat tercapai. Namun pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan diorientasikan untuk peningkatan pendapatan per kapita, dapat menyebabkan pola pembagian dari

pertumbuhan itu sendiri kurang diperhatikan, sehingga mengakibatkan timbulnya disparitas pendapatan di masyarakat [2].

Berbagai masalah timbul dalam kaitan dengan pertumbuhan ekonomi wilayah, dan terus mendorong perkembangan konsep-konsep pertumbuhan ekonomi wilayah. Dalam kenyataannya banyak fenomena tentang pertumbuhan ekonomi wilayah. Kesenjangan wilayah dan pemerataan pembanguan menjadi permasalahan utama dalam pertumbuhan wilayah, bahkan beberapa ahli berpendapat bahwa pertumbuhan ekonomi wilayah dan proses perjalanan pertumbuhan merupakan hal yang penting [3].

Ketimpangan sendiri sebenarnya memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari adanya ketimpangan adalah dapat mendorong wilayah lain yang kurang maju untuk dapat bersaing dan meningkatkan pertumbuhannya guna meningkatkan kesejahteraannya. Sedangkan dampak negatif dari ketimpangan yang ekstrim antara lain inefisiensi ekonomi, melemahkan stabilitas sosial dan solidaritas, serta ketimpangan yang tinggi pada umumnya dipandang tidak adil [4].

Sejalan hal tersebut, untuk mengurangi kesenjangan antar sektor, antar kabupaten dan antar kota di Sumatera Utara, Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan berbagai kebijakan secara menyeluruh dan terpadu termasuk meningkatkan alokasi dana langsung ke masing-masing wilayah Kabupaten/Kota disamping melanjutkan dan meningkatkan upaya penanggulangan kemiskinan serta menggerakkan kembali kegiatan ekonomi di berbagai daerah secara merata. Pengembangan wilayah Pantai Barat merupakan salah satu program prioritas dalam pembangunan Provinsi Sumatera Utara sebagai bagian dari Rencana Strategis (Renstra) Provinsi Sumatera Utara yang selama ini diupayakan untuk mengejar ketertinggalan dibandingkan wilayah lainnya [5]

Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang relatif tinggi juga diiringi oleh disparitas antar wilayah yang semakin relatif besar.Hal ini terjadi dikarenakan strategi pembangunan ekonomi Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan selama ini masih mengacu pada pertumbuhan ekonomi (*growth oriented strategy*) dan belum mengacu kepada pemerataan pembangunan yang semakin baik (*growth oriented strategy with distribution*) [6].

METODE PENELITIAN

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kawasan Pantai Timur dan Kawasan Pantai Barat Sumatera Utara selama periode tahun 2009-2013. Untuk menganalisis tingkat ketimpangan pembangunan dalam dan antar wilayah Pantai Timur dan Pantai Barat di Sumatera Utara dengan menggunakan Indeks Entropi Theil. Nilai koefisien Theil ini menunjukkan seberapa merata distribusi pendapatan perkapita. Rumus yang digunakan dalam pengukuran Indeks Theil Entropi adalah sebagai berikut :

1) $IC = \Sigma_I yi \log\left({yi}/{xi}\right) = IC_{br} + IC_{wr}$

2) $IC_{br} = \Sigma_r Yr \log\ ({Yr}/{Xr})$

3) $IC_{wr} = \Sigma_r Yr \left[\Sigma_r \left({yi}/{Yr}\right) \log\left(\frac{\frac{yi}{Yr}}{\frac{xi}{Xr}}\right) \right]$

[7]

Keterangan :
IC = Indeks total ketimpangan
IC_{br} = Indeks ketimpangan *between group*
IC_{wr} = Indeks ketimpangan *within group*
yi = Pangsa PDRB perkapita kabupaten i terhadap PDRB perkapita provinsi
xi = Pangsa jumlah penduduk kabupaten i terhadap total populasi provinsi
Yr = Pangsa jumlah PDRB per kapita wilayah terhadap PDRB perkapita provinsi
Xr = Pangsa jumlah penduduk wilayah terhadap total populasi nasional.

Indikator :
- Nilai indeks Entropi Theil (IC) mendekati 1 berarti sangat timpang
- Nilai indeks Entropi Theil (IC) mendekati 0 berarti sangat merata

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Ketimpangan Pembangunan Dalam Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur di Sumatera Utara

Dari hasil perhitungan yang dilakukan dalam penelitian ini didapatkan angka indeks ketimpangan dalam wilayah sebagaimana pada Tabel 1.

Tabel 1. Nilai Rerata Hasil Analisis Ketimpangan Dalam Wilayah di Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013

Dalam Wilayah	2009	2010	2011	2012	2013
Wilayah Pantai Barat	0.00876	0.00417	0.00436	0.00470	0.00492
Wilayah Pantai Timur	0.36015	0.35631	0.35289	0.34909	0.34489
Total	0.36891	0.36048	0.35725	0.35379	0.34981

Sumber : Data BPS Provsu, (Diolah).

Berdasarkan Tabel 1 dapat diketahui bahwa hasil analisis ketimpangan pembangunan di dalam dua wilayah *(within)* lebih kecil dari 1, dimana *Indeks Entropy Theil* pada 2 (dua) wilayah setiap tahunnya mempunyai tren yang menurun. Namun yang menjadi perhatian adalah nilai *Indeks Theil* wilayah Pantai Timur lebih besar dari wilayah Pantai Barat yang berarti bahwa tingkat ketimpangan pembangunan di dalam wilayah Pantai Timur lebih besar apabila dibandingkan dengan di dalam wilayah Pantai Barat.

Pada Kawasan Pantai Timur, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapita Kabupaten/Kota memiliki perbedaan yang cukup signifikan antara satu dengan yang lainnya. PDRB Kota Medan dan Batubara cukup tinggi apabila dibandingkan dengan daerah lain dimana rata-rata PDRB perkapita masing-masing Rp.18.100.562 dan Rp. 20.250.991, sedangkan daerah lain PDRB perkapita berkisar 8 juta–10 juta. Hal ini disebabkan Kota Medan merupakan ibukota provinsi dimana mobilitas barang dan jasa berjalan dengan baik dan didukung dengan sarana dan prasana yang baik. Sementara untuk Kabupaten Batubara kaya akan Sumber Daya Alamnya yaitu banyaknya perkebunan kelapa sawit dan adanya industri Inalum, disamping itu juga jumlah penduduknya tidak terlalu banyak hanya sebesar 382.960 orang pada tahun 2013.

Untuk Kawasan Pantai Barat pada tahun 2009 indeks ketimpangan cukup tinggi apabila dibandingkan dengan tahun-tahun kedepannya, hal ini disebabkan terdapat beberapa Kabupaten yang baru dimekarkan antara lain Nias Utara, Nias Barat, Gunung Sitoli, Padang Lawas Utara dan Padang Lawas. Namun tahun 2010 menurun kemudian meningkat lagi dengan laju pertumbuhan yang positif. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah untuk kemudian mengantisipasi meningkatnya ketidakmerataan pembangunan yang ada di Kawasan Pantai Barat. Secara keselurahan indeks theil total dalam kawasan setiap tahunnya menunjukkan tren yang menurun yang berarti bahwa proses pembangunan untuk pemerataan telah menunjukkan hasil yang positif, walau dengan laju pertumbuhan yang cukup kecil.

Hasil Analisis Tingkat Ketimpangan Pembangunan Antar Wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur di Sumatera Utara

Dapat diketahui bahwa indeks Entropi Theil's lebih besar dari pada 1 yang berarti bahwa adanya ketimpangan pembangunan antar kedua wilayah, walau dengan tren yang menurun nilai *Indeks Entropi Theil's* ini termasuk besar dan tren penurunannya semakin kecil setiap tahunnya

Tabel 2. Nilai Rerata Hasil Analisis Ketimpangan Antar Wilayah di Sumatera Utara Tahun 2009 2013

Between	2009	2010	2011	2012	2013
Wilayah Pantai Barat	17.67107	17.56714	17.42147	17.36845	17.29849
Wilayah Pantai Timur	9.503793	9.686737	9.631931	9.611546	9.622407
Total	27.17487	27.25388	27.0534	26.97999	26.92089

ISBN : 978-602-73463-1-4

Kontribusi indeks terbesar adalah pada wilayah Pantai Barat dikarenakan wilayah ini adalah wilayah yang baru berkembang sehingga terdapat ketimpangan didalamnya. Namun tren indeksnya menurun, hal ini sesuai dengan bentuk kurva ketimpangan yang berbentuk U terbalik. Hal ini disebabkan proses pembangunan baru dimulai pada pada wilayah ini, dimana kesempatan kerja dan peluang pembangunan belum mampu dimanfaatkan dengan baik. Adanya keterbatasan sarana dan prasarana, rendahnya kualitas sumber daya manusia dan adanya faktor social budaya yang terkadang menghambat jalannya pembangunan. Hal ini berbeda dengan Kawasan Pantai Timur yang sudah cukup berkembang apabila dibandingkan dengan Kawasan Pantai Barat.

Hasil Analisis Total Ketimpangan Pembangunan di Sumatera Utara

Hasil analisis total ketimpangan pembangunan dengan Indeks Theil menunjukkan bahwa ketimpangan antar wilayah mendominasi ketimpangan total Sumatera Utara. Ketimpangan pembangunan antar wilayah menyumbangkan rata-rata lebih dari 98% selama periode yang diamati.

Tabel 3. Nilai Rerata Hasil Analisis Ketimpangan Total di Sumatera Utara Tahun 2009 – 2013

Tahun (1)	Dalam Wilayah (2)	Antar Wilayah (3)	Total (4)	Pangsa (2) Terhadap (4)
2009	0.368919	27.17487	27.54379	0.986606
2010	0.360481	27.25388	27.61436	0.986946
2011	0.357257	27.0534	27.41066	0.986966
2012	0.353791	26.97999	27.33378	0.987057
2013	0.349815	26.92089	27.27071	0.987173

Sumber : Data BPS Provsu, (Diolah)

Tingginya indeks ketimpangan antar wilayah antara lain disebabkan tidak menyebarnya pembangunan di Sumatera Utara. Penyebabnya adalah setiap daerah mempunyai kondisi yang berbeda-beda baik itu kondisi alam, kondisi perekonomian, kondisi sarana dan prasarana dan lain-lain. Tjahjono dalam Wijayanti dan Wahono [8], menyatakan bahwa dampak dari pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan daerah yang kaya akan sumberdaya alam mendapatkan kenaikan penerimaan yang besar.

Pada tahun 2013 berdasarkan data Badan Pusat Statistik jumlah penduduk di Kawasan Pantai Timur 62% dari total penduduk Sumatera Utara sedangkan untuk Kawasan Pantai Barat hanya 19% dari total penduduk Sumatera Utara selebihnya berada di Kawasan Dataran Tinggi. Disamping itu anggaran Dana Alokasi Umum khususnya untuk Kota Medan yang terdapat di Kawasan pantai Timur jauh lebih besar apabila dibandingkan dengan daerah lainnya sehingga sedikit banyak menyebabkan ketimpangan dengan daerah lain yang berada di Kawasan Pantai Timur. Pada Kawasan Pantai Barat Dana Alokasi Umum yang didapatkan oleh Kabupaten/Kota cenderung hampir sama hal ini dapat disebabkan banyaknya Kabupaten/Kota hasil pemekaran dimana Kabupaten Mandailing Natal dan Padang Sidempuan mendapakan Dana Alokasi Umum yang lebih besar dibandingkan dengan yang lainnya.

Pada Kawasan Pantai Timur juga banyak merupakan daerah perkebunan dan daerah yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten/Kota sebelumnya, sehingga proses pembangunan belum pada tahap *mature*. Namun hal ini tidak hanya terjadi pada Provinsi Sumatera Utara tetapi juga pada provinsi-provinsi lain yang ada di Indonesia dimana ibukota provinsi akan menjadi sentra pembangunan dan akan menjadi konsentrasi penduduk disebabkan terdapatnya sarana dan prasarana yang lengkap, lancarnya mobilitas barang dan jasa serta terdapatnya konsentrasi kegiatan ekonomi wilayah walaupun sering terdapat ibukota provinsi tidak mempunyai kandungan Sumber Daya Alam yang cukup besar apabila dibandingkan dengan daerah lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Tingkat ketimpangan pembangunan di dalam wilayah Pantai Timur lebih besar apabila dibandingkan dengan di dalam wilayah Pantai Barat Sumatera Utara.
2. Adanya ketimpangan pembangunan antar kedua wilayah dengan kontribusi indeks terbesar terjadi di wilayah Pantai Barat, hal ini dikarenakan sebagaian besar wilayah Pantai Barat merupakan wilayah yang baru berkembang sehingga terdapat ketimpangan di dalamnya sebagai akibat dampak pelaksanaan otonomi daerah.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

3. Ketimpangan antar wilayah yang terjadi di wilayah Pantai Barat dan Pantai Timur mendominasi ketimpangan total Sumatera Utara.

DAFTAR PUSTAKA

[1] S. Purnasihar, Analisis Ketimpangan Pembangunan Regional di Kawasan Timur Indonesia dan Kawasan Barat Indonesia, Yogyakarta: Tesis Pascasarjana Ekonomi Pertanian Fakultas Pertanian UGM , 2012.
[2] M. Todaro, Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
[3] B. Provsu, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provsu 2009-2013, Medan, 2008.
[4] Sirojuzilam, Disparitas : Ekonomi dan Perencanaan Regional, Medan: Pustaka Bangsa Press, 2008.
[5] M. Terrasi, The "New" Convegence Debate and The "Old" Italian North-South Problem, European Regional Science Association, 1996.
[6] W. Wahono, "Analisis Konsentrasi Kemiskinan di Indonesia Periode Tahun 1999 – 2003," *Ekonomi Pembangunan,* vol. 10, no. 3, Des 2005.
[7] T. Tambunan, Transformasi Ekonomi di Indonesia: Teori dan Penemuan Empiris, Jakarta: Salemba Empat, 2001.
[8] Deliarnov, Perkembangan Pemikiran Ekonomi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

RESETTLEMENT, PARTISIPASI DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Fery Andrianus[1)], Syafruddin Karimi[1)], Melinda Noer[1)] dan Werry Darta Taifur[1)]

[1)]Universitas Andalas

Email: feryandrianus2002@yahoo.com

Naskah diterima :10 Desember 2016 Naskah direvisi : 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 7 Mei 2017

ABSTRAK

Pemindahan penduduk terjadi akibat pembangunan fasilitas publik seperti bendungan. Pemindahan merupakan salah satu bentuk pengorbanan masyarakat dalam proses pembangunan suatu negara. Masyarakat berharap ketika dipindahkan kehidupan lebih baik dari sebelumnya. Tulisan ini memberi suatu pemikiran yang mencoba mengkaji hubungan antara partisipasi masyarakat dan kompensasi dengan kesejahteraan masyarakat. Dimana partisipasi masyarakat dan kompensasi sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan. Contohnya dalam melaksanakan pemindahan penduduk, pemerintah perlu mengikutsertakan masyarakat, semakin tinggi partisipasi masyarakat terlibat dalam program pembangunan, akan semakin besar pula peluang program dan kegiatan pemerintah akan berhasil dan berdmpak baik bagi kesejahteraan masyarakat, karena itu partisipasi msayarakat merupakan faktor penting dalam suksesnya program pembangunan termasuk pemukiman kembali.Begitu juga dengan kompensasi, makin sesuai kompensasi dengan keinginan masyarakat maka akan berdampak baik pula bagi kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan bukan hanya bisa diukur dengan variabel ekonomi tetapi lebih dari itu variabel non ekonomi juga berperan dalam menjelaskan tingkat kesejahteraan masyarakat.

***Kata kunci**: pemukiman kembali, partisipasi, kesejahteraan*

RESETTLEMENT

Pembangunan fasilitas publik menyebabkan terjadinya pemindahan penduduk, seperti pembangunan bendungan, jalan, jembatan, pasar dan fasiltas publik lainnya. Pemindahan bagi penduduk merupakan salah satu bentuk pengorbanan dalam pembangunan. Program pemukiman kembali (*resettlement*) untuk penduduk yang pindah pada awalnya fokus pada ganti rugi tanah dan pembangunan pemukiman kembali. Namun pemindahan penduduk tidak selalu berlangsung mulus, banyak masalah yang muncul. Permasalahantersebut antara lain prosespembebasan lahan, saat relokasi,waktu pemukiman kembali. Kondisi ini dialami oleh penduduk yang pindah (*resettler*) pada kasus proyek bendungan Kedungombo, Nipah, Karian, dan Jatibaran. Sehingga tujuan resettlement untuk peningkatan kesejahteraan tidak terjadi, malahan muncul masalah baru [1]. Menurut Amiany dan Sahay [2], kebijakan pemukiman kembali bukan hanya fokus pada penggantian kerugian harta atau pembangunan fisik semata, tetapi hal yang lebih penting dilakukan oleh pemerintah adalah langkah-langkah untuk memulihkan taraf hidup dan mata pencaharian *(livelihood)*. Sehingga pandangan terhadap pemukiman kembali menjadi berubah.Pemukiman kembali selanjutnya telah menjadi masalah nasional, sehingga dalam jangka panjang akan berdampak terhadap pembangunan daerah dan nasional.

Pemukiman kembali pada prinsipnya memilikitujuan untuk meningkatkankesejahteraan penduduk, tetapikenyataannya kehidupan penduduk tidak lebih baik bahkan menurun dibanding sebelumnya. Menurut Messakh [3], dampak dari kebijakan pemukiman kembali bagi pengungsi hanya sementara waktu, pemerintah tidak tegas sehingga kehidupan sosial, sekonomi dan budaya menjadi rapuh, disamping itu sering terjadi konflik internal dengan masyarakat lokal yang berdampak terhadap pengrusakan tanaman dan lahan. Lebih lanjut Wiranata [4], menjelaskan pembangunan bendungan dengan memanfaatkan bantuan lembaga-lembaga keuangan dunia ternyata tidak berkorelasi positif dengan kesejahteraan masyarakat lokal, tetapi cendrung menguntungkan sekelompok orang dan mengorbankan banyak orang, dimana masyarakat harus pindah dari

tempat asalnya, seperti kasus di India. Untuk itu, ADB [5] menyaratkan, harus ada 3 (tiga) poin penting dalam program pemukiman kembali yang harus dipenuhi yaitu ganti rugi, bantuan untuk relokasi, dan rehabilitasi penghidupan minimal sama dengan kondisi di tempat sebelumnya.

Menurut Jackson dan Sleigh [6], biasanya pembayaran yang benar kepada pemukim kembali adalah secara sukarela, sukarela dapat dicapai ketika kompensasi membuat orang-orang hidup lebih baik. Seperti yang diilustrasikan pada Gambar 1. Gambar tersebut menunjukkan bahwa harga akan dinegosiasi pada pembayaran kompensasi P2, pada titik ini masyarakat yang akan dipindahkan bersikap acuh tak acuh untuk tinggal atau meninggalkan tempat mereka yang lama. Titik P1 menjadi alasan bagi masyarakat untuk bertahan tinggal (jika perlu akan menolak dengan segala cara), selanjutnya masyarakat mempunyai insentif ekonomi untuk bergerak (pindah ke tempat bdaru) jika kondisi pada P3. Pembayaran pada P1 dibawah dari kompensasi (*under-compensated*). Supaya masyarakat mau menjadi *voluntary resettlement*, pembayaran kompensasi adalah diatas pembayaran P2 tetapi dibawah P3 (*zone of negotiation*). Ini akan sesuai dengan aspirasi dari individu-individu untuk menjadi lebih baik. Titik-titik yang ada pada grafik di atas akan menjadi dasar dari nilai rata-rata untuk kelompok-kelompok dan pertimbangan variasi didalam titik dari pengabaian (*indifference*) untuk individu, tetap didalam rumahtangga yang sama. Beberapa masyarakat tidak akan ingin pindah. Walaupun kelihatannya analisis ini sederhana namun pada faktanya beberapa faktor dipertimbangkan oleh pemukim tidak hanya nilai uang, karena itu analisis ini tidak selalu mudah dalam kenyataannya. Dalam kenyataannya kompensasi sering tidak menguntungkan masyarakat. Masyarakat yang terkena dampak selalu di pihak yang lemah.

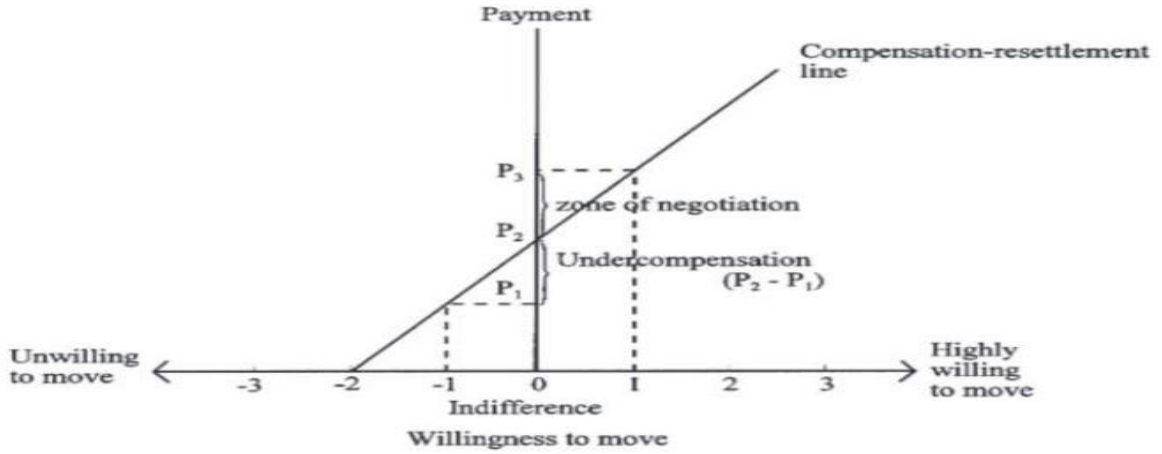

Gambar 1. Tingkat Pembayaran Kompensasi Untuk Pemukiman Kembali
Sumber : Jackson dan Sleigh, 2000

Cernea [7] mengkritik, salah satu kekurangan dari kompensasi adalah dimensi waktu dalam pemulihan masyarakat yang terkena dampak. Pemindahan masyarakat menjadi kemunduran besar, perlu untuk biaya dan upaya untuk mengejar pemulihan kembali. Masyarakat tersebut tidak hanya kehilangan aset, tetapi juga melupakan pertumbuhan, masyarakat sekitar atau lainnya yang tidak kena dampak melanjutkan telah mengembangkan diri untuk lebih baik. Untuk para pengungsi mereka harus berusaha keras untuk mengembalikan hidup mereka minimal ke posisi sebelum ada proyek. Mereka harus mengejar, yaitu mereka harus memulihkan waktu yang hilang, dengan mempercepat laju pembangunan, mencapai kecepatan yang lebih cepat daripada masyarakat sekitarnya.

Tingkatan dan Bentuk Partisipasi Masyarakat

Arnstein [8] menjelaskan bahwa partisipasi masyarakat identikdengan kekuasaan masyarakat. (*Citizen participation is a categorical term for citizen power*). Arnstein menjelaskan tipologi partisipasi masyarakat dalam bentuk level dan tingkatan anak tangga yang terdiri dari 8 anak tangga. Level paling bawah menunjukkan keadaan tanpa partisipasi (*non participation*), yang meliputi tangga *manipulation* dan *therapy*. Pada level ini masyarakat tidak berpartisipasi dalam perencanaan tetapi para pemegang kekuasaan dapat mengedukasi masyarakat. Selanjutnya level token (*degree of tokenism*) yang terdiri dari tangga *informing, consultation, dan placation*. Level ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya sekedar ikut dan mendengar, mereka tidak mempunyai kekuatan untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi mereka. Level terakhir dan yang paling tinggi

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

adalah*citizen power* yang terdiri dari tangga *partnership, delegated power, dan citizen control*. Level terakhir ini merupakan bentuk partisipasi masyarakat yang sebenarya danmenggambarkan peran serta kontribusi masyarakat dalam perencanaan pembangunan baik daerah dan nasional.Dengan demikian, untuk melihat bagaimana partisipasi masyarakat ini terjadi adalah dengan menganalisis apakah level *citizen power* ini terlaksana dengan baik atau tidak

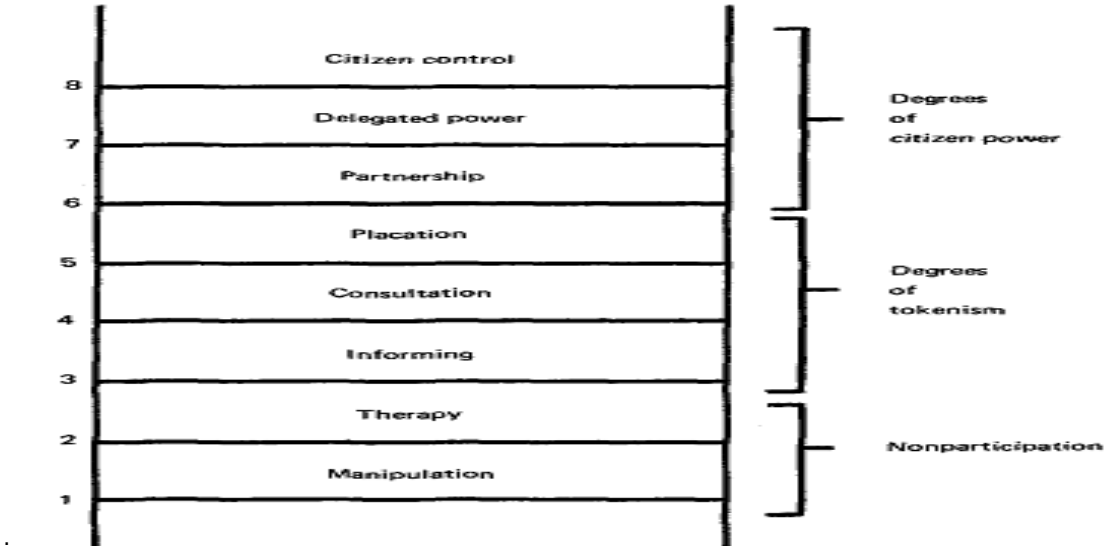

Gambar 2. Delapan Tingkatan Tipologi Partisipasi Masyarakat
Sumber: Arnstein (1969).

Selanjutnya Navruzov, Rose and Shelley [9] membandingkan partisipasi masyarakat yang disampaikan oleh Arnstein dengan pemberdayaan masyarkat yang dikemukakan oleh Burns *et.al* [10]. Lihat Tabel 2. Burns *et all* menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat (c*itizen empowerment*) terdiri atas 3 level yaitu *citizen control*, *citizen participation* dan *citizen non participation*. Dalam menganalisis pemberdayaan masyarakat tersebut, masyarakat dilihat sebagai konsumen yang memiliki berbagai alternatif untuk mendapatkan kekuasaan [11]. Masyarakat sebagai konsumen memiliki pilihan, partisipasi dan kontrol. Pilihan artinya masyarakat sendiri yang menentukan apakah mereka terus terlibat atau tidak, apakah mereka puas atau tidak dengan kondisi yang ada. Selanjutnya,partisipasi adalah kondisi masyarakat bisa mempengaruhi keadaan dengan catatan tujuan tidak berubahKemudian, kontrol, yaitu kondisi masyakarat yang bisa mempengaruhi keadaan dan mengubah tujuan, karena itu masyarakat harus ikut proses mulai dari awal sampai akhir. Dengan demikian pemberdayaan masyarakat sebenarnya menjelaskan bagaimana masyarakatharus bertanggung jawab terhadap diri sendiri (kemandirian) dan responsif atau terlibat aktif dalam kegiatan untuk melahirkan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah, masyarakat harus terlibat mulai dari proses perencanaan sampai lahirnya kebijakan tersebut.

Finsterbusch dan Wicklyn [12] lebih lanjut menjelaskan bahwa ada 4 (empat) bentuk partisipasi masyarakat terbagi atas 4 (empat) tahap. Penjelasan ini mirip dengan yang disampaikan oleh Cohen dan Uphoff [13], yang mengatakan bahwa partisipasi merupakan keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan keputusan dan intervensi, pelaksanaan program, evaluasi dan menikmati manfaat dari program tersebut. Sedangkan Finsterbusch dan Wicklyn [12] mengatakan bahwa bentuk partisipasi terdiri atas tahap perencanaan, implementasi, pemeliharaan dan pemanfaatan hasil program.

Perencanaan Partisipatif

Perencanaan partisipatif merupakan model utama pembangunan yang bersifat *button up*. Pendekatan ini menurut Nasution [14], melibatkan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan, dalam bentuk kontribusi, dukungan, komitmen, kerjasama dan keahlian. Kemudian Lubis [15], menambahkan bahwa perencanaan partisipatif merupakan strategi pembangunan dan salah satu cara yang efektif dalam proses penentuan keputusan publik, karena perencanaan partisipatif ditentukan oleh kesadaran masyarakat untuk mau melibatkan diri secara aktif dalam proses pembangunan. Selanjutnya keberhasilan pembangunan partisipatif tersebut sangat ditentukan oleh faktor sosial dan politik, yang meliputi; tingkat kepercayaan masyarakat (*public trust*), legitimasi (*legitimacy)*, tanggung jawab (*accountability*), kualitas layanan (*public service quality*), dan mencegah pembangkangan publik (*public disobedience*). Kemudian Lubis menyimpulkan bahwa perencanaan

pembangunan partisipatif memegang peran penting dan merupakan aplikasi fungsi otonomi daerah dalam pembangunan.

Pandangan yang hampir sama tentang perencanaan partisipatif juga disampaikan oleh banyak peneliti lainnya. Purnamasari [16], menjelaskan bahwa suatu perencanaan pembangunan dikatakan partisipatif bila memiliki ciri-ciri sebagai berikut: a) terfokus pada kepentingan masyarakat; b) partisipatoris; c) sinergitas; d) legalitas. KemudianWibowo [17], mengatakan bahwa perencanaan partisipatif meliputi; penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, perumusan tujuan, menetapkan langkah-langkah rinci, dan merancang anggaran. Dari hasil penelitian yang dilakukan diketahui bahwa proses perencanaan partisipatif, hanya melibatkan masyarakat pada dua tahap yaitu tahap penyelidikan dan perumusan masalah. Kedua tahap ini sudah melibatkan masyarakat, sedangkan untuk tahap lain seperti identifikasi daya dukung, menetapkan langkah-langkah rinci dan merangcang anggaran, masyarakat tidak diikutsertakan. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan partisipatif masih banyak yang belum dilakukan sesuai dengan aturan yang seharusnya. Pandangan ini didukung oleh Hidayat [18], yang mengemukakan tahap-tahap perencanaan seharusnya menggunakan pendekatan *bottom up planning*, namun pada realisasinya lebih bercorak kepada pendekatan *top down planning,* dimana perencanaan dan pembangunan masih berasal dari usulan dari atas. Hal ini terjadi karena; a) pemerintah menganggap masyarakat hanya sebagai pendukung perencanaan; b) usulan dianggap merupakan keinginan bukan kebutuhan; c) adanya kepentingan elite.

Untuk kasus di luar Indonesia, kejadian yang sama juga terjadi di Thailand, Chaowarat [19] menjelaskan bahwa perencanaan partisipatif hanya sebagai simbol bagi pemegang kekuasaan dan dunia bisnis di Kota Thai dalam mempertahankan dominasi mereka, sehingga partisipasi masyarakat yang diharapkan tidak berjalan dengan baik, akibat kuatnya dominasi pusat. Selanjutnya hal yang sama juga di temui oleh Piper dan Lieres [20], dalam penelitian mereka di Afrika Selatan, diketahui bahwa partisipasi masyarakat belum berjalan sebagaimana mestinya, partisipasi masyarakat masih dijadikan untuk kepentingan elit dari partai dan pemimpin daerah yang berkuasa.

Beberapa masalah yang muncul dalam perencanaan partisipatif, sebenarnya merupakan kondisi yang umum dan sering terjadi dalam proses perencanaan. Kondisi ini bisa terjadi sebenarnya juga tidak terlepas dari fungsi dan peran perencana (*planner*), karena masih banyak perencana yang belum mengerti dan memahami peran mereka secara baik. Seperti yang dijelaskan Sawitri [20], bahwa secara teori maupun praktek peran perencana dalam perencanaan partisipatif adalah sebagai fasilitator dan komunikator. Dengan peran tersebut perencana membantu terjadinya komunikasi antar stakeholder dalam menghasilkan perencanaan yang efektif. Selanjutnya dalam menjalankan profesinya sebagai perencana, selain mengandalkan pengetahuan dan teknik analisis, perencana juga perlu mempunyai kemampuan membangun dialog antar stakeholder. Perencana harus menjunjung tinggi etika yang menuntun perilakunyauntuk mendukung partisipasi masyarakat dan tanggung jawab pada kepentingan masyarakat. Sebagai komunikator, perencana juga perlu mematuhinorma pragmatis alamiah dalam berkomunikasi agar mendapatkan kepercayaan masyarakat dan mampu membangun komunikasi yang efektif.

Banyak kelemahan dan permasalahan yang terjadi dalam perencanaan partisipatif. Kondisi ini tidak bisamengeneralisir dan membuat kesimpulan bahwa perencanaan partisipatif tidak relevan atau tidak mampu menjawab persoalan yang terjadi dalam perencanaan pembangunan. Keberhasilan model perencanaan partisipatif dalam pembangunan juga banyak ditemukan peneliti. Seperti yang dijelaskan oleh Astuti dan Hardiana [21], bahwa penelitian dengan metode PAR (*Participatory Action Research*), menunjukkan bahwa Konsep Model Pemberdayaan Masyarakat Permukiman Kumuh sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Perkotaan Yang Berkelanjutan (PMPKB) berhasil dengan baik. Proses partisipatif dimulai dari pemetaan masalah,penyusunan rencana tindakan komunitas dan pengintegrasian dengan *rolling plan* perencanaan pada tingkat kota, bisa menjadi instrumen untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat melalui perencanaan dari bawah (*bottom-up planning)*sehingga bisa menjamin dan memastikan terintegrasinya proses *bottom-up planning* pada tingkat kelurahandi dalam dokumen perencanan kota. Kondisi ini tidak terlepas dari peran fasilitator yang cukup baik.

Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Hendrik [22] untuk mengukur tingkat kesejahteraan ada 3 (tiga) cara yaitu a) Menggunakan standar Upah Minimum Regional (UMR) yang dikeluarkan oleh Gubernur selaku kepala pemerintah provinsi, b) Menggunakan indikator atau Status kesejahteraan, yang dapat diukur dari proporsi pengeluaran rumah tangga. Rumah tangga sejahtera apabila proporsi pengeluaran untuk kebutuhan pokok sebanding atau lebih rendah dari proporsi pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok dan sebaliknya,jika proporsi pengeluaran rumah tangga untuk kebutuhan pokok lebih besar dibandingkan dengan pengeluaran untuk kebutuhan bukan pokok, maka

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

rumah tangga tersebut merupakanbukan rumah tangga sejahtera. c) Menggunakan 14 kriteria kemiskinan menurut BPS [23]. Jika dari 14 kriteria tersebut terpenuhi 9 kriteria, maka rumah tangga tersebut dikatakan miskin/tidak sejahtera, 14 indikator tersebut adalah :

1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m2 per orang
2) Jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan
3) Jenis dinding tempat tinggal dari bambu/ rumbia/ kayu berkualitas rendah/tembok tanpa diplester.
4) Tidak memiliki fasilitas buang air besar/ bersama-sama dengan rumah tangga lain.
5) Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6) Sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung/ sungai/ air hujan.
7) Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/ arang/ minyak tanah
8) Hanya mengkonsumsi daging/ susu/ ayam dalam satu kali seminggu.
9) Hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun
10) Hanya sanggup makan sebanyak satu/ dua kali dalam sehari
11) Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas/ poliklinik
12) Sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah: petani dengan luas lahan 500m2, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan atau pekerjaan lainnya dengan pendapatan dibawah Rp. 600.000,- per bulan
13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga: tidak sekolah/ tidak tamat SD/ tamat SD.
14) Tidak memiliki tabungan/ barang yang mudah dijual dengan minimal Rp. 500.000,- seperti sepeda motor kredit/ non kredit, emas, ternak, kapal motor, atau barang modal lainnya.

Menurut Sadikin dan Subagyono [24] ukuran kesejahteraan petani digambarkan oleh 5 (lima) indikator yaitu tingkat pendapatan, proporsi pengeluaran pangan keluarga, indeks daya beli petani, ketahanan pangan, nilai tukar petani. Selanjutnya BPS [23], juga mempublikasi Indikator Kesejahteraan Masyarakat Tahun 2015 yang menyajikan berbagai aspek kesejahteraan yang datanya tersedia dan terukur. Interpretasi perubahan taraf kesejahteraan dianalis dari delapan bidang yaitu Kependudukan, Kesehatan dan Gizi, Pendidikan, Ketenagakerjaan, Taraf dan Pola Konsumsi, Perumahan dan Lingkungan, Kemiskinan, serta Sosial Lainnya yang menjadi acuan dalam upaya peningkatan kualitas hidup. Kesejahteraan bukan bermakna untuk meningkatkan kemakmuran material saja tetapi juga meningkatkan kebahagiaan warga negara atau masyarakat. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang dipersepsikan secara subjektif oleh setiap orang, beberapa ahli mendefinisikan kebahagiaan sebagai: sejauh mana individu menilai secara positif kualitas dari keseluruhan hidupnya. Berbagai penelitian menyebutkan bahwa kebahagiaan memiliki dua komponen yaitu komponen afektif dan komponen kognitif.

Menurut BPS [23], Indikator ekonomi ternyata memiliki keterbatasan dalam menunjukkan tingkat kesejahteraan masyarakat, karena Indikator ekonomi pada umumnya diukur secara obyektif denganpendekatan berbasis uang (*monetary-based indicators*), dimana ukuran seperti ini lebih bersifat objektif. Sebenarnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat ada dua cara, yaitu 1) menggunakan standar yang sama (indikator obyektif) dan 2) menggunakan standar yang tidak sama (indikator subyektif). Salah satu indikator kesejahteraan yang mengukur capaian berdasarkan standar yang tidak sama untuk masing-masing individu adalah indeks kebahagiaan.

Menurut BPS [23], pengukuran indeks kebahagiaan merupakan pengukuran yang bersifat '*beyondGDP*'. Kebahagiaan merupakan suatu hal yang dirasakan secara berbeda oleh setiap orang atau subjektif, karena itu untuk mengukur kebahagiaan bukan hal yang objektif tetapi merupakan hal yang subyektif. Kebahagiaan yang menggambarkan kondisi subyektif digunakan untuk melengkapi indikator obyektif yang telah dilakukan sebelumnya. Indeks Kebahagiaan Indonesia dirilis pertama kali pada tahun 2013 berdasarkan hasil studi dengan representasi estimasi tingkat nasional.Indeks Kebahagiaan sebenarnya merupakan indeks komposit dari hasil observasi tingkat kepuasan terhadap 10 aspek kehidupan yang utama. Kesepuluh aspek tersebut secara substansi dan bersama-sama menunjukkan tingkat kebahagiaan yang meliputi kepuasan terhadap:1) kesehatan, 2) pendidikan, 3) pekerjaan, 4) pendapatan rumah tangga, 5) keharmonisan keluarga, 6) ketersediaan waktu luang, 7) hubungan sosial, 8) kondisi rumah dan aset, 9) keadaan lingkungan, dan 10) kondisi keamanan.

PEMBAHASAN

Berdasarkan literatur yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis mencoba memberikan analis dalam permasalah resettlement ini dalam bentuk hubungan antara resettlement dengan kompensas, partisipasi dan kesejahteraan masyarakat terkena dampak pembangunan bendungan atau waduk.

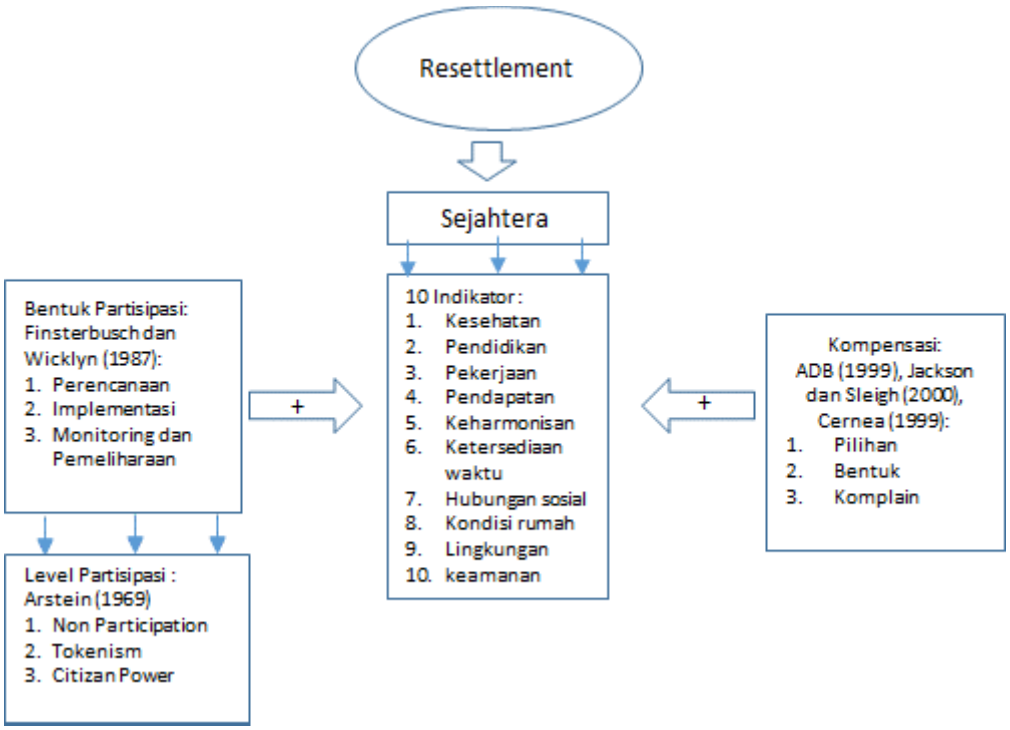

Gambar 3. Analisis Hubungan Resettlement, Kompensasi dan Partisipasi
Sumber : Diolah sendiri.

Dalam Gambar 3 dapat dijelaskan bahwa kesejahteraan masyarakat dihipotesakan dipengaruhi oleh dua indikator atau variabel yaitu partisipasi dan kompensasi. Kenapa masyarakat yang dipindahkan hidupnya kurang sejahtera. Jawaban dari pertanyaan ini bisa dilihat dari dua indikator yaitu partispasi dan kompensasi. Dari gambar 3 dapat dijelaskan bahwa keterlibatan atau partisipasi masyarakat sangat penting dalam suatu kebijakan publik apalagi menyangkut pembangunan bendungan. Hal ini sudah diuraikan sebelumnya, bagaimana Arnstein menjelaskan partisipasi masyarkat sangat menentukan suatu proses pembangunan. Pada kasus resettlement dapat dilihat apakah proses pemindahan mulai dari tahap perencaanaan, pelaksanaan dan monitoring sudah melibatkan masyarakat dalam posisi yang sebenarnya, karena jika keterlibatan masyarakat tidak sesuai dengan yang seharusnya akan berdampak pada kehidupan masyarakat pada masa selanjutnya. Begitu pula dengan kompensasi, apakah kompensasi yang diterima masyarakat sudah sesuai dengan yang disepakati baik dari segi bentuk maupun jumlah. Jika kedua indikator ini tidak berjalan dengan baik maka kesejahteraan yang akan dicapai masyarakat setelah pindah diyakini tidak akan terlaksana sebagaimana mestinya.

PENUTUP

Pemukiman kembali (*resettlement*) merupakan konsekuensi dari pembangunan fasilitas publik. Fasilitas publik dibangun merupakan tuntunan pembangunan nasional dalam upaya mensejahterakan masyarakat. Pemukiman kembali berhasil jika masyarakat yang dipindahkan hidupnya lebih baik dari sebelumnya. Keberhasilan pemukiman kembali tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Makin partisipatif masyarakat dalam proses pembangunan maka akan semakin besar peluang kegiatan pemerintah berhasil dilaksanakan. Namun dalan kenyataan partisipasi masyarakat belum seperti yang diharapkan, banyak kendala dan tantangan yang terjadi, sehingga partisipasi masyarakat tidak optimal.

Kesejahteraan masyarakat merupakan tujuan pembangunan. Kesejahteraan tidak hanya dinilai dari materi atau variabel ekonomi saja. Ukuran kesejahteraan telah mengalami perkembangan, tidak hanya variabel ekonomi saja yang digunakan tetapi variabel sosial, budaya dan lainnya juga ikut dalam pengukuran kesejahteraan, sehingga ukuran kesejahteraan menjadi lebih komprehensif.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

DAFTAR PUSTAKA

[1] Kementrian PU. 2011. Executive Summary : Penyusunan Model Perhitungan Pembebasan lahan, Relokasi & Pemukiman Kembali Penduduk dalam Pembangunan Waduk.

[2] Amiany., Sahay, S, N. 2011. Kajian Pemukiman Kembali Penduduk Tepian Sungai Kahayan di Kota Palangkaraya, Jurnal Arsitektur, Vol. 6 No. 1 ISSN 1412 – 3388

[3] Messakh, A. T. 2003 Kebijakan Pemukiman Kembali Pengungsi di Perbatasn Indonesia -Timor Leste (Studi Kasus Kecamatan Tasifeto Timur, Kabupaten Belu, Provinsi Nusatenggara Timur), Tesis Program Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota, Universita Diponegoro, Tidak di Publikasikan.

[4] Wiranata, A, I, M, A. (2010). Mengkritik Makna Hegemoni Pembangunan Berkelanjutan, Studi Kasus: Proyek Dam di Lembah Sungai Narmada, Jurnal Ilmiah Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Vol. I No. 01. Universitas Udayana, Bali.

[5] ADB. 1995. Involuntary Resettlement.

[6] Jackson, S. and Sleigh, A. C. 2001. The Political Economy and Socio-Economic Impact of China's Three Georges Dam. Asian Studies Review 25, 57-72.

[7] Cernea, M. M. 2003. For a New Economics of Resettlement: A Sociological Critique of the Compensation Principle*International Social Science Journal*, 2003, nr 175 (UNESCO, Paris: Blackwell)

[8] Arnstein, S. R. 1969. A Ladder of Citizen Participation. JAIP. Vol. 35, No. 4, 216-224.

[9] Navruzov, Y., Rose, A., Shelley, W. 2000. Role of Partnership in Modern Local Government, paper to be presented at the Eighth Annual Conference of the Network of Institutes and Schools of Public Administration in Central and Eastern Europe (NISPAcee), Budapest, April 13-15, 2000

[10] Burns, D., Hambleton, R., Hogget, P. 1994. *The Politics of Decentralisation:Revitalising Local Democracy.* – MACMILLAN. – p. 304.

[11] Utomo, D, S. 2008. Penanganan Pengaduan Masyarakat Mengenai Pelayanan Publik. Bisnis & Birokrasi, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, hlm. 161-167 Volume 15, Nomor. 3 ISSN 0854-3844.

[12] Finsterbusch, K., Wicklin III, W. A. V. 1987. The contribution of beneficiary participation todevelopment project effectiveness. Public Administration and Development, Vol 7, 1-23.

[13] Cohen, J.M., Uphoff, N.T. 1977. Rural development participation: concepts and measures for project design, implementation and evaluation.Ithaca, New York, Cornell University, Center for International Studies, Rural Development Committee.

[14] Nasution, M. A. 2007. Perencanaan Pembangunan Partisipatif : Studi Tentang Penyusunan Rencana PembangunanJangkaMenengah Daerah Kota Medan Tahun 2006-2010. Tesis Pascasarjana USU. Medan.

[15] Lubis, A. 2009. Upaya Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan. Jurnal Taburasa PPS Unimed. Vol 6, No 2, 181:190.

[16] Purnamasari, I. (2008).Studi Partisipasi Masyarakat Dalam Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi. Tesis S2 MAP Undip.

[17] Wibowo, A. H. 2009. Analisis Perencanaan Partisipatif : Studi Kasus Di kecamatan Pemalang Kabupaten Pemalang. Tesis MAP Undip.

[18] Hidayat, A. 2014. Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Langgam Tahun 2012. Jom FISIP. Vol 1 No 2.

[19] Chaowarat, P. 2010. Participatory Planning in Municipal Development in Thailand. von der Fakultät VI – Planen Bauen Umwelt der Technischen Universität Berlin zur Erlangung des akademischen Grades. genehmigte Dissertation.

[20] Sawitri, D. 2006. Profesi Perencana Dalam Perencanaan Partisipatif: Suatu Kajian Teori Dan Praktek Perencanaan, Vol XXII, No 1.

[21] Astuti, W., Hardiana, A. 2009. Model Perencanaan Partisipatif Pada Level Kelurahan Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Pada Permukiman Kumuh Perkotaan Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 20 No.2, 146-154.

[22] Hendrik. 2011. Analisis Pendapatan dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Danau Pulau Besar dan Danau Bawah di Kecamatan Dayun Kabupaten Siak, Propinsi Riau, Jurnal Perikanan dan Kelautan, No. 16, Vol. 1, 21-32.

[23] BPS. 2015. Berita Resmi Statistik No. 13/02/32/Th. XVII.

[24] Sadikin, I., Subagyono, K. 2008. Kinerja Beberapa Indikator Kesejahteraan Petani Padi di Perdesaan Kabupaten Kerawang.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KEGAGALAN PEMBANGUNAN PERTANIAN MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PETANI DI INDONESIA

Gevisioner[1)], Rudi Febriamansyah[1)], Ifdal[1)] dan Suardi Tarumun[2)]

[1]Program Pascasarjana, Universitas Andalas
[2]Program Pascasarjana, Universitas Riau

email : irgevisioner@gmail.com

Naskah diterima :21 Februari 2017 Naskah direvisi : 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 7 Maret 2017

ABSTRAK

Dari waktu ke waktu terbukti sektor pertanian selalu menjadi andalan dalam pembangunan perekonomian nasional, dulu, sekarang, dan diyakini untuk masa yang akan datang. Sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin besar, seperti globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia tidak terlepas dari sejarah aktivitas pertanian yang terjadi selama ini. Oleh karena itu tulisan ini bertujuan untuk membahas perspektif historis pembangunan pertanian untuk pembangunan. Kebijakan pembangunan pertanian Indonesia dari dulu hingga saat sekarang, sebagian besar merupakan penggulangan sejarah pelaksanaan kebijakan pembangunan di masa lalu. Perhatian lebih banyak diberikan pada proses bagian hulu seperti akses sumber daya lahan, penyediaan berbagai sarana produksi dan teknik produksi. Salah satunya dapat dilihat pada kebijakan pembangunan pertanian periode 2014-2019, yang mencoba menggulang kesuksesan pembangunan pertanian pada periode Repelita Pertama. Perhatian yang serius terkait aspek hilir yaitu kebijakan harga yang layak masih sangat terbatas atau bahkan terabaikan. Kehidupan petani Indonesia makin sulit karena memang laju kehidupannya dibiarkan berlanjut tanpa jaminan hak hidup yang lebih baik dari negara.

Kata kunci: *kebijakan, kesejahteraan petani, pembangunan pertanian*

PENDAHULUAN

Urgensi pembangunan pertanian untuk pembangunan nasional suatu negara secara teoritis telah teruji dan tidak terbantahkan lagi. Xenophon, filsuf dan sejarawan Yunani yang hidup 425-355 SM mengatakan bahwa "*Agriculture is the mother and nourishes of all other arts",* Pertanian adalah ibu dari segala budaya. Jika pertanian berjalan dengan baik, maka budaya-budaya lainnya akan tumbuh dengan baik pula, tetapi manakala sektor pertanian diterlantarkan, maka semua budaya lainnya akan rusak. Namun dalam tataran implementasi kebijakan pertanian terutama di negara-negara berkembang sering terjadi kebijakan yang salah sehingga sektor pertanian terabaikan dan ditinggalkan. Kebijakan pembangunan ekonomi di sebagian besar negara berkembang termasuk di Indonesia seringkali terdapat ketidakkonsistenan antara apa yang secara formal tertuang dalam dokumen perencanaan dengan implementasi dalam pelaksanaan strategi pembangunan ekonomi [1].

Dari waktu ke waktu terbukti sektor pertanian selalu menjadi andalan dalam pembangunan perekonomian nasional, dulu, sekarang, dan diyakini untuk masa yang akan datang. Terlepas dari itu, memang harus diakui bahwa sektor pertanian menghadapi tantangan yang semakin besar, seperti globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan. Sementara itu, didalam negeri sendiri masih dirasakan kurang keberpihakan pengambil kebijakan terhadap pembangunan sektor pertanian dalam perspektif pembangunan nasional [2],[3].

Perkembangan pembangunan pertanian di Indonesia tidak terlepas dari sejarah aktivitas pertanian yang terjadi selama ini. Menurut Krisnamurthi [4], mengungkapkan pentingnya sejarah dalam konteks revitalisasi pertanian, bahwa sejarah menjadi penting bukan karena romantisme nostalgia atau mengagungkan kebanggaan prestasi, tetapi justru karena dapat menjadi cermin untuk mengenal jati diri dan untuk memperbaiki hari esok dalam lintasan sejarah itu sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa cermin itu bukan untuk mencari kekurangan dan kesalahan, tetapi sebagai modal untuk melangkah ke depan.

Tulisan ini bertujuan 1) menelaahan praktek pembangunan pertanian di Indonesia, 2) menelaah pengaruh pembangunan pertanian terhadap kesejahteraan petani.

METODE

Tulisan ini merupakan makalah kebijakan, yang merupakan hasil studi literatur. Variabel yang digunakan dalam menentukan kesejahteraan petani adalah nilai tukar petani (NTP). Data dianalisis secara deskriptif, setelah dilakukan perhitungan pertumbuhan nilai tukar petani. Kajian dilaksanakan pada bulan Januari – Mei 2015.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktek Pembangunan Pertanian di Indonesia
Zaman Pra Kolonial dan Kolonial

Masuknya barat (Belanda) ke Indonesia telah banyak mempengaruhi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat, terutama berikaitan dengan kepentingan perekonomian Belanda. Sejak VOC memegang kekuasaan, masyarakat tidak memiliki hak atas tanah [5]. VOC melakukan kebijakan pertanian bukan untuk memajukan pertanian negeri ini, tetapi untuk memperoleh keuntungan sebesar-besarnya. Dengan sistem tanam paksa (*culture stelsel*) yang dijalankan atas prinsip penyerahan wajib atau paksa dan prinsip monopoli, masyarakat tidak terjamin kehidupannya Kondisi ini menyebabkan bertambah lemahnya hak milik perseorangan petani akibat pengaruh-pengaruh feodal [6].

Pemerintah kolonial Belanda menjalankan sistem pembangunan pertaniannya, membuat undang-undang agraria (Agrarisch Wet) pada tahun 1870. Dengan undang- undang ini maka hak hidup perusahaan besar dijamin, sehinga berdiri perusahaan-perusahaan besar dengan tanah-tanah perkebunan yang luas yang berdampingan dengan para petani di sekitamya dengan hanya mengolah tanah jumlahnya sangat sempit [7].

Berdasarkan prinsip penyerahan wajib ini, maka pungutan dari rakyat ditetapkan bukan lagi berupa uang, tetapi berupa hasil tanaman yang dapat di ekspor seperti indigo (rutam), teh, tembakau, kopi dan tebu. Sementara prinsip monopoli dimanifesitasikan dengan memberi hak monopoli kepada Nederlandsche Handels Maatschappij (NHM), berupa wewenang dalam produksi pengangkutandan perdagangan hasil ekspor. Tebu dan kopi, boleh dikatakan merupakan primadonanya ekspor. Dalam hal penggunaan lahan pertanian, kopi dan tebu memiliki perbedaan yang besar. Kopi ditanam di lereng-lereng gunung, sedangkan tebu ditanam di sawah-sawah di dataran rendah. Perbedaan ini menyebabkan pengaruh yang ditimbulkan kedua jenis tanaman pun berbeda pula. Tanaman kopi cenderung memperluas areal tanaman, sedangkan tebu relatif tetap dalam lahan yang sebelumnya sudah diibudidayakan oleh penduduk [6].

Era Kemerdekaan Indonesia

Setelah Indonesia merdeka, kebijakan pemerintah terhadap pertanian tidak banyak mengalami perubahan dibanding zaman kolonial. Pemerintah tetap mencurahkan perhatian khusus pada produksi padi dengan berbagai peraturan seperti wajib jual padi kepada pemerintah. Namun masih banyak tanah yang dikuasai oleh penguasa dan pemilik modal besar, sehingga petani penggarap atau petani bagi hasil tidak dengan mudah menentukan tanaman yang akan ditanam dan budidaya terhadap tanamannya pun tak berkembang. Pada periode 1960 – 1965, Indonesia dibawah pemerintahan dengan model ekonomi terpimpin dan pada periode 1965 – 1968 dibawah pemerintahan transisi ke pemerintahan orde baru.

Sejarah pembangunan pertanian berawal pada masa orde baru. Pada awal masa orde baru pemerintahan menerima beban berat dari buruknya perekonomian orde lama. Tahun 1966-1968 merupakan tahun untuk rehabilitasi ekonomi. Pemerintah orde baru berusaha keras untuk menurunkan inflasi dan menstabilkan harga. Pemerintah orde baru menyusun dua tahapan strategi besar berupa Pola Umum Pembangunan Jangka Panjang (PU-PJP) yaitu PU-PJP1 (1969 – 1994) dan PU-PJP2 (1994-2019). Dimana PJP I diarahkan untuk menciptakan landasan kuat memasuki proses tinggal landas (*take-off*), sementara PJP2 merupakan masa tinggal landas, sesuai tahapan pembangunan Rostow. Strategi pembangunan dilaksanakan melalui lima serangkaian Repelita yang semuanya dititik beratkan pada sektor pertanian dan sektor industry yang mengalami pergeseran secara bertahap [4].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Revolusi Hijau

Selama tahap pertama Repelita, pembangunan pedesaan khususnya sektor pertanian didomominasi oleh suatu gaya komando yang keras. Program BIMAS Gotong Royong (1969 – 1970) menjadi bukti empiris utama bagaimana pemerintah bekerjasama dengan perusahaan agribisnis international untuk menjamin produksi serta distribusi bibit, pupuk, pestisida, serta penyuluhan dan juga menjamin pasokan beras ke kota. Program ini berakhir dengan kegagalan dan diberhentikan secara tiba-tiba dengan keputusan presiden. Pengalaman BIMAS Gotong Royong memberikan pembelajaran berharga bahwa model komando memberikan peluang keberhasilan yang sangat kecil.

Untuk menghindari kebijakan inefisien itu, pemeritah menyadari bahwa perlu mencoba arah yang lain. Cara yang ditempuh adalah dengan memberikan subsidi. Subsidi berupa subsidi pupuk, bantuan kredit, sistem harga dasar padi, proyek-proyek pertanian. Pada permulaan tahun 1970-an pemerintah Indonesia meluncurkan suatu program pembangunan pertanian yang dikenal secara luas dengan program revolusi hijau yang dimasyarakat petani dikenal dengan program BIMAS. Pada waktu itu, revolusi hijau dianggap sebagai "juru selamat"bagi sektor pertanian, khususnya di negara berkembang. Oleh karena itu, tanpa revolusi hijau sulit dibayangkan bagaimana produksi pertanian akan mampu memberi makan bagi penduduk yang jumlahnya semakin meningkat.

Studi yang dilakukan the Food Research Institute, Stanford University pada akhir tahun 1980-an, menjelaskan bahwa terdapat tiga alternatif sasaran kebijakan perbesaran di Indonesia. Pertama, berupaya menjadi pengekspor beras melalui tingkat pertumbuhan produksi beras sebesar 4 persen per tahun. Kedua, tetap melakukan impor dengan mengupayakan tingkat pertumbuhan produksi sebesar 1 persen per tahun. Ketiga, pertumbuhan produksi 2,5 persen per tahun dengan sasaran mempertahankan *swasembada on trend* (mengimpor beras ketika produksi jelek dan mengekspor ketika produksi bagus). Terdapat lima instrumen kebijakan yang digunakan untuk mengimplementasi sasaran kebijakan tersebut yaitu tingkat harga, stabilisasi harga, investasi publik, kebijakan ekonomi makro dan regulasi pedesaan [8].

Instrumen kebijakan harga mengubah tingkat harga beras dalam negeri. Kebijakan harga beras saat itu merupakan kebijakan yang bersifat netral. Pemerintah saat itu berkeinginan untuk memiliki sistem perberasan yang efisien, yang senantiasa menjaga agar harga beras dalam negeri tidak terlalu jauh dari trend harga beras dunia, sehingga dapat dikatakan bahwa kebijakan itu tidak memproteksi petani, tetapi juga tidak mendisproteksinya. Namun untuk merangsang petani agar mampu mengadopsi penggunaan teknologi baru, termasuk didalamnya penggunaan varietas unggul, maka pemerintah memberikan subsidi harga pupuk kimia yang amat besar untuk menurunkan biaya produksi.

Pelaksanaan revolusi hijau telah berhasil mengubah sikap petani, dari sikap anti teknologi ke sikap yang mau memanfaatkan teknologi pertanian modern, misalnya pupuk kimia, bibit padi unggul. Tetapi revolusi hijau juga menimbulkan berbagai masalah bagi petani. Ketergantungan pada bibit unggul yang seragam dan meninggalkan bibit lokal yang dimiliki, subsektor tanaman pangan rentan terhadap berbagai hama, petani menjadi bodoh dengan melupakan banyak pengetahuan lokal. Ongkos yang harus dibayar oleh program revolusi hijau ini adalah hilangnya institusi lokal, musnahnya keanekaragaman sumber daya hayati, menurunnya kualitas tanah, serta menurunnya kualitas lingkungan secara keseluruhan [9].

Selintas revolusi hijau memang memajukan pertanian. Namun, jika ditelisik lebih jauh justru membuat petani semakin terdesak pada marginalitas, sehingga diperbudak oleh berbagai rekayasa teknologi negara-negara maju yang mahal harganya. Ekses negatif revolusi hijau dapat dirasakan hingga saat ini. Karena hilangnya teknologi lokal, menyebabkan petani sangat tergantung pada produk-produk pertanian buatan pabrik.

Pasca Revolusi Hijau

Pada periode (1985 – 1997) ditandai dengan mulai melambatnya pembangunan pertanian yang ditunjukkan melambatnya pertumbuhan produktivitas padi. Hingga berakhirnya masa orde baru, sistem usaha tani di Indonesia mengalami keterpurukan karena krisis multi dimensi. Kredit pertanian dicabut, suku bunga kredit membumbung tinggi sehingga tidak ada kredit yang tersedia ke pertanian. Infrastruktur pertanian pedesaan kususnya irigasi banyak yang rusak karena biaya pemeliharaan tidak ada. Pelaku agribisnis mengalami kegamangan, sehingga program agribisnis tidak berlangsung lama meskipun depresiasi rupiah cukup memberikan insentif untuk ekspor sehingga tidak memberi waktu bagi para petani untuk menyelesaikan sendiri [4].

Pada tahun 90-an terjadi pergeseran komitmen pemerintah dari kebijakan orientasi produsen beras, menuju orientasi konsumen beras. Pemerintah mulai menerapkan kebijakan impor dan pengurangan atas asupan produksi beras. Gejalah ini sesungguhnya menandai menguatnya proyek globalisasi. Konsekuensi utama

ISBN : 978-602-73463-1-4

dari kebijakan ini adalah secara sengaja mengorbankan wilayah pedesaan bagi pertumbuhan wilayah perkotaaan, mengorbankan sektor pertanian demi pertumbuhan industi, dan akhirnya mengorbankan petani untuk pekerja perkotaan. Hal ini menyebabkan stagnasi pertumbuhan dalam produksi beras yang tidak berkelanjutan, yakni revolusi hijau [9].

Keberhasilan pembangunan Orde Baru ternyata tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Pada pertengahan tahun 1997 hingga pertengahan 1999 Indonesia mengalami krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis multidimensi sosial-ekonomi-politik, mengakibatkan meningkatnya pengangguran terbuka dan penduduk miskin. Kondisi ini membalikkan kondisi Indonesia seperti pada awal 1980-an. Impor beras meningkat tajam dan menempatkan Indonesia kembali menjadi negara importir terbesar dunia [1].

Pada periode (2005–2014) atau Kabinet Bersatu, memasuki era globalisasi yang dicirikan oleh persaingan perdagangan internasional yang sangat ketat dan bebas, pembangunan pertanian semakin dideregulasi melalui pengurangan subsidi, dukungan harga dan berbagai proteksi lainnya. Pemerintahan menggunakan strategi tiga jalur (*triple track strategy*) sebagai manifestasi dari strategi pembangunan yang lebih *pro-growth*, *pro employment* dan *pro-poor*. Operasionalisasi konsep strategi tiga jalur tersebut dirancang, salah satunya melalui revitalisasi pertanian dan perdesaan untuk berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Selama periode setelah krisis ekonomi hingga saat ini, strategi perberasan tidak lagi tersusun dengan baik. Kebijakan perberasan menghadapi *trade-offs* yang amat sulit. Instrumen kebijakan utama yang dilakukan adalah bea masuk impor, yang telah meningkatkan harga beras dalam negeri sebesar 25–30 persen, serta subsidi konsumsi beras terbatas bagi kelompok miskin di pedesaan dan perkotaan. Kompensasi yang diterima oleh kelompok miskin di pedesaan dan perkotaan tidak sebesar peningkatan harga beras yang diakibatkan oleh kebijakan tersebut [8].

Secara teoritis, pemerintah bisa membantu petani padi dengan instrumen kebijakan yang lain, seperti subsidi produksi langsung, dimana petani akan menerima subsidi yang nilainya sesuai dengan jumlah produksi yang dipasarkan. Kebijakan ini tidak akan menyebabkan naiknya harga beras dalam negeri dan dengan sendirinya akan menghilangkan *trade-offs* antara produsen dan konsumen.

Pemerintahan Jokowi dan Yusuf Kalla (2014 – 2019)

Kebijakan pembangunan pertanian atau pangan pada pemerintahan saat ini, terdapat pada Program Peningkatan Kedaulatan Pangan, yang merupakan salah satu pada program ke enam dari Nawacita. Arah kebijakan umum kedaulatan pangan dalam RPJMN 2015-2019 adalah: pemantapan ketahanan pangan menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat, serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan [10].

Memperhatikan kebijakan dan strategi pembangunan pertanian pada pemerintahan saat sekarang, secara umum merupakan penggulangan dari program-program terdahulu, yang mengarah kembali ke revolusi hijau tanpa memprioritaskan peningkatan kesejahteraan petani [2], prioritas pembangunan terarah ke sektor industri. Sesungguhnya, tidaklah salah mendorong pertumbuhan sektor industri karena nilai tambah yang lebih besar akan dapat diperoleh dari sektor tersebut. Akan tetapi, menjadi kurang tepat jika pengembangan industri dilakukan dengan menelantarkan sektor pertanian. Harusnya, industri yang pertama didorong negara agraris ialah agroindustri yang berbasis komoditas pangan dan pertanian yang dihasilkan di dalam negeri [11], [12].

Krisis pangan yang terjadi di Indonesiapada tahun 2007/2008, merupakan involusi atau kemerosotan pertanian yang telah terjadi sejak 1950-an, tetapi tidak di tangani secara serius oleh pemerintah. Fragmentasi lahan mulai terjadi hingga produktivitas lahan merosot. Krisis pangan pada periode 2007/2008 juga ada kaitannya dengan stategi atau orientasi pengembangan pertanian yang diterapkan/dianjurkan oleh lembaga-lembaga dunia, yang lebih memperioritaskan agroindustri berorientasi pasar dunia dan menjadi penyuplai jaringan supermarket global. Dengan demikian merupakan pertanda bahwa pembangunan pertanian mulai terpuruk karena pondasi yang kurang kuat sehingga bangunan tersebut runtuh [8]. Menurut Krisnamurthi [4], mengungkapkan bahwa hal ini disebabkan kekeliruan pembangunan yang dilaksanakan selama ini. Kekeliruan pembangunan yang mendasar adalah tidak ditempatkannya pembaruan agraria yang berupa penataan kembali penguasaan, penggunaan, pemanfaatan, peruntukan dan pemeliharaan sumber-sumber agraria sebagai pra-kondisi dari pembangunan nasional.

Penurunan perhatian terhadap sektor pertanian telah dirasakan akibatnya pada saat ini dan cenderung akan semakin parah jika tidak dilakukan upaya pemulihan secara cepat dan tepat. Pada tataran global, harga komoditas pangan mulai naik dan krisis pangan mulai membayangi. Untuk Indonesia, kekhawatiran terhadap kemungkinan kekurangan pangan juga mulai dirasakan. Kebijakan *land reform* belum memberikan hasil yang jelas. Peningkatan kemakmuran petani, yang selalu menjadi tema sentral, masih sekedar mimpi dan harapan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[13], [14]. Gambaran praktek pembangunan pertanian selama ini mengikuti pola pembangunan konvensional, yang hanya mengutamakan kemajuan ekonomi dengan melupakan kesejahteraan pelaku utamanya yakni petani.

Perkembangan Kesejahteraan Petani

Kesejahteraan petani merupakan tujuan pembangunan pertanian dan pembangunan nasional. Merupakan perjuangan setiap keluarga untuk mencapai kesejahteraan anggota keluarganya. Secara sederhana keluarga petani dikatakan sejahtera manakala dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya. Menjadi petani berhadapan dengan resiko usaha yang diakibatkan berbagai faktor, diantaranya faktor alam yang sering kali tidak dapat diprediksi. Beban pertanian menjadi semakin berat manakala petani tidak pernah tahu bahkan tidak pernah bisa memprediksi berapa harga satuan hasil panen yang akan diterima, karena terbatasnya akses dan informasi pasar. Dengan banyaknya faktor yang tidak dapat dikontrol dalam usaha pertanian, menyebabkan terlalu besar unsur ketidakpastian dalam usaha tani, sehingga sulit untuk merasa aman untuk berusahatani

Kebijakan pembangunan pertanian pada periode 2005 -2014, baik dalam tataran konsep namun dalam tataran implementasi kebijakan sertingkali terdapat ketidak konsistenan antara rencana dan pelaksanaanya. Hal ini dapat digambarkan tidak menigkatnya kesejahteraan petani. Meskipun telah terjadi penurunan sumbangan sektor pertanian terhadap GDP di Indonesia [1],[15]. Transformasi struktural di Indonesia kurang berjalan, dimana peran pertanian dalam perekonomian nasional akan semakin menurun, namun tidak ada pergerakan angkatan kerja dari pertanian ke sector industry dan jasa [15],[16].

Secara sederhana keluarga petani dikatakan sejahtera manakala dapat memenuhi kebutuhan dasar anggotanya. Salah satu indikator untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani adalah Nilai tukar petani (NTP). Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan salah satu penanda (indikator) ekonomi rumahtangga tani yang paling tua dan dipublikasikan berkala secara konsisten oleh Badan Pusat Statistik (BPS) sehingga telah amat populer di Indonesia. NTP-BPS tersebut digunakan sebagai penanda kesejahteraan ekonomi rumahtangga tani. Kesejahteraan ekonomi lazim diukur sebagai daya beli pendapatan atas barang konsumsi.

Nilai tukar petani penting untuk diukur dan diketahui untuk menunjukkan keadaan tingkat kesejahteraan petani, yang memberikan gambaran berapa besar tingkat kemiskinan dan keberhasilan kebijakan pemerintah. Nilai tukar petani juga penting sebagai pengukur kemampuan daya tukar sektor pertanian terhadap sektor non pertanian. Fluktuasi NTP menunjukkan fluktuasi kemampuan riil petani dan mengindikasikan kesejahteraan petani [17].

Perkembangan data Nilai Tukar Petani (NTP) dari tahun ke tahun dan antar wilayah menunjukkan tidak ada perbaikan yang cukup nyata. NTP di Indonesia periode 2004 – 2014 tidak kunjung meningkat (Gambar 1), Penyebab utama tidak meningkatkanya kesejahteraan petani adalah disparitas harga yang tajam antara harga di level petani dengan harga di level konsumen pada komoditas pertanian. Petani menerima harga dibawah harga keekonomiannya [15].

Peningkatan nilai tukar petani dapat dilakukan dengan menghilangkan kendala penerapan teknologi, pengendalian harga sarana produksi dan harga jual komoditas pertanian, sehingga usahatani tersebut masih memberikan keuntungan bagi petani. Kendala penerapan teknologi seperti ketersediaan benih/bibit bermutu, pupuk, obat-obatan, teknologi budidaya sampai pasca panen yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas usahatani. Namun suatu hal yang tidak boleh dilupakan adalah harga sarana produksi harus tetap terjangkau oleh petani dan harga jual komoditas tersebut masih memberikan keuntungan bagi petani. Peningkatan produktivitas kurang berarti bagi petani apabila harga jual kurang menguntungkan, pendapatan pertanian akan lebih rendah dari pengeluaran rumah tangga. Pengembangan infrastruktur, pendidikan dan pembinaan keterampilan petani sangat penting agar petani dapat bekerja secara mandiri dan nilai tukar petani itu sendiri meningkat. Perbaikan infrastruktur perlu dikomplemenkan dengan pembenahan struktur dan efisiensi pemasaran sehingga daya beli petani dan daya tukar petani dapat ditingkatkan [17].

ISBN : 978-602-73463-1-4

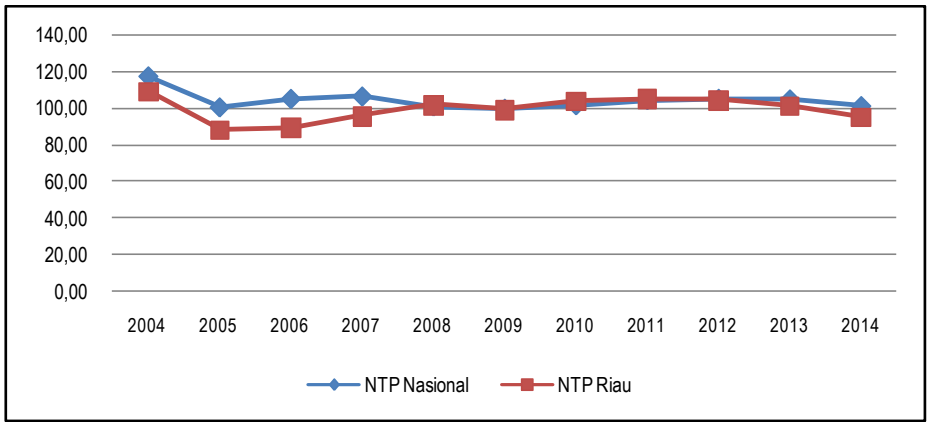

Gambar 1. Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) di Indonesia dan Provinsi Riau Tahun 2004 – 2014

Terkait pembangunan pertanian nasional lebih khusus lagi produksi pertanian, selama ini perhatian lebih banyak diberikan pada proses bagian hulu seperti akses sumber daya lahan, penyediaan berbagai sarana produksi dan teknik produksi. Memang pembangunan sektor hulu sangat penting dan tidak bisa diabaikan. Namun itu saja tidak akan cukup untuk menjawab isu kedaulatan pangan dan kemakmuran petani [13].

Pembangunan sektor pertanian dalam perspektif pembangunan nasional harus diletakkan dalam kedudukan yang seimbang dengan pembangunan sektor ekonomi lain dalam kerangka industrialisasi secara bertahap, artikulatif, dan berimbang berbasis pertanian. Pertanian untuk pembangunan dalam implementasinya apat dilakukan dengan pengembangan agribisnis berdaya saing dan berkelanjutan. Starateginya dapat dilaksanakan melalui : 1) reorientasi pembangunan dari pembangunan ekonomi konvensional kearah pembangunan ekonomi secara berkelanjutan; 2) memposisikan pertanian sebagai sektor andalan dalam pembangunan nasional; 3) mewujudkan kemandirian pangan secara berkelanjutan; 4) mengurangi jumlah petani miskin dan membangun partisipasi petani; 5) pertanian untuk pembangunan mampu memadukan pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan pertanian untuk pembangunan mampu memadukan pertumbuhan, pemerataan, dan berkelanjutan dan 6) membangun sistem agribisnis berdaya saing dan berkelanjutan [1]

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Model pembangunan pertanian Indonesia dari dulu hingga saat sekarang, sebagian besar merupakan penggulangan sejarah pelaksanaan kebijakan pembangunan di masa lalu. Perhatian lebih banyak diberikan pada proses bagian hulu seperti akses sumber daya lahan, penyediaan berbagai sarana produksi dan teknik produksi. Idiologi penyediaan pangan pangan adalah pangan murah.
2. Kebijakan pembangunan pertanian di Indonesia dari masa kemasa tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Ditemukan adanya kebijakan pembangunan pertanian setelah kemerdekaan yang menggulang kebijakan pada zaman kolonial. Perhatian yang serius terkait aspek hilir yaitu kebijakan harga yang layak masih sangat terbatas atau bahkan terabaikan. Persoalan pertanian tidak dapat dipandang sebagai persoalan sektoral, tetapi harus ditempatkan sebagai persoalan negara.
3. Implementasi pembangunan pertanian belum dapat meningkatkan kesejahteraan petani selama ini, hal ini dapat dilihat dari perkembangan nilai tukar petani yang relatif tidak menunjukkan peningkatan. Kehidupan petani Indonesia makin sulit karena memang laju kehidupannya dibiarkan berlanjut tanpa jaminan hak hidup yang lebih baik dari negara. Implementasi reformasi agraria sebagai salah satu jalan peningkatan kesejahteraan petani masih berjalan ditempat.

Saran

Kebijakan pembangunan pertanian ke depan seyogyanya lebih memperhatikan peningkatan kesejahteraan petani. Perbaikan kebijakan harga yang lebih berpihak pada petani secara langsung akan memberikan rangsangan bagi mereka untuk meningkatkan produktivitas usaha taninya. Dengan harga yang lebih baik, petani menjadi semakin serius melakukan proses produksi sehingga dapat mencapai hasil yang lebih baik. Pada gilirannya pendapatan akan meningkat dan dalam batas tertentu kemakmuran dapat diwujudkan. Selain itu, petani akan memiliki kemampuan daya beli (*purcashing power*) yang lebih baik terhadap barang industri dan jasa sehingga permintaan akan barang industri juga akan meningkat. Pada gilirannya, sektor industri dan jasa juga akan terdorong untuk lebih produktif karena adanya peningkatan permintaan. Akhirnya siklus ini secara keseluruhan juga mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Mengingat di negara manapun,

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

pemerintahnya akan berupaya memperkuat cadangan pangannya dan tidak mempercayakan kebijakan pangannya pada mekanisme pasar.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Daryanto, A. 2010. Memposisikan Secara Tepat Pembangunan Pertanian Dalam Prespektif Pembangunan Nasional. Direktur Program Pascasarjana Manajemen dan Bisnis Institut Pertanian Bogor.

[2] Syahyuti. 2013. Pemahaman terhadap Petani Kecil sebagai Landasan Kebijakan Pembangunan Pertanian, Jurnal Forum Agro Ekonomi 2013. Vol.31 Nomor 1; 15-29.

[3] Wisjnuprapto. 2013. Perspektif Ilmu-Ilmu Pertanian dalam Pembangunan Nasional. Pemikiran Guru Besar IPB. IPB-Press. Bogor.

[4] Krisnamurthi, B. 2013. Revitalisasi Pertanian dan Dialog Peradaban. Penerbit Buku Kompas. Jakarta Arifin, Bustanul.

[5] Geertz, C. 1993. Involusi Pertanian : Proses Perubahan Ekologi di Indonesia. Bhratara Karya Aksara. Jakarta. Hal 101 -105.

[6] Susatyo, R. 2006. Penguasaan Tanah dan Ketenagakerjaan di Karesidenan Semarang pada Masa Kolonial. Koperasi Ilmu Pengetahuan Sosial. Hal, 48,

[7] Pakpahan, A. 2004 Hak Hidup Petani dan Impor Produk Pertanian. Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Vol.2 Nomor 1, Maret 2004; hal 17-24.

[8] Pearson, S, dkk. 2005. Aplikasi Policy Analysis Matrix pada Pertanian Indonesia. Yayasan Obor Indonesia. Jakarta.

[9] Abisono, N. 2002. Dinamika Kebijakan Pangan Orde Baru. Jurnal Sosial dan Ilmu Politik. Vol.5, Nomor 3. Maret 2002. Hal 271-294.

[10] Bappenas. 2014. Rancangan Awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015 – 2019. Buku I Agenda Pembangunan Nasional. Kementerian Perencanaan Nasional / Bappenas. Hal.199.

[11] Hendrastomo, G. 2011. Keterpurukan Sektor Pertanian Sebagai Potret Kegagalan Industrialisasi di Indonesia. Dimensia, Vol,5 No.1. Maret 2011. Hal 71-83.

[12] Lakitan, B. 2014. Kesejahteraan Petani dan Kedaulatan Pangan. Media Indonesia.

[13] Djamal, E. 2013. Pembangunan Perdesaan Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Pemikiran Guru Besar Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara. IPB. Press.

[14] Gumiwang. R. 2014. Ketika 10 Tahun di Tangan Seorang Doktor Pangan. IPB, Petani Justru Terpuruk. 18/10/2014. Bisnis.com

[15] Arifin, Bustanul. 2013. The Roles of Input Policies in Transforming Agriculture in Indonesia. Washington. D.C. IFPRI.

[16] Subejo. 2013. Bunga Rampai Pembangunan Pertanian dan Pedesaan. Penerbit Univesitas Indonesia (UI-Press). Jakarta.

[17] Ruauw Eyverson. 2010. Nilai Tukar Petani sebagai Indikator Kesejahteraan Petani. Analisis Sosial Ekonomi. Volume 6. Nomor 2, Mei 2010: 1-8

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA MISKIN MELALUI PEMANFAATAN WAKTU LUANG ISTRIDI KAWASAN PERDESAAN (KASUS : KABUPATEN BEKASI)

Ina Helena Agustina[1)]

[1)]Fakultas Teknik Program Studi Perencanaan Wilayah Dan Kota Unisba

Email: Inahelena66@gmail.com

Naskah diterima :26 Februari 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 24 Maret 2017

ABSTRAK

Kabupaten Bekasi telah mengalami perubahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5,7% pertahun atau sebesar 232,755Ha/Tahun. Implikasinya adalah berkurangnya lahan pertanian garapan bagi petani sehingga mengakibatkan kemiskinan di Kawasan perdesaan. Jumlah keluarga miskin berdasarkan data PBI dan JKN Kabupaten Bekasi Tahun 2015 terdapat 143702 KK atau 549.120 jiwa atau sebesar 18% dari jumlah total penduduk Kabupaten Bekasi. Angka tersebut meningkat dari tahun 2013 yang jumlah penduduk miskinnya hanya 5,2% . Kemiskinan di Kabupaten Bekasi didominasi oleh profesi petani dan nelayan. Salah satu parameter kemiskinan adalah tingkat pendapatan masyarakat yang tidak mampu memenuhi kebutuhan sektor basis mereka.Walaupun pandangan lain menetapkan bahwa kemiskinan merupakan masalah multidimensi. Kemiskinan bukan hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga mencakup kerentanan dan kerawanan orang atau sekelompok orang baik laki-laki maupun perempuan untuk menjadi miskin, dan keterbatasan akses masyarakat miskin dalam penentuan kebijakan publik yang berdampak pada kehidupan mereka. Akan tetapi tingkat pendapatan masih menjadi parameter untuk melihat tingkat kemiskinan suatu wilayah. .Penelitian dilakukan dengan pendekatan deduktif. Selanjutnya dilakukan teknik sampling dengan metode slovin sehingga diperoleh 100 keluarga miskin yang menjadi sampel di perdesaan Kecamatan Pebayuran dan Kecamatan Muara Gembong. Kemudian dianalisis dengan model matematis sederhana. Ternyata dari hasil analisis menunjukkan bahwa waktu luang istri dapat menjadi varibel peningkatan pendapatan keluarga miskin maka optimalisasi waktu luang istri melalui program-program pemerintah di Kabupaten Bekasi dapat memberikan suatu solusi untuk peningkatan pendapatan keluarga miskin di Kawasan perdesaan Kabupaten Bekasi.

***Kata kunci** : Kemiskinan, Waktu Luang ,Istri*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan persoalan pembangunan yang dihadapi disetiap wilayah di dunia. Tingginya angka kemiskinan didunia mengundang perhatian dunia untuk menurunkan jumlah penduduk miskin dunia. Pengurangan jumlah penduduk miskin dunia menjadi salah satu kesepakatan global yang dinyatakan dalam tujuan pembangunan Milenium (Millenium Development Goals Tahun 2015). Dengan masuknya penanggulangan,kemiskinan sebagai agenda global maka kebijakan pembangunan di Indonesia, baik Pusat maupun Daerah.diprioritaskan untuk program-program dan kegiatan-kegiatan penanggulangan kemiskinan. Sebagai bentuk komitmen Pemerintah terhadap pengentasan penduduk miskin.

Dalam rangka mengakselerasi dan meningkatkan efektivitas upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 15 [1], mengamanatkan untuk dibentuknya wadah koordinasi lintas sektoral dan lintas pemangku kepentingan dalam penaggulangan kemiskinan baik di tingkat Pusat maupun Provinsi dan Kabupaten/Kota. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 [2], mengatur secara lugas tentang susunan keanggotaan dan peran yang harus diemban oleh Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota. Walaupun upaya penanggulanagan kemiskinan telah dibuktikan dengan sistem aturan dan pola koordinasinya akan tetapi masalah kemiskinan di Kabupaten/Kota terus saja ada bahkan meningkat seperti yang dialami Kabupaten Bekasi.

Kabupaten Bekasi telah mengalami perubahan alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian yang cukup signifikan, yaitu sebesar 5,7% pertahun atau sebesar 232,755Ha/Tahun [3]. Implikasinya adalah berkurangnya lahan pertanian garapan bagi petani sehingga mengakibatkan kemiskinan di Kawasan perdesaan. Jumlah keluarga miskin berdasarkan data PBI dan JKN Kabupaten Bekasi Tahun 2015 terdapat 143702 KK atau 549.120 jiwa atau sebesar 18% dari jumlah total penduduk Kabupaten Bekasi. Angka tersebut meningkat dari tahun 2013 dengan jumlah penduduk miskinnya hanya 5,2%. Selain itu angka kemiskinan di Kabupaten Bekasi tahun 2016 relatif tinggi jika dibandingkan dengan angka kemiskinan Provinsi Jabar sebesar 8,3%. Melihat fenomena ini maka upaya kajian kemiskinan yang bersifat empirik sangat dibutuhkan di Kabupaten Bekasi.

Berdasarkan penelitian terdahulu, dalam mengatasi masalah kemiskinan dilihat dari kemampuan masyarakatnya. Salah satu faktor kemampuanmasyarakat tersebut adalah pembentukan modal melalui upaya kemandirian masyarakat [4]. Dalam kerangka mengedepankan kemandirian masyarakat maka keluarga miskin sebagai suatu unit kajian dalam memahami kondisi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Untuk itu pendapatan keluarga menjadi sasaran melihat kemampuan dalam hal pembentukan modal. Pendapatan keluarga merupakan gabungan antara pendapatan suami dan istri. Untuk mendukung memotret suatu keluarga miskin tersebut, terutama dalam kaitannya dengan pendapatan agregatnya maka eksplorasi data yang dilihat seperti jenis pekerjaan suami maupun istri, waktu luang suami dan istri, tingkat pemenuhan konsumsi keluarga, jumlah anggota keluarga, dan peluang usaha.

METODE PENELITIAN

Paradigma penelitian ini adalah paradigma positivisme, dimana pendekatannya bersifat parsial pada kasus kemiskinan dalam suatu agregat rumah tangga. Artinya secara logik bahwa peningkatan pendapatan keluarga berasal dari pendapatan suami maupun pendapatan istri. Dengan demikian maka metode penelitian yang digunakan adalah metode deduktif dengan rumusan rumusan hipotesis bahwa tingkat pendapatan keluarga miskin adalah pendapatan agregat istri dan suami yang dipengaruhi oleh waktu luang suami maupun waktu luang istri. Selanjutnya dilakukan teknik sampling dengan metode slovin. Dimana Wilayah penelitian Kabupaten Bekasi yang terdiri dari 23 kecamatan, yaitu Kecamatan Setu, Serang Baru, Cikarang Pusat, Cikarang selatan, Cibarusah, Bojongmangu, Cikarang Timur, Kedungwaringin, Cikarang Utara, Karangbahagia, Cibitung, Cikarang Barat, Tambun Selatan, Tambun Utara, Babelan, Tarumajaya, Tambelang, Sukawangi, Sukatani, Sukakarya, Pebayuran, Cabangbungin dan Kecamatan Muara Gembong yang tersebar di 180 desa dan 7 Kelurahan.

Sesuai dengan tujuan penelitian maka, sampel yang diambil sebagai responden adalah kecamatan yang termasuk ke daerah pedesaan, baik itu petani maupun nelayan. Maka yang diambil sebagai sampel adalah masyarakat miskin yang berada di kecamatan Pebayuran, Sukakarya, Sukatani dan yang berada di sebelat timur Kabupaten Bekasi kemudian di sebelah selatan diambil daerah Bojongmangu dan Cibarusah kemudian dari sebelah utara di ambil kecamatan Muaragembong dengan masing-masing diambil sampel secara proporsi berdasarkan data banyaknya jumlah warga.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk Miskin

Kecamatan	Jumlah Penduduk Miskin (KK)	Jumlah Responden
Pebayuran	13,745	36
Sukakarya	5,326	14
Sukatani	6,621	18
Bojongmangu	3,238	9
Cibarusah	4,028	11
Muaragembong	4,813	13
Jumlah	37,771	100

Sumber : Data PBI-JKN Dinas Sosial Kab Bekasi, Agustus 2016

Pendekatan statistik dapat menentukan besarnya ukuran sampel dengan metode yang digunakan adalah menggunakan rumus Slovin [5], sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

dimana :

n : jumlah sampel

N : jumlah populasi = 37.771

e : batas toleransi kesalahan (error tolerance) = 0.1

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Berdasarkan rumus di atas, diperoleh sampel minimal sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$
$$n = \frac{37.771}{1 + (37.771\ x\ 0.1^2)}$$
$$n = \frac{37.771}{1 + (37.771\ x\ 0.01)}$$
$n = 99.74$ dibulatkan menjadi 100

Berdasarkan perhitungan di atas dapat dilihat bahwa sampel minimal yang harus diambil dalam penelitian ini dengan kekeliruan pengambilan sampel sebesar 0.1=10% adalah 100 orang, dengan menggunakan teknik *Quota sampling* yang memiliki pola yang hampir sama dengan *stratified sampling*. Diambil 100 responden dari masing-masing kecamatan tersebut diatas secara acak yang termasuk dalam kategorisasi pedesaan.Kemudian dianalisis dengan model matematis sederhana.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perspektif Kemiskinan

Kemiskinan sering dianalogkan dengan semua sifat kekurangan dan ketidakberdayaan. Analog ini mengakibatkan definisi kemiskinan menjadi sangat luas sehingga sulit untuk memahaminya dan kesulitan untuk menentukan langkah kebijakan yang perlu dilakukan untuk menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan dapat didefinisikan dalam berbagai versi. Ada batasan sederhana yang mengkaitkan kemiskinan dengan standar minimal yang dihitung berdasarkan pendapatan (income based poverty line). Mereka yang dinyatakan miskin adalah individu, rumah tangga, masyarakat, atau kelompok sosial lainnya yang memperoleh pendapatan dibawah standar minimal. Batasan ini mengabaikan sumber daya tunai (non cash) yang tersedia di masyarakat dan sulit digunakan dalam situasi setempat yang terbatas [6].

Kemiskinan diartikan sebagai ketidak mampuan berpartisipasi dalam bermasyarakat secara ekonomi, sosial budaya dan politik. Pengertian ini melihat kemiskinan bersipat multidemensi yang mencakup kemiskinan insani dan martabat, konsep kemiskinan multidemensi melihat kemiskinan menjadi berapa katagori yaitu kemiskinan pendapatan, kesehatan, pendidikan, ketenaga kerjaan, ketimpangan struktur usaha, ketidak berdayaan, penyandang masalah kesejahtraan sosial, ketimpangan gender dan kesenjangan antar golongan dan wilayah [7].

Selama dekade 1970-an pada saat minat dan perhatian pada masalah kemiskinan tengah meningkat, para ahli ekonomi pembangunan mulai berusaha mengukur luasnya atau kadar parahnya tingkat kemiskinan di dalam suatu negara dan kemiskinan relative antarnegara dengan cara menentukan atau menciptakan suatu batasan yang lazim disebut sebagai garis kemiskinan (poverty line). Setelah melakukan telaah yang lebih mendalam mereka menemukan konsep kemiskinan absolut (absolute poverty) yang kemudian dipakai secara luas. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan fisik minimum setiap orang berupa kecukupan makanan, pakaian serta perumahan sehinggga dapat menjamin kelangsungan hidupnya [8].

BAPPENAS [9], mendefinisikan kemiskinan sebagai kondisi dimana seseorang atau kelompok orang, laki-laki dan perempuan, tidak terpenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Definisi kemiskinan ini beranjak dari pendekatan berbasis hak yang mengakui bahwa masyarakat miskin, baik laki-laki maupun perempuan, mempunyai hak-hak dasar yang sama dengan anggota masyarakat lainnya.

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan pemenuhan hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang, laki-laki dan perempuan, dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Hak-hak dasar terdiri dari hak-hak yang dipahami masyarakat miskin sebagai hak mereka untuk dapat menikmati kehidupan yang bermartabat dan hak yang diakui dalam peraturan perundang-undangan. Hak-hak dasar yang diakui secara umum antara lain meliputi terpenuhinya kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, sumberdaya alam dan lingkungan hidup, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan, dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik, baik bagi perempuan maupun laki-laki.

Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Kemiskinan merupakan fenomena yang

kompleks, bersifat multidemensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri, berdasarkan temuan dari berbagai kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survai.

Hak-hak dasar tidak berdiri sendiri tetapi saling mempengaruhi satu sama lain sehingga tidak terpenuhinya satu hak dapat mempengaruhi pemenuhan hak lainnya. Kemiskinan merupakan fenomena yang kompleks, bersifat multidemensi dan tidak dapat secara mudah dilihat dari suatu angka absolut. Luasnya wilayah dan sangat beragamnya budaya masyarakat menyebabkan kondisi dan permasalahan kemiskinan di Indonesia menjadi sangat beragam dengan sifat-sifat lokal yang kuat dan pengalaman kemiskinan yang berbeda antara perempuan dan laki-laki. Kondisi dan permasalahan kemiskinan secara tidak langsung tergambar dari fakta yang diungkapkan menurut persepsi dan pendapat masyarakat miskin itu sendiri, berdasarkan temuan dari berbagai kajian, dan indikator sosial dan ekonomi yang dikumpulkan dari kegiatan sensus dan survai.

Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) dan pendekatan head count index yaitu merupakan ukuran yang menggunakan kemiskinan absolut [10]. Lebih lanjut Kuncoro [10], mencoba mengidentifikasikan penyebab kemiskinan dipandang dari sisi ekonomi. Pertama, secara mikro, kemiskinan muncul karena adanya ketidaksamaan pola kepemilikan sumberdaya yang menimbulkan distribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumberdaya dalam jumlah terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumberdaya manusia. Kualitas sumberdaya manusia yang rendah berarti produktivitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumberdaya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung, adanya diskriminasi, atau karena keturunan. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dalam modal.

Ketiga penyebab kemiskinan ini bermuara pada teori lingkaran setan kemiskinan (vicious circle ot poverty). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi. Rendahnya investasi berakibat pada keterbelakangan, dan seterusnya. Logika berpikir ini dikemukakan oleh Ragnar Nurkse, ekonom pembangunan ternama, di tahun 1953 yang mengatakan: "*a poor country is poor because it is poor*" (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Kuncoro [11], menyatakan penyebab kemiskinan jika diidentifikasi sangat kompleks dan saling terkait yaitu:

1. Kualitas sumber daya manusia yang rendah, baik motivasi maupun penguasaan management dan teknologi;
2. Kelembagaan yang belum mampu menjalankan dan mengawal pelaksanaan pembangunan;
3. Prasarana dan sarana yang belum meratadan sesuai dengan kebutuhan pembangunan;
4. Minimnya modal dan; dan
5. Berbelitnya prosedur dan peraturan yang ada.

Kelemahan ini menyebabkan penduduk miskin tidak mampu memanfaatkan peluang yang ada sehingga potensi dan peluang ekonomi yang ada diserap dan dimanfaatkan sepenuhnya oleh kelompok wilayah dan sektor yang kaya dan mampu, akibatnya penduduk miskin relatif menjadi lebih miskin lagi karena tertinggal.

Pada bagian lain juga disebutkan berdasarkan penyebabnya, kemiskinan dapat dibedakan dalam tiga pengertian: kemiskinan natural (alamiah), kemiskinan struktural (buatan) dan kemiskinan kultural. Kemiskinan natural adalah keadaan miskin, karena asalnya memang miskin. Kelompok masyarakat ini miskin karena tidak memiliki sumber daya yang memadai, baik sumber daya alam, sumber daya manusia maupun sumber daya pembangunan lainnya. Alfin [12] mendefinisikan kemiskinan struktural (kemiskinan buatan) adalah kemiskinan yang diderita oleh suatu golongan masyarakat karena struktur masyarakat itu mengakibatkan mereka tidak dapat ikut menggunakan sumber-sumber pendapatan yang seharusnya tersedia bagi mereka .Kemiskinan kultural mengacu pada sikap hidup seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh gaya hidup, kebiasaan hidup dan budayanya, dimana mereka sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan.

Ada beberapa pandangan mengenai penyebab kemiskinan yang dikemukakan oleh para pakar pembangunan dan sosial di Indonesia. Untuk lebih jelasnya lihat uraian dibawah ini. Ditinjau dari sumber penyebab kemiskinan, dikenal adanya kemiskinan kultural dan kemiskinan struktural. Kemiskinan kultural mengacu pada sikap seseorang atau masyarakat yang disebabkan oleh "gaya hidup", "kebiasaan hidup" dan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

"budayanya". Mereka sudah merasa kecukupan dan tidak merasa kekurangan. Kelompok masyarakat ini tidak terlalu tergerak berusaha untuk memperbaiki tingkat kehidupannya sehingga menyebabkan pendapatan mereka rendah menurut ukuran yang umum dipakai. Dengan ukuran absolut, misalnya tingkat pendapatan minimum, mereka dapat dikatakan miskin, tetapi mereka tidak merasa miskin dan tidak mau disebut miskin. Dalam keadaan seperti ini, bermacam tolok ukur kebijaksanaan pembangunan tidak dengan mudah dapat menjangkau mereka.

Keadaan pemilikan sumber daya yang tidak merata, kemampuan masyarakat yang tidak seimbang dan ketidaksamaan kesempatan dalam berusaha dan memperoleh pendapatan akan menyebabkan keikutsertaan dalam pembangunan tidak merata pula. Ketimpangan ini pada gilirannya menyebabkan perolehan pendapatan tidak seimbang, dan selanjutnya menimbulkan struktur masyarakat yang timpang. Perbedaan antara masyarakat yang telah ikut serta dalam proses pembangunan dengan yang masih tertinggal menyebabkan keadaan kemiskinan, baik absolut maupun relatif. Keadaan semacam ini dikenal sebagai kemiskinan yang disebabkan oleh pembangunan yang belum seimbang dan hasilnya belum terbagi merata. Kondisi kemiskinan dapat disebabkan oleh sekurang-kurangnya empat penyebab berikut :

a. Rendahnya taraf pendidikan

Taraf pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas danmenyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Dalam bersaing untuk mendapatkan lapangan kerja yang ada, taraf pendidikan menentukan. Taraf pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang.

b. Rendahnya derajat kesehatan

Taraf kesehatan dan gizi yang rendah menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, dan daya pikir, dan prakarsa.

c. Terbatasnya lapangan kerja

Keadaan kemiskinan karena kondisi pendidikan dan kesehatan diperberat oleh terbatasnya lapangan pekerjaan. Selama ada lapangan kerja atau kegiatan usaha, selama itu ada harapan memutuskan.

d. Kondisi keterisolasian

Banyak penduduk miskin, secara ekonomi tidak berdaya karena terpencil dan terisolasi. Mereka hidup terpencil sehingga sulit atau tidak dapat terjangkau oleh pelayanan pendidikan, kesehatan, dan gerak kemajuan yang dinikmati masyarakat lainnya.

Keempat penyebab yang diuraikan di atas menunjukkan adanya lingkaran kemiskinan. Rumah tangga miskin pada umumnya berpendidikan rendah dan terpusat di daerah perdesaan. Karena berpendidikan rendah, maka produktivitasnya pun rendah sehingga imbalan yang diterima tidak cukup memadai untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum, antara lain kebutuhan pangan, sandang, kesehatan, perumahan, dan pendidikan, yang diperlukan untuk dapat hidup dan bekerja. Akibatnya, rumah tangga miskin akan menghasilkan keluarga miskin pula pada generasi berikutnya. Imbalan yang rendah juga menghambat pengembangan kegiatan sosial ekonomi, serta membatasi peran serta penduduk miskin dalam kegiatan pembangunan. Sedangkan di dalam proses pembangunan, yang menikmati hasil pembangunan haruslah yang dapat menghasilkan sesuatu. Maka kunci pemecahan masalah kemiskinan adalah memberi kesempatan kepada penduduk miskin untuk ikut serta dalam proses produksi dan kepemilikan aset produksi.

Kondisi Keluarga Miskin Wilayah Kasus

Berpijak dari perspektif kemiskinan seperti yang telah dijelaskan di atas maka dalam penelitian di Kabupaten Bekasi digunakan data keluarga miskin dari PBI. Data PBI merupakan data yang memberikan informasi nama dan alamat dari keluarga miskin , maka berdasarkan data tersebut dilakukan survey secara random terhadap 100 sampel keluarga miskin. Hasil dari 100 keluarga miskin yang disurvei ternyata menunjukkan38,7% pekerjaan suami adalah buruh tani, artinya mereka tidak memliki lahan sawah. Sedangkan 22,7% berprofesi sebagai pedagang baik itu pedagang keliling, pedagang makanan maupun pedagang ikan hasil tangkapan para nelayan. Sedangkan yang berprofesi sebagai nelayan terambil 17,3%. Buruh serabutan sebanyak 10,7%. Buruh serabutan yang dimaksud adalah buruh bangunan, buruh tani musiman dan buruh penangkap ikan sebagai pembantu nelayan. Sisanya sebanyak 5,3% adalah tukang ojek. Akan tetapi secara historis teridentifikasi bahwa masa lalu profesi diluar petani dan nelayan berasal dari petani dan nelayan sebesar 85,3 % selebihnya telah berprofesi seperti itu. Secara historis mereka berasal dari keturunan keluarga petani

dan nelayan. Hasil wawancara menunjukkan pendidikan terakhir mereka 70,3% adalah tamat SD dan sisanya tidak tamat SD.

Berdasarkan hasil wawancara menyatakan bahwa sebesar 55% istri dalam keluarga tersebut tidak mempunyai pekerjaan sementara 45% memiliki pekerjaan. Dari jumlah Istri yang memiliki pekerjaan ternyata 35,6% sebagai buruh tani, 31,1% sebagai buruh serabutan, seperti buruh mencuci pakaian, buruh membantu membersihkan ikan dan pekerjaan apa saja. Sedangkan 33,3%nya memiliki profesi sebagai pedagang baik itu pedagang ikan, makanan maupuan pedagang keliling.

Sistem pendapatan keluarga baik istri maupun suami dalam bentuk upah harian. Adapun besar upah suami perhari nya sebagai buruh tani memiliki besaran rata-rata Rp. 100.000/hari .Mereka bekerja rata-rataselama 10 jam/hari. Pedagang keliling pun rata-rata mendapatkan penghasilan Rp 100.000/hari. Untuk buruh serabutan yang bekerja 6- 8 jam/hari rata-rata mendapat Rp. 50.000/hari akan tetapi mereka mereka merasa cukup jika mendapat beras saja. Untuk profesi buruh bangunan sehari bekerja mendapatkan upah sebesar Rp. 100.000 tetapi jika tidak mendapat pekerjaan mereka sama sekali tidak mendapatkan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Besarnya pendapatan istri sebagai buruh cuci pakaian sebesar Rp. 400.000/ bulannya sedangkan untuk istri yang memilih buruh tani mereka mendapatkan Rp. 75.000/hari. Pendapatan seperti ini dinilai oleh 44% responden kurang sedangkan 56% menilai mencukupi. Walaupun mereka mengakui bahwa konsumsi responden saat tidak musim tani berkurang drastis sehingga mereka hanya mengkonsumsi nasi dan garam.

Besaran pengeluaran yang rutin mereka keluarkan adalah untuk makan, minum dan transportasi anak sekolah. Biaya pendidikan dasar anak mereka mendapat subsidi dari pemerintah Kabupaten Bekasi sehingga gratis. Demikian pula dengan biaya kesehatan manakala terdapat anggota keluarga yang sakit. Para responden berusaha untuk tidak mempunyai pinjaman keuangan ke manapun.

Model Matematis Peningkatan Pendapatan Keluarga Miskin Melalui Pemanfaatan Waktu Luang Istri

Model matematis dibuat dengan struktur pendapatan rumah tangga adalah gabungan dari pendapatan suami dan istri yang ternyata berpengaruh lurus terhadap pemanfaatan waktu luang istri dalam rumah tangga miskin. Variabel waktu luang istri yang diambil sebagai variabel bebas karena dari hasil uji antar variabel menunjukkan bahwa variabel dari waktu luang istri bisa menjadi penambahan pendapatan. Untuk mendapatkan modelnya maka digunakan analsiis statistik regresi linier. Regresi sederhana didasarkan pada hubungan fungsional maupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Persamaan Umum Regresi linier sederhana adalah:

$Y = a + bX + e$

Dimana:

X (waktu luang istri)	Y (Pendapatan)
1 jam sehari	Rp. 5.471,882
2 jam sehari	Rp. 4.464,994
3 jam sehari	Rp. 3.458,106
4 jam sehari	Rp. 2.451,218
5 jam sehari	Rp. 1.444,330

Y = Subyek dalam variabel dependen yang diprediksikan.
a = Harga Y bila X = 0 (harga konstan)
b = Angka arah koefisien regresi, yang menunjukkan angka peningkatan ataupun penurunan variabel dependen
yang didasarkan pada variabel independen apabila b (+) maka terdapat kenaikan sedangkan jika b (-) maka
terjadi penurunan.
X = Subyek pada variabel independen yang mempunyai nilai tertentu.
e = variabel kekeliruan
Harga dari a dan b dapat dicari dengan rumus, menurut Sugiyono (1999:206).

$$a = \frac{(\sum Yi)(\sum Xi)^2 - (\sum Xi)(\sum XiYi)}{n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2}$$

$$b = \frac{n\sum XiYi - (\sum Xi)(\sum Yi)}{n\sum Xi^2 - (\sum Xi)^2}$$

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dengan bantuan SPSS Versi 20, maka dapat dilihat secara lebih jelasnya output berikut ini.

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.755[a]	.570	.565	9596.3484

a. Predictors: (Constant), waktu luang istri

Berdasarkan output di atas dapat dilihat bahwa waktu luang istri mempunyai pengaruh yang signifikans terhadap pendapatan rumah tangga, dimana pengaruh atau kontribusi dari waktu luang istri adalah sebesar 57.0% sisanya pendapatan suami dapat dipengaruhi oleh variabel lain, model pengaruh waktu luang istri terhadap pendapatan suami adalah sebagai berikut:

Coefficients[a]

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	6478.767	1696.216		3.820	.000
	waktu luang istri	-1006.888	.031	-.947	-29.102	.000

a. Dependent Variable: pendapatan

Out put di atas menunjukkan bahwa Pendapatan rumah tangga = 6.478,77 - 1006.88 waktu luang istri + e. Artinya, apabila istri ikut bekerja dengan suami maka pendapatan akan bertambah sebesar Rp. 6.478,77 dan sebaliknya apabila waktu luang istri tidak dipergunakan maka pendapatan rumah tangga akan kecil, karena berdasarkan model di atas dapat dilihat bahwa hubungan pengaruh antara pendapatan rumah tangga dengan waktu luang istri menunjukkan pengaruh yang terbalik (-) dan signifikan (p-value < 0.05). Sehingga apabila waktu luang istri semakin kecil maka pendapatan rumah tangga tersebut akan meningkat dan sebaliknya semakin lama waktu luang istri yang tidak dipergunakan maka tidak akan ada tambahan pendapatan. misalnya apabila waktu luang istri bertambah setiap 1 jam per hari maka pendapatan akan bertambah. Berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa waktu luang istri berpengaruh terhadap besarnya pendapatan yang diterima oleh keluarga miskin di daerah kasus tersebut.

Konstruksi Kemiskinan Di Wilayah Kasus

Disparitas wilayah sangat kentara di Kabupaten Bekasi. Kabupaten Bekasi memiliki 23 Kecamatan dengan 180 desa dan 7 kelurahan. Wilayah yang tumbuh cepat terkonsentrasi di wilayah yang berbatasan dengan DKI Jakarta serta yang menjadi Kawasan Industri seperti Cikarang pusat, Cikarang Barat, Cikarang Timur, Cikarang Selatan, Kedungwaringin, Tambun Selatan dan Kedungwaringin. Sedangkan wilayah lainnya merupakan wilayah yang kurang cepat tumbuh. Wilayah yang kurang cepat tumbuh masih didominasi oleh kegiatan pertanian. Dominasi keluarga miskin berada di Kecamatan Pebayuran yang dominasi kegiatannya adalah pertanian.

Solusi kemiskinan di Kabupaten Bekasi tidak cukup di serahkan pada suatu program daerah saja. Karena pada dasarnya kemiskinan di Kabupaten Bekasi merupakan dampak domino dari Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian. Akibat hilangnya lahan garapan petani, maka petani bekerja di luar keahlian mereka. Alih fungsi lahan di Kabupaten Bekasi relatif tinggi yaitu sebesar 5,7% /tahu [3]. Perubahan penggunaan lahan di Kabupaten Bekasi terjadi karena Kebijakan Pemerintah Pusat yang mengalokasikan Kawasan Industri terbesar seAsia Tenggara di Kabupaten Bekasi. Kebijakan dalam bentuk Keputusan Presiden No 41 [13] seperti yang dapat dilihat pada tabel 2 yang menjelaskan kawasan industri di Kabupaten Bekasi.

Kebijakan tersebut diperkuat dengan terbitnyaUndang Undang Nomor 39 [14]. Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat mendorong kawasan usaha Cikarang, Kab Bekasi, menjadi KEK. Pemerintah pusat sangat berkepentingan dengan Kabupaten Bekasi karena menurut catatan BAPPENAS [9], setiap tahunnya wilayah Kabupaten Bekasi menyumbang sekitar Rp. 40 tryliun uang pajaknya ke negara dari sektor industri yang dimulai sejak tahun 1980an, itulah salah satu faktor mengapa Kabupaten Bekasi menjadi daerah yang sangat penting bagi Pemerintah Pusat (2015). Konstruksi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bekasi akibat dari kepentingan negara dengan demikian negara/pemerintah pusat harus turut bertanggung jawab terhadap proses pemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bekasi tersebut.

Tabel 2. Kawasan Industri Di Kabupaten Bekasi

No	Nama Kawasan Industri	Luas (Ha)
1	Jababeka	1.100
2	Bekasi Fajar Industrial Estate	800
3	Megapolis Manunggal Industrial Estate	805
4	Lippo City Development	470,4
5	East Jakarta Industri Park (EJIP)	320
6	Hyundai Inti Development	200
7	Rawa Intan	100
8	Cikarang Hijau Indah	230
9	Bekasi Matra Industrial Estate	500
10	Alinda Tama Sakti	200
11	Gobel Dharma Nusantara	54
12	YKK Indinesia Zipper	20
13	Kawasan Dharma Industri	18
14	Indo Kargomas Persada	230
15	Gerbang Teknologi Cikarang	240
16	Pura Delta Lestari	1.000
17	Permata Kirana Sakti	125
18	Adito Mulia Sakti	50
Kabupaten Bekasi		6.462,4

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bekasi, 2015

Arahan Strategi Penanggulangan Kemiskinan di Wilayah Kasus

Berdasarkan hasil pemodelan menunjukkan kemiskinan di perdesaan dapat dikonstruksikan proses penanggulangannya dengan cara : memanfaatkan waktu luang istri melalui kegiatan produksi.Dengan demikian maka program-program yang dapat mengurangi kemiskinan adalah program yang menekankan pada pemberdayaan keluarga terutama istri dalam suatu keluarga. Adapun program-program yang telah ada di Kabupaten Bekasi terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga adalah Program Kesejahteraan Keluarga (PKK). Gerakan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada tuhan yang maha esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.

Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan, Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah), secara fungsional. Dapat dikemukakan bahwa kunci berkembangnya program dan kegiatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK), justru ada peran nyata diwujudkan oleh istri Pimpinan Daerah.

Strategi Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam upaya menjangkau sebanyak mungkin keluarga, dilaksanakan melalui "Kelompok Dasawisma", yaitu kelompok 10 – 20 KK yang berdekatan. Ketua Kelompok Dasawisma dipilih dari dan oleh anggota kelompok. Ketua Kelompok Dasawisma membina 10 rumah dan mempunyai tugas menyuluh, menggerakkan dan mencatat kondisi keluarga yang ada dalam kelompoknya. Semua informasi harus disampaikan kepada kelompok Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) setingkat diatasnya, yang akhirnya sampai di Tim Penggerak Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) Desa/Kelurahan .Salah satu upaya strategis yang dilakukan oleh Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam hal pemberdayaan penanggulangan kemiskinan adalah Pengembangan Kehidupan Berkoperasi. Pengembangan kehidupan berkoperasi yaitu upaya untuk meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan UP2K-PKK (giatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang merupakan bentuk usaha bagian dari kegiatan 10 program pokok Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai usaha bersama atau perorangan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera degan sasarannya adalah:

1. Keluarga berpenghasilan rendah
2. Yang telah memiliki usaha
3. Yang tergabung dalam kelompok atau perorangan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

4. Membutuhkan modal

Secara keseluruan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) adalah:
1. Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
9. Kelestarian Lingkungan Hidup
10. Perencanaan Sehat

Kesepuluh program tersebut satu dengan yang lainnya merupakan program yang saling berkait dan bersifat integrasi untuk menciptakan suatu keluarga yang sejahtera dalam perspektf ekonomi, sosial dan budaya. Program yang memiliki keterkaitan erat dengan peningkatan pendapatan keluarga adalah program ke delapan yaitu pengembangan kehidupan berkoperasi. Pengembangan kehidupan berkoperasi yaitu upaya untuk meningkatkan pembinaan, pengelolaan dan pengembangan UP2K-PKK (Kegiatan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga) yang merupakan bentuk usaha bagian dari kegiatan 10 program pokok Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai usaha bersama atau perorangan; untuk meningkatkan pendapatan keluarga, dalam rangka mewujudkan keluarga sejahtera degan sasarannya adalah:
1. Keluarga berpenghasilan rendah;
2. Yang telah memiliki usaha;
3. Yang tergabung dalam kelompok atau perorangan;
4. Membutuhkan modal.

Jenis usaha yang telah dikembangkan selama ini yang bersumber dari bantuan dana bergulir Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi antara lain: Pelele Ikan Laut dan tambak, Kerajinan Kue Dodol dan makanan lainya. Namun kelompok UP2K-PKK yang ada di Desa Pantai Mekar Kecamatan Muara Gembong ini masih tergolong klasifikasi UP2K-PKK Madya (tingkat sedang), masih membutuhkan bimbingan lebih lanjut dan tambahan modal.

Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) merefleksikan program padu serasi dalam menciptakan kesejahteraan suatu unit keluarga. Dengan demikian satu program dengan program yang lainnya tidak dapat dilepaskan untuk membangun suatu keluarga yang mapan secara ekonomi tetapi juga sejahtera secara sosial dan menegakkan nilai-nilai budaya Bangsa Indonesia. Hal ini tercermin dalam pengembangan program perencanaan sehat dalam yang tertuang dalam program PKK tersebut. Tujuan dari program perencanaan sehat adalah merencanakan keseimbangan, keserasian, keselarasan,antara pemasukan dan pengeluaran keluarga, mengatur kehidupan keluarga sesuai kemampuan masing-masing menuju terwujudnya keluarga berkualitas yaitu melalui Keluarga Berencana (KB), reproduksi sehat, dan pendewasaan usia perkawinan. Adapun kegiatan yang dilakukan dalam program perencanaan sehat yaitu:

1. Penyuluhan tentang mengatur kehidupan keluarga yang selaras serasi dan seimbang dengan melibatkan instansi terkait dalam pertemuan yang digelar di tingkat desa;
2. Penyuluhan merencanakan kehidupan dan penghidupan untuk masa depan dengan melibatkan petugas/penyuluh Keluarga Berencana (KB) pada kegiatan Posyandu dan pertemuan lainnya;Melakukan gerakan Keluarga Berencana Nasional dengan bekerja sama dengan Kepala UPTB-PPKB dan Kepala UPTD Puskesmas, dan para Kepala Desa, dengan pelayanan gratis pasca banjir, dan Pelayanan Keluarga Berencana (KB) IUD dan implant gratis dengan sistim jemput bola melakukan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di desa–desa.

Dengan demikian maka kemiskinan yang terjadi dalam suatu agregat keluarga miskin di wilayah kasus (Kabupaten Bekasi) dapat ditanggulang melalui penguatan peran istri. Dimana secara teritegrasi masuk melalui pengembangan keluarga sejahtera yan telah diusung program PKK. Penguatan Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) terutama untuk UPPKS dan kegiatan PEKKA (Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga). PEKKA telah dilakukan dibeberapa kecamatan seperti Kecamatan Tambun Selatan, Kecamatan Pebayuran, Kecamatan Cibarusah dan Kecamatan Cirakang Barat. Untuk UPPKS tidak cukup hanya pada pemberian modal

semata tetapi harus disinergikan dengan pengembangan keterampilan seperti program PEKKA. Dimana peningkatan keterampilan para istri sudah menjadi solusi utama dalam masalah penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

Dengan demikian fungsi dan peran Tenaga Penggerak (TP) Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menciptakan keluarga terampil sehingga dapat menciptakan usaha bahkan meningkatkan pendapatan keluarganya maka Tenaga Penggerak (TP) memiliki kedudukan yang sangat strategis. Karena Tenaga Penggerak (TP) Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi motor penggerak sekaligus motivator, dinamisator dan fasilitator kegiatan. Tenaga Penggerak (TP) Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa selalu bergerak aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat dengan harapan hasil pembinaan dan penyuluhan tersebut di bawa dan diterapkan oleh ibu-ibu di keluarganya masing-masing. Sehingga ibu sebagai pendamping suami dapat berperan lebih optimal dalam ikut mewujudkan keluarga yang sehat, berketahanan dan sejahtera. Untuk mengoptimalkan peran Tenaga Penggerak (TP) maka sudah saatnya Tenaga Penggerak (TP) diberikan dana insentif dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pembahasan pada bagian sebelumya maka dapat disimpulkan bahwa untuk meningkatkan pendapatan keluarga miskin dilakukan dengan peningkatan produktivitas waktu luang istri. Karena berdasarkan model matematis sederhana menghasilkan Out put di atas menunjukkan bahwa Pendapatan rumah tangga = 6.478,77 - 1006.88 waktu luang istri + e. Artinya, apabila istri ikut bekerja dengan suami maka pendapatan akan bertambah sebesar Rp. 6.478,77 dan sebaliknya apabila waktu luang istri tidak dipergunakan maka pendapatan rumah tangga akan kecil, karena berdasarkan model di atas dapat dilihat bahwa hubungan pengaruh antara pendapatan rumah tangga dengan waktu luang istri menunjukkan pengaruh yang terbalik (-) dan signifikan (p-value < 0.05). Sehingga apabila waktu luang istri semakin kecil maka pendapatan rumah tangga tersebut akan meningkat dan sebaliknya semakin lama waktu luang istri yang tidak dipergunakan maka tidak akan ada tambahan pendapatan

Adapun upaya peningkatan produktivitas waktu luang istri dilakukan melalui program PKK Kabupaten Bekasi yaitu program dasawiswa dengan penggerak PKK melalui tenaga kader yang dirancang secara profesional. Akar masalah kemiskinan di Kabupaten Bekasi tidak cukup dilakukan dengan solusi program Pemerintah daerah karena konstruksi kemiskinan yang terjadi diakibatkan oleh peran Pemerintah pusat yang menetapkan Kabupaten bekasi sebagai kawasan Industri dengan sumbangan dana pada devisa negara sebesar 40 triyun/tahun. Dengan demikian maka Pemerintah Pusat wajib menanggulangi kemiskinan yang terjadi di Kabupaten Bekasi. Penanggulangannya melalui bantuan pendanaan terutama untuk menggerakkan pembangunan program PKK Kabupaten Bekasi, karena programPKK merupakan pilar yang mampu menyentuh keluarga miskin di tatanan suatu kelompok masyarakat suatu wilayah termasuk di kabupaten Bekasi. Program penanggulangan kemiskinan di Perdesaan Kabupaten Bekasi dapat ditanggulangi dengan strategi sevagai berikut :

1. Rekonstruksi Program Kesejahteraan Keluarga (PKK)

   Fungsi dan peran Tenaga Penggerak (TP) pada Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) dalam menciptakan keluarga terampil sehingga dapat menciptakan usaha bahkan meningkatkan pendapatan keluarganya maka Tenaga Penggerak (TP) memiliki kedudukan yang sangat strategis. Karena Tenaga Penggerak (TP) Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) menjadi motor penggerak sekaligus motivator, dinamisator dan fasilitator kegiatan. Tenaga Penggerak (TP) Program Kesejahteraan Keluarga (PKK) baik di tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan maupun desa selalu bergerak aktif melakukan pembinaan dan penyuluhan pada masyarakat dengan harapan hasil pembinaan dan penyuluhan tersebut di bawa dan diterapkan oleh ibu-ibu di keluarganya masing-masing. Sehingga ibu sebagai pendamping suami dapat berperan lebih optimal dalam ikut mewujudkan keluarga yang sehat, berketahanan dan sejahtera. Untuk mengoptimalkan peran Tenaga Penggerak (TP) maka sudah saatnya Tenaga Penggerak (TP) diberikan dana insentif dari sumber Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bekasi. Melalui bantuan dari anggaran pemerintah pusat terutama dari pendanaan yang berkaitan dengan adanya Kawasan Industri di Kabupaten Bekasi.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

2. Pengembangan Kreativitas Keluarga Miskin Melalui Pencangkokkan Kegiatan Kampus

Untuk mengembangkan kreativitas kelompok keluarga miskin tersebut dapat mencanggokkan dengan kegiatan kampus yang dikerjasamakan dengan perguruan tinggi. Terutama untuk fokus pada membangun produk berdasarkan kreatifitas sumber daya yang ada di Kabupaten Bekasi.

3. Integrasi Produk dari Keluarga Miskin Perdesaan dengan UKM dan Pariwisata

Arahan program berikutnya adalah mengintegrasikan produk-produk unggulan lokal Kabupaten Bekasi baik berupa makanan maupun kreasi produk non makanan untuk dikembangkan. Produk-produk unggulan lokal dikembangkan oleh keluarga miskin tersebut tentunya dengan bantuan pihak pemerintah. Produk mereka dibeli oleh pemerintah daerah untuk kemudian di kaitkan dengan pengembangan UKM (Usaha Kecil Menengah) di Kabupaten Bekasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

[2] Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Kabupaten/Kota

[3] Dwiardi, Robinov dan Ina Helena Agustina (2016),*Kajian Alih Fungsi Lahan Pertanian terhadap Swasembada Beras di Kabupaten Bekasi*, Spesia , UNISBA, Bandung

[4] Indratno , Imam dan Ina Helena Agustina 2005, *Studi Kemampuan Masyarakat Dalam Pengembangan Ekonomi Lokal Sebagai Upaya Pengentasan Kemisminan (Studi Kasus Desa Tegalurung Kecamatan Legon Kulon Kabupaten Subang*), Volume 21No 3http://ejournal.unisba.ac.id/index.php/mimbar/article/view/185

[5] Sevilla, Consuelo (2007). *Research Methods*. Rex Printing Company. Quezon City.

[6] Padmowihardjo,Soedijanto 2004. *Menata Kembali Penyuluhan Pertanian Di Era Pembangunan* Agribisnis. Bandung: Departemen Pertanian.

[7] Mustofa, Solehatul Muhamad 2005. *Kemiskinan Mayarakat Petani Desa Di Jawa*. Semarang: Unnes Perss.

[8] Todaro, Michael P, dan Smith, Stephen C, 2004. *Pembangunan Ekonomi di Dunia* Ketiga Edisi Kedelapan. Jakarta: Penerbit Erlangga.

[9] Bappenas. 2005. Strategi Nasional Penanggulan Kemiskinan. Sekretariat Kelompo Kerja Perencanaan Makro Penanggulangan Kemiskinan komisi Penanggulangan Kemiskinan.

[10] Kuncoro ,Mudrajad, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*. Jakarta: Erlangga.

[11] Kuncoro, Mudrajad, 2003. *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.

[12] Alfinn, Mely G. Tan, dan Soemardjan. 1980. Kemiskinan Struktural Suatu Bangsa Rampai. Yayasan Ilmu-ilmu Sosial.

[13] Keputusan Presiden No 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri

[14] Undang-undang Nomor 39 tahun 2009 tentang kawasan Ekonomi Khusus (KEK).

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI ANGGOTA GABUNGAN KELOMPOK TANI TANJUNG SEHATI DALAM KEGIATAN KELOMPOK DI KABUPATEN MERANGIN

Isyaturriyadhah[1)], Asnawati Is[1)] dan Effy Yudiawati[1)]

[1)]Fakultas Pertanian Universitas Muara Bungo, Jambi

Email: isyaturriyadhah_amin@yahoo.com

Naskah diterima :2 Maret 2017 Naskah direvisi : 21 Maret 2017 Disetujui terbit : 21 Maret 2017

ABSTRAK

Partisipasi erat hubungannya dengan kegiatan pembangunan, sehingga usaha menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat menempati posisi yang sangat penting dalam seluruh proses pembangunan dalam arti luas. Partisipasi petani yang tergabung dalam wadah Gapoktan menjadi penting posisinya dalam kegiatan Gapoktan karena keterlibatan aktif dan kerjasama yang dilakukan baik dengan sesama anggota maupun pengurus Gapoktan, akan menentukan keberhasilan Gapoktan itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan Gapoktan Tanjung Sehati dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani, mengetahui tingkat partisipasi anggota Gapoktan dalam kegiatan kelompok dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota Gapoktan. Penelitian dilakukan di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi dengan menggunakan mixed methods yaitu metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 30 orang. Untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota Gapoktan dalam kegiatan kelompok dilakukan dengan analisis interval dengan teknik skoring, untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota Gapoktan dilakukan dengan analisis regresi linear berganda dan untuk mengetahui kegiatan Gapoktan dilakukan dengan metode deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan yang dilakukan Gapoktan Tanjung Sehati dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani adalah diskusi kelompok tentang kegiatan usaha tani dan yang terkait dengan Gapoktan, rapat akhir tahunan, gotong royong, penyediaan bibit sawit, penyediaan pupuk subsidi, penyuluhan kelompok dan pengajuan PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan). Tingkat partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan berkelompok tinggi. Faktor-faktor yang signifikan berpengaruh terhadap partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan berkelompok adalah motivasi, kepemimpinan Gapoktan, peran pemerintah desa dan peran penyuluh sedangkan faktor-faktor yang tidak signifikan adalah usia dan peran pedagang.

***Kata Kunci**: Gapoktan, Partisipasi, Merangin.*

PENDAHULUAN

Peraturan Menteri Pertanian [1] tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani mengamanatkan bahwa petani sebagai pelaku utama pembangunan, perlu memiliki tanggungjawab untuk mewujudkan sasaran produksi dan produktivitas target pencapaian swasembada dan swasembada berkelanjutan. Partisipasi petani terhadap pembangunan pertanian di daerah sangat penting untuk mendukung keberhasilan pengembangan usahatani. Kegiatan tersebut, diarahkan untuk menumbuhkan kemampuan petani dalam melaksanakan kegiatan usahatani berkelompok [2]. Di Indonesia kelompok tani memiliki peran yang cukup penting dalam penyebaran inovasi pertanian. Dalam kegiatan penyuluhan para penyuluh pertanian menggunakan pendekatan kelompok karena jumlah petani yang sangat banyak dibandingkan dengan jumlah penyuluh. Disamping itu, kondisi sosial ekonomi dan sosial budaya juga mendukung untuk menggunakan pendekatan kelompok [3]. Melalui pendekatan yang dilakukan oleh penyuluh tersebut kegiatan penyuluhan pertanian diharapkan mampu mendorong para petani melalui kelompok tani untuk meningkatkan kemampuannya, baik kemampuan berpartisipasi, berprasangka, berkreativitas, maupun kemampuan dalam mengambil keputusan, sehingga kemandirian kelompok tani dalam mengelola kegiatan usaha tani dan menata organisasi senantiasa akan bergerak kearah yang lebih baik. Kemajuan kelompok tani merupakan hal penting

yang harus mendapat perhatian, dalam rangka memacu perkembangan kelompok tani lainnya dalam kegiatan usahataninya. Oleh sebab itu diperlukan identifikasi terhadap tingkat partisipasi dari anggota kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan yang ada, sebagai salah satu upaya untuk mengetahui seberapa jauh tingkat kemajuan Gapoktan terutama menyangkut partisipasi anggota agar dapat mendukung kegiatan usahataninya secara penuh.

Partisipasi erat hubungannya dengan kegiatan pembangunan, sehingga usaha menumbuhkan dan mengembangkan partisipasi masyarakat menempati posisi yang sangat penting dalam seluruh proses pembangunan dalam arti luas [4]. Menurut Mardikanto [5] bahwa partisipasi adalah suatu bentuk keterlibatan dan keikutsertaan secara aktif dan sukarela, baik karena alasan-alasan dari dalam (intrinsik) maupun dari luar (ekstrinsik) dalam keseluruhan proses kegiatan yang mencakup: pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi dari hasil yang dicapai.

Untuk menumbuhkan kelompok tani yang maju dan tangguh perlu adanya kerjasama dalam melaksanakan setiap kegiatan serta meningkatkan rasa keakraban antara sesama anggotanya. Salah satu kendala yang sering dijumpai dalam pembinaan dan pengembangan kelompok tani menuju kelompok tani yang maju dan tangguh adalah kurangnya dukungan dan partisipasi dari anggotanya dalam melaksanakan setiap hasil musyawarah yang ditetapkan bersama. Partisipasi petani yang tergabung dalam wadah Gapoktan menjadi penting posisinya dalam kegiatan kegiatan Gapoktan karena keterlibatan aktif dan kerjasama yang dilakukan baik dengan sesama anggota maupun pengurus Gapoktan akan menentukan kinerja efektivitas Gapoktan itu sendiri. Efektivitas Gapoktan pada dasarnya ditentukan dari akumulasi efektivitas yang dilakukan oleh anggotanya. Dengan kata lain, apabila setiap anggota Gapoktan berkoordinasi melakukan tugas dan pekerjaannya masing-masing dengan baik, maka efektivitas Gapoktan secara keseluruhan akan muncul. Namun demikian prestasi seorang anggota Gapoktan tidak juga dapat dikatakan sebagai keberhasilan atau keefektifan Gapoktan secara keseluruhan. Partisipasi petani yang tergabung dalam wadah Gapoktan menjadi penting posisinya dalam kegiatan Gapoktan karena keterlibatan aktif dan kerjasama yang dilakukan baik dengan sesama anggota maupun pengurus Gapoktan akan menentukan keberhasilan Gapoktan itu sendiri. Partisipasi akan efektif apabila dilaksanakan secara kolektif dalam wadah kelompok. Hal demikian akan menghasilkan sinergi yang pada gilirannya akan menghasilkan manfaat ekonomi yang dapat dinikmati oleh semua pihak. Adapun wujud partisipasi yang dapat diberikan oleh anggota Gapoktan pada suatu kegiatan yaitu: ide/gagasan, keterampilan, tenaga, harta benda, dan uang. Setiap anggota Gapoktan yang berperan serta aktif pada kegiatan di Gapoktan akan memberikan kontribusi yang berbeda.

Berbagai studi penelitian terdahulu menghasilkan bahwa faktor internal yang mempengaruhi partisipasi anggota Gapoktan pada suatu kegiatan adalah usia, pendapatan dan motivasi. Sedangkan faktor eksternal atau faktor diluar diri yang mempengaruhi partisipasi anggota Gapoktan pada suatu kegiatan antara lain: peranan penyuluh, intensitas menerima sosialisasi kegiatan, kepemimpinan Gapoktan, dan kepemimpinan kelompoktani [6]. Faktor-faktor tersebut juga diduga mempengaruhi partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan kegiatan Gapoktan. Peran serta dan keterlibatan aktif anggota Gapoktan pada kegiatan Kegiatan Gapoktan sendiri akan menentukan keberhasilan Gapoktan dalam mencapai tujuannya.Berdasarkan kondisi di atas, menarik untuk dikaji lebih mendalam beberapa permasalahan yang juga menjadi fokus perhatian dalam penelitian tentang Gapoktan ini, yaitu: (1) Bagaimana tingkat partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan Gapoktan? (2) Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota Gapoktan? (3) Apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan Gapoktan guna meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani.

METODE PENELITIAN

Penelitian dilakukan pada Gapoktan Tanjung Sehati di Kabupaten Merangin Propinsi Jambi. Pemilihan lokasi dilakukan dengan pertimbangan bahwa kelompoktani tersebut memiliki susunan organisasi kelompoktani yang lengkap, penyuluh pertanian aktif dan selalu membimbing kegiatan kelompoktani. Sedangkan penentuan informan ditentukan secara *purposive* sesuai dengan kriteria informan yang mengetahui dan paham tentang kegiatan yang dilakukan Gapoktan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah: menggunakan kuesioner, pengamatan langsung, wawancara mendalam, dokumentasi dan studi pustaka.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan *mixed methods* yaitu metode penelitian kombinasi kualitatif dan kuantitatif dengan jumlah responden sebanyak 30 orang responden yang tergabung dalam Gapoktan Tanjung Sehati. Analisis data dilakukan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, adapun untuk menganalisis data dilakukan sebagai berikut: *Pertama*, analisis interval kelas untuk mengetahui tingkat partisipasi anggota Gapoktan. Penentuan interval kelas menggunakan rumus sebagaimana digunakan oleh Nazir bahwa interval kelas merupakan hasil bagi antara *range* (nilai maksimal – nilai minimal) dengan jumlah kelas yang diinginkan [5].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

I = J / K

Dimana:
I = Interval Kelas
J = Jarak antara skor maksimum dengan skor minimum
K = Jumlah kelas yang digunakan

Kedua, analisis regresi linear berganda untuk menguji faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan Gapoktan. Model yang digunakan adalah sebagai berikut:

Y = bo + b1 X1 + b2 X2 + b3 X3 + b4 X4 + b5 X5 + b6 X6 + e

Di mana:
Y : Partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan Gapoktan
bo : Intersep
b1 – b6 : Koefisien regresi variabel X1-X6
X1 : Usia
X2 : Motivasi
X3 : Kepemimpinan Gapoktan
X4 : Peran Pemerintah Desa
X5 : Peran Penyuluh
X6 : Peran Pedagang Desa
e : galat

Ketiga, untuk mengetahui kegiatan yang dilakukan Gapoktan dilakukan dengan analisis deskriptif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Partisipasi Anggota Gapoktan Pada Kegiatan Gapoktan

Keberhasilan dari suatu pembangunan dan kemajuan dari sebuah organisasi sangat dipengaruhi dan ditentukan oleh tingkat partisipasi dari masyarakat dan anggotanya. Partisipasi petani anggota Gapoktan diukur dari keikutsertaan petani dalam menjalankan kegiatan kelompok. Dalam penelitian ini yang dikatakan sebagai partisipasi anggota Gapoktan adalah peran serta atau keterlibatan anggota Gapoktan dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan Gapoktan pada tahap perencanaan, pelaksananaan, pemantauan dan evaluasi, serta pemanfaatan hasil baik dalam wujud ide, tenaga, dan materi. Pengertian ini mengadopsi dari konsep yang diungkapkan oleh Mardikanto [7] yang membagi partisipasi dalam empat tingkatan kegiatan pembangunan yang meliputi: tahap perencanaan, pelaksananaan, pemantauan serta evaluasi, dan pemanfaatan hasil. Berikut ini disajikan dalam tabel 1 hasil analisis data tingkat partisipasi anggota Gapoktan Tanjung Sehati dalam kegiatan kelompok.

Tabel 1. Tingkat Partisipasi Anggota Gapoktan Dalam Kegiatan Kelompok

No.	Tahap	Skor	Persentase (%)		Kategori
			Per/Kegiatan	Total	
1	Perencanaan	228	84,4	25,4	TINGGI
2	Pelaksanaan	231	85,5	25,6	TINGGI
3	Pengawasan	131	72,7	14,5	SEDANG
4	Pemanfaatan/evaluasi	167	92,7	18,5	TINGGI
	Total Tingkat Partisipasi	**757**	**84**		TINGGI

Sumber: Analisis Data Primer, 2016

Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana terangkum dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa tingkat partisipasi anggota Gapoktan secara menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga pemanfaatan hasil masih tergolong tinggi yaitu sebesar 84 persen. Hal ini dikarenakan adanya kejelasan dari rencana kegiatan yang dilakukan untuk kemajuan Gapoktan. Disamping itu informasi dan komunikasi memegang peranan penting,

artinya informasi dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan sudah diketahui sebelumnya. Pada tahap perencanaan, anggota Gapoktan mengambil peranan aktif dalam menghadiri pertemuan kelompok dan memberikan sumbangan berupa pendapat/ide/pikiran atau sumbangan lainnya. Persentase pada tahap ini tinggi yaitu mencapai 84,4 % atau menyumbang sekitar 25,4 % dari total persentase partisipasi.

Pada tahap pelaksanaan tinggi sekitar 85, 5% atau 25,6 % dari persentase total partisipasi. Hal ini terlihat bahwa anggota kelompok aktif dalam pelaksanaan kegiatan kelompok tani, apapun hasil keputusan bersama dilaksanakan oleh kelompok dengan penuh tangungjawab. Pada tahap pelaksanaan ini salah satu hal yang menyebabkan partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan yang akan dilakukan cukup tinggi karena sosialisasi kegiatan yang diberikan tidak hanya sebatas kepada orang orang yang dekat baik dari segi kedekatan hubungan maupun tempat tinggal yang berdekatan dengan pengurus tapi kepada anggota yang tempat tinggalnya cukup jauh juga dilakukan sosialisasi artinya sosialisasi selalu dilaksanakan kepada semua anggota Gapoktan. Tingginya sosialisasi terhadap pelaksanaan kegiatan kemudian berdampak pada tingginya kontribusi secara materi yang diberikan oleh anggota Gapoktan seperti dalam hal; (1) memberikan bantuan semen, batu bata/batako, kayu, asbes/genteng, paku, kawat, besi untuk pembangunan sekretariat Gapoktan, (2) mengeluarkan uang untuk membeli makanan dan minuman pada saat pembangunan sekretariat Gapoktan. Anggota Gapoktan tidak enggan untuk berkontribusi karena selain memfokuskan pada pemenuhan kebutuhan sehari-hari keluarganya juga mengharapkan agar Gapoktan tempat mereka bernaung menjadi lebih maju dan lebih berkembang. Bentuk lain dari partisipasi yang kebanyakan diberikan oleh anggota Gapoktan pada tahap pelaksanaan dalam bentuk tenaga meliputi: (1) mengajak sesama anggota Gapoktan untuk bergotong-royong dalam pembangunan sekretariat Gapoktan, (2) ikut serta membangun jalan menuju sekretariat Gapoktan, dan (3) membantu memberikan keringanan pada anggota Gapoktan dalam membeli/pembayaran pupuk bersubsidi dari Gapoktan.

Pada tahap pengawasan berada pada kategori sedang sekitar 72,7 % atau berkontribusi sebesar 14,5 % dari persentase total partisipasi. Pada tahap ini anggota kelompok tidak terlalu aktif melakukan pengawasan terhadap kegiatan yang dilakukan, anggota kelompok mempercayakan kepada ketua dan anggota pengurus. Terakhir pada tahap pemanfaatan hasil kegiatan termasuk dalam kategori tinggi 92,7 % atau menyumbang sekitar 18,5 dari persentase total partisipasi. Pada tahap ini hampir seluruh anggota memanfaatkan kegiatan kelompok. Anggota kelompok merasa dengan adanya kegiatan yang dilakukan Gapoktan menambah pendapatan anggota dalam berusahatani, tidak adanya hambatan yang begitu berarti dalam melaksanakan kegiatan usaha tani.

Secara umum dari semua kegiatan yang telah diuraikan diatas terlihat bahwa partisipasi anggota Gapoktan didorong oleh beberapa hal yaitu: 1). Adanya kepentingan bersama antara anggota. 2). Adanya kesamaan kondisi sumberdaya alam dalam berusaha tani. 3). Adanya kondisi masyarakat dan kehidupan sosial yang sama. 4). Adanya rasa saling percaya. Hal ini sesuai dengan pendapat Ndraha [8] yang menyatakan bahwa masyarakat akan tergerak berpartisipasi jika partisipasi itu dilakukan melalui organisasi yang sudah dikenal, partisipasi itu memberikan manfaat langsung kepada masyarakat yang bersangkutan, manfaat yang diperoleh melalui partisipasi itu dapat memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan dalam proses partisipasi itu terjamin adanya kontrol yang dilakukan oleh masyarakat.

Dengan diketahuinya tingkat partisipasi anggota Gapoktan Tanjung Sehati di Kabupaten Merangin yang memiliki nilai skor 757 dengan persentase 84 (84%) termasuk dalam kategori tingkat partisipasi tinggi. Hal ini membuktikan bahwa keberadaan anggota Gapoktan Tanjung Sehati mendukung secara aktif setiap kegiatan yang akan dan harus dikerjakan secara bersama-sama yang merupakan salah satu syarat untuk bergabung menjadi anggota Gapoktan Tanjung Sehati yang akhirnya telah menempatkan Gapoktan Tanjung Sehati sebagai Gapoktan yang dianggap maju di Kabupaten Merangin.

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Partisipasi Petani dalam Kegiatan Kelompok

Tujuan penelitian yang kedua adalah mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi partisipasi Gapoktan dalam kegiatan kelompok. Selanjutnya tingkat partisipasi kelompok tani digunakan sebagai variabel terikat (Y), sedangkan variabel bebas (X) yang dipilih adalah: Usia (X1), Motivasi (X2), Kepemimpinan Gapoktan (X3), Peran Pemerintah Desa (X4), Peran penyuluh (X5) dan Peran Pedagang (X6). Untuk mengetahui apakah variabel-variabel bebas (X) berpengaruh terhadap variabel terikat (Y), maka dilakukan analisis regresi dengan menggunakan program SPSS.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 2. Hasil Analisis Regresi Faktor-faktor yang Berpengaruh Nyata Terhadap Partisipasi Kelompok Tani di Kabupaten Merangin

Variabel X	Koefisien Regresi	Nilai t hitung	Tingkat Kesalahan (p)
Usia (X1)	0,483	0,558	0,582 NS
Motivasi (X2)	0,229	2,126	0,045**
Kepemimpinan Gapoktan (X3)	0,237	2,759	0,011**
Peran Pemerintah Desa (X4)	0,340	3,926	0,001**
Peran Penyuluh (X5)	0,246	2,184	0,040**
Peran Pedagang (X6)	0,142	0,689	0,498 NS
Y = Tingkat Partisipasi Kelompok Tani Konstanta = 53, 729 R2 = 0, 989 Nilai F hitung = 335, 077 ** = Signifikan pada taraf kesalahan 5 % NS = Tidak signifikan pada taraf kesalahan 5 %			

Sumber : Analisis Data Primer, 2016

Dari tabel 2 diketahui nilai koefisen determinasi (R2) adalah 98,9 persen. Hal ini menunjukkan bahwa model fungsi regresi yang digunakan mempunyai ketepatan model mendekati 1, sehingga dapat diketahui bahwa variasi dari variabel terikat (Y) dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Dengan demikian sisanya 1,1 persen dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dianalisis dalam penelitian ini (diluar faktor usia, motivasi, kepemimpinan Gapoktan, Peran pemerintah desa, peran penyuluh dan peran pedagang).

Dari analisis regresi diperoleh nilai F hitung sebesar 335,077. Nilai F hitung adalah nilai yang menyatakan perbandingan antara rerata kuadrat regresi dengan rerata kuadrat residu. Nilai F hitung juga menunjukkan signifikansi pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) secara bersama-sama pada tingkat signifikansi tertentu. Nilai F hitung yang diperoleh ternyata lebih besar daripada nilai F tabel sebesar 2, 46 pada tingkat signifikansi 5 persen, yang berarti bahwa diantara variabel bebas (variabel usia, motivasi, kepemimpinan Gapoktan, Peran pemerintah desa, peran penyuluh dan peran pedagang) ada yang berpengaruh nyata terhadap variabel terikat (Y). Tabel diatas menunjukkan bahwa ada empat variabel yang berpengaruh nyata terhadap partisipasi Gapoktan dalam kegiatan kelompok di Kabupaten Merangin yaitu: X2 (Motivasi), X3 (Kepemimpinan Gapoktan), X4 (Peran Pemerintah Desa) dan X5 (Peran Penyuluh). Selanjutnya dari hasil analisis regresi, diperoleh nilai koefisien dari masing-masing variabel. Nilai koefisien regresi menunjukkan besarnya pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y) akibat penambahan satu satuan unit variabel bebas (X). Sehingga semakin besar nilai koefisien regresi, maka semakin besar pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dari variabel-variabel yang berpengaruh nyata, nilai koefisien regresi yang dihasilkan variabel X2 (Motivasi) adalah sebesar 0, 229, X3 (Kepemimpinan Gapoktan) adalah sebesar 0, 237, X4 (Peran Pemerintah Desa) adalah sebesar 0, 340 dan X5 (Peran Penyuluh) sebesar 0, 246.

Dari hasil analisis, motivasi berpengaruh nyata terhadap tingkat partisipasi anggota Gapoktan terhadap kegiatan kelompok. Motivasi anggota ini merupakan kebutuhan atau kesadaran anggota Gapoktan untuk mencapai prestasi demi kemajuan kelompoknya. Motivasi timbul sebagai akibat adanya suatu kebutuhan. Motivasi merupakan suatu proses psikologi yang mencerminkan antara sikap, kebutuhan, persepsi, dan keputusan yang terjadi pada diri seseorang. Motivasi anggota Gapoktan Tanjung Sehati untuk melakukan sesuatu atau menampilkan prilaku yang dipengaruhi oleh adanya keputusan dalam diri. Dengan adanya keputusan, anggota Gapoktan akan dengan mudah menentukan perilaku apa yang akan dipilih.

Kepemimpinan kelompok/Gapoktan mempunyai pengaruh terhadap tingkat partisipasi anggota Gapoktan dalam kegiatan berkelompok. Baiknya kepemimpinanan Gapoktan yang dicirikan dengan hal-hal yang berkaitan dengan gaya ketua Gapoktan dalam mengelola Gapoktan sesuai dengan situasi dan tingkat kematangan anggota Gapoktan tentu berpengaruh terhadap peran serta dan keterlibatan aktif anggota Gapoktan pada kegiatan yang dilakukan Gapoktan. Anggota Gapoktan Tanjung Sehati tergerak berkontribusi pada kegiatan-kegiatan Gapoktan karena ketua Gapoktan sudah menggunakan gaya *telling* (memberikan supervisi dan instruksi) ketika terdapat anggota Gapoktan yang tidak mengetahui dan tidak mau mengikuti kegiatan Gapoktan; gaya *selling* (memberikan dorongan dan motivasi) ketika terdapat anggota Gapoktan yang mengetahui, tetapi tidak mau mengikuti kegiatan Gapoktan. Adapun motivasi anggota Gapoktan yang kuat untuk berpartisipasi pada kegiatan-kegiatan Gapoktan diantaranya keinginan untuk sebagai berikut: (1) meningkatkan kerjasama dengan petani, maupun pengurus Gapoktan/ Kelompoktani; (2) diperhatikan pada saat berhubungan dengan petani maupun pengurus Gapoktan/Kelompoktani; (3) selalu berhubungan dengan ketua Gapoktan untuk

memperoleh informasi terbaru tentang Gapoktan; dan (4) bekerjasama dengan penyuluh sebagai pendamping untuk mengembangkan usaha dalam kegiatan Gapoktan. Di sisi lain, keinginan dan dorongan yang kuat oleh anggota Gapoktan Tanjung Sehati dalam hal: keinginan untuk menjadi orang yang berguna bagi masyarakat di desanya; menerapkan pengetahuan yang diberikan oleh penyuluh; menambah wawasan dan pengetahuan dari penyuluh; dan mengikuti pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuannya dalam berusahatani, itu merupakan beberapa motivasi anggota Gapoktan Tanjung Sehati untuk berpartisipasi pada kegiatan Gapoktan yang disebabkan pemenuhan kebutuhan akan pengembangan diri.

Dari hasil analisis peran pemerintah desa memberikan pengaruh terhadap tingkat partisipasi petani dalam kegiatan kelompok. Beberapa hal yang ditemukan di lapangan menunjukkan bahwa peran tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk diantaranya: peran dalam memberikan semangat dan dukungan kepada anggota Gapoktan dalam berusahatani, peran dalam bentuk penunjang fasilitas misalnya dukungan terhadap pembuatan jalan menuju sekretariat Gapoktan/peran dalam bentuk pembangunan prasarana usahatani. Dalam hubungannya dengan pemerintah desa, Gapoktan merupakan organisasi masyarakat yang berada dibawah pembinaan pemerintah desa, dan merupakan organisasi kemasyarakatan yang melaksanakan fungsi sebagai wadah partisipasi masyarakat desa yang mempunyai program untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian [7]. Kedudukan desa dalam sistem pemerintahan di Indonesia merupakan unit pemerintah terendah. Pemerintah desa sebagai pemegang kebijakan-kebijakan negara bertanggungjawab terhadap seluruh warga masyarakat, terutama pada aspek-aspek umum dari kehidupan manusianya. Dengan demikian peran pemerintah desa terhadap pengembangan masyarakat sangat penting. Beberapa peran penting pemerintah desa terhadap masyarakat termasuk kelompok tani/Gapoktan antara lain: sebagai pengalokasi dan dan daya dalam pembangunan pedesaan, sebagai sumber informasi yang lengkap tentang seluruh segi kehidupan di desa, sebagai legitimator dalam penentuan arah pembangunan desa [9]. Dari pembahasan mengenai peran pemerintah desa terhadap tingkat partisipasi anggota Gapoktan Tanjung Sehati di Kabupaten Merangin tersebut, dalam penelitian ini peran pemerintah desa sudah sesuai dengan kedudukan dan fungsinya selaku pemerintah desa.

Peranan penyuluh berpengaruh secara signifikan terhadap partisipasi anggota Gapoktan dalam kegiatan berkelompok. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Hariadi [3] bahwa penyuluhan (penyampaian pesan kepada sasaran) mempengaruhi kelompok tani sebagai unit kerja. Penyuluh yang dimaksud disini adalah bukan hanya penyuluh pemerintah saja, melainkan juga penyuluh dari swasta (perusahaan), LSM, Perguruan Tinggi bahkan dari masyarakat sendiri. Menurut Kartasapoetra [10], Penyuluh memiliki beberapa peran penting dalam mengembangkan kelompok tani binaannya, peran tersebut antara lain: (1) Sebagai pendidik, memberikan pengetahuan dan pengarahan terhadap cara-cara berusahatani yang baik., (2) Sebagai Motivator, membimbing dan memotivasi para petani agar mau mengubah cara berpikir dan cara kerjanya agar timbul keterbukaan dan mau menerapkan cara-cara berusahatani baru yang lebih berdaya guna dan berhasil guna dan (3) sebagai Penasihat : melayani, memberi petunjuk-petunjuk dan mampu membantu petani, baik dalam bentuk peragaan atau memberikan contoh-contoh kerja dalam berusahatani untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi para petani.

Kegiatan Yang di Lakukan Gapokan

Kegiatan/aktivitas Gapoktan adalah beberapa kegiatan/kesibukan yang telah dan akan dilaksanakan oleh anggota Gapoktan Tanjung Sehati yang wujud kegiatannya tampak dalam pergerakan dan pengembangan/progresivitas kelompoknya. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kegiatan yang dilakukan Gapoktan Tanjung Sehati dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani diantaranya adalah: 1). Diskusi kelompok tentang kegiatan usaha tani dan yang terkait dengan Gapoktan. Gapoktan Tanjung Sehati memiliki kegiatan rutin yaitu diskusi kelompok yang merupakan kegiatan berkelanjutan yang diadakan dan merupakan metode yang paling efektif untuk dilakukan karena dalam kegiatan ini anggota Gapoktan dapat berdiskusi masalah perkembangan tanaman usahatani, masalah hama dan penyakit maupun masalah-masalah lain yang ditemui terkait usahatani. 2). Rapat Akhir Tahunan (RAT). Salah satu tugas dari anggota Gapoktan adalah hadir dalam pertemuan/rapat anggota dan aktif memberikan saran dan pendapatnya demi majunya Gapoktan. Dalam RAT ini dihadiri anggota dan pengurus yang membahas tentang keadaan Gapoktan diantaranya kas dan program-program kedepan yang akan dijalankan sekaligus mengevaluasi program yang sudah dilaksanakan. 3). Gotong Royong. Usaha pemberdayaan yang dilakukan oleh Gapoktan Tanjung Sehati yaitu mengadakan kegiatan gotong royong, termasuk diantaranya adalah perbaikan jalan usahatani. Tujuannya adalah menumbuhkan semangat kebersamaan, rasa saling memiliki, kemitraan serta solidaritas sosial. 4). Penyediaan Bibit Sawit. Penyediaan bibit merupakan salah satu program kerja Gapoktan Tanjung Sehati. Hal ini diupayakan agar anggota Gapoktan yang memerlukan bibit tidak perlu bersusah untuk mencari bibit yang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dibutuhkan karena Gapoktan sudah menyediakan dengan mutu yang lebih baik dan harga yang lebih murah bagi para anggotanya. 5). Menyediakan Pupuk Bersubsidi. Selain penyediaan bibit, Gapoktan Tanjung Sehati juga menyediakan sarana produksi usahatani lain seperti pupuk subsidi dan obat-obatan untuk para anggota yang membutuhkan. Adanya pupuk yang dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan petani dalam usahataninya dirasakan sangat membantu petani anggota Gapoktan karena harga pupuk subsidi lebih rendah dibanding pupuk yang dijual diluar kelompok tani. 6). Penyuluhan kelompok. Penyuluhan merupakan keterlibatan seseorang untuk melakukan komunikasi informasi secara sadar denngan tujuan untuk membantu sesamanya memberikan pendapat sehingga bisa membuat keputusan yang benar. Selain diskusi kelompok, Gapoktan Tanjung Sehati juga menyediakan waktu untuk melakukan kegiatan penyuluhan kepada anggotanya yang dihadiri oleh ketua kelompok, pengurus serta petugas penyuluh lapangan (PPL). 7) Pengajuan PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan). Merupakan upaya untuk mengatasi pembiayaan usahatani anggota kelompok. Secara umum dari semua kegiatan yang telah dilakukan oleh anggota Gapoktan terlihat bahwa partisipasi petani anggota Gapoktan didorong oleh beberapa faktor pengikat diantaranya adalah karena adanya kepentingan bersama anggota, adanya kesamaan kondisi sumber daya alam dalam berusahatani dan adanya kesamaan jenis komoditi usaha tani, adanya kondisi masyarakat dan sosial yang sama serta adanya rasa saling percaya diantara sesama anggota.

KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Tingkat partisipasi anggota Gapoktan pada kegiatan berkelompok berada pada kategori tinggi. Dengan pencapaian persentase yaitu 84 %.
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi anggota kelompok tani dalam kegiatan kelompok adalah motivasi, kepemimpinan Gapoktan, peran pemerintah desa dan peran penyuluh.
3. Kegiatan yang dilakukan Gapoktan Tanjung Sehati dalam meningkatkan pendapatan anggota kelompok tani adalah diskusi kelompok tentang kegiatan usaha tani dan yang terkait dengan Gapoktan, rapat akhir tahunan, gotong royong, penyediaan bibit sawit, penyediaan pupuk subsidi, penyuluhan kelompok dan pengajuan PUAP (Program Usaha Agribisnis Pedesaan).

SARAN

1. Partisipasi anggota Gapoktan dalam kegiatan berkelompok masih dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhinya, mengingat skor dan persentase tingkat partisipasi yang didapatkan dari hasil analisis data masih belum mencapai maksimal 100%.
2. Agar dilakukan penelitian lebih lanjut terutama mengetahui lebih rinci lagi sejauh mana kekuatan hubungan faktor-faktor tersebut dengan tingkat partisipasi dalam kegiatan kelompok.
3. Untuk Gapoktan Tanjung Sehati, kegiatan-kegiatan dalam Gapoktan masih bisa ditambah lagi seperti pelatihan-pelatihan pembukuan keuangan dan administrasi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Peraturan Menteri Pertanian No. 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompoktani dan Gabungan Kelompoktani

[2] Haryanto, Y dan Pradiana, W. 2014. *Pengaruh Partisipasi Anggota Kelompoktani Dan Peran Penyuluh Pertanian Dalam Penyusunan RDK–RDKK*. Kementerian Pertanian Badan Penyuluhan Dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian. Bogor.

[3] Hariadi, S. S. 2011, *Dinamika Kelompok: Teori dan Aplikasinya untuk Analisis Keberhasilan Kelompok Tani Sebagai Unit Belajar, Kerjasama, Produksi, dan Bisnis,* Yogyakarta.

[4] Mubyarto. 1996. *Berbagai Aspek Pembangunan Pedesaan*. Aditya Media. Yogyakarta.

[5] Nazir, M. 1988. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Jakarta.

[6] Sandyatma, Y. H. 2012. *Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dalam Menunjang Efektivitas Gapoktan Pada Kegiatan Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat Di Kabupaten Bogor*. Jurnal Kawistara Vol 2 No. 3. Hal 225-328. Bogor.

[7] Mardikanto, T. 2007. *Penyuluhan Pembangunan Pertanian*. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

[8] Ndraha, T. 1990. *Pembangunan Masyarakat*. Rhineka Cipta. Jakarta.

[9] Khairuddin. 2006. *Pembangunan Masyarakat, Tinjauan Aspek Sosiologi, Ekonomi dan Perencanaan*. Liberty. Yogyakarta.

[10] Kartasapoetra. 1991. *Teknologi Penyuluhan Pertanian*. Bumi Aksara. Jakarta.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS WILAYAH KOMODITI BASIS DALAM MENGOPTIMALKAN POTENSI EKONOMI REGIONAL KABUPATEN DHARMASRAYA

Joni Haryadi[1)], Melinda Noer[2)] dan Hery Bachrizal Tanjung[2)]

[1]Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas
[2]Dosen Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Email : jharyadi@yahoo.com

Naskah diterima :10 Maret 2017 Naskah direvisi : 17 Maret 2017 Disetujui terbit : 16 Mei 2017

ABSTRAK

Salah satu usaha untuk mengoptimalkan potensi wilayah di Kabupaten Dharmasraya adalah dengan menentukan produk basis/unggulan yang bisa dijadikan andalan dalam pengembangan kawasan pertanian berdasarkan kecamatan-kecamatan yang ada di Kabupaten Dharmasraya. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis komoditi pertanian yang menjadi basis disetiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus - Oktober 2016 dengan periode data analisa tahun 2011-2015. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kuantitatif. Analisa kuantitatif digunakan untuk menganalisis wilayah komoditi basis sektor pertanian dengan analisa Location Quotient (LQ). Analisis deskriptif digunakan untuk menganalisis program pengembangan komoditi unggulan yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komoditi basis wilayah Kecamatan IX Koto: Kacang hijau, nenas, kopi, kerbau, dan ikan nila. Kecamatan Pulau Punjung: padi, pisang, kelapa, ayam buras, dan lele. Kecamatan Timpeh: padi, jeruk, kelapa sawit, itik, dan ikan tawes. Kecamatan Sitiung: Padi, salak, cengkeh, ayam petelur, dan ikan gurami. Kecamatan Padang Laweh: kacang kedelai, duku, lada, sapi, dan ikan mas. Kecamatan Tiumang: ubi jalar, duku, lada, itik, dan ikan nila. Kecamatan Koto Salak: jagung, kacang panjang, kopi, itik, dan ikan nila. Kecamatan Koto Baru: padi, pepaya, karet, ayam broiler, dan lele. Kecamatan Asam Jujuhan: ubi kayu, ketimun, lada, kambing, dan ikan patin. Koto Besar: ubi jalar, ketimun, lada, ayam petelur, dan ikan mas. Kecamatan Sungai Rumbai: ubi jalar, salak, karet, ayam buras, dan ikan patin. Dari analisis pada program jangka menengah Kabupaten Dharmasraya, program pengembangan komoditi basis yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2011-2015 sesuai dengan komoditi basis dimasing-masing kecamatan, namun juga terdapat beberapa komoditi non unggulan yang basis di beberapa kecamatan seperti: ubi kayu, terung, pepaya, cabe, kelapa, pinang, kerbau, kambing, ayam buras, itik yang memerlukan pengembangan kedepannya. Dari analisis yang dilakukan, peneliti menyarankan untuk program program yang telah dilaksanakan agar dilanjutkan pelaksanaannya dan kedepannya dalam pembuatan program pembangunan pertanian, pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan beberapa komoditi yang merupakan komoditi basis di beberapa kecamatan.

***Kata Kunci**: Pertanian, Unggulan*

PENDAHULUAN

Kabupaten Dharmasraya merupakan Kabupaten yang baru berkembang dan merupakan wilayah pemekaran dari kabupaten Sijunjung, disahkan pada tahun 2004 dengan luas 2961,13 km². Berdasarkan Perda No 3 Tahun 2008, wilayah Kabupaten Dharmasraya terdiri atas sebelas kecamatan yaitu (1) Kecamatan Pulau Punjung, (2) Kecamatan IX Koto , (3) Kecamatan Timpeh , (4) Kecamatan Sitiung, (5) Kecamatan Padang Laweh, (6)Kecamatan Koto Baru, (7) Kecamatan Koto Besar, (8) Kecamatan Koto Salak, (9) Kecamatan Tiumang, (10) Kecamatan Sungai Rumbai, (11) Kecamatan Asam Jujuhan. Kabupaten Dharmasraya sangat berpotensi untuk pengembangan sektor pertanian seperti sektor pangan, holtikultra, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kehutanan. Diketahui sektor pertanian di Dharmasraya memberikan kontribusi terhadap PDRB sebesar 30,82%, hal ini di dukung oleh luas lahan pertanian seluas 265.257,8 Ha (89,58%) [1].

Salah satu upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dan sekaligus sebagai sektor pengerak pertumbuhan ekonomi wilayah dengan mengembangkan komoditas unggulan. Sektor unggulan ini penting untuk diketahui guna menentukan skala prioritas dalam pembangunan. Sektor unggulan tersebut adalah sektor yang memenangkan persaingan dibandingkan dengan sektor lainnya yang dapat menjadi ciri khas disuatu daerah. Untuk mengetahui komoditi pertanian unggulan, tingkat spesialisasi, dan tingkat lokalisasi komoditi pertanian dapat dilakukan dengan mengunakan teori basis ekonomi. Berdasarkan teori basis ekonomi maka seluruh kegiatan sektor pertanian dapat diklasifikasikan menjadi kegiatan basis dan non basis.

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam penentuan komoditas basis atau unggulan adalah pendekatan Kuosien Lokasi (*Location Quotient*). Pendekatan *Location Quotient* (LQ) merupakan salah satu pendekatan yang umum digunakan dalam model ekonomi basis sebagai langkah awal untuk memahami sektor kegiatan yang menjadi pemacu pertumbuhan. Hendayana (2003:3), menyatakan teknik *Location Quotient* (LQ) relavan digunakan sebagai metode dalam menentukan komoditas unggulan khususnya dari sisi penawaran (produksi/populasi). Untuk komoditas yang berbasis lahan seperti tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan perhitungannya didasarkan pada lahan pertanian (areal tanam atau areal panen), produksi, dan produktivitas. Sedangkan untuk komoditas pertanian yang tidak berbasis lahan seperti usaha ternak, dasar perhitungannya digunakan jumlah produksi (ekor).

Dengan adanya penentuan komoditi basis berdasarkan wilayah kecamatan maka bisa dilihat mana komoditi yang prospek dan tidak prospek untuk dikembangkan di setiap kecamatan di Kabupaten Dharmasraya. Selain itu juga akan dilihat apa saja program yang telah dilaksanakan pemerintah daerah dalam pengembangan komoditi basis di Kabupaten Dharmasraya Hasil dari penentuan komoditi basis dengan metode *Location Quotient* (LQ) ini bisa dijadikan salah satu acuan oleh pemerintah daerah kedepannya dalam membuat program program / kebijakan terkait pengembangan komoditi unggulan di Kabupaten Dharmasraya.

METODE PENELITIAN

Tempat dan waktu

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Dharmasraya karena Kabupaten Dharmasraya merupakan daerah baru berkembang yang memerlukan langkah strategis dalam pembangunan daerahnya, sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi yang ada diwilayahnya. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Agustus sampai Oktober 2016.

Data

Data yang digunakan adalah data sekunder yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Dinas Perkebunan dan Kehutanan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Dharmasraya.

Fokus Data

Untuk analisis komoditi basis per kecamatan, data yang digunakan antara lain:

a. jumlah produksi komoditi pertanian pada wilayah kecamatan tahun 2011 - 2015,
b . jumlah produksi komoditi pertanian pada wilayah kabupaten tahun 2011- 2015,
c. jumlah produksi subsektor komoditi pertanian pada kecamatan tahun 2011 - 2015.
d. jumlah produksi subsektor komoditi pertanian pada kabupaten tahun 2011 - 2015.

Untuk analisis program pengembangan komoditi basis, data yang digunakan antara lain:

a. Perencanaan program, meliputi: (a)latar belakang program, (b)tujuan program, dan (c) sasaran program.
b. Pelaksanaan program,meliputi: (a) waktu pelaksanaan, (b) subjek/SDM yang terlibat, (c) kegiatan yang dilakukan, (d) sejauh mana pelaksanaan program, serta (e) hasil yang diperoleh

Teknik analisis

Untuk menganalisa wilayah komoditi basis analisa yang digunakan adalah analisa data kuantitatif dengan analisis berupa *Location Quotient* (LQ).

Menurut Bendavid dalam Handayana [2], secara sistematis persamaan indeks LQ dapat ditulis sebagai berikut:

$$LQ = \frac{Qij / Qj}{Qir / Qr}$$

Keterangan:

Qij = Jumlah produksi komoditi pertanian i pada wilayah kecamatan (Ton/Tahun)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Qi = Jumlah produksi subsektor komoditi pertanian kecamatan (Ton/Tahun)
Qir = Jumlah produksi komoditi pertanian i pada wilayah kabupaten (Ton/Tahun)
Qr = Jumlah produksi subsektor komoditi pertanian kabupaten (Ton/Tahun)

Kriteria pengukuran nilai LQ yang dihasilkan sebagai berikut:

a. Bila LQ>1 berarti wilayah tersebut menjadi basis/unggulan, atau produksi dari komoditi unggulan tersebut, hasilnya tidak saja dapat memenuhi kebutuhan diwilayah bersangkutan akan tetapi juga dapat diekspor keluar wilayah.
b. Bila LQ<1 berarti wilayah tergolong non basis atau produksi dari komoditi unggulan tersebut disuatu wilayah tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri sehingga perlu pasokan atau impor dari luar.

Bila LQ =1 berarti wilayah tersebut tergolong nonbasis, tidak memiliki keunggulan, produksi dari komoditi unggulan tersebut hanya mampu memenuhi kebutuhan wilayah sendiri dan tidak mampu untuk diekspor. Untuk analisa program pengembangan komoditi basis maka analisa yang dilakukan yaitu analisa deskripstif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Beberapa jenis komoditi pertanian yang diusahakan di Kabupaten Dharmasraya diantaranya, untuk subsektor tanaman pangan yaitu: padi, jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang kedelai, kacang hijau, kacang tanah. untuk subsektor hortikultura yaitu: kacang panjang, terung, cabe, ketimun, pisang, jeruk, pepaya, rambutan, nenas, durian, duku, salak. Untuk subsektor perkebunan yaitu: karet, kelapa, kelapa sawit, kopi, lada, kakao,cengkeh, pinang. Untuk subsektor peternakan yaitu: sapi,kerbau, kambing, ayam buras, ayam broiler, ayam petelur, itik. Untuk subsektor perikanan yaitu ikan nila, ikan mas, ikan lele, ikan gurami, ikan patin, ikan tawes [1].

Untuk komoditi unggulan, pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya menetapkan beberapa komoditi sebagai komoditi unggulan untuk skala Kabupaten Dharmasraya. Komoditi tersebut antara lain: padi, jeruk, salak, duku, karet, kelapa sawit, kakao, sapi, ikan nila, dan lele. Penetapan komoditi unggulan tersebut didasarkan pada jumlah produksi dan kesesuaian lingkungan untuk budidiya komoditi di Kabupaten Dharmasraya. Berdasarkan metode *Location Quotient* (LQ) suatu komoditi dikatakan basis apabila memiliki nilai LQ > 1. Dari hasil analisis Location Quotient (LQ) pada masing masing kecamatan didapatkan hasil sebagai berikut:

Tabel 1. Komoditi Basis di masing-masing kecamatan di Kabupaten Dharmasraya.

No	Kecamatan	Sektor Pertanian				
		Pangan	**Hortikultura**	**Perkebunan**	**Peternakan**	**Perikanan**
1	IX Koto	Kacang Hijau, Padi	Nanas, Rambutan, Jeruk, Cabe, Pisang, Pepaya,	Kopi, Kakao, Kelapa, Pinang, Karet	Kerbau, Kambing, Itik, Ayam Broiler	Nila
2	Pulau Punjung	Padi	Pisang, Jeruk, Rambutan, Terung	Kelapa, Pinang, Karet	Ayam Buras, Itik, Ayam Broiler, Kerbau	Lele, Patin, Gurami, Nila
3	Timpeh	Padi	Jeruk, Rambutan, cabe	Kelapa Sawit	Itik, Sapi, Ayam Buras, Kambing, Kerbau	Tawes, Nila, Lele
4	Sitiung	Padi	Salak, Terung, Cabe, Kacang Panjang, Jeruk, Rambutan	Cengkeh, Pinang, Kelapa, Kakao, Kelapa Sawit	Ayam Petelur, Kerbau, Sapi	Gurami, Tawes, Nila, Patin
5	Padang Laweh	Kacang Kedelai, Kacang Tanah, Jagung, Kacang Hijau, Ubi kayu	Duku, Durian, Pepaya	Lada, Kelapa Sawit	Sapi, Kambing, Ayam Broiler	Mas, Nila
6	Tiumang	Ubi Jalar, Kacang Tanah, Ubi Kayu	Duku, Pepaya, Pisang, terung	Lada, Pinang, Kelapa Sawit	Itik, Ayam Buras, Sapi, Kambing	Nila
7	Koto Salak	Jagung, Ubi Kayu	Kacang panjang, Durian, Jeruk, Duku	Kopi, Kelapa, Karet, Kakao, Pinang	Itik, Kerbau, Sapi, Ayam Buras, kambing	Nila
8	Koto Baru	Padi	Pepaya, Durian, Duku	Karet, Kakao,	Ayam Broiler,	Lele, Nila

ISBN : 978-602-73463-1-4

				Kelapa, Kopi, Pinang	Kerbau	
9	Asam Jujuhan	Ubi Kayu, Kacang Hijau, Ubi Jalar, Kacang Kedelai, Kacang Tanah	Ketimun, Nenas, Jeruk, Cabe, Terung, Pisang, Kacang Panjang, Pepaya	Lada, Cengkeh, Karet, Kopi	Kambing, Sapi, Ayam Petelur, Ayam Buras, Kerbau, itik	Patin
10	Koto Besar	Ubi Jalar, Ubi Kayu, Kacang Tanah, Jagung, Kacang Kedelai	Ketimun, Cabe, Terung, Kacang Panjang, Rambutan	Lada, Kelapa Sawit	Ayam Petelur, Sapi, Kambing	Mas, Tawes
11	Sungai Rumbai	Ubi Jalar, Kacang Hijau, Ubi Kayu, Kacang Tanah, Jagung	Salak, Terung, Nanas, Kacang Panjang, Ketimun, Cabe, Pepaya	Karet, Cengkeh, Kopi, Kakao, Kelapa	Ayam Buras, Kambing, Ayam Petelur	Patin, Lele

Dari hasil analisa *Location Quotient* (LQ) pada setiap kecamatan, didapatkan hasil bahwa komoditi unggulan yang ditetapkan pemerintah daerah Kabupaten Dharmasraya sesuai dengan komoditi basis hasil analisis *Location Quotient* (LQ), namun juga terdapat komoditi non unggulan yang basis di beberapa kecamatan seperti: pada subsektor pangan, komoditi umbi umbian dan kacang kacangan basis di 7 kecamatan: IX Koto, Padang Laweh, Tiumang, Koto Salak, Asam Jujuhan, Koto Besar, Sungai Rumbai. Pada subsektor hortikultura, komoditi terung basis di 6 kecamatan: Pulau Punjung, Sitiung, Tiumang, Asam Jujuhan, Koto Besar, Sungai Rumbai. Komoditi pepaya basis di 6 kecamatan: IX Koto, Pulau Punjung, Tiumang, Koto Baru, Asam Jujuhan, Sungai Rumbai. komoditi cabe basis di 6 kecamatan: IX Koto, Timpeh, Sitiung, Asam Jujuhan, Koto Besar, Sungai Rumbai. Pada subsektor perkebunan, Komoditi kelapa basis di 6 kecamatan: IX Koto, Pulau Punjung, Sitiung, Koto Salak, Koto baru, dan Sungai Rumbai. Komoditi pinang basis di 6 kecamatan: IX Koto, Pulau Punjung, Sitiung, Tiumang, Koto Salak, Koto Baru. Pada subsektor peternakan, Komoditi kambing basis di 8 kecamatan: IX Koto, Timpeh, Padang Laweh, Tiumang, Koto Salak, Asam Jujuhan, Koto Besar, Sungai Rumbai. Komoditi kerbau basis di 7 kecamatan: IX koto, Pulau Punjung, Timpeh, Sitiung, Koto Salak, Koto Baru, Asam Jujuhan. Komoditi ayam buras basis di 6 kecamatan: Pulau Punjung, Timpeh, Tiumang, Koto Salak, Asam Jujuhan, Sungai Rumbai. Dan komoditi itik basis di 6 kecamatan: IX Koto, Pulau Punjung, Timpeh, Tiumang, Koto Salak, Asam Jujuhan.

Program program pengembangan komoditi basis yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya sela tahun 2011-2015 diantaranya: Penyaluran pupuk di jaringan irigasi, Pembinaan dan pengembangan komoditi jeruk, gerakan pengelolaan tanaman terpadu komoditas padi, peningkatan produksi produktivitas dan mutu tanaman serealia, revitalisasi penggilingan padi, pembagian alisintan (traktor, *combine harvester*, dan pompa air) kepada petani, pembangunan sarana pertanian/perkebunan seperti embung, dam parit, dan jalan usahatani. penyuluhan pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) perkebunan, pemeliharaan dan perawatan balai pengembangan teknologi perkebunan, pembagian bibit perkebunan (karet, kelapa sawit, dan kakao) kepada petani, penguatan dan pemberdayaan kelembagaan tanaman tahunan, pembukaan lahan perkebunan baru, peremajaan tanaman perkebunan masyarakat, pengembangan investasi peternakan daerah, pelatihan pemanfaatan kotoran ternak menjadi biogas, pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak, peningkatan produksi hasil peternakan melalui inseminasi buatan dan transfer embrio, pengembangan pembibitan ternak (sapi), pelatihan pengolahan ikan, pembangunan depo pemasaran ikan, pengembangan kawasan minapolitan, pengembangan bibit ikan unggul, serta pembinaan petani pembudidaya ikan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis Location Quotient (LQ) selama periode tahun 2011-2015 di masing masing kecamatan di Kabupaten Dharmasraya didapatkan kesimpulan komoditi basis wilayah Kecamatan IX Koto adalah kacang hijau, nenas, kopi, kerbau, ikan nila. Kecamatan Pulau Punjung : padi, pisang, kelapa, ayam buras, lele. Kecamatan Timpeh : padi, jeruk, kelapa sawit, itik, dan ikan tawes. Kecamatan Sitiung : padi, salak, cengkeh, ayam petelur, ikan gurami. Kecamatan Padang Laweh: Kacang Kedelai, duku, lada, sapi, dan ikan mas.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kecamatan Tiumang: ubi jalar, duku, lada, itik, ikan nila. Kecamatan Koto Salak: jagung, kacang panjang, kopi, itik, ikan nila. Kecamatan Koto Baru: padi, pepaya, karet, ayam broiler, lele. Kecamatan Asam Jujuhan: ubi kayu, ketimun, lada, kambing, ikan patin, Kecamatan Koto Besar: ubi jalar, ketimun, lada, ayam petelur, ikan mas. Kecamatan Sungai Rumbai: ubi jalar, salak, karet, ayam buras, ikan patin.

Dari analisis pada program jangka menengah Kabupaten Dharmasraya, program pengembangan komoditi basis yang telah dilaksanakan pemerintah Kabupaten Dharmasraya selama tahun 2011-2015 sesuai dengan komoditi basis dimasing masing kecamatan, namun juga terdapat beberapa komoditi non unggulan yang basis di beberapa kecamatan seperti: ubi kayu, terung, pepaya, cabe, kelapa, pinang, kambing, kerbau, ayam buras, dan itik sehingga memerlukan pengembangan kedepannya.

Saran

Untuk program program yang telah dilaksanakan agar dilanjutkan pelaksanaannya, dan. kedepannya dalam pembuatan program pembangunan pertanian, pemerintah daerah diharapkan mempertimbangkan beberapa komoditi non unggulan yang basis di beberapa kecamatan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] [BPS] Badan Pusat Statistik. 2014. *Kabupaten Dharmasraya Dalam Angka Tahun 2014*. Pemerintah Kabupaten Dharmasraya.

[2] Hendayana, Rachmat. 2003. Aplikasi Metode Location Quotient (LQ) Dalam Penentuan Komoditas Unggulan Nasional. Balai Pengkajian danPengembangan Teknologi Pertanian. Bogor. 21 hal.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

IDENTIFIKASI PUSAT - PUSAT PELAYANAN DENGAN ANALISIS *WEIGHTED CENTRALITY INDE* (STUDI KASUS KABUPATEN BOGOR)

Ken Martina Kasikoen [1)], Darmawan Listya Cahya [1)] dan Laili Fuji Widyawati [1)]

[1]Fakultas Teknik/Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Unniversitas Esa Unggul

Email : ken.martina@esaunggul.ac.id

Naskah diterima :25 Februari 2017 Naskah direvisi : 23 Maret 2017 Disetujui terbit : 24 Maret 2017

ABSTRAK

Kabupaten Bogor sebagai wilayah yang bersebelahan dengan kota-kota besar seperti DKI Jakarta dan Kota Bogor mengalami perkembangan pesat.Sebagai daerah penyangga dan mendapatkan limpahan penduduk dari kota-kota besar tersebut, pengembangan wilayah di kabupaten ini perlu mendapat perhatian, agar tidak terjadi pengembangan wilayah yang tidak terkendali. Sebagai langkah awal untuk mengetahui pengembangan wilayah dapat dilakukan dengan identifikasi pusat-pusat pelayanan pada wilayah tersebut, sesuai pernyataan Tony McCall (2010) bahwa pada masa kini pendekatan dinamika spasial banyak digunakan sebagai dasar untuk mengetahui pengembangan pada suatu wilayah.Tujuan penelitian ini adalah identifikasi pusat-pusat pelayanan sebagai gambaran pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor. Untuk mengetahui pengembangan wilayah secara ekonomi dan pergeserannya digunakan metode analisis shift - share, sedang untuk mengetahui hirarki pusat-pusat pelayanan yang ada, digunakan metode weigted centrality index. Dari hasil analisis menggunakan data PODES Kabupaten Bogor tahun 2011, diketahui beberapa lapangan usaha mengalami kemajuan. Sedang dari identifikasi pusat-pusat pelayanan, diketahui yang mempunyai hirarki tertinggi sebagian besar berada di ibukota Kabupaten Bogor, yaitu di Kecamatan Cibinong.Hasil analisis ini selanjutnya dapat digunakan sebagai masukan dalam penyusunan rencana tata ruang wilayah yang lebih rinci agar pengembangan wilayah Kabupaten Bogor teratur dn terkendali.

Kata kunci: *Pengembangan Wilayah, Shift-share, Pusat-pusat pelayanan.*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bogor adalah salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya bersebelahan dengan DKI Jakarta dan Kota Bogor. Kabupaten ini mengalami limpahan penduduk dari kedua kota tersebut, yang berakibat pada perkembangan wilayah yang sangat pesat. Ditandai oleh pesatnya perkembangan jumlah penduduk dengan tingkat pertumbuhan rata-rata sebesar 3,31% selama kurun waktu 2008 s/d 2015. Perkembangan ini pada akhirnya menciptakan pusat-pusat pelayanan baru di kabupaten ini. Kabupaten Bogor telah memiliki RTRW Kabupaten untuk kurun waktu 2005 s/d 2025. Setelah berjalan 11 tahun, diketahui perkembangan Kabupaten Bogor sangat pesat, hal ini didukung oleh ketersediaan fasilitas penunjang kehidupan penduduknya, seperti fasilitas pelayanan, fasilitas transportasi, serta ketersediaan lahan (*holding capacity)* sebagaidaya tarik untuk pengembangan wilayah [1].

Agar pengembangan wilayah Kabupaten Bogor dapat teratur dan terarah, selain mempedomani RTRW kabupaten yang telah disusun, juga perlu diantisipasi pengembangan wilayah yang tidak sesuai dengan RTRW.Berbagai metode analisis yang digunakan untuk mengetahui pengembangan pada suatu wilayah, namun analisis yang digunakan disesuaikan dengan ketersediaan data dari wilayah yang bersangkutan. Tony Mc.Call [2], menyatakan bahwa pada awalnya pengembangan wiayah diidentifikasi menggunakan data ekonomi, peningkatan ekonomi menunjukkan peningkatan kesejahteraan dan pengembangan wilayah. Namun sejak abad 21, pengembangan wilayah dapat diidentifikasi berdasarkan dinamika spasial dari wilayah bersangkutan, dan salah satu cara untuk melihat wilayah dengan mengetahui ketersediaan dan kondisi infrastruktur wilayah, termasuk peningkatan ketersediaan fasilitas [2]. Studi ini bertujuan melakukan analisis

pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor berdasarkan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan ekonomi, serta perkembangan fasilitas pelayanan. Hasil studi ini dapat digunakan untuk mengetahui pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor, dan dapat menjadi masukan dalam penentuan kebijakan pengembangan di wilayahnya.

METODEN PENELITIAN

Penelitian ini dibatasi pada Kabupaten Bogor - Provinsi Jawa Barat. Untuk mengetahui pengembangan wilayah di kabupaten ini, dilakukan dengan analisis kependudukan, analisis ekonomi, dan analisis pusat-pusaat pelayanan. Metode analisis kependudukan yang digunakan adalah metode pertumbuhan geometri yang mengasumsikan bahwa pertumbuhan penduduk adalah konstan, atau sama setiap tahunnyaitu r (%) atau menggunakan dasar bungaa majemuk [3]. Dengan mengetahui jumlah penduduk pada tahun dasar (Po), maka untuk mengetahui jumlah penduduk setelah tahun "t" dapat digunakan formula berikut:

$Pt = Po\,(1+r)^t$ (1)

Keterangan

Pt = penduduk pada tahun n

Po = penduduk pada tahun awal

r = angka pertumbuhan penduduk (%)

n = waktu dalam tahun (periode proyeksi)

Selanjutnya untuk mengetahui pertumbuhan dan pergeseran ekonomi digunakan metode *shift share.* Socrates [3], menyatakan bahwa analisis shift share dapat digunakan untuk menghitung competitif basis ekonomi industri [4]. Metode ini mengasumsikan pertumbuhan sektor ekonomi wilayah yang diteliti sama dengan pertumbuhan sektor ekonomi di wilayah perekonomian yang dijadikan acuan.Pada penelitian ini wilayah yang dijadikan acuan adalah Provinsi Jawa Barat. Perubahan atau pertumbuhan kinerja ekonomi kabupaten dibagi dalam tiga komponen, yaitu :

1. Komponen pertumbuhan nasional (*national growth component)* yaitu mengukur perubahan kinerja ekonomi pada perekonomian acuan.
2. Komponen pertumbuhan proporsional (*mix-industry or proportional shift component)* yaitu mengukur perbedaan pertumbuhan sektor-sektor ekonomi acuan dengan pertumbuhan agregat.
3. Komponen pergeseran atau pertumbuhan pangsa wilayah (*different shift or regional share*), yaitu mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian acuan.

Rumus yang digunakan adalah sebagai berikut [5]:

$$PEK = \left[\frac{Y^*}{Y} - 1\right] + \left[\frac{Y_i'}{Y_i} - \frac{Y^*}{Y}\right] + \left[\frac{y_i'}{y_i} - \frac{Y_i'}{Y_i}\right] \quad (2)$$

dimana :

Y^* = indikator ekonomi provinsi akhir tahun kajian

Y = indikator ekonomi provinsi awal tahun kajian

Y_i' = indikator ekonomi provinsi sektor i akhir tahun kajian

Y_i = indikator ekonomi provinsi sektor i awal tahun kajian

y_i' = indikator ekonomi kabupaten sektor i akhir tahun kajian

y_i = indikator ekonomi kabupaten sektor i awal tahun kajian

Pengembangan wilayah di Kabupaten Bogor juga diteliti dengan mengetahui perkembangan ketersediaan fasilitas pelayanan, dengan asumsi bahwa semakin besar jumlah fasilitas pelayanan yang tersedia, maka wilayah tersebut semakin berkembang. Hal ini disebabkan karena jumlah penduduk yang membutuhkan fasilitas tersebut semakin besar. Metode analisis yang digunakan adalah Index Sentralitas Terbobot atau *Weighted Centrality Index* (WCI). Imam Buchori dan Kristiana [5], menyatakan metode ini dapat digunakan untuk mengetahui struktur atau hierarki pusat-pusat pelayanan pada suatu wilayah [6].

Data yang digunakan untuk analisis pusat-pusat pelayanan dengan *Weighted Centrality Index* (WCI) adalah

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Data Potensi Desa (PODES) yang diterbitkan oleh BPS [7], yang memberikan informasi data ketersediaan fasilitas pelayanan di Kabupaten Bogor pada tingkat desa. Untuk menghitung banyaknya kelas interval digunakan perhitungan berdasarkan rumus [8] :

$$K = 1 + 3{,}3 \log n \quad (3)$$

Dimana:
K = Jumlah Kelas Interval
n = Jumlah data observasi.
log = logaritma
Panjang kelas dihitung berdasarkan rumus di bawah ini [8]:

$$PK = \frac{\text{Bobot IS tertinggi - Bobot IS terendah}}{\text{Jumlah Interval Kelas}} \quad (4)$$

Dimana:
PK = Panjang Kelas
IS = Indeks Sentralitas

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kabupaten Bogor mempunyai luas wilayah 2.301,95 Km^2 terdiri atas 40 kecamatan, 428 desa/kelurahan. Dengan batas wilayah sebelah utara Kota Depok, sebelah barat, sebelah barat daya Kabupaten Tangerang, sebelah timur Kabupaten Purwakarta, sebelah timur laut Kabupaten Bekasi, sebelah Selatan Kabupaten Sukabumi, sebelah tenggara Kabupaten Cianjur. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 1.

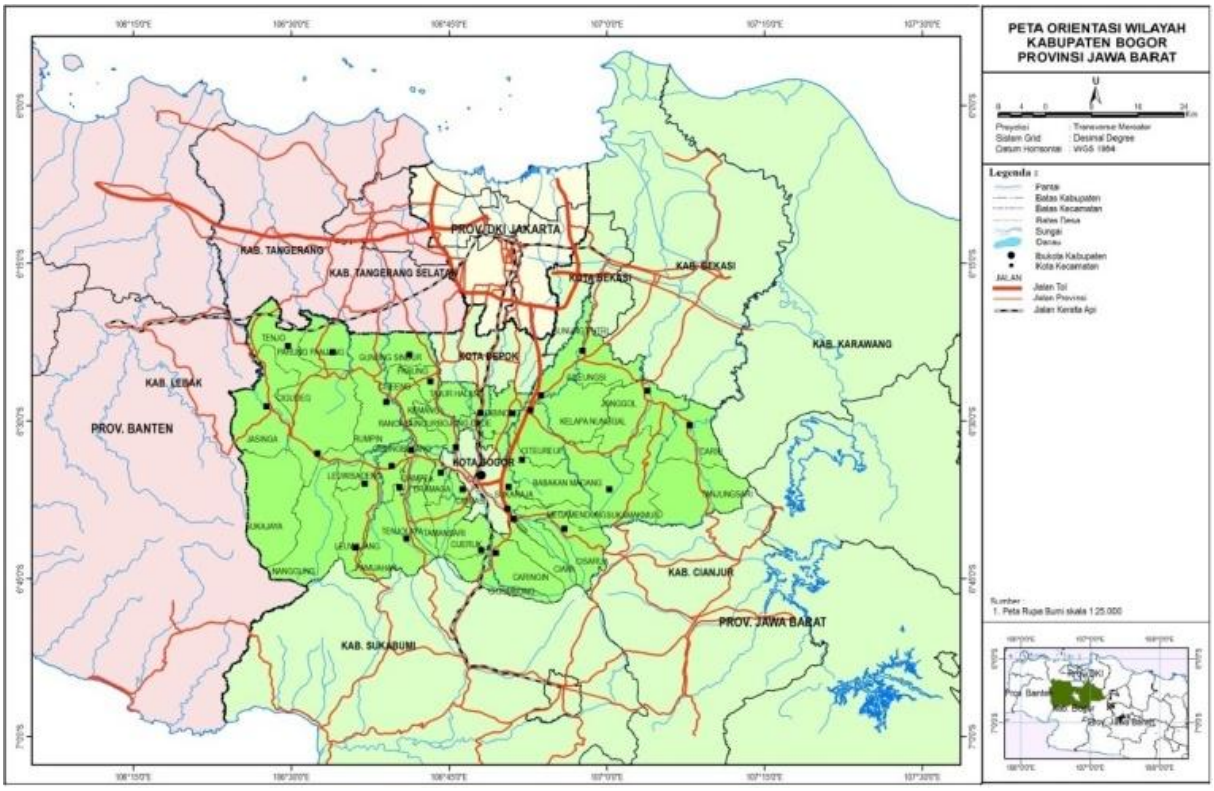

Gambar 1. Peta Orientasi Kabupaten Bogor

Pada tahun 2015 jumlah penduduknya mencapai 5.459.668 jiwa dengan rata-rata perkembangan jumlah penduduk selama tahun 2008 s/d 2015 sebesar 3,31%. Kepadatan penduduk sebesar 23,72 jiwa/Ha, dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Ciomas, disusul Kecamatan Cibinong dan Kecamatan Bojong Gede. Kecamatan Cibinong merupakan pusat pemerintahan kabupaten, sedang dua kecamatan lainnya terletak bersebelahan dengan Kota Bogor. Kecamatan-kecamatan yang lokasinya bersebelahan dengan Kota Bogor pada umumnya mempunyai tingkat kepadatan tinggi, lebih dari 40 jiwa/Ha, melebihi rata-rata kepadatan penduduk Kabupaten Bogor. Analisis ekonomi di Kabupaten Bogor menggunakan rumus *shift share* dengan data PDRB tahun 2013 dan 2015 menunjukkan hasil seperti terlihat pada Tabel 1.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 1. Pertumbuhan Daya Saing dan Proporsional di Kabupaten Bogor

Lapangan Usaha	Pertumbuhan Daya Saing Kabupaten	Pertumbuhan Proporsional
Pertanian,kehutanan dan perikanan	0.06	-0.10
Pertambangan dan Penggalian	0.01	-0.08
Industri Pengolahan	0.01	-0.01
Pengadaan Listrik dan Gas	0.04	-0.14
Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang	0.01	0.02
Bangunan/Konstruksi	0.09	-0.03
Perdagangan Besar dan Eceran	0.03	0.08
Transportasi dan Pergudangan	0.01	0.04
Penyedia Akomodasi dan Makan Minum	0.00	0.26
Informasi dan Komunikasi	0.02	0.02
Jasa Keuangan dan Asuransi	0.00	0.00
Real Estate	0.04	0.05
Jasa Perusahaan	0.00	-0.05
Administrasi,Pemerintahan,Pertahanan dan Jaminan Sosial	0.01	0.16
Jasa Pendidikan	0.04	0.22
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.09	0.08
Jasa Lainnya	0.01	0.00

Sumber : Hasil analisis

Apabila digambarkan dalam bentuk grafik seperti terlihat pada gambar berikut ini

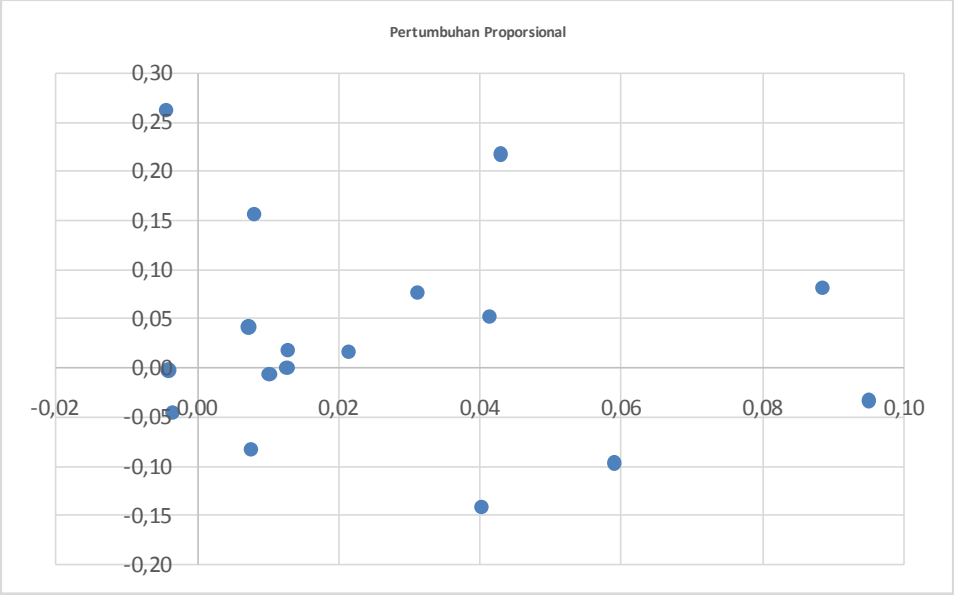

Gambar 2. Grafik Pergeseran Ekonomi (Shift - Share) Kabupaten Bogor Tahun 2013 – 2015 (Sumber: Hasil Perhitungan)

Dari hasil analisis terlihat bahwa sektor-sektor yang berada pada kuadran kesatu (Unggul) antara lain sektor-sektor: Pengelolaan Sampah,Limbah dan Daur Ulang, Perdagangan Besar dan Eceran, Transportasi dan Pergudangan, Penyedia Akomodasi dan Makan Minum, Informasi dan Komunikasi ,Jasa Keuangan dan Asuransi, Real Estate,Jasa Perusahaan, Administrasi, Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial, Jasa Pendidikan, Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Jasa Lainnya. Sedang sektor lainnya seperti Pertanian,

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kehutanan dan Perikanan, Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan Gas, Bangunan/Konstruksi, dan Jasa perusahaan berada pada kuadran dua (Agak Unggul).

Untuk mengetahui hirarki pusat-pusat pelayanan di wilayah Kabupaten Bogor, digunakan metode *Weighted Centrality Index* (WCI). Data yang digunakan adalah data PODES Kabupaten Bogor tahun 2011. Desa/kelurahan yang berjumlah 428 diurut berdasarkan kelompok masing-masing kecamatan. Data fasilitas pelayanan yang digunakan antara lain fasilitas pendidikan, kesehatan, peribadatan dan perdagangan pada masing-masing desa/kelurahan disusun dalam bentuk skalogram. Jumlah data tersebut adalah 45 (empat puluh lim buah). Selanjutnya dihitung bobot masing-masing fasilitas, yaitu membagi nilai 100 dengan total fasilitas yang sama dari seluruh desa/kelurahan. Bobot masing-masing fasilitas selanjutnya dikalikan jumlah fasilitas yang ada pada masing-masing desa/kelurahan. Berdasarkan hasil perhitungan, jumlah kelas interval adalah 10, dengan rentang nilai bobot masing-masing kelas seperti terlihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 2. Rentang Nilai Bobot Masing-masing Kelas

Hirarki	**Kisaran Nilai Bobot**		
1	115,52	S/D	128,33
2	102,72	S/D	115,51
3	89,91	S/D	102,7
4	77,10	S/D	89,9
5	64,29	S/D	77,09
6	51,48	S/D	64,28
7	38,68	S/D	51,47
8	25,87	S/D	38,67
9	13,06	S/D	25,86
10	0,25	S/D	13,05

Sumber : Hasil Perhitungan

Hirarki tertinggi mempunyai nilai bobot sebesar 128,33 yaitu pada Desa Nanggewer. Selanjutnya hirarki kedua sampai ketiga, tidak terdapat satu desa/kelurahan yang berada pada hirarki tersebut.Hirarki keempat Desa Pabuaran.Dua desa dengan hirarki tertinggi tersebut berada di Kecamatan Cibinong yang merupakan lokasi ibukota Kabupten Bogor.

Tidak ada desa/kelurahan yang berada pada hirarki kelima.Desa Ciangsana pada Kecamatan Gunung Putri berada pada hirarki keenam.Desa ini mempunyai hirarki tinggi karena akses yang mudah untuk mencapai desa ini.Terdapat 13 desa/kelurahan termasuk dalam hirarki ketujuh.Lima desa di antaranya merupakan desa/kelurahan yang berada di Kecamatan Cibinong. Kecamatan ini merupakan pusat pemerintahan Kabupaten Bogor, dan 7 desa/kelurahan dari 12 desa/kelurahan yang ada di kecamatan ini mempunyai hirarki tertinggi di Kabupaten Bogor. Jumlah desa/kelurahan dengan hirarki ke delapan adalah 26,satu di antaranya Desa Pakansari di Kecamatan Cibinong. Jumlah desa/kelurahan yang termasuk kategori hirarki kesembilan 95 buah, dan hirarki kesepuluh 291 buah.Pada umumnya desa/kelurahan tersebut berlokasi jauh dari kota-kota besar seperti Kota Jakarta dan Kota Bogor, juga desa/kelurahan yang ketersediaan fasilitas transportasi terbatas.Untuk lebih jelasnya gambaran hirarki desa/kelurahan dapat dilihat pada Gambar 3.

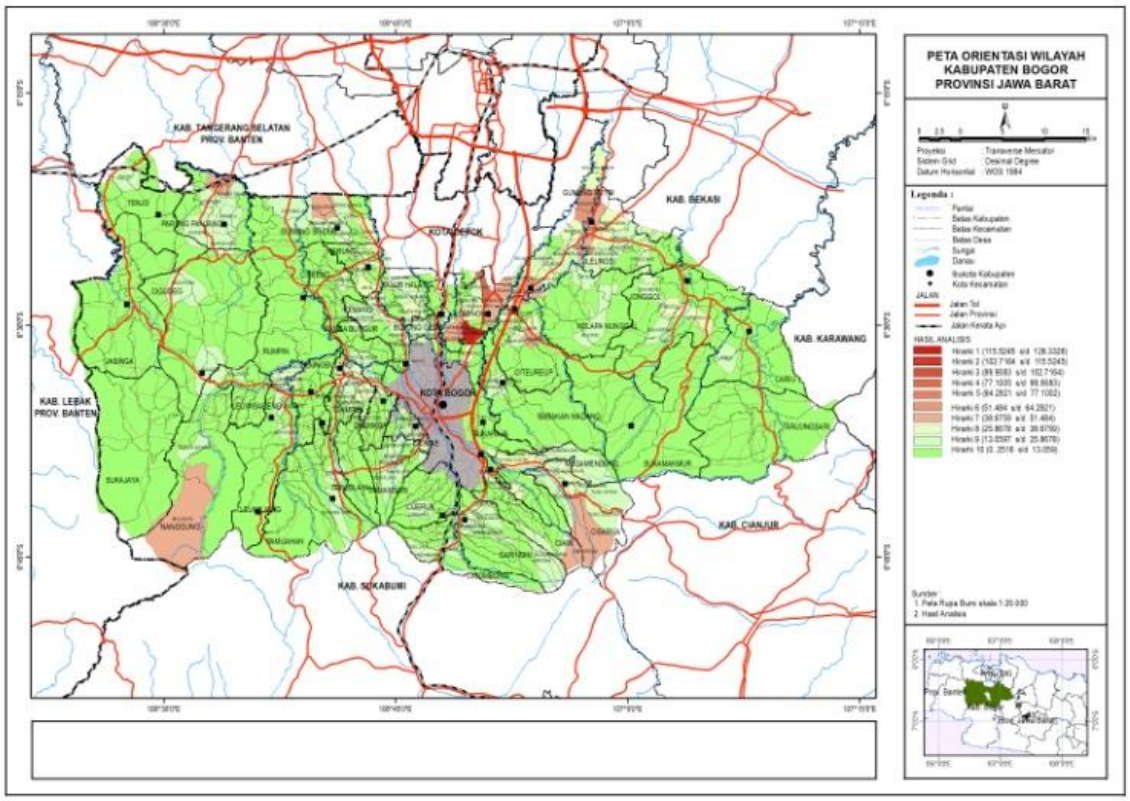

Gambar 3. Pusat-pusat Pelayanan Kabupaten Bogor
(Sumber: Hasil Analisis)

KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil analisis *shift share* yang digunakan untuk menggambarkan kondisi ekonomi di Kabupaten Bogor menunjukkan pergeseran terbesar pada industri dan pengolahan dan sektor perdagangan dan eceran. Hal ini perlu menjadi perhatian karena dapat merubah lingkungan Kabupaten Bogor yang merupakan wilayah pertanian dan perkebunan. Pusat-pusat pelayanan pada suatu wilayah dapat diidentifikasi dengan menggunakan *Weighted Centrality Index* (WCI) dengan data ketersediaan fasilitas pelayanan. Untuk Kabupaten Bogor diketahui pusat-pusat pelayanan tertinggi berada di ibukota kabupaten, dan desa/kelurahan yang dekat dengan Kota Jakarta dan Kota Bogor.Selanjutnya ibukota kecamatan tidak selalu mempunyai hirarki tertinggi di kecamatan masing-masing. Dari 40 kecamatan, hanya 10 desa/kelurahan yang mempunyai hirarki tertinggi di kecamatannya. Hasil analisis pusat-pusat pelayanan dan perkembangan pusat-pusat pelayanan pada penelitian lanjutan dapat dikaitkan dengan ketersedian fasilitas transportasi dan ketersediaan lahan untuk berkembang.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Colin Lee. 1973. Models in Planning, an Introduction to the Use of Quantitative Models in Planning, Pergamon Press, Toronto ,
[2] McCall, Tony. 2010. What do we mean by Regional Development?, Institute of Regional Development Cradle Coast campus. University of Tasmania
[3] Socrates. 2002. Shift Share Analysis Narrative, Costal Bend
[4] Departemen Pekerjaan Umum. 1992. Studi Tipologi Kabupaten, Jakarta
[5] Buchori, I. dan Astuti, K,. D. 2015. Studio Perencnaan Wilayah, Penerbit Universtas Terbuka. Jakarta.
[6] Badan Pusat Statistik. 2011. Potensi Desa. Jakarta.
[7] Sugiyono. 2015. Statistika untuk Penelitian, Alfabeta. Bandung

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MOBILITAS PENCARI KERJA PEREMPUAN DI PERKOTAAN

Komara Djaja[1)], Hera Susanti[2)], Shelly Adelina[3)] dan Cita Wigjoseptina[1)]

[1)]Kajian Pengembangan Perkotaan - Sekolah Kajian Strategik Dan Global, Universitas Indonesia
[2)]Departemen Ilmu Ekonomi - Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Indonesia
[3)]Kajian Gender - Sekolah Kajian Strategik Dan Global, Universitas Indonesia

email:komara02@gmail.com

Naskah diterima : 23 Februari 2017 Naskah direvisi : 8 Maret 2017 Disetujui terbit : 7 Mei 2017

ABSTRAK

Perkembangan kota Metropolitan seringkali ditandai oleh meningkatnya jumlah dan ragam kesempatan kerja. Perkembangan kesempatan kerja tersebut diisi oleh para pencari kerja, baik dari dalam kota Metropolitan itu sendiri maupun dari daerah sekitarnya. Makalah ini akan memfokuskan pembahasannya pada pencari kerja perempuan. Data BPS menunjukkan bahwa angka pengangguran penduduk perempuan di perkotaan dalam banyak kasus sering lebih tinggi dibandingkan penduduk lelaki, terutama kelompok penduduk usia muda. Dengan menggunakan pendekatan multidisplin penelitian ini bertujuan untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang menentukan kekurang-unggulan atau gender disadvantage pada kelompok pencari pekerja perempuan wilayah perkotaan. Data primer diperoleh dengan survey terstruktur untuk mendapatkan gambaran makro tentang hambatan dalam mencari kerja bagi pencari kerja perempuan. Beberapa informasi yang ingin didalami antara lain adalah; pemilihan bidang pekerjaan apa yang diingini, faktor apa yang melatar belakangi keinginan bekerja di bidang yang dipilih, bagaimana kesediaan pencari pekerja untuk bekerja di daerah lain, dan bagaimana persepsi pencari kerja terhadap peluang kerja dan besarnya upah. Untuk melengkapi hasil kuesioner, dilakukan pula wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran perspektif tentang gender disadvantage dan keadaan sosial ekonomi yang melatarbelakangi pencari kerja perempuan dalam mencari pekerjaan.

Kata kunci: *Pengangguran, perempuan, perkotaan*

PENDAHULUAN

Aglomerasi ekonomi yang pesat di perkotaan sangat tergantung pada tersedianya faktor produksi, salah satunya tenaga kerja. Peluang kerja di daerah perkotaan tersebut juga diisi oleh tenaga kerja dari daerah sekitanya. Namun dalam banyak hal, penawaran tenaga kerja selalu lebih besar dari permintaan tenaga kerja di perkotaan, maka pengangguran menjadi hal yang tidak dapat dihindari. Data Sakernas BPS tahun 2008 menunjukkan bahwa angka pengangguran terbuka kelompok penduduk perempuan jauh lebih tinggi dibandingkan laki-laki yaitu 9,7 persen dibandingkan 7,6 persen. Data ketenagakerjaan nasional juga menunjukkan kondisi ketenaga kerjaan perempuan tidak meningkat signifikan dalam satu setengah dekade terakhir, dimana persentasi angkatan kerja perempuan 38,5 persen pada tahun 1990 menjadi 38 persen pada tahun 2014. Angka partisipasi tenaga kerja (APTK) perempuan 50 persen pada tahun 1990 menjadi 51 persen pada tahun 2014, dan rasio kelompok penduduk lelaki yang bekerja terhadap perempuan adalah 62 persen pada tahun 1990 kemudian menjadi 61 persen pada tahun 2014.

Menurut Sisca [1], perbedaan gender, laki-laki dan perempuan, dalam tenaga kerja selalu ada. Pemahaman peran gender dalam masyarakat didasarkan pada norma dan nilai-nilai yang dibentuk dan hidup di masyarakat (*social construction theory*). Dalam Ridgeway [2], persepsi atau sterotipe gender membentuk praduga penilaian bahwa kedudukan lelaki adalah di atas perempuan dimana peran maskulin misalnya, sering dikaitkan dengan sifat kuat, agresif dan dominan dan sebaliknya, peran feminin sering diasosiasikan dengan sifat lemah, pasif, ngemong, dan mengalah. Sher Verick [3] dalam studinya di India menemukan bahwa partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja sangatlah ditentukan oleh; (i) tingkat pembangunan ekonomi; (ii) perolehan pendidikan masyarakat; (iii) dimensi sosial, seperti norma terkait perkawinan, fertilitas, peran perempuan di luar rumah tangga; (iv) akses terhadap kredit dan faktor input; (v) karakteristik rumah tangga dan

pasangan suami/istri; (vi) faktor kelembagaan, seperti hukum, perlindungan social, diskriminasi, dan manfaat program.

Makalah ini merupakan bagian dari penelitian yang bertujuan untuk untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang menentukan *gender disadvantage* pada kelompok pencari kerja perempuan wilayah perkotaan. Makalah ini juga ingin melihat bagaimana *gender disadvantage* di pengaruhi oleh mobilitas para pengangguran atau pencari kerja perempuan di perkotaan.

METODE PENELITIAN

Studi ini merupakan studi empirik dengan pendekatan multiperspektif. Penelitian ini menggunakan metode penyebaran kuesioner terstruktur untuk mendapatkan gambaran makro mengenai hambatan dalam mencari kerja bagi pengangguran perempuan, faktor pemilihan pekerjaan hingga faktor yang melatar belakangi kesediaan untuk bekerja di daerah lain dengan melihat persepsi peluang kerja dan besar upah. Untuk melengkapi hasil kuesioner, dilakukan penelitian kualitatif dengan wawancara mendalam untuk mendapatkan gambaran sosial ekonomi yang melatarbelakangi pengangguran perempuan dalam mencari pekerjaan dilihat dari perspektif gender. Penelitian dilakukan di sekitar 3 (tiga) kota inti, yaitu Kota Jakarta, Kota Bandung dan Kota Yogyakarta. Untuk mengetahui interaksi pencari kerja perempuan antara kota inti dan kota pinggirannya, maka ditentukan sebagai berikut; 1. Untuk Kota inti Jakarta, maka konta pinggiran yang diteliti adalah, Kota Tengerang, Kota Tengarang Selatan, Kota Depok, Kota Bogor, Kota Bekasi. Untuk kota inti Bandung dipilih Cimahi sebagai kota pinggirannya. Sedang untuk kota inti Yogya, dipilih Kabupaten Sleman sebagai kota pinggirannya. Untuk metode kualitatif, selain wawancara mendalam juga dilakukan FGD dengan institusi pemerintah daerah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil

Responden yang diambil adalah pencari kerja kelompok penduduk perempuan yang mendatangi Dinas Tenaga Kerja dan Bursa Kerja. Dari kelompok penduduk perempuan 15-60 tahun, ternyata mayoritas yang mencari kerja adalah kelompok usia muda berusia 18 sampai 29 tahun. Dari sini dapat disimpulkan bahwa pencari kerja aktif kelompok penduduk perempuan dalam kelompok usia 18-29, baik sebagai pekerja pemula maupun pindah ke profesi pekerjaan lain; dimana 59 persen adalah sudah pernah bekerja atau masih bekerja. Dari status perkawinan tampak bahwa yang berstatus lajang (83,51 persen). Hal ini dapat dipahami bahwa jika pada usia muda tersebut sudah berkeluarga, sangat boleh jadi keinginan masuk ke pasar tenaga kerja agak tertunda karena mengurus keluarga, khususnya anak.

Motivasi mencari kerja

Motivasi utama perempuan pencari pekerjaan adalah membantu orang tua dan memenuhi kebutuhan hidup (51,9 persen). Keadaan ini menunjukkan bahwa motivasi kerja perempuan terutama untuk kepentingan orang lain, baik keluarga inti maupun orang tua. Dalam usia muda tersebut, khsusnya dimana tempat tinggal si pencari kerja masih bersama orang tua, maka menopang kehidupan keluarga besar, yaitu orang tua, kakak atau adik, adalah gambaran umum masyarakat, khususnya pada kelompok pendapatan menengah ke bawah. Motivasi ini diikuti oleh motivasi memperbaiki taraf hidup (18.21 persen). Selain itu motivasi lainnya adalah menginginkan pekerjaan yang lebih baik (8,15 persen) dan menambah pengalaman atau menambah ilmu.
Dari hasil survey kualitatif berdasarkan perspektif gender, diketahui bahwa motivasi mencari kerja adalah:

- Perempuan muda pengangguran menyadari bahwa jika mereka memiliki pekerjaan dan penghasilan maka mereka akan memiliki posisi tawar yang baik dalam relasinya dengan pasangan maupun keluarga.
- Namun pada sisi yang lain perempuan muda pengangguran (subjek penelitian ini) mengakui bahwa mereka punya "beban" yang dikonstruksikan sebagai tugas mereka untuk mengabdi di dalam rumah.
- Dengan demikian, pekerjaan di luar rumah diyakini mereka sebagai sesuatu yang tidak akan mereka lakukan selamanya (tidak berani menggantungkan cita-cita tinggi untuk posisi/capaian terbaik dalam karier)

Faktor pemilihan pekerjaan

Di antara pencari kerja yang pernah bekerja sebagai buruh/karyawan, jumlah pencari kerja yang berstatus honorer lebih tinggi ketimbang pegawai tetap. Hal ini dapat terjadi sebagai dampak UU Ketenagakerjaan, dimana perusahaan khususnya perusahaan UMKM untuk lebih memilih status tenaga kerja

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

honorer dibanding tenaga kerja tetap karena besarnya ketentuan pembayaran uang PHK. Dari wawancara muncul pula kecenderungan pekerja perempuan untuk enggan berpindah kerja setelah berstatus tetap.
Alasan keluar dari tempat kerja terlihat lebih karena faktor internal yaitu pendapatan tidak memuaskan (17 persen), tidak cocok dengan lingkungan kerja (13 persen), jam kerja tidak sesuai (10 persen) dan menikah (7 persen). Selain itu ada sekitar 10 persen alasan keluar dari tempat kerja karena terkait dengan lokasi, yaitu jauh dari tempat tinggal, jauh dari keluarga dan pindah tempat tinggal. Walaupun alasan habis masa kontrak menjadi alasan yang banyak dipilih (25 persen) sebagai faktor eksternal, terlihat bahwa pencari kerja perempuan sudah mempunyai posisi tawar dalam pemilihan pekerjaan.

Hal menarik lainnya adalah dimana faktor kondisi untuk mencapai tempat kerja lebih diutamakan dibandingkan dengan faktor kondisi pekerjaannya. Jadi mereka lebih mengutamakan kemudahan transportasi dan jaminan keamanan, baru kemudian kondisi pekerjaannya seperti gaji, jam kerja, hak cuti dan status sebagai pegawai tetap. Terlihat juga bahwa mereka walau memilih untuk bekerja di sekitar lokasi tempat tinggal, tapi lebih mementingkan kemudahan transportasi dan jaminan keamanan, jadi mereka bersedia dengan lokasi agak jauh tapi dengan jaminan aksesibbilitas dan keamanan yang lebih terjamin.

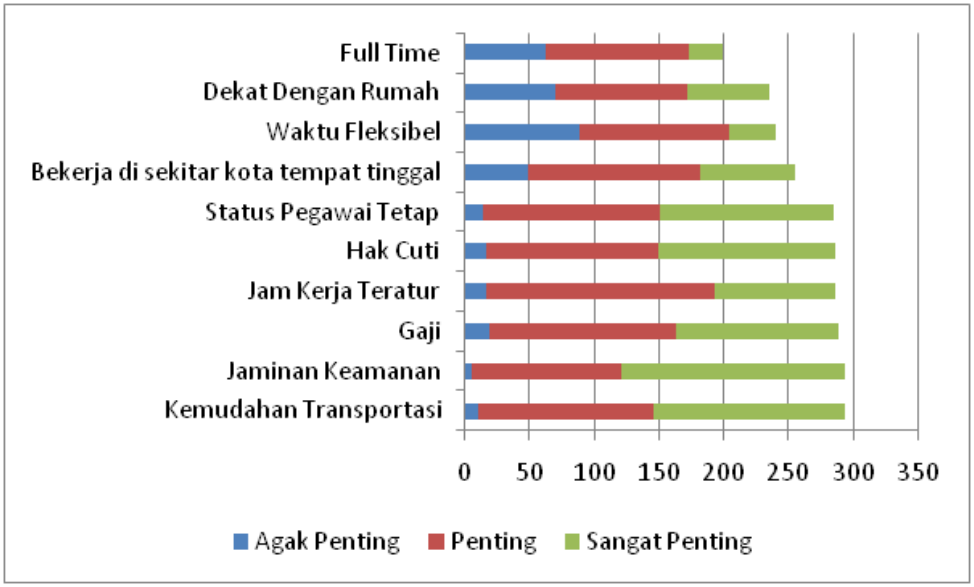

Gambar 1.Faktor Pertimbangan memilih pekerjaan

Dari hasil survey kualitatif berdasarkan perspektif gender, diketahui bahwa motivasi mencari kerja adalah:

- Jenis pekerjaan yg cocok untuk perempuan adalah menjadi guru, dosen, dan berwiraswasta di rumah, dengan alasan akan mudah membagi waktu utk keluarga. Karena, bagaimana pun juga, meski bekerja itu penting bagi perempuan, namun tugas utama sebagai ibu yang melayani keluarga harus tetap berlangsung.

- Subjek penelitian mengaku tidak akan mungkin mengambil jenis pekerjaan yang selama ini dikonstruksikan untuk laki-laki dengan alasan tidak akan kuat secara fisik

Hambatan Mencari Pekerjaan

Pada Gambar 2. terlihat hal yang menarik bahwa hanya sebagian kecil yang mengatakan bahwa kesempatan pekerjaan perempuan terbatas, ini menandakan bahwa perempuan perkotaan melihat bahwa kesempatan untuk bekerja bagi perempuan telah luas. Selain itu adanya saingan dari kaum laki-laki maupun dari pendatang bukan menjadi permasalahan utama. Pencari pekerjaan perempuan di perkotaan - terutama yang baru pertama mencari pekerjaan -melihat bahwa permasalahan utama yang dihadapi adalah ketidak sesuaian keterampian yang diimiliki dengan kesempatan kerja, selain itu perlunya pengalaman.

ISBN : 978-602-73463-1-4

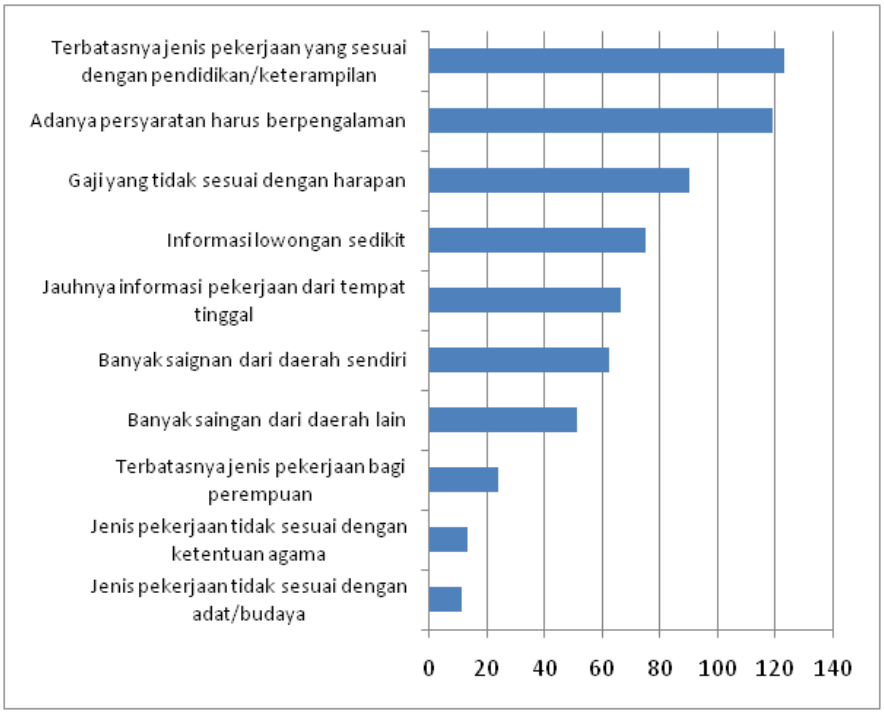

Gambar 2. Hambatan mencari Pekerjaan

Aspek Lokasi

Lokasi tempat kerja menjadi kendala tersendiri. Survey menunjukkan perbandingan lokasi di pekerjaan terdahulu dengan yang diinginkan. Terlihat bahwa umumnya para perempuan pencari kerja ini menginginkan tempat kerja yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Walaupun demikian, terlihat pula adanya perubahan nilai, sehingga yang menginginkan bekerja di luar provinsi dan bahkan di luar negeri juga cukup banyak.

Tabel 1. Perbandingan Lokasi tempat kerja dalam Pekerjaan Sebelumnya dengan Yang diinginkan

No	Jawaban	Pekerjaan Sebelumnya		Yang Diinginkan	
		Total	Presentasi	Total	Presentase
1	Kecamatan yang sama dengan tempat tinggal	40	13.33%	109	32.93%
2	Kecamatan yang berbeda dengan tempat tinggal	45	15.00%	64	19.34%
3	Kabupaten yang berbeda dengan tempat tinggal	51	17.00%	62	18.73%
4	Provinsi yang berbeda dengan tempat tinggal	39	0.13%	81	24.47%
5	Negara yang berbeda dengan tempat tinggal	2	0.67%	12	3.63%
-	Tidak Jawab	123	41.00%	3	0.91
	Total	300	100,00%	331	100.00%

Sumber: hasil survey, 2016

Kesiapan untuk bekerja lebih jauh dari tepat tinggal juga dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan. Jika dilihat dari perbedaan latarbelakang pendidikannya, mobilitas pekerja perempuan lulusan SMK lebih tinggi dibandingkan dengan SMA. Dan preferensi lulusan perguruan tinggi untuk bekerja di luar kota lebih tinggi dibandingkan dengan lulusan SMA atau SMK.

Tabel 2. Kesediaan bekerja di Luar Kota berdasarkan tingkat pendidikan

Pendidikan	Bersedia bekerja di luar kota
SLTA/MA	54%
SMK	62%
Akademi D1/D2/D3	83%
Universitas (S1)	86%

Sumber: hasil survey, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dari hasil penelitian kualitatif perspektif gender diketahi bahwa lokasi tempat bekerja merupakan faktor yang menentukan pilihan mereka untuk merebut peluang yang ada. Namun diakui, daya tarik kota besar sangatlah besar.

Apabila dilihat perbedaan tiap kota yang disurvey, terlihat bahwa bersedianya pekerja perempuan untuk bekerja di luar kota atau bahkan luar provinsi terkait dengan lokasi kota dan kondisi aksesibilitas yang tersedia. Dari tujuh lokasi survey dapat dikelompokan dalam mobilitas tinggi, yaitu Depok, Sleman, Tangerang Selatan dan Bekasi dimana pencari perja perempuan bersedia bekerja di beda kota dan beda provinsi. Mobilitas sedang, yaitu Bogor dan Tangerang dimana pencari kerja perempuan bersedia bekerja di beda kota tapi tidak beda provinsi. Mobilitas rendah yaitu Cimahi dimana hanya perempuan pencari kerja lebih bersedia bekerja di dalam kota dan dalam dalam provinsi.

Seperti di kota-kota yang masuk dalam kawasan Bodetabek, beda provinsi disini kemungkinan besar adalah Kota Jakarta atau Jawa Barat untuk Tangerang dan Tangerang Selatan atau Banten untuk Depok, Bekasi dan Bogor. Untuk Kota Bogor dan Kota Tengarang, preferensi lokasi bekerja di Jakarta atau lain provinsi setinggi Depok, Bekasi dan Tangerang Selatan. Untuk Bogor, secara lokasi walaupun memang masuk dalam Kawasan Botabek tapi tidak berbatasan langsung dengan Kota Jakarta, sehingga ini yang mungkin menyebabkan kurangnya preferensi untuk bekerja di luar provinsi atau Jakarta.

Jika melihat di luar Bodetabek, di Cimahi, preferensi untuk bekerja di luar kota maupun luar provinsi terlihat kurang diinginkan. Kemungkinan hal ini karena Cimahi tidak berbatasan langsung dengan provinsi lain. Sedangkan untuk Sleman, preferensi untuk bekerja di luar kabupaten atau luar provisni terlihat sangat terbuka, karena akses ke pusat Kota Jogyakarta cukup dekat dan Sleman juga berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Tengah, sehingga terbuka untk berkerja di luar provinsi yang berdekatan, misal di Magelang atau ke arah Kota Solo.

Tabel 3. Preferensi Lokasi tempat kerja antar Kota

Jawaban	Cimahi	Sleman	Bekasi	Bogor	Depok	Tangerang	Tangerang Selatan
Bekerja di Luar Kota	40%	90%	65%	83%	88%	60%	73%
Bekerja di Luar Provinsi	10%	74%	53%	43%	68%	45%	75%

Sumber: hasil survey, 2016

Untuk alasan pemilihan lokasi bekerja, walau mayoritas pencari kerja menyampaikan keinginan agar lokasi tempat kerjanya dekat dengan tempat tinggal. Namun alasan lain, seperti mencari pengalaman, peluang lebih tinggi, tempat lebih nyaman maupun UMR (Upah Minimum Regional) lebih tinggi, menunjukkan adanya perbedaan nilai dengan alasan pertama tadi. Disini keinginan untuk lebih maju menjadi pertimbangan untuk menentukan lokasi tempat kerja yang diinginkan.

Tabel 4. Alasan Pencari Kerja Perempuan Menginginkan Lokasi Tempat Kerja

No	Jawaban	%
1	Lokasi dekat dengan tempat tinggal	27.60%
2	Akses mudah	20.22%
3	Mencari pengalaman	18.31%
4	Peluang lebih tinggi	12.57%
5	Tempat lebih nyaman	5.74%
6	UMR lebih tinggi	14.21%
7	Lainnya	1.09%
	Tidak Jawab	0.27%
	Total	100%

Sumber: hasil survey, 2016

Kesediaan untuk bekerja di lokasi yang lebih jauh bisa juga dikaitkan dengan presepsi terhadap kondisi daerah tempat tinggalnya, dari segi kemajuan daerahnya, peluang kerja dan upah. Untuk kondisi kemajuan daerahnya, sebagian besar responden di tujuh kota mempersepsikan daerahnya telah maju, dengan melihat dari kondisi jalan dan kondisi keamanan yang baik. Hal ini karena lokasi survey yang terpilih memang merupakan daerah perkotaan.

Akan tetapi jika membandingkan isu upah dan kesempatan kerja, terlihat ada perbedaan. Daya dorong pencari kerja perempuan untuk mencari pekerjaan di luar daerahnya tidak selalu karena daerahnya lebih tidak baik dari segi peluang kerja dan upah. Seperti di Depok, walau presepsi terhadap upah dan peluang kerja di Depok lebih tinggi, tapi mobilitas pencari kerja ke daerah lain tinggi atau untuk Cimahi, walau presepsi terhadap upah dan peluang kerja di daerahnya rendah tapi mereka lebih memilih bekerja di daerahnya. Untuk Tangerang selatan, Tangerang dan Bekasi, mobilitas pencari kerja perempuan tinggi dan sedang, dimana mereka merasa peluang kerja di daerahnya rendah walaupun upahnya tinggi. Untuk Bogor presepsi terhadap peluang kerja dan upah di daerahnya rendah, sehingga bisa menjadi pendorong melakukan mobilitas mencari kerja ke daerah lain.

Tabel 5. Matriks Mobilitas dan Peluang Kerja di Daerahnya

		Persepsi Peluang Kerja	
		Tinggi	**Rendah**
MOBILITAS	**Tinggi**	Depok Bekasi	Tangsel Sleman Bekasi
	Sedang		Bogor Tangerang
	Rendah		Cimahi

Tabel 6. Matriks Mobilitas dan Upah di Daerahnya

		Persepsi Upah	
		Tinggi	**Rendah**
MOBILITAS	**Tinggi**	Depok Tangsel Bekasi	Sleman
	Sedang	Tangerang	Bogor
	Rendah		Cimahi

KESIMPULAN DAN SARAN

Perempuan pekerja tidak bisa meninggalkan kewajiban domestiknya walau motivasi kerja perempuan terutama untuk kepentingan orang lain, baik keluarga inti maupun orang tua. Oleh karena itu mempengaruhi mobilitas pencari kerja perempuan. Dimana lokasi yang dekat tempat tinggal menjadi pilihan utama. Akan tetapi mobilitas mereka bisa lebih tinggi ketika aksesibilitas dan keamanan terjamin. Mobilitas pencari kerja perempuan juga dipengarhui pula oleh pendidikannya, dimana lulusan PT dan SMK mempunyai mobilitas lebih tinggi.

Peluang kerja yang kurang walau upah dirasa lebih tinggi mempengaruhi untuk melakukan mobilitas lebih tinggi. Kondisi aksesibilitas yang tinggi dapat menyebabkan mobilitas semakin tinggi walau mereka melihat upah dan peluang kerja di daerahnya tinggi. Sebaliknya walau upah dan peluanga kerja rendah tetap enggan bermobilisasi ke daerah lain ketika aksesibilitas kurang menunjang.

Pembedaan perilaku basis gender dalam dunia kerja sudah dimulai sejak tahap penyiapan keterampilan kerja sampai dengan posisi/peran juga gaji. Pencari kerja perempuan juga memiliki preferensi piihan kerja yang sesuai keahlian dan lokasi kerja yang tidak jauh dari tempat tinggalnya.

Faktor yang mempengaruhi preferensi/pilihan perempuan pencari kerja ternyata kebanyakan bukan dari eksternal tetapi justru dari internal yang menyadari kulturnya sebeagai perempuan yaitu bahwa akan ada tuntutan keluarga (anak dan suami) untuk meluangkan waktu lebih banyak, sehingga pemilihan waktu, status posisi kerja juga menyesuaikan dengan faktor tersebut.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Untuk meningkatkan peluang kerja perempuan dengan meningkatkan mobilitas, bisa dengan peningkatan pendidikan yang sesuai dengan peluang kerja. Meningkatkan aksesibilitas dengan infrastruktur antar daerah yang cepat dan aman, sehingga waktu tempuh lebih cepat dan mereka tetap masih bisa mengerjaan pekerjaan domestiknya. Agar perempuan bisa mendapatkan pekerjaan di daerahnya, peningkatan upah saja tidak cukup, karena upah berlaku universal laki-laki dan perempuan, perlu juga dibarengi dengan peningkatan peluang kerja di daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] A.R. Sisca. 2012. Kondisi Sosial Demografis Penduduk Usia Kerja di Indonesia". Jakarta: LIPI.
[2] Ridgeway, C.L. and Lynn Smith-Lovin. 1999. The Gender System and Interaction. Annual Review of Sociology Vol 25
[3] Sher Venk. 2016. India Labor Market. ILO 2016.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PERAN PERENCANAAN PENYULUHAN PERTANIAN TINGKAT NAGARI BERBASIS IKATAN SESAMA PETANI TERHADAP PEMBANGUNAN PEDESAAN DI NAGARI BALAI PANJANG

Muhamad Reza[1)], Melinda Noer[2)], Yonariza[2)] dan Asmawi[3)]

[1)]Program Doktor Prodi. Ilmu Pertanian, Pemusatan Pembangunan Pertanian, Pascasarjana Universitas Andalas
[2)] Sosek, Fakultas Pertanian Universitas Andalas
[3)] Ilmu komunikasi FISIP Universitas Andalas
Email: rezamsi@yahoo.co.id

Naskah diterima : 3 Maret 2017 Naskah direvisi 21 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Dokumen Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari disusun melalui kegiatan Musrenbang dengan melibat stakeholder terkait, diantaranya adalah penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang menggunakan dokumen perencanaan penyuluhan pertanian nagari sebagai alat untuk berkontribusi pada Musrenbang tersebut.Dokumen perencanaan penyuluhan pertanian disusun melalui penglibatan petani dari kelompok ikatan sesama petani dan kelompoktani lainnya. Melalui metode penelitian studi kasus pada proses Musrenbang untuk menyusun RKP Nagari Balai Panjang, diharapkan dapat menjelaskan peran perencanaan penyuluhan pertanian pada pembangunan nagari dengan cara mengaikatkan penjelasan tentang proses perencanaan penyuluhan pertanian berbasis ikatan sesama petani dengan penjelasan keterlibatan PPL pada tahapan Musrenbang untuk menyusun RKP Nagari.Penelitian dilaksanakan pada bulan April s/d Mei 2016.Teknik pengumpulan data digunakan wawancara dan dokumentasi.Informan penelitian sebanyak 10 orang didapat dari teknik purposif.Teknik analisa data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan alat analisis sintesis melalui dua modus analisis yaituhermeneutik untuk interpretativisme data tekstual dan narasi untuk mendeskripsikan fakta.Hampir keseluruhan kegiatan pada proses perencanaan penyuluhan pertanian nagari Balai Panjang melibatkan petani dari kelompok ikatan sesama petani sebagai sumber data/informasi dan pemikiran (ide dan masukan) tentang kondisi nagari dan pertanian, dan sebagai pengambil beberapa keputusan perencanaan untuk menghasilkan dokumen perencanaan penyuluhan pertanian. Dokumen tersebut digunakan penyuluh sebagai sumber data, informasi, dan usulan program serta kegiatan pembangunan bidang pertanian di nagari yang terlihat dari keterlibatan penyuluh pada tahapan Pra-Musrenbang dan pelaksanaannya untuk menyusun RKP Nagari.Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa perencanaan penyuluhan pertanian berperan dalam pengambilan keputusan RKP bidang pertanian yang akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nagari.

Kata kunci: *perencanaan partisipatif, keputusan perencanaan, programa penyuluhan pertanian.*

PENDAHULUAN

Musyawarah Perencanaan Pembangunan nagari (MusrenbangNag) merupakan salah satu bentuk perencanaan degan pendekatan partisipatif yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat dan pihak-pihak terkait dalam pengambilan keputusan, pengumpulan gagasan, perumusan pilihan-pilihan (*option*), evaluasi pilihan, tindakan memilih, dan merumuskan strategi untuk melakukan pilihan terhadap dampak yang timbul [1] dari kegiatan pembangunan nagari yang dilaksanakan berdasarkan hasil MusrenbangNag. Pendekatan partisipatif dalam kegiatan Musrenbangnag merupakan perwujudan dari penerapan konsep demokrasi yang menjadikan nagari sebagai wilayah otonom terendah [2] di Sumatera Barat, berkewenangan untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan nagari secara mandiri [3]. Salah satu luaran yang dihasilkan melalui MusrenbangNag adalah Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari dengan mengikutsertakan pemangku kepentingan diantaranya adalah penyuluh pertanian.Keterlibat mereka selama ini hanya dilihat dari sisi individu yang terlibat dan berkontribusi dalam pengambilankeputusan sebagai perwakilan dari kelompok atau institusinya.Bagaimana dan mengapa mereka dapat berkontribusi, belum terungkapkan dengan jelas dari penelitian-penelitian terdahulu terutama alat yang mereka gunakan untuk bisa berontribusi dalam kegiatan

MusrenbangNag.

Begitu juga kontribusi yang diberikan penyuluh pertanian lapangan (PPL) dalam MusrenbangNag, tentunya PPL menggunakan instrumen tertentu sebagai acuan dan pedoman untuk dapat memberikan masukan, kritikan, saran terkait dengan keputusan perencanaan RKP Nagari yaitu programa penyuluhan pertanian sebagai luaran dari perencanaan penyuluhan pertanian nagari yang dibuat dengan mempertimbangkan keterpaduannya dengan rencana pembangunan desa/nagari dan proses penyusunannya menggunaan pendekatan partisipatif [4].

Proses perencanaan penyuluhan tersebut diselenggarakan oleh PPL Nagari Balai Panjang dengan melibatkan petani dari perwakilan kelompoktani, termasuk juga dari kelompok ikatan sesama petani yang anggotanya saling terikat oleh hubungan kekeluargaan, *sasuku*,dan persahabatan[5]. Ikatan tersebut meruapakan modal sosial dalam bentuk jaringan kerja yang dilihat dari dimensi yang mengikat anggota didalamnya atau yang lebih dikenal dengan *bonding social capital* 6],[7],[8],[9],[10],[11]. Dokumen perencanaan yang dihasilkan, digunakan penyuluh sebagai pedoman dan menjadi sumber data dalam keterlibatannnya pada Musrenbang Nagari dalam menyusun RKP Nagari Balai Pajang.

Dari sinilah dapat terlihat bahwa sebenarnya perencanaan penyuluhan pertanian memiliki peran dalam pembangunan nagari melalui MusrenbangNag untuk menyusun RKP Nagari.Akan tetapi, penelitian terhadulu yang membahas tentang perencanaan penyuluhan pertanian baru sebatas tentang prosesnya[12],[13], dan kondisi partisipasi petani [14][15], sedangkan yang membahas tentang kaitan atau peran perencanaan penyuluhan pertanian terhadap pembangunan pedesaan belum ada dikaji secara mendalam, meskipun penelitian lainnya telah mengungkap bahwa penyuluh atau penyuluhan pertanian berperan dalam pembangunan pertanian dan pedesaan[16][17][18].

Pada saat tidak adanya kajian-kajian yang mengungkap tentang peran perencanaan penyuluhan pertanian pada pembangunan desa/nagari, maka dasar atau kekuatan argumentasi akademisnya tentang peranannya pada pembangunan pedesaan/nagarimasih menjadi polemik yang tak berkesudahan.Selain itu teori dan konsep yang menegaskan bahwa penyuluhan pertanian merupakan faktor pelancar [19] pembangunan pertanian berkaitan langsung dengan pembangunan desa/nagari, membutuhkan pembuktian-pembuktian baru untuk membuktikan bahaw teori dan konsep tersebut masih dapat berlaku saat sekarang ini. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian dengan tujuan menjelaskan peran perencanaan penyuluhan pertanian pada pembangunannagari dengan cara mengaikatan penjelasan tentang proses perencanaan penyuluhan pertanian berbasis ikatan sesama petani, dan penjelasan keterlibatan PPL pada tahapan Musrenbang untuk menyusun RKP Nagari.

METODE PENELITIAN

Penelitin ini termasuk kedalam jenis penelitian studi kasus dengan metode penelitiannya adalah kualitatif [20]. Kasus penelitian berupa peran perencanaan penyuluhan pertanian pada pembangunan nagari yang dilihat dari kegiatan MusrenbangNag untuk menysun RKP Nagari. Penelitian dilaksanakan pada bulan April s/d Mei 2016.Fokus data penelitian yaitu mengaikatkan penjelasan tentang proses perencanaan penyuluhan pertanian berbasis ikatan sesama petani dengan penjelasan keterlibatan PPL pada tahapan Musrenbang untuk menyusun RKP Nagari untuk mengungkapkan peran perencanaan penyuluhan pertanian pada pembangunan nagari. Teknik pengumpulan data digunakan wawancara dan dokumentasi.Informan penelitian sebanyak 10 orang didapat dari teknik purposif.Data penelitian dianalisadengan teknik deskriptif kualitatif dengan alat analisis sintesis melalui dua modus analisis yaitu *hermeneutik* untuk *interpretativisme* data tekstual dan narasi untuk mendeskripsikan fakta [21][22].

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Berbasis Ikatan Sesama Petani.

Perencanaan penyuluhan pertanian yang dimaksudkan adalah kegiatan penyuluh pertanian di tingkat desa/nagari untuk mengambil keputusan [23] rencana program dan kegiatan penyuluhan pertanian secara sistematis yang dilaksanakan setiap tahunnya melalui pendekatan partisipatif [24] dengan luarannya berupa programa penyuluhan pertanian nagari. Pada setiap tahapan peyuluh pertanian bersama-sama dengan petani (sebagai perwakilan dari kelompoktani) mengambil keputusan tentang program dan kegiatan penyuluhan pertanian yang dibutuhkan oleh petani supaya dapat mengatasi permasalahan pertanian dan membantu pencapaian tujuan pembangunan pertanian yang menjadi sektor utama pada pembangunan pedesaan/nagari.

Prosesnya perencanaan penyuluhan pertanian nagari terdiri dari beberapa tahapan yaitu tahapan persiapan, pelaksanaan, finalisasi.Pada setiap tahapan tersebut terdapat beberapa kegiatan seperti persiapan PRA (lihat Tabel 1) atau kroscek data dan pelaksanaanya untuk menggali data dan informasi nagari.Selanjutnya

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

adalah persiapan penyusunan Rencana Defenitif Kelompok (RDK)/Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) seperti yang terlihat pada Tabel 2, kemudian RDK/RDKK direkapitulasi oleh PPL, dimana keseluruhan kegiatan tersebut bertujuan untuk menetapkan keadaan yang ada diwilayah kerja penyuluh.

Tabel 1. Resume Pernyataan Informan Tentang Proses Persiapan PRA di Nagari dengan Kelompoktani Berbasis Ikatan

No	Kegiatan	Perihal Persiapan Pelaksanaan PRA untuk Mendapatkan Data dan Informasi Nagari			
		Lokasi	**Pelaku**	**Kontribusi Pelaku**	**Metode Pengambilan Keputusan**
1.	Pembentukan Tim PRA dan sub tim PRA	Masjid/Musholla/Ruang Pertemuan Kantor Walinagari	PPL, petani/ pelaku usahatani, tokoh masyarakat	**PPL**: pimpinan pertemuan, memberikan materi penyuluhan tentang PRA, memfasilitasi pembentukan tim. **Petani/ pelaku usahatani, tokoh masyarakat**: memfasiitasi saran & prasarana pertemuan, sumbang saran, menyediakan makan/minum	Musyawarah/ Kesepakatan bersama
2.	Penentuan waktu pelaksanaan PRA		PPL, petani/ pelaku usahatani, tokoh masyarakat	**PPL**: menjadi fasilitator dan pengambilan keputusan **Petani:** mengambil keputusan	Musyawarah/ Kesepakatan bersama
3.	Pembagian Tugas		PPL, petani/ pelaku usahatani, tokoh masyarakat	**PPL**: menjadi fasilitator **Petani:** mengusulkan dan mengambil keputusan	Musyawarah/ Kesepakatan bersama
4.	Persiapan alat dan bahan/perbanyakan instrument	Posko Kelompoktani	PPL, Tim PRA (petani/ pelaku usahatani, tokoh masyarakat)	**PPL**: memberikan daftar kebutuhan alat dan bahan, menyediakan bahan/alat/intrumen yang tersedia di BP3K. **Tim PRA**: mempersiapan saran & prasarana untuk pertemuan PRA, menyediakan data sekunder yang berasal dari keltan/gapoktan dan kantor walinagari	Musyawarah/ Kesepakatan bersama
5.	Kunjungan pengakraban dan sosialisasi	Masjid/Ruang Pertemuan Kantor Walinagari/ Posko Kelompoktani	Penyuluh dari BP3K, PPL, Tim PRA, Petani/Pelaku usahatani, aparatur pemerintah nagari	**Penyuluh BP3K/PPL :** memberikan penyuluhan tentang PRA (tujuan, manfaat, cara pelaksanaan PRA). **Tim PRA**, **Petani/Pelaku usahatani, aparatur pemerintah nagari:** kehadiran, menetapkan waktu dan tempat, membantu menyediakan saran & prasarana pertemuan, menyumbangkan makan/minuman.	Musyawarah/ Kesepakatan bersama

Sumber: sinstesis hasil wawancara dengan informan, 2016.

Tahapan pertama yang dilakukan oleh penyuluh pertanian dalam kegiatan persiapan ini adalah melakukan pembentukan tim PRA dan Sub Tim PRA. Tim tersebut berguna sebagai pemandu penyamaan pandangan dalam menggali data dan informasi nagari. Penyuluh pertanian nagari bekerjasama dengan ketua kelompok tani tokoh masyarakat dalam melaksanakan pembentukan tim PRA.

Tahapan kedua adalah penyuluh bersama-sama dengan tim PRA yang telah terbentuk, menyepakati waktu pelaksanaan PRA untuk menggali data dan informasi mengenai kondisi pertanian dan kondisi Nagari. Watu pelaksanaan PRA untuk menggali data dan informasi nagari diserahkan sepenuhnya kepada kesedian dari tim dengan cacatan masih masuk dalam waktu kerja penyuluh pertanian lapangan, karena mayoritas penyuluh di daerah ini adalah perempuan yang tidak bisa beraktifitas di malam hari. Kronologis pelaksannyaan, penyuluh menyerahkan kepada ketua tim untuk menyepakati dengan anggotanya mengenai penetapan waktu pelaksanaan PRA, selanjutnya waktu yang diusulkan oleh tim dikomunikasikan kepada penyuluh pertanian.Penetapan waktu yang didapatkan dimasing-masing nagari memang ada perbedaan, karena keputusan penetapan waktunya bukan dari penyuluh atau diorganisir oleh BP3K setempat.

Setelah disepakatinya waktu pelaksanaan PRA, maka penyuluh dan tim PRA menyepakati mengenai pembanian tugas masing-masing anggota. Seperti pelaksanaan pada tahapan sebelumnya, pembagian tugas diserahkan kepada tim untuk membaginya pada masing-masing anggota. Tugas tersebut ditetapkan atas dasar kesepakatan tim, penyuluh pertanian hanya memfasilitasi dan memberikan masukan kepada tim komponen pembagian tugas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan PRA. Seabagi contoh, ada yang bertugas sebagai koordinator kegiatan, penyediaan sarana dan prasarana pelaksanaan PRA, konsumsi kegiatan dan penggerak petani untuk mau terlibat dalam kegiatan tersebut.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Sehubungan dengan telah terbentuknya tim, tersepakatinya waktu pelaksanaan, dan telah dibagi tugas masing-masing anggota tim. Maka pada satu minggu sebelum pelaksanaan PRA, penyuluh pertanian bersama-sama tim PRA yag telah terbentuk, melakukan persiapan peralatan pendukung pertemuan dan menyediakan bahan-bahan yang dirasa dibutuhkan untuk pertemuan termasuk instrument atau forms isian yang telah disediakan oleh penyuluh pertanian. Kegiatan ini dilaukan, supaya dalam pelaksanaan penggalian data dan informasi nagari dapat terlaksana dengan baik. Kegiatan persiapan lainnya yang dilakukan PPL bersama dengan petani dari kelompok ikatan sesama petani adalah mempersiapkan pelaksanaan penyusunan RDK/RDKK seperti yang terlihat ringkasan kronologisnya pada table di bawah ini.

Tabel 2. Resume Pernyataan Informan Tentang Persiapan Penyusunan RDK/RDKK

No	Kegiatan	Perihal Persiapan Pelaksanaan Penyusunan RDK/RDKK			
		Lokasi	**Pelaku**	**Kontribusi Pelaku**	**Metode Pengambilan Keputusan**
1.	Sosialisasi RDK/RDKK	Masjid/ ruang pertemuan kantor Walinagari/ Posko Poktan	PPL, Petani & pengurus poktan	**PPL:** menyampaikan tujuan & manfaat penyusunan RDK/RDKK, menjelaskan komponen dalam blangko isian RDK/RDKK. **Petani & pengurus poktan:** waktu, memfasilitasi rasana & prasarana pertemuan, konsumsi pertemuan	Musyawarah/ Kesepakatan bersama
2.	Menginventarisasi kedala usahatani			**PPL:** pimpinan pertemuan, menggali kendala usahatani yg dihadapi petani/poktan. mencatat kendala usahatani **Petani & pengurus poktan:** memberikan informasi kendala usahatani, sumbang saran, masukan tentang materi penyuluhan yang dibutuhkan.	
3.	Mengevaluasi & memotivasi petani/keltan			**PPL:** evaluator dan motivator petani/poktan. **Petani & pengurus poktan:** memberikan informasi dan tanggapan terhadap hasil evaluasi PPL.	
4.	Persiapan data untuk menyusun RDK/RDKK			**PPL:** memberikan daftar kebutuhan data untuk penyusunan RDK/RDKK **Petani & pengurus poktan:** menyediakan data tertulis yang dimiliki poktan	

Sumber: sinstesis hasil wawancara dengan informan, 2016.

Kegiatan persiapan penyusunan RDK/RDKK diawali dengan melakukan sosialisasi.Dalam hal ini penyuluh pertanian lapangan menjadi pelaku utama sedangkan petani menjadi masyarakat penerima sasaran kegiatan sosialisasi.Pada pelaksanaannya, penyuluh pertanian menyampaikan tujuan yang hendak dicapai dengan tersusunnya RDK/RDKK oleh kelompoktani.Selanjutnya penyuluh pertanian menyampai komponen yang ada pada blangko pengisian RDK/RDKK dan menjelaskan setiap komponen tersebut kepada petani yang hadir dalam kegiatan ini.Sedangkan kontribusi dari petani yang ditemukan dalam kegiatan ini yaitu kesedian mereka hadir dalam kegiatan, menanyakan komponen dalam blangko RDK/RDKK yang tidak dipahami peteni dan bersedia memfasilitasi tempat kegiatan.Bahkan petani dengan sukarela menyediakan konsumsi peserta pada kegiatan ini.

Setelah kegiatan sosialisai selesai dilaksanakan oleh penyuluh, dilanjutkan dengan kegiatan mengiventarisasi kendala usaha tani yang dihadapi oleh petani dan kelompoktani.Kegiatan ini secara sederhanya merupakan kegiatan pencatatan yang dilakukan oleh penyuluh atas segala sesuatu kendala/masalah yang dihadapi petani dalam menjalankan usahataninya, dalam hal ini lebih kepada usahatani padi sawah, karena kegiatan persiapan yang dilihat dilapangan untuk menyusun RDK/RDKK pada usahatani padi sawah.Pada kegiatan ini peran penyuluh sebagai pimpinan pertemuan untuk menggali data dan informasi tentang kendala/masalaha usahatani yang dihadapi oleh petani.

Tahpan berikutnya yaitu persiapan penyediaan data untuk menyusun RDK/RDKK. Penyuluh menyampaikan kepada petani segala sesuatu hal yang dibutuhkan untuk menyusun RDK/RDKK terutama data-data yang dimiliki oleh kelompoktani. Pada tahapan ini, antara peserta yang berasal dari kelompok berbasis

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ikatan dengan kelompoktani yang tidak berbasis ikatan sama-sama mampu menyediakan data yang dibutuhkan.Artinya, tidak ditemukan perbedaan yang siknifikan pada tahapan ini antara kedua jenis kelompoktani ini. Kegiatan persiapan yang dilaksanakan untuk penyusunan RDK/RDKK pada kenyataanya lebih difokuskan pada penetapan waktu dan tempat pelaksanaan, mengevaluasi kegiatan kelompoktani yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya, mengevaluasi tingkat produktivitas yang dihasilkan oleh anggota kelompoktani.Kegiatan persiapan ini dilakukan dalam bentuk pertemuan antara pengurus kelompoktani yang didampingi oleh penyuluh pertanian lapangan.

Setelah seluruh kegiatan di atas dilaksanakan, maka pada hari yang berbeda dilanjutkan kegiatan berikutnya adalah menetapkan tujuan, masalah/kendala yang akan dihadapi untuk mencapai tujuan, penetapan rencana kerja penyuluhan pertanian. Pada saat keseluruhan data telah didapatkan oleh PPL melalui beberapa pertemuan degan petani, maka barulah disusun drfat dokumen perencanaan penyuluhan pertanian nagari yang nantinya dikomunikasikan kembali kepada petani untuk menjaring masukan untuk kesempurnaan dokumen perencanaan penyuluhan pertanian (programa penyuluhan pertanian).Setelah dokumen tersebut dirampungkan penyusunan oleh PPL, selanjutnya dilakukan proses legalitasnya dan diserahkan ke BP3K Kecamatan Lareh Sago Halaban. Keseluruhan kegiatan pada tahapan pelaksanaan dan finalisasi dapat dilustrasikan melalui Gambar 1 di bawah ini.

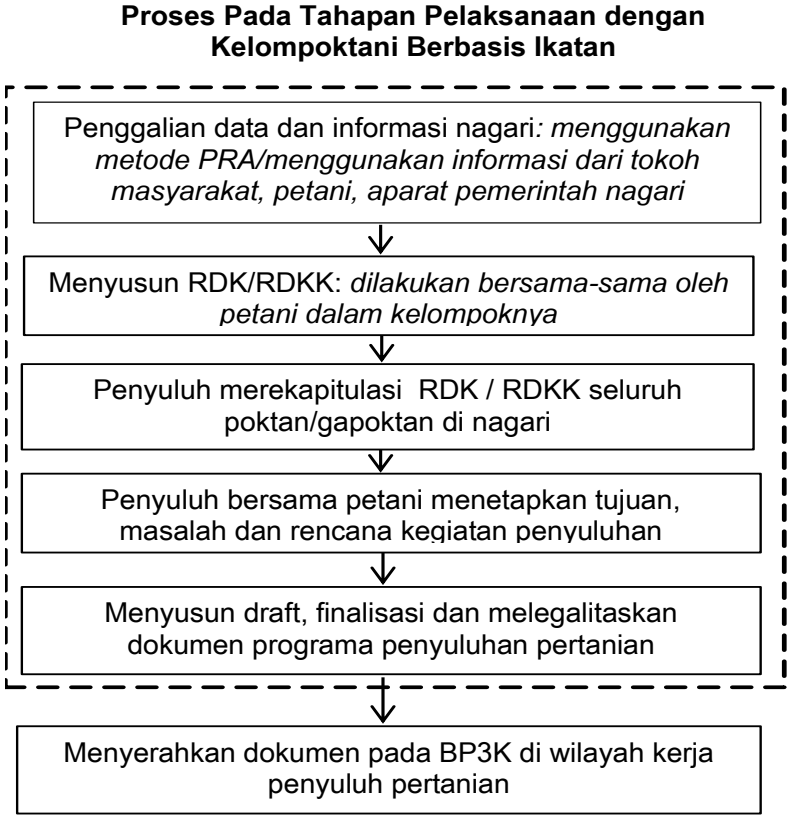

Gambar 1. Resume Proses pada Tahapan Pelaksanaan Perencanaan Penyuluhan Pertanian di Nagari dengan Kelompoktani Berbasis Ikatan di Nagari Balai Panjang

Setiap tahun, penyuluh pertanian nagari berkewajiban menyusun perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari sebagai pedoman mereka melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian.Dokumen perencanaan program penyuluhan nagari menjadi data dasar yang digunakan untuk menyusun perencanaan program ke tingkat selanjutnya, yaitu tingkat kecamatan. Dalam dokumen perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari, tertuang beberapa hal yang berkaitan dengan situasi, kondisi, permasalahan dan tujuan yang diinginkan oleh petani. Artinya, dokumen ini menjadi potret nyata dan dapat dijadikan acuan kegiatan sesuai kebutuhan petani, bukan sesuai kebutuhan pemerintah.Kondisi tersebut didapatkan dari metode partisipatif yang digunakan oleh penyuluh dalam menyusun dokumen perencanaan penyuluhan pertanian.

Tahap pertama yang dilaksanakan penyuluh dalam menyusun perencanaan penyuluhan pertanian nagari yaitu penggalian data dan informasi nagari. Pada prakteknya, masih ada penyuluh pertanian nagari yang tidak menggunakan pendekatan partisipatif terutama metode PRA untuk menggali data dan informasi nagari.Tindakan tersebut tentunya tidak sesuai dengan aturan yang berlaku di pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota, dimana perencanaan program penyuluhan pertanian nagari disusun dengan menggunakan acuan Permentan Nomor 25 Tahun 2009.Dalam kebijakan tersebut, jelas diperintahkan untuk seluruh penyuluh

pertanian di wilayah kerja Desa/Nagari menggunakan metode PRA sebagai alat menggali data dan informasi sumber daya nagari.

Temuan yang didapatkan dilokasi penelitian, kebanyakan penyuluh yang bisa menerapkan metode PRA untuk menggali data dan informasi nagari yang memiliki kelompoktani dalam golongan kelompok domisili, karena kelompok ini kebanyakkan anggotanya memiliki hubungan kekeluargaan, persahabatan, pertemanan yang beriplikasi pada aktifnya kelompok disetiap kegiatan penyuluhan pertanian. Metode PRA digunakan pada wal masa tugas PPL di wilayah kerjanya yaitu tahun 2012, sedangkan untuk tahun berikutnya untuk menggali data dan informasi nagari dilaksanakan dengan cara kroscek data dan menggunakan data sekunder yang telah ada.

Tahapan kedua adalah penyuluh memfasilitasi kelopok tani menyusun Rencana Defenitif Kelompok (RDK) dan Rencana Defenitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).Rencana definitif Kelompok (RDK) yaitu rencana yang diperoleh melalui kesepakatan/musyawarah seluruh anggota kelompok tani dalam kegiatan: pengelolaan usaha pertaniannya, penyiapan sarana produksi, produksi, pemasaran hasil, pengembalian modal serta pemupukan modal secara berkelompok. Pada prinsipnya, penyusunan RDK dan RDKK dilakukan secara bersamaan oleh kelompoktani yang didampingi oleh penyuluh pertanian setempat. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RDK/RDKK dilaksanakan dengan cara menyediakan blangko isian yang telah dibawa oleh penyuluh untuk diisi oleh kelompoktani atas dasar kesepakatan bersama.

Setelah seluruh kelompoktani yang ada di nagari menyusun RDK/RDKK-nya masing-masing, maka penyuluh meminta pengurus kelompoktani untuk mengumpulkan RDK/RDKK tersebut kepada penyuluh. Pada nagari yang memiliki kelompok ikatan sesama petani, pengumpulan RDK/RDKK dilakukan secara proaktif oleh pengurus kelompoktani. Sedangkan di nagari yang kelompoktaninya tidak banyak memiliki kelompok ikatan sesama petani, pengumpulan RDK/RDKK lebih didominasi oleh penyuluh itu sendiri dengan cara menjemputnyakepada kelompok masing-masing. Kondisi ini juga memperlihatkan bahwa, pekerjaan penyuluh di nagari yang banyakterdapat kelompok ikatan sesama petani lebih dimudahkan dengan proaktifnya pengurus kelompoktani setempat bila dibandingkan dengan nagari yang kebanyak kelompoktani tidak terbentuk atas dasar ikatan. Selanjutnya, RDK/RDKK yang telah dikumpulkan tersebut direkapitulasi oleh penyuluh pertanian lapangan yang bertugas di masing-masing nagari.RDK/RDKK tersebut diperiksa kelengkapan dan kebenarannya untuk disetujui dan ditandatangani oleh penyuluh pertanian, dan diketahui oleh Wali Nagari.Rekapitulasi RDKK dibuat rangkap 3 (tiga), lembar pertama untuk Balai Penyuluhan Kecamatan/BP3K, lembar kedua untuk penyuluh pertanian, dan lembar ketiga sebagai arsip gapoktan.Rekapitulasi RDKK disusun paling lambat satu bulan sebelum jadwal tanam.

Tahapan berikutnya yang dilaksanakan dalam proses perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari yang dilaksanakan oleh penyuluh bersama-sama petani dari kelompok ikatan sesama petani adalah melakukan penetapan tujuan, masalah/kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan dan rencana kegiatan penyuluhan pertanian nagari. Seluruh poin dari penetapan tersebut dirumuskan secara bersama-sama oleh petani dengan penyuluh pertanian. Pelaksanaannya dilakukan pada hari yang berbeda, sedangkan tempatnya masih sama dengan kegiatan sebelumnya dan peserta dalam kegiatan ini lebih didominasi oleh pengurus kelompktani ditambah perwakilan petani yang memang bersedia mau terlibat dalam kegiatan ini. Namun, kegiatan tersebut tidak dilaksanakan di nagari yang mengalami permasalahan menggerakkan petani dalam proses perencanaan penyuluhan pertanian. Dalam hal ini, pelaku penetapan tujuan, masalah/kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan dan rencana kegiatan penyuluhan pertanian nagari dilakukan sendiri oleh penyuluh pertanian, hasilnya baru dikomunikasikan pada pengurus kelompoktani. Artinya, pendekatan partisipatif masih dapat diterapkan pada petani yang berada pada kelomok ikatan sesame petani, tidak sama dengan kelompoktani yang hanya kesamaan hamparan lahan pertanian dijadikan pengikat anggotanya.

Setelah seluruh kegiatan dilaksanakan, maka penyuluh menyusun draft dokumen perencanaan penyuluhan pertaian berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan pada kegiatan sebelumnya. Pada saat draft selesai dibuat, penyuluh mengkomunikasikan kembali kepada pengurus kelompoktani untuk meminta masukannya terhadap poin program dan kegiatan yang termuat dalam draft tersebut, setelah didapatkan kesepakatan bersama barulah dilanjutkan ke tahapan finalisasi dokumen programa penyuluhan pertaian nagari yang disusun oleh penyuluh itu sendiri. Finalisasi dokumen perencanaan penyuluhan pertanian nagari, dilaksanakan oleh penyuluh bersama-sama dengan petani yang berasal dari kelompok tani, gapoktan, perangkat nagari, pemuka masyarakat.Penglibatan seluruh pihak terkait ini bertujuan agar dokumen perencanaan penyuluhan pertaian nagari, benar-benar sesuai dengan kondisi dan kebutuhan petani dan oleh pemerintah nagari untuk membantu kegiatan pembangunan nagari, khususnya pada sektor pertanian. Dokumen perencanaa penyuluhan pertanian tingkat nagari, awalnya dibuatkan drafnya sesuai format yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Pelimbatan seluruh pihak terkait dalam kegiatan finalisai dokumen, bukan berarti mereka semua yang terlibat membuat, namun pihak terkait tersebut lebih dimintakan saran dan masukka terkait dengan isi yang

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

terkandung dalam dokumen, khususnya yang terkait dengan penetapan masalah, tujuan, prioritas kegiatan, dan rencana kegiatan penyuluhan pertanian untuk tahun kedepannya.

Menurut seluruh penyuluh pertanian yang dijadikan informan dalam penelitian ini, permasalahan dalam hal finalisasi dokumen perencanaan penyuluhan pertanian nagari, bisa dikatakan tidaka dialami mereka.Seluruh kendala atau permasalahan yang dihadapi tidak menjadi halangan dalam kegiata ini.Dokumen perencanaan penyuluhan pertanian tingkat nagari yang telah selesai disusun, ditandatangi oleh penyuluh pertanian nagari setempat dan Kepala BP3K Kecamatan.

Dokumen perencanaan penyuluhan pertanian nagari, selanjutnya dipresentasikan pada pertemuan yang diselenggarakan oleh pemerintah nagari seperti kegiatan Musrembang Nagari.Tujuan disampaikannya isi dari dokumen tersebut kepada pihak pemerintah nagari adalah memberi masukan pada pemerintah nagari segala sesuatu yang berhubugan dengan kegiatan penyuluhan pertanian di nagari tersebut.Seluruh program dan kegiatan yang termuat dalam perencanaan program penyuluhan pertanian nagari yang memang berkaitan dengan kegiatan pemerintah nagari, dimasukkan dalam dokumen perencanaan pembangunan nagari.

Hasil akhir dari seluruh kegiatan pada proses perencanaan penyuluhan pertanian yang dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif adalah programa penyuluhan pertanian. Isi dalam dokumen tersebut diantaranya adalah potensi yang ada dinagari, komoditi ungulan pertanian di nagari dan tingkat produktivitasnya, keberadaan kelembagaan petani dan pelaku usahatani, masalah pertanian yang dihadapi petani, dan program/kegiatan penyuluhan pertanian yang ditetapkan berdasarkan keputusan bersama oleh PPL dengan petani. Data dan informasi yang terdapat dalam Programa tersebut digunakan oleh PPL sebagai alat untuk dapat berkontribusi pada kegiatan MusrenbangNag dalam menyusun RKP Nagari.

Tahapan MusrenbangNag Dalam Menyusun RKP Yang Melibatkan Penyuluh Pertanian di Nagari Balai Panjang

Pendekatan partisipatif yang lebih dikenal dengan nama Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) juga diaplikasi dalam kegiatan menyusun Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Nagari setiap tahunnya oleh pemerintah nagari bekerjasama dengan masyarakat serta pemagku kepentingan di Nagari termasuk disini penyuluh pertanian. Terdapat beberapa poin besar yang dituangkan dalam RKP Nagari, diataranya adalah memuat rancangan kerangka ekonomi desa/nagari, program prioritas pembangunan desa/nagari, rencana kerja dan pendanaan serta prakiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa/nagari maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Oleh karena dilibatkannya pihak-pihak lain dalam kegiatan penyusunan RKP nagari/desa, mengidikasikan bahwa dalam menghasilkan dokumen RKP nagari/desa tidak saja hanya pemerintah nagari yang memainkan peran tunggal, namun ada pihak lain yang berperanseperti PPL yang bertugas di daerah tersebut. Pembuktiannya dapat dilihat pada tahapan yang dilalui dalam kegiatan Musrenbang Nagari (lihat Gambar 2), terutama tahapan yang melibatkan penyuluh pertanian di Nagari Balai Panjang.

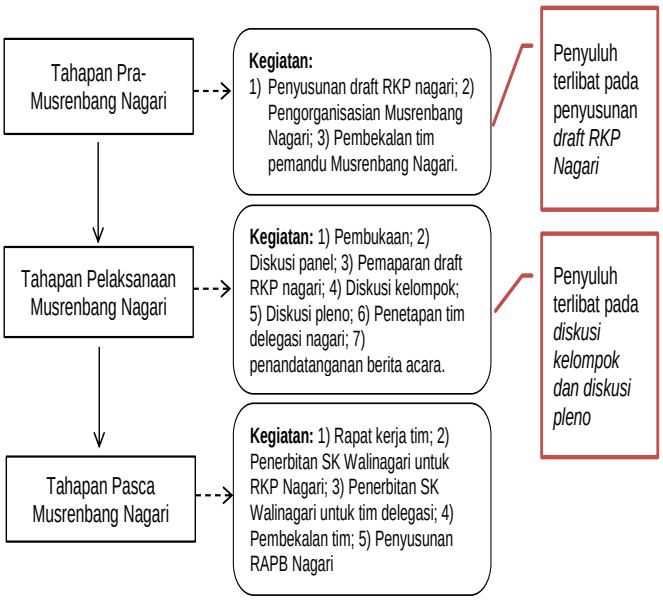

Gambar 2. Tahapan Pelaksanaan Musrenbang Nagari Balai Panjang dalam Menyusun RKP Nagari Yang Melibatkan Penyuluh Pertanian

Berdasarkan Gambar 2 di atas, terlihat bahwa penyuluh pertanian terlibat pada dua tahapan kegiatan yaitu Tahap Pra-Musrenbang Nagari pada kegiatan penyusunan draft RKP Nagari dan Tahap Pelaksanaan Musrenbang Nagari yaitu pada kegiatan diskusi kelompok dan diskusi pleno.Sedangkan pada tahap Pasca Musrenbang Nagari yang bersifat penglegalitasan hasil perencanaan lebih didominasi oleh pemerintah nagari.

Pada tahapan-tahapan tersebut, membuka ruang komunikasi dan diskusi antara PPL dengan peserta lainnya terutama dengan pihak pemerintah nagari untuk menyampaikan gagasan, saran dan keputusan perencanaan yang berkaitan langsung dengan pembangunan pertanian di nagari sebagai salah satu sektor utama dalam perekonomian masyarakat nagari.Dalam pelaksanaanya, PPL yang terlibat menggunakan dokumen programa penyuluhan pertanian sebagai sumber data dan inforasi pertanian nagari yang disampaikannya pada kegiatan MusrenbangNag, seperti data tentang kondisi pertanian yang ada di nagari, komoditi unggulan pertanian beserta produktivitasnya, dan permasalahan pertanian yang dihadapi oleh petani serta program dan kegiatan penyuluhan pertanian yang telah ditetapkan oleh PPL dengan petani untuk dilaksanakan pada tahun berikutnya setelah dokumen programa penyuluhan pertanian dilegalitaskan.

Pada tahapan lainnya, PPL juga menyampaikan kepada pemerintah nagari bahwa program dan kegiatan pembangunan nagari yang berkaitan dengan sektor pertanian ditetapkan dengan mempertimbangkan keputusan perencanaan yang tertuang dalam dokumen programa penyuluhan pertanian dan dokumen milik institusi pertanian pemerintah.Masukan tersebut disampaikan supaya program dan kegiatan pembangunan nagari pada sektor pertanian tidak terjadi tumpang tindih dengan program dan kegiatan yang dilakasanakan PPL dan intitusi pertanian milik pemerintah daerah.

Keseluruhan masukan dan saran yang diberikan oleh PPL setempat tidak terlepas dari keberadaan dokumen perencanaan penyuluhan pertanian, karena seluruh data dan informasi yang disampaikan PPL diambil dari dalam dokumen tersebut.Oleh karena itulah, dari keterlibatan PPL dalam kegiatan MusrenbangNag di Nagari Balai Panjang dapat terlihat bahwa perencanaan penyuluhan pertanian memiliki kaitan dengan RKP nagari sebagai pedoman pelaksanaan pembangunan nagari.

Peran Perencanaan Penyuluhan Pertanian Terhadap Pembangunan Nagari Balai Panjang

Melihat adanya keterlibatan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) pada beberapa tahapan Musrenbang Nagari untuk menyusun RKP di Nagari Balai Panjang, membantu memperkuat pembuktian dugaan bahwa adanya peran perencanaan penyuluhan pertanian dalam pembangunan pedesaan/nagari. Karena, penyuluh pertanian dalam beberapa kegiatan MusrenbangNag untuk menyusun RKP nagari, membawa dokumen perencanaan penyuluhan pertanian (Programa Penyuluhan Pertanian) sebagai pedoman untuk dapat memberikan data dan informasi terkait pertanian di nagari, serta memberikan saran dan masukan terkait dengan sinergitas program/kegiatan pembangunan nagari disektor pertanian dengan yang telah ditetapkan oleh PPL dan instansi pertanian di nagari tersebut.

Melalui Tabel 3dapat menjelaskan dengan ringkas mengenai peran perencanaana penyuluhan pertanian dalam pembangunan Nagari Balai Panjang melalui kegiatan Musrenbang Nagari untuk menyusun RKP Nagari.

Tabel 3. Resume Peran Perencanaan Penyuluhan Pertanian Terhadap Pembangunan Nagari Balai Panjang Melalui Kegiatan Musrenbang untuk Menyusun RKP Nagari

No	Tahapan Musrenbang	Kegiatan	Deskripsi Peran
1	Pra-Musrenbang nagari	Penyusunan draft RKP Nagari	Menyumbang data dan informasi mengenai kondisi pertanian di nagari
2	Pelaksanaan Musrenbang Nagari	Diskusi kelompok	Informasi program dan kegiatan prioritas yang telah ditetapkan dalam perencanaan penyuluhan pertanian, supaya tidak terjadi tumpang tindih usulan prioritas kegiatan pembangunan disektor pertanian.
		Diskusi pleno	Informasi program dan kegiatan prioritas penyuluhan pertanian nagari.

Sumber: Resume hasil wawancara dengan informan, 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Melihat bahwa penyuluh pertanian berperan dalam bentuk menyumbangkan data dan informasi pertanian nagari melalui isi yang terdapat pada dokumen perencanaan penyuluhan pertanian nagari, serta memberikan masukan tentang program dan kegiatan pembnagunan pertanian di nagari yang menjadi sektor utama dalam kehidupan perekonomian masyarakat Nagari Balai Panjang, dapat menjadi alasan bahwa perencanaan penyuluhan pertanian memiliki peran dalam pembangunan pedesaan di Nagari Balai Panjang. Karena, pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah nagari mengacu kepada dokumen RKP Nagari yang disusun berdasarkan hasil kesepakatan bersama.

Sebagai contohnya dapat dilihat pada tahapan pra-MusrenbangNag, kegiatan ini bertujuan untuk menyusun draft dokumen RKP Nagari.Dalam hal ini, PPL terlibat dalam menyumbangkan data dan informasi terkait dengan kondisi pertanian yang ada di nagari.Data dan informasi yang digunakan berasal dari dokumen programa penyuluhan pertanian nagari yang telah disusun bersama-sama petani.Selanjutnya pada tahapan pelaksanaan MusrenbangNagari, PPL juga berkontribusi dalam memberi masukan dan saran untuk keputusan menetapkan program serta kegiatan tentang pembangunan pertanian yang dibutuhkan oleh petani di nagari.Saran dan masukkan tersebut juga didapatkan PPL dari dokumen programa penyuluhan pertanian nagari.

Kondisi keterlibatan PPL dengan programa penyuluhan pertanian pada beberapa tahapan MusrenbangNag untuk menyusun RKP Nagari, mengindikasikan secara tidak langsung perencanaan penyuluhan pertanian berperan dalam pembangunan nagari khsusnya untuk sektor pertanian. Bentuk peranan yang diberikan berupa data, informasi, serta masukan tentang program dan kegiatan pembangunan nagari disektor pertanian yang sesuai dengan kebutuhan pertanian di daerah tersebut.

Akan tetapi, tidak selalu PPL dilibatkan pada kegiatan penyusunan RKP Nagari.PPL dilibatkan jika pemerintah nagari memang membuka ruang kegiatan pembangunan nagari disektor pertanian seperti pembangunan atau perbaikan jaringan sumber air yang digunakan oleh masyarakat dan digunakan untuk kebutuhan pengairan persawahan di nagari.Kebanyakan pembangunan nagari yang dilaksanakan adalah bersifat pembangunan fisik untuk memperbaiki atau menambah saran dan prasarana nagari yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak.Oleh karena itu, peran perencanaan penyuluhan pertanian pada pembangunan pertanian hanya dapat dikatakan ada, jika PPL dilibatkan pada kegiatan MusrenbangNag dan menjadikan dokumen programa penyuluhan pertanian sebagai alatnya untuk dapat berkotribusi dalam pengambilan keputusan perencanaan pembangunan nagari khsusnya pada sektor pertanian.

KESIMPULAN DAN SARAN

Melalui keterlibatan penyuluh pertanian lapangan (PPL) di nagari yang dilibatkan pada beberapa tahapan dan kegiatan MusrenbangNag, dapat dinyatakan bahwa perencanaan penyuluhan pertanian nagari memiliki peran dalam pembangunan nagari khsusnya pada sektor pertanian.Pernyataan ini didasari oleh adanya dokumen perencanaan penyuluhan pertanian yang digunakan PPL untuk berkontribusi pada kegiatan MusrebangNag dalam rangka menyusun RKP nagari.Namun, peranaan tersebut tidak selalu dapat diberikannya, karena tidak selalu PPL dilibatkan dalam kegiatan MusrenbangNag. PPL hanya dilibatkan jika pemerintah nagari memang berkeinginan melakukan pembangunan disektor pertanian yang dilaksanakan melalui dana yang dimiliki oleh pemerintah nagari. Oleh karena itu, disarankan kepada pemerintah nagari, tidak hanya memfokuskan kegiatan pembangunan nagari pada perbaikan dan penambahan saran prasarana fisik saja, karena sektor pertain merupakan tulang punggung perekonomian masyarakat nagari. Sehingga kegiatan MusrenbangNag untuk menyusun RKP nagari dapat selalu mengakomodir kebutuhan pertanian di nagari dan peran perencanaan penyuluhan pertanian dapat selalu terlihat melalui keterlibatan PPL dalam prosesnya.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Uphoff, N.T., John M. Cohen, and A.M. Goldsmith. 1979. Rural Development Committee: Feasibility and Aplication of Rural Development Participation: A State of The Art Paper. Cornell University. Ithaca. New York,

[2] Aris, S *at al*. 2015. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Manggopoh di Kecamatan Lubuk Basung Kabupaten Agam., Jurnal Ilmu Sosial dan Politik (JISIP), 2015, Vol.4, No.2, hal 239-408.

[3] Noer,M. 2008. Peran Kelembagaan Lokal Dalam Perencanaan Wilayah Desentralistis Kasus Studi: Perencanaan Berbasis Nagari di Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat. DISERTASI Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota IPB. Bandung.,

[4] Permentan Nomor 25. 2009. Tentang Pedoman Penyusunan Programa Penyuluhan Pertanian

[5] Reza, M at al. 2016. Kelompok Ikatan Sesama Petani Dalam Proses Perencanaan Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota Studi Kasus Nagari Balai Panjang dan Tanjuang Gadang.

Dipresentasikan Pada Seminar Nasional Fakultas Pertanian Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dengan Tema " Membangun Ketahanan Pangan Nasional Berbasis Sumber Daya Lokal". Serang Banten 2 November 2016.

[6] Ife, Jim dan Frank Tesoriero. 2008. Community Development : Alternatif Pengembangan Masyarakat di era Globalisasi, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

[7] Yustika, E.A. 2006. Ekonomi Kelembagaan Defenisi, Teori dan Strategi. Bayumedia Publishing. Malang.

[8] Masik, A. 2005. Hubungan Modal Sosial dan Perencanaan. Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol.16/No. 3, Desember 2005, hlm. 1-23

[9] Narayan dan Prirchett. 1999. *Cent and Sociability: Household Income and Social Capital in Rural Tanzania*. Jurnal Economic Development and Cultural Change.

[10] Woolcock, M. 2000. *Why should we care about social capital ?.* Canbera Bulletin of Public Adminitrations, No 98, pp 17-19.

[11] Putnam, R.D. 1993. The Prosperous Community: Social Capital and Public Life. American Prospect, 13, Spring, 35- 42. In Elinor Ostrom and T.K. Ahn. 2003. Foundation of Social Capital. Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited.

[12] Reza, M. 2016. Proses Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian Tingkat Nagari di Kabupaten Lima Puluh Kota. Jurnal Menara Ilmu, Vol.X Jilid 1 No.63 Januari 2016.

[13] Amanah, S. 2003.Perencanaan Program Penyuluhan Perikanan Di Desa Anturan, Buleleng, Bali. Buletin Ekonomi Perikanan Vol.V. No.1 Tahun 2003.

[14] Hardianto Y & Pradiana W. 2014. Pengaruh Partisipasi Anggota Kelompok Tani Dan Peran Penyuluh Pertanian Dalam Penyusunan RDK dan RDKK. Sekolah Tinggi Penyuluh Pertanian Bogor.

[15] Herawati dan Pulungan I. 2006.Faktor-faktor yang berhubungan dengan partisipasi kontak tani Dalam Perencanaan Program Penyuluhan Pertanian (Kasus WKUPP Nyalindung, Kabupaten Sukabumi). Jurnal Penyuluhan, Vol.2, No.2, IPB September 2006.

[16] Sumardjo. 2012. Peran Perguruan Tinggi Dalam Pengembangan Keilmuan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Pembangunan. Makalah Lokakarya Nasional Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesian "Menggagas Arah Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Masa Depan. Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Universitas Padjadjaran. Jatinangor, 25-26 Januari 2012, hal 3 - 28.

[17] Harsoyo dan Subejo. 2012. Keterkaitan Isu Pembangunan Pertanian Dan Pedesaan Kontemporer Dengan Pendidikan Sosiologi Dan Penyuluhan. Makalah Lokakarya Nasional Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesian "Menggagas Arah Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Masa Depan. Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Universitas Padjadjaran. Jatinangor, 25-26 Januari 2012, hal 145 - 154.

[18] Sufyadi, D. 2012. Sosiologi Dan Penyuluhan Untuk Pembangunan Pertanian. Makalah Lokakarya Nasional Pertemuan Nasional Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Indonesian "Menggagas Arah Pendidikan Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Masa Depan. Laboratorium Sosiologi dan Penyuluhan Pertanian Universitas Padjadjaran. Jatinangor, 25-26 Januari 2012, 114 - 118.

[19] Mosher. A.T. 1966. Getting Agriculture Moving. New York: A Praegr, Inc. Publisher.,

[20] Yin, R.K. 2013. Studi Kasus, Desain dan Metode Cetakan ke-12, Penerjemah Mudzakir. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

[21] Moleong, J.l. 2008. Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi. PT. Remaja Rosada Karya., Bandung.,

[22] Patton, M.Q. 1990. *Qualitative Evaluation and Research Methods* (2nded). Newbury Park, CA: Sage Publication,Inc.,

[23] Friedman, John. 1987. Planing in the public Domain: From Knowledge to action. Princeton: Princeton Univ. Press.

[24] Mardikanto, T. 2009. Sistem Penyuluhan Pertanian. Sebelas Maret University Press. Surakarta.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PRIORITAS PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR PEDESAAN (STUDI KASUS : DESA SEMUKUT – KAB. KEP. MERANTI)

Muhammad Sofwan[1)]

[1)]Prodi Teknik Perencaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Riau

Email :msofwan.transp12@gmail.com

Naskah diterima : 13 Maret 2017 Naskah direvisi 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 22 Maret 2017

ABSTRAK

Dalam penelitian ini, pembangunan infrastruktur menjadi perhatian utama dalam perencanaan kebijakan pembangunan infrastuktur pedesaan. Dalam proses pembangunan infrastruktur pedesaan permasalahan yang lazim terjadi disebabkan sulitnya menentukan komponen kebijakan yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastuktur pedesaan yang disebabkan terbatasnya dana alokasi anggaran infrastruktur oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah terumusnya prioritas program pembangunan infrastruktur yang barbasis partisipasi masyarakat. Variabel dalam penelitian ini berupa data Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dan kondisi bangunan Rumah (Rumah Swadaya dan Rumah Tidak Layak Huni), sehingga dapat dijadikan data awal dalam penyusunan prioritas program pembangunan Desa Semukut. Sedangkan berdasarkan proses yang dilakukan dalam penyusunan prioritas pembangunan infrastruktur dilakukan dengan menginventarisir kondisi bangunan rumah dan PSU yang ada, kemudian menentukan skoring penilaian kualitas dan tingkat pelayanan dari masing-masing komponen infrastruktur. Hasil skoring yang dihasilkan memperlihatkan tingkatan kepentingan dari komponen infrastruktur yang ada.Dengan demikian, hasil dari skoring tersebut menjadi dasar dalam penentuan komponen infrastruktur yang prioritas berdasarkan tingkatan kepentingannya.Dari hasil yang diperoleh beberapa komponen infrastruktur menjadi prioritas dibagi dalam tiga kategori prioritas, dan masing-masing kategori tersebut menunjukkan tingkat kepentingan program / komponen yang harus dilaksanakan terlebih dahulu dalam pembangunan infrastruktur pedesaan di Desa Semukut.

Kata kunci: *Infrastruktur, Pedesaan, PSU*

PENDAHULUAN

Pada dewasa ini masyarakat pedesaan menuntut peranan aktif pemerintah desa dalam pelaksanaan pembangunan dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan desa berdasarkan konsep pembangunan berbasis partisipasi masyarakat. Konsep pembangunan ini menyusun beberapa program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya program peningkatan infrastruktur pedesaan. Proses pembangunan infrastruktur perdesaan ini mencakup beberapa komponen penting seperti perumahan, jalan lingkungan, drainase, air bersih, air limbah, persampahan dan kelistrikan. Kelemahan beberapa program yang berjalan saat ini masih banyaknya program yang berjalan yang tidak tepat sasaran dikarenakan kebijakan yang diambil tidak melibatkan masyarakat sebagi objek pembangunan, sehingga program yang dijalankan bersifat mumbazir karena tidak berdampak langsung bagi kesejehteraan masyarakat.

Kondisi diatas lazim terjadi di berbagai kondisi kebijakan tidak hanya di tingkat local bahkan skala regional, oleh karena itu, beberapa infrastruktur yang ada tidak dapat difungsikan secara efektif. Kondisi ini juga terjadi di Desa Semukut yang berada di Kecamatan Pulau Merbau (Kab. Kepulauan Meranti), beberapa program yang dilaksanakan tidak berdampak langsung terhadap kebutuhan utama warga masyarakat Desa Semukut. Beberapa program yang dianggap tidak tepat sasaran seperti bantuan air bersih (Pamsimas) yang berfungsi sebagai pelayanan kebutuhan air bersih, kelemahan program ini yaitu lokasi tempat dibangunnya instalasi air bersih ini berada pada tempat pemukiman sangat membutuhkan karena ada kawasan pemukiman yang lebih membutuhkan dari lokasi yang dibangun saat ini. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu menyusun program pembangunan infrastruktur secara efektif dan efesien agar dapak dari program tersebut langsung dirasakan oleh

masyarakat.

Berdasarkan permasalahan yang dipaparkan diatas, dapat disimpulkan permasalahan yang ada berupa masih lemahnya koordinasi pemerintah dalam membuat program kebijakan yang mengakibatkan beberapa program perjalan secara tidak efektif, khususnya bidang infrasruktur yang memerlukan dana yang cukup besar. Oleh kerena itu, dapat dirumuskan tujuan dari penilitian ini yaitu terumusnya prioritas program pembangunan infrastruktur yang barbasis partisipasi masyarakat, sehingga dengan program yang disusun dapat dilaksanakan secara efektif dan efesien serta dapat berdampak secara langsung dengan meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat di Desa Semukut.

METODE PENELITIAN

Metode Pengumpulan Data

Berdasarkan ruang lingkup wilayah penelitian ini dilaksanakan di Desa Semukut (Kec. Pulau Merbau – Kab. Kepulaun Meranti) yang mencakup 3 dusun, yaitu Dusun 1, Dusun 2 dan Dusun 3.Dengan luas Desa sebesar 4.500 Ha dan sebahagian guna lahannya masih berfungsi sebagai perkebunan rakyat. Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sekunder. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, dan sumber sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya kalau dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan interview, kuesioner (angket), observasi [1].

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data berupa data skunder yang diperoleh dari instasnsi pemerintahan seperti monografi dan profil desa dari Kantor Desa Semukut, data statistic dari BPS Kab. Kep. Meranti, serta data dan informasi dari instansi lain yang terkait dengan topik penelitian. Penelitian ini juga menggunakan data perimer yang diperoleh dengan interview, kuesioner dan observasi lapangan guna mengetahui kondisi dan pelayanan infrastuktur perdesaan yang ada di Desa Semukut. Dalam penelitian ini data/variabel infrastruktur yang akan diamati berupa 1) kondisi perumahan (perumahan tidak layak huni dan perumahan swadaya), 2) kondisi jalan lingkungan, 3) kondisi air bersih, 4) kondisi drainase, 5) kondisi persampahan dan 6) kondisi kelistrikan. Dimana data ini diperoleh dari proses wawancara, kuesioner dan observasi sehingga dapat dengan langsung menggambarkan kondisi infrastruktur dilapangan secara eksisting.

Metode Analisis

Metode penelitian merupakan cara ilmiah yang digunakan untuk mendapatkan data dengan tujuan tertentu.Cara ilmiah berarti kegiatan itu dilandasi oleh metode keilmuan [1]. Metode keilmuan ini merupakan gabungan antara pendekatan rasional dan empiris [2]. Pendekatan rasional memberikan kerangka berpikir yang koheren dan logis, sedangkan pendekatan empiris memberikan kerangka pengujian dalam memastikan suatu kebenaran. Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif, dimana proses analisis data kualitatif dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu wawancara, pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar foto dan sebagainya. Setelah ditelaah, langkah selanjutnya adalah reduksi data, penyusunan satuan, kategorisasi dan yang terakhir adalah penafsiran data.

Analisis data dalam pendekatan kualitatif terdiri atas tiga proses kegiatan, yaitu : reduksi data, tampilan (display) data, dan penulisan kesimpulan. Analisis kualitatif dalam penelitian tentang mengindentifikasi data dan informasi kondisi infrastruktur (PSU) yang bertujuan penyusunan prioritas pembangunan yang dilakukan dengan cara berikut ini.

Reduksi data dilakukan dengan cara membaca transkrip wawancara, jawaban kuesioner, dan dokumen-dokumen yang akan dianalisis lalu membuat catatan atas data tersebut. Selain catatan, data juga bisa dibuat menjadi ringkasan data (summary), dan menyajikan/tampilan data dengan bentuk teks naratif, tabel, dan skoring. Kemudian data-data hasil survey dianalisis dan didiskusikan. Hasil dari data yang diperoleh dilakukan pengolahan dan pengelimpokan data dalam bentuk table, skoring nilai dan naratif kondisi variable pengamatan.

Hasil dari analisis dan diskusi adalah memberikan gambaran dalam bentuk table skoring dan teks naratif tentang prioritas pembangunan infrastrutur pedesaan yang ada di Desa Semukut berdasarkan penilaian skoring.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Desa Semukut

Semukut adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Pulau Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti dimana penduduk potensialnya (umur 17 tahun keatas) 2000 jiwa lebih pada tahun 2010. Secara geografis Desa Semukut berada di Kecamatan Pulau Merbau – Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan luas wilayah sebesar 4.500 Ha.Kondisi topografi Desa Semukut berupa dataran rendah dengan kondisi jenis tanah sebagian besar berupa gambut. Secara administratif Desa Semukut berbatas wilayah dengan Desa Canai (Utara), Selat Rengit (Selatan), Desa Padang Kamal (Barat) dan Selat Air Hitam (Timur), untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

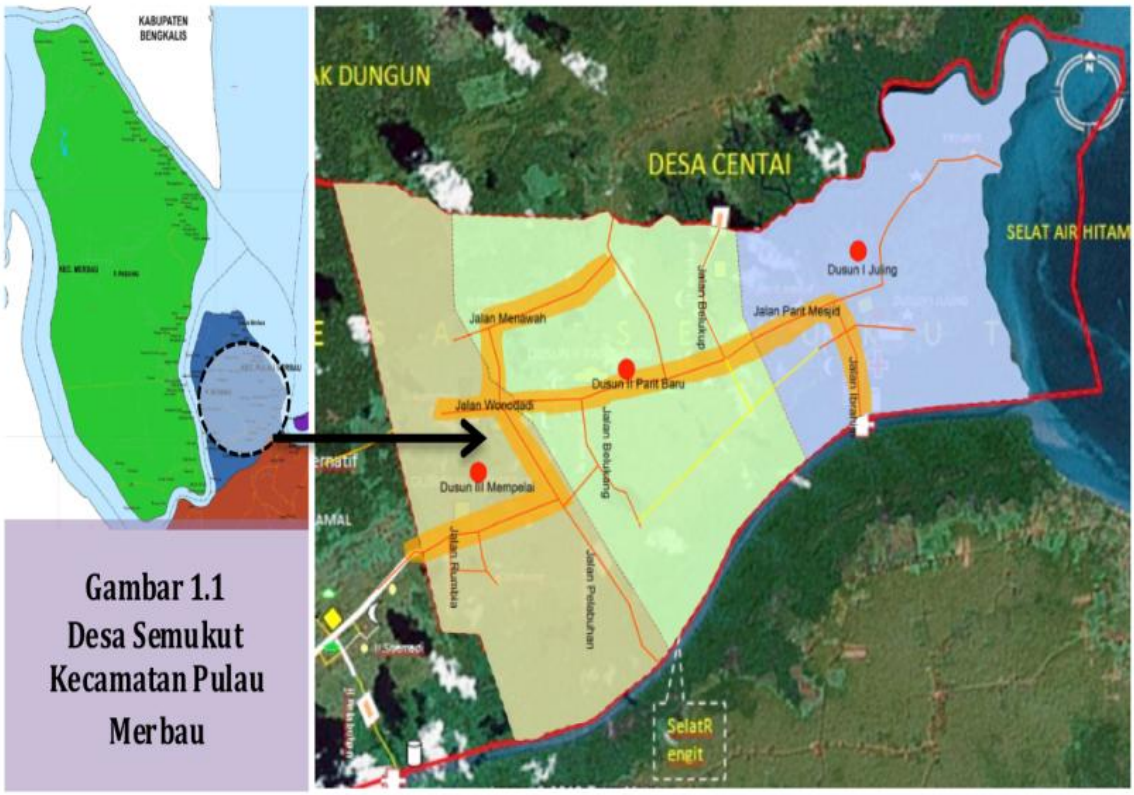

Gambar 1.1
Desa Semukut
Kecamatan Pulau
Merbau

Karakteristik Prasarana Sarana Utilitas (PSU) dan Perumahan di Desa Semukut

Jalan Lingkungan

Jalan lingkungan di Desa Semukut sebagian besar sudah dalam kondisi yang baik, selama kurun waktu 5 tahun terakhir sudah cukup banyak perbaikan jalan lingkungan yang dilakukan oleh pemerintah. Hanya saja ada beberapa ruas jalan yang masih dalam kondisi yang jelek terutama di ruasjalan yang ada di Dusun III. Kondisi jalan lingkungan yang ada di Desa Semukut memiliki rata-rata lebar jalan 2,5 3 meter. Kondisi perkerasan jalan lingkungan nya sudah cukup baik dengan perkerasan semenisasi, ada juga kondisi ruas jalan yang telah diseminisasi dalam kondisi hancur dan berlubang dimana ruas jalan terebut telah di buat sekita 10 tahun yang lalu dan merupakan akses utama ke beberapa desa yang berada di sebelah utara Desa Semukut

ISBN : 978-602-73463-1-4

Air Bersih

Kondisi air bersih juga merupakan masalah utama yang ada di Desa Semukut ini dimana kondisi air bersih terutama yang merupakan sumur galian kondisinya sangat tidak layak di komsumsi dapat dilihat dari warna dan bau yang di timbulkan. Sebagian besar warga Desa Semukut mengandalkan air hujan sebangai air kosumsi warga, selain itu juga ada bantuan dari pemerintah berupa sumur-sumur bor yang dapat di pergunakan warga Desa Semukut untuk kebutuhan sehari-hari yang berupa bantuan pemerintah pusat. Sebagian masyarakat sangat berharap adanya bantuan instalasi pengolahan air minum yang disediakan oleh pemerintah yang diharapkan bisa memenuhi kebutuhan air kosumsi atau air layak minum warga, karena kondisi air dari sumber air sumur galian dan sumur bor tidak dapat di kosumsi langsung oleh warga masyarakat Desa Semukut

Air Limbah

Kondisi sistem pengolahan air limbah yang ada di Desa Semukut masih berisifat konvensional dengan menggali lubang pembuangan guna dimanfaatkan untuk fungsi buang limbah padat.Sedangkan untuk sistem pengbuangan limbah cair seperti limbah cair rumah tangga dan limbah cair mandi dan mencuci sistem pembuangannya dibuat berupa saluaran yang dihubungkan langsung kesaluran sistem drainase yang ada.Akan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

tetapi sebagain rumah warga juga sudah ada yang memiliki sistem pembuangan limbah yang sudah sangat baik yaitu dengan instalasi septitank, terutama berada pada rumah-rumah yang kondisinya sudah sangat layak. Sedangkan kan untuk rumah yang tidak layak huni sistem pembuangannya masih sangat tradisional seperti kondisi yang ada di gambar.

Drainase

Jaringan sistem drainase di Desa Semukut sudah mengalami perubahan dalam beberapa tahun belakangan, perbaikan tersebut seiring dengan adanya perbaikan jalan yang ada di Desa Semukut.Hampir seluruh jalan yang ada di Desa Semukut sudah ada jaringan sisitem drainase guna menampung air limpasan hujan dari setiap ruas jalan sebagaimana fungsi utama sistem drainase yang ada.Kondisi fisik sistem drainase di Desa Semukut masih berupa jaringan yang masih berupa galian tanah atau parit yang memilki lebar rata-rata 1 – 1,5 meter.Jaringan sistem drainase di Desa Semukut ini sudah cukup tertata dengan baik dimana jpembuangan air pada jarinagn sistem drainese yang ada sudah diarahkan ke badan air penerima yang berjarak tidak terlalu jauh dari Desa Semukut.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Persampahan

Kondisi pengelolaan sampah di Desa Semukut masih sama kondisi dengan pengelolaan sampah yang ada di desa lainnya. Dimana sistem pengelolaan sampah bersifat masih konvensional dengan menggali lubang sampah lalu membakar sampah tersebut.Hal ini berkaitan dengan prokduksi sampah yang masih tergolong sedikit di Desa Semukut dan masih bisa di dikelola dengan cara pembakaran.

Listrik

Jaringan listrik di Desa Semukut telah terpansang secara menyeluruh di semua dusun yang ada.kondisi infrastuktur jaringannya juga sudah terpasang dengan baik dengan sudah tiang besi sebagi penyangga kabel aliran listrik. Akan tetapi masih ada beberapa rumah juga yang belum terinstalasi aliran listrik dan penyebabnya hanya karena kondisi ekonomi masyarakat saja sebagai penyababnya.

Rumah Layak Huni

Kondisi rumah layak huni dapat dilihat digambar merupakan rumah semi permanen dengan kondisi rumah utama berupa rumah panggung dangan dinding dan lantai berupa papan/kayu sedangkan dapur sudah memiliki bahan baku terbuat dari semen/beton. Selain rumah yang berbentuk panggung ada juga rumah permanen yang berupa terbuat dari semen/beton dan sebagian besar dari pemilik rumah permanen tersebut

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

merupakan pegawai negeri sipil dan tentunya mereka memilki penghasilan lebih.Sebagian besar rumah yang sudah layak huni berada disekitar jalan poros/utama Desa Semukut yaitu berada di Dusun I dan Dusun II, sebagian besar penghini dari rumah yang layak tersebut merupakan petani. Di Desa Semukut ini sudah pernah menerima bantuan perumahan yaitu pada tahun 2003 sebanyak 5 unit dan pada tahun 2004 sebanyak 2 unit.

Rumah Tidak Layak Huni

Rumah tidak layak huni tersebar ada di semua dusun akan tetapi jumlah nya yang cukup banyak berada di Dusun III dengan hampir 40% dari total rumah yang ada di Dusun III. Sebagian besar berada di kawasan pemukiman suku anak dalam.Kondisi pemukiman suku anak dalam ini berada sangat dekat dengan Selat Rengit dan posisi rumah yang ada berkelompok membentuk satu lingkungan perumahan. Sedangkan posisi rumah tidak layak huni yang berada di 2 dusun lainnya posisinya menyebar tidak membentuk satu lingkungan pemukiman tidak layak huni akan tetapi hanya unit per unit perumahan.

Rekapitulasi Hasil Invetarisir PSU dan Perumahan di Desa Semukut

Rekapitulasi kondisi prasarana sarana utilitas yang dilakukan dengan proses observasi lapangan dan wawancara/kuisioner diperoleh data dan informasi kondisi infrastruktur pedesaan yang ada di Desa Semukut.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Dapat digambarkan kondisi perumahan yang ada masih sebagian besar bisa dikategorikan cukup layak, hanya sekitar 134 unit rumah yang dikategorikan sudah tidak layak huni. Hal ini menunjukkan sebesar 40 % dari jumlah unit rumah yang ada di Desa Semukut masih dalam kondisi buruk, dan sebagian besar berada di Dusun 3 dengan hampir sebagian besar rumah yang berada di dusun ini berkondisikan rumah panggung yang terbuat dari papan. Untuk lebih jelasnya hasil rekapitulasi dari inventarisasi kondisi PSU dan perumahan dapat di lihat pada table dibawah ini.

Kondisi PSU di Desa Semukut sudah cukup baik terutama kondisi kelistrikan, hampir seluruh rumah yang ada sudah teraliri oleh prasarana listrik hanya saja kondisi daya yang dipasok oleh PLN yang masih kurang dan hal ini berakibat adanya pemadaman pada jam-jam tertentu. Kondisi PSU yang menjadi kebutuhan dasar masyarakat Desa Semukut adalah kondisi air bersih yang sangat sulit didapat hal ini dikarenakan kondisi air tanah yang ada di desa ini merupakan air gambut yang tidak bisa digunakan langsung untuk kebutuhan sehari-hari. Air bersih yang digunakan warga Desa Semukut hanya mengandalkan air hujan sebagai air yang di peruntukkan kosumsi.

Tabel 1. Rekapitulasi Kondisi PSU dan Perumahan Desa Semukut

No	Nama PSU	Lokasi	Volume	Kualitas Teknis			Cakupan Pelayanan		
				Baik	Sedang	Buruk	Tinggi	Sedang	Rendah
Rumah Layak Huni									
1	Rumah Tidak Layak Huni	Dusun I,II,III	134 Unit			✓		✓	
Jalan Lingkungan									
1	Jalan Ekonomi	Dusun I	3250 m			✓	✓		
2	Jalan A. Bakar	Dusun III	1400 m			✓		✓	
3	Jalan Cemaning	Dusun III	500 m			✓			✓
4	Jalan Kayu Ara	Dusun I	3 Km			✓	✓		
5	Jalan Belekop	Dusun II	700 m			✓	✓		
6	Jalan Menuju Aliyah	Dusun II	800 m			✓			✓
7	Jalan Menawah	Dusun II	400 m			✓			✓
Drainase									
1	Jalan-jalan Desa Semukut	Dusun I,II,III	4000 m			✓	✓		
Air Bersih									
1	Pamsimas	Dusun I,II,III	3 Unit			✓	✓		
Air Limbah									
1	MCK/Sanitasi	Dusun I,II,III	294 Unit			✓	✓		
Persampahan									
1	Pengolahan Sampah	Dusun I,II,III	-			✓		✓	
Listrik									
1	Jaringan Listrik	Dusun I,II,III	-	✓			✓		

Sumber. Hasil Analisis 2016

Hasil Skoring dan Skala Prioritas PSU dan Perumahan di Desa Semukut

Dalam penentuan skala prioritas infrastruktur pedesaan Desa Semukut, penilaina skoring ditentukan berdasarkan kondisi fisik/teknis dari komponen PSU dan Rumah dan kondisi pelayanan.Kondisi pelayanan menggambarkan seberapa penting infrastruktur dalam sisi fungsi/manfaat dari masing-masing infrastruktur, semakin tinggi manfaat dari infrastruktur tersebut semakin tinggi pula tingkat pelayanannya.Sedangkan skala skoring yang digunakan nilai 1,3 dan 5 dengan masing-masing nilai menggambarkan kondisi infrastruktur di lapangan.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table di bawah ini. Berdasarkan hasil analisis (Tabel 1.2) diperoleh beberapa prioritas pembangunan infrastruktur dengan dikelompokkan berdasarkan hasil skoring, dari hasil tersebut di kelompokkan menjadi beberapa skala prioritas yakni prioritas pertama berarti pembangunan infrastrukturnya menjadi kebutuhan utama bagi masyarakat Desa Semukut. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kepentingan dan manfaat yang diperoleh dari pembangunan infrastruktur akan berdampak secara langsung dengan kondisi kualitas kehidupan masyarakat Desa Semukut.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 2. Skoring dan skala prioritas PSU dan Perumahan Desa Semuku

No	Nama PSU	Lokasi	Volume	Kondisi		Total Skor	Skala Prioritas
				Teknis	Pelayanan		
Rumah Layak Huni							
1	Rumah Layak Huni	Dusun II,III	45 Unit	5	3	4	Kedua
		Dusun III	50 Unit	5	5	5	Pertama
		Dusun I, II	39 Unit	5	1	3	Ketiga
Jalan Lingkungan							
1	Semenisasi Jalan Ekonomi	Dusun I	3250 m	5	5	5	Pertama
2	Semenisasi Jalan A. Bakar	Dusun III	1400 m	5	3	4	Kedua
3	Semenisasi Jalan Cemaning	Dusun III	500 m	5	1	3	Ketiga
4	Base Jalan Kayu Ara	Dusun I	3 Km	5	5	5	Pertama
5	Semenisasi Jalan Ekonomi	Dusun II	700 m	5	5	5	Pertama
6	Peningkatan Jalan Menuju Aliyah	Dusun II	800 m	5	1	3	Ketiga
7	Peningkatan Jalan Menawah	Dusun II	400 m	5	1	3	Ketiga
Drainase							
1	Parit Beton Jalan Desa Semukut	Dusun I,II,III	4000 m	5	5	5	Pertama
Air Bersih							
1	Instalasi Pengolahan Air Bersih/Pamsimas	Dusun I,II,III	10 Unit	5	5	5	Pertama
2	PAH (Penampung Air Hujan)	Dusun I,II,III	200 Unit	5	3	4	Kedua
Air Limbah							
1	SPAL Individual (Tangki Septik/Bak Resapan)	Dusun II,III	45 Unit	5	3	4	Kedua
		Dusun III	50 Unit	5	5	5	Pertama
		Dusun I, II	39 Unit	5	1	3	Ketiga
Persampahan							
1	TPS Persampahan	Dusun I,II,III	3 Unit	5	1	3	Ketiga
	Listrik						
1	Peningkatan Daya Listrik	Dusun I,II,III	-	1	5	3	Ketiga

Sumber. Hasil analisis 2016

Skala Prioritas Pembangunan Infrastruktur di Desa Semukut

Pada tahapan analisis dihasilkan skoring masing-masing komponen infrastruktur berdasarkan kondisi teknis/fisik dan tingkat pelayanan dari masing-masing komponen, hal ini yang menjadi dasar perhitungan bobot komponen infrastruktur yang menjadi prioritas utama. Unutk lebih jelasnya jenis infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan di desa semukut dapat dilihat pada table di bawah ini. Berdasarkan Tabel 1.3, penentuan prioritas pembangunan infrastruktur dengan mudah dilaksanakan karena sudah ada dasar dalam pelaksaanan pekerjaan teknis yang akan dilakukan, dengan mengacu pada hasil diatas maka pemerintah dengan mudah melaksakan program pembangunannya. Dengan ini, pembangunan infrastruktur di Desa Semukut dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta dapat berdampak langsung dengan kualitas hidup masyarakat di desa ini.

Skala Prioritas	Pembangunan Infrastruktur
Pertama	Semenisasi Jalan Ekonomi (3250 m)
	Base Jalan Kayu Ara (3 km)
	Semenisasi Jalan Ekonomi (700 m)
	Parit Beton Jalan Desa Semukut (4 km)
	Instalasi Pengolahan Air Bersih/Pamsimas (10 Unit)
	Rumah Layak Huni (50 Unit)
	SPAL Individual (Tangki Septik/Bak Resapan) (50 Unit)
Kedua	Rumah Layak Huni (45 unit)
	Semenisasi Jalan A. Bakar (1400 m)
	PAH (Penampung Air Hujan) (200 Unit)
	SPAL Individual (Tangki Septik/Bak Resapan) (45 Unit)
Ketiga	Rumah Layak Huni (39 Unit)
	Semenisasi Jalan Cemaning (500 m)
	Peningkatan Jalan Menuju Aliyah (800 m)
	Peningkatan Jalan Menawah (400 m)
	Peningkatan Daya Listrik
	TPS Persampahan (3 Unit)
	SPAL Individual (Tangki Septik/Bak Resapan) (39 Unit)

ISBN : 978-602-73463-1-4

KESIMPULAN DAN SARAN

Peran serta masyarakat dalam pembangunan menjadi bagian penting dalam terselanggaranya program pembangunan, dimana peran penting masyarakat dapat dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian yang mengakibatkan pemabagunan dalam hal ini pembangunan infrastruktur dapat dengan mudah diukur capainya. Pelaksanan pembangnan yang baik tentunya menghasilkan dampak yang signifikan terhadap kehidupan masyarakat, maka pemabngunan infrastruktur tersebut haruslah tepat guna dan tetap sasaran.Sehingga pembangunan infrastruktur tersebut mendorong terciptanya tujuan dasar dari pembangunan itu sendiri yaitu meningkatnya kesejahteraan masyarakat.

Hasil dari proses yang dilakukan memperlihatkan komponen-komponen yang menjadi prioritas utama dalam pembangunan infrastruktur diukur berdsarkan seberapa penting komponen tersebut berdasarkan tingkat pelayanannya. Dari hasil penelitian ini dapat dirumuskan program-program yang menjadi prioritas pembangunan Desa Semukut yang tentunya akan berdampak langsung terhadap kualitas kehidupan masyarakat. Hasil dari penelitian ini merupakan indikasi program yang dapat ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah baik pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti maupun Pemerintah Provinsi Riau dalam bentuk proyek pembangunan infrastruktur yang dilaksanakan di Desa Semukut. Data dan informasi penelitian ini dihasilkan dari proses yang melibatkan berbagai macam steakholder yang berperan dalam pembangunan desa, sehingga dengan adanya program kebijakan infrastruktur bisa berjalan secara efektif dan efisien.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Asnudin. Andi,*Tinjauan Proses Pengadaan kontraktor skala kecil dalam Rangka Pengembangan Infrastruktur Perdesaan*. Institut Teknologi Bandung,Bandung, 2004.
[2] Departemen Pekerjaan Umum, "*Pedoman Teknis Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan*". 2008.
[3] Kementrian PUPR. "Bantuan Prasarana, Sarana, Dan Utilitas Umum Untuk Perumahan Umum" , 2015.
[4] Ginting, Nabari. *Peranan Lembaga Desa Menggali Potensi Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang*. PPS USU, Medan, 1998.
[5] Adisasmita, Rahardjo. *Membangun Desa Partisipatif. Graha Ilmu*.Makassar, 2006.
[6] Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman
[7] Badan Pusat Statistik. Kabupaten Dalam Angka Tahun 2015. BPS Kab. Kep Meranti. 2016.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

INTERAKSI LINTAS BATAS ANTAR NEGARA DALAM PENDEKATAN PEMBANGUNAN KAWASAN PERBATASAN
(Studi Kasus : Kawasan Perbatasan Indonesia-Malaysia di Kabupaten Kapuas Hulu-Kalbar)

Muhamad Yogie Syahbandar
Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota
Fakultas Teknik, Universitas Pakuan
Email : my.syahbandar@gmail.com

Naskah diterima : 23 Maret 2017 Naskah direvisi 14 April 2017 Disetujui terbit : 16 Mei 2017

ABSTRAK

Secara geografis- Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat berbatasan langsung dengan negara tetangga yaitu Sarawak-Malaysia. Kondisi ini menempatkan kabupaten kapuas hulu menjadi strategis secara nasional di bidang pertahanan dan keamanan. Adanya kedekatan tersebut juga secara otomatis menimbulkan hubungan dan interaksi lintas batas pada kedua negara. Hubungan interaksi kedua negara sudah berlangsung lama dan cukup kuat. Adanya kesamaan rumpun suku mengakibatkan timbulnya interaksi secara sosial, budaya maupun ekonomi, hubungan tersebut tidak dipandang sebagai ancaman namun sebagai peluang untuk pengembangan kawasan perbatasan. Oleh karena itu aspek lintas batas menjadi cukup penting dalam upaya meningkatkan pembangunan kawasan perbatasan. Tujuan pertama makalah ini adalah menganalisis tingkat interaksi dan aktifitas masyarakat dikawasan perbatasan kedua analisis persepsi mengenai proritas kerjasama antar negara untuk kemudian diperoleh potensi pengembangan lintas batas dalam pembangunan kawasan perbatasan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriftif, analisis gravitasi untuk melihat tingkat interaksi secara kuantitatif serta analisis deskripsi untuk menjelaskan potensi pengelolaan lintas batas berdasarkan hasil observasi lapangan dan persepsi stakholder. Berdasarkan Hasil identifikasi ini maka dapat disimpulkan bahwa Interaksi lintas batas yang terjalin selama ini bisa menjadi modal dasar dalam pengelolaan lintas batas dan pembangunan kawasan perbatasan untuk kesejateraan masyarakat.

Kata kunci: *Interaksi ,Lintas Batas, Kawasan Perbatasan*

PENDAHULUAN

Secara geografis kawasan perbatasan Kalimantan Barat dengan Malaysia berada paling utara Provinsi Kalimantan Barat membentang dari barat ke timur sepanjang sekitar 805 km, meliputi Kabupaten Sambas, Bengkayang, Sanggau, Sintang, dan Kapuas Hulu. Jika diasumsikan kawasan perbatasan merupakan kawasan yang berjarak 20 km dari garis batas sepanjang 966 km, terhitung dari tanjung Dato, Kabupaten Sambas yang berada diujung paling barat sampai ke Kabupaten Kapuas Hulu yang berada diujung paling timur, dengan luasan meliputi 19.320 km2, atau 1.932.000 ha.

Kabupaten Kapuas Hulu adalah salah satu kawasan perbatasan darat yang mempunyai fungsi strategis dari sudut pandang pertahanan dan keamanan negara. Namun demikian. Namun demikinan kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu masih termasuk wilayah dengan tingkat perkembangan rendah dibandingkan dengan wilayah perbatasan lainnya di Kalimantan Barat. Dengan kondisi tertinggal, terpencil, serta terbatasnya sarana dan prasarana wilayah, maka wilayah perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu dikatagorikan agak tertinggal [1]. Rendahnya dukungan infrastruktur pembangunan maupun infrastruktur pertahanan dan keamanan menyebabkan lemahnya pengawasan terhadap wilayah perbatasan sehingga dapat merugikan secara politik, sosial, ekonomi bagi Kabupaten Kapuas Hulu.

Pada dewasa ini reorientasi paradigma pengelolaan batas wilayah negara dan kawasan perbatasan telah berkembang dari outward looking menjadi outward looking yang kemudian diwujudkan dalam kebijakan spasial nasional melalui Undang-Undang Nomor 26 [2], tentang Penataan Ruang dan yang menetapkan

kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka mengejar ketertinggalan tersebut perlu dilakukan pembangunan infrastruktur fisik maupun sumber daya manusia. Reorientasi arah pembangunan yang lebih mengutamakan kesejahteraan harus dioptimalkan melalui pemanfaatan potensi sumberdaya. Modal lainya pembangunan kawasan perbatasan adalah hubungan Indonesia dan Malaysia yang sudah terjalin lama. Adanya kesamaan rumpun suku mengakibatkan timbulnya interaksi secara sosial, budaya maupun ekonomi, hubungan tersebut tidak dipandang sebagai ancaman namun sebagai peluang untuk pengembangan kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu.

Maksud dan Tujuan

Adapun maksud tulisan ini adalah menganalisis potensi interaksi lintas batas sebagai pendekatan dalam pembangunan kawasan perbatasan. Dengan maksud diatas maka di rumuskan tujuan sebagai berikut:

- Analisis Tingkat Interaksimasyarakat di kawasan perbatasan kabupaten Kapuas Hulu
- Analisis Aktifitas lintas batas di kawasan perbatasan kapuas hulu- dengan Malaysia
- Analis Persepsi prioritas hubungan kerjasama di kawasan perbatasan.

METODE PENELITIAN

Lokasi dan Waktu Penelitian

Wilayah studi adalah wilayah administratif KabupatenKapuas Hulu meliputi 7 (Tujuh) kecamatan yang berbatasan langsung dengan negara tetangga (Serawak, Malaysia).. Luas total kecamatan yang di kawasan perbatasan meliputi luasan 15.770,6 km2 atau 52,85% dari total luas Kabupaten Kapuas Hulu secara keseluruhan dengan rincian Tabel 3.

Tabel 1. jumlah penduduk wilayah perbatasandi Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2012

Kecamatan	Luas Wilayah (Km^2)	Jumlah Penduduk (jiwa)
Putussibau Selatan	5.352.30	20.064
Empanang	547.14	2.933
Puring Kencana	258.66	2.287
Badau	700.00	5.428
Batang Lupar	1.332.90	4.670
Embaloh Hulu	3.457.60	4.810
Putussibau Utara	5.204.80	25.375
Jumlah	16.853.40	65.567

Sumber : Kapuas Hulu Dalam Angka (2013)

Orientasi dan batas administrasi wilayah pengamatan dan wilayah studi dapat dilihat pada Gambar 1

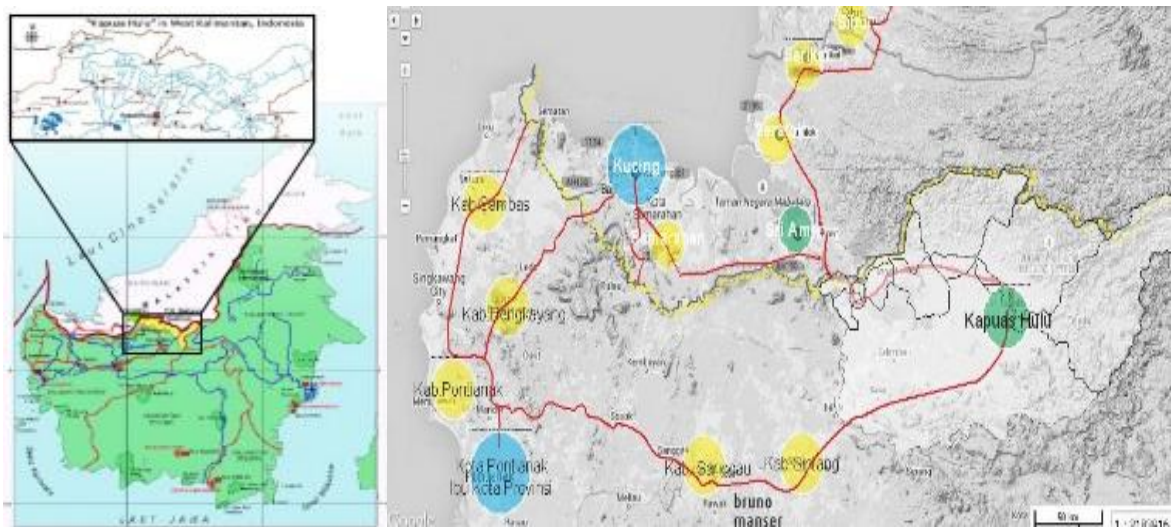

Gambar 1. orientasi kawasan perbatasan di Kabupaten Kapuas Hulu

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

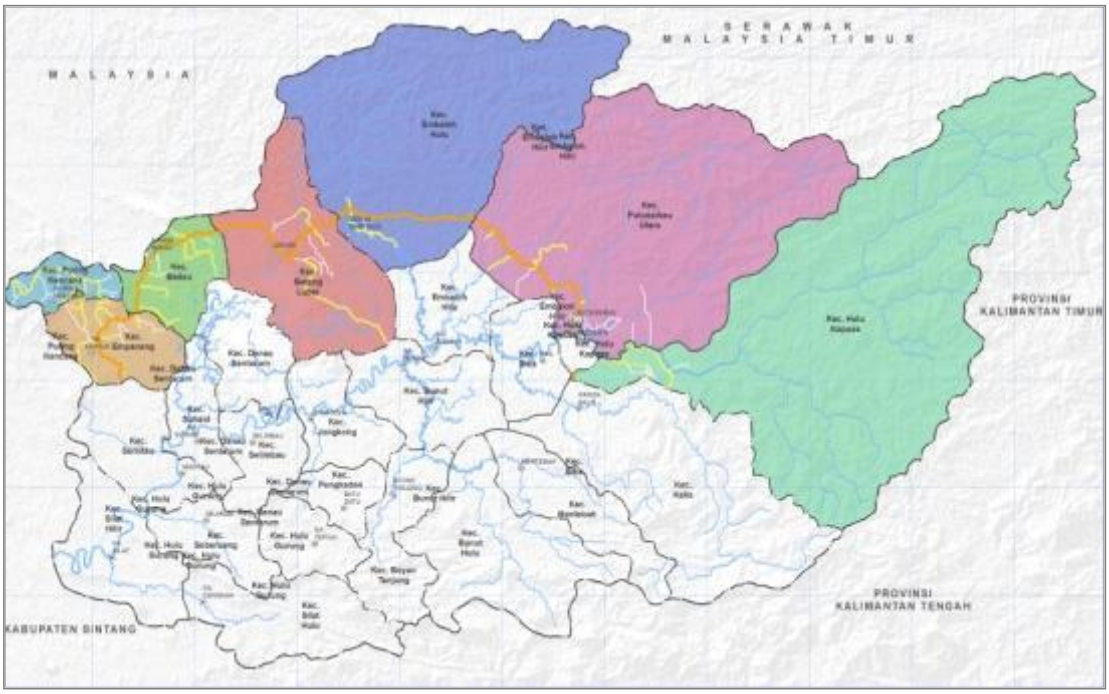

Gambar 2. Peta Kawasan Perbatasan dikabupaten Kapuas Hulu

Kebutuhan Data

Dalam Penelitian ini ada dua jenis data yang digunakan yaitu data sekunder dan data primer. Kebutuhan data antara lain Jumlah Penduduk, Kondisi ekonomi, Sarana dan Prasarana, Jaringan Jalan, Jarak dan waktu tempuh, Dokumentasi (Foto dan Video) Peta, Kuisioner.

Bahan dan Alat

Bahan penelitian yang digunakan adalah seluruh data dan. Alat yangdigunakan dalam mengolah data antara lain : ARCGIS 10.2, MS Excell, MS Word, Expert Choice 2000.

Metode Pengumpulan Data

Metode Pengumpulan data dilakukan dengan Studi Literatur,observasi serta survei Instansi, antara lain ke Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Kapuas Hulu, Kantor Penelitian dan Pengembangan dan Informatika Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Pertanian Kabupaten Kapuas Hulu, BPS Kabupaten Kapuas Hulu, Dinas Perindustrian (Dinas Pertanian dan Perkebunan) Kabupaten Kapuas Hulu, dan Biro Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kapuas Hulu serta Kantor Kecamatan dan Desa dikawasan perbatasan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang digunakan dalam hal ini adalah analisis Deskriptif, Gravitasi serta Analisis Hierarki Proses (AHP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Tingkat Interaksi Lintas Batas Di Kawasan Perbatasan Kabupaten Kapuas Hulu

Untuk mengukur kekuatan nteraksi antar kawasan digunakan model interaksi W.J. Reilly Adapun persyaratan tersebut antara lain.(a). Kondisi sosial-ekonomi, tingkat pendidikan, mata pencarian, mobilitas, dan kondisi sosial-budaya penduduk relatif memiliki kesamaan, (b) Kondisi alam setiap wilayah relatif sama,(c)Keadaan sarana dan prasarana transportasi yang menghubungkan wilayah-wilayah yang dibandingkan

ISBN : 978-602-73463-1-4

relatif sama.Kekuatan interaksi di ukur dengan melihat faktor jumlah penduduk dan jarak antara kedua wilayahpersyaratan tertentu.Hasil analisis kekuatan interaksi antar kecamatan diperbatasan Indonesia dengan Lubuk Antu (Malaysia) tertera pada table 2

Tabel 2 Indeks interaksi kecamatan di kawasan perbatasan dengan Malaysia

No	Nama Kecamatan	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Putussibau Selatan		0.9	0.6	1.4	2.1	3.1	447.5	5.1
2	Empanang	0.9		81.7	31.4	6.7	2.8	1.0	80.3
3	Puring Kencana	0.6	81.7		12.7	3.2	1.7	0.7	36.8
4	Badau	1.4	31.4	12.7		26.2	6.3	1.6	1589.7
5	Batang Lupar	2.1	6.7	3.6	26.2		23.5	2.4	66.4
6	Embaloh Hulu	3.1	2.8	1.7	6.3	23.5		3.3	20.0
7	Putussibau Utara	447.5	1.0	0.7	6.6	2.4	19.0		5.7
8	Lubuk Antu (Malaysia)	5.1	80.3	36.8	1589.7	66.4	20.0	5.7	

Berdasarkan tabel diatas maka kecamatan yang memiliki tingkat interaksi paling tinggi adalah kecamatan Badau, kemudian Batang Lupar, Embaloh Hulu, emapanang sedangkan yang memiliki tingkat interaksi yang rendah adalah kecamatan putussibau utara. Kecamatan putussibau utara,

Analisis Aktifitas Lintas Batas

Untuk mengetahui jenis hubungan interaksi yang terjadi dilakukan pengamatan dan wawancara mendalam *(In-depth Interview)*. Informan atau nara sumber dalam wawancara ini adalah camat ditujuh kecamatan perbatasan dan petugas imigrasi PLB Badau, Petugas Bea Cukai PLB Badau, Petugas Dinas Perhubungan PLB Badau, Temenggung (ketua adat) dayak iban lanjak, tokoh masyarakat serta warga negara malaysia. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara maka diketahuiterdapat interaksi yang telah terjadi interaksi antara kecamatan di perbatasan dengan kawasan di Malaysia.Interaksi tersebut tercermin dalam kegiatan lintas batas yang dilakukan yaitu interaksi secara sosial-budaya, ekonomi (perdagangan lintas batas), penyediaan infrastruktur/sarana dan prasarana serta transportasi. Interaksi yang terjadi telah berlangsung cukup lama dan ditunjang oleh hubungan kekerabatan yang kuat antar penduduk dikedua negara. Gambar 3 menjelaskan mengenai analisi hubungan interaksi yang terjadi di kawasan perbatasan negara.

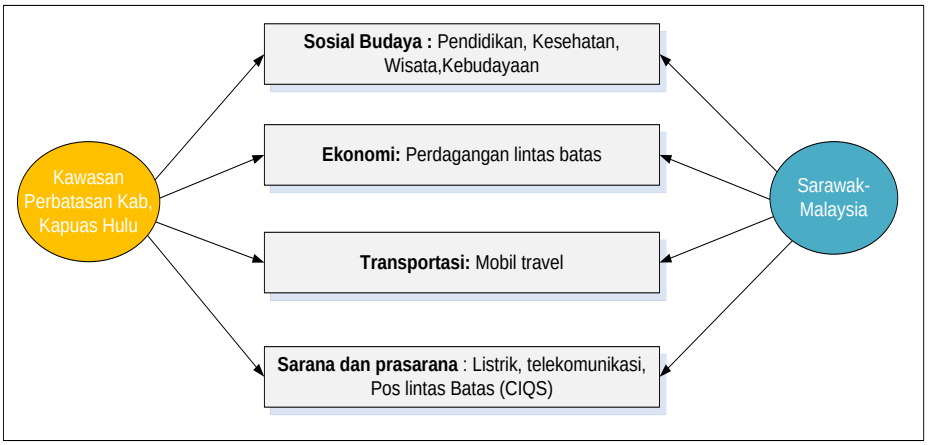

Gambar 3. Analisis bentuk interaksi lintas batas Indonesia-Malaysia

Persepsi Hubungan Kerjasama Dalam Pengelolaan Lintas Batas

Untuk mengetahui prioritas hubungan kerjasama dalam pengelolaan litas batas diketahui dengan cara melakukan penilaian dengan penentuan skoring atas jawaban yang didapatkan melalui Analytic Hierarchy Process (AHP). Semakin tinggi nilai yang diperoleh menandakan bahwa faktor tersebut lebih diprioritas dibandingkan dengan faktor lain yang memiliki nilai lebih rendah. Nilai dari tiap jawaban responden kemudian dirata-ratakan sehingga diperoleh nilai persepsi hubungan kerjasama dalam pengelolaan lintas batas.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Pengumpulkan informasi dilakukan dengan wawancara mendalam kepada stakeholder terkait, antara lain: pemerintah daerah: BAPPEDA Kabupaten Kapuas Hulu, Badan Pengelola Perbatasan Daerah (BPPD) Kabupaten Kapuas Hulu, Unsur NGO: WWF Indonesia-Kabupaten Kapuas Hulu, Masyarakat: Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Kapuas Hulu, Temenggung Adat (Ketua Adat) Dayak Iban Lanjak". Berdasarkan perspektif responden yang dianalisa dengan metode AHP maka diketahui persepsi kerjasama lintas batas yang menjadi prioritas stakholder terlihat pada Berikut

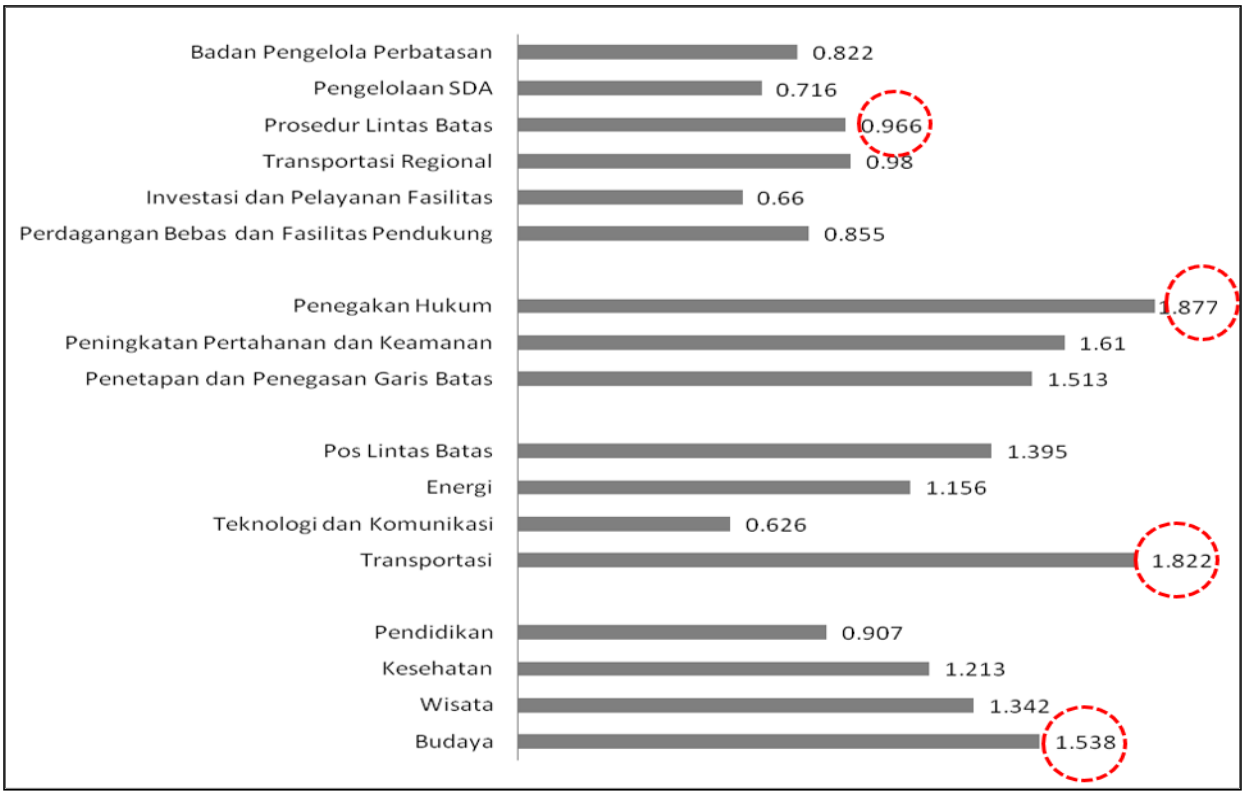

Gambar 4. Analisis AHP untuk Persepsi pengembangan lintas batas di Kabupaten Kapuas Hulu

Persepsi Hubungan Kerjasama dalam pengelolaan lintas batas di Kabupaten Kapuas Hulu memberikan gambaran mengenai prioritas hubungan dan kerjasama di kawasan Perbatasan Kabupate Kapuas Hulu. Prioritas hubungan kerjsama pengelolaan berdasarkan aspek kelembagaan dan kebijakan adalah prosedur lintas batas (0,98), perdagangan lintas batas (0,96), Badan Pengelola perbatasan (0,85), Investasi dan pelayanan fasilitas (0,82), transportasi regional (0,71), pengelolaan SDA (0,66). Hubungan kerjsama dan dalam prosedur lintas batas dan perdagangan lintas batas menjadi penting karena terkait kondisi perdagangan di kawasan perbatsan saat ini. Belum ada prosedur yang baru dalam mengatur perdagangan lintas batas yaitu adanya pembatasan nilai barang yang diperjualbelikan. Hal ini memunculkan adanya perdagangan gelap melalui pintu tikus. Oleh karena itu perlu segera diatur mengenai prosedur lintas batas dan perdagangan lintas batas.

Prioritas pada aspek batas wilayah negara adalah penegakan hukum (1,87), peningkatan pertahanan dan keamanan (1,61), penetapan dan penegasan garis batas (1,51), penegakan hokum menjadi prioritas dikarenakan masih terdapat pelanggaran humum di lintas batas, sedangkan aspek pertahanan dan keamanan dan penetapan dan penegasan garis batas dipandang belum menjadi prioritas utama di daerah. Sebaliknya yang terjadi di level pemerintah pusat hal ini menjadi isu utama dalam aspek batas wilayah negara. Prioritas pada aspek infrastruktur adalah pos lintas batas (1,82), transportasi (1,39), energi (1,15), teknologi informasi dan komunikasi (0,62). Pos Lintas menjadi prioritas utama karena menjadi pintu gerbang tempat keluar masuknya masyarakat dikedua negara. Saat ini Pos Lintas Batas yang memiliki pelayan CIQS hanya tersedia di Kecamatan Badau. Berdasarkan kesepakatan kedua negara beberapa pos lintas batas salah satunya di Kecamatan Puring Kencana. Adanya pos lintas batas akan lebih mengefektifikan interaksi dan hubungan lintas batas kedua negara.

Prioritas berdasarkan aspek konektifitas manusia (people conectivity) adalah Sosial Budaya (1,53), Wisata (1,34), Kesehatan (1,23) dan pendidikan(0,90). Hubungan kerjasama Sosial daan Budaya telah terjalin sejak lama bai secara formal maupun non formal. Masyarakat dikedua negara merupakan rumpun yang sama sehingga mempunyai kondisi social budata dan adat istiadat yang tidak jauh berbeda. Hubungan kerjasam social budaya di pandang menjadi prioritas untuk mempererat hubungan kedua negara. Dengan membuka hubungan

secara sosial budaya maka akan dengan mudah membuka hubungan formal antar kedua negara.Selanjutnya hubungan kedua negara yang menjadi prioritas adalah kesehatan dan pendidikan. Secara non formal kedua hubungan ini sudah sejak lama dilakukan. Agar hubungan ini memberikan manfaat dan tidak merugikan masyarakat dikedua negara maka perlu adannya peningkatan hubungan kerjasama secara formal yang dapat mengatur sektor pendidikan dan kesehatan dikedua negara.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Interaksi lintas masyarakat di perbatasan cukup kuat, hal ini ditandai dengan adanya hubungan secara social, ekonomi antar kedua negara yang telah terjalin cukup lama. Hubungan interaksi menjadi modal dasar dalam pembangunan kawasan perbatasan yang berorientasi pada pembangunan lintas batas.
2. Persepsi Hubungan Kerjasama dalam pengelolaan lintas batas di Kabupaten Kapuas Hulu memberikan gambaran mengenai prioritas hubungan dan kerjasama yang saling menguntungkan disemua sektor dan saling melengkapi kebutuhan.

.Saran

Adapun saran dalam upaya mengembangkan kawasan perbatasan antarnegara di kabupaten Kapuas Hulu antara lain

1. Meningkatkan hubungan kerjasama lintas batas antar negara di bidang Sosial, Budaya, Keamanan,
2. perdagangan antar negara, dsb
3. Pengembangan pusat pertumbuhan (KW Putussibau Utara) dan simpul strategis pintu gebang perbatasan (PKSN Badau)
4. Meningkatkan arus perdaganganekspor-impor dan kerjasama perdagangan
5. Pengembangan potensi wisata alam Danau Sentarum (TNDS) dan Taman Nasional Betung Karihun (TNB()
6. Meningkatkan interaksi dan konektifitas antar negara melalui pembangunan Infrastruktur dan jaringan pendukung
7. Meningkatkan pengelolaan dan nilai tambah produksi komoditas unggulan yang berdaya saing ekspor maupun produk pelengkap.
8. Menyusun kembali regulasi untuk meningkatkan efektifitas kegiatan lintas batas dan respon terhadap ASEAN dan AEC

DAFTAR PUSTAKA

[1] [BAPENAS] Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. 2007. *Evaluasi Pembangunan Wilayah Perbatasan 2005-2007.* Jakarta (ID): Bappenas

[2] Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan yang menetapkan kawasan perbatasan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dalam bidang pertahanan dan keamanan dengan tetap memperhatikan kesejahteraan masyarakat.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

ANALISIS PENGARUH PEMBANGUNAN INFRASTUKTUR TERHADAP KEMISKINAN KOTA TANGERANG

Resti Meliana Sari[1)],Ikhmaliska Aisha Maqdi[1)] dan M. Yogie Syahbandar[1)]

[1]Mahasiswa Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Pakuan
[2]Staff Pengajar Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik, Universitas Pakuan

Email : resti.ms25@gmail.com

Naskah diterima : 6 Maret 2017 Naskah direvisi 12 Maret 2017 Disetujui terbit : 21 Maret 2017

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Kota Tangerang memiliki jumlah masyarakat miskin sebesar 5% atau sekitar 100.000 jiwa. Dalam upaya mengatasi kemiskinan dilakukan dengan secara langsung maupun tidak langsung. Investasi dalam pembangunan sarana infrastruktur diduga memiliki pengaruh terhadap pembangunan perekonomian suatu daerah. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh penjuru dunia. Penelitian ini bertujuan untuk melihat (1) Kondisi investasi (belanja) pemerintah Kota Tangerang dalam bidang Infrastruktur, (2) Kondisi pendapatan masyarakat dan kemiskinan, dan (3) Keterkaitan antara investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur dengan pengentasan kemiskinan. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif dan metode kuantitatif berupa metode analisis regresi dan korelasi, kedua metode tersebut digunakan secara simultan. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Nilai investasi (belanja) pemerintah Kota Tangerang dalam bidang Infrastruktur setiap tahunnya mengalami perubahan, (2) Persentase dan jumlah penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan di Kota Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 yang terus menurun, (3) Kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil, (4) Penyebaran pendapatan sesama penduduk miskin semakin tidak timpang, (5) Hubungan di antara investasi infrastruktur dengan kemiskinan cukup erat yaitu memiliki nilai korelasi 0.517, (6) Investasi Infrastruktur memiliki pengaruh sebesar 26,7% terhadap perubahan tingkat kemiskinan masyarakat Kota Tangerang, serrta (7) hubungan korelasi yang terjadi berupa variable merupakan korelasi negative, yaitu apabila biaya untuk pembangunan infrastruktur ditingkatkan (+), maka jumlah masyarakat miskin akan berkurang (-). Begitupun sebaliknya.

Kata kunci: *Kemiskinan, Infrastruktur, Investasi Pemerintah*

PENDAHULUAN

Peningkatan jumlah penduduk yang terjadi di Indonesia, menimbulkan berbagai permasalahan, antara lain masalah pangan, papan, pengangguran, penyediaan fasilitas pendidikan, dan fasilitas sosial lainnya. Hal ini dapat memicu terjadinya penurunan tingkat kesejahteraan sosial baik di daerah perkotaan maupun pedesaan. Jumlah penduduk miskin di Indonesia masih sangat banyak, yakni pada perhitungan Badan Pusat Stastistik (BPS) tahun 2016 [1], bahwa jumlah penduduk miskin mencapai 28,01 juta jiwa atau 10,86 persen dari total penduduk Indonesia. Dan di Kota Tangerang sendiri mencapai 5% atau sekitar 100.000 jiwa. Kemiskinan merupakan masalah pembangunan di berbagai bidang yang ditandai oleh keterbatasan, ketidakmampuan, dan kekurangan. Pengurangan kemiskinan harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan nasional. Kemiskinan merupakan masalah pokok yang penanggulangannya tidak dapat ditunda lagi.

Investasi dalam pembangunan sarana infrastruktur, diduga memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan perekonomian suatu negara. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, bandara, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, yang antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat [2].

Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Fasilitas transportasi memungkinkan orang, barang, dan jasa yang diangkut dari satu tempat ke tempat yang lain di seluruh penjuru dunia [3]. Perannya sangat penting baik dalam proses produksi maupun dalam menunjang distribusi komoditi ekonomi. Telekomunikasi, listrik, dan air merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti perdagangan, industri dan pertanian. Keberadaaan infrastruktur akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi. Perbaikan infrastruktur akan meningkatkan penyerapan tenaga kerja, memicu investasi dan peningkatan pendapatan masyarakat. Infrastruktur yang baik juga merangsang peningkatan pendapatan masyarakat. Aktivitas ekonomi yang semakin meningkatkan mendorong mobilitas faktor produksi dan aktivitas perdagangan.

Maksud dan Tujuan

Diharapkan penelitian ini mampu menganalisis keterkaitan antara jumlah pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur dan berbagai variabel ekonomi lainnya dengan penurunan angka kemiskinan di Kota Tangerang. Adapun maksud dan tujuan penelitian ini terdiri dari tiga hal utama yaitu:

- Identifikasi kondisi investasi (belanja) pemerintah Kota Tangerang dalam bidang Infrastruktur
- Identifikasi Kondisi pendapatan masyarakat dan kemiskinan
- Analisis keterkaitan antara investasi pemerintah dalam bidang infrastruktur dengan angka kondisi kemiskinan Kota Tangerang

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kuantitatif dan metode kualitatif. Metode kuantitatif digunakan untuk menganalisa data yang tersaji dalam bentuk angka-angka adapun analisis kuantitatif yang digunakan adalah metode analisis regresi dan metode analisis korelasi. Metode analisis regresi tersebut digunakan untuk melihat hubungan sebab-akibat antara satu variabel dengan variable yang lain, dalam penelitian ini analisis tersebut guna melihat keterkaitan antara variable investasi belanja pemerintah dalam hal infrastruktur dengan variable tingkat kemiskinan masyarakat. Menurut D.A. Lind, W.G. Marchal dan S.A Wathen (2014) [4] adapun model persamaan regresi linear sederhana adalah seperti berikut ini :

$$Y = a + bx$$

Dimana :

Y = Variabel response atau variabel akibat (*dependent*)
X = Variabel *predictor* atau variabel faktor penyebab (*independent*)
a = Konstanta
b = Koefisien regresi (kemiringan); besaran *response* yang ditimbulkan oleh *predictor*.

Menurut D.A. Lind, W.G. Marchal dan S.A Wathen [4], adapun pengertian analisis korelasi adalah sekumpulan teknik untuk mengukur nilai dari hubungan antar dua variable. Koefisien korelasi menunjukan kekuatan hubungan antara dua himpunan variabel. Diberi tanda r, dan nilai r dapat berkisar dari -1 sampai +1. Tanda negatif berarti varibel berkorelasi negatif, tanda positif berarti variabel berkorelasi positif, serta apabila tidak terdapat hubungan sama sekali antar variabel maka r bernilai 0. Untuk lebih jelasnya mengenai kekuatan dari koefisien korelasi menurut Iqbal Hasan, M (2008) [5] dapat dilihat pada penjelasan berikut:

$0.00 < r \leq 0.20$ = sangat lemah
$0.21 < r \leq 0.40$ = lemah
$0.41 < r \leq 0.60$ = cukup
$0.61 < r \leq 0.80$ = kuat
$0.81 < r \leq 1.00$ = sangat kuat

Selain metode analisis kuantitatif yang telah dijelaskan tersebut, adapula metode analisis kualitatif digunakan untuk menganalisa data yang berbentuk non numerik atau data-data yang tidak diterjemahkan dalam bentuk angka-angka dengan menggunakan analisa deskriptif, menurut Firdaus M, Harmini dan M.A Farid [6] bahwa analisis deskriptif dalam menyimpulkan hubungan antara dua variabel yaitu investasi belanja pemerintah

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dalam hal infrastruktur dengan variable tingkat kemiskinan masyarakat dapat dilakukan dengan menjelaskan kesimpulan dari hasil analisis yang berupa penyajian grafis, tabulasi dan atau model matematis yang digunakan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data-data sekunder. Pengumpulan data sekunder sering juga disebut studi kepustakaan atau studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data melalui kajian terhadap dukumen-dokumen, teori-teori dan konsep-konsep yang ada kemudian diambil sebagai data yang diperlukan dalam proses penelitian. Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada bulan Oktober 2016. Pelaksanaan penelitian mengenai Analisis Pengaruh Pembangunan Infrastuktur Terhadap Program Pengentasan Kemiskinan ini dilaksanakan di Kota Tangerang. Dimana Kota Tangerang merupakan salah satu kota yang berada di bagian Timur Provinsi Banten. Kota Tangerang berjarak ± 60 km dari Ibukota Provinsi Banten dan ± 27 km dari Ibukota Negara Republik Indonesia, DKI Jakarta. Luas wilayah Kota Tangerang adalah ±184,24 km2 (termasuk Bandar Udara

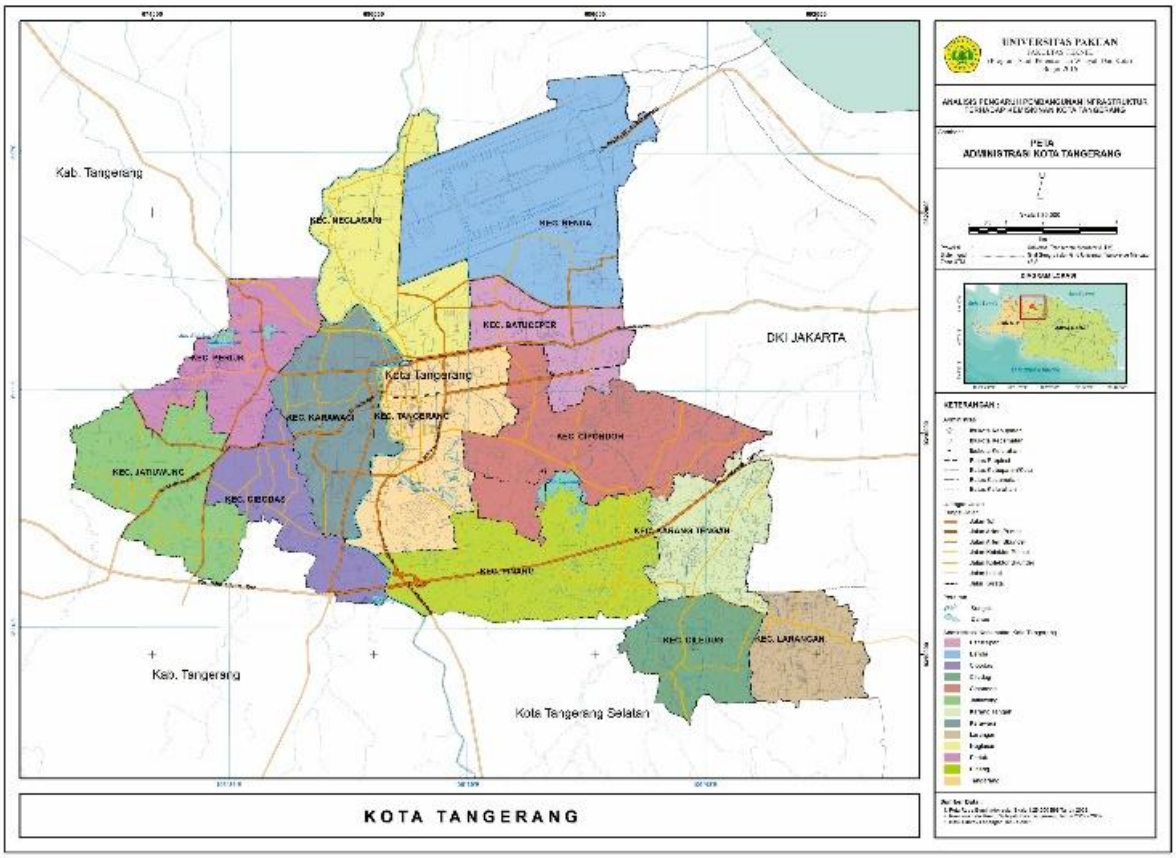

Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian

Internasional Soekarno-Hattaseluas ±19,69 km2). Secara administratif, Kota Tangerang terdiri atas 13 Kecamatan dan 104 Kelurahan. Untuk lebih jelasny mengenai ruang lingkup kegiatan dapat di lihat pada gambar 1 berikut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Investasi (Belanja) Pemerintah Kota Tangerang Dalam Bidang Infrastruktur

Pada dasarnya infrastruktur pembangunan dapat dibedakan menjadi: (1) infrastruktur ekonomi yaitu infrastruktur fisik baik yang digunakan dalam proses produksi maupun yang dimanfaatkan oleh masyarakat, meliputi semua prasarana umum seperti tenaga listrik, telekomunikasi, perhubungan, irigasi, air bersih dan sanitari serta pembuangan limbah, (2) infrastruktur sosial yaitu prasarana sosial seperti kesehatan dan pendidikan. Kondisi investasi (belanja) pemerintah Kota Tangerang dalam bidang Infrastruktur setiap tahunnya selalu mengalami perubahan, baik perubahan yang berupa kenaikan jumlah pengeluaran maupun perubahan berupa penurunan jumlah pengeluaran pemerintah dalam bidang infrastruktur. Berdasarkan data yang di peroleh dari Bappeda Kota Tangerang Tahun 2010-2014 (2014) [7], diketahui bahwa jumlah pengeluaran pemerintah Kota Tangerang paling besar terjadi pada tahun 2013 dimana pengeluaran untuk infrastruktur tersebut mencapai Rp.666,042,657,829.00,- dan pengeluaran terkecil terjadi pada tahun 2010 yaitu Rp. 190,045,927,880.00,-

ISBN : 978-602-73463-1-4

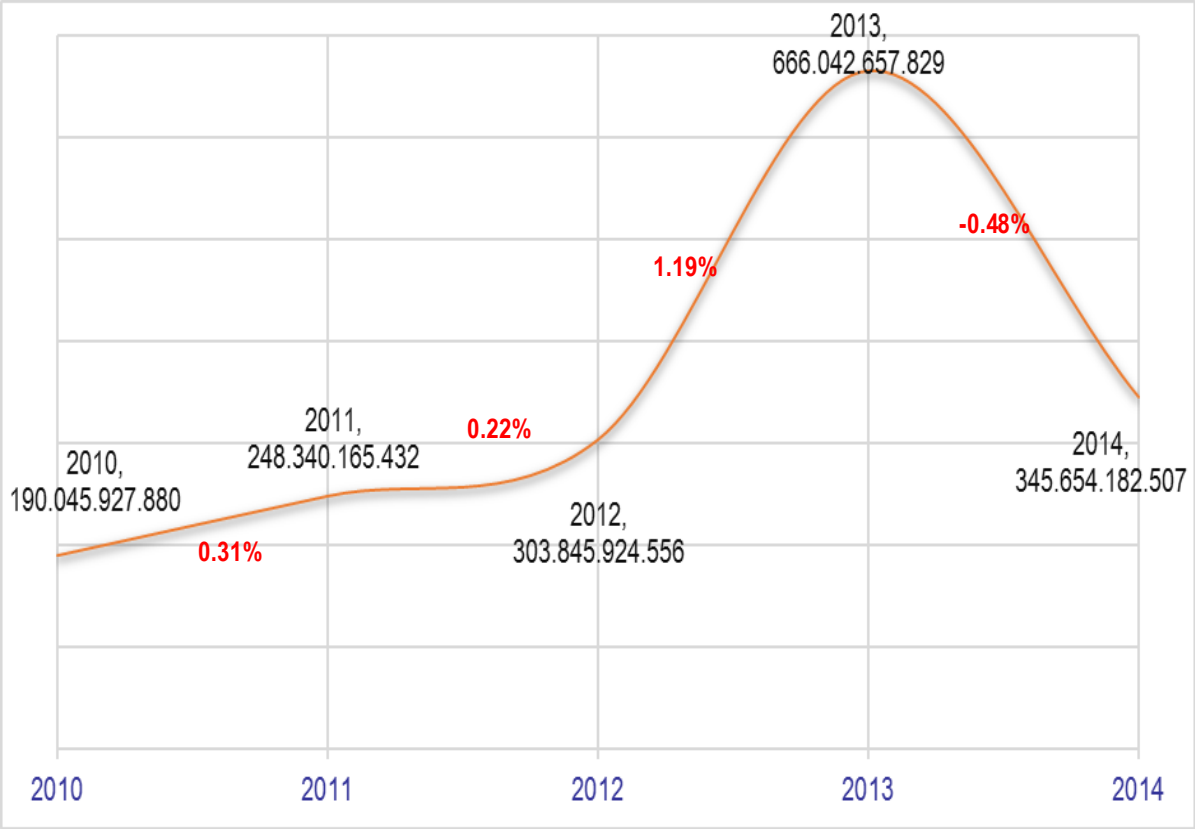

Gambar 2. Tingkat Investasi Infrastruktur Kota Tangerang

Sedangkan tahun 2011 mencapai Rp. 248,340,165,432.00,-, tahun 2012 Rp. 303,845,924,556.00,- dan tahun 2014 yaitu sebesar Rp. 345,654,182,507.00,-. Untuk lebih jelasnya mengenai kondisi investasi (belanja) pemerintah Kota Tangerang dalam bidang infrastruktur dapat dilihat pada tabel 1 dan gambar 2 berikut.

Tabel 1. Jumlah Investasi Pemertintah Terhadap Infrastruktur

No	Tahun APBD	Jumlah (Rp)	Laju Pertumbuhan
1	2014	345,654,182,507	-0.48%
2	2013	666,042,657,819	1.19%
3	2012	303,845,924,556	0.22%
4	2011	248,340,165,422	0.31%
5	2010	190,045,927,880	-

Sumber: APBD Kota Tangerang Tahun 2010-2014 [7] dan Hasil Analisa 2016

Dari gambar diatas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013 terdapat perubahan yang tidak stabil dan cukup besar, namun hal tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor yaitu:

- Pada tahun 2013 terdapat kegiatan pembangunan rumah sakit dengan pengeluaran dana sebesar Rp. 123,570,142,000.00,-
- Adanya pembangunan gedung sekolah dasar dan sekolah menengah yang mengeluakan dana sebesar Rp. 149,056,951,856.00,-
- Pengeluaran terbesar merupakan bagian dari infrastruktur kesehatan dan pendidikan.
- Selain itu adanya pula pembangunan yang mengeluarkan dana lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya seperti jaringan jalan, pembangunan gedung perkantoran, dan lain sebagainya.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Kondisi Pendapatan Masyarakat Dan Kemiskinan

Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin

Kondisi dan perkembangan perekonomian baik makro maupun mikro disuatu wilayah sangat mempengaruhi tingkat kemiskinan masyarakat. Orang-orang miskin sering ditandai dengan menderita kekurangan gizi dan tingkat kesehatan yang buruk, sedikit melek huruf atau buta huruf sama sekali. Ciri orang miskin lainya adalah biasanya bekerja dengan memperoleh penghasilan yang minim, bekerja di sector informal maupun buruh serabutan, dengan penghasilan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok satu hari saja [8].

Kemiskinan absolut didasarkan pada ketidakmampuan individu untuk mendapatkan sumber daya yang cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar minimal untuk hidup layak. Masalah yang ditimbulkan oleh kemiskinan absolut sudah jelas dan tidak ada masyarakat yang dapat merasa nyaman dengan kondisi dimana rekan-rekan satu wilayahnya berada dalam kesengsaraan karena kemiskinan yang diderita mereka. Seperti yang kita ketahui bahwa pengukuran tingkat kemiskinan didasarkan pada satu garis yang disebut sebagai garis kemiskinan. Garis kemiskinan ini terdiri dari 2 komponen yaitu garis kemiskinan makanan (GKM) dan aris kemiskinan non makanan (GKNM) [8].

Berdasarkan data yang diperoleh dari Bappeda Kota Tangerang, tahun 2010-2013 (2013) [8] bahwa garis kemiskinan (GK) penduduk Kota Tangerang pada tahun 2013 sebesar Rp 398.513,- per kapita per bulan, sedangkan di tahun 2014 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar Rp 421.554,- per kapita per bulan. Menurut penelitian Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014 [9] kontribusi makanan (terutama beras) terhadap garis kemiskinan sangat tinggi yaitu sebesar 29.13 persen. Pada tahun 2013 garis kemiskinan berasal dari makanan menyumbang sebesar 68,92% dan non makanan 31,15%; dari makanan ternyata kontribusi beras masih tetap tinggi yaitu sebesar 21,75%, disusul rokok kretek filter, telur ayam ras , mie istan dan daging ayam ras. Daerah perkotaan seperti Kota Tangerang pengeluaran yang paling dominan dikeluarkan oleh penduduk miskin berupa non makanan adalah perumahan, listrik, pendidikan dan angkutan.

Garis kemiskinan/GK di Kota Tangerang dari tahun 2010 sampai dengan 2014 memperlihatkan adanya persentase yang terus menurun, pada tahun 2010 sebesar 6.55 % menurun pada tahun 2011 yang sebesar 6.14 % dan menurun lagi pada tahun 2012 yang sebesar 5.56 %, tahun 2013 sebesar 5,26 % dan tahun 2014 sebesar 4,91 %. Hal ini tidak lain karena program yang ditujukan untuk masyarakat miskin di Kota Tangerang seperti program kesehatan gratis, pendidikan, infrastruktur dan subsidi pangan relatif tepat sasaran [9].

Dari hasil analisis diketahui bahwa semakin tahun nilai **indeks kedalaman kemiskinan** semakin menurun dari 1.10 pada tahun 2010 menjadi 0.85 pada tahun 2011, 0,68 pada tahun 2012 menjadi 0,58 pada tahun 2013 dan menurunlagi menjadi 0,44 pada tahun 2014 ini menggambarkan kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin kecil atau pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan. Sedangan untuk **indeks keparahan kemiskinan** terlihat bahwa pada tahun 2010 pengeluaran diantara penduduk miskin bernilai 1,806.7, pada tahun 2011 yaitu 1,847.3, pada tahun 2012 pengeluaran diantara penduduk miskin bernilai indeks 0.13, tahun 2013 sebesar 0.10 sedangkan pada tahun 2014 sebesar 0.06 dari tahun ketahun terus menurun, ini menggambarkan penyebaran pendapatan sesama penduduk miskin semakin tidak timpang.

Keterkaitan Antara Investasi Pemerintah Dalam Bidang Infrastruktur Dengan Pengentasan Kemiskinan

Pengeluaran pemerintah di sektor infrastruktur dalam kaitannya dengan pembangunan daerah. Infrastruktur merupakan suatu sarana (fisik) pendukung agar pembangunan ekonomi daerah dapat terwujud. Menurut kajian ilmiah yang dilakukan Friawan dalam Fatimah [10] dijelaskan bahwa infrastruktur sangat penting dalam integrasi ekonomi yaitu : pertama, ketersediaan infrastruktur yang baik merupakan mesin utama pemicu pertumbuhan ekonomi. Kedua, untuk memperoleh manfaat yang penuh dari integrasi, ketersediaan jaringan infrastruktur sangat penting dalam memperlancar aktivitas perdagangan dan investasi. Ketiga, perhatian terhadap perbaikan infrastruktur juga penting untuk mengatasi kesenjangan pembangunan ekonomi antar daerah. Dengan membaiknya infrastruktur diharapkan akan memperlancar mobilitas kerja ekonomi antar daerah yang selanjutnya menarik minat para investor untuk berinvestasi di daerah tersebut, artinya akan menciptakan kesempatan kerja baru karena munculnya unit unit kegiatan baru. Pada akhirnya perbaikan infrastruktur akan meningkatkan kondisi pembangunan. Meningkatnya kondisi pembangunan akan memberikan efek peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan Ikhsan dalam T.W Krismanti [11] bahwa secara langsung pembangunan infrastruktur sendiri merupakan kegiatan produksi yang menciptakan output dan kesempatan kerja. Secara tidak langsung, ketersediaan infrastruktur yang mempengaruhi perkembangan sektor-

sektor ekonomi yang lain, terutama infrastruktur dasar yang memberikan produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan infrastruktur lanjutan.

Hubungan antara Pengeluaran Pemerintah dengan Kemiskinan

Masalah kemiskinan yang identik dengan jumlah pendapatan masyarakat yang tidak memadai, harus selalu menjadi prioritas dalam pembangunan suatu negara. Meskipun masalah kemiskinan akan selalu muncul karena sifat dasar dari kemiskinan adalah relatif, namun ketika dari sebuah negara mengalami peningkatan taraf hidup, maka standar hidup akan berubah. Agenda mengatasi kemiskinan bagi suatu negara berkaitan dengan banyaknya faktor yang berhubungan dengan apa yang diakibatkan oleh kemiskinan itu sendiri, karena dampak dari kemiskinan itu akan berhubungan dengan kondisi fundamental yang menjadi syarat berlangsungnya pembangunan suatu negara yang berkelanjutan. Permasalahan utama dari kemiskinan adalah kemampuan dari masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan-pelayanan untuk kebutuhan hidup mereka, seperti kemampuan untuk memperoleh pelayanan kesehatan dan pedidikan. Di sinilah peran pemerintah melalui pengeluarannya, memberikan aksesibilitas yang lebih mudah kepada masyarakat miskin untuk memperoleh pelayanan umum [12].

Analisis Hubungan Pengeluaran Pemerintah dalam hal infrastruktur terhadap Kemiskinan

Secara umum, tingkat kemiskinan yang ada di Kota Tangerang cenderung mengalami penurunan setiap tahunnya. Dalam menganalisa hubungan antara pengeluaran pemerintah dalam hal infrastruktur dengan kemiskinan memerlukan data-data sebagai berikut:

Tabel 2. Kebutuhan Data Analisis Regresi dan Korelasi

Tahun	Pengeluaran Infrastruktur (Rp)	Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa)
2014	345,654,182,507	97,763
2013	666,042,657,829	103,710
2012	303,845,924,556	107,000
2011	248,340,165,432	124,300
2010	190,045,927,880	114,300

Sumber: BPS dan BAPPEDA Kota Tangerang 2010-2014

Analisis Regresi:

Tabel 3. Summary Output

SUMMARY OUTPUT	
Regression Statistics	
Multiple R	0.517292829
R Square	0.267591871
Adjusted R Square	0.023455828
Standard Error	10120.93534
Observations	5

Sumber: Hasil Analisis 2016

Berdasarkan hasil analisis diatas di peroleh nilai regresi yaitu Multiple R adalah sebesar 0.517, dimana nilai hubungan di antara kedua variable tersebut cukup erat. Dijelaskan bahwa nilai R Square atau koefisien deteminan (KD) yaitu 26,7% hal ini berarti variable X (Pengeluaran Infrastruktur) memiliki pengaruh sebesar 26,7% terhadap perubahan tingkat kemiskinan masyarakat Kota Tangerang (Y), dan sebanyak 73.3% penyebab kemiskinan masyarakat di sebabkan oleh faktor lainnya. Dari penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa pembangunan infrastruktur cukup berpengaruh besar terhadap pengentasan kemiskinan di Kota Tangerang.

Dalam pembuktian analisis ini, dengan melihat taraf signifikan dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.) bahwa :

- Jika Sig di atas 0,05 maka Ho diterima

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

- Jika Sig di bawah 0,05 maka Ho ditolak

Dari hasil analisa ini diketahui nilai Sig adalah sebagai berikut:

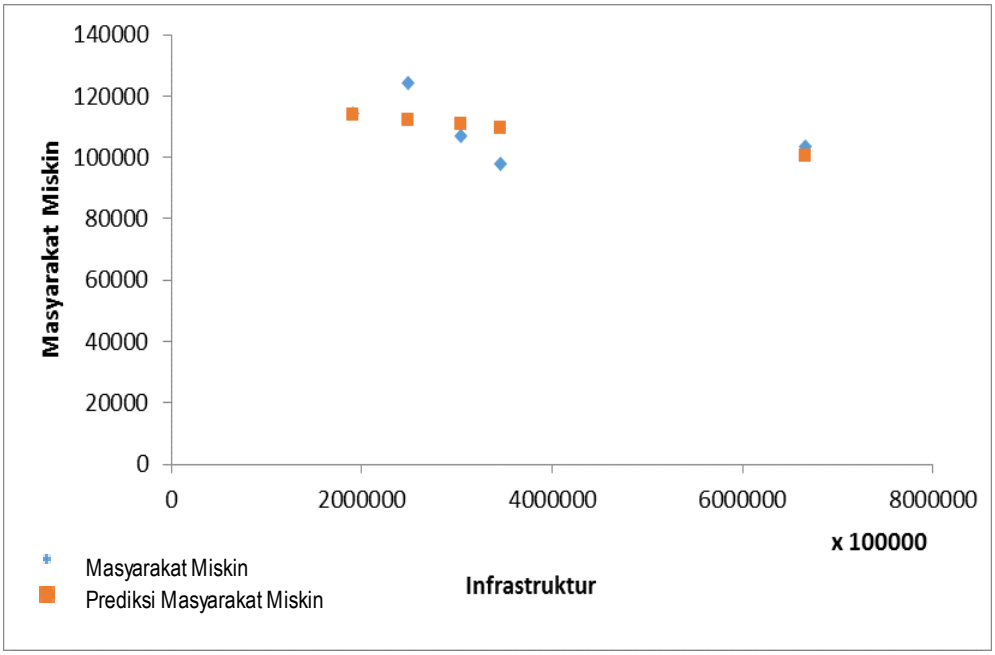

Gambar 3. Diagram Persamaan Regresi

Tabel 4. Analysis of Variance

ANOVA					
	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	112274806.7	112274806.7	1.0961	0.372045764
Residual	3	307299996.5	102433332.2		
Total	4	419574803.2			

Sumber: Hasil Analisis 2016

Dari hasil analisis diatas di peroleh nilai F adalah 1.096 dan nilai Sig yaitu sebesar 0.372 yang berarti > 0.05 maka pengeluaran infrastruktur berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan.

Tabel 5. Koefisien Regresi

	Coefficients	Standard Error	t Stat
Intercept	119422.0602	10576.26204	11.29151865
Infrastruktur	-2.85287E-08	2.72497E-08	-1.046936902

	P-value	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	0.00149	85763.67411	153080.4462
Infrastruktur	0.372046	-1.15249E-07	5.81919E-08

Sumber: Hasil Analisis 2016

Dari analisis ini, di hasilan model persamaan regres sederhana yaitu:

Y= 119,422 - 2.853X

Berdasarkan hasil penghitungan dan persamaan regresi sederhana tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa :

- Pengeluaran biaya untuk infrastruktur mempunyai pengaruh negatif (koefisien regresi (b) = -2.853) terhadap angka jumlah masyarakat miskin, yang artinya jika pengeluaran biaya untuk infrastruktur naik sebanyak 1% maka jumlah masyarakat miskin akan menurun sebanyak 3 orang;
- Nilai konstanta adalah sebesar 119,422, memiliki arti jika tidak adanya pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur atau biaya untuk pembangunan infrastruktur tetap (= 0), maka prediksi jumlah masyarakat miskin akan berjumlah 119,422 jiwa.

Analisis Korelasi

Analisis korelasi adalah metode statistika yang digunakan untuk menentukan kuatnya atau derajat hubungan linier antara dua variabel atau lebih. Pengerjaan analisa ini juga menggunakan bantuan dari software Ms. Excel.

Hasil Analisis korelasi menunjukkan:

Tabel 6. Correlation Statistics

	Infrastruktur	Masyarakat Miskin
Infrastruktur	1	
Masyarakat Miskin	-0.517292829	1

Sumber: Hasil Analisis 2016

Hasil dari analisis tersebt menyatakan bahwa korelasi yang terjadi diantara variable merupakan korelasi negative. Dimana dengan nilai -0.517 merupakan nilai korelasi dengan interpretasi memiliki hubungan atau keterkaitan sedang, namun dikarenakan hasil analisis menyataan bahwa korelasi negative maka hubungan kedua variable ini tidak searah atau terbalik. Dalam kasus ini dimaksudkan sebagai berikut:

1. Apabila biaya untuk pembangunan infrastruktur ditingkatkan (+), maka jumalahmasyarakat miskin akan berkurang (-). Begitupun sebaliknya
2. Apabila biaya untuk pembangunan di kurangi (-) maka jumlah masyarakat miskin akan bertambah (+)

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan mengenai Pengaruh Pembangunan Infrastuktur Terhadap kondisi Kemiskinan adalah sebagai berikut:

1. Investasi dalam pembangunan sarana infrastruktur, memiliki pengaruh yang besar terhadap pembangunan dan upaya penanggulangan kemiskinan
2. Pengeluaran Infrastruktur memiliki pengaruh sebesar 26,7% terhadap perubahan tingkat kemiskinan masyarakat Kota Tangerang .
3. Model persamaan regresi sederhana adalah **Y= 119,422 - 2.853X**
4. Pengeluaran biaya untuk infrastruktur mempunyai pengaruh negatif (koefisien regresi (b) = -2.853) terhadap angka jumlah masyarakat miskin, yang artinya jika pengeluaran biaya untuk infrastruktur naik sebanyak 1% maka jumlah masyarakat miskin akan menurun sebanyak 3 orang;
5. Nilai konstanta adalah sebesar 119,422, memiliki arti jika tidak adanya pengeluaran untuk pembangunan infrastruktur atau biaya untuk pembangunan infrastruktur tetap (= 0), maka prediksi jumlah masyarakat miskin akan berjumlah 119,422 jiwa.
6. korelasi hubungan antara pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur terhadap kemiskinan merupakan korelasi negative. Dimana dengan nilai -0.517 merupakan nilai korelasi dengan interpretasi memiliki hubungan atau keterkaitan sedang, namun dikarenakan hasil analisis menyataan bahwa korelasi negative maka hubungan kedua variable ini tidak searah atau terbalik.
7. Apabila biaya untuk pembangunan infrastruktur ditingkatkan (+), maka jumlah masyarakat miskin akan berkurang (-). Begitupun sebaliknya
8. Apabila biaya untuk pembangunan di kurangi (-) maka jumlah masyarakat miskin akan bertambah (+)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Adapun saran-saran yang diusulkan untuk pemerintah Kota Tangerang dari hasil penelitian ini adalah:

1. Pembangunan infrastruktur di Kota Tangerang harus di tingkatkan sebagai bentuk pelayanan pemerintah serta penggerakan roda perekonomian masyarakat
2. Pembangunan infrastruktur yang berkaitan langsung dengan masyarakat miskin menjadi prioritas utama.
3. Melakukan pendataan kembali mengenai jumlah masyarakat miskin guna menghasilkan data yang update.
4. Melakukan kegiatan lainnya yang bersifat pro kemiskinan

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik (BPS). (2016). Kota Tangerang Dalam Angka 2016. Kota Tangerang
[2] Catur Lestari, Fatin. (2008). Kemiskinan Dan Pengeluaran Pemerintah Untuk Infrastruktur. Skripsi Pada Institut Pertanian Bogor, Bogor.
[3] Purnomo, H (2009). Dampak Pembangunan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Bekasi. Bogor: Skripsi pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
[4] D.A. Lind; W.G. Marchal; S.A. Wathen [MGH]. (2014). Teknik-Teknik Statistika dalam Bisnis dan Ekonomi. Salemba.
[5] Iqbal Hasan, M (2008). Pokok-Pokok Materi Statistika. Jakarta: Bumi Putra.
[6] Firdaus M, Harmini dan M.A Farid. (2011). Aplikasi Metode Kuantitatif. Bogor: IPB Press.
[7] Bappeda Kota Tangerang. (2014). APBD Kota Tangerang 2010-2014. Kota Tangerang
[8] Bappeda Kota Tangerang. (2013) Data Kemiskinan Kota Tangerang 2010-2013. Kota Tangerang
[9] Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Tangerang, Analisa Kemiskinan Kota Tangerang 2014. Tangerang
[10] Fatimah. (2015). Peranan Pemerintah Daerah di Provinsi Jawa Timur dalam Peningkatan Kualitas Penduduk. Jember: Skripsi Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Jember
[11] T.W Krismanti (2009). Analisis Pengaruh Infrastruktur Ekonomi Dan Sosial Terhadap Produktivitas Ekonomi di Indonesia. Bogor: Skripsi pada Departemen Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Manajemen Institut Pertanian Bogor
[12] Misdawita dan A. Arini Putri Sari (2013). Analisis Dampak Pengeluaran Pemerintah di Bidang Pendidikan, Kesehatan, dan Pengeluaran Subsidi Terhadap Kemiskinan di Indonesia. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik: Vol. 4 No. 2

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

INVENTARISASI LEMBAGA KEUANGAN LOKAL DALAM MENDUKUNG PEMBANGUNAN PERTANIAN BERKELANJUTAN DI KECAMATAN PAUH KOTA PADANG

Rika Hariance[1)], Zednita Azriani[1)], Cindy Paloma[1)], Yuerlita[1)] dan M Refdinal [1)]

[1)]Dosen Agribisnis Universitas Andalas

Email: rikahariance@gmail.com

Naskah diterima : 24 Februari 2017 Naskah direvisi 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 7 Maret 2017

ABSTRAK

Lembaga keuangan lokal merupakan lembaga penunjang permodalan di sektor pertanian yang berbasis pada penguatan modal sosial masyarakatnya.Lembaga keuangan lokal mengalami perkembangan pertumbuhan di Kota Padang dari tahun ke tahun. Penelitian ini bertujuan untuk menginventarisasi lembaga keuangan lokal dan menganalisa akses petani terhadap lembaga keuangan tersebut yang dilaksanakan di Kecamatan Pauh Kota Padang dengan metode eksplorasi. Fokus pengamatan pada profil petani dan rumah tangga petani pelaku (produsen, petani pengolah hasil pertanian, petani pemasar hasil pertanian, serta kombinasinya). Profil Lembaga Keuangan Lokal (LKMA, Koperasi, BMT, Arisan, Julo-julo dan lainnya), serta akses terhadap lembaga keuangan lokal (tekonologi dan informasi, mekanisme, sarana dan prasarana). Analisa yang digunakan analisa deskriptif kualitatif.Hasil penelitian menunjukkan sebanyak 47% responden tidak memanfaatkan jasa lembaga keuangan apapun untuk kegiatan usahatani mereka.Sementara itu, 27% menyatakan julo-julo merupakan lembaga keuangan yang mereka gunakan untuk membantu permodalan.Julo-julo merupakan sistem keuangan yang dibangun atas dasar silaturahmi dan kekeluargaan dalam sebuah kelompok.Lembaga keuangan ini merupakan sebuah kearifan lokal yang hingga saat ini masih melembaga dalam masyarakat, kepercayaan dan kejujuran serta rasa tolong menolong diantara sesama anggota kelompok menjadi dasar keberlanjutan lembaga keuangan ini. Sementara itu lembaga keuangan lainnya yang juga digunakan oleh petani responden adalah BPTN Syariah (3%), Koperasi (3%), LKMA (10%), LPM (3%) dan BPTN (3%) dan sebanyak 4% tidak menggunakan jasa lembaga keuangan untuk permodalan.Bentuk jasa yang dimanfaatkan oleh responden adalah pinjaman, tabungan dan kredit.

Kata kunci: *Lembaga Keuangan Lokal, Akses Kredit, Pembangunan Pertanian*

PENDAHULUAN

Kemiskinan merupakan isu yang sangat penting untuk ditanggulangi dalam pembangunan pertanian.Dimana kemiskinan erat kaitannya dengan kesejahteraan hidup masyarakat. Kemiskinan juga menjadi salah satu fokus dari pembentukan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yaitu berkurangnya kemiskinan dan kesenjangan sosial ekonomi selain dari tercapainya suatu kawasan yang stabil, makmur, berdaya saing tinggi, dengan pertumbuhan ekonomi yang berimbang. Berdasarkan data BPS [1], Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada tahun 2009 mencapai 14.2 persen, dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2013 menjadi 11,4 persen, dari tahun ke tahun persentase jumlah penduduk miskin rata-rata berkurang sebesar 1 persen tiap tahunnya. Hal ini disebabkan karena inflasi yang cenderung rendah dan upah rata-rata buruh tani naik sebesar 4 persen. Jika dibandingkan, persentase kemiskinan di Sumatera Barat masih berada dibawah persentase kemiskinan Indonesia, namun angkanya masih tinggi berkisar rata-rata diangka 8 persen. Kemiskinan di Sumatera Barat pada tahun 2013 adalah 8.14 persen yang masih terkonsentrasi di pedesaan (2/3) tepatnya 69,41 persen [1].

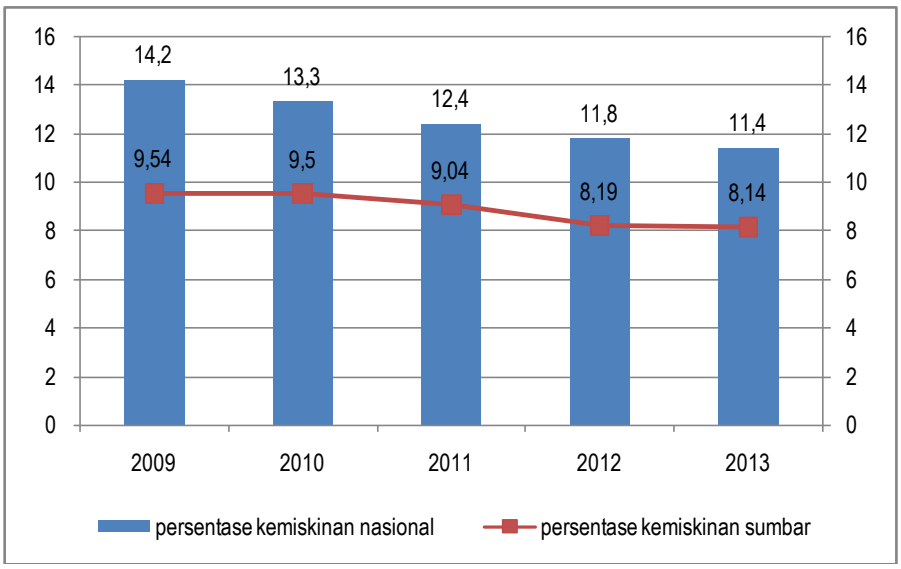

Gambar 1. Perkembangan Kemiskinan di Indonesia dan Sumatera Barat tahun 2009-2013
Sumber : Badan Pusat Statistik, 2014

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka kemiskinan di Indonesia termasuk di Sumatera Barat. Salah satunya melalui akses terhadap permodalan di sektor pertanian, karena sektor pertanian merupakan sektor yang paling besar menyerap tenaga kerja di Sumatera Barat. Gambar 2 menunjukkan bahwa masyarakat di Sumatera Barat sebanyak 41 persen bekerja di sektor pertanian, sedangkan untuk sektor lainnya yang terbanyak adalah sektor perdagangan sebesar 21 persen, jasa 17 persen, industri 8 persen, dan sektor lainnya 13 persen.

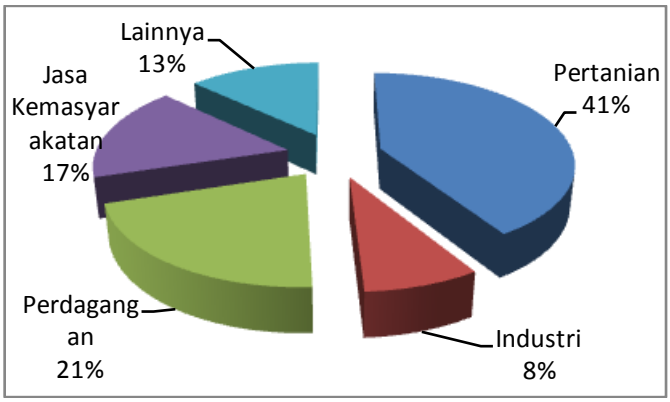

Gambar 2. Persentase Tenaga Kerja Persektor Di Sumatera Barat Tahun 2013
Sumber : BPS Sumbar, 2013 (data diolah)

Sebagian besar masyarakat miskin yang berada di pedesaan merupakan petani berskala kecil, pada umumnya pendapatan usaha tani habis untuk konsumsi, dan sangat membutuhkan dana pinjaman untuk memulai usaha tani pada setiap musim tanam. Petani butuh kredit non-produktif untuk keperluan-keperluan seperti *consumption smoothing*, berobat, pendidikan, kecelakaan, kehilangan, dll. Jadi, petani membutuhkan lembaga keuangan yang bisa diakses kapan saja untuk keperluan-keperluan produktif mau pun non-produktif. LKM sesuai untuk konteks desa karena LKM secara konseptual berbeda dengan LK formal seperti bank komersial yang kaku dan sulit diakses. Tetapi LKM juga harus bisa lebih unggul dari LK informal. Oleh karena itu, pendirian lembaga keuangan mikro desa sangat diperlukan. Pemerintah pusat dan daerah di Indonesia sudah mulai mengupayakan pengembangan LKMD setidaknya sejak satu dekade terakhir, seperti Lumbung Pitih Nagari, Kredit Mikro Nagari, Baitul Maal wat Tamwil (BMT) dan Lembaga Keuangan Mikro-Agribisnis (LKM-A). Sejumlah besar dana sudah dikucurkan untuk berbagai program tersebut.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 1. Jumlah Dana Program Pembiayaan Pemerintah yang telah disalurkan

Jenis program	Tahun Pembentukan	Jumlah Kucuran Dana Awal
Lumbung Pitih Nagari	1972	Rp. 500.000,-
Baitul Maal wat Tamwil	1995	-
Lembaga Keuangan Mikro Agribisnis	2008	Rp. 100.000.000,-
Kredit Mikro Nagari	2007	Rp. 300.000.000

Sumber: Data diolah

Pemberian dana dari pemerintah pada tahap awal merupakan modal LKMD untuk dapat beroperasional. Perbedaan pemberian modal awal bagi masing-masing LKMD tersebut menunjukkan perhatian pemerintah dari tahun ke tahun untuk sektor pertanian semakin besar, hal ini terlihat pada kucuran dana pada LKM-A yang bernilai Rp. 100.000.000,- di awalnya. Dana ini ditujukan oleh pemerintah untuk menstimulus perkembangan LKMD kedepannya, agar lebih mandiri dan mampu untuk mengembangkan modal yang telah dimiliki melalui jasa tabungan maupun pinjaman yang dilakukan.

Pertanyaan utama yang ingin dijawab dari penelitian ini adalah dari lembaga pembiayaan yang ada, lembaga manakah yang berpotensi untuk tetap berlanjut dalam melayani petani. Secara umum, tujuan penelitian adalah menilai keberlanjutan LKMD sebagai pendukung pendanaan warga miskin secara mapan di pedesaan di Kecamatan Pauh. Secara lebih terinci, tujuan penelitian ini adalah: menginvetaris lembaga keuangan lokal yang ada di Kecamatan Pauh dan menganalisis akses petani serta respon mereka terhadap keberlanjutan Lembaga keuangan lokal di Kecamatan Pauh.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian eksplorasi (*exploratory research*) [2]. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kecamatan Pauh Kota Padang. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan dengan sengaja (*purposive*), dengan alasan: (a) Kecamatan Pauh merupakan kecamatan terdekat yang berada di sekitar kampus Universitas Andalas pada umumnya dan Fakultas Pertanian pada khususnya, serta (b) Kecamatan Pauh termasuk salah satu kawasan potensial untuk dikembangkan menjadi kawasan pertanian berdasarkan hasil kajian Identifikasi/Pemataan dan Kajian Potensi Keluarga Miskin dan Lingkungan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Padang tahun 2011.

Data yang dikumpulkan berbentuk data primer dan data sekunder yang mencakup data kuantitatif dan data kualitatif. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah Teknik Wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan (*quisioner*). Selanjutnya teknik wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan terkait pengumpulan informasi kualitatif dengan menggunakan panduan wawancara mendalam (*in-depth interview guide*) terhadap para informan kunci (*key informan*) melalui tatap muka (wawancara langsung).

Adapun yang menjadi sumber informasi utama penelitian untuk data primer adalah rumah tangga (petani/peternak/petani ikan/petani pekebun/pelaku UKM pengolahan hasil pertanian) yang akan didalami dengan menggunakan kuesioner atau panduan wawancara terstruktur. Selain itu dilakukan juga pengumpulan data primer terhadap sumber informasi penunjang, yakni: pengurus kelompok tani/gapoktan, pengurus LKMA, penyuluh pertanian, Kepala Unit Pengelola Teknis (UPT) Pertanian Kecamatan Pauh, Lurah, tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), serta beberapa informan kunci lainnya. Dari data primer dan sekunder dikumpulkan di lapangan sesuai tujuan penelitian, analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif.

ISBN : 978-602-73463-1-4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran umum pertanian di Kecamatan Pauh

Tabel 2. Jenis dan Penggunaan Lahan di Kecamatan Pauh

Jenis Penggunaan Lahan	Luas lahan (ha)
1. sawah	1060,25
2. pekarangan	205,00
3. Tegalan	464,00
4. Ladang	219,00
5. Hutan Rakyat	1.896,00
6. Hutan Lindung	10.103,00
7. Padang Rumput	-
8. Sementara tidak diusahakan	-
9. lain -lain	377,00
Jumlah	14.324,25

Sumber: Kecamatan Pauh dalam Angka, 2013

Jenis lahan kering yang ada di Kecamatan Pauh adalah berupa tegal/kebun, ladang/huma, hutan rakyat, pekarangan, hutan negara, dan lainnya. Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa lahan paling banyak digunakan untuk aktifitas masyarakat setelah hutan negara adalah pada hutan rakyat yaitu sebesar 1.896 ha, kemudian tegal dan kebun sebanyak 464 ha.

Berdasarkan data Kecamatan Pauh Dalam Angka tahun 2013 diperoleh informasi bahwa jenis tanaman pangan dan hortikultura yang diusahakan di Kecamatan Pauh adalah padi sawah, jagung, bawang merah, kacang panjang, cabe merah, terung, ketimun, kangkung, bayam dan lainnya. Tanaman buah-buahan yang diusahakan di Kecamatan Pauh adalah pisang, durian, duku, sawo, jeruk, pepayam rambutan, alpukat, mangga, dan bengkoang.

Gambaran Umum Lembaga Keuangan di Kecamatan Pauh

Pada tahun 2012 Kecamatan Pauh tercacat memiliki 21 koperasi aktif dan 4 unit koperasi tidak aktif. Dari sumber Dinas Koperasi dan PKM Kota Padang tercatat jumlah anggota koperasi di Kecamatan Pauh selama tahun 2012 yakni 1.295 orang (Statistik Kecamatan Pauh, 2013). Adapun data sebarannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 3. Jumlah Koperasi di Kecamatan Kota Pauh

Jenis	Jumlah
1. Koperasi aktif	21
2. Koperasi tidak aktif	4
Jumlah	**25**

Sumber: Kecamatan Pauh dalam Angka, 201

Dengan jumlah koperasi aktif yang lebih banyak dari pada yang tidak aktif, ini merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan oleh pemerintahan Kecamatan Pauh untuk melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan. Pemerintah Kecamatan Pauh dapat mendorong lembaga keuangan ini melalui kegiatan pelatihan bagi pengurus maupun anggota, menyediakan akses modal dan fasilitas dengan baik serta mencarikan mitra kerjasama agar lembaga ini dapat berkembang dengan baik.

Profil Responden

Tabel 4. Karakteristik Petani Responden di Kec. Pauh

No	Kategori	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Umur		
	- 15 – 30 Tahun	3	10
	- 31 – 50 Tahun	16	53.33

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

	- 50 Tahun	11	36,66
2	Pendidikan		
	- SD	11	36,66
	- SLTP	9	30
	- SLTA	10	33,33
3	Jumlah Tanggungan		
	- 1 – 2 Orang	15	50
	- 3 – 4 Orang	10	33,33
	- > 5 Orang	5	16,66
4	Luas Lahan		
	- < 0.25 Ha	8	26,66
	- 0,3 – 1 Ha	15	50
	- > 1 Ha	7	23,33

Dari tabel tersebut dapat digambarkan bahwa petani responden berusia 31 sampai 50 tahun memiliki jumlah persentase 53,33%. Usia tersebut merupakan usia produktif. Tingkat pendidikan tesebar merata antara SD, SLTP dan SLTA, tidak ada responden yang memiliki latar belakang pendidikan perguruan tinggi, hal ini mempengaruhi kemampuannya dalam mengelola usahataninya. Adapun luas lahan yang dimiliki oleh petani responden yang paling banyak adalah antara 0,3 Ha sampai 1 Ha, hal ini sesuai dengan ciri pertanian subsisten yang luas lahan usahataninya tidak lebih besar dari 1 Ha. Hal ini juga mempengaruhi petani dalam mengambil keputusan melakukan usahatani. Begitu juga dengan jumlah tanggungan dalam keluarga, semakin banyak jumlah tanggungan akan membuat petani semakin giat berusaha, jumlah tanggungan petani responden yang paling banyak adalah antara 1 sampai 2 orang yaitu sebanyak 33,33%.

Tabel 5.Pola Usahatani Petani Responden di Kec. Pauh

No	Komoditi	Jumlah (orang)	Produksi
1	Padi	25	18.375 Kg
2	Kacang tanah	1	1.050 Kg
3	Jagung	4	3.200 Tongkol
4	Ubi Kayu	6	3.995 Kg
5	Terong	1	120 Kg
6	Bengkuang	1	480 Kg
7	Karet	1	100 Kg
8	Durian	2	2.400 Buah
9	Manggis	1	4.500 Kg

Kecamatan Pauh merupakan daerah dengan demografi yang baik untuk pertanian, wilayah ini cocok untuk ditanami dengan tanaman pangan, palawija serta tanaman perkebunan lainnya. seperti yang terlihat dalam tabel diatas, petani responden paling banyak mengusahakan tanaman padi yaitu sebanyak 25 orang, kemudian diikuti tanaman palajiwa lainnya seperti ubi kayu dan jagung sebanyak 6 orang dan 4 orang, tanaman hortikultura berupa terong, bengkuang dan kacang tanah sebanyak masing-masingnya 1 orang, dan tanaman perkebunan berupa durian, karet dan manggis dengan jumlah petani sebanyak 2 orang, 1 orang dan 1 orang. Adapun status kepemilikan atas lahan yang ditanami oleh patani responden tersebut adalah Milik sendiri sebanyak 63,33%, sewa sebanyak 0% dan bagi hasil sebanyak 36,66%, seperti yang terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 6. Status kepemilikan lahan petani Responden di Kecamatan Pauh

No	Status	Jumlah (orang)	Persentase (%)
1	Milik sendiri	19	63,33
2	Sewa	0	0
3	Bagi hasil	11	36,66
	Total	30	100

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat kita lihat bahwa petani dalam mengelola usahataninya tidak ada yang melakukan penyewaan atas lahan, petani responden melakukan pengelolaan usahatani pada lahan miliknya sendiri atau lahan yang dipinjam dengan sistem bagi hasil, hal ini sesuai dengan kriteria pada petani dengan pola usahatani subsisten. Dalam pengelolaan usahatani, petani tidak terlepas dari masalah seperti iklim,

ISBN : 978-602-73463-1-4

hama dan penyakit tanaman serta masalah permodalan. Petani responden di Kecamatan pauh juga mengalami persoalan yang serupa, seperti yang tergambar dalam tabel dibawah ni:

Tabel 7. Masalah yang dimiliki petani responden di Kec.Pauh dalam mengelola usahataninya

No	Masalah	Jumlah (orang)
1	Iklim (Cuaca)	26
2	Sulitnya Mendapatkan benih berkualitas	2
3	Kesulitan Mendapatkan Pupuk	7
4	Kesulitan Mendapatkan Pestisida	8
5	Tenaga Kerja	8
6	Air Irigasi	12
7	Hama dan Penyakit Tanaman	28
8	Modal	21

Dari informasi diatas dapat dilihat bahwa sebanyak 28 orang terkendala pada hama dan penyakit tanaman, 26 orang terkendala pada kondisi iklim dan 21 orang petani responden menyatakan memiliki kendala permodalan. Kendala dalam kegiatan usahatani akan mengakibatkan hasil yang diperoleh tidak maksimal. Kendala petani dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman tentu dapat diatasi salah satunya dengan melakukan penyuluhan kepada petani tentang pengendalian hama dan penyakit dengan menggunakan agen hayati, pestisida nabati ataupun dengan menggunakan pestisida yang telah diproduksi dan tersedia di toko sarana produksi pertanian. Kemajuan tekhnologi yang dihasilkan melalui riset-riset terkait dengan hama dan penyakit tentunya juga diharapkan dapat menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh petani dalam mengendalikan hama dan penyakit.

Selain itu kendala lainnya berupa kesulitan mendapatkan benih berkualitas, pupuk, dan pestisida serta tenaga kerja akan dapat diatasi salah satunya dengan tersedianya modal yang cukup dalam berusahatani. Pengelolaan usahatani yang baik dan intensif salah satunya tentu ditopang oelh ketersediaan modal dalam usahatani sebagai salah satu unsur pokok. Sebanyak 21 orang petani responden menyatakan bahwa mereka mengalami kesulitan dalam memperoleh modal. Maka disini peran lembaga keuangan sangat dibutuhkan untuk membantu mereka dalam memperoleh modal. Namun lembaga keungan tersebut tentunya diharapkan merupakan lembaga keuangan yang tidak memiliki persyaratan yang rumit dan bunga yang tinggi. Karena rata-rata usahatani yang dikelola petani di Kecamatan Pauh hanya diatas lahan yang kecil dari 1 Ha.

Lembaga Keuangan yang Dimanfaatkan Oleh Petani Responden di Kecamatan Pauh

Berdasarkan kepada hasil penelitian dalam mengelola usahataninya petani menggunakan layanan lembaga keuangan yang ada dibawah ini:

Tabel 8. Lembaga keuangan yang dimanfaarkan petani responden di Kecamatan Pauh

No	Nama Lembaga	Jumlah (Orang)
1	Btn Syariah	1
2	Julo – Julo	8
3	Koperasi	1
4	Lkm-A	3
5	Lpm	1
6	Bank Tpn	1
7	Arisan Kwt	1
8	Tidak Memanfaatkan Lk	14
Total		30

Julo-julo merupakan sistem keuangan yang dibangun atas dasar silaturahmi dan kekeluargaan dalam sebuah kelompok. Lembaga keuangan ini merupakan sebuah kearifan lokal yang hingga saat ini masih melembaga secara lokal dalam masyarakat, kepercayaan dan kejujuran serta rasa tolong menolong diantara sesama anggota kelompok menjadi dasar keberlanjutan lembaga keuangan ini. Silaturahmi dan sifat kekeluargaan merupakan bagian dari bagian modal sosial yang ada dalam masyarakat. Karena menurut

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Mardikanto [3], unsur-unsur modal sosial dalam masyarakat adalah berupa hubungan sosial (perkumpulan, jaringan, dan kepemimpinan sosial) serta nilai atau norma efektif (toleransi, simpati, kepercayaan dan kejujuran). Julo-julo merupakan kegiatan berkumpul nya masyarakat (hubungan sosial), dimana dalam kumpulan masyarakat tersebut ditunjuk satu orang "*kapalo julo-julo*" yang dipercaya sebagai pemimpin (ketua) yang akan mengatur jalannya julo-julo semua anggota. Hal ini menunjukkan bahwa julo-julo dibangun atas dasar modal sosial masyarakat anggotanya, sehingga keberadaan lembaga ini masih tetap menjadi pilihan masyarakat dalam menyelesaikan persoalan keuangannya. Sementara itu lembaga keuangan lainnya yang digunakan oleh petani responden adalah BTBN syariah, Koperasi LKMA, LPM dan Bank TPN. Lembaga tersebut dimanfaatkan oleh petani responden untuk aktivitas sebagai berikut :

Akses petani terhadap lembaga keuangan lokal di Kecamatan Pauh

Adapun bentuk akses petani terhadap lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Pauh dapat dilihat dari bentuk jasa keuangan yang dimanfaatkan oleh petani dari lembaga keuangan tersebut. Bentuk jasa keuangan tersebut dapat dilihat pada tabel 9 dibawah ini.

Tabel 9.Bentuk Jasa Keuangan yang dimanfaatkan Petani Responden di Kec. Pauh

No	Bentuk Jasa	Jumlah
1	Pinjaman/Kredit	9
2	Tabungan	6
3	Tidak Memanfaatkan	15
TOTAL		30

Dari data diatas dapat dilihat bahwa 15 orang dari 30 responden tidak memanfaatkan jasa keuangan yang ada dari lembaga keuangan yang ada di Kecamatan Pauh. 9 orang lainnya memanfaatkan jasa keuangan berupa pinjaman, dan 6 orang memanfaatkan jasa tabungan.

Respon petani terhadap keberlanjutan lembaga keuangan lokal di Kecamatan Pauh

Respon petani terhadap keberlajutan lembaga keuangan lokal di Kecamatan Pauh diukur dengan menilai lembaga keuangan mana yang diharapkan tetap bertahan sebagai lembaga penyedia modal. Adapun lembaga keuangan yang diharapkan oleh petani responden sebagai lembaga keuangan lokal untuk membantu mereka dalam melaksanakan usahatani adalah sebagai berikut :

Tabel 10.Lembaga Keuangan yang diharapkan Ada oleh Petani Responden di Kecamatan Pauh

No	Lembaga Yang Dibutuhkan	Jumlah (Orang)
1	Koperasi	2
2	Julo – Julo	5
3	Koperasi Dan Julo-Julo	1
4	Tidak Memberi Jawaban	22
Total		30

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa lembaga keuangan yang diharapkan oleh petani adalah Julo-julo, koperasi atau kombinasi keduanya. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga keuangan yang berlandaskan kepada kesamaan visi anggota, silaturahmi, dan rasa tolong menolong atau gotong royong masih dipercayai oleh petani sebagai lembaga yang mampu menyelesaikan persoalan permodalan dalam usahatani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Responden menggunakan lembaga julo-julo sebagai lembaga keuangan. Julo-julo merupakan sistem keuangan yang dibangun atas dasar silaturahmi dan kekeluargaan dalam sebuah kelompok. Lembaga keuangan ini merupakan sebuah kearifan lokal yang hingga saat ini masih melembaga secara lokal dalam masyarakat, kepercayaan dan kejujuran serta rasa tolong menolong diantara sesama anggota kelompok menjadi dasar keberlanjutan lembaga keuangan ini. Sementara itu lembaga keuangan lainnya yang digunakan oleh petani responden adalah BTBN syariah, Koperasi, LKMA, LPM dan Bank TPN. Bentuk jasa yang

dimanfaatkan oleh petani responden adalah pinjaman, tabungan dan kredit. Sementara itu lembaga yang diharapkan tetap ada adalah julo-julo, koperasi atau kombinasi koperasi dan julo-julo. Maka disarankan kepada pemerintah Kecamatan Pauh untuk dapat melakukan kegiatan pemberdayaan dan pengembangan kepada lembaga keuangan lokal yang ditopang dengan modal sosial anggotanya, sehingga persoalan permodalan dalam usahatani dapat diatasi guna mencapai kesejahteraan bagi masyarakat petani di pedesaan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] BPS Sumbar. 2014. Sumatera Barat Dalam Angka. Padang
[2] Mardikanto, dkk. 2014. Pembangunan Berbasis Masyarakat. Alfabeta. Bandung
[3] Neuman, William Lawrence. 2015. Basics Of Social Research Qualitative and Quantitative Approach. Pearson. Toronto

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KAJIAN PERKEMBANGAN PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA AGRIBISNIS PERDESAAN (PUAP) DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

Siti Abir Wulandari[1)]

[1]Fakultas Pertanian/Agribisnis, Universitas Batanghari

Email : abir_wulandari@yahoo.com

Naskah diterima : 18 November 2016 Naskah direvisi 27 Maret 2017 Disetujui terbit : 7 Maret 2017

ABSTRAK

Saat ini pemerintah telah menyalurkan Bantuan Langsung Masyarakat Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) yang selanjutnya disingkat BLM PUAP. BLM PUAP adalah dana bantuan modal untuk gapoktan (gabungan kelompok tani) guna pengembangan usaha agribisnis di perdesaan. Provinsi Jambi merupakan salah satu provinsi yang mendapatkan program ini dimana pelaksanaannya masih berlangsung sampai tahun 2015.Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu kabupaten yang menerima bantuan tersebut sejak tahun 2008hingga tahun 2012. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan rata-rata penyaluran pertahun dana program PUAP dari tahun 2008 sampai tahun 2012 dan mengetahui gambaran pengembangan rata-rata dana program PUAP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kajian dalam penelitian ini hanya menggunakan data sekunder tentang dropping dana PUAP pertahun dan rata-rata penyaluran dana PUAP pertahun. Data sekunder dianalisis secara deskriptif yang disajikan dalam betuk tabel dan grafik. Hasil penelitian menunjukkandampak program Pemberdayaan Usaha Agribisnis Pedesaan memberikan efek positif pada usaha rumah tangga maupun usaha di sektor pertanian. Efek positif ini terlihat dengan adanya penambahan dana usaha yang diajukan oleh kelompok tani berbunga yang sangat kecil, dimana pengembalian dana usaha tersebut dikembalikan sesuai kemampuan yang ditentukan melalui kesepakatan bersama.Perkembangan rata-rata penyaluran pertahun dana program PUAP dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi dan cenderung menurun. Rata-rata pengembangan dana PUAP adalah sebesar Rp. 22,468,764,- dengan rata-rata pengembangan dana PUAP terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 33,284,925,- dan rata-rata pengembangan dana PUAP terendah pada tahun 2012 sebesar Rp5,820,931,- .Berdasarkan data tersebut maka dapat dikatakan bahwa dana PUAP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur belum berkembang dengan baik. Hal ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih dari pemerintah untuk mencari kendala yang masih ada.Gambaran pengembangan rata-rata dana program PUAP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi dan juga menunjukkan kecendrungan menurun.

***Kata Kunci** : Program Pendanaan, PUAP, Petani .*

PENDAHULUAN

Sektor ekonomi terbesar dan terpenting dalam perekonomian nasional Indonesia adalah sektor pertanian. Sektor agribisnis menyerap lebih dari 75% angkatan kerja nasional termasuk di dalamnya 21,3 juta unit usaha skala kecil berupa usaha rumah tangga, maka sebesar 80% dari jumlah penduduk nasional yang menggantungkan hidupnya pada sektor agribisnis. Peranan sektor agribisnis yang demikian besar dalam perekonomian nasional memiliki implikasi penting dalam pembangunan ekonomi nasional ke depan.

Indonesia adalah negara agraris, sehingga semua masyarakat Indonesia tahu dan sadar bahwa bangsa Indonesia mempunyai potensi besar dalam sektor pertanian. Hal ini dapat dilihat dari mata pencaharian utama masyarakat Indonesia adalah bertani.Sehingga dapat dikatakan bahwa sebagian besar masyarakat

Indonesia menggantungkan hidupnya dari sektor agraris baik untuk bercocok tanam, beternak, ataupun yang lainnya.

Masalah kemiskinan berhubungan erat dengan permasalahan pertanian di Indonesia pada umumnya.Kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk memperahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat [1]. Masalah paling dasar bagi sebagian besar petani Indonesia adalah masalah keterbatasan modal yang dimiliki oleh para petani,sedangkan modal adalah unsur yang esensial dalam mendukung peningkatan produksi dan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Kekurangan modal ini akan sangat membatasi gerak aktifitas usahanya yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan. Permasalahan yang dihadapi dalam permodalan pertanian berkaitan langsung dengan kelembagaan selama ini, yaitu lemahnya organisasi tani, sistem dan prosedur penyaluran kredit yang rumit, birokratis dan kurang memperhatikan kondisi lingkungan sosial budaya perdesaan, sehingga sulit menyentuh kepentingan petani yang sebenarnya.

Salah satu program kebijakan pembangunan pertanian dalam rangka pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan mewujudkan kesejahteraan petani dan pedesaan adalah program PUAP. Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) merupakan program nasional dalam rangka pengentasan kemiskinan pada sektor pertanianyang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian Republik Indonesia sejaktahun 2008. Program ini berupa pemberian dana bantuan penguatan modal kepada petani melalui gapoktan (gabungan kelompok tani). Petani diharapkan memanfaatkan danatersebut untuk mengembangkan agribisnis mereka untuk meningkatkanpendapatan petani sehingga petani keluar dari kemiskinan.

Provinsi Jambi merupakan salah satu propinsi yang mendapatkan program ini dimana pelaksanaannya masih berlangsung sampai tahun 2015. Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salahsatu kabupaten yang menerima bantuan tersebut sejak tahun 2008, hingga tahun 2012 sebanyak 87 gapoktan telah menerimanya.untuk itu perlu dikaji bagaimana perkembangan program PUAP yang telah berjalan selama ini. Kajian dalam makalah ini membahas tentang Perkembangan Program Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

PERUMUSAN MASALAH

Salah satu komponen yang harus ada untuk menyatakan majunya struktur pembangunan pedesaan adalah lembaga pengkreditan, selain itu juga harus ada pasar dan lembaga penyuluhan. Kredit selalu dibutuhkan dalam pertanian.Badan kredit pedesaan merupakan suatu lembaga yang dibentuk atau dibina oleh pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi masyarakat pedesaan, dengan pemberian kredit untuk menambah produktifitas mereka dan menciptakan tambahan kesempatan kerja di pedesaan.Kredit yang diberikan harus mudah prosedurnya dan selalu dibandingkan dengan kredit informal, lebih murah biayanya, tetapi penggunaannya harus terarah untuk kegiatan- kegiatan yang produktif.

Dari uraian diatas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perkembanganrata-rata penyaluran pertahun dana program PUAP dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana gambaran pengembangan rata-rata dana program PUAP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui :

1. perkembangan rata-rata penyaluran pertahun dana program PUAP dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?
2. Bagaimana gambaran pengembangan rata-rata dana program PUAP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur?

METODE PENELITIAN

Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Propinsi Jambi. Pemilihan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini dilakukan karena Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapatkan dana PUAP selama 5 tahun berturut mulai dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2012. Penerimaan dana PUAP selama lima tahun berturut-turut memberikan gambaran yang lebih jelas tentang bagaimana perkembangan penyaluran dana dan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

pengembangan program PUAP. Oleh karena itu, fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengetahui perkembanganpenyaluran dana dan pengembangan program PUAP di daerah Tanjung Jabung Timur.

Metode Penarikan Sampel

Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur, populasi dari penelitian ini adalah seluruh gapoktan pengelola dana bergulir PUAP yang menerima bantuan dana PUAP tahun 2012 dengan jumlah populasi 19 unit gapoktan yang tersebar pada 6 kecamatan. Pengambilan sampel dengan menggunakan teknik *cluster sampling*. Pada penelitian iniklaster yang dimaksud adalahseluruh gapoktan pengelola dana bergulir PUAP yang menerima bantuan dana PUAP tahun 2012 dengan jumlah populasi 19 unit gapoktan yang tersebar pada 6 kecamatan. Pada masing-masing kecamatan diambil sampel secara proporsionaldengan *Proportional Allocation* sebagai berikut :

$$\boldsymbol{ni = \frac{Ni}{N}\ x\ n}$$

Dimana :
ni : Ukuran sampel pada kelompok tani ke-i
Ni : Ukuran populasi ada kelompok tani ke-i
N : Populasi pada seluruh kecamatan sampel
n : Jumlah sampel yang ditetapkan

Untuk mendapatkan sampel penerima dana bergulir, digunakan teknik *simple random sampling.*

Metode Analisis Data

Penelitian ini dilakukan dengan metode survey dan data yang telah diperoleh dilapangan diidentifikasi, diolah dan dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu dengan cara mendeskripsikan fokus kajian yang telah diteliti sehingga dapat menjelaskan menjelaskan kondisi perkembanganpenyaluran dan pengembangan dana program PUAP. Hasil analisis pelaksanaan program PUAP dibandingkan dengan pedoman/petunjuk, sehingga dapat diketahui apakah pelaksanaan program tersebut telah sesuai dengan ketentuan atau tidak. Untuk mengevaluasi bagaimana pelaksanaan program PUAP dan penyaluran dana PUAP digunakan matrik analisis kesesuaian. Hasil penelitian ini menunjukkan berapa persen dari masing-masing elemen evaluasi yang dilaksanakan sesuai ketentuan.

Konsepsi Pengukuran dan Variabel

1. Perkembangan penyaluran dana adalah gambaran besarnya nominal rata-rata realisasi dana PUAP yang disalurkan pada gapoktan.
2. Pengembangan dana PUAP adalah besarnya tambahan nilai dari nilai nominal dana PUAP yang direalisasikan.
3. Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan yang selanjutnya disingkat PUAP adalah program bantuan modal usaha Gabungan Kelompok tani dalam menumbuhkembangkan usaha agribisnis sesuai dengan potensi pertanian desa sasaran.
4. Petani adalah perorangan warga negara Indonesia beserta keluarganya yang mengelola usaha di bidang pertanian yang meliputi usaha hulu, usaha tani, agroindustri, pemasaran dan jasa penunjang.
5. Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Poktan adalah kumpulan petani/peternak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan,kesamaan kondisi lingkungan (sosial, ekonomi, sumber daya) dankeakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
6. Gabungan Kelompok tani yang selanjutnya disingkat Gapoktan adalah kumpulan beberapa Poktan bekerjasama untukmeningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha yang menerima dana BLM PUAP
7. Rencana Usaha Bersama yang selanjutnya disingkat RUB adalah rencana usaha untuk pengembangan agribisnis yang disusun oleh Gapoktan berdasarkan kelayakan usaha dan potensi desa.
8. Penyelia Mitra Tani yang selanjutnya disingkat PMT adalah individu yang memiliki kemampuan dan pengetahuan di bidang keuangan mikro yang direkrut oleh Kementerian Pertanian untuk melakukan sosialisasi, advokasi, dan supervisi tentang pengetahuan PUAP kepada pengurus Gapoktan dalam pengelolaan dana BLM PUAP.

ISBN : 978-602-73463-1-4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Rata-Rata Penyaluran Per Tahun Dana Program PUAP

Permasalahan mendasar yang dihadapi petani adalah kurangnya akses sumber permodalan, sehingga PUAP menjadi program yang tepat saat ini. PUAP sebagai bagian dari pelaksanaan program PNPM-Mandiri melalui bantuan modal usaha gapoktan memiliki salah satu tujuan yaitu untuk meningkatkan kemampuan pengurus gapoktan dalam operasionalisasinyadisamping itu salah satu sasarannya yaitu berkembangnya gapoktan yang dimiliki dan dikelola oleh petani untuk menjadi kelembagaan ekonomi. Dalam hal ini indikator keberhasilan *output* berupa tersalurkannya dana BLM PUAP kepada sasaran dan indikator keberhasilan *outcome* berupa meningkatnya kemampuan gapoktan dalam memfasilitasi dan mengelola bantuan modal usaha untuk petani anggota baik petani pemilik penggarap, petani penggarap, buruh tani maupun rumah tangga petani.

Program PUAP mulai bergulir di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sejak tahun 2008 namun realisasi pencairan dana dan kepengurusan lembaga PUAP dimulai pada tahun 2009. Dana yang diperoleh oleh setiap Gapoktan adalah sebesar Rp.100.000.000., dibagi dengan jumlah kelompok tani. Adapun proses pencairan dana yang dilakukan adalah 60/40 % setiap enam bulan sekali yang dihibahkan oleh dinas ketahanan pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada setiap tahunya melalui Rekening gapoktan setempat di Bank Negeri atau Bank Daerah setempat dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan.

Dana yang dipinjamkan pada peminjam adalah sebesar Rp.1.000.000.,dengan bunga pengembalian sebesar 0,5 % dengan jangka waktu pengembalian sesuai kesepakatan peminjam dan pengurus gapoktan setempat di kelurahan masing-masing. Tanaman yang diusahakan petani bermacam-macam, sehingga proses pengembalian dana dilakukan dengan dua versi: versi pertama dilakukan sesuai prosedur yaitu dengan melakukan angsuran perbulan oleh peminjam kepada bendahara gapoktan selama enam bulan maka pinjaman harus dilunasi oleh peminjam. Versi kedua dilakukan dengan kesepakatan antara peminjam dan pengurus dana yaitu dilakukan angsuran permusim tanam (3 bulan) dan harus dilunasi oleh peminjam dengan 2x angsuran dengan jangka waktu enam bulan saja untuk petani yang berusahatani tanaman semusim. Adapun persyaratan dan jaminan yang diberlakukan adalah saprodi ,surat –surat berharga dan barang yang bisa dijadikan jaminan untuk pinjaman Finance. Pegelolaan dana PUAP dikelola oleh pengurus PUAP yang di awasi di bawah pengawasan pengurus gapoktan di tingkat desa.

Setelah pengembalian dana PUAP pada tiap periode diharapkan dapat meningkatkan jumlah alokasi dana hibah dari tahun-tahun sebelumnya, namun kenyataannya berbeda, pengembalian dana PUAP sering kali lamban dan tidak berjalan mulus sesuai prosedur yang ditentukan hal ini dikarenakan adanya gagal panen (Fuso) yang dialami petani peminjam sehinggadapat menyebabkan stagnansi atau berjalan ditempat tanpa adanya pengembangan dana seperti yang diinginkan dan dicanangkan sesuai program pemerintah setempat.

Dana PUAP yang diterimasetiap gapoktan tidak semuanya tersalurkan 100 % kepada kelompok tani. Hal ini disebabkan jumlah anggota kelompok tani yang tidak maksimum dan karakteristik pengembalian dana PUAP yang berbeda pada masing-masing poktan. Setiap tahun jumlah gapoktan penerima dana PUAP mengalami perubahan. Dari tahun 2008 sampai tahun 2012 berturut-turut adalah 16,19,12, 21, 19 gapoktan. Realisasi penyaluran dana PUAP menunjukkan angka realisasi yang berbeda setiap tahun. Adapun ketentuan dropping dana per gapoktan adalah sebesar Rp 100.000.000,- dengan rata-rata penyaluran yang berbeda setiap tahun dengan nilai rata-rata realisasi selama 5 tahun adalah sebesar Rp 84,413,566,-.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 1 dan grafik 1.

Tabel 1. Rata-rata Droping dana, Rata-rata Penyaluran dan Persentase Penyaluran dana PUAP mulai Tahun 2008 sampai Tahun 2012

Tahun	Droping Dana Puap (Rp)	Rata-Rata Penyaluran (Rp)	Persentaserata-Rata (%)
2008	100,000,000	91,061,563	91.06
2009	100,000,000	87,447,368	87.45
2010	100,000,000	93,333,333	93.33
2011	100,000,000	82,857,143	82.86
2012	100,000,000	67,368,421	67.37
Rata-Rata	100,000,000	84,413,566	84

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015 [2]

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dari grafik 1 terlihat bahwa rata-rata penyaluran dana PUAP cendrung menurun namun berfluktuasi, penyaluran dana tertinggi terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp. 93,333,333,- (93.33%)dan terendah pada tahun 2012 sebesar Rp.67,368,421,- (67.36%). Jika dilihat dari porsinya maka rata-rata persentase penyaluran dana PUAP juga cendrung menurun.

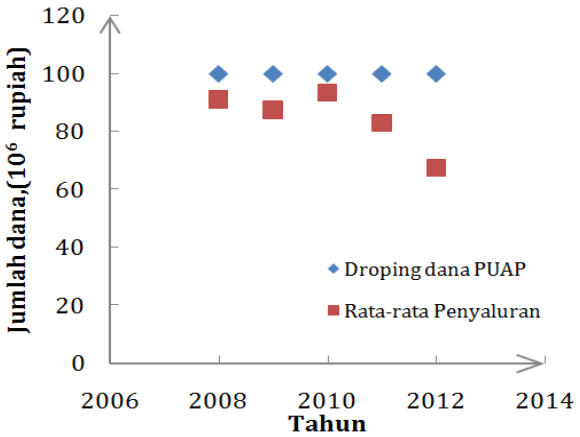

Gambar 1. Rata-rata Droping dana, Rata-rata Penyaluran dan Persentase Penyaluran dana PUAP mulai Tahun 2008 sampai Tahun 2012.

Perkembangan Per Tahun Dana Program PUAP Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur

Pengembangan dana PUAP berkisarantara Rp.33,284,925,-sampai Rp 5,820,931,-. Rata-rata pengembangan dana PUAP adalah sebesar Rp 22,468,764,- dengan rata-rata pengembangan dana PUAP terbesar terjadi pada tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 33,284,925,- dan rata-rata pengembangan dana PUAP terendah pada tahun 2012 sebesar Rp5,820,931,-. Untuk pengembangan dana PUAP juga menunjukkan hal yang sama yaitu cendrung menurun dan berfluktuasi selama 5 periode. Penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar 8.64 %. Jauh dibawah rata-rata persentase perkembangan selama lima tahun penelitian yaitu sebesar 26 %.Untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada tabel 2 dan grafik 2.

Tabel 2. Rata-rata Penyaluran, Perkembangan Rata-rata dan Persentase Perkembangan Dana PUAP mulai Tahun 2008 sampai Tahun 2012.

TAHUN	RATA-RATA PENYALURAN (Rp)	PERKEMBANGAN RATA-RATA (Rp)	PERSENTASE RATA-RATA (%)
2008	91,061,563	33,284,925	36.56
2009	87,447,368	23,704,632	27.11
2010	93,333,333	27,996,333	29.99
2011	82,857,143	21,537,000	25.99
2012	67,368,421	5,820,931	8.64
Rata-rata	84,413,566	22,468,764	26

Sumber : Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015 [2]

Dari Tabel 2 diatas terlihat bahwapengembangan dana PUAP berkisar antara Rp.33,284,925,-sampai Rp. 5,820,931,-.

ISBN : 978-602-73463-1-4

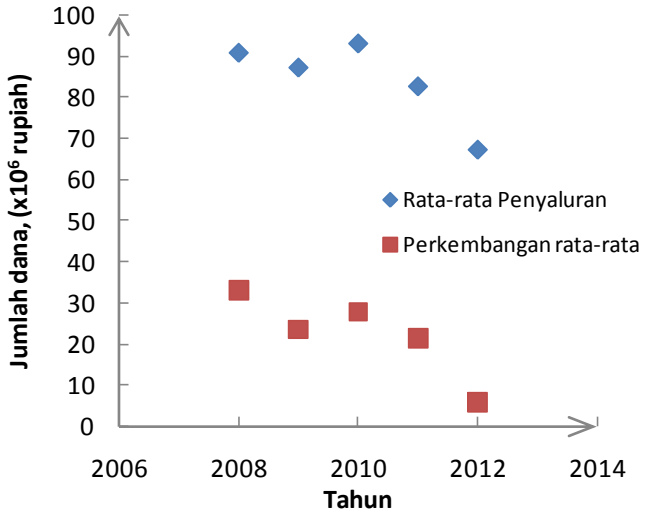

Gambar 2. Persentase Rata-rata Penyaluran dan Perkembangan Rata-rata Dana PUAP dari Tahun 2008 sampai Tahun 2012

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dari kajian ini adalah:

1. Perkembangan rata-rata penyaluran pertahun dana program PUAP dari tahun 2008 sampai tahun 2012 di Kabupaten Tanjung Jabung Timur berfluktuasi namun menunjukkan kecendrungan menurun.
2. Gambaran pengembangan rata-rata dana program PUAP di Kabupaten Tanjung Jabung Timur juga berfluktuasi dan juga menunjukkan kecenderungan menurun.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih pada lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat universitas batanghari jambi atas bantuan dana penelitian hingga penelitian dijalankan.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Pusat Statistik, 2016. Persentase Penduduk Miskin Maret 2015. http://www.bps.go.id/brs/view/1158 diakses tanggal 17 Februari 2016
[2] Dinas Pertanian Kabupaten Tanjung Jabung Timur, 2015. Daftar Rekapitulasi Penyaluran Dana PUAP Tahun Peluncuran 2012 Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

KAJIAN PENGHIDUPAN RUMAH TANGGA DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN PASCA GEMPA 2009 (Studi Kasus Nagari Tandikek Kecamatan Patamuan)

Sosmiarti [1)], Syafruddin Karimi [1)], Melinda Noer [2)] dan Werry Darta Taifur [1)]

[1] Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
[2] Fakultas Pertanian Universitas Andalas

Email : sos_Udo@yahoo.co.id

Naskah diterima : 17 November 2016 Naskah direvisi 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Gempa bumi merupakan bencana alam yang cukup banyak menimbulkan kerentanan,baik berupa hilangnya sumber daya manusia yang produktif, hilangnya pekerjaan, harta benda, terganggunya kesehatan, menurunnya produksi,melemahnya hubungan sosial dan meningkatnya angka kemiskinan karena penurunan pendapatan yang diterima oleh rumah tangga dan kemungkinan berubahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah bencana.Juga telah merubah kepemilikan aset, akses dan aktifitas yang menunjang keberlanjutan penghidupannya,maka akan muncul berbagai usaha sebagai strategi untuk bertahan hidup dan memulihkan kondisi pasca bencana. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana penghidupan rumah tangga korban bencana gempa Sumatera barat tahun 2009 di Nagari Tandikek Utara setelah gempa, strategi apa saja yang telah mereka lakukan untuk bertahan hidup dan melanjukan kehidupannya. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan metode survey dikelompokkan responden pada rumah hilang, rumah rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bahwa, tingkat kerusakan aset penghidupan yang besarlah yang mengakibatkan rumah tangga korban bencana lama pulih kondisi penghidupan mereka, yaitu tingkat kerusakan rumah, meninggalnya pencari nafkah, rusaknya lahan dan berkurangya sumber daya air, terutaama mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian. Strategi bertahan dan memulihkan penghidupan tersebut rumah tangga korban bencana gempa dan tanah longsor di Nagari tandikek utara Lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatkan jangka pendek, tidak begitu mampu mengembangkan aset penghidupan yang ada, karena pilihan yang dilakukan lebih kepada memenuhi kebutuhan dasar. Hal inlah yang menjadi penyebab lamanya pulih dari kerentanan pasca bencana.

Kata kunci: *Penghidupan, Keberlanjutan penghidupan dan Strategi bertahan hidup*

PENDAHULUAN

Bencana alam berupa gempa bumi yang terjadi pada tanggal 30 September 2009 di Sumatera Barat berkekuatan 7,9 Skala richter, mempunyai dampak yang luas hampir diseluruh kabupaten/kota. Salah satunya adalah Kabupaten Padang Pariaman. Daerah ini termasuk yang mengalami tingkat kerusakan terparah, karena tidak hanya gempa tetapi tanah longsor juga terjadi pada waktu yang hampir bersamaan, tepatnya dikecamatan Patamuan Nagari Tandikek Utara, dengan kerugian materil sebesar Rp 8,67triliun,menyebabkan 452 jiwa melayang dan 192 orang dinyatakan hilang. Sebanyak 110 unit rumah tertimbun , 2.025 unit rumah rusak berat, 1.073 unit rumah rusak sedang dan 684 unit rumah rusak ringan.

Kerusakan terbesar kedua dialami pada sektor sosial yang mencapai nilai Rp 598,61 miliar, akibat rusak beratnya ratusan tempat ibadah, sekolah dan puskesmas. Dimana lebih dari 75% sarana kesehatan berada dalam kondisi rusak berat dan tidak dapat digunakan lagi, begitu juga dengan sarana pendidikan 59% dalam kondisi rusak berat, 197 unit bangunan pemerintah dan 988 unit tempat ibadah rata dengan tanah. Kerusakan terbesar ketiga dialami sektor infrastruktur akibat rusaknya banyak ruas jalan, jembatan dan irigasi dengan total nilai kerugian Rp160,43 miliar.Kemudian kerusakan pada sektor ekonomi akibat kerusakan pusat perdagangan

tradisional dan tempat usaha masyarakat menimbulkan kerugian mencapai senilai Rp74,94 miliar.Kerugian di sektor lainnya seperti budaya, pariwisata, pemuda dan olah raga ditaksir senilai Rp35,28 miliar.

Dari semua kerusakan yang terjadi, Pemerintah bersama 130 lembaga internasional dari puluhan negara telah memberlakukan masa tanggap darurat selama 2 bulan sejak terjadi gempa, dalam bentuk evakuasi korban, perbaikan hunian, penyediaan air bersih, pengawasan makanan dan gizi. Diikuti oleh masa pemulihan (*recovery*) selama 2 tahun yaitu sejak tahun 2009 sampai tahun 2011, yang melaksanakan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi dengan dana miliaran rupiah untukmemulihkan perumahan dan prasarana lingkungan pemukiman, pemulihan prasarana publik, pemulihan layanan dasar masyarakat terutama bagi kelompok rentan dan miskin, pemulihan ekonomi produktif dan pemulihan lintas sektoral. Semua bantuan diatas bertujuan untuk memulihkan kondisi penghidupan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat korban bencana [1]. Terhadap berbagai kerentanan yang dihadapi oleh rumah tangga pasca bencana yang mungkin akan mempengaruhi tingkat kesejahteraannya, maka akan muncul berbagai usaha sebagai strategi untuk bertahan hidup dan memulihkan kondisi pasca bencana. Pada umumnya diawal krisis akibat bencana, strategi bertahan hidup dan memulihkan penghidupan akan tergantung pada jumlah asset, akses, kapasitas dan aktifitas masing-masing individu/rumah tangga [2][3].

Strategi yang umumnya dilakukan rumah tangga untuk bertahan hidup dan memulihkan penghidupan dalam pelaksanaanya dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu secara mandiri, dengan bantuan orang lain dan mengikuti kebijakan pemerintah. Strategi pertama adalah strategi mandiri, merupakan strategi yang hanya melibatkan anggota rumah tangga dalam aktifitas pemulihan penghidupannya yang dapat dilakukan secara aktif maupun pasif. Strategi aktif merupakan strategi yang dilakukan dengan mengoptimalkan segala potensi yang dimiliki keluarga dan jenisnya beragam, Seperti yang ditemukan beberapa peneliti berikut, yaitu: melakukan diversifikasi pekerjaan [4], Mencari pekerjaan sampingan [5] , melibatkan anggota keluarga (Istri dan anak) dalam mencari nafkah atau pekerjaan [6], melakukan diversifikasi produk [7], mengurangi ketergantungan terhadap sektor pertanian dan meningkatkan ke non pertanian [8], ikut arisan/ julo- jilo kampung) dan menambah jam kerja [4][5][6][][7][8][9]. Strategi pasif adalah strategi bertahan hidup yang dilakukan dengan cara meminimalisir pengeluaran keluarga dengan membiasakan hidup hemat, seperti yang ditemukan Suriastini yaitu rumah tangga akan bersikap hati-hati, cermat dan tidak boros dalam membelanjakan uang [9]. Strategi kedua adalah strategi yang dilakukan dengan bantuan orang lain atau dikenal dengan strategi jaringan, yaitu strategi dengan memanfaatkan jaringan sosial dan kelembagaan, strategi ini juga beragam, seperti yang ditemukan oleh beberapa peneliti, yaitu meminjam uang kepada kerabat, tetangga atau kawan , Meminjam uang ke rentenir, koperasi atau Bank, menerima bantuan dari keluarga dirantau atau melakukan migrasi sebagai alternatif terakhir [10][11][12] Strategi ketiga adalah mengikuti kebijakan pemerintah terkait dengan program pendidikan, keterampilan, bantuan dana bergulir, bantuan rumah tangga miskin dan lainnya, yang tujuannya adalah untuk membantu pemulihan ekonomi rumah tangga, dimana peningkatan kapasitas/ketrampilan dan permodalan bergulir bagi masyarakat dimanfaatkan untuk keberlanjutan penghidupan. Penghidupan yang berkelanjutan,menurut Endang [13] ditentukan oleh faktor demografi (umur dan jumlah anak, jumlah tanggungan, struktur keluarga, dan daerah asal), pendapatan, dan aset penghidupan (modal manusia, modal alam, modal sosial, modal finansial, dan modal fisik). ini dapat dimaknai bahwa faktor-faktor tersebut di atas turut mempengaruhi pilihan strategi yang akan diambil oleh rumah tangga.

Dalam beberapa kasus, Upaya pemulihan pasca bencana dari pemerintah dan lembaga swata lebih difokuskan kepada pemulihan fisik, sedangkan peningkatan sosial ekonomi korban bencana terabaikan. Ini disebabkan dampak fisik dapat dilihat secara nyata, dapat dihitung besar kerugiannya dan dapat dipulihkan dalam waktu yang relatif singkat, sedangkan dampak sosial ekonomi tidak terlihat dengan nyata, sulit diukur besaran dampaknya tetapi dapat menimbulkan keterpurukan dalam jangka waktu yang panjang.Hal ini tentu akan berpengaruh kepada kesejahteraan dan keberlanjutan penghidupan korban bencana.[14][15][16]. Untuk menyelesaikan persoalan pemulihan penghidupan rumah tangga korban bencana di Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman dengan mempertimbangkan kondisi aset penghidupan, tingkat kesejahteraan dan strategi bertahaan hidup yang dilakukan, maka tujuan penelitian ini adalah;

1. Mengkaji kondisi aset penghidupan rumah tangga sebelum dan setelah bencana gempa
2. Mengkaji strategi rumah tangga bertahan hidup setelah bencana gempa.

Dengan mengetahui kondisi penghidupan rumah tangga korban bencana setelah gempa,, maka perlu dikaji kondisi aset penghidupan dan strategi bertahan hidup yang mereka dilakukan untuk bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya. *Penghidupan (Livelihood)* diartikan sebagai kapabilitas, aset dan aktifitas-aktifitas yang dibutuhkan untuk menjalani kehidupan yang lebih baik. Chambers and Conway meyakini bahwa seseorang dalam melangsungkan kehidupannya membutuhkan setidaknya lima aset penting yaitu, Aset Alam (*Natural Capital*), Aset Manusia (*Human Capital*), Aset Fisik (*Phisical Capital*), Aset Sosial (*Social Capital*), dan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Aset Keuangan (*Financial Capital*). Kemudian dipertegas bahwa kelima aset tersebut saling terkait dan haruslah merupakan suatu kombinasi yang beragam untuk digunakan dalam berbagai aktifitas aksessibilitas dalam mengisi hidup, bertahan hidup dan berkembang.[17][18][19][20].

Sedangkan Keberlanjutan Penghidupan (Sustainable Livelihood) dimaknai sebagai usaha rumah tangga untuk mengatasi dan memulihkan penghidupannya dari kerentanan akibat bencana dengan memanfaatkan aset, akses dan kapabilitas yang dimilikinya serta strategi yang mendukung pengembangan aset tersebut, yang semuanya ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraannya sekarang dan masa yang akan datang. Pemulihan Penghidupan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah upaya untuk membangun kembali aset penghidupan dari korban bencana untuk menjadi lebih baik dari yang sebelumnya, karena semakin banyak aset yang dimiliki semakin tidak rentan rumah tangga tersebut dan semakin besar pengurangan aset yang terjadi semakin tidak aman sumber penghidupan rumah tangga tersebut. Dimana tingkat daya pulih suatu rumah tangga dari kerentanan akibat bencana akan bervariasi, tergantung pada faktor aset, pengetahuan, lama kejadian bencana, kharakter bencana, tingkat kerusakan dan kerugian, kharakteristik wilayah serta sosial ekonomi dan pengaruh faktor eksternal [21][18]

Adapun proposisi dari penelitian adalah:

1. Belum pulihnya kondisi penghidupan masyarakat di Nagari Tandikek Utara diduga karena kerusakan aset penghidupan yang terjadi terlalu banyak sehingga menurunkan aktifitas produksi terutama bagi mereka yang menggantungkan penghidupannya pada sumber daya alam, hal ini berakibat kepada tingkat kesejahteraan dan tidak terjaminnya keberlanjutan penghidupan didaerah tersebut.

2. Belum pulihnya kondisi penghidupan masyarakat di Nagari Tandikek Utara diduga karena Strategi penghidupan yang dilakukan untuk pemulihan tidak mampu mengembangkan aset penghidupan rumah tangga, sehingga sulit bagi mereka untuk keluar dari kerentanan akibat bencana gempa

METODE PENELITIAN

Rancangan Penelitian

Tahap awal penelitian ini adalah mengkaji konsep literatur serta penelitian sebelumnya dengan mendalami konsep livelihood, Aset penghidupan dan Strategi bertahan hidup. Dari kajian literatur dirumuskan masalah dan tujuan yang hendak dicapai, kemudian disusun kerangka penelitian dan alat analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian. Karena penelitian ini adalah penelitian survey maka ditentukan jumlah sampel dan distribusi sampel. Sampel dalam penelitian ini adalah rumah tangga menurut tingkat kerusakan rumah sebanayak 128 KK yang diambil secara tratifight random sampling, yaitu rumah hilang, rusak berta, rusak sedang dan rusak ringan, yang tersebar pada 3 jorong yaitu Jorong Lubuk Laweh, Jorong Jajaran, Jorong air Kelok dan Jorong Kampung apa..

Tahap berikutnya adalah pengumpulan data primer dengan menyebar kuesioner dan Indept interview, untuk mendapatkan informasi tentang kondisi perubahan aset pengidupan, dan tingkat kesejahteraan rumah tangga. Setelah semua data terkumpul dilakukan verifikasi dan koleksi data yang kemudian diolah, dianalisa dan penulisan laporan. Dari temuan tersebut dibuat rekomendasi kebijakan

Ruang lingkup

Penelitian ini dilakukan di Nagari Tandikek Utara Kecamatan Patamuan Kabupaten Padang Pariaman, bulan Oktober - Desember 2016. Dengan variabel yang diteliti terkait dengan kondisi penghidupan adalah aset penghidupan dalam bentuk Modal Manusia (*Human Asset*), Modal Sosial (*Social Asset*), Modal Phisik (*Physical Asset*), Modal Alam (*Natural Asset*) dan Modal Keuangan (*Financial Asset*). Untuk strategi yang dipilih akan diidentifikasi sesuai kondisi dilapangan dengan kategori mandiri, jejaring dan mengikuti program pemerintah. Unit analisis penelitian adalah rumah tangga korban bencana gempa pada tanggal 30 September 2009 dilokasi penelitian yang masuk kategori rumah hilang, rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.

Pengumpulan Data

Jenis data penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dapat berupa data-data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif; Data primer merupakan data yang dikumpulkan secara langsung bersumber dari kuesioner yang disebarkan kepada responden, yaitu rumah tangga korban bencana gempa yang

berisi tentang kondisi aset, dan strategi bertahan hidup. Data sekunder, dengan melihat catatan - catatan (dokumentasi) berbagai hal yang erat hubungannya dengan pokok penelitian, yaitu terkait dengan jumlah rumah yang menjadi korban bencana berdasarkan tingkat kerusakan dan bantuan bencana dari PNPB, Adapun pengumpulan data pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi, dilakukan untuk melihat secara sepintas wilayah penelitian, sehingga dapat diperoleh gambaran umum mengenai kondisi wilayah penelitian dan isu yang aktual di masyarakat yang menyangkut tema penelitian. Kegiatan pengamatan dilapangan ini didukung oleh data yang telah dipelajari melalui metode studi literatur sebagai awal pengumpulan data umum obyek penelitian.
2. Wawancara terstruktur dengan menyusun daftar pertanyaan (kuesioner) yang diajukan kepada responden untuk dijawab: sebagai instrumen pokok pengumpulan data penelitian ini. Kuesioner ini dimaksudkan untuk memperoleh informasi secara tertulis dari responden berkaitan dengan tujuan penelitian. Dalam kuesioner terdapat pertanyaan yang akan dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif.
3. Wawancara mendalam (*Indepth Interview*) adalah suatu proses memperoleh informasi untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden maupun pihak yang terkait. Dengan wawancara mendalam ini diharapkan dapat mempelajari kejadian dan kegiatan yang tidak dapat diamati secara langsung yang dapat menggambarkan secara mendalam kondisi rumahtangga dan responnya terhadap kondisi livelihood mereka pasca bencana.
4. Dokumentasi dan kepustakaan, merupakan penelusuran dokumen untuk mengetahui gambaran umum daerah penelitian seperti keadaan lokasi serta karakteristik penduduknya. Penelusuran pustaka, data publikasi, laporan penelitian lainnya, data potensi desa, kecamatan, kabupaten/kota, serta dari instansi-instansi terkait diantaranya BPS, BAPEDALDA, dan instansi terkait lainnya. Data-data yang dicari berupa fisik, infrastruktur wilayah kecamatan/ kelurahan/desa terpilih, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan sebagainya yang terdiri dari data tabuler statistik dan peta yang ada kaitannya dengan penelitian ini.

Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

Untuk memperjelas arti serta mempermudah analisis dipaparkan definisi operasional variabel yangdigunakan sesuai dengan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Aset penghidupan yaitu sumberdaya atau modal yang digunakan untuk keberlanjutan kehidupan rumah tangga sekarang dan masa yang akan datang yang terdiri dari modal manusia, modal alam, modal sosial, modal finansial dan modal fisik :
   a. Modal manusia adalah modal yang berupa: tingkat pendidikan, pekerjaan, ketrampilan, dan tenaga kerja yang bisa dimanfaatkan dalam kegiatan mata pencaharian rumahtangga yang bisa menopang penghidupan responden di masa yang akan datang.
   b. Modal alam merupakan persediaan alam yang mempunyai nilai dan manfaat bagi penghidupan. Diukur dengan: kepemilikan lahan dan produksi tanaman dan ternak.
   c. Modal sosial merupakan relasi sosial antara responden dengan penduduk lainnya yang berada disekitarnya. Aspek modal sosial meliputi: Organisasi kemasyarakatan yang diikuti
   d. Modal finansial mengacu pada sumber-sumber keuangan rumah tangga yang dimanfaatkan untuk menunjang kehidupan. Indikator modal finansial terkait dengan kepemilikan, meliputi: pendapatan, kredit, dan tabungan., NGO, Remitan, dana pensiun dan upah yang mengacu pada identifikasi terhadap kemampuan masyarakat terkena dampak gempa untuk dapat bertahan hidup dan melanjutkan kehidupannya secara normal dan layak
   e. Modal fisik merupakan sarana atau fasilitas yang dimiliki responden untuk dalam menjalani kehidupan, Kondisi rumah dan kepemilikannya

2. Strategi bertahan hidup adalah cara-cara rumahtangga merangkai berbagai kegiatan untuk memperoleh pendapatan, cara-cara memanfaatkan berbagai aset.Pilihan strategi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi yang dilakukan oleh rumah tangga untuk memulihkan penghidupan dan mempertahankan kehidupannya, yaitu dengan mandiri yang dapat bersifat aktif atau pasif, menggunakan jejaring baik formal maupun non formal atau memanfaatkan program pemerintah.

Analisis Data

Tujuan Pertama dalam penelitian ini yaitu Mengkaji perubahan aset penghidupan sebelum dan sesudah gempa, dianalisis dengan analisis deskriptif, yang mengambarkan nilai - nilai variabel secara rata- rata dalam

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

persentase untuk setiap variabel yang diamati, yang hasilnya ditampilkan dalam bentuk tabel dan dianalisis. Tujuan kedua dari penelitian ini adalah Mengidentifikasi pilihan strategi yang dilakukan rumah tangga untuk bertahan hidup dan melanjutkan penghidupannya setelah bencana gempa, dilakukan dengan analisis deskriptif yang menggunakan nilai rata- rata dan persentase yakan ditampilkan berupa tabel identifikasi strategi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kondisi Aset Penghidupan

Human Capital.

Kondisi Sumber daya manusia di Nagari Tandikek Utara setelah bencana gempa dan tanah longsor sangat memprihatinkan, khususnya di Jorong Lubuk Laweh. Karena sebanyak 132 orang meninggal dunia karena tertimbun tanah lonsor, dari korban jiwa tersebut sekitar 40 % adalah pencari nafkah utama dari keluarga yang ditinggalkan, kondisi ini diperburuk oleh hilangya rumah dan lahan untuk bertahan hidup. Sedangkan tiga jorong lainnya tidak banyak perubahan karena tidak ada korban jiwa. Ditinjau dari pendidikan, maka benca gempa dan tanah longsor tidak nagari Tandikek Utara tidak banyak perubahan kondisi dari sebelum bencana , karena kegiatan belajar mengajar hanya terhenti sementara, setelah itu tetap berjalan seperti biasa meskipun menjelang perbaikan sekolah yang runtuh, mereka belajar ditenda yang disediakan pemerintah dan NGO.

Dari aspek kesehatah, setelah gempa terdapat beberapa masyarakat dalam kelompok orang tua, ibu hamil dan menyusui serta anak- anak mengalami trauma akibat kejadian yang menimpa anggota keluarga mereka, tapi pemerintah bersama NGO telah berupaya mengobati mereka melalui Trauma Hialing dan melalui program kesehatan ibu dan anak, pemantauan gizi bay dan balita.

Natural Capital

Kondisi modal alam (Natural Capital), setelah bencana untuk nagari Tandikek Utara dapat dikelompokkan menjadi tiga: yaitu kondisi lahan yang rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan.. Kondisi lahan yang rusak berat dialami oleh 22 orang responden yang berasal dari Jorong LubuK Laweh, karena lahan meeka tertimbun longsor, sedang yang mengalami rusak sedang adalah Jorong Jajaran, karena sebagian dari lahan responden terbawa longsor, dan lahan yang rusak ringan adalah jorong Air Kelok dan Kampung apa. Meskipun berbeda tingkat kerusakan lahan yang mereka alami, tapi kondisi kelangkaan air dialami oleh keempat jorong tersebut setelah gempa, akibat hancurnya irigasi dan hilangnya beberapa sumber air. Kerusakan lahan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Distribusi Responden Menurut Luas lahan yang Rusak/ HilangSetelah Bencana
(Dalam %)

No	Jorong	Luas Lahan Rusak/ Hilang (Ha)			Total
		0-1	2-3	2-3	
1	Lubuk Laweh		5	20	25
2	Jajaran	5	20	10	35
3	Air Kelok	5	10	10	25
4	Kp Apa	10	5	-	15
Jumlah		20	40	40	100

Sumber: Data Diolah

Kelangkaan sumber air telah merubah sebagian mata pencarian petani dari menanam padi ke tanaman palawija yang hanya membutuhkan air yang sedikit dibanding tanaman padi. Bahkan sekitar 40 % responden beralih pekerjaan ke non pertanian. Dari keempat jorong yang banyak beralih ke non pertanian adalah Jorong Lubuk laweh, karena mereka yang masih selamat membeli tanah di sekitar pasar Tandikek, sehingga mereka memilih pekerjaan sesuai dengan tempat yang baru, yaitu sebagai pedagang, sopir dan lainnya.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Tabel 2. Distribusi Responden Menurut Jenis Pekerjaan Setelah Gempa (%)

No	Jorong	Jenis Kelamin		Total
		Sektor Pertanian	Non Pertanian	
1	Lubuk Laweh	10	15	25
2	Jajaran	25	10	35
3	Air Kelok	15	10	25
4	Kp Apa	10	5	15
Jumlah		60	40	100

Sumber : Data diolah

Phisikal Capital

Perubahan kondisi Modal phisik setelah bencana gempa, cukup besar, terutama kondisi rumah tempat tinggal. Dimana responden dapat dikelompokkan kepada korban gempa dengan tingkat kerusakan rumah hilang, rusak berat, rusak sedang dan rusak ringan. Responden yang mengalami rumah hilang adalah 20 % yang berlokasi di Jorong Lubuk Laweh, 40 % Responden mengalami rumah rusak berat, 20 % mengalami rumah rusak sedang dan 20 % responden mengalami rumah rusak sedang, dengan distribusi sebagai berikut:

Tabel 3. Distribusi Responden Menurut Kondisi Kerusakan rumah Setelah Gempa (Dalam %)

No	Kondisi Kerusakan Rumah	Persentase
1	Rumah Hilang	20
2	Rusak Berat	40
3	Rusak sedang	20
4	Rusak Ringan	20
Jumlah		100

Sumber. Data diolah

Adapun status kepemilikan rumah setelah gempa diawal bencana terjadi perubahan yang cukup berati, yang sebelumnya seratus persen milik sendiri, setelah bencana tinggal di tenda bantuan, 20 % status kepemilikannya adalah menumpang di rumah saudara. Selama kurang lebih satu tahun, dan akhirnya pada pasa recovery mereka mendapatkan bantuan rumah bambu dengan ukuran 4x6 dari Qatar, setelah itu dapat bantuan rumah dari Canada dan terakhir mendapatkan dana rehap rumah dari pemerintah, dengan dana Rp 15 Jt utuk rumah hilang/ rusak berat, 10 Jt untuk rumah rusak sedang dan 5 Jt untuk rumah rusak ringan. Meskipun ukuuran rumah saat ini lebih kecil dari sebelum bencana, tapi semua responden sudah tinggal dirumah milik sendiri.

Sosial Capital

Dari aspek sosial, semua responden adaalah anggota kelompok tani di jorong masing- masing, dalam kesehariannya mereka masuk dalam organisasi yang bernama arisan kampung (100%), Kongsi kematian (60%), dan kelompok usaha bersama (20%). Dengan mengikuti organisasi tersebut memperkuat mereka dalam pemulihan kondisi pasca gempa.

Financial Capital

Dari sisi keuangan, setelah bencana gempa sampai kondisi saat ini. Sekitar 35 % responden merasa bahwa pendapatan mereka masih menurun dibandingkan dari sebelum bencana. Hal ini umumnya dirasakan oleh mereka yang bekerja sebagai petani. Dimana berkurangnya jumlah air untuk pertanian samppai saat ini mempengaruhi hasil produksi pertaniannya, apalagi mereka telah berpindah tanaman dari padi ke pepaya, karena tidak ada penyuluhan, maka hasil yang diperoleh tidak maksimal. Kendala lainnya juga diperoleh dari kesulitan memasarkan produk pepaya tersebut, dan harga yang ditetapkan agen sangat rendah, sehingga penjualan tidak dapat menutupi biaya yang dikeluarkan.

Dengan memperhatikan kondisi kelima aset penghidupan maka dapat diketahui bahwa tingkat kerusakan aset yang besarlah yang mengakibatkan rumah tangga korban bencana lama pulihnya kondisi penghidupan mereka. Dimana rata- rata untuk rumah tangga yang rumahnya hilang membutuhkan waktu lebih dari 3 tahun untuk pulih, bahkan ada yang sampai saat ini merasa belum pulih penghidupannya.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dari kondisi saat ini, kendala yang dihadapi oleh korban bencana gempa dan tanah longsor di Nagari Tandikek utara adalah persoalan kekuranagan sumber daya air, penyuluhan pertanian, modal usaha, peralatan pertanian dan ketterampilan untuk tanbahan penghasilan. Adapun persentase responden yang membutuhkan hal diatas adalah sebagai mana yang terlihat ppada tabel berikut ini.

Tabel 4 . Bantuan yang Dibutuhkan Responden untuk memulihkan Kondisi Ekonomi

No	Jenis Bantuan	Pendapat		Persentase
		Ya	Tidak	
1	Penyuluhan Pertanian	100	-	100
2	Penyuluhan peternakan dan Perikanan	100	-	100
3	Modal Usaha	100	-	100
4	Pelatihan Keterampilan	50	50	100
5	Peralatan Pertanian	100	-	100

Sumber : Data diolah

Strategi Bertahan Hidup.

Pada kondisi tidak ada bencana, seseorang akan melakukan aktifitas yang menghasilkan uang dalam rangka mempertahankan kesejahteraan rumah tangganya, tetapi dalam kondisi bencana aktifitas yang dilakukan tersebut tidak saja mempertahankan kehidupannya tapi juga memulihkan kondisi penghidupanya lebih baik atau minimal sama dengan kondisi sebelum bencana gempa.. Strategi yang dilakukan seseorang untuk bertahan dan memulihkan penghidupannya akan dipengaruhi oleh jumlah aset capital yang tersisa dari bencana dan akses rumah tangga untuk mendapatkan aset atau mengembangkannya sesuai dengan capasitas yang dimilikinya. Kemampuan individu dalam mengembangkan aset akan berbeda antara individu dalam masyarakat.

Strategi bertahan dan memulihkan penghidupan rumah tangga dari korban bencana dapat dikelompokkan kepada tiga kategori, yaitu secara mandiri, dengan jejaring dan memanfaatkan bantuan pemerintah dan lembaga swasta lainnya. Dari hasil penelitian lapangan ditemukan bahwa strategi yang dilakukan rumah tangga korban bencana gempa di Nagari Tandikek Utara setelah bencana antara lain: kembali bekerja seperti biasa, Mencari pekerjaan sampingan, memanfaatkan kredit koperasi, ikut arisan, memanfaatkan kiriman uang dari saudara di rantau, memanfaatkan bantuannraskin, mengurangi pengeluaran, memanfaatkan peternakan sapi bergulir , pindah pekerjaan dan melibatkan anggota rumah tangga bekerja. Dari semua strategi tersebut maka sebagian besar masuk dalam kategori mandiri, yaitu melakukan aktifitas berdasarkan kemampuan sendiri dan anggota keluarga saja.pilihan ini dilakukan oleh rumah tangga dengan tingkat kerusakan aset yang ringan daan sedang, sedangkan untuk kategori rusak berat dan rumah hilang mereka sangat membutuhkan bantuan saudara dan yang lainnya untuk pulih , dan dukungan program kemiskinan juga sangat mereka harapkan untuk keluar dari kerentanan pasca bencana gempa. 2009), Bekele (2008), UNDP (2010), Salim dan Supriyani (2006), Kusnadi (2000) dan Widodo (2011) serta Temuan ini sesuai dengan pendapat suharto (Perhatikan tabel berikut:)

Tabel 5. Strategi Responden Bertahan Hidup Setelah Gempa (Dalam %)

No	Strategi Bertahan Hidup	Pendapat		Persentase
		Ya	Tidak	
1	Kembali bekerja seperti semula	60	40	100
2	Mencari pekerjaan sampingan	20	80	100
3	Memanfaatkan kredit koperasi	20	80	100
4	Ikut Arisan	40	60	100
5	Remitan	60	40	100
6	Bantuan Raskin	40	60	100
7	Mengurangi Pengeluaran	20	80	100
8	Peternakan sapi bergulir	20	80	100
9	Pindah pekerjaan	10	90	100
10	Melibatkan anggota rumah tangga bekerja			
Jumlah				

Sumber : Data diolah

ISBN : 978-602-73463-1-4

Dari strategi bertahan dan memulihkan penghidupan tersebut diatas terlihat bahwa, rumah tangga korban bencana gempa dan tanah longsor di Nagari tandikek utara Lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatkan jangka pendek, tidak begitu mampu mengembangkan aset penghidupan yang ada, karena pilihan yang dilakuakan lebih kepada memenuhi kebutuhan dasar. Hal inlah yang menjadi penyebab lamanya pulih dari kerentanan pasca bencana.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Bahwa, tingkat kerusakan aset penghidupan yang besarlah yang mengakibatkan rumah tangga korban bencana lama pulih kondisi penghidupan mereka, yaitu tingkat kerusakan rumah, meninggalnya pencari nafkah, rusaknya lahan dan berkurangya sumber daya air, terutaama mereka yang menggantungkan hidup pada sektor pertanian.

2. Strategi bertahan dan memulihkan penghidupan tersebut rumah tangga korban bencana gempa dan tanah longsor di Nagari tandikek utara Lebih banyak melakukan kegiatan yang sifatkan jangka pendek, tidak begitu mampu mengembangkan aset penghidupan yang ada, karena pilihan yang dilakuakan lebih kepada memenuhi kebutuhan dasar. Hal inlah yang menjadi penyebab lamanya pulih dari kerentanan pasca bencana.

Saran

Berdasarkan kendala yang dihadapi oleh rumah tangga korban bencana gempa dan tanah longsor untuk memulihkan penghidupannya, maka sebaiknya pemerintah membantu tidak hanya dari aspek fisik saja, tapi keberlanjutan penghidupan mereka juga perlu menjadi perhatian, terutama didaerah yang rentan dengan longsor. Dan program bantuan kebencanaan hendaknya disesuaikan dengan kebuthan masyarakat setempat, tiak diseragamkam untuk semua daerah, karena kerentanan kerusakan dan kendala yang mereka hadapi berbeda- beda.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). 2010. Data Kejadian Bencana Tahun 2010 Di Provinsi Sumatera Barat.
[2] Retno,T,Wulan, Edwin Maulana, Nita Maulia, Wiwin Ambarwulan, Tri Raharjo, Farid Ibrahim, Mega Dharma Putra1, Dwi Sri Wahyuningsih, Zheni Setyaningsih. 2016. Strategi Penghidupan Masyarakat Pada Periode Krisis Bencana Banjir Pada Lahan Pertanian Di Pesisir Kabupaten Bantul (Studi Kasus Masyarakat Dusun Depok, Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta), Prosiding Seminar Nasional Kelautan 2016 Universitas Trunojoyo Madura, 27 Juli 2016.
[3] Baiquni, M. 2007. Strategi Penghidupan di Masa Krisis. Idial Media, Yogyakarta.
[4] Allison, E.H., Ellis, F. 2001. The livelihoods approach and management of small-scale fishers. Marine policy,25, 377-388.
[5] Bekele, Adugna. E,. 2008. Livelihood Strategies And Food Security Inwolayta, Southern Ethiopia: The Case Of Bolososore District, Thesis Submitted to the Department of Rural Development and Agricultural Extension, Schoolof Graduate Studies Haramaya University
[6] UNDP. 2010. Livelihood Asessment Of West Sumatra, Kerjasama PSBE Fakultas Ekonomi Universitas AndalasDenganUNDP dan OXFAM. Tidak di publis
[7] Salim, H.P., & Supriyati. 2006. Diversifikasi Usahatani dan Peningkatan Pendapatan Petani di Lahan Sawah. Dalam K. Suradisastra, Y. Yusdja, M. Siregar, & K. Kariyasa (Eds.), Diversifikasi Usahatani dan Konsumsi: Suatu Alternatif Peningkatan Kesejahteraan Rumah Tangga Petani. Bogor: Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian
[8] Khan, Mohammad Asif,. 2008. Livelihood Strategies and Employment Structure in Northwest Pakistan. Dissertation, University Gottingen, Germany
[9] Suriastini, Ni wayan. 2010. Bertahan Hidup di Tengah Krisis: Studi Dampak jangka Pendek dan Menengah Tragedi Bom Bali. 2002-2005. Disertasi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
[10] Widodo, Slamet, 2011, Strategi Nafkah Berkelanjutan Bagi Rumah Tangga Miskin Di Daerah Pesisir, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 15, No. 1, Juli 2011: 10-20.
[11] INSTRAW. 2005. "Gender, Remittances and Development: Research Gaps and Future Priorities"Presentation to Conference of Women Leaders, September 27th 2005, Haifa, Israel

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

[12] Turton, Cathryn. 2000. Enhancing Livelihoods Through Participatory Watershed Development In India. Overseas Development Institute Portland House Stag Place London SW1E 5DP UK
[13] Endang Saleh, Sri. 2011.Kertas Pedoman Penghidupan Berkelanjutan . Program Studi Kependudukan Pascasarjana UGM. Yogyakarta. 92
[14] Alexander, B., Chan-Halbrendt, C. and Salim, W. 2006. Sustainable Livelihood Consideration for Disaster Risk Management: Implications for implementation of the Government of Indonesia Tsunami Recovery Plan. Disaster Prevention and Management, 15(1): 31-50.
[15] Chhotray, V. and Few, R. 2012. Post-disaster recovery and ongoing vulnerability: Ten years after thesuper-cyclone of 1999 in Orissa, India. Global environmental change, 22: 695-702.
[16] Olshansky, R. and Chang, S. 2009. Planning for Disaster Recovery: Emerging Research Needs And Challenge Progress in Planning, 72: 200-209.
[17] DFID. 1999. Sustainable Livelihoods Guidance Sheets. Departemen For International For Development. London
[18] Chambers, Robert and Gordon Conway. 1991. Sustainable Rural Livelihoods: Practical Concepts for the 21st Century, Discussion Paper 296, Brighton: Institute of Development Studies
[19] Ellis, F. 2000. Rural Livelihoods and Diversity in Developing Countries. Oxford: Oxford University Press.
[20] Clayton, B. D., D. Dean and O. Dubois.2003. Rural Planning In Developing Countries, Supporting Natural Resource Management and Sustainable Livelihoods. Earthscan Publications Ltd. United Kingdom
[21] Noviani,R, Pipit Wijayanti Dan Yasin Yusup. 2013. Pemodelan Tingkat Daya Pulih Masyarakat Di Kawasan Rawan Bencana Banjir Kota Surakarta, Forum Geografi, Vol. 27, No. 1, Juli 2013: 57 – 68

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

BADAN USAHA MILIK DESA: MENGIDENTIFIKASI POTENSI, PELUANG DAN TANTANGAN

Teguh Widodo

Kepala Bagian Ekonomi & Pembangunan Setda Kab. Padang Pariaman

Email: t29uhw@yahoo.co.id

Naskah diterima : 13 Maret 2017 Naskah direvisi: 20 Maret 2017 Disetujui terbit : 25 Maret 2017

ABSTRAK

Dengan keluarnya undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa, ada peluang baru bagi desa untuk membuka usaha baru bagi peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya—bahkan desa berpeluang untuk memandirikan dirinya menjadi maju tanpa tergantung dengan anggaran pemerintah di atasnya. Namun dalam upaya mewujudkan hal terebut, desa/nama sebutan lain dari desa (Nagari, dusun, kampung) perlu diberikan capacity building supaya dapat mengidentifikasi potensi-potensi, peluang dan tantangan tentangan BUM des itu sendiri. Sehingga pendirian BUM des tidak hanya semangat sementara, tapi hendaknya menjadi usaha desa yang secara kontinu. Makalah ini mencoba menelaah lebih lanjut tentang potensi-potensi yang dapat digali guna mendirikan BUM des, sehingga BUMdes itu feasible baik dari sisi ekonomi maupun upaya peningkatan pelayanan. Selain itu makalah ini juga mengkaji kemungkinan adanya peluang termasuk tantangan ke depan yang mulai saat ini harus diantisipasi, sehingga penanaman modalnya tidak total lost. Makalah ini dibagi menjadi beberapa sub bagian. Bagian pertama menjelaskan urgensi BUMdes bagi kesejahteraan masyarakat, bagian berikutnya menjelaskan tentang potensi, peluang dan tantangan BUMdes dalam meningkatkan pelayanan umum desa maupun dalam meningkatkan kesejahteraannya warganya. Bagian terakhir dari bab ini adalah catatan penutup yang merupakan rekomendasi rencana tindak lanjut gagasan.

Kata Kunci: *BUMdes, potensi, peluang dan tantangan*.

PENDAHULUAN

Pasal 87 sampai 90 Undang-Undang Nomor 6 [1], memberikan peluang yang cukup luas kepada desa/nama lain dari desa untuk membuat badan usaha milik desa (BUMDes). Desa berkesempatan mengembangkan inovasi dan kreativitasnya bersama badan musyawarah di desa membentuk BUMDes. Dengan adanya BUMDes, desa diharapkan dapat memandirikan dirinya dalam membangun desa dan rakyatnya sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan. Pengalaman yang sudah sudah, ketika masyarakat perdesaan diberikan bantuan oleh pemerintah pusat maupun daerah dalam bentuk dana bergulir sering terjadi tunggakan. Sebagai contoh, di Sumatera Barat, berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan, terdapat sekitar 12 Milyar kredit macet.

Berdasarkan kondisi tersebut, sebenarnya dalam hal finansial masyarakat perdesaan mengalami persoalan pada pengembalian pinjaman, sehingga para kreditur seringkali memberi stigma kepada masyarakat perdesaan sehingga untuk periode-periode berikutnya, mereka memberikan berbagai pertimbangan sebelum menyetujui kredit. Kondisi lain bisa jadi disebabkan kemauan para peminjam (*willingness to pay*) untuk membayar pinjaman ada tapi usaha yang mereka lakukan tidak berjalan dengan baik, atau dengan kata lain mengalami kegagalan.

Berbagai kendala yang dialami masyarakat desa dalam pengembalian pinjaman dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya menjadi peluang sekaligus tantangan bagi para pelaku usaha di desa ataupun penggiat kegiatan desa, termasuk pula BUMDes. Menjadi peluang, karena ada pangsa pasar yang dapat menjadi sumber penghidupan bagi BUMDes. Menjadi tantangan, karena akan banyak rintangan yang akan mengganggu operasional BUMDes itu sendiri.

Untuk itu, makalah ini mencoba lebih lanjut menjelaskan potensi, peluang dan tantangan yang dimungkinkan muncul terhadap pelaksanaan BUMDes berdasarkan kondisi umum wilayah dan karakteristik masyarakat perdesaannya. Makalah ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama menjelaskan urgensi BUMdes bagi kesejahteraan masyarakat, bagian berikutnya menjelaskan tentang potensi, peluang dan tantangan BUMdes dalam meningkatkan pelayanan umum desa maupun dalam meningkatkan kesejahteraannya warganya. Bagian terakhir dari bab ini adalah rencana tindak lanjut gagasan.

URGENSI BUMDES DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKATNYA

Banyaknya kegagalan program kegiatan pemerintah yang diperuntukkan kepada masyarakat perdesaan, mengindikasikan ada kesalahan yang memang harus diperbaiki baik dari sisi mekanisme maupun program itu sendiri.

BUMDes muncul sebagai alternatif program yang didukung dengan kebijakan di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 6 [1]. Filosofi BUMDes tidak lain adalah konstruksi menggabungkan fungsi self-governing community dengan local self government, diharapkan kesatuan masyarakat hukum adat yang selama ini merupakan bagian dari wilayah desa, ditata sedemikian rupa menjadi Desa dan Desa Adat. Mekanisme self-governing dalam ranah perencanaan domain publik sejatinya ada dalam tradisi Social Mobilisation [2]. Mekanisme ini, seolah ada negara dalam negara, tapi kalau dirunut dalam tipenya lebih masuk dalam ranah utopian di mana komunitas membuat arena tersendiri tanpa menentang negara—dan karena banyak memberi manfaat terhadap publik, maka negara cenderung mendiamkannya atau bahkan mendukungnya dan menjadi inklusif. Demikian halnya konteks BUMDes, dimungkinkan akan memberikan nilai manfaat bagi publik karena fungsinya seperti replika perusahaan negara, hanya saja ini skalanya lebih kecil termasuk cakupannya.

Saat ini, ketika anggaran negara terbatas, seolah negara membuat stimulan kepada pemerintahan yang lebih kecil untuk secara mandiri nantinya menggerakan roda pemerintahannya tanpa harus terlalu menggantungkan anggaran Pemerintah di atasnya. Sudah sejak lama, para penggiat pembangunan perdesaan seperti Sayogyo [3], Mubyarto [4], menganggap desa dengan komunitas warganya dari sisi ekonomi terbatas, tapi di sisi lain lebih mandiri dibandingkan dengan masyarakat perkotaan yang cenderung menerima dan menikmati fasilitas publik yang disediakan pemerintah.

Untuk itu, pendirian BUMDes sangat seiring dengan karakteristik desa yang cenderung memiliki kemandirian yang tinggi dan berpotensi untuk diberdayakan. Bahkan, beberapa hasil studi yang dilakukan di beberapa daerah perdesaan seperti Desa Tlanak Kabupaten Lamongan Jawa Timur, mampu memberikan layanan air bersih yang kepada warganya dibandingkan dengan PDAM setempat yang airnya sering mati. Demikian halnya beberapa desa lainnya di Gunung Kidul seperti Karangrejek, Karangasem yang patut jadi tauladan karena mampu membangun kampungnya berkat kemandiriannya di tengah-tengah keterbatasan sumber air. Mereka mampu membangun embung, jembatan secara mandiri tanpa menggantungkan uluran pemerintah. Embung tersebut jadi wahana mempertahankan air di pegunungan untuk membuat kolam lele sistem terpal.

Dari beberapa contoh keberhasilan desa tersebut, jelas menyiratkan bahwa Desa memiliki kemandirian yang jadi landasan pokok berdirinya BUMDes. Berdasarkan usaha-usaha yang dilakukan desa tersebut, juga telah menyiratkan bahwa secara filosofis, pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan ekonomi maupun pelayanan umum minimal dalam desa tersebut. Didalam peraturan Menteri Desa (Permendesa) Nomor 4 tahun 2015 juga disebutkan dalam pasal 2 bahwa "Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerja sama antar-Desa." Lebih lanjut juga disebutkan dalam pasal berikutnya bahwa tujuan pendirian BUMDes diantaranya adalah:

a. meningkatkan perekonomian Desa;
b. mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa;
c. meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa;
d. mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga;
e. menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga;
f. membuka lapangan kerja;
g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa; dan
h. meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

POTENSI BERKEMBANGNYA BUMDES

Makalah ini sebagai bentuk optimisme terhadap kemungkinan berkembangnya BUMDes di hampir setiap desa. Hal ini didasarkan pada potensi yang dimiliki tiap desa, praktis ada. Beberapa potensi umum saja, dapat dicermati bahwa desa punya potensi untuk dikembangkan diantaranya:

1. Banyak kegiatan layanan komunitas yang bersifat lokal dan mereka selama ini usahakan dengan kerjasama dan belum dilakukan secara profesional. Misalkan, di beberapa desa di Pulau Jawa banyak usaha-usaha kelompok yang dilakukan pada skup RW atau bahkan RT sekalipun seperti penyewaan alat-alat gerabah, masak dan tenda pesta. Mereka memperoleh modal dengan cara memungut beras satu genggam setiap malam yang dijemput pada waktu melakukan ronda keliling. Kegiatan ini disebut jimpitan. Hasil pungutan tersebut disepakati dalam musyawarah RT ataupun RW untuk membeli peralatan gerabah. Jadi setiap anggota komunitas yang akan mengadakan pesta baik pernikahan, kenduri maupun acara menjamu lainnya, akan menyewa gerabah tersebut. Hasil penyewaan tersebut dikumpulkan untuk mengadakan berbagai kegiatan yang bermanfaat bagi publik, seperti membangun pengerasan jalan makadam, membuat gapura dan lain sebagainya.
2. Kondisi masyarakat perdesaan yang lebih Homogen. Uphoff [5], menjelaskan konteks masyarakat yang homogen memiliki keuntungan dalam hal pengambilan keputusan yang bersifat mandiri. Keuntungan lain adalah adanya solidaritas sebagai penggerak komunitas. Kondisi komunitas seperti ini sangat potensial untuk menjaga marwah usaha berbasis komunitas.
3. Banyaknya sumber-sumber lokal yang belum dimanfaatkan. Sebagai contoh, bagi masyarakat yang tinggal di kawasan wisata pantai mereka berpotensi sebagai rekanan pihak ketiga pemerintah dalam mengelola lahan parkir, atau bagi masyarakat pedesaan dapat mengelola aset sungai untuk kegiatan ekonomi usaha wisata pemancingan dan sebagainya. Bagi masyarakat yang memiliki sumber mata air, dapat bekerja sama dengan PDAM turut menyiapkan air bersih sebagaimana kegiatan PAMSIMAS sebagaimana yang dilakukan Desa Tlanak Lamongan.

PELUANG

Selain potensi, ada sumber-sumber eksternal yang masuk pada wilayah perdesaan dan ini dapat dimanfaatkan sebagai sumber baru yang bernilai ekonomi.

1. Banyak layanan publik yang belum disediakan pemerintah dapat dijadikan peluang bagi desa untuk mendirikan BUMDes, seperti listrik PLN yang belum masuk desa dapat dijadikan peluang bagi BUMDes sebagai wahana baru dengan memanfaatkan sumber mata air sebagai tenaga listrik mikro hidro, ataupun dengan memanfaatkan diesel. Meskipun kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 30 [6] tentang Ketenagalistrikan, namun ini dapat disikapi dengan pengurusan izin kepada Pemerintah.
2. Masuknya program-program pemerintah yang bersifat menjual barang-barang bersubsidi seperti raskin, dan pupuk bersubsidi. Dengan adanya barang-barang subsidi yang dijual ke perdesaan, membuka peluang bagi warga desa untuk membuka BUMDes usaha distribusi raskin maupun pupuk bersubsidi. Di usaha tersebut justru akan membuat masyarakat akan turut mengawasi jalannya pelaksanaan distribusi barang/jasa yang ada dalam pengawasan pemerintah.
3. Terbatasnya warga masyarakat mengakses sumber-sumber perbankan, menjadi peluang bagi desa membuka usaha simpan pinjam, bahkan kredit usaha yang pernah digulirkan pemerintah dan saat ini macet, dapat menjadi peluang bagi desa dengan menawarkan jasa penagihan yang dananya kemudian dapat digulirkan kembali. Tentunya peluang ini diikuti dengan mekanisme penyertaan modal pemerintah daerah kepada BUMDes. Diakui saat ini masih banyak rakyat desa yang terjerat dengan para tengkulak sistem ijon ataupun rentenir. Kondisi itu karena salah satunya disebabkan sulitnya masyarakat desa mendapatkan akses perbankan, seperti jarak kantor perbankan yang relatif jauh, ataupun sulitnya mendapatkan pinjaman karena tidak tahu mekanisme utang ke perbankan. Dengan adanya unit simpan pinjam yang dilaksanakan BUMDes akan ada peluang bagi rakyatnya untuk meminjam.

ISBN : 978-602-73463-1-4

TANTANGAN

Selain potensi dan peluang, ada beberapa hambatan yang perlu diwaspadai dan disikapi BUMDes ke depannya.

1. Bagi BUM Des yang bergerak di bidang simpan pinjam akan menghadapi tantangan macetnya pinjaman seperti yang saat ini dihadapi Pemerintah dalam menyalurkan kredit usaha rakyat.
2. Keterbatasan sumber daya manusia pelaku BUMDes harus segera disikapi dengan bimbingan teknis dan pelatihan lainnya untuk meningkatkan pelayanan.
3. Banyaknya perusahaan-perusahaan swasta lainnya yang bergerak di bidang usaha yang sama dimungkinkan akan menjadi pesaing utama BUMDes. Kalau layanan BUMDes lebih buruk dari layanan perusahaan lain, maka dimungkinkan berpalingnya pelanggan.

RENCANA TINDAK LANJUT

Pemerintah Pusat dengan membuka pintu usaha bagi BUMDes melalui Permendesa nomor 4 [7], merupakan *political will* yang harus ditindaklanjuti. Sebagai tanggung jawabnya, pemerintah juga harus banyak memberikan penguatan kapasitas terhadap para pelaku dan pelaksana BUMDes. Diberikannya peluang BUMDes untuk mengelola aset-aset ataupun layanan publik hendaknya diikuti dengan rencana aksi yang tertuang dalam peta jalan (*roadmap*) perusahaan, sehingga pada periode tertentu akan nampak jelas kemana arah BUMDes.

Payung hukum memang sudah disiapkan pemerintah, yang perlu segera ditindaklanjuti adalah menyiapkan perangkat lunaknya (soft tools) BUMDes seperti forum komunikasi BUMDes yang dapat dijadikan ajang berbagi informasi antar pelaku BUMDes. Yang tidak kalah pentingnya adalah wadah pelatihan pelayanan BUMDes yang memungkinan dapat difasilitasi oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal. Supaya kebijakan pendirian BUMDes dapat berjalan secara efektif dan efisien sepertinya tidak perlu terburu-buru secara booming desa di seluruh Indonesia mendirikan BUMDes, tapi perlu ada pilot project BUMDes di beberapa tempat dengan karakteristik desa yang berbeda, misalkan dipilotproject-kan untuk desa yang ada di kawasan pegunungan, pantai dan desa tertinggal. Dengan demikian nantinya akan ada perlakuan yang berbeda terhadap kesesuaian jenis usaha untuk desa dengan tipologi geografi yang berbeda.

Rencana tindak lanjut berikutnya adalah didasarkan atas kondisi masyarakat desa yang memiliki keterbatasan modal, perlu disikapi dengan menggandeng swasta sebagai bapak asuh usaha, sehingga BUMDes dapat dibina usahanya tanpa harus saling melemahkan usahanya.

Sebagai catatan penutup, perlu kiranya dalam pendirian BUMDes ada tenaga pendamping yang turut mengawal mulai dari proses pendirian sampai berjalannya usaha. Memang banyak rencana tindak lanjut yang harus disikapi segera, mengingat kebijakannya telah bergulir. Desa sebagian kecil telah menyikapinya, tapi aksi dari pemerintah pusat terhadap BUMDes sepertinya masih perlu giat lagi.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
[2] J Friedman (1987) Planning in The Public Domain. Pelgrav New York
[3] Sayogyo (1983) Sosiologi Pedesaan. Univ Gadjah Mada Press, Yogyakarta
[4] Mubyarto (1998) Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. BPFE Yogyakarta.
[5] N Uphoff (1986) Local Institutional Development: An Analytical Sourcebook with Cases, Kumarian Press Connecticut.
[6] Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan
[7] Permendesa nomor 4 Tahun 2015

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MENGAWAL PEMBANGUNAN NEO-ENDOGENOUS DI PERDESAAN: PENGEMBANGAN KAWASAN PERDESAAN DI KAB SERANG

Teti A Argo[1)] dan Hastu Prabatmojo[1)]

[1]Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, SAPPK, Institut Teknologi Bandung

Email :targo@pl.itb.ac.id

Naskah diterima :17 November 2016 Naskah direvisi: 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 27 Maret 2017

ABSTRAK

Diperkenalkannya Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) melalui UU 6/2014 tentang Desa yang menitikberatkan pada pengembangan pertanian antar desa, merupakan konsep pembangunan perdesaan yang terintegrasi. Intensifnya gerakan globalisasi dan upaya mengkotakan desa desa mengakibatkan kegiatan di sector pertanian semakin terpinggirkan, mengakibatkan PKP tidak lagi hanya mendorong pembangunan yang menitikberatkan pada adaptasi dan inovasi melalui kapasitas local. Peran pemerintah, baik pusat maupun daerah, memfasilitasi interaksi dan integrasi kegiatn pertanian antar sector mengakibatkan peran extra local forces menjadi utama dalam pembangunan di perdesaan. Makalah ini bertujuan mengidentifikasi elemen keterkaitan antar desa yang dapat mengintegrasikan pembangunan di Kawasan Perdesaan Mandiri Kec Baros, terutama dalam menyediakan pelayanan bagi keberlanjutan kegiatan agropolitan. Analisis ini meliputi: 1) interaksi pemerintah pusat dan daerah terutama pertemuan kepentingan antar keduanya dan bagi daerah adalah untuk memudahkan akses terhadap pengetahuan, interaksi serta pendanaan; 2) interaksi pemerintah dengan organisasi / warga masyarakat mengenai rencana pembangunan antar desa, terutama bagi organisasi masyarakat yang belum paham tentang rencana PKP tersebut; 3) analisis SWOT membantu menempatkan posisi tiga desa dalam pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan implementasi rencana pemerintah daerah; 4) berjalannya akses infrastruktur, pasar, dan suprastruktur dalam pengembangan Agropolitan. Hasil akhirnya ditunjukkan bahwa PKP menjadi salah satu cara untuk menjaga identitas perdesaan melalui pengembangan pertanian yang saling berinteraksi dan berjejaring. PKP diharapkan dapat berkembang pada penguatan kepemimpinan local dalam mengembangkan adaptasi pengetahuan pada keperluan lokal.

Kata kunci: *Pengembangan Kawasan Perdesaan, Pembangunan Neo-Endogenous, Interaksi antara Pemerintah dan Masyarakat*

PENDAHULUAN

Pembangunan di perdesaan telah lama didominasi oleh program pembangunan sectoral, atau berbasis komunitas baik yang digerakkan oleh pemerintah maupun oleh organisasi masyarakat. Desa desa yang berhasil menyandang status Mandiri, maupun Maju, merupakan desa yang pemerintah desanya dapat mengkonsolidasikan program pembangunan sectoral pada pemenuhan kebutuhan warganya [1], atau yang warganya terlibat aktif dalam pembangunan desanya. Arus globalisasi juga menyentuh ke perdesaan memungkinkan masuknya korporasi besar atau sering disebut globalisasi korporasi, atau unit komersial dari perkotaan yang menjadi penggerak ekonomi perdesaan [1]. Kabupaten di Indonesia yang memiliki tingkat Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi berasal dari sector non pertanian seperti industry, pelabuhan, atau sector pertanian skala besar seperti perkebunan atau pertambangan. Karakteristik perdesaan mendapat tantangan dari arus finansial yang mengubah lansekap dan guna lahan di perdesaan di Indonesia.

Diundangkannya Desa dan konsep pembangunan melalui UU No. 6/2014 memberi arah baru dalam pembangunan perdesaan, dimana pendanaan pemerintah dapat secara langsung menggapai desa melalui pemerintahan desa. Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) merupakan salah satu instrument pembangunan desa yang model pembangunan perdesaan yang terintegrasi (Integrated Rural Development/IRD) yang mengusung semangat interaksi antar desa terutama dalam mendorong pembangunan ekonomi berbasis

aglomerasi. Kegiatan ekonomi berbasis local, skala kecil dan menengah mendapatkan kesempatan untuk dikembangkan melalui alokasi penggunaan ruang perdesaan. Model ini, menjadi unggulan terutama dalam menyelaraskan strategis pembangunan nasional, di perdesaan untuk mengusung Nawacita No 3 mengenai Pembangunan Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan.

Sejak dicanangkan sebagai UU, PKP dijalankan sebagai suatu program pembangunan di tingkat kabupaten yang mengintegrasikan strategis pembangunan sectoral dengan pembangunan di daerah. Proses perencanaan PKP sendiri merupakan suatu model yang baru diterapkan oleh pemerintah pusat di beberapa desa yang berstatus tertinggal. Hal ini terutama untuk mendorong terdapatnya capacity building dalam mengembangkan program pembangunan di tingkat antar desa terutama memilih program yang mendapat dukungan dari pemerintah pusat dan daerah.

Meskipun program pembangunan yang akan terdapat dalam PKP merupakan bagian dari program pemerintah, peran aktif dari kelompok masyarakat, dan potensi wilayah menjadi pertimbangan utama bagi berjalannya PKP. Penggerak dalam pembangunan di perdesaan diharapkan akan berasal dari masyarakat dan lingkungannya sendiri, tanpa campur tangan pihak luar (extra legal forces) [2]. Dikenal sebagai pembangunan endogenous, pembangunan ini menitikberatkan pada identitas atau keunikan local yang dapat menjadi sumbangsih bagi pembangunan perdesaan, dan sekaligus menjadi garda depan dalam mempertahankan bahkan memperkuat identitas perdesaan. Dengan adanya campur tangan pemerintah, yang muncul sebagai skema programatik alokasi dana, pembangunan endogenous menjadi preskripsi kebijakan dan tindakan, yang tidak lagi murni sebagai pembangunan endogenous. Pembangunan neo-endogenous memungkinkan adanya peran 'extra local forces' dalam pembangunan perdesaan, dimana posisi, potensi dan keberadaan – bahkan manipulasinya - digunakan bagi kepentingan di perdesaan itu sendiri [3].

Studi ini mengambil kasus perencanaan di Kawasan Perdesaan di Kabupaten Serang. Sebagai bagian dari propinsi Banten, kabupaten ini merupakan daerah penyangga dari kota Serang, yang merupakan ibukota Provinsi Banten. Di bagian baratnya berbatasan dgn kabupaten Pandeglang yang merupakan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Lesung yang mana investasi pemerintah pusat ditempatkan . Di bagian timur, kabupaten ini berbatasan dengan kabupaten Tangerang yang merupakan penyangga dari ibukota DKI Jakarta. Kabupaten Serang sendiri menjadi daya tarik bagi pengembangan industry dari kota Serang, difasilitasi oleh berbagai kawasan industri. Kabupaten Serang, dengan demikian dikelilingi oleh kegiatan ekonomi yang mendapat suntikan kebijakan dan dana pemerintah pusat.

Salah satu unggulan kegiatan di sector pertanian di perdesaan kabupaten Serang, adalah memiliki pertanian lahan basah, perkebunan dan peternakan. Produknya telah dikirimkan ke daerah lain dan beberapa komoditas seperti kopi telah diekspor. Kecamatan Baros, melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah kabupaten Serang 2016-2021, dinyatakan sebagai Kawasan Strategis Kabupaten, sebagai agropolitan [4]. Melalui konsep agropolitan ini akan dikembangkan berbagai penyediaan pelayanan publik yang akan mendukung pemasaran, transaksi, SKA dan system pendukung transaksi.

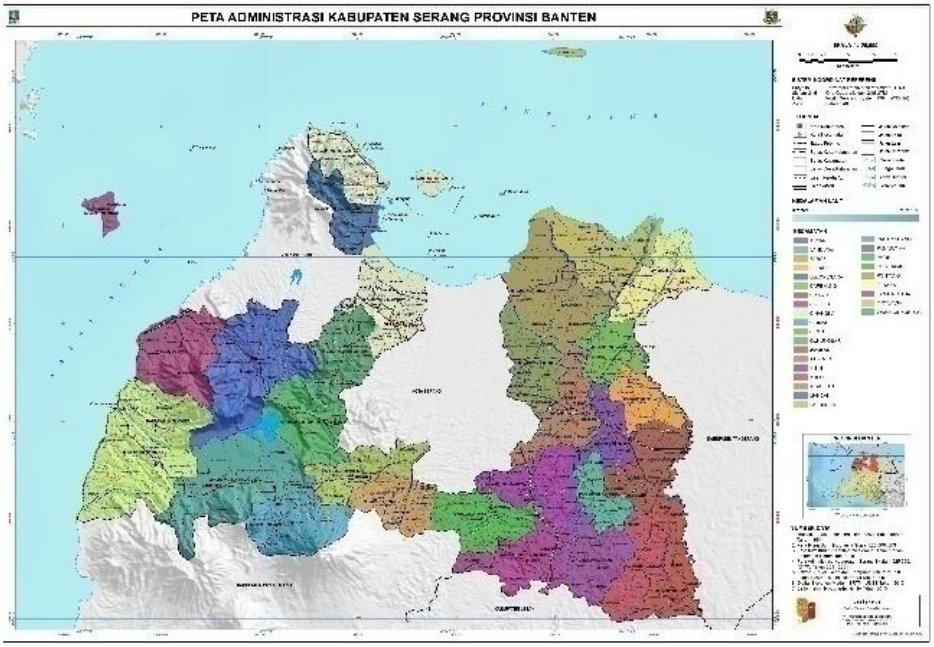

Gambar 1. Peta Administrasi Kabupaten Serang
Sumber: Pemkab Serang, 2014.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Menitikberatkan pada tiga desa (Taman Sari, Sindangmandi, Cisalam) yang menjadi produsen utama pertanian di Kecamatan Baros, penggunaan lahan pertaniannya telah disyahkan sebagai bagian dari preservasi guna lahan pertanian pada konsep Lahan Pertanian Pengan Berkelanjutan (LP2B) . Tiga desa tersebut meliputi 29% dari luas kecamatan Baros, dengan guna lahan pertanian mendominasi sekitar 40%. Lebih dari 50% penduduknya bekerja di sector pertanian. Secara keseluruhan tingkat pendidikan rata rata penduduknya tidak tamat SD, lebih rendah dari tingkat pendidikan rata rata di Kabupaten Serang. Jenis komoditas yang dihasilkan ini beragam: tanaman jagung, kacang panjang, padi, mentimun, terong, dan umbi-umbian. Komoditas tanaman buah-buahan yang dihasilkan oleh kawasan ini meliputi durian, pisang, dan duku. Di subsektor perkebunan, komoditas yang banyak dihasilkan adalah kelapa, kopi, coklat, dan cengkeh. Di sisi lain, ayam kampung, bebek, dan kambing merupakan hasil ternak di kawasan ini

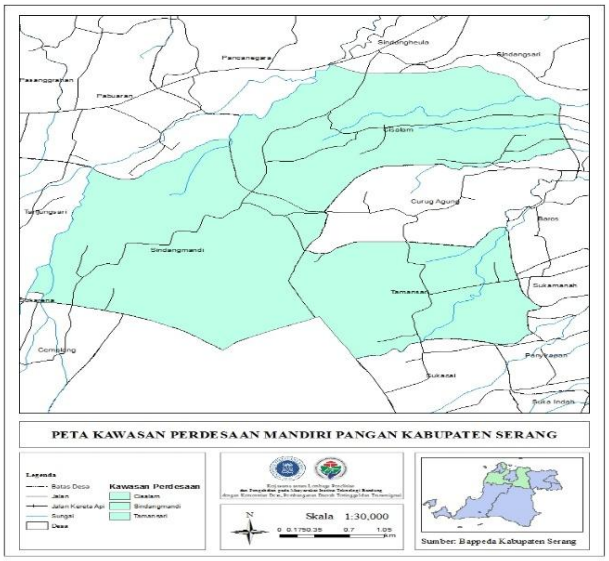

Gambar 2. Lokasi Kawasan Perdesaan Mandiri Pangan Kabupaten Serang
Sumber: Kemendesa PDTTrans, 2015.

Makalah ini bertujuan mengidentifikasi elemen keterkaitan antar desa yang dapat mengintegrasikan pembangunan di Kawasan Perdesaan Mandiri Kec Baros, terutama dalam menyediakan pelayanan bagi keberlanjutan kegiatan agropolitan. Lebih lanjut, penelitian ini mengarah pada konsep IRD yang dikembangkan untuk pembangunan perdesaan berbasis territorial ini dipadukan dengan prinsip governance (tata kelola pemerintahan), dengan pemerintah sebagai penghela melalui penyediaan pelayanan publik/kolektif, serta kelompok masyarakat sebagai penggerak utama, akan menghasilkan tata kelola pemerintahan berbasis interaksi antar pemangku kepentingan yang setara dan seimbang.

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP): Konsep Menghadirkan Pemerintah dalam Pembangunan Perdesaan

Terminologi Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) secara legal diperkenalkan sebagai konsep pembangunan di perdesaan yang berbasis territorial untuk memberi jaminan akan tata ruang bagi identitas perdesaan. Peran negara muncul sebagai pengatur dan penjamin pelaksanaan pembangunan di desa – desa, dengan diperkenalkannya pula proses pembangunan formal seperti penentuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Des), yang sudah dipraktekkan pada pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Dengan ini pula program pembangunan yang konsepnya diperkenalkan di tingkat pusat, juga diadopsi di tingkat desa. Berubahnya konstelasi ekonomi perdesaan, terutama akibat kecenderungan menurunkan keterlibatan tenaga kerja pertanian, migrasi penduduk ke perkotaan, serta rendahnya tingkat upah di perdesaan, merepresentasikan sulitnya mengintervensi tren tersebut melalui kebijakan sectoral, yang sebagian besar menitikberatkan pada kerja organisasi masyarakat, mengasumsikan penduduk perdesaan kepentingan kolektif akan menjadi pilihan dalam pengambilan keputusan. Kekuatan organisasi masyarakat di perdesaan, melalui Kelompok Tani, KUD, Mitra Air, Kelompok Wanita Tani serta organisasi berbasis masyarakat lainnya mengangkat kekuatan kolektif perdesaan (cooperative social relation/gemeinschaft) untuk mengadaptasi, mengadopsi perubahan akibat interaksi antar masyarakat dan lingkungan alamiah serta merespons terhadap berubahnya tantangan pemasaran.

ISBN : 978-602-73463-1-4

Dengan meningkatnya keberagaman kegiatan ekonomi desa, dan serta merespons terhadap surplus produksi di perdesaan, PKP muncul sebagai model pembangunan perdesaan yang mengintegrasikan program pembangunan sectoral agar sinergis, efisien serta mendorong agar identitas perdesaan pada sector pertanian. PKP sebagai kebijakan pembangunan perdesaan juga dapat dianggap sebagai intervensi kebijakan skala local, yang memobilisasi apparat desa dan organisasi masyarakatnya.

Secara konseptual PKP dapat diidentikkan dengan konsep Pembangunan Perdesaan terintegrasi (Integrated Rural Development / IRD) yang diperkenalkan di negara berkembang sejak tahun 1960an [5]. IRD menempatkan peran pemerintah sebagai pengelola desa, menggunakan alokasi dana untuk bantuan transfer teknologi melalui fasilitasi secara local baik secara saintifik dan engineering, terutama untuk peningkatan produksi pertanian. Bantuan transfer teknologi ini diarahkan pada surplus pertanian yang diharapkan dapat membiayai transformasi perdesaan yang menyejahterakan. Tumpuan pada pengelolaan sumber daya local, menggunakan kapasitas masyarakat local diharapkan menjadi bentuk self-help, sebagai prasyarat pembangunan endogenous, terutama dalam menghadapi tantangan dari luar Adalah pergeseran mekanisme penggerakan pembangunan dari 'government' menjadi 'governance' yang mengubah hubungan kerja antar pemerintah dan masyarakat. IRD yang semula mengkoordinasikan alokasi dana pemerintah di berbagai sector menjadi terintegrasi, mengasumsikan bahwa penggerak ekonomi desa adalah turunnya dana pemerintah beserta project pembangunannya. Dengan 'governance', tidak lagi pembangunan yang disponsori oleh pemerintah saja, namun program dan kegiatan perdesaan merupakan hasil kemitraan antara pemerintah dan masyarakat [6]. Bentuk kemitraan seperti aliansi, jejaring dan pergerakan sosial, koperasi, merujuk pada pola kesejahteraan, berbasis agen, reflektif serta tangguh. Inilah yang mendasari reorganisasi hubungan antara birokrasi dan masyarakat menjadi asosiatif, komunal dan kolektif.

Bentuk kemitraan dari kegiatan pemerintah seringkali mengharuskan masyarakat di perdesaan menyetujui, menerima skema kegiatan tersebut. Kadangkala waktu yang dibutuhkan untuk memahami dan mendiskusikan skema tidak cukup untuk mendapatkan respons masyarakat. Namun apabila ada penolakan terhadap konsep, dan metode dari skema kegiatan pemerintah seringkali diasumsikan pada urungnya alokasi dana diturunkan. Hal ini menutup ruang bagi masyarakat perdesaan yang mempertanyakan, menolak, memberi alternative solusi dalam kegiatan pemerintah. Pada kasus desa berstatus Maju di kab Gunung Kidul, pemerintah desa tidak menutup kesempatan turunnya dana pemerintah melalui penolakan kegiatan, namun melalui adaptasi kegiatan pemerintah terhadap rencana pembangunan desa yang diinisiatifkan di tingkat desa [1]. Kompromi untuk tetap mendapatkan alokasi sumber daya, menjadi jalan tengah bagi pemerintah desa agar berpartisipasi dalam pembangunan.

Tahapan perencanaan PKP sendiri diinisiatifkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemen Desa PDTTrans) terhadap desa berstatus Tertinggal secara massif di beberapa propinsi. Proses konseptualisasi PKP, menggunakan pendekatan perencanaan, yang berjangkar pada sinkronisasi program pemerintah pusat dan daerah pada desa tertinggal tersebut, untuk mengusung tema utama dari PKP di desa tertinggal. Dalam proses pembuatan rencana tersebut, diperkenalkan proses dialog, dengan birokrasi di berbagai tingkatan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, dan juga menjadi aspirasi bagi inisiatif kegiatan pemerintah di tingkat local, termasuk di tingkat desa. Proses dialog dengan warga masyarakat maupun dengan organisasi masyarakat berlangsung untuk mengajak partisipasi aktif dalam pelaksanaannya.

Secara kewilayahan, tema kegiatan yang diusung dalam PKP merupakan tema yang mengintegrasikan kegiatan antar desa. Di Kecamatan Baros, kegiatan produksi pertanian, beserta inovasi teknologi dan pemasarannya yang mengarah pada kemandirian secara sosial ekonomi pada kegiatan inisiatif pemerintah. Dalam PKP ini program yang dibuat, diterjemahkan dalam bentuk pemetaan struktur ruang antar desa, beserta rencana investasi yang dibutuhkan terutama pada program infrastruktur antar desa. Arah tata ruang antar desa tidak lagi diatur ketat melalui zoning atau kode ruang yang keta. Konsep tata ruang dalam PKP dibentuk melalui penjejakan yang bersifat non linear, kontinual, multi scalar dalam masyarakat yang berjejaring (networked society) [6]. Dalam tata ruang PKP, ditekankan pada mobilisasi actor di masyarakat untuk mebangun agenda strategis yang kemudian membentuk pemanfaatan ruang yang diharapkan memicu aktifitas ekonomi, inovasi, perdebatan maupun resistensi.

Dalam nalar interpretasi tata ruang akibat keperluan bagi membangun pergerakan dan akses masyarakat terhadap pasar dan konsumen, peran pemerintah menjadi katapis bagi tindak local, terutama dalam memobilisasi actor lemah (powerless actors) dan menjadi agen pengubah.

METODE PENELITIAN

Studi ini mengurai dan menginterpretasikan pada proses perencanaan PKP Pertanian Mandiri di Kecamatan Baros, Kabupaten Serang. Dimulai dengan mengikuti proses perencanaan PKP, yaitu proses yang meliputi:

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

1. review kebijakan pemerintah yang terkan di perdesaan kecamatan Baros, didalamnya berisikan komitmen pelaksanaannya;
2. pengumpulan data lapangan terutama mendapatkan informasi statistik dan laporan mengenai pengembangan pertanian di tiga desa kecamatan Baros;
3. diikuti dengan penentuan SWOT terutama untuk menjembatani permasalahan pengembangan pertanian antar desa;
4. Focus Group Discussion diutamakan untuk sinkronisasi kegiatan pemerintah antar sector, baik antar dinas di daerah, maupun antara pemerintah pusat dan daerah, serta dengan organisasi /warga masyarakat;
5. penentuan program dan kegiatan pendukung dari pemerintah, yang dapat meningkatkan pelayanan kolektif bagi masyarakat. Di dalamnya juga terdapat rencana investasi antar desa, beserta waktu pelaksanaannya.

Lima tahapan perencanaan PKP Kab Baros, menerapkan model konkuren yang memadukan antara pendekatan analisis kebijakan dengan perencanaan strategis. Namun elemen governance terlacak pada diskusi yang dibahas memasukkan organisasi masyarakat sebagai pelaku kegiatan di masyarakat, serta dalam membangun aliansi antara pemerintah setempat dan masyarakat.

Review dilakukan terhadap hasil dari tahapan dan menerapkan analisis situasi yang berkaitan dengan berjalannya PKP sebagai model governance dan place shaping dalam tata ruang Kawasan Perdesaan. Analisis situasi menerapkan interaksi pihak pemerintah daerah dan masyarakat dalam melewati pentahapan pembuatan dokumen PKP pertanian tersebut. Analisis ini meliputi: 1) interaksi pemerintah pusat dan daerah terutama pertemuan kepentingan antar keduanya dan bagi daerah adalah untuk memudahkan akses terhadap pengetahuan, interaksi serta pendanaan; 2) interaksi pemerintah dengan organisasi / warga masyarakat mengenai rencana pembangunan antar desa, terutama bagi organisasi masyarakat yang belum paham tentang rencana PKP tersebut; 3) analisis SWOT membantu menempatkan posisi tiga desa dalam pengembangan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dan implementasi rencana pemerintah daerah; 4) berjalannya akses infrastruktur, pasar, dan suprastruktur dalam pengembangan Agropolitan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PKP di daerah merupakan suatu proses negosiasi pemerintah antar tingkat, terutama dari tingkat pusat ke daerah terhadap fasilitasi pembangunan antar desa, terutama mendukung pada kegiatan khas perdesaan yaitu di sector pertanian. Interpretasi pertanian, dapat berupa sector pertanian lahan basah atau kering, juga hortikultura, peternakan, perikanan. Dalam ekspansi ekonominya, turunan sub sector dan komoditasnya dapat merambah pada sector pariwisata, ekonomi kreatif, jasa keuangan, serta peningkatan akses terhadap infrastruktur. Kementerian Desa PDTTrans, dimaknai oleh pemkab sebagai kementerian yang memiliki tuas kebijakan berupa fasilitasi pengembangan Kawasan Perdesaan multi tahun, serta menyuarakan alokasi dana sectoral kepada desa tertinggal. Interaksi pemerintah antar tingkat ini juga menyepakati desa desa tertinggal yang potensial dikembangkan secara ekonomi serta memiliki kapasitas masyarakat kolektif dalam kegiatan yang saat ini berjalan. Dengan demikian inisiatif pembangunan kawasan perdesaan tidak semata mata sebagai upaya pemerintah saja, apalagi jika dianggap sebagai model top down. Di sisi lain, pemerintah daerah mengenali beberapa program /kegiatan pemerintah pusat di daerah yang memerlukan komitmen jangka panjang, baik dari sisi pengembangan kebijakan, program maupun implementasinya, namun terhambat setelah beberapa waktu. Pemkab yang sudah memiliki sumbangsih pada program inisiatif pusat tersebut, kehilangan sumber bantuan, tidak saja dari sisi dana namun juga capacity building maupun transfer teknologi yang terhenti. Posisi pemkab dengan demikian merupakan upaya untuk melanjutkan program pembangunan di perdesaan yang sempat terhenti atau belum selesai, terutama yang diinisiatifkan secara sectoral seperti agropolitan, LP2B atau pembangunan pasar.

Pembangunan Kawasan Perdesaan bertemakan pertanian mandiri, menjadi titik ‘jual’ dengan masyarakat di tiga desa. Kegiatan pertanian yang terselenggara di ketiga desa tersebut sudah beragam dengan produksi yang sudah diperjualbelikan ke luar kecamatan. Absennya rantai pemasaran yang memihak petani, memunculkan model tengkulak yang menguasai pergerakan produk pertanian di daerah. Dengan jenis komoditas yang beragam tersebut, pengembangan system logistic termasuk pergudangan, transportasi dan pemasaran memerlukan disain kegiatan yang spesifik, menyesuaikan pada jenis komoditas. Pada skala produksi saat ini, penguasaan pemasaran oleh tengkulak masuk ke dalam skala keekonomian komoditas. Dalam mengejar ketertinggalannya, adalah persiapan system logistic, akses infrastruktur dan pemasaran yang mempertimbangkan skala produksi komoditas beserta pengetahuan tentang asar komoditas yang menjadi

sasaran utama masyarakat. Perwujudan dalam PKP muncul dalam bentuk pelayanan publik seperti akses infrastruktur jalan, modal angkut serta pasar sebagai pusat transaksi /pemasaran. Kelompok tani, maupun kelompok wanita tani, tidak cukup berkutat pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi, serta menghadapi hambatan lingkungan. Kelompok tani telah berfungsi sebagai penyalur pupuk, bibit, teknologi baru, serta terlibat dalam pemasaran komoditas yang dihasilkan anggotanya. Beberapa jenis komoditas tanaman lahan kering, bermitra dengan perusahaan untuk penjualan produksinya. Keberadaan organisasi masyarakatnya tidak mengikat dan mengarah pada berbagi informasi. Interaksi antara pemerintah dengan kelompok masyarakat petani ini pada tahap perencanaan KPK mengarah pada mendapatkan masukan terhadap perencanaan ini. Masukan sebagai aspirasi ini lebih mengarah pada penyediaan pelayanan publik untuk mempermudah akses terhadap kegiatan pertaniannya misalnya pada jaringan jalan yang memadai, adanya lokasi pusat pemasaran, adanya fasilitas keuangan yang dekat dan memahami karakteristik komoditas yang diproduksi, yang memerlukan peran serta pemerintah.

Menitik terhadap hasil SWOT bagi prospek pertanian mandiri (lihat Tabel dibawah), dapat dikenali kondisi masyarakat di ketiga desa menghadapi kekurangan pengetahuan, pengalaman dalam bercocok tanam yang tepat, yaitu mengenai produksi yang efisien dan sesuai kondisi tanah local. Kapasitas masyarakat local dalam berinovasi memerlukan bantuan dari pihak luar. Kelompok Wanita tani (KWT), organisasi bentukan pemkab, merupakan kelompok aktif dalam menggelar pameran produk, dan pemasaran, ditujukan pada diversifikasi pangan. Kegiatan pemasaran dan pengenalan komoditas local tidak dilaksanakan di kecamatan Baros sendiri melainkan ke kota Serang yang berdekatan dengan DKI Jakarta, dan kab Tangerang. Skala ekonomi kota seperti Serang memungkinkan terjadinya transaksi dan pemasaran skala besar, dan intensif. Sebaliknya kecamatan Baros yang direncanakan akan menjadi ibukota kabupaten Serang berlokasi di desa Ciruas Perencanaan PKP kec Baros memperkuat posisinya sebagai Pusat Kegiatan Lokal untuk memfasilitasi transaksi perdagangan local, serta pusat transportasi local. Kawasan Perdesaan kec Baros menjadi areal pengumpul dan areal gugus kendali komoditas, dengan terdapatnya pemasaran dan transaksi skala kecil. Kawasan ini lebih pada pusat informasi komoditas yang dihasilkan dari kawasan ini. Sedangkan dalam unsur pemenuhan pelayanan publik dasar seperti fasilitas kesehatan, pendidikan dan fasiltas pasar, penduduk kecamatan Baros harus bertransportasi ke arah kota Serang. Mengingat jarak dari kecamatan Baros ke ibukota Kab Serang hanya sekitar 13 km [7], pengembangan kec Baros sebagai Pusat Kegiatan Lokal akan memperkuat sebagai pendukung pusat kegiatan yang lebih tinggi.

Tabel 1. SWOT untuk Pertanian Mandiri di kec Baros

Strength	Weakness
• Kondisi tanah di kawasan perdesaan subur dan cocok untuk budidaya pertanian • Lahan pertanian luas • Terdapat sumber air bersih berupa mata air di Desa Sindangmandi • Komoditas hasil perkebunan sudah dipasarkan hingga Jakarta • Terdapat 11 kelompok tani yang mayoritas termasuk ke dalam kelas madya	• Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai cara bertani yang baik. • Komoditas pertanian yang dihasilkan langsung dijual tanpa melalui proses pengolahan. • Penjualan komoditas pertanian dikuasai oleh tengkulak. • Belum terdapat BUMDes. • Kebutuhan air bersih untuk irigasi di Desa Cisalam belum terpenuhi. • Kualitas jalan kawasan perdesaan masih rendah. • Kurangnya sarana dan prasarana kesehatan di kawasan perdesaan
Opportunity	Threat
• Desa Sindangmandi ditetapkan sebagai salah satu Pusat Pelayanan Lingkungan (PPL) yang berfungsi untuk pusat koleksi dan distribusi hasil pertanian serta pelayanan permukiman perdesaan. • Terdapat rencana pengembangan jaringan jalan nasional di Kabupaten Serang berupa usulan jalan	• Terdapat perkebunan buah naga milik investor Malaysia di mana masyarakat hanya menjadi penggarap lahan

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

bebas hambatan prospektif (bersyarat) atau jalan strategis nasional prospektif Kragilan (Kabupaten Serang) – Warunggunung (Kabupaten Lebak) – Panimbang (Kabupaten Pandeglang) – Bandar Udara Banten Selatan. • Terdapat rencana pengembangan sistem jaringan sumber daya air berupa pembangunan bendungan Sindangheula, Cidanau, dan Pamarayan untuk memenuhi kebutuhan kawasan industri, kebutuhan air minum, serta kebutuhan pertanian.	

Penyediaan pelayanan publik di kecamatan Baros diarahkan pada dukungan bagi penciptaan permukiman yang layak huni, melalui penyediaan utilitas dasar seperti jaringan air bersih, dan fasilitas kesehatan saat ini. Pada beberapa permukiman, keberadaan ini menjadi semakin genting untuk mengurangi beban domestic dalam penghidupan masyarakat. Diperbaikinya jaringan jalan terutama menghubungkan desa memungkinkan interaksi antar petani dan pengepulan produk dilaksanakan lebih efisien dan mudah. Namun yang paling perlu dikembangkan dalam PKP adalah dukunga teknologi tepat guna serta transfer pengetahuan dalam peningkatan kualitas dan kuantitas komoditas yang dapat dilakukan dilokasi kecamatan Baros. Hal ini menuntut diseminasi pengetahuan dan teknologi mengadaptasi kondisi lingkungan local, terutama pada taraf pengetahuan masyarakat local.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pembangunan Kawasan Perdesaan (PKP) Mandiri Pertanian yang mengutamakan pada pengintegrasian kebutuhan ruang akan kegiatan sectoral, bukan untuk mengurangi perlunya kegiatan sectoral di kecamatan Baros. PKP menjadi arahan kegiatan yang diharapkan dapat diterjemahkan kepentingannya di tingkat desa, agar dapat pula diadopsi sebagai kegiatan di tingkat desa maupun di tingkat kabupaten. Skala kegiatan PKP yang antar desa ini tidak mendapat alokasi pendanaan secara khusus. Namun tidak diharapkan pula bahwa dengan posisi desa dengan model pembangunan setiap wilayah administrative semakin kuat, maka menciptakan kantong pembangunan yang tidak memperdulikan desa desa sekitarnya. Sebaliknya, meskipun pengelolaan pembangunan skala desa akan dibatasi secara administrative, desa memiliki kepemimpinan fungsional dalam menjaga identitas pertaniannya melalui kerjasama antar desa.

Pada desa status tertinggal, tidak dapat dielakkan bahwa peran extra local forces yang diinisiatifkan oleh pemerintah, baik local maupun pusat, menjadi pemicu masyarakat untuk mendapat aliran informasi, pengetahuan, alih teknologi yang menyesuaikan pada kondisi local. Pembangunan neo-endogenous ini justru menjadi penggerak utama dalam membentuk masyarakat yang akan dipersiapkan untuk mandiri. Hal tidak dapat perlu dikembangkan lebih lanjut dalam PKP ini adalah menjaga dan bahkan meningkatkan hubungan antara pemerintah dan masyarakat secara berkala. Masyarakat menjadi pihak yang memahami cara kerja pemerintah dan memanfaatkan kesempatan yang berasal dari pemerintah. Pada saat yang sama, pengembangan jejaring antara kelompok tani, dengan KWT, pemeirntah daerah dan dinas serta badan menjadi bagian utama untuk menjaga momentum pembangunan perdesaan yang dapat menjaga identitas pertaniannya. Pelaksanaan PKP Mandiri Pertanian memerlukan pengisian makna yang dibentuk dari interpretasi masyarakat terhadap pentingnya pembentukan jejaring tidak saja antar masyarakat melaikan kemitraan dengan pemerintah yang akan menyejahterakan masyarakat secara local.

DAFTAR PUSTAKA

[1] J. Sumner. 2005. Sustainability and the Civil Commons: Rural Communities in the Age of Globalization, Toronto: University of Toronto Press,
[2] Ray. 2000. “Endogenous Social Economic Developmen in European Union: Issues of Evaluation.,” Journal of Rural Studies, vol. 16, no. 4, pp. 447-458,
[3] V. Paul. 2013. “Hopes for the Countryside's Future: An Analysis of Two Endogenous Development Experiences in South-Eastern Galicia,” Journal of Urban and Regional Analysis, pp. 169-192
[4] Pemerintah Kabupaten Serang. 2015. “Perda No 7 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016-2021,” Pemkab Serang, Serang,

[5] J. Morris. 1981. "Synthesis of Integrated Rural Development Projects," Overseas Development Administration, London.
[6] M. Shucksmith. 2009. "Disintegrated Rural Development? Neo - Endogenour Rural Developmetn, Planning and Place-Shaping in Diffused Power Context," European Society for Rural Society, pp. 1-14.
[7] B. K. Serang. 2017. "Badan Pusat Statistik Kabupaten Serang," BPS, 01 01 2017. [Online]. Available: https://serangkab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/4. [Accessed 02 02 2017].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MENTAUTKAN DESA-KOTA MELALUI PENERAPAN *SUPPLY CHAIN FINANCING* PADA KOMODITAS WORTEL DI KOPERASI AL-ITTIFAQ

Tuti Karyani[1)], Nabila Luthfiannisa[1)] dan Ery Supriyadi.R[2)]

[1)2)] Faperta Unpad,
[2)] Ikopin

Email: tutikaryani23@gmail.com

Naskah diterima : 2 Maret 2017 Naskah direvisi: 24 Maret 2017 Disetujui terbit : 27 Maret 2017

ABSTRAK

Koperasi Al-Ittifaq adalah unit usaha agribisnis yang menjadi supplier tetap beberapa supermarket besar yang berada di Bandung dan Jakarta.Permasalahan yang terjadi pada koperasi ini adalah lamanya jangka waktu pembayaran dari supermarket sehingga merugikan koperasi dan petani. Hal ini yang mendasari koperasi menerapkan model supply chain financing (SCF) pada wortel yang difasilitasi oleh Bank BNI 46. Keterkaitan antara Koperasi Al-Ittifaq dengan Supermarket yang difasilitasi BNI ini merupakan bagian dari upaya mentautkan desa dengan kota.Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari model SCF bagi koperasi dan petani wortel. Penelitian dilakukan di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang terletak di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung. Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif, dengan teknik studi kasus. Penentuan sumber data ditentukan dengan sengaja menggunakan teknik bola salju. Informan dalam penelitian ini terdiri atas petani dan pengurus Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan alat analisis deskriptif dan value stream mapping. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rantai pasok wortel ini mampu mentautkan desa dan kota melalui hubungan aliran produk, aliran uang dan aliran informasi.Implementasi Model SCF wortel ini bekerjasama dengan Bank Negara Indonesia dan Lion Super Indoyangberdampak positif bagi petani karena jeda waktu pembayaran dari koperasi menjadi singkat juga, yaitu satu minggu.

***Kata kunci** : Mentautkan desa-kota, Model Supply Chain Finance, Koperasi Al-Ittifaq*

PENDAHULUAN

Wilayah Jawa Barat merupakan salah satu daerah pemasok sayuran untuk memenuhi kebutuhan dalam dan luar negeri, halini disebabkan karena iklim Jawa Barat yang sejuk dan kondisi tanah yang kaya akan unsur hara menjadi faktor pendukung kesuksesan daerah Jawa Barat untuk menghasilkan tanaman sayuran dan buah yang berkualitas baik. Produk sayur dan buah dari Jawa Barat dapat dengan mudahnya ditemukan di pasar tradisional dan supermarket yang ada di daerah Jakarta dan sekitarnya. Salah satu sentra sayuran Jawa Barat adalah Kabupaten Bandung dengan wortel sebagai salah satu komoditas unggulannya. Produktivitas wortel Kab. Bandung pada tahun 2014 sebesar 222,32 kwintal/ha.

Koperasi Al-Ittifaq merupakan Pondok Pesantren yang mengelola Koperasi yang mewadahi kelompok tani wortel yang berada di daerah sekitar Desa Alam Endah. Koperasi ini setiap harinyamensuplai permintaan wortel beberapa supermarket yang berada di daerah Bandung dan Jakarta.Jumlah sayuran wortel yang dikirimkan bergantung pada permintaan dari pihak supermarket. Saat ini Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq telah bekerjasama dengan empat supermarket besar yang berada di Bandung dan Jakarta, yaitu Lion Super lindo (LSI), Lottemart, Toserba Yogya, dan Griya.

Wortel baru dapat dikirimkan apabila telah terjadi kesepakatan harga jual antara pihak koperasi dengan pihak supermarket. Harga jual ini ditentukan oleh pihak koperasi yang kemudian diajukan kepada pihak supermarket. Perubahan harga dilakukan setiap dua minggu sekali. Ketika barang telah sampai di supermarket, pihak supermarket tidak akan langsung membayar pada hari itu juga, terjadi penundaan pembayaran. Pihak

supermarket baru akan membayarkan tagihannya pada bulan berikutnya. Berikut ini merupakan salah satu skema alur transaksi pembayaran dari Toserba Yogya dan Griya:

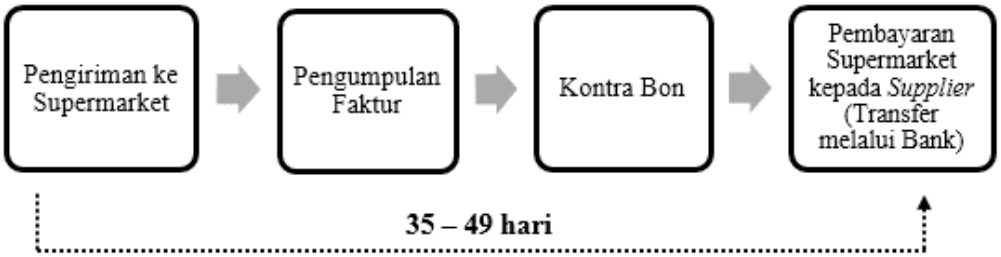

Gambar 1. Alur Transaksi Pembayaran dari Toserba Yogya dan Griya
Sumber: Bayu, Kartib dan Sulistiyo, Dedi [1] (2010)

Padahal menurut Perdana dan Avianto dalam Karyani (2013) [2], aliran uang akan menentukan kelancaran dan kesinambungan dalam aliran produk.*Lead time* yang panjang membuat para petani mitra dan *supplier* tidak dapat bertahan dalam rantai pasok tersebut. Model *supply chain financing* (SCF) diharapkan membantu *supplier* dan petani untuk mempersingkat jeda waktu pembayaran yang dilakukan oleh supermarket.

Menurut Hoffman [3], *Supply Chain Financing* (SCF) adalah bagaimana mengelola modal kerja, arus kas antara perusahaan sepanjang rantai pasokan baik dalam bentuk pembayaran antara vendor dan pembeli atau dalam bentuk keuangan.Saat ini Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq menjalankan model *supply chain financing* (SCF) pada komoditas wortel yang berorientasi pada supermarket. Model pembiayaan ini bekerjasama antara Bank Negara Indonesia (BNI) dan Lion Super Indo (LSI). Pada tahun 2013 BNI yang merupakan sebuah lembaga keuangan memiliki program *supply chain financing*, kemudian menjalin kerjasama dengan supermarket LSI untuk membantu membayarkan tagihan yang dimiliki oleh LSI kepada para *supplier.*Oleh karena itu menarik untuk diteliti mengenai bagaimana proses bisnis pelaku bisnis pada pelaku pada rantai pasok wortel di Koperasi Al-Ittifaq serta implementasinya dan dampak yang ditimbulkan dari model pembiayaan *supply chain financing* (SCF), baik bagi koperasi mau pun bagi petani. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:

1. Proses bisnis petani wortel di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq, DesaAlam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung.
2. Implementasi dari model pembiayaan tersebut di Koperasi PondokPesantren Al-Ittifaq, Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung
3. Dampak yang ditimbulkan dari model *Supply Chain Financing* (SCF) bagiKoperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq dan petani wortel di Desa AlamEndah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung,

Konsep Rantai Pasok dan Pembiayaan Rantai Pasok (*Supply Chain Financing*)

Kredit pertanian bukan sekedar sebagai faktor pelancar pembangunan pertanian, akan tetapi berfungsi pula sebagai satu titik kritis pembangunan pertanian (*critical point of development*) [4].Pada suatu rantai pasok terdiri atas lebih dari 2 pelaku, sehingga keperluan terhadap kredit atau pembiayaannya berbeda tergantung pada proses bisnisnya. Menurut Pujawan [5], rantai pasok adalah jaringan perusahaanperusahaan yang secara bersama-sama bekerja untuk menciptakan dan menghantarkan suatu produk ke tangan pemakai akhir. Ling Li [6] dan Vorst [7], menyatakan bahwa rantai pasok lebih menekankan pada semua aktivitas dalam memenuhi kebutuhan konsumen yang di dalamnya terdapat aliran dan transformasi barang mulai dari bahan baku sampai ke konsumen akhir dan disertai dengan aliran informasi dan uang.

Supply chain financing adalah layanan yang diberikan oleh bank kepada*buyer* dan/atau s*upplier* dalam rangka pembayaran atas pengadaan barang dan jasakebutuhan operasional *buyer* kepada *supplier*. Menurut USAID [8], *supply chain financing* adalah produkkeuangan dan jasa yang mengalir ke atau melalui setiap titik dalam rantai pasokdalam rangka meningkatkan pengembalian atas investasi dan pertumbuhan dandaya saing rantai pasok itu. Dengan pembiayaan rantai pasok, risiko danpengembalian dari penyedia keuangan ditanggung bersama oleh pelaku dalamrantai pasok. SCF awalnya difokuskan pada lintas batas perdagangan timur-barat.

Hubungan antara pembeli dan pemasok sudah menjadi ciri khas sebuah kekuatanyang seimbang dalam hal mencari keuntungan sejak dahulu.Terdapat tiga komponen biaya yang menjadi fokus dalam *supply chainfinancing*, yaitu biaya pemasaran, biaya distribusi, dan biaya logistik. Menurut KIT and IRR [9], menyebutkan bahwa komponen yangmembentuk suatu rantai pembiayaan adalah *chain actor* dan *chain supporter*.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Berikut ini penjelasan mengenai kedua komponen tersebut:

1. Pelaku Utama Rantai Pasok (*Chain Actor*)

   Chain actor adalah pihak yang memiliki komoditas dalam suatu rantaipasok. Selanjutnya KIT dan IIRR membagi *chain actor* kedalam duabagian, yaitu penjual (*the seller*) dan pembeli (*the buyer*). Setiap pelakudalam rantai pasok dapat menjadi penjual, pembeli, atau sebagai penjualdan pembeli.
2. Pelaku Pendukung Rantai Pasok (*Chain Supporter*)

   Chain supporter adalah pihak yang tidak memiliki komoditas, namunhanya bertindak sebagai pelancar kegiatan dalam rantai pasok tersebut.Dalam *supply chain financing*, lembaga keuangan merupakan chainsupporter.

METODE PENELITIAN

Objek penelitian ini adalah mentautkan desa-kota melalui penerapan *supply chain financing* (SCF) wortel pada Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq yang lokasinya di Desa Alam Endah, Kecamatan Rancabali, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.Desain penelitian yang digunakan adalah desain kualitatif. Teknik penelitian yang digunakan adalah studi kasus (*case study*).Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini adalah teknik wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi pustaka.Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain: 1) Analisis Deskriptif untuk mendeskripsikan proses bisnis petani wortel dan aliran rantai pasok wortel di Koperasi Al-Ittifaq; 2) *Value Stream Mapping* (VSM) untuk mengetahui implementasi dan dampak yang ditimbulkan dari model SCF terhadap petani dan Koperasi Al-Ittifaq.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses Bisnis Petani Wortel di Koperasi Al-Ittifaq

Koperasi Al-Ittifaq memiliki dua gudang, yaitu gudang untuk Bandung dan gudang untuk Jakarta. Setiap gudang memiliki petani pemasoknya masing-masing dan terdapat koordinator yang bertanggung jawab terhadap pasokan wortel dikedua gudang tersebut. Peran koordinator dalam kegiatan usahatani wortel di Koperasi Al-Ittifaq adalah untuk menyediakan wortel sesuai dengan permintaan konsumen dan menjadi jembatan bagi petani yang akan memasok wortel ke koperasi. Koordinator yang bermitra dengan koperasi merupakan anggota koperasi.

Petani Wortel Untuk Supermarket Bandung

Berikut ini gambaran proses bisnis petani wortel untuk supermarket Bandung:

Gambar 2. Proses Bisnis Wortel di Gudang Bandung

Berdasaran Gambar 2, petani wortel melakukan proses budidaya wortel mulai dari tanam hingga panen selama kurang lebih 120 hari. Setelah dipanen langsung dilakukan pencucian hingga bersih, kemudian wortel dibawa oleh petani ke rumah koordinator menggunakan mobil *pick up*. Proses selanjutnya setelah pencucian adalah proses *sortasi* dan *grading* wortel. Wortel dibagi menjadi tiga kategori, yaitu kategori *baby* wortel, wortel curah, dan wortel barang sisa (BS).

Tabel 1. Kategori Wortel Untuk Gudang Bandung

Wortel Curah	***Baby* Wortel**
Memiliki panjang 15 – 25cm.	Memiliki panjang ≤ 10 cm.
Tidak memiliki warna hijau pada pangkal wortel.	Tidak memiliki warna hijau pada pangkal wortel.
Tidak bercabang.	Tidak bercabang.
Tidak terdapat cacat pada fisik wortel.	Tidak terdapat cacat pada fisik wortel.
Segar.	Segar.

Wortel yang tidak termasuk ke dalam kriteria di atas, disebut BS. Yang jumlahnya sekitar 30% dari total keseluruhan wortel. Wortel selanjutnya dikemas sesuai dengan permintaan dari pihak supermarket, untuk *baby* wortel dikemas menggunakan plastik *wrap*. Wortel curah dikemas menggunakan kantong plastik dengan komposisi sesuai dengan yang tertera dalam *purchase order* dari supermarket. Wortel yang sudah dikemas kemudian dibawa ke gudang yang berada di koperasi untuk ditimbang jumlah pasokan pada hari tersebut dan dicatat ke dalam buku kas koordinator. Koperasi Al-Ittifaq membeli wortel curah dari koordinator dengan harga Rp 9.000/kg dan Rp 5.000/kg untuk *baby* wortel. Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq menerapkan sistem pembayaran tunda kepada para koordinator yang memasok produk ke gudang Bandung. Koordinator akan menerima uang hasil penjualan wortelnya satu minggu sekali yaitu setiap hari Jum'at. Jumlah tagihan yang harus dibayarkan oleh koperasi dapat dilihat di buku kas milik koordinator, karena seluruh koordinator yang bermitra dengan koperasi memiliki buku kasnya masing-masing.

Sistem pembayaran tunda yang diterapkan koperasi tidak terlalu memberatkan koordinator,. Hal ini dikarenakan pendapatan koordinator tidak hanya dari menjual wortel kepada koperasi, tetapi juga menjual wortel ke Pasar Induk Caringin, Bandung. Wortel-wortel yang masuk ke dalam kategori BS, dijual ke Pasar Induk Caringin. Sistem pembayaran di Pasar Induk Caringin adalah tunai, sehingga koordinator mendapatkan uang dari pasar untuk membiayai kebutuhan sehari-hari.

Petani Wortel Untuk Supermarket Jakarta

Gudang Jakarta memiliki sistem yang hampir sama dengan gudang Bandung dalam hal alur masuknya wortel ke gudang. Hal yang berbeda dari gudang Bandung adalah tugas koordinator disini hanya sebagai pencari wortel saja, tidak perlu melakukan *sortasi*, *grading* dan pengemasan. Alur proses bisnis untuk gudang Jakarta dapat dilihat pada Gambar 3 :

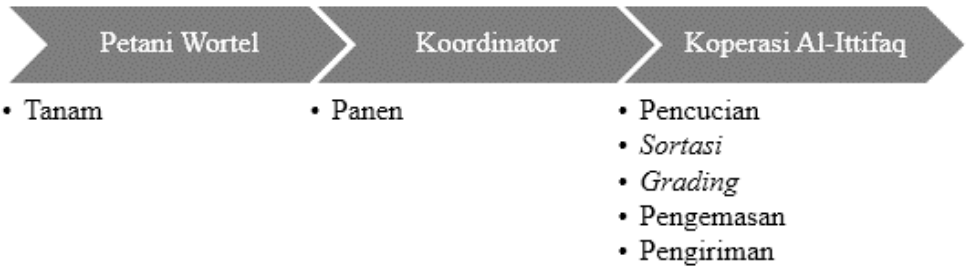

Gambar 3. Proses Bisnis Wortel di Gudang Jakarta

Berdasarkan Gambar 3, tugas seorang koordinator hanya mencari sayuran wortel yang siap panen kemudian membeli wortel tersebut dari petani wortel dengan harga Rp 2.000/kg. Proses panen dilakukan langsung oleh tiga orang pekerja yang dibayar dengan harga Rp 500/kg untuk satu timnya. Wortel yang sudah dipanen langsung dibawa ke gudang Jakarta yang berada di Koperasi. Wortel yang dijual ke koperasi dicuci, di*sortasi*, di-*grading*, dan di kemas oleh santri-santri yang bekerja di koperasi bagian gudang Jakarta. Rata-rata pasokan wortel yang masuk ke gudang adalah 68 kg setiap harinya. Koperasi membeli wortel dari koordinator dengan harga Rp 5.000/kg, dengan kriteria wortel tersebut segar, tidak terdapat warna hijau pada pangkalnya, tidak bercabang dan berukuran 15 – 25 cm, dan tidak terdapat *baby* wortel.

Pola pembayaran yang diterapkan koperasi kepada koordinator wortel adalah pembayaran tunda, dengan jeda waktu satu minggu. Ini juga berlaku untuk seluruh petani dan koordinator yang memasok barangnya ke gudang Jakarta. Untuk gudang Jakarta, pembayaran dilakukan setiap hari Sabtu.

1. Rantai Pasok Wortel di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq

Berdasarkan pemetaan yang dilakukan di lapangan, dapat ditemukan rantai utama dalam agribisnis wortel di Koperasi Al-Ittifaq

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

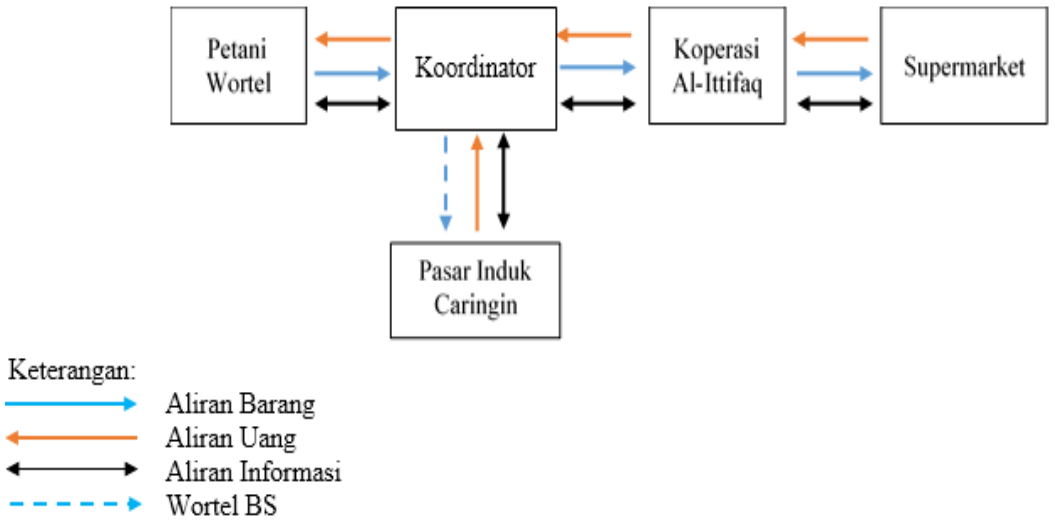

Gambar 4. Rantai Pasok Agribisnis Wortel di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq

Aliran pertama adalah aliran barang yang mana dalam rantai pasok tersebut berupa wortel yang diawali dengan bentuk input produksi di tingkat petani, selanjutnya input ini diproses pada kegiatan budidaya yang hasilnya berupa wortel. Wortel yang sudah dipanen kemudian dikumpulkan di tempat tinggal koordinator untuk dilakukan proses *sortasi*, *grading*, dan pengemasan. Wortel-wortel yang sudah terkumpul kemudian dikirimkan kepada supermarket Lottermart yang berada di Jakarta pada pukul 22.00 WIB menggunakan mobil *pick up* dan supermarket LSI yang berada di daerah Bandung pada pukul 05.00 WIB menggunakan mobil *box*. Aliran ini merupakan aliran yang bergerak dari desa ke kota. Desa Alam Endah ke kota Bandung dan Jakarta. Aliran kedua adalah aliran uang berupa transaksi yang terjadi antar pelaku rantai pasok. Aliran uang bergerak sebaliknya yaitu dari supermarket ke koperasi, lalu ke coordinator dan petani. Di sini terjadi aliran uang dari kota ke desa.

Aliran ketiga adalah aliran informasi yang merupakan faktor utama lancarnya arus aliran barang dan aliran uang. Aliran informasi bergerak dari dua arah, yaitu dari petani kepada supermarket dan dari supermarket kepada petani. Informasi yang bergerak dari petani kepada supermarket biasanya berupa jumlah produksi wortel yang dihasilkan petani, kebutuhan input produksi, harga yang berlaku dikalangan petani, kontrak kerja antara koperasi – supermarket, koperasi – koordinator dan koordinator – petani. Informasi yang bergerak dari arah hilir ke hulu atau dari supermarket kepada petani adalah *purchase order*, *purchase performance*, *service level* koperasi, bukti terima barang, kriteria produk, dan harga beli wortel. Aliran barang, aliran uang dan aliran informasi ini menunjukkan bahwa terjadi hubungan keterkaitan antara desa dan kota dan sebaliknya.

2. Implementasi *Supply Chain Financing* Pada Wortel di Koperasi Al-Ittifaq

Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq mulai menerapkan model pembiayaan SCF sejak tahun 2013. Pada tahun yang sama, BNI dan LSI menjalin kerjasama terkait dengan program SCF dimiliki oleh BNI. Model pembiayaan SCF merupakan salah satu fasilitas kredit yang diberikan BNI kepada *supplier* dari nasabah utama BNI, yaitu ritel modern. Pelaksanaan model pembiayaan SCF ini melibatkan kerjasama dengan tiga pihak, yaitu Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq sebagai *supplier*, supermarket LSI sebagai *buyer*, dan BNI sebagai lembaga keuangan.

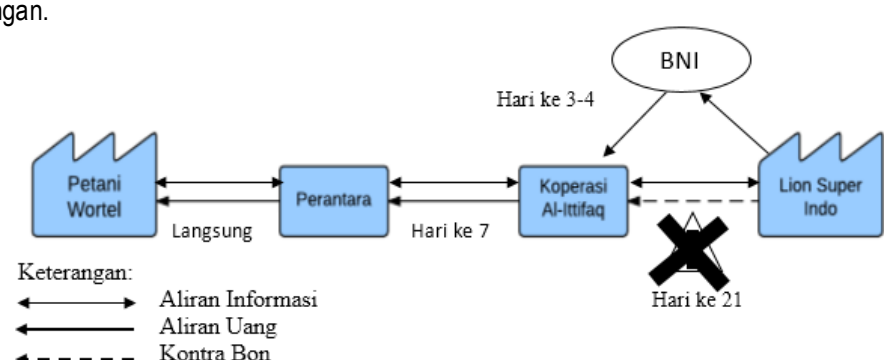

Gambar 5. Peta Aliran Uang Agribisnis Wortel dengan Model SCF

ISBN : 978-602-73463-1-4

Berdasarkan Gambar 5, dengan adanya SCF dari BNI, jeda waktu pembayaran dari LSI menjadi lebih singkat. Melalui penerapan model SCF ini, Koperasi Al-Ittifaq sudah dapat menerima uang pelunasan LSI yang dibayarkan oleh BNI 3-4 hari setelah *kontra bon*. *Kontra bon* adalah sebuah bukti sah pembelanjaan LSI kepada Koperasi Al-Ittifaq yang digunakan untuk mencairkan uang pelunasan LSI. Singkatnya jeda waktu pembayaran membawa dampak baik bagi kelangsungan usahatani wortel di Koperasi Al-Ittifaq.

Perhitungan SCF Wortel

Perhitungan SCF yang diterapkan oleh Koperasi Al-Ittifaq pada komoditas wortel adalah sebagai berikut:

Biaya SCF = Total Tagihan – (0,03% x *lead time* pembayaran x total tagihan)

Keterangan:

- 0,03 % adalah persentase biaya yang ditentukan oleh BNI.
- *Lead time* pembayaran adalah jumlah jeda hari antara tanggal dikeluarkannya *kontra bon* oleh LSI dan tanggal seharusnya LSI membayarkan tagihannya.

Tabel 2. Biaya SCF Wortel Pada Bulan Februari 2016

Minggu Ke-	Total Tagihan LSI	Lead Time	Biaya SCF	Penerimaan Koperasi
1	Rp 330.400	29	Rp 2.874	Rp 327.526
2	Rp 413.000	36	Rp 4.460	Rp 408.540
3	Rp 742.000	29	Rp 6.455	Rp 735.545
4	Rp 581.000	36	Rp 6.275	Rp 574.725
Total	Rp 2.066.400		Rp 20.064	Rp 2.046.336
Rabat (2,5%)	Rp 51.660			

Biaya SCF adalah biaya yang dikenakan oleh BNI kepada Koperasi Al-Ittifaq setiap *kontra bon*. SCF merupakan salah satu skim kredit yang dimiliki oleh BNI, sehingga terdapat biaya potongan yang harus ditanggung oleh koperasi. Berdasarkan Tabel 2, jumlah biaya SCF yang harus dibayar oleh koperasi pada bulan Februari 2016 adalah Rp 20.064 dan terdapat biaya rabat 2,5%. Menurut Ketua Koperasi Al-Ittifaq, jumlah biaya SCF yang dibebankan kepada koperasi tidak terlalu memberatkan karena koperasi dapat menerima uang lebih cepat dan dapat diputar kembali untuk membiayai kebutuhan lainnya.

Pada lembar MoU antara Koperasi Al-Ittifaq dan LSI, masa pembayaran LSI kepada Koperasi Al-Ittifaq selama 21 hari setelah *kontra bon* dan dalam satu bulan terjadi dua kali pencairan uang oleh LSI, yaitu pada tanggal 5 dan 20. Namun dengan adanya sistem SCF, koperasi dapat menerima uang pembayaran dari LSI lebih cepat dari biasanya dan tidak perlu menunggu tanggal 5 dan 20 setiap bulannya, karena BNI akan mengirimkan uang pelunasan LSI ke rekening koperasi 3-4 hari setelah *kontra bon*. Semakin singkatnya jeda waktu pembayaran membuat kelangsungan usahatani wortel di Koperasi Al-Ittifaq menjadi lebih lancar, ini sebuah keuntungan yang dirasakan oleh koperasi. Keuntungan lainnya yang didapatkan Koperasi Al-Ittifaq dari sistem SCF ini adalah BNI langsung mengirimkan seluruh uangnya kepada koperasi tanpa dicicil dan tanpa harus menunggu pihak LSI melunasi tagihannya kepada BNI.

Dampak dari Model SCF Terhadap Petani dan Koperasi

Koperasi Al-Ittifaq mempunyai dua gudang, yaitu gudang Bandung dan gudang Jakarta. Gudang yang sudah menerapkan model SCF adalah gudang Bandung, sedangkan gudang Jakarta masih belum menggunakan model tersebut. Gudang Jakarta belum menggunakan model SCF karena dari pihak Lottemart dan Bank BJB belum menerapkan model SCF. Oleh karena itu, untuk menentukan dampak dari model SCF dapat dilakukan dengan cara membandingkan keadaan gudang Bandung dan gudang Jakarta.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Gudang Jakarta

Jenis sayuran yang dikirimkan oleh gudang Jakarta ke Lottemart lebih sedikit, namun jumlah yang dikirimkan lebih banyak dibandingkan dengan gudang Bandung. Lottemart adalah supermarket yang menyediakan berbagai jenis sayuran dalam jumlah besar, karena rata-rata konsumen yang berbelanja ke Lottemart adalah hotel, restoran, kantor, dan *catering*. Begitu pula dengan sayuran wortel, dalam seminggu volume rata-rata permintaan wortel di gudang Jakarta sebesar 735 kg dengan proses pendistribusian yang dilakukan setiap hari.

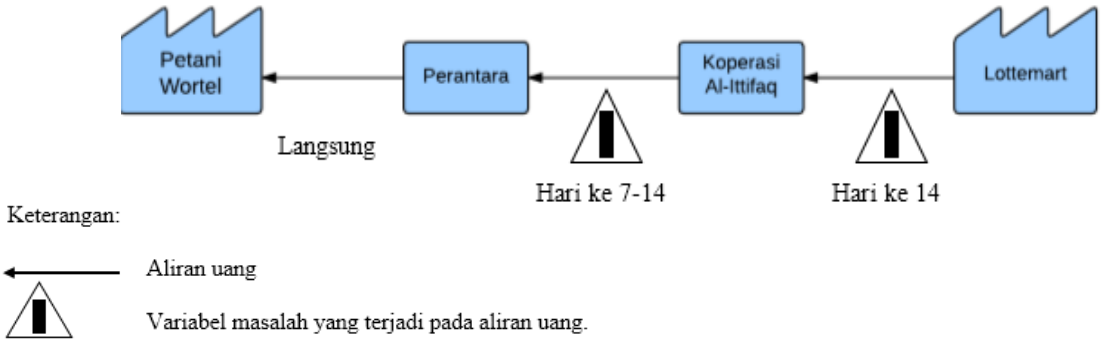

Gambar 6. Peta Aliran Uang Agribisnis Wortel Tanpa Model SCF

Berdasarkan Gambar 6, masa pembayaran Lottemart kepada Koperasi Al-Ittifaq dilakukan 14 hari setelah *kontra bon*. Jeda waktu selama 14 hari dirasa cukup lama bagi koperasi, karena selama jeda waktu tersebut koperasi tidak mendapatkan pemasukan. Untuk mempertahankan kelangsungan usahatani di Gudang Jakarta, Koperasi Al-Ittifaq harus menyediakan modal dua kali lipat dari biasanya. Setiap minggunya pada hari Sabtu, Koperasi Al-Ittifaq bagian gudang Jakarta melakukan pembayaran produk kepada koordinator. Hal ini lah yang menjadi salah satu kendala yang memberatkan koperasi, karena mereka harus menyediakan uang setiap minggunya untuk melunasi tagihan kepada koordinator. Pembayaran produk ke koordinator terkadang ikut terlambat hingga dua minggu karena koperasi tidak memiliki uang untuk melunasi tagihan. Keterlambatan pembayaran ini biasanya terjadi pada awal-awal bulan, karena pada awal bulan pihak Lottemart melakukan potongan rabat sekitar 6%, sehingga jumlah uang yang diterima oleh koperasi menjadi lebih sedikit dan tidak mencukupi untuk membayar produk ke koordinator. Potongan rabat 6% tentunya memberatkan koperasi, karena potongan tersebut jumlah pendapatan petani menjadi berkurang. Namun demikian peraturan ini tidak bisa diganggu gugat oleh koperasi

Berbagai upaya sudah dilakukan oleh Koperasi Al-Ittifaq untuk melakukan pembayaran produk kepada koordinator secara tepat waktu, salah satunya adalah berdiskusi dengan Lottemart supaya mereka memperpendek jeda waktu pembayaran kepada koperasi. Pihak koperasi juga menawarkan Lottemart untuk menggunakan model SCF, namun mereka belum mau menggunakan karena Bank BJB belum memiliki program SCF.

Dampak Model SCF Terhadap Koperasi dan Petani

Tabel 3. Perbandingan Gudang Bandung dan Jakarta

	Gudang Bandung	**Gudang Jakarta**
Model pembiayaan	SCF.	Non SCF.
Jeda waktu pembayaran	3 – 4 hari setelah *kontra bon*.	14 hari setelah *kontra bon*.
Bank yang digunakan	BNI.	BJB.
Jeda waktu pembayaran kepada koordinator	7 hari.	7 – 14 hari.
Kondisi Gudang	Lebih teratur, rapi, dan bersih.	Kurang bersih.
Manajemen	Terdapat struktur dan pembagian tugas yang jelas.	Masih belum terdapat pembagian tugas yang jelas bagi para santri.
Jumlah komoditas yang dikirimkan	148 jenis.	17 jenis.
Kegiatan produksi	*Sortasi*, *grading*, *packaging*, pengiriman.	Panen, pencucian, *sortasi*, *grading*, *packaging*, pengiriman.

Berdasarkan Tabel 3, gudang Bandung yang menggunakan model SCF terlihat lebih baik bila dibandingkan dengan gudang Jakarta yang tidak menggunakan model SCF. Model SCF membawa dampak baik bagi Koperasi Al-Ittifaq, karena dengan singkatnya jeda waktu pembayaran. Uang pelunasan yang diterima oleh koperasi digunakan untuk operasional dan pengembangan koperasi. Pemasukan dari koperasi juga digunakan untuk membantu memenuhi kebutuhan Pondok Pesantren Al-Ittifaq.

Dari Tabel 3 juga nampak bahwa jeda waktu pembayaran kepada petani dan koordinator pada gudang Bandung adalah tujuh hari dan gudang Jakarta adalah 7-14 hari. Bagi petani dan koordinator yang memasok sayurannya kepada gudang Bandung, jeda waktu tujuh hari tidak terlalu menjadi masalah. Namun bagi petani yang memasok sayuran ke gudang Jakarta menjadi masalah, karena jeda waktu tersebut terlalu lama bagi petani yang hanya memiliki pemasukan dari koperasi. Lamanya jeda waktu pembayaran kepada petani gudang Jakarta menyebabkan beberapa petani tidak mau menjual sayurannya kepada koperasi, sehingga jumlah petani mitra semakin berkurang dan koperasi kesulitan untuk memenuhi permintaan sayuran dari Lottemart.

Penerapan model SCF di Koperasi Al-Ittifaq bagian gudang Bandung memberikan dampak baik bagi petani. Uang pelunasan dari LSI yang diterima lebih cepat dapat digunakan koperasi untuk membantu petani dan anggota koperasi yang membutuhkan pinjaman uang atau yang mau mencairkan uangnya lebih cepat dari waktu yang sudah ditentukan. Koperasi juga dapat memenuhi sarana produksi pertanian yang dibutuhkan petani. Penerapan model SCF memberikan dampak baik bagi petani dan koordinator, walaupun secara tidak langsung dirasakan oleh petani.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Proses bisnis petani wortel di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq ialah menanam, memelihara, memanen dan mencuci wortel; adapun proses bisnis pada koordinator ialah sortasi, grading dan mengemas; proses bisnis di koperasi hanya mengirimkan melalui dua saluran, yaitu saluran yang berasal dari koordinator gudang Bandung dan gudang Jakarta. Pemasaran ke Jakarta menggunakan cara pembayaran tunda (jeda) waktu antara 7 sampai 14 hari setelah wortel dikirimkan, adapun untuk pemasaran ke Bandung sudah melai diterapkan model Supply chain financing (SCF). Dari proses bisnis antar pelaku dalam rantai ini menunjukkan adanya hubungan keterkaitan antara desa dan kota.
2. Implementasi dari model SCF di Koperasi Pondok Pesantren Al-Ittifaq membantu koperasi untuk mempersingkat jeda waktu pembayaran tagihan LSI menjadi lebih cepat, yaitu 3-4 hari setelah *kontra bon*. Setiap *kontra bon*, BNI mengenakan biaya sekitar 0,03% dari jumlah tagihan LSI kepada Koperasi Al-Ittifaq. Pemotongan biaya 0,03% tidak memberatkan bagi koperasi dan koperasi merasa sangat terbantu dengan adanya model SCF ini.
3. Dampak yang ditimbulkan dari penerapan model SCF di Koperasi Al-Ittifaq bagi petani adalah jeda waktu pembayaran dari koperasi kepada petani menjadi lebih singkat bila dibandingkan dengan yang tidak menggunakan model SCF. Jeda waktu pembayaran kepada petani yang menggunakan model SCF adalah 7 hari, sedangkan jeda waktu untuk petani yang tidak menggunakan model SCF mencapai 14 hari.

Saran

1. Model SCF diharapkan dapat direplikasi di unit usaha agribisnis lainnya dan diterapkan oleh Koperasi Al-Ittifaq kepada seluruh supermarket yang menjadi mitra kerja selama ini, seperti Lottemart, Griya, dan Toserba Yogya.
2. SCF meningkatkan hubungan desa dengan kota melalui kegiatan transaksi pemasaran hasil pertanian.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Bayu, Kartib. Sulistiyo, Dedi. 2010. "Model Pembiayaan Usaha Kecil dan Menengah Pemasok ke Peritel Besar." Majalah
[2] Ilmiah UNIKOM, Volume 10 No 1: 51-64.
[3] Karyani, Tuti dkk. 2013. "Model Pembiayaan Pra Panen Pada Rantai Pasok Agribisnis Berdasarkan Sistem Produksi Komoditas Cabai Merah dengan Orientasi Pasar Terstruktur." Bandung.LPPM Universitas Padjadjaran.
[4] Hofmann, E. 2005. Supply Chain Finance: Some Conceptual Insights, Kühne Institutfür Logistik (KLOG-

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

HSG) Universität St.Gallen Dufourstrasse, Wiesbaden.
[5] Ashari. 2009. "Oprimalisasi Kebijakan Kredit Program Sektor PertanianIndonesia". Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian, Volume 7 No. 1: 21-42.
[6] Pujawan,INyoman. 2005. SupplyChainManagement, Edisi Pertama. Guna Widya, Surabaya
[7] Ling li 2007. Supply chin Management: Concept, techniques and practices enhancing value through collaboration. Singapore: World Scientific Publishing Co.Pte.,Ltd
[8] Vorst. 2000. Effective Food Supply Chain, Generting Modelling nd Evaluating Supply Chain Scenario. PHd Thesis Wageningen University.
[9] USAID. 2010. "Value Chain Finance". Melalui http://www.apps.delebridge.net/amap/index.php/Value_Chain_Finance [11/07/11].
[10] KIT and IIRR. 2010. Value Chain Finance: Beyond Microfiance for Rural Entrepreneurs. Royal Tropical Institute, Amsterdam; and International Institute of Rural Reconstruction, Nairobi.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

MODEL PENGEMBANGAN PERDESAAN KAWASAN PERBATASAN KECAMATAN RUPAT UTARA KABUPATEN BENGKALIS

Umar Mansyur[1)]

[1)]Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Pakuan - Bogor

Email :mumarputra@yahoo.com

Naskah diterima : 22 Februari 2017 Naskah direvisi: 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 7 Maret 2017

ABSTRAK

Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Bengkalis terletak di pesisir pantai utara Kawasan Selat Malaka dan berba-tasan langsung dengan Malaysiasertamerupakan pulau dan pesisir dengan hamparan pesisir pantai berpasir putih terpan-jang di Indonesia dengan potensi nilai jual pariwisataeksotis. Beberapa isu pokok kawasan diantaranya adalah: 1) fisik-lingkungan (kondisi prasarana dasar dan sarana umum kurang memadai kuantitas maupun kualitas pelayanannya; terjadi kerusakan dan penurunan mutu lingkungan kawasan;dan kurangdukungan teknologi informasi untuk pelayanan sistem transportasi laut/pelabuhan, darat, dan udara); 2) sosial-ekonomi (aktivitas yang khas dibanding kawasan lainnya; berpotensi perkebunan dan perikanan dengan sistem tradisional; sebagai PKLyang pendukung pertumbuhan PKW sebagaisimpul kegiatan ekonomi regional; dan terdapat sejumlah besar endemik dan keanekaragaman tipikal bernilai tinggi); dan 3) sosial-kependudukan (khas dibanding kawasan lainnya; dan terletak pada wilayah perbatasan laut strategis pertahanan dan ke-amanan).Kajian ini bertujuan untuk: 1) mengidentifikasi tipologi perdesaan kawasan perbatasan; dan 2) merumuskan model pengembangan perdesaan kawasan perbatasan. Pendekatan analisis yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif pembobot-an untuk mengidentifikasi tipologi desa dan deskriptif kualitatif kebijakan untuk merumuskan model pengembangan perdesa-an. Hasil kajian adalah: 1) Tipologi perdesaan adalah: desa campuran di wilayah pesisir/pantai dengan pola permukiman desa perkampungan pertanian dengan mata pencaharian desa pertanian/nelayanyang swadaya; dan2) Model pengem-bangan perdesaan kawasan perbatasan yang terpadu mencakup model integrasi spasial berjenjang dan terintegrasi berupa pola ruang yaituhutan bakau magrove, pariwisata pantai, perkebunan, permukiman berciri kota/ecofarming, housing, resort, permukiman nelayan, tempat rekreasi dan permukiman perdesaan serta struktur ruang yaitupusat pelayanan skala regional dan BPW, rencana jalan dan rencana pelabuhan penyeberangan antarnegara.

Kata kunci: *pengembangan, perdesaan, perbatasan*

PENDAHULUAN

Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu daerah dengan wilayah kepulauan di Provinsi Riau, dimana salah satu kecamatan yaitu Rupat Utara dengan Ibukota Tanjung Medang terdiri dari delapan desa dan berada pada pesisir Pantai Utara di Kawasan Selat Malaka atau berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia. Secara umum daerah ini merupa-kan pulau dan pesisir dengan hamparan pesisir pantainya yang potensial untuk pariwisata dan merupakan daerah peme-karan dari Kecamatan Rupat. Beberapa potensi dan permasa-lahan serta isu strategis di Kecamatan Rupat Utara, diantara-nya adalah: 1) memiliki nilai jual yang sangat eksotis, karena berpantai pasir putih terpanjang di Indonesia; 2) sebagai be-randa depan negara perlu dukungan teknologi informasi dan pelayanan sistem transportasi laut (pelabuhan), darat, dan udara yang berdaya saing; 3) kawasan yang memiliki batas fisik yang jelas yaitu perbatasan laut akan bersifat bersifat insular dan memiliki sejumlah besar endemik dan keaneka-ragaman yang tipikal dan bernilai tinggi; 4) aspek sosial, eko-nomi dan budaya masyarakat kawasan perbatasan bersifat khas dibandingkan dengan kawasan lainnya; 5) terletak pada wilayah perbatasan laut strategis terhadap aspek pertahanan dan keamanan, maka terdapat keterkaitan hubungan trans-portasi dan aksesibilitas yang baik dan mudah dengan wila-yah lain; 6) sebagai pusat Kegiatan

Lokal (PKL) untuk pendu-kung pertumbuhan PKW Bengkalis dan simpul kegiatan eko-nomi regional di kawasan tersebut; 7) potensi alamiah khusus-nya perkebunan dan perikanan sebagian besar masih dikelola secara tradisional; 8) kondisi prasarana jalan yang berada di desa perbatasan masih terbatas dan minim, baik kondisi jalan di desa-desa hinterlandnya serta relatif jauh dari pusat kota sehingga belum mampu mendukung fungsi dan peran sebagai kawasan perbatasan; 9) kondisi prasarana dasar dan sarana umum, seperti pendidikan, kesehatan, perdagangan, jasa kurang memadai, termasuk listrik dan air bersih serta teleko-munikasi, baik dari sisi kuantitas maupun kualitas pelayanan-nya; dan 10) kerusakan dan penurunan mutu lingkungan, khu-susnya terhadap hutan, gambut, bakau hingga abrasi pantai.

Kajian ini bertujuan untuk:1)mengidentifikasi tipologi per-desaan kawasan perbatasan;dan 2)merumuskan model pe-ngembangan perdesaan kawasan perbatasan. Untuk mencapai tujuan kajian digunakanmetode pende-katan deskriptif kuantitatif untuk mengidentifikasi tipologi desa dan deskriptif kualitatif untuk merumuskan model pengemba-ngan perdesaan. Kawasan perbatasan merupakan kawasan strategis nasio-nal dari sudut kepentingan pertahanan keamanan atau kawa-san yang diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting secara nasional terhadap kedaulatan negara dan per-tanahan dan keamanan negara tetapi pendekatan penanga-nan kawasan perbatasan telah diubah dari pendekatan ke-amanan (*security approach*) menjadi pendekatan kesejah-teraan (*prosperity approach*),sedangkan Wilayah tertinggal (*underdevelopment*) merupakan sebuah kondisi suatu wilayah dengan wilayah lainnya dengan suatu perbandingan dimana melekat tiga konsep utama yaitu kemiskinan, penduduk miskin dan wilayah yang miskin/daerah miskin [1] [2] [3].

Pesisir dan kepulauan atau sering dikatakan sebagai wila-yah pesisir adalah daerah peralihan antara ekosistem darat dan laut yang dipengaruhi oleh perubahan di darat dan laut di mana ke arah laut 12 mil dari garis pantai untuk provinsi dan sepertiga dari wilayah laut itu (kewenangan provinsi) untuk kabupaten/kota dan ke arah darat batas administrasi kabu-paten/kota, sedangkan pulau kecil adalah pulau dengan luas lebih kecil atau sama dengan 2.000 km2 (dua ribu kilo meter persegi) beserta kesatuan ekosistem-nya [4]. Oleh karena itu, pesisirmerupakan daerah pertemuan an-tara darat dan laut; ke arah darat meliputi bagian daratan, baik kering maupun terendam air, yang masih dipengaruhi sifat-sifat laut seperti pasang surut, angin laut, dan perembesan air asin; sedangkan ke arah laut meliputi bagian laut yang masih dipengaruhi oleh proses-proses alami yang terjadi di darat seperti sedimentasi dan aliran air tawar, maupun yang dise-babkan oleh kegiatan manusia di darat seperti penggundulan hutan dan pencemaran.

Desa (*rural*) berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal atau tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup dengan norma serta memiliki batas yang jelas sedangkan per-desaan (*village*) adalah bentuk pengembangan dari istilah desa yang lebih mengacu pada ciri-ciri wilayah yang lebih luas. Sedangkan tipologi desa atau perdesaan [1], terdiri dari:

1. Berdasarkan Sistem Ikatan Kekerabatan, maka ciri-ciri fisik desa dalam sistem kehidupan masyarakat dimana terben-tuk ikatan-ikatan kekerabatan dalam wilayah permukiman penduduk, maka tipologi desa digolongkan tipe desa cam-puran, yaitu suatu desa dimana penduduknya mempunyai ikatan keturunan dan wilayah dalam bentuk ikatan darah dan ikatan wilayah sama kuatnya dan desa seragam/homogen yaitusuatu desa dimana penduduknya mempu-nyai ikatan keturunan dan wilayah dalam bentuk ikatan darah dan ikatan wilayah tidak sama kuatnya.
2. Berdasarkan Hamparan Wilayah, maka desa dapat dikla-sifikasikan atas desa pedalaman dan desa pantai/pesisir.
3. Berdasarkan Pola Pemukiman(desa pertanian), maka ter-dapat tipe desa pertanian *farm village type*, yaitu suatu desa dimana orang bermukim secara besama-sama dalam suatu tempat dengan sawah ladang yang berada di sekitar tempat mereka. Tipe desa seperti ini banyak dijumpai di Asia Tenggara termasuk Indonesia dan tipe desaindustri*industry village type*, yaitu suatu desa dimana orang ber-mukim secara besama-sama dalam suatu tempat dengan bahan mentah industri yang berada di sekitar tempat mere-ka. Tipe desa seperti ini banyak dijumpai di negara industri maju.
4. Berdasarkan Mata Pencaharian, maka mata pencaharian pokok dapat diklasifikasikan dalam desa pertanian dan desa industri.
5. Berdasarkan Perkembangannya, maka tipe desa di Indone-sia terbagi atas empat tipe, yakni: Pra desa (desa trade-sional), desa swadaya, desa swakarya dan desa swasem-bada.

Zona Perdesaan Baru (*the new rural zone*) dalam tataran konsep dan model dapat mencakup: zona pertanian (*farming zone*) dengan zona utama area pertanian; zona aktivitas perdesaan (*rural activity zone*) yaitu zona fleksibel antara pertanian dan kegiatan penunjang lainnya; zona kehidupan perdesaan (*rural living zone*) adalah zona permukiman perde-saan; dan zona konservasi perdesaan (*rural conservation zone*) yaitu zona perlindungan lingkungan [5].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Pengembangan perdesaan dalam bentuk model dapat dimulai dari hakekat pembangunan dimana dapat diartikan sebagai suatu proses peningkatan kualitas kehidupan masya-rakat sehingga dinilai lebih baik dari sebelumnya. Sedangkan pembangunan wilayah perdesaan dapat diartikan sebagai pe-ningkatan taraf hidup masyarakat dan perbaikan lingkungan perdesaan agar lebih baik dari sebelumnya.Indikator taraf hidup masyarakat biasanya digunakan ekonomi melalui besar-nya pendapatan per kapita di wilayah tersebut.Sedang indi-kator lingkungan dinilai melalui keberlanjutan(*sustainability*). Pembangunan perdesaan harus mampu meraih aspek-aspek pertumbuhan, pemerataan, kesejahteraan dan keberlanjutan [1].

Agar dicapai keberhasilan pembangunan, setiap wilayah termasuk perdesaan dapat memilih teori,model dan strategi pembangunan wilayah perdesaan,yang umum telah ditentu-kan sebelumnya dalam bentuk tujuan pembangunan dan me-rupakan penerapan paradigma pembangunan yang pada umumnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat pa-da wilayah bersangkutan [1]. *Grand* disain pengembangan wilayah dan kawasan di Indonesia sangat beragam karena dipengaruhi oleh perkem-bangan teori dan model pengembangan wilayah serta tatanan sosial-ekonomi, sistem pemerintahan dan administrasi pemba-ngunan.Secara umum terdapat dua tinjauan model pemba-ngunan yaitu model sektoral dan model regional-spasial.

Model pengembangan wilayah berdimensi spasial memba-has aspek-aspek integrasi fungsional yang berkaitan dengan lokasi, industri, urbanisasi, komplementaritas, dan peningkat-an hubungan desa-kota dan antar kota untuk menunjang pro-ses pembangunan. Model spasial pengembangan wilayah dapat dikelompokkan menjadi tiga yaitu:(1) model pusat per-tumbuhan sebagai pendalaman pendekatan pembangunan dari atas "*development from above*" yang berorientasi pada kota dan industri, (2) model desentralisasi territorial yang me-nekankan pada pembangunan perdesaan dan pertanian sebagai pendalaman pendekatan pembangunan dari bawah "*development from below*" serta (3) model integrasi spasial yang mencoba mengintegrasikan dua model sebelumnya dengan memberikan perhatian pada model hubungan antar kota dan desa. Seluruh model tersebut relevan digunakan sebagai dasar pengembangan wilayah perdesaan dan penyesuaian terhadap tipe dan karakter perdesaan [1].

Konsep pengembangan kawasan desa terpadu pernah di-laksanakan melalui berbagai ragam program pengembangan kawasan terpadu, yang pada asalnya merupakan upaya pem-bangunan wilayah-wilayah khusus yang bersifat lintas sektoral dan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah yang relatif ter-tinggal. Pada dasarnya program ini berorientasi pada strategi pemerataan pembangunan, yang dapat berorientasi sektoral apabila terkait dengan beragamnya kegiatan sektoral dalam satu wilayah, dan dapat berorientasi regional apabila terkait dengan upaya suatu wilayah untuk meningkatkan perekono-mian dari kesejahteraan suatu kawsan tertentu agar dapat memiliki kondisi sosila ekonomi yang lebih meningkat [2] [3].

Pendekatan yang komprehensif dan mengacu kepada ke-terpaduan antar sektor telah banyak dilakukan, dalam berba-gai fokus kawasan pengembangan, seperti pengembangan wilayah kepulauan, pengembangan konservasi lahan krisis atau yang terkait dengan kepentingan mempertahankan dan melestarikan lingkungan hidup, pengembangan kawasan pe-nyangga, pengembangan sosial budaya, pembinaan masya-rakat terasing dan pengembangan wilayah tertinggal maupun perabatasan. Model integrasi spasial merupakan jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang menekankan petumbuhan pada wilayah perkotaan (model pusat pertumbuhan) dan desen-tralisasi teritorial yang menekankan pada penyebaran inves-tasi dan sumberdaya pembangunankota dan perdesaan dengan menganjurkan pembentukan sistem spasial yang mengintegrasikan pembangunan perkotaan dan perdesaan. Hal ini dilakukan dengan menciptakan suatu jaringan produksi, distribusi dan pertukaran yang mantap mulai dari desa-kota kecil-kota menengah-kota besar (metropolitan).

Pendekatan alternatif ini didasari pemikiran bahwa dengan adanya integrasi sistem pusat-pusat pertumbuhan yang ber-jenjang dan berbeda karakteristik fungsionalnya, maka pusat-pusat tersebut akan dapat memacu penyebaran pemba-ngunan wilayah [2] [3]. Pendekatannya adalah memacu perkembangan sektor pertanian yang diintegrasikan dengan sektor industri pendukungnya.Berdasarkan asumsi tersebut, sasaran dari strategi ini adalah meningkatkan produksi pertainan,memperluas lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan bagi sebagian besar penduduk, terutama penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan.

Untuk mendukung perkembangan pertanian sehingga nilai komersial produk pertanian meningkat di perdesaan, maka permukiman-permukiman harus membentuk suatu sistem yang terintegrasi sehingga pelayanan sarana dan prasarana dapat berlokasi secara efisiensi dan penduduk perdesaan memiliki akses yang baik terhadap sarana tersebut atau mampu diakses oleh semua lapisan masyarakat perdesaan. Tanpa akses terhadap pusat-pusat pasar yang terintegrasi maka penduduk perdesaan (petani) akan mengalami kesulitan di dalam pemasaran hasil pertanian, sulit mendapatkan *input-output* produksi, modernisasi pola-pola pertanian, penyesuai-an produk terhadap selera pasar (konsumen) dan mendapat-kan pelayanan-pelayanan yang

dibutuhkan untuk meningkat-kan kualitas hidup diperdesaan [2] [3].

Model integrasi spasial mencakup dua instrumen yang di-gunakan untuk mewujudkan model yaitu pembentukan sistem permukiman yang terintegrasi dan hirarkis dan keterkaitan spasial.Keterkaitan spasial merupakan elemen kunci dari pen-dekatan integrasi spasial.Selain itu, perkembangan pada suatu wilayah dipengaruhi oleh perkembangan dan perbedaan fungsi permukiman serta keterkaitan antar permukiman mau-pun antara permukiman dengan wilayah pengaruhnya (pelaya-nannya).Kenyataanmemperlihatkan bahwa suatu wilayah bukan hanya dibentuk oleh sistem permukiman yang terpisah dengan fungsi masing-masing, namun juga oleh jaringan dan interaksi sosial, ekonomi, dan fisik. Proses interaksi tersebut dimungkinkan oleh adanya keterkaitan antar permukiman [1] [2] [3].

Dengan adanya keterkaitan spasial ini penduduk yang tinggal diwilayah perdesaan memiliki aksesibilitas terhadap berbagai pelayanan, fasilitas, infastruktur, dan kegiatan pere-konomian yang berlokasi di pusat-pusat desa, kota pasar (ke-camatan), maupun pusat wilayah (regional). Melalui hubungan keterkaitan ini pula, diharapkan penduduk perdesaan dapat memperoleh input yang dibutuhkannya untuk meningkatkan produktifitas pertanian dan mendukung kegiatan pemasaran.Bentuk atau model pengembangan desa perbatasan terpadu berbasis integrasi spasial dapat dirumuskan dalam bentuk dua hal, yaitu :

1. Pola Ruang yang terdiri dari: peruntukan ruang-ruang; zonasi penggunaan ruang, dan penentuan kawasan prio-ritas; dan
2. Struktur Ruang yang terdiri dari :pengembangan pusat-pusat pelayanan: penyediaan fasilitas-fasilitas pelayanan kegiatan pertanian, perdagangan dan jasa, sosial, dan in-dustri; rencana pengembangan sistem prasarana: jaringan jalan, drainase, pengairan, air bersih, listrik, telekomunikasi dan sistem jaringan lainnya.

METODE PENELITIAN

Lokasi kajian di Kecamatan Rupat Utara Kabupaten Beng-kalis secara geografis dan administratif merupakan pemeca-han atau pemekaran Kecamatan Rupat yakni pada tanggal 16 Agustus 2001 berdasarkan Peraturan Daerah No. 06 Tahun 2001, dengan Ibu Kota Tanjung Medang. Letak geografis wilayah Kecamatan Rupat Utara berada pada 101^0 253' LU - 101^0 47' 14" LU, dan 0^0 55' 24" BT - 2^0 7' 41" BT dan dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Malaka/Malaysia
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Rupat
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Rupat
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir

Kecamatan Rupat Utara mempunyai luas 628,5 Km^2 dan memiliki 8 (delapan) desa dengan 38 RW dan 81 RT [6] [7], ke delapan desa tersebut dengan masing-masing luasnya ada-lah sebagai berikut:

Tabel 1. Kecamatan Rupat Utaraberdasarkan Luas Wilayah Desa

Desa/Kelurahan	Luas (km^2)	Persentase (%)
Titi Akar	185.0	29.44
Tanjung Medang	75.0	11.93
Teluk Rhu	72.5	11.54
Tanjung Punak	66.0	10.50
Kadur	76.0	12.09
Hutan Ayu	56.0	8.91
Suka Damai	59.0	9.39
Putri Sembilan	39.0	6.21
Total	**628.5**	**100**

Sumber: Kecamatan Rupat Utara dalam Angka, 2016

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan pene-litian deskriptif yang bersifat kualitatif dan kuantitatif untuk mengidentifikasi tipologi perdesaan dan merumuskan model pengembangan perdesaan. Teknik pengumpulan dataPrimer berupa: identifikasi kondisi obyektif desa (fisik, sosial budaya, ekonomi, infra-struktur); identifikasi potensi ekonomi ungulan (tiap desa di wilayah perencanaan); dan Inventarisir permasalahan. Teknik analisisyang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif pembobotan untuk mengidentifikasi tipologi desa, yaitu hasil identifikasi tipologi perdesaan di lokasi kajian dan analisis deskriptif kualitatif kebijakan untuk

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

merumuskan model pengembangan perdesaan, yaitu rumusan model pe-ngembangan berdasarkan kondisi faktual di lapangan dan kaitannya dengan kebijakan yang terkait dengan lokasi kajian. Kerangka fikir kajian ini dapat dilihat pada Gambar 1

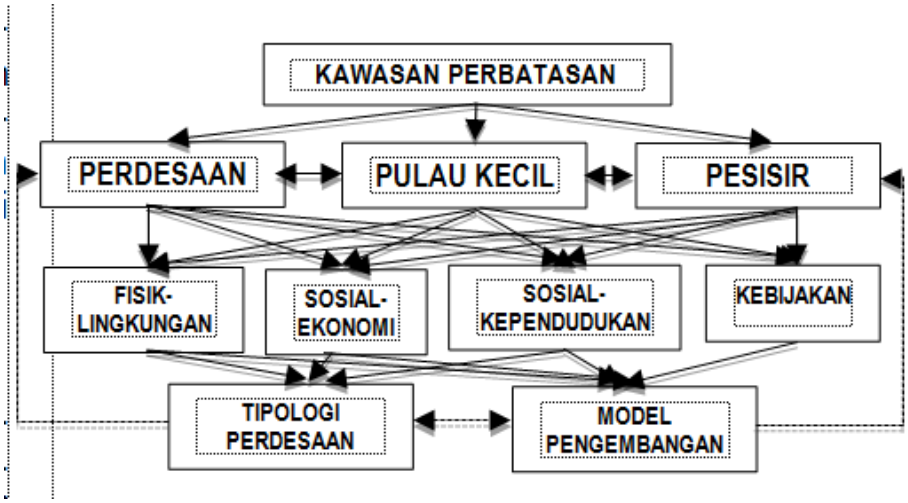

Gambar 1. Kerangka Fikir Kajian

Peta lokasi kajian secara administrasi dapat dilihat pada Gambar 2.

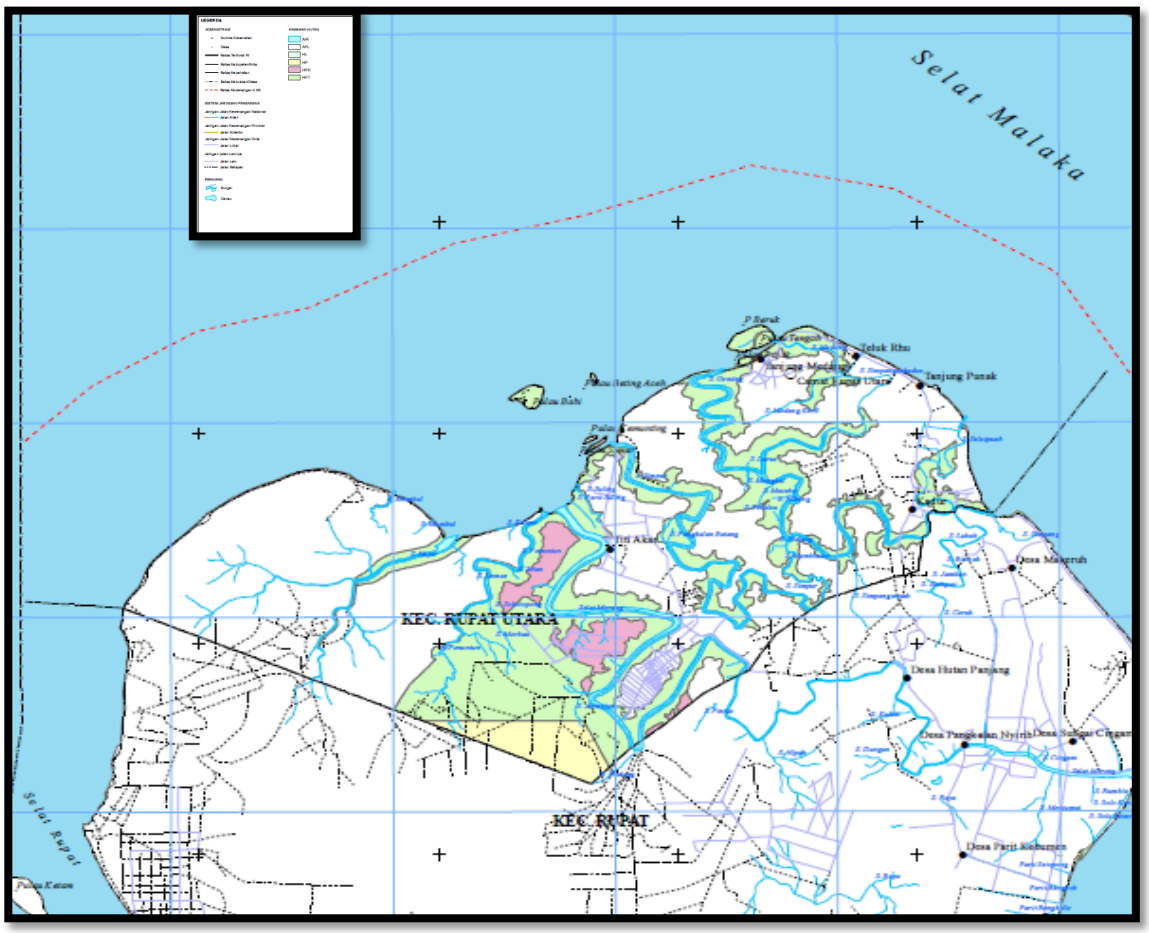

Gambar 2. Peta Administrasi Kecamatan Rupat Utara

ISBN : 978-602-73463-1-4

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fisik-Lingkungan

Kondisi topografi Kecamatan Rupat Utara secara umum dapat diklasifikasikan sebagai daerah berkontur datar dengan kemiringan antara 0^0-5^0 dan dapat disimpulkan bahwa lokasi kajian merupakan kawasan yang tepat untuk aktivitas per-desaan dan perkotaan.Untuk kelerengan tersebutberartipada ketinggian wilayah tidak jauh berbeda dengan ketinggian muka air laut, selanjutnya diperparah dengan sistem drainase yang kurang baik, sehingga menyebabkan lokasi kajian rawan terhadap genangan/banjir. Sebenarnya daerah ini cocok untuk pengembangan bangunan dengan intensitas tinggi, seperti perdagangan, perumahan, perkantoran, namun diperlukanperencanaan khusus untuk mengatasi daerah genangan tersebut.

Kondisi geologi didominasi oleh endapan permukaan muda berbentuk rawa gambut berwarna abu-abu kecoklatan ter-dapat pada keadaan basah, sangat lunak, elastis, rekah kerut tinggi dan mengandung bahan organik. Harga tekanan *uncon-fined streght* kurang dari 0,5 kg per cm^2 dan memiliki sifat keteknikan buruk, kurang teguh, daya dukung rendah dan mudah terjadi amblesan maupun erosi. Batuan dasar terdapat pada kedalaman lebih dari 60 meter.Pengikisan dapat terjadi di semua daerah tepian selat, sungai dan parit sebagai akibat hantaman oleh gelombang dan pasang surutterutama disebabkan oleh buruknya sifat tanah yang bersifat lunak, sehingga menyebabkan garis pantai semakin landau dan mundur. Keadaan ini juga akan merusak tumbuhan bakau, sedangkan lumpur hasil pengikisan juga menyebabkan pen-dangkalan setempat,sehingga mengganggu jalur lalu lintas air.

Berdasarkan data Peta Hidrogeologi, maka kondisi hid-rologi merupakan wilayah dengan lapisan tak terlipat dan miring lemah.Komposisi litologi berupa aluvium yang terdiri dari lempung, lanau, kerikil lempungan, sisa tumbuhan dan gambut.Kelulusan air pada material lempung termasuk ren-dah, sedangkan material kasar tergolong sedang.Air tanah terdapat pada lapisan akuifer dengan sistem aliran yang mela-lui ruang antar butir, sehingga lapisan tersebut termasuk akui-fer produktif dengan penyebaran luas.Sifat keterusan air tanah pada lapisan akuifer termasuk sedang dan muka air tanah dangkal dapat dijumpai dekat dengan permukaan tanah dan debit sumur dapat mencapai lebih dari 5 liter/detik.Pulau Rupat memiliki 6 (enam) sungai, yaitu Senebak, Raya, Rem-pang, Nyiur, Sair dan Penuntun. Lebar sungai berkisar antara 8-15 m dengan kedalaman 0,5-1,5 m dengan debit sungai sesaat diperkirakan berkisar antara 3,6-6,0 m^3/detik, dengan kondisi dasar sungai berlumpur, pasir dan kuarsa dan potensi sedimentasi seluruh sungai berkisar 8,09-31,6ton/tahun.

Kondisi kemiringan lahan didominasi dengan slope antara 5-15% dan 0-2% serta 15-25% yang berarti kondisi tersebut memungkinkan untuk aktivitas perkotaan/perdesaan. Kondisi klomatilogi berdasarkan karakteristik iklim hampir sama dengan kondisi iklim di wilayah Indonesia pada umum-nya, yaitu beriklim tropis dengan 2 musim yaitu musim hujan dan musim kemarau dengan jumlah curah hujan rata-rata 1.705,90 mm/tahun dengan temperatur udara berkisar antara 26-32^0C. Menurut klasifikasi Oldeman, maka lokasi kajian ter-masuk zone agroklimat E dengan sub zona agrolimat E3, yaitu daerah dengan jumlah bulan keringnya (curah hujan < 100 mm/bulan) 4-6 bulan dalam setahun.

Potensi ekosistem hutan mangrove (hutan bakau) ter-dapat sejenis dengan hutan bakau di Pulau Rupat pada umumnya yang terdiri dari *Avicenniamarina*, *Ceriopstagal*, *Rhizophoramucronata*, *Sonneratiaalba*, *Xylocarpusgranatum*, *Sonneratiacoscolaris*, dan *Exsocariaagallacha*. Ketujuh jenis vegetasi mangrove tersebut yang mendominasi wilayah pesisir dan bantaran sungai Pulau Rupat dan telah banyak mem-berikan andil terhadap pembangunan di daerah ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Pada umumnya, kawasan hutan mangrove (bakau) terse-but berhadapan langsung Selat Malaka dan sudah mengalami kerusakan, sedangkan kelompok hewan laut yang dominan adalah moluska, udang tertentu dan beberapa ikan yang khas. Penggunaan lahan di lokasi kajianterdiri dari 8 (delapan) jenis yaitu: Pemukiman,Hutan Bakau (*Mangrove*), Badan Air(Sungai/Genangan),Lahan Basah(Sawah/Rawa), Lahan Ko-song, Perkebunan, Hutan Campur dan Semak Belukar (lihat Tabel 2). Pulau Rupat mempunyai beberapa tipologi ekosistem, diantaranya semak belukar, habitat hutan bakau dan habitat hutan sekunder dan hampir dapat dijumpai di seluruh wilayah pulau, sedangkan habitat hutan bakau dijumpai di sepanjang pesisir pulau dan ekosistem ini memiliki keterkaitan yang erat dengan vegetasi dan satwa yang dapat hidup pada habitat tersebut (lihat Gambar 3).

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 2.Penggunaan Lahan Kecamatan Rupat Utara berdasarkan Urutan Luas Penggunaan

Penggunaan Lahan
1. Hutan Bakau (Magrove)
2. Badan Air (sungai/genangan)
3. Lahan Basah (sawah/rawa)
4. Permukiman
5. Lahan Kosong
6. Perkebunan
7. Hutan Campuran
8. Semak Belukar

Sumber: Kecamatan Rupat Utara dalam Angka, 2016

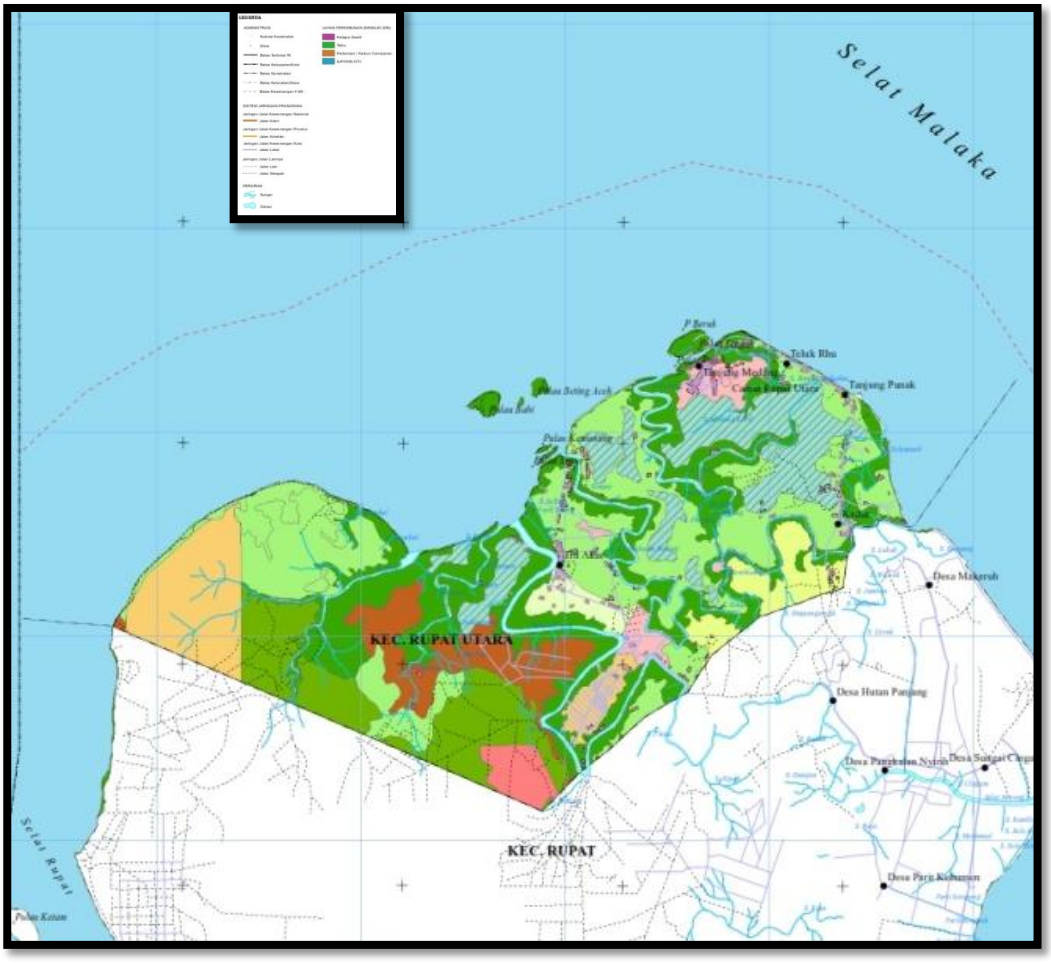

Gambar 3 Peta Penggunaan Lahan Kec. Rupat Utara

Pada umumnya sumber air bersih yang digunakan oleh masyarakat di Pulau Rupat adalah air hujan dan air tanah.Infrastruktur penampungan air hujan biasanya dimiliki lang-sung oleh penduduk, sedangkan sarana yang disediakan oleh pemerintah baru dalam bentuk menara penampungan ter-dapat beberapa unit dan belum dapat memenuhi semua kebu-tuhan masyarakat. Kualitas air tanah yang digunakan dikategorikan kurang memenuhi standar kesehatan sehingga perlu diusahakan sumur-sumur air artesis. Untuk pembuangan limbah rumah tangga, biasanya masyarakat membuat di lubang resapan.Di samping itu, ada pula masyarakat yang membuat kakus serta septik tank.Namun demikian masih ada pula sebagian masya-rakat yang menggunakan sungai sebagai tempat pembuangan kotoran.

Terdapat Gardu Induk 0,56 MV di Kecamatan Rupat dengan sistem jaringan distribusi tegangan menengah 20 KV di Kecamatan Rupat dan Kecamatan Rupat Utara dan sebagian besar berupa kabel 'bentang' dan telah di pasang sampai sebagian besar wilayah perdesaan. Dengan sistem tramisi dan distribusi saat ini, sarana penyaluran yang dibangun memang belum memadai sehingga masih perlu ditingkatkan mengingat makin

tingginya permintaan yang harus dilayani.Wilayah ini akan terkoneksi dalam sistem Interkoneksi C Wilayah Utara dan didukung dengan 1 PLTG Duri yang rencananya akan dibangun.

Pada saat ini di Pulau Rupat belum ada prasarana telepon kabel.Namun demikian, sinyal telepon seluler dari beberapa operator seluler sudah dapat menjangkau pulau ini, sehingga komunikasi dengan telepon seluler juga relatif sudah banyak dilakukan penduduk. Pengelolaan air limbah rumah tangga yang berasal dari kakus (*blackwater*) penduduk sebagian besar menggunakan pengolahan setempat (*onsite*), yaitu berupa tangki septik dan sistem peresapan (lubang resapan) di halaman rumahnya. Sedangkan untuk air limbah yang berasal dari mandi, cuci dan dapur (*greywater*), umumnya dibuang langsung ke saluran drainase yang ada di depan rumah. Namun sebagian masya-rakat juga masih melakukan pembuangan air limbah lang-sung ke badan air seperti sungai dan pantai, terutama bagi masyarakat yang berada di sekitar kawasan tersebut.

Panjang total jalan utama adalah 143,43 km dengan fisik jalan yang telah disemen sepanjang 40 km dan jalanan dengan pengerasan tanah sepanjang 10 km. Sarana transpo-rtasi darat pada umumnya menggunakan kendaraan bermotor roda dua dan hanya ada satu atau dua buah buah mobil di pulau ini. Sarana pendaratan ikan dan pelabuhan berjumlah 2 buah, yaitu satu di Kecamatan Rupat Utara dan satu di Keca-matan Rupat.Selain itu, sarana pelabuhan rakyat ditemui hampir di semua desa pesisir Pulau Rupat.Sarana trans-portasi laut digunakan untuk angkutan penumpang maupun barang. Angkutan penumpang misalnya dalam bentuk speed fiber dengan kapasitas angkut sekitar 30-40 orang dan mela-yani jalur Tanjung Medang-Titi Akar-HutanSamak-Dumai. Sedangkan transportasi kapal barang menggunakan kapal motor pompong yang mengangkut bahan makanan pokok dan material bangunan dari luar pulau. Adapun jalur transportasi menuju ke Kecamatan Rupat Utara adalah sebagai berikut:

1. Dari Kota Pekanbaru menggunakan moda darat dapat melalui Dumai ke Batu Panjang hingga ke Tanjung Medang dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam 20 menit;
2. Dari Kota Pekanbaru menggunakan moda udara dapat melalui Dumai ke Batu Panjang hingga ke Tanjung Medang dengan waktu tempuh kurang lebih 50 menit;
3. Dari Bengkalis menggunakan moda darat dapat melalui Dumai ke Batu Panjang hingga ke Tanjung Medang dengan waktu tempuh kurang lebih 80 menit atau dari Kota Bengkalis ke Tanjung Medang dengan menggunakan motor pompong akan menempuh waktu 5 jam dan dengan speedboat kurang lebih 150 menit;
4. Dari Dumai ke Tanjung Medang menggunakan speedboat akan menempuh waktu 150 menit; dan
5. Dari Tanjung Medang ke Batu Panjang menggunakan speedboat akan menempuh waktu 3 jam, menggunakan motor pompong selama 6 jam dan melalui darat sekitar 3 jam.

Sosial-Ekonomi

Struktur perekonomian kawasan perbatasan Kecamatan Rupat Utara mendapat kontribusi terbesar dari sektor per-tanian yang sebagian besar disumbang oleh subsektor per-kebunan, subsektor perikanan, dan tanaman bahan makanan, selanjutnya diikuti oleh sektor perdagangan, hotel, dan resto-ran (subsektor perdagangan besar dan eceran). Berdasarkan data kecamatan, terdapat 1 KUD di Desa Tanjung Medang dan 1 non KUD di Desa Kadur.Mata pencaharian penduduk di lokasi kajian terutama kepala keluarga mempunyai pekerjaan utama pada sektor pertanian dan sebagian kecil disektor per-dagangan/jasa lainnya.

Luas panen padi lading adalah 52 Ha yang tersebar di semua desa dengan jumlah produksi tanaman padi sebesar 71,1 ton. Produksi tanaman sayuran terbanyak adalah sayu-ran ketimun sebanyak 13.5 ton. Sedangkan untuk buah-buahan dengan produksi terbanyak dihasilkan durian dan pisang dengan jumlah produksi masing masing 237,1 ton dan 197,4 ton. Tanaman perkebunan dengan luas area tanaman perkebunan untuk tanaman kelapa 107 ha, untuk karet 3.802 ha, dan untuk kelapa sawit 753 ha. Dengan produksi 76,1 ton buah kelapa, 3.984,1 ton karet, serta 1.025,1 ton kelapa sawit. Tanaman karet yang produksinya terbesar berpeluang men-jadi komoditas unggulan dan untuk terus dikembangkan menghasilkan produk turunan dari karet yang dijadikan bahan baku untuk tujuan ekspor.

Populasi ternak di lokasi kajian menurut data BPS Kabupaten Bengkalis yakni sapi 1.043 ekor, kambing 586 ekor, dan ayam ras pedaging, ayam kampung, dan itik yang dikelompokkan dalam kategori unggas sebanyak 21.487 ekor. Populasi Unggas terbanyak terdapat di Desa Titi Akar dengan 7.562 ekor diikuti dengan Desa Tanjung Medang dengan 4.812 ekor, selanjutnya Desa Kador dan Desa Teluk Rhu masing-masing 2.903 dan 1.842 ekor.

Luas area perikanan di lokasi kajian memiliki area yang terkecil dibandingkan dengan seluruh kecamatan di kawasan perbatasan dan tidak termanfaatkan secara maksimal.Pro-duksi perikanan terbesar adalah ikan laut, dimana produksi ikan laut merupakan produksi yang terbesar di Kabupaten Bengkalis

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

sedangkan produksi ikan air tawar di lokasi kajian tidak dihasilkan. Produksi perikanan berdasarkan Kecamatan Rupat Utara Dalam Angka 2016 berjumlah 250,3 ton; yang terdiri perikanan laut 248 ton dan perikanan air tawar 2,3 ton. Jumlah rumah tangga nelayan/perikanan pada tahun 2016 antara lain untuk perikanan laut 515 keluarga dan budidaya kolam sebanyak 37 keluarga.Adapun produksi ikan air laut hasil tangkapan terbanyak terdapat di Desa Teluk Rhu dan Titiakar dengan jumlah produksinya masing-masing 113 dan 110 ton.

Potensi sektor pariwisata pantai pasir putih di lokasi kajian terbentang disepanjang pesisr pantai diantaranya Pantai Tanjung Lapin, Pantai Pesona, Pantai Teluk Rhu serta objek wisata mangrove yang tersebar di bantaran Sungai Tanjung Medang, serta tempat wisata lainnya yang berada di pulau-pulau kecil diantaranya Pulau Tengah, Pulau Beruk, Pulau Pajak, Pulau Beting Aceh, Pulau Ke-munting, Pulau Babi, dan Pulau Simpur, yang sangat ber-potensi untuk dikembangkan sebagai *ecotourism*.

Sosial-Kependudukan

Karakteristik kependudukan di Kecamatan Rupat Utara dengan luas 628,5 Km2, memiliki 8 (delapan) desa serta terdapat 38 RW dan 81 RT,dengan jumlah penduduk 16.123 jiwa, yang terdiri dari 8.205 jiwa laki-laki dan 7.927 jiwa perempuan dengan tingkat sex rasio sebesar 104. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Kecamatan Rupat Utara Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
Laki-laki	8.205	50,86
Perempuan	7.927	49,14

Sumber: Kecamatan Rupat Utara dalam Angka, 2016

Penduduk di lokasi kajian dengan kehidupan masyarakat dalam bentuk ikatan-ikatan kekerabatan di dalam wilayah pemukiman penduduk baik secara ikatan keturunan darah dan wilayah yang sama kuatnya.Mata pencaharian pokok pen-duduk sebagian besar desa pertanian dengan pola perm-ukiman (desa pertanian), dimana dimana orang bermukim secara besama-sama dalam suatu tempat dengan sawah ladang yang berada di sekitar tempat mereka dengan klasi-fikasi desa pantai/pesisir. Tipologi perdesaan di kawasan perbatasan berdasarkan pembobotan dengan tinjauan aspek fisik-lingkungan, aspek sosial-ekonomi dan sosial-kependudukan dapat dilihat pada tabel 4.

Berdasarkan hasil analisis tersebut, maka dapat disim-pulkan bahwa tipologi perdesaan di kawasan perbatasan Ke-camatan Rupat Utara sangat dipengaruhi oleh hamparan wilayah dan tingkat perkembangannya dengan nilai 100, kemudian menyusul pola permukiman dan dominasi mata pencahariannya dengan nilai 75 serta yang terakhir sistem kekerabatan dengan nilai 50.

Tabel 4. Tipologi Perdesaan Kecamatan Rupat Utara

No.	Tipologi / Aspek Kajian	1 50	2 100	3 25	4 75	5 50
1	Fisik-lingkungn		■	■		■
2	Sosial-ekonomi			■	■	
3	Sosial-kependudukan	■		■		■
Total Nilai		**50**	**100**	**75**	**75**	**100**

Sumber: Analisis, 2016

Ket.1= Sistem Kekerabatan (0-25-50-75-100)
2= Hamparan Wilayah (0-25-50-75-100)
3= Pola Permukiman (0-25-50-75-100)
4= Mata Pencaharian (0-25-50-75-100)
5= Perkembangan (0-25-50-75-100)

Tipologi desa Kecamatan Rupat Utara dikaitkan dengan aspek fisik-lingkungan, sosial-ekonomi, dan sosial-kependu-dukan adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Hamparan Wilayah, maka tipologi perde-saan lokasi kajian adalah Desa Pesisir/Pantai.
2. Berdasarkan Perkembangannya, maka tipologi perdesa-anlokasi kajian adalah Desa Swadaya.
3. Berdasarkan Pola Pemukiman, maka tipologi perdesaan lokasi kajian adalah Tipe Perkampungan Petani.
4. Berdasarkan Mata Pencaharian, maka tipologi perdesa-an lokasi kajian adalah Desa Pertanian.
5. Berdasarkan Sistem Ikatan Kekerabatan, maka tipologi lokasi kajian adalah Desa Campuran.

Model pengembangan perdesaan di kawasan perbatasan berdasarkan kebijakan dan kondisi aspek fisik-lingkungan, aspek sosial-ekonomi, dan sosial-kependudukan, maka dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 5. Arahan Perdesaan Kecamatan Rupat Utara

Kecamatan Rupat Utara	**Luas Wilayah (Km^2)**	**Prioritas**
Titi Akar	185.0	Perkebunan
Tanjung Medang	75.0	Wisata Bahari & Pemerintahan
Teluk Rhu	72.5	Wisata Bahari & Perikanan
Tanjung Punak	66.0	Wisata Bahari & Pendidikan
Kadur	76.0	Hutan
Hutan Ayu	56.0	Hutan
Suka Damai	59.0	Permukiman
Putri Sembilan	39.0	Hutan

Sumber: RTRW Kabupaten Bengkalis dan Analisis, 2016

Model pengembangan perdesaan kawasan perbatasan adalah terpadu mencakup model integrasi spasial berjenjang dan terintegrasi dalam bentuk pola ruang yang terdiri dari hutan bakau *magrove*, pariwisata pantai, perkebunan, permu-kiman berciri kota/*ecofarming*, *housing*, *resort*, permukiman nelayan dan tempat rekreasi dan permukiman perdesaan dan struktur ruang dengan alokasi pusat pelayanan skala regional dan BPW, rencana jalan lingkar kolektor primer, sekunder dan lokal serta rencana pelabuhan penyeberangan antarnegara atau dengan rincian sebagai berikut :

Model Pola Ruang Kecamatan Rupat Utara (lihat Gambar 4) terdiri dari :
1. Hutan Bakau Magrove;
2. Pariwisata Pantai;
3. Perkebunan;
4. Permukiman Berciri Kota (*ecofarming, housing, resort*, permukiman nelayan dan tempat rekreasi); dan
5. Permukiman Perdesaan.

Model Struktur Ruang Kecamatan Rupat Utara (lihat Gambar 5) terdiri dari :
1. Pusat pelayanan skala regional;
2. Pusat pelayanan skala BPW;
3. Rencana jalan lingkar (kolektor primer dan sekunder serta lokal); dan
4. Rencana pelabuhan penyeberangan antarnegara.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

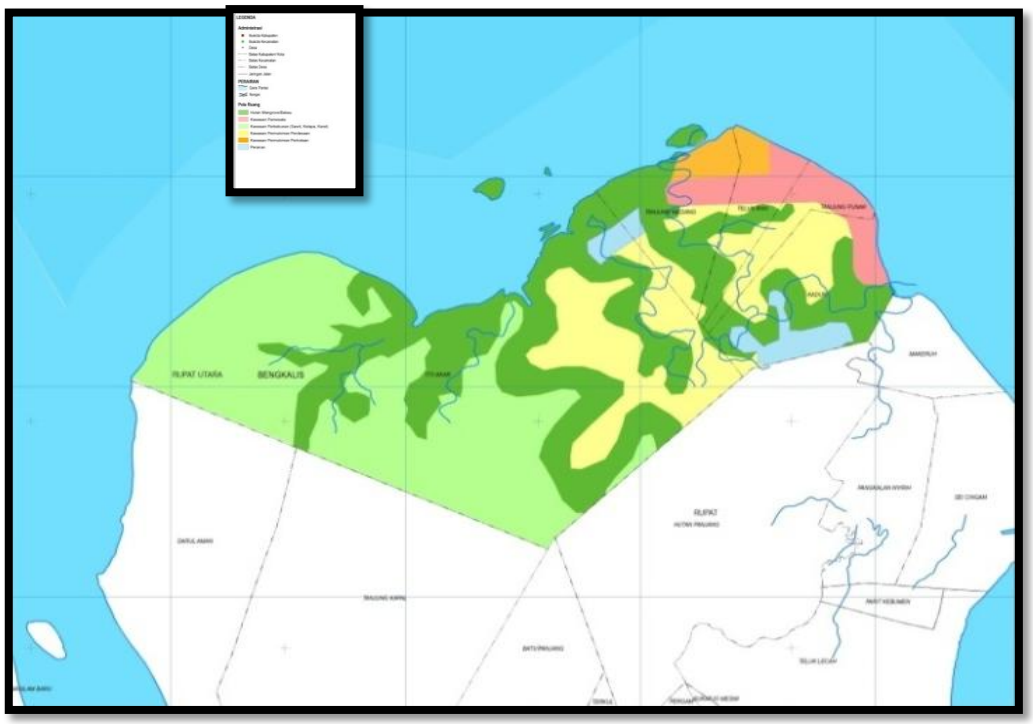

Gambar 4 Model Pola Ruang Kec. Rupat Utara

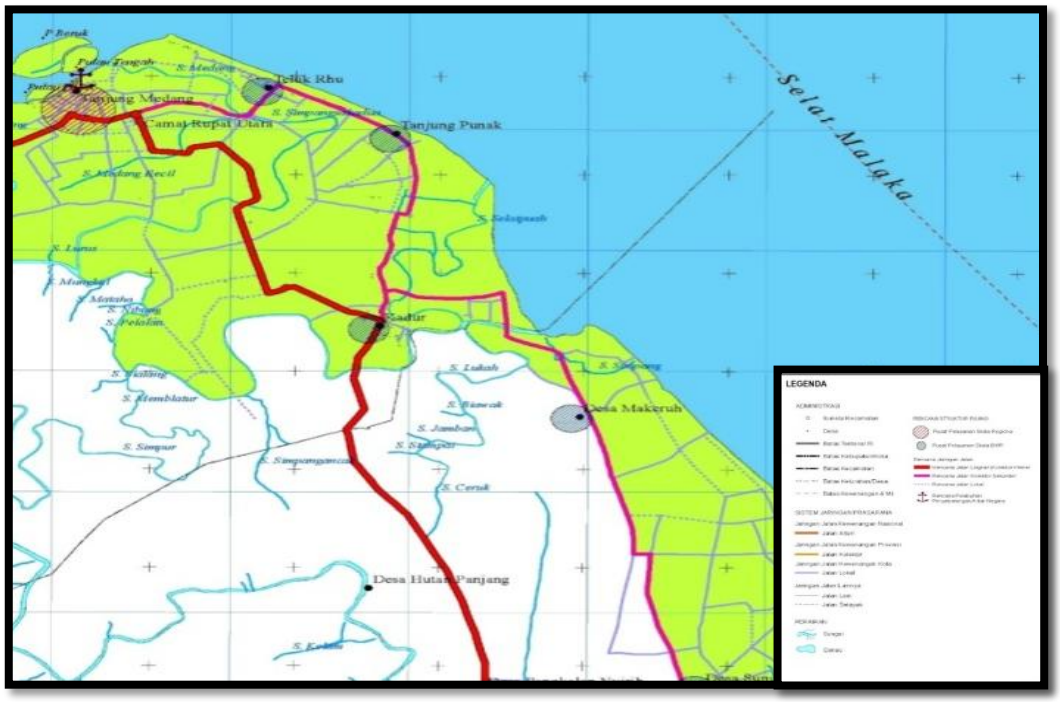

Gambar 5 Model Struktur Ruang Kec. Rupat Utara

KESIMPULAN DAN SARAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa tipologi perdesaan di Kecamatan Rupat Utara adalahdesa campuran dengan pola permukiman pertanian terutama pertanian/nelayan dan ting-kat perkembangan desa swadayadengan model pengem-bangan perdesaan kawasan perbatasan terpadu mencakup model integrasi spasial berjenjang dan terintegrasi dalam bentuk pola ruang (hutan bakau *magrove*, pariwisata pantai, perkebunan, permukiman berciri kota/*ecofarming*, *housing*, *resort*, permukiman nelayan dan tempat rekreasi dan permu-kiman perdesaan) dan struktur ruang (pusat pelayanan skala regional dan BPW, rencana jalan lingkar

ISBN : 978-602-73463-1-4

kolektor primer, sekunder dan lokal serta rencana pelabuhan penyeberangan antarnegara) yang terdiri dari dan struktur ruang dengan alokasi.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan model pengemba-ngan tersebut dibutuhkan kebijakan berjenjang dan terinteg-rasi serta mendukung dari pemerintah pusat (Pengelolah Perbatasan dan Kementerian Kepariwisataan) serta peme-rintah daerah (Pemprov Riau dan Pemkab Bengkalis) serta partisipasi dan peranserta masyarakat setempat secara aktif.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Muta'ali, L. 2013. Pengembangan Wilayah Perdesaan (Pers-pektif Keruangan), Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG), Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
[2] Muta'ali, L. 2014. Pengembangan Kawasan Perbatasan, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG), Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
[3] Muta'ali, L. 2014. Pengembangan Wilayah Tertinggal, Badan Penerbit Fakultas Geografi (BPFG), Universitas Gadjah Mada: Yogyakarta.
[4] UU RI Nomor 1 tahun 2014 tentang Perubahan atas UU nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesi-sir dan Pulau-Pulau Kecil
[5] Brown, F., *Golden Plains Rural Land Use Strategy (Final Report)*, Parsons Brinckerhoff Australia Pty: Bendigo, January2008
[6] RTRW Kabupaten Bengkalis 2013-2033
[7] Kecamatan Rupat Utara dalam Angka 2016

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

PEMBANGUNAN INKLUSIF DESA-KOTA MELALUI PENGEMBANGAN KAWASAN AGROPOLITAN

Wiwik Ambarsari[1)]

[1)]Program Studi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Wiralodra

Jl. Ir. H. Juanda Km 3. Indramayu

Email : wiwikambarsari@yahoo.co.id

Naskah diterima : 2 Desember 2016 Naskah direvisi: 28 Februari 2017 Disetujui terbit : 6 Maret 2017

ABSTRAK

Kajian ini betujuan untuk mengetahui peranan pengembangan kawasan agropolitan dalam menunjang pembangunan inklusif desa-kota. Metode kajian ini menggunakan studi pustaka. Pembangunan inklusif desa-kota dilakukan akibat dampak dari pembangunan yang tidak merata menyebabkan urbanisasi sehingga potensi desa tidak tergali. Pemerintah mengupayakan hal ini melalui program pengembangan kawasan agropolitan. Agropolitan merupakan pembangunan ekonomi berbasis pertanian yang dilaksanakan dengan jalan mensinergikan berbagai potensi yang ada, secara utuh, dan menyeluruh (berdaya saing, berbasis kerakyatan, berkelanjutan, dan terdesentralisasi), yang digerakkan masyarakat dan difasilitasi pemerintah. Ini mengartikan bahwa pengembangan kawasan perdesaan sebagai satu kesatuan pengembangan wilayah berdasarkan keterkaitan ekonomi antara desa-kota (urban rural linkages) dengan hubungan yang menyeluruh dan bersifat interpendensi (timbal balik) yang dinamis. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan inklusif desa-kota melalui pengembangan kawasan agropolitan akan dapat berkesinambungan dan dirasakan peranannya oleh masyarakat daerah lokal secara langsung khususnya dan masyarakat kota umumnya sehingga kawasan agropolitan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi yang memiliki daya saing, kemandirian, dan kesejahteraan, jika dilakukan: (1) penguatan potensi sumber daya manusia lokal melalui pendampingan, yaitu pembinaan dan pelatihan manajemen dan teknologi agribisnis dalam pengembangan nilai tambah produk melalui agroindustri (agroprocesing), (2) penguatan potensi sumberdaya lokal sesuai agroklimatnya dengan memanfaatkan komoditas unggulan yang menjadi ciri khas daerah, (3) penguatan berbagai infrastruktur yang menunjang pasar produk pertanian, seperti jalan poros desa, dan mengoptimalkan pasar sub terminal agribisnis dengan memanfaatkan teknologi internet, dan (4) penguatan kelembagaan agropolitan di tingkat lokal sampai pusat dengan cara kemitraan secara sinergis, terintegrasi, dan berkesinambungan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan dunia usaha.

***Kata kunci** : pembangunan inklusif desa-kota, pengembangan, kawasan agropolitan*

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk Indonesia berpotensi semakin meningkat sehingga memberikan potensi pasar yang semakin besar dan pertumbuhan ekonomi yang semakin pesat. Selain itu, urbanisasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun sehingga proporsi penduduk yang tinggal di kawasan perkotaan diperkirakan mencapai 67,5% pada tahun 2015 dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pada kawasan perkotaan diperkirakan akan mencapai 86% pada tahun 2030 [1].

Dampak urbanisasi pada daerah migran itu sendiri (desa) secara umum adalah berkurangnya penduduk sehingga potensi alamnya tidak tergali dan tidak termanfaatkan secara optimal. Padahal potensi daerah migran merupakan perdesaan yang kaya akan potensi sumber daya alamnya berupa pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan, dan perikanan sehingga umumnya penduduk desa bermata pencaharian sebagai petani. Dengan demikian akibat arus urbanisasi menyebabkan sektor pertanian menjadi terdesak sehingga menurunkan produktivitas pertanian karena selain penduduk desa yang berkurang dan kebutuhan konsumsi penduduk semakin tinggi khususnya di kota, kondisi pemasaran di perdesaan sangat lemah, terbatasnya pemahaman dan pengetahuan petani sehingga inovasi teknologi kurang berperan, budaya petani

lokal yang cenderung subsisten, infrastruktur yang kurang memadai, dan kelembagaan masyarakat dan pemerintahan kurang kondusif. Hal ini menyebabkan Indonesia pada tahun 2000, mengimpor kedelai senilai 275 juta US $, sayur mayur senilai 62 juta US $, dan buah-buahan senilai 65 juta US $ [2].

Kondisi ini melatarbelakangi dilakukannya pemerataan pembangunan antara desa dan kota oleh Pemerintah Pusat dengan program pengembangan kawasan agropolitan yang diadopsi dari konsep teori pembangunan wilayah melalui agropolitan oleh Friedman dan Douglass *dalam* Kementerian Pekerjaan Umum [2] dimana dinyatakan bahwa agropolitan merupakan suatu paradigma pembangunan wilayah yang bertumpu pada pembangunan masyarakatnya di perdesaan karena kegagalan pengembangan sektor industri pada negara-negara berkembang di Asia sehingga mengakibatkan terjadinya hiper urbanisasi. Konsep agropolitan Indonesia sendiri menurut Kementerian Pertanian [3] adalah suatu kota pertanian yang tumbuh berkembang dan mampu memacu perkembangan sistem dan usaha agribisnis sehingga dapat melayani, mendorong, menarik, dan menghela kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya. Selain itu, kawasan agropolitan dapat diartikan sebagai sistem fungsional desa-desa yang diterlihat dari hierarki keruangan desa yang ditandai dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya sehingga terbentuk kawasan agropolitan.

Tujuan dari pengembangan kawasan agropolitan sebagai konsep pembangunan wilayah dan perdesaan dapat dirumuskan sebagai berikut : (1) menciptakan pembangunan desa-kota secara berimbang, (2) meningkatkan keterkaitan desa-kota yang sinergis, (3) mengembangkan ekonomi dan lingkungan pemukiman perdesaan berbasis aktifitas pertanian, dan (4) meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat perdesaan [4]. Sedangkan menurut Rondinelli [5] bahwa tujuan pengembangan kawasan agropolitan pada dasarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan produksi pertanian dan penjualan hasil-hasil pertanian, mendukung tumbuhnya industri *agroprocessing* skala kecil-menengah, dan mendorong keberagaman aktifitas ekonomi dari pusat pasar. Dengan kata lain bahwa tujuan dari konsep agropolitan ini adalah untuk mengembangkan potensi lokal sebagai roda pertumbuhan ekonomi di kawasan perdesaan yang dapat menciptakan kawasan tersebut sejahtera dengan tumpuan hidup masyarakatnya dari lima agro, yaitu agroproduksi, agroindustri, agrobisnis, agroteknologi, dan agrowisata. Dengan demikian, tulisan ini bertujuan melihat peranan program pengembangan kawasan agropolitan yang sudah dilakukan di beberapa daerah kawasan agropolitan di Indonesia dalam pembangunan inklusif desa-kota.

METODE PENELITIAN

Metode karya ilmiah dalam tulisan ini merupakan suatu hasil dari beberapa kajian yang bersumber dari literatur atau pustaka yang berkaitan dengan pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan, yaitu di kawasan agropolitan Bagelen, Gombong, Gondangan, dan Cipanas. Kerangka pemikiran tulisan ini melalui pendekatan pengembangan kawasan agropolitan, seperti terlihat pada Gambar 1 yang sudah dimodifikasi [3].

Gambar 1 menunjukkan pembangunan sistem desa-kota melalui pendekatan pengembangan kawasan agropolitan. Peran pemerintah, perguruan tinggi, LSM, masyarakat, dan dunia usaha pada pembangunan sistem desa-kota sangat penting sekali demi keberlanjutan pengembangan kawasan tersebut. Desa sebagai pusat areal pertanian dan menghasilkan produk-produk primer pertanian yang didukung oleh sumber daya manusia, teknologi, sarana produksi, dan kesesuaian lahan. Ini semua dapat berjalan dengan tersedianya sistem infrastruktur yang memadai, seperti adanya jaringan irigasi, jalan, sumber air, sistem energi, dan infrastruktur lainnya. Tentunya komoditas pertanian yang dioptimalkan adalah komoditas unggulan daerah setempat agar menghasilkan produktivitas yang tinggi. Ketersediaan produk unggulan pertanian ini agar dapat memenuhi permintaan pasar maka perlu dibuatkan sistem infrastruktur distribusi pemasaran sebagai salah satu strategi pemasaran, yaitu dalam bentuk terminal agribisnis (berada di desa), pelabuhan laut, dan bandara udara. Dengan demikian produk-produk pertanian dari desa sampai di pasar lokal, pasar antar pulau, dan pasar internasional sehingga menciptakan kawasan agropolitan dengan masyarakat yang mandiri dan sejahtera.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

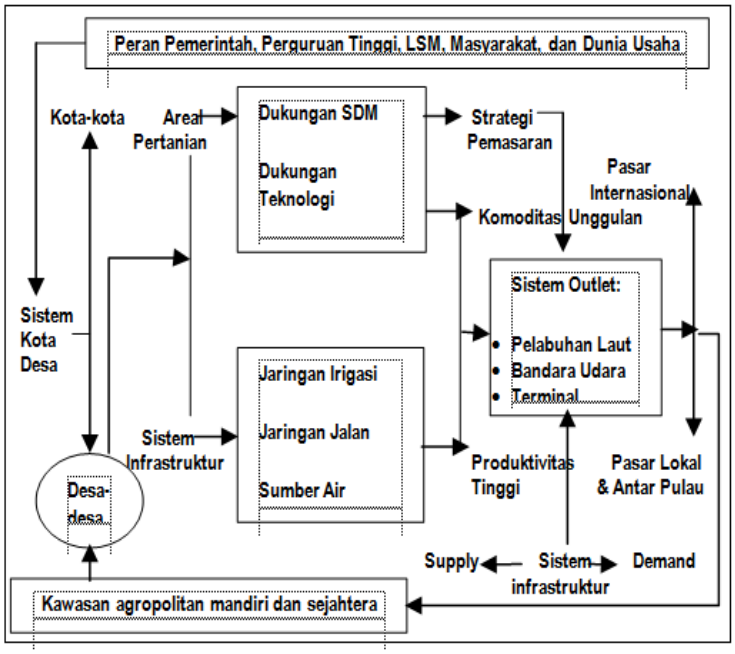

HASIL DAN PEMBAHASAN

Suatu kawasan dapat dilakukan pengembangan menjadi agropolitan tentunya harus memiliki persyaratan dan pelaksanaannya melalui berbagai tahapan yang terencana, dan terstruktur dengan memperhatikan faktor lingkungan, sosial, dan budaya sehingga berkesinambungan. Menurut Kementerian Pertanian [3] bahwa persyaratan pengembangan kawasan agropolitan adalah:

1. Memiliki sumberdaya lahan dengan agroklimat yang sesuai untuk mengembangkan komoditi pertanian khususnya pangan, yang telah mempunyai pasar (selanjutnya disebut komoditi unggulan).
2. Memiliki prasarana dan infrastruktur yang memadai untuk mendukung pengembangan sistem dan usaha agribisnis khususnya pangan, seperti misalnya: jalan, sarana irigasi/pengairan, sumber air baku, pasar, terminal, jaringan telekomunikasi, fasilitas perbankan, pusat informasi pengembangan agribisnis, sarana produksi pengolahan hasil pertanian, dan fasilitas umum serta fasilitas sosial lainnya.
3. Memiliki sumberdaya manusia yang mau dan berpotensi untuk mengembangkan kawasan sentra produksi pangan (agropolitan) secara mandiri.
4. Konservasi alam dan kelestarian lingkungan hidup bagi kelestarian sumberdaya alam, kelestarian sosial budaya maupun ekosistem secara keseluruhan.

Kawasan agropolitan merupakan kawasan terpilih dari kawasan agribisnis atau sentra produksi pertanian terpilih dimana pada kawasan tersebut terdapat kota pertanian (*agropolis*) yang merupakan pusat pelayanan agribisnis yang melayani, mendorong dan memacu pembangunan pertanian kawasan dan wilayah-wilayah sekitarnya yang memiliki komoditi unggulan (spesifik lokasi) yang merupakan sumber pendapatan sebagian besar masyarakat. Kawasan agropolitan berdasarkan strukturnya dibedakan atas tiga wilayah, yaitu pertama menjadi kota tani utama yang berfungsi sebagai jasa koleksi, kedua menjadi pusat distrik agropolitan/pertumbuhan berfungsi sebagai jasa distribusi, dan ketiga menjadi pusat satuan kawasan pertanian berfungsi sebagai pusat pelayanan pemukiman [6].

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum [2] bahwa tahapan pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan, yaitu:

1. Penyusunan *masterplan* pengembangan kawasan agropolitan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
2. Penetapan lokasi agropolitan yang diusulkan kabupaten kepada provinsi.
3. Sosialisasi program pengembangan kawasan agropolitan oleh stakeholder di tingkat pusat dan daerah agar terintegrasi dan terpadu.
4. Pendampingan pelaksanaan program oleh pemerintah yang berperan sebagai fasilitator. Masyarakat ditempatkan sebagai pelaksana utama.
5. Pembiayaan program pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat yaitu petani, penyedia agro, pengelola hasil, pemasar, dan penyedia jasa (prasaran dan sarana yang bersifat publik dan strategis).

6. Usulan indikasi program/kegiatan di kawasan agropolitan dimasukkan dalam Rencana Program Investasi Jangka Menengah (RPIJM) Kabupaten.

Kementerian Pekerjaan Umum [2] menyatakan bahwa pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia sejak tahun 2002 sampai 2011 berada di 32 provinsi dengan menghasilkan 382 kawasan agropolitan, yang terdiri atas 38 kawasan agropolitan yang baru dimulai, 32 kawasan yang sedang berproses, dan 312 kawasan yang sudah selesai. Ini menunjukkan bahwa 81,67 persen pelaksanaan kawasan sudah berhasil diselesaikan yang membutuhkan waktu 9 tahun dan masih terdapat 18,33 persen lagi kawasan agropolitan masih dalam proses pengembangan, yaitu kawasan agropolitan baru sebesar 9,95 persen dan proses lanjutan pengembangan 8,38 persen yang belum selesai.

Pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan ini tidak semudah yang dibayangkan karena terdapat kendala-kendala yang dihadapi sehingga dibutuhkan proses penyesuaian wilayah dan pendekatan partisipatif pada masyarakat dan stakeholder terkait secara sinergis dan berkesinambungan. Seperti halnya yang dinyatakan oleh Soetomo [7] bahwa pengembangan kawasan agropolitan diperlukan pengembangan sumber daya lokal yang terintegrasi dan konektivitas dengan sumber daya global dalam waktu yang sama, ini menjadi strategi pengembangan agropolitan. Tentunya ini dilakukan melalui pendekatan pemberdayaan dan perencanaan partisipasi dan pengembangan penduduk lokal dan sumber daya lokal lainnya. Pemberdayaan program aksi untuk pertanian yang dimulai dengan pembentukan forum penduduk setempat, difasilitasi oleh pemerintah daerah dan perguruan tinggi setempat.

Daerah-Daerah Kawasan Agropolitan Pada Pembahasan (Bagelen, Gombong, Gondangan, dan Cipanas)

Beberapa daerah yang telah melaksanakan pengembangan kawasan agropolitan yang menjadi pembahasan dalam kajian ini, diantaranya pada: 1) kawasan agropolitan Bagelen, 2) kawasan agropolitan Desa Gombong, 3) kawasan agropolitan Gondangan, dan 4) kawasan agropolitan Cipanas. Hal ini didasarkan pada keempat kawasaan agropolitan tersebut memiliki agroklimat dan keunggulan kekhasan daerah masing-masing yang sesuai dengan arah pengembangan kawasan agropolitan, yaitu agroproduksi, agroindustri, agrobisnis, agroteknologi, dan agrowisata.

Kawasan Agropolitan Bagelen

Kawasan Agropolitan Bagelen merupakan salah satu Kecamatan di Wilayah Kabupaten Purworejo dengan luas ± 63,67 Km^2 terletak diujung tenggara ±12 Km dari Ibu Kota Kabupaten Purworejo dan berbatasan langsung dengan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Gambar 2, lingkaran merah adalah pusat kota Kabupaten Purworejo dan lingkaran hijau adalah kota Kecamatan Bagelen). Sebagian besar wilayah Kecamatan Bagelen merupakan daerah pegunungan yang terdiri atas 17 Desa. Jumlah penduduk Kecamatan Bagelen tahun 2015 adalah 34.117 yang terdiri dari laki-laki 16.969 jiwa (49,74%) dan 17.148 (50,26%) perempuan. Sebagian besar penduduk Bagelen mata pencahariannya adalah petani. Hasil olahan produk pertanian berupa gula kelapa dan gula semut (*brown sugar*) yang sudah diekspor ke Jepang [8].

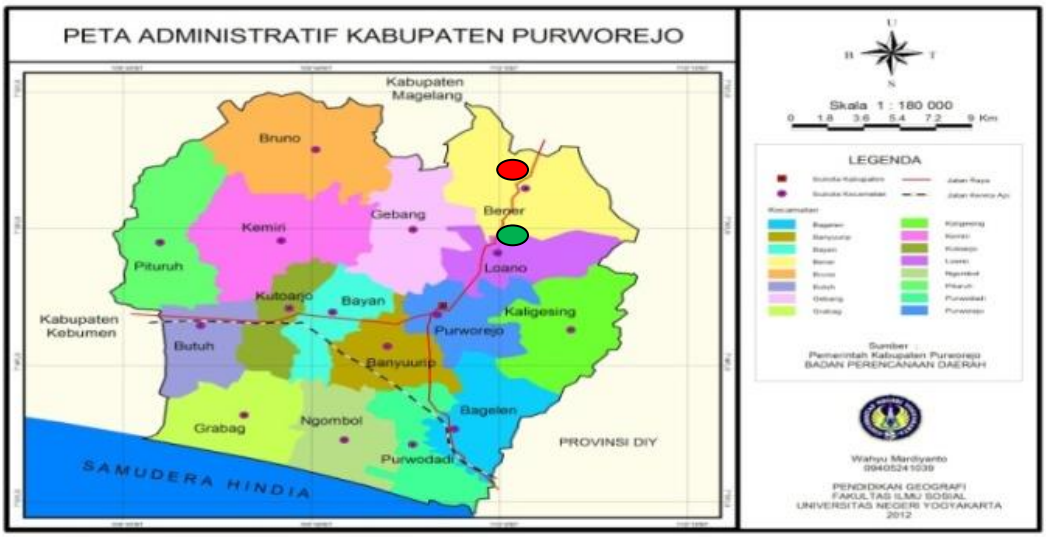

Gambar 2. Peta Kabupaten Purworejo

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Selayang pandang kawasan agropolitan Bagelen Kabupaten Purworejo menceritakan mengungkapkan bahwa kawasan agropolitan Bagelen ditetapkan pada tahun 2007. Pada awal ditetapkan sebagai kawasan agropolitan, pemerintah daerah melakukan pembentukan pokja tingkat kabupaten, pembangunan Jembatan Sembir Tahap 1 yang menghubungkan wilayah agropolitan Kecamatan Purwodadi dengan Kecamatan Ngombol dan Kecamatan Bagelen dengan Kaligesing, terutama untuk mempermudah aksesibilitas menuju pasar. Tahun 2008, pembangunan Jembatan Sembir Tahap 2 dilanjutkan menggunakan dana APBD Kabupaten. Tahun 2010 pembentukan pokja kecamatan di 4 wilayah kawasan agropolitan Bagelen (Kecamatan Bagelen, Kecamatan Kaligesing, Kecamatan Purwodadi, dan Kecamatan Ngombol) dan memperoleh bantuan berupa *Specific Grant* yaitu suatu program agropolitan dari Provinsi Jawa Tengah untuk pembinaan kelembagaan dan peningkatan jalan poros Desa Krendetan Tlogokotes dan Semawung-Nadri [2].

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum [2] bahwa sarana pemasaran berupa bangunan sub terminal agribisnis (STA) Bagelen di Desa Krendetan diresmikan pada tahun 2011 oleh Bupati Purworejo yang memperoleh bantuan bangunan dari Pemerintah Pusat, berupa 2 shelter, 6 kios, dan 1 gedung kantor di atas areal seluas 1.500 $m^{2.}$. STA yang dibangun sebelumnya adalah pasar tradisional penduduk sekitar dan pasar kambing sehingga fungsi pasar berkelanjutan melalui STA. Pembangunan infrastruktur selanjutnya adalah peningkatan jalan poros antar setiap desa di Kecamatan Bagelen. Aksesibilitas jalan poros desa yang semakin baik maka semakin cepat produk pertanian sampai di STA.

Fungsi dari STA Bagelen adalah membantu mempromosikan hasil-hasil pertanian. Pada pelaksanaannya terdapat kendala karena hanya dua hari yang dilakukan sebagai hari pasar, yaitu Rabu dan Sabtu sehingga belum optimal karena dalam seminggu ada 7 hari. Hal ini menyebabkan promosi hasil pertanian di pasar lokal terhambat. Tentunya, ini tidak menjadikan patah semangat sehingga pemerintah Kabupaten Purworejo melakukan solusinya melalui pengoptimalan fungsi internet sebagai media pasar. Ini dilakukan melalui kerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan mendatangkan mobil komputer. Mobil komputer dilengkapi dengan jaringan internet dan petugas yang siap membantu pada hari pasar yaitu Rabu dan Sabtu. Melalui internet inilah produk-produk pertanian yang dimiliki petani dapat dipromosikan dan dipasarkan. Ini tentunya sesuai dengan visi kawasan agropolitan Bagelen yaitu menjadikan kawasan agropolitan Bagelen sebagai daerah produsen pertanian dalam arti luas, berorientasi agribisnis, berwawasan global-kosmopolitan dengan peningkatan kemandirian serta daya saing menuju kesejahteraan [2].

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Asriningtyas [9] dinyatakan bahwa pada pelaksanaan pengembangan kawasan agropolitan Bagelen masih ada kendalanya yaitu pada kawasan *hinterland*, kota tani, dan kota tani utama belum mampu mewujudkan sebuah interaksi yang diharapkan melalui adanya pengembangan kawasan agropolitan Bagelen. Masih terdapat masyarakat yang menjalankan cara pertanian, pengelolaan pasca panen, dan pemasaran sama seperti yang mereka lakukan sejak dahulu, sehingga perlu adanya sosialisasi yang lebih mendalam serta pendampingan agar masyarakat secara menyeluruh memahami bahwa sesungguhnya melalui kawasan agropolitan Bagelen mereka menjadi lebih mudah dalam melaksanakan kegiatan pertanian untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan para petani.

Pada proses kawasan agropolitan yang diharapkan di daerah Bagelen ternyata dalam perkembangannya masih terdapat kendala dari tahun 2012 yang dilakukan Kementerian PU dengan hasil penelitian Asriningtyas tahun 2016 khususnya pada teknologi budidaya, pengelolaan pasca panen hasil pertanian yang berorientasi nilai tambah, dan pemasaran. Belum diketahui seberapa besar persentasi masyarakat yang sudah dan atau belum mengalami peningkatan kesejahteraan dari hasil pengembangan kawasan agropolitan Bagelen. Dengan demikian, sangat baik saran yang diberikan dari hasil penelitian Asriningtyas [9] untuk dilakukan sosialisasi mendalam mengenai pentingnya peran pengembangan kawasan agropolitan bagi masyarakat luas yang disertai pendampingan sampai berhasil (mandiri) sebagai wujud dari bentuk pemberdayaan pada masyarakat melalui pendekatan partisipatif.

Kawasan Agropolitan Desa Gombong

Hasil kajian Bappeda Kabupaten Pemalang [10] mengungkapkan bahwa luas kawasan agropolitan Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang berjumlah 1.043,41 ha dengan penggunaan lahan berupa tegalan, hutan negara, perkebunan swasta/negara, dan bangunan. Batas wilayah Desa Gombong adalah di sebelah utara dengan Desa Beluk, sebelah Timur dengan Desa Belik, sebelah Selatan dengan Kabupaten Purbalingga, dan sebelah Barat dengan Kecamatan Pulosari (Gambar 3, lingkaran merah adalah letak kantor Desa Gombong [11].

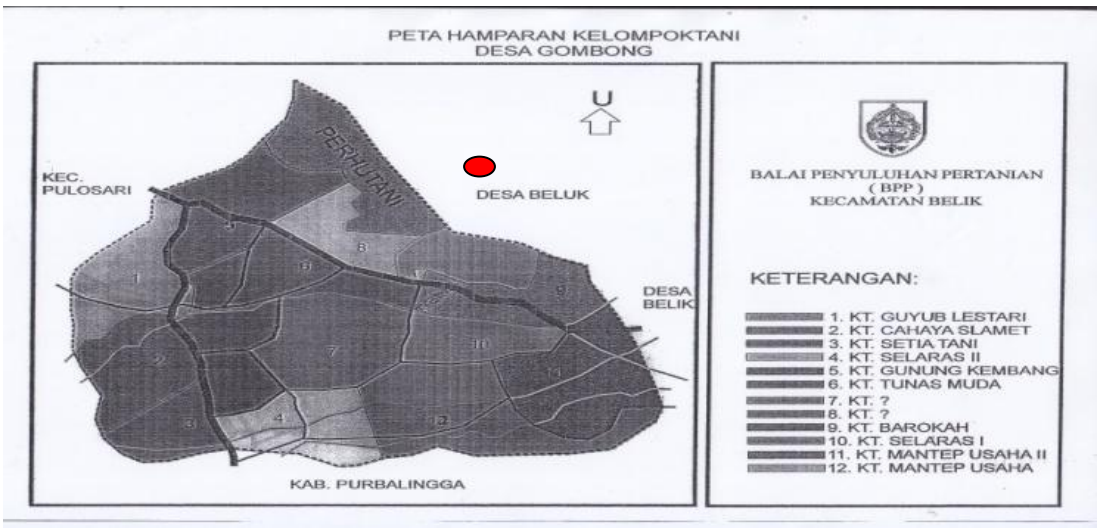

Gambar 3. Peta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang

Topografi wilayahnya memiliki ketinggian lebih dari 750 meter di atas permukaan laut. Penduduk Desa Gombong tahun 2014 berjumlah 11.125 jiwa yang terdiri dari 5.621 laki-laki dan 5.504 perempuan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk Desa Gombong adalah petani (50%), selebihnya buruh tani, buruh industri, buruh bangunan, dan pedagang. Potensi sumber daya alamnya adalah pertanian dengan komoditas unggulan tanaman sayuran. Prasarana Desa Gombong yang menunjang pertanian adalah kios saprotan sebanyak 6 buah [10].

Kawasan agropolitan Desa Gombong diresmikan tahun 2003 dengan terbentuknya kelembagaan pemasaran, yaitu Asosiasi Petani dan Pedagang Sayuran (APPH) dan pada tahun 2005 diresmikannya sub terminal agribisnis (STA). Peran APPH adalah sebagai binaan Penyuluh Pertanian Lapangan (PPL) Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Dispertanhut) Kabupaten Pemalang, yang berperan untuk membina kelompok petani cabai merah besar dalam teknologi budidaya sesuai standar STA karena untuk dijual kepada mitra STA di pasar luar daerah, luar pulau bahkan luar negeri. Kemitraan STA khususnya cabai merah sudah berjalan dengan PT Indofood dan PT ABC. Pasar luar daerah, yaitu di Bandung dan Cirebon, pasar luar pulau, yaitu di Kalimantan, dan pasar luar negeri adalah Singapura. Keberadaan STA ini sangat menguntungkan petani cabai merah besar karena harga cabai merah besar pada saat panen raya maupun tidak panen raya adalah stabil. Pada awalnya komoditas yang ditampung dan dibeli STA adalah hanya cabai merah besar saja tetapi berjalannya waktu komoditas yang bernilai ekonomi tinggi diterima dengan syarat petani mau dibina dalam teknologi budidaya melalui APPH, seperti buncis jepang, brokoli hijau, dan wortel. Hal ini menunjukkan bahwa peran STA melalui APPH sangat penting bagi petani khususnya dalam menjualkan produk-produk pertanian di Desa Gombong [10].

Kawasan agropolitan Desa Gombong dalam pengembangannya terhenti sampai tahun 2007, yang hanya berfungsi adalah peran STA saja. Hal ini diakibatkan oleh beberapa permasalahan yang ada, yaitu masalah pertanian seperti pemanfaatan lahan pertanian di bukit-bukit sehingga mudah terjadinya erosi menyebabkan tanah tidak subur, sumber air tidak ada (mengandalkan hujan), modal petani belum memadai, sistem pertanian masih bersifat tradisional belum komersil, petani sebagian besar hanya menjadi buruh tani, tidak ada lembaga koperasi unit desa maupun koperasi pertanian, dan belum ada lembaga keuangan atau bank, serta yang lebih penting lagi adalah kelembagaan agropolitan di tingkat masyarakat dan pemerintahan baik desa, kecamatan, dan kabupaten tidak berjalan. Ini tentunya diperlukan komitmen pemerintah dan kerjasamanya dengan perguruan tinggi setempat, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan dunia usaha secara terpadu dan terintegrasi mengingat Desa Gombong pernah memperoleh penghargaan Kalpataru pada tahun 1999 [10].

Dengan demikian peran dari STA di Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang sangat penting sekali dalam interaksi antara desa dan kota. Dengan kata lain pusat pasar agribisnis yang membangun perekonomian daerah akan mempercepat pembangunan desa itu sendiri menuju perkembangan kota yang bersumber hasil pertanian.

Kawasan Agropolitan Desa Gondangan

Kajian dari Indarwata dan Pujiastuti [12] yang mengungkapkan bahwa kawasan agropolitan Desa Gondangan merupakan salah satu desa di Kecamatan Jogonalan yang memiliki jumlah penduduk sebesar 3.747 jiwa yang terdiri dari laki-laki 1.898 dan perempuan 1.849. Jumlah kepala keluarga sebanyak 1057. Sebagian

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

besar mata pencaharian penduduknya adalah buruh. Luas wilayahnya adalah 105,8326 Ha. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Prawatan, sebelah barat berbatasan dengan Desa Tangkisan Pos, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Rejoso, dan sebelah timur berbatasan dengan desa Bakung (Gambar 4, ditandai dengan lingkaran merah adalah Kecamatan Jogonalan) [8].

Desa Gondangan ini memiliki potensi pertanian berupa jagung, kedelai, kacang, dan umbi-umbian serta masyarakatnya yang memproduksi makanan ringan skala *home industri*. Potensi ini dijadikan program unggulan yang bertujuan untuk membangkitkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sehingga layak untuk dikembangkan menjadi desa agroindustri yang dapat meningkatkan taraf ekonomi masyarakat desa. Produk makanan ringannya berasal dari hasil pertanian yang diolah menjadi cemilan atau jajanan pasar, seperti rambak, gadung, tempe kripik, keripik singkong, marning [12].

Gambar 4. Peta Kabupaten Klaten

Indarwata dan Pujiastuti [12] mengungkap bahwa produk-produk pangan sangat didominasi oleh produk rambak. Pengusaha kecil banyak yang bergabung dan membentuk kelompok-kelompok, yang diberi nama kelompok "Ngudi Mulyo", kelompok "Guna Darma", dan kelompok "Sumber Urip" dengan total jumlah anggota (industri rumah tangga) sebanyak 101. Keberadaan UMKM di Kecamatan Jogonalan memberikan peluang pekerjaan bagi bagi masyarakat sekitar sehingga akan mengurangi pengangguran yang membutuhkan banyak tenaga kerja. Pemasaran lokal produk rambak, meliputi Klaten, Cawas, Manisrenggo. Pemasaran luar daerah produk rambak, meliputi Solo (mencakup Sukoharjo), Banjarnegara (mencakup Ciamis, Garut), Jawa Timur (Tuban), Yogyakarta (Bantul terutama Imogiri, Kulon Progo).

Pada perjalanannya pengembangan agroindustri pada kawasan agropolitan Gondangan masih terdapat beberapa hal yang harus dipersiapkan, diantaranya adalah (1) peningkatan kualitas produk agar dapat bersaing di pasaran, (2) peningkatan kualitas pengepakan agar lebih menarik lagi, dan (3) perlunya dukungan dari lembaga terkait dalam rangka peningkatan kemampuan UMKM dalam aspek manajemen dan manajemen keuangan dengan cara melakukan pendampingan [12]. Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan kawasan agropolitan Bagelen yang disarankan untuk dilakukan terus pendampingan sampai dinyatakaan dapat dilepas (mandiri) walaupun sudah diberikan sosialisasi atau pun pelatihan karena untuk melihat kemajuan dari kegiatan yang sudah dilakukan sebagai bentuk monitoring dan evaluasi. Tentunya, ini bentuk tanggung jawab dari pemerintah daerah untuk keberlanjutannya.

Kawasan Agropolitan Cipanas

Menurut Kementerian Pekerjaan Umum [2] bahwa pengembangan kawasan agropolitan Cipanas Kabupaten Cianjur dilaksanakan sejak tahun 2002 (Gambar 5) [8]. Pada pengembangan wilayah Cipanas ini sangat sesuai dengan kondisi sumberdaya alamnya sehingga berkembang menjadi kawasan agropolitan sekaligus daerah tujuan wisata (DTW) berupa air terjun, pegunungan alami, perkebunan, peternakan sapi/kambing, tanaman pangan, dan tanaman hias. Cipanas sebagai DWT menawarkan beragam wahana wisata, seperti *outbound*, *camping ground*, kolam renang dengan air pegunungan alami, belanja sayur organik,

dan kebun petik stroberi. Hanya masih terdapat kendala pada pengambangan kawasan agropolitan Cipanas, yaitu pada tingkat produktivitas petani yang cenderung subsisten dan sangat sulit mempengaruhi pengembangan agroindustri. Tantangan lainnya adalah infrastruktur atau fasilitas yang tersedia tidak memadai seperti jalan poros desa yang rusak dan pasar yang terbatas.

Hasil penelitian Mulyani [13] menunjukkan bahwa pengembangan kawasan agropolitan Cipanas belum signifikan dalam pencapaian manfaat jangka menengah dalam meningkatkan pendapatan usahatani yang disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah: (1) meskipun terjadi peningkatan intensitas penyuluhan pertanian namun belum terjadi peningkatan produktivitas, karena keterbatasan petani dalam hal permodalan; (2) pembangunan infrastruktur transportasi di kawasan agropolitan tidak menurunkan biaya transportasi dan tidak merubah pola pemasaran komoditi pertanian, karena petani tetap menjual komoditi pertaniannya pada tengkulak; (3) petani belum melaksanakan proses pengolahan komoditi pertanian (*agroprocessing*) yang merupakan subsistem yang memberikan nilai tambah terbesar dalam sistem agribisnis., (4) adanya kecenderungan program pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Cipanas meningkatkan jumlah petani dengan tingkat pendapatan tinggi dan sedang serta meningkatkan rata-rata tingkat pendapatan usahatani petani di wilayah inti dibandingkan wilayah transisi dan *hinterland*, dan (5) pembangunan infrastruktur transportasi secara lokalitas berpengaruh secara nyata terhadap peningkatan harga tanah. Semakin dekat terhadap pusat agropolitan harga tanah semakin mahal akan tetapi dikhawatirkan akan memicu terjadinya alih fungsi lahan pertanian kepada aktivitas non pertanian yang memiliki nilai *land rent* yang lebih tinggi.

Selain itu, Handoko [14] mengungkapkan bahwa kendala pada kawasan agropolitan Cipanas adalah: (1) kondisi faktor pemasaran, kelembagaan, dan teknologi usaha tani dalam kegiatan agropolitan kurang memadai; (2) persepsi masyarakat terhadap kawasan agropolitan tentang industri pengolahan hasil pertanian belum tertanam; dan (3) potensi kegiatan agropolitan sudah sesuai namun aplikasi dari potensinya kurang sesuai karena kurangnya peran pemerintah. Kondisi ini menandakan bahwa kendala utama dalam pengembangan kawasan agropolitan Cipanas terdapat pada fungsi kelembagaan dan infrastruktur penunjang kegiatan yang kurang berjalan dengan baik dan peran tengkulak yang sangat dominan karena memegang mata rantai transportasi, pemasaran, dan uang tunai.

Gambar 5. Peta Kota Cipanas Kabupaten Cianjur

Kondisi Cipanas sebagai kawasan agropolitan perlu diatasi dengan beberapa langkah, diantaranya adalah: (1) mengoptimalkan pengaruh pengembangan kawasan agropolitan di Kecamatan Cipanas pada kelembagaan di tingkat petani. Adanya kelembagaan petani diharapkan dapat meningkatkan *economic of scale* dalam agribisnis sayuran; (2) perlunya meningkatkan kapasitas sumber daya petani dari petani yang berorientasi produksi menjadi petani yang berorientasi agribisnis; (3) perlunya pengembangan sistem kemitraan antara petani, pemilik modal, dan pemerintah baik kemitraan permodalan, produksi, pengolahan dan pemasaran untuk meningkatkan kesejahteraan petani, (4) perlunya petani mendapatkan pelatihan dan pemahaman lebih lanjut sehingga budaya subsisten lambat laun dapat ditinggalkan, dan (5) harus dijalankan dan dibentuknya kerjasama pemerintah, kelembagaan agropolitan, dan petani agar tercapainya faktor pendukung kegiatan agropolitan[2] [13] [14].

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Dampak Pelaksanaan Pengembangan Keempat Kawasan Agropolitan (Bagelen, Gombong, Gondangan, dan Cipanas)

Pelaksanaan program pengembangan kawasan agropolitan dari keempat wilayah tersebut (Bagelen, Gombong, Gondangan, dan Cipanas) menunjukkan adanya kesesuaian pelaksanaan pada pendekatan pengembangan kawasan agropolitan yang dianjurkan oleh Kementerian Pertanian [3] sehingga memberikan dampak baik keberhasilan yang dirasakan bagi masyarakat lokal maupun masih terdapat permasalahan yang menjadi kendala pada proses pengembangan kawasan agropolitan. Kemandirian dan kesejahteraan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat setempat dan masyarakat kota pada umumnya. Kondisi ini tentunya menciptakan interaksi desa-kota yang saling membutuhkan, dimana pedesaan memegang peranan penting pada pengoptimalan sumber daya lokal berupa komoditas unggulan sebagai proses produksi pangan yang dibutuhkan perkotaan melalui mekanisme pasar dan infrastrukturnya.

Dampak yang yang dapat dirasakan dari pelaksanaan program pengembangan di kawasan agropolitan secara umum yang telah diuraikan di atas adalah : (1) terbangunnya infrastruktur perdesaan yang menunjang pertumbuhan ekonomi perdesaan sehingga masyarakat lebih mudah akses ke pasar (STA) dan harga produk pertanian relatif stabil, (2) terbentuknya industri-industri rumah (agroindustri) sebagai unit-unit UMKM yang dapat menyerap banyak tenaga kerja di daerah kawasan agropolitan, (3) terciptanya daerah-daerah wisata di sekitar kawasan agropolitan yang menjadi lapangan pekerjaan bagi masyarakat lokal, (4) meningkatkan pendapatan petani di wilayah inti agropolitan, (5) meningkatnya harga tanah di kawasan agropolitan dengan adanya infrastruktur transportasi.

Prasetia, *et al* [15], mengungkapkan bahwa keberhasilan pada pengembangan kawasan agropolitan dapat terwujud apabila permasalahan yang menjadi kendala dalam pengembangan kawasan agropolitan harus ditangani, seperti : (1) infrastruktur jalan belum semua terbangun sehingga belum memadai maka pembangunan infrastruktur jalan seperti poros desa segera dibangun, (2) sumber daya manusia khususnya petani masih bersifat subsisten dalam usahataninya dan pada agroindustri sehingga perlu adanya pendampingan setelah dilakukan pelatihan dalam teknologi budidaya usahataninya dan manajemen pemasaran agar berorientasi agribisnis, (3) informasi daerah dijadikan kawasan agropolitan belum terdengar dan terasakan oleh seluruh masyarakat lokal sehingga diperlukan sosialisasi yang mendalam mengenai tujuan program pengembangan kawasan agropolitan oleh pemerintah dan menyeluruh kepada masyarakat luas, dan (4) kelembagaan agropolitan dari tingkat masyarakat desa sampai pemerintah daerah setempat tidak berjalan baik sehingga diperlukan komitmen pemerintah secara serius dengan cara bekerjasama atau kemitraan secara sinergitas, terintegrasi, dan berkesinambungan dengan masyarakat, perguruan tinggi setempat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dunia usaha dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program pengembangan kawasan agropolitan agar berkelanjutan. Ini menunjukkan bahwa sumber daya manusia merupakan aspek yang paling kuat pada etos kerja dan sangat berpengaruh dalam pengembangan kawasan agropolitan, yang kemudian diikuti dengan sumber daya buatan (norma dan infrastruktur), sumber daya sosial (organisasi dan jaringan), dan sumber daya lainnya yang menunjang sistem dan usaha agribisnis.

Peran Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta Masyarakat dan Dunia Usaha untuk Keberlanjutan Pengembangan Kawasan Agropolitan dalam Keterkaitan Desa-Kota

Kementerian Pertanian [3] mengungkapkan bahwa sinergitas antara pemerintah dengan masyarakat, perguruan tinggi setempat, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan dunia usaha dalam merencanakan, melaksanakan, serta monitoring dan evaluasi program pengembangan kawasan agropolitan adalah sangat penting sekali dan menjadi prioritas utama demi keberlanjutannya kawasan agropolitan yang menunjang pembangunan keterkaitan desa-kota.

Peran pemerintah

Pada tingkat pusat, provinsi, dan kabupaten/kota bahwa peran pemerintah memiliki peranan secara masing-masing sebagai regulator, fasilitator, dan motivator dengan memfasilitasi ketersediaan sarana dan prasarana sekaligus memberikan kewenangan manajemen dalam pengelolaan pengembangan kawasan agropolitan [3].

Peran Perguruan Tinggi (PT)

Perguruan Tinggi berperan sangat penting menjadi mitra pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah dalam pengembangan di bidang budidaya pertanian, peternakan, perikanan sebagai *center of excellence* riset. Perguruan Tinggi diharapkan menjadi pusat pengembangan pendidikan dan pelatihan agribisnsi kepada masyarakat petani dan dunia usaha [3]. Peran Universitas dan lembaga penelitian lainnya harus menjadi "orang tua" untuk mendorong, mendidik dalam kehidupan sehari penduduk daerah di bagian model "Partisipasi Penelitian Tindakan" Program dan kegiatan akademik siswa bisa dilaksanakan [7].

Peran lembaga swadaya masyarakat (LSM)

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berperan sebagai mitra pemerintah untuk mewujudkan *good governance* dan menjadikan pemerintahan yang bersih dan berwibawa. LSM diharapkan selalu bersikap kooperatif dan kritis sehingga menjadi mekanisme kontrol pada program-program pemerintah khususnya tata ruang kawasan agropolitan dan memberikan masukan, kritik, dan saran atas pedoman tata ruang kawasan agropolitan. Hal ini diharapkan akan memberikan umpan balik (*feed back*) yang baik untuk perbaikan di masa yang akan datang [6].

Peran masyarakat dan dunia usaha

Kementerian Pertanian [3] mengungkapkan bahwa penataan ruang perlu terus didorong dengan pendekatan *community driven planning* melalui peranan masyarakat dan dunia usaha sehingga diharapkan: (1) terciptanya kesadaran, kesepakatan, dan ketaatan masyarakat dan dunia usaha terhadap aturan tata ruang kawasan sentra agropolitan; (2) masyarakat dan dunia usaha ikut merencanakan, menggerakkan, melaksankan, dan mengontrol pelaksanaan program agropolitan dan penataan ruang kawasannya; (3) adanya kesadaran hukum masyarakat akan pentingnya tata ruang kawasan agropolitan sehingga masyarakat dan dunia usaha selalu berkoordinasi dan berhubungan dengan instansi pemerintah terkait jika melakukan kegiatan yang berkaitan dan berhubungan dengan usaha agribisnis dan agroindustri; (4) meningkatkan legitimasi program pembangunan kawasan agropolitan; dan (5) masyarakat dan dunia usaha menjadi pelaku langsung dan objek dari program pengembangan kawasan agropolitan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pembangunan inklusif desa-kota melalui pendekatan pengembangan kawasan agropolitan akan dapat berkesinambungan dan dirasakan perananya oleh masyarakat daerah lokal secara langsung khususnya dan masyarakat kota umumnya sehingga kawasan agropolitan memiliki daya saing, kemandirian, dan kesejahteraan, jika dilakukan: (1) penguatan potensi sumber daya manusia lokal melalui pendampingan dalam pembinaan dan pelatihan manajemen dan teknologi agribisnis dalam pengembangan nilai tambah produk melalui agroindustri (*agroprocesing*); (2) penguatan potensi sumberdaya lokal sesuai agroklimatnya dengan memanfaatkannya komoditas unggulan yang menjadi ciri khas daerah; (3) penguatan berbagai infrastruktur yang menunjang pasar produk pertanian, seperti jalan poros desa, dan mengoptimalkan pasar sub terminal agribisnis dengan memanfaatkan teknologi internet; dan (4) penguatan kelembagaan agropolitan di tingkat lokal sampai pusat dengan cara kemitraan secara sinergis, terintegrasi, dan berkesinambungan antara pemerintah, perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, masyarakat, dan dunia usaha.

Saran

Komitmen yang sungguh-sungguh dari pemerintah sebagai regulator, motivator, dan fasilitator untuk melengkapi sarana dan prasarana yang mendukung pengembangan kawasan agropolitan, baik dari berbagai infrastruktur, pendampingan pada sumber daya manusia sebagai pelaku, permodalan, manajemen, dan teknologi.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

DAFTAR PUSTAKA

[1] World Bank. 2012. Indonesia The rise of metropolitan regions: towards inclusive and sustainable regional development Washington DC: World Bank.
[2] Kementerian Pekerjaan Umum. 2012. Agropolitan dan Minapolitan. Konsep Kawasan Menuju Keharmonisan. Direktorat Jenderal Cipta Karya. Jakarta.
[3] Kementerian Pertanian. 2002. Kawasan Agropolitan. Departemen Pertanian. Jakarta.
[4] Rustiadi E, Sitorus S.R.P., Pribadi D.O. Dardak E.E. 2005. Konsepsi dan pengelolaan agropolitan. Disampaikan pada Lokakarya Penataan Ruang Kawasan Metropolitan dan Agropolitan. Jakarta. 28 November 2005.
[5] Rondinelli A. Dennis. 1985. Applied Methods of Regional Analysis The Spatial Dimensions of Development Policy. London. Westview Press/ Boulder.
[6] Undang-Undang No.26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
[7] Soetomo, Sugiono. 2004. Urban Development as the Interface of Regional Development from Below in Central Java-Indonesia, 40th ISoCaRP Congress.
[8] Wikipedia. 2016.
[9] Asriningtyas, Maretha. 2016. Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Agropolitan Bagelen di Kabupaten Purworejo. Skripsi. UGM. Yogyakarta.

[10] Bappeda Kabupaten Pemalang. 2016. Kajian Potensi Desa Gombong Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang.
[11] BPP Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. 2015. Laporan Tahunan Tahun 2015.
[12] Indarwanta, Didik dan Pujiastuti, Eny Endah. 2011. Kajian Potensi (Study Kelayakan) Pengembangan Agroindustri di Desa Gondangan Kecamatan Jogonalan. Klaten. Jurnal Administrasi Bisnis. Volume 8. No. 2:1-13.
[13] Mulyani, Sri. 2007. Kajian Terhadap Pendapatan Petani dan Harga Tanah di Kawasan Agropolitan. Tesis. Studi Kasus di Kecamatan Agropolitan Pacet dan Cipanas Kabupaten Cianjur. Sekolah Pascasarjana. IPB. Bogor.
[14] Handoko, Dimas. 2016. Identifikasi Potensi dan Kendala Pengembangan Kawasan Agropolitan Cipanas, Kabupaten Cianjur. Jurnal Online Mahasiswa Bidang Perencanaan Wilayah & Kota. Volume 1, Nomor 1. Dikutip dari http://jom.unpak.ac.id/index.php/teknikpwk/article/view/118.
[15] Prasetiya, Adi, Suyadi, Mohammad Bisri, dan Soemarno. 2014. Analysis of Sendang Agropolitan Area Development, Tulungagung. American Journal of Sociological Research 2014, 4(2): 60-66 DOI: 10.5923/j.sociology.20140402.06.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

LOCAL ECONOMIC LINKAGES PADA KOTA KECIL/MENENGAH SEBAGAI INSTRUMEN KONSEP KETERKAITAN DESA-KOTA (*RURAL-URBAN LINKAGE)*

Yosep Mohamad Holis[1)]

[1]Program Studi Doktor Perencanaan Wilayah dan Kota
Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan, Institut Teknologi Bandung

Email : yosepholis@students.itb.ac.id

Naskah diterima : 15 Desember 2016 Naskah direvisi: 6 Maret 2017 Disetujui terbit : 6 Maret 2017

ABSTRAK

Sejauh ini, Pengembangan teori dan praktis hanya fokus baik pada isu perkotaan maupun perdesaan saja, dimana hanya sedikit yang meneliti dan mempertimbangkan interconnection antara keduanya. Hal ini terbukti sampai dengan saat ini masih terjadi kesenjangan wilayah yang tinggi antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Setidaknya ada 3 paradigma (mind-stream) konsep perencanaan pengembangan wilayah yang terkait dengan konsep rural-urban linkage. Ketiga konsep itu adalah (i) konsep Growth Poles (Perroux, 1950) yang konsepnya diperkaya dengan Konsep Center – Peryphery oleh, Friedman, (1957), Myrdall (1957) dan Hirchman (1958); (ii) konsep Integrasi keruangan dan regional nework dan (iii) konsep pendekatan Desentralisasi (Decentralized Territorial). Ketiga konsep tersebut dipandang mempunyai kelemahan dan belum dapat mengatasi ketimpangan wilayah (Sawitri D, 2006) dan menimbulkan disconnect antar wilayah desa dan kota (Dardak E, 2009). Namun demikian, selain kelemahan, ketiga konsep tersebut memberikan Lesson learned dan inspirasi yang bermanfaat dalam membangun konsep kebaruan tentang Keterkaitan Desa Kota (rural-urban linkages). Melalui studi literature, makalah ini mengadopsi ketiga konsep di atas dengan mengintegrasikan pembangunan ekonomi dan pembangunan kewilayahan dalam kontek rural-urban linkage. Fokus makalah ini adalah mengkaji sistem jaringan pengembangan pertanian mulai dari sub sistem produksi, sub sistem industri pengolahan, jaringan dan distribusi pasar, kelembagaan sampai pada terminal agribisnis (pasar regional) pada setiap hirarki mulai dari tingkat desa, kecamatan, kota kecil, kota sedang sampai kota besar. Sistem jaringan ini akan terwujud apabila adanya kebijakan pemerintah yang terintegrasi dari berbagai jenjang melalui pengembangan pusat-pusat layanan pada setiap jenjang hirarki wilayahnya terutama di tingkat kota kecil/sedang sebagai penghubung antara perdesaan dan perkotaan.

Kata kunci: *Keterkaitan desa-kota, integrasi economic linkages, Kota Kecil/menengah*

PENDAHULUAN

Sejauh ini, Pengembangan *Theories and Practices* hanya fokus baik pada isu perkotaan (*urban)* maupun *perdesaan (rural)* saja, dimana hanya sedikit yang meneliti dan mempertimbangkan *interconnection* antara keduanya [1]. World Bank [2], menyatakan bahwa mengabaikan keterkaitan perkotaan dan desa (*rural-urban linkage*) menyebabkan inefisiensi dan menghasilkan kesenjangan pertumbuhan antar wilayah. Padahal, beberapa penelitian empirik menunjukkan bahwa hubungan antara wilayah perdesaan dan perkotaan, termasuk pergerakan manusia, barang, modal dan transaksi sosial lainnya, memegang peranan penting dalam keseimbangan proses pengembangan wilayah kota dan desa [3][4]. Dardak [4], menyatakan "dikotomi antara desa dan kota dalam perencanaan pembangunan merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari. Lebih lanjut, praktek perencanaan pengembangan wilayah berdasarkan Konsep *"Spatial Planning System*", yang bersifat terpusat dan mengejar pertumbuhan perekonomian nasional, belum berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengatasi ketimpangan wilayah [5].

Secara empirik, konsep-konsep pengembangan wilayah yang tersentralistik dan berdimensi ekonomi telah ikut mempengaruhi kesenjangan yang terjadi antara pusat pertumbuhan (perkotaan) dengan *hinterland*-nya (perdesaan). Konsep-konsep tersebut telah banyak diadopsi menjadi instrumen dalam kebijakan pembangunan

baik di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, termasuk di Indonesia. Salah satu konsep awal pengembangan wilayah yang berpengaruh di dunia adalah *Growth Polestheory (*Francois Perroux) yang bersifat *Development From Above.*Konsep ini lebih menitikberatkan aspek ekonomi (industri) dan cenderung sentralistik. Konsep pusat pertumbuhan ini juga diperkaya oleh Gurnal Mirdal (1956) dengan konsep *Center-Pheriphery Model* yang mengembangkan keterkaitan wilayah melalui hubungan input (*backward linkages*) dan output (*forward linkages*) yang secara implisit memberikan inspirasi konsep *rural-urban linkage*. Selain Mirdal, Konsep *Growth Pole*juga diperkaya oleh Hirschman (1958) yang mengungkapkan pemikirannya bahwa dalam proses pembangunan terdapat *trickling-down effect*dan *polarization effect*) yang berbeda antara daerah [6].

Pada kenyataannya konsep ini tidak mampu menghindari kesenjangan antar wilayah. Hal ini diantaranya karena *trickle down effect* dan *spread effect* tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri (perkotaan) tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah *hinterland*/perdesaan (Mercado, 2002). Sehingga muncul desentralisasi pengembangan wilayah melalui konsep agropolitan yang ditawarkan oleh Friedman (1975), kemudian disusul konsep *fungtional spatial integration* oleh Rondinelli (1983), *regional network/cluster (Douglass, 1996)* dan *rural-urban linkage* oleh Tacoli C. (1998).

Pendekatan yang terakhir di atas didasari pemikiran bahwa dengan adanya integrasi sistem pusat-pusat pertumbuhan yang berjenjang dan berbeda karakteristik fungsionalnya, maka pusat-pusat tersebut akan dapat memacu penyebaran pembangunan wilayah. Keterkaitan antar sistem pusat-pusat pertumbuhan bisa berupa: (1)Keterkaitan fisik (jaringan transportasi); (2) Keterkaitan ekonomi, baik *forward linkages*) maupun *backward linkages*. (3) Keterkaitan pergerakan pendudukdan tenaga kerja, (4). Keterkaitan teknologi, (5). Keterkaitan sosial. (6). Keterkaitan pelayanan sosial. (7) Keterkaitan administrasi, politik dan kelembagaan.

Melihat kerangka berpikir dari ketiga konsep di atas, terdapat kesamaan yaitu ditujukan untuk menciptakan suatu konsep pengembangan wilayah yang bersifat antar wilayah (*inter-regional)*. Artinya, memungkinkan untuk menjadi bahan dalam merumuskan konsep *rural-urban linkage* dalam rangka mengurangi kesenjangan antar wilayah. Oleh karena itu, perlu untuk dianalisa integrasi dari ketiga model pengembangan wilayah ini sehingga mampu memberikan paradigma yang baru khususnya terkait konsep *rural-urban linkage*. Mengingat wilayah indonesia merupakan wilayah pertanian (agraris) dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB masih tinggi, maka konsep *rural-urban linkage* yang akan didiskusikan pada paper ini lebih difokuskan pada pentingnya *economic linkage* pada setiap hirarki wilayah. Hal ini diharapkan mampu membentuk dan memunculkan pusat-pusat pertumbuhan secara berjenjang pada setiap hirarki kota.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalahstudi literature dengan melakukan *critical review* beberapa konsep pengembangan wilayah yang telah diterapkanuntuk mendapatkan hal-hal positif dan negative sebagai *lesson learned* dalam memodifikasi model-model konsep pengembangan wilayah yang relevan dengan konsep keterkaitan Desa-Kota. Dalam pembahasannya, penulis membaginya kedalam 4 bagian; (i) Pendahuluan berupa Perumusan masalah, (ii)Kritik Konsep Pengembangan Wilayah yang terkait Konsep Keterkaitan Desa-Kota; (iii) Konsep Keterkaitan Desa-Kota dalam Paradigma Ilmu Perencanaan Wilayah dan (iv) *Usulan Konsep keterkaitan Desa-Kota; (v) Kesimpulan.*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengembangan Wilayah menuju Konsep Keterkaitan Desa-Kota

Dari waktu ke waktu, banyak konsep pengembangan wilayah yang muncul telah mewarnai dan berusaha menjawab permasalahan-permasalahan suatu wilayah dan perkotaan dalam berbagai konteks dan dinamika di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Di satu sisi, konsep-konsep yang muncul telah memberikan efek positif terhadap pengembangan suatu wilayah atau kota, namun di sisi lain masih menyisakan dan bahkan menimbulkan permasalahan-permasalahan lain. Salah satu tujuan munculnya konsep-konsep pengembangan wilayah adalah untuk menjawab isu ketimpangan pengembangan wilayah antara *urban* dan *rural.* Oleh karena itu, pada bagian ini akan menganalisa beberapa konsep atau teori pengembangan wilayah yang diharapkan mampu memberikan *opportunities, constraints,* dan *limitations* terhadap munculnya konsep rural-urban linkage dalam suatu kerangka pengembangan wilayah yang terpadu (*integrated regional development*). Berdasarkan fungsi dan sejarah perkembangannya, analisa paper ini mengambil konsep pemikiran dari Rondinelli (1983), yaitu dengan membaginya kedalam 3 kelompok utama perencanaan wilayah, yaitu mulai dari (i) Konsep *Growth Poles (centralized regional planning)* (ii) *(*konsep agropolitan (*decentralized regional planning)* (iii) *Fungsionalspatial integration* yang mengarah pada *rural-urban linkage*.

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Konsep Development From Above (Growth Poles)

Perencanaan Pembangunan wilayah di Indonesia secara historik pada awalnya menganut konsep Kutub Pertumbuhan (*Growth Pole*) yang awalnya dirancang oleh Francois Perroux (1950) yang kemudian diperkaya oleh Gurnal Mirdal (1956) dan Hirschman (1958) melalui konsep Pusat – Pinggiran (*Center - Pheriphery) (Sawitri, 2006)*. Konsep ini menyatakan bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub pertumbuhan dengan intensitas yang berubah-ubah. Lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam dan dengan pengaruh yang dinamis terhadap perekonomian wilayah (Glasson, 1978). Konsep ini bersifat *top-down* (sentralistik) dan awalnya hanya berlandaskan persfektif ekonomi (industri) tidak memasukan unsur keruangan.

Menurut Gore, C (1984) : konsep *growth pole* telah didefinisikan oleh berbagai pakar secara berbeda-beda dan lebih spesifik :

1. Boudeville (1966) : kutub pertumbuhan regional, yaitu sekelompok industri yg mengalami ekspansi yg berlokasi di suatu daerah perkotaan dan mendorong perkembangan kegiatan ekonomi lebih lanjut ke seluruh daerah pengaruhnya.
2. McCrone (1969) suatu pusat pertumbuhan yang terdiri dari suatu kompleks industri yang saling berkaitan dan mendapat keunggulan ekonomi dari keuntungan lokasi (*locational proximity*).
3. Nichols (1969) suatu pusat pertumbuhan adalah suatu pusat kegiatan ekonomi di perkotaan yg mengalami pertumbuhan secara *self sustaining,* dan sampai suatu titik pertumbuhan itu didorong ke luar daerah pusat terutama ke daerah-daerah yang kurang berkembang.
4. Parr (1973) suatu pusat pengembangan menyajikan suatu pusat perkotaan dgn ukuran populasi yang terdefinisikan meliputi salah satu karakteristik pertumbuhan (a) pertumbuhan penduduk (kesempatan kerja) pd tingkat yg lebih besar dari rata-rata ukuran regional, dan (b) pertumbuhan absolut penduduk (kesempatan kerja) yang lebih besar daripada pertumbuhan regional.
5. Lasuen (1974) pusat pengembangan adalah sekelompok industri yg besar yg mempunyai keterkaitan yg kuat melalui hubungan input-output antara leading industri di sekitarnya yg secara geografi membentuk kluster. Leading industri mendorong ke seluruh kelompok, menginovasi, dan tum-buh pd tempat yg lebih cepat daripada industri-industri eksternal ke

Teori pusat pertumbuhan yang mulai berkembang sejak tahun 1950 ini secara garis besar menetapkan beberapa konsep sebagai berikut (Perroux dalam Glasson, 1978) :

1. *Propulsive industry*, industri sebagai pemicu perkembangan. Suatu perusahaan propulsip (propulsive firm) dicirikan sebagai perusahaan yang antara lain relatif besar dan menimbulkan dorongan-dorongan pertumbuhan yang nyata kepada lingkungannya;
2. *Circular and cumulative causation*, proses yang memungkinkan akumulasi perkembangan;
3. *Multiplier effect*, menurut teori ini ketimpangan dapat diatasi oleh *trickling down process* and *spread effect*. Konsep *spread effects* menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsip dinamik (output) dari kutub pertumbuhan akan memencar keluar dan memasuki ruang di sekitarnya (hinterland), sehingga dengan terdistribusinya output dari pusat pengembangan dapat mendorong pertumbuhan ruang di sekitarnya.(Perroux dalam Pontoh dan Kustiwa, 2009)

Ada beberapa hal positif dari konsep *growth* pole ini, diantaranya :

1. konsep ini memberikan peluang untuk mendekatkan dua cabang penting dalam analisis regional, yaitu analisis mengenai pertumbuhan ekonomi regional dan analisis struktur ruang regional;
2. Konsep ini dapat digunakan sebagai alat strategi intervensi pemerintah dalam menetapkan kebijakan investasi pembangunan daerah (Alkadrie, 1999).

Namun demikian, menurut beberapa *scholars* konsep ini mempunyai banyak kelemahan dan keterbatasan, diantaranya;

1. Kerangka permasalahan dikembangkan dalam setting masyarakat industri dan cenderung tidak melihat problem spesifik wilayah, khususnya wilayah pedesaan yang didominasi sektor pertanian (alkadrie, 1999);
2. Rendahnya kapasitas penyerapan tenaga kerja karena industri yang dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan merupakan industri padat modal, sehingga kenaikan dalam kapasitas produksi tidak menciptakan kesempatan kerja yang seimbang (Firman, 1989);
3. Dalam hubungan pusat-pinggiran, efek balik (*backwash effect*) sering bekerja lebih cepat daripada efek pemancaran (*spread effect*), sehingga kesenjangan wilayah semakin melebar. Kondisi ini terjadi karena (a)

kurang jelasnya hirarki kota-kota; (b) wilayah pinggiran tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan sumber dayanya (Firman, 1989);
4. Kegagalan teori pusat pertumbuhan dalam meminimalisir kesenjangan adalah karena *trickle down effect* dan *spread effect* tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri (perkotaan) tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah *hinterland*(perdesaan). Selain itu respon pertumbuhan dipusat tidak cukup menjangkau wilayah *hinterland* karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).

Konsep Development From Below (Agropolitan)

Selanjutnya kegagalan konsep *growth pole* dalam menghadirkan keseimbangan pembangunan, telah dijawab dengan menerapkan konsep *desentralisasi pengembangan wilayah* (perdesaan) atau ada juga yang menyebut *Development from below (DFB)*, yaitu dalam hal ini agropolitan/minapolitan. Menurut Rondinelli (1983) alasan munculnya strategi agropolitan atau tipe-tipe pembangunan dari bawah antara lain:

1. Kegagalan strategi *development from above* (*DFA*), yang berakibat pada ketimpangan wilayah, karena terkonsentrasi pada program pembangunan skala besar (largescale);
2. Kondisi fisik dan sosial ekonomi internal merupakan kunci sukses penerapan strategi pembangunan.
3. konsep pembangunan hendaknya berasal dari masyarakat itu sendiri dengan empertimbangkan sumberdaya lokal dan partisipasi.
4. Sistem ekonomi lokal harus berperan dalam membentuk pola interaksi ekonomi antar wilayah. Sehingga dapat meningkatkan nilai tambah (*value added*).

Pendekatan pembangunan perdesaan melalui konsep agropolitan dikembangkan oleh Friedman dan Douglas (1975). Menurut Friedman dan Douglas (1975) bahwa dalam konteks pengembangan agropolitan terdapat tiga isu utama yang perlu mendapat perhatian, yaitu: (1) akses terhadap lahan pertanian dan penyediaan pengairan, (2). desentralisasi politik dan wewenang administrasi dari tingkat pusat dan tingkat lokal, dan (3) perubahan paradigma atau kebijakan pembangunan nasional untuk lebih mendukung diversifikasi produk pertanian. Melihat kota-kota sebagai site utama untuk fungsi-fungsi politik dan administrasi, pendekatan pengembangan agropolitan di banyak negara lebih cocok dilakukan pada skala kabupaten (Douglass, 1998).

Tujuan pembangunan agropolitan adalah menciptakan "*cities in the field*"dengan memasukkan beberapa unsur penting dari gaya hidup kota ke dalam daerah perdesaan yang berpenduduk dengan kepadatan tertentu. *Agropolitan distric* merupakan satuan yang tepat untuk membuat suatu kebijaksanaan pembangunan ruang, melalui desentralisasi perencanaan dan pengambilan keputusan (*decentralized*) (Friedman dan douglass, 1975). *Agropolitan districts* dapat dikembangkan didaerah perdesaan dengan kepadatan penduduk tinggi atau peri-urban untuk meningkatkan standart hidup meningkatkan kesempatan bekerja dan mengurangi tingkat migrasi ke kota (Friedman, 1996).

Menurut Djakapermana R. D. (2003), kawasan agropolitan sebagai sistem fungsional desa-desa yang ditunjukkan dari adanya hirarki keruangan desa yakni dengan adanya pusat agropolitan dan desa-desa di sekitarnya membetuk Kawasan Agropolitan. Disamping itu, Kawasan agropolitan ini juga dicirikan dengan kawasan pertanian yang tumbuh dan berkembang karena berjalannya sistem dan usaha agribisnis di pusat agropolitan yang diharapkan dapat melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya (lihat gambar 2).

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

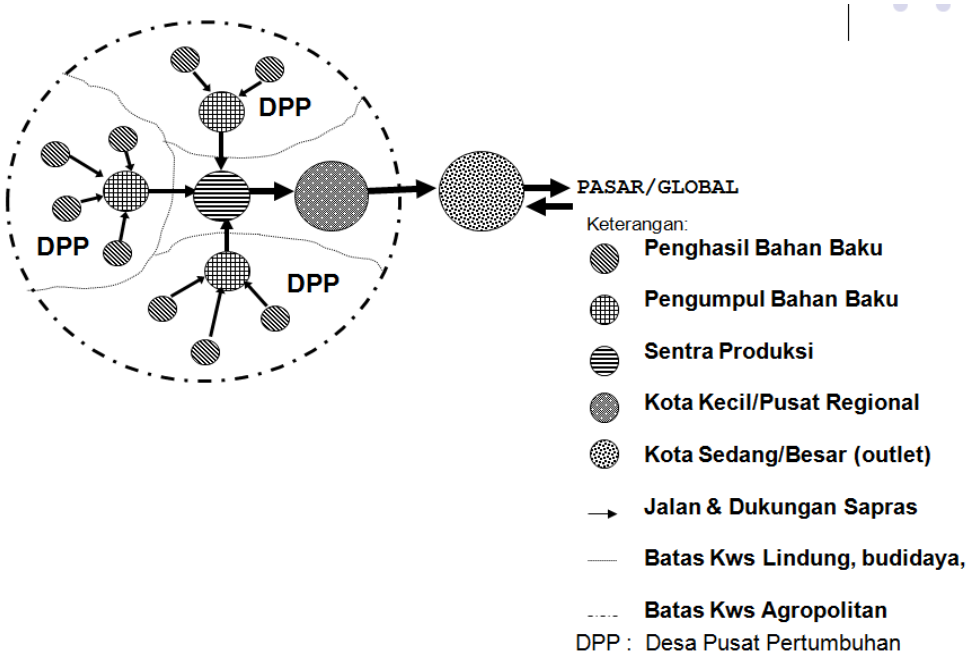

Gambar 2. Konsep Pengembangan Kawasan Agropolitan
(Sumber : Djakapermana R. D., 2003)

Lebih lanjut, Rondinelli (1983) menyatakan bahwa kunci keberhasilan penerapan strategi pengembangan agropolitan adalah :

1. Wilayah agropolitan tersebut harus merupakan wilayah yang tertutup. Hal ini terkait dengan kebijaksanaan untuk memanfaatkan sumberdaya lokal dan melawan sistem perdagangan bebas dan mekanisme pasar yang eksploitatif melalui perusahaan-perusahaan multinasional. Ekspresi kemampuan masyarakat untuk mengembangkan wilayah dengan kemampuannya sendiri (*self relience*);
2. Mengarahkan pemanfaatan sumberdaya untuk kepentingan wilayah tersebut sehingga terjadi akumulasi perkembangan di dalam wilayah itu sendiri;
3. Aksesibilitas penduduk yang sama terhadap kekuatan sosial dan faktor produksi. Basis untuk akumulasi kekuatan sosial ini diantaranya ialah aset produktif dan faktor produksi seperti tanah, air dan alat produksi lainnya, sumberdaya finansial,informasi, pengetahuan dan ketrampilan, organisasi sosial-politik.

Dari uraian di atas, konsep agropolitan ini memberikan hal-hal yang positif dalam konsep pengembangan wilayah, menurut Friedmann (1975) diantaranya :

1. Menyeimbangkan pendapatan desa dan kota dengan memperbanyak kesempatan kerja produktif dan memadukan kegiatan-kegiatan pertanian dengan kegiatan non-pertanian;
2. Merangkai distrik agropolitan menjadi jaringan regional, dengan cara membangun dan memperbaiki sarana untuk menciptakan hubungan antar wilayah agropolitan dan antara wilayah agropolitan dengan kota-kota yang lebih besar.
3. melayani dan mendorong kegiatan-kegiatan pembangunan pertanian (agribisnis) di wilayah sekitarnya

Namun, Konsep ini juga pada tataran implementatif hanya berjalan (efektif) pada tahap-tahap awal saja hampir di sebagian besar wilayah Indonesia (Bappenas, 2007). Kontinuitas, *outcomes* dan *impact* dari konsep pembangunan dengan pendekatan kewilayahan tersebut cenderung tidak dapat tercapai. Hal ini karena :

1. Pemutusan hubungan antar sektor perkotaan dengan perdesaan karena khawatir akan terjadinya eksploitasi (tidak melihat segi positif perkotaan);
2. Sistem wilayah yang tertutup terhadap intervensi dari luar hampir mustahil dilakukan dan bahkan akan mendistorsi konsep pengembangan wilayah terpadu wilayah perkotaan dan perdesaan;
3. Konsep ini memerlukan koordinasi baik secara vertikal dan horizontal, sementara sistem pemerintahan dan otonomi daerah menimbulkan permasalahan koordinasi tersebut;

Konsep Integrasi Ruang /Regional Network

Strategi integrasi spasial merupakan jalan tengah antara pendekatan sentralisasi yang menekankan pertumbuhan pada wilayah perkotaan (metropolitan) dan desentralisasi yang menekankan penyebaran investasi

dan sumberdaya pembangunan pada kota kota kecil dan pedesaan (Rondinelli, 1983). Pendekatan alternatif ini didasari pemikiran bahwa dengan adanya integrasi sistem pusat-pusat pertumbuhan yang berjenjang dan berbeda karakteristik fungsionalnya, maka pusat-pusat tersebut akan dapat memacu penyebaran pembangunan wilayah (Rondinelli, 1983). Menurut Rondinelli (1983), ada beberapa kunci dalam strategi integrasi spasial ini diantaranya :

1. Adanya hirarki dan keterkaitan (*linkages*) antar kelompok masyarakat atau organisasi yang berlokasi pada komunitas yang tersebar;
2. Terciptanya transformasi struktur ruang, organisasi, tingkah laku, kelembagaan sosial ekonomi dan kultur sehingga elemen-elemen tersebut menjadi suatu instrumen yang produktif dalam proses pertumbuhan dan perubahan;
3. Perbaikan sistem administrasi dan keberpihakan dari pemerintah terutama bagi wilayah-wilayah yang belum berkembang, serta koordinasi antar lembaga.

Namun demikian, konsep ini mempunyai beberapa kelemahan (Rondinelli, 1983), diantaranya :

1. Pendekatan ini terlalu ideal sehingga jauh dari kenyataan. Pengembangan Sektor secara serentak pada kenyataannya sulit dilakukan karena keterbatasan sumberdaya;
2. Sistem permukiman sebagai pembentuk integrasi spasial sering tidak dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Kegagalan permukiman untuk mendukung terbentuknya integrasi spasial ini diantaranya disebabkan:
    - Jumlah pusat-pusat dan permukiman yang skalanya lebih kecil tidak memadai sehingga tidak terbentuk hirarki permukiman. Keadaan ini disebabkan oleh dua kondisi, yakni:
        a. jumlah penduduk terlalu sedikit sehingga penyediaan prasarana menjadi tidak efisien;
        b. secara spasial letak (lokasi) permukiman-permukiman tersebut berjauhan sehingga tidak dapat membentuk suatu sistem pelayanan.
    - Distribusi fasilitas dan pelayanan diantara permukiman-permukiman tidak memadai, bahkan untuk fasilitas pelayanan dan infrastruktur "dasar" seperti kesehatan dan pendidikan.
    - tidak terdapat keterkaitan (interaksi) antar pusat permukiman maupun antar permukiman dengan wilayah pelayanannya.

Menganalisa konsep-konsep pengembangan wilayah di atas, kita mendapatkan beberapa *lesson learned* dan inspirasi yang bermanfaat dalam membangun konsep *rural-urban linkagesin term of regional planning*. Dalam kontek regional planning, Konsep growth pole (*centralized-regional models*), konsep agropolitan (*decentralized-regional model*) serta konsep *spatial integration* merupakan suatu rangkaian dan pecahan-pecahan puzzle yang dapat diadopsi dan disusun menjadi sebuah konsep yang mampu menjawab kesenjangan yang terjadi khususnya antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Secara spesifik perbedaan pemikiran dan orientasi dari ketiga konsep tersebut dapat digambarkan pada Tabel 1 di bawah ini.

Tabel 1. Perbandingan Ide Dasar Konsep-konsep Pengembangan Wilayah

Perbandingan	DFA	DFB	Spatial Integration
Orientasi pembangunan	Dari atas	Dari bawah	Integrasi dari bawah & atas
Pemerataan & Pertumbuhan	Pertumbuhan dulu	Pemerataan dan tujuan sosial lain	Pertumbuhan dengan pemerataan
Keseimbangan kota & desa	Titik berat : pembangunan kota	Titik berat : pembangunan desa	Integrasi pembangunan desa-kota
Keseimbangan sektor	Titik berat industry	Titik berat pertanian	Keseimbangan industri dan pertanian

Sumber : Hasil analisis literatur

Dalam konteks yang lebih detil, ketiga konsep pengembangan wilayah tersebut memberikan hal-hal positif dan negatifnya terhadap perjalanan pengembangan wilayah di Indonesia terutama masalah kesenjangan pembangunan antara wilayah perdesaan dan perkotaan. Untuk itu makalah ini mengkaji konsep-konsep pengembangan wilayah sebagai berikut :

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Tabel 2. Nilai Positif dan Negatif Konsep-konsep Pengembangan Wilayah

Development From Above (Growth Pole)
Positif : • Memberikan peluang untuk mendekatkan dua cabang penting dalam analisis regional yaitu analisis mengenai pertumbuhan ekonomi regional dan analisis struktur ruang regional. • dapat digunakan sebagai alat strategi intervensi pemerintah dalam menetapkan kebijaksanaan investasi bagi pembangunan.
Negatif : • Rendahnya kapasitas penyerapan tenaga kerja karena industri yang dikembangkan di pusat-pusat pertumbuhan merupakan industri padat modal, sehingga kenaikan dalam kapasitas produksi tidak menciptakan kesempatan kerja yang seimbang (Firman, 1989); • Dalam hubungan pusat-pinggiran, efek balik (backwash effect) sering bekerja lebih cepat daripada efek pemancaran (spread effect), sehingga kesenjangan wilayah semakin melebar. Kondisi ini terjadi karena (a) kurang jelasnya hirarki kota-kota; (b) wilayah pinggiran tidak memiliki kekuasaan untuk mengendalikan sumber dayanya (Firman, 1989); • Kegagalan teori pusat pertumbuhan dalam meminimalisir kesenjangan adalah karena trickle down effect dan spread effect tidak terjadi yang diakibatkan karena aktivitas industri (perkotaan) tidak mempunyai hubungan dengan basis sumberdaya di wilayah hinterland(perdesaan). Selain itu respon pertumbuhan dipusat tidak cukup menjangkau wilayah hinterland karena hanya untuk melengkapi kepentingan hirarki kota (Mercado, 2002).
Development From Below
Positif : • Menyeimbangkan pendapatan desa dan kota dengan memperbanyak kesempatan kerja produktif dan memadukan kegiatan-kegiatan pertanian dengan kegiatan non-pertanian; • Merangkai distrik agropolitan menjadi jaringan regional, dengan cara membangun dan memperbaiki sarana untuk menciptakan hubungan antar wilayah agropolitan dan dengan kota-kota yang lebih besar.
Negatif : • Pemutusan hubungan antar sektor perkotaan dengan perdesaan karena khawatir akan terjadinya eksploitasi (tidak melihat segi positif perkotaan); • Sistem wilayah yang tertutup terhadap intervensi dari luar hampir mustahil dilakukan dan bahkan akan mendistorsi konsep pengembangan wilayah terpadu wilayah perkotaan dan perdesaan; • Konsep ini memerlukan koordinasi baik secara vertikal dan horizontal, sementara sistem pemerintahan dan otonomi daerah menimbulkan permasalahan koordinasi tersebut
Regional Network / Spatial Integration
Positif : • Adanya hirarki dan *linkages* antar kelompok masyarakat (organisasi) yang berlokasi pada komunitas yang tersebar; • Terciptanya transformasi struktur ruang, organisasi, tingkah laku, kelembagaan sosial ekonomi dan kultur sehingga elemen-elemen tersebut menjadi suatu instrumen yang produktif dalam proses pertumbuhan dan perubahan.
Negatif : • Pendekatan ini terlalu ideal sehingga jauh dari kenyataan. Pengembangan Sektor secara serentak pada kenyataannya sulit dilakukan karena keterbatasan sumberdaya; • Sistem permukiman sebagai pembentuk integrasi spasial sering tidak dapat berjalan sebagaimana yang diinginkan. Kegagalan permukiman untuk mendukung terbentuknya integrasi spasial ini diantaranya disebabkan jumlah pusat-pusat dan permukiman yang skalanya lebih kecil tidak memadai sehingga tidak terbentuk hirarki permukiman. • tidak terdapat keterkaitan (interaksi) antar pusat permukiman maupun antar permukiman dengan wilayah pelayanannya.

Sumber : Hasil olahan dari berbagai sumber

Konsep Keterkaitan Desa-Kota di Indonesia

Kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan sampai dengan saat ini masih dan semakin tinggi. Data Bappenas tahun 2012 menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di perkotaan sekitar 5,61% sedangkan di perdesaan sekitar 3,41%.Lebih lanjut, perbedaan persentase penduduk perkotaan dengan penduduk perdesaan menunjukkan kecenderungan semakin tinggi. Bahkan sekitar 68% penduduk akan tinggal diperkotaan pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 82% pada tahun 2045 (BPS, 2014). Hal ini tentunya akan memberikan dampak multi dimensi sepeti *urbanbias, primate cities* dan *urban sprawl*. Oleh karena itu, terkait dengan pengembangan wilayah, perlu ada terobosan-terobosan baru yang bermanfaat untuk mengurangi kesenjangan wilayah dengan salah satunya menerapkan konsep keterkaitan Desa-Kota (*Rural-Urban Linkage*).

Dalam mengantipasi kesenjangan pembangunann tersebut, sebenarnya Indonesia sadar dan telah menerapkan strategi *"keterkaitan desa kota"* dalam pengembangan wilayah. Hal ini, secara konsep didorong karena adanya kegagalan dalam pengimplementasian strategi *growth pole*. Menurut Yulistianis, (2013) strategi keterkaitan desa dan kota di Indonesia banyak dilakukan dengan pendekatan *Top-Down*. Konsep strategi yang pertama kali muncul diprakarsai oleh Bappenas yang dikenal dengan PARUL (Proverty AlleviationRural Urban Linkages). PARUL merupakan strategi dengan pendekatan yang dipengaruhi oleh pasar atas pengembangan ekonomi lokal melalui kerjasama public–privat. Namun, dalam implementasinnya program ini dinilai kurang berhasil karena kurangnya peran serta masyarakat dalam pengembangan desa kota. Kecenderungan yang terjadi adalah kuatnya peran sektor swasta dalam pengembangan wilayah karena kurangnya pengawasan pemerintah sehingga meskipun wilayah dapat tumbuh namun kesejahteraan masyarakat tidak terjadi karena hasil pembangunan hanya dapat dinikmati oleh beberapa kelompok saja.

Selain PARUL, pemerintah juga menerapkan konsep KAPET (Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu). KAPET merupakan program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi wilayah tertentu yang memiliki sumberdaya potensial dan memerlukan investasi besar. Program ini telah berjalan di beberapa wilayah, namun juga dinilai tidak berhasil karena yang terjadi bukan pengembangan desa kota melainkan hanya berupa relokasi industri yang justru tidak berkaitan dengan sumberdaya lokal sehingga terjadi *foot loose industry* (Yulistianis, 2013).

Kekurangberhasilan program-program keterkaitan desa-kota tersebut menurut Yulistianis (2013) diakibatkan oleh beberapa hal. *Pertama*, kurang optimalnya peran dan fungsi desa dan kota dalam kontek *supply dan demand* komoditas pertanian dan industry. *Kedua*, tidak tepatnya aliran keterkaitan desa dan kota, seperti aliran manusia dan komoditas (Douglas, 1985). Sebagian penduduk desa melakukan mobilitas berupa migrasi ke kotasebagai dampak dari kurang optimalnya fungsi dan peran desa untuk memberikan lapangan pekerjaan serta penghidupan yang layak. Dari sisi aliran komoditas adalah tidak adanya aliran komoditas desa ke kota. Karena tidak adanya pengembangan industri di kota yang terkait dengan komoditas bahan baku di desa sekitarnya. *Ketiga*, kurangnya intervensi kebijakan dalam upaya mengkaitkan desa dan kota. Intervensi kebijakan keterkaitan desa dan kota menurut Lo Shalih dan Douglas dinilai dari empat hal yaitu jalan dan transportasi, listrik, komunikasi dan pelabuhan atau bandara.

Pembahasan

Paradigma utama dalam konsep keterkaitan desa-kota adalah melibatkan peran kota dan desa secara komplementer dan timbal balik dalam kontek regional.Konsep *rural-urban linkage* iniperlu didasari dengan gabungan pemikiran baik secara *spatial (Keruangan)* maupun *a-spatial* (ekonomi dan kebijakan). Artinya pengembangan ekonomi perdesaan yang fokus terhadap sektor pertanian harus memiliki keterkaitan dan saling memberikan pengaruh dengan pengembangan ekonomi perkotaan yang fokus terhadap sektor industri, komersial dan jasa. Keterikatan ini akan terjadi dengan cara membangun dan atau mengembangkan pusat-pusat layanan pada setiap jenjang hirarki wilayah sesuai dengan keunggulan komperatif (basis ekonomi) masing-masing.

Desa membutuhkan kota dalam pemasaran hasil produksi dan mendapatkan barang jasa yang tidak dapat disediakan di desa. Sedangkan kota membutuhkan hasil produksi dari desa untuk memenuhi kebutuhan dasar penduduknya, sebagai bahan baku industri dan untuk mengoptimalkan fungsi kota sebagai pusat distribusi. Menurut Rondinelli (1985), keterkaitan desa dan kota dapat ditinjau dari keterkaitan fisik (infrastruktur), ekonomi (aliran barang dan jasa), mobilitas penduduk (migrasi), teknologi, interaksi sosial, penyediaan pelayanan, politik, administrasi dan organisasi.

Kunci utama keberhasilan strategi keterkaitan desa-kota adalah pengoptimalan peran dan fungsi kota dan desa dalam pengembangan wilayah dengan memanfaatkan instrument-instrumen *linkages* di atas. Dan pada tataran yang lebih detil, beberapa akademisi menyarankan perlunya fungsi dan peran "kota kecil/menengah"

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

dalam menjembatani keterkaitan desa dan kota (Rondinelli, 1983;; Douglass, 1998; Tacoli, 1998; Linch, K. 2005; McGee,T.G. 2008; Akkoyulu, S. 2013.

Kawasan ini merupakan kawasan yang sangat penting dalam konteks *rural-urban linkage.* Karena wilayah ini merupakan wilayah transisi atau daerah perbatasan antara wilayah perdesaan dan perkotaan (*suburban areas*), wilayah ini sudah termasuk *small cities* karena sudah memiliki karakteristik kota seperti misalnya jumlah dan kepadatan penduduk relatif tinggi dan prasarana serta fasilitas yang beragam. Oleh karena itu, strategi pengembangan wilayah ini diarahkan untuk pembangunan dan pengembangan kota-kota kecil dan pusat-pusat pertumbuhan yang baru agar terjadi proses integrasi antara sektor pertanian dan industri. Strategi ini diharapkan mampu mengembangkan kesempatan kerja yang luas untuk menahan migrasi penduduk ke kota. Dalam konteks *local economic linkage,* kawasan ini diarahkan sebagai *market town* atau dalam istilah ekonomi (pertanian) adalah kawasan terminal agribisnis.Oleh karena itu, fungsi dan peran kwasan ini ditujukan untuk :

1. Berperan sebagai pasar untuk pertanian di wilayah perdesaan sehingga produser perdesaan bisa mengakses informasi pasar, fluktuasi harga, preferensi konsumen yang pada akhirnya mampu memaksimalkan sumber daya, meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayahnya. Hal yang penting adalah dukungan infrastruktur yang memadai.
2. Berperan sebagai kawasan distribusi barang dan jasa ke wilayah perdesaan dan perkotaan, penyedia layanan jasa dan poduk industri;
3. Berperan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penyedia lapangan pekerjaan non-pertanian. Artinya masyarakat perdesaan mendapatkan penghasilan dari kegatan non-pertanian, sementara masyarakat perkotaan dapat megkonsumsi komoditas pertanian dan bahkan mendapatkan penambahan penghasilan dari komoditas pertanian. Pembauran aktivitas pertanian dan non-pertanian diharapkan dapat menciptakan diversifikasi kegiatan ekonomi sebagai penunjang mesin pertumbuhan.
4. Pengembangan wilayah yang tidak hanya berorientasi kepada pembangunan perdesaan saja tetapi juga berorientasi pada penjalaran inovasi dan pelayanan bagi aliran produksi pertanian dan industri ringan dari perdesaan ke kota kecil dan kota yang lebih besar.
5. Kegiatan-kegiatan utama di kawasan ini bisa berupa pengembangan industri pengolahan, terminal agribisnis dan pembangunan kota-kota baru *(small cities).*
6. Apabila kondisi di atas apat dicapai, kawasan ini akan menjadi kontra magnet urbanisasi di wilayah kota besar.

Selain dimensi uang dan ekonomi yang telah diuraikan di atas, intervensi kebijakan juga penting untuk efektivitas fungsi dan peran kota kecil/menengah dalam konsep *rural-urban linkage.* Beberapa intervensi kebijakan yang diperlukan diantaranya :

1. *Forward dan backward linkage*antara kegiatan pertanian dan non-pertanian harus diperkuat untuk menstimulir pertumbuhan ekonomi wilayah;
2. Dukungan kelembagaan terutama lembaga intermediary di Kota kecil seperti fungsi terminal agribisnis untuk menstimulir daya saing produk dan wilayah
3. UMKM sebagai mesin pertumbuhan perlu diberikan kemudahan akses terhadap pasar, permodalan, pendidikan, keterampilan, teknologi tepat guna dan *building capacity*;
4. Intervensi kebijakan untuk mengembalikan kembali fungsi-fungsi wilayah sesuai karakteristiknya, yaitu wilayah perdesaan sebagai wilayah pertanian (termasuk kehutanan, perkebunan, peternakan, perikanan), dan wilayah perkotaan untuk kegiatan komersial, perdagangan, jasa dan industri pengolahan.
5. Pengembangan kawasan industry yang berdasarkan dengan sumber daya local.

KESIMPULAN DANSARAN

Kesimpulan

Konsep-konsep pengembangan wilayah sampai saat ini masih belum mampu mengatasi kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan. Fakta menunjukkan bahwa rata-rata laju pertumbuhan ekonomi di perkotaan sekitar 5,61% sedangkan di perdesaan sekitar 3,41%. Dan Bahkan sekitar 68% penduduk akan tinggal diperkotaan pada tahun 2025 dan meningkat menjadi 82% pada tahun 2045 (BPS, 2014). Salah satu konsep pengembangan wilayah yang berpotensi untuk mengurangi kesenjangan perkotaan dan perdesaan adalah dengan menerapkan Konsep "Keterkaitan Desa-kota". Untuk mengoptimalkan keterkaitan desa-kota, konsep ini perlu difokuskan dengan mengoptimalkan fungsi dan peran kota kecil/menengah sebagai *market town* berupa Terminal Agribisnis melalui pendekatan *regional network/cluster.* Konsep keterkaitan desa-kota akan lebih efektif apabila mengkolabroasikan perspektif *spatial,* ekonomi dan intervensi kebijakan

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai peran Terminal agribisnis di kota kecil/menengah, terutama dampaknya terhadap *forward linkage* (perkotaan) dan *backward linkage* (perdesaan).

DAFTAR PUSTAKA

[1] Alkadri et al. 1999. Manajemen Teknologi untuk Pengembangan Wilayah. Jakarta :Edisi Pertama, Direktorat Kebijaksanaan Teknologi Untuk Pengembangan Wilayah- BPPT

[2] Bintarto R. 1989. Interaksi Desa Kota dan Permasalahannya. Jakarta: Ghalia Indonesia.

[3] Brindley, Rydin and Stoker. *Popular planning : Coin Street, London* in Campbell and Susan (2003) Reading in Planning Theory, Blakcwell Publisher Ltd, Oxford.

[4] Campbell and Fanstein, (2003) Reading in Planning Theory, Blakcwell Publisher Ltd, Oxford.

[5] Dardak E 2009. Pengembangan Pusat Kegiatan Perdesaan (RuralTown) sebagai Langkah Integrasi Kawasan Perdesaan Dan Perkotaan Menjadi Wilayah Fungsional. Jurnal Penataan Ruang. Edisi Juli – Agustus 2009.

[6] Djakapermana R. D., 2003. Pengembangan Wilayah Dan Penataan Ruang di Indonesia : Tinjauan Teoritis Dan Praktis. Studium General Sekolah Tinggi Teknologi Nasional (STTNAS) di Yogyakarta, 1 September 2003. Departemen Pekerjaan Umum

[7] Flyvbjerg, B. *Rationality and Power* in Campbell and Susan (2003) Reading in Planning Theory, Blakcwell Publisher Ltd, Oxford

[8] Glasson J and Marshall T, 2007. Regional Planning. Routledge Publisher.

[9] Levy, J. M., *What Local Economic Developers Actually : Location Quotients versus Press Releases* in Campbell and Susan (2003) Reading in Planning Theory, Blakcwell Publisher Ltd, Oxford.

[10] Pontoh, N. A dan Kustiwan, I (2009).Pengantar Perencanaan Perkotaan. ITB

[11] Rondinelli, D. (1985), Applied Methods of Regional Analysis: The Spatial Dimensions of Development Policy, Westview Press, Boulder, Colorado.

[12] Sawitri, D. 2006. Keikutsertaan Masyarakat dalam Pengembangan Lokal (Studi Kasus: Pengembangan Desa di Jawa Barat) Jurnal Perencanaan Wilayah dan Kota, Vol. 17/No. 1, April 2006, hlm. 39-60.

[13] Sjafrizal, 2014. Ekonomi Wilayah dan Perkotaan. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

[14] Tacoli C. (1998). Rural – Urban Interactions : a guide to the literature. Environmental and Urbanization Journal, Vol. 10, No. 1, April 1998.

[15] https://yulistianijulis.wordpress.com/2013/12/12/keterkaitan-desa-kota-rural-urban-linkages-dalam-pengembangan-wilayah/ (22.35 16/11/2016)

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Lampiran 1.
Panitia Pengarah

Penasehat/Penanggung Jawab	**:**	Prof. Dr. Tafdil Husni, SE., MBA (Rektor Unand) Dr. Tubagus Furqon Shofani (ASPI) Dr. Bayu Krisnamurthi (PERHEPI)
Panitia Pengarah		
Ketua	**:**	Dr. Ir. Endry Martius, M.Sc. (PWD PPs Unand)
Wakil Ketua		Prof. Dr. Rudi Febriamansyah, M.Sc. (Ketua PERHEPI Komda Padang)
Sekretaris	**:**	Dr . Zednita, S.P., M.Si. (Perhepi Komda Padang)
Anggota	**:**	Dr. Harif Amali Rivai, SE., M.Si. (Dekan FEUA) Prof. Dr. ADrimas (Koord Prodi PPn FEUA) Dr. Ir. Faidil Tanjung (Koord Prodi PWD PPs UA) Prof. Dr. Ir. Melinda Noer, M.Sc. Dr. Ir. Osmet, M.Sc. Dr. Hefrizal HanDra Ferry ADrianus, S.E., M.Si.

Lampiran 2.
Panitia Pelaksana Seminar Nasional

Penanggung Jawab	:	Rektor Universitas Andalas, Padang
Pengarah	:	Prof. Dr. Ir. Rudi Febriamansyah, M.Sc.(PERHEPI Padang)
Ketua Pelaksana	:	Dr. Ir. Zednita M.Si.
Wakil Ketua		Maramis
Sekretaris		Dr. Faidil Tanjung, M.Si
Bendahara		Ir. Dwi Evaliza, M.Si
		Rina Sari, S.P, M.Sc
Sekretariat		Dr. Zulvera, S.P., M.Si. (koord.)
		Dr. Yuerlita, S.Si, M.Si.
		Eki Amnur Hadi, S.P
		Anugrah Sri Widiasyih, S.P
		Siska Handayani, S.P
		Nadia Firnalista, S.P
		Fastabiqul Khairat
		Budi Ananda Putra
Seksi Acara/Makalah	:	Hasnah, S.P., M.Sc., Ph.D. (koord.)
		Dr. Ir. Ifdal, M.Sc
		Nuraini Budi Astuti, SP., M.Si
		Dr. Ayesha Ivonne
Pendanaan dan Sponsor	:	Dr. Ira Wahyuni, MS (Koord)
		Rika Hariance, SP., M.Si
		Rafnel Azhari, SP., M.Si
		Uci Mardiani, ST., MT
Acara	:	Prof. Yonariza, M. Sc (Koord)
		Afrianingsih, SP. M.Si
		Cindy Paloma, SP., M.Si
		Alvindo Dermawan, SP
		Syajratu Emmal Khairati, SP
Tamu	:	Syahyana Raesi, M.Sc (Koord)
		Nur Afni Evalia, SP., M.Si
		Leni Jumiati, Skom,. Mkom
		Salmi
Humas dan Perlengkapan	:	Rian Hidayat, SP., M.Si (Koord)
		Muhammad HenDri, SP., M.Si
		Dr. Nofialdi, M.Si
		Zandri
		Bayu Satria
		Syafril
		Sari Muliadi S.Kom, M. Kom
Konsumsi	:	Dr. Rusda Khairati, M.Si (Koord)
		Lora Triana, SP,.M.Si
		Yanti
		Yusnawati

ISBN : 978-602-73463-1-4
http://pasca.unand.ac.id/id/prosiding-seminar-nasional-perencanaan-pembangunan-inklusif-desa-kota

Didukung Oleh :

ISBN : 978-602-73463-1-4